

**MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MELALUI BUDAYA ORGANISASI
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)**



Diajukan oleh
Muhajir R. Hakim
16919029

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MELALUI BUDAYA ORGANISASI
(Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



Diajukan oleh
Muhajir R. Hakim
16919029

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apa pun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 September 2018



Muhajir R. Hakim

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, is positioned below the text "Dosen Pembimbing".

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun
oleh :

MUHAJIR R. HAKIM

No. MHS. : 16919029

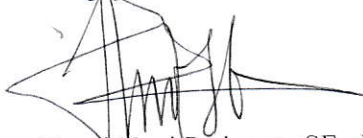
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**MEMBANGUN TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH MELALUI BUDAYA ORGANISASI
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO)**

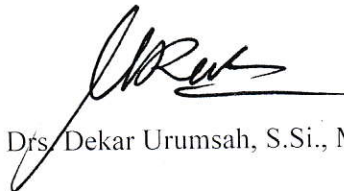
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com. (IS), Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Banyak orang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu sangat lama dan menguras waktu, biaya, dan tenaga jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Memang benar adanya dan peneliti merasakan hal itu, karena sudah menjadi ciri-ciri penelitian kualitatif yang sifatnya alamiah. Diantara teman-teman sebimbangan tidak sedikit dari mereka sering mengeluh karena waktunya lebih banyak di lapangan, ada yang mencoba mempercepat penelitiannya dengan membujuk dosen pembimbingnya, bahkan ada juga yang frustrasi. Apalagi dosen pembimbing mewajibkan kami menggunakan alat bantu NVivo, *software* yang katanya susah dan terbilang baru serta selama penelitian di S1 belum pernah kami terapkan. Tambah rumit jadinya karena untuk meneliti harus belajar dua kali, belajar metode penelitian kualitatif terlebih dahulu lalu belajar penggunaan *software* NVivo. Ya, itulah ciri khas anak bimbingan kualitatif dengan NVivo, yaitu konsekuensi semakin lama lulus dan makin lama pula wisuda.

Meneliti kualitatif dengan menggunakan alat bantu NVivo juga telah banyak membuat mahasiswa menjadi khawatir untuk memilih kualitatif. Telah terbentuk opini di kalangan teman-teman mahasiswa bahwa meneliti kualitatif dengan NVivo jauh lebih lama waktunya dibandingkan dengan meneliti kualitatif tanpa NVivo. Pengalaman dari teman-teman yang telah lulus dengan metode ini, mereka baru dapat menyelesaikan penelitian kualitatif menggunakan NVivo dengan menghabiskan waktu rata-rata di atas 12 bulan sudah termasuk waktu santai, berlibur, pulang kampung, dan waktu depresi. Namun demikian peneliti

menolak anggapan bahwa kualitatif menjadi penghalang dan menjadi lebih lama lulus dan wisuda. Lulus itu pilihan dan wisuda itu tradisi. Kecepatan menyelesaikan tesis itu cuma soal hambatan dan cepat itu bukan prestasi. Ibarat jalan tol, kita bisa melaju dengan cepat kalau tidak ada hambatan di jalan berapa pun banyaknya muatan kita. Penelitian kualitatif tidak bisa dibanding-bandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi sangat tergantung dari mazhab penelitian yang kita gunakan. Mengukur kecepatan waktu penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah tidak relevan. Semua itu bergantung kepada niat, kemauan, dan keseriusan serta instrumen yang kita gunakan sebagai peneliti dan kita sebagai mahasiswa bimbingan yang memilih dosen pembimbing dengan bijak.

Dengan segenap tenaga, waktu, dan pikiran yang peneliti curahkan untuk menyelesaikan tesis ini, hanya membutuhkan waktu efektif 8 bulan (Februari~Oktober; 3 bulan waktu untuk proposal dan 5 bulan waktu di lapangan dan olah data), sudah termasuk, waktu santai, waktu berlibur, dan waktu pulang kampung. Peneliti tidak mempermasalahkan lamanya waktu penelitian ini, karena orientasi peneliti adalah proses dan bukan hasil. Banyak pengalaman dan ilmu yang peneliti dapatkan dari penelitian yang cukup lama ini, terutama ilmu tentang NVivo. Peneliti bersyukur karena apa yang selama ini dikhawatirkan tidak terjadi seperti yang teman-teman alami tersebut. Oleh karena itu, puji syukur kehadiran Allah SWT, Zat yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini sesuai batas waktu yang ditetapkan universitas. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Besar

Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu dan terang benderang.

Laporan penelitian tesis ini terdiri dari 2 volume dengan total ketebalan sebanyak 897 halaman. Volume 1 merupakan isi laporan penelitian dengan tebalnya 363 halaman yang terdiri dari pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metoda penelitian, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 simpulan, implikasi dan saran serta daftar referensi. Sedangkan volume 2 merupakan lampiran dari laporan penelitian dengan tebalnya 535 halaman yang terdiri dari 24 lampiran. Lampiran yang paling tebal adalah lampiran yang memuat daftar hasil wawancara partisipan dengan ketebalan 349 halaman yang merupakan dokumen asli di lapangan sebelum diolah dengan bantuan NVivo dan *framework matrix* yang merupakan dokumen wawancara yang telah melalui proses reduksi dan hasil analisis dengan bantuan NVivo dengan ketebalan 165 halaman. Walaupun banyak yang heran karena tebalnya laporan penelitian ini, peneliti tetap yakin dan percaya diri bahwa yang terpenting adalah 2 hal, pertama, membawa manfaat untuk peneliti dan kedua, redaksi penelitian ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan bukan hasil parafrase kalimat penelitian punya orang lain sehingga menambah ilmu dan pengalaman bagi peneliti.

Penyusunan tesis ini telah melibatkan beberapa pihak yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya baik langsung maupun tidak langsung. Selama proses penelitian dari tahap seminar proposal, peneliti telah melakukan 26 kali bimbingan sampai dengan tahap pra-ujian pendadaran. Frekuensi bimbingan tersebut terdiri dari 17 kali bimbingan NVivo dan 9 kali bimbingan draft narasi

laporan. Oleh karena itu pertama-tama peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAccy., Ph.D.,CFrA, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya. Selama proses bimbingan sejak bulan Februari sampai dengan selesainya tesis ini bulan Oktober 2018, beliau telah banyak memberi arahan, petunjuk, dan ilmu penelitian kualitatif terutama telah mengajarkan praktik penerapan *software* NVivo dalam penelitian kualitatif, yang benar-benar merupakan pengetahuan baru bagi peneliti dengan banyak memberikan koreksi dan solusi bagi kesempurnaan penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga ilmu beliau berkah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Kepada beberapa pihak yang turut memberikan dukungan dan bantuan langsung kepada peneliti selama proses penelitian, tidak lupa juga peneliti menghaturkan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan semoga Allah membalas kebaikan mereka terutama kepada:

- 1) Bupati Kulon Progo, Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K) yang telah memberikan kesempatan dan waktu penelitian di daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Dosen penguji peneliti, Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D, yang telah banyak memberikan koreksi, masukan, dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
- 3) Sekretaris Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Maria Indrati atas kewenangannya yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk

mewawancarai para pejabat eselon III dan eselon IV-nya untuk diwawancarai.

- 4) Sekretaris BKAD Kabupaten Kulon Progo, Ratna Juita atas kewenangannya yang telah mengizinkan, memberikan data penelitian yang diperlukan, dan memberikan kesempatan untuk mewawancarai para pejabat eselon III, eselon IV, dan stafnya;
- 5) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bambang Sutrisno atas kewenangannya yang telah mengizinkan salah satu auditornya untuk diwawancarai;
- 6) Seluruh partisipan di Kabupaten Kulon Progo yang telah bersedia dan meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk diwawancarai:
 - a) Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;
 - b) Taufiq Amrullah, ST., M.M., selaku Kepala Bidang Aset BKAD;
 - c) Iswandari Artiningsih, S.E., selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
 - d) Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD;
 - e) Drs. Sunarya, M.M., selaku Kepala Bidang Pendapatan BKAD;
 - f) Nasip, S.E., selaku Kepala Bidang Pajak BKAD;
 - g) Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Analisis Data Pembangunan Bappeda;

- h) Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev., selaku Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda;
 - i) Kuni Mas'adah, selaku Kepala Subbagian Keuangan BKAD, merangkap PPK-Pembuat SPM dan PPTK;
 - j) Lukman Hakim, S.E., M.M., selaku Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan BKAD;
 - k) Sri Sugiyarti, S.E., selaku Kepala Subbidang Belanja BKAD;
 - l) Alif Romdhoni, selaku Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan;
 - m) Meylani Lestari, selaku Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD;
 - n) C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng., selaku Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda;
 - o) Khamdan Syakiri, S.Psi., selaku Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda;
 - p) Ari Fitriani, selaku Auditor Madya di Inspektorat Daerah;
 - q) Eko Catur Setyawati, S.E., selaku PPK-Petugas Akuntansi BKAD;
 - r) Angelia Resty K., selaku Bendahara Pengeluaran BKAD; dan
 - s) Sutanti, S.E., selaku Bendahara Penerimaan BKAD.
- 7) Seluruh staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah, staf di Dinas Komunikasi dan Informasi, staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu dan mendukung peneliti demi kelancaran penelitian ini.

- 8) Teman-teman se-bimbingan dari berbagai jurusan/angkatan, terutama kepada Supandi Rahman yang telah berbagi ilmu NVivo kepada peneliti, Ahmad Nofrianto yang telah membantu kelancaran instal NVivo dan display laporan peneliti, serta Dwi Handoyo yang telah memberi informasi dan berbagi penyajian data dalam NVivo.

Kepada pihak lain yang juga turut memberikan bantuan secara tidak langsung kepada peneliti, tidak lupa juga peneliti memberi ucapan terimakasih terutama kepada:

- 1) Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
- 2) Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
- 3) Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Univesitas Islam Indonesia;
- 4) Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univesitas Islam Indonesia;
- 5) Pegawai dan staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan informasi dan kelancaran akademik bagi peneliti.
- 6) Teman-teman se-angkatan Magister Akuntansi angkatan ke-13 (Maksi 13) yang telah memberi dukungan, memberi ucapan selamat, dan memberi doa yang tulus sehingga terus memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian dan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga peneliti sangat mengharapkan saran

maupun kritik yang bersifat konstruktif. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi sebuah karya yang bermanfaat khususnya bagi diri peneliti sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Wates, 17 Oktober 2018

Emerha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
ABSTRAK	xxix
ABSTRACT	xxx
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Fokus Penelitian.....	14
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Manfaat Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum.....	20
2.1.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.1.1.1 Konsep Pengelolaan	20
2.1.1.2 Keuangan daerah	21
2.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	23
2.1.1.4 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
2.1.2 Konsep Dasar Penganggaran	26
2.1.2.1 Perencanaan dan Penganggaran	26

2.1.2.2	Jenis dan Prinsip Penganggaran di Sektor Publik.....	27
2.1.2.3	Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29
2.1.3	Landasan Hukum Keuangan Daerah	31
2.2	Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi	32
2.2.1	Konsep Transparansi	32
2.2.1.1	Definisi Transgparansi.....	33
2.2.1.2	Tingkatan Transparansi di Pemerintahan.....	34
2.2.1.3	Indikator dan Alat Ukur Transparansi	35
2.2.1.4	Prinsip Transparansi di Pemerintahan	36
2.2.1.5	Membangun Transparansi di Pemerintahan	37
2.2.2	Konsep Akuntabilitas	38
2.2.2.1	Definisi Akuntabilitas.....	38
2.2.2.2	Jenis Akuntabilitas.....	40
2.2.2.3	Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas.....	41
2.2.2.4	Membangun Akuntabilitas di Pemerintahan	42
2.2.3	Mencegah Korupsi melalui Transparansi dan Akuntabilitas	44
2.2.3.1	Penyebab Perilaku Korupsi di Pemerintahan.....	44
2.2.3.2	Mencegah Korupsi di Pemerintahan.....	45
2.3	Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi	47
2.3.1	Budaya Kerja Organisasi	47
2.3.1.1	Definisi Budaya Organisasi	48
2.3.1.2	Karakteristik, Unsur, dan Atribut Budaya Organisasi	48
2.3.1.3	Proses Terbentuknya Budaya Organisasi.....	51

2.3.1.4 Budaya Organisasi Kuat dan Lemah.....	54
2.3.2 Proses Belajar Organisasi	56
2.3.2.1 Pengetahuan, Penciptaan Pengetahuan, dan Manajemen Pengetahuan	56
2.3.2.2 <i>Explicit Knowledge</i> dan <i>Tacit Knowledge</i>	57
2.3.2.3 Kategori <i>Tacit Knowledge</i>	58
2.3.2.4 Teori <i>Knowledge Conversion</i>	61
2.3.2.5 Bentuk-bentuk Proses SECI	64
2.4 Peta Literatur Penelitian	69
2.4.1 Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum	73
2.4.2 Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi	75
2.4.3 Peta Literatur untuk <i>Nodes</i> Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi	79
2.5 Penelitian Terdahulu.....	81
2.6 <i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu.....	88
BAB III: METODE PENELITIAN	93
3.1 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif	93
3.2 Rancangan Penelitian	95
3.2.1 Tahap Penentuan Topik Penelitian	97
3.2.2 Tahap Penentuan Rumusan Masalah	97
3.2.3 Tahap Pengumpulan dan Reviu Literatur	98
3.2.4 Tahap Pengumpulan Data	101
3.2.5 Tahap Analisis Data	101

3.2.6 Tahap Penarikan Kesimpulan	103
3.3 Objek Penelitian	104
3.4 Instrumen Penelitian	105
3.5 Jenis Data	106
3.6 Sumber Data	107
3.6.1 Strategi <i>Gatekeepers</i>	108
3.6.2 Strategi <i>Snowball</i>	111
3.7 Teknik Pengumpulan Data	114
3.7.1 Teknik Wawancara Mendalam	115
3.7.2 Teknik Dokumentasi	123
3.7.2.1 <i>Website</i>	123
3.7.2.1 Dokumen Internal	125
3.8 Pengujian Keabsahan Data	127
3.8.1 Uji Kredibilitas	127
3.8.1.1 Perpanjangan Waktu Penelitian	128
3.8.1.2 Triangulasi	129
3.8.1.3 Pengecekan Anggota	130
3.8.2 Uji Realibilitas	132
3.8.2.1 Pengecekan Kembali Hasil Transkrip	132
3.8.2.2 Pengecekan Hasil Koding	133
3.9 Teknik Analisis Data	133
3.9.1 Analisis Model Miles dan Huberman	134
3.9.2 Mengolah Data dengan Bantuan <i>Software NVivo</i>	136

3.9.2.1 Melakukan Manajemen Data	138
3.9.2.2 Melakukan Analisis Eksploratif	139
3.9.2.3 Membuat Kategori Konsep	140
3.9.2.4 Melakukan Koding dan Membuat <i>Node</i>	141
3.9.2.5 Melakukan Proses Integrasi dan Disintegrasi	142
3.9.2.6 Melakukan Konstruksi Tema-tema Utama	142
3.9.2.7 Membuat Laporan Hasil Analisis Data	143
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	144
4.1 Pengenalan Bab	144
4.2 Profil Singkat Kabupaten Kulon Progo	146
4.2.1 Sekilas Terbentuknya Kabupaten Kulo Progo	146
4.2.2 Gambaran Umum Pemerintahan	150
4.2.3 Ringkasan Visi Misi Pembangunan Daerah	153
4.2.4 Riwayat Singkat Perekonomian Daerah	154
4.2.5 Sekilas Gambaran Keuangan Daerah	157
4.2.6 Sederet Prestasi Pembangunan Daerah.....	158
4.3 Gambaran Umum APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	162
4.3.1 Pendapatan Daerah	166
4.3.2 Belanja Daerah	167
4.3.3 Pembiayaan Daerah	168
4.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan	170
4.3.5 Rasio Belanja Daerah	173
4.3.6 Analisis Pembiayaan Daerah	174

4.4	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	175
4.4.1	Mekanisme Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel	176
4.4.1.1	Bersinergi Bersama Stakeholder dengan Melibatkan BKAD	180
4.4.1.2	Tersedia Media Publikasi Internal dan Eksternal	183
4.4.1.3	Konsultasi Publik dan Menyerap Aspirasi melalui Sistem Informasi Perencanaan	185
4.4.1.4	Tersedia Layanan Pengaduan Masyarakat	188
4.4.1.5	Pra-RKA dan Standar Evaluasi.....	190
4.4.1.6	Berorientasi Proses dengan Membentuk Pokja RPJM.....	193
4.4.1.7	Konektivitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....	195
4.4.1.8	Payung Hukum Perencanaan Memadai dan Mengikuti Aturan Berlaku	197
4.4.2	Mekanisme Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel	199
4.4.2.1	Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik	202
4.4.2.2	Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui.....	216
4.4.2.3	Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan.	217
4.4.2.4	Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran	219
4.4.2.5	Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan	222
4.4.2.6	Rakor dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD.....	225
4.4.2.7	Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai	227
4.4.3	Mekanisme Penatausahaan yang Transparan dan Akuntabel.....	229
4.4.3.1	Kerjasama yang Baik antara PPTK, PPK, dan Bendahara.	232

4.4.3.2 PPTK sebagai Fungsi Pembuat Dokumen Pertanggungjawaban	235
4.4.3.3 Sistem Panjar Berbasis Bukti Pertanggungjawaban.....	238
4.4.3.4 Komitmen Bersama Penyampaian SPj Tepat Waktu dan Lengkap	240
4.4.3.5 Keadaan Kas dan Aset Tetap yang Selalu Dimonitoring	242
4.4.4 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel	245
4.4.4.1 Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	247
4.4.4.2 Sinkronisasi Data Pelaporan Keuangan melalui PPK.....	249
4.4.4.3 Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	251
4.4.4.4 Penghargaan Kinerja Pelaporan	253
4.5 Budaya Kerja yang Membentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	255
4.5.1 Budaya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	255
4.5.1.1 Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi	258
4.5.1.2 Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif	262
4.5.1.3 Berorientasi dan Komitmen Melayani	265
4.5.1.4 Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral	268
4.5.1.5 Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi.....	269
4.5.2 Proses Belajar Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	275
4.5.2.1 Sosialisasi	279
4.5.2.2 Eksternalisasi	289
4.5.2.3 Kombinasi	301

4.5.2.4 Internalisasi	310
4.6 Perbaikan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	319
4.6.1 Kekurangan dan Kendala Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	321
4.6.1.1 Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	321
4.6.1.2 Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	322
4.6.1.3 Tidak Ada Petugas yang Mengakuntansikan Transaksi di PPKD	324
4.6.1.4 Masih Adanya Persoalan <i>Rent Seeker</i> dan Penyerapan Anggaran yang Rendah	325
4.6.1.5 Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yang Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah	327
4.6.2 Rekomendasi Perbaikan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transpran dan Akuntabel	329
4.6.2.1 Jadikan Variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan sebagai Salah Satu Indikator Kinerja.....	331
4.6.2.2 Jadikan Media Sosial sebagai Alat Penyebaran Informasi..	332
4.6.2.3 Bentuk PPK-SKPKD yang Dikoordinasikan oleh Bidang Akuntansi	334
4.6.2.4 Terapkan ASB di Semua Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah	335
4.6.2.5 Lakukan Upaya Optimalisasi Aset sesuai Aturan Berlaku.	338
BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	344
5.1 Simpulan	344
5.2 Implikasi dan Keterbatasan Penelitian	348

5.2.1 Implikasi Teoritis	349
5.2.2 Implikasi Praktis	349
5.2.3 Keterbatasan Penelitian	350
5.3 Saran	350
DAFTAR REFERENSI	353

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Propinsi	3
Tabel 1.2: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Modus	4
Tabel 1.3: Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga.....	5
Tabel 1.4: Indeks Akuntabilitas Kabupaten di Indonesia versi <i>Local Budget Index</i> Tahun 2017.....	10
Tabel 1.5: Indeks Transparansi Kabupaten di Indonesia versi <i>Local Budget Index</i> Tahun 2017.....	11
Tabel 4.1: Ringkasan Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dan 2018	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	25
Gambar 2.2:	Gambaran Umum Struktur APBD Berdasarkan Kelompok Akun Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	30
Gambar 2.3:	Spiral Proses Pengetahuan SECI	62
Gambar 2.4:	Peta Literatur Penelitian	71
Gambar 3.1:	Diagram Alir Penelitian	96
Gambar 4.1:	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo	147
Gambar 4.2:	Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo	152
Gambar 4.3:	Peta Analisis Akhir-Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018	164
Gambar 4.4:	Grafik Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Kulon Progo T.A 2017 dan 2018	171
Gambar 4.5:	Grafik Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dan 2018	173
Gambar 4.6:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	179
Gambar 4.7:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	201
Gambar 4.8:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	231
Gambar 4.9:	Peta Analisis Akhir Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	246
Gambar 4.10:	Peta Analisis Akhir Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	257

Gambar 4.11: Peta Analisis Akhir Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	276
Gambar 4.12: Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	278
Gambar 4.13: Peta Analisis Akhir Kekurangan dan Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	320
Gambar 4.14: Peta Analisis Akhir Rekomendasi dan Saran Perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	330

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	<i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu Berdasarkan Jumlah <i>Source</i> ..	364
Lampiran 2:	<i>Matrix Coding</i> Penelitian Terdahulu Berdasarkan Jumlah Kata	365
Lampiran 3:	Surat Izin Penelitian	366
Lampiran 4:	Profil Partisipan Wawancara	368
Lampiran 5:	Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017	369
Lampiran 6:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017	380
Lampiran 7:	<i>Matrix Coding</i> Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	383
Lampiran 8:	<i>Matrix Coding</i> Budaya Kerja dan Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo	384
Lampiran 9:	<i>Matrix Coding</i> Kekurangan, Kendala, dan Solusi untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	385
Lampiran 10:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	386
Lampiran 11:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	430
Lampiran 12:	Daftar Wawancara dengan Partisipan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	725
Lampiran 13:	<i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	734
Lampiran 14:	<i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	752

Lampiran 15: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	781
Lampiran 16: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	792
Lampiran 17: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	797
Lampiran 18: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Sosialisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	814
Lampiran 19: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Eksternalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	833
Lampiran 20: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Kombinasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	846
Lampiran 21: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Proses Internalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	861
Lampiran 22: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	876
Lampiran 23: <i>Framework Matrix</i> Wawancara tentang Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo	879
Lampiran 24: <i>Framework Matrix</i> Dokumentasi tentang Gambaran Umum dan Postur APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo.....	882

ABSTRAK

Prestasi transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Kulon Progo bisa dilihat dari setiap mekanisme pengelolaan keuangan di daerahnya. Salah satunya sebagai kabupaten pertama yang paling akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dan urutan ke-12 sebagai kabupaten paling transparan dari 70 kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi prestasi terbaik pengelolaan keuangan dari sisi transparansi dan akuntabilitas serta seberapa penting dari praktik tersebut dijadikan pembelajaran untuk diimplementasikan di daerah lain. Fokus penelitian untuk mengetahui kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas yang diserap, dipahami, dan diterapkan sehari-hari dalam mengelola keuangan daerah. Metode penelitian adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan 19 partisipan dan diolah dengan alat bantu *software* NVivo 11 Plus. Penelitian ini menemukan paling kurang 24 kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan tersebut mengkristal menjadi 5 budaya kerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo tercipta melalui proses belajar yang diajarkan dan disebarkan melalui pengalaman dan keahlian yang berbentuk tasit. Pengalaman dan keahlian tersebut pertama kali dikembangkan sejak Bupati Hasto Wardoyo memimpin. Enam belas kegiatan kemudian berproses dimulai dari sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi (SECI) sampai menjadi prestasi terbaik saat ini.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Daerah, Budaya, Transparansi, Akuntabilitas, SECI.*

ABSTRACT

*The achievements of transparency and accountability in Kulon Progo Regency can be seen from every mechanism of financial management in the region. One of them is the first district that is the most accountable in regional financial management and the 12th is the most transparent district of 70 districts / cities in Indonesia. This study seeks to explore the best performance of financial management in terms of transparency and accountability and how important it is to be used as learning to be implemented in other areas. The focus of the research is to find out activities that shape transparency and accountability that are absorbed, understood and applied daily in managing regional finances. The research method is qualitative. Data was collected through documentation and in-depth interviews with 19 participants and processed with NVivo 11 Plus software tools. This research has found at least 24 activities that shape the transparency and accountability of regional financial management in Kulon Progo Regency. These activities crystallize into 5 work culture of transparency and accountability in regional financial management. Knowledge of transparency and accountability in regional financial management in Kulon Progo Regency is created through a learning process that is taught and disseminated through experience and expertise in the form of *tasit*. The experience and expertise was first developed since Regent Hasto Wardoyo took the lead. Sixteen activities then proceeded from socialization, externalization, combination and internalization (SECI) to the best achievement at this time.*

Keywords: *Regional Financial Management, Culture, Transparency, Accountability, SECI.*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Langkah penting pertama dalam melakukan penelitian adalah mengkaji literatur/pustaka. Kajian pustaka (*literature review*) adalah mempelajari dan mengeksplorasi pustaka melalui gagasan pengetahuan yang terakumulasi dan membangun konsep berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para ahli dan peneliti lainnya yang berkontribusi dan berbagi hasil penelitian satu sama lain (Neuman, 2014:126). Dalam bab ini akan disajikan kajian literatur dengan 6 topik bahasan. Tiga topik utama tentang kajian pustaka yang menjadi landasan teori penelitian ini dan 3 topik tentang hasil olah data literatur dengan alat bantu NVivo yang menjadi landasan berpikir peneliti.

Kajian pertama akan dimulai dengan topik pengelolaan keuangan daerah dan landasan hukum yang membahas konsep pengelolaan dan konsep penganggaran. Kajian kedua topik tentang transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yang membahas tentang konsep, indikator, dan cara mencegah korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas. Kajian ketiga topik tentang budaya kerja dan proses belajar organisasi pemerintah daerah yang membahas tentang konsep budaya, pengetahuan, dan teori transfer pengetahuan. Kajian keempat tentang peta penelitian yang dihasilkan dengan bantuan NVivo dan penjelasannya. Kajian kelima tentang pembahasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan terakhir penjelasan tentang penelitian terdahulu melalui *matrix coding* yang diolah dengan bantuan NVivo.

1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum

Bagian ini membahas 3 subtopik utama yaitu pengelolaan keuangan daerah, wujud dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dan landasan hukum keuangan daerah.

1.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dibahas dalam 3 subtopik lagi yaitu konsep pengelolaan, ruang lingkup keuangan daerah, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, seperti berikut ini.

1.1.1.1 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan menurut Badudu dan Zain (1996:650) dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki 4 arti yaitu pengelolaan adalah proses, cara, atau perbuatan mengelola; pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Arti pengelolaan adalah *soft skill* atau keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain (Siagian, 2005:1-3). Sementara Terry dan Franklin (1982:4) mendefinisikan pengelolaan adalah sebuah proses yang jelas dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk menentukan dan menetapkan tujuan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain (Koontz et al., 1984:5). Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang efektif dan efisien (Sikula, 1981:3).

Konsep dan definisi pengelolaan tersebut sekilas sebenarnya mirip dengan istilah manajemen atau dalam bahasa Inggrisnya *management*, yang berarti mengelola. Manajemen didefinisikan oleh Daft (2002:8) adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Ada dua hal penting dalam definisi ini yaitu adanya empat fungsi manajemen dan adanya pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Griffin (2004:7) bahwa manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

1.1.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan daerah didefinisikan dalam semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara/daerah bersama aturan turunannya, dan salah satunya adalah peraturan pemerintah. Peneliti hanya mengambil satu definisi yang

dimuat dalam peraturan turunan ini karena pada prinsipnya definisi ini sama bunyinya untuk semua peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2005) memberi definisi bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah juga diperintahkan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Masih menurut peraturan pemerintah tersebut bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi 6 aspek yaitu:

- a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) penerimaan daerah;
- d) pengeluaran daerah;
- e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

1.1.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Jika konsep pengelolaan tersebut di atas diterapkan dalam konteks keuangan daerah, maka yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2005) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu diperintahkan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1.1.1.4 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Kementerian Dalam Negeri, 2006), tahapan pengelolaan keuangan daerah itu dibagi dalam 4 (empat) mekanisme yang diringkas berikut ini.

1) Tahap Perencanaan.

Tahap ini merupakan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN). Tahap ini dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah (RPJMD) sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Tahap Pelaksanaan.

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran setelah APBD disahkan. Tahap ini dimulai dari penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) oleh bendahara.

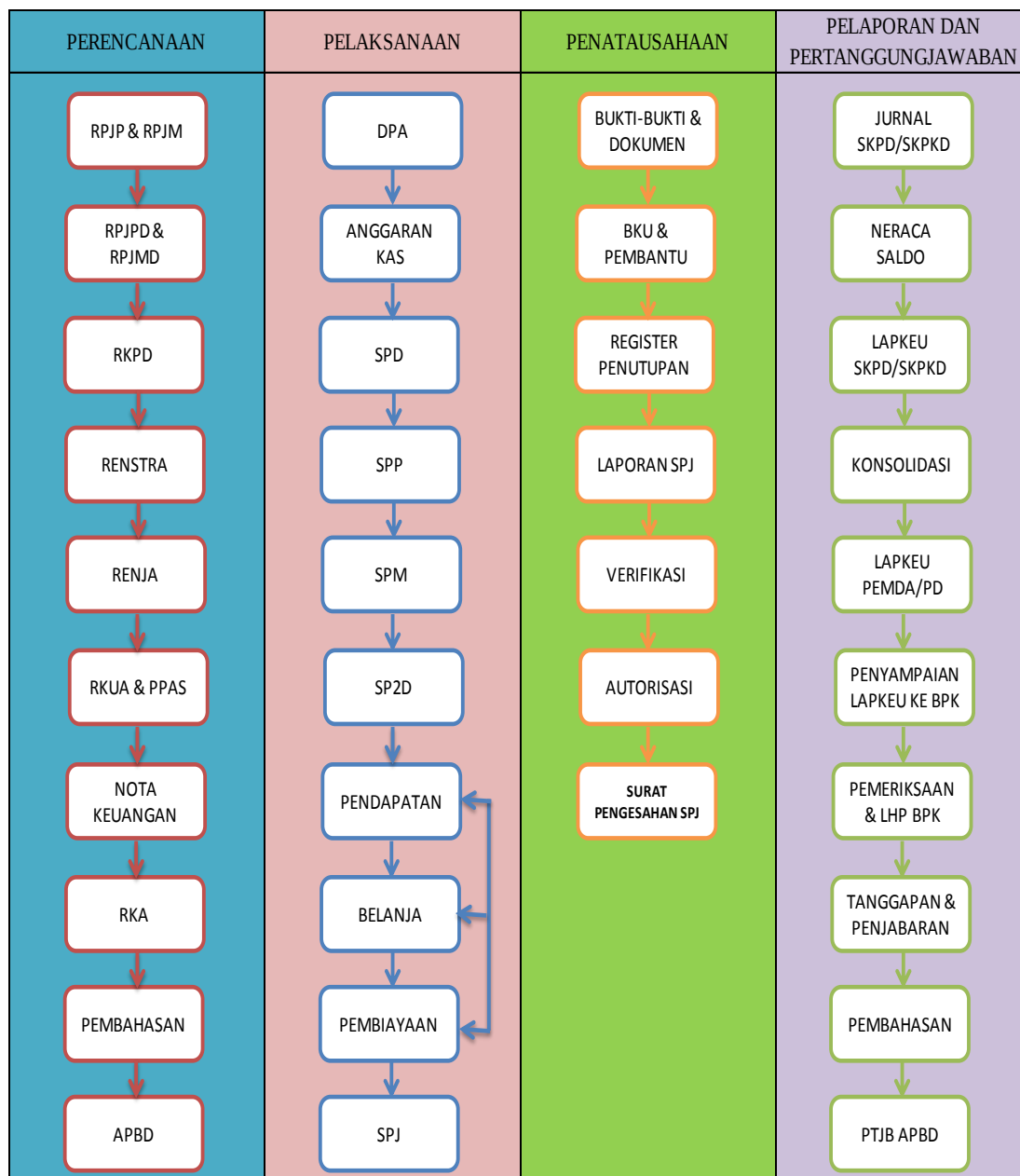
3) Tahap Penatausahaan.

Tahap ini merupakan proses penyelenggaraan administrasi dan dokumentasi atas hasil pelaksanaan APBD. Tahap ini dimulai dari pengumpulan bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban sampai dengan pengesahan SPj oleh pengguna anggaran.

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Tahap ini merupakan proses penyelenggaraan akuntansi atas transaksi seluruh keuangan daerah berdasarkan proses penatausahaan. Tahap ini dimulai dari pembuatan jurnal ke dalam sistem keuangan sampai dengan penetapan hasil pembahasan pertanggungjawaban kepala daerah di DPRD.

Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka mekanisme pengelolaan keuangan daerah akan terlihat dalam ringkasan pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sumber: Diadaptasi dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

1.1.2 Konsep Dasar Penganggaran

Pada bagian ini dijelaskan perbedaan perencanaan dengan penganggaran, jenis-jenis penganggaran, prinsip-prinsip penganggaran di pemerintahan, dan definisi dan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijelaskan berikut ini.

1.1.2.1 Perencanaan dan Penganggaran

Antara perencanaan dan penganggaran memiliki arti yang berbeda. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004) tentang sistem perencanaan pembangunan nasional didefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nursini (2010:76) mendefinisikan penganggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Perbedaan tersebut menurut Madjid (2014:5) terletak pada komponennya dimana perencanaan memiliki komponen yang terdiri dari visi misi yang hendak dicapai, tujuan, sasaran, program, kegiatan, kinerja, target, hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*). Sementara komponen penganggaran disebutkan oleh Mardiasmo (2005:62) terdiri dari komponen informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Jadi dalam perencanaan, semua masih mengandung konsep dan ide tentang apa yang akan dilakukan yang berisi strategi yang sifatnya kualitatif. Sedangkan dalam penganggaran, merupakan kelanjutan dari proses perencanaan tetapi sudah dikuantifikasi dalam bentuk rupiah.

Meskipun ada perbedaan, antara perencanaan dan penganggaran memiliki keterkaitan erat dan satu kesatuan. Keterkaitannya menurut Mardiasmo (2005:64) bahwa penganggaran merupakan salah satu alat dari perencanaan yang digunakan untuk 1) merumuskan tujuan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang ditetapkan; 2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya; 3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun; dan 4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

1.1.2.2 Jenis dan Prinsip Penganggaran di Sektor Publik

Ritonga (2012:21-25) membagi 3 jenis penganggaran di sektor publik, yaitu anggaran tradisional, anggaran berbasis pelayanan publik, dan anggaran berbasis kinerja. Anggaran tradisional adalah anggaran yang penyusunannya didasarkan atas pendekatan *incrementalism* dan berstruktur *line item*. Ciri-ciri dari pendekatan anggaran ini adalah sentralistik, spesifikatif, tahunan, anggaran bruto, dan naik-naik. Anggaran berorientasi pelayanan publik adalah anggaran yang penyusunannya berorientasi pada sistem desentralisasi dengan memperhatikan konsep nilai uang dengan pendekatan sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Ciri-ciri anggaran ini adalah penyusunannya yang berbasis *zero based budgeting* (ZBB) dan memperhatikan alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sementara anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan prestasi kerja dan *output* dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Ciri-ciri anggaran ini adalah tidak berbasis angka seperti pada anggaran berbasis ZBB, artinya walaupun

anggaran masih tersisa tetapi kinerja telah tercapai, maka kegiatan tidak lagi dilaksanakan.

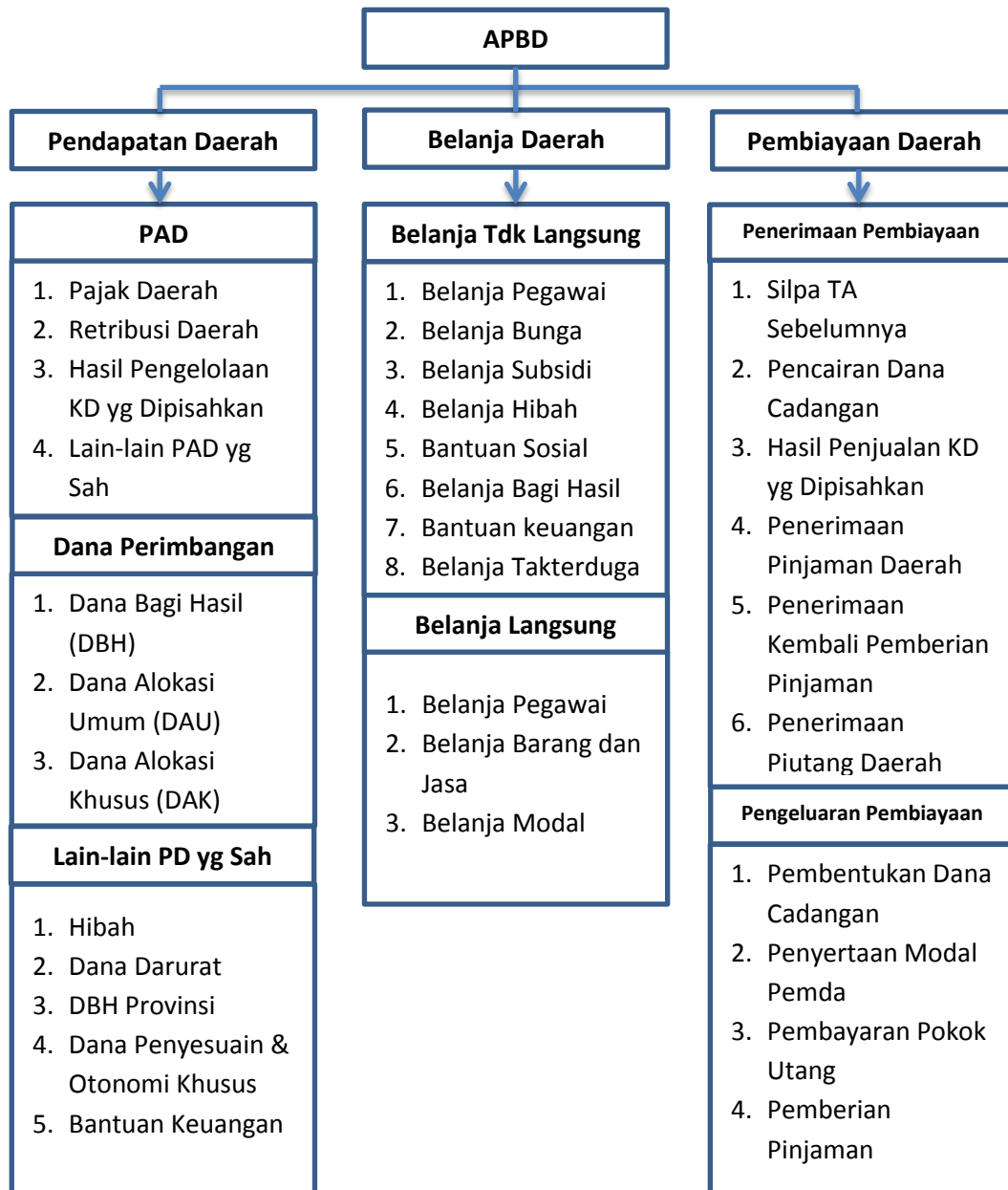
Untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran, Mardiasmo (2005:67-68) mengemukakan ada 8 prinsip anggaran yang wajib dilaksanakan di sektor publik, yaitu:

- 1) Autorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran harus mendapat autorisasi dari dewan perwakilan terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
- 2) Komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga apabila ada dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip;
- 3) Keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum;
- 4) *Nondiscretionary appropriation*, yaitu jumlah anggaran yang disetujui dewan harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- 5) Periodik, yaitu anggaran disusun secara tahunan;
- 6) Akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan kantong-kantong pemborosan yang dapat mengakibatkan *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;
- 7) Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami, dan tidak membingungkan;
- 8) Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

1.1.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2006). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD wajib berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD juga mempunyai fungsi autorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD disusun berdasarkan struktur yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah disebut surplus atau defisit. Sementara selisih antara surplus atau defisit dengan pembiayaan disebut selisih lebih atau selisih kurang pembiayaan (Silpa/Sikpa). Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih ringkasnya, gambaran umum struktur APBD dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Gambaran Umum Struktur APBD Berdasarkan Kelompok Akun Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sumber: Diadaptasi dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

1.1.3 Landasan Hukum Keuangan Daerah

Konsep pengelolaan keuangan daerah dan konsep transparansi dan akuntabilitas memiliki landasan hukum yang sama. Artinya landasan hukum transparansi dan akuntabilitas adalah satu dan saling terkait. Setiap menjelaskan tentang keuangan daerah diwajibkan juga untuk dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Dasar hukum kewajiban pelaksanaan kedua konsep tersebut diatur mulai dengan undang-undang, peraturan presiden/peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Undang-undang yang menjadi rujukan utama pengelolaan keuangan daerah antara lain.

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan semua peraturan menteri pengganti dan turunannya.

Dalam penjelasan pasal-pasal semua peraturan di atas dijelaskan lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas dijabarkan menjadi asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang salah duanya adalah transparansi dan akuntabilitas yang berorientasi hasil dan keterbukaan pengelolaan keuangan negara. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

1.2 Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi

Pada bagian ini akan dijelaskan 3 subtopik utama yaitu konsep transparansi, konsep akuntabilitas dan hubungan antara konsep transparansi dan akuntabilitas dengan pencegahan Korupsi.

1.2.1 Konsep Transparansi

Isu transparansi dalam anggaran pemerintah merupakan topik yang paling hangat dibicarakan saat ini karena telah menjadi kebutuhan yang banyak dituntut oleh

masyarakat. Secara teoritis, transparansi merupakan salah satu pilar dari *good corporate governance* yang paling esensial. Berikut akan dijelaskan definisi transparansi, tingkatan transparansi, indikator transparansi, prinsip transparansi, dan membangun transparansi di pemerintahan.

1.2.1.1 Definisi Transparansi

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:16) mendefinisikan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini berarti organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh setiap pemangku kepentingan.

Sementara menurut Badudu dan Zain (1996:1533) dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, transparansi diartikan tembus cahaya, jernih, nyata dan jelas, serta terbuka atau tidak terbatas pada orang tertentu saja. Dalam hal keuangan, transparansi mengandung makna menyampaikan, menjawab, atau menerangkan informasi kinerja keuangan dan tindakan seseorang atau organisasi. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh organisasi.

Meijer (2013:5) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal

lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik.

Terdapat tiga definisi transparansi yang diamati dalam sebuah organisasi, yaitu transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan, transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai strategik atau akuntabilitas mimetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya, serta transparansi adalah tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan (López dan Torres, 2017:6).

1.2.1.2 Tingkatan Transparansi di Pemerintahan

Biondi dan Lapsley (2014:148-149) membagi transparansi menjadi tiga level yang disebut model Biondi dan Lapsley (*BL Model*) yaitu pada level pertama transparansi tercapai jika ada akses terhadap informasi (*access*), pada level kedua, transparansi tercapai jika ada pemahaman terhadap fenomena yang sudah diungkapkan (*understanding*), dan pada level ketiga yang merupakan level tertinggi yang transparansi tercapai jika informasi dan pemahaman pada level pertama dan level kedua tersebut ditindaklanjuti secara luas dan berpotensi ditangani oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam fenomena yang diungkapkan (*shared meanings*). Dengan demikian menurut Model BL bahwa transparansi tertinggi tercapai bila informasi tidak hanya tersedia (level 1) atau dipahami (level 2), tapi bila informasi ini ditindaklanjuti dengan niat dan cara yang baik (level 3).

Ada juga level transparansi yang menggunakan sistem informasi yang bisa dilihat dari penggunaan teknologi informasi seperti saat ini. Model tingkatan ini bermacam-macam mulai dari aplikasi internal, *website*, dan media sosial yang memiliki manfaat tersendiri tergantung jenis organisasinya. Roengtam et al. (2017:356-361) berusaha untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial terhadap transparansi dan fungsi pemerintah daerah terpilih di tiga negara yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Secara keseluruhan hasil penelitian dari 3 negara tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial bukan menandakan adanya transparansi dan akuntabilitas, karena media sosial belum mempengaruhi proses internal organisasi di tiga kota tersebut. Penggunaan media sosial tidak digunakan sebagai ruang bagi pemerintah dan warga negaranya untuk berinteraksi. Media sosial hanya digunakan untuk penyebaran informasi kepada publik dan mengumpulkan informasi dari warga tapi bukan untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

1.2.1.3 Indikator dan Alat Ukur Transparansi

Krina (2003:15) mengatakan bahwa transparansi bisa dilihat atau diukur dalam 3 indikator, yaitu:

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; dan

- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Level transparansi pernah diteliti oleh Lapsley dan Rios (2015:390-391) di Parlemen Skotlandia bahwa pada level pertama setiap anggaran yang dibahas oleh komisi di parlemen, akses informasinya dikemukakan di depan umum, namun substantif masalahnya sebenarnya masih tertutup. Pada level kedua, terbukti bahwa komisi anggaran memiliki tingkat permintaan pemahaman yang signifikan yang anggotanya tidak dapat memahami dokumen anggaran dengan jelas. Pada level ketiga disimpulkan tidak ada transparansi dalam penganggaran karena pada akhirnya keputusan komisi anggaran didasarkan pada politik aritmatika yaitu menerima perintah partai dan menegakkan konsensus yang jelas berdasarkan suara mayoritas.

Dari ketiga level transparansi tersebut disimpulkan bahwa politisi tidak tertarik pada transparansi, meskipun mereka mungkin membuat ucapan yang baik kepada publik yang mendukungnya. Ini menggarisbawahi dimensi kepercayaan dalam transparansi. Jika transparansi sudah dijadikan *lip service* dengan prinsip dasar keuangan publik kontemporer, ini menimbulkan isu utama mengenai sejauh mana pemilih dapat mempercayai politisinya.

1.2.1.4 Prinsip Transparansi di Pemerintahan

Prinsip transparansi di pemerintahan adalah menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan

informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Krina, 2003:14).

1.2.1.5 Membangun Transparansi di Pemerintahan

Araujo dan Tejedo-Romero (2016:14-15) mengatakan ada 3 faktor yang harus diperhatikan jika ingin membangun transparansi di pemerintahan, yaitu tingkat partisipasi pemilih (*elektoral turnout*), ideologi politik, dan tingkat persaingan politik. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih, maka semakin tinggi tekanan rakyat kepada pemerintah daerah untuk mengungkap informasi kepada publik. Ideologi politik berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah yang artinya semakin terbuka ideologinya maka semakin transparan pengungkapan informasinya. Semakin kuat tingkat persaingan politik, maka rakyat semakin mudah mengungkap informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini mengandung standar konsekuensi bahwa transparansi dan pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan rakyatnya sebagian besar ditentukan oleh faktor politik sehingga rakyat harus sadar dan memahami peran faktor politik terhadap pengungkapan informasi dan transparansi karena hubungan antara transparansi dan variabel politik merupakan proses yang dinamis.

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh López dan Torres (2017:13-14), bahwa aksesibilitas dan transparansi informasi berpengaruh terhadap sumber daya keuangan, kinerja ekonomik, dan kinerja sosial. Penelitian ini menyimpulkan lebih cenderung berdampak positif dan terdapat hubungan antara keduanya. Dampak terhadap sumber daya keuangan adalah meningkatkan nilai organisasi melalui karakteristik organisasinya sehingga memperoleh legitimasi dari *stakeholder* khususnya para pendiri organisasi. Proses penciptaan nilai dengan transparansi terjadi melalui mempunyai organisasi menarik datangnya sumber daya keuangan berupa dana baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan dampak aktivitas ekonomik dan sosial organisasi. Jadi transparansi merupakan nilai strategiknya dan aksesibilitas *online*-nya merupakan alat untuk mempromosikan keberlangsungan ekonomik, efisiensi sosial, dan keterbukaan kerjasama.

1.2.2 Konsep Akuntabilitas

Terdapat dua sumber definisi yang diberikan untuk akuntabilitas yaitu definisi dari para ahli dan definisi menurut undang-undang. Dalam pembahasan ini definisi akuntabilitas dibahas berdasarkan para ahli seperti berikut ini.

1.2.2.1 Definisi Akuntabilitas

Secara harfiah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability*. Suwardjono (2014:251) memperkenalkan terjemahan untuk *accountability* dengan istilah pertanggungjawaban. Verba bertanggung jelas sengaja diciptakan sebagai padan kata *to be accountable for* untuk membedakannya dengan verba bertanggung jawab sebagai padan kata *to be responsible for*. Oleh karena itu, istilah *accountability* dan

responsibility dapat diterjemahkan menjadi “pertanggungjelasan” dan “pertanggungjawaban”, sementara bentuk verba lainnya adalah “mempertanggungjelaskan” dan “mempertanggungjawabkan”.

Mahmudi (2014:9) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Berbeda dengan pendapat Suwardjono yang memisahkan konsep akuntabilitas dan responsibilitas, Mahmudi (2014:9) menyatukan konsep akuntabilitas sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dan tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang mewakili kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian.

Mahsun (2014:83-85) juga memberi definisi dan perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas didefinisikan menjadi dua yaitu definisi secara sempit dan definisi secara luas. Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam arti luas akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah

(prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas didefinisikan juga oleh Friedman (2009:22) sebagai hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang salah satunya bertanggungjawab kepada yang lain untuk suatu kepentingan. Akuntabilitas biasanya dikaitkan dengan kinerja dan akuntabilitas kinerja itu sendiri berhubungan dengan peran pemimpin yaitu bagaimana pemimpin menjalankan program yang menjadi tanggungjawabnya yang memungkinkan baginya membuat kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan.

1.2.2.2 Jenis Akuntabilitas

Mahsun (2014:85-87) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja. Selain keuangan, akuntabilitas juga terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- 1) akuntabilitas fiskal, yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi;
- 2) akuntabilitas hukum, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah;
- 3) akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan;
- 4) akuntabilitas hasil, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat;

- 5) akuntabilitas kejujuran, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*); dan
- 6) akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas setiap kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

1.2.2.3 Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas

Krina (2003:11) memberi pedoman tentang indikator dan alat untuk mengukur akuntabilitas publik berikut ini.

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
 - b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi *stakeholders*;
 - c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;
 - d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi; dan
 - e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
 - a. penyebaran informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;
 - b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
 - c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan
 - d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

1.2.2.4 Membangun Akuntabilitas di Pemerintahan

Akuntabilitas tidak begitu saja terjadi, tetapi akuntabilitas harus dibangun. Pertama melalui lingkungan yang memiliki akuntabilitas kemudian melalui rerangka kerja akuntabilitas. Hasilnya lingkungan akan mengintegrasikan akuntabilitas dalam individu, tim, dan sistem kerja organisasi. Setelah itu rerangka kerja memastikan pelaksanaan dan pemenuhan atas kewajiban akuntabilitas (Mahsun, 2014:89).

Tentang cara membangun akuntabilitas di sektor publik, Atan et al. (2017:10-11) mengatakan terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa budaya dan lingkungan kerja merupakan dimensi terpenting dalam memberikan akuntabilitas hasil (*outcome accountability*) yang lebih tinggi kepada organisasi pemerintah karena nilai budaya dapat memandu perilaku orang dan menentukan identitas organisasi. Hubungan positif yang signifikan ini menunjukkan bahwa budaya kerja dan

lingkungan dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama. Budaya kepercayaan juga dapat mengurangi kompleksitas budaya nirlaba seperti kurangnya kepercayaan.

Kedua, bahwa ada hubungan yang tidak signifikan antara kepemimpinan dan akuntabilitas. Ini berarti kepemimpinan tidak menjamin akuntabilitas yang baik bagi organisasi pemerintah. Kepemimpinan adalah faktor kunci sukses organisasi, namun tidak memastikan bahwa organisasi akan memiliki akuntabilitas tingkat tinggi. Hal tersebut tergantung bagaimana pemimpin memimpin, dan ini sebagian besar tergantung pada manajer organisasi untuk mencoba dan mendorong akuntabilitas.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas karena semuanya sepakat bahwa etika itu penting dalam proses manajemen dan akan mempengaruhi pekerja untuk bertanggung jawab saat melaksanakan tanggung jawab mereka dan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi. Pendidikan etis akan melatih karyawan di sektor publik tentang pentingnya akuntabilitas di bidang rutinitas harian mereka. Etika berhubungan erat dengan perilaku dan rasa tanggung jawab atas tindakan seseorang.

Keempat, menerapkan sistem *whistle-blowing* pada organisasi sektor publik. Dalam kasus ini, jika karyawan hanya tinggal diam sambil mengetahui sesuatu yang tidak benar sebenarnya terjadi dalam organisasi, dia juga dianggap tidak etis bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik harus mendorong praktik *whistle-blowing* dan menanamkannya dalam budaya organisasi.

1.2.3 Mencegah Korupsi Melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Pada bagian ini dibahas 2 subtopik lagi yaitu penyebab perilaku korupsi di pemerintahan dan bagaimana mencegah korupsi di pemerintahan, yang dijelaskan berikut ini.

1.2.3.1 Penyebab Perilaku Korupsi di Pemerintahan

Korupsi di sektor publik sangat kompleks dan sulit dipahami karena telah membentuk skema ke seluruh generasi. Lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti undang-undang yang kurang memadai, lemahnya penegakan hukum, lemahnya demokrasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kewenangan luas yang diberikan kepada pejabat publik, tidak adanya *check and balance* yang efektif, dan insentif yang buruk. Selain itu faktor perilaku juga memainkan peran penting yang menyebabkan terjadinya korupsi (Prabowo dan Cooper, 2016:26-28).

Menurut Prabowo et al. (2017a:568-569) bahwa masalah korupsi dapat dilihat melalui lensa perilaku yang dibingkai dalam 3 perspektif model infeksi korupsi yaitu teori skemata (*schemata theory*), teori normalisasi korupsi (*corruption normalization theory*), dan teori pengembangan moral (*moral development theory*). Dengan menyatukan 3 model teori ini bisa dilihat bahwa proses korupsi sudah dimulai saat Soeharto berkuasa sampai dengan saat ini yang sudah mengakar melalui 3 proses yaitu institusionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi yang bergerak dari atas ke bawah dimulai dari budaya orang Jawa, skema organisasi sektor publik, skema individu Aparatur Sipil Negara (ASN), sampai ke skema sosial ke seluruh rakyat Indonesia.

Purcell (2016:110-112) menilai korupsi di pemerintahan melalui teori *fraud triangle* yang dapat beregenerasi melalui simbiosis hubungan antara motif, peluang, dan rasionalisasi dengan kelemahan manusia dan kondisi organisasi akan bertindak sebagai inkubatornya. Korupsi dan penyalahgunaan lebih mudah dilihat dari sebuah perilaku organisasi dan individu dibandingkan dengan melihat model tata kelola/kepatuhan dan risiko. Pendekatan alternatif ini menganggap bahwa perilaku korupsi menyediakan cara untuk menyerap faktor penyebabnya yang memungkinkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan untuk beregenerasi (*germinate*). Jika perilaku ini dibiarkan, maka korupsi dan penyalahgunaan dalam pemerintahan daerah bisa menjadi sulit. Untuk menginvestigasinya pun membutuhkan kepercayaan informan dan kemampuan yang memiliki wawasan yang kuat dengan waktu yang efektif dengan mempertimbangkan konteks perilaku organisasi yang lebih luas. Contoh perilaku korupsi ini adalah disfungsi organisasi (*organisational dysfunctionality*), toksisitas budaya (*toxicity of culture*), kepemimpinan yang tidak efektif (*ineffectual leadership*), dan respon individual yang tidak etis (*individual's unethical response*).

1.2.3.2 Mencegah Korupsi di Pemerintahan

Prabowo et al. (2017b:27) kembali menyoroti cara organisasi sektor publik menciptakan dan menggunakan konsep *knowledge conversion* untuk menyebarluaskan korupsi ke seluruh organisasi pemerintah. Korupsi tumbuh dan menyebar ke seluruh struktur dan aktivitas organisasi melalui proses belajar anggota organisasi. Proses belajar ini memungkinkan korupsi untuk beregenerasi seiring

dengan waktu dan telah menjadi kuat. Korupsi pada umumnya diajarkan dan dipelajari melalui tasit/pengalaman (*tacit*) termasuk dengan cara *know how*, model skema, pendekatan pemecahan masalah, dan rutinitas organisasi. Cara terbaik memberantas korupsi adalah dengan melakukan proses mengakui dan melepaskan pengetahuan (*un-learning*) dan mengadopsi pengetahuan baru dalam memperbaiki organisasi (*re-learning*) terhadap pengetahuan korupsi di sektor publik yang tidak lepas dari peran aktif tokoh kepemimpinan. Menghilangkan korupsi harus menghapusnya dari spiral *knowledge conversion* dengan cara *un-learning* dan *re-learning* organisasi baik dalam bentuk tasit maupun eksplisit dan menggantinya dengan pengetahuan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan integritas organisasi.

Selain dari sisi 3 teori lensa perilaku, Prabowo et al. (2017b:27) menyarankan untuk mencegah korupsi dengan cara terlebih dahulu memahami *building blocks* dari pilar normalisasi korupsi sebelum merancang sarana dan strategi untuk mengekang korupsi. Mencontoh pemberantasan korupsi yang berhasil dari negara lain tidak menjamin keefektifannya di Indonesia karena perbedaan dalam karakteristik perilaku masyarakat. Dibutuhkan penyelidikan mendalam terhadap aktivitas ASN sehari-hari dan interaksi mereka dalam institusi publik terkait faktor sosial dan budayanya. Dengan kata lain untuk menghambat regenerasi korupsi harus dilakukan denormalisasi melalui kepemimpinan dengan moralitas yang kuat (analogi memberantas korupsi dengan mitologi Yunani tentang Hercules)

Graycar dan Masters (2018:182) meramu strategi untuk mencegah korupsi melalui fungsi-fungsi pelayanan di sektor publik dan mengenali kesalahan dan

strategi pencegahannya dalam bentuk matriks yang dinamakan *situational crime prevention (SCP) techniques*. Pada sumbu vertikal pelayanan publik terdapat 5 fungsi yaitu fungsi pemberian layanan publik (*public service delivery*), fungsi manajemen keuangan (*financial management*), fungsi layanan pengadaan dan sumber daya (*resource dan service procurement*), fungsi manajemen sumber daya manusia (*human resource management*), dan fungsi kepemimpinan (*leadership*). Sedangkan pada sumbu horisontal pencegahan korupsi terdapat 4 strategi utama, yaitu strategi mengubah usaha (*change the effort*), strategi mengubah risiko dan penghargaan (*change the risiko dan rewards*), strategi integritas nilai (*value integrity*), dan strategi meningkatkan kesadaran (*raise awareness*).

1.3 Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi

Pada bagian ini akan dibahas 2 subtopik utama yaitu budaya kerja dan proses belajar budaya organisasi. Budaya kerja dibahas tentang konsep budaya. Sementara dalam topik proses belajar budaya organisasi dibahas definisi pengetahuan, jenis pengetahuan, dan proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi (SECI) terbentuknya pengetahuan.

1.3.1 Budaya Kerja Organisasi

Dalam topik budaya kerja berturut-turut dijelaskan tentang definisi budaya, karakteristik dan unsur budaya, proses terbentuknya budaya, dan tanda-tanda budaya organisasi kuat dan lemah.

1.3.1.1 Definisi Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan oleh Tobari (2015:59) sebagai kumpulan kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang mudah diserap dan mudah dipahami, dipraktikkan dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan organisasi. Sementara Tika (2006:5), mendefinisikan budaya organisasi adalah unsur-unsur yang terdiri dari asumsi dasar, keyakinan yang dianut, pedoman mengatasi masalah yang dikembangkan oleh pemimpin dan dapat dibagi serta diwariskan kepada anggota dan disesuaikan dengan norma/peraturan yang berlaku dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut memiliki fungsi berikut ini.

- a) Asumsi dasar dalam budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku.
- b) Keyakinan berfungsi sebagai nilai-nilai yang berbentuk slogan, moto, filosofi, atau prinsip.
- c) Pedoman mengatasi masalah berfungsi sebagai alat adaptasi eksternal dan internal.

1.3.1.2 Karakteristik, Unsur, dan Atribut Budaya Organisasi

Riani (2011:21-23) mengatakan paling kurang ada 12 karakteristik budaya organisasi sebagai wujud nyata keberadaannya, yaitu:

- 1) kepemimpinan, yaitu proses mempengaruhi segala aktivitas ke arah pencapaian tujuan organisasi;
- 2) inovasi, yaitu metode yang teruji atau pemberian keleluasaan kepada anggota untuk menerapkan cara-cara baru melalui eksperimen;

- 3) inisiatif individu, yaitu kewenangan dalam menjalankan tugas dan seberapa besar kebebasan dalam mengambil keputusan;
- 4) toleransi terhadap risiko, yaitu kemampuan menghadapi risiko dalam pekerjaan;
- 5) pengarahan, yaitu kejelasan organisasi dalam menentukan sasaran dan harapan terhadap SDM atas hasil kerjanya;
- 6) integrasi, yaitu bagaimana unit-unit dalam organisasi didorong untuk menjalankan kegiatannya dalam satu koordinasi yang baik;
- 7) dukungan manajemen, yaitu seberapa baik manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- 8) pengawasan, yaitu pengawasan melalui peraturan dan supervisi langsung untuk melihat secara langsung perilaku anggota organisasi;
- 9) identitas, yaitu pemahaman anggota organisasi yang memihak kepada organisasinya secara penuh;
- 10) sistem penghargaan, yaitu alokasi balas jasa sesuai kinerja karyawan;
- 11) toleransi terhadap konflik, yaitu usaha mendorong karyawan untuk kritis terhadap konflik yang terjadi; dan
- 12) pola komunikasi, yaitu komunikasi yang terbatas pada hirarki formal dari setiap organisasi.

Terdapat 3 tingkatan unsur-unsur penting dari suatu budaya organisasi seperti yang dikatakan oleh Riani (2011:25-26) berikut ini.

- 1) Artifak (*artifacts*), yaitu sesuatu yang dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu. Artifak dapat dilihat langsung dari struktur sebuah organisasi dan proses yang dilakukan di dalamnya. Artifak merupakan hal yang paling mudah dilihat dan ditangkap saat kita memasuki sebuah organisasi karena berhubungan erat dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan saat berada di dalamnya.
- 2) Nilai-nilai (*values*), yaitu unsur yang didukung oleh organisasi yang meliputi strategi, tujuan, dan filosofi dasar yang dimiliki oleh organisasi. Nilai-nilai ini dapat dipahami jika kita sudah mulai menyelami organisasi tersebut dengan tinggal lebih lama dengannya. Unsur ini biasanya dinyatakan secara tertulis dan menjadi aturan bagi setiap gerak dan langkah anggota organisasi. Pernyataan tertulis ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan seiring waktu akan sangat dipengaruhi oleh cita-cita, tujuan, dan persepsi yang dimiliki oleh pendiri organisasi.
- 3) Asumsi-asumsi tersirat yang dipegang bersama (*shared tacit assumptions*), yaitu keyakinan dan semua hal-hal yang sudah dianggap normal atau sudah menjadi kebiasaan atau menerima apa adanya yang dipegang bersama oleh seluruh anggota. Asumsi tersirat ini dapat kita jumpai dengan menelusuri sejarah organisasinya.

Selain karakteristik dan unsur-unsurnya, Riani (2011:27) juga mengatakan bahwa budaya organisasi tersusun dari konstruksi antara dua tingkat atribut berikut ini.

- a) Atribut yang kelihatan (*observable*), yaitu budaya organisasi yang mencakup aspek organisasi seperti arsitektur, seragam, pola perilaku, peraturan, legenda, mitos, bahasa, dan seremoni yang dilakukan oleh organisasi.
- b) Atribut yang tidak kelihatan (*unobservable*), yaitu budaya organisasi yang mencakup aspek organisasi seperti *shared values*, norma-norma, kepercayaan, asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah-masalah dan keadaan di sekitarnya.

1.3.1.3 Proses Terbentuknya Budaya Organisasi

Budaya dalam sebuah organisasi tidaklah muncul begitu saja, namun ada proses yang harus dilalui budaya itu hingga akhirnya menjadi budaya organisasi. Riani (2011:10-20) kembali menyatakan ada 3 tahap terbentuknya budaya organisasi seperti berikut ini.

- 1) Tahap membentuk, yaitu proses yang dimulai dengan pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Pada saat para pendiri organisasi memiliki ide untuk mendirikan organisasi, maka budaya organisasi pasti akan ikut terpikirkan meskipun masih secara eksplisit. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika organisasi sudah benar-benar berdiri. Proses terbentuknya biasanya mengikuti alir berikut ini.
 - a. Para pendiri dan pimpinan lainnya membawa satu set asumsi dasar, nilai-nilai, perspektif, artifak ke dalam organisasi dan menanamkannya kepada karyawan.

- b. Budaya muncul ketika para anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah pokok organisasi.
 - c. Secara perorangan, masing-masing anggota boleh menjadi seorang pencipta budaya baru (*culture creator*) dengan berbagai cara dan bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi kemudian diajarkan kepada generasi penerus.
- 2) Tahap mempertahankan, yaitu tahapan setelah budaya terbentuk kemudian organisasi menjadi dewasa maka budaya senantiasa diperbaiki dan diperkuat. Cara mempertahankan budaya dilakukan melalui proses yang dimulai dengan ASA (*attraction-selection-attrition*), *onboarding*, kepemimpinan, dan sistem balas jasa.
- a. *Attraction* (ketertarikan), karyawan tertarik kepada sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki jiwa kompetisi mungkin akan merasa nyaman dan cocok bekerja, sehingga dia tertarik untuk bekerja. Kecocokan nilai antara kandidat dengan organisasi ini sangat menentukan kenyamanan dalam bekerja.
 - b. *Selection* (penyeleksian), ketika para kandidat sedang mencari organisasi yang cocok dengan mereka, di saat yang sama organisasi juga sedang mencari orang-orang yang akan sesuai dengan budaya organisasi. Organisasi akan lebih memilih orang-orang yang sesuai dengan budaya organisasi.
 - c. *Attrition* (penyisihan), yaitu proses alami ketika kandidat yang tidak sesuai akan meninggalkan organisasi. Setelah memilih orang-orang yang cocok bagi

organisasi, terkadang masih saja ada karyawan yang tidak cocok. Organisasi akan mengeliminasi kandidat yang tidak sesuai melalui penyesuaian.

- d. *Onboarding*, yaitu proses ketika karyawan baru mempelajari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi.
 - e. Kepemimpinan, yaitu peran pemimpin dalam menciptakan dan mengubah budaya organisasi dengan memotivasi karyawan melalui pemberian inspirasi sehingga budaya organisasi cenderung lebih suportif dan berorientasi karyawan.
 - f. Sistem balas jasa, yaitu pembentuk budaya yang dilakukan organisasi melalui membalas berdasarkan perilaku atau hasil yang dipilih untuk diberi jasa atau dihukum. Jika organisasi membalas berdasarkan kinerja akan menentukan budaya. Jika promosi didasarkan pada senioritas (eselonisasi), maka akan sulit membangun budaya berorientasi hasil. Tipe perilaku yang diberi imbalan atau dibiarkan juga akan berpengaruh pada budaya dan menentukan bagaimana sebuah budaya berevolusi.
- 3) Tahap mengubah, yaitu usaha mengubah budaya organisasi melalui beberapa pertimbangan. Ada tiga tahapan pertimbangan yang biasanya menjadi alasan suatu budaya harus diubah, yang dijelaskan berikut ini.
- a. Sebelum organisasi bisa mengubah budayanya, organisasi harus memahami budaya yang ada.

- b. Memikirkan bentuk organisasi di masa mendatang dan memutuskan bagaimana budaya bisa mendukung kesuksesan.
- c. Individu dalam organisasi harus memutuskan untuk mengubah perilaku untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Lebih sulit untuk mengubah budaya sebuah organisasi daripada menciptakan budaya. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. Membutuhkan 2 elemen untuk menciptakan perubahan yaitu dukungan eksekutif dan pelatihan.

2.3.1.4 Budaya Organisasi Kuat dan Lemah

Budaya organisasi yang kuat adalah budaya yang nilai-nilainya baik formal maupun informal dianut secara bersama-sama dan berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja pimpinan dan anggota organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dikatakan kuat apabila dianut bersama, mempengaruhi perilaku, membangkitkan semangat bekerja, resisten terhadap tantangan, mempunyai sistem peraturan, dan memiliki koordinasi dan kontrol.

Berdasarkan definisi organisasi kuat di atas, Tika (2006:109-111) kemudian merinci lebih lanjut organisasi yang berbudaya kuat dan lemah juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri organisasi berbudaya kuat yaitu:

- 1) anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi, tahu dan jelas apa tujuan organisasi serta mengerti perilaku mana yang dipandang baik dan tidak baik;

- 2) pedoman bertingkah laku bagi orang-orang digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan sehingga orang-orang bekerja menjadi sangat kohesif;
- 3) nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten dari yang berpangkat paling rendah sampai pada pimpinan tertinggi;
- 4) organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan-pahlawan organisasi dan secara sistematis menciptakan bermacam-macam tingkat pahlawan, misalnya pramusaji terbaik bulan ini, pemberi saran terbaik, pengemudi terbaik, inovator tahun ini, dan sebagainya;
- 5) dijumpai banyak ritual, mulai yang sangat sederhana sampai dengan ritual yang mewah. Pemimpin organisasi selalu mengalokasikan waktunya untuk menghadiri acara-acara ritual ini;
- 6) memiliki jaringan kultural yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawannya;
- 7) menurunkan tingkat keluarnya karyawan;
- 8) ada kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi; dan
- 9) ada pembinaan kohesif, kesetiaan, dan komitmen organisasi.

Sementara organisasi yang berbudaya lemah memiliki ciri-ciri berikut ini.

- 1) Mudah terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain.
- 2) Kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi.

- 3) Anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri.

2.3.2 Proses Belajar Organisasi

Proses belajar organisasi yang akan dikaji berikut ini dibahas menggunakan teori *knowledge conversion*. Teori ini berkaitan erat dengan pengetahuan yang pertama kali diciptakan oleh Ikujiro Nonaka sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980 yang kemudian diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang saat itu.

2.3.2.1 Pengetahuan, Penciptaan Pengetahuan, dan Manajemen Pengetahuan

Pengetahuan atau *knowledge* merupakan aset takberwujud bagi setiap organisasi. Pengetahuan didefinisikan secara tradisional sebagai kepercayaan yang dijustifikasi (*justified true believe*), artinya pengetahuan fokus pada sesuatu yang dibenarkan (*justified*) dan bukan sesuatu yang benar (*true*). Pengetahuan diciptakan dalam interaksi sosial di antara individu dan organisasi sehingga pengetahuan bersifat dinamis dalam konteks ruang dan waktu. Jika diciptakan di luar konteks ruang dan waktu, maka disebut informasi dan bukan pengetahuan (Nonaka et al., 2000:7).

Penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*) adalah proses interaktif bagaimana cara pengetahuan diciptakan secara keorganisasian. Penciptaan pengetahuan diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk menciptakan pengetahuan baru, menyebarkan pengetahuan ke seluruh sistem yang ada, dan memasukkannya ke dalam produk, layanan dan sistem. Pengetahuan tercipta karena adanya interaksi antara pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) dan pengetahuan eksplisit

(*explicit knowledge*) yang berlangsung pada 3 tingkatan yaitu individual, kelompok dan organisasi. Kedua pengetahuan tersebut merupakan landasan dalam sebuah hubungan yang saling melengkapi sehingga menciptakan dinamika pengetahuan pada organisasi (Winardi, 2003:336-337).

Adanya pengetahuan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi melalui sebuah sistem yang disebut manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang lengkap dan sistematis. Manajemen pengetahuan didefinisikan oleh Turban et al. (2011:474-475) sebagai manajemen aktif dan sistematis dari ide, informasi, dan pengetahuan terhadap individu yang bekerja dalam sebuah organisasi. Dengan sistem tersebut organisasi melakukan pengamatan terhadap lingkungan, menangkap setiap informasi yang diperoleh, menyimpan, dan memilah informasi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Struktur pengetahuan tersebut memungkinkan pemecahan masalah yang efektif dan efisien, menciptakan pembelajaran yang dinamik, perencanaan strategik dan pengambilan keputusan.

2.3.2.2 *Explicit Knowledge dan Tacit Knowledge*

Pengetahuan terbagi menjadi dua yaitu pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*) dan pengetahuan tasit (*tacit knowledge*). Menurut Nonaka dan Konno (1998:42), pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, angka-angka serta dapat dibagikan dalam bentuk data, rumus ilmiah, spesifikasi, manual, dan sejenisnya. Pengetahuan ini dapat dengan mudah ditransmisikan di antara individu secara formal dan sistematis.

Sedangkan pengetahuan tasit menurut Nonaka dan Konno (1998:42) adalah pengetahuan yang sifatnya sangat pribadi dan kuat terbentuknya dalam pikiran seseorang yang tidak mudah terlihat dan tidak mudah diekspresikan sehingga sangat sulit dikomunikasikan atau berbagi dengan orang lain. Pengetahuan tasit adalah pengetahuan yang *unarticulable* dan intuitif dan merupakan bagian dari pemikiran kognitif individu dan persepsi. Pengetahuan tacit tidak mudah dibagikan dan upaya untuk berbagi bisa lambat, mahal dan tidak pasti (Takeuchi, 2005:5). Contoh dari pengetahuan ini misalnya seperti wawasan, instuisi, dan firasat masuk dalam kategori ini.

2.3.2.3 Kategori *Tacit Knowledge*

Bennet dan Bennet (2012:78-79) mengkategorikan pengetahuan tasit menjadi 4 jenis yaitu:

- 1) *Embodied tacit knowledge*, yaitu pengetahuan tasit yang melibatkan pola saraf yang tersimpan di dalam tubuh dan bersifat kinestetik dan indrawi. Kinestetik terkait dengan pergerakan tubuh yang dilakukan sehari-hari. Keahlian yang melibatkan pancaindera ini disebut juga pengetahuan somatik (*somatic knowledge*). Contoh orang yang memiliki keahlian ini adalah atlet, artis, penari, sopir, anak-anak, pekerja perakitan, dan sebagainya.
- 2) *Intuitive tacit knowledge*, yaitu rasa mengetahui yang datang dari dalam individu yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan, namun pengambil keputusan atau aktor tidak bisa menjelaskan bagaimana atau mengapa tindakan yang diambil adalah benar. Pengetahuan tasit intuitif merupakan hasil dari

pembelajaran berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui ketidaksadaran bekerja sepanjang waktu dengan kemampuan pemrosesan berkali-kali lebih besar daripada tingkat kesadarannya. Contoh aktivitas ini adalah mengukur kecepatan situasi apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan pengalaman hari ini.

- 3) *Affective tacit knowledge*, yaitu pengetahuan tasit yang melibatkan emosi dan perasaan yang tidak diungkapkan. Jika perasaan itu diungkapkan sebagai emosi, maka disebut sebagai pengetahuan eksplisit. Perasaan sebagai bentuk pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa atau ide, tetapi perasaan dapat mengarah ke tindakan afektif karena dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Misalnya perasaan takut jika melanggar aturan dapat terjadi setiap kali tindakan tersebut dimulai sehingga dapat mencegah pengambil keputusan untuk benar-benar melaksanakan tindakan itu.
- 4) *Spiritual tacit knowledge*, yaitu menjiwai sesuatu baik dengan pikiran maupun tindakan. Pengetahuan ini lahir dari dalam jiwa yang melambangkan prinsip-prinsip kehidupan manusia dan berfokus pada aspek moralnya. Pengetahuan ini mirip dengan pengetahuan tasit intuitif, namun yang membedakan adalah pengetahuan tasit spritual tidak dilabeli dengan emosi. Contoh dari pengetahuan ini adalah rasa kepedulian, sifat keterbukaan, etos kerja, konsistensi, toleransi, dan rasa hormat.

Kategori pengetahuan tasit lainnya yang hampir mirip dikemukakan juga oleh Lubit (2001:166-167) yang membagi pengetahuan tasit menjadi 4 jenis, yaitu:

- 1) *Hard to pin down skills-know how*, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui keterampilan (*know-how*) yang dilatih secara berulang-ulang dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Contoh dari pengetahuan ini adalah pemain golf yang bisa mengukur ketepatan bola golf untuk bisa masuk ke dalam lubangnya.
- 2) *Mental models*, yaitu kemampuan menganalisis situasi dan memahami hubungan sebab akibat dari suatu kegiatan. Pengetahuan ini sering disebut juga dengan skema yang menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibangun dan saling terkait satu sama lain. Contoh dari pengetahuan ini adalah kemampuan meramal tren penjualan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu.
- 3) *Ways of approaching problems*, yaitu pengetahuan mencari solusi yang telah dilihat dari beberapa masalah serupa dan memilih yang paling cocok dari alternatif yang ada. Cara mendekati masalah berasal dari kebiasaan dan pola mental yang berkembang ketika melihat bagaimana orang lain berpikir melalui masalah. Contoh dari pengetahuan ini adalah seorang motivator dan orang bijak yang banyak memiliki solusi untuk memotivasi orang lain.
- 4) *Organizational routines*, yaitu pengetahuan yang terkait dengan pola pikir yang teratur dan dapat diprediksi (*how to*). Aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang biasanya dipadatkan, dikembangkan, dan ditegakkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) sehingga susah untuk dikendalikan atau dihalangi oleh siapa pun. Contoh dari pengetahuan ini adalah rutinitas termasuk cara

memproduksi barang, cara mempekerjakan dan memecat personil, cara menangani persediaan, prosedur pengambilan keputusan, kebijakan periklanan, dan prosedur yang ada di HRD.

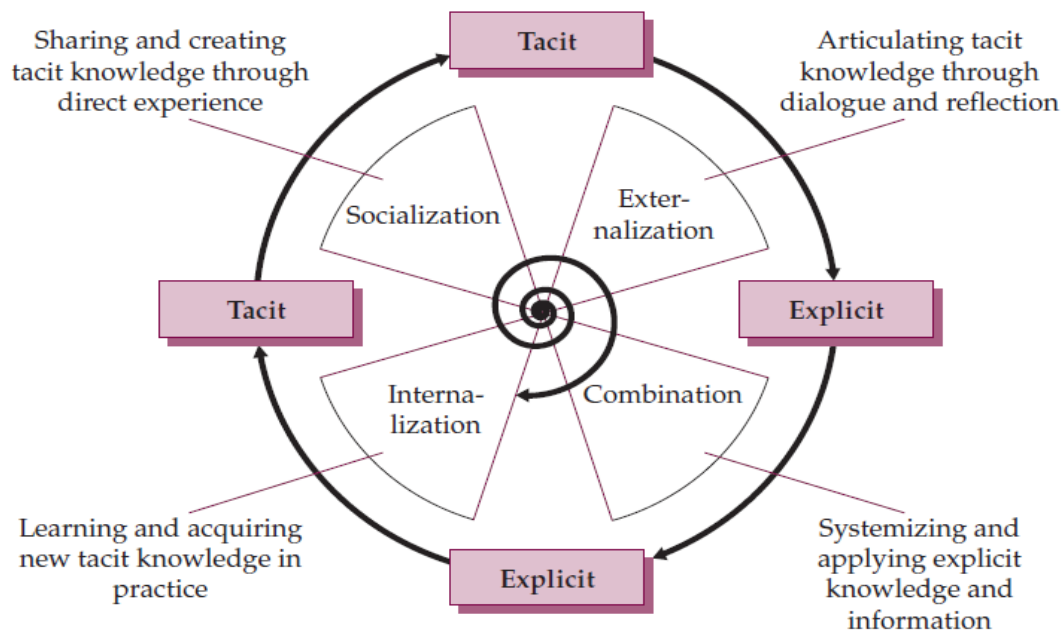
2.3.2.4 Teori *Knowledge Conversion*

Knowledge conversion adalah interaksi dinamis antara satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lainnya. Tia merupakan salah satu proses atau fase dalam proses penciptaan pengetahuan di suatu organisasi (Nonaka dan Konno, 1998:42). Dalam teori *knowledge conversion*, Nonaka et al. (2000:8) mengatakan bahwa pengetahuan diciptakan melalui interaksi antara dimensi epistemologis dan dimensi ontologis. Proses penciptaan terjadi terus menerus yang seseorang memiliki kepentingan atau ingin melampaui batasan tertentu dari pengetahuan yang lama dalam dirinya untuk mengakuisisi konteks baru, pandangan baru, dan pengetahuan baru tentang dunia.

Dimensi epistemologis merupakan penciptaan pengetahuan melalui interaksi sosial antara tasit dan eksplisit yang prosesnya disebut SECI. Sedangkan dimensi ontologis menggambarkan penciptaan pengetahuan melalui interaksi tasit dan eksplisit baik secara individu, kelompok, organisasi atau antarorganisasi. Kedua dimensi tersebut berinteraksi secara mikro dan makro dengan satu sama lain sehingga terjadi perubahan.

Model SECI dari Nonaka et al. (2000:9-10) merupakan akronim dari tahapan konversi pengetahuan yang terdiri dari *socialization*, *externalization*, *combination*,

dan *internalization*, yang dijelaskan oleh (Takeuchi, 2005:7) dalam gambar 2.3 dan penjelasannya berikut ini.



Gambar 2.3 Spiral Proses Pengetahuan SECI

Sumber: Diadopsi dari Takeuchi (2005:7)

1) Sosialisasi (*socialization*).

Yaitu proses transfer pengetahuan dari bentuk tasit ke bentuk tasit antara satu individu ke individu lainnya melalui pengamatan, pengulangan, dan praktik secara langsung. Pengetahuan yang disosialisasikan adalah berupa keterampilan (*skill*) yang diperoleh dari pengalaman, dan pengetahuan ini tidak akan pernah menjadi *explicit* sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mentransfer pengetahuan tersebut secara luas ke dalam organisasi. Singkatnya sosialisasi merupakan proses berbagi pengalaman dan keterampilan teknis melalui

pengamatan, penilaian dan mencontoh praktik-praktik yang ada. Sebagai contoh proses sosialisasi disampaikan melalui bentuk seminar, rapat, dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya yang memungkinkan terjadinya perpindahan pengetahuan dari seseorang ke orang lain.

2) Externalisasi (*externalization*).

Yaitu proses transformasi pengetahuan yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan diformulasikan dari bentuk tacit ke bentuk eksplisit, sehingga dengan mudah dipelajari oleh individu lain. Pada proses ini seseorang mewujudkan pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk nyata, seperti menuliskan dalam bentuk buku, presentasi, dan lain-lain. Singkatnya eksternalisasi merupakan penciptaan pengetahuan melalui berbagai metafora, analogi, model dan sejarah yang didorong dengan dialog dan refleksi kolektif. Sebagai contoh seseorang bisa dengan menuliskan *know-how* dan pengalaman yang didapatkan dalam bentuk tulisan artikel atau bahkan buku. Tulisan-tulisan tersebut akan sangat bermanfaat bagi orang lain yang sedang memerlukannya.

3) Kombinasi (*combination*).

Yaitu proses transfer pengetahuan dari bentuk eksplisit ke bentuk eksplisit melalui penggabungan berbagai pengetahuan *explicit* dalam suatu organisasi kemudian diolah menjadi suatu pengalaman baru yang *explicit* sehingga mudah dipahami dan ditransfer kepada individu lain dalam organisasi. Proses kombinasi pengetahuan eksplisit dilakukan ke dalam satu bentuk media yang lebih sistematis, melalui proses penambahan pengetahuan baru, kombinasi dan

kategorisasi pengetahuan yang telah terkumpul. Singkatnya kombinasi merupakan proses rekonfigurasi dari berbagai pengetahuan eksplisit yang terpisah dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru. Contoh konkritnya adalah sebuah penelitian yang mengambil referensi penelitian dari berbagai sumber eksplisit dan kemudian menghasilkan sebuah laporan penelitian akhir yang lengkap.

4) Internalisasi (*internalization*).

Yaitu proses transformasi pengetahuan dari bentuk eksplisit ke bentuk tacit yang baru yang kemudian ditransfer secara luas dalam organisasi melalui proses belajar sehingga menjadi tacit dari individu-individu dalam organisasi, dengan catatan bahwa setiap individu mau belajar pengetahuan baru dan mau menginternalisasikan di dalam dirinya akan memperluas dan memperkaya pengetahuan *tacit* yang bersangkutan. Singkatnya internalisasi merupakan proses pembelajaran dan interaksi berulang kali sehingga pengetahuan eksplisit dapat diserap kembali menjadi pengetahuan tacit dari gaya dan kebiasaan individu (*learning by doing*). Misalnya dengan seseorang membaca buku dan kemudian mempraktekkan teori-teori yang ada di dalam buku tadi, maka orang tersebut akan mengembangkan pengetahuannya sendiri.

2.3.2.5 Bentuk-bentuk Proses SECI

McNabb (2007:149-150) mengatakan bahwa inovasi dalam sektor publik merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan terjadi melalui konversi keberadaan pengetahuan dan ide-ide ke dalam manfaat baru seperti memperbaiki

proses dan layanan, penggunaan alat-alat baru yang mengganti alat, material, dan atau proses yang lama. Proses inovasi di sektor publik juga meliputi pencarian dan penerapan teknologi baru dalam organisasi, perbaikan cara-cara baru proses pemberian layanan, proses dan sistem manajemen baru yang belum dicoba.

Untuk mempermudah relevansi teori ke dalam praktik penciptaan pengetahuan organisasi, Easa (2012:159-161) merinci bentuk-bentuk konversi pengetahuan yang terjadi dalam suatu organisasi ke dalam susunan SECI berikut ini.

a. Sosialisasi

1) Pertemuan dan *workshop (meeting and workshop)*

Organisasi melakukan pertemuan, *workshop*, seminar untuk mendiskusikan masalah pekerjaan terkini.

2) Diskusi tatap muka (*face to face discussions*)

Diskusi tatap muka antara sesama karyawan yang intens terhadap masalah pekerjaan yang didukung di dalam organisasi.

3) Diskusi kerjasama (*cooperative discussions*)

Melibatkan organisasi dalam proyek-proyek bersama untuk mendukung pengetahuan staf melalui interaksi tatap muka dengan orang lain.

4) Diskusi dengan ahli (*expert discussions*)

Organisasi mengundang para anggota yang berkualifikasi dan para ahli eksternal untuk berbicara tentang keyakinan, nilai-nilai dan budaya mereka.

5) Pertemuan informal (*informal meetings*)

Organisasi mendorong pertemuan informal untuk minum teh, kopi, makan siang dan lain-lain.

6) Aktivitas sosial (*social activities*)

Organisasi mendorong kegiatan sosial di luar tempat kerja.

7) Rotasi jabatan (*personal rotation*)

Organisasi mengikuti sebuah perencanaan sistematis untuk merotasi karyawannya melalui departemen yang berbeda.

b. Eksternalisasi

1) Cara pandang karyawan (*staff's point of view*)

Organisasi mendokumentasikan cara pandang stafnya (pendapat) mengenai topik yang relevan.

2) Hasil rapat (*findings of meetings*)

Organisasi mendokumentasikan temuan-temuan dari pertemuan, seminar, lokakarya, dan program pelatihan yang diadakan.

3) Laporan tentang pihak eksternal (*reports about externals*)

Organisasi menerbitkan laporan eksternal berdasarkan pengalamannya yang terakumulasi.

4) Penentuan topik pelatihan (*training topics*)

Organisasi menetapkan topik program pelatihan dan seminar berdasarkan usulan sendiri dan anggota/ahli eksternal yang berkualifikasi.

5) Pengalaman ahli (*experience of expert*)

Organisasi mendokumentasikan pengalaman yang bermanfaat dari ahli yang berkualifikasi ke dalam laporan.

c. Kombinasi

1) Pembaruan *database (updating database)*

Organisasi memperbarui *database*-nya.

2) Pengembangan aturan dan kebijakan (*developing rules and decisions*)

Organisasi mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam basis data, jaringan, dan laporan sebelumnya untuk mengembangkan aturan dan keputusannya.

3) Komunikasi yang terdokumentasi (*documented communication*)

Organisasi menggunakan informasi yang didokumentasikan sebagai sarana koneksi antara stafnya, masing-masing dengan yang lain, dan dengan badan eksternal misalnya pelanggan, pesaing, mitra, atau pemerintah.

4) Justifikasi laporan eksternal (*external reports justification*)

Organisasi mengumpulkan, mengklasifikasikan dan memberi tahu stafnya dengan laporan dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan eksternal.

5) Pengklasifikasian informasi internal (*classification of internal information*)

Organisasi mengklasifikasikan informasi yang disebutkan dalam basis data, jaringan dan laporan.

6) Publikasi penelitian/penyebaran informasi (*published research*)

Organisasi bergantung pada penelitian dan laporan yang dipublikasikan yang relevan untuk mengembangkan kebijakan dan tujuannya.

d. Internalisasi

1) Pembentukan budaya (*shaping culture*)

Organisasi percaya bahwa ketersediaan data dan informasi sangat kuat membentuk cara pandang dan budaya organisasinya.

2) Akses hasil pertemuan (*meetings outcomes access*)

Organisasi memfasilitasi untuk mengakses hasil-hasil atau rekomendasi program pelatihan, *workshop*, dan seminar.

3) Akses database (*database access*)

Organisasi juga memfasilitasi dalam mengakses *database* dan internetnya untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

4) Penjelasan isi dokumen (*documents content explanation*)

Organisasi mengatur pertemuan untuk menjelaskan isi laporan atau dokumen terkait yang dibuat internal.

5) Penjelasan laporan eksternal (*sosialisasi eksternal*)

Organisasi juga mengatur pertemuan untuk menjelaskan dan menganalisis laporan relevan yang diterbitkan pihak luar seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya atau organisasi lain yang relevan.

6) Pelatihan yang relevan (*related courses*)

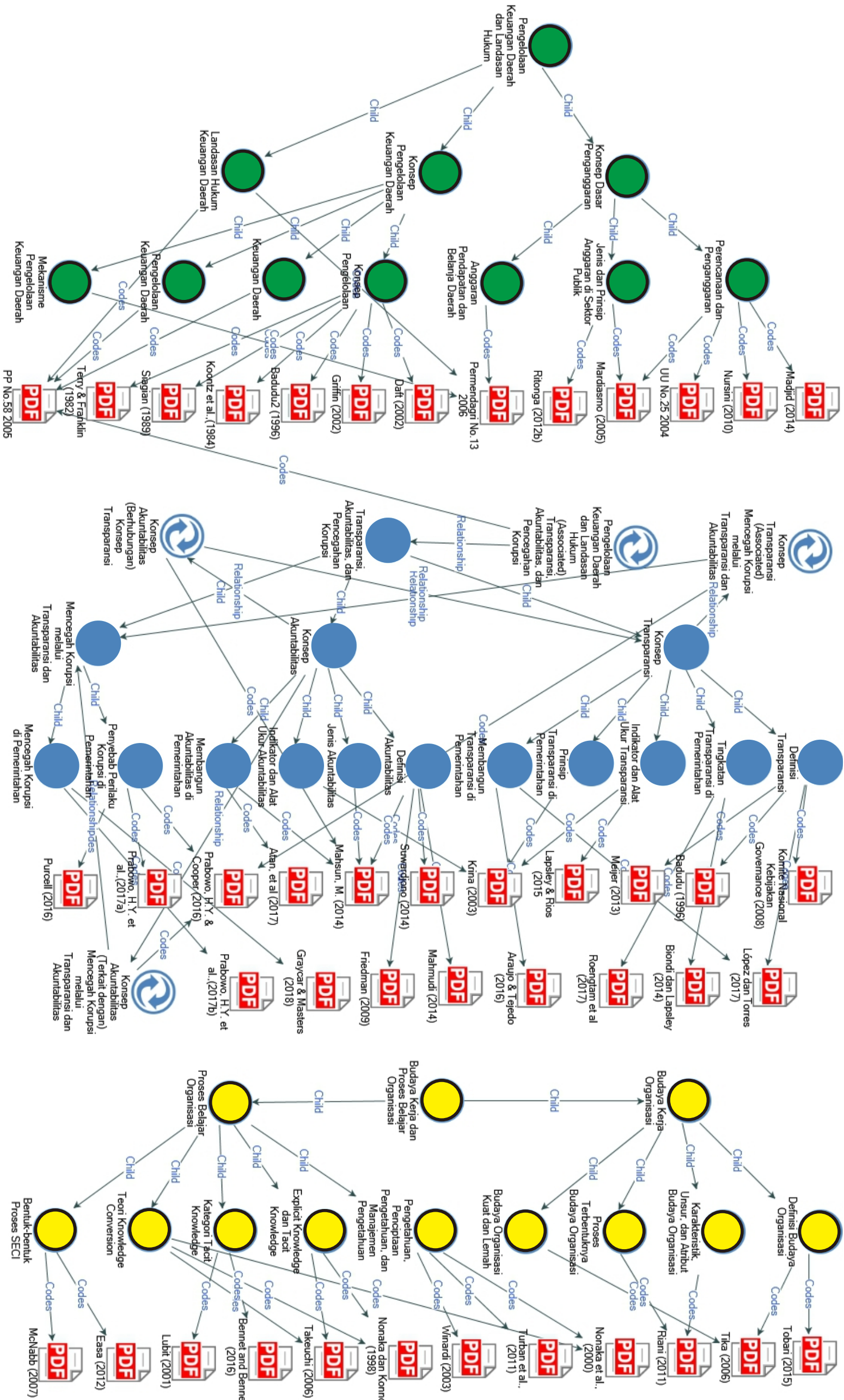
Organisasi mendorong/menganjurkan karyawannya untuk ikutserta atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya diploma, S1, S2, dan S3).

2.4 Peta Literatur Penelitian

Peta literatur (*literature maps*) adalah ringkasan visual dari riset-riset atau teori-teori yang sudah dilakukan para ahli yang disajikan dalam bentuk gambar dengan berbagai cara yaitu dengan hirarkis, *flowchart*, atau dengan berbentuk lingkaran-lingkaran (Creswell, 2014:36). Dalam *software* NVivo, salah satu output dari *project map*-nya adalah peta literatur yang memvisualisasikan ide dan konsep dalam bentuk bagan dan grafik berdasarkan teori yang dikaji peneliti. Peta literatur dalam NVivo merupakan bagian dari *project map*. *Project map* atau peta proyek adalah peta yang bertujuan untuk menjelajahi dan mengatur data; mengidentifikasi pola, teori, dan penjelasan yang muncul; merepresentasikan secara visual hubungan antara item-item proyek; dan memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek (QSR International, 2018).

Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan *nodes*, anak panah (*conector*), serta sumber dokumen. *Nodes* memiliki sub dan anak sub. *Nodes* yang paling utama disebut *nodes* utama (*parent nodes*). Sub-*nodes* dan anak *subnodes* disebut *child nodes*. *Nodes* adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (QSR International, 2018). *Nodes* terbentuk dari kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan informasi yang terdapat dalam data (Bandur, 2016:165). Sub-*nodes* merupakan *nodes* terendah dari *nodes* utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas *nodes* utama. Sedangkan anak sub-*nodes* merupakan penjelasan berikutnya atas sub-*nodes* yang memerlukan penekanan lebih lanjut. Konektor memberi penjelasan tentang dari mana

arah *nodes* berasal dan ke mana *nodes* beregenerasi sampai ke anak *subnodes*. Sumber dokumen merupakan asal *nodes* terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui proses koding. Peta literatur dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.4 Peta Literatur Penelitian
Sumber : Diolah peneliti melalui NVivo

Cara membaca peta secara umum diringkas berikut ini. Secara seksama, peta terlihat membentuk 3 kumpulan masing-masing berwarna hijau, biru tua, dan kuning. Peta yang berwarna hijau adalah *nodes* utama pengelolaan keuangan daerah dan landasan hukum. Peta yang berwarna biru tua adalah *nodes* utama transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Peta yang berwarna kuning adalah *nodes* utama budaya kerja dan proses belajar organisasi. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, peneliti membangun teori dari 3 konsep dasar. Berdasarkan ketiga konsep dasar itu, peta literatur juga terbentuk menjadi 3 peta yang terpisah. Dalam peta terlihat 3 konsep dasar yang diwakili 3 *nodes* utama yaitu konsep 1) pengelolaan keuangan daerah dan landasan hukum; 2) transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi; dan 3) budaya kerja dan proses belajar organisasi. Ketiga bagian peta ini merepresentasikan 4 rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab 1.

Nodes utama yang pertama yaitu *nodes* pengelolaan keuangan daerah dan landasan hukum merupakan konsep dasar dalam membentuk pola pikir untuk menjawab rumusan masalah ke-1 yaitu gambaran umum dan postur APBD yang menjadi objek pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Nodes* utama yang kedua yaitu *nodes* transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi merupakan konsep dasar dalam membentuk pola pikir untuk menjawab rumusan masalah yang ke-2 yaitu mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Nodes utama yang ketiga yaitu *nodes* budaya kerja dan proses belajar organisasi merupakan konsep dasar dalam membentuk pola pikir untuk menjawab

rumusan masalah yang ke-3 dan ke-4 yaitu bagaimana membangun budaya organisasi yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan apa saja yang dapat dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya di masa yang akan datang. Interpretasi ketiga bagian peta tersebut masing-masing dijelaskan secara detil berikut ini.

2.4.1 Peta Literatur untuk *Nodes* Pengelolaan Keuangan Daerah dan Landasan Hukum

Untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu 3 konsep penting yaitu konsep pengelolaan, keuangan daerah, konsep dasar penganggaran, dan landasan hukum keuangan daerah. Pemahaman tentang konsep pengelolaan dipelajari dan dieksplorasi dari berbagai pendapat para pakar dan ahli di bidang manajemen di antaranya terdapat 6 ahli yang dikutip pendapatnya seperti Terry dan Franklin, Badudu, Griffin, Siagian, Koontz, dan Daft. Dari pendapat mereka peneliti memahami bahwa konsep pengelolaan pada prinsipnya sama dengan definisi manajemen yang berarti suatu seni, proses, cara, atau keterampilan dalam mengelola sumber daya secara bersama-sama dan dilakukan bertahap melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya adalah konsep dasar penganggaran yang sangat berkaitan dengan perencanaan di sektor publik. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, diberi definisi tentang perencanaan di sektor publik. Konsep penganggaran tersebut

merupakan bagian dari perencanaan. Peneliti mencoba memahami keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dari Madjid, Nursini, Mardiasmo, dan Ritonga. Dari pendapat mereka peneliti memahami bahwa wujud dari pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan dan penganggaran yang berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Konsep berikutnya yang sangat penting dipahami adalah tentang landasan hukum keuangan daerah itu sendiri. Penekanan lebih lanjut ditujukan untuk mendalami lebih banyak lagi informasi hukum tentang konsep ini. Untuk memahami tentang landasan hukumnya, peneliti harus mengetahui tentang apa itu keuangan daerah, apa itu APBD, dan bagaimana mekanismenya. Definisi dan ruang lingkup keuangan daerah dipelajari dari peraturan perundang-undangan yaitu PP nomor 58 tahun 2005 yang merupakan pedoman umum tentang pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Pengelolaan APBD tersebut dilaksanakan berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 melalui 4 mekanisme yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan/pengawasan.

Dari penjelasan rangkaian *nodes* pertama dalam peta literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa logika yang dibangun untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintah daerah adalah pertama, mengetahui konsep pengelolaan melalui pendapat para ahli; kedua, memahami konsep dasar perencanaan dan penganggaran yang menaungi konsep pengelolaan melalui penjelasan para ahli; ketiga, mendalami pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengetahui apa itu

keuangan daerah dan seperti apa ruang lingkupnya, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan terjadi berdasarkan tahapannya; dan keempat, mencari tahu landasan hukum pengelolaan keuangan yang membentuk APBD melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengetahui informasi tersebut peneliti semakin yakin untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini sehingga peneliti akan lebih fokus menerima informasi yang relevan dengan pola pikir sehingga jawaban atas permasalahannya benar-benar terjawab sesuai substansinya.

2.4.2 Peta Literatur untuk *Nodes* Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Korupsi

Peta ini memperlihatkan bagaimana pemahaman transparansi dan akuntabilitas melalui 3 konsep utama yaitu konsep akuntabilitas, konsep transparansi, dan penggunaan kedua konsep tersebut untuk mencegah korupsi di pemerintahan. Untuk memahami konsep akuntabilitas, peneliti harus memahami terlebih dahulu definisi akuntabilitas, jenis akuntabilitas, indikator dan alat ukur akuntabilitas, serta bagaimana membangun akuntabilitas di pemerintahan. Definisi akuntabilitas dipahami dari berbagai pendapat para ahli yang terdiri dari 4 sumber yaitu Mahsun, Mahmudi, Suwardjono, Friedman. Dari pendapat mereka peneliti memahami bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban organisasi atau individu tentang wewenang dan tugas yang diberikan dengan disertai perhitungan untuk dilaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Akuntabilitas juga terdiri dari 8 jenis dan salah satunya adalah akuntabilitas keuangan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Mahsun. Akuntabilitas

diukur dengan 9 indikator yang merujuk pada pendapat Krina yaitu tersedia bagi setiap yang membutuhkan, prinsip administrasi yang benar, sesuai standar, ada mekanisme, konsisten, informasi yang disebarluaskan, informasi yang akurat dan lengkap, akses publik, dan tersedia sistem informasinya. Akhirnya untuk membangun akuntabilitas di pemerintahan, peneliti merujuk pada pendapat Mahsun dan memahami hasil penelitian yang dilakukan oleh Atan. Kedua peneliti tersebut mengatakan bahwa untuk membangun akuntabilitas diperlukan budaya dan lingkungan kerja yang diprakarsai oleh manajer organisasi.

Konsep kedua adalah transparansi. Untuk mengetahui konsep transparansi, peneliti memahami terlebih dahulu definisi transparansi, tingkatan transparansi, indikator dan alat ukur transparansi, prinsip transparansi, serta bagaimana membangun transparansi di pemerintahan. Untuk mengetahui definisi transparansi, peneliti menelaah 4 sumber pendapat para ahli dan 1 sumber peraturan yaitu Lopez dan Torres, Meijer, Badudu, KNKG. Dari pendapat mereka peneliti memahami bahwa transparansi merupakan tindakan memberikan informasi yang terbuka, jujur, tersedia, mudah dipahami, mudah diakses, dan ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan. Untuk melihat level transparansi, peneliti mendalami 2 sumber hasil penelitian yang dilakukan oleh Biondi dan Lapsley serta Roengtam yang memberi kesimpulan bahwa dari level transparansi tergantung jenis organisasinya. Jika organisasi menggunakan sistem informasi ada 3 yaitu tersedia, dipahami, dan ditindaklanjuti. Apabila organisasi menggunakan teknologi informasi ada 3 juga yaitu aplikasi internal, situs web, dan media sosial. Untuk mengukur transparansi peneliti

masih menggunakan indikator yang merujuk pada sumber yang sama yang dikemukakan oleh Krina yaitu adanya mekanisme keterbukaan, mekanisme fasilitas pertanyaan, dan mekanisme pelaporan.

Peneliti juga mendalami bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan bagaimana membangun transparansi di pemerintahan. Untuk prinsip transparansi peneliti merujuk pada Krina dan 1 hasil penelitian Thornton dan Thornton yang keduanya berkesimpulan bahwa prinsipnya adalah menjamin akses dan keterlibatan warga. Sedangkan cara membangun transparansi di pemerintahan, peneliti mendalami hasil penelitian yang dikemukakan oleh 3 sumber penelitian yaitu Porumbescu, Araujo dan Tejedo, serta Lopez dan Torres. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa untuk membangun transparansi di pemerintahan diperlukan partisipasi warga, ideologi politik negara, tingkat persaingan politik, sumber daya keuangan, kinerja ekonomik, kinerja sosial, dan persepsi kepercayaan rakyat yang positif terhadap pemerintah.

Konsep yang terakhir bagaimana transparansi dan akuntabilitas digunakan untuk mencegah korupsi di pemerintahan. Untuk mengetahuinya terlebih dahulu peneliti memahami penyebab perilaku korupsi itu sendiri dan kemudian memahami cara mencegahnya. Terdapat 5 sumber jurnal yang didalami yaitu 1 sumber dari Purcell, 3 sumber dari Prabowo, dan 1 sumber dari Graycar dan Master. Masing-masing memberi pendapat yang berbeda namun sama-sama memberi solusi. Dari pendapat Purcell, peneliti memahami bahwa korupsi terjadi dengan cara bersimbiosis melalui teori *fraud triangle* dan untuk mendeteksinya bisa mempertimbangkan

perilaku organisasi melalui adanya disfungsionalitas, toksisitas budaya, kepemimpinan yang tidak efektif, dan individu yang tidak etis.

Dari pendapat Prabowo, peneliti memahami bahwa korupsi terjadi karena dipejari dan menyebar melalui konversi pengetahuan serta cara mencegahnya dengan melakukan *un-learning* dan *re-learning* organisasi. Selain itu peneliti juga mendalami cara lain yang dikemukakan Prabowo yaitu bahwa korupsi terjadi melalui 3 teori lensa perilaku dan untuk memberantasnya tidak bisa hanya dengan mencontoh keberhasilan negara lain tetapi harus melalui kepemimpinan dengan moralitas yang kuat. Terakhir dari pendapat Graycar dan Master, peneliti memahami bahwa mencegah korupsi bisa melalui matriks yang mempertemukan fungsi-fungsi pelayanan di sektor publik dengan ramuan strategi pencegahan melalui beberapa perubahan yang signifikan.

Dari penjelasan rangkaian *nodes* kedua dalam peta literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa logika yang dibangun untuk memahami konsep transparansi dan akuntabilitas adalah pertama, peneliti memahami definisi transparansi dan akuntabilitas yang meliputi jenis-jenisnya, tingkatannya, indikator dan alat ukurnya, prinsip-prinsipnya, dan cara membangunnya; dan terakhir, memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat mencegah perilaku korupsi di pemerintahan. Dengan memiliki bekal rerangka tersebut, peneliti yakin akan mampu untuk menjawab permasalahan yang ke-2.

2.4.3 Peta Literatur untuk *Nodes* Budaya Kerja dan Proses Belajar Organisasi

Konsep ini dipahami melalui 2 topik utama yaitu uraian uraian budaya kerja dalam konteks organisasi pemerintahan dan proses belajar organisasi dalam bingkai teori manajemen pengetahuan. Dalam konsep pertama tentang budaya kerja organisasi, peneliti melakukan pendalaman dengan memahami definisi budaya; karakteristik, unsur, dan atribut budaya; proses terbentuknya budaya; serta bentuk budaya organisasi yang kuat dan lemah. Untuk memahami definisi budaya organisasi, peneliti mengambil pendapat dari Tika dan Tobari yang menyatakan bahwa budaya merupakan sekumpulan kebiasaan yang menjadi dasar pelaksanaan organisasi. Untuk karakteristik, unsur, dan budaya peneliti pahami dari Riani bahwa karakteristik budaya ada 9 macam, unsur budaya ada 3 jenis, dan atribut budaya ada 2 jenis. Sementara untuk proses terbentuknya budaya, dipahami juga dari pendapat Riani yang secara garis besar ada 3 tahapan yaitu tahap membentuk, tahap mempertahankan, dan tahap mengubah. Terakhir adalah pemahaman tentang bentuk organisasi kuat dan lemah peneliti pahami dari pendapat Tika, bahwa budaya yang kuat memiliki paling kurang 9 ciri-ciri dan budaya lemah memiliki paling kurang 3 ciri-ciri.

Untuk memahami bagaimana proses belajar suatu organisasi, peneliti mendalami dari teori manajemen pengetahuan modern yang terdiri dari definisi pengetahuan, jenis pengetahuan, kategori pengetahuan tacit, teori konversi pengetahuan (*knowledge conversion*), dan bentuk-bentuk proses SECI. Definisi pengetahuan diambil dari 3 pendapat para ahli yaitu Nonaka, Turban, dan Winardi,

bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang dibenarkan dan dipelajari. Jenis-jenis pengetahuan diambil dari penjelasan Nonaka dan Takeuchi, yang membagi pengetahuan menjadi pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Teori transfer pengetahuan dipahami dari 3 pendapat para ahli yaitu Nonaka, Nonaka dan Konno, serta Takeuchi, yang menyatakan bahwa pengetahuan tercipta karena adanya interaksi antara pengetahuan tacit dan eksplisit secara terus-menerus dan berulang-ulang. Bentuk-bentuk proses SECI dipahami dari penelitian Easa, yang mengelompokkan masing-masing proses kedalam sekumpulan kegiatan.

Dari semua pendapat para ahli tersebut, peneliti memahami bahwa pengetahuan tercipta secara sederhana melalui interaksi antara pengetahuan tacit dengan pengetahuan eksplisit dan terjadi dalam lingkup individu, kelompok, dan organisasi. Sedangkan transfer pengetahuan terjadi saat interaksi itu berlangsung terus menerus dan berulang membentuk spiral melalui 4 proses yang disebut SECI, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi.

Dari penjelasan rangkaian semua *nodes* terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa pola pikir yang terbentuk adalah informasi budaya yang dicaritemukan dalam menjawab rumusan masalah ke-3 dan ke-4 terletak pada kebiasaan sehari-hari dan proses transfer pengetahuan. Untuk memahami proses belajar dan budaya kerja, peneliti terlebih dahulu harus memahami; pertama, apa itu budaya, kedua bagaimana budaya itu terbentuk, ketiga apa unsur dan atributnya, keempat bagaimana bentuk organisasi kuat dan lemah, dan kelima bagaimana budaya itu berproses menjadi pengetahuan melalui teori penciptaan dan konversi pengetahuan. Dengan mengetahui

informasi tersebut, peneliti semakin yakin untuk menjawab permasalahan yang ke-3 dan ke-4. Dengan logika ini peneliti akan lebih fokus menerima informasi yang relevan dengan pola pikir sehingga jawaban atas permasalahan ke-3 dan ke-4 dalam penelitian ini benar-benar terjawab sesuai substansinya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Arianti (2017:1306-1307) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Bengkulu. Temuan pertama bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya dengan adanya akuntabilitas publik yang baik yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai agen dalam menyampaikan APBD, maka pengawasan yang akan dilakukan oleh dewan akan semakin baik. Temuan kedua mengatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya ada atau tidak adanya transparansi yang diberikan oleh pemda dalam menyampaikan APBD tidak mempengaruhi kinerja dewan. Dewan akan melakukan pengawasan terhadap APBD dari sisi transparansi berdasarkan persepsi mereka. Hal ini karena transparansi hanyalah wacana dan implementasinya bersifat formalitas tergantung persepsi masing-masing.

Auditya dkk. (2013:37-38) menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah melalui SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kesimpulan pertama bahwa

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, yang artinya semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Temuan kedua menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, yang artinya semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Jika pemerintah daerah ingin baik kinerjanya, maka harus memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Fauziyah (2017:14-15) meneliti tentang pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang artinya penyajian laporan keuangan yang baik akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara aksesibilitas juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, yang artinya bahwa semakin baik aksesibilitas maka akuntabilitas pengelolaan keuangan juga menjadi semakin baik.

Iswahyudi dkk. (2016:162-163) menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan *value for money* (VFM) terhadap *good governance* di seluruh SKPD Kabupaten Lumajang. Dari sisi akuntabilitas dan transparansi, analisis pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* terutama dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi. Aspek transparansi dalam

penyelenggaraan pemerintahan akan meningkatkan terwujudnya *good governance* dikarenakan apabila aparat telah menyediakan akses informasi yang jelas mengenai prosedur-prosedur, penggunaan biaya, dan pertanggungjawaban atas kegiatan/program yang dilaksanakan serta telah disediakan akses untuk pengaduan terkait pelanggaran aturan atau permintaan uang suap dan bekerjasama dengan media massa untuk meningkatkan arus informasi. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas dan *value for money* diakui turut mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, namun karena kurangnya kemampuan SDM dalam memahami prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga dalam pelaksanaannya akuntabilitas tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam operasional beberapa SKPD.

Ludani dkk. (2015:6-8) meneliti tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Ditemukan bahwa bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 4 bentuk pertanyaan yaitu apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan, dan bagaimana pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan. Jawabannya menyatakan bahwa yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan di berbagai sektor. Harus dipertanggungjawabkan karena pertanggungjawaban merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi pemerintah daerah. Yang harus bertanggungjawab

dan terlibat langsung atas pelaksanaan program yang ada adalah pemerintah daerah yang membutuhkan koordinasi yang baik antara dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut dan juga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan program yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari masyarakat yang ada. Terakhir pertanggungjawaban belum berjalan seiring dengan kewenangan karena pelaksanaan program yang ada tidak dilaksanakan secara menyeluruh, hanya melihat beberapa pihak saja atau wilayah tertentu.

Nurritziana dkk. (2017:44) melakukan pengujian dan pembuktian empiris pengaruh penyajian dan aksesibilitas LKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta pengujian dan pembuktian pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan *public stakeholder*. Terbukti bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ini artinya semakin berkualitas penyajian laporan keuangan daerah maka transparansi pengelolaan keuangan semakin meningkat. Terdapat juga pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah yang artinya bahwa laporan keuangan daerah yang terbuka, tersedia dan *accesable* akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus diwujudkan dengan memublikasikan laporan keuangan daerah sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang artinya semakin baik penyajian laporan keuangan pemda akan semakin akuntabel pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Penyajian laporan keuangan yang baik, keterbukaan atau aksesibilitas laporan keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang artinya bahwa laporan keuangan yang terbuka, tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan *public stakeholders* yang artinya bahwa keterbukaan dalam laporan keuangan akan melahirkan kepercayaan para pemangku kepentingan kepada pemerintah daerah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan *public stakeholder* yang artinya, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* kepada pemerintah daerah.

Riswanto (2016:6) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember. Disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akutabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuktikan

bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan benar, sesuai, dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sari (2017:582-584) menguji 4 variabel yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Kesimpulannya pertama bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang artinya apabila sistem pengendalian interen dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap unsur organisasi, maka akan menghasilkan transparansi dan akuntabilitas yang berupa laporan keuangan yang handal dan informatif, terciptanya pengamanan aset daerah, serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan yang berlaku. Variabel kedua adalah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini artinya bahwa semakin mudah diakses dan dimengerti LKPD, maka semakin transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Wulandari (2017:68) meneliti perbedaan persepsi para pengguna atas akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Surakarta. Penelitiannya menyimpulkan dua perbedaan pendapat yaitu tentang akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan. Untuk akuntabilitas publik bahwa memang terbukti ada perbedaan persepsi antara *internal users* dan *external users* atas akuntabilitas publik laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dikarenakan masing-masing *users* memiliki intepretasi sendiri dalam menentukan ukuran yang

digunakan untuk menilai akuntabilitas publik yang dilatarbelakangi oleh usia, masa kerja dan tingkat pendidikan yang berbeda. Sementara untuk akuntabilitas keuangan juga terbukti bahwa ada perbedaan persepsi antara *internal users* dan *external users* atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Para *users* menilai akuntabilitas keuangan tidak berdasarkan standar yang baku untuk mengukurnya sehingga terjadi penilaian dengan kriteria masing-masing *users*. Selain itu tingkat pemahaman dan pengalaman di lapangan (praktik) juga memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan penilaian persepsi atas akuntabilitas keuangan. Perbedaan persepsi antara *users* tersebut terjadi karena mereka tidak menggunakan satu ukuran dalam menilai akuntabilitas publik dan akuntabilitas keuangan.

Yuliani (2014:151-152) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik di Pemerintah Kabupaten Magelang. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, variabel yang berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap akuntabilitas publik adalah variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dan variabel kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan dan penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik melalui kinerja pemerintah daerah. Khusus variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dimungkinkan karena adanya sistem yang digunakan belum bagus, sehingga tidak memudahkan karyawan, dan sumber daya manusia atau karyawan yang kurang

memahami sistem tersebut. Padahal sekarang pemerintah daerah dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

2.6 *Matrix Coding* Penelitian Terdahulu

Matrix coding (pengodean matriks) adalah kuir hasil pengodean yang pasangan itemnya ditabulasikan silang dan ditampilkan dalam bentuk matriks (Bazeley dan Jackson, 2013:250). Tujuan umum dari *matrix coding* adalah untuk mengeksplorasi dan menunjukkan pola hubungan dalam data. Dalam konteks penelitian, matriks ini berguna untuk menemukan *gap* penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. *Output* dari matriks ini menghasilkan keunikan topik penelitian peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dengan topik yang sama atau relevan. Dengan demikian maka dalam penelitian ini, *matrix coding* merupakan matriks yang memperlihatkan perbandingan topik antara hasil penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil olah data melalui bantuan NVivo, *matrix coding* dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2 di halaman 364 dan 365.

Berdasarkan pada lampiran 1 di halaman 364, secara umum dapat dijelaskan bahwa dari 10 sumber penelitian tentang topik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (PKD), tema yang paling banyak dibahas adalah 3 tema yaitu tema tentang aksesibilitas LKPD mempengaruhi akuntabilitas PKD, akuntabilitas LKPD yang mempengaruhi kinerja pemda, dan penyajian LKPD

mempengaruhi akuntabilitas PKD yang dilakukan oleh 6 orang peneliti masing-masing oleh Sari, Nurrizkiana, Fauziyah, Yuliani, Riswanto, dan Auditya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membahas topik transparansi dan akuntabilitas PKD, mereka lebih banyak menekankan transparansi dan akuntabilitas yang sudah terbentuk yang wujudnya bisa dilihat dalam bentuk media, sarana, dan laporan keuangan.

Sedangkan sisa dari topik penelitian tersebut di atas tentang transparansi dan akuntabilitas PKD merupakan tema yang baru sedikit dilakukan pembahasan. Tema-tema yang paling dominan dibahas hanyalah tema-tema tentang transparansi dan akuntabilitas dalam hubungannya dengan kebijakan publik, kepercayaan masyarakat, anggaran, gaya kepemimpinan, pemerintahan yang baik, pemahaman dewan, dan sistem pengendalian interen. Hasilnya pun sama, semua peneliti lebih menekankan pada keluaran dari apa yang telah dilakukan dan bukan bagaimana melakukan. Mereka lebih fokus pada kemampuan masyarakat mengakses informasi, fokus pada dampaknya yang mempengaruhi model pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan namun tidak memfokuskan pada pengelolaan keuangan daerah semata. Hal ini menunjukkan bahwa proses terbentuknya transparansi dan akuntabilitas merupakan tema yang baru dan belum diteliti jika dibandingkan dengan tema-tema yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Jika mengacu pada *matrix coding* yang dihitung berdasarkan jumlah kata (*word*) seperti tampak pada lampiran 2 di halaman 365, maka tema-tema yang paling disukai adalah tema tentang akuntabilitas PKD mempengaruhi kepercayaan publik,

bentuk-bentuk akuntabilitas PKD, dan pengaruh transparansi terhadap kinerja pemda. Hal ini dibuktikan dalam tabel dengan banyaknya kata yang berturut-turut didominasi oleh penelitian yang dilakukan Wulandari, Ludani, dan Riswanto. Mereka juga lebih banyak menekankan dan mengedepankan hasil atau *output* dari transparansi dan akuntabilitas itu sendiri. Rata-rata yang diteliti tentang asosiasi atau pengaruh terhadap dampaknya dan dilakukan dengan teknik kuantitatif, tetapi belum ada yang menitikberatkan pada proses yang membentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dari 10 penelitian dengan 21 tema dalam tabel tersebut yang membahas topik yang sama yaitu transparansi dan akuntabilitas, bisa dikatakan bahwa tidak ada satu pun yang membahas tentang fokus utama penelitian ini yaitu topik yang lebih banyak mendalami prosesnya. Topik penelitian ini akan membahas bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu terbentuk melalui budaya kerja organisasi pemerintah di Kabupaten Kulon Progo. Indikator ini ditandai dengan warna yang ada di masing-masing sel. Semakin tebal warna dalam sel, menunjukkan bahwa penelitian tersebut sudah banyak dilakukan. Demikian juga sebaliknya semakin pudar atau semakin terang warna sel menandakan bahwa penelitian tersebut jarang atau belum pernah dilakukan.

Jika dilakukan perbandingan, tampak dalam matriks tema tentang budaya kerja transparansi dan akuntabilitas memperlihatkan sel dengan warna putih terang dengan angka 0. Artinya tema penelitian ini sama sekali belum dibahas oleh peneliti lain atau sudah dilakukan pembahasan dengan topik yang sama tetapi belum fokus pada prosesnya dalam konteks 10 sumber penelitian terdahulu ini. Hal tersebut

disebabkan banyak penelitian tentang topik yang sama hanya berorientasi pada hasil yaitu apa yang telah dihasilkan melalui transparansi dan akuntabilitas misalnya laporan keuangan yang wajib dipublikasikan. Sementara tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada proses yaitu bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu terbentuk melalui budaya kerja di pemerintahan. Ini menyadarkan kita bahwa meneliti tentang budaya kerja dalam penelitian ini hanya mampu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang lebih fokus dengan pendekatan studi kasus yang mendalam. Dalam penelitian terdahulu ini terdapat 9 penelitian yang berbasis kuantitatif dan hanya ada 1 yang berbasis kualitatif. Namun demikian 1 penelitian kualitatif ini pun dilakukan masih bersifat *reviu literatur*.

Berbeda pula dengan penelitian sebelumnya yang banyak menekankan pada keluasan makna dimana yang diteliti hanya berupa variabel yang sifatnya berada di permukaan yang tampak, maka penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman makna karena yang diteliti adalah situasi sosial yang berakar dari tradisi yang mencerminkan apa yang dilakukan dan bukan apa yang akan berlaku. Hal ini bisa dipahami karena mencari makna budaya kerja bukan hanya ditentukan oleh hal-hal yang kasat mata seperti struktur organisasi, kode etik, sistem, prosedur tetap, laporan keuangan, dan sebagainya, melainkan juga hal-hal yang tidak kasat mata seperti produktivitas, etos kerja, dan prestasi yang apabila diteliti secara sempit dan mendalam akan menemukan sumber kekuatan tersembunyi yang menjadi pemicu kinerja pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam konteks budaya kerja pengelolaan keuangan yang secara parsial belum banyak diteliti, produktivitas pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Kulon Progo yang mengelola keuangan daerah tidak dipandang hanya dari ukuran fisik semata tetapi juga diukur dari produk sistem nilai. Sistem nilai ini mengandung komponen-komponen yang dimiliki seorang pegawai dalam aktivitas sehari-hari seperti pemahaman makna bekerja, sikap terhadap pekerjaan dan lingkungannya, perilaku ketika bekerja, etos kerja, sikap terhadap waktu, serta cara atau alat yang digunakan untuk bekerja. Sistem ini mengharuskan prestasi pegawai yang unggul dinilai produktivitasnya dari sikap mental yang sudah terinternalisasi. Aktualisasi budaya bekerja inilah yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti kuantitatif lainnya sehingga perlu dilakukan oleh peneliti seperti penelitian yang dilakukan saat ini.

Di sinilah letak keunikan penelitian ini yang sekaligus memperlihatkan adanya *gap* penelitian jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena beberapa penelitian kuantitatif yang meneliti topik yang sama selalu terkendala waktu dan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel yang belum tentu bisa digeneralisasi secara komprehensif. Sementara dalam penelitian ini, objek penelitian lebih membutuhkan pemahaman makna yang terfokus.

BAB III METODA PENELITIAN

Metoda penelitian adalah rerangka atau proposisi filosofis yang mempengaruhi pikiran dan mendorong seseorang untuk melakukan penelitian karena adanya asumsi-asumsi mendasar yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. Asumsi filosofis tersebut mengacu pada pandangan ontologis dan epistemologis penelitian dan paradigma penelitian (Creswell, 2014:5).

Dalam bab ini akan dipaparkan metoda penelitian yang berisi penjelasan umum tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah pemaparan rancangan penelitian berturut-turut dijelaskan tentang alasan memilih metoda kualitatif, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

3.1 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif

Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan keuangan daerah yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, peneliti menggunakan metoda penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistika. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan kita untuk menguji pengalaman orang-orang secara detil melalui penggunaan seperangkat

metoda seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, analisis konten, metoda visual, dan biografi atau sejarah hidup, sehingga desain penelitian seperti itu hanya cocok dilakukan dengan metoda kualitatif (Hennink et al., 2011:9).

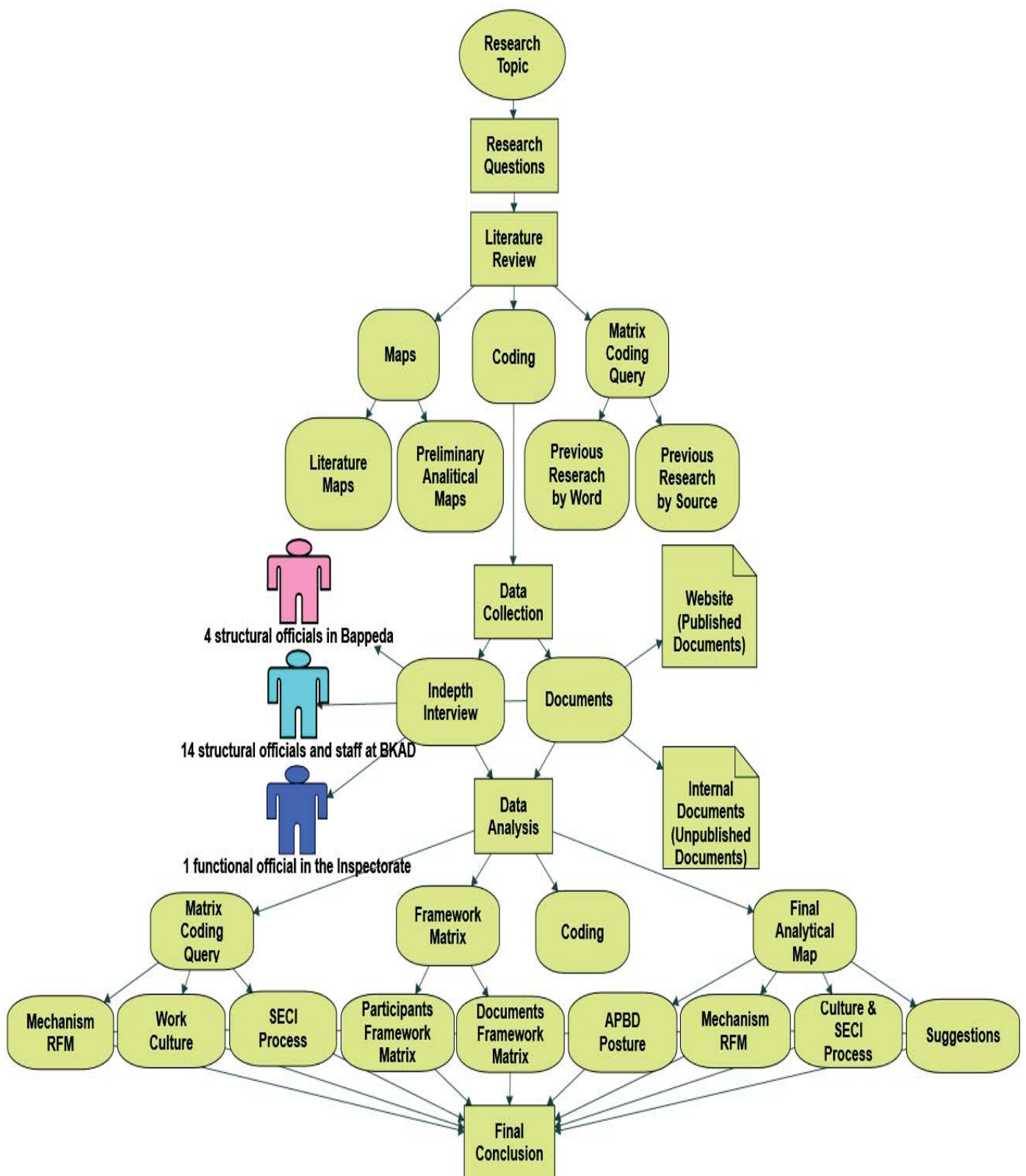
Metoda penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti tentang budaya kerja. Permasalahan budaya dalam penelitian ini memiliki nilai estetika yang tinggi dan secara inheren lebih menarik sehingga perlu orientasi makna yang dalam yang apabila menggunakan kuantitatif, fenomenanya tidak dapat dijelaskan dengan tepat (Silverman, 2013:50). Oleh karena metoda kualitatif memiliki pisau analisis yang lebih bersifat eksploratif, maka peneliti menggunakannya untuk mengupas masing-masing topik secara mendalam untuk memperoleh data yang lebih tuntas dan pasti sehingga data akan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Untuk lebih memfokuskan pemahaman makna dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks itu tidak jelas (Woodside, 2010:1). Studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat dan hati-hati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dalam strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulann data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2014:14).

Melakukan penelitian studi kasus berarti mengidentifikasi topik yang cocok untuk analisis mendalam dalam konteks alami dengan menggunakan berbagai sumber informasi, sehingga topik yang didalami juga harus rinci (Hancock dan Algozzine, 2006:16-17). Alasan memilih studi kasus karena lebih menekankan kedalaman pemahaman atas masalah yang diteliti yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu gejala atau fenomena tertentu dalam lingkup yang sempit.

3.2 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian (*research approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metoda-metoda rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014:3). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metoda penelitian karena rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya apabila penelitian ini dirancang dengan baik maka metoda penelitian yang digunakan memperoleh hasil penelitian yang baik (Hancock dan Algozzine, 2006:34). Oleh karena itu sebelum peneliti benar-benar turun ke lapangan, maka penelitian ini perlu dirancang dengan baik. Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah, pengumpulan dan revidi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar 3.1 dan dijelaskan berikut ini.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Sumber: Diolah peneliti melalui NVivo

3.2.1 Tahap Penentuan Topik Penelitian

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian adalah subjek atau materi subjek penelitian yang menjadi gagasan utama yang harus dipelajari dan dieksplorasi oleh peneliti (Creswell, 2014:25). Sebelum mempertimbangkan apa yang diteliti dalam proyek penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sendiri topik yang diteliti dengan mempertimbangkan kebermanfaatan secara praktis dan akademis. Peneliti memilih topik ini karena tertarik dengan adanya prestasi yang ditorehkan Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan keuangan daerah padahal banyak pemerintah daerah belum mampu mencapainya. Prestasi pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah adanya transparansi dan akuntabilitas

Setelah topik dipilih, diajukan kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan. Bersamaan dengan topik, peneliti juga mengajukan lokasi dilakukannya penelitian. Topik dan lokasi penelitian ini kemudian dibahas bersama dengan pembimbing. Salah satu kriteria dalam menentukan kelayakan topik penelitian ini adalah disesuaikan dengan ketersediaan data dan kebersediaan partisipan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

3.2.2 Tahap Penentuan Rumusan Masalah

Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya suatu proyek penelitian. Dengan demikian masalah penelitian dicantumkan dalam bentuk pertanyaan sehingga menjadi bentuk rumusan

masalah. Rumusan masalah adalah satu/dua pertanyaan umum dan terluas tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2014:139).

Setelah topik disetujui oleh dosen pembimbing, peneliti membuat proposal mini yang meringkas secara umum rancangan penelitian. Dalam proposal mini ini yang lebih ditekankan adalah pembuatan rumusan masalah penelitian. Proposal mini diperlukan untuk melihat keterkaitan topik, latar belakang, dan metoda penelitian dengan masalah penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Sebelum disetujui, peneliti melakukan penajaman rumusan masalah dengan melakukan *grandtour questions* ke lokasi penelitian untuk memastikan apakah jawaban atas rumusan masalah tersebut benar-benar ada, valid, dan bisa diambil serta dikumpulkan di lokasi penelitian.

3.2.3 Tahap Pengumpulan dan Reviu Literatur

Reviu literatur (*literature review*) adalah analisis literatur atas topik penelitian yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2014:27-28).

Setelah topik, lokasi, dan rumusan masalah disetujui dosen pembimbing, peneliti kemudian mengumpulkan literatur berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan buku manual di perpustakaan, *e-book*, artikel, dan hasil penelitian sebanyak-sebanyaknya melalui jurnal *online* dan *website*. Jurnal, *e-book*, dan artikel yang terkumpul kemudian

dibaca untuk memahami hasil penelitian masing-masing. Semua literatur yang telah dibaca dan dipahami diberi tanda dan dipisahkan berdasarkan relevansinya. Untuk melengkapi jurnal penelitian tersebut, peneliti juga mencari teori-teori yang relevan di perpustakaan dengan membaca dan mencatat poin-poin penting. Semua hasil pengumpulan literatur didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* berupa file pdf.

Kajian pustaka dilakukan terhadap definisi, konsep dan teori yang terkait dengan topik penelitian. Sedangkan kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan analisis terhadap artikel dan jurnal yang terdapat pada artikel sebelumnya yang juga relevan dengan topik penelitian ini. Setelah dikumpulkan semua literatur yang sudah ditandai, peneliti selanjutnya melakukan analisis literatur dengan menggunakan NVivo. Dalam diagram alir di atas, *output* revid literatur dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu *maps*, *matrix coding query*, dan *coding*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, *maps (literature maps)* adalah ringkasan visual dari riset-riset atau teori-teori yang sudah dilakukan para ahli yang disajikan dalam bentuk gambar dengan berbagai cara yaitu dengan hirarkis, *flowchart*, atau dengan berbentuk lingkaran-lingkaran (Creswell, 2014:36). Sementara *matrix coding query* adalah kuiri hasil pengodean yang pasangan itemnya ditabulasikan silang dan ditampilkan dalam bentuk matriks (Bazeley dan Jackson, 2013:250).

Output berupa *maps* dan *matrix coding query* dihasilkan setelah melalui proses *coding* terhadap kajian pustaka berupa konsep dan teori dan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu. *Output* dari *maps* adalah peta literatur penelitian dan peta analisis awal penelitian. Peta literatur merupakan penyajian data

terhadap hasil revid literatur yang diolah melalui alat bantu NVivo. Peta ini mempermudah peneliti membangun pola berpikir dalam penelitian. Sementara *matrix coding* terdiri dari 2 yaitu *matrix coding* berdasarkan kata dan *matrix coding* berdasarkan sumber jurnalnya. Kedua matriks ini memberi gambaran keunikan penelitian yang dilakukan saat ini dibanding hasil penelitian terdahulu yang topiknya mirip dan relevan.

Koding (*coding*) dalam analisis data kualitatif adalah kata atau frasa singkat yang paling sering muncul dan secara simbolis memberikan ringkasan, intisari yang menonjol, kesimpulan pokok masalah, dan atau atribut yang membangkitkan ingatan dari sesuatu yang berdasarkan bahasa atau data visual (Leavy, 2014:584). Sedangkan Bazeley dan Jackson (2013:70) mendefinisikan koding adalah representasi abstrak dari suatu objek atau fenomena, atau cara mengidentifikasi tema dalam suatu teks. Koding bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian sehingga informasi yang terkumpul tersebut akan membentuk kategor-kategori utama yang selanjutnya akan saling terhubung dan memunculkan konsep-konsep teoritis yang baru.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan koding melalui NVivo yang dibagi dalam 2 tahap koding yaitu pada tahap pengumpulan literatur sebelum turun ke lapangan dan pada tahap analisis data pada saat di lapangan. Tahapan koding sebelum turun ke lapangan dilakukan terhadap literatur dan dokumen yang menjadi sumber narasi di bab 1 sampai dengan bab 3. Sedangkan pada tahap analisis data pada saat di

lapangan, koding dilakukan terhadap hasil wawancara. Semua hasil koding ini menjadi dasar dibuatnya peta literatur, *matrix coding*, dan peta analisis akhir.

3.2.4 Tahap Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2014:189). Setelah hasil analisis literatur disajikan melalui proses koding dan *output*-nya, maka langkah selanjutnya adalah mempresentasikan hasil analisis tersebut di depan pembimbing dan penguji melalui seminar proposal. Setelah seminar disetujui, peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam diagram alir terlihat bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik dengan peneliti sebagai instrumennya, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi yang dijelaskan lebih lanjut mulai halaman 115 sampai 127 bab ini.

3.2.5 Tahap Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif adalah menyiapkan dan mengatur analisis data (yaitu data teks seperti dalam transkrip, atau data gambar dalam foto), kemudian mengurangi data ke dalam tema melalui proses dan kondensasi koding, dan akhirnya menyajikan data dalam bentuk angka, tabel, atau suatu diskusi. Analisis data ini merupakan suatu pendekatan yang luas yang tidak hanya menganalisis teks dan gambar, tetapi meliputi pula pengorganisasian data, melakukan pemahaman pendahuluan terhadap *database*, mengode dan mengorganisasikan tema, menyajikan data, dan membentuk interpretasi data (Creswell, 2013:156-157).

Dalam tahap analisis data ini terdapat suatu alat analisis berbentuk *kuiiri* (*query*) atau *matrix coding queries*. *Kuiiri* adalah alat analisis dalam NVivo yang berfungsi untuk membantu mengeksplorasi data dan hasil koding serta membantu membandingkan tema-tema dan kategori yang muncul selama proses koding (QSR International, 2018). *Kuiiri* yang berbentuk matriks ini selain digunakan untuk mencari keunikan penelitian, juga digunakan untuk mempermudah membaca peta dalam NVivo (QSR International, 2018). Sedangkan *framework matrix* adalah matriks yang meringkas data dalam sebuah *grid* yang bertujuan untuk mentabulasikan transkrip hasil wawancara atau diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan tujuan yang sama yaitu mencaritemukan makna (QSR International, 2018).

Hasil koding dalam analisis data ini juga mirip dengan hasil koding dalam tahap analisis literatur. Jika koding pada tahap literatur revidu menghasilkan 2 output, maka tahapan koding pada saat analisis data di lapangan menghasilkan 3 *output* hasil koding yaitu *matrix coding queries*, peta analisis akhir, dan *framework matrix*. Prosedurnya dimulai dari pembuatan koding menjadi *nodes*, kemudian *nodes* disajikan dalam bentuk peta analisis akhir. Peta analisis yang ada kemudian dibuatkan *relationship* sehingga menjadi *matrix coding* yang berguna untuk mempermudah membaca peta analisis. Untuk membantu penyajian data wawancara, peneliti kemudian membuat *framework matrix* yang memvisualisasikan transkrip wawancara dalam bentuk *hardcopy*.

Dalam gambar 3.1 tersebut, peneliti membuat 3 jenis matriks yaitu *matrix coding* mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk Rumusan Masalah 2 (RM2),

matrix coding budaya kerja, dan *matrix coding* proses SECI untuk RM3, dan *matrix coding* untuk kendala dan solusi perbaikan (RM4). Melalui *framework matrix*, peneliti membuat daftar wawancara untuk RM2, RM3, dan RM4 dan *framework matrix* dokumentasi untuk RM1. Analisis data dijelaskan lebih lanjut mulai halaman 133 sampai 143 bab ini.

3.2.6 Tahap Penarikan Kesimpulan Akhir

Tahap terakhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014:274) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan adalah menginterpretasi atau memaknai data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan. Oleh karena itu bentuk penarikan kesimpulan berupa 3 bentuk interpretasi yang terdiri dari 1) interpretasi data dapat berupa interpretasi pribadi peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian; 2) interpretasi data dapat juga berbentuk makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori; 3) interpretasi juga dapat berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab yang muncul dari data dan analisis tetapi bukan dari hasil ramalan peneliti. Peneliti akan memanfaatkan hasil olah data yang dibantu oleh NVivo yang telah disajikan dalam bentuk peta dan kuiri untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dijelaskan juga pada halaman 143 bab ini.

3.3 Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Wates, ibukota Kabupaten Kulon Progo. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fungsi dan tugas utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Objek ini dipilih karena merupakan salah satu pemerintah daerah di Propinsi DIY yang sukses melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Instansinya dipilih karena SKPD tersebut mencerminkan pola tahapan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Aktivitas, pegawai, dan tempat yang berada dalam satu lingkungan ini merupakan situasi sosial yang melakukan aktivitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam lingkup Kabupaten Kulon Progo.

Situasi sosial yang diamati terdiri dari 3 elemen yaitu, aktivitas (*activity*), pelaku (*actor*), dan tempat (*place*). Yang dimaksud aktivitas dalam penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan keuangan seperti membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD), membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), aktivitas pencairan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan. Pelakunya adalah para pejabat eselon III dan IV serta auditor dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di BKAD dan Bappeda serta Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Tempatnya adalah semua bagian/bidang di

BKAD yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pajak, Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan di Bappeda dan ruang auditor di Inspektorat Kulon Progo. Interaksi antara pegawai, kegiatan, dan tempatnya ini menghasilkan suatu situasi sosial yang ditarik maknanya.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the researcher is the instrument*) (Tracy, 2013:89). Peneliti bukan saja dapat dengan tepat menangkap ungkapan verbal, tetapi juga bahasa tubuh orang yang diteliti (Putra, 2011:14). Adanya karakteristik penelitian kualitatif ini, menimbulkan konsekuensi bagi peneliti untuk mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan partisipan, sehingga peneliti harus memiliki pengalaman yang sekiranya dapat mencerminkan data mengenai latar belakang yang komprehensif agar pembaca dapat memahami topik dan interpretasi peneliti (Creswell, 2014:184-187).

Merasakan apa yang partisipan rasakan merupakan kunci untuk memahami partisipan secara mendalam. Untuk melengkapi instrumen penelitian tersebut sesuai dengan teknik pengumpulan data, peneliti telah memperkaya pengetahuan dengan membaca dan mengkaji teori sebagai bekal serta membawa alat bantu berupa daftar dan pedoman wawancara, peralatan rekam seperti *video recorder*, *voice recorder*, dan *camera*. Teori yang dipelajari dan digunakan untuk menganalisis adalah teori

knowledge conversion yang telah peneliti pelajari dari beberapa pakar di bidang manajemen pengetahuan. Selain itu sebelum proses pengumpulan data, peneliti juga telah membangun komunikasi yang baik dengan partisipan yaitu 7 orang pejabat eselon III setingkat Kepala Bidang, 8 orang pejabat eselon IV setingkat Kepala Subbidang, dan 1 orang auditor, serta 3 orang staf untuk mendapatkan data penelitian.

3.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap data yang diperlukan oleh data primer (Mahdi dan Mujahidin, 2014:132). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diambil langsung melalui *website* Kabupaten Kulon Progo dan dokumen internal yang diminta langsung kepada pejabat di SKPD Bappeda, BKAD, dan Inspektorat. Contoh dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati Kulon Progo (perkada), rencana strategis (renstra), penjabaran RAPBD, laporan pelaksanaan APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK), dan buku-buku serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek dan topik yang diteliti

seperti Laporan tentang Kulon Progo yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.

3.6 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data statistik yang sudah tersedia. Kata-kata dan tindakan merupakan data yang berasal dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi dan Suwandi, 2008:169-173). Sesuai dengan buku pedoman penulisan tesis, bahwa yang akan menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan ketersediaan data. Artinya partisipan yang akan menjadi sumber data ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali sehingga jumlah partisipan tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2017:20).

Untuk memperoleh sumber data dengan baik, peneliti telah merekrut partisipan. Perekrutan partisipan merupakan proses pemilihan individu dari populasi penelitian untuk secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian. Metoda perekrutan partisipan yang dipilih adalah metoda perekrutan tidak secara acak atau yang dikenal dengan nama *purposive recruitment*, yaitu metoda perekrutan yang bertujuan untuk mencari orang/partisipan yang memang memiliki banyak informasi dan pengalaman mengenai topik yang akan diteliti. Dalam metoda ini partisipan tidak ditentukan dari

jumlahnya tetapi ditentukan oleh penyerapan informasi, artinya lebih mengutamakan kedalaman informasi dan variasi minat dan pengalaman terhadap objek yang diteliti (Hennink et al., 2011:84-105). Untuk mempermudah penerapan metoda *purposive recruitment* ini, peneliti menggunakan dua strategi dengan penjelasan berikut.

3.6.1 Strategi Gatekeepers

Strategi *gatekeepers* adalah merekrut partisipan yang memiliki peranan penting dalam sebuah komunitas, yang secara khusus memiliki pengetahuan tentang karakteristik anggota organisasi, dan memiliki pengaruh yang cukup untuk menganjurkan anggota organisasi berpartisipasi dalam penelitian (Hennink et al., 2011:84-105). Strategi ini dipilih karena *gatekeepers* mampu mengarahkan dan memobilisasi dengan mudah anggota organisasi yang diperintahkan oleh pimpinan organisasi atau orang terpercaya supaya berpartisipasi dalam penelitian ini.

Dalam konteks penelitian ini, *gatekeepers* adalah pejabat eselon IIIA di BKAD, Bappeda, dan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo yang memiliki pengaruh vertikal yaitu Sekretaris BKAD, Ratna Juita; Sekretaris Bappeda, Maria Indrati; dan Sekretaris Inspektorat, Bambang Sutrisno. Jabatan sekretasis dipilih karena pejabat ini memiliki eselonisasi yang tinggi dibanding kepala bidang yang berkedudukan sebagai eselon IIIB. Secara struktural, sekretaris memiliki wewenang dan pengaruh lebih tinggi dibanding kepala bidang, sehingga alur komando mengalir secara vertikal dan perintahnya wajib dilaksanakan oleh pejabat yang berada di bawahnya. Cara peneliti mendapatkan *gatekeepers* ini dilakukan dengan tahapan yang dimulai dengan bertanya dan berbincang terlebih dahulu tentang identitas *gatekeepers* ini kepada

setiap pegawai yang peneliti jumpai di BKAD, Bappeda, dan Inspektorat. Tahap selanjutnya mencari tahu latar belakang *gatekeepers* tersebut lewat *website* masing-masing SKPD tentang nama pribadi, lama jabatan yang diduduki saat ini, sampai tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Strategi *gatekeepers* diterapkan berturut-turut di BKAD, Bappeda dan Inspektorat.

Untuk bertemu *gatekeepers* di BKAD, peneliti meminta dipertemukan dengan ibu Ratna sebagai sekretaris BKAD melalui staf sekretariat BKAD yaitu Sugiyanta. Peneliti kemudian berbincang dengan Sekretaris BKAD menyampaikan maksud penelitian dengan membawa Surat Izin Penelitian dari Bupati Kulon Progo. Setelah mempelajari beberapa nama pejabat yang peneliti minta dari salah seorang staf sekretariat BKAD, kepada ibu Ratna peneliti meminta semua Kepala Bidang di BKAD untuk diwawancarai. Atas dasar persetujuan beliau peneliti diizinkan dan ibu Ratna melalui Sugiyanta membawa peneliti ke setiap ruangan kepala bidang masing-masing dan diperkenalkan kepada pejabat yang bersangkutan. Begitulah prosedurnya saat pertama kali peneliti mewawancarai pejabat-pejabat di semua bidang di BKAD selalu meminta diantar oleh Sugiyanta dengan tujuan untuk meyakinkan mereka akan legalitas peneliti. Wawancara selanjutnya peneliti melakukannya sendiri dengan membuat janji terlebih dahulu kepada setiap pejabat sebagai partisipan di BKAD.

Untuk memperoleh *gatekeepers* di Bappeda, peneliti minta dipertemukan dengan Maria Indrati selaku sekretaris. Oleh sekretaris Bappeda ini, peneliti lalu diarahkan untuk bertemu Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Bappeda, yaitu Diana Puspitasari mewakili ibu Maria Indrati, karena beliau saat itu tidak dapat

ditemui karena kesibukannya. Peneliti kemudian diterima di ruangan rapat berbincang menyampaikan maksud penelitian dengan Diana Puspitasari dengan memperlihatkan Surat Izin Penelitian dari Bupati Kulon Progo. Atas dasar surat tersebut Diana mengarahkan peneliti kepada 3 orang pejabat struktural yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan 2 orang stafnya masing-masing Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan dan Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan. Diana kemudian meminta salah satu staf *frontline* Bappeda untuk mengantar dan menunjukkan kepada peneliti ruangan masing-masing partisipan di Bappeda tersebut.

Sementara untuk bertemu Bambang Sutrisno, sekretaris sebagai *gatekeepers* di Inspektorat, peneliti memilih berbincang-bincang terlebih dahulu dengan beberapa staf dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bambang Sidi Rahmanto di depan kantor Inspektorat. Peneliti membutuhkan waktu 2 minggu lebih untuk bisa bertemu Bambang Sutrisno karena kesibukan beliau. Dari informasi sementara yang peneliti dapatkan dari para staf bahwa tanpa izin dari Sekretaris Inspektorat, wawancara tidak dapat dilakukan. Para pejabat di Inspektorat tidak bersedia untuk diwawancarai. Peneliti diminta untuk menunggu karena saat itu mereka sedang melakukan audit di setiap SKPD. Setelah beberapa kali peneliti meminta waktu, pada akhirnya 1 bulan kemudian peneliti bertemu dan meminta izin kepada Bambang Sutrisno, dan beliau hanya memberi kesempatan dan peneliti diarahkan untuk mewawancarai 1 orang auditor madya yaitu Ari Fitriani. Peneliti diantar oleh staf ke ruangan auditor. Menurut auditor Ari, data di Inspektorat tidak sembarang untuk diberikan kecuali peneliti mendapatkan izin khusus langsung dari Bupati Kulon Progo. Oleh karena itu

peneliti hanya mewawancarai auditor Ari dan lebih konsen mengambil data di BKAD dan Bappeda.

3.6.2 Strategi *Snowball*

Strategi *snowball* adalah strategi yang sifatnya melengkapi strategi *gatekeepers* dengan merekrut partisipan yang memiliki karakteristik khusus, memiliki pengalaman yang langka, atau kelompok populasi yang tersembunyi yang mungkin sulit diidentifikasi dengan strategi *gatekeepers* (Hennink et al., 2011:84-105). Strategi ini dilakukan dengan cara mula-mula jumlah partisipan hanya sedikit, lama-lama menjadi banyak jika jumlah partisipan yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan atau menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya ketika peneliti mewawancarai kepala bidang, kepala bidang tersebut belum mampu menjawab pertanyaan penelitian dan peneliti diarahkan/disarankan olehnya untuk bertanya kepada kepala subbidang tertentu yang lebih paham masalah. Peneliti akan mengikuti petunjuk tersebut dan mencari yang bersangkutan, jika berhasil diwawancarai dan informasi belum juga diperoleh sehingga kepala subbidang tersebut memberi petunjuk yang sama dengan mengarahkan peneliti untuk mewawancarai kepala subbidang lainnya atau staf tertentu yang juga lebih paham, maka peneliti pun mencari orang yang dimaksud. Begitu seterusnya sampai peneliti merasa kalau informasi benar-benar diperoleh dan pertanyaan penelitian terjawab dengan tuntas.

Penerapan strategi *snowball* dilakukan di BKAD dan Bappeda, yang pada awalnya peneliti hanya mewawancarai 6 pejabat eselon III di BKAD, berubah

jumlahnya dan bertambah 8 orang sehingga totalnya menjadi 14 orang. Semula yang ditarget yaitu Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Aset dan Kepala Bidang Akuntansi. Pertambahan jumlah partisipan dengan *snowball* adalah Kepala Subbidang Belanja, Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan, Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan PPK-Petugas Akuntansi. Cara ini dilakukan ketika peneliti merasakan kalau data dimaksud tidak cukup atau belum diperoleh dengan tepat, maka peneliti berusaha melanjutkan wawancara tersebut kepada temannya yang setara jabatannya yang tentunya seizin dan sepengetahuan partisipan lama.

Untuk partisipan di BKAD, strategi *snowball* terjadi pada Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Pendapatan BKAD, dan Kepala Bidang Akuntansi. Atik Zuniastuti selaku Kepala Bidang Anggaran merupakan pejabat yang baru bertugas 3 bulan di BKAD saat peneliti mewawancarainya. Atas saran beliau, peneliti diminta untuk mewawancarai pejabat eselon IV Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda yaitu Susy Setyo Cahyani untuk menanyakan tentang proses perencanaan yang detil. Nur Hadiyanto selaku Kepala Bidang Perbendaharaan mengarahkan peneliti untuk mewawancarai Bendahara Pengeluaran BKAD yaitu Angelia Resty dan stafnya Sri Sugiyarti selaku Kepala Subbidang Belanja untuk bertanya langsung tentang proses pencairan

anggaran di BKAD dan proses pencairan anggaran khusus di tingkat pemerintah daerah.

Sementara Kepala Bidang Pendapatan BKAD, Sunarya yang saat wawancara sedang berlangsung dimutasi ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mengarahkan peneliti untuk mewawancarai stafnya yaitu Alif Romdhoni selaku Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan untuk menanyakan proses penerimaan dan evaluasi pendapatan daerah. Dari Romdhoni peneliti kemudian meminta izin untuk mewawancarai Lukman Hakim selaku Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan yang merupakan pejabat senior di Bidang Pendapatan dan lebih banyak mengetahui seluk-beluk pendapatan daerah. Demikian juga dengan Angelia Resty mengarahkan peneliti untuk mewawancarai Sutanti selaku Bendahara Penerimaan yang lebih banyak mengetahui tentang pertanggungjawaban penerimaan di BAKD.

Iswandari Artiningsih selaku Kepala Bidang Akuntansi mengarahkan peneliti untuk mewawancarai para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Kuni Mas'adah selaku PPK-Pembuat SPM dan Eko Catur Setyawati selaku PPK-Petugas Akuntansi. Dengan cara yang sama, atas saran setiap kepala bidang ini peneliti mewawancarai lagi beberapa orang kepala subbagian dan kepala subbidang yang direkomendasikan yaitu kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah atas saran Kepala Bidang Perbendaharaan, Dengan cara lain yaitu sistem data *saturated*, misalnya melanjutkan wawancara dengan Kepala Subbidang

Pengembangan Pendapatan setelah mempertimbangkan data yang dicari dari Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan belum jenuh.

Sementara di Bappeda 3 pejabat eselon III berencana untuk diwawancarai yaitu Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, dan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian. Atas saran Ibu Sri Wijayanti, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, peneliti tidak melanjutkan wawancara di 2 bidang ini karena peneliti merasa data yang dibutuhkan semuanya sudah cukup terpenuhi di Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.

Untuk partisipan di Bappeda, strategi *snowball* terjadi pada Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan. Peneliti mewawancarai Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda atas saran Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan. Selanjutnya Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan menyarankan peneliti untuk mewawancarai Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan karena faktor senioritas.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran, maka data tersebut harus berupa fakta dan fakta itu juga digunakan sebagai bukti penelitian. Oleh karena itu peneliti melakukan 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan teknik dokumentasi (*record review*).

3.7.1 Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah metoda pengumpulan data yang melibatkan antara pewawancara (*interviewer*) dan partisipan (*interviewee*) untuk berdiskusi mengenai topik khusus secara mendalam. Dalam metoda ini pewawancara dan orang yang diwawancara tidak hanya bertanya dan menjawab namun juga saling melihat reaksi/gerak gerik satu sama lain yang menggambarkan kedekatan hubungan yang dibangun antara pewawancara dan partisipan yang diwawancarai (Hennink et al., 2011:109).

Model wawancara mendalam yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interviews*). Pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan terbuka, lalu kemudian melanjutkan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban partisipan. Pedoman wawancara yang berisi poin-poin pertanyaan utama tetap dibuat dan dilaksanakan oleh peneliti, tetapi hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi, yang pertanyaan selanjutnya menggelinding tergantung improvisasi peneliti di lapangan yang tentunya masih terkait dengan topik yang diteliti.

Model wawancara tidak terstruktur tersebut dipilih karena wawancara mendalam banyak menyimpan cadangan masalah yang berupa kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri (Patilima, 2013:68). Instrumen penelitian utama dalam

teknik wawancara mendalam ini menggunakan alat perekam suara berupa *voice recorder*.

Peneliti melakukan wawancara mendalam di 3 SKPD terhadap pejabat eselon III, eselon IV, dan staf/auditor yaitu di BKAD, Bappeda, dan Inspektorat yang keseluruhannya berjumlah 19 orang. Dari jumlah tersebut, 14 orang berasal dari BKAD, 4 orang berasal dari Bappeda dan 1 orang berasal dari Inspektorat. Wawancara dilaksanakan di ruang kerja masing-masing pejabat dan staf pada saat jam kerja dan jam istirahat. Karena kesibukan masing-masing partisipan, sebelum melakukan wawancara peneliti sudah membuat janji untuk diwawancara, namun demikian terkadang peneliti juga harus menunggu mereka tidak sibuk baru bersedia untuk diwawancarai.

Proses wawancara dilakukan selama 5 bulan (sudah termasuk olah datanya) dimulai dari bulan Mei 2018 dan berakhir di bulan Oktober 2018. Wawancara dilakukan berkesinambungan berdasarkan aliran data yang diberikan partisipan. Dalam sekali wawancara peneliti membatasi jumlah partisipan yang diwawancara sebanyak 3 sampai 5 orang dengan tujuan untuk mempercepat proses transkripnya. Setelah rekaman wawancara sebelumnya selesai ditranskrip, baru peneliti melanjutkan wawancara berikutnya. Setiap partisipan diwawancarai sebanyak 2 sampai dengan 7 kali dengan durasi wawancara rata-rata 45 menit sampai dengan 60 menit per partisipan.

Setelah wawancara, peneliti melakukan olah transkrip dan berusaha menganalisis kebutuhan data dari hasil transkrip tersebut. Masing-masing partisipan

diwawancarai dengan topik rumusan masalah yang sama tapi dengan substansi yang berbeda karena setiap pejabat memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda, sehingga peneliti mewawancarai mereka sesuai tupoksinya. Misalnya peneliti menanyakan aktivitas perencanaan yaitu membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bappeda berbeda dengan peneliti mewawancarai aktivitas perencanaan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) di BKAD. Wawancara lengkap setiap partisipan dapat dilihat pada lampiran 10, 11 dan 12 masing-masing di halaman 386, 430, dan 725.

Partisipan yang diwawancara di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terdiri dari 6 orang pejabat eselon III yaitu:

1) Nur Hadiyanto

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan belanja dan mengelola kas daerah di Kabupaten Kulon Progo. Beliau dibantu oleh 2 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Belanja dan Kasubbid Pengelolaan Kas.

2) Atik Zuniastuti

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan perencanaan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan, serta pembinaan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Kulon Progo. Beliau dibantu oleh 3 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Perencanaan Anggaran, Kasubbid Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kasubbid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.

3) Taufiq Amrullah

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan inventarisasi dan penilaian, penghapusan dan administrasi persediaan, serta optimalisasi aset tetap dan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Beliau dibantu oleh 3 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Inventarisasi dan Penilaian, Kasubbid Penghapusan dan Administrasi Persediaan, dan Kasubbid Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.

4) Sunarya

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan fungsi perencanaan pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Di bawah beliau terdapat tiga pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Perencanaan Pendapatan, Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan, dan Kasubbid Pengembangan Pendapatan. Selama proses wawancara berlangsung, partisipan ini telah dimutasi ke Satpol PP pada Bulan Juni 2018.

5) Nasip

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan, penetapan serta penagihan dan pengawasan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Pejabat ini membawahi Kasubbid Perencanaan Pendapatan, Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan, serta Kasubbid Pengembangan Pendapatan.

6) Iswandari Artiningsih

Adalah pejabat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah di Kab.Kulon Progo. Pejabat ini dibantu oleh 2 orang pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Akuntansi Keuangan Daerah dan Kasubbid Pelaporan Keuangan Daerah.

Sementara 5 orang partisipan pejabat eselon IV di BKAD yaitu:

1) Kuni Mas'adah

Adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan khusus di tingkat SKPD BKAD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat ini berada di bawah koordinasi langsung dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BKAD. Selain jabatan struktural, partisipan ini juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di bagian Sekretariat BKAD dan merangkap jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-Pembuat SPM di BKAD.

2) Lukman Hakim

Adalah pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan berbagai strategi pendapatan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

3) Sri Sugiyarti

Adalah pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan belanja untuk pengeluaran dalam APBD Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari dan bertanggungjawab kepada Nur Hadiyanto selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

4) Alif Romdhoni

Adalah pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan terhadap program-program dan strategi pendapatan termasuk mengevaluasi Surat Pertanggungjawaban semua Bendahara Penerimaan di Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

5) Meylani Lestari

Adalah pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari dan bertanggungjawab kepada Atik Zuniastuti selaku Kepala Bidanganya.

Tiga orang staf di BKAD masing-masing yaitu:

1) Angelia Resty

Adalah staf yang bertugas yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di BKAD. Secara administratif dan

fungsional berada di bawah koordinasi Kepala BKAD selaku pengguna anggaran dan kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

2) Sutanti

Adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BKAD. Secara administratif dan fungsional berada di bawah koordinasi Kepala BKAD selaku pengguna anggaran dan kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

3) Eko Catur Setyawati

Adalah staf yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah. Secara administratif partisipan ini berada di bawah koordinasi Sekretaris yang juga merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Partisipan yang diwawancara di Bappeda keseluruhannya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon III yaitu:

1) Sri Wijayanti

Adalah pejabat yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Memiliki 2 orang bawahan pejabat eselon IV yaitu Kasubbid Analisis Data Pembangunan dan Kasubbid Perencanaan Pembangunan.

Pejabat eselon IV yang diwawancarai di Bappeda berjumlah 3 orang yang terdiri dari:

1) Diana Puspitasari

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari dan berada langsung di bawah Sekretaris Bappeda.

2) Susy Setyo Cahyani

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan analisis data pembangunan daerah yaitu rumusan masalah pembangunan daerah dan data kondisi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari Sri Wijayanti selaku Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Pembangunan.

3) Khamdan Syakiri

Adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab merencanakan pembangunan daerah termasuk konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Partisipan ini merupakan bawahan dari Sri Wijayanti selaku Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Pembangunan.

Sedangkan partisipan yang diwawancarai di Inspektorat Daerah berjumlah 1 orang yaitu:

1) Ari Fitriani

Adalah auditor yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan untuk urusan yang telah ditetapkan terhadap setiap SKPD di Kabupaten Kulon Progo.

Kesembilan belas partisipan yang dijelaskan di atas, profil lengkapnya masing-masing dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 368.

3.7.2 Teknik Dokumentasi

Teknik analisis dokumen atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008:158). Instrumen penelitian utama dalam teknik analisis dokumen ini adalah *website* dan dokumen internal.

3.7.2.1 Website

Website digunakan untuk mencari semua peraturan keuangan daerah yang telah disebarluaskan secara elektronik melalui *website* Kabupaten Kulon Progo dan *website* Badan Pusat Statistik. *Website* Kulon Progo berasal dari domain utama www.kulonprogo.go.id. Dari domain utama *website* Kulon Progo tersebut peneliti menelusuri lagi ke *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan masing-masing *website* SKPD melalui subdomain:

- a) www.jdih.kulonprogo.go.id;

- b) www.bappeda.kulonprogokab.go.id;
- c) www.bkad.kulonprogokab.go.id; dan
- d) www.inspektorat.kulonprogokab.go.id.

Dokumentasi yang diunduh dari *website* Kulon Progo adalah dokumentasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dokumen dimaksud terdiri dari peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan bupati, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 3) Peraturan Daerah No.12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
- 4) Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018;
- 5) Peraturan Daerah No.14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan;
- 6) Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2012 tentang pedoman evaluasi perencanaan;

- 7) Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tupoksi Bappeda;
- 8) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tupoksi Inspektorat Daerah;
- 9) Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumentasi tentang pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diunduh dari website adalah:

- 1) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
- 4) Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- 5) Peraturan Bupati No.72 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Bupati No.24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda;
- 7) Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD 2018;

3.7.2.2 Dokumen Internal

Dokumen internal merupakan cara manual yang digunakan untuk mencari semua peraturan daerah, peraturan bupati, dan dokumentasi tambahan lainnya tentang pengelolaan keuangan Kabupaten Kulon Progo yang tidak dipublikasikan melalui

website. Untuk peraturan daerah dan peraturan bupati yang tidak dipublikasikan melalui *website* diperoleh langsung oleh peneliti di BKAD melalui Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Subbidang Belanja, Kepala Bidang Akuntansi, dan Kepala Bidang Aset yaitu:

- 1) Data yang diminta langsung kepada Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD yaitu Peraturan Bupati No.75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo;
- 2) Data yang diminta langsung dari Kepala Subbidang Belanja BKAD yaitu Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uang Persediaan;
- 3) Data yang diminta langsung dari Kepala Bidang Akuntansi yaitu ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Kebijakan Akuntansi Daerah;
- 4) Data yang minta langsung dari Kepala Bidang Aset yaitu buku dan pedoman tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Dokumentasi lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo peneliti dapatkan langsung dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan data tambahan lainnya langsung dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi DIY. Dari Badan Pusat Statistik adalah:

- 1) Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2018;
- 2) Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2016;
- 3) Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2010;
- 4) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018.

Sementara dari BPK Perwakilan Propinsi DIY, peneliti memperoleh data lengkap tentang laporan keuangan yang telah diaudit, yaitu:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2017;
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2016;
- 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2015; dan
- 4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2014.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Seperti yang telah dinyatakan di atas bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, maka yang diuji keabsahannya bukanlah instrumennya tetapi datanya. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji kredibilitas dan uji reliabilitas.

3.8.1 Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas kualitatif adalah ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil dan kesimpulan penelitian dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran

umum. Kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan serta menginterpretasi data autentik tersebut dengan akurat (Bandur, 2016:281-282). Creswell (2014:201) juga membedakan uji validitas antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Uji kredibilitas atau validitas dalam kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Bahkan Creswell juga merekomendasikan untuk menggunakan lebih banyak strategi validitas agar dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menilai keakuratan dan meyakinkan pembaca akan akurasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan itu peneliti melakukan uji kredibilitas penelitian ini dengan 3 cara yang dijelaskan berikut ini.

3.8.1.1 Perpanjangan Waktu Penelitian

Perpanjangan penelitian (*prolonged time participation*) mengharuskan peneliti lebih lama di lapangan, bertemu, serta berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Ini dilakukan bukan saja untuk meningkatkan keakraban, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kepercayaan. Jika orang-orang yang diteliti semakin akrab dan percaya pada peneliti, maka apa pun yang hendak digali lebih dalam akan didapatkan oleh peneliti. Perpanjangan penelitian dilaksanakan jika data yang terkumpul sudah sangat banyak, telah dianalisis, dan ada temuan yang dapat dikategorikan, atau dengan kata lain ketika fokus penelitian telah diperoleh dan telah dijelaskan dengan uraian yang rinci (Putra, 2011:168-169).

Sebagaimana diketahui izin penelitian yang diajukan peneliti hanya 6 bulan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kulon Progo sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2018. Selama masa penelitian tersebut peneliti telah menemukan fokus penelitian yaitu adanya proses transfer pengetahuan yang telah dianalisis melalui transkrip wawancara. Berdasarkan data yang sudah cukup banyak terkumpul dan hasil analisis wawancara, peneliti perlu mengelaborasi adanya budaya dan transfer pengetahuan yang menjadi inti dan fokus penelitian ini. Peneliti merasa waktu penelitian masih kurang karena masih ada beberapa partisipan yang perlu diwawancari lebih lanjut lagi pada 3 bulan terakhir yaitu untuk rumusan masalah yang ke-3 dan ke-4. Perpanjangan penelitian akhirnya ditambah waktunya selama 3 bulan dimulai Agustus 2018 hingga Oktober 2018. Surat izin perpanjangan penelitian dapat dilihat pada lampiran 3 di halaman 366.

3.8.1.2 Triangulasi

Triangulasi (*triangulate*) atau cek dan ricek merupakan pengecekan data dengan menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu. Beragam sumber artinya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Beragam teknik berarti penggunaan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Beragam waktu berarti memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore, atau malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika partisipan diajak berbincang berdua dengan peneliti dan saat partisipan berbicara di depan publik tentang topik yang sama (Putra, 2011:189).

Peneliti telah melakukan triangulasi terhadap hasil wawancara selama dalam proses penelitian. Cara yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen.

Triangulasi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi silang antara hasil wawancara terhadap partisipan yang satu dengan yang lain. Peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi partisipan. Semua partisipan ditriangulasi dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama tetapi pada partisipan yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Partisipan yang paling banyak ditriangulasi adalah hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Kepala Bidang Akuntansi BKAD dan hasil wawancara terhadap Bendahara Pengeluaran dengan PPK-Petugas Akuntansi.

Sebagai contoh, misalnya peneliti mengkonfirmasi pernyataan Kepala Bidang Perbendaharaan tentang adanya penerapan *cash managemen system* (CMS) dengan Bendahara Pengeluaran. Terhadap hasil wawancara ini peneliti menelusuri lebih lanjut penerapan CMS tersebut kepada Bendahara Pengeluaran karena terkait dengan usulan terhadap kekurangan dan kendala pada rumusan masalah ke-4 penelitian ini. Contoh lainnya peneliti juga telah mengkonfirmasi tentang pernyataan Kepala Bidang Akuntansi kepada Bendahara, PPK dan PPTK tentang adanya komitmen kuat para PPK, PPTK dan Bendahara di BKAD dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPj) dan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu di BKAD. Hasil triangulasi dikumpulkan dalam bentuk rekaman wawancara yang telah diarsipkan peneliti dalam NVivo.

3.8.1.3 Pengecekan Anggota

Pengecekan anggota (*member checking*) merupakan upaya untuk memeriksa apakah peneliti tidak berhasil mengungkapkan emik, karena itu peneliti melakukan

pengecekan kepada orang-orang yang telah diteliti, diamati, dan diwawancarai. Mereka boleh mempersoalkan, mengkritik, dan memberikan masukan kepada peneliti. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditemukan sebagai hasil penelitian adalah emik, realitas apa adanya, bahkan cara ungkap dan istilah-istilah yang mereka gunakan. Pengecekan anggota dilakukan secara bertahap, tidak di akhir penelitian baik secara formal maupun informal. Dengan cara formal, peneliti memberikan kesempatan kepada partisipan untuk membaca catatan laporan dan kesimpulan sementara. Dengan cara informal, peneliti melakukan perbincangan informal dengan partisipan dan mendiskusikan temuan-temuan penting dan mengecek istilah-istilah kunci yang partisipan gunakan (Putra, 2011:200).

Pengecekan anggota telah dilakukan peneliti terhadap hasil wawancara baik tentang penggunaan istilah oleh partisipan, pengecekan transkrip wawancara oleh partisipan yang bersangkutan, kesalahan penulisan narasi wawancara, dan sebagainya. Substansi wawancara dicek kebenarannya dengan cara menanyakan langsung kepada partisipan apakah mengandung rahasia atau tidak, misalnya peneliti menghubungi Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda tentang adanya rahasia yang akan dipublikasikan melalui penelitian ini. Beberapa transkrip wawancara telah diubah untuk mengikuti kemauan Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda. Peneliti juga menghubungi semua partisipan yang telah diwawancarai tentang kesediaan nama mereka untuk ditampilkan dalam laporan penelitian. Peneliti selanjutnya diminta oleh partisipan untuk melihat hasil transkrip yang telah dilakukan oleh peneliti dan beberapa dari mereka telah membaca transkrip tersebut seperti Kepala Bidang

Anggaran, Atik Zuniastuti, Kepala Bidang Perbendaharaan, Nur Hadiyanto, Kepala Subbidang Belanja, Sri Sugiyarti, dan Kepala Bidang Akuntansi, Iswandari Artiningsih. Hasil pengecekan anggota dikumpulkan dalam bentuk rekaman wawancara yang telah diarsipkan peneliti dalam NVivo.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas kualitatif adalah upaya mengidentifikasi bahwa pendekatan penelitian yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain untuk proyek penelitian yang berbeda (Creswell, 2014:201). Alasan menggunakan uji realibilitas disebabkan adanya kelemahan penelitian kualitatif yang selalu dikritik subjektif sehingga salah menyajikan data bahkan menyederhanakan fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu peneliti harus dapat memastikan bahwa hasil analisis data penelitian dapat dikonfirmasi kembali. Untuk melaksanakan uji realibilitas, peneliti melakukannya dengan prosedur uji berikut ini.

3.8.2.1 Pengecekan Kembali Hasil Transkrip

Creswell (2014:201) memberi saran untuk mengecek kembali hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkrip. Dalam penelitian ini, hasil wawancara ditranskrip sendiri oleh peneliti tanpa bantuan orang lain dengan tujuan agar peneliti benar-benar memahami substansi permasalahan yang sedang diwawancarai. Hasil wawancara diputar kembali dan peneliti mendengarkan berulang-ulang. Transkrip dilakukan secara verbatim dengan menyertakan semua bahasa verbal partisipan. Proses transkrip membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena harus mendengarkannya berulang-ulang.

Setelah ditranskrip, file hasil transkripsi tersebut dibaca berulang-ulang dengan tujuan untuk mendapatkan kecocokan makna antara jawaban satu partisipan dengan partisipan lainnya. Tidak berhenti disitu, peneliti juga membaca kembali hasil transkrip tersebut pada tahap koding setelah diimpor ke dalam NVivo saat membuat peta analisis dan juga dibaca lagi pada tahap pembuatan narasi. Sebagai contoh ketika sedang mentranskrip file wawancara atas nama Nur Hadiyanto, peneliti menemukan jawaban atas beberapa permasalahan yang ditanyakan tentang penerapan Analisis Standar Belanja (ASB), peneliti membuka kembali hasil transkrip wawancara dengan Meylani Lestari yang mengatakan bahwa ASB memang belum diterapkan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil pengecekan ini menguatkan peneliti bahwa 2 jawaban atas satu permasalahan adalah sama.

3.8.2.2 Pengecekan Hasil Koding

Creswell (2014:201) mengatakan bahwa hasil koding harus dicek untuk memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang tentang kode-kode selama proses koding. Koding atas transkrip hasil wawancara dilakukan melalui NVivo. Peneliti sangat terbantu dengan adanya *software* ini, karena proses memunculkan kembali hasil koding dengan mudahnya dilakukan, sehingga untuk memeriksa hasil koding juga sangat cepat. Dalam penelitian ini hasil koding telah beberapa kali direduksi dan dirasionalkan.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara sistematis dalam mengelola, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan yang lebih rinci. Untuk melakukan analisis, data

dan fakta dihubungkan dengan konsep, generalisasi lanjutan, dan hasil identifikasi tema sehingga memungkinkan untuk memperbaiki pemahaman, memperluas teori, dan menambah pengetahuan (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang tata kelolanya dilakukan dengan bantuan aplikasi NVivo.

3.9.1 Analisis Model Miles dan Huberman

Analisis Miles dan Huberman adalah teknik analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh dan dilakukan mulai pada saat pengumpulan data berlangsung sampai dengan setelah data selesai dikumpulkan dalam periode tertentu (Miles et al., 1992). Model yang dipilih adalah model analisis yang dilakukan secara interaktif. Jawaban yang diperoleh saat wawancara langsung dianalisis. Bila hasil wawancara terasa belum memuaskan maka dilanjutkan dengan wawancara lagi sampai diperoleh data yang kredibel.

Sama halnya dengan data dokumentasi, setelah data diperoleh, data langsung direduksi dan disajikan lalu ditarik kesimpulan sementara dan diverifikasi baik kepada partisipan yang memberikan dokumen di awal ataupun kepada partisipan lainnya. Setelah itu dilanjutkan pengumpulan data lagi dan dilakukan hal yang sama secara interaktif dan terus menerus. Begitu seterusnya sampai datanya sudah jenuh. Secara detil, langkah-langkah analisis data ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Dalam tahap reduksi, data yang semakin banyak, kompleks dan rumit dirangkum, dipilih yang pokok, difokuskan pada yang penting, dan dicari tema serta polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya atau mempermudah pencarian data tersebut saat diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan pola dalam data. Tahapan reduksi dimulai dari memahami data, melakukan coding, mencari tema, meninjau tema, mengidentifikasi dan menamai tema, dan memilih tema yang memberikan kontribusi bagi penelitian (Braun dan Clarke, 2006:15-23).

Dalam tahap penyajian data, data yang telah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan dalam merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Neuman, 2014:496). Dalam penyajian data ini juga akan dilakukan analisis dengan membuat penjelasan tentang kasus yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta melakukan penjodohan pola dengan cara membandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya (Yin 1994:106-111).

Dalam tahap verifikasi data dan penarikan kesimpulan, dibuat simpulan sesuai pertanyaan penelitian yang diajukan. Simpulan tersebut dibuat sesuai hasil dari penjelasan dan penjodohan pola yang telah dibuat. Dari penjodohan pola tersebut akan dapat dirumuskan kelemahan/kekurangan dan penyebab permasalahan. Selanjutnya dapat dirumuskan alternatif rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kesimpulan

dapat bersifat sementara. Bila ditemukan bukti-bukti lain yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan tersebut dapat diubah. Namun bila kesimpulan tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka dapat dijadikan kesimpulan final yang kredibel.

Secara keseluruhan proses analisis data Miles dan Huberman tersebut di atas dirangkum oleh Putra (2011:204) dengan langkah-langkah berikut ini.

- 1) Seluruh catatan lapangan dibagi ke dalam paragraf atau kalimat.
- 2) Setelah dibagi ke dalam paragraf atau kalimat, diberi koding sesuai kategorinya.
- 3) Semua kategori catatan lapangan yang telah dikoding disatukan ke dalam suatu kategori.
- 4) Berbagai kategori ini dicari keterkaitannya untuk mendapatkan makna yang holistik.
- 5) Dibuat kesimpulan akhir.

3.9.2 Mengolah Data dengan Bantuan *Software NVivo 11*

Analisis Miles dan Huberman dilakukan secara elektronik dengan alat bantu NVivo. NVivo adalah sebuah program komputer untuk membantu analisis data kualitatif yang memungkinkan seseorang untuk meng-*import* dan mengode data tekstual, mengedit teks, mengambil, meninjau, dan mengode ulang data yang telah dikodekan, mencari kombinasi kata-kata dalam teks atau pola dalam pengodean, dan *import* atau *export* data dari atau ke perangkat lunak analisis kuantitatif lainnya. Keuntungan menggunakan NVivo adalah kemampuannya untuk membentuk cara melihat data (dari statis ke dinamis) dengan membuat hubungan antarkategori yang

lebih terlihat dalam format teks dan *hyperlink* kategori ke dokumen lain (Yuliansyah dkk., 2014:2).

Model interaktif 3 tahap analisis Miles dan Huberman diterapkan dalam *software* NVivo sebagai suatu kesatuan yang berlangsung terus menerus. Pada tahap reduksi, hasil transkrip wawancara dan dokumentasi diimpor ke dalam NVivo lalu direduksi dengan cara memilih hasil wawancara yang relevan dengan *nodes* yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tidak semua hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada setiap partisipan mengandung makna yang dicari dan relevan. Jika wawancara tersebut tidak penting, maka tidak dilakukan koding namun transkrip tersebut tetap berada dalam NVivo, untuk cadangan sewaktu-waktu ternyata diperlukan. Sebaliknya transkrip wawancara yang dianggap penting dan relevan dengan *nodes* akan dikoding ke dalam *nodes* masing-masing. Begitu seterusnya sampai peneliti mendapatkan makna yang holistik.

Pada tahap penyajian data, hasil koding yang terkumpul membentuk tema atau *nodes* yang telah direduksi disajikan dalam berbagai bentuk model seperti peta baik yang disebut peta literatur (bab 2) maupun peta analisis akhir (bab 4); diagram alir penelitian (bab 3); *matrix coding* (bab 2 dan 4); dan *framework matrix* (bab 4). Jadi semua model peta dan gambar dalam NVivo ini merupakan perwujudan penyajian data dalam Miles dan Huberman. Penyajian data dalam bentuk peta dan gambar berguna untuk mempermudah proses visualisasi ide, mengidentifikasi perubahan pola data, dan keterkaitan masing-masing *nodes* untuk

mengeksplorasi makna yang tersembunyi dibalikny dan mengelaborasinya menjadi narasi.

Pada tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan, *nodes* yang telah diakui sebagai proses akhir kondensasi koding, diverifikasi sekali lagi melalui tahapan pengujian keabsahan data. Jika data telah benar-benar valid lalu ditarik kesimpulan melalui pembuatan narasi. Semua hasil proses data dalam NVivo akan diekspor ke dalam word dan excel untuk membantu penyajian data dalam narasi. Narasi yang ditarik kesimpulannya, semua mewakili *nodes* yang telah terbentuk. Dengan dasar nodes ini peneliti mulai menuangkan ide dalam bab 4 pembahasan.

Untuk memperjelas analisis data dengan model Miles dan Huberman yang diolah menggunakan alat bantu *software* NVivo, Bandur (2016:165) menjelaskan tahapan analisis data dengan NVivo dengan 7 langkah yaitu 1) melakukan manajemen data; 2) melakukan analisis eksploratif; 3) membuat kategori konsep; 4) melakukan koding (*coding*) dan membuat *nodes*; 5) melakukan proses integrasi dan disintegrasi; 6) melakukan konstruksi tema-tema utama; dan 7) membuat laporan hasil analisis data. Penjelasan langkah-langkah tersebut seperti berikut ini.

3.9.2.1 Melakukan Manajemen Data

Yaitu menyimpan semua jenis data kualitatif dalam folder-folder yang dibuat dalam NVivo, misalnya folder tentang data transkrip wawancara, rekaman wawancara, foto, isi *website*, dan sebagainya (Bandur, 2016:165). Sebelum mengolah data di NVivo, peneliti terlebih dahulu mengimpor semua dokumen yang berbentuk *file* word dan pdf yang telah dikumpulkan pada tahap reviu literatur ke dalam NVivo.

Manajemen data dilakukan berdasarkan *source*, yaitu sumber internal dan eksternal. Dalam NVivo ini, data penelitian hanya berasal dari *source* internal. Peneliti memisahkan data yang berasal dari literatur revidu dengan data yang diperoleh dari instrumen penelitian. Data literatur revidu dipisahkan berdasarkan urutan bab pembahasan yaitu bab1 sampai dengan bab 4 dengan membuat folder masing-masing. Sementara untuk data dari instrumen penelitian dipisahkan berdasarkan instrumennya misalnya data dari hasil wawancara berdasarkan jenis SKPD per partisipan.

3.9.2.2 Melakukan Analisis Eksploratif

Yaitu mengeksplorasi masing-masing data untuk mendapatkan gambaran umum melalui teknik *skimming* yakni membaca topik-topik utama data untuk mendapatkan ide-ide utama; mengetahui ide-ide dan fakta-fakta yang muncul dalam berbagai data yang ada; memikirkan bagaimana data diorganisasikan; menentukan apakah data yang sudah ada cukup atau butuh data tambahan (Bandur, 2016:165).

Analisis eksploratif dilakukan dalam 2 tahap, sebelum turun lapangan yaitu pada tahap analisis data kajian pustaka dan pada saat di lapangan yaitu analisis data hasil wawancara di lapangan. Pada tahap analisis data kajian pustaka, peneliti membaca semua *file* teori yang ada dalam NVivo untuk mencari topik utama. Topik-topik tersebut disajikan melalui peta literatur untuk membangun pola pikir peneliti. Pada tahap analisis data hasil wawancara, peneliti menghubungkan-hubungkan antara setiap topik dari data kajian pustaka dengan topik dari hasil wawancara. Peneliti mencari kesamaan topik antara keduanya dan relevansinya dengan penerapan di Kabupaten Kulon Progo. Topik dari hasil wawancara sebagai patokan utama, jika

kedua topik berbeda maka topik pada kajian pustaka direduksi oleh peneliti dan diganti dengan topik yang sesuai berdasarkan topik hasil wawancara.

3.9.2.3 Membuat Kategori Konsep

Yaitu membuat kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan informasi yang terdapat dalam data. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan koding deskriptif dan *scanning*. Koding deskriptif adalah memberikan dekskripsi tentang kategori-kategori tersebut untuk membentuk tema-tema. *Scanning* adalah membaca teks atau sumber data lainnya secara lebih detil agar memperoleh pemahaman yang tepat (Bandur, 2016:165).

Setelah peneliti menentukan topik utama setiap hasil wawancara, maka langkah selanjutnya peneliti mengangkat topik tersebut menjadi tema. Untuk memudahkan mencari topik utama, peneliti menggunakan format transkrip wawancara dari NVivo. Format ini telah menyediakan topik-topik utama yang dipasang setelah wawancara dilakukan dan pada saat transkrip dibuat. Semua file transkrip hasil wawancara peneliti pisahkan sesuai topik utama. Jadi transkrip wawancara sudah terpasang topik-topik penting sehingga memudahkan peneliti untuk membacanya sebagai *nodes*.

Untuk membuat kategori tema yang nantinya akan menjadi *nodes*, peneliti tidak perlu lagi membaca ulang-ulang hasil transkrip tetapi cukup melihat topik utamanya. Namun sebelum membuat *nodes* tersebut, penentuan topik telah peneliti lakukan dengan ekstra cermat dengan cara semua hasil wawancara benar-benar

merepresentasikan topik utama yang dipilih. Dari sinilah tema dibangun dan di-*input* ke dalam NVivo sesuai dengan urutan rumusan masalah.

3.9.2.4 Melakukan Koding dan Membuat *Nodes*

Koding (*coding*) adalah proses mengisi *nodes* dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kategori-kategori konsep (*codes*) yang sudah terbentuk dalam sistem *nodes*. Informasi tersebut dapat bersumber dari transkrip wawancara, foto, dan bahkan rekaman video (Bandur, 2016:165). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, koding adalah representasi abstrak dari suatu objek atau fenomena, atau cara mengidentifikasi tema dalam suatu teks. Koding bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian sehingga informasi yang terkumpul tersebut akan membentuk kategori-kategori utama yang selanjutnya akan saling terhubung dan memunculkan konsep-konsep teoritis yang baru.

Dalam NVivo, *nodes* diibaratkan seperti sebuah kontener (*container*) tempat kita menyimpan semua kategori konsep yang dibuat berdasarkan data yang ada. Jadi membuat node berarti membuat kategori-kategori konsep serta sub-sub konsepnya berdasarkan informasi yang terdapat dalam data. Setelah *nodes* tersedia dalam NVivo, peneliti selanjutnya melakukan koding terhadap transkrip hasil wawancara. Agar tidak kehilangan momen dan waktu, pembuatan koding dilakukan bersamaan dengan pembuatan *nodes*. Jadi saat *nodes* telah terbentuk, saat itu juga peneliti mengkodekan transkrip yang sesuai ke dalam *nodes* yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak bekerja 2 kali berturut-turut karena mengingat

banyaknya transkrip yang harus dikoding. Pada tahap koding ini juga sering terjadi perubahan narasi *nodes* karena ditemukan banyak topik yang sama tetapi memiliki *nodes* lebih dari satu.

3.9.2.5 Melakukan Proses Integrasi dan Disintegrasi

Yaitu menyatukan semua *nodes* yang memiliki karakteristik informasi yang sama dan pada saat bersamaan mengeluarkan dari sistem *nodes* semua kategori yang kurang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Proses ini kalau dalam analisis Miles dan Huberman disebut reduksi data untuk menghasilkan tema-tema utama yang hendak dilaporkan peneliti (Bandur, 2016:165).

Ketika ditemukan banyak topik yang sama tetapi memiliki *nodes* lebih dari satu, maka peneliti melakukan disintegrasi. *Nodes* yang seharusnya jadi satu diintegrasikan dengan *nodes* yang lain berdasarkan kesamaan topiknya melalui menu *cut* dan *merged* dalam NVivo. Sementara *nodes* yang tidak relevan di-*delete* dari daftar *nodes* dalam NVivo. Tema-tema yang kurang relevan di-*uncode* kembali agar tidak muncul dalam peta analisis NVivo. Disinilah terjadi pengurangan *nodes* yang pertama kali.

3.9.2.6 Melakukan Konstruksi Tema-tema Utama

Yaitu proses membentuk tema-tema utama berdasarkan koding untuk selanjutnya membangun konsep-konsep atau bahkan teori-teori baru berdasarkan analisis data. Dalam tahap ini peneliti juga menyatukan temuan-temuan utama hasil analisis data (Bandur, 2016:165).

Setelah terjadi pengurangan nodes, peneliti membangun tema-tema utama dari nodes tersebut. Pada tahap ini masih terjadi pengurangan nodes setelah peneliti membaca kembali semua nodes yang terbentuk. Pengurangan terjadi ketika telah dikonstruksi ternyata temanya masih ada yang sama. Tema-tema utama dibangun dengan tujuan untuk persiapan pembuatan narasi sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah penelitian. Dalam NVivo semua nodes harus menjadi narasi, jadi jika ada 100 nodes maka 100 nodes tersebut harus menjadi narasi.

3.9.2.7 Membuat Laporan Hasil Analisis Data

Yaitu tahap akhir dalam analisis induktif data kualitatif untuk melaporkan tema tema utama yang muncul selama analisis data. Dalam tahap ini peneliti hanya melaporkan informasi yang didukung oleh banyak informasi yang detil, bukan tema-tema yang hanya didukung oleh informasi yang umum. Hasil akhir analisis NVivo akan disajikan dengan bentuk *queries*, model visualisasi, grafik-grafik, dan diagram-diagram (Bandur, 2016:165).

Setelah tema-tema utama terbentuk maka langkah selanjutnya adalah membuat narasi. Pada tahap ini juga masih terjadi pengurangan *nodes* lagi karena ketika dalam pembuatan narasi, isi dari *nodes* yang telah membentuk tema ternyata ada yang sama juga. Peneliti kemudian menyatukan nodes tersebut sehingga menjadi ramping. Pengurangan *nodes* dilakukan semata-mata karena *nodes*-nya memang banyak yang masih sama namun kalimatnya berbeda. Jadi pada tahap ini pengurangan *nodes* bukan bertujuan untuk menyederhanakan tema tetapi lebih merasionalkan narasi, agar penjelasan dalam bab pembahasan tidak berulang-ulang.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Pemaparan dalam bab ini merupakan hasil temuan penelitian yang terdiri 4 tema utama (*nodes*). Semua *nodes* dalam peta analisis yang telah terbentuk dengan bantuan NVivo telah dijabarkan menjadi tema dalam narasi laporan ini. Pada coding pertama kali, peneliti memperoleh lebih dari 200 tema (*nodes*) untuk 4 rumusan masalah yang dianalisis. Jumlah tema ini merupakan jumlah terbanyak dan peneliti mencoba mengecek kembali untuk mencari tema-tema yang ternyata sama. Pada tahap kedua peneliti menyatukan beberapa tema yang sama padahal hanya berbeda kalimat, sehingga jumlah tema berkurang menjadi di bawah 150 tema. Begitu seterusnya peneliti lakukan, sampai pada saat membuat narasi, masih ada jumlah tema yang dikurangi kembali karena adanya kesamaan makna. Sampai pada tahap akhir, peneliti berhasil memperoleh tema yang benar-benar cocok dan tidak mengambang yang jumlahnya telah dirasionalkan menjadi 92 tema masing-masing untuk RM1 sebanyak 33 tema, RM2 sebanyak 24 tema, RM3 sebanyak 20 tema, dan RM4 sebanyak 15 tema.

Pembahasan diawali dengan penjelasan profil singkat kabupaten Kulon Progo. Topik ini merupakan gambaran umum objek penelitian yang sangat relevan untuk disampaikan sebelum masuk pembahasan rumusan masalah terkait dengan pembahasan penelitian. Topik berikutnya merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian seperti yang sudah disusun dalam bab-bab sebelumnya yaitu 1) gambaran

umum APBD yang menjadi objek pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo; 2) mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo; 3) budaya kerja yang membentuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo; dan 4) perbaikan untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang.

Dalam topik pertama tentang gambaran umum APBD yang menjadi objek pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kulon Progo, dipaparkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran melalui penjelasan singkat masing-masing akun APBD dalam bentuk angka-angka, tabel, grafik dan ringkasan penjelasan setiap akun yang ada untuk tahun anggaran 2018 dengan mengambil anggaran tahun 2017 sebagai pembandingan. Pada topik kedua tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo, berturut-turut dibahas kegiatan utama yang membentuk transparansi dan akuntabilitas ditinjau dari 4 tahapan mekanismenya.

Dalam topik ketiga tentang budaya kerja yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, dibahas tentang unsur-unsur budaya yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo. Sementara untuk topik terakhir tentang perbaikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo, dibahas kekurangan dan kendala dalam

dan diberikan ulasan mengenai saran perbaikan yang peneliti tawarkan kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar di tahun mendatang agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini sudah terbangun dengan baik.

4.2 Profil Singkat Kabupaten Kulon Progo

Bagian ini membahas 6 subtopik utama tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil Kabupaten Kulon Progo. Pokok bahasan terdiri dari sekilas pembentukan Kabupaten Kulon Progo, gambaran umum pemerintahan, ringkasan visi misi pembangunan, riwayat singkat perekonomian, kondisi umum keuangan daerah, dan dan sederet prestasi pembangunan yang sudah dilaksanakan.

4.2.1 Sekilas Terbentuknya Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo adalah salah satu dari 5 kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang letaknya kurang lebih 35 km ke arah barat dari pusat Kota Yogyakarta. Kabupaten yang memiliki semboyan *binangun* berbentuk gunung ini, terletak di antara Bukit Menoreh dan Samudera Hindia yang dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai Bogowonto serta Sungai Glagah di bagian barat dan tengah. Kabupaten ini posisinya persis di tengah pulau jawa sehingga dijuluki *the jewel of java*, berada di antara 7°38'42" sampai dengan 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" sampai dengan 110°16'26" Bujur Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.623,512 hektar atau sekitar 586,28 km², dengan batas-batas administrasi wilayah yaitu di sebelah timur

berbatasan dengan sungai Progo yang memisahkan wilayah Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, sedangkan di sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Indonesia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018). Gambar 4.1 berikut ini adalah peta wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Diadopsi dari kulonprogokab.go.id, data per 31 Juli 2018.

Secara fisiografis, Kulon Progo terdiri dari dataran pantai di bagian selatan, di bagian tengah dan timur berupa topografi bergelombang sampai berbukit, dan di bagian barat serta utara berupa rangkaian perbukitan pegunungan yang dikenal sebagai perbukitan Menoreh. Sementara secara geografis/kewilayahan, Kabupaten Kulon Progo terletak pada jalur transportasi Jawa selatan yang terhubung dengan kota-kota di Jawa oleh jaringan transportasi.

Kabupaten Kulon Progo terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1951, pada awalnya merupakan penggabungan 2 wilayah yaitu wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan wilayah Kadipaten Pakualaman. Sebelum perang Diponegoro (1825-1830), wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dijadikan pusat pemerintahan yang dijalankan oleh pepatih dalem. Namun pada masa setelah perang Diponegoro, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibentuk menjadi 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Pengasih (1831), Kabupaten Sentolo (1831), Kabupaten Nanggulan (1851), dan Kabupaten Kalibawang (1855). Pada tahun 1912, keempat kabupaten tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota di Pengasih. Pada 16 Februari 1927, Kabupaten Kulon Progo dibagi lagi menjadi 2 Kawedanan yaitu Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kepanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh, dan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010).

Daerah selatan yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman, pada mulanya merupakan daerah yang terpisah-pisah yang masuk Keprajan Kejawen yang berada di sebelah barat Sungai Progo dan dikuasai oleh Pangeran Notokusumo. Pada tahun 1813, sentono ndalem Paku Alam menyatukan letak wilayahnya yang terpisah-pisah tersebut menjadi satu kesatuan setingkat kabupaten dan diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota di Brosot. Pada tahun 1877, Sri Paduka Paku Alam V mengganti nama Karang Kemuning menjadi Adikarta dengan beribukota di Bendungan. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan. Pada tahun 1903, ibukota Adikarta dipindahkan ke Wates (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010).

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sepakat melakukan penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarta. Atas dasar kesepakatan tersebut, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta

dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Kulon Progo (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010).

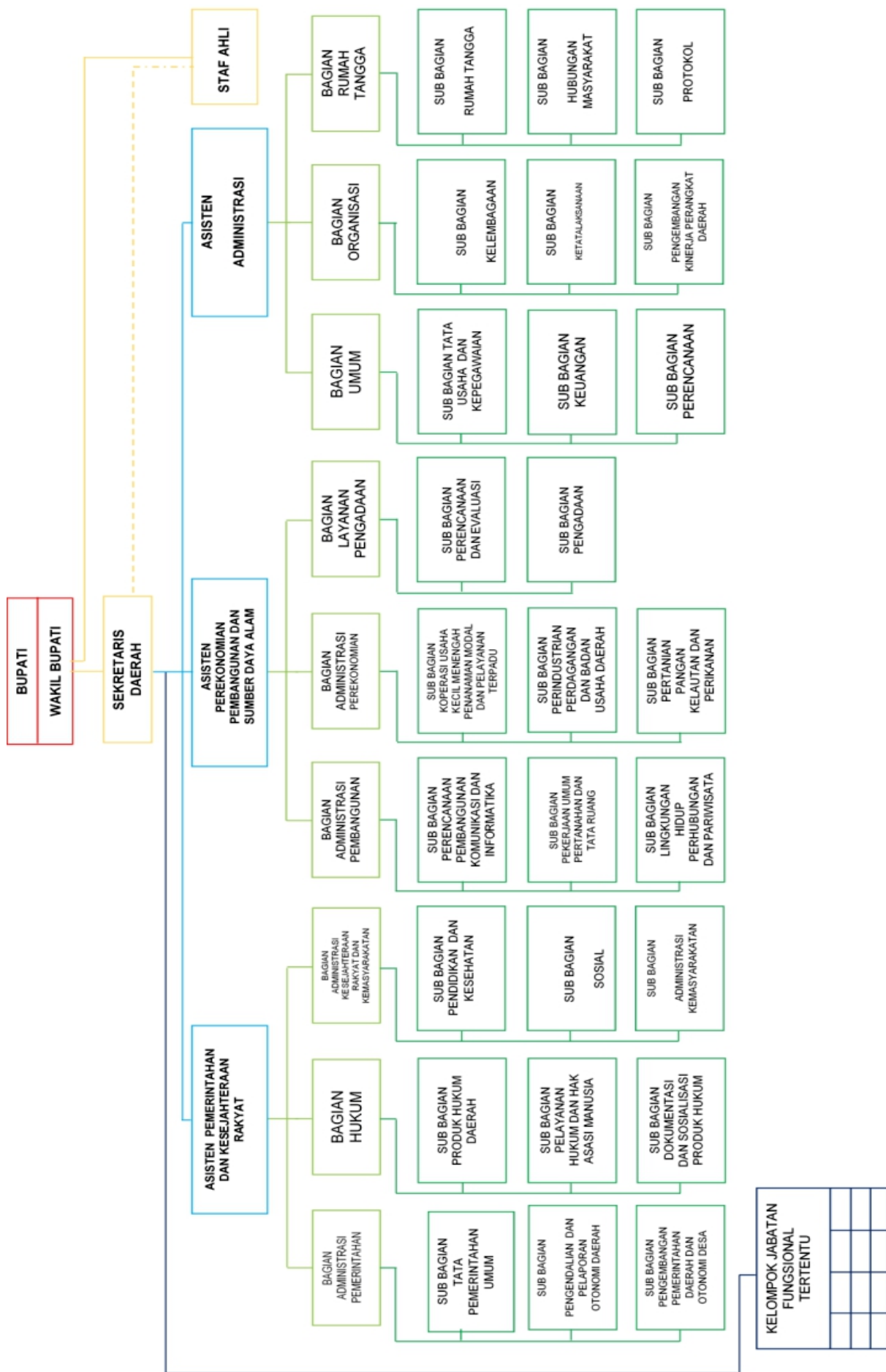
4.2.2 Gambaran Umum Pemerintahan

Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.862 RW dan 4.472 RT. Dua belas kecamatan tersebut adalah Girimulyo, Galur, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon, dan Wates. Ibukota atau pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wates (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018). Secara yuridis formal, pemerintahan mulai dijalankan sejak diberlakukannya Undang-undang UU No. 18 tahun 1951 pada tanggal 15 Oktober 1951. Tanggal ini merupakan hari jadi Kabupaten Kulon Progo. Sejak didirikan tahun 1951 sampai dengan memasuki usianya yang ke-67 pada Oktober 2018, Kulon Progo telah dipimpin oleh 25 orang Bupati (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010). Pada saat laporan penelitian ini di-*publish*, Kulon Progo dipimpin oleh pasangan Bupati Hasto Wardoyo bersama Wakil Bupati H. Sutedjo. Bagi sang Bupati yang berprofesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan ini, jabatan yang diemban sekarang merupakan jabatan periode kedua yang dimulai 2017-2022, setelah sebelumnya berkuasa sejak tahun 2011-2016 (kulonprogokab.go.id).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi perangkat daerah telah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 elemen,

yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/Fungsi Penunjang, dan Staf Pendukung. Kelima elemen ini sering disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah merupakan merupakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas daerah (Republik Indonesia, 2016).

Untuk memperkuat koordinasi, secara administrasi bupati dan wakil bupati dibantu oleh 5 orang staf ahli Bupati, masing-masing staf ahli bidang hukum dan politik, staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, dan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2016). Mulai tahun 2017 struktur pemerintahan Kabupaten Kulon Progo memiliki 39 OPD yang terdiri dari 2 sekretariat, 8 kantor, 4 badan, 12 dinas, 1 inspektorat, dan 12 kecamatan (kulonprogokab.go.id). Dalam menunjang fungsinya, Kulon Progo memiliki jumlah pegawai yang setiap tahunnya selalu menurun. Sejak tahun 2015 tercatat sebanyak 10.386 orang yang terdiri dari 7.889 orang PNS daerah dan 2.497 orang PNS pusat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2010). Gambar 4.2 berikut ini adalah struktur organisasi pemerintah kabupaten Kulon Progo.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Diadopsi dari Sekretariat Kab. Kulon Progo, Data per 31 Juli 2018 (setda.kulonprogokab.go.id)

4.2.3 Ringkasan Visi Misi Pembangunan Daerah

Visi dan misi yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih dan juga merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang pemerintah kabupaten Kulonprogo yang tercantum dalam RPJPD 2005-2025 adalah "*Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin*" (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007). Sementara visi pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 adalah "*Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tenteram, Berkarakter, dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa.*" (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017a).

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo, maka dalam RPJPD 2005-2025 dirumuskan 8 misi jangka panjang pembangunan yaitu (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007):

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila;
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu;

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari;
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri;
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional

Sementara dalam RPJMD tahun 2017-2022 juga dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah sebagai pejabaran dari misi dalam RPJPD sebagai berikut (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017a):

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

4.2.4 Riwayat Singkat Perekonomian Daerah

Kebijakan perekonomian Kabupaten Kulon Progo diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan andil pertumbuhan yang cukup besar dalam perekonomian yaitu sektor-sektor yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara langsung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tumbuh sebesar 4,64% atau mengalami percepatan dibanding tahun 2014 yang mencapai 4,46%. Masing-masing

kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif walaupun tidak ada lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan di atas 2 digit. Kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 8,09% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2016).

Berdasarkan proyeksi tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk sebanyak 421.295 jiwa yang terdiri atas 207.245 jiwa penduduk laki-laki dan 214.050 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2016, penduduk Kulon Progo mengalami pertumbuhan 1,11% per tahun. Kepadatan penduduk rata-rata 711 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Wates dengan kepadatan 1.514 jiwa/km² dan terendah di Samigaluh sebesar 381 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018). Dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 tersebut, maka nilai PDRB atas dasar harga berlaku lebih dari Rp9,06 triliun, sementara untuk Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB berdasarkan harga konstan adalah Rp6,97 triliun.

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sebesar Rp21,78 juta rupiah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018). Distribusi persentase PDRB ini masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 18.93%, disusul di urutan kedua sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,03%, dan di urutan ketiga ditempati sektor industri pengolahan dengan kontribusi 12,39%. Sektor usaha dengan kontribusi terkecil yakni sektor

pengadaan listrik dan gas dengan kontribusi sebesar 0,09% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Selama kurun waktu 2013 s/d 2017, laju inflasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 berada di kisaran 4,20% dan inflasi terendah tahun 2016 sebesar 2,29% (Badan Pusat Statistik, 2018). Walaupun perhitungan inflasi di Kulon Progo masih mengacu pada inflasi kota Yogyakarta, inflasi tersebut mengalami pertumbuhan yang rendah sebesar rata-rata -14,62% dengan penyumbang inflasi tertinggi tahun 2016 adalah bahan makanan sebesar 4,77% dan terendah disumbang oleh transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -2,06%. Jumlah inflasi ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dari tahun 2013-2016 yang sebesar 3,02% pada tahun yang sama. Hal ini kemudian menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada 2017 diprediksi sebesar 4,75% dan pada 2018 diproyeksi kembali naik menjadi 5% (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2018).

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2018 adalah pembangunan bandara baru *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon dan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo. Hal ini didukung juga oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai, kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif kondusif, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Dengan semangat *The Jewel of Java*, potensi pertumbuhan ekonomi tersebut terus dipacu sehingga memunculkan beberapa pembangunan Mega

Proyek di daerahnya misalnya Penambangan Pasir Besi, Pelabuhan Tanjung Adikarto, serta kawasan industri lainnya.

4.2.5 Sekilas Gambaran Keuangan Daerah

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksan Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LPKD tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini merupakan opini WTP yang ke-5 kalinya sejak tahun anggaran 2013. LKPD tersebut terdiri dari 7 laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Aliran Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam LRA tahun anggaran 2017, penerimaan daerah terrealisasi sebesar Rp1.440,88 milyar atau 98,91% dari target anggaran. Sementara pengeluaran daerah tercapai sebesar Rp1.341,23 milyar atau 94,92% dari target anggaran. Dari jumlah ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp59,39 milyar yang kemudian ditutup dari pembiayaan netto daerah. Sementara dalam Neraca daerah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki total aset sebesar Rp1.778,17 triliun. Jumlah total aset ini didominasi oleh aset tetap hampir lebih dari 85% atau sebesar Rp1.501,69 triliun. Dari sisi modal, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki ekuitas sebesar

Rp1.761,03 triliun dengan total utang sebesar Rp17,15 milyar atau sebesar 0,96% dari total asset (BPK Perwakilan Propinsi DIY, 2018).

Dari sisi aliran kas, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki aliran kas positif dari aktivitas operasi sebesar Rp243,82 milyar. Dari jumlah ini Kabupaten Kulon Progo memiliki aliran kas yang dominan dikuasai oleh aktivitas investasi karena aliran kas bebas negatif sebesar Rp258,16 milyar karena besarnya pengeluaran belanja modal yang mencapai Rp267,77 milyar sehingga menghasilkan sisa kas sebesar Rp54 milyar. Jumlah belanja modal ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang mencapai Rp639,21 milyar (BPK Perwakilan Propinsi DIY, 2018) dan ini menandakan prioritas pembangunan infrastuktur masih kurang optimal. Ringkasan laporan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2017 dapat dilihat dalam lampiran 5 di halaman 370.

4.2.6 Sederet Prestasi Pembangunan Daerah

Sejak tahun 2012-2018 di bawah kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo, pembangunan Kabupaten Kulon Progo mengalami kemajuan pesat dan menjadi salah satu daerah paling maju dan prestisius di Indonesia. Prestasi bupati yang menang telak 85,62% suara di pemilihan periode keduanya tahun 2017 itu dimulai dari adanya predikat bahwa Kulon Progo adalah kabupaten termiskin di propinsi DIY dengan jumlah angka kemiskinan mencapai 23,62% pada tahun 2011 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018). Kepala daerah jebolan UGM tersebut langsung melakukan 5 gerakan perubahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017a). Terdapat beberapa

prestasi yang sudah tercapai di beberapa bidang terutama 5 bidang-bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan (Kulonprogokab.go.id, 2018).

Dalam bidang UMKM, ada program Bela Beli Kulonprogo yaitu program ekonomi kerakyatan yang berisi semangat merebut pasar di daerah sendiri dengan cara menyenangkan, menggunakan, dan membeli produk-produk lokal yang dibuat sendiri oleh rakyat Kulon Progo. Program ini terdiri dari antara lain program memproduksi air minum kemasan dengan nama “AirKu” melalui PDAM Kulon Progo, program mewajibkan PNS dan pelajar di Kulon Progo untuk membeli dan memakai batik *geblek renteng* buatan rakyat Kulon Progo di hari-hari tertentu, program mewajibkan PNS membeli 10 kg beras setiap bulan dari petani Kulon Progo, program mewajibkan semua pemborong bangunan untuk membeli material buatan rakyat Kulon Progo, dan program kerja sama Alfamart/Indomart yang membuka usaha di Kulon Progo dengan koperasi Toko Milik Rakyat atau Tomira (Kulonprogokab.go.id, 2018).

Di bidang kesehatan diantaranya terdapat 2 program pembangunan prorakyat yaitu program Kawasan Tanpa Rokok yaitu kebijakan bebas asap rokok yang melarang beredarnya rokok dan iklan rokok di daerah Kulon Progo yang diatur melalui Peraturan Daerah. Walaupun dampak dari kebijakan ini membuat pendapatan dari pajak daerah menurun, tapi paling tidak kebijakan ini merupakan apresiasi moral yang membela hak kesehatan masyarakat. Satunya lagi adalah kebijakan bebas biaya berobat di RSUD Wates bagi seluruh rakyat Kulon Progo yang dikenal sebagai *universal coverage* yang dalam pembayarannya pemerintah daerah menanggung

biaya kesehatan setiap warganya sebesar Rp5 juta per orang. Selain bebas biaya juga setiap pasien tanpa pandang bulu diberikan layanan bebas kamar rawat inap tanpa dibedakan menurut kelas (Kulonprogokab.go.id, 2018).

Dalam bidang pertanian, ada program kebijakan mengganti Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Daerah (Rasda) yang sebelumnya dipasok sendiri oleh Bulog. Pemkab memfasilitasi pembentukan gapoktan (gabungan kelompok tani). Mereka juga dilatih untuk mengikuti berbagai pelatihan. Untuk melakukan pelatihan Pemkab kemudian membentuk Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB). Petani diajak tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, tetapi memproses dan mengemasnya menjadi beras. Mereka juga difasilitasi mesin giling dan bantuan permodalan serta pelatihan manajemen atau pengelolaan. Pemkab kemudian mengajak dan menjalin kerjasama dengan Bulog. Bulog membeli beras untuk raskin dari petani setempat atau gapoktan. Sedangkan dari sisi petani sendiri pendapatan juga meningkat. Beras produksi gapoktan ini dengan kemasan yang bagus juga sudah dijual di minimarket-minimarket di Kulon Progo (Kulonprogokab.go.id, 2018).

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pemda meluncurkan kebijakan unik yaitu bedah rumah tanpa menggunakan APBD maupun APBN dalam bentuk program *gentong rembes* (gotong royong rakyat bersatu). Sistem pelaksanaan program ini dilakukan setiap hari minggu dengan menggerakkan ibu-ibu PNS untuk mengumpulkan uang yang setiap bulannya bisa terkumpul sebanyak Rp250 juta. Penggunaannya untuk memperbaiki rumah warga yang rusak dengan mengalokasikannya setiap rumah Rp10 juta per pekan, sehingga setiap bulan ada 4

rumah yang berhasil dibangun. Sudah 4 tahun gerakan ini berjalan telah menghasilkan 3.050 rumah selesai dibangun (Kulonprogokab.go.id, 2018).

Dalam bidang pemerintahan, prestasi dapat dilihat dengan adanya berbagai inovasi seperti keterbukaan informasi, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, perizinan *online*, jemput bola, perizinan simultan atau penyederhanaan dengan satu berkas bisa keluar satu bahkan tiga izin sekaligus. Selain itu juga menyusun sistem informasi geografis, membuat desk investasi, bahkan kalau ada investasi skala besar langsung ditangani oleh tim. Pemkab Kulonprogo juga sudah punya Perda maupun Perbup tentang kemudahan dalam hal penanaman modal, yang mendapat nilai positif dari Lembaga Ombudsmen Daerah (LOD) khususnya terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Kulonprogokab.go.id, 2018).

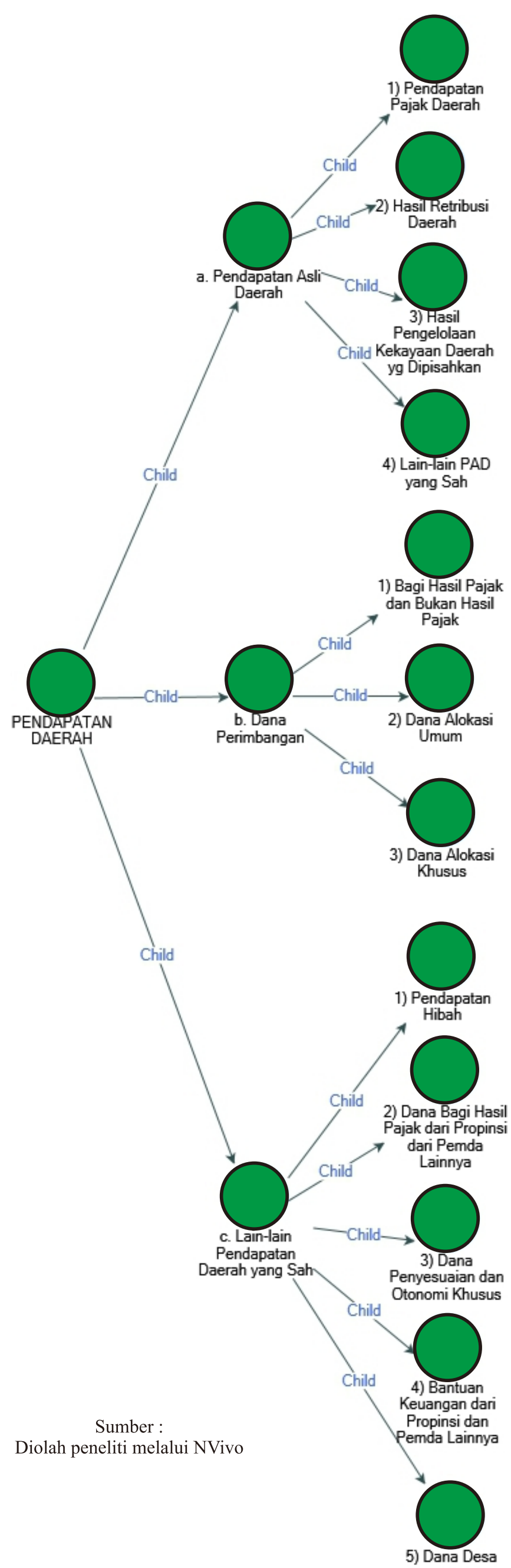
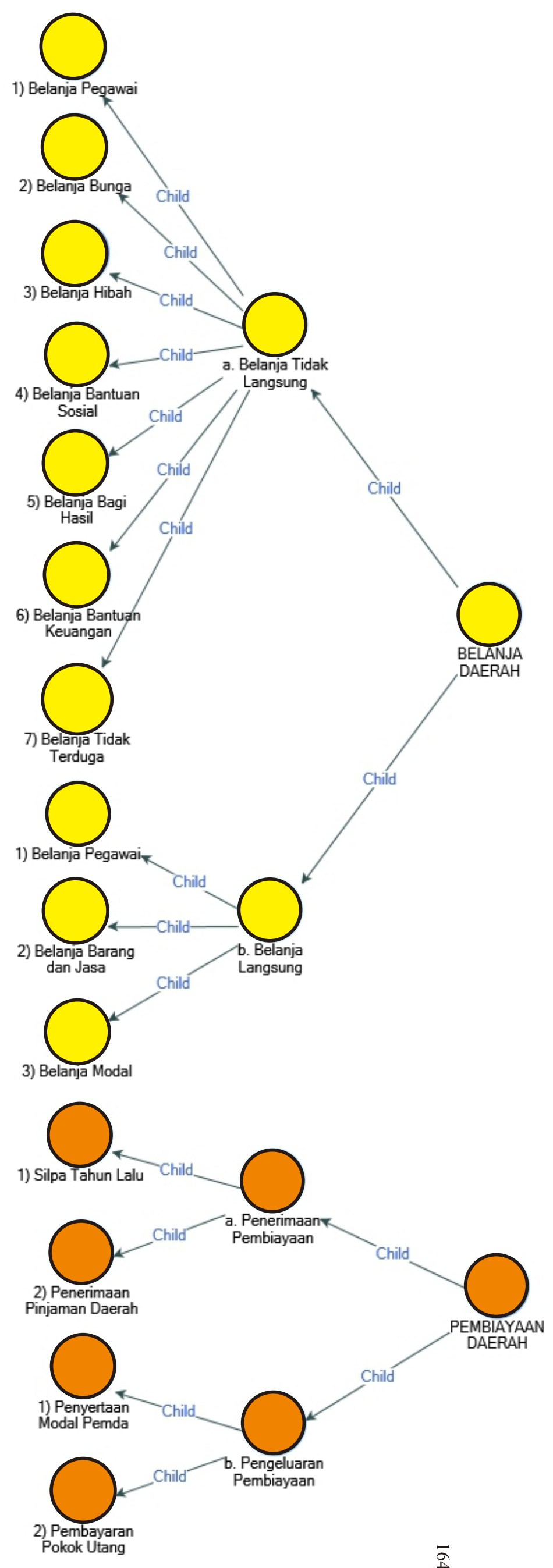
Keberhasilan seluruh program dan kebijakan pembangunan yang telah diterapkan di Kulon Progo bisa dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan Kulon Progo hingga 5,8% yaitu dari 21,54% pada tahun 2013 menjadi 16,74% pada tahun 2014. Dampak keberhasilan semua program prorakyat adalah diakuinya program kerakyatan ekonomi berdikari tersebut oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 12 Mei 2018. Selain itu lebih dari 70 penghargaan berskala nasional juga telah diraih oleh Bupati Kulon Progo (Kulonprogokab.go.id, 2018).

4.3 Gambaran Umum APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Dalam pembahasan topik ini, anggaran yang dibahas menggunakan APBD perubahan tahun anggaran 2017 dan APBD penetapan tahun anggaran 2018 (sebelum perubahan 2018). Gambaran umum APBD dipaparkan dalam bentuk postur APBD. Postur APBD adalah bentuk atau keadaan, susunan atau struktur dari akun-akun yang membentuk anggaran menjadi satu kesatuan yang memperlihatkan posisi keuangan daerah dan disajikan dalam angka-angka seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 (sebelum perubahan) dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017. Pembahasan berikut peneliti kutip dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 dan 2017a). Ringkasan APBD Tahun 2018 dan Perubahan APBD Tahun 2017 berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut dapat dilihat dalam lampiran 6 di halaman 381 dan 382.

Terdapat 3 akun besar yang membentuk struktur APBD Kabupaten Kulon Progo, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Postur yang terdiri dari tiga kesatuan akun ini memperlihatkan besarnya APBD Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2018 adalah Rp1.530,54 milyar. Jumlah dana sebesar

pendapatan daerah itu akan digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp1.533,28 milyar. Ini artinya terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp2,74 milyar yang akan ditutup dari sumber pembiayaan daerah. Ringkasan postur APBD tahun anggaran 2018 yang diperbandingkan dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 tersebut dapat dilihat dari peta yang telah diolah melalui NVivo seperti pada gambar 4.3. Dari peta tersebut setiap akun dalam APBD akan dijelaskan secara singkat 3 akun besar yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.



Sumber :
Diolah peneliti melalui NVivo

Gambar 4.3 Peta Analisis Akhir
Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018

Tabel 4.1 Ringkasan Postur APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 dan 2018

NAMA AKUN	ANGGARAN		NAIK (TURUN)		KOMPOSISI	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Jumlah	Persen	Tahun 2017	Tahun 2018
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 242.829.753.092	Rp 207.069.271.745	-Rp 35.760.481.347	-14,73%	16,85%	13,53%
Dana Perimbangan	Rp 967.937.059.000	Rp 993.976.585.000	Rp 26.039.526.000	2,69%	67,18%	64,94%
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 230.114.742.583	Rp 329.496.636.119	Rp 99.381.893.536	43,19%	15,97%	21,53%
Pendapatan Daerah	Rp1.440.881.554.675	Rp 1.530.542.492.864	Rp 89.660.938.189	6,22%	100,00%	100,00%
Belanja Tidak Langsung	Rp 847.339.962.070	Rp 828.097.598.749	-Rp 19.242.363.321	-2,27%	56,48%	54,01%
Belanja Langsung	Rp 652.932.799.317	Rp 705.190.894.115	Rp 52.258.094.798	8,00%	43,52%	45,99%
Belanja Daerah	Rp1.500.272.761.387	Rp 1.533.288.492.864	Rp 33.015.731.477	2,20%	100,00%	100,00%
Surplus (Defisit) APBD	-Rp 59.391.206.712	-Rp 2.746.000.000	Rp 56.645.206.712	-95,38%	4,12%	0,18%
Penerimaan Pembiayaan	Rp 69.122.706.712	Rp 13.000.000.000	-Rp 56.122.706.712	-81,19%	4,80%	0,85%
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 9.731.500.000	Rp 10.254.000.000	Rp 522.500.000	5,37%	0,68%	0,67%
Pembiayaan Daerah	Rp 59.391.206.712	Rp 2.746.000.000	-Rp 56.645.206.712	-95,38%	4,12%	0,18%
Silpa (Sikpa) APBD	-Rp 0	Rp -	Rp 0	-100,00%	104,12%	100,18%

Sumber: Diadaptasi dari Perda Kab.Kulon Progo No.11 dan No.13 Tahun 2017.

4.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah total keseluruhan penerimaan uang melalui rekening kas umum pemerintah kabupaten Kulon Progo yang menambah ekuitas dana, merupakan hak pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam satu tahun anggaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo (Republik Indonesia, 2010). Pendapatan daerah dalam APBD tahun ini dianggarkan sebesar Rp1.530,54 milyar. Jumlah pendapatan ini bersumber dari 3 akun yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2010). Dalam APBD tahun anggaran 2018, PAD dianggarkan sebesar Rp207,06 milyar atau turun 14,73% dibanding tahun anggaran 2017 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan oleh pemerintah pusat setiap tahun anggaran melalui transfer ke APBD dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, dan besaran pendanaannya. Dana ini muncul sebagai konsekuensi adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar-pemerintah daerah sendiri,

sehingga pemberiannya juga didasarkan atas pemberian tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas ekonomi dan keseimbangan fiskal (Republik Indonesia, 2010). Untuk tahun anggaran 2018, Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi dana perimbangan ini sebesar Rp993,98 milyar atau naik 2,69% dibanding tahun anggaran 2017 yang berjumlah Rp967,94 milyar. Dana ini terdiri dari 3 akun yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah akun yang disediakan khusus untuk menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Pada tahun anggaran 2018, Kabupaten Kulon Progo memperoleh penerimaan dari pendapatan ini sebesar Rp329,49 milyar dan pada tahun 2017 sebesar Rp230,11 milyar atau naik sebesar 43,19%. Pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari propinsi, dan dana desa.

4.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo (Republik Indonesia, 2010). Belanja daerah merupakan gambaran dari komitmen pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap pembangunan masyarakat sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Dalam tahun anggaran 2018,

Pemkab Kulon Progo menganggarkan belanja daerah sebesar Rp1.523,29 milyar atau sedikit naik 2,2% dari tahun anggaran 2017. Jenis belanja ini terdiri dari 2 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo (Republik Indonesia, 2010). Contoh belanja tidak langsung adalah pembayaran gaji pegawai negeri sipil di Kabuapten Kulon Progo. Pada tahun anggaran 2018, belanja ini diproyeksikan sebesar Rp828,09 milyar atau turun 2,2% dibanding tahun 2017. Belanja ini terdiri dari 7 item yang sebagian besar habis dianggarkan untuk membayar belanja pegawai yang diproyeksikan sebesar hampir 75% dari total belanja tidak langsung atau sama dengan 40,36% dari total belanja daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Republik Indonesia, 2010). Pada tahun anggaran 2018, belanja ini diproyeksikan sebesar Rp705,19 milyar atau mengalami kenaikan 8,0% dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017, belanja yang terdiri dari 3 item ini sebagian besar dialokasikan untuk membayar belanja barang dan jasa yang diproyeksikan sebesar 53% dari total belanja langsung. Berbanding terbalik dengan tahun 2017, pada anggaran tahun 2018, belanja ini didominasi oleh belanja modal dengan presentase sebesar hampir 52% dari total belanja langsung.

4.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu

dibayar atau diterima kembali yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2009). Hasil perhitungan anggaran Kabupaten Kulon Progo masing-masing pada tahun anggaran 2018 dan 2017 memperlihatkan angka yang defisit. Oleh karena itu angka yang defisit ini harus ditutup dengan pembiayaan netto. Jika terjadi defisit anggaran, maka defisit ini harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan, dan sebaliknya jika terjadi surplus anggaran, maka surplus ini harus ditutup dengan pengeluaran pembiayaan. Hasil perhitungan pembiayaan daerah sering disebut dengan Silpa jika terjadi surplus dan disebut Sikpa jika terjadi defisit atau sering juga disebut Silpa negatif.

Undang-undang mewajibkan hasil perhitungan Silpa/Sikpa harus menghasilkan angka nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan mula-mula harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Namun jika penerimaan pembiayaan itu masih melebihi untuk menutup defisit, maka kelebihan tersebut harus segera dimanfaatkan lagi melalui pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan muncul sebagai indikasi bahwa secara anggaran masih ada belanja yang belum bisa dibayarkan dengan pendapatan yang ada atau semua penerimaan dari pemerintah yang berupa pendapatan masih kurang untuk membiayai pengeluaran. Sementara pengeluaran pembiayaan muncul sebagai indikasi bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja.

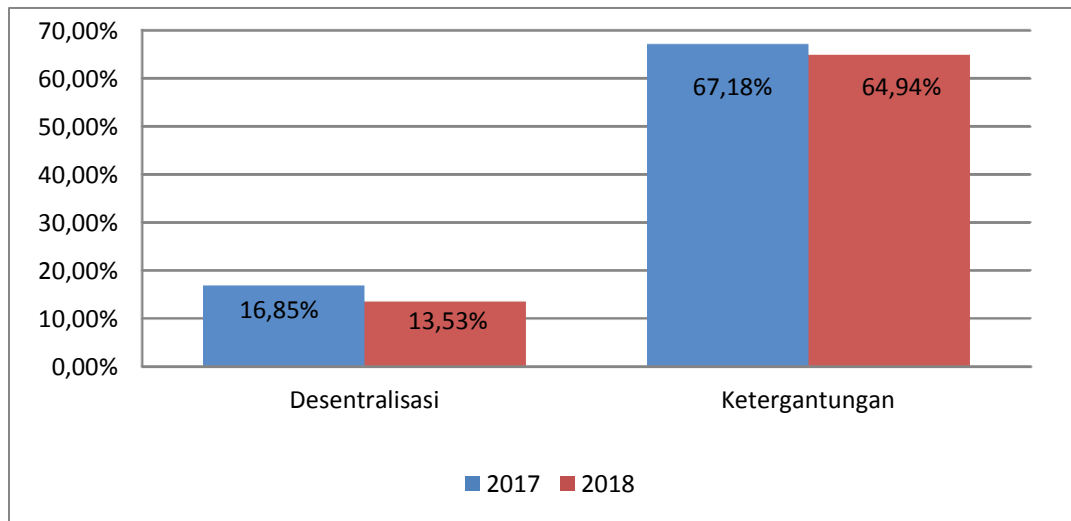
Pada tahun anggaran 2017, pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp59,39 milyar. Sementara pada tahun anggaran 2018 turun drastis 95,38% atau sebesar Rp2,75 milyar dibanding tahun anggaran sebelumnya. Angka ini sama dengan jumlah defisit yang terjadi. Jumlah pembiayaan tersebut terdiri dari dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014). Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan (Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2014).

Dari pemaparan semua akun-akun APBD di atas, untuk akun pendapatan daerah dapat dilihat dari indikator rasio derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan. Untuk akun belanja daerah, dapat dianalisis dari rasio belanja daerah. Sedangkan untuk akun surplus/defisit dan pembiayaan bisa dianalisis dari rasio pembiayaan daerah.

4.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan

Derajat desentralisasi adalah rasio yang dihitung melalui perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Sementara rasio

ketergantungan keuangan merupakan rasio yang dihitung melalui perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010:142) seperti yang diperlihatkan dalam gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4 Grafik Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Kulon Progo T.A 2017 dan 2018

Sumber: Diadaptasi dari Perda Kab.Kulon Progo No.11 dan No.13 Tahun 2017.

Menurut rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan, APBD Kabupaten Kulon Progo sangatlah kurang ideal. Dari gambar 4.4 dapat ditentukan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2018 hanya sebesar 13,53%, lebih rendah atau mengalami penurunan dibanding tahun 2017 sebesar 16,85%. Ini artinya bahwa kemampuan penyelenggaraan autonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih sangat rendah. Kewenangan untuk mengelola fungsi-fungsi pelayanan publik yang berasal dari potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang dipercayakan oleh pemerintah pusat belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

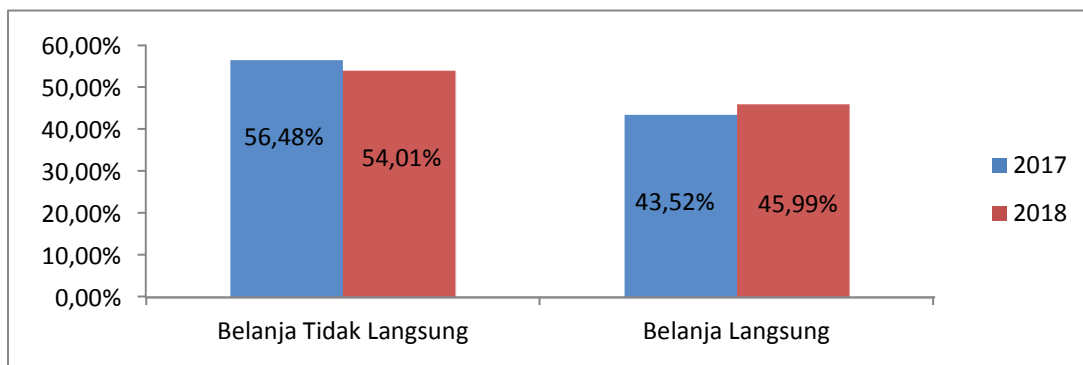
Akibat kecilnya derajat desentralisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak akan mampu mengurangi persoalan pemerintahan akibat meningkatnya jumlah unit-unit pemerintahan dan fungsi spesialisasi yang dibutuhkan sehingga mengurangi kemampuan pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam memenuhi permintaan publik. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan diselenggarakan secara sentralisasi. Semakin berkembang organisasi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk memberikan pelayanan. Walaupun tanggungjawab akhir segala persoalan ada pada pemerintah pusat, besarnya kebebasan untuk berinisiatif dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat masih 86,47% dikontrol oleh pemerintah pusat.

Dari rasio ketergantungan keuangan, dapat diketahui bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo untuk tahun anggaran 2018 masih sangat tinggi yaitu 64,94%, lebih baik jika dibanding tahun 2017 yang lebih tinggi lagi yaitu sebesar 67,18%. Ini artinya bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih kurang optimal dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau dengan kata lain hanya 35,06% potensi pendapatan daerah yang dapat digali dan diberdayakan menjadi pendapatan daerah. Dalam konteks era autonomi daerah, memang logis kalau dana perimbangan keuangan sudah sewajarnya menjadi hak setiap pemerintah daerah, tetapi ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat sebenarnya sangat

merugikan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Salah satu alasannya adalah pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menjadi lupa diri terhadap kemampuan dan potensi daerahnya sendiri.

4.3.5 Rasio Belanja Daerah

Berdasarkan rasio belanja daerah, APBD juga memperlihatkan komposisi yang kurang ideal. Membandingkan porsi antara kedua jenis belanja itu terlihat anggaran belanja langsung lebih kecil dari anggaran belanja tidak langsung seperti pada gambar 4.5 berikut ini.



Gambar 4.5 Grafik Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Pendapatan Kabupaten Kulon Progo T.A 2017 dan 2018

Sumber: Diadaptasi dari Perda Kab.Kulon Progo No.11 dan No.13 Tahun 2017

Dari gambar 4.5 mengindikasikan bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten Kulon Progo ini masih terlihat lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Porsi belanja tidak langsung sebesar 54,01% pada tahun anggaran 2018 mengartikan bahwa mayoritas dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat akan banyak terserap untuk belanja tidak langsung. Sementara porsi belanja langsung yang hanya sebesar

45,99% pada tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo pada kenyatannya nanti belum akan terakomodir semuanya dengan baik.

4.3.6 Analisis Pembiayaan Daerah

APBD memperhitungkan defisit berturut-turut tahun anggaran 2017 sebesar Rp59,39 milyar dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,746 milyar. Jumlah surplus ini sebenarnya bukan menunjukkan adanya penghematan tapi karena adanya kesenjangan anggaran atau disebut *budget slack*. Secara eksplisit memang tidak bisa dibuktikan. Tetapi secara implisit bisa dijelaskan bahwa terdapat 2 penyebabnya yaitu dipengaruhi oleh kemampuan pemkab Kulon Progo dalam mengestimasi pendapatan dan kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Penyebab pertama yaitu dari sisi estimasi pendapatan, berdasarkan realisasi pendapatan asli daerah sejak tahun anggaran 2016 dan 2017 dalam LKPD Pemkab Kulon Progo Tahun 2017, bisa dilihat bahwa secara umum hampir semua target PAD bisa tercapai yaitu 103% untuk 2017 dibanding tahun 2016. Namun pada anggaran tahun 2018 target pendapatannya diturunkan atau dengan angka dari Rp242,8 milyar untuk 2017 (angka setelah perubahan) menjadi Rp207,06 milyar untuk 2018 (angka sebelum perubahan). Ini mengindikasikan bahwa potensi pendapatan sebenarnya lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Di sinilah terjadi *budget slack* untuk anggaran pendapatan.

Penyebab kedua yaitu dari sisi estimasi belanja, berdasarkan realisasi belanja daerah sejak tahun anggaran 2016 dan 2017 dalam LKPD Pemkab Kulon Progo Tahun 2017, bisa dilihat bahwa secara umum hampir semua target belanja tidak terrealisasi atau hanya mencapai 95% untuk 2017 dibanding tahun 2016. Namun pada anggaran tahun 2018 target belanja daerahnya justru dinaikkan atau dengan angka dari Rp1.341,23 milyar untuk 2017 (angka setelah perubahan) menjadi Rp1.533,29 milyar untuk 2018 (angka sebelum perubahan). Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan belanja sebenarnya kecil dari jumlah yang dianggarkan. Di sinilah terjadi *budget slack* untuk anggaran belanja.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kulon Progo untuk tahun anggaran 2018 adalah sehat. Namun jika dilihat secara detil dari total pendapatan, penerimaannya masih kurang optimal dan jika dilihat dari total belanja, pengeluarannya juga masih termasuk kategori ideal walaupun masih terdapat *budget slack* dari sisi penganggarannya.

4.4 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan yang *rigid* dan wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah karena telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sudah berbentuk aturan turunan dan mekanisme ini sudah menjadi pengetahuan publik. Oleh

karena itu peneliti tidak akan membahas mekanisme umum ini karena mekanisme ini pasti sama di semua pemerintah daerah dan yang membedakannya hanyalah budaya kerja dan dimensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Pembahasan mekanisme pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada teori *knowledge conversion*. Pada bagian ini dibahas tentang pengetahuan eksplisit (*explicit knowledge*) yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pembahasan ini transparansi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu dalam uraian berikut tidak dipisahkan antara transparansi dan akuntabilitas dan masing-masing tidak dibuatkan penjelasan tersendiri.

Terdapat 3 komponen pengetahuan *explicit knowledge*, yaitu 1) database; 2) manual yang terdiri dari buku, dokumen, laporan, panduan, peraturan, serta sistem dan prosedur; dan 3) kajian ilmiah, kebijakan, dan program komputer. Setiap komponen pengetahuan *explicit knowledge*, terbagi lagi ke dalam kegiatan transparansi dan akuntabilitas menurut 4 tahapan, yaitu mekanisme perencanaan, mekanisme pelaksanaan, mekanisme penatausahaan, dan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

4.4.1 Mekanisme Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel

Mekanisme perencanaan adalah tahapan awal pengelolaan keuangan daerah dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Visi Misi Bupati, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

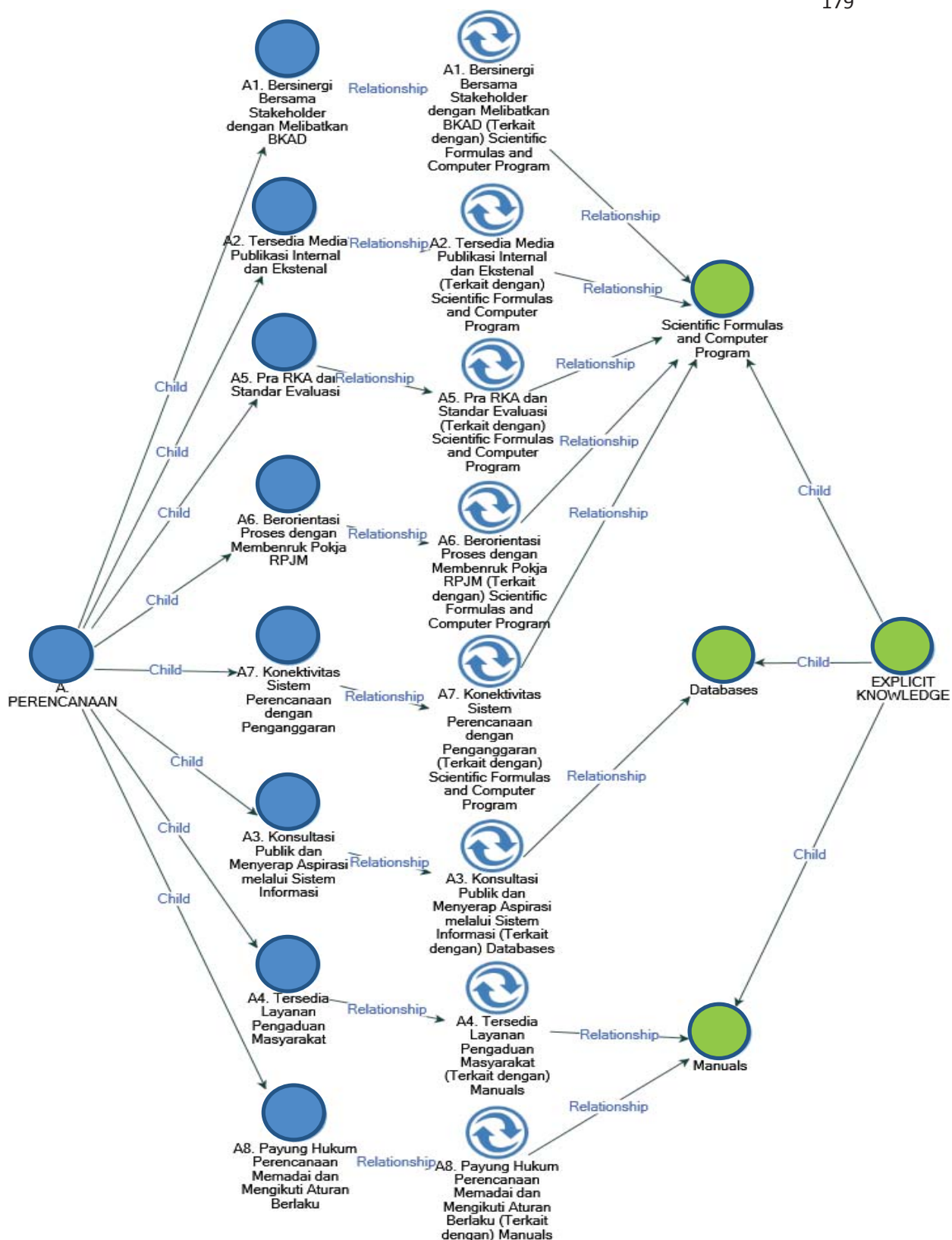
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Bappeda memiliki peran dalam membuat kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dari sisi konsepnya. Sedangkan BKAD berperan mencari sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan untuk membiayai pengeluaran pembangunan dalam bentuk belanja untuk setiap prioritas pembangunan yang telah disetujui bersama.

Dalam mekanisme perencanaan ini ditemukan 8 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dimasukkan ke dalam 3 komponen pengetahuan *explicit knowldege* berikut ini.

- a. Komponen manual terdiri dari 2 kegiatan, yaitu menyediakan payung hukum perencanaan yang memadai dan mengikuti aturan berlaku dan menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- b. Komponen database terdiri dari 1 kegiatan, yaitu konsultasi publik dan menyerap aspirasi melalui sistem informasi perencanaan.
- c. Komponen kajian ilmiah, kebijakan, dan program komputer terdiri dari 5 kegiatan, yaitu bersinergi bersama *stakeholder* dengan melibatkan BKAD; menyediakan media publikasi internal dan eksternal; pra-RKA dan standar

evaluasi; berorientasi proses dengan membentuk Pokja RPJMD, dan konektivitas sistem perencanaan dan penganggaran.

Keterkaitan masing-masing komponen pengetahuan *explicit knowledge* dengan kegiatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan tersebut berturut-turut diperlihatkan dalam peta analisis yang diolah dengan NVivo dan dijelaskan satu per satu melalui gambar 4.6 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.6 ini, disajikan *matrix coding*-nya pada lampiran 7 di halaman 383.



Gambar 4.6 Peta Analisis Akhir
Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan
Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.4.1.1 Bersinergi Bersama Stakeholder dengan Melibatkan BKAD

Kegiatan ini banyak berisi kebijakan tertulis yang sifatnya sukarela berupa edaran pimpinan untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti undangan rapat dan perintah berkoordinasi. Dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan menyusun strategi perencanaan berada di tangan Bappeda. Namun tugas tersebut secara sukarela dibagi dengan BKAD dan pihak-pihak terkait serta tidak dilakukannya sendiri oleh Bappeda.

Secara umum proses perencanaan di setiap pemerintah daerah, seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Forum yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat tersebut kurang mendapat perhatian, karena sebagian besar pengelola keuangan di daerah dan pihak berkepentingan lebih tertarik pada tahap penganggaran. Perencanaan dianggap hanya sebagai alat untuk memancing datangnya uang sehingga yang menjadi daya tariknya justru berada pada tahap penganggaran yaitu pembahasan dan perhitungan angka-angka. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang di tahap penganggaran yang seringkali bertele-tele dan bersifat transaksional karena lahirnya kepentingan politik.

Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, sudah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan perencanaan keuangan bahwa dalam melakukan perencanaan mereka membagi tanggungjawab dengan pihak lain yang terkait dan tidak hanya menjadi tugas pokok SKPD di bidang perencanaan pembangunan saja. Strategi pertama yang dilakukan adalah mengundang semua *stakeholder* yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah untuk mengikuti musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang). Pihak-pihak yang dilibatkan tidak hanya dari instansi pemerintah semata tapi juga melibatkan LSM, organisasi masa, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sebagainya. Kata Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda:

“...Prosesnya juga kita..kita lakukan misalnya musrenbang kan kita juga menghadirkan semua stakeholder yang apa..yang berperan di kegiatan, jadi tidak hanya instansi pemerintah tapi ada juga LSM, kemudian eeh organisasi ormas, organisasi massa, organisasi keagamaan, itu juga kita undang semua.” (Wijayanti, 2018)

Banyak pemerintah daerah yang melaksanakan perencanaan pembangunan ditangani sendiri oleh Bappeda. Sebaliknya, sangat sedikit pemerintah daerah yang mengikutsertakan BKAD ketika menyusun proyek perencanaan, hal ini disebabkan karena ego sektoral masing-masing yang telah melekat di setiap organisasi dan pejabatnya. Bappeda merupakan SKPD dengan posisi yang strategis. Kewenangan besar dalam mengelola strategi dan kebijakan pembangunan seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pemerintah daerah melalui oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Ketika proyek mulai didesain sedemikian rupa sebenarnya sudah terjadi korupsi pada tahap pembentukan ide perencanaan ini. Hal itu biasanya terjadi di pemerintah daerah yang sangat tidak transparan, sehingga melahirkan praktik perencanaan yang tidak sehat. Baru di tahap perencanaan saja sudah dikorupsi apalagi kalau proyeknya sudah dilaksanakan.

Di Kabupaten Kulon Progo, Bappeda dan BKAD merupakan 2 Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan

perencanaan pembangunan. Walaupun sebagian besar kebijakan perencanaan baru bersifat ide dan strategi sehingga tidak terlalu menekankan pada angka-angka keuangan, tapi BKAD tetap dilibatkan dalam penyusunan konsep kebijakan pembangunan. Ini merupakan strategi kedua yaitu melibatkan BKAD dalam setiap proses perencanaan, seperti kata Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda:

“He’e, dari Forum OPD ini sudah terlibat. Jadi, kami memang bersinergi istilahnya. Bappeda dan BKAD bekerja sama di sini mengawal semuanya sampai APBD.” (Cahyani, 2018)

Untuk apa sebenarnya BKAD dilibatkan? Bukankah menurut tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), BKAD hanya terlibat pada saat pembahasan APBD saja? Kebanyakan di pemerintah daerah, setelah strategi dan prioritas perencanaan pembangunan selesai disusun, konsep akhir perencanaan yang berbentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tinggal diserahkan saja kepada BKAD untuk diberi angka-angka. Tidak begitu yang dilakukan di Kulon Progo. Adanya koordinasi untuk mengetahui kemampuan daerah dari sisi finansial sebagai alasan utama perlu dilibatkannya OPD yang mengetahui banyak tentang keuangan daerah ini. Koordinasi dilakukan hampir pada semua bidang di BKAD terutama bidang anggaran, bidang pendapatan, bidang pajak, dan bidang perbendaharaan. Lebih lanjut Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda mengatakan:

“Nyusun RKPD dan KUA. Jadi, yang BKAD ini kan timnya dari bidang anggaran terus bidang pendapatan. Pendapatan sama pajak terus bidang Perbend, Ini semua terlibat.” (Cahyani, 2018)

4.4.1.2 Tersedia Media Publikasi Internal dan Eksternal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mempublikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan, banyak dilakukan melalui aplikasi baik yang dibuat sendiri (internal) maupun menggunakan aplikasi buatan pihak luar (eksternal). Salah satu bentuk transparansi yang paling esensial dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban mempublikasikan *output* atau hasil-hasil pengelolaan keuangan baik berupa program dan kebijakan maupun realisasi keuangannya. Bagi sebagian besar pemerintah daerah, masih ada yang meyakini bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak bisa diumumkan ke publik karena menyangkut rahasia negara, sehingga tidak sedikit pun pemerintah daerah sangat pelit dan sensitif ketika publik ingin mengetahui strategi dan jumlah pengelolaan keuangan yang belum dan sudah mereka rencanakan dan realisasikan.

Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan beberapa sistem informasi keterbukaan publik yang telah mengantarkan mereka sebagai kabupaten paling transparan di Indonesia. Tidak hanya terpusat dan terbatas secara domain berupa *website* kabupaten saja, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki *website* yang berfungsi sebagai media publikasi eksternal di *sub-domain* setiap SKPD dan malah menawarkan cara-cara yang sifatnya manual juga. Semua strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan di-*upload* di media ini baik itu berupa ringkasan RPJMD di

tingkat kabupaten maupun ringkasan Renstra di tingkat SKPD, kata Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda.

“Kita share di sub-domain, jadi tiap SKPD itu kan punya sub-domain. Sub-domainnya di eee SKPD, SKPD-nya dot, kulonprogokab.go.id. Nah, nanti di share di situ...He'e, he'e, he'e, iya memang seperti itu(tertawa). Memang kayaknya eee, tidak ada kewajiban di keputusan apa atau di aturan apa. Cuma, cuma fungsi ini saja keterbukaaan informasi saja.” (Puspitasari, 2018a)

Memang tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan semua hasil-hasil pembangunan. Beberapa peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat mewajibkan adanya publikasi setiap informasi namun justru yang sering kita temukan informasi tersebut masih bersifat umum dan tidak rinci. Semua itu tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasinya. Jika kita mencari dokumen Renstra SKPD suatu pemerintah daerah, misalnya dan meminta secara langsung, masih banyak kesulitan yang kita temukan bahkan tidak ada data yang bisa kita cari lewat internet. Tetapi jika kita mencarinya di Kabupaten Kulon Progo, mereka telah menyiapkan sistem informasi berupa aplikasi atau *software* perencanaan yang berfungsi sebagai media publikasi internal yang komprehensif baik yang masih berupa usulan maupun telah berbentuk strategi final. Hal ini dikatakan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda.

“...kita ada itu sih, kita kan pakai sistem ya, aplikasi e-planning ya. Kan ada usulan dari masyarakat, kemudian dari usulan dewan, kemudian ada usulan OPD sendiri to, ada di keterangannya ada di misalnya kegiatan A, itu sasarannya berapa, kemudian ada keterangan usulan siapa.” (Syakiri, 2018a)

Selain *website* dan aplikasi *e-planning* yang telah dimiliki sekarang, Pemda Kulon Progo juga masih menyediakan aplikasi internal khusus untuk menjangkau aspirasi di tingkat akar rumput. Aplikasi itu diberi nama “RencanaKu” yang semua saran, masukan dan usulan dari masyarakat di tampung lewat aplikasi ini. Aplikasi ini milik pemerintah daerah dan dikelola oleh Bappeda. Hanya setiap warga Kulon Progo saja yang dapat mengakses aplikasi ini. Pengoperasiannya pun mudah, hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga. Strategi penjangkauannya juga sangat beragam, baik itu melalui musrenbang tingkat desa sampai ke musrenbang tingkat kabupaten atau propinsi, kata Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan.

“SIM, Sistem Perencanaanya kami ‘RencanaKu’, Rencana Kulon Progo. Di kami ada, usulan masyarakat itu di aplikasi ‘RencanaKu’. Itu ada memang ada usulan masyarakat. He’e, Rencana, ‘RencanaKu’ gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.” (Cahyani, 2018)

4.4.1.3 Konsultasi Publik dan Menyerap Aspirasi melalui Sistem Informasi Perencanaan

Kegiatan ini banyak berisi *database* dari hasil olah data melalui sistem informasi perencanaan. Banyak data tentang perencanaan yang berhasil dihimpun dari sistem informasi ini yang berupa aspirasi rakyat dan hasil konsultasi publik dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang perencanaan. Data tersebut kemudian disimpan dalam bank data yang dikelola oleh Bappeda.

Keterbukaan informasi tidak hanya bisa dilihat di tingkat eksekutif atau lingkup pemerintahan Kabupaten Kulon Progo saja, tetapi diterapkan juga di tingkat legislatif. Pada level legislatif, disediakan aplikasi “AspirasiKu” yang fungsinya hampir sama dengan aplikasi “RencanaKu” yaitu menyerap aspirasi rakyat di tingkat konstituen masing-masing legislator. Perbedaannya hanya terletak pada tim pengelolanya saja. “AspirasiKu” dikelola langsung oleh pihak DPRD Kabupaten Kulon Progo, seperti kata Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda.

“...kemudian di DPRD itu sudah membuat sistem aplikasi namanya “AspirasiKu”. Nah itu semua yang warga masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau mungkin keluhan gitu, bisa lewat “AspirasiKu” itu.” (Wijayanti, 2018)

Setelah semua aspirasi terserap dan diinput ke dalam sistem informasi yang kemudian menjadi rancangan awal, selanjutnya Bappeda melakukan konsultasi publik. Konsultasi dilakukan melalui forum dengan mengundang para ahli, akademisi, perwakilan ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meminta masukan dan saran atas rancangan perencanaan pembangunan. Tidak hanya berhenti disitu, walaupun sudah dilakukan konsultasi publik, hasilnya masih digodok lagi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten Kulon Progo. Hasil musrenbang pun masih harus dikonsultasikan lagi ke Bupati dan Gubernur. Setelah itu dibahas dan dimatangkan lagi di tingkat forum perangkat daerah. Sistem konsultasi publik yang berlapis-lapis ini dilakukan dengan tujuan biar masyarakat juga mengetahui apa yang dibangun dan

direncanakan oleh pemerintah daerah selama ini, sehingga mendapatkan hasil perencanaan yang berkualitas dan memiliki prioritas dan bukan hanya dilakukan asal jadi saja dengan selalu memperhatikan aspirasi dari tingkat bawah. Pernyataan itu dikemukakan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda.

“Setelah rancangan awal, biasanya kita konsultasi publik dulu, kalau RPJPD ya. Setelah konsultasi publik baru kita musrenbang-kan. Ada musrenbang juga. Setelah itu kita paparkan ke Bupati dulu. Ada masukan-masukannya dari ahli, staf ahli, dari OPD-OPD yang lain. Kemudian kita juga minta fasilitasi dari Pemda DIY memperbaiki rancangan sebelum kita tetapkan menjadi RPJMD. Langkah-langkahnya seperti itu.” (Syakiri, 2018a)

Setiap warga Kulon Progo berhak memberi usulan dan rencana pembangunan di wilayahnya masing-masing. Masyarakat Kulon Progo terwakili aspirasinya melalui dua pilihan yaitu bisa langsung melalui aplikasi perencanaan dan juga bisa melalui wadah atau forum musyawarah pembangunan di masing-masing daerahnya. Lalu bagaimana masyarakat Kulon Progo mengetahui kalau aspirasinya diterima? Lebih lanjut Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda menjelaskan:

“Itu kita serahkan ke OPD karena sudah jadi kegiatan OPD. Yang disetujui mana saja, nah nanti OPD yang menginformasikan ke masing-masing. Itu RKPD juga kita publish. Di website kan juga di-publish. Nah mereka bisa melihat dari situ.” (Syakiri, 2018a)

Hasil penjaringan aspirasi yang telah dimatangkan berulang kali biasanya menghasilkan beberapa perencanaan yang disepakati sebagai prioritas utama. Masyarakat bisa memantau usulannya tersebut langsung di aplikasi eksternal seperti *website* dan aplikasi internal seperti “AspirasiKu” dan “RencanaKu”. Untuk usulan yang tidak menjadi prioritas diberikan catatan tersendiri di kedua aplikasi tersebut.

Usulan program dan kegiatan yang belum ter-*cover* pada tahun berjalan akan dimasukkan lagi pada tahun berikutnya, begitu seterusnya. Bisa jadi ditunda atau diganti dengan beberapa bentuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

4.4.1.4 Tersedia Layanan Pengaduan Masyarakat

Banyak pemerintah daerah memberikan sistem layanan pengaduan seperti kotak saran atau layanan SMS sampai kepada sistem *online* di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah daerah masing-masing. Pelayanan seperti itu sebenarnya biasa-biasa saja karena pada hakikatnya sistem pengaduan tersebut kurang mendapat tanggapan yang baik oleh masyarakat. Masyarakat tidak terlalu antusias karena tanggapan dan penyelesaian kasus dengan cara itu, penanganannya terlambat bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Walaupun hal itu diperintahkan oleh undang-undang, namun belum mampu mendorong pemerintah daerah lainnya untuk mencari alternatif dan solusi pengaduan masyarakat yang efektif.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga tidak serta-merta diterima atau memuaskan setiap orang. Sekalipun pembangunan itu dimulai dari awal seperti perencanaan sampai kepada pengawasan, tetap saja mendapat kritikan. Namun demikian, Bupati Kulon Progo menaruh perhatian besar kepada setiap orang yang ingin memberikan saran dan kritik terhadap hasil kerja pemerintahannya. Bahkan Bupati sendiri yang langsung memimpin pengelolaan pengaduan masyarakat. Sistem pengaduan yang paling banyak menyedot perhatian dan menarik minat masyarakat adalah “Forum Kamisan” dan “Bupati

Menyapa.” Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda menjelaskan berturut-turut kedua sistem pengaduan ini.

“...ada juga setiap hari kamis pagi, itu kan Bupati kan ada forum, namanya Forum Kamisan, itu beliau menyediakan waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 10, menerima warga masyarakat. Bupati atau wakil bupati, hari kamis pagi.” (Wijayanti, 2018)

Forum kamisan merupakan forum serap aspirasi dan pengaduan warga secara tatap muka dengan Bupati Kulon Progo tentang apa saja yang menjadi aduan, saran, kritik, dan usulan pembangunan daerah, bahkan permasalahan-permasalahan pribadi warga. Acara ini dilaksanakan setiap hari kamis pagi dimulai pukul 06.30 sampai dengan maksimal pukul 10.00 WIB. Setiap aspirasi dan keluhan warga dicatat untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan dimasukkan dalam strategi perencanaan pembangunan daerah.

“...Nah nanti dari forum kamis pagi itu kan ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang apa saja. Itu terus nanti ada, kan ada yang nyatet ya, di-feedback-kan ke SKPD, misalnya jalan rusak, itu nanti disampaikan ke mana...ke dinas PU, dan biasanya di sini juga dapat tembusan.” (Wijayanti, 2018)

Demikian juga dengan *Bupati Menyapa*, hampir sama dengan Forum Kamisan, tetapi sistem ini tidak dengan cara tatap muka namun dengan siaran langsung dalam bentuk dialog interaktif melalui panggilan telepon ketika Bupati sedang menjadi pembicara dan narasumber di Radio Republik Indonesia (RRI). Kerjasama Pemda dengan Lembaga Penyiaran Publik Yogyakarta itu disiarkan langsung melalui *streaming* RRI Yogyakarta Programa 1 dan Programa 4 serta

dipancarluaskan oleh beberapa radio komunitas di Kulon Progo pada setiap hari Jumat pagi pukul 07.30 sampai dengan 08.00 WIB.

“...selain itu Bupati juga ada acara “Bupati Menyapa”, itu lewat RRI dan biasanya jumat pagi, tapi saya gak hapal ya jam berapa. Jumat pagi-pagi itu disiarkan di radio, biasanya ada yang telepon.” (Wijayanti, 2018)

4.4.1.5 Pra-RKA dan Standar Evaluasi

Kegiatan ini standar banyak inovasi yang meliputi kebijakan untuk melakukan pra-RKA dan monitoring dengan sistem informasi atas usulan dari beberapa pihak setelah melalui kajian yang mendalam terkait dengan penggunaan informasi perencanaan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa sistem informasi perencanaan yang sudah tersedia saat ini di Kulon Progo adalah aplikasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu, “AspirasiKu” dan “RencanaKu”. Kedua aplikasi ini telah menjadi cikal bakal dimulainya alur sistem perencanaan yang menghasilkan proses yang benar-benar aspiratif, bahkan sudah menjadi sumber rujukan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi APBD. Demikian kata Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda.

“Kalau usulan masyarakat itu rata-rata tentang jalan, tentang kesehatan, pendidikan. Nah, itu dia sudah mengakomodir ini usulan dari Musrenbang Kecamatan. Nanti di sistem juga menggunakan sistem “RencanaKu” tadi.” (Puspitasari, 2018a)

Kedua aplikasi tersebut sangat membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). *Output* berbentuk data aspirasi warga dalam aplikasi “AspirasiKu” menjadi *input* dalam aplikasi “RencanaKu” sehingga dapat digabungkan menjadi satu perencanaan yang benar-benar matang. *Output* dari data dalam sistem “RencanaKu”

yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini kemudian dijadikan *input* lagi dalam penyusunan RKA, karena sudah diolah menjadi bentuk program dan kegiatan. Sebelum SKPD benar-benar menyusun RKA, sistem “RencanaKu” ini sudah menyajikan *input* dan *output* RKA yang masih bersifat sementara dan masih bisa diubah, sehingga sering disebut Pra-RKA. Jika sudah *fixed*, Pra-RKA ini akan dikopi menjadi RKA, masih menurut Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda.

“Kita di “RencanaKu”, Sistem “RencanaKu” tadi sudah membuat pra-RKA. Pra-RKA, jadi, nanti angkanya itu biar fixed sampai ke DPA, lebih memudahkan. Jadi, sudah di-entry rigit gitu.” (Puspitasari, 2018a)

Pra-RKA sangat membantu tiap SKPD karena SKPD sudah tidak perlu lagi repot-repot mencari dan menginput program dan kegiatan ke dalam RKA untuk diusulkan kepada BKAD. Bahkan untuk Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) juga sudah di-entry dalam *software* ini, sehingga SKPD tidak repot lagi meng-*input* harga ketika membuat RKA. Setiap program dan kegiatan yang telah terbentuk dalam aplikasi “RencanaKu” di-*link*-kan ke masing-masing OPD yang relevan untuk dianggarkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang secara langsung akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tidak hanya itu, sebelumnya juga “RencanaKu” sudah di-*link*-kan dengan KUA-PPAS, sehingga memudahkan Bappeda dalam menentukan prioritas pembangunan dalam waktu yang singkat. Terkait dengan hal ini, Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda masing-masing menyatakan:

“Kita di “RencanaKu” di Bappeda. Kita juga sih yang kelola. Subbidang perencanaan. Tapi nanti yang input kan masing-masing OPD.

Sudah kita user sama pasword masing-masing. Itu nanti, dari situ langsung link ke KUA-PPAS. Jadi kita konek, jadi setelah musrenbang kan kita cermati, kita bikin kayak pra-RKA gitu. Itu nanti sebagai bahan untuk Bappeda.” (Syakiri, 2018a)

“Di sini kami sudah pakai RKA, Pra-RKA namanya. Jadi, Pra-RKA, Pra-RKA di sini jadi, jadi Pra-RKA kami ini tinggal kopi ke sini sudah jadi RKA.” (Cahyani, 2018)

Selain aplikasi di atas, pada saat monitoring dan evaluasi hasil-hasil perencanaan, pengawasan terhadap perencanaan tersebut sudah tidak dilakukan secara manual lagi. Ada aplikasi “MonevKu” yang menggantikannya untuk mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Semua hasil pelaksanaan perencanaan di-input melalui aplikasi ini lalu akan dievaluasi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan. Masih menurut Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda, setiap OPD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi atas ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.

“Kita punya, eeehh Bappeda ada “MonevKu”, jadi pengendalian yang ada di RKPD itu. Yang kelola bidang Litbang.” (Syakiri, 2018a)

“MonevKu” ini juga konek di setiap OPD tepatnya di bagian perencanaan dan atau keuangan. Pusat datanya dikelola oleh Bappeda di bidang Pengendalian. Setiap bulan kepala subbagian perencanaan dan keuangan SKPD meng-entry capaian fisik dan kendala serta permasalahan tiap-tiap kegiatan di masing-masing instansi. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian, “MonevKu” juga menjadi rujukan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Ketika tiba waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),

“MonevKu” akan secara otomatis menyajikan poin-poin untuk bahan laporan LAKIP.

4.4.1.6 Berorientasi Proses dengan Membentuk Pokja RPJM

Kegiatan ini mengandung unsur kajian ilmiah tentang perencanaan. Perencanaan tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi proses, yaitu pendekatan yang menggunakan kerangka berpikir ilmiah (teknokratik), melibatkan semua OPD terkait (partisipatif), disusun berdasarkan visi misi Bupati (politis), dan dilaksanakan dengan sistem musrenbang dan berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya (*top-down* dan *bottom-up*).

Proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah atau RPJPD dan RPJMD sampai dengan disahkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Walaupun peraturan ini baru diberlakukan pada tahun 2018, namun ketentuan di dalamnya sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pemda Kulon Progo. Artinya dalam proses ini, perencanaan dilakukan secara bertahap, runtut, bukan hanya formalitas belaka, dan tanpa ada mekanisme yang dilewati, seperti yang dikatakan Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda.

“Peta kinerja itu dibuat berbarengan dengan penyusunan RPJMD. Jadi, di peta kinerja itu ada bagan, seperti bagan itu mulai dari visi terus ke misi, misalnya Bupati kemudian ke sasaran daerah eh ke tujuan dulu, tujuan daerah, ke sasaran daerah, kemudian sasarannya OPD terus kemudian programnya OPD apa, kemudian kayaknya sampai program. Nah, kalau di

renstra nanti mengerucut ke program itu ke kegiatan apa saja. Jadi, arahnya dia itu mau mendukung misi berapa itu sampai itu, ada peta kinerjanya, kayak gitu. Nah, itu menjadi dasar penyusunan renstra. Nah, untuk renja kan menyusunnya berdasarkan eh untuk renja berdasarkan renstra. Jadi, indikatornya ambil dari renstra.” (Puspitasari, 2018a)

Sebelum membuat perencanaan, pada awalnya pemda membentuk kelompok kerja yang disebut Kelompok Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Pokja RPJM) yang ditetapkan dengan SK Bupati. Semua SKPD dilibatkan dalam tim ini dan semua urusan dalam tim teknis ini dikompilasi untuk dirundingkan bersama. Untuk lebih memenuhi unsur pendekatan teknokratik, tim Pokja RPJM didampingi oleh tim ahli dari Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) yang bertugas memberi kajian, saran, dan masukan dari sisi teori dan ilmiah kepada tim. Hal ini sesuai yang dikatakan Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan berikut.

“Tim teknis ada. SK Bupati. Yang melibatkan Bappeda dan OPD lainnya. Ada Sekda, Bagian Hukum. Semua kita libatkan.” (Syakiri, 2018a)

“He'e, tim pelaksana. Jadi, kita dalam menyusun RPJMD kan ada beberapa pokja, pokja RPJM itu nanti di Bapeda semuanya. Mereka mengampu per urusan nah di bidang sini kan kompilasi semuanya. Terus kami didampingi kemarin didampingi tenaga ahli dari MAP-UGM.” (Cahyani, 2018)

Setelah mendapat masukan dari tim ahli, Pokja kemudian menentukan prioritas pembangunan. Prioritas ini ditentukan berdasarkan jumlah anggaran yang ada. Sebagai contoh, dalam merencanakan pembangunan diwajibkan memprioritaskan 70% anggaran untuk kegiatan fisik dan sisanya untuk non-fisik. Nah

karena anggarannya sudah ditentukan, maka perencanaan harus mengikuti jumlah anggaran (*follow for money*). Sehingga apabila anggaran sudah dipatok sejumlah itu, maka otomatis harus ada prioritas dan dipilih yang paling prioritas serta tidak boleh melebar anggarannya kemana-mana.

4.4.1.7 Konektivitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan ini membahas penggunaan program aplikasi yang terkomputerisasi dengan baik. Konektivitas juga dilakukan antarkegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran yang secara tupoksi berbeda fungsi dan tempat. Terdapat pemisahan ketugasan antarsistem perencanaan internal buatan Pemda Kulon Progo dengan sistem perencanaan eksternal buatan BPKP. Seperti diketahui sistem “AspirasiKu” dan “RencanaKu” merupakan aplikasi internal yang disediakan sendiri oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo, sementara Simtem Manajemen Keuangan Daerah (Simda) merupakan aplikasi eksternal milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Semua perencanaan di-*input* melalui aplikasi internal ini yaitu dimulai dengan meng-*input* data musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, forum SKPD, forum RKPD, dan terakhir meng-*input* KUA-PPAS. Sementara untuk Simda dimulai dengan meng-*input* RKA, DPA, dan APBD, seperti dikemukakan oleh Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan berikut.

“He’e, Rencana, “RencanaKu” gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.” (Cahyani, 2018)

Pada pertengahan tahun 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membuat sistem aplikasi perencanaan terbaru yang bernama Simcan (sistem perencanaan). Simcan ini akan melengkapi tugas aplikasi internal yang belum dapat dikoneksikan secara *online* dengan Simda, sehingga solusinya adalah menggunakan aplikasi Simcan ini dari BPKP. Selama ini aplikasi internal “AspirasiKu” dan “RencanaKu” belum bisa *online* terkoneksi dengan Simda, sehingga Pemda Kulon Progo masih merasa kesulitan ketika harus membuat penganggaran. Cara yang dilakukan selama ini adalah melakukan sistem ekspor-impor secara manual dari sistem “AspirasiKu” dan “RencanaKu” ke Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda), seperti yang diakui oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD berikut ini.

“Ketika mau bikin DPA, dia sudah include. Jadi bersamaan, gak, maksudnya DPA yang tadi itu ekspor impor dari “RencanaKu”, tapi kalau untuk penyusunan anggaran kasnya itu malah nginput lagi. Tidak ...tidak terus jadi...belum ada sistem tersendiri. Bukan 2 kali tapi memang belum ini buat waktu di tahap perencanaan.” (Hadiyanto, 2018a)

Jika dibandingkan dengan Sistem Perencanaan (Simcan), antara “AspirasiKu” dan “RencanaKu” juga belum konek secara *online*. Masih menggunakan sistem ekspor-impor file. Jadi *database* Pra-RKA di “RencanaKu” diekspor terlebih dahulu ke Simda, lalu diolah menjadi RKA di Simda, kata Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda.

“Tetapi, dari database Pra-RKA di “RencanaKu”, kita ekspor ke Simda.” (Cahyani, 2018)

Sementara Simcan sendiri bisa *online* dengan Simda, sehingga tidak memerlukan ekspor-impor dan mempersingkat waktu pengolahan data yang dibutuhkan. Dengan penggabungan ketiga aplikasi sistem perencanaan ini membuat kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat, meminimalkan aktivitas korupsi dari ide perencanaan, calo anggaran, negosiasi anggaran, dan bentuk penyelewengan lainnya.

4.4.1.8 Payung Hukum Perencanaan Memadai dan Mengikuti Aturan Berlaku

Kegiatan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Peraturan yang ada bukan hanya menggunakan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat tetapi juga peraturan yang diramu dan diturunkan dari peraturan di atasnya yang dilegislati bersama DPRD baik yang berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, terdapat 2 sumber peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No.54 tahun 2010 dan Permendagri No.86 Tahun 2017. Aturan turunan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dikeluarkan untuk memberi petunjuk teknis yang lebih komprehensif. Satu-satunya aturan turunan dari Permendagri ini adalah Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang sistem perencanaan. Walaupun sudah ada Permendagri pengganti namun Perda ini belum diperbaharui karena sebenarnya masih relevan dengan kondisi dan tidak terlalu jauh berbeda.

“Masih SPPD itu tadi, sistem perencanaan pembangunan daerah, perda itu loh...Cuma dua itu. Kami memang belum mengubah ini, seharusnya kan sudah diubah karena yang ini perda 2007 itu sudah lama ya..karena kan sudah ada permendagri yang 54, 86, tapi secara prinsip di permendagri 86 atau 54 itu kan tidak terlalu berbeda, perbedaannya tidak terlalu banyak.” (Wijayanti, 2018)

Semua tahapan perencanaan memiliki petunjuk teknis. Bersumber dari peraturan daerah (Perda) yang diatur dengan Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang sistem perencanaan, disediakan payung hukum turunan tentang perencanaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (Perbup) misalnya terdapat pedoman musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pedoman perencanaan, serta pedoman pengendalian dan evaluasi. Masing-masing Perda dan Perbup ditindaklanjuti lagi dengan petunjuk teknis yang ditandatangani kepala Bappeda.

“Kalau aturannya, anu sih...juknis aja. Setiap kegiatan misal forum konsultasi publik, kemudian musrenbang ada juknisnya. Kalau yang tandatangan ya kalau bukan Sekda ya kepala Bappeda.” (Puspitasari, 2018a)

Semua aturan tentang perencanaan pembangunan dapat di-*download* dengan mudah di *website* Bappeda atau di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo tanpa terkecuali. Semua komplit dalam bentuk pdf, mulai dari tahun anggaran sebelum-sebelumnya sampai pada tahun anggaran berjalan. Untuk perencanaan tahun yang akan datang saat ini sedang dalam proses rancangan dan tetap akan diumumkan ke publik jika telah tiba waktunya.

4.4.2 Mekanisme Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel

Mekanisme pelaksanaan adalah tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), penyusunan anggaran kas, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP, SPM, dan SP2D), pelaksanaan belanja, dan berakhir dengan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj).

Instansi yang terlibat pelaksanaan ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD dan semua SKPD di Kabupaten Kulon Progo. BKAD memiliki peran dalam menerima, menyalurkan, dan melaporkan semua uang hasil pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan SKPD berperan menerima, melaksanakan, dan mengeluarkan semua uang yang telah diterima dari BKAD sesuai peruntukannya untuk membiayai pengeluaran pembangunan dalam bentuk belanja.

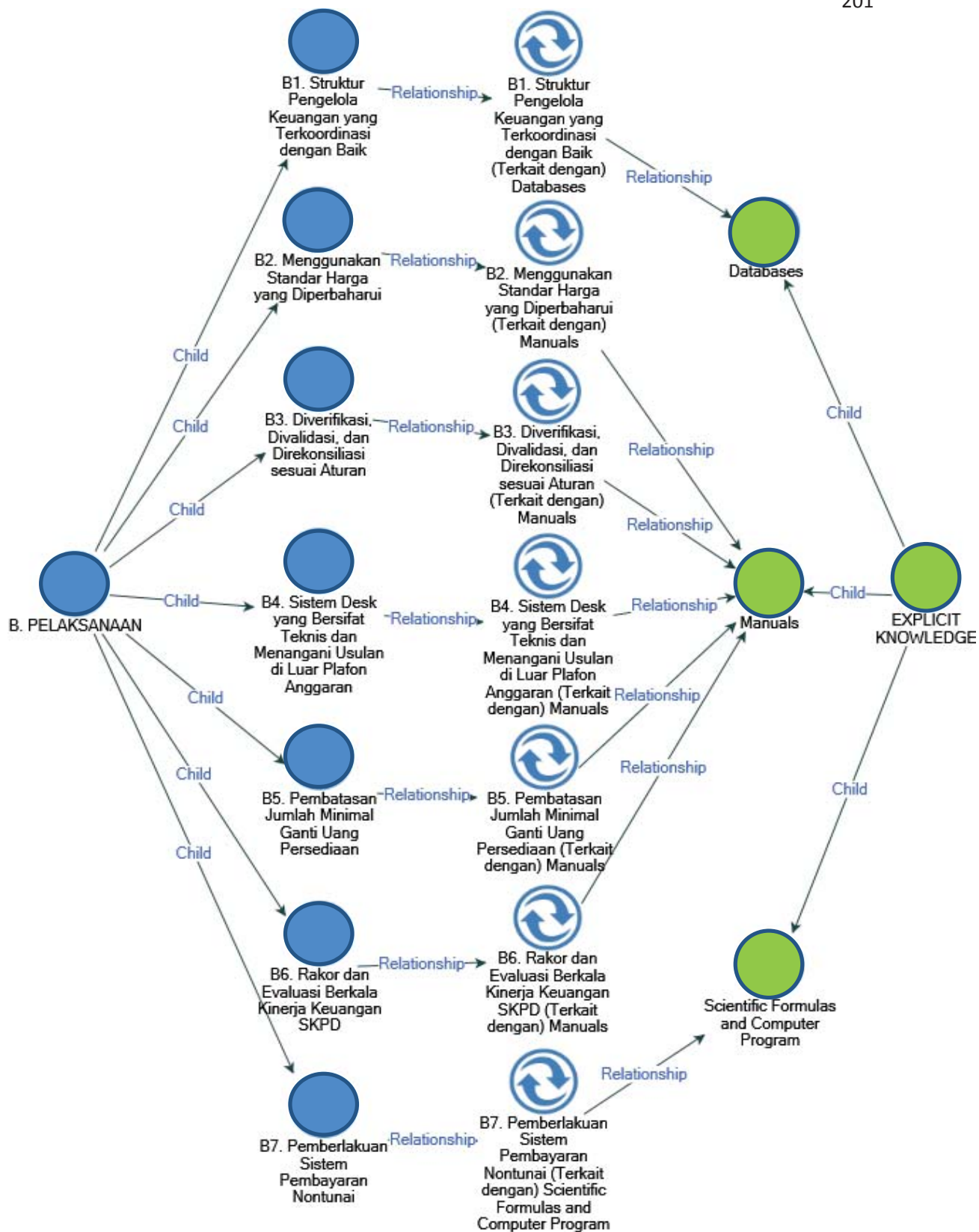
Dalam mekanisme pelaksanaan ini ditemukan 7 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini terbagi juga ke dalam 3 komponen pengetahuan *explicit knowledge* berikut ini.

- a) Komponen manual (buku, pedoman, laporan, panduan, peraturan, serta sistem dan prosedur) terdiri dari 5 kegiatan, yaitu 1) yaitu rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi berkala kinerja keuangan SKPD; 2) menggunakan standar harga yang diperbaharui; 3) melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi sesuai aturan; 4)

membentuk sistem desk yang bersifat teknis dan menangani usulan di luar plafon anggaran; serta 5) pembatasan jumlah minimal ganti uang persediaan.

- b) Komponen database terdiri dari 1) kegiatan, yaitu struktur pengelola keuangan yang terkoordinasi dengan baik.
- c) Komponen kajian ilmiah, kebijakan, dan program komputer terdiri dari kegiatan pemberlakuan sistem pembayaran nontunai.

Keterkaitan masing-masing komponen pengetahuan *explicit knowledge* dengan kegiatan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo berturut-turut diperlihatkan dalam peta analisis yang diolah dengan NVivo dan dijelaskan satu per satu melalui gambar 4.7 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.7 ini, disajikan *matrix coding*-nya pada lampiran 7 di halaman 383.



Gambar 4.7 Peta Analisis Akhir
Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan
Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.4.2.1 Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik

Perintah undang-undang yang tercantum dalam Permendagri 13 tahun 2006 mewajibkan bahwa sebelum melaksanakan anggaran, perlu dibentuk pengelola keuangan daerah, tetapi tidak secara detil mengatur sampai ke koordinasi. Pengelola keuangan daerah dipimpin oleh bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD). Besarnya kewenangan bupati menjadi alasan untuk dibagikan kepada pejabat di bawahnya.

Bupati selaku PKPKD kemudian melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat di bawahnya. Pelimpahan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, yang menguji, yang menerima atau yang mengeluarkan uang. Orang-orang yang bertanggungjawab sebagai pejabat pengelola keuangan biasanya dipilih atau ditunjuk secara otomatis berdasarkan pada kesamaan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjalankan tugas keseharian agar lebih efektif dan tidak mengganggu konsentrasi pekerjaannya.

Para pejabat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo yang menerima pelimpahan wewenang dari kepala daerah antara lain Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) yang dijabat sekretaris daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merangkap Bendahara Umum Daerah yang dijabat oleh kepala BKAD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran merangkap Pengguna Barang yang dijabat oleh setiap kepala SKPD (eselon II), Kuasa Bendahara Umum Daerah yang

dijabat oleh kepala bidang di BKAD (eselon III), Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dijabat oleh beberapa pejabat di bawah pengguna anggaran di setiap SKPD (eselon III), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh kepala bidang/bagian (eselon III) di setiap SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh sekretaris/kasubag keuangan di SKPD (Eselon III atau IV), serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Barang yang dijabat oleh setiap staf di SKPD.

Aturan tersebut bersifat *rigid*, namun bukan berarti hanya itu-itulah saja. Pemda disarankan untuk berinovasi demi efektivitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk pejabat pengelola keuangan daerah di tingkat SKPD BKAD Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa jabatan pengelola keuangan daerah yang struktur dan fungsinya sangat berbeda dengan beberapa pemerintah daerah lain. Selain berbeda, jabatan tersebut memberikan manfaat yang efektif bagi pengelolaan keuangan di Kulon Progo, seperti dijelaskan berikut ini.

a. *Pejabat Kuasa BUD lebih dari satu orang*

Pada umumnya jabatan Kuasa BUD selalu jatuh dan disematkan di bidang perbendaharaan setiap BKAD karena memang tidak diatur secara detil dalam peraturan. Namun karena tugas pokok dan fungsinya yang relevan dan sama, maka dianggap wajar dijabat oleh Kabid Perbendaharaan. Oleh karena itu yang menjabat Kuasa BUD pastilah kepala bidang perbendaharaan di BKAD. Di Kabupaten Kulon Progo jabatan Kuasa BUD tidak hanya dijabat oleh Kabid Perbendaharaan tetapi

berada di 3 bidang di BKAD yaitu selain di bidang perbendaharaan, juga ada di bidang pajak dan bidang aset.

Secara fungsional, Kuasa BUD bertanggungjawab langsung kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala BKAD. Namun secara struktural tidak demikian, Kabid Perbendaharaan bertanggungjawab langsung kepada kepala BKAD, seperti yang dikatakan oleh Kepala Subbidang Belanja BKAD.

“Iya, aaahh, kuasa BUD itu banyak. Jadi kita ada SK Kuasa BUD yang SK Bupati tentang kuasa BUD. Tidak hanya bidang perbendaharaan tapi ada bidang pajak, bidang aset . Ada SK-nya dan di-SK-kan. Tidak semua bidang menjadi kuasa BUD. Jumlahnya itu saya lupa, Cuma perbendaharaan, pajak, aset. Nanti lihat fotokopi SK-nya. Biar jelas.”
(Sugiyarti, 2018)

Pemilihan 3 orang pejabat Kuasa BUD ini bertujuan untuk memisahkan dan membagi tugas-tugas Kuasa BUD yang terlalu banyak dalam hal pencairan anggaran sehingga mempercepat proses pencairan. Selain itu juga untuk memudahkan koordinasi terkait dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang yang ada di BKAD dengan menganut prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menerima, dan yang mengeluarkan uang. Dengan adanya pemisahan tugas 3 orang Kuasa BUD ini, maka tanggungjawab masing-masing bidang tersebut semakin jelas dan tidak tumpang tindih sehingga koordinasi tetap berjalan dengan baik.

b. PPTK Dijabat Eselon IV

Tidak seperti di kebanyakan daerah, PPTK dijabat oleh satu orang yaitu eselon III atau kepala bidang terkait. Jadi jika dalam satu SKPD terdapat 5 bidang, maka otomatis PPTK juga ada 5 orang yang juga dijabat kepala bidang. Hal ini lumrah dan sudah menjadi kebiasaan karena beberapa daerah beralasan supaya lebih mudah koordinasi dan kepala bidang tersebut satu tingkat di bawah kepala SKPD sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan jalur perintah yang berlawanan arah jika disematkan kepada pejabat di bawah kepala bidang. Di Kabupaten Kulon Progo PPTK justru dijabat oleh eselon IV atau kepala subbidang/subbagian. Jadi apabila dalam satu bidang ada 3 orang kepala subbidang, maka kasubbid itu otomatis menjabat sebagai PPTK, sehingga PPTK bisa jadi lebih dari satu orang, seperti dikemukakan oleh Bendahara Pengeluaran BKAD.

“Satu bidang itu ada yang 3 PPTK, ada yang 2 PPTK. Karena kan yang jadi PPTK kan Subbid.” (Resty, 2018)

Penunjukkan ini dikarenakan terdapat pemisahan jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang dijabat juga oleh kepala bidang. Jika PPTK dijabat oleh kepala bidang maka terjadi rangkap jabatan antara PPTK dengan PPK atau PPKom. Ini cukup riskan karena mereka memiliki kewenangan yang besar sehingga keduanya sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan, kata Kepala Subbidang Belanja BKAD.

“Iya, pejabat penatausahaan keuangan. Kita mengaturnya seperti itu dan aturan itu, PPK tidak boleh dirangkap oleh PPTK. Semuanya PPTK itu. Eselon IV itu semuanya PPTK. Kabid itu kan penanggungjawab kegiatan.” (Sugiyarti, 2018)

c. PPKom Wajib Bersertifikat dan Biasanya Dijabat Eselon III

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tidak termasuk dalam struktur pengelola keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006. Jabatan ini merupakan jabatan yang diemban karena adanya usulan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa terpisah dengan pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur mula-mula dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016. Untuk membedakan istilah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang sama-sama kalau disingkat menjadi PPK, maka dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, Kabupaten Kulon Progo memisahkan istilah keduanya. Pejabat Penatausahaan Keuangan disingkat PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPKom. Demikian diungkapkan Kepala Subbidang Belanja BKAD.

“Ya. Mungkin maksudnya PPKom apa ya? Kita kan membedakan pejabat sama-sama PPK. Kalau yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen itu beda lagi. Jadi kalau kita namanya di sisdur kita bunyinya eeee terjemahannya PPKom. Kalau PPK yang saya sampaikan tadi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Oh PPK.” (Sugiyarti, 2018)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memiliki kewenangan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari perencanaan pengadaan sampai

dengan diterimanya barang/jasa hasil pengadaan. Untuk Kabupaten Kulon Progo, PPKom dijabat oleh Kepala Bidang di setiap SKPD. Satu SKPD hanya memiliki satu PPKom. PPKom ditunjuk dan bertanggungjawab oleh dan kepada Pengguna Anggaran. Berbeda dengan Kepala Bidang yang otomatis menjadi PPK tanpa ada surat keputusan, PPKom harus di-SK-kan terlebih dahulu karena adanya persyaratan keahlian pengadaan yang wajib dimiliki. Syarat-syarat untuk menjabat PPKom tidak mutlak harus dijabat oleh Kepala Bidang karena adanya kewajiban untuk memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Masih menurut Kepala Subbidang Belanja BKAD, jika staf memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, maka staf tersebut bisa menjabat sebagai PPKom sepanjang kepala bidang tidak ada yang memiliki sertifikat dimaksud.

“PPKom itu kewenangan pengguna anggaran untuk menunjuk eee biasanya kepala bidang. Atau kalau tidak ada syaratnya PPK ee PPkom kan harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Atau staf pun boleh asal memenuhi syarat punya sertifikat pengadaan. Ditunjuk dengan SK kepala dinas. Kalau tidak ditunjuk tidak bisa otomatis.” (Sugiyarti, 2018)

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun PPKom memiliki kewenangan yang besar dalam proses pengadaan barang dan jasa sampai kepada pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pencairan keuangan, keduanya sama-sama bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan kepada PPK. PPKom akan menangani pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga, sedangkan PPTK akan menangani pertanggungjawaban pengadaan bukan dengan pihak ketiga.

d. *Penekanan dan Pemisahan Fungsi PPK sebagai Verifikator SPj, Pembuat SPM, dan Fungsi Akuntansi*

Untuk kabupaten Kulon Progo, terdapat perbedaan tugas antara PPK dengan PPKom. PPK dijabat oleh Sekretaris dan PPKom dijabat oleh kepala bidang yang sama-sama eselon III. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, walaupun PPKom memiliki kewenangan yang besar dalam proses pengadaan barang dan jasa, jika hal itu berhadapan dengan pencairan keuangan daerah, maka terdapat pemisahan tugas sehingga harus melibatkan PPK. Semua pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPKom wajib dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi dan dicairkan, dan jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka PPK berwenang menolaknya. Struktur PPK yang dipimpin oleh sekretaris beranggotakan 3 orang yang disebut pembantu PPK. Semua pembantu PPK dijabat oleh pejabat dan staf yang berada di bawah sekretaris yaitu kepala subbagian keuangan dan stafnya. Staf di subbagian keuangan tersebut merangkap sebagai anggotanya yang terdiri dari pembuat SPM, verifikator SPj, dan petugas akuntansi. Kepala Subbidang Belanja BKAD kembali mengatakan:

“Ini pak Pejabat Penatausahaan Keuangan ya. PPK kan punya pembantu, nah itu di kasubbag keuangan. Pembantunya kan verifikator SKPD sama akuntansi, pembuat SPM. Ada tiga. Jadi itu wilayahnya PPK-SKPD. Kasubbag keuangan SKPD. Jadi semua SKPD di Kasubbag Keuangannya, stafnya itu merangkap anggota PPK.” (Sugiyarti, 2018)

Kepala Subbagian Keuangan diberi jabatan sebagai pembantu PPK fungsi akuntansi yang membuat proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Biasanya yang dipilih yang memiliki latar belakang akuntansi. Jika kasubbag keuangan bukan yang

berlatar belakang akuntansi, maka pembantu PPK-nya dipilih dari staf yang memiliki latar belakang akuntansi. Sementara verifikator SPj dan pembuat SPM atau disebut operator diserahkan kepada staf. Dalam melaksanakan tugasnya pembantu PPK pembuat SPM memiliki pembagian tugas yang terpisah dengan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran hanya berwenang membuat SPP melalui Simda Keuangan, sementara PPK fungsi pembuat SPM memiliki wewenang membuat SPM. Keduanya tidak dapat disatukan karena adanya prinsip pemisahan kewenangan yang meminta, memerintahkan, dan membayar uang. Bendahara pengeluaran sebagai fungsi yang berwenang meminta dan membayarkan uang, dan pengguna anggaran sebagai fungsi yang memerintahkan. Dalam hal ini pengguna anggaran diwakili oleh PPK. Jadi pembuatan SPP menjadi ranah kewenangan bendahara pengeluaran dan pembuatan SPM adalah wilayah kewenangan PPK yang dilaksanakan oleh pembantu PPK bagian pembuat SPM. Kepala Subbidang Belanja BKAD kembali menyatakan:

“Ah iya, jadi begini. Itu di penatausahaan bendahara pengeluaran sebenarnya sudah ada. Di sisdur kalau bapak sudah membaca, di situ sudah dijelaskan. SPP itu kan memang ranahnya bendahara pengeluaran. Ya terus eee setelah SPP disetujui baru SPM. SPM sudah wilayahnya PPK-SKPD. Yang mengajukan SPP kan bendahara. SPM itu yang membuat ranahnya PPK-SKPD, karena ada pembantu PPK itu pembuat SPM, verifikator, dan fungsi akuntansi. Jadi sudah beda. Simdanya jadi satu. Iya jadi semua pakai satu. Bendahara pengeluaran bisa juga buka SPM. Kalau kewenangannya tapi kadang-kadang kalau kurang SDM suatu SKPD kadang-kadang saling membantu.” (Sugiyarti, 2018)

Kedudukan PPK di setiap SKPD adalah strategis karena memiliki kewenangan yang kuat sehingga berfungsi dengan baik terutama pembuat SPM. Di sebagian besar pemerintah daerah, PPK ini justru tidak berfungsi, kalau pun berfungsi

paling hanya bertugas membuat berbagai laporan dan bukan membuat SPM. Pembuatan SPM dan verifikasi SPj paling sering dan paling banyak dirangkap dan dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.

e. Bidang Pendapatan Mengkoordinir Bendahara Penerimaan

Di setiap SKPD yang memiliki fungsi pendapatan pasti ditunjuk bendahara penerimaan yang bertugas mengurus semua yang terkait dengan pemasukan uang dari pendapatan dan penagihan piutang daerah. Seringkali mengurus pendapatan asli daerah merupakan tugas yang berat karena selain ditentukan oleh potensi sumber daya yang tersedia juga karena tidak semua SKPD memiliki fungsi pendapatan. Hanya beberapa SKPD saja yang memiliki fungsi ini seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan BKAD, serta SKPD teknis lainnya.

Beberapa pemerintah daerah, bendahara penerimaan hanya bertanggungjawab kepada pengguna anggaran di SKPD masing-masing. Keterkaitannya dengan BKAD hanya sebatas penyetoran pendapatan tersebut setiap hari baik secara tunai maupun nontunai sesuai ketentuan berlaku. Pada setiap akhir bulan juga hanya menyetorkan SPj pendapatan kepada BKAD, itu saja. Di kabupaten Kulon Progo, selain kedua hal tersebut bendahara penerimaan diawasi dan disupervisi oleh BKAD melalui bidang pendapatan. Secara fungsional telah diatur bahwa setiap bendahara penerimaan bertanggungjawab kepada BKAD melalui bidang pendapatan. Bidang pajak berwenang mengkoordinir semua SKPD fungsi pendapatan termasuk bidang pajak sendiri yang ada di BKAD. Secara struktural memang setara, tapi oleh Bupati diberi

kewenangan khusus. Bidang pendapatan memiliki 2 tugas supervisi yaitu mensupervisi target-target perencanaan terkait pendapatan yang ada di SKPD yang juga merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara struktural, dan mensupervisi SPj penerimaan yang disampaikan oleh bendahara penerimaan yang merupakan tupoksinya secara fungsional. Hal itu diakui oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan, BKAD.

“Jadi kita ee lebih tepatnya kalau secara mekanismenya kita mensupervisi setiap OPD termasuk juga pajak. Jadi kalau kemudian kita memang setara tetapi setiap ee proses koordinasi mereka itu bagian yang kita supervise. Target-target mereka secara perencanaan, pajak yang masuk berapa itu bagian yang kita di pendapatan ini yang kita awasi. Jadi kita itu berbicara secara fungsi ee supervise tapi kadang kita berbicara secara OPD. Maksudnya gini, pada satu sisi saya mensupervisi semua OPD pendapatan. Saya juga karena bidang pajak ini sebagai leading sektornya BKAD di fungsi pajak ya dia termasuk yang saya supervise terkait dengan capaian pajaknya, permasalahan, target terkait dengan progress , terkait hal-hal yang kemudian menyangkut ee pemasukan daerahnya. Jadi ya fungsinya koordinasi supervise gitu.” (Romdhoni, 2018a)

Untuk fungsi verifikasi SPj penerimaan, bidang pendapatan melakukan koordinasi dan supervisi kepada semua bendahara penerimaan. Fungsi dari verifikasi ini adalah untuk keperluan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait dengan data pendapatan yang ada di Simda pendapatan yang dikelola oleh bidang pendapatan. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan kembali memperkuat.

“...Jadi untuk proses, jadi verifikasi terhadap SPJ pendapatan, SPJ fungsional pendapatan itu kita lakukan setiap bulan. Mekanismenya kita setiap maksimal di tanggal ee 5 itu harus sudah menyampaikan misalnya sekarang ya contohnya sekarang kita bulan ini bulan Mei. Jadi tanggal 5 bulan mei itu mereka sudah menyampaikan SPJ fungsional di bulan April bulan sebelumnya. Nah, fungsi verifikasi ini adalah untuk sinkronisasi termasuk rekonsiliasi terkait dengan SIMDA yang ada di kita. Jadi kita itu

kan menerapkan aplikasi keuangan yang berbasis SIM ya yang kemudian itu pengembangan dari BPKP. Jadi kita punya SIMDA pendapatan yang kemudian kita senantiasa rekon bukti STS dengan jumlah yang ada itu senantiasa kita cek. Sehingga di OPD ketika menyampaikan SPJ yang kita harus kita verifikasi dilengkapi dengan STS itu nanti dimasukkan ke kita.” (Romdhoni, 2018a)

Sistem pencocokkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penerimaan yang disupervisi dilakukan melalui aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda) pendapatan dan rekonsiliasi dengan pihak bank penerima. Hasil kerja bidang pendapatan dan SKPD dan bendahara penerimaan yang disupervisi akan dilaporkan kepada Bupati setelah sebelumnya dilakukan rapat koordinasi tentang progres dan capaian masing-masing setiap bulannya. Bidang pendapatan akan berwenang menerima dan menolak SPj yang disampaikan. Bendahara penerimaan wajib setiap tanggal 5 bulan berjalan menyampaikan SPj penerimaan. Apabila ditolak SPj yang disampaikan, bendahara penerimaan wajib memperbaiki walaupun belum ada sanksi namun mereka sangat antusias. Hal itu dialami dan diakui sendiri oleh Bendahara Penerimaan BKAD.

“Emm, kita gimana nggih. Kalau diawasi itu cuman ada yang entry cuman ada yang entry maksudnya nyocokin pendapatan saya nanti di entry tempatnya Mas Eko yang bagian pendapatan itu. Nanti kalau ada yang selip langsung ke saya, Mbak ini salah misalnya ada selisih berapa gitu kan nanti langsung misalnya kurang setor atau apa. Paginya langsung saya ini langsung perbaiki lagi. Misalnya ada kurang setor kan biasanya ini juga salah angka tau, nanti di sana ketemu salahnya. Nah, kita nanti langsung nuruti di hari berikutnya.” (Sutanti, 2018)

f. Bidang Perbendaharaan Mengkoordinir PPK-Petugas Akuntansi

Kebutuhan untuk rekonsiliasi dan sinkronisasi data oleh bidang akuntansi menjadi sangat penting dan urgen. Hal ini karena bidang akuntansi merupakan gerbong akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah melalui penerbitan laporan pertanggungjawaban. Bidang akuntansi juga merupakan palang pintu terakhir untuk mendeteksi segala kesalahan dan permasalahan yang sudah dilakukan di tahap awal. Apa yang tidak bisa dideteksi di bidang anggaran, di bidang perbendaharaan, di bidang pendapatan, bidang pajak, dan bidang aset, bahkan dari SKPD lainnya, biasanya baru terdeteksi di bidang akuntansi. Dari posisi ini, koordinasi sangat dibutuhkan. Untuk beberapa pemerintah daerah yang sudah menggunakan aplikasi atau *software* pun terkadang koordinasi dengan PPK jarang dilakukan. Mereka terlalu mengandalkan sistem informasi semisal Simda sebagai sarana sekaligus sebagai alat deteksi kesalahan. Padahal sistem informasi seperti itu justru banyak kekurangan yang jika salah memasukkan data maka pada akhirnya juga akan memperoleh *output* yang salah.

Untuk Kabupaten Kulon Progo, bidang akuntansi dan PPK terutama petugas akuntansi merupakan mitra kerja yang saling membutuhkan. Koordinasi yang dibangun selama ini adalah pendampingan dan rapat koordinasi untuk mendapatkan data yang benar-benar valid. Pendampingan dilakukan setiap hari kerja berupa penyelesaian tenggat waktu pemasukan laporan. Seringkali juga petugas akuntansi diajarkan oleh bidang akuntansi terhadap permasalahan yang mereka hadapi selama

ini. Hal itu dilakukan dan diakui sendiri oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

Setiap saat, kita, mungkin istilahnya cuma kegiatan pendampingan gitu ya, tapi sebenarnya kita membuka pintu setiap saat monggo ke sini kalau ada kesulitan gitu. Boleh lewat telepon ataupun mau WA, mau email, boleh.” (Artiningsih, 2018b)

Sementara untuk rapat koordinasi dilakukan setiap triwulan berupa evaluasi hasil kerja PPK-SKPD. Untuk tingkat SKPD yang tidak terlalu besar biasanya ditangani langsung oleh bidang akuntansi. PPK-Petugas Akuntansi BKAD, membenarkannya.

“Jadi tiap beberapa waktu itu kita ada rapat koordinasi petugas akuntansi itu pasti ada. Ee kalau yang pasti itu setiap triwulanan. Pasti itu.” (Setyawati, 2018)

Namun untuk SKPD yang besar seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan biasanya dibantu SKPD yang bersangkutan untuk melakukan rapat evaluasi. Setiap akhir bulan akan dilakukan rekonsiliasi bersama PPK yang dilakukan di bidang akuntansi dengan memanggil setiap petugas akuntansi. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD, kembali menyatakan:

“He’e, yang dia punya sub lagi, fungsi akuntansi atau bahasanya sederhana kita petugas akuntansi itu. Nah, jadi teman-teman di sini, saya terbatas bertujuh sama saya untuk 45 SKPD, 21 Puskesmas, 100 eh 300 sekolahan. Nah, itu cara kita seperti itu misalnya kayak Dindik, Dindik punya 300 sekolahan, saya kan nggak mungkin. Akhirnya kita bantu koordinasi, saya ngomong sama bidang aset, tolong dong pengurus barang SKPD A dikondisikan karena datanya dibutuhkan oleh petugas akuntansi. Nah, saya

ke yang PPK SKPD tadi sebagai atasannya. Saya juga menyampaikan hal yang sama tolong dikoordinir internal Njenengan antara petugas akuntansi dan barang karena datanya harus sama seperti itu dan kita ada misalnya kayak forum-forum koordinasi sampai ke PPK SKPD tadi yang bosnya.” (Artiningsih, 2018c)

g. Bidang Aset Mengkoordinir Pengelola dan Pengurus Barang

Aset merupakan permasalahan utama sebagai penyebab opini yang buruk bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Sebenarnya bukan substansi permasalahannya yang menjadi hambatan tapi karena kemauan untuk melakukannya yang tidak ada. Permasalahan aset bukan berarti tidak bisa diselesaikan sepanjang pimpinan dan semua staf mau bersama-sama memiliki komitmen untuk menyelesaikannya. Sama halnya seperti bidang pendapatan dan bidang perbendaharaan, bidang aset BKAD juga diberi kewenangan untuk mengkoordinir bendahara barang atau pengelola barang. Walaupun kepala bidang aset merupakan jabatan eselon III, tetapi mengkoordinir eselon II di setiap SKPD itu hal yang biasa. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pengguna anggaran juga merupakan pengguna barang sehingga mau tidak mau harus berhubungan dengan bidang aset. Kepala Bidang Aset BKAD sudah sering mengalaminya.

“Iya, memang apa ya secara kedinasan memang statusnya sama ya, tetapi kita secara fungsi kan ada fungsi kita sebagai koordinator pelaporan. Koordinator, jadi bidang aset itu selaku PPKD untuk pelaporan aset tetap dan persediaan. Nah dengan ketugasan ini lah kita gunakan. Jadi saya mengkoordinir eselon II di atas saya itu hal yang biasa. Jadi ketika diminta data, mereka harus.” (Amrullah, 2018a)

Koordinasi dilakukan dengan membuat *link* secara berjenjang, misalnya untuk SKPD yang memiliki banyak cabang dan subcabang atau unit pelaksana teknis dinas

(UPT) seperti Dinas Pendidikan, jadi sekolah melapor ke UPT, UPT melapor ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan melapor ke BKAD. Demikian juga dengan Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Data dari pengelola barang tersebut direkapitulasi sehingga laporan data akhir akan langsung membentuk akun persediaan, akun aset tetap, dan akun aset lainnya melalui aplikasi persediaan yang dimiliki Pemda kabupaten Kulon Progo. Pada setiap akhir bulan tetap dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

4.4.2.2 Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui

Kegiatan ini berkaitan erat dengan adanya panduan yang jelas dalam membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yaitu adanya penajaman rencana kerja dari 3 aspek yaitu prioritas belanja, standarisasi harga, dan batas waktu penyusunan RKA. Prioritas belanja terkait dengan pengeluaran yang harus sesuai dengan kebutuhan, efisien, dan efektif. Standarisasi harga terkait dengan adanya batas maksimal atau plafon pengeluaran yang diatur dengan peraturan bupati. Batas waktu penyusunan ini terkait dengan dibatasinya waktu maksimal proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam proses penyusunan RKA, sebenarnya yang lebih penting dari ketiga aspek penajaman rencana kerja tersebut di atas adalah standar harga barang dan jasa karena standar harga ini akan menjadi plafon anggaran. Dalam praktik pelaksanaan belanja, jika jumlah standar harga yang dianggarkan dalam APBD lebih rendah dari jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka yang menjadi pedoman adalah standar harga. Sebaliknya apabila standar harga lebih tinggi daripada

harga dalam DPA maka yang berlaku adalah harga dalam DPA. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran dalam RKA merupakan plafon tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Oleh karena itu standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi akan menjadi sumber pemborosan APBD. Kecurangan sebenarnya sudah dimulai dari sini. Biasanya oknum-oknum tertentu dapat melakukan pengaturan harga yang tinggi pada saat membuat standar harga agar meraup keuntungan jika mendapatkan proyeknya. Modusnya bisa bermacam-macam, yang salah satunya adalah tidak melakukan survei ketika menyusun standar harganya. Jadi kunci dari efisiensi dan efektivitas belanja bisa dimulai dari penyusunan standar harga barang dan jasa.

Penyusunan standar harga di Kabupaten Kulon Progo sangat ketat dan selektif. Data harga diambil berdasarkan survei terhadap 3 jenis harga belaku. Selalu di-update jika terjadi perubahan harga dan biasanya dalam setahun bisa dilakukan sampai dengan 3 kali perubahan standar harga melalui survei tergantung kondisi perekonomian daerah. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“Eehh.....kalau ketentuannya mungkin hanya setahun sekali, tapi kemaren kalau ada hal-hal yang. Kemaren kan ada ini...ketentuan perbup-nya itu tentang standarisasi itu apabila ada kenaikan harga yang....ada lonjakan, lonjakan harga itu bisa dilakukan perubahan sehingga untuk yang 2017 kita berubah 3 kali, ha ha ha.” (Hadiyanto, 2018a)

4.4.2.3 Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari peraturan di atasnya yang khusus mengatur kewajiban pemeriksaan pertanggungjawaban setiap SKPD. Proses verifikasi, validasi dan rekonsiliasi merupakan proses yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo. Proses ini meliputi pelaksanaan

penerimaan perpajakan oleh bidang pajak, realisasi penerimaan oleh bidang pendapatan, proses pencairan oleh bidang perbendaharaan, proses permintaan, pembayaran, dan pendokumentasian oleh para bendahara penerimaan dan pengeluaran. Diverifikasi berarti menentukan kebenaran atas suatu dokumen dengan cara memeriksanya dengan teliti. Divalidasi mengandung makna pengesahan dokumen yang dianggap benar sehingga layak di-*input* ke dalam sistem, sementara direkonsiliasi artinya mencocokkan kesamaan saldo atau angka-angka yang ada dalam satu dokumen dengan saldo yang ada pada dokumen lainnya.

Di beberapa daerah, proses verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi hanya dilakukan oleh staf yang secara struktural memang bertugas sesuai bidangnya atau diberi tugas oleh atasannya. Untuk tugas verifikasi, di Kabupaten Kulon Progo ini dibentuk tim khusus verifikasi sehingga kualitas kerjanya lebih efektif dibanding harus dikerjakan oleh staf biasa. Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan SK kepala BKAD, seperti yang dibenarkan oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan BKAD.

“Iya. Di kita ada tim teknisnya. Di kita ada tim yang bertugas memverifikasi terhadap SPj seperti itu termasuk melakukan rekonsiliasi dengan OPD. Ada tim teknisnya dan itu di SK-kan oleh kepala OPD.”
(Romdhoni, 2018a)

Sementara untuk penerapan rekonsiliasi juga dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Proses ini berlangsung secara konsisten dan terus menerus, dan akan dieksekusi jika dianggap layak berdasarkan peraturan yang berlaku. Verifikasi dilakukan di semua bidang seperti bidang pendapatan, bidang

pajak, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang aset. Penerimaan pendapatan misalnya, setiap penerimaan SPj pendapatan akan direkonsiliasi atau diperiksa kebenaran angka-angka yang dilampiri bukti pendukung. Berturut-turut pernyataan ini dibenarkan kembali oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan BKAD.

“Nanti ada berita acara rekonsiliasi. Kemudian nanti kita rekon itu ee apa ya melibatkan beberapa pihak. Artinya bukan hanya OPD mereka dan kita tetapi juga bidang akuntansi yang menguasai sistem. Jadi kan untuk SIMDAny kan yang memegang akuntansi. Jadi contoh kasusnya begini misalnya ada angka masuk katakanlah sekian juta tapi tidak ada STS-nya. Neg yang belum ada STS belum ternganu itu kan belum bisa kita akui secara anu. Jadi kita tetap harus berpegangnya sampai detail di STS itu. Terkadang permasalahan yang kita hadapi itu ketika STS itu kan harusnya rinci dan rigid tetapi biasanya OPD atau mungkin itu ngglundung.” (Romdhoni, 2018a)

Untuk kegiatan validasi, setelah SPj dinyatakan lengkap maka disahkan melalui lembaran pengesahan.

“...kalau secara uang yang anu ya memang tidak ada. Tapi biasanya nanti diakhir di proses pencatatan itu kan harus jelas secara penggunaan misalnya oh yang satu kebersihan, oh yang satu ternyata parkir. Jadi di situ yang kadang ee apa ya, masih dibutuhkan ee proses proses rekon itu. Jadi nanti berita acara rekonsiliasi itu yang disepakati yang mana ya itulah yang menjadi dokumen untuk kemudian kita pertanggungjawabkan.” (Romdhoni, 2018a)

4.4.2.4 Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran

Kegiatan ini berkaitan dengan adanya panduan khusus dalam menangani anggaran terutama dalam membuat sistem desk yang merupakan kepanjangan tangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Tidak ada kewajiban untuk

membuat tim kecil semacam desk anggaran ini, namun dalam menyusun penganggaran, setiap daerah diwajibkan memiliki TAPD. Secara umum menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tim ini bertugas merasionalkan usulan anggaran yang diajukan oleh semua SKPD. *Output* kerja yang dihasilkan dari tim ini berupa RKA yang telah diseleksi dan dirasionalkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Hal ini dilakukan karena setiap SKPD selalu merasa kurang anggarannya dan akan mengajukan usulan anggaran yang lebih dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Kulon Progo, keberadaan TAPD masih dirasa belum cukup untuk mengurus anggaran. Selain TAPD dibentuklah tim kecil atau disebut Desk RKA. Desk yang merupakan kepanjangan tangan dari TAPD dan dikoordinir oleh Bidang Anggaran BKAD ini bertugas secara teknis untuk menyeleksi dan merasionalkan usulan anggaran dari SKPD sebelum dinaikkan ke TAPD. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD yang juga merupakan anggota tim desk tersebut.

“Tim teknis itu ya..yang ini pelaksana desk. Jadi desk..desk apa ya..Desk RKA itu, disini yang nangani bidang anggaran. Nanti setelah SKPD itu datang yang memaparkan tadi itu, misalnya kegiatan A pengelolaan kas dapat dana 30 juta. Dari 30 juta itu opo wae gitu.. apa itu nanti di...dengan tim itu, desk.” (Hadiyanto, 2018a)

Dalam pelaksanaannya, desk ini akan memanggil tim perencanaan masing-masing SKPD untuk memaparkan dan mempresentasikan usulan RKA-nya di depan Desk RKA. Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD, cara kerja desk dibagi berdasarkan SKPD, yaitu setiap orang akan menangani dan membawahi beberapa

SKPD sehingga jika ada keperluan atau masalah di setiap SKPD yang diampuh, maka masing-masing anggota Desk akan menanganinya sebelum dilanjutkan di tingkat TAPD.

“Tidak...itu kan kepanjangan tangan TAPD. Jadi ketika di level itu cukup di tim teknis, tapi ketika di level tadi harus TAPD. Jadi di level kegiatan ini dikasih berapa, dikasih ini itu digagalkan saja digantin dengan kegiatan ini...itu di level TAPD. Bisa...ada ini kok apa..dibagi tugas. Jadi ada satu orang itu atau satu kelompok mengampuh SKPD mana saja itu.” (Hadiyanto, 2018a)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dipresentasikan oleh setiap SKPD akan ditanggapi dan dibedah oleh desk. Dalam sehari bisa terdiri dari 2 SKPD karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencermati usulan anggaran mereka. RKA yang tidak rasional diwajibkan untuk disempurnakan. Pemeriksaan RKA meliputi pencermatan penempatan kode rekening belanja dan besarnya anggaran yang seharusnya dibutuhkan. Sementara usulan RKA yang telah lolos uji di tingkat desk akan dibahas lagi di tingkat TAPD. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD yang juga menjadi anggota TAPD.

“Iya, satu per satu. Iya wajib. Harus jelas, harus tepat juga meletakkan rekening belanja. Ya lumayan ya.... satu SKPD ini, itu mbak Ita kemaren jenengan desk berapa jam..? itu mbak Ita kemaren desk ke...eeehh..nek kita kegiatannya sudah ini..ini...Penempatan rekeningnya juga sudah bener juga nggih? Misalnya makan dan minum itu ada makan minum rapat, makan minum harian, itu kan peruntukannya lain-lain. Paling misalnya ATK, kadang juga gak logis. Ya.. kalau soalnya yang sudah rutin-rutin tiap tahun seperti itu sama, tinggalin. PPTK yang dipanggil langsung. Bukan kepala SKPD. Bukan.” (Hadiyanto, 2018a)

Banyaknya SKPD yang menyusun anggaran tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan serta cenderung transaksional sangat diperhatikan oleh Desk RKA ini. Jika

hanya mengharapkan TAPD, modus penganggaran yang amburadul ini kemungkinan tidak akan terdeteksi di tingkat TAPD karena pekerjaannya kurang teknis dan anggotanya lebih banyak diambil dari para pejabat seperti kepala SKPD yang setingkat dengan manajer dan kerjanya lebih banyak mengambil kebijakan. Keberadaan staf TAPD juga belum menjamin adanya pemeriksaan yang lengkap terhadap usulan RKA dari SKPD.

Selain menyeleksi usulan RKA dari SKPD, desk RKA juga diberi tugas untuk menampung usulan di luar plafon anggaran. Jika usulan yang diajukan oleh SKPD lebih besar dari pagu anggaran dan usulan tersebut dianggap penting dan rasional, maka usulan itu ditampung untuk diputuskan di tingkat TAPD, kata Kepala Bidang Perbendaharaan.

“Nah kalau itu, istilahnya bukan lobi. Itu kan sudah ada mekanismenya usulan di luar plafon namanya. Jadi kan wajib plafon. Kemudian ternyata ada usulan, ah ini karena pusat seperti misalnya dinas sosial ternyata pusat itu yang program dulu 2013 yang pusat, mulai 2018 di lepas, pusat tidak mau mendanai lagi, kan harus didanai oleh daerah. Nah masuk usulan di luar plafon. Nah kita juga, saya kira nanti mampukah pendapatan, kadang-kadang ehh..namanya pendapatan dan belanja mana yang di..kalau pendapatan itu yang target minimal yang harus dicapai, kalau belanja itu adanya batas maksimal. Kadang-kadang nek ada usulan di luar plafon ini yang dikejar sampai pendapatan, anu bisa naik gak pendapatannya. Program di luar plafon yang didanai sekian, nah nanti closing itu pendapatannya, he..he.he. mana ya yang bisa dinaikkan lagi. Ha..ha..ha.” (Hadiyanto, 2018a)

4.4.2.5 Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan

Kegiatan ini mengatur kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo. Aturan turunan ini

dibuat dengan baik dan diimplementasikan dengan efektif karena banyak pemerintah daerah lainnya dalam membuat aturan turunan hanya bersifat *copy paste*, sehingga dalam eksekusinya hanya sekedar gugur kewajiban hukum semata.

Ganti uang persediaan adalah permintaan penggantian atas uang persediaan yang telah habis dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran. Ketentuan tentang uang persediaan ini diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Selain mengatur jumlah uang persediaan, dalam ketentuan tersebut juga diperintahkan untuk membuat ketentuan batas jumlah pengajuan SPP-GU yang ditetapkan dengan peraturan bupati. Belum seluruhnya pemerintah daerah membuat peraturan tentang batas ganti uang persediaan ini. Yang paling banyak adalah membuat ketentuan tentang batas uang persediaan yang diberikan mula-mula di awal tahun anggaran kepada bendahara pengeluaran.

Di kabupaten Kulon Progo, pembatasan minimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah 60% dari jumlah uang persediaan (UP) yang diterima di awal tahun. Batas pengajuan 60% berarti bendahara pengeluaran hanya boleh mengajukan bukti-bukti pengeluaran untuk dimintakan kembali pengantiannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebanyak minimal 60% ke atas. Di bawah 60% tidak akan dicairkan oleh BUD. Misalkan jika bendahara pengeluaran menerima UP sebanyak Rp100 juta di awal tahun dan pada bulan berikutnya telah dibelanjakan sebanyak Rp50 juta, maka jumlah ini belum dapat diajukan SPP-GU karena baru mencapai 50% dari UP. Bendahara baru boleh mengajukan SPP-GU jika pengeluaran sudah mencapai Rp60 juta. Jadi menurut

Kepala Subbidang Belanja BKAD yang sering menangani masalah ini, jika diajukan penggantian uang sejumlah Rp60 juta tersebut, maka uang persediaan akan kembali berjumlah seperti sedia kala.

“Ya kalau GU minimal 60% dari uang persediaan. Itu ada SK-nya. Jadi bunyinya itu ada di SK uang persediaan, penetapan uang persediaan dalam SK Bupati. Boleh. Minimal. Ya maksimal sebesar UP. Di bawah 60% belum bisa.” (Sugiyarti, 2018)

Tujuan ditetapkannya batasan minimal 60% ini adalah untuk mempercepat perputaran uang persediaan (UP) yang ada di bendahara pengeluaran yang sebelumnya sudah diperhitungkan sebelum tahun anggaran dimulai untuk penggunaan 12 bulan ke depan. Angka 60% dipilih karena angka ini dianggap layak dengan pertimbangan sisa UP yang ada di bendahara pengeluaran masih mencukupi untuk digunakan selama sebulan ketika bendahara sedang menunggu pencairan ganti UP berikutnya, dengan catatan UP tersebut hanya dibelanjakan untuk pengeluaran yang ada anggarannya. Jika UP tersebut dibelanjakan untuk pengeluaran yang tidak ada anggarannya, maka dipastikan perputaran UP tidak akan lancar sehingga menyebabkan jumlah yang akan diajukan sebagai SPP-GU tidak akan mencukupi lagi sebesar minimal 60%. Kepala Subbidang Belanja BKAD kembali membenarkan.

“Jadi UP itu kan menghitungnya, eeehhh yang mau direncanakan dengan GU dibagi duabelas. Jadi harusnya kan minimal satu bulannya GU. Nah kalau semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan anggaran kasnya, perencanaannya dari awal itu gak masalah. Nah kalau ada masalah itu kehabisan uang dan sebagainya, itu karena memang perencanaannya kurang ini, kurang pas.” (Sugiyarti, 2018)

4.4.2.6 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD

Kegiatan ini mengatur adanya kewajiban pelaporan melalui dokumen dalam melakukan rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi secara berkala. Rakor sudah menjadi kewajiban berkala dan dilakukan terus menerus terhadap kinerja keuangan setiap SKPD baik untuk rencana pengeluaran keuangan maupun realisasinya terutama yang memiliki unsur pendapatan maupun tidak.

Rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pimpinan di pemerintah daerah dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian prestasi pengelolaan keuangan daerah. Rakor juga sebagai pertanda bahwa pimpinan menaruh perhatian lebih terhadap kinerja bawahannya untuk diberi penghargaan atau ditegur atas hasil kerja yang optimal dan masih belum optimal. Banyak alasan atau motivasi untuk melakukan evaluasi ini dan salah satunya karena terkait dengan kebutuhan perhitungan indikator kinerja dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja PNS. Untuk daerah yang belum menerapkan sistem pembayaran gaji berbasis kinerja, sangat mungkin rapat evaluasi pasti jarang dilakukan karena kurangnya semangat atau etos kerja yang memicunya.

Di Kabupaten Kulon Progo, rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah sering dilakukan secara berkala baik per bulan maupun per triwulan. Kebutuhan rakor tidak hanya semata-mata dimotivasi oleh adanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah diterapkan, tetapi juga adanya perhatian lebih dari pimpinan dalam meningkatkan kinerja keuangan terutama pencapaian target-target penerimaan pendapatan yang

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022. Rakor itu juga sering diikuti oleh Kepala Subbidang Belanja BKAD.

“Memeriksa, tidak juga. Yah kalau itu sudah diatur, ada di ini ya setiap bulan itu ada rakor asistensi . Jadi rakor SKPD. Ya setiap bulan. Ya itu kita melaporkan bahwa SKPD A serapannya sekian. Itu juga untuk penilaian kinerja keuangan pada waktu kita mau mencairkan TPP. Tambahan penghasilan kan syaratnya harus kinerja keuangannya ehhh jadi ada merah, hijau, kuning. Jadi detilnya SKPD yang tahu.” (Sugiyarti, 2018)

Sebelum melakukan rapat koordinasi dan evaluasi di tingkat kabupaten, koordinasi dan evaluasi juga dimulai dari setiap bidang yang ada di setiap SKPD. Sebagai contoh di BKAD, semua bidang yang ada melakukan rapat di tingkat bidang masing-masing dan hasil rapat akan dibawa ke rakor tingkat kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, kata Kepala Bidang Pajak yang rutin mengikuti rakor ini.

“Heeh tingkat kabupaten semuanya, meskipun kita melakukan evaluasi secara intern. Itu setiap 3 bulan jadi sebelum tingkat kabupaten melakukan evaluasi kita harus melakukan evaluasi dulu. Nantikan kita juga akan ditanyakan to, setiap unsur-unsur pendapatan dari gaji kita yang kita tangani itu sampai sejauh mana kemudian kenapa itu kan juga harus kita siapkan.” (Nasip, 2018a).

Rakor dan evaluasi bukan hanya di tingkat pimpinan atau selevelnya, tetapi juga untuk para bendahara dan pengelola keuangan lainnya. Paling banyak rapat di bendahara dan pengelola keuangan dimaksudkan untuk mempersiapkan diri ketika akan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat terhadap dokumentasi dan penatausahaannya. Bendahara Penerimaan pun sering diundang mengikuti rakor tersebut.

“Eem berapa ya. Lumayan lama juga e itu. Gak mesti setiap bulan. Misalnya ada sesuatu yang di ini, nanti baru dikumpulkan rapat atau apa. Biasanya kalau mau ada pemeriksaan dari BPK paling tidak mesti di ini dulu dikumpulkan dulu nanti supaya laporannya itu sudah ini apa yang mesti disiapkan untuk BPK. Biasanya seperti itu.” (Sutanti, 2018)

4.4.2.7 Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai

Kegiatan ini merupakan kebijakan yang mengandung semangat dalam mencegah penyelewengan. Kebijakan tersebut diperkuat lagi dengan payung hukum yang jelas setelah melalui beberapa tahap kajian ilmiah. Selain kebijakan yang ada, penggunaan aplikasi dengan sistem komputerisasi juga menjadi nilai tambah tersendiri dalam penerapan sistem pembayaran ini karena sudah menjadi tuntutan zaman.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sudah banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk pelayanan pemerintahan terutama di bidang keuangan dan perbankan. Banyak sekarang aplikasi *online* untuk bisa bertransaksi misalnya tranfer keuangan antarbank tanpa harus bersusah payah mengeluarkan tenaga untuk pergi ke bank. Di daerah lain semisal Jakarta, mereka telah menerapkan sistem pembayaran *online* ini. Lihat saja bagaimana penerapan uang elektornik dapat meningkatkan PAD Jakarta. Keberhasilan penerapan transaksi nontunai yang dikenal dengan nama *cashless society* itu tidak saja efisien terhadap sistem pembayaran tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak *online*, misalnya melalui sistem parkir *online* yang sebelumnya penerimaan retribusinya rendah justru menjadi meningkat.

Meniru keberhasilan itu, pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY juga telah menerapkan sistem nontunai tetapi penerapannya masih terbatas pada sistem pembayaran dan belum dilakukan terhadap sistem penerimaan. Sistem pembayaran *online* mulai diujicoba pada bulan Oktober tahun 2017. Sistem pembayaran tersebut dikenal dengan *Cash Management System* (CMS). Itu pun baru diterapkan pada SKPD BKAD dan RSUD dengan sistem pembayaran melalui bendahara pengeluaran, kata Bendahara Pengeuaran BKAD yang sudah sering menerapkannya.

“Iya, kalau dulu mulai nontunai itu Oktober 2017. Ada beberapa kegiatan, e ada beberapa belanja yang memang di-nontunai. Kalau yang tunai itu cuman SPPD, BBM. Jadi e untuk ee kalau untuk yang masih tunai panjar di bendahara itu yang SPPD sama BBM. BBM ketika 2017. He em kalau sekarang sudah menggunakan. Kalau sekarang BBM-nya sudah pakai kupon. E surat pengantar jenisnya.” (Resty, 2018).

Sistem kerja pembayaran nontunai adalah mengecek saldo di rekening dan membayar semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran melalui aplikasi berbasis *website*. Aplikasi ini milik BPD DIY dan dioperasikan dari kantor BPD DIY cabang Kulon Progo. Ketika SP2D telah dicairkan, maka BPD melalui sistem akan memberitahukan kepada bendahara pengeluaran bahwa ada transaksi masuk. Bendahara pengeluaran pun tidak perlu repot-repot mengecek ke bank. Begitu juga jika bendahara ingin membayar pengeluaran, menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BKAD, bendahara tidak perlu lagi mengeluarkan cek, cukup mengendalikannya lewat aplikasi dan dalam hitungan detik uang telah dikeluarkan.

“Kebetulan kami sudah menggunakan CMS, Cash Mangement System. Jadi eum kami langsung transfer sendiri tidak melalui bank. Jadi bendahara itu sudah sekaligus merangkap layaknya sebagai pegawai bank. Jadi PPTK membuat SPj itu berdasarkan anggaran kas itu yang sudah mereka buat. Jadi anggaran kas Januari harus dilaksanakan Januari. Mereka menyusun SPj. Oh saya punya Januari kegiatan katakanlah pendataan. Nah ketika pendataan keperluan pendataan itu apa ? oh keperluan pendataan katakanlah kami butuh ATK, kemudian kami butuh perjalanan dinas. Nah ketika ATK mau dibeli kita pesan dulu kepada toko. Kemudian begitu kita sudah pesan, kemudian mendapatkan bon, kemudian kita SPj-kan lengkap kita serahkan bendahara. Bendahara akan langsung mentransfer kepada pihak toko.” (Mas’adah, 2018b)

Pada bulan April 2018, pelaksanaan *Cash Management System* (CMS) ini mulai dimatangkan dengan menerbitkan peraturan bupati sebagai landasan hukumnya dan akan diterapkan pada tahun ini juga. Manfaat dari CMS ini adalah meminimalkan pembayaran transaksi yang tidak jelas dan menghilangkan calo pembayaran serta mengurangi terjadinya penyelewengan. Kalau pun terjadi penyelewengan, dengan sistem CMS ini akan segera terdeteksi karena sistem akan meninggalkan jejak-jejak pelakunya melalui sistem informasi.

4.4.3 Mekanisme Penatausahaan yang Transparan dan Akuntabel

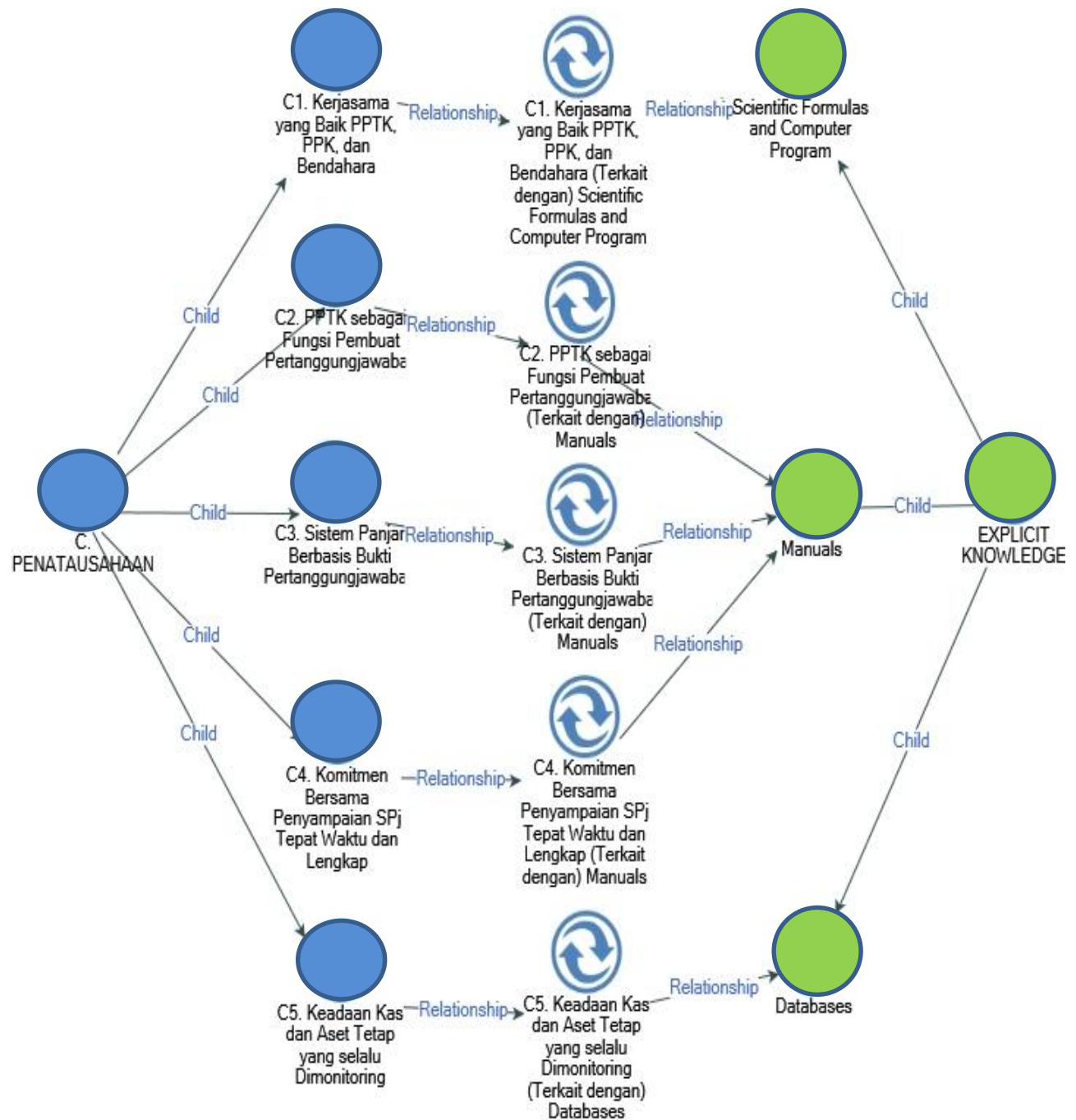
Mekanisme penatausahaan adalah tahapan mengadmistrasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai dari pengumpulan bukti-bukti pertanggungjawaban, mencatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan semua buku pembantunya, membuat register penutupan, membuat laporan Surat Pertanggungjawabn (SPj), melakukan verifikasi dan autorisasi, dan terakhir melakukan pengesahan SPj. Semua tahapan ini dilakukan di masing-masing

SKPD. BKAD memiliki peran dalam menerima tembusan laporan SPj yang disetorkan oleh bendahara maksimal setiap tanggal 10 bulan berjalan.

Dalam mekanisme ini ditemukan 5 kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini terbagi juga ke dalam 3 komponen pengetahuan *explicit knowledge* berikut ini.

- a) Komponen manual (buku, pedoman, dan laporan, panduan, peraturan, serta sistem dan prosedur) terdiri dari 3 kegiatan, yaitu 1) komitmen bersama penyampaian SPj tepat waktu dan lengkap; 2) PPTK berfungsi sebagai pembuat pertanggungjawaban; dan 3) sistem panjar berbasis bukti pertanggungjawaban.
- b) Komponen database terdiri dari 1 kegiatan, yaitu keadaan kas dan aset tetap yang selalu dimonitoring.
- c) Komponen kajian ilmiah, kebijakan, dan program komputer terdiri dari kegiatan kerjasama yang baik PPTK, PPK, dan bendahara.

Keterkaitan masing-masing komponen pengetahuan *explicit knowledge* dengan kegiatan transparansi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo berturut-turut diperlihatkan dalam peta analisis yang diolah melalui NVivo dan dijelaskan satu per satu pada gambar 4.8 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.8 ini, disajikan *matrix coding*-nya pada lampiran 7 di halaman 383.



Gambar 4.8 Peta Analisis Akhir
Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan
dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.4.3.1 Kerjasama yang Baik antara PPTK, PPK, dan Bendahara

Kegiatan ini merupakan kebijakan pemisahan wewenang. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas terpisah dan saling berkoordinasi. Empat fungsi pengelola keuangan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam proses terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik.

Banyak daerah yang memiliki keempat fungsi ini tapi tidak berjalan dengan semestinya. Seringkali semua pekerjaan pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD hanya dikerjakan sendiri dan terfokus di Bendahara. Hal ini karena adanya *mindset* pegawai yang mengakui bahwa urusan pengelolaan keuangan adalah urusan bendahara yang dianggap ahli dalam bidang keuangan. Dengan pemikiran semacam itu tidak sedikit pemerintah daerah yang membentuk PPTK dan PPK hanya formalitas saja untuk memenuhi ketentuan peraturan, tapi tidak berfungsi alias hanya namanya saja yang tertera dalam surat keputusan. Yang lebih parah lagi, biasanya ada juga pemerintah daerah yang membentuk PPTK dan PPK tetapi yang melaksanakan semua pekerjaannya adalah bendahara, begitu giliran waktunya menagih hak keuangan sangat antusias terima honor, namun ketika terjadi permasalahan semua itu dibebankan kepada bendahara.

Untuk Kabupaten Kulon Progo, PPTK, PPK, dan bendahara sangat berfungsi dengan baik. PPTK berfungsi sebagai pembuat dokumen pertanggungjawaban karena mereka yang melaksanakan kegiatan di lapangan (dibahas tersendiri di halaman 236

sampai 239 bab ini). PPK berfungsi melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang diajukan PPTK, membuat SPM, dan mengakuntansikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang telah disahkan. Sedangkan fungsi bendahara sendiri hanya membuat SPP dan membayar serta mempertanggungjawabkan semua jenis pengeluaran. Pemisahan fungsi yang tegas ini sangat berpengaruh terhadap proses pengendalian yang apabila terjadi kesalahan akan mudah terdeteksi. Sebagaimana dikatakan oleh PPK-Pembuat SPM BKAD berikut ini.

“Surat pernyataan verifikasi. Sudah ada dicentang kelengkapannya sudah, kemudian sudah ditandatangani karena itu punya kewenangannya masing-masing sebagai pengendalian. Kalau semua ditangani bendahara, pengendaliannya ada di mana?” (Mas’adah, 2018a)

Proses pelaksanaan pencairan mengikuti ketentuan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan bupati. Kerjasama yang baik terjadi secara siklis saat pembuatan SPj sampai dengan pencairan uang, begitu seterusnya. Pada awalnya ketika anggaran telah disahkan melalui DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menerima uang persediaan. Di saat yang sama PPTK juga mengidentifikasi semua kegiatan yang menjadi kewenangannya di masing-masing bidang. Jika sudah diperlukan sesuai waktu pelaksanaannya, PPTK kemudian mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Bendahara Pengeluaran. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karena sudah menggunakan CMS, yang boleh dibayar secara tunai hanyalah kegiatan SPPD dan BBM, selain itu semuanya nontunai dan ditransfer melalui rekening penerima.

PPTK kemudian membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) jika ingin menerima pencairan dari Bendahara Pengeluaran. SPj yang sudah dibuat oleh PPTK diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi sebelum dibuatkan SPP oleh Bendahara Pengeluaran.

“Nggak, kalau kita kan sebenarnya kalau di Kulon Progo itu kan sebelum kita SPP SPM, itu setiap SPj belanja itu diverifikasi dulu oleh PPK. Jadi ketika SPj itu sudah benar-bener valid, ee istilahnya dari segi angka atau rekening itu sudah sesuai, nanti baru ke bendahara. Nah di bendahara itu setelah di, istilahnya dicocokkan seperti itu baru nanti dibuku ke SIMDA.” (Resty, 2018)

Jika SPj telah sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui oleh PPK, maka SPj tersebut akan dibuatkan SPP oleh Bendahara Pengeluaran. Sebenarnya alur ini terbalik. Seharunya PPTK menyerahkan SPj-nya langsung kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP. Bendahara dalam hal ini harus melakukan verifikasi internal terlebih dahulu. Namun Bendahara Pengeluaran BKAD kembali menyatakan kalau ini dilakukan untuk memangkas waktu pelaksanaan verifikasi karena yang menentukan kebenaran verifikasi adalah PPK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Ada sebelum di ini itu diverifikasi sama pembantu PPK-Verifikator, Yang di apa, diverifikasi. Ketika PPTK itu mau mengembalikan SPj ke bendahara itu diverifikasi dulu. Sebelum naik ke pak kepala itu diverifikasi dulu, meminimalisir kesalahan, gitu, jadi biar nggak nanti ketika udah jadi SPP nggak bolak balik ke PPTK. Jadi curi start.” (Resty, 2018)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dibuatkan SPM. PPK-lah yang berwenang membuat Surat Perintah Membayar

(SPM). Sebelumnya PPK sekali lagi memverifikasi SPP yang dilampiri SPj dengan cara membuat draft SPM melalui Simda keuangan. Jika draf SPM ini lengkap maka persyaratan SPM akan dicentang, dan sebaliknya jika belum lengkap kolom persyaratannya tidak akan dicentang. SPM yang lengkap ini kemudian dimintakan tandatangan oleh PPK kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran, kata PPK-Pembuat SPM BKAD.

“Oh SPP kan gini. SPP kalau SPj sudah siap SPj sudah ok, clear, bendahara membuat SPP. SPP ditandatangani oleh kepala, tandatangani oleh bendahara, kemudian dimintakan persetujuan kepala. Ok sudah ditandatangani kepala, turun. Nanti PPK SPM membuat SPM berdasarkan SPP yang ada. Dan eu SPM itu sudah melalui Simda jadi PPK pembuat SPM tinggal klik dari simda yang ada.” (Mas’adah, 2018a)

Untuk bendahara penerimaan juga dilakukan dengan cara kerjasama yang sama. Bendahara Penerimaan hanya berhubungan dengan PPK dalam hal verifikasi SPj Penerimaan yang telah dibuatkan. PPK yang terkait dengan hal ini hanyalah Pembantu PPK urusan verifikasi dan petugas akuntansi sebelum dicatat ke dalam jurnal penerimaan. Menurut Bendahara Penerimaan BKAD, SPj tersebut harus melalui verifikator untuk diperiksa kelengkapannya.

“Iya. Nanti dicocokkan sama entry-annya Mbak Nisa itu. Kalau di sana kita ya udah kita kumpul di sana. Nanti kalau misalnya ada yang salah baru maksud saya memang arsipnya ditumpuknya di sana. Jadi kita nggak tentukan bakal lama di sana.” (Sutanti, 2018)

4.4.3.2 PPTK sebagai Fungsi Pembuat Dokumen Pertanggungjawaban

Bukti pertanggungjawaban merupakan hal yang paling sensitif dalam setiap pengelolaan keuangan, karena dokumen tersebut menjadi objek pemeriksaan BPK

dan Inspektorat. Tidak sedikit juga pemerintah daerah jarang memperhatikan pembuatan bukti-bukti pertanggungjawaban. Jika pelaksana kegiatan adalah orang lain, selalu yang menjadi pembuat buktinya adalah bendahara pengeluaran. Hal ini sebenarnya kurang tepat karena menimbulkan celah penyelewengan dan bersifat transaksional. Orang hanya mau duitnya saja tapi mengabaikan pertanggungjawaban. Kurangnya akuntabilitas seperti ini dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah, sehingga tidak jarang BPK selalu menemukan bukti-bukti pertanggungjawaban yang fiktif karena berbeda yang menerima dan yang membuat pertanggungjawaban.

Di Kabupaten Kulon Progo, PPTK adalah pemilik kegiatan sekaligus pelaksana kegiatan. Sehingga tepat jika yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban adalah PPTK karena pada awalnya PPTK-lah yang membuat dan mengusulkan RKA-SKPD sehingga mereka lebih mengetahui peruntukan dana kegiatan dan yang menerima uang panjar dari bendahara pengeluaran. PPTK bekerja sesuai dengan jumlah kegiatan yang dimilikinya. Jadi jika terdapat 30 kegiatan di suatu bidang, maka dibagi berdasarkan jumlah subbidang yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing karena kepala subbidang adalah PPTK. Misalnya jika dalam suatu bidang ada 3 subbidang, maka tiap satu PPTK mendapat 10 kegiatan yang memang sudah sesuai tupoksi dan kewenangannya. Jika ada kegiatan yang sifatnya umum akan dikonsultasikan kepada pengguna anggaran dan akan dibuatkan tim tersendiri untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Jika itu berhubungan dengan pengadaan, PPTK akan berkoordinasi dengan PPKom dan Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan. Hal itu dibenarkan oleh Bendahara Pengeluaran BKAD.

“Iya. Berarti mungkin tergantung kegiatannya ya. Misalkan ada 10, nggak harus cuman satu ya, harus dibagi-bagi gitu. Jadi ada tiga puluh kegiatan jadi tiga PPTK, satu PPTK sepuluh-sepuluh. Masing-masing Kasubag itu membikin rencana apa program.” (Resty, 2018)

PPTK juga melakukan pencatatan dan pembukuan tersendiri dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Bukan hanya pembukuan tapi juga membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian fisik dan keuangannya. Walaupun secara struktural sebenarnya tupoksi ini tidak ada tetapi semangat PPTK dalam membuat SPj perlu diapresiasi. Setiap PPTK ditunjuk satu orang staf sebagai operator yang bertugas membuat SPj dan tentunya juga tidak pernah di-SK-kan. Tugas dari operator ini meng-SPj-kan semua kegiatan dan membukukan ke dalam buku panjar. Jadi di samping tugas-tugasnya sebagai staf secara struktural juga bertugas membuat SPj. Di satu sisi kalau diperhatikan sebenarnya bendahara pengeluaran beban kerjanya berkurang, tetapi di sisi lain beban kerja di PPTK tersebut sangat berat karena harus menyelesaikan kewajiban pelaksanaan kegiatan dan anggarannya yang terdapat dalam anggaran kas, seperti yang dinyatakan oleh salah satu PPTK di Sekertariat BKAD berikut.

“Tidak ada. Itu adalah sampiran. Biasanya setiap PPTK memang pegang satu orang. Untuk membantu membuatkan SPj. Tapi kalau tugas membantu membuatkan tupoksi SPj tidak ada.” (Mas’adah, 2018b)

“Kalau di PPTK pembukuan masing-masing. Katakanlah saya di subbag keuangan. Saya mempunyai kegiatan keuangan, kemudian ada kegiatan pembuatan laporan. Nah kami punya kendali setiap PPTK, punya kendali terkait dengan kegiatan reklame masing-masing. Nah kalau di subbag keuangan terkait SPj saya serahkan kepada salah satu staf kami. Monggo untuk meng-SPj-kan terkait dengan kendalinya dia mengendalikan. “Oh ini anggaran kas sudah, mba ini tolong anggaran kas di bulan januari, februari,

bulan maret, nanti di bulan ini harus meng-SPj-kan apa, nanti dibulan ini harus meng-SPj-kan apa. Itu di bulan itu harus. Kebetulan staf kami sudah membuat kendalinya.” (Mas’adah, 2018b)

Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) merupakan syarat mutlak untuk diterima dan dibuatkan Surat Permitaan Pembayaran (SPP) oleh bendahara pengeluaran. Indikator SPj yang disetorkan oleh PPTK kepada bendahara pengeluaran telah lengkap adalah telah mendapatkan tanda tangan dari kepala SKPD selaku pengguna anggaran setelah sebelumnya diverifikasi oleh PPK dengan ketat. SPj yang lengkap baru akan dibayarkan bendahara kepada PPTK merupakan syarat diterimanya uang kegiatan oleh PPTK. Jadi dengan kata lain, ada SPj dan lengkap, pasti ada uang, seperti yang dikatakan oleh PPK-Pembuat SPM BKAD.

“Iya yang menyiapkan SPj adalah PPTK. Jadi masuk bendahara, itu sudah lengkap. Sudah tinggal bayar. Ditandatangani oleh kepala. Kepala sudah menyetujuinya. Kalau belum disetujui kepala, bendahara belum akan membayarkan. Jadi kalau ada SPj kok kepala itu belum tanda tangan belum menyetujui artinya bendahara belum akan mengeluarkan dana.” (Mas’adah, 2018b)

4.4.3.3 Sistem Panjar Berbasis Bukti Pertanggungjawaban

Kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama tentang pemberian panjar yang telah dijadikan panduan umum. Panduan tersebut diperkuat dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Kulon Progo.

Uang muka kerja atau dikenal dengan istilah panjar adalah pemberian uang tunai dari bendahara pengeluaran kepada PPTK atau pelaksana kegiatan pada awal kegiatan sebelum PPTK melaksanakan kegiatannya. Setiap uang yang dibayarkan

oleh bendahara disebut panjar apabila uang tunai tersebut sudah dibayarkan tetapi belum dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu panjar ini tidak dapat diakui sebagai belanja apabila belum dipertanggungjawabkan. Jadi sepanjang PPTK atau pelaksana kegiatan belum menyetorkan bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap uang yang diterimanya dari bendahara pengeluaran, maka panjar tersebut masih terhitung sebagai saldo kas tunai walaupun secara tunai uangnya tidak ada. Dalam permendagri No. 13 tahun 2006, uang panjar yang diperkenankan adalah uang panjar yang dibayarkan untuk kegiatan selain kegiatan dengan pembayaran langsung (LS). Artinya pembayaran panjar hanya bisa dibayarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPTK. Adapun pembayaran melalui kegiatan dengan pembayaran langsung seperti pengadaan barang/jasa oleh PPKom atau panitia pengadaan dilarang menggunakan uang panjar atau uang persediaan.

Di kabupaten Kulon Progo pembayaran uang panjar didasarkan pada bukti-bukti pertanggungjawaban. Dalam konteks *cash management system* yang sudah diterapkan saat ini, panjar berbasis bukti pertanggungjawaban adalah uang panjar yang hanya bisa dibayarkan jika pertanggungjawaban sudah diterima oleh bendahara pengeluaran walaupun uangnya belum dibayarkan. Ini artinya PPTK diwajibkan menyediakan terlebih dahulu bukti-bukti pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut PPTK harus menggunakan pihak ketiga atau dengan kata lain berhutang terlebih dahulu dengan pihak ketiga. Jadi untuk melaksanakan kegiatannya, PPTK menerima barang/jasa terlebih dahulu dari pihak ketiga dan nanti dibayar

kemudian melalui transfer langsung oleh bendahara pengeluaran. Hal ini dibenarkan oleh Bendahara Pengeluaran BKAD berikut ini.

“Nggak ada, jadi sekarang sistemnya SPj jadi dulu baru nanti bendahara transfer. Karena kan kalau misalnya kita transfer dulu ternyata nanti SPj nggak sesuai kan kita mau minta ke rekanan lagi udah susah, kalau misalnya ada kelebihan, kalau misalnya masih kurang, kita masih transfer lagi. Tapi kalau misalnya kelebihan belanja kan kita juga agak.” (Resty, 2018)

Ada pengecualian untuk sistem pembayaran panjar berbasis bukti pertanggungjawaban ini yaitu hanya untuk kegiatan perjalanan dinas (dinas luar/DL atau SPPD) dan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Untuk kedua kegiatan ini bendahara akan membayar secara tunai dan pertanggungjawabannya nanti diserahkan kemudian. Menurut Bendahara Pengeluaran BKAD, selain kedua kegiatan ini, panjar tidak akan dibayarkan.

“Jadi misalnya PPTK mau DL ke Jakarta misalnya, nanti ngajuin dulu panjar, kan sudah perhitungan misalnya mau berapa hari, ada uang saku berapa, terus misalnya ee tiketnya berapa, transport lokalnya berapa, nanti ngajuin ke bendahara nanti kita kasih cash, setelah itu mereka pulang bikin SPj baru kembali ke bendahara.” (Resty, 2018)

Sistem pembayaran panjar di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 2 jenis, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu mekanisme pembuatan SPj tanpa uang panjar dan mekanisme pembuatan SPj dengan uang panjar.

4.4.3.4 Komitmen Bersama Penyampaian SPj Tepat Waktu dan Lengkap

Kegiatan ini berkaitan dengan adanya sistem dan prosedur yang jelas tentang alur pertanggungjawaban. Dalam berbagai peraturan tentang pengelolaan keuangan

daerah, tidak diatur dengan tegas berapa lama panjar yang telah dibayarkan harus dipertanggungjawabkan.

Banyak pemerintah daerah yang bersikap tidak membuat peraturan turunan untuk mengatur batasan waktu lamanya panjar beredar. Inilah yang menyebabkan banyak SKPD yang melaksanakan kegiatan begitu terima panjar sangat lama membuat pertanggungjawaban, padahal seringkali uang telah habis dibelanjakan dan kegiatannya telah selesai. Mereka belum mengetahui kalau kecepatan perputaran uang persediaan sangat tergantung dari cepatnya panjar dipertanggungjawabkan. Ini menandakan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah bagi setiap daerah yang buruk pengelolaan keuangannya.

Untuk kabupaten Kulon Progo, batas waktu penyampaian bukti-bukti pertanggungjawaban setelah uang panjar diterima adalah 7 hari. Batas waktu ini ditetapkan tidak secara tertulis dan hanya berdasarkan komitmen bersama. Tidak juga dibuatkan peraturan semacam surat keputusan atau surat edaran. Jika Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban dalam batas waktu tersebut, maka panjar yang telah diterimanya harus dikembalikan tunai. Apabila tidak dikembalikan, maka perputaran uang persediaan yang ada di tangan bendahara pengeluaran menjadi tersendat sehingga mengganggu kegiatan yang ada di PPTK lainnya. Bendahara Pengeluaran dan PPTK BKAD mengakui dan membenarkannya berikut ini.

“Kalau yang LS kan udah jadi baru ditransfer, jadi nggak ada masalah nggeh. Kalau yang UP misalnya ambil panjer, kita kasih waktu maksimal satu minggu harus kembali, kalau satu minggu nggak kembali nanti

kembali tunai ke bendahara, ditarik lagi. Jadi ada sejenis apa ya.” (Resty, 2018)

“Batasan dari kesepakatan kita. Iya satu minggu harus dikembalikan. Kalau satu minggu tidak dikembalikan harus ditarik lagi. Iya. Sudah kesepakatan bersama. Kalau tidak mau ya tarik. Tarik ya semua sudah menyadari.” (Mas’adah, 2018b)

Lalu apa sanksinya jika ternyata PPTK sudah menerima uang panjar tapi tidak mempertanggungjawabkan? Keterlambatan menyerahkan pertanggungjawaban akan berdampak pada kegiatan yang ada di PPTK lainnya. PPTK yang tidak menyerahkan SPj akan mendapat sanksi berupa penilaian kinerjanya menjadi merah sehingga mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP yang akan diterima. Sanksi ini diberikan secara kolektif, artinya jika PPTK yang berbuat kesalahan maka seluruh SKPD kinerjanya merah dan semua mendapat pengurangan TPP. Inilah yang menyebabkan komitmen mereka sangat kuat dalam memenuhi target waktu penyampaian pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran sehingga apabila tidak menepatinya akan menjadi beban moral bagi mereka. Demikian diakui oleh Bendahara Pengeluaran BKAD.

“Nanti ada sanksinya. Biasanya dari kinerjanya jadi merah nanti.”
(Resty, 2018)

4.4.3.5 Keadaan Kas dan Aset Tetap yang Selalu Dimonitoring

Kegiatan ini mengatur tentang sistem pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan daerah terutama tentang kas dan aset tetap. Pengawasan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam upaya menjamin pelaksanaan

APBD agar terlaksana sesuai dengan perencanaan. Salah satu aspek penting dari pengawasan keuangan daerah tersebut adalah monitoring.

Dalam konteks keuangan daerah, monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Kas dan aset tetap merupakan objek pengelolaan keuangan daerah yang sangat rawan untuk dimanipulasi dan diselewengkan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan SKPD yang sering mendapatkan penekanan untuk dimonitoring di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari keadaan kas dan kondisi aset tetap daerah.

Sebagai contoh di BKAD Kulon Progo, pengguna anggaran setiap 3 bulan sekali selalu meminta laporan pembukuan kas melalui berita acara pemeriksaan kas. Jika terdapat hal-hal yang menjadi masalah, PPTK akan dipanggil untuk dibahas bersama. Hal itu diakui langsung oleh Kepala Subbagian Keuangan BKAD yang juga merangkap sebagai salah satu PPTK di Sekretariat BKAD.

“Euu kepala setiap 3 bulan sekali itu euu membuat berita acara terkait pembukuan kas. Jadi eu kepala itu memonitor terkait dengan keadaan kas setiap 3 bulan sekali selama kontrol monitor. Juga terkait dengan kegiatan di SPj kami semua ditandatangani oleh kepala. Jadi terkait SPj, SPj itu dibuat oleh PPTK. Kemudian diparaf oleh pembuat PPTK, di paraf oleh penanggungjawabnya program, penanggungjawab kegiatan, penanggungjawab program. Penanggungjawab kegiatannya adalah eselon III-nya, atasan langsung nah setelah itu dimintakan tanda tangan kepada pak kepala, nah setiap kali diminta kepada pak kepala, pak kepala pun akan selalu melihat. Kira-kira pas gak, srek gak. Kalau memang belum srek, belum pas, pak kepala tidak akan tandatangan terkait dengan SPj itu. Seringkali terjadi seperti itu juga. (Mas’adah, 2018b)

Untuk aset tetap, pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah memonitor aset tetap sejak dari usulan Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) yang juga terkait dengan plafonisasi anggaran. Pengadaan aset tetap dilakukan dengan mempertimbangkan surplus berdasarkan kondisi tahun sebelumnya. Jadi tipe aset yang ada akan disandingkan dengan usulan dalam RKBMD. Jika usulan dirasa melebihi dari yang sewajarnya, maka akan dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan saja. Kepala Bidang Aset BKAD menyatakan:

“Jadi apa namanya, hasil-hasil desk kita itu, semuanya kan kita buat rangkap dua, kita kembalikan ke SKPD kemudian kita serahkan ke Bappeda. Setelah masuk dalam Bappeda nanti kategorinya kan masih disandingkan dengan plafon yang ada. Nah nanti semuanya dikembalikan lagi kepada SKPD, nanti dari prioritas yang sudah muncul tadi mana yang menjadi prioritas utama yang akan masuk di dalam apa namanya APBD, RKA. Jadi begitu.” (Amrullah, 2018a)

Untuk pengadaan aset tetap, saat ini pemerintah daerah menyerahkannya kepada setiap SKPD mengajukan usulan langsung ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), jadi tidak melalui bidang aset di BKAD lagi. Bidang Aset hanya memberikan rambu-rambu supaya tetap dipatuhi. Sebagai contoh, di setiap SKPD selalu melakukan pengamanan kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 yang dikenal dengan nama “Apel Kendaraan Dinas”. Apel kendaraan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pemeliharaan sudah dilakukan untuk kendaraan tersebut. Kepala Bidang Aset BKAD menyatakan:

“Apel kendaraan itu kan salah satu bentuk untuk pengamanan apa..pengamanan kendaraan. Jadi kendaraan kan kita eeh serahkan atau kita eeh..dimanfaatkan, yang pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban

pejabat struktural atau fungsional tertentu. Eeh itu kan secara berkala kita lakukan apel kendaraan.” (Amrullah, 2018a)

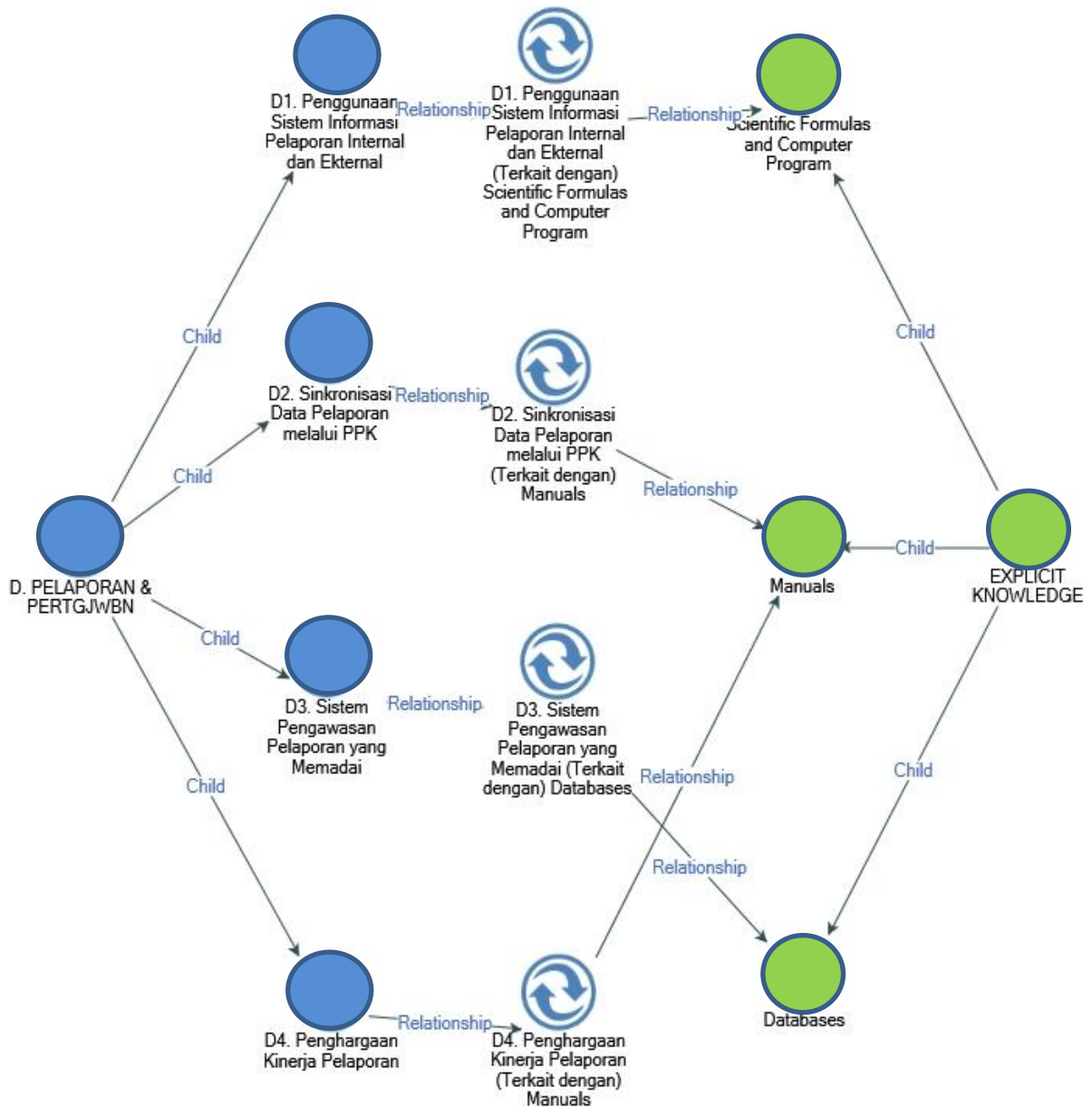
4.4.4 Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir yang berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban di Kabupaten Kulon Progo yang dimulai dari pembuatan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan sampai dengan kegiatan pengawasan dan berakhir dengan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ditemukan 4 kegiatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini terbagi juga ke dalam 3 komponen pengetahuan *explicit knowledge* berikut ini.

- 1) Komponen manual (buku, pedoman, laporan, panduan, peraturan, serta sistem dan prosedur) terdiri 2 kegiatan, yaitu penghargaan kinerja pelaporan dan kegiatan sinkronisasi data pelaporan melalui PPK.
- 2) Komponen database terdiri dari 1 kegiatan, yaitu sistem pengawasan pelaporan yang memadai.
- 3) Komponen kajian ilmiah, kebijakan, dan program komputer terdiri dari 1 kegiatan yaitu penggunaan sistem informasi pelaporan internal dan eksternal.

Masing-masing kegiatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan tersebut berturut-turut diperlihatkan dalam peta analisis yang diolah melalui NVivo dan dijelaskan satu per satu melalui gambar 4.9 berikut ini. Untuk mempermudah

membaca gambar 4.9 ini, disajikan *matrix coding*-nya pada lampiran 7 di halaman 383.



Gambar 4.9 Peta Analisis Akhir
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.4.4.1 Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal

Kegiatan ini berkaitan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi yaitu *software* sistem pemrosesan data keuangan, *software* sistem pemrosesan data aset, dan *software* sistem pemrosesan data pengawasan. Di Kabupaten Kulon Progo, sistem pemrosesan data keuangan yang juga merupakan sistem informasi eksternal digunakan di setiap SKPD dan dikendalikan oleh BKAD dan operatornya masing-masing berada di bidang perbendaharaan, bidang anggaran, dan bidang akuntansi. Sistem pemrosesan data aset yang juga merupakan sistem informasi internal digunakan di setiap SKPD dan dikendalikan oleh BKAD khusus di bidang aset. Sementara sistem pemrosesan data pengawasan yang juga merupakan sistem informasi eksternal digunakan di Inspektorat Daerah dan dikendalikan langsung oleh Inspektorat Daerah.

Dari pemrosesan data keuangan di pemerintah kabupaten Kulon Progo, aplikasi yang sering digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau dikenal dengan nama Simda. Simda adalah aplikasi eksternal buatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi ini paling banyak digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia karena selain mudah dan sederhana dalam penerapannya juga karena gratis untuk pemerintah daerah.

Simda digunakan untuk pemrosesan data keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dengan *user* di perencana keuangan

(bidang anggaran dan semua kasubbag perencanaan SKPD), bendahara pengeluaran (setiap SKPD), bendahara penerimaan (bidang pendapatan dan SKPD pengolah pendapatan), PPK (semua SKPD), PPKD (bidang perbendaharaan) dan pembuatan laporan keuangan pemda (bidang akuntansi dan pelaporan). Antara masing-masing pengguna Simda ini sudah *online* sehingga mudah dikendalikan.

Untuk pelaporan yang menghasilkan LKPD, data diolah secara berurutan ketika data diinput melalui SPP, SPM, SP2D baik yang UP, GU, TU, dan LS termasuk penatausahaan melalui buku register, BKU dan buku pembantunya, semuanya sudah secara otomatis akan menghasilkan laporan keuangan, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

“Oh, jadi kalau kan kita juga pake SIMDA, eee, SP2D terbit UP cair sudah terbuku di SIMDA. Dan nanti bendahara keluar masuknya uang juga uang dia juga udah dia membukukan di SIMDA. BKU segala macam sama fungsional, jadi nanti terkondisi di sana di fungsinya ada sisa kas, Ok, eeeee. Iya. Ada sisa kas. Dari sana kita lihat tinggal berapa, udah nanti e GU juga prosesnya udah langsung di SIMDA ada gitu. Jadi.”(Artiningsih, 2018a)

“He e, sampe LS juga. LS e... dari SP2D udah ada kan ada register SP2D yang LS segala macam. Udah nanti sampe fungsional realisasinya udah masuk. Sampe ke LRA nah enaknya pake aplikasi itu. Jadi teman-teman gak gak terlalu repot paling cuman melengkapi kelengkapan SPj-SPj itu aja.” (Artiningsih, 2018a)

Untuk pelaporan yang menghasilkan laporan barang milik daerah (aset tetap), sistem informasi internal yang ada di bidang aset belum *online* dengan Simda yang ada di bidang lainnya, sehingga data pelaporan keuangan untuk menghasilkan LPKD harus diekspor-impor manual. Pencatatan dilakukan secara manual melalui jurnal penyesuaian. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan kembali menyatakan:

“Aset itukan karena kita tidak terintegrasi kasihan. Kita tidak terintegrasi SIM-nya jadi di sana ada SIM sendiri. Bidang Aset. Nah karna proses penyusunan neraca itu diakhir tahun maka e.. nilai aset akan masuk ke SIMDA secara manual di jurnal manual pada saat proses penyusunan laporan keuangan.” (Artiningsih, 2018a)

Untuk sistem informasi di bidang pengawasan yang dikendalikan oleh Inspektorat Daerah, menggunakan aplikasi eksternal yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengolah data tentang tindak lanjut atas temuan baik yang ditemukan oleh BPK sendiri maupaun temuan oleh Inspektorat. Aplikasi ini dikelola Inspektorat dan sifatnya tertutup serta hanya bisa diakses oleh pegawai Inspektorat tertentu. Jika masyarakat ingin mengetahui hasil-hasil pemeriksaan yang sifatnya umum, hanya bisa dilihat lewat *website* Inspektorat Daerah.

“Kita baru SIM... SIM pengawasan itu SIM.. kaya apa.. sama SIM yang dari BPK itu masalah tindak lanjut-tindak lanjut, kita lewat SIM. Dan tidak semua orang bisa membuka secara.., harus punya password-nya. Kalau mau mengakses ya.. yang hanya sudah di.. unggah di.. Web-nya Inspektorat.” (Fitriani, 2018)

4.4.4.2 Sinkronisasi Data Pelaporan Keuangan melalui PPK

Kegiatan ini berkaitan dengan adanya kebijakan dalam melakukan sinkronisasi data yang diatur dalam peraturan turunan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu kelemahan yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya dalam membuat laporan keuangan adalah masalah data yang *output* datanya berbeda antara Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pembuat laporan keuangan SKPD yang nantinya akan dikompilasi. Penyebabnya bisa bermacam-macam tetapi yang utama adalah kesalahan catat atau belum dicatat. Kelemahan ini sering kita temukan bukan hanya di pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi sistem informasi tetapi juga di pemerintah daerah yang sudah menggunakan aplikasi sistem informasi. Jika kesalahan catat atau belum catat yang terjadi, seringkali susah untuk dikoordinasikan antara SKPD dengan BKAD karena catatan yang tidak lengkap, sehingga memakan waktu lama untuk mengatasinya.

Di kabupaten Kulon Progo, untuk mengantisipasi kesalahan data seperti di atas dilakukan pencocokkan atau sinkronisasi data setiap bulan oleh masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang dikoordinir langsung oleh bidang akuntansi BKAD. Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD, pada akhir bulan PPK akan melakukan *posting* jika datanya telah sesuai dan cocok yang nantinya akan dikirim ke bidang akuntansi melalui data *online* antar-Simda.

“Dia akan memposting monggo entar akhir bulan atau diawal bulan nah sebelum itu pasti dia sinkronisasi dulu. Kan saya selalu bilang ke SKPD, antara bendahara, petugas akuntansi, bendahara pengeluaran, penerimaan itu harus koodinasi internal di bawah PPK-SKPD. Nah, proses itulah yang mereka lakukan sinkronisasi.” (Artiningsih, 2018a)

Setiap SKPD memiliki PPK termasuk di Bendahara Uumum Daerah (BUD). PPK yang disertai tugas untuk mensinkronkan data adalah PPK petugas akuntansi.

Sebelumnya PPK hanya berada di tingkat SKPD, sementara di PPKD selaku SKPKD pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi, saat ini yang menjadi PPK di BKAD selaku SKPKD adalah bidang akuntansi yang disebut PPK-PPKD, sehingga jalur koordinasi tidak terputus. Menurut kepala bidangnya, bidang akuntansi dipilih dengan alasan tupoksinya yang sangat mendekeati.

“Kan petugas akuntansi PPKD itu kan e tidak bisa ditunjuk karna kita kurang SDM, Lah siapa gitu kan? Akhirnya secara tugasnya dilakukan oleh bidang yang tupoksinya mendekeati. Nah karna itu akuntansi maka di bidang akuntansi kami yang melakukan. Kami buat e akuntansi nya PPKD seringnya kan dia masuk ke dalam akuntansi Pemda.” (Artiningsih, 2018a)

Masih menurut Kepala Bidang Akuntansi BKAD, penunjukkan bidang akuntansi selaku PPK-PPKD masih bersifat sementara karena kendala kekurangan SDM. Pada tahun anggaran 2019, akan ditunjuk petugas akuntansi khusus untuk PPKD.

“Kami di akuntansi nanti hanya mengkonversi termasuk PPKD kalau ka sekarang kalau sen, kami yang kompilasi ya melakukan ya BPKD. Tapi kalau mulai 2019 sudah akan ditunjuk oleh. 2018 kan udah terlambat ya seperti kan dah jalan. Jadi kita melakukan dan mengkompilasi. Nah kalau besok kita tidak melakukan, karna sudah ada petugasnya sendiri berakuntansi khusus PPKD kami tinggal mengkompilasi.” (Artiningsih, 2018a)

4.4.4.3 Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai

Kegiatan ini membahas tentang *database* yang diolah melalui sistem informasi “MonevKu” dan sistem pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Sudah menjadi kewajiban bahwa setiap rupiah APBD yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban harus diawasi dengan

ketat melalui SKPD pengawas. Ada beberapa model pengawasan terhadap pelaporan pertanggungjawaban terutama laporan keuangan yaitu reviu laporan keuangan, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan reguler. Pengawasan dilakukan baik oleh pengawas internal seperti Inspektorat Daerah dan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pengawasan internal setiap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah selesai disusun dan sebelum diserahkan ke BPK wajib direviu oleh Inpektorat Daerah.

Di Kabupten Kulon Progo, pengawasan terhadap pelaporan yang berupa reviu atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terdiri dari 2 jenis yaitu reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan reviu laporan keuangan SKPD. Masing-masing dilaksanakan dengan jumlah waktu 15 hari per laporan. Reviu atas laporan keuangan SKPD dilakukan pertama kali sebelum reviu laporan keuangan pemerintah daerah karena laporan SKPD ini menjadi dasar penyusunan LKPD. Hasil reviu atas laporan keuangan SKPD menjadi dasar dalam mereviu LKPD yang mungkin berisi berbagai perbaikan angka-angka dan penjelasan lainnya, seperti yang dikatakan oleh salah satu auditor di Inspektorat Daerah.

“Reviu biasanya, ada dua reviu. Jadi yang pertama reviu laporan keuangan SKPD, dan reviu laporan keuangan LKPD jadi masing-masing 15 hari. Tapi waktunya bersamaan dengan penyusunan laporan.. kan laporan keuangan SKPD dulu jadi baru dikonsolidasi di laporan keuangan LKPD.”
(Fitriani, 2018)

Selain pengawasan melalui reviu laporan keuangan, untuk menghadapi pemeriksaan rutin dan reguler, disediakan semacam unit konsultasi yang bertujuan

menyelesaikan permasalahan yang berpotensi menjadi temuan pemeriksa. Unit konsultasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Ruang lingkup konsultasi ini tidak masuk dalam lingkup pengawasan baik internal, eksternal, rutin, dan reguler. Jadi semacam forum pengawasan nonformal untuk pendampingan setiap SKPD agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Fitriani selaku auditor Inspektorat Daerah kembali menyatakan:

“...ada juga kita pembinaan-pembinaan, pendampingan-pendampingan. Kadang dari SKPD konsultasi ke kami juga, ada yang namanya unit konsultasi. Ya, jadi setiap SKPD, atau dari desa atau dari manapun ketika ada kebingungan masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, atau barang bisa konsultasi di sini.” (Fitriani, 2018)

4.4.4.4 Penghargaan Kinerja Pelaporan

Kegiatan ini merupakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Saat ini banyak pemerintah daerah berlomba-lomba menganggarkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan tertentu di luar gaji pokok sebagai pegawai ASN dengan alasan untuk meningkatkan semangat dan kinerja pemerintahan.

Ada dua sistem pembayaran gaji berbasis kinerja ini yaitu Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Baru beberapa daerah yang sukses melaksanakan sistem tunjangan berbasis kinerja seperti DKI Jakarta, dan beberapa propinsi lainnya. Namun tidak sedikit juga pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem tunjangan berbasis kinerja karena terkendala indikator kinerja

yang menjadi tolok ukur pembayarannya. Akibatnya banyak pemerintah daerah yang hanya melakukan pembayaran dengan sistem TPP, termasuk di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam menghitung pembayaran TPP di Kabupaten Kulon Progo, kinerja pelaporan keuangan menjadi salah satu indikator penilaian. Indikator ini berada dalam pengendalian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulon Progo. Jika terjadi ketidaksesuaian target atau tidak maksimal pencapaian kinerjanya, tidak ada hukuman yang diberikan, hanya saja dapat mengurangi *grade* dari kinerja pelaporannya. Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Akuntansi:

“Kadang e BKPP yang punya TPP ya? Diakan punya grade, Nah, nilainya diambil dari Inspektorat, BKAD, Bappeda. Automatis nanti TPP-nya juga gak bisa 100%, tetapi e itukan cuma salah satu komponen penilai.” (Artiningsih, 2018a)

“Kalau secara eksplisit kita tidak tidak memberikan punishment hanya saja kan yang namanya teguran itu sudah secara ini toh, e sudah secara apa ya caranya ni ki kinerja dia kan buruk, karna kalau dia telat pun, kan ada di Bappeda, Bappeda ada penilaian istilahnya raport yang itu toh. Nah itu juga pengaruhnya ke sana. ada grade-grade-nya diumumkan tapi itu di Bappeda ya.” (Artiningsih, 2018a)

Dampak dari tidak tercapainya perhitungan kinerja juga dilakukan secara kolektif dan bukan bersifat individu, sehingga apabila salah satu orang bekerja tidak mencapai target, maka hanya diberi teguran tetapi seluruh SKPD mendapatkan pengurangan nilai kinerja. Akibatnya tunjangan TPP yang diterima per individu juga menjadi berkurang. Kepala Bidang Akuntansi BKAD kembali menyatakan:

“Iya. Cuma kan dia nilainya jatuh itu bisa jadi kenapa? apakah di BKAD atau di Bappeda e.. monev-nya atau di Inspektorat mungkin ada temuan yang belum ditindaklanjuti? Gitu. TPP itu kalau misalnya e... jelek cuma 80% misalnya itu satu SKPD dapat 80%.” (Artiningsih, 2018a)

4.5 Budaya Kerja yang Membentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini akan dibahas jenis pengetahuan *tacit knowledge* yang terdiri dari 2 pembahasan utama yaitu budaya kerja dan proses terjadinya budaya tersebut yang dianalisis melalui proses SECI. Budaya kerja diidentifikasi dari tugas-tugas keseharian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil wawancara. Sementara proses terbentuknya budaya, selain dengan wawancara juga dianalisis dengan SECI untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses transfer pengetahuan yang sedang terjadi.

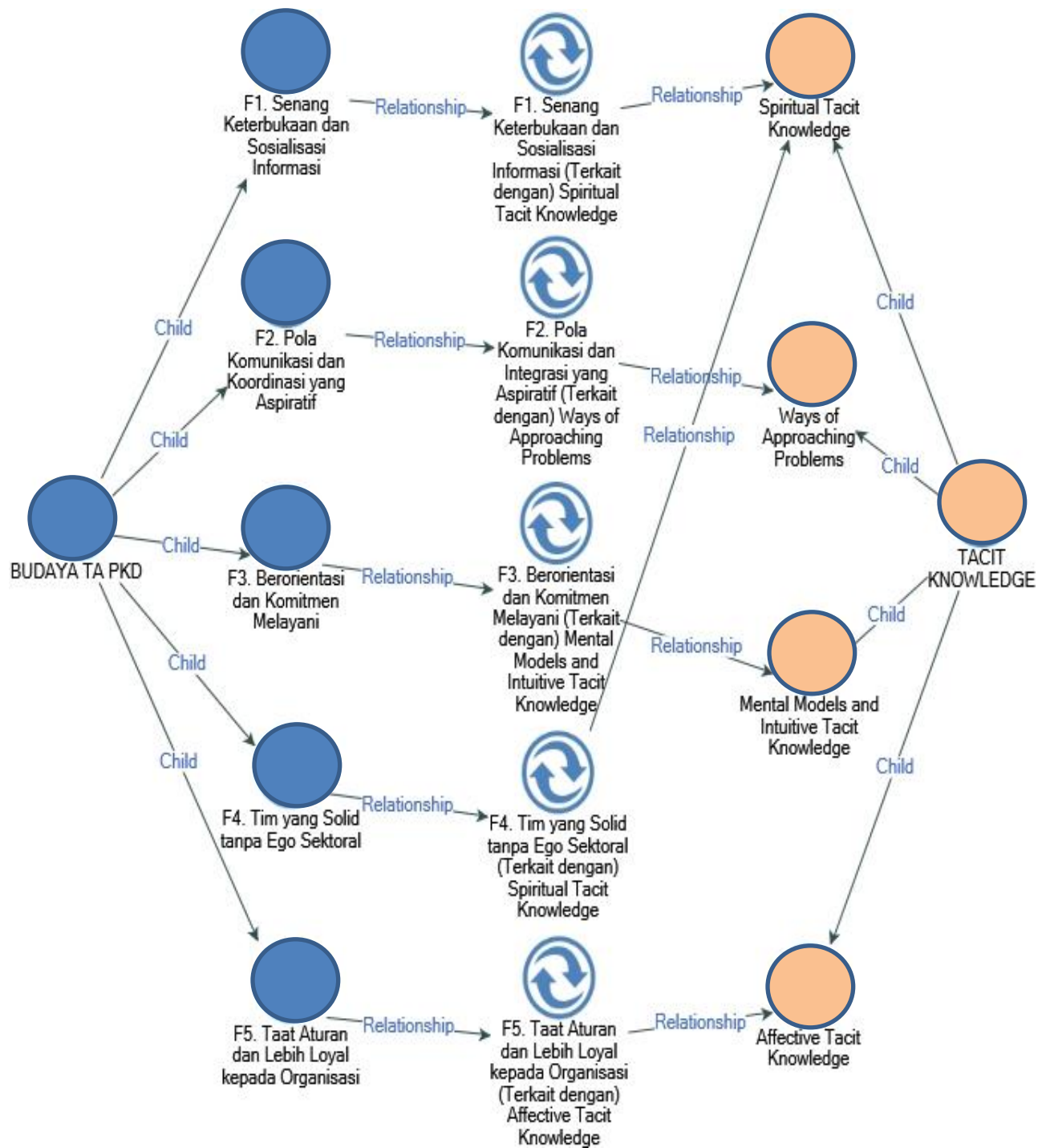
4.5.1 Budaya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Pada bagian ini dibahas tentang budaya transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan dikaitkan dengan adanya budaya sebagai pengetahuan *tacit knowledge*. Dalam aktivitas keseharian mengelola keuangan daerah di Kulon Progo ditemukan paling kurang 5 budaya kerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Budaya ini dimasukkan lagi ke dalam 4 komponen pengetahuan *tacit knowledge* berikut ini.

- 1) Pengetahuan *tacit spritual knowledge* terdiri kegiatan senang keterbukaan dan sosialisasi informasi.

- 2) Cara-cara menyelesaikan masalah (*ways of approaching problem*) terdiri dari kegiatan pola komunikasi dan integrasi yang aspiratif.
- 3) Model mental dan pengetahuan intuitif (*mental models dan intuitive tacit knowledge*), terdiri dari kegiatan berorientasi dan komitmen melayani.
- 4) Pengetahuan tasit afektif (*affective tacit knowledge*) terdiri dari kegiatan taat aturan dan lebih loyal kepada organisasi.

Keterkaitan masing-masing komponent *tacit knowledge* dengan kegiatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo berturut-turut diperlihatkan dalam peta analisis yang diolah dengan NVivo dan dijelaskan satu per satu melalui gambar 4.10 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.10 ini, keterangan lengkap disajikan melalui *matrix coding* pada lampiran 8 di halaman 384.



Gambar 4.10 Peta Analisis Akhir
Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.5.1.1 Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi

Keterbukaan dan sosialisasi telah dijiwai dalam setiap pemikiran dan tindakan para pengelola keuangan di Kabupaten Kulon Progo. Keterbukaan dan sosialisasi informasi merupakan pengetahuan tasit yang sering terjadi saat melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan APBD di Bappeda dan BKAD. Mula-mula budaya ini terbentuk dengan adanya *mindset* tentang keterbukaan di kalangan para pengelola keuangan. Bagi mereka keterbukaan itu informasinya mudah diakses bagi siapa saja dan tidak ada yang disembunyikan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

“Oke, transparan itu ketika semua informasi disajikan secara wajar didukung bukti yang sah dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, menurut saya itu transparan. Jadi, tidak ada hal yang disembunyikan.” (Artiningsih, 2018c)

Budaya keterbukaan yang sering dilakukan adalah penyusunannya yang bersifat *bottom up*, dan itu dapat dilihat dari mekanisme perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, kebiasaan melakukan perencanaan didasarkan atas aspirasi masyarakat walaupun hanya berupa ide dan dilakukan dengan siklus tahunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Selain itu, penyusunan sebelum Rencana Kerja Anggaran (pra-RKA) juga tidak semata-mata dari usulan SKPD tetapi disaring secara hirarki dan selanjutnya dalam penyusunan RKA, datanya hanya boleh diambil dari sistem informasi perencanaan yang sudah menjadi basis data. Kepala Bidang Anggaran BKAD menjelaskannya secara runtut berikut ini.

“Ketika Musrenbang Kecamatan sudah di sepakati hasilnya seperti apa, hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Artinya Musrenbang Kabupaten itu tidak semata-mata hanya dari usulan SKPD Kabupaten. Tapi, sudah apa ya, Artinya yang dibahas di Musrenbang Kabupaten itu sudah tidak hanya usulan dari SKPD. Tapi, sudah me--, apa ya, enak, istilahnya itu, sudah mengambil dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan tadi.” (Zuniastuti, 2018)

Tugas ini rutin dilakukan terbuka di Bappeda dengan sistem aplikasi *“RencanaKu”*. Dengan adanya aplikasi ini, sekitar 30% sampai dengan 50% tugas perencanaan belanja akan diselesaikan di Bappeda sehingga sangat menghemat waktu penyusunan anggaran di BKAD yang tinggal menyisakan tugas perencanaan pendapatan.

“Ketika “RencanaKu” dan Simda sudah terkoneksi, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa diminimalisir. Mungkin itu ya, jadi, jadi kami memang penyusunan APBD itu memang tidak serta-merta berdiri sendiri karena sudah ada proses sebelumnya di Bappeda sejak dari RKPD dan KUA-PPAS. Bahkan mungkin 30% atau 50% pekerjaan penyusunan APBD itu sudah tertuang di Bappeda. Tapi, tapi itu anu ya, belanjanya. Tapi, kalau di BKAD kami kan selain belanja juga ada pendapatan.” (Zuniastuti, 2018)

Dengan adanya keterbukaan ini masyarakat bisa mengetahui apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Di tingkat desa dan kecamatan ini, pokok-pokok pikiran dewan juga sudah diakomodir, bahkan masyarakat yang mengusulkan rencana pembangunan pun bisa mengetahui usulannya diterima atau tidak.

“Jadi, apa yang tertuang di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan itu nanti terakomodir juga di “RencanaKu”. Dia bisa ngecek usulan kecamatan dari Kecamatan A itu masuk nggak ya ketika mengusulkan perbaikan jalan dia bisa ngecek di eee di SKPD PU. Ruas jalanku muncul nggak ya dibangun nggak ya, itu bisa nge-klik di “RencanaKu”, bisa

ngecek, nggih. Tapi, yang, yang bisa diakses oleh publik itu memang “RencanaKu”.” (Zuniastuti, 2018)

Budaya sosialisasi yang sering dilakukan juga terjadi baik di tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Sosialisasi terdiri dari 2 bentuk yaitu sosialisasi informasi ke luar dan sosialisasi informasi ke dalam. Informasi hasil-hasil pembangunan yang disosialisasikan ke luar berupa informasi hasil-hasil pembangunan. Hal ini diakui juga oleh Kepala Bidang Pendapatan BKAD.

“Memang kemudian tidak dilaporkan kemana, cuma di dalam APBD kan ada setiap tahun ada ringkasan APBD, kemudian dipublikasikan di mas media. Nah tapi bukan kami. Itu pemda secara keseluruhan bersama-sama. Semacam itu. Kalau masalah apakah itu transparan, siapa pun boleh kok mas. Memang kami tidak menempelkan “ini loh targetnya sekian”. Tidak. Tapi siapa pun untuk kebutuhan mereka baik itu untuk penelitian, baik itu untuk memuaskan seseorang butuh informasi, ya tidak apa-apa. Ya kita kasih di situ. Ya begitu mas. Biasanya yang datang mahasiswa. “Pak realisasinya sudah mencapai angka berapa sekarang”. Itu pertanyaan biasa itu. Tidak ada yang ditutupi kok mas...” (Sunarya, 2018)

Sementara untuk informasi yang disosialisasikan ke dalam berupa panduan dan pedoman yang harus dilaksanakan sehari-hari yang berasal dari pengetahuan atau peraturan terbaru untuk lebih meningkatkan kualitas hasil kerja pengelola keuangan. Media sosialisasi dilakukan melalui aplikasi, surat, pengumuman, media massa, website, atau media sosial seperti *what's up*. Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD kembali menyatakan:

“Kita sosialisasinya ada bentuknya adalah penerbitan surat edaran kepada semua OPD untuk menyusun dokumen Pra-RKA atau Pra Rencana Kegiatan Anggaran. Jadi, itu kalau di PPAS itu kan sudah tertuang sebuah program itu terdiri dari kegiatan apa saja...” (Zuniastuti, 2018)

“Tadi kan saya punya forum koordinasi. Nah, pada moment itu kita share apa yang baru, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya seperti itu. Paling nggak kita sosialisasi dulu, kita minta SKPD coba. Itu ada caranya, nah itu kita share di WA, ayo input, caranya begini, buka ini, buka ini, itu sudah lengkap di WA, dicoba dululah gitu. Ketika bisa ya sudah nggak usah ke sini tapi kalau ada kesulitan yuk ke sini.” (Artiningsih, 2018c)

“Karena Perbup-nya kan cuma bla-bla pasal-pasal. Nah, setelah turun sampai ke Perbup biasanya kita sosialisasi, sosialisasi. Kemudian kita kan pakai medianya aplikasinya Simda.” (Artiningsih, 2018c)

Budaya sosialisasi ini mengakar kuat di kegiatan sehari-hari dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dikenal dengan nama “manajemen ada T”. Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan, manajemen ini merupakan bentuk atau model pengelolaan keuangan yang memerlukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diterapkan, dan apabila tidak dilakukan sosialisasi maka akan mendapatkan resisten dan konsekuensi yang besar.

“...manajemen biasanya ada T orang jowo itu ha ha. Manajemen ada T itu ya masalah sosialisasi saja sebenarnya. Kalau memang ada aturan baru dan tersosialisasi dengan baik, saya kira akan patuh. Tapi karena biasanya sudah seperti ini, terus ada aturan baru kita tidak tahu, ya sudah celaka itu, he he he. Iya, celaka, betul. Konsekuensinya besar itu kemaren.” (Hadiyanto, 2018a)

Bentuk konsekuensi bisa bermacam-macam yaitu dalam bentuk kerugian materil bagi pemerintah daerah akibat tidak mengikuti aturan yang ada dan bisa juga berbentuk penolakan keras terhadap keputusan pemerintah pusat.

Pengalaman kita 2017 itu gara-gara manajemen ada T biasanya seperti ini ternyata ada aturan baru itu kita jadi serapan DAK fisik paling rendah se-DIY, kita rugi 11 milyar. Itu kan itu, jadi biasanya DAK fisik itu per triwulan itu kita bisa mengajukan kontrak pencairan-kontrak pencairan,

seperti itu ya, nah kemarin itu ada aturan baru, PMK 50, pengisian data kontrak paling lambat pada triwulan kedua, itu untuk sepanjang tahun. Artinya triwulan 3, triwulan 4 itu kita sudah tidak bisa lagi mengisi data kontrak. Lah karena biasanya itu boleh kita mengisi ternyata aplikasinya dikunci, baru ribut sih, lah tidak bisa diisi, ha ha...hangus.” (Hadiyanto, 2018a)

4.5.1.2 Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif

Budaya ini merupakan kegiatan rutin dalam mengelola keuangan dari perencanaan sampai dengan pelaporan di Kabupaten Kulon Progo. Komunikasi dilakukan untuk kegiatan pengelolaan keuangan sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung dan secara berjenjang baik vertikal maupun horisontal. Integrasi merupakan cara-cara setiap unit kerja didorong untuk menjalankan kegiatannya dalam satu koordinasi yang baik.

Pola komunikasi yang sering dilakukan dimulai dari perencanaan dan penganggaran antara BKAD dan Bappeda dengan SKPD yang berupa pencermatan rinci terhadap akun-akun belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dari tahap penganggaran ini, komunikasi terhadap pencermatan RKA juga ditelusuri sampai ke akuntansi dan pelaporan. Bidang penganggaran akan mencermati melalui kewajaran suatu kegiatan yang diusulkan, lalu akan dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki. Kepala Bidang Anggaran BKAD mencontohkan, misalnya SKPD akan mengusulkan kegiatan pengadaan bibit, lalu akan diperiksa siapa yang menjadi sasaran dan akan dilaksanakan di bulan apa. Ini akan diperkirakan dengan terjadinya musim penghujan atau musim panas.

“Sasarannya misalnya petani kopi, pengadaan bibitnya kok pengadaan bibit misalnya padi, sasaran kelompoknya kok petani kopi ini yang benar, benar nggak? Oh, iya, mohon maaf perlu dikoreksi. Nah, pencermatan-pencermatan itu kami mencocokannya di belanjanya, di belanja.” (Zuniastuti, 2018)

Komunikasi ini memberikan dampak positif terhadap budaya organisasi berupa adanya inisiatif dari para staf pengelola keuangan. Namun inisiatif masih dibatasi oleh komunikasi berjenjang, yang artinya para staf tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan masing-masing atasannya. Inisiatif ini paling banyak terjadi di bidang perbendaharaan yang merupakan gerbong terakhir pencairan dimana penerbitan SP2D tidak memerlukan waktu lama untuk diautorisasi.

“Tidak ada. Tidak ada. Yang pasti, saya kira komunikasinya cukup baik. Jadi kalau ada pertentangan mbak Sri, mbak Eka kalau saya anggap bisa selesaikan di tingkat bidang begitu. Tidak sampai ke atas. Lebih sering tidak sampai ke atas. Tapi kalau memang ada hal-hal yang penting seperti plakantas sehingga kalau saya tidak bisa mengambil sikap/keputusan, baru ke atas.” (Hadiyanto, 2018c)

Terdapat beberapa bentuk integrasi dalam konteks pengelolaan keuangan, yaitu pelaksanaan rapat koordinasi di setiap bidang, koordinasi berjenjang untuk mengendalikan petugas akuntansi melalui kepala SKPD, komunikasi intensif antar-petugas akuntansi melalui *whatsApp*, penentuan permasalahan tarif pajak antara bidang pajak dan pendapatan dengan wajib pajak, pelibatan inspektorat di setiap permasalahan pengelolaan keuangan, serta evaluasi target perhitungan pendapatan dan monitoring surat pertanggungjawaban (SPj) penerimaan.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara *bottom up*. Dilakukan dari bawah berarti ada usulan staf yang menurut komitmen bersama harus disampaikan ke atasan dan dari atas artinya jika ada kesulitan di antara para staf, maka atasan ikut dilibatkan untuk membina para stafnya. Rapat koordinasi di setiap bidang dilaksanakan per triwulan. Untuk bidang akuntansi koordinasi dilakukan dalam bentuk mengumpulkan para petugas akuntansi untuk memberikan materi yang dirasakan urgen. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyatakan:

“Seluruh SKPD, kita punya eee anggaran misalnya untuk rapat-rapat koordinasi. Nah, dengan anggaran yang terbatas saya bisanya tri wulan 1 kali gitu kan. Kita kumpul semua petugas SKPD nah kita materi kita berikan apa yang kita rasa urgent gitu. Misalnya sekarang oh lagi urgent misalnya penata usahaan persediaan gitu ya. Nah, pada moment itu kita ngobrolin persediaan, dari A sampai Z pelan-pelan, harapannya mereka dengar dulu kemudian sedikit-sedikit paham. Kalau ada permasalahan apa, nah itu nanti sharing-nya di sana. Jadi, benar-benar kita mengefektifkan forum-forum kayak gitu karena cuma itu yang kita punya gitu.” (Artiningsih, 2018c)

Untuk di bidang pajak dan pendapatan, bentuk koordinasi bisa terlihat ketika terjadi permasalahan tentang besarnya tagihan pajak. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pajak, bahwa bidangnya tidak akan sewenang-wenang menetapkan surat ketetapan pajak dan akan selalu mengajak bicara para wajib pajak untuk mendapatkan nilai yang disepakati.

Oh, gini, kita biasanya kalau ada permasalahan gitu, kita koordinasi dengan baik yang ada di sub bidang termasuk juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kita kembali lagi ke lapangan mencari informasi yang sebenarnya, sebenar-benarnya eee sampai dengan mendapatkan nilai yang hampir mendekati. Kemudian dari eee pihak pemohon juga katakanlah kita ajak bicara kemudian nanti disepakati memang nilai yang aslinya seperti, seperti itu. (Nasip, 2018b)

Permasalahan ini juga akan dibawa ke Inspektorat untuk dikonsultasikan apakah berpotensi menjadi temuan pemeriksa atau tidak. Hasil konsultasi kemudian di laporkan kepada Kepala Badan. Selain itu setiap bulan SPj penerimaan akan selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh bidang pendapatan agar selalu terjadi *balance* antara bank penerima dengan catatan di bidang pendapatan.

4.5.1.3 Berorientasi dan Komitmen Melayani

Kecepatan pelayanan pencairan keuangan merupakan hal yang paling utama dalam pengelolaan keuangan daerah terutama untuk kelancaran pelaksanaan belanja dan penyerapan anggaran. Untuk mewujudkan hal itu, BKAD dan Bappeda memiliki komitmen melayani dan berorientasi prioritas dalam setiap penyelesaian suatu kegiatan pengelolaan keuangan dimulai dari penganggaran pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Budaya yang berorientasi prioritas terlihat dalam hal perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang berbasis tematik pembangunan daerah didasarkan pada *core* ketugasan masing-masing SKPD dimana belanja yang akan dibiayai adalah yang menjadi tugas pokok setiap SKPD. Mereka punya kewenangan untuk menentukan prioritas sesuai ketersediaan anggaran, sehingga SKPD harus pandai-pandai mengelola anggaran. Jadi yang dibiayai hanyalah yang prioritas, jika ada belanja yang tidak terdani maka belanja tersebut bukan prioritas. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu memenuhi standar pelayanan minimal, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pendukung yang diatur tersendiri dalam peraturan.

Penentuan prioritas dalam pelaksanaan anggaran sangat diperhatikan dan telah menjadi kebiasaan karena pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat komit dan peduli dengan pencegahan penyelewengan anggaran. Salah satu yang sering dilakukan adalah menggunakan aplikasi sistem perencanaan (Simcan) yang *link* dengan Simda untuk menghadapi SKPD yang punya kepentingan tertentu ketika mengajukan usulan anggaran. Di sini Bappeda dan BKAD akan bekerja sama. Bappeda akan melakukan *core* pencermatan optimalisasi penggunaan anggaran melalui indikator *benefit* dan *impact*-nya dan BKAD lebih fokus pada pemanfaatan dan pelaksanaan sampai detil dengan rupiahnya misalnya pelaksanaannya di bulan apa dan pembayarannya sesuai dengan akun yang dimiliki setiap belanja. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD:

“Itu sudah tidak ada missed, sudah tidak ada perbedaan antara pendampingan dari Bappeda dengan kami di BKAD. Artinya itu sudah nge-link, sistem itu sudah nge-link itu memang sangat, sangat membantu kami terutama ketika menghadapi SKPD yang tanda petik kadang-kadang dia punya mau. Ketika di, ketika ketemu dengan Bappeda anu, oke, oke, oke, nanti ketika mau dipindah ke Simda karena ada rentang waktu dia nyisipkan apa.” (Zuniastuti, 2018)

Komitmen dalam melayani dimulai dari memberikan payung hukum yang jelas sebagai aturan turunan dari peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Disediakan peraturan daerah dan peraturan bupati di semua bidang di BKAD agar tidak menimbulkan *gap*, kebingungan, dan pelanggaran aturan yang berlaku karena peraturan yang ada masih sangat umum. Misalnya dengan adanya Permendagri No.64 kemudian di Bidang Akuntansi dibuatkan Perbup No.24 Tahun 2014. Tujuannya agar

lebih mudah memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan setiap SKPD dalam melakukan pencairan anggaran. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang Akuntansi BKAD:

“Iya, itu Permendagri 64 tapi Permendagri 64 itu kan terlalu, apa ya istilahnya, mungkin kalau dipahami oleh teman-teman pelaksana akuntansi di sini istilahnya Petugas Akuntansi di SKPD ada 45 SKPD tahun ini 2017, saya bicara 2017 ya. Oke, pasti sangat kesulitan sehingga kebijakan kami adalah menurunkannya menjadi Peraturan Bupati. Nanti bisa dilihat di JDIH, dulu berawal dari Nomor 24 tahun 2014.” (Artiningsih, 2018c)

Eksekusi terhadap aturan turunan ini kemudian menjadi dasar dalam pelayanan baik itu di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, pendapatan, dan pajak. Di bidang pajak misalnya, pelayanan dilakukan sampai ke tingkat desa dengan memberi pemahaman kepada wajib pajak bahwa pemerintah daerah memiliki piutang yang belum tertagih. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Pajak.

“Kemudian untuk yang belum tertagih sekian itu kita sampaikan. Karena kita mau tidak mau harus minta bantuan baik dengan Pak Camat maupun Pak Kasdes karena biasanya kan masalah terjadi di tingkat padukuhan.” (Nasip, 2018b)

Komitmen melayani ini sudah ditanamkan sejak Bupati Hasto menjabat. Dalam setiap apel selalu ditekankan bahwa PNS itu pelayan masyarakat karena dengan menjadi PNS, birokrasi di pemerintah daerah itu justru ada peluang yang lebih untuk berbuat baik kepada masyarakat. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD yang selalu ikut menyaksiannya dalam apel pagi menyatakan:

“...begitu kan. Ya dulu kemana? Iya to..ha..ha, ketika jadi PNS ya begitu tidak memberikan, justru dia ketika jadi PNS kan punya kewenangan melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Tapi hi..hi pas pensiun baru mulai terpikirkan jadi pengurus yayasan, jadi ketua RT, kepala RW, begitu kan. Nah ini yang ditekankan seperti itu. Justru mumpung masih aktif/masih ada waktunya untuk berbuat baik, kesempatan punya kewenangan, ya itu hilang begitu.” (Hadiyanto, 2018c)

4.5.1.4 Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral

Budaya ini merupakan kegiatan rutin dalam mengelola keuangan dari perencanaan sampai dengan pelaporan di Kabupaten Kulon Progo. Ada 2 konvensi yang tidak tertulis yang sedang berlaku dan diterapkan di BKAD dalam hal menjaga kesinambungan pencairan anggaran, yang pertama yaitu *team work* dengan model ketugasan saling mengisi dan kedua yaitu kebersamaan internal.

Dalam proses pencairan anggaran, *team work* yang terbentuk di BKAD adalah tim yang solid. Model ketugasannya tidak egosentris, artinya setiap orang tidak mementingkan diri sendiri jika harus bertugas ke luar daerah. Masalah pencairan sudah diatur dalam sistem dan prosedur, sehingga apabila kepala badan selaku BUD sedang ke luar kota, maka Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa BUD harus berada di tempat untuk menangani semua pencairan.

“Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau masalah pencairan itu sudah diatur dalam sisdur di perbup. Jadi antara mbak Sri, saya, dan pak Kepala itu tidak boleh semuanya bersama-sama meninggalkan kantor. Jadi kalau pak Kepala pergi, mbak Sri pergi, saya tinggal di kantor. Atau kalau saya, pak Kepala pergi, mbak Sri harus tinggal di kantor. Tidak bisa kosong. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak ada yang berangkat sama-sama. Ada ketentuan soalnya. Di SPM, Standar Pelayanan Minimal kita tentang pencairan itu 2 x 24 jam harus selesai.” (Hadiyanto, 2018c)

Di bidang lainnya seperti bidang pajak dan akuntansi. Kepala Bidang Pajak selalu menekankan bahwa staf yang ada di bidangnya adalah satu kesatuan dan bekerja atas nama bidang, bukan individu mulai dari subbidang pendataan, pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak. Mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tetapi butuh saling koordinasi

“Iya, simultan, jadi monggo karena ini merupakan suatu kerja kita bareng, kita tidak boleh terkotak-kotak. Artinya mana yang memang membutuhkan kita bantu. Kan bicara kita pada tahun ini memang begitu besar untuk dituntut kaitannya dengan masalah pendapatan. Kemudian juga kita merekrut tenaga harian lepas.” (Nasip, 2018b)

Demikian halnya dengan di bidang akuntansi, para petugas akuntansi melalui PPK sering belajar dengan datang langsung atau lewat telepon tanpa harus melalui tahapan birokrasi. Koordinasinya berjalan lancar dipimpin Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

“Nah, itu kan lebih enak jalannya, gitu. Terus hal-hal yang krusial kita sampaikan. Pokoknya sharing informasi di internal SKPD saya, saya juga bilang, halo bidang pajak, bidang pendapatan, bidang perben, kalau ada apa-apa saya diceritain. Jadi, saya tahu gitu kan karena informasi itu nanti harus saya sajikan di laporan keuangan Pemda.” (Artiningsih, 2018c)

4.5.1.5 Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi

Budaya ini merupakan kegiatan rutin dalam mengelola keuangan dari perencanaan sampai dengan pelaporan di Kabupaten Kulon Progo yang dapat dikelompokkan ke dalam aktivitas keseharian yang disebut taat terhadap aturan, yaitu:

a. Selalu mempedomani dan membuat aturan turunan

Penyusunan perencanaannya mengacu pada peraturan baik itu undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah, peraturan bupati dan surat keputusan lainnya yang setara. Selain peraturan, semua kebijakan penganggaran mengikuti prioritas dan tema pembangunan yang dimulai sejak RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, Renstra, Renja, dan berbagai instrumen pelaksanaannya. Sementara pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir yang pelaksanaannya sangat tergantung pada kebijakan perencanaan yang dilakukan di awal. Jika perencanaan dan penganggaran salah, maka sampai pelaporan pun akan terpengaruh, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD:

“Soalnya kalau tidak nanti ketika APBD sudah, sudah diundangkan menjadi Perda dan penjabarannya oleh Perbup, Peraturan Bupati nanti kita SPj-nya kan pasti harus mengacu DPA itu.” (Zuniastuti, 2018)

b. Pergeseran mendahului perubahan anggaran

Jika terjadi perubahan terhadap anggaran, sering dilakukan sebelum anggaran perubahan benar-benar ditetapkan yang dikenal dengan istilah pergeseran mendahului perubahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika melakukan perubahan anggaran setelah beberapa bulan anggaran ditetapkan. Hal ini wajar karena banyak asumsi-asumsi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan pun membolehkan perubahan anggaran tetapi tidak wajib. Namun demikian dasar hukum pergeseran sebelum perubahan yang dilakukan di Kabuapten Kulon Progo selalu

berdasarkan pertimbangan yang logis dan didukung dasar hukum yang jelas. Jadi menurut Kepala Bidang Anggaran BKAD tidak sembarang menggeser anggaran karena keinginan tertentu.

“Artinya ada ketentuan di atasnya yang membutuhkan kami menyesuaikan dengan pergeseran mendahului perubahan. Misalnya ada juknis DAK, DAK-nya sudah tercantum di APBD, tapi ternyata secara juknis dari kementerian teknis mengubah. Jadi, yang sebelumnya belanja langsung ternyata diminta ke belanja tidak langsung. Nah, itu kami juga harus menindaklanjuti. Nah, dasar kami adalah Permen Peraturan Menteri Teknis yang mengatur tentang juknis penggunaan DAK bidang tertentu sesuai teknisnya ke teknis kementerian itu. Jadi, ketika ada peraturan-peraturan di atasnya yang mengamanatkan kami untuk menyesuaikan di APBD ya kita tindak lanjuti.” (Zuniastuti, 2018)

c. Pendekatan masalah dari unsur teknisnya

Dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD sering dibutuhkan juga tenaga-tenaga terampil dan berpengalaman terutama dalam membuat laporan keuangan. Hal yang wajar biasanya dilakukan dengan merekrut tenaga akuntansi. Di kabupaten Kulon Progo tenaga akuntansi sangat terbatas apalagi dengan adanya moratorium penerimaan PNS, sangat kesulitan dalam menangani akuntansi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Namun hal itu sering ditangani dan dicarikan jalan keluar dari sisi teknisnya. Yang paling sering dilakukan adalah memberdayakan petugas akuntansi yang ada saat ini walaupun tidak semuanya berlatarbelakang pendidikan akuntansi. Petugas akuntansi diberi pelatihan tersendiri dan diberi ruang untuk bertukar pikiran. Pendekatan yang dilakukan Oleh Kepala Bidang Akuntansi selalu didekati dari permasalahan yang terjadi.

“Tapi, walaupun kebijakan kita sudah berbaur teknis jadi bisa dikatakan ada unsur teknisnya juga. Harapan kita lebih applicable, mudah

dipahami karena terus terang petugas akuntansi semua SKPD kan beragam, tidak semua orang Jurusan Akuntansi, tidak semua sarjana akuntansi. Kadang yang sarjana akuntansi atau jurusan akuntansi pun memahami akuntansi keuangan daerah itu sulit karena banyak hal-hal khusus, tidak semata-mata seperti yang kita terima di bangku kuliah dulu gitu.” (Artiningsih, 2018c)

d. Diskresi dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pengambilan keputusan yang kronologis

Jika terjadi permasalahan, seringkali dilakukan melalui koordinasi. Di bidang pendapatan dan pajak misalnya, penentuan nilai pajak berdasarkan zona nilai tanah yang selama ini berpotensi menjadi temuan BPK, diantisipasi melalui penerbitan Surat Keputusan. Dilakukan pendataan terlebih dahulu lalu dimintakan pertimbangan kepada gubernur sebagai dasar pembuatan surat keputusan bupati. Diskresi semacam ini juga terjadi saat memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak misalnya retribusi menara telekomunikasi, dasar hukumnya menurut Kepala Bidang Pendapatan saat itu hanya dilakukan dengan keputusan Bupati lalu ditindaklanjuti dengan peraturan dinas terkait.

“Ah semacam itu mas. Itu angkanya pasti. Semua diatur. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi mas, yang namanya memungut uang rakyat dalam bentuk pajak dan retribusi itu harus ada aturan.” (Sunarya, 2018)

Eksekusi suatu kebijakan bisa mendatangkan dampak yang positif dan negatif. Bisa jadi negatif apabila pelaksanaannya hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan logis semata tanpa dokumentasi yang menjadi landasan hukumnya. Dampak positif sering dirasakan apabila diputuskan hati-hati sehingga memerlukan dokumentasi yang aturannya harus diambil secara kronologis. Ketika eksekusi terhadap satu hal tidak sesuai dengan aturannya harus ada kronologinya juga sekalipun itu keputusan

pribadi. Keputusan ini akan dianggap sebagai keputusan organisasi. Untuk mengatasinya hal yang paling sering dilakukan adalah diseting apa surat menyuratnya, dokumennya yang mana, ceritanya jelas dan bisa dilacak, harus ada nota dinas, harus ada persetujuan semua pihak dan terdokumentasi dengan baik. Bukannya begitu diproses langsung setuju dan ditandatangani pencairan tanpa ada dasar melalui tahapannya. Demikian dikatakan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“...Jadi bagaimana itu, apa istilahnya itu, itu didorong sebagai suatu, itu tadi keputusan organisasi, bukan keputusan pejabat. Jadi ada kronologinya, oh dulu pernah ada surat dari Dinas Pertanian seperti ini, oh sudah ada kajian menyatakan ini KLB, kasusnya memang benar ini. Jadi tahapan-tahapan itu dibuat, walaupun itu belum ada aturan SOP-nya. Tapi biar suatu saat diperiksa itu ada ceritanya itu, jelas tidak orang terus lempar, uuh tidak tahu itu urusan pertanian, bukan seperti itu tapi sama-sama dibuat agar menjadi suatu kronologi yang jelas yang ada bukti-bukti dokumennya. Jadi intinya itu.” (Hadiyanto, 2018c)

Sementara indikator loyal kepada organisasi bisa dilihat dari beberapa aktivitas keseharian berikut ini.

a. Konsisten dalam bekerja walaupun terjadi pergantian pimpinan

Proses pencairan anggaran di BKAD merupakan proses yang berlangsung terus menerus di hari kerja. Oleh karena itu harus ada pergantian dan pertukaran petugas agar penyerapan anggaran tercapai sesuai target. Di bidang perbendaharaan kebiasaan pelayanan SP2D sangat bergantung pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD yang memiliki peran tidak tergantikan karena berwenang mengeluarkan dan mencairkan anggaran, sehingga salah satu di antaranya harus tetap

berada di tempat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan yang sering melakukannya dan telah menjadi kebiasaan bahwa mereka lebih loyal kepada organisasi dan bukan kepada orang atau pimpinan.

“Inggih. Ya. Ini yang contoh gampang saja. Memang awal 2018 kemaren ada pergantian pimpinan. Ya kita itu kan apel pagi lah yang gampang. Dulu ketika pimpinan lama, apel pagi itu rajin. Dia lebih menekankan untuk apel dan sebagainya. Kemudian ganti pimpinan, pimpinan baru dia tidak urus apel tapi tetap apel, ha..ha..ha iya. Jadi sudah kebiasaan. Jadi saya kira teman-teman ini sudah lah bahwa loyalitas itu kepada organisasi bukan kepada orang/pimpinan. Wah ini ngomong ada saya atau tidak ada saya ha.ha.ha. Cuma kalau ada hal-hal tertentu pengambilan keputusan kalau ada masalah ya tetap. Cuma pelayanan SP2D, masalah kas ini tetap harus challenge.” (Hadiyanto, 2018c)

b. Memperhitungkan kompensasi jam kerja yang ditinggalkan

Budaya lainnya yang takkalah seringnya juga terjadi hampir setiap hari terutama di bidang perbendaharaan. Tidak bisa dihindari memang jika staf ada keperluan di luar kantor pada saat jam kerja, harus minta izin pimpinan untuk menyelesaikan urusannya. Namun dengan konsekuensi bahwa mereka harus mengganti jam kerja yang hilang itu dengan jam kerja di waktu lainnya dan terkadang cara yang dipilihnya adalah harus lembur menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau pun tidak harus lembur, pada saat jam kerja usai, mereka masih tetap berada di kantor sampai selesai pekerjaannya. Seperti itulah budaya kerja di perbendaharaan demi terlaksananya proses pencairan anggaran yang telah diatur dalam standar pelayanan minimal.

“Dulu pernah mereka pulang malam jam 11 malam, jam 2 malam, demi menyelesaikan tugas. Padahal ibu-ibu semua, ha.ha, pulang jam 2. Suaminya datang menyusul. Kan tidak berani pulang sendiri. Demi menyelesaikan tugas. Artinya kalau memang itu harus selesai besok, memang

harus selesai, ya apapun yang terjadi pasti diupayakan untuk diselesaikan.”
(Hadiyanto, 2018c)

c. Berani mengkritik pimpinan jika terjadi kesalahan

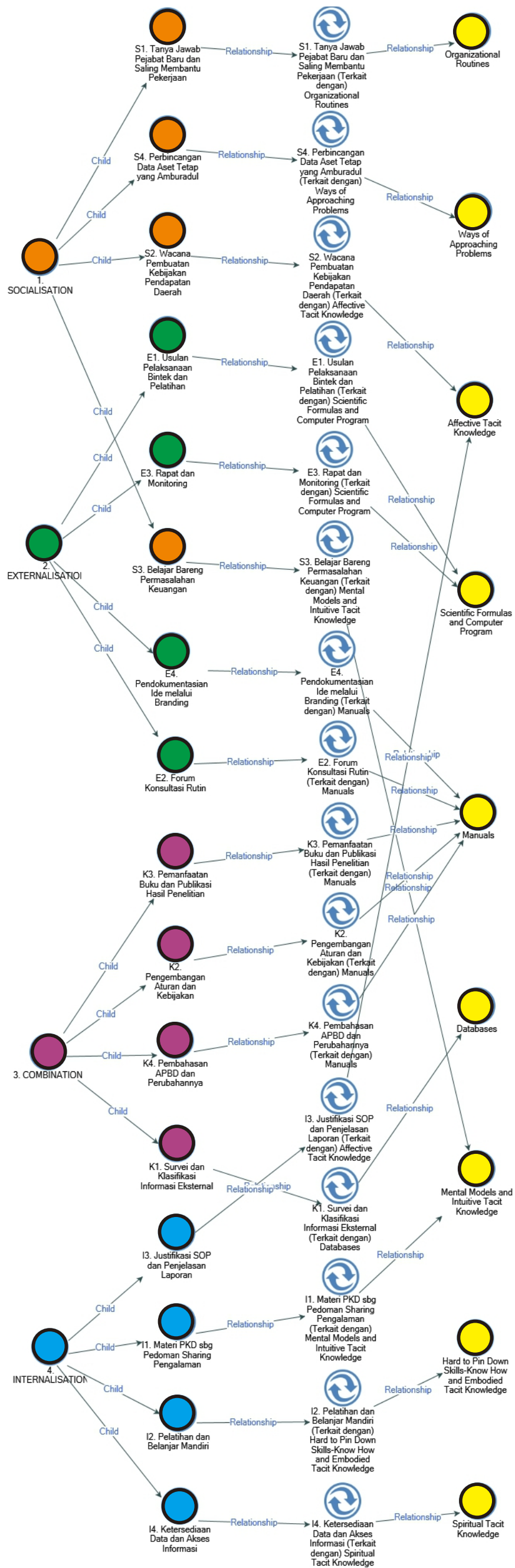
Peraturan pengelolaan keuangan daerah memang kaku, tapi tidak berarti mencari-cari celah untuk memberi peluang penyalahgunaan. Proses pencairan di BKAD sangat dinamis dan pimpinan selalu mengakomodir aspirasi setiap bawahannya. Bahkan pimpinan sangat menyenangkan jika selalu dikritik dalam setiap pengambilan keputusan tentang proses pencairan anggaran. Tidak ada yang berbakti kepada pimpinan. Berani berdiskusi dan demi mencapai yang terbaik. Kata Kepala Bidang Perbendaharaan:

“Nah itu kadang-kadang saya salah mengambil keputusan atau apa, diprotes. Di sini sudah gak tertutup, seharusnya begini-begini. Tapi saya kan punya pertimbangan sendiri. Eh begini mbak, nah ini akhirnya jadi diskusi untuk menemukan yang terbaik tapi mereka artinya berani untuk diskusilah. Tidak terus yes man, atau ha ha ha. Saya pun dengan pak kepala kalau ini seperti ini keliru, eh kita sowan. Kita datang ke sana. Pak newun sewu, apakah tidak lebih baik ini seperti ini.” (Hadiyanto, 2018c)

4.5.2 Proses Belajar Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo

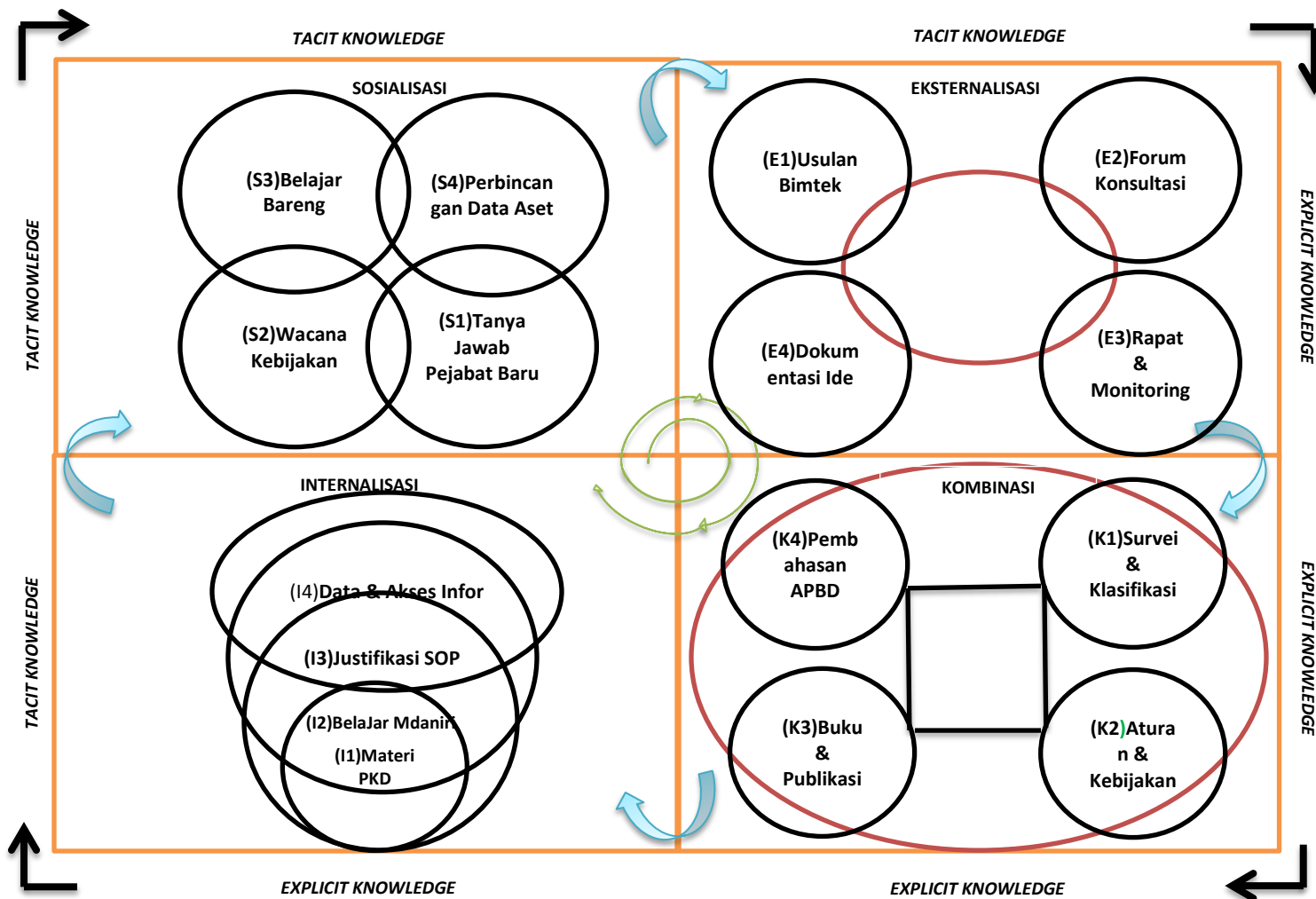
Empat proses model SECI berikut ini digunakan sebagai model konversi pengetahuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo. Proses transfer pengetahuan dimulai dari sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan terakhir internalisasi. Berikut adalah peta proses SECI dari NVivo yang disajikan pada gambar 4.11 dengan penjelasan berturut-berturut berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.11 ini, keterangan lengkap disajikan melalui *matrix coding* pada lampiran 8 di halaman 384.

Sumber :
Diolah peneliti melalui NVivo



Gambar 4.11 Peta Analisis Akhir
Proses SECI Pengetahuan Transparansi & Akuntabilitas di Kabupaten Kulon Progo

Peta tersebut di atas bisa dilihat juga dalam bentuk proses SECI yang diadopsi dari Nonaka dan Toyama. Dalam gambar berikut ini, interaksi pada masing-masing proses terdiri dari 3 komponen yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Ketiga komponen ini turut mempengaruhi terbentuknya pengetahuan transparansi dan akuntabilitas di Kulon Progo. Dalam setiap diagram tersebut komponen individu diperlihatkan melalui gambar bulatan kecil, kelompok ditunjukkan pada gambar bulatan besar dan organisasi diwakili oleh kotak persegi empat besar. Masing-masing kotak memiliki 4 aktivitas SECI. Proses transfer pengetahuan diperlihatkan sesuai arah panah dan dimulai dari sisi kiri Sosialisasi, berputar ke arah kanan serta berakhir pada sisi kiri Internalisasi. Gambar 4.12 menunjukkan keterkaitannya seperti berikut ini.



Gambar 4.12 Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Diadaptasi dari Nonaka dan Toyama (2003:5)

Pembahasan berikut ini memberikan gambaran umum setiap proses SECI secara detail.

4.5.2.1 Sosialisasi

Proses sosialisasi terhadap pengetahuan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari transfer pengetahuan tacit dari pegawai satu ke pegawai lainnya melalui pertemuan tatap muka yang membicarakan tentang pengalaman masing-masing. Hal ini terjadi melalui diskusi yang dilakukan dalam pertemuan informal dengan melibatkan staf dalam lingkungan kerja lintas bidang/bagian dalam SKPD, dan antar-SKPD, serta diskusi dengan badan eksternal dan masyarakat. Pejabat dan staf saling berbagi pengetahuan mereka dengan mudah antara 2 orang, kelompok, per bidang/bagian, dan antara subbidang dan subbagian yang berlangsung setiap hari kerja di lingkungan SKPD.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pengelola keuangan di Kabupaten Kulon Progo memiliki mekanisme khusus untuk menempatkan pengalaman pribadi dan keterampilan informal kepada pegawai lain. Para partisipan mengatakan bahwa mereka sering dan pernah 1) tanya jawab pejabat baru dengan stafnya; 2) dialog dengan pimpinan dan mengajari teman kerja; 3) mewacanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 4) tukar pikiran kepala bidang pajak antar-kabupaten; 5) “belajar bareng” atas permasalahan keuangan; 6) memperbincangkan data aset tetap yang amburadul; dan 7) berkomitmen untuk meraih predikat WTP.

1. Tanya jawab pejabat baru dan saling membantu pekerjaan (S1)

Ini adalah aktivitas sosialisasi yang berasal dari tanya jawab informal para pejabat di level eselon III dan eselon IV dengan para stafnya serta para staf yang saling membantu pekerjaan di bidang yang sama baik karena instruksi atasannya maupun kerelaan membantu rekan kerja masing-masing. Proses tanya jawab para pejabat baru dengan stafnya terjadi karena adanya aktivitas mutasi jabatan. Proses mutasi jabatan merupakan kesempatan yang baik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Pelantikan para pejabat merupakan mekanisme yang wajib dialami oleh setiap pemilik jabatan untuk mendukung proses sosialisasi. Semua partisipan yang sebagian besar baru dilantik telah diwawancarai dan mengakui bahwa mereka yang menduduki jabatan akan meninggalkan dan menerima pengalaman mereka dikarenakan mereka harus menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru.

Melalui mutasi yang dilakukan baik antar-SKPD maupun antarunit dalam SKPD, telah menyebabkan terjadinya proses sosialisasi. Untuk pejabat yang memiliki pengalaman yang berbeda dengan tugas barunya, pengalaman lama akan ditinggalkan dan bagi pejabat baru yang memiliki pengalaman yang sama dengan tugas barunya, maka akan menerima pengalaman baru. Untuk di BKAD proses sosialisasi terjadi melalui beberapa orang pejabat yang telah menduduki jabatan barunya dan berasal dari bidang yang lain tetapi masih dalam lingkungan BKAD. Demikian juga di Bappeda, mereka rata-rata berasal dari SKPD lain. Tanya jawab di antara mereka dalam satu bidang/bagian justru tidak dapat dihindari baik itu kepada staf maupun

kepada atasan langsungnya. Rata-rata materi pertanyaan adalah seputar tugas pokok dan fungsi terutama yang menyangkut keuangan.

Untuk pejabat baru dengan pengalaman yang sama seperti Kuni Mas'adah, Lukman Hakim, dan Nur Hadiyanto, proses mutasi sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka membawa pengalamannya ketika dimutasi di jabatan barunya sehingga pengalaman itu dibagikan kepada staf untuk memudahkan tugas-tugas yang mereka jalankan saat ini. Salah satu di antara mereka, Kuni Mas'adah Kepala Subbagian Keuangan BKAD yang sebelumnya menjadi Bendahara PPKD itu mengatakan:

“Kebetulan ketika saya jadi bendahara, saya bendaharanya bendahara PPKD njeh, bukan bendahara SKPD, jadi bendahara pengelolaan keuangan yang saya jalani adalah pengelolaan keuangan hibah dan bantuan sosial. Ya memang e.. ketika saya jadi bendahara, banyak sekali e.. ilmu yang kami dapatkan, untuk kami terapkan sebagai Kasubag keuangan, memang hampir semuanya ketika saya jadi bendahara, ketika saya terapkan cocok karena memang sudah linknya ke sana.” (Mas'adah, 2018c)

Berbeda dengan pejabat baru seperti Nasip, Atik Zuniastuti, Taufiq Amrullah, dan Sunarya, mereka sering melakukan tanya jawab untuk menerima pengetahuan baru dari staf mereka. Salah satu di antara mereka, Taufiq Amrullah sebagai Kepala Bidang Aset BKAD yang sebelumnya berasal dari Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah dan Meylani Lestari Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD yang sebelumnya menjabat staf di Bagian Keuangan Sekrtariat Daerah itu masing-masing memberi tanggapan:

“Cuma yang saya terapkan hanya e.. semangat di bidang ekonomi bahwa brand sebuah brand itu penting. Jadi waktu di ekonomi saya punya kegiatan waktu itu untuk me.. membuat branding Kulonprogo yang The Jewel

of Java itu ah.. itu saya terapkan di bidang aset, kita juga buat brand Asik Menata Aset.” (Amrullah, 2018b)

“...guru yang paling berharga e.. ya itu.. dengan mutasi itu memang meningkatkan pengalaman tapi belum tentu sebanding dengan kinerjanya, he'em.. nggak..nggak.. terus ekspres lah.. karena hal baru.” (Lestari, 2018a)

Sejak zaman Bupati pak Hasto, pola mutasi tidak mengikuti rumpun jabatan (penggolongan seorang pamong dari spesialis sampai ke generalis) tetapi berbasis manajemen risiko, sehingga bisa belajar penanggulangan kemiskinan dan transaksi nontunai. Hadiyanto yang dulu menjabat Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial itu selalu belajar melalui mutasi jabatan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dari sistem pembayaran tunai menjadi nontunai.

“Iya. Dulu justru saya ini akuntansi kok neng bidang sosial, kesasar ini. Ada orang kesasar ini. Hehehe. Tapi ya nggak papa artinya kita cukup banyak belajar banyak hal terutama program-program penanggulangan kemiskinan nggih kita belajar di sana, program-program penanggulangan kemiskinan, kemudian apa ee kemaren tentang transaksi non tunai itu malah kita mulai dari bansosnya. Baru kita sekarang di Pemda secara keseluruhan mulai melaksanakan transaksi non tunai. Padahal di sana sudah lebih dulu dilakukan untuk bantuan sosial. Nggih.” (Hadiyanto, 2018d)

Selain tanya jawab, sosialisasi juga terjadi ketika para staf saling mengajarkan dan saling membantu pelaksanaan pekerjaan mereka dalam unit atau bidang dan subbidang yang sama. Pekerjaan yang dilakukan adalah membantu pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) keuangan masing-masing. Jika terjadi masalah dalam pekerjaan mereka, para staf juga bertanya langsung kepada pimpinan, bisa kepada kepala bidang atau kepala badan. Diskusi antara sesama teman juga terjadi untuk membahas masalah yang dihadapi masing-masing. Seperti yang dialami oleh Artiningsih dan Nasip. Salah satu dari mereka, Nasip Kepala Bidang Pajak yang baru

menjabat 3 bulan ini menerapkan sistem kerja saling membantu pelaksanaan pekerjaan SPj keuangan antarsubbidang agar semua staf menjadi tahu jika harus dibutuhkan tenaganya.

“Ya sebetulnya yang namanya pekerjaan kalau hanya sifatnya monoton itu tentu tidak akan menambah pengetahuan. Tetapi karena adanya saling membantu sehingga mereka akan tahu. Jadi ee ini sudah sudah kesepakatan kita, bahwa kita bekerja tidak hanya dalam lingkup subbid kita tetapi mana yang memang perlu bantuan itu nanti kita bantu. Jadi yang inisiatif nanti Kasubidnya. Katakanlah, Mas karena saya ada kegiatan ini tolong saya dibantu katakanlah pendataan, pendataan itu kan hanya punya dua orang. Kalau melakukan pendataan hanya dua orang kan kapan selesainya...” (Nasip, 2018c)

2. Wacana Pembuatan Kebijakan Pendapatan Daerah

Wacana pembuatan kebijakan pendapatan daerah merupakan aktivitas sosialisasi yang lebih banyak bercerita tentang rencana pembuatan zonasi nilai tanah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan para ahli di bidangnya dan diskusi lepas tentang upaya optimalisasi pajak daerah melalui tukar pikiran antara kepala bidang pajak Kulon Progo dengan setiap kepala bidang pajak di kabupaten dalam lingkup propinsi DIY. Selama ini dalam penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) masih menggunakan tarif tertentu yang dihitung sesuai kebijakan sendiri. Kulon Progo masih terkendala hitungan tarif besarnya nilai tanah yang dikenakan pajak.

Untuk menilai itu perlu dilakukan pembagian wilayah tanah yang wajib kena pajak karena harga tanah di setiap daerah tidak ada yang sama. Oleh karena itu diperlukan prediksi perhitungan pembuatan zona wilayah melalui pemetaan objek dengan bantuan satelit yang alatnya belum bisa disediakan sendiri oleh pemerintah

Kabupaten Kulon Progo. Penentuan nilai zonasi ini merupakan bagian dari transparansi akuntabilitas pengelolaan pendapatan agar tidak terjadi “kongkalikingkong” besarnya tagihan PBB antara petugas penagihan pajak dengan wajib pajak PBB. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan menguatkan hal ini.

“Jadi.. kalau PBB itu kan da.. zona siaga per meter untuk menentukan, ini contoh kecilnya ya.. untuk PBB itu, jadi ketika menentukan suatu obyek pajak, untuk kemudian dia mendapatkan nilai tertentu katakanlah NJOP, dan NPOP kemudian muncul nanti di slip merah yang kemudian per meter berapa, itukan ada zonasinya, a.. zona itukan selain memperhitungkan katakanlah secara letak geografis kedekatan dengan fasilitas sarana umum, sarana publik, akses dan segala macam nah itu kan digunakan.” (Romdhoni, 2018b)

Sementara tukar pikiran bidang pajak antar-kabupaten merupakan diskusi lepas yang dilakukan secara informal yang membahas tentang pengalaman dan mencaritemukan ide-ide agar dapat melakukan upaya optimalisasi pajak daerah di masing-masing kabupatennya. Pertemuan diselenggarakan dengan sistem tuan rumah secara bergantian. Acara ini merupakan kegiatan yang diinisiatif oleh setiap kepala bidang pajak dalam wilayah 5 kabupaten dan kota di Propinsi DIY dan tidak dibiayai oleh APBD. Anggota diskusi terdiri dari semua kepala bidang pajak bersama kepala-kepala subbidang masing-masing. Tidak melibatkan wajib pajak daerah. Dalam diskusi ini yang sering dibicarakan adalah kendala-kendala setiap daerah terhadap penentuan nilai zonasi PBB. Kepala Bidang Pajak BKAD membenarkannya.

“...kemudian kaitannya dengan masalah pengetahuan aturan-aturan perpajakan kita juga ada forum. Ini kan anu, itu satu Provinsi. Sehingga untuk yang ketempatan itu gantian giliran. Kemaren baru saja dari Gunung Kidul tanggal berapa itu hari. ...Kalau anunya itu sebetulnya tergantung.

Tergantung tetapi nanti tinggal yang tuan rumah itu mencari waktu tetapi paling tidak ya ee tiga bulan sekali ketemu.” (Nasip, 2018c)

Salah satu hasil diskusi forum pajak antar-kabupaten lebih banyak menyarankan untuk berkoordinasi dengan tenaga ahli. Oleh karena itu kepala bidang pajak BKAD telah berencana melibatkan pembuatan zonasi ini dengan ahli UGM. Untuk mewujudkan proses sosialisasi itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan bidang pendapatan, Kepala Bidang Pajak mengaku telah berkoordinasi dengan tim Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan akan menjadikan tim PSEKP tersebut sebagai tenaga ahli.

“Ee gini. Untuk ahli yang jelas kaitannya karena kita tidak mampu, karena yang namanya untuk membuat NIR dengan rata-rata kemudian penentuan zona nilai tanah itu kan kita tidak ada yang ahli. Ha kita kan minta tolong yang ahlinya ya di PSEKP UGM itu, itu dalam rangka untuk menyusun NIR kaitannya untuk penentuan pajak daerah.” (Nasip, 2018c)

3. “Belajar Bareng” Permasalahan Keuangan

Aktivitas sosialisasi ini memberi pemahaman bahwa setiap pemerintah daerah memiliki permasalahan yang sama tentang pengelolaan keuangan daerah, apalagi kalau daerah tersebut belum pernah mendapatkan prestasi opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP). Cara penyelesaian masalahnya pun beragam tergantung keahlian dan budaya yang dimiliki masing-masing. Permasalahan utama yang pernah dialami oleh Kabupaten Kulon Progo sebelum pemerintahannya memperoleh prestasi pengelolaan keuangan seperti sekarang ini, yaitu pembukuan keuangan dahulu masih manual, sehingga bendahara dan PPK-SKPD belum optimal dan tidak berfungsi

dengan baik saat itu, serta dokumentasi yang kurang baik di semua lini dari penerimaan sampai dengan pengeluaran.

Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan sistem manajemen keuangan daerah atau Simda. Masalah yang paling dirasakan adalah yang disebabkan karena pergantian bendahara yang dilakukan setiap tahun sehingga harus memberi pelatihan lagi kepada pejabat barunya. Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD, sejak tahun 2012 pemerintah daerah telah menggunakan Simda di setiap pengelolaan keuangan yang ada di setiap SKPD.

“Tapi komitmen dari pengambil kebijakan waktu itu kenapa gak kita beralih ke SIMDA, nah kalau kita di teknis pelaksanaan kan tinggal ikut kebijakan. Kemudian dari 2012 berusaha e beralih ke SIMDA untuk keuangannya. Ya sampe sekarang.” (Artiningsih, 2018b)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi tersebut, di awal-awal penerapan Simda banyak diberikan sosialisai praktik operasional simda. Semua bendahara pengeluaran yang menggunakan Simda diundang di Bidang Akuntansi untuk menerima pengetahuan baru.

“Ngak. E, pernah beberapa kali juga dulu ketika di awal-awal pakai SIMDA mereka e menggunakan anggaran mereka sendiri untuk melakukan BIMTEK tapi juga ada yang inisiatif kami untuk e mengundang mereka sebagai narasumber memberikan pembinaan juga ada.” (Artiningsih, 2018b)

Mereka yang menghadapi *trouble* dengan aplikasi ini ditangani melalui “diskusi bareng” yang tidak terjadwal dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Akuntansi kapan dan dimana saja baik dengan sesama bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD maupun antara bendahara pengeluaran dan PPK dengan operator simda baik yang ada di BKAD atau langsung dengan BPKP pemilik Simda.

“Aa.. kita diskusi, misalnya: saya lagi nggarap, oh begini teorinya, saya kan misalnya kebetulan saya yang tahu, kemudian saya sampaikan. Mereka bisa ingat trus nanti disampaikan kalau ada yang mengalami kesulitan serupa. Paling gitu aja.” (Artiningsih, 2018b)

Penyelesaian atas permasalahan tersebut memberi pelajaran bahwa dengan beralih dari pembukuan manual menjadi menggunakan sistem informasi akan lebih mengakuratkan *output* data yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan merupakan 2 SKPD kunci untuk menjadi tempat bertanya para bendahara dan PPK-SKPD. Demikian Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD mengakuinya.

“Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondy yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator.” (Hadiyanto, 2018b)

4. Perbincangan Data Aset Tetap yang Amburadul

Perbincangan data aset yang amburadul merupakan satu-satunya yang menjadi penyebab munculnya aktivitas sosialisasi ini. Kendala utama yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo pada beberapa tahun sebelumnya dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah terletak pada pengelolaan aset tetap dan persediaan yang belum tertata dengan baik. Penyebab utama terletak pada adanya perbedaan data aset yang dicatat oleh Bidang Akuntansi dengan yang dilaporkan oleh Bidang Aset. Permasalahan aset ini pun menjadi perbincangan hangat saat itu dalam lingkungan pemerintah Kulon Progo, sebagaimana dituturkan oleh Kepala Bidang Akuntansi BKAD.

“Belum, belum pernah. Sekali lagi karena pada saat itu mungkin banyak hal-hal atau variabel-variabel yang kita belum baik gitu. Ya contoh itu tadi, misalnya: e aset yang belum tertata, persediaan belum tertata gitu loh. Jadi kalau kita WTP itu bukan semata-mata karena kita pake SIMDA tapi memang lebih karena kita di berbagai sektor sudah memperbaiki diri.” (Artiningsih, 2018b)

Permasalahan yang sama diakui oleh Kepala Bidang Aset BKAD selaku penanggungjawab pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

“Kalau pelaporan-pelaporan sudah, hanya saja kan eeehh...permasalahannya kan hanya di data. Data kemarin yang saya sampaikan dalam paparan saya itu. Jadi permasalahannya di data, yang belum apa... direkon, dilakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan eeehh...bidang aset dan bidang akuntansi. Selama ini itu, sehingga data itu kan antara yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan data yang dimiliki bidang aset kan terjadi perbedaan yang mendasar.” (Amrullah, 2018b)

Aset tetap merupakan akun penyumbang jumlah terbesar total aset dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo atau sekitar 70% dari total neraca daerah, sehingga atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merasa sadar dan berusaha komit untuk meningkatkan kinerja agar otomatis mendapatkan WTP. Semuanya bergerak dan berusaha mulai dari tataran pengambil kebijakan sampai ke tataran teknis. WTP bukanlah tujuan utama tetapi bagaimana meningkatkan kinerja dan memiliki komitmen yang kuat karena jika kinerja bagus maka WTP akan menyusul dengan sendirinya. Demikian semangat Kepala Bidang Aset BKAD dalam mengelola asetnya.

“Atas perbedaan-perbedaan yang mendasar itu yah..kita buat apa namanya, kita lakukan kan sensus, sensus barang negara, inventarisasi. Nah kita kan untuk sensus kita mengetahui kondisi data yang valid yang sebenarnya kita terapkan mana yang tidak ada, sehingga atas hasil sensus

kita ketahui oh ternyata ada barang yang rusak berat sekian milyar, yang barangnya tidak ada sekian milyar.” (Amrullah, 2018b)

4.5.2.2 Eksternalisasi

Proses eksternalisasi terhadap pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari transfer pengetahuan tasit dari pegawai ke pegawai melalui pertemuan tatap muka yang membicarakan tentang pengalaman masing-masing menjadi bentuk eksplisit yang bertransformasi nyata melalui media tertentu yang dengan mudah dipelajari oleh pegawai lainnya. Hal ini terjadi melalui penerbitan laporan dan dokumentasi tentang peristiwa yang relevan, melaksanakan saran para ahli, dan meminta para atasan dan bawahan untuk berkomunikasi melalui konsultasi, forum, rapat, bimtek, diklat, dan diseminasi yang sifatnya formal.

Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar partisipan mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki mekanisme khusus untuk menempatkan pengalaman pribadi dan keterampilan informal yang ada pada orang lain supaya mudah untuk diakses. Partisipan kemudian terkonfirmasi jika mereka sudah melakukan, memberikan dan menerima 1) usulan pelaksanaan bimtek dan diklat; 2) rapat dan monitoring; 3) forum konsultasi rutin, dan 4) pendokumentasian ide dengan membuat *branding*.

1. Usulan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Proses eksternalisasi melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan merupakan artikulasi pengetahuan tasit menjadi eksplisit akibat munculnya

aktivitas tanya jawab para pejabat dan staf tentang permasalahan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Transformasi tasit terjadi dalam bentuk usulan bimtek dari setiap bidang di SKPD kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) maupun ke luar daerah serta pelatihan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda).

Usulan bimbingan teknis lingkup BKAD diajukan oleh Bidang Pajak kepada BKPP untuk mengajarkan pengetahuan kepada petugas penetapan pajak daerah dan petugas penilai properti di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), sebagaimana dikatakan oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan BKAD:

“Ada.. untuk beberapa yang sering itu karena langsung menyangkut teknis ya.. teknis itu biasanya kalau misalnya pajak ada anu itu temen-temen di pajak, seperti kemaren Mas Eko yang Kasubbid penetapan itu mereka e.. diikutkan oleh BKBP diklat apa yo.. tapi terkait dengan pajak satu minggu di Jakarta itu Mas Eko, kemudian beberapa tahun lalu bahkan kita pernah kerja sama dengan STAN kita kirimkan 2 orang sebagai penilai properti atau apa itu, dua orang itu dikirim untuk ikut itu.” (Romdhoni, 2018b)

Bimtek biasanya paling banyak ditujukan kepada staf atau pejabat yang masih baru karena telah menjadi kewajiban pimpinan untuk mengajari stafnya supaya tugasnya dapat berjalan efektif baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Selain Bidang Pajak, Kepala Bidang Akuntansi juga pernah mengusulkan stafnya untuk mengikuti bimtek kepada BKPP.

“Nek kita bisanya menyarankan e.. misalnya e seklai-kali adain dong BIMTEK apa gitu kan BIMTEK akuntansi, atau BIMTEK penerusan aset atau apa gitu. Karna memang ini toh kebutuhannya apa, terutama kalau ada aturan-aturan baru. Gitu. (Artiningsih, 2018b)

Selain mengutus stafnya untuk diklat ke luar daerah, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pelatihan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda). Pelaksanaan pelatihan bisa dilakukan di Wates atau langsung mendatangi kantor BPKP di Yogyakarta. Kepala Bidang Perbendaharaan banyak melakukan *update* pengetahuan tentang Simda ini karena mereka lebih banyak berkepentingan sebagai operator Simda Kabupaten.

“Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondi itu. Itu.. tri.. tri wulan iya., tri wulanan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali.” (Hadiyanto, 2018b)

Sementara untuk Kepala Bidang Aset, keperluan pelatihan lebih banyak kepada sistem informasi aset yang pelaksanaannya membutuhkan praktik tatap muka yang dipandu langsung programer SIM Aset.

“Yaaa...kita tetap..ya modelnya tetap praktikal. Nah sehingga jadi, iya dilakukan di sini atau di gedung yang agak luas itu. Jadi ini kan..ini..eeh kalau dulu pengurus barang pendidikan (sambil menunjukkan foto di layar yaitu foto tim dari bidang aset yang menjadi pengajar). Pak Sugiantoro itu programernya. Kalau co-programer pak Mahsum ini sekarang di LPPM, eeh Badan Penanggulangan Bencana. Ini kepala seksi saya. Ini tim saya. Ini orang sini semua tapi menjadi tim ahlinya sana.” (Amrullah, 2018b)

2. Forum Konsultasi Rutin

Proses eksternalisasi dari aktivitas forum konsultasi rutin merupakan tindak lanjut pengetahuan tasit dari adanya wacana pembuatan kebijakan pengelola keuangan termasuk wacana usulan kebijakan terhadap pengelolaan pendapatan.

Pendokumentasian tasit melalui forum konsultasi rutin ini terjadi dalam bentuk 1) pertemuan rutin di bidang akuntansi; 2) pertemuan rutin di bidang perbendaharaan; dan 3) forum serap aspirasi kamisan.

Pertemuan rutin per triwulan di bidang akuntansi membahas masalah yang terjadi di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permasalahan di PPK adalah persoalan akuntansi yang diajarkan kepada petugas akuntansi. Rata-rata petugas akuntansi yang dtunjuk setiap tahunnya bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi sehingga perlu pendampingan setiap saat. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Akuntansi BKAD.

“Iya. Kalau pertemuan rutin ada setiap triwulan nah saya selenggarakan saya undang mereka semua di forum itu monggo kalau mereka ada yang mau disampaikan permasalahan atau apa silahkan.” (Artiningsih, 2018b)

Hasil pertemuan antara Kepala Bidang Akuntansi dengan PPK berupa catatan pedoman pembuatan jurnal untuk digunakan oleh petugas akuntansi yang terdiri dari panduan dan cara memasukkan angka debit dan kredit di aplikasi Simda.

“Itu kan misalnya, nah itu kita sampaikan. Teman saya, ada adminnya nanti di grup menyampaikan admin saya ke semua petugas akuntansi sudah langsung kita pandu di situ, jurnalnya ini debit kreditnya ini, yang di jurnal ini. Itu sudah kita sampaikan. Cuma kalau mereka petugas akuntansi discovery masih bingung ya monggo datang ke sini. Gitu. Kita seperti itu.” (Artiningsih, 2018b)

Di samping pertemuan formal yang diadakan setiap 3 bulan sekali, petugas akuntansi juga diberi keleluasaan untuk berkonsultasi langsung via *whatsapp* jika

permasalahan dianggap belum selesai. Kepala Bidang Akuntansi selalu mengajak mereka untuk diskusi.

“Monggo setiap ada kebutuhan ke sini aja, boleh telpon, boleh datang. Dari dulu seperti itu.” (Artiningsih, 2018b)

Sementara untuk permasalahan yang terjadi di PPTK menyangkut kewajiban pembuatan laporan kegiatan yang berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang perlu dikonsultasikan dengan bidang akuntansi karena merupakan bukti akhir yang dibutuhkan oleh petugas akuntansi. Hasil pertemuan dengan PPTK dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan yang akan disampaikan kepada kepala BKAD. Pengawasan terhadap laporan kegiatan PPTK dilakukan secara berjenjang melalui kepala subbidang perencanaan dan kepala subbidang keuangan karena merekalah yang menjadi PPTK. Kepala Bidang Akuntansi kembali membenarkan.

“Setiap bulan, akhir bulan harus bikin laporan kegiatan yang dari sana kan secara berjenjang melalui Subbag perencanaan pasti disampaikan monev nya ke atasan. Nah dari sana kan bisa di pantau, oh ini jalan. Nah ketika tidak ada hal-hal yang signifikan kan berarti segala sesuatunya berjalan dengan baik.” (Artiningsih, 2018b)

Pertemuan rutin per caturwulan juga terjadi di bidang perbendaharaan yang membahas masalah di bendahara pengeluaran tentang pengelolaan anggaran terutama tentang pengelolaan belanja di luar kas daerah dan konsultasi langsung tentang Simda. Kepala Bidang Perbendaharaan mengkoordinir langsung aktivitas ini.

“Ya.. kalau anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di-update di-refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya

kemarin ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.” (Hadiyanto, 2018b)

Pengetahuan para bendahara pengeluaran diperbaharui dengan adanya perubahan peraturan dan adanya fitur-fitur baru dalam Simda. Hasil pertemuan pun diberikan dalam bentuk catatan tentang mekanisme pengesahan belanja di luar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kemudian langsung dipraktikkan dengan menggunakan Simda.

“...ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di-update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di-update lagi ya.. kita sosialisasi lagi.” (Hadiyanto, 2018b)

Salah satu forum komunikasi yang paling disukai masyarakat adalah Forum Serap Aspirasi Kamisan yang bertujuan menerima saran dan kritik yang dilaksanakan setiap hari kamis pagi dan membahas persoalan rakyat langsung dengan Bupati Kulon Progo. Hasil pertemuan didokumentasikan melalui notulen yang dicatat oleh petugas khusus dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo dan dokumennya akan ditembuskan kepada SKPD yang relevan dan terkait dengan permasalahan. Kepala Bidang Perencanaan dan Analisis Data Bappeda pernah mendapat tembusan hasil diskusi kamisan ini.

“Nah nanti dari forum kamis pagi itu kan ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang apa saja. Itu terus nanti ada, kan ada yang nyatet ya, di-feedback-kan ke SKPD, misalnya jalan rusak, itu nanti disampaikan ke mana...ke dinas PU, dan biasanya di sini juga dapat tembusan.” (Wijayanti, 2018)

3. *Rapat dan Monitoring*

Proses eksternalisasi melalui kegiatan rapat dan monitoring merupakan transformasi pengetahuan tasit menjadi eksplisit karena aktivitas “belajar bareng” permasalahan keuangan. Transformasi tasit terjadi dalam bentuk rapat dan pertemuan serta pengawasan pihak terkait seperti rapat dengan mengundang subbagian keuangan dan perencanaan untuk menyamakan visi misi; rapat di bidang pendapatan untuk sosialisasi pajak daerah; rapat pembahasan pembuatan peraturan bupati dengan mengundang semua bidang untuk mengusulkan draft peraturan bupati masing-masing; rapat koordinasi di bidang pendapatan untuk mengevaluasi target-target pendapatan; rapat evaluasi bendahara di Bidang Perbendaharaan; serta monitoring pajak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Propinsi setiap bulan.

Rapat di lingkungan BKAD secara umum dengan mengundang kepala-kepala bidang dan subbagian keuangan dan perencanaan untuk menyamakan visi misi terkait pengelolaan keuangan dan evaluasi kendala yang dihadapi. Rapat tersebut telah ditindaklanjuti dengan lebih mengefektifkan fungsi PPTK dan PPK dalam mengelola SPj. Kepala Subbagian Keuangan yang menjabat PPK BKAD yang sekaligus menjadi PPTK pernah mengikuti rapat ini.

“Ya.. untuk mengundang e.. Subag keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan. Itu pernah.. pernah kami diundang sekali, tapi kan itu e.. intern ya.. antar hanya antar bidang, itu diundang. Dan itu sebenarnya, apa yang mereka sampaikan itu kita sudah jalankan.” (Mas’adah, 2018c)

Rapat di bidang pendapatan dilaksanakan di lingkungannya dengan mengundang semua subbidang dan staf untuk lebih mengintensifkan sosialisasi 10 jenis pajak daerah yang dikelola. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mengakui adanya pertemuan ini.

“Ya karena mereka jadi tahu misalnya apa tata cara pengisian form pendataan anu, pendataan itu MBLB mineral bukan logam yang ditambang, dia tahunya dari sosialisasi itu. Formnya dibagikan terus juga dikasih tahu caranya ngisi seperti itu.” (Hakim, 2018)

Rapat pembahasan pembuatan peraturan bupati dengan mengundang semua bidang untuk mengusulkan draft peraturan bupati yang diinginkan masing-masing. Rapat ini bermanfaat untuk saling *sharing* informasi karena harus diselesaikan dengan rembuk yang matang. Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan mengkoordinir langsung aktivitas ini di BKAD.

“Iya.. selain meningkatkan pengetahuan juga kan bisa saling sharing, sharing pendapat sharing informasi, tanggapan kan dari rapat itu semua keluar ya.. muncul, dari sisi orang pendapatan misalnya gimana, dari sisi pelaporannya gimana, perbendaharaan nanti yang akan melaksanakan SPG-nya gimana, jelas tidak hanya jadi ajang belajar tapi memang di situ juga solusi ya.. tapi keputusan kan baru ditahap kita, apapun hasilnya kita tetap bawaan ke Pak Sekda, atau Pak Bupati kalau itu menyangkut kebijakan yang penting rembuk matengnya di sini di BPKAD” (Lestari, 2018a)

Rapat koordinasi di bidang pendapatan dilaksanakan untuk mengevaluasi target-target pendapatan. Rapat ditentukan oleh Kepala Bidang Pajak setiap bulan dengan melibatkan semua pegawai di bidang pendapatan dan pegawai harian lepas untuk menjelaskan adanya peraturan-peraturan baru tentang perpajakan daerah

termasuk realisasi pendapatan asli daerah yang berkoordinasi dengan kecamatan dan desa.

“...kita dalam satu bulan sekali itu melakukan rapat koordinasi baik dengan yang harian lepas yang ada di lapangan maupun dengan rekan-rekan kita, kita sampaikan ada hal-hal yang mungkin perlu untuk segera ditindak lanjuti atau ada aturan-aturan baru kita sampaikan die e rapat koordinasi rutin yang setiap bulannya itu dilakukan. Termasuk kaitannya dengan masalah PAD. PAD ini kan kita evaluasi, kita evaluasi umpamannya kan untuk akhir bulan itu sudah kita tahu angkanya belum mencapai seperti target. Nah, itu nanti kita sampaikan kemudian upaya apa yang harus kita laksanakan nanti kita rembug secara bersama-sama.” (Nasip, 2018c)

Rapat evaluasi bendahara di Bidang Perbendaharaan juga dilakukan setiap saat ketika terjadi permasalahan Simda terutama tentang perpajakan. Rapat yang terakhir dilakukan adalah pertemuan dengan pihak Propinsi yang terkait dengan penerapan sistem pembayaran nontunai. Kepala Bidang Perbendaharaan memimpin langsung rapat tersebut.

“Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalau ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai.” (Hadiyanto, 2018b)

Sementara untuk monitoring pajak, pengawasannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Propinsi setiap bulan. Rapat ini sifatnya kerjasama karena kewenangan pengelolaan pajak daerah harus sepengetahuan pihak propinsi dalam hal perizinannya. Hasil monitoring ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan para petugas pajak daerah untuk lebih

meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang, seperti diakui oleh Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan BKAD.

“Kerja samanya di Perda ini kan sekarang MBLB kan kewenangan pengelolaannya itu kan di Provinsi. Dinas PUPR ESDM Provinsi DIY. Itu. Tapi pajaknya masuknya sini, pajak mineral bukan logam. Jadi kewenangan sana itu misalnya pengawasan, pengawasan tentang pengambilan mineral bukan logam pasir, batu apa itu sana yang ngawasi itu sana.” (Hakim, 2018)

4. Pendokumentasian Ide melalui Branding

Aktivitas ini merupakan proses eksternalisasi yang mendokumentasikan hasil pengetahuan tacit pada tahap sosialisasi yang berupa pertemuan dan dialog informal yaitu perbincangan yang mengemuka terhadap pengelolaan aset tetap yang amburadul. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengartikulasikan pengetahuan tacit seseorang dan mengubahnya menjadi pengetahuan eksplisit agar mudah dipraktikan oleh orang lain. Pendokumentasian ide-ide yang muncul dalam proses sosialisasi tersebut, terinspirasi sejak adanya tantangan dan pengalaman 7 tahun Kabupaten Kulon Progo tidak pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pendokumentasian ide terjadi dalam bentuk *branding* yang berfungsi sebagai penyemangat bekerja dan sebagai bukti eksistensi yang mewakili persoalan yang ada. *Branding* pertama yang lahir adalah *the jewel of java*. Slogan *marketing* pariwisata Kulon Progo yang diluncurkan di akhir masa jabatan Bupati Toyo Santoso Dipo tersebut merupakan *brand* rujukan yang menginspirasi munculnya beberapa *branding* di bidang pengelolaan keuangan daerah Kulon Progo. *The jewel of java* mengandung

makna bahwa Kulon Progo berada di tengah-tengah Pulau Jawa sehingga Kulon Progo juga sering disebut sebagai mutiaranya Pulau Jawa. Konsep yang ditemukan oleh Jos Iwan ini menjadi cikal bakal dipilihnya Kulon Progo menjadi lokasi bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan menggantikan bandara Adi Soetjipto di Kota Yogyakarta Propinsi DIY. Kepala Bidang Perbendaharaan menjadi saksi atas munculnya slogan terbaik ini.

“Marketing Pak Jos Iwan ini ya kita berterima kasih kepada beliau. Hehe. Beliau melahirkan branding the jewel of java, dia yang berjuang apa marketing pemasaran wilayah Kulon Progo. Dia yang menemukan konsep bahwa ternyata Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kemudian ada Jogja di sini itu tengahnya Kulon Progo. Jadi titik Kulon Progo kalau di tengah dia ke timur bisa, ke barat juga bisa. Itu makanya konsep the jewel of java, mutiaranya Pulau Jawa itu di Kulon Progo. La beliau kayaknya yang berhasil menarik makanya bandara itu ada di Kulon Progo itu. Hehe. Termasuk branding beliau sampai ke Ceko, ke India. (Hadiyanto, 2018d)

Sejak awal pemerintahan Bupati Hasto Wardoyo, *branding the jewel of java* telah didokumentasikan dan disimpan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo menjadi sebuah buku yang menjadi penyemangat membangun daerah di semua sektor terutama pariwisata dan pengelolaan keuangan daerah.

“Bappeda. Dia brandingnya the jewel of java, kemudian kenapa tulisannya seperti itu, bentuknya apa, filosofinya apa, warnanya itu apa maknanya. Itu ada di sana satu buku.” (Hadiyanto, 2018d)

Berdasarkan semangat ekonomi, kemudian lahirlah *brand asyik menata aset* yang merupakan penerapan dari *branding the jewel of java*. Brand ini lahir dari ide-

ide Kepala Bidang Aset BKAD yang mengemuka ketika terjadi perbincangan aset yang amburadul.

“Cuma yang saya terapkan hanya e.. semangat di bidang ekonomi bahwa brand sebuah brand itu penting. Jadi waktu di ekonomi saya punya kegiatan waktu itu untuk me.. membuat branding Kulonprogo yang The Jewel of Java itu ah.. itu saya terapkan di bidang aset, kita juga buat brand Asik Menata Aset.” (Amrullah, 2018b)

Branding asyik menata aset dicetuskan oleh Taufiq Amrullah, Kepala Bidang Aset dan di-*launching* bukunya bersamaan dengan *brand* tersebut oleh Bupati Kulon Progo. Buku tersebut disimpan di Bidang Aset dan menjadi pedoman bagi pengelola aset dan rujukan pembuatan beberapa peraturan turunan di bidang aset. Salah satu alasan peluncurannya adalah karena adanya anggapan bahwa aset itu tidak penting sehingga aset terbengkalai dan dinomorduakannya pengelola barang yang tidak mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan di level tataran kebijakan pemerintah daerah.

“...Brand itu kenapa di-launching-kan karena apa namanya...eehh aset itu kan dikelola oleh orang-orang nomor dua kelas. Hebatnya kelas ke sekian dari tataran..tataran kasta pegawai. Jadi gak diperhatikan , kemudian kita coba share dulu agar diperhatikan. Saya launching-kan bukunya, sampai akhirnya pak Bupati pun, eeh..nempel stiker label-label dan kita minta juga wakil bupati menempelkan stiker di apa namanya...eehh sekolah. Jadi gaungnya sampai ke kecamatan. Jadi supaya karena goalnya tadi asyik dan itu menjadi minta perhatian, ya..kita minta ada pencaanangan khusus, pencaanangan dan sosialisasi. Akhirnya kan sekarang itu pengurus barang menjadi..oohh saya itu diperhatikan. Itu..jadi mereka dalam pembuatan laporan..bekerja.” (Amrullah, 2018)

Dari *brand* tersebut, pengelolaan aset berkembang dengan baik dan mendapat perhatian serius Bupati dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala Bidang Aset saat

itu diminta khusus oleh Bupati untuk menuntaskan permasalahan aset dan mendapat kepercayaan penuh.

“...itu sebuah tantangan dari dulu sebenarnya e.. saya juga tidak serta merta karena saya di pindah tapi saya juga pernah bicara dengan Pak Sekda waktu itu e.. sanggupkah saya me.. menata aset itu lebih baik kan gitu sebelum saya dipindah ke sini, karena kan tidak semua orang kan mau menjadi Kepala Bidang Aset karena dalam tanda kutip tidak ada apa-apanya kan, yang ada hanya masalah-masalah gitu aja, tapi ternyata setelah saya duduk di sini masalah itu menjadikan berkah.” (Amrullah, 2018b)

4.5.2.3 Kombinasi

Proses kombinasi terhadap pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo diterapkan dengan merumuskan kembali pengetahuan eksplisit menjadi bentuk yang lebih jelas dan lebih bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan tertentu untuk melaksanakan proses kombinasi ini. Dari tanggapan semua partisipan, proses kombinasi terjadi melalui 1) studi banding dan survei; 2) pengembangan aturan dan kebijakan; 3) pemanfaatan buku dan hasil penelitian; dan 4) pembahasan APBD dan perubahannya.

Semua informasi eksternal dan internal yang diperoleh melalui studi banding, survei, hasil penelitian, dan hasil pembahasan APBD, diperbarui dan diklasifikasikan dengan benar, dimanfaatkan, ditindaklanjuti, serta dijadikan pelajaran untuk mendukung pengambilan keputusan dan aturan secara tertulis. Para partisipan menegaskan bahwa di Kabupaten Kulon Progo paling sering dilakukan apabila ada aturan baru dari pemerintah pusat selalu dikodifikasi untuk menjadi aturan turunan

agar lebih mudah dipahami seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan surat keputusan. Hasil-hasil pengalaman yang diperoleh dari pihak luar juga berusaha untuk dikonversi dan dicaritemukan dasar hukumnya terlebih dahulu baru kemudian diterapkan.

1. Survei dan Klasifikasi Laporan Eksternal

Aktivitas ini merupakan proses yang mengkombinasikan laporan hasil survei dengan laporan eksternal lainnya untuk dijadikan satu peraturan sebagai panduan yang komprehensif dalam menyusun APBD dan optimalisasi pendapatan daerah. Hasil akhir kombinasi ini berupa survei harga barang dan jasa untuk keperluan standar belanja, studi banding di Temanggung dan Tangerang Selatan tentang eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan justifikasi peraturan dari pusat menjadi peraturan turunan.

Standar Harga Barang dan Jasa atau SHBJ merupakan pedoman harga yang digunakan dalam menyusun APBD melalui RKA-SKPD. Pedoman ini disusun berdasarkan hasil survei harga barang dan jasa yang dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh BKAD dengan melibatkan pihak SKPD terkait dan pedagang di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah BAKD menjadi koordinator survei mengatakan:

“Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu.” (Lestari, 2018a)

Kombinasi antara standar dan hasil survei menghasilkan peraturan bupati tentang standar satuan harga barang dan jasa pemerintah kabupaten Kulon Progo yang diusulkan kepada bagian hukum untuk diterbitkan. Semua SKPD wajib mengikuti aturan ini dalam menyusun RKA-SKPD. Demikian Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah BAKD membenarkan.

“Iya.., kalau nggak ada di sini ya.. salinannya kita dikasihkan, karena kita yang mengusulkan Perda atau Perbup itu nanti sama bagian hukum kita diberikan salinan gitu, jadi mau ngopy ke kita bisa, ngopy langsung ke bagian hukum juga bisa, download juga bisa.” (Lestari, 2018a)

Untuk menambah pengalaman di bidang pengelolaan pajak daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), bidang pajak BKAD melakukan studi banding ke beberapa kabupaten seperti Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tangerang Selatan. Hasil studi dituangkan dalam sebuah laporan hasil kunjungan untuk dijadikan peraturan bupati sebagai pedoman dalam mengelola pajak daerah. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan yang juga pernah mengikuti studi banding mengakuinya.

“Ya itu suatu ketika bisa dijadikan referensi misalnya Kulon Progo bisa aja punya kebijakan seperti Temanggung yang eksplorasi MBLB nya dihentikan ata dikurangi bisa. Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.” (Hakim, 2018)

Peraturan lainnya yang juga diterbitkan adalah Surat Ketetapan Pajak yang sebelumnya dilakukan berdasarkan laporan wajiab pajak melaui surat pemberitahuan pajak daerah. Atas dasar laporan itu dilakukan lagi pengamatan potensi pajaknya

melalui analisis kemampuan wajib pajak. Laporan kemudian diklasifikasikan melalui Simda Pendapatan. Dalam menetapkan jumlah pajak, petugas pajak berpedoman pada peraturan bupati yang ada sebelumnya, sehingga dari hasil analisis dan pengklasifikasian tersebut akan menghasilkan dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang akan disampaikan kepada wajib pajak (WP). Kepala Bidang Pajak menyatakan:

“He’em. Jadi kan katakanlah sekarang ada wajib pajak datang ke sini, katakanlah mau ee berkaitan dengan pajak ee restoran. Pertama mereka kan melaporkan, melaporkan jadi dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, terus nanti kan masuk di aplikasi bidang penetapan. Penetapan kan meng-entry data yang mereka laporkan. Dari aplikasi itu bisa otomatis diterbitkan suat ketetapan pajaknya. Nah, itu nanti kan langsung bisa diprint dari data yang sudah dimasukkan tadi, nanti bisa disampaikan ke WP. (Nasip, 2018c)

2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan

Proses kombinasi dalam aktivitas ini terjadi melalui pengembangan aturan dan kebijakan yang sudah ada menjadi produk aturan terbaru yang sesuai dengan keinginan bersama yang diamanatkan oleh undang-undang Terbentuknya aturan tersebut melalui beberapa aktivitas seperti penerapan sistem pembayaran nontunai yang mengakomodir Surat Keputusan Mendagri dengan menerbitkan peraturan bupati sebagai landasan hukumnya; terbitnya pedoman pemeriksaan pajak daerah dari hasil meniru peraturan bupati Temanggung seperti peraturan bupati tentang sistem tol pendataan; kolaborasi bagian hukum Sekretariat Daerah dengan subbidang kebijakan pengelolaan keuangan BKAD untuk menggodok dan mengganti peraturan bupati tentang SHBJ dan hak administratif DPRD; serta terbitnya dasar hukum pengelolaan

barang daerah yang merupakan tindak lanjut dari Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Dalam lingkup bidang pendapatan, terdapat mekanisme tersendiri untuk memberi pedoman dalam melakukan penilaian pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu dengan mengintensifkan staf penilai properti yang telah didiklatkan untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi permohonan wajib pajak yang selalu meminta keringanan pajak BPHTB. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk pedoman baku yang di-SK-kan kepala BKAD berdasarkan hasil laporan kunjungan lapangan petugas pajak lainnya. Atas hal ini, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan bersaksi:

“...ketika ada seseorang datang ada transaksi intinya ingin keringanan karena mungkin nggak dapet jalan nek sekian itu terlalu mahallah dari harga pasar lah. Nah.. temen-temen yang pernah didiklatkan penilai properti itu yang nanti akan berbicara, bisa ya bisa tidak. Jadi bisa dikabulkan bisa tidak, kembali ke... nanti bagaimana itu kondisi riil di lapangan bahkan ada sampe kunjungan lapangan untuk memastikan bener po yang disampaikan itu seperti itu...” (Romdhoni, 2018b)

Hal yang hampir sama juga terjadi di bidang pendapatan sendiri, hasil kunjungan ke Kabupaten Temanggung dan beberapa kabupaten lainnya yang berupa laporan tertulis hasil kunjungan dijadikan dasar pembuatan pedoman pemeriksaan melalui peraturan bupati terhadap sistem tol pendataan yang berfungsi untuk mendata truk sebagai dasar penerbitan surat pemberitahuan pajak daerah. Kepala Subbidang Pengembagan Pendapatan mengatakan:

“Ha itu kan hasilnya itu yang anu, yang ee apa istilahnya membuat kebijakan kita pendataan di lapangan itu memakai sistem tol pendapatan, tol

pendataan. Itu hasil dari sosialisasi itu. Pendataan truk yang lewat itu ditanya pakai itu (36:50), diberikan itu, suruh ngisi formulir dari PT apa gitu. Nanti di situ dipegang kita, hasilnya itu surat pemberitaan pajak daerah. Itu seperti itu. itu baru juga, itu strategi baru mulai bulan September 2017 baru dilaksanakan.” (Hakim, 2018)

Peraturan terbaru tentang sistem pembayaran nontunai juga diberlakukan saat ini setelah beberapa kali menelaah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang anjuran pelaksanaan sistem pembayaran nontunai. Untuk mengotimalkan penerapannya, sebelumnya beberapa pejabat telah mengikuti magang di pemerintah pusat sebelum penerapan sistem nontunai tersebut dan menyesuaikan dengan aturan baru. Peraturan bupati atas sistem tersebut sekarang telah diterbitkan. Hal ini disaksikan sendiri oleh Kepala Subbagian Keuangan BAKD.

“e.. kebetulan terkait dengan pelaksanaan non tunai ini pernah kita pernah ada yang ikut magang di Pusat yaitu di bidang perbendaharaan, mereka yang ikut magang ke sana sedangkan yang harus melaksanakan adalah kita di e.. pengelola keuangan, ya kita tanya perlakuannya itu kepada mereka.” (Mas’adah, 2018c)

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD bahwa sebelumnya penerapan sistem nontunai tersebut juga berdasarkan instruksi bupati Kulon Progo yang ditindaklanjuti.

“Kemaren itu pelaksanaannya memang baru dalam bentuk instruksi Bupati, itu menindak lanjuti dari SK Mendagri terkait transaksi non tunai ini, untuk tahun ini, ini akan di apa namanya e.. regulasinya akan dituangkan dalam Perbup.” (Lestari, 2018a)

Tindak lanjut terhadap peraturan juga dilakukan oleh Kepala Bidang Aset BKAD, Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

diturunkan yang menghasilkan peraturan bupati (perbup) tentang sewa barang milik daerah, Perbup barang bongkaran, dan SK bupati tentang sensus aset daerah.

“Hem.. untuk Perda sudah ada, Perda pengelolaan daerah yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perbup nya, perbup otonomi daerah, terus ada Perbup tentang sewa-menyewa barang milik daerah, sewa kemudian Perbup barang bongkaran, dari barang bongkaran gedung, kemudian Perbup tentang e.. tindak lanjut e.. peraturan Bupati, keputusan Bupati tindak lanjut dari sensus. Kemudian penilaian barang milik daerah nah kita tindak lanjuti di situ.” (Amrullah, 2018b)

3. Pemanfaatan Buku dan Hasil Penelitian

Proses kombinasi melalui pemanfaatan buku dan hasil penelitian terjadi melalui instruksi penyusunan perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menghasilkan beberapa dokumen perencanaan misalnya Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Buku ini juga menjadi *output* atas pengalaman mengelola aset sekian tahun seperti penerbitan buku oleh Kepala Bidang Aset yang menjadi rujukan pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Penerbitan aturan yang berasal dari pengklasifikasian informasi dan laporan eksternal selalu dilakukan studi referensi sebelum mengadopsinya. Misalnya hasil penelitian mahasiswa yang telah meneliti di Kabupaten Kulon Progo yang diwajibkan menyetorkan hasil penelitiannya untuk ditelaah mana yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan masukan. Bappeda menggunakan rekomendasi hasil penelitian termasuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk ditindaklanjuti dan dijadikan bahan rumusan kebijakan misalnya Renstra terutama tentang Pendapatan Asli Daerah

(PAD) karena sudah diwajibkan dalam Permedagri No. 86 tahun 2017. Demikian pengakuan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“Oh, penelitian-penelitian luar. Ee biasanya itu menjadi salah satu, iya dipake juga sih sebagai salah satu konsideran. Biasanya misalnya merumuskan Renstra dan sebagainya, itu kan kita nek bahasa ekonomi itu perlu mempertimbangkan rata-rata industry. Katakanlah sebagai pembanding to misalnya tingkat ketergantungan terhadap Pusat atau derajat apa istilahnya disentralisasi seperti apa itu kan kita selalu membandingkan diri dengan luar gitu. terutama dengan ini, terutama dengan empat Kabupaten dan satu Kota yang sewilayah DIY. Nah, kita itu selalu membandingkan diri dengan Bantul, Sleman, Gunung Kidul. APBD kita tahun ini berapa, oh ternyata Bantul, Sleman, Gunung Kidul sekian. Biasanya dari hasil penelitian orang-orang terhadap Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Jadi kita gunakan. Terutama BPS ya lembaga luar.” (Hadiyanto, 2018d)

Selain hasil-hasil penelitian dan peraturan-peraturan, juga ada buku yang dihasilkan dari hasil pengalaman selama menangani pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan rujukan yang berjudul “Meraih Opini WTP Apa Adanya” kemudian dituangkan kembali dalam sebuah buku yang disusun digunakan untuk mengajar di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) oleh Taufiq Amrullah, Kepala Bidang Aset BKAD.

“Makanya waktu itu kan saya terus kemudian e.. apa e.. ngumpulkan materi, materi hasil pemeriksaan Nyonya itu kan e.. berkenaan dengan temuan-temuan aset dan jadilah buku “Meraih Opini WTP Apa Adanya” yang.. yang dikarang oleh ahli vidia, kalau bisa googling itu meraih buku apa, meraih opini WTP apa adanya ahli vidia, inilah yang kita pakai sebagai bahan pembelajaran di PSEKP.” (Amrullah, 2018c)

Buku ini menjadi pedoman pengelolaan aset bukan hanya untuk Kabupaten Kulon Progo tetapi sudah di-share sebagai pengalaman kepada daerah lain yang membutuhkan yang sebelumnya dirangkum untuk dijadikan materi pembelajaran.

“Jadi itu.. saya kan dulu BPK, kemudian materi-materi dia saya kumpulkan, kemudian apa namanya e.. di edit kemudian apa namanya kita jadikan buku diterbitkan oleh BPFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi ya itulah yang kita pake untuk selama itu, saya nggak ada bukunya pas habis, biasanya peserta minta memang itu.” (Amrullah, 2018c)

“Itu. Jadi bermula dari sana. Jadi ide itu saya punya buku ya sebentar, ada filenya nanti bisa dicopy. Mungkin dari buku itu njenengan bisa anu. Sebentar. Mungkin bisa dipakai. Diary. Nah mungkin ini bisa dipakai nanti. Karena membaca dari sini nanti. Iya. Nanti di copy aja.” (Amrullah, 2018c)

4. Pembahasan APBD dan Perubahannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu-satunya dokumen resmi tentang kebijakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pembahasan APBD ini menjadi unsur transformasi pengetahuan eksplisit ke eksplisit karena prosesnya dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. Dokumen resmi yang dijadikan dasar dari pembahasan APBD ini antara lain Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Pra-RKA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian menghasilkan dokumen APBD yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Proses penyusunan perencanaan yang menghasilkan APBD memang sudah menjadi amanat peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa semua perencanaan harus disusun dari 4 pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan teknokratis dan pendekatan politis yang sebenarnya merupakan representasi dari proses rekonfigurasi dari berbagai pengetahuan eksplisit yang terpisah dengan tujuan

untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“Nggih. Kalau di Kulon Progo boleh saya katakan empat, kalau di sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada empat pendekatan ya. Pendekatan teknokratik, partisipatif, kemudian pendekatan politik atau perwakilan lewat dewan, yang satu itu apa, ini masalah Musrenbang dan sebagainya. Saya kira kalau diukur derajatnya itu, sisi teknokratiknya itu cukup lumayan mewarnai perencanaan pada umumnya. Jadi tidak semata-mata politis asal usulane dewan terus bisa terwujud itu ya nggak. Ada porsi-porsi memang ee nopo, usulan-usulan dari dewan. Tapi lebih ke teknokratiknya itu kental misalnya Bupati menghendaki sekarang misalnya apa ee postur APBBDlah katakanlah. Tahun ini APBD kita berapa, 1, 5 T nanti berapa persen ini untuk infrastruktur, berapa persen itu udah arahan dari berapa persen untuk pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang untuk bantuan sosial berapa itu ada arahan untuk seperti itu. Jadi porsi-porsi itu sudah secara garis besar ditentukan dulu porsi APBDnya nanti ya terjemahannya kita berebut kuenya sudah sesuai porsinya itu.” (Hadiyanto, 2018d)

4.5.2.4 Internalisasi

Proses internalisasi terhadap pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menyoroti bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendukung kegiatan tertentu yang terkait dengan proses konversi pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan tacit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua partisipan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendorong pejabat dan stafnya untuk meningkatkan pengetahuan pribadi mereka dengan mengikuti pelatihan yang relevan dan memerintahkan untuk menggunakan sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, sehingga semua data yang tersedia sangat mudah diakses dan membentuk cara pandang dan budaya kerja mereka untuk selalu belajar secara mandiri.

Sejalan dengan temuan ini, sebagian partisipan yang diwawancarai juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memungkinkan pejabat dan stafnya melakukan kunjungan atau studi banding untuk menjustifikasi standar operasional yang berlaku di daerah lain. Hasil kunjungan dan pengklasifikasian informasi ini menawarkan peluang yang baik untuk mentransfer pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan tasit dengan membaca semua materi yang disediakan seperti *handout*, buku-buku dan materi elektronik. Partisipan kemudian menyimpulkan bahwa keberhasilan program-program yang diterapkan dari hasil pengalaman ini juga sangat tergantung pada level tataran pengambil kebijakan baik dari sisi dukungan moral maupun dari sisi anggarannya.

1. Materi PKD sebagai Pedoman Membagi Pengalaman

Aktivitas ini merupakan penyerapan pengetahuan eksplisit yang kemudian ditransfer secara luas melalui proses belajar dari pejabat dan pegawai baik di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Setiap individu mau belajar pengetahuan baru dan mau menginternalisasikan di dalam dirinya sehingga akan memperluas dan memperkaya pengetahuan *tacit* yang bersangkutan. Proses belajar dilakukan dengan cara menerima kunjungan studi banding dari pemda lain, membagi pengalaman di PSEKP UGM, serta berkunjung dan diundang oleh pemerintah daerah lain untuk saling belajar dan membagi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo telah dirasakan manfaatnya dan tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Dari hasil wawancara, semua partisipan belum tahu kalau Kulon Progo telah terkenal tetapi mereka pernah melihat dan menerima langsung kedatangan para pejabat dan staf dari pemerintah daerah lain untuk mengamati langsung dan mempelajari kesuksesan Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola keuangan daerah, baik itu berupa proses keuangannya maupun aset-asetnya. Kunjungan itu terjadi mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini. Para tamu belajar dengan melakukan diskusi dan tanya jawab serta melihat-melihat dokumen dan proses yang sedang terjadi. Hal ini diakui oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

“Saya belum pernah dengar untuk bersaing antarkabupaten, paling kalau Kabupaten lain ke sini itu dalam rangka e.. studi komparasi gitu.”

(Mas’adah, 2018c)

“Dan sama lah gitu. paling kalau ketika ada studi banding yang kita cuma sharing, gitu aja. Diskusi gitu aja. Semua sih pulau Jawa. Sumatera sering. Kadang Pemdanya kadang dewannya.” (Artiningsih, 2018b)

Tidak hanya menerima kunjungan, Kabupaten Kulon Progo juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa pemda lain untuk menjadi instruktur tetap terkait permasalahan tentang pengelolaan aset daerah. Misalnya seperti pemerintah Kabupaten Malaka, yang pelaksanaannya telah dilakukan dengan pembentukan tim pengelola oleh Bupati Kulon Progo atas permintaan Bupati Malaka. Hal ini berturut-turut diakui oleh Kepala Bidang Aset sekaligus sebagai instrukturinya.

“Oh, ada kita kerja sama dengan Malaka. Jadi Malaka itu kita kerja sama ee Malaka. Jadi ini satu-satunya kemarin saya baru apa namanya bekerja atas nama Pemda. Nah, ini Malaka kita membuat surat . . . mereka. Jadi Bupati Malaka mebuat surat kepada Bupati Kulon Progo untuk kita melakukan apa namanya ee workshop dengan program milik daerah.” (Amrullah, 2018b)

Membagi pengalaman di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada juga menjadi cara membagi pengetahuan eksplisit. Kepala Bidang Aset, Taufiq Amrullah menjadi salah satu pengajar di PSEKP ini khusus membawakan materi pengelolaan aset daerah kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang belajar di institusi tersebut.

“Ya... yang khusus yang berkenaan dengan manajemen aset mungkin ada peningkatan, ya.. ya.. paling tidak e... kontribusi yang bisa saya berikan adalah saya bisa sharing tentang pengalaman menata aset itu dengan temen-temen melalui PSEKP, dan ini sebenarnya kan ada ada.. apa.. sosok yang saya saya... kagumi kalau sekarang menjadi Kepala BKAD Gorontalo yaitu bapak Setiojati Kepala BKAD Gorontalo.” (Amrullah, 2018c)

Pengalaman Taufiq ini tidak hanya dibagi di institusi pendidikan tetapi juga sampai melakukan kunjungan ke daerah-daerah membagi pengalaman seperti di Kabupaten Batang, Bontang, Wonogiri, Tegal, Talang, Tagalog, dan masih banyak lagi.

“Kita terapkan kemaren terakhir itu di Kabupaten Batang. Ini kalau kota yang kerja sama kita sejak 2013 itu Kota Bontang sampai sekarang. Jadi teman-teman itu ke sana 4 kali dalam setahun. Jadi bermula dari kerja sama tadi, ya semacam itu. Iya. Yang kita-kita. Wonogiri, Tegal, Talang, Tagalog, Sumatera, . . . sudah kita.” (Amrullah, 2018b)

2. *Pelatihan dan Belajar Mandiri*

Proses internalisasi pengetahuan eksplisit ke tacit melalui aktivitas ini kurang terbentuk dengan sempurna walaupun masih ada sebagian kecil yang berhasil terbentuk. Dari sebagian besar partisipan yang diwawancarai, mereka mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak mendukung sepenuhnya pengadaan diklat yang memadai. Paling tidak ada 2 alasan yang dikemukakan yaitu karena keterbatasan anggaran dan karena sering adanya mutasi jabatan. Kalau pun ada anggaran untuk pelatihan, hanya dilakukan untuk diklat yang urgen saja. Selain itu adanya minat untuk mengikuti pelatihan keuangan msialnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kursus Daerah (LKD), Kursus Keuangan Daerah (KKD) karena tiap tahun ada permintaan untuk diklat, tetapi anggarannya hanya tersedia di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang belum tentu juga akan dianggarkan. Kejadian ini dialami sendiri oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“Anggaran Bimtek itu ada dianggarkan, tapi itu minim sekali, anggaran Bimtek itu hanya 12 juta untuk satu Kabupaten, satu.. Instansi kita ini untuk satu tahun, sedangkan untuk hal-hal seperti itu, Bimtek seperti itu, paling ndak satu orang anggarannya 5 juta, kita paling hanya bisa mengirim 2 orang dalam satu tahun, itu tahun-tahun kemaren. Tahun ini saya tidak tahu kita masih ada anggaran Bimtek apa ndak, dan di Bimtek itu biasanya, Bimtek yang sangat-sangat-sangat urgent kan terkait dengan hal-hal yang baru. Kalau terkait pengelolaan keuangan jelas aturan semuanya regulasinya sudah ada itu mungkin sudah tidak penting lagi. Bimtek itu terkait dengan aturan-aturan yang bener-bener baru, dan bener-bener urgent kita harus laksanakan.” (Mas’adah, 2018c)

“Bukan karena faktor anggaran, nggeh jadi.. kadang-kadang setiap tahun itu kita itu di beri apa.. di beri formulir itu ngisi untuk kebutuhan diklat, tapi ya.. sudah tinggal kebutuhan, kebutuhan aja nggak pernah, nggak pernah

dilaksanakan. Saya nggak tahu mungkin sana lebih diklatnya yang diklat-diklat ini sih, yang diklat-diklat teknis fungsional gitu ya, yang ada sertifikatnya yang.. dia kemudian angka kredit dan sebagainya, nek yang diklat-diklat semacam itu kan nggak ada angka kreditnya, nggak ada ini kan, jadi nggak prioritas.” (Hadiyanto, 2018b)

Kendala yang kedua disebabkan adanya keengganan para staf dalam mengikuti diklat yaitu setelah ikut diklat mereka kemudian menjadi was-was karena akan dimutasi. Demikian pengakuan Kepala Bidang Pajak BKAD yang mengaku banyak menerima keluhan dari stafnya.

“Ya kalau saya memandang mereka memang betul-betul pengen menambah pengetahuan mereka. Ya memang betul-betul sadar kaitannya dengan masalah pekerjaan mereka. Tetapi kadang-kadang juga ada yang istilahnya apa ya, pengen ikut kemudian tapi kendalanya setelah ikut mereka kemudian dimutasi. Ha itu yang menjadi tidak . . ., wah pengen ikut itu ya kadang seperti itu.” (Nasip, 2018c)

Dampak dari ketakutan akan dimutasi ini lebih banyak dirasakan oleh mereka yang telah memegang jabatan, sehingga muncul sikap oportunistik untuk menjadikan latar belakang pendidikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan jabatan. Cara yang dilakukan mereka akhirnya memilih kuliah dengan status izin belajar lalu mengejar predikat penyesuaian ijazah. Dari sini kemudian terjadi bahwa pengetahuan mereka meningkat tapi latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Kembali Kepala Bidang Pajak mengakuinya.

“Ya mungkin. Nggih nggih. Tetapi waktu saya di kecamatan itu juga saya menemui ada orang seperti itu kok. Jadi yang satunya itu saya dorong untuk bisa segera menyelesaikan akhirnya mereka berhasil mengikuti penyesuaiannya, akhirnya bisa menjadi 3A. (Nasip, 2018c)

“Ya itu yang mandiri. Kalau yang dibiayai oleh Pemda itu malah justru mereka bertanggungjawab. Ndak berani mau seenaknya, ndak berani.

Karena kan konsekuensinya nanti kalau anu kan mengambalikan. Iya. Kalau untuk kaitannya dengan masalah pengen pengetahuannya meningkat kok saya rasa kok tidak. Karena relevansinya dengan pekerjaan kan juga berbeda.” (Nasip, 2018c)

3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan

Aktivitas ini merupakan proses pembelajaran dan interaksi dari gaya dan kebiasaan individu mencermati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan laporan-laporan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) atau sering disebut petunjuk teknis (juknis) yang menjadi aturan turunan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Jika peraturan tersebut berubah, maka SOP tersebut juga berubah sehingga diperlukan penjelasan kembali. Perubahan aturan bisa dilakukan melalui penerbitan atau revisi peraturan lama atau bisa juga karena situasi dan kondisi.

Proses justifikasi SOP banyak dilakukan di Bidang Pendapatan BKAD yang diperlukan untuk mengoptimalkan target-target pendapatan daerah yang telah ditentukan. SOP disusun berdasarkan diklat yang telah diikuti atau teori-teori yang disebabkan perubahan struktur organisasi pemerintah. Penjelasan diperlukan untuk mengingatkan kembali kepada staf di lapangan agar tidak salah mengambil keputusan. Alasan itu dinyatakan oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan BKAD.

“Sudah jadi SOP, jadi apa yang di dapat oleh temen-temen ketika anu.. kita juga ada SOP lapangan nih.. kemudian mereka diklat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru itu misalnya bisa dari karena regulasi karena teori nah.. kemudian di praktekan ya SOP ini yang kemudian di sesuaikan jadi ya.. ada perubahan terhadap SOP ketika temen-temen dan SOP ini kan sebenarnya perubahannya kan tidak hanya regulasi yang berubah tapi

dengan struktur kelembagaan yang berubah, ketika ada force major yang kemudian anu kan bisa di.” (Romdhoni, 2018b)

Belajar dari permasalahan yang terjadi dan bekerja sambil belajar (*learning by doing*) dengan adanya pendampingan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan juga menjadi cara yang efektif untuk melakukan internalisasi pengetahuan pembukuan di Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). *Learning by doing* dibutuhkan karena permasalahan yang dihadapi oleh PPK sangat beragam setiap tahun terutama apabila latar belakang pendidikan mereka bukan dari akuntansi. PPK-Petugas Akuntansi BKAD mengakuinya.

“Ya itu lerning by doing pada akhirnya ya. Jadi kan gini Mas, setiap tahun itu kan masalah yang dihadapi gak mesti sama. Kesulitan-kesulitannya itu pasti anu gak sama setiap tahunnya itu. Pasti yang tim pendamping kan dari Aklap tim pendamping yang setiap ada masalah ini gimana ada keadaan seperti ini mohon solusinya misalnya. . . .itu seperti apa sebenarnya kayak kayak gitu. Pas misalnya katakanlah kita jurnal kayak gini, debit gini, kredit gini tapi pas di-entry ke SIMDA sampai LO neraca gak balance nah itu ada solusi lagi gimana gitu lo.” (Setyawati, 2018)

4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi

Seperti dalam proses internalisasi pengetahuan eksplisit ke tacit melalui aktivitas pelatihan dan belajar mandiri, proses internalisasi melalui aktivitas ini juga kurang terbentuk dengan sempurna. Namun hanya beberapa partisipan yang berpendapat demikian. Ada satu alasan utama yang dikemukakan yaitu karena adanya promosi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja. Sebenarnya ada transfer ilmu melalui promosi jabatan karena sudah menghasilkan senioritas namun yang terjadi kemudian adalah seseorang selalu

dimutasi ketika sudah *expert* di salah satu jabatan sehingga masih ada kendala di proses kaderisasi. Hal ini diakui dan dialami sendiri oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan BKAD.

“Artinya ketika seseorang semakin lama expertnya semakin tinggi di satu sisi, tapi ketika ini nanti ada proses promosi ini yang mau nggak mau. Nah.. ini yang kadang memang e.. apa ya.. menjadi kendala bersama, ketika proses promosi atau pengisian mutasi tanpa memperhitungkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. kalau secara internal sebenarnya ya sudah terjadi ya ada transfer, bahkan ketika seseorang yang sudah pinter ini kemudian dipindah karena tuntutan katakanlah mungkin karir, nah.. kalau yang muncul dari bawah sudah terkaderkan itu nggak masalah. Nah.. masalahnya yang muncul itu justru dari luar yang mungkin tidak memiliki kapasitas latar belakang pendidikan kemampuan untuk itu. Tapi yang terjadi di internal ini rata-rata misalnya contoh di sebelah itu, kemaren promosinya yang kemaren dilibatkan itu memang staf yang membidangi itu yang kemudian promosi, jadi artinya tidak ada masalah di proses kaderisasi.” (Romdhoni, 2018b)

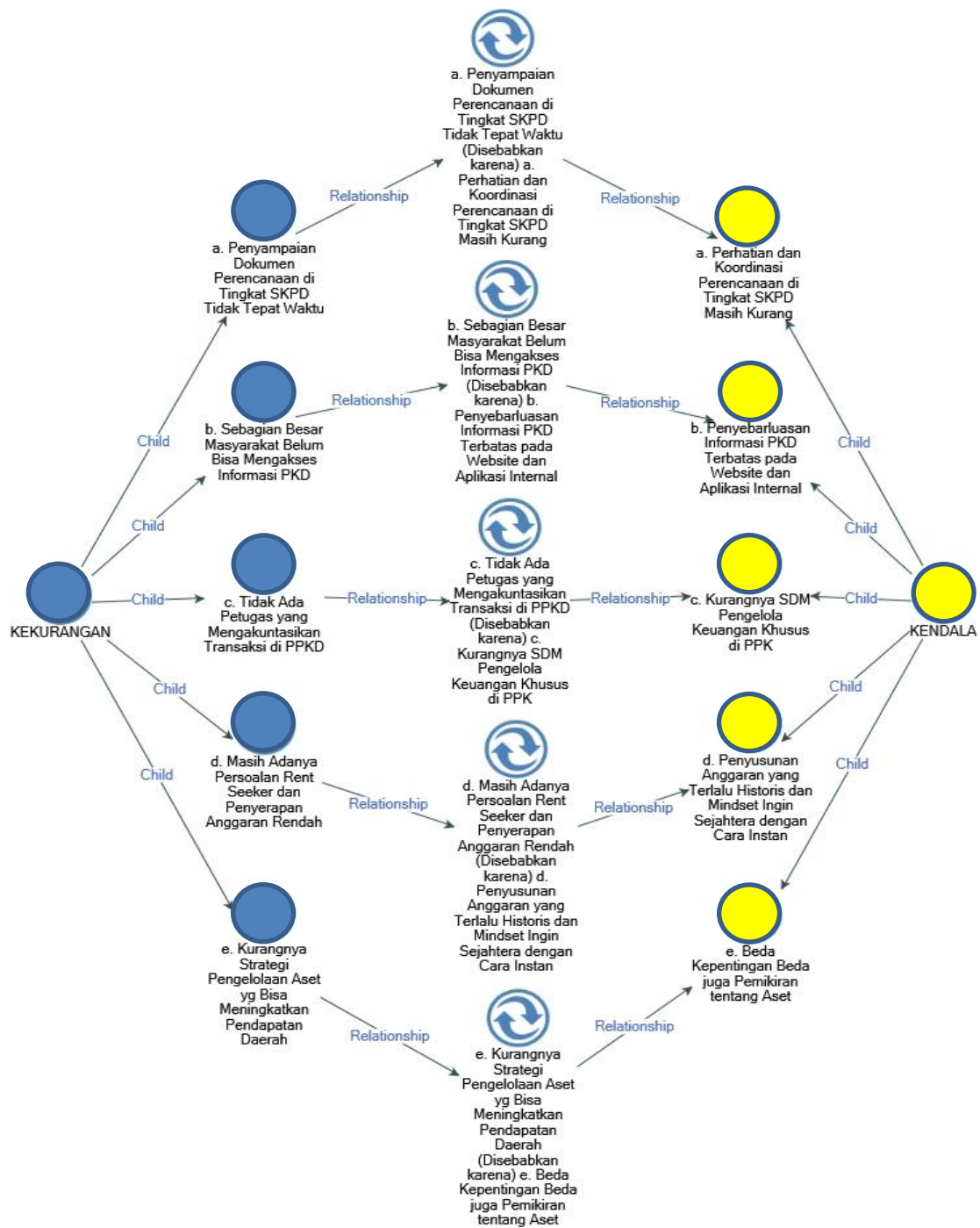
Berbeda dengan pendapat Romdhoni, senioritas juga sudah terjadi di Bidang Pajak yaitu salah seorang pejabat di subbid penetapan pajak yang sering menjadi tutor untuk memberi penjelasan dan mengakses informasi tentang pajak. Dalam bidang ini, seseorang yang sudah *expert* sering memberikan bantuan melalui penjelasan-penjelasan terhadap setiap dokumentasi yang dikuasainya. Kepala Bidang Pajak sebagai atasan menuturkan:

“Ya kalau ee kaitannya dengan masalah sosialisasi karena saya belum pernah melaksanakan nggih selama di sini, tapi saya yakin untuk Mas Eko memang sudah bisa dijadikan sebagai sumber untuk bisa memberikan penjelasan. Karena kadang saya juga kalau ada hal-hal yang kurang tahu itu saya coba minta Mas Eko.” (Nasip, 2018c)

4.6 Perbaikan yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa yang Akan Datang

Pada bagian ini peneliti terlebih dahulu membahas jenis-jenis kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo. Kekurangan merupakan sesuatu yang menghalangi atau membuat pekerjaan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan semestinya tapi tidak memberikan hasil yang efektif. Kekurangan ini diperoleh melalui identifikasi pernyataan tidak langsung para partisipan dalam wawancara. Kendala merupakan penyebab timbulnya kekurangan tersebut yang juga diidentifikasi dari hasil wawancara yang sama.

Atas dasar kekurangan dan kendala tersebut, diberikan saran penelitian untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel lagi pada masa-masa yang akan datang. Peta analisis kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Kulon Progo dalam mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diperlihatkan melalui NVivo pada gambar 4.13 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.13 ini, keterangan lengkap disajikan melalui *matrix coding* pada lampiran 9 di halaman 385.



Gambar 4.13 Peta Analisis Akhir
Kekurangan dan Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.6.1 Kekurangan dan Kendala Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Dari hasil wawancara, para partisipan memberikan jawaban beragam tentang kendala yang dihadapi dan jawaban tersebut diringkas masing-masing menjadi 5 poin utama seperti yang dijelaskan berikut ini.

4.6.1.1 Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu

Dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang APBD terutama tentang perencanaan, telah ditetapkan batas waktu pembahasan dokumen perencanaan. Salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai contoh dalam pasal 82 Permendagri No. 13 Tahun 2006, dokumen RKPD telah ditentukan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan sudah harus selesai ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Kulon Progo banyak melibatkan SKPD misalnya dokumen RKPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD yang disusun oleh SKPD ini menjadi dasar penyusunan RKPD.

Permasalahan yang terjadi adalah Renstra dan Renja ini sering terlambat disetorkan kepada Bappeda yang menjadi penanggungjawab perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Dampak terlambat menyusun Renja, maka akibatnya juga akan terlambat menyusun RKPD. Keterlambatan itu sangat dikeluhkan oleh Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Bappeda sebagai salah satu pejabat yang bertanggungjawab atas hal itu.

“Kalau perencanaan sih, masalahnya kan kita dikejar deadline waktu ya.. ini ya.. sesuai dengan Permendagri kan ada batasan-batasan waktu kapan dia harus ditetapkan, kapan mungkin akan dilaksanakan, kapan harus diserahkan ke DPRD, kendalanya itu kadang-kadang e.. bahan-bahan dari OPD itu terlambat masuk ke kita iya.., usul-usulan kegiatan dari OPD itu terlambat masuk ke kita jadi ya.. karena kita dikejar waktu kemudian bahannya terlambat ya... akhirnya kadang-kadang kita lembur untuk mengejar itu.” (Syakiri, 2018b)

Penyebab terjadinya keterlambatan ini adalah perhatian dan koordinasi para petugas perencana di tingkat SKPD yang masih kurang. Para kepala SKPD di Kabupaten Kulon Progo juga turut memberikan andil karena koordinasi yang minim.

“Ehmm.. heheh. Ya.. ada sih yang terus kesel ngirim ada juga yang sama aja sih, hehehehe. Karenakan tergantung, tergantung di OPD-nya masing-masing nggeh kalau Kepala nya care tentang perencanaan, biasanya kan perencanaan nggak begitu peduli kan yang penting, anggaran nya berapa nah itu yang.. mereka perjuangkan biasanya sih.” (Syakiri, 2018b)

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan ini yaitu menyurat ke kepala SKPD, membuat grup *whatsapp* antar-petugas perencanaan se-Kabupaten Kulon Progo agar mudah berkoordinasi, sampai menjemput langsung dokumennya ke SKPD. Berbagai upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil yang efektif. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan kembali mengeluh.

“He’em sama... begitu, nih sampe sekarang kita masih... masih ada yang belum ngumpul juga, sudah kita surati secara resmi batas waktunya kapan kemudian pengampu juga sudah kasih tahu ini lho OPD yang belum meng... kita juga udah share ke WA grup juga... seperti itu.” (Syakiri, 2018c)

4.6.1.2 Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi pengelolaan keuangan daerah rata-rata belum bisa diakses sebagian besar masyarakat terutama informasi perencanaan pembangunan. Selama ini

informasi keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dipublikasikan lewat aplikasi internal dan website, baik di tingkat SKPD maupun di tingkat kabupaten. Informasi yang disajikan lewat aplikasi internal seperti “AspirasiKu” dan “RencanaKu” hanya bisa diakses oleh rakyat Kulon Progo saja dan kalangan tertentu sebagai admin di tingkat birokrasi. Hal ini diakui oleh masing-masing Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda.

““RencanaKu” itu kalau untuk publik kayaknya tidak bisa kalau nggak salah. (Puspitasari, 2018a)

“Oh, nggak.” (Cahyani, 2018)

Sementara informasi yang disajikan lewat internet hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan yang memahami teknologi informasi. Sementara banyak rakyat Kulon Progo yang belum memahaminya karena terkendala pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini bisa dilihat dari konten *website* seluruh SKPD di Kabupaten Kulon Progo yang belum mengakomodasi alat bantu belajar sehingga masyarakat yang mengakses serbagian besar belum atau tidak mengerti dengan permasalahan yang diakses. Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda mengakuinya.

“He’e, he’e, he’e, iya memang seperti itu(tertawa). Memang kayaknya eee, tidak ada kewajiban di keputusan apa atau di aturan apa. Cuma, cuma fungsi ini saja keterbukaan informasi saja.” (Puspitasari, 2018a)

Selama ini transparansi informasi perencanaan yang disajikan melalui *website* disajikan yang bersifat umum saja, namun apabila masyarakat yang membutuhkannya memintanya, maka bisa menghubungi SKPD yang bersangkutan secara langsung dan ini diakui oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Analisis Data Bappeda.

“Komplit. Dalam bentuk pdf. Bisa didownload, nanti coba jenengan di web-nya Bappeda, he..ee, Bappeda Kulon Progo. Tapi untuk yang tahun ini kita baru sampe pada tahap rancangan. Nah rancangan akhirnya kan belum.” (Wijayanti, 2018)

Hal ini memang termasuk baik namun yang mengakses informasi itu kebanyakan hanya orang-orang yang ahli seperti ilmuwan, peneliti, dan praktisi yang notabene merupakan orang-orang yang lebih mengetahui dan paham dengan masalah yang terjadi dan bukan mereka yang nonahli seperti rakyat jelata. Dampak dari tidak bisa diaksesnya informasi pengelolaan keuangan secara komprehensif adalah munculnya peluang tidak akan terpenuhinya tindak lanjut dari aspirasi masyarakat untuk memenuhi level transparansi tertinggi, padahal masyarakat bawah sebelumnya telah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

4.6.1.3 Tidak Ada Petugas Khusus yang Mengakuntansikan Transaksi di PPKD

Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat adalah adanya pemisahan tugas yang jelas dan tidak boleh ada rangkap jabatan. PPK memiliki tugas yang berbeda dengan bendahara pengeluaran baik Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun BKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) di BKAD yang sudah terlalu banyak

akan membuat beban kerjanya menjadi tinggi apabila tanggungjawab itu diberikan kepadanya. Jika tidak ada petugas akuntansi di level Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), maka tugas membuat proses akuntansi akan terbengkalai karena bendahara pengeluaran dan PPK di BKAD selaku SKPD tidak boleh rangkap jabatan sebagai petugas akuntansi. Menurut Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD, tidak adanya PPK-SKPKD di BKAD ini disebabkan karena kurangnya pegawai yang berkompoten di bidang akuntansi, sehingga untuk mengatasinya pekerjaan PPK ini ditangani langsung oleh Bidang Akuntansi.

“Kan petugas akuntansi PPKD itu kan e tidak bisa ditunjuk karna kita kurang SDM, Lah siapa gitu kan? Akhirnya secara tugasnya dilakukan oleh bidang yang tupoksi-nya mendekati. Nah karna itu akuntansi maka di bidang akuntansi kami yang melakukan. Kami buat e akuntansinya PPKD seringnya kan dia masuk ke dalam akuntansi Pemda.” (Artiningsih, 2018a)

Dampak dari tidak adanya PPK-SKPKD ini adalah terputusnya aliran dokumen dari bendahara pengeluaran PPKD dan pengelola belanja PPKD kepada bidang akuntansi untuk membuat laporan keuangan PPKD. Apabila tugas ini dilakukan oleh bidang akuntansi kemungkinan juga akan menambah beban pekerjaan yang secara kuantitas jumlah pegawainya di bidang ini sangat terbatas.

4.6.1.4 Masih Adanya Persoalan “Rent Seeker” dan Penyerapan Anggaran yang Rendah

Penyerapan anggaran merupakan satu-satunya indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan pengeluaran APBD di setiap pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan normal adalah hal yang wajar terjadi. Namun yang tidak wajar adalah jika penyerapan anggaran itu

lebih banyak disebabkan karena semata-mata hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa ada benefit dan dampak positif yang dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Kulon Progo, hal ini bisa terlihat dengan masih adanya persoalan *rent seeker* atau pemburu rente dalam melaksanakan anggaran.

Permasalahan ini bisa dideteksi dari adanya bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan pelaksana kegiatan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dicairkan. Kepala Bidang Perbendaharaan pernah mendeteksi adanya persoalan ini ketika beliau menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Nah, ee ya ini persoalan rent seekers, pemburu rente ini masih apa Mas, menjadi persoalan yang besar di kita nggih. Artinya saya itu sok tanda tangan SP2D kemudian melihat dokumen belanja dengan foto-foto, dengan pack. Kadang-kadang merasa kok ini mahal banget nek dikerjakan oleh ee rekanan pihak ketiga itu kan dia harus memperhitungkan pajak, kemudian laba yang diperkenankan, laba wajar yang diperkenankan 10%, pajak 10%, biaya-biaya yang lain. Termasuk mungkin ngasih pimpronya. Hehehe. Jadi jatuhnya mahal.” (Hadiyanto, 2018d)

Persoalan *rent seeker* dan penyerapan anggaran yang rendah merupakan 2 permasalahan yang terpisah namun tidak menutup kemungkinan penyebabnya juga saling berhubungan. Persoalan pemburu rente bisa disebabkan oleh *mind set* gaya hidup yang kurang menjiwai profesi pamong PNS yang ingin sejahtera dengan cara yang instan. Kepala Bidang Perbendaharaan kembali berargumen.

“Ya saya kira masalah kesejahteraanlah. Orang pengen sejahtera dengan cara instan, mungkin kemudian gaya hidup juga gitu. akhirnya itu jadi kurang menjiwai profesi pamong, profesi PNS. Nek pengen sugih yo ora dadi PNS gitu masalahe atau PNS sugih itu mestinya punya perusahaan juga, itu punya sambilan juga, apa kebunnya luas gitu baru PNS itu bisa kaya. Tapi kalau hanya PNS tok kok mau kaya itu yo gak bisa kita.” (Hadiyanto, 2018d)

Sementara penyerapan anggaran yang rendah disebabkan karena penyusunannya yang terlalu historis karena hanya mendasarkan realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar untuk membuat anggaran tahun berikutnya. Kepala Subbagian Keuangan BKAD memberi alasannya tentang apa yang terjadi di bidangnya.

“Itu penyebab, ketika kita anggarkan e.. kita akan melihat pelaksanaan kegiatan tahun lalu, ternyata pelaksanaan kegiatan tahun lalu kita melaksanakan lembur itu sampe 5 hari belum selesai, maka tahun ini kita anggarkan 5 hari, ternyata karena tahun ini ternyata lembur nya cukup dilaksanakan 2 hari, ya sudah 2 hari kita laksanakan.” (Mas’adah, 2018d)

“Ya. Kita selalu, e.. melihat data N min 1 akan kita selalu lihat kita akan juga melihat N+1 nya jadi ketika penganggaran ketika pelaksanaan kita akan melihat pelaksanaan N-1 seperti apa kita sebagai acuan sebagai pembelajaran untuk tahun yang akan datang, nah.. kalau memang N-1 itu ternyata kok kurang baik nah itu pembelajaran kita, hal dulu jangan kita ulang lagi kan seperti itu, tapi kadang-kadang hal yang dulu yang inginnya kita tidak ulang ternyata terulang lagi ya kita jalani aja, kan seperti itu.” (Mas’adah, 2018d)

Dampak dengan adanya persoalan *rent seeker* dan rendahnya penyerapan ini, bisa menimbulkan potensi penyelewengan dengan cara hanya mencairkannya semata-mata tanpa ada efek manfaat yang dirasakan.

4.6.1.5 Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset Tetap yang Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah

Aset tetap merupakan aset yang paling dominan dalam mempengaruhi baik buruknya pengelolaan keuangan daerah. Jumlah aset tetap Kabupaten Kulon Progo tercatat berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kulon Progo tahun anggaran 2017 mencapai 84% dari total aset atau sebesar Rp1.501 milyar. Dari total

aset tetap tersebut secara berurutan jalan, irigasi, dan jaringan memberikan kontribusi terbanyak yaitu sebesar 65%, disusul gedung dan bangunan sebesar 50%, peralatan dan mesin sebesar 23%, dan tanah sebesar 19% dari jumlah aset tetap.

Potensi penerimaan pendapatan dari aset tetap tersebut belum teridentifikasi dengan baik untuk menjadi peluang menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Pendapatan daerah akan bertambah melalui strategi optimalisasi aset seperti perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Kurangnya strategi pengelolaan aset ini diakui oleh Kepala Bidang Aset BKAD.

“...sehingga secara umum ya permasalahan-permasalahan yang ada itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti dulu kan gitu. sehingga ee bisa kita atasi, kita selesaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau kita awalnya dulu goalnya adalah mencapai opini WTP kan berarti masuk didalam tataran penata usahaan. Penata usahaan sudah clear berarti sekarang sudah masuk didalam pengamanan. Pengamanan selesai dengan baik nanti kan masuk dioptimalisasi. Nah, inilah yang sekarang saya ingin juga mendukung kebijakan besar juga yang sekarang berusaha untuk bagaimana mendapat ee membuat strategi pengelolaan aset itu bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.” (Amrullah, 2018d)

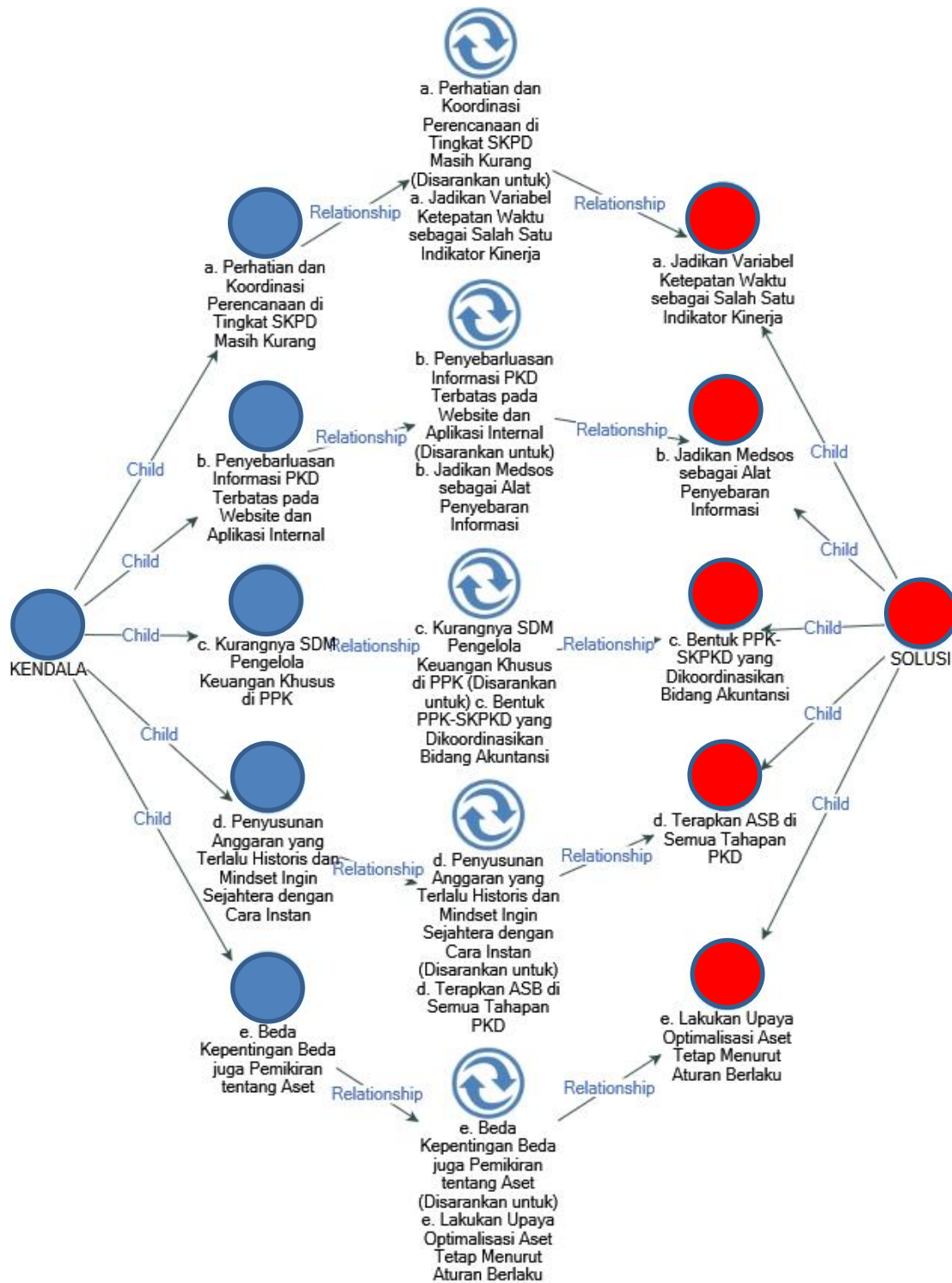
Kurangnya strategi pengelolaan aset tetap ini disebabkan oleh perbedaan pemikiran para pemangku kepentingan terhadap aset tetap. Beda kepentingan beda juga pemikiran tentang aset. Para pemangku kepentingan berkeinginan bahwa aset tetap diserahkan kepada BUMN untuk pengelolaannya, sementara para pemangku kepentingan yang lain berpendapat bisa dikelola secara mandiri dengan cara disewa

saja. Kendalanya adalah sulitnya menyamakan persepsi antarpara pemangku kepentingan tersebut, kata Kepala Bidang Aset BKAD.

“Ya karena kan masing-masing kita beda kepentingan. Karena perbedaan kepentingan inilah yang mungkin bisa menyebabkan persepsi yang berbeda. Jadi seperti penyertaan modal itu kan ada pemikiran bahwa kalau modal aset diserahkan kepada BUMD itu sudah dianggap sebagai kekayaan yang dipisahkan. Itu kalau suatu saat hilang bagaimana seperti itu. Padahal kan kalau kita menata pada good government itu kan perusahaan daerah pun juga diatur dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga untuk pengamanan terhadap aset yang kita sertakan sebagai penyertaan modal saya rasa masih bisa.” (Amrullah, 2018d)

4.6.2 Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transpran dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan rekomendasi penelitian sebagai bentuk sumbangsih pikiran peneliti untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo pada masa yang akan datang. Pembahasan saran penelitian mengikuti urutan pembahasan kendala yang dihadapi yang terdiri dari 5 topik rekomendasi yang diperlihatkan oleh NVivo dan dijelaskan pada gambar 4.14 berikut ini. Untuk mempermudah membaca gambar 4.14 ini, keterangan lengkap disajikan melalui *matrix coding* pada lampiran 9 di halaman 385.



Gambar 4.14 Peta Analisis Akhir
 Rekomendasi dan Saran Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
 Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Diolah Peneliti dengan NVivo

4.6.2.1 Jadikan Variabel “Ketepatan Waktu” Penyampaian Dokumen Perencanaan sebagai Salah Satu Indikator Kinerja

Memilih indikator kinerja yang tepat merupakan bagian dari sistem *reward* dan *punishment*. Sistem *reward* yang terkait dengan penghargaan kinerja yaitu alokasi balas jasa sesuai kinerja pegawai ini yang akan menjadi alternatif. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dari SKPD, namun upaya itu selalu saja tidak berhasil. Oleh karena itu menjadikan variabel ketepatan waktu sebagai indikator kinerja akan membuat para perencana di tingkat SKPD akan merasa termotivasi. Kepala Subbagian Perencanaan Bappeda mendukung hal ini dilaksanakan.

“Kalau biasanya sih rata-rata tetep ini ya memakai surat dengan batas waktu, kemudian kan bagian perencanaan itu pengumpulan dokumen itu menjadi bagian dari penilaian TPP. Itu ngefek juga, kalau kalau nggak tepat waktu, nanti angkanya bisa TPP-nya jadi berapa persen. tau kadang mereka diingatkan, ini menjadi bagian dari TPP sehingga diminta segera mengumpulkan, kaya gitu baru mereka ini, berlomba-lomba, seperti itu.” (Puspitasari, 2018b)

Menjadikan variabel ketepatan waktu merupakan bagian dari kinerja didukung juga dari sisi ilmiah. Hal ini dilakukan dengan banyaknya hasil penelitian yang telah membuktikan hal ini, di antaranya bahwa tunjangan kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan adanya tunjangan kinerja pegawai akan termotivasi bekerja dengan maksimal sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan (Najoan dkk., 2018:23).

Model menjadikan unsur ketepatan waktu sebagai indikator kinerja harus dilakukan dengan pencermatan yang matang dengan melibatkan instansi terkait seperti BKPP dan BKAD. Perlu diintensifkan lagi bidang-bidang yang selama ini sudah menjadi pengampuh SKPD agar terkoordinasi dengan baik. Perlu dimasukkan juga variabel-variabel pendukung seperti substansi dokumen perencanaannya yang harus jelas dan efektif dan jangan sampai hanya asal jadi dan bertujuan untuk mengejar ketepatan waktu semata.

4.6.2.2 Jadikan Media Sosial sebagai Alat Penyebaran Informasi

Penggunaan media sosial sebagai alat transparansi saat ini telah menjadi tren di berbagai pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Porumbescu (2017:531) mengatakan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh positif dengan persepsi kepercayaan pemerintah. Ini artinya penggunaan akun media sosial oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang signifikan terhadap kejujuran pemerintah. Oleh karena itu akun media sosial sangat efektif meningkatkan persepsi warga masyarakat tentang pemerintahan.

Sebaliknya dengan hadirnya media sosial, menurut Thornton dan Thornton, (2013:379) penggunaan *website* bagi pemerintah daerah saat ini dirasakan kurang transparan lagi karena *website* hanya menyediakan materi terbatas dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat tentang masalah fiskal pemerintah. Materi *website* dianggap terbatas karena tidak ada alat bantu dalam *website* yang berguna untuk memberi pemahaman isi dari *website* itu sendiri. Jika tidak ada alat bantu, maka informasi dalam *website* hanya ditujukan kepada mereka

yang ahli dan paham dengan masalah yang terjadi di pemerintahan, sementara rakyat biasa walaupun bisa mengakses tetapi tidak paham dengan apa yang diaksesnya. Informasi yang disajikan lewat *website* dianggap transparan apabila substansi dalam *website* dianggap dapat dimengerti (*intelligible*) oleh masyarakat melalui alat bantu belajar dan melibatkan mereka tentang apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk Kabupaten Kulon Progo, penggunaan media sosial baru dilakukan oleh beberapa SKPD seperti Dinas Kominfo yang telah memiliki akun *facebook*. Namun untuk SKPD pengelola keuangan seperti BKAD dan Bappeda belum menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi. Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Analisis Data Bappeda.

“Belum....Mungkin ke depan.” (Wijayanti, 2018)

Atas dasar pertimbangan di atas, peneliti menyarankan bahwa di samping adanya *website*, juga menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi. Di samping kos pengelolaannya yang lebih murah dibanding *website*, media sosial juga sangat mudah diakses oleh masyarakat di semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD juga telah menggunakan media sosial *WhatsApp* namun hanya terbatas pada kalangan internal saja dan itu pun bukan untuk penyebaran informasi eksternal.

“Lebih efektif kalau pakai media sosial. Terus teman-teman di aset juga sama. Itu ada caranya, nah itu kita share di WA, ayo input, caranya begini, buka ini, buka ini, itu sudah lengkap di WA, dicoba dululah gitu. Ketika bisa ya sudah nggak usah ke sini tapi kalau ada kesulitan yuk ke sini.” (Artiningsih, 2018c)

4.6.2.3 Bentuk PPK-SKPKD yang Dikoordinasikan oleh Bidang Akuntansi

Kewajiban untuk membentuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di tingkat BKAD selaku SKPKD atau PPKD diatur dalam pasal 208 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Kementerian Dalam Negeri, 2006). Jika dikaji lebih lanjut makna dari pasal tersebut memang tidak secara langsung diperintahkan untuk menunjuk PPK-SKPKD namun karena PPK-SKPKD memiliki tugas yang sama dengan PPK-SKPD, maka secara tersirat pembentukannya menjadi sebuah keniscayaan. Pembentukan ini juga untuk mengimbangi pekerjaan bendahara pengeluaran PPKD yang bertugas menerima, membayar, dan mempertanggungjawabkan anggaran pengeluaran PPKD yang menjadi tanggungjawabnya.

“Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPPLS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.” (Kementerian Dalam Negeri, 2006)

Hal yang sama juga bisa dicermati dari peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini memiliki kelemahan karena tidak ada petugas sebagai PPK-SKPKD yang mengakuntansikan bukti-bukti pertanggungjawaban yang telah disiapkan Bendahara Pengeluaran PPKD dan telah diverifikasi oleh Pengelola Belanja PPKD. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk membentuk PPK-SKPKD dibawah koordinasi Bidang Akuntansi BKAD sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemisahan tugas antara yang menerima,

membayar, dan mencatat. Pembentukan petugas akuntansi ini didukung oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

“Ya... pasti nanti ada SK Bupatinya, kemudian nanti akan ditunjuk siapa yang jadi PPK dan satuannya, sudah direncanakan untuk 2019 akan dibentuk mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kemaren.” (Artiningsih, 2018d)

4.6.2.4 Terapkan ASB di Semua Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Landasan hukum ASB sudah diatur sejak lama, yaitu pertama kali dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan ke Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sampai dengan dicabutnya peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, pasal yang mengatur ASB masih tetap muncul. Namun sayang pasal tersebut sampai saat ini masih bersifat abstrak karena tidak ada pedoman dan penjelasan yang rinci yang mengatur cara membuat dan menggunakannya (Ritonga, 2012a:2).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, dasar hukum Analisis Standar Belanja (ASB) diatur dalam pasal 89 ayat (2) huruf (e) dan pasal 93 ayat (1) dan ayat (4).

“e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.” (Kementerian Dalam Negeri, 2006)

“(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.” (Kementerian Dalam Negeri, 2006)

“(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.” (Kementerian Dalam Negeri, 2006)

Menurut Ritonga (2012a:11), ASB dapat diterapkan di semua tahap pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap perencanaan, ASB dapat digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahap tersebut ASB digunakan oleh Bappeda untuk mengarahkan para pengusul kegiatan baik masyarakat maupun aparat pemda agar lebih fokus pada kinerja. Dengan ASB para perencanaan di Bappeda akan mengetahui apa yang menjadi pemicu kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan agar dapat menentukan plafon anggarannya dengan tepat.

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, ASB digunakan pada penyusunan KUA-PPAS, penyusunan RKA, dan pembayaran oleh semua bendahara pengeluaran. Pada tahap KUA-PPAS, ASB digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan besaran anggarannya dengan cara menganalisis kewajarannya. Pada tahap RKA, ASB digunakan untuk mengkuantitatifkan target kinerja menjadi RKA sebelum disahkan menjadi DPA. Sedangkan pada tahap pembayaran oleh bendahara pengeluaran, ASB digunakan untuk mengetahui besarnya anggaran kegiatan tertinggi yang diminta oleh

PPTK. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, ASB digunakan oleh pembuat laporan dan para pemeriksa untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan dengan membandingkan antara jumlah pagu anggaran dengan jumlah pagu yang tertera dalam ASB (Ritonga, 2012a:12).

Berdasarkan landasan hukum dan landasan teori tersebut, peneliti menyarankan untuk segera membuat Analisis Standar Belanja (ASB), karena ASB ini memiliki manfaat antara lain yaitu penetapan KUA-PPAS dan alokasi kegiatan menjadi objektif, dapat menentukan kewajaran kos untuk melaksanakan suatu kegiatan, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, dan memiliki argumen yang kuat jika dituduh melakukan pemborosan (Ritonga, 2012a:12). Usulan ini juga didukung oleh semua bidang di BKAD dan Bappeda seperti kata Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD.

“Ya... ya... memang... kita sedang menyusun kok ini ASB. ASB semua tahap ya... ini.” (Hadiyanto, 2018e)

Dalam penerapan aplikasi sistem perencanaan BPKP yang sudah mulai dipersiapkan di Bappeda, penggunaan ASB menjadi wajib karena merupakan salah satu syarat dalam menggunakan aplikasi ini. ASB dalam sistem perencanaan dijadikan bagian dari menu sehingga harus diinput terlebih dahulu sebelum membuat dokumen perencanaan lainnya. Sementara untuk proses penyusunan ASB-nya juga akan melibatkan BPKP. Kepala subbidang kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan pejabat yang bertanggungjawab menyediakan rancangan ASB ini.

“Kita sama tim membuat ASB kami bersama tim mayoritas Bappeda, kemudian BKAD kemudian beberapa OPD-OPD besar, yang mana kegiatan di dalamnya itu banyak dana... dari Pemerintah pusat kayak DPU misalkan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan e... beberapa OPD tidak semua OPD terlibat yang OPD besar.” (Lestari, 2018b)

4.6.2.5 Lakukan Upaya Optimalisasi Aset sesuai Aturan Berlaku

Upaya optimalisasi adalah mengoptimalkan pengelolaan aset melalui inventarisasi, penilaian, serta pengkajian terhadap potensi aset tetap yang ada untuk menghasilkan pendapatan daerah dengan menghimpun semua jenis barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk Kabupaten Kulon Progo, sistem pemanfaatan aset tetap belum dilakukan optimalisasi yang komprehensif sehingga belum memberikan kontribusi nyata kepada pendapatan daerah. Ketika peneliti menanyakan hal ini tentang apakah sudah melakukan optimalisasi aset untuk menambah pendapatan, Kepala Bidang Aset menjawab:

“Belum belum. ...yang selama ini kan, tahun ini baru kita lakukan. Jadi ada tanah yang pegang pasar sana . . . itu untuk optimalisasi.”
(Amrullah, 2018e)

Sebelum melakukan optimalisasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu isu-isu strategis sekaligus sebagai peluang agar penerapannya nanti efektif dan efisien, yaitu 1) adanya tuntutan publik agar aset daerah dikelola dengan mekanisme pasar yang transparan dan akuntabel; 2) investor juga memiliki keinginan yang sama untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah; dan 3) aset yang tidak termanfaatkan dioptimalkan untuk penggunaan yang lain baik untuk kepentingan

sosial kemasyarakatan maupun untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 telah diatur cara-cara melakukan optimalisasi. Cara-cara tersebut harus saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan pihak yang diajak bekerjasama.

Upaya optimalisasi meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Dari batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan pemerintah tersebut, secara teoritis pemerintah daerah hanya tinggal melaksanakan saja, sedangkan secara teknis berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri. Batasan dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban membuat Perda dan Perkada.

a. Sewa

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kabupaten Kulon Progo dapat melakukan penyewaan terhadap barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah, maka penyewa harus membayarkan sejumlah uang kepada pemilik. Pengukuran nilai uang tersebut perlu dilakukan agar memperoleh nilai wajar. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Persepsi tentang nilai wajar dianggap multitafsir. Misalnya ada yang mengatakan bahwa nilai wajar untuk tanah itu adalah sesuai dengan NJOP yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan PBB, tetapi ada juga yang

mengatakan nilai wajar adalah nilai yang berlaku di pasaran umum setempat, dan banyak yang menganggap bahwa nilai wajar itu sangat subjektif. Karena subjektivitas nilai wajar tanah itu bermacam-macam, maka untuk mengukur nilai wajar peran penilai independen sangat diperlukan untuk membandingkan nilai wajar yang ditafsirkan oleh masing-masing pihak terkait.

b. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan diperlukan karena dalam era globalisasi, perubahan manajemen pemerintahan tidak lagi dapat dipertahankan dengan cara-cara birokratis. Untuk menghilangkan birokrasi agar proses penganggaran terpisah dengan manajemen pemerintahan, cara yang paling mudah adalah dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun pemerintah hanya menerima bagian laba atau dividen yang merupakan pendapatan daerah dari obyek kerjasama. Kerjasama pemanfaatan dapat berupa kerjasama pemanfaatan aset daerah, misalnya aset hotel bagi pemerintah daerah yang memiliki hotel, kerjasama pemanfaatan tanah bagi pemerintah daerah yang memiliki tanah berlebih dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.

Sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan pemerintah, mitra kerjasama ditetapkan berdasarkan tender. Sebelum tender dilakukan diperlukan adanya analisis ekonomi dan keuangan terhadap obyek yang akan dikerjasamakan mengingat setelah terjadinya kerjasama pemanfaatan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam masa kerjasama tidak akan merugikan pemerintah daerah dengan alasan-alasan teknis yang tidak dapat diterima oleh pemerintah kecuali dalam keadaan darurat.

Apabila kajian ekonomi dan kajian keuangan tidak dilakukan, sedangkan kajian politik menjadi alat utama untuk melakukan kerjasama maka hasilnya cenderung terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan menguntungkan pemerintahan dengan segala risiko dalam pengambilan keputusan, sedangkan kemungkinan kedua akan merugikan pemerintah daerah baik secara politik maupun secara ekonomi.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidaklah mudah dan sederhana yang dibayangkan. Pemerintahan yang menghasilkan uang bukan dari sumber pajak dan retibusi sampai saat ini di Indonesia belumlah banyak, dan sangat sulit untuk dijadikan contoh. Kalaupun ada mungkin proses untuk mencapai ke arah itu tidak semudah peraturan yang ada. Menurut peraturan yang ada, proses kerjasama pemanfaatan secara berjenjang sangatlah rumit yang dimulai dari analisis manfaat terhadap obyek yang dikerjasamakan, proposal yang diajukan, perlu adanya tender, nilai atau harga yang kompetitif, proses politik yang tidak selalu mulus, jangka waktu pemanfaatan harus menghitung untung rugi, dan pengawasan operasional yang harus jelas.

c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, bentuk pemanfaatan selain kerjasama juga terdapat pemanfaatan model lainnya, yaitu dengan Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). Kerjasama dalam optimalisasi aset sangatlah menguntungkan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa menerapkan sistem ini. Untuk melaksanakan model BGS dan BSG, perlu diperhatikan juga kritikan dan kelemahannya agar penerapan optimalisasi menjadi

efektif dan efisien. Terdapat 2 hal yang perlu dikritisi dan terdapat 1 kelemahan pelaksanaannya, yaitu kritikan terhadap persyaratan perubahan fungsi aset dan cara mengukur pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan serta kelemahan adanya peluang kebangkrutan.

Kritikan pertama adalah syarat perubahan fungsi untuk melakukan BGS dan BSG telah ditentukan apabila barang milik daerah berlebih (*idle*) yang secara ekonomis menguntungkan pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan perubahan fungsi. Sehubungan dengan barang milik daerah yang berlebih tersebut, apabila organisasi pemerintah daerah bisa lebih ramping dan efisien maka diasumsikan akan banyak bangunan atau tanah berlebih karena adanya penyatuan SKPD. Pada awalnya masing-masing SKPD mengelola satu bidang tanah sehingga setelah adanya penggabungan, tanah atau bangunan yang tidak ditempati oleh SKPD menjadi *idle* sehingga dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain agar lebih optimal. Sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak mempunyai tanah atau bangunan yang berlebih, tetapi pemerintah daerah tersebut mempunyai dana berlebih maka pemerintah daerah tersebut dapat membeli tanah yang selanjutnya didayagunakan oleh pihak lain. Cara ini kelihatan sangat janggal, karena dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa bangunan dari BGS dilaksanakan jika tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas lainnya.

Hal yang berikutnya yang perlu menjadi pertanyaan adalah tentang bagaimana mengukur pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama yang harus diukur oleh tim penilai yang dibentuk oleh kepala daerah. Dalam aturan

yang ada, prosedur dan mekanisma lelang belum dijelaskan secara lengkap, sedangkan apa yang harus dilakukan sudah jelas yaitu lelang yang dilakukan harus dengan kontribusi tetap dan ada pembagian keuntungan. Tetapi belum ada satu aturan pun yang mengatur bagaimana melakukan lelang/tender. Padahal banyak investor di berbagai daerah yang mau melakukan investasi dalam rangka kerjasama pemanfaatan sangat agresif walaupun banyak pemerintah daerah terkadang ragu untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa tatacara pembelian aset/barang tidak sama dengan tatacara pelepasan aset. Pembelian aset dilakukan dengan cara mengeluarkan uang daerah untuk mendapatkan aset sehingga mengeluarkan harga semurah-murahnya untuk mendapatkan aset yang berkualitas. Sedangkan di sisi lain pelepasan aset merupakan penjualan aset untuk mendapatkan uang, sehingga melepaskan sejumlah aset untuk mendapatkan uang setinggi-tingginya sesuai harga yang wajar. Sementara itu tender/lelang kerjasama pemanfaatan dilakukan untuk memperoleh partner/mitra kerjasama yang saling menguntungkan.

Sementara untuk kelemahan BGS dan BSG, salah satu adalah jika pihak ketiga mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah yang harus melanjutkan operasi proyek dan memberikan subsidi. Hal ini berarti akan membebani APBD tentunya. Jika hal hal ini sampai terjadi maka dipastikan APBD akan tergerus untuk proyek ini dan kemungkinan besar akan menjadi lahan Korupsi bagi pemerintah daerah jika tidak diawasi dengan ketat.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini.

1. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah ditemukan paling kurang 24 kegiatan yang membentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui 4 tahapan mekanisme di Kabupaten Kulon Progo. Temuan tersebut telah memberi pemahaman bahwa keterkaitan setiap item kegiatan akan terlihat membentuk model pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - a. Model pengelolaan keuangan daerah yang transparan berdasarkan 4 mekanisme tersebut secara umum dapat dilihat dari 2 indikator yaitu dalam tahap sosialisasi informasi yaitu adanya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi. Keterbukaan tersebut dibangun dan dilaksanakan dengan sistem informasi *e-planning* seperti sistem informasi “RencanaKu”, “AspirasiKu”, dan Website yang bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat. Standarisasi penyebaran informasi juga didukung dengan fasilitas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan publik tentang semua kebijakan dan pelayanan seperti dalam acara rutin “Forum Serap Aspirasi Kamisan” dan “Bupati Menyapa.” Dengan demikian unsur transparansi dalam setiap mekanisme ini adalah

keputusan disusun sesuai standar dan target, lalu di-*publish* dan bisa diperbandingkan sehingga masyarakat mengetahui apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara detil dan masyarakat diberi hak untuk mengusulkan apa yang mereka butuhkan.

- b. Sementara untuk model pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan 4 mekanisme tersebut dapat dilihat dari setiap prosesnya yaitu adanya mekanisme yang menjamin bahwa pembuatan keputusan dibuat tertulis dan tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, lengkap, dan konsisten dalam mencapai prioritas dan target yang ditetapkan. Standarisasi pelaporan hasil kerja juga dipertanggungjawabkan dan diawasi melalui sistem yang menjamin terhindarnya penyimpangan dalam kegiatan melayani misalnya melalui aplikasi “MonevKu”. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menciptakan lingkungan kerja yang penuh komitmen dan tanggungjawab dengan cara menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang dikelola dengan diiringi mekanisme supervisi dan monitoring, sehingga hasil kerjanya mudah diakses dan didasari data yang lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan.

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki budaya kerja pengelolaan keuangan daerah yang kuat. Budaya kerja tersebut telah membentuk pedoman dalam berperilaku. Wujud nyata keberadaan budaya dalam mengelola keuangan daerah

tersebut terlihat dari adanya beberapa karakteristik yang antara lain seperti kepemimpinan yang kuat, punya inovasi, inisiatif individu yang tinggi, toleransi terhadap risiko, terdapat pengarahan dan pengawasan memadai, dan adanya sistem penghargaan kinerja. Bupati Hasto Wardoyo berperan besar sebagai *culture creator* dengan membawa seperangkat nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menurunkannya kepada setiap pejabat dan staf di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini disimpulkan berdasarkan 5 temuan budaya kerja transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan di daerahnya yaitu:

- a. Senang keterbukaan dan sosialisasi informasi;
 - b. Pola komunikasi dan koordinasi yang aspiratif;
 - c. Berorientasi dan berkomitmen melayani;
 - d. Tim yang solid tanpa ego sektoral; dan
 - e. Taat aturan dan lebih loyal kepada organisasi
3. Berdasarkan hasil temuan penelitian dengan menggunakan proses SECI, pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo terbentuk dari budaya kerja yang sudah dikembangkan sejak kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo pada awal tahun pemerintahannya yaitu sejak tahun 2012. Pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo tercipta melalui proses belajar yang diajarkan dan disebarkan melalui pengalaman dan keahlian yang berbentuk tasit. Hal ini bisa dibuktikan melalui setiap tahapan proses SECI yaitu:

- a. Pada tahap sosialisasi, yaitu ketika para partisipan diminta untuk menelusuri kembali keadaan pengelolaan keuangan daerah sebelum menjadi baik seperti sekarang ini, semua partisipan menyatakan bahwa sejak tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah penuh dengan riwayat kelam yang membuat posisi Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten paling jelek saat itu dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini terjadi ketika saat itu aset tetap Kabupaten Kulon Progo masih amburadul, pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik masih bersifat wacana, para pejabat dan pegawai masih sibuk mencari dan menambah pengetahuan melalui pembelajaran, dan pembukuan daerah masih manual sehingga tidak mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Pada tahap eksternalisasi, yaitu ketika Bupati selaku penanggungjawab pengelola keuangan daerah mulai berbenah. Para pejabat dan pegawai pengelola keuangan diinstruksikan untuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan, dilakukan rapat-rapat dan pertemuan yang membahas permasalahan yang sedang terjadi, melakukan konsultasi rutin dengan pihak luar yang terkait, dan mulai mewujudkan cita-cita dan komitmen untuk menjadi yang terbaik melalui penciptaan berbagai *branding* sebagai penyemangat kerja.
- c. Pada tahap kombinasi, yaitu proses mengimplementasikan semua rencana dan komitmen terbaik yang telah dicanangkan untuk dilaksanakan melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan informasi eksternal, membuat berbagai

macam aturan turunan dari pemerintah pusat menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati di bidang pengelolaan keuangan, dan melakukan studi banding untuk mencontoh hasil pengelolaan keuangan daerah lain yang lebih maju. Semua hasil-hasil tersebut dikombinasikan sehingga memunculkan berbagai ide-ide baru dan pengetahuan terkini yang berguna untuk mengelola keuangan daerah.

- d. Pada tahap internalisasi, yaitu proses memberi efek dan benefit dari hasil usaha dan komitmen yang telah dibangun selama 2 periode pemerintahan yang secara positif mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki memungkinkan para pengelola keuangan untuk menghadapi situasi yang berbeda dengan meraih predikat prestisius dan memperkenalkan ide-ide konstruktif dan memiliki stok pengetahuan pengelolaan keuangan yang mumpuni yang telah ditransformasikan melalui *sharing* pengalaman dengan daerah lain, ketersediaan data dan akses informasi yang mudah, dan pembaruan pelatihan dan pembelajaran yang berkesinambungan.

1.2 Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis, baik dari sisi transparansi dan akuntabilitas maupun dari sisi proses transfer pengetahuannya. Selain implikasi juga terdapat beberapa keterbatasan, yang diringkas berikut ini.

1.2.1 Implikasi Teoritis

Model transfer pengetahuan SECI adalah model yang umum digunakan untuk mengetahui proses belajar suatu organisasi, namun penggunaan setiap prosesnya dipengaruhi oleh konteks budaya kerja masing-masing daerah terutama sifat ketugasan masing-masing personal di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dukungan kepemimpinan yang membatasi jarak antara staf dan pejabat dalam berbagi pengetahuan. Misalnya dengan adanya pelantikan para pejabat yang sering dimutasi membuat mereka berada pada posisi sulit terutama yang memegang posisi penting sehingga mereka tidak mau membagi pengetahuan secara informal karena tekanan rahasia jabatan, takut melakukan kesalahan, mereka sangat berhati-hati melakukan apa yang diminta pimpinan untuk didokumentasikan, dan tidak memberikan umpan balik dari apa yang diperoleh dari pimpinannya. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya beberapa kegiatan dalam proses SECI. Pada tahap sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi, pengetahuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kulon Progo terbentuk dengan baik, namun pada tahap internalisasi yang sebagian besar kegiatannya belum terinternalisasi membentuk pengetahuan transparansi dan akuntabilitas yang baru dengan baik.

1.2.2 Implikasi Praktis

Implikasi praktis terhadap hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya. Transparansi dan akuntabilitas yang dipraktikkan di Kabupaten Kulon Progo hanya cocok untuk daerah lain yang memiliki karakteristik dan budaya kerja yang sama. Jika tidak sama, diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan

kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru, di luar kebiasaan/rutinitas yang ada. Selain itu untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik di setiap pemerintah daerah, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat tertinggi hingga terendah.

1.2.3 Keterbatasan Penelitian

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan berbagai strategi triangulasi dan diperpanjang beberapa bulan untuk mengantisipasi ketercukupan data dan peneliti terus berusaha seoptimal mungkin untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini, namun dalam pelaksanaannya strategi dan perpanjangan waktu tersebut dirasa belum cukup. Peneliti masih terkendala dengan berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan yang tidak dapat dihindari. Teknik wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Tidak dilakukan observasi yang mendalam karena keterbatasan waktu penelitian. Observasi merupakan teknik yang tepat untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, sehingga dengan adanya strategi tersebut budaya dan proses belajar transparansi dan akuntabilitas yang diteliti benar-benar valid. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan secara komprehensif baik dari sisi waktu maupun dari strategi pengumpulan datanya pada objek budaya kerja yang lebih mendalam.

1.3 Saran

1. Kurangnya dukungan fasilitas diskusi informal antara staf dengan pejabat yang secara negatif mempengaruhi proses berbagi pengetahuan karena kurangnya

kepercayaan dan rasa takut membuat kesalahan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mempertimbangkan membuat perubahan untuk mendukung interaksi informal, seperti menyeimbangkan antara waktu formal bekerja dengan waktu acara sosial di luar tempat kerja pada waktu-waktu tertentu. Hal ini bermanfaat bagi staf untuk menjadi lebih dekat dengan para pejabat sehingga mampu membangun kepercayaan dan mengurangi rasa takut membuat kesalahan sehingga akan mendorong mereka untuk berbagi pengetahuan.

2. Penerapan waktu rotasi pejabat yang terlalu cepat dan sering tidak sesuai kompetensi jabatannya berpengaruh negatif ke semua pekerjaan baik secara individu maupun secara kolektif sehingga mengurangi waktu tatap muka antara pejabat baru dengan staf atau sebaliknya dan dengan demikian proses berbagi pengetahuan menjadi tidak optimal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan lebih banyak merotasi pejabat lintas bidang/bagian daripada lintas SKPD. Kalau pun terpaksa lintas SKPD, harus diterapkan sama untuk jumlah pekerjaan yang lebih banyak. Rotasi jabatan yang lebih lama memberikan manfaat terhadap pejabat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pekerjaan kepada pegawai lainnya. Oleh karena itu disarankan, durasi rotasi tidak singkat tetapi lebih panjang. Durasi jabatan yang ideal mungkin adalah 2 tahun untuk mendapatkan dan mentransfer pengalaman ke bidang lain.
3. Kurangnya program pelatihan pegawai dan kurangnya kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu pengetahuan yang disebabkan oleh kurangnya

anggaran pendidikan dan pelatihan berpengaruh negatif terhadap proses berbagi pengetahuan. Kurangnya pegawai pengganti dan minimnya kaderisasi juga mendukung tidak tercapainya angka indeks pendidikan pegawai yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo disarankan untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang komprehensif. Salah satu cara mengelola pengetahuan tersebut adalah pengambilan pengetahuan para ahli baik dari dalam maupun dari luar organisasi harus didokumentasikan dengan baik. Para pejabat atau staf yang telah mengikuti diklat dan bimtek diwajibkan membuat laporan tertulis selama program pelatihannya dan dibuatkan database yang dikelola secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Amrullah, T. (2018a). *Wawancara RM2 08-05-2018*. Wates.
- Amrullah, T. (2018b). *Wawancara RM3 14-05-2018*. Wates.
- Amrullah, T. (2018c). *Wawancara RM3 16-07-2018*. Wates.
- Amrullah, T. (2018d). *Wawancara RM4 16-07-2018*. Wates.
- Amrullah, T. (2018e). *Wawancara RM4 17-09-2018*. Wates.
- Arianti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. *JOM Fekon Fakultas Ekonomi Universitas Pekanbaru*, 4(1), 1295–1309.
- Artiningsih, I. (2018a). *Wawancara RM2 04-06-2018*. Wates.
- Artiningsih, I. (2018b). *Wawancara RM3 04-06-2018*. Wates.
- Artiningsih, I. (2018c). *Wawancara RM3 11-05-2018*. Wates.
- Artiningsih, I. (2018d). *Wawancara RM4 17-09-2018*. Wates.
- Atan, R., Alam, M. M., dan Said, J. (2017). Practices of corporate integrity and accountability of non-profit organizations in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 1–18. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2016-0260>
- Auditya, L., Husaini, dan Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness Maksi Universitas Bengkulu*, 3(1), 21–41.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). www.bpk.go.id. Retrieved March 11, 2018, from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2010). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2010*. Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo. Retrieved from www.kulonprogokab.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2016). *Kabupaten Kulon Progo*

- dalam Angka 2016*. Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo. Retrieved from www.kulonprogokab.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2018). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2018*. Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo. Retrieved from www.kulonprogokab.bps.go.id
- Badudu, J. S., dan Zain, M. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus* (Edisi Pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bazeley, P., dan Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with NVIVO* (2nd ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- Bennet, D., dan Bennet, A. (2012). Engaging tacit knowledge in support of organizational learning. *Journal of Knowledge Management*, 16(2), 357–372. <https://doi.org/10.1108/13673271211218915>
- Biondi, L., dan Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: the heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(2), 146–164. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035>
- BPK Perwakilan Propinsi DIY. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017*. Yogyakarta.
- Braun, V., dan Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. Retrieved from http://eprints.uwe.ac.uk/11735/2/thematic_analysis_revised
- Cahyani, S. S. (2018). Wawancara RM2 31-05-2018. Wates.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd Ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Kualitatif, Quantitatif and Mixed Methods*

- Approaches* (4th Ed.). Thousan Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Daft, R. L. (2002). *Manajemen; (Emil Salim, Tinjung Desy Nursanti, Maryanmi Hermanto, Penerjemah.)* (5th Ed.). Jakarta: Erlangga.
- de Araujo, J. F. F. E., dan Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Easa, N. F. H. (2012). *Knowledge Management and The SECI Model : A Study of Innovation in the Egyptian Banking Sector*. University of Stirling.
- Fauziyah, M. R. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–16.
- Fitriani, A. (2018). *Wawancara RM2 16-07-2018*. Wates.
- Friedman, M. (2009). *Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measurable Improvements for Customers and Communities* (First Edition). FPSI Publishing.
- Graycar, A., dan Masters, A. B. (2018). Preventing malfeasance in low corruption environments : twenty public administration responses. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 170–186. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2017-0026>
- Griffin, R. (2004). *Management* (7th Ed.). Boston Massachusetts, United States of America: Houghton Mifflin Company.
- Hadiyanto, N. (2018a). *Wawancara RM2 24-05-2018*. Wates.
- Hadiyanto, N. (2018b). *Wawancara RM3 04-06-2018*. Wates.
- Hadiyanto, N. (2018c). *Wawancara RM3 07-05-2018*. Wates.
- Hadiyanto, N. (2018d). *Wawancara RM3 16-07-2018*. Wates.
- Hadiyanto, N. (2018e). *Wawancara RM4 17-09-2018*. Wates.
- Hakim, L. (2018). *Wawancara RM3 16-07-2018*. Wates.
- Hancock, D. R., dan Algozzine, B. (2006). *Doing Case Study Research: A Practical*

- Guide for Beginning Researchers*. Columbia University, New York: Teachers College Press.
- Hasan, M., dan Nurhidayat, Y. (2017). *Laporan Local Budget Index 2017 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Jakarta. Retrieved from <https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2017/03/Local-Budget-Index-2017.pdf>.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods* (1st Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Indonesian Corruption Watch. (2018). www.antikorupsi.org.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., dan Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money, dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Kabar24.bisnis.com. (2017). [www.kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com). Retrieved December 20, 2017, from <http://kabar24.bisnis.com/read/20171205/16/715457/suap-apbd-di-jambi-konsekuensi-penganggaran-yang-tidak-libatkan-masyarakat>
- Kemenpan dan RB. (2017). www.menpan.go.id. Retrieved December 21, 2017, from <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2016>
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006). Jakarta.
- Khairudin, dan Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 137–154.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Good-Public-Governance.pdf>.
- Koontz, H., Cyril, O. D., dan Heinz, W. (1984). *Management* (8th Editio). McGraw-Hill. International Book Company.
- Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi*

- dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kulonprogokab.go.id. (2018). www.kuloinprogokab.go.id.
- Lapsley, I., dan Rios, A. M. (2015). Making sense of government budgeting: an internal transparency perspective. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(4), 377–394. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/QRAM-01-2015-0014>
- Lauranti, M., Afrina, E., & Mawesti, D. (2017). *Open Government: Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia (Sebuah Laporan untuk Advokasi Kebijakan Implementasi e-Government)*. Jakarta. Retrieved from [http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Laporan Open Government Perkumpulan Prakarsa\(1\).pdf](http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files/Laporan%20Open%20Government%20Perkumpulan%20Prakarsa(1).pdf).
- Leavy, P. (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Lestari, M. (2018a). Wawancara RM3 17-07-2018. Wates.
- Lestari, M. (2018b). Wawancara RM4 18-09-2018. Wates.
- López, F. J., dan Torres, A. A. J. B. P. M. P. R. (2017). Accessibility and transparency: impact on social economy. *Online Information Review*, 41(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/OIR-09-2015-0296>
- Lubit, R. O. Y. (2001). Knowledge Management: The Keys to Sustainable Competitive Advantage. *Organizational Dynamic*, 29(4), 164–178.
- Ludani, M. M., Tampi, G. B., dan Pombengi, J. (2015). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Samratulangi*, 2(29), 1–9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7751>
- Madjid, N. C. (2014). *Konsep Perencanaan dan Penganggaran*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Mahdi, A., dan Mujahidin. (2014). *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik* (Edisi 2). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsum, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE. Fakultas Ekonomika dan Busines, Universitas Gadjah Mada.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi 1).
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Yogyakarta: Andi.
- Mas'adah, K. (2018a). *Wawancara PPK RM2 25-05-2018*. Wates.
- Mas'adah, K. (2018b). *Wawancara PPTK RM2 25-05-2018*. Wates.
- Mas'adah, K. (2018c). *Wawancara RM3 16-07-2018*. Wates.
- Mas'adah, K. (2018d). *Wawancara RM4 16-07-2018*. Wates.
- McNabb, D. E. (2007). *Knowledge Management in the Public Sector*. Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Mediaindonesia.com. (2017). [www.mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com/news/read/122941/transparansi-di-daerah-masih-buruk/2017-09-18). Retrieved December 20, 2017, from <http://mediaindonesia.com/news/read/122941/transparansi-di-daerah-masih-buruk/2017-09-18>
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *Department of Public Administration and Organizational Science*, 73(3), 429–439.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. (1992). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd Ed). Arizona State University: Sage Publication, Inc.
- Najoan, J. F., Pangemanan, L. R. J., dan Ellen G. Tangkere. (2018). Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Universitas Sam Ratulangi*, 14, 11–24.
- Nasip. (2018a). *Wawancara RM2 31-05-2018*. Wates.

- Nasip. (2018b). *Wawancara RM3 09-05-2018*. Wates.
- Nasip. (2018c). *Wawancara RM3 17-07-2018*. Wates.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). United States of America: Pearson Education Limited.
- Nonaka, I., dan Konno, N. (1998). The Concept of “Ba”: Building A Foundation for Knowledge Creation. *California Management Review*, 40(3), 40–54.
- Nonaka, I., Toyama, R., dan Konno, N. (2000). SECI , Ba and Leadership : A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. *Long Range Planning*, 33, 5–34.
- Nurritziana, B., Handayani, L., dan Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Nursini. (2010). *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi*.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Keempat). Bandung: Alfabeta.
- Porumbescu, G. (2017). Linking Transparency to Trust in Government and Voice. *American Review of Public Administration*, 47(5), 520–537. <https://doi.org/10.1177/0275074015607301>
- Prabowo, H. Y., dan Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1–36. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., dan Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re- engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
- Prabowo, H. Y., Sriyana, J., dan Syamsudin, M. (2017). Forgetting Corruption : Unlearning the Knowledge of Corruption in the Indonesian Public Sector. *Journal of Financial Crime*, 1–32. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2016-0048>

- Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. (2017). *Pedoman Penulisan Tesis 2017*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Purcell, A. J. (2016). Australian local government corruption and misconduct. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 102–118. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2013-0060>
- Puspitasari, D. (2018a). *Wawancara RM2 03-05-2018*. Wates.
- Puspitasari, D. (2018b). *Wawancara RM4 18-09-2018*. Wates.
- Putra, N. (2011). *Penelitian Kualitatif, Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Index.
- QSR International. (2018). www.qsrinternational.com.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (2016).
- Resty, A. K. (2018). *Wawancara RM2 08-05-2018*. Wates.
- Riani, A. L. (2011). *Budaya Organisasi* (Edisi 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fekon Universitas Jember*, 1–7.
- Ritonga, I. T. (2012a). *Analisis Standar Belanja : Konsep, Metoda Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah* (Edisi 2). Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- Ritonga, I. T. (2012b). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia* (Cetakan II). Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah

Daerah.

- Ritonga, I. T., dan Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 111–125. Retrieved from www.journal.uui.ac.id/index.php/jaai
- Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D. N., dan Kholid, A. (2017). Does social media transform city government? A case study of three ASEAN cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Pukhet, Thailand. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(3), 343–376. <https://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071>
- Romdhoni, A. (2018a). Wawancara RM2 25-05-2018. Wates.
- Romdhoni, A. (2018b). Wawancara RM3 04-06-2018. Wates.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon Fakultas Ekonomi Universitas Pekanbaru*, 4(1), 571–586.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (2007).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (2009).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2014). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 1–10.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (2017).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (2017).

- Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2018). *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018*.
- Setyawati, E. C. (2018). *Wawancara RM2 25-05-2018*. Wates.
- Siagian S.P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sikula, A. F. (1981). *Personal Administration and Human Resourch Management* (2nd Ed.). John Wiley & Son.
- Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research* (4th ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- Sugiyarti, S. (2018). *Wawancara RM2 14-05-2018*. Wates.
- Sunarya. (2018). *Wawancara RM3 09-05-2018*. Wates.
- Sutanti. (2018). *Wawancara RM2 31-05-2018*. Wates.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE. Fakultas Ekonomika dan Busines, Universitas Gadjah Mada.
- Syakiri, K. (2018a). *Wawancara RM2 24-05-2018*. Wates.
- Syakiri, K. (2018b). *Wawancara RM4 17-07-2018*. Wates.
- Syakiri, K. (2018c). *Wawancara RM4 17-09-2018*. Wates.
- Takeuchi, H. (2005). *The New Dynamism of the Knowledge-Creating Company*. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/4611971150473410355/JKE2_ch01.pdf
- Terry, G. R., dan Franklin, S. G. (1982). *Principle of Management* (8th Ed.). Richard D. Irwin, Inc.
- Thornton, J. B., dan Thornton, E. (2013). Assessing state government financial transparency websites. *Reference Services Review*, 41(2), 366–387. <https://doi.org/10.1108/00907321311326273>
- Tika, M. P. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Tobari. (2015). *Membangun Budaya Organisasi pada Instansi Pemerintahan* (Edisi Kesatu). Yogyakarta: Deepublish.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact* (1st ed.). USA: John Wiley & Son.
- Turban, E., Sharda, R., Delen, D., Aronson, J. E., Liang, T. P., dan King, D. (2011). *Decision Support and Business Intelligence Systems* (9th Editio). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Wijayanti, S. (2018). Wawancara RM2 07-05-2018. Wates.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice* (1st ed.). Boston College, USA: Emerald Group Publishing Limited.
- Wulandari, S. (2017). Persepsi Users atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 60–74.
- www.kulonprogokab.go.id. (2017). Retrieved December 13, 2017, from <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=hal&id=233>
- Yin, R. B. (1994). *Case Study: Design and Methods* (2nd Edition). Sage Publication, Inc.
- Yuliani, N. L. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang*, 5(2), 128–157.
- Yuliansyah, Hakim, H. M., dan Suryani, A. W. (2014). *Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak NVivo*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuniastuti, A. (2018). Wawancara RM3 08-05-2018. Wates.

Lampiran 1:
Matrix Coding Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Budaya Kerja Membentuk Akuntabilitas PKD	Budaya Kerja Membentuk T.r. Transparansi PKD	Akuntabilitas Publik PKD dan Kinerja Dewan	Aksesibilitas Kebijakan Publik PKD dan Kinerja	Aksesibilitas LKPD dan Akuntabilitas PKD	Akuntabilitas PKD dan Transparansi PKD	Akuntabilitas PKD dan Kinerja Pemda	Akuntabilitas PKD terhadap Kepercayaan dan Publik	Gaya Kepemimpinan dan Akuntabilitas PKD	Gaya Kepemimpinan dan Akuntabilitas PKD	Pemahaman Akuntabilitas PKD dan Good Governance	Penyajian LKPD dan Akuntabilitas PKD	Penyajian LKPD dan Transparansi PKD	SLPKD dan Akuntabilitas PKD	Sistem Pengendalian Interen dan Akuntabilitas PKD	Sistem Pengendalian Interen dan Akuntabilitas PKD	Transparansi PKD dan Good Governance	Transparansi PKD dan Kepercayaan Stakeholder	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda
1 : Arianti (2017)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 : Yuliani (2014)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3 : Wulandari (2017)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 : Sari (2017)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5 : Riswanto (2016)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6 : Nurrizkiana, dkk (2017)	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
7 : Ludani dkk., (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 : Iswahyudi, dkk (2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9 : Fauziyah (2017)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10 : Auditya dkk.,(2013)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH SKOR	0	0	1	1	3	2	3	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo. Jumlah Skor Berdasarkan Source (Jurnal)

Lampiran 2:
Matrix Coding Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)																					
	Budaya Kerja Membentuk Akuntabilitas PKD	Akuntabilitas Publik PKD dan Kinerja Dewan	Aksesibilitas LKPD dan Akuntabilitas PKD	Aksesibilitas LKPD dan Transparansi PKD	Akuntabilitas PKD dan Kinerja Pemda	Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Publik	Gaya Kepemimpinan dan Akuntabilitas PKD	Bentuk Akuntabilitas PKD	Gaya Kepemimpinan dan Akuntabilitas PKD	Pemahaman Akuntabilitas PKD dan Good Governance	Penyajian LKPD dan Akuntabilitas PKD	SIPKD dan Akuntabilitas Publik	Sistem Pengendalian Interen dan Akuntabilitas PKD	Transparansi PKD dan Good Governance	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda	Transparansi PKD dan Kepercayaan Stakeholder	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda	Transparansi PKD dan Kinerja Pemda	
Arianti (2017)	0	0	241	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Yuliani (2014)	0	0	0	0	0	0	151	0	146	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	
Wulandari (2017)	0	0	0	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sari (2017)	0	0	0	0	69	69	0	0	0	103	103	0	229	229	0	120	120	0	0	0	
Riswanto (2016)	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	
Nurritziana, dkk (2017)	0	0	0	0	213	254	0	206	0	0	0	0	265	169	0	0	0	0	206	0	
Ludani dkk., (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iswahyudi, dkk (2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	215	0	0	
Fauziyah (2017)	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	
Auditya dkk.,(2013)	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	
JUMLAH	0	0	241	122	481	323	657	723	146	356	103	103	81	723	398	195	120	120	215	554	

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo. Jumlah Skor Berdasarkan Word (Kata)

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
 Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00139/II/2018

Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/1586/Kesbangpol/2018, Tanggal: 09 Februari 2018, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

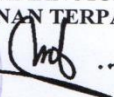
Diizinkan kepada : MUHAJIR R. HAKIM
 NIM / NIP : 16919029
 PT/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Keperluan : IZIN PENELITIAN
 Judul/Tema : MENAKAR PRESTASI DAERAH MELALUI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)

Lokasi : BAPPEDA, BKAD, & INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Waktu : 09 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
 Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
 Pembina Utama Muda; IV/c
 NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
 Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00686/VII/2018

Memperhatikan : Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/7782/Kesbangpol/2018, Tanggal: 20 Juli 2018, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearngkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : **MUHAJIR R. HAKIM**
 NIM / NIP : 16919029
 PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
 Judul/Tema : **MENAKAR PRESTASI DAERAH MELALUI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO)**

Lokasi : **BAPPEDA, BKAD, DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : 01 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
 Pada Tanggal : **24 Juli 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran 4:
Profil Partisipan Wawancara

No.	Nama Partisipan Wawancara	Jenis Kelamin	NIP	Jabatan	Instansi	Pangkat, Golongan/Ruang	Eselon	Umur	Total Masa Kerja	Masa Kerja Jabatan	Pendidikan Terakhir/Universitas
1	Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.	Perempuan	19730427 199803 2 005	Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Pembina, IV/a	IIIb	45 Tahun	29 Tahun	10 Tahun	S2 Magister Ekonomi Pembangunan/UGM
2	Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.	Perempuan	19830617 200604 2 013	Kepala Subbagian Perencanaan	Bappeda	Penata Tingkat 1. III/d	IVa	35 Tahun	12 Tahun	5 Tahun 5 Bulan	S2 Magister Ekonomi Pembangunan/UGM
3	C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.	Perempuan	19810528 200604 2 030	Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan	Bappeda	Penata Tingkat 1. III/d	IVb	38 Tahun	12 Tahun	4 Tahun	S2
4	Khamdan Syakiri, S.Psi	Laki-laki	19791231 200604 1 012	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Penata Tingkat 1. III/d	IVb	38 Tahun	10 Tahun	3 Bulan	S2 / UGM
5	Drs. Sunarya, M.M.	Laki-laki	19690128 198902 1 002	Kepala Bidang Pendapatan	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	49 Tahun	29 Tahun	4 Bulan	S2 Magister Manajemen/UGM
6	Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.	Laki-laki	19750606 199311 1 001	Kepala Bidang Perbendaharaan	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	43 Tahun	24 Tahun 6 Bulan	1 Tahun 5 Bulan	S2 Magister Akuntansi/UGM
7	Nasip, S.E.	Laki-laki	19670131 199603 1 001	Kepala Bidang Pajak	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	51 Tahun	22 Tahun	3 Bulan	S1 Ekonomi/Universitas Jember
8	Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.	Perempuan	19740615 199803 2 007	Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	44 Tahun	20 Tahun	5 Bulan	S2 / UGM
9	Taufik Amrullah, S.T., M.M.	Laki-laki	19700406 199903 1 003	Kepala Bidang Aset	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	48 Tahun	19 Tahun	6 Tahun	S2 Magister Manajemen/UGM
10	Iswandari Artiningsih, S.E.	Perempuan	19731115 199903 2 004	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	BKAD	Pembina, IV/a	IIIb	45 Tahun	19 Tahun	3 Tahun	S1 Akuntansi/UGM
11	Kuni Mas'adah	Perempuan	19681014 199803 2 001	Kepala Subbagian Keuangan selaku PPTK dan PPK-Pembuat SPM	BKAD	Penata Tingkat 1. III/d	IVa	50 Tahun	20 Tahun	5 Tahun	S1
12	Lukman Hakim, S.E., M.M.	Laki-laki	19690715 199803 1 008	Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan	BKAD	Pembina, IV/a	IVb	49 Tahun	20 Tahun	1 Tahun 5 Bulan	S2 Sumber Daya Manusia
13	Sri Sugiyarti, S.E.	Perempuan	19701027 199703 2 002	Kepala Subbidang Belanja	BKAD	Penata, III/c	IVb	48 Tahun	24 Tahun	5 Tahun	S1
14	Alif Rondhoni	Laki-laki	19810720 199912 1 002	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan	BKAD	Penata Tingkat 1., III/d	IVb	37 Tahun	19 Tahun	5 Bulan	ID IV / STPDN
15	Meylani Lestari	Perempuan	19860507 201001 2 007	Kepala Subbidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan	BKAD	Penata, III/c	IVb	32 Tahun	8 Tahun	4 Bulan	S1, Institut Pertanian Bogor
16	Elko Catur Setyawati, S.E.	Perempuan	19870701 200604 2 001	Staf selaku PPK-Petugas Akuntansi	BKAD	Penata Muda, III/a	-	31 Tahun	12 Tahun 1 bulan	4 Tahun	S1 Ekonomi/Universitas Janabadra
17	Angela Resty K.	Perempuan	19870411 201001 2 008	Staf selaku Bendahara Pengeluaran SKPD	BKAD	Penata Muda, III/a	-	31 Tahun	8 Tahun	4 Tahun	ID3 Akuntansi/UGM
18	Sutanti, S.E.	Perempuan	19800119 201001 2 002	Staf selaku Bendahara Penerimaan SKPD	BKAD	Penata Muda, III/a	-	38 Tahun	8 Tahun	5 Tahun	S1 Ekonomi / UWMY
19	Ari Fitriani	Perempuan	19770927 200604 2 005	Auditor Madya	Inspektorat	Pembina, IV/a	-	40 Tahun	12 Tahun 4 Bulan	10 Tahun	S2 / UMY Yogyakarta

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
NERACA

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.a	38.875.407.080,85	52.848.654.003,62
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.b	285.624.115,73	128.382.966,40
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.c	16.866.355,00	2.270.892,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.d	13.599.005.615,27	16.195.849.789,82
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.e	0,00	4.310.510.812,00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.f	1.277.653.328,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.a	10.222.348.858,00	9.632.891.468,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.b	228.558.701,00	903.511.303,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.c	23.409.216.043,93	20.586.474.327,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.d	(16.019.406.706,60)	(14.432.567.319,20)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	21.000.000,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.4	39.811.128.070,71	24.854.210.681,06
JUMLAH ASET LANCAR		111.727.401.461,89	115.030.188.923,70
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	152.383.458.131,90	139.752.134.617,44
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		152.383.458.131,90	139.752.134.617,44
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		152.383.458.131,90	139.752.134.617,44
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	284.465.887.077,00	279.813.591.457,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	339.791.736.196,00	320.119.131.958,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	743.231.135.130,00	730.836.137.271,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	972.942.296.199,00	822.351.439.046,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	49.685.908.493,00	45.031.740.209,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	31.524.617.134,00	27.822.010.004,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(919.950.965.882,00)	(866.180.398.263,57)
JUMLAH ASET TETAP		1.501.690.614.347,00	1.359.793.651.681,43
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	2.744.444.193,00	2.335.559.343,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	11.480.612.015,31	9.622.565.595,00
Amortisasi		(1.851.626.725,60)	(1.394.984.215,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		12.373.429.482,71	10.563.140.723,00
JUMLAH ASET		1.778.174.903.423,50	1.625.139.115.945,57

URAIAN	REF	2017	2016
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	5.195.633,00	48.607.840,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.b	890.000.000,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.c	12.400.928,75	6.416.667,00
Utang Beban	5.3.2.1.d	624.717.945,00	563.952.468,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.e	12.987.804.688,00	12.115.770.022,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14.520.119.194,75	12.734.746.997,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri		2.626.368.665,00	3.987.868.666,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		2.626.368.665,00	3.987.868.666,00
JUMLAH KEWAJIBAN		17.146.487.859,75	16.722.615.663,00
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		1.761.028.415.563,75	1.608.416.500.282,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.778.174.903.423,50	1.625.139.115.945,57

Wates, 2018
BUPATI KULON PROGO
2.2/18
HASTO WARDoyo





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
<i>(Dalam Rupiah)</i>					
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.440.881.554.674,81	1.425.110.286.517,18	98,91	1.358.070.874.847,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	242.829.753.091,61	249.692.648.563,65	102,83	180.273.363.594,69
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a	43.024.098.351,29	47.237.503.606,60	109,79	31.393.835.053,70
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b	7.407.197.578,13	7.340.858.186,19	99,10	9.857.662.642,63
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c	15.783.395.763,54	15.783.395.763,54	100,00	14.317.819.815,93
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d	176.615.061.398,65	179.330.891.007,32	101,54	124.704.046.082,43
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.114.130.588.007,20	1.092.383.136.158,53	98,05	1.161.030.011.704,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.a	967.937.059.000,00	942.334.184.917,00	97,35	957.551.588.907,00
Bagi Hasil Pajak - LRA		26.657.201.000,00	25.598.376.237,00	96,03	25.797.654.182,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		1.587.512.000,00	602.093.671,00	37,93	589.547.984,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		705.868.940.000,00	705.868.940.000,00	100,00	718.490.508.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) - LRA		99.466.666.000,00	83.219.317.952,00	83,67	82.166.879.741,00
Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) - LRA		134.356.740.000,00	127.045.457.057,00	94,56	130.506.999.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.b	50.890.070.000,00	50.890.070.000,00	100,00	99.744.600.000,00
Dana Penyesuaian - LRA		50.890.070.000,00	50.890.070.000,00	100,00	99.744.600.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.c	75.878.394.634,20	79.733.816.868,53	105,08	76.355.539.797,63
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		75.878.394.634,20	79.733.816.868,53	105,08	76.355.539.797,63
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.d	19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	100,00	27.378.283.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	100,00	27.378.283.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	83.921.213.576,00	83.034.501.795,00	98,94	16.767.499.548,00
Pendapatan Hibah - LRA		6.293.736.576,00	5.407.024.795,00	85,91	16.767.499.548,00
Dana Desa		77.627.477.000,00	77.627.477.000,00	100,00	0,00
BELANJA	5.1.2	1.341.233.225.981,65	1.273.152.920.188,17	94,92	1.249.217.168.464,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.068.228.167.159,94	1.013.400.077.159,68	94,87	1.005.681.962.716,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	662.356.928.138,54	639.208.940.386,18	96,51	737.416.762.509,20
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	347.468.351.781,46	326.691.503.384,50	94,02	230.229.276.725,80
Belanja Bunga	5.1.2.1.c	463.757.840,00	461.445.589,00	99,50	38.583.281,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	30.208.075.000,00	21.776.383.400,00	72,09	33.571.120.200,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	27.731.054.400,00	25.261.804.400,00	91,10	4.426.220.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	268.489.369.523,68	258.766.459.024,49	96,02	241.983.733.198,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	8.870.934.780,00	6.975.425.618,00	78,63	11.004.089.945,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	47.441.373.728,00	44.798.712.230,00	94,43	36.546.307.975,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	75.689.848.421,00	73.377.899.576,82	96,95	54.963.606.575,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	124.800.114.544,60	121.991.213.902,67	97,75	129.380.547.561,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	5.154.335.000,00	4.896.074.450,00	94,99	857.879.521,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	236.762.300,00	231.581.850,00	97,81	284.029.625,00
Belanja Modal BLUD	5.1.2.2.g	7.296.000.750,00	6.495.551.397,00	89,03	8.947.291.996,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	3.515.689.298,11	986.384.004,00	28,06	2.251.452.550,00
Belanja Tak Terduga		3.515.689.298,11	986.384.004,00	28,06	2.251.452.550,00
TRANSFER	5.1.2.4	159.039.535.405,00	157.303.083.779,00	98,91	138.679.337.956,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		6.288.916.745,00	4.600.444.223,00	73,15	2.795.602.565,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		5.143.709.979,00	3.663.564.794,00	71,22	2.528.075.636,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.145.206.766,00	936.879.429,00	81,81	267.526.929,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		152.750.618.660,00	152.702.639.556,00	99,97	135.883.735.391,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		151.723.843.000,00	151.723.843.000,00	100,00	135.037.452.231,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.026.775.660,00	978.796.556,00	95,33	846.283.160,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(59.391.206.711,84)	(5.345.717.449,99)	9,00	(38.525.631.572,68)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	69.122.706.711,84	69.126.549.811,84	100,01	119.564.181.384,52
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.a	69.874.496.542,84	69.126.549.811,84	98,93	115.020.985.213,52
Pinjaman Dalam Negeri	5.1.3.1.b	(751.789.831,00)	0,00	0,00	4.248.210.169,00
Penerimaan Kembali Piutang	5.1.3.1.c	0,00	0,00	0,00	294.986.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	9.731.500.000,00	9.731.500.000,00	100,00	19.912.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	19.912.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		731.500.000,00	731.500.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		59.391.206.711,84	59.395.049.811,84	100,01	99.652.181.384,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(0,00)	54.049.332.361,85	0,00	69.126.549.811,84

Wates, 2018.
BUPATI KULON PROGO
2.2.18
HASTO WARDOYO





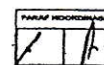
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(Dalam Rupiah) LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN	1.440.881.554.674,81	1.425.110.286.517,18	(15.771.268.157,63)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	242.829.753.091,61	249.692.648.563,65	6.862.895.472,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	43.024.098.351,29	47.237.503.606,60	4.213.405.255,31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.407.197.578,13	7.340.858.186,19	(66.339.391,94)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.783.395.763,54	15.783.395.763,54	0,00
1.1.4	Lain-lain Penapatan Asli Daerah Yang Sah	176.615.061.398,65	179.330.891.007,32	2.715.829.608,67
1.2	DANA PERIMBANGAN	967.937.059.000,00	942.334.184.917,00	(25.602.874.083,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	28.244.713.000,00	26.200.469.908,00	(2.044.243.092,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	705.868.940.000,00	705.868.940.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	233.823.406.000,00	210.264.775.009,00	(23.558.630.991,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	230.114.742.583,20	233.083.453.036,53	2.968.710.453,33
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.293.736.576,00	5.407.024.795,00	(886.711.781,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.878.394.634,20	79.733.816.868,53	3.855.422.234,33
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.890.070.000,00	50.890.070.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	77.627.477.000,00	77.627.477.000,00	0,00
2	BELANJA	1.500.272.761.386,65	1.430.456.003.967,17	(69.816.757.419,48)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	847.339.962.069,65	810.863.636.032,00	(36.476.326.037,65)
2.1.1	Belanja Pegawai	626.381.850.126,54	605.074.534.860,00	(21.307.315.266,54)
2.1.2	Belanja Bunga	463.757.840,00	461.445.589,00	(2.312.251,00)
2.1.4	Belanja Hibah	30.208.075.000,00	21.776.383.400,00	(8.431.691.600,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.731.054.400,00	25.261.804.400,00	(2.469.250.000,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	6.288.916.745,00	4.600.444.223,00	(1.688.472.522,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	152.750.618.660,00	152.702.639.556,00	(47.979.104,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.515.689.298,11	986.384.004,00	(2.529.305.294,11)
2.2	BELANJA LANGSUNG	652.932.799.317,00	619.592.367.935,17	(33.340.431.381,83)
2.2.1	Belanja Pegawai	35.975.078.012,00	34.134.405.526,18	(1.840.672.485,82)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	347.468.351.781,40	326.691.503.384,50	(20.776.848.396,90)
2.2.3	- Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial	347.468.351.781,40	326.691.503.384,50	(20.776.848.396,90)
2.2.3	Belanja Modal	269.489.369.523,60	258.766.459.024,49	(10.722.910.499,11)
	SURPLUS/DEKUR	(59.391.206.711,84)	(5.345.717.449,99)	54.045.489.261,85
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	69.122.706.711,84	69.126.549.811,84	3.843.100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	69.874.496.542,84	69.126.549.811,84	(747.946.731,00)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	(751.789.831,00)	0,00	751.789.831,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.731.500.000,00	9.731.500.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	731.500.000,00	731.500.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	59.391.206.711,84	59.395.049.811,84	3.843.100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	54.049.332.361,85	54.049.332.361,85

Wates,

BUPATI KULON PROGO,

22 Jan
HASTO WARDOYO





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	Ref	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	69.126.549.811,84	115.020.985.215,52
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	69.126.549.811,84	115.020.985.215,52
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	54.049.332.361,85	69.126.549.811,84
Sub Total		54.049.332.361,85	69.126.549.811,84
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	54.049.332.361,85	69.126.549.811,84

Wates, 2018

BUPATI KULON PROGO

2.2 HZ

HASTO WARDOYO





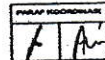
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
Pendapatan Pajak Daerah - LO		47.826.960.996,60	31.810.259.724,70	16.016.701.271,90	50,35
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		7.340.858.186,19	10.178.944.975,63	(2.838.086.789,44)	(27,88)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		15.783.395.763,54	14.317.819.815,93	1.465.575.947,61	10,24
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		180.520.491.221,57	130.688.850.056,43	49.831.641.165,14	38,13
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		251.471.706.167,90	186.995.874.572,69	64.475.831.595,21	34,48
PENDAPATAN TRANSFER - LO					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO		942.334.184.917,00	957.551.588.907,00	(15.217.403.990,00)	(1,59)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO		50.890.070.000,00	99.744.600.000,00	(48.854.530.000,00)	(48,98)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya LO		79.733.816.868,53	76.355.539.797,63	3.378.277.070,90	4,42
Bantuan Keuangan LO		19.425.064.373,00	27.378.283.000,00	(7.953.218.627,00)	(29,05)
Jumlah Pendapatan Transfer LO		1.092.383.136.158,53	1.161.030.011.704,63	(68.646.875.546,10)	(5,91)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah-LO		13.560.858.481,80	100.450.143.731,88	(86.889.285.250,08)	(86,50)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya-LO		738.267.104,93	797.576.150,00	(59.309.045,07)	(7,44)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		77.627.477.000,00	0,00	77.627.477.000,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		91.926.602.586,73	101.247.719.881,88	(9.321.117.295,15)	(9,21)
JUMLAH PENDAPATAN		1.435.781.444.913,16	1.449.273.606.159,20	(13.492.161.246,04)	(0,93)
BEBAN	5.4.2				
BEBAN OPERASI	5.4.2.1				
Beban Pegawai		639.198.565.386,18	743.714.024.059,20	(104.515.458.673,02)	(14,05)
Beban Persediaan		70.207.446.498,53	92.159.917.729,73	(21.952.471.231,20)	(23,82)
Beban Jasa		82.934.251.296,00	144.253.834.895,62	(61.319.583.599,62)	(42,51)
Beban Pemeliharaan		8.466.937.713,42	13.839.673.285,00	(5.372.735.571,58)	(38,82)
Beban Perjalanan dinas		23.678.799.258,50	20.191.298.006,00	3.487.501.252,50	17,27
Beban Bunga		461.433.455,00	38.253.911,00	423.179.544,00	1.106,24
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		21.776.383.400,00	33.571.120.200,00	(11.794.736.800,00)	(35,13)
Beban Bantuan Sosial		25.261.804.400,00	4.426.220.000,00	20.835.584.400,00	470,73
Beban Penyusutan dan Amortisasi		118.891.846.249,00	90.388.941.766,06	28.502.904.482,94	31,53
Beban Penyisihan Piutang		1.619.776.080,56	5.728.392.550,80	(4.108.616.470,24)	(71,72)
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD		103.245.928.916,62	0,00	103.245.928.916,62	0,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS		25.417.698.735,00	0,00	25.417.698.735,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK		7.872.011.002,00	0,00	7.872.011.002,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI		1.129.032.882.390,81	1.148.311.676.403,41	(19.278.794.012,60)	(1,68)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
Beban Transfer		157.303.083.779,00	138.679.337.956,00	18.623.745.823,00	13,43
JUMLAH BEBAN TRANSFER		157.303.083.779,00	138.679.337.956,00	18.623.745.823,00	13,43
JUMLAH BEBAN		1.286.335.966.169,81	1.286.991.014.359,41	(655.048.189,60)	(0,05)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		149.445.478.743,35	162.282.591.799,79	(12.837.113.056,44)	(7,91)

URAIAN	REF	2017	2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		41.257.415.227,80	102.729.400.239,20	(61.471.985.011,40)	(59,84)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		41.257.415.227,80	102.729.400.239,20	(61.471.985.011,40)	(59,84)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		190.702.893.971,15	265.011.992.038,99	(74.309.098.067,84)	(28,04)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		97.168.858.579,00	2.251.452.550,00	94.917.406.029,00	4.215,83
POS LUAR BIASA		(97.168.858.579,00)	(2.251.452.550,00)	(94.917.406.029,00)	4.215,83
SURPLUS/DEFISIT-LO (60 + 65)		93.534.035.392,15	262.760.539.488,99	(169.226.504.096,84)	(64,40)

Wates, 2018
BUPATI KULONPROGO
2.2/18
HASTO WARDOYO





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.608.416.500.282,57	1.370.677.508.949,25
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	93.534.035.392,15	262.760.539.488,99
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	69.458.945,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya		59.077.879.889,03	(25.091.007.100,67)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.761.028.415.563,75	1.608.416.500.282,57

Wates, 2018

BUPATI KULON PROGO,

hr

2.2/12

HASTO WARDOYO





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	REF	2017	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a	47.237.503.606,60	31.393.835.053,70
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.b	7.340.858.186,19	9.857.662.642,63
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.5.1.c	15.783.395.763,54	14.317.819.815,93
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.d	169.728.350.907,32	124.269.286.682,43
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.e	25.598.376.237,00	25.797.654.182,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.f	602.093.671,00	589.547.984,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.g	705.868.940.000,00	718.490.508.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.h	210.264.775.009,00	212.673.878.741,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.i	50.890.070.000,00	99.744.600.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.j	79.733.816.868,53	76.355.539.797,63
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	5.5.1.k	19.425.064.373,00	27.378.283.000,00
14	Penerimaan Hibah	5.5.1.l	5.407.024.795,00	16.767.499.548,00
15	Penerimaan Lainnya (Dana Desa)	5.5.1.m	77.627.477.000,00	-
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		1.415.507.746.417,18	1.357.636.115.447,32
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.a	639.208.940.386,18	737.416.757.509,20
19	Pembayaran Barang	5.5.1.b	326.691.503.384,50	230.229.281.725,80
20	Pembayaran Bunga	5.5.1.c	461.445.589,00	38.583.281,00
21	Pembayaran Subsidi	5.5.1.d	-	-
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.e	21.776.383.400,00	33.571.120.200,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.f	25.261.804.400,00	4.426.220.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan (ke Desa dan lainnya)	5.5.1.g	152.702.639.556,00	135.883.735.391,00
25	Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.5.1.h	986.384.004,00	2.251.452.550,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.i	3.663.564.794,00	2.528.075.636,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.j	936.879.429,00	267.526.929,00
28	Pembayaran Transfer ke Pemerintah Pusat		-	-
29	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 28)		1.171.689.544.942,68	1.146.612.753.222,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 29)		243.818.201.474,50	211.023.362.225,32
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
32	Arus Masuk Kas			
33	Penjualan atas Tanah	5.5.2.a	-	-
34	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	666.946.788,00	-
35	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.c	-	-
36	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.d	-	-
37	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.e	-	434.759.400,00
38	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.f	8.935.593.312,00	-
39	Jumlah Arus Masuk Kas (33 s/d 38)		9.602.540.100,00	434.759.400,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Perolehan Tanah	5.5.2.a	6.975.425.618,00	11.004.089.945,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	44.798.712.230,00	36.546.307.975,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.c	73.377.899.576,82	54.963.606.575,00
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.d	121.991.213.902,67	129.380.547.561,00
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.e	4.896.074.450,00	857.879.521,00
46	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.f	231.581.850,00	284.029.625,00
47	Belanja Modal BLUD	5.5.2.g	6.495.551.397,00	8.947.291.996,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.h	9.000.000.000,00	19.912.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s/d 48)		267.766.459.024,49	261.895.753.198,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)		(258.163.918.924,49)	(261.460.993.798,00)
51	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.a	-	294.986.000,00
54	Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.b	-	4.248.210.169,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 54)		-	4.543.196.169,00
56	Arus Keluar Kas			
57	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.a	731.500.000,00	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas (57 s/d 57)		731.500.000,00	-
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (55 - 58)		(731.500.000,00)	4.543.196.169,00

No.	Uraian	REF	2017	2016
60	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
61	Arus Masuk Kas			
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	84.899.500.108,80	93.277.824.984,20
63	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 62)		84.899.500.108,80	93.277.824.984,20
64	Arus Keluar Kas			
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	84.942.912.315,80	93.238.001.013,20
66	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 65)		84.942.912.315,80	93.238.001.013,20
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63 - 66)		(43.412.207,00)	39.823.971,00
68	Kenaikan/Penurunan Kas (30 + 50 + 59 + 67)		(15.120.629.656,99)	(45.854.611.432,68)
69	Saldo Awal Kas di BUD		69.175.186.151,84	115.029.769.084,52
	Saldo Awal Kas di KASDA		52.848.654.003,62	103.626.941.251,50
	Saldo Awal Kas di BLUD		16.195.878.289,82	10.874.379.541,22
	Kas Di bendahara Penerimaan		2.270.892,00	87.101.859,00
	Kas Di bendahara Pengeluaran		128.382.966,40	441.346.432,80
70	Saldo Akhir Kas di BUD (68 + 69)		54.054.556.494,85	69.175.157.651,84

Watcs, 2018
BUPATIKULON-PROGO
2.2/11
HASTO WARDoyo



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 13 Tahun 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

<div>  <div> KABUPATEN KULON PROGO RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 </div> </div>		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.530.542.492.863,98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	207.069.271.744,53
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	57.687.397.290,89
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.325.783.127,13
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.531.111.952,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.524.979.373,89
1.2	DANA PERIMBANGAN	993.976.585.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.678.780.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	705.868.940.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	260.428.865.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	329.496.636.119,45
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.821.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.536.045.119,45
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.250.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00
1.3.7	Dana Desa	77.889.191.000,00
2	BELANJA	1.533.288.492.863,98
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	828.097.598.748,98
2.1.1	Belanja Pegawai	618.845.503.494,66
2.1.2	Belanja Bunga	477.109.379,00
2.1.4	Belanja Hibah	23.949.790.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.738.700.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.601.319.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	152.826.043.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.659.133.875,32
2.2	BELANJA LANGSUNG	705.190.894.115,00
2.2.1	Belanja Pegawai	37.397.890.700,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.808.659.246,00
2.2.3	Belanja Modal	362.984.344.169,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.746.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.254.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.254.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.746.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
<div> <div>BUPATI KULON PROGO,</div> <div>HASTO WARDOYO</div> </div>		

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 11 Tahun 2017
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN KULON PROGO					
RINGKASAN PERUBAHAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2017					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.402.546.137.805,59	1.440.881.554.674,81	38.335.416.869,22	2,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.215.012.961,59	242.829.753.091,61	21.614.740.130,02	9,77
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	81.519.038.320,79	43.024.098.351,29	(38.494.939.969,50)	(47,22)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.840.603.205,00	7.407.197.578,13	(1.433.405.626,87)	(16,21)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.806.411.232,81	15.783.395.763,54	1.976.984.530,73	14,32
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.048.960.202,99	176.615.061.398,65	59.566.101.195,66	50,89
1.2	DANA PERIMBANGAN	979.213.034.000,00	967.937.059.000,00	(11.275.975.000,00)	(1,15)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.250.013.000,00	28.244.713.000,00	(1.005.300.000,00)	(3,44)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	718.490.508.000,00	705.868.940.000,00	(12.621.568.000,00)	(1,76)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	231.472.513.000,00	233.823.406.000,00	2.350.893.000,00	1,02
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.118.090.844,00	230.114.742.583,20	27.996.651.739,20	13,85
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.249.215.544,00	6.293.736.576,00	4.044.521.032,00	179,82
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	71.351.328.300,00	75.878.394.634,20	4.527.066.334,20	6,34
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.890.070.000,00	50.890.070.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	77.627.477.000,00	77.627.477.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.440.263.093.213,57	1.500.272.761.386,65	60.009.668.173,08	4,17
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	832.272.967.754,92	847.339.962.069,65	15.066.994.314,73	1,81
2.1.1	Belanja Pegawai	615.789.620.030,75	626.381.850.126,54	10.592.230.095,79	1,72
2.1.2	Belanja Bunga	622.211.979,17	463.757.840,00	(158.454.139,17)	(25,47)
2.1.4	Belanja Hibah	22.914.500.000,00	30.208.075.000,00	7.293.575.000,00	31,83
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.586.200.000,00	27.731.054.400,00	144.854.400,00	0,53
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.400.826.245,00	6.288.916.745,00	(3.111.909.500,00)	(33,10)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	153.959.609.500,00	152.750.618.660,00	(1.208.990.840,00)	(0,79)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.515.689.298,11	1.515.689.298,11	75,78

Halaman 1

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	607.990.125.458,65	652.932.799.317,00	44.942.673.858,35	7,39
2.2.1	Belanja Pegawai	32.818.934.174,00	35.975.078.012,00	3.156.143.838,00	9,62
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.502.542.802,40	347.468.351.781,40	66.965.808.979,00	23,87
2.2.3	Belanja Modal	294.668.648.482,25	269.489.369.523,60	(25.179.278.958,65)	(8,54)
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.716.955.407,98)	(59.391.206.711,84)	(21.674.251.303,86)	57,47
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.448.455.407,98	69.122.706.711,84	24.674.251.303,86	55,51
3.1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.448.455.407,98	69.874.496.542,84	25.426.041.134,86	57,20
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	(751.789.831,00)	(751.789.831,00)	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.731.500.000,00	9.731.500.000,00	3.000.000.000,00	44,57
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	731.500.000,00	731.500.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	37.716.955.407,98	59.391.206.711,84	21.674.251.303,86	57,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

Halaman 2

Lampiran 7:

Matrix Coding Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

NAMA KEGIATAN	EXPLICIT KNOWLEDGE		
	Databases	Manuals	Scientific Formulas and Computer Program
A. PERENCANAAN			
A1. Bersinergi Bersama Stakeholder dengan Melibatkan BKAD	1	1	12
A2. Tersedia Media Publikasi Internal dan Eksternal	1	1	12
A3. Konsultasi Publik dan Menyerap Aspirasi melalui Sistem Informasi	9	3	3
A4. Tersedia Layanan Pengaduan Masyarakat	3	11	1
A5. Pra RKA dan Standar Evaluasi	2	1	12
A6. Berorientasi Proses dengan Membentuk Pokja RPJM	1	1	12
A7. Konektivitas Sistem Perencanaan dengan Penganggaran	2	2	14
A8. Payung Hukum Perencanaan Memadai dan Mengikuti Aturan Berlaku	3	13	1
B. PELAKSANAAN	0	0	0
B1. Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik	4	0	0
B2. Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui	0	1	0
B3. Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan	0	2	0
B4. Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran	0	1	0
B5. Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan	0	1	0
B6. Rakor dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD	0	4	0
B7. Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai	0	1	3
C. PENATAUSAHAAN	0	0	0
C1. Kerjasama yang Baik PPTK, PPK, dan Bendahara	0	1	3
C2. PPTK sebagai Fungsi Pembuat Pertanggungjawaban	0	2	1
C3. Sistem Panjar Berbasis Bukti Pertanggungjawaban	0	2	2
C4. Komitmen Bersama Penyampaian SPj Tepat Waktu dan Lengkap	0	3	0
C5. Keadaan Kas dan Aset Tetap yang selalu Dimonitoring	1	0	0
D. PELAPORAN & PERTGJWBN	0	0	0
D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	0	0	2
D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	0	1	0
D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	7	3	1
D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan	0	1	0
TOTAL	34	56	79

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo. Jumlah Skor Berdasarkan Partisipan

Lampiran 8:

Matrix Coding Budaya Kerja dan Proses SECI Pengetahuan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (TA PKD) di Kabupaten Kulon Progo

BUDAYA DAN PROSES BELAJAR TA PKD	EXPLICIT KNOWLEDGE			TACIT KNOWLEDGE					
	Databases	Manuals	Scientific Formulas and Computer Program	Affective Tacit Knowledge	Hard to Pin Down Skills Know How and Embodied Tacit Knowledge	Mental Models and Intuitive Tacit Knowledge	Organizational Routines	Spiritual Tacit Knowledge	Ways of Approaching Problems
BUDAYA TA PKD									
F1. Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi	0	1	0	0	0	0	0	4	1
F2. Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif	0	0	0	0	0	0	0	0	5
F3. Berorientasi dan Komitmen Melayani	0	0	0	0	0	5	0	0	0
F4. Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral	0	0	0	0	0	0	0	4	0
F5. Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi	0	1	0	4	0	0	0	0	1
PROSES BELAJAR TA PKD									
1. SOCIALISATION									
S1. Tanya Jawab Pejabat Baru dan Saling Membantu Pekerjaan	0	0	1	4	2	0	0	0	3
S2. Wacana Pembuatan Kebijakan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	1	3	0	0	0
S3. Belajar Bareng Permasalahan Keuangan	1	1	2	1	1	4	0	1	1
S4. Perbincangan Data Aset Tetap yang Amburadul	1	0	1	0	1	2	1	0	1
2. EXTERNALISATION									
E1. Usulan Pelaksanaan BinteK dan Pelatihan	2	1	5	1	1	1	0	1	5
E2. Forum Konsultasi Rutin	1	3	1	1	2	1	1	1	1
E3. Rapat dan Monitoring	1	3	7	1	2	3	0	1	1
E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding	0	1	1	1	2	1	0	0	0
K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	4	4	0	2	0	4	4	0	4
K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	3	6	1	5	1	2	2	3	5
K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	0	3	0	0	3	0	0	0	1
K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya	1	8	0	2	1	4	1	1	8
4. INTERNALISATION									
I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	0	0	1	1	0	6	0	0	0
I2. Pelatihan dan Belanja Mandiri	1	1	1	1	1	1	0	1	3
I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	1	1	1	3	1	1	0	1	1
I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi	0	0	0	0	0	0	0	2	0
TOTAL SKOR	16	34	22	27	19	38	9	20	41

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo. Jumlah Skor Berdasarkan Partisipan

Lampiran 9:

Matrix Coding Kekurangan, Kendala, dan Solusi untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Kekurangan dan Kendala	a. Perhatian dan Koordinasi Perencanaan di Tingkat SKPD Masih Kurang	b. Penyebarluasan Informasi PKD Terbatas pada Website dan Aplikasi Internal	c. Kurangnya SDM Pengelola Keuangan Khusus di PPK	d. Penyusunan Anggaran yang Terlalu Historis dan Mindset Ingin Sejahtera dengan Cara Instan	e. Beda Kepentingan Beda juga Pemikiran tentang Aset
a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	1	0	0	0	0
b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	0	3	0	0	0
c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	0	0	3	0	0
d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	0	0	0	2	0
e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	2
TOTAL SKOR	1	3	3	2	2

Kendala dan Solusi	a. Jadikan Variabel Ketepatan Waktu sebagai Salah Satu Indikator Kinerja	b. Jadikan Medsos sebagai Alat Penyebaran Informasi	c. Bentuk PPK-SKPKD yang Dikoordinasikan Bidang Akuntansi	d. Terapkan ASB di Semua Tahapan PKD	e. Lakukan Upaya Optimalisasi Aset Tetap Menurut Aturan Berlaku
a. Perhatian dan Koordinasi Perencanaan di Tingkat SKPD Masih Kurang	4	0	0	0	0
b. Penyebarluasan Informasi PKD Terbatas pada Website dan Aplikasi Internal	0	4	0	0	0
c. Kurangnya SDM Pengelola Keuangan Khusus di PPK	0	0	3	0	0
d. Penyusunan Anggaran yang Terlalu Historis dan Mindset Ingin Sejahtera dengan Cara Instan	0	0	0	3	0
e. Beda Kepentingan Beda juga Pemikiran tentang Aset	0	0	0	0	2
TOTAL SKOR	4	4	3	3	2

Sumber : Diolah Peneliti melalui NVivo. Jumlah Skor Berdasarkan Partisipan

Lampiran 10:

Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo

1. Sri Wijayanti

Wawancara dengan Sri Wijayanti, pada Senin, 7 Mei 2018, pukul 13.57 WIB di ruang kerjanya. Sri Wijayanti adalah Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme perencanaan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Mekanisme penyusunan perencanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo

Sri Wijayanti

Mekanisme RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, renja, ini semua sesuai dengan ini semua, sesuai dengan peraturan, Permendagri 86.

Emerha

Berarti kita langsung nomor 2 ya bu?

Sri Wijayanti

Loh ini, kalau kami yang nomor 1, ini ya mas, ini dari RPJPD, meskipun kami kan tidak, karena saya di sini kan RPJPD sudah tersusun ya. Yang RPJM, RKPD, Renstra, Renja, sama KUA PPAS ya sesuai dengan peraturannya, mekanismenya. Artinya misalnya ini lo...dengan adanya mekanisme penyusunan RKPD dari rancangan awal, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, dan rancangan akhir. Ini semua prosesnya kita lewati. Yang RPJMD juga.

Q.2. Model perencanaan yang transparan (indikator dan alat ukurnya)

Emerha

Tentang indikator dan alat ukur transparansi perencanaan?

Sri Wijayanti

Ya.. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi proses perencanaan. Ya ini kan setiap...setiap prosesnya kan ada musrembang, dan sebagainya itu kita, misalnya kita umumkan, eeh maksudnya seperti rancangan awal, kemudian rancangan RKPD, rancangan, kemudian nanti..nanti RKPD-nya kan semuanya diupload di web to.. Prosesnya juga kita..kita lakukan misalnya musrembang kan kita juga menghadirkan semua stakeholder yang apa..yang berperan di kegiatan, jadi tidak hanya instansi pemerintah tapi ada juga LSM, kemudian eeh organisasi ormas, organisasi massa, organisasi keagamaan, itu juga kita undang semua.

Emerha

Kalau di website jika ada masyarakat yang ingin bertanya, apa itu difasilitasi juga di website?

Sri Wijayanti

Di kami ada, usulan masyarakat itu di aplikasi “RencanaKu”. Itu ada memang ada usulan masyarakat.

Emerha

Aplikasi itu dikelola di bidang mana bu?

Sri Wijayanti

Di sini, iya di bidang sini. Di aplikasi “RencanaKu” itu ada form usulan masyarakat gitu loh. Kemudian di musrembang sendiri itu kan ada juga usulan dari masyarakat kan pada saat musrembang kecamatan itu. Itu ada usulan dari masyarakat. kemudian di DPRD itu sudah membuat sistem aplikasi namanya “AspirasiKu”. Nah itu semua yang warga masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau mungkin keluhan gitu, bisa lewat “AspirasiKu” itu.

Emerha

Aplikasi “AspirasiKu” itu bisa diakses dari luar?

Sri Wijayanti

Yang bisa akses yang NIK Kulon Progo. Iya yang bisa memasukkan cuma rakyat Kulon Progo. Hm.hm pake NIK itu dikelola di DPRD.

Emerha

Kalau mekanisme yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi perencanaan?

Sri Wijayanti

Pelaporan..? Maksudnya gimana ini ya mas? Contohnya gimana ya?

Emerha

Maksudnya, setiap informasi yang sudah dibuka ke publik, itu sudah dilaporkan kemana saja? Prosedurnya gimana? Apa memang semata-mata hanya untuk dipublikasikan? Bisa jadi kan yang dilaporkan ke atasan berbeda dengan yang dipublikasikan? Lalu kalau ada pegawai yang melakukan penyelewengan itu apa ada juga mekanisme pelaporannya? Misalnya masyarakat tahu itu dan dia harus melapor kemana gitu? Ada prosedurnya?

Sri Wijayanti

Kalau pelaporan itu ada form aduan yang dikelola oleh Diskominfo. Itu kan ada. Ada juga setiap hari kamis pagi, itu kan Bupati kan ada forum, namanya “forum kamisan”, itu beliau menyediakan waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 10, menerima warga masyarakat. Bupati atau wakil bupati, hari kamis pagi. Tapi kalau mau kesana biasanya ini dulu ya mas, daftar dulu. Eeh..eeh karena kan kadang bupati dan wakil, kadang bupati saja, kadang wakil bupati saja beserta staf ahli biasanya atau asistennya. Nah nanti dari

forum kamis pagi itu kan ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang apa saja. Itu terus nanti ada, kan ada yang nyatet ya, di-feedback-kan ke SKPD, misalnya jalan rusak, itu nanti disampaikan ke mana...ke dinas PU, dan biasanya di sini juga dapat tembusan.

Emerha

Itu daftar forum kamisan itu dimana?

Sri Wijayanti

Eehh di *front office*, tapi itu daftar dulu. Di *front office* di kantornya Bupati. Soalnya takut kalau terlalu banyak, apa waktunya terbatas. Tapi tetap dibuka selain itu Bupati juga ada acara “Bupati Menyapa”, itu lewat RRI dan biasanya jumat pagi, tapi saya gak hapal ya jam berapa. Jumat pagi-pagi itu disiarka di radio, biasanya ada yang telepon.

Emerha

Kalau misalnya nomor hotline khususnya, untuk pejabat-pejabat ada juga?

Sri Wijayanti

Yang selama ini sudah berjalan baru Dinas Perhubungan, nah perhubungan itu ne jenengan mirsane di apa namanya...tiang-tiang LPJU, nah itu kan ada nomor telepon kalau misalnya LPJU ini mati silahkan hubungi nomor ini, itu dinas perhubungan. Yang lain saya kurang..kurang tahu. Mungkin ada juga cuman beda-beda.

Q.3. Model perencanaan yang transparan (transparansi dibangun dan dilaksanakan dengan model sistem informasi)

Emerha

Menurut pendapat ibu, apa definisi transparan dalam konteks perencanaan?

Sri Wijayanti

Ya..masyarakat tahu apa yang kita bangun, apa yang kita rencanakan, itu aja sih. Dan masyarakat juga berhak atau memberikan usulan terhadap apa yang mereka butuhkan.

Emerha

Berarti hanya sekedar memberi informasi. Kalau melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, bagaimana?

Sri Wijayanti

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ya kita di forum-forum itu tadi, ya...musrembang.

Emerha

Kalau informasi itu dibuka lewat website, apakah masyarakat yang mengakses langsung paham ya bu? Atau disediakan khusus keterangan dan penjelasan di web itu?

Sri Wijayanti

Gak sih. Sepertinya tidak disediakan penjelasan khusus. Tapi dengan bahasa yang sederhana, mereka kan tahu. Bahasa perencanaan kita juga bukan, masak, artinya yang muluk-muluk. Kita mencoba dengan bahasa yang sederhana. Jadi langsung gampang dimengerti.

Emerha

Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa informasi itu diberikan jujur kepada masyarakat?

Sri Wijayanti

Selama ini yang kita informasikan apa yang ada. Iya...yang gak jujur yang gimana? Kurang paham nih..

Emerha

Maksudnya bagaimana mengantisipasi jika informasi itu bercampur hoax, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat sehingga dianggap tidak jujur?

Sri Wijayanti

Saya belum pernah melihat, ya. Belum pernah melihat. Sepanjang yang saya tahu..ha..ha..Ini saya belum pernah tahu.

Emerha

Soal transparansi, informasi yang sudah terbuka, itu bagaimana cara menyeimbangkan antara hak masyarakat atas informasi dengan kewajiban rahasia negara?

Sri Wijayanti

Mestinya yang kita upload, yang kita sampaikan ke masyarakat itu bukan yang sifatnya rahasia. Contoh kasus begini, pernah kan kita ada data album kemiskinan. Nah di data album kemiskinan itu yang kita sampaikan ke masyarakat kan hanya yang agregatnya saja, jumlah penduduk miskinnya yang bisa diakses gitu loh, artinya bahwa di desa ini ada kemiskinan tetapi by name, by address-nya kan tidak kita buka, itu kan menyangkut kerahasiaan orang. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengetahui data itu, silahkan berkonsultasi ke kami. Kebutuhannya untuk apa pengen mengetahui data yang by name, by address orang miskin tadi. Contohnya gitu itu loh. Lebih mudahnya yang disampaikan.

Emerha

Kalau misalkan informasi itu dibutuhkan oleh masyarakat, tapi ternyata mengdanung rahasia jabatan atau rahasia negara, itu dibuka juga?

Sri Wijayanti

Selama ini gak, kalau ada rahasia.

Q.4. Model perencanaan yang akuntabel (indikator dan alat ukur akuntabilitas)

Emerha

Dalam tahap pembuatan, apakah keputusan perencanaan dibuat tertulis dan tersedia bagi setiap yang membutuhkan? Misalnya setelah membuat perencanaan, ibu membuat laporan tertulis kepada masyarakat bahwa ini yang sudah direncanakan dan itu mudah diakses oleh masyarakat?

Sri Wijayanti

Yaa itu setelah jadi dokumen akhir, tapi tahapannya tadi yang saya sampaikan bahwa rancangan awal RKPD misalnya, rancangan awal RKPD itu kan kita upload, rancangannya kita upload, rancangan akhirnya kita upload. Jadi kan masyarakat bisa mengikuti kalau yang memang ingin kan bisa mengikuti prosesnya itu. Itu iya jadi.

Emerha

Kalau usulan masyarakat lewat musrembang itu, bagaimana mereka tahu usulan mereka diterima atau ditolak? Itu diinformasikan juga?

Sri Wijayanti

Di ini..di ini tadi, di dokumen-dokumen yang tadi, yang kita upload itu, kan jadi kelihatan to.. jadi besok di akhir, di rancangan, eehh di dokumen RKPD yang akhir itu kan ada kegiatan, kegiatan yang belum, yang ditunda pelaksanaannya, yang belum disepakati mungkin karena kan keterbatasan anggaran, nah itu kan tidak semua kebutuhan, kadang kan masyarakat itu usulannya kan banyak sekali sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Itu kan dimana-mana pasti ada yang constrain anggaran kayak gitu. Itu di...tunda pelaksanaannya atau untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan. Kan itu bisa dipergunakan untuk rancangan tahun berikutnya. Dokumen tertulisnya juga ada, nanti bukunya juga ada, buku kayak gini (sambil menunjuk tumpukan buku di sampingnya). Nah ini untuk yang sudah disepakati. Nah ini yang ditunda. Dua-duanya kita upload. Kita upload satu buku.

Emerha

Apakah keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku? Jadi maksudnya secara administratif lengkap dan sesuai kebutuhan?

Sri Wijayanti

Iya, secara administrasi lengkap.

Emerha

Apakah ada kejelasan sasaran dari setiap kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi-misi (RPJMD)?

Sri Wijayanti

Iya pasti. Kami ada ini ya mas, itu yang ditempel teman-teman itu (sambil menunjuk tempelan kertas besar di dinding sebelah kanannya), itu peta indikator kinerja. Itu kan dari visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, terus sasaran SKPD-nya, kemudian itu program, ada di dokumen juga.

Emerha

Berarti (peta indikator kinerja) itu sebagai pengingat saja ya biar dapat dipastikan sesuai visi misi?

Sri Wijayanti

Iya..iya.

Emerha

Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa standar perencanaan telah terpenuhi dan apa ada juga mekanisme apabila standar tersebut tidak terpenuhi?

Sri Wijayanti

Iya..iya..pengendalian dan evaluasi kan sesuai permendagri 86 itu kan, pengendalian dan evaluasi dilakukan di setiap tahap. Jadi misalnya pada saat penyusunan rancangan awal RKPD, itu pengendaliannya bagaimana. Rancangan itu di bidang pengendalian nanti yang lakukan itu.

Emerha

Kalau dalam tahap sosialisasi bu, apakah informasi perencanaan hanya disebarikan melalui website saja? Gak ada lewat medsos misalnya buka akun FB atau IG?

Sri Wijayanti

Belum....Mungkin ke depan.

Emerha

Bagaimana akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara untuk mencapai sasaran perencanaan? Dengan kata lain, nah itu tadi apakah dokumen-dokumen misalkan lampiran-lampiran lengkap diupload di website?

Sri Wijayanti

Komplit. Dalam bentuk pdf. Bisa didownload, nanti coba jenengan di web-nya Bappeda, he..ee, Bappeda Kulon Progo. Tapi untuk yang tahun ini kita baru sampe pada tahap rancangan. Nah rancangan akhirnya kan belum.

Emerha

Tadi sistem informasinya ada dua kan, “RencanaKu” dan “AspirasiKu”. “AspirasiKu” dikelola oleh DPRD. Bagaimana akses publik dilakukan setelah keputusan perencanaan dibuat? Itu kerja sama dengan Bappeda ya?

Sri Wijayanti

“AspirasiKu” sementara ini masih dikelola di dewan dan kita mendapatkan data sudah dalam bentuk *hardcopy*, hasil dari “AspirasiKu.” Itu disampaikan ke kami, menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.

Emerha

Kalau yang “RencanaKu”?

Sri Wijayanti

Ya itu “RencanaKu”, kami yang mengelola.

Emerha

Itu bisa diakses oleh masyarakat atau cuma terbatas di lingkungan Bappeda?

Sri Wijayanti

Yang tadi yang usulan dari masyarakat, kan masyarakat bisa, bisa menginput. Kalau yang di luar admin-nya SKPD.

Q.5. Model perencanaan yang akuntabel (akuntabilitas perencanaan dibangun)

Emerha

Definisi akuntabel menurut Ibu dalam konteks perencanaan?

Sri Wijayanti

Akuntabel itu perencanaannya sesuai standar ya. Akuntabel itu bisa diperbandingkan, bisa ada target, ada targetnya. Cuma itu sih yang saya tahu.

Emerha

Kalau dalam proses perencanaan itu, saya ingin tahu budaya kerjanya itu seperti apa? Mulai dari jenjang strukturnya sampai ke stafnya.

Sri Wijayanti

Maksudnya gimana ya?

Emerha

Maksudnya dalam proses perencanaan itu apa dikoordinasikan oleh satu orang, dalam budaya kerja misalnya disiplinnya seperti apa?

Sri Wijayanti

Ya..masing-masing. Yang jelas di sini masing-masing personal itu mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Itu nanti dikoordinasikan sampai ke atas, sampai ke levelnya. Kalau perencanaan kan kita ada TAPD, tim anggaran pemerintah daerah itu yang punya tanggungjawab.

Emerha

Kalau perencanaan apa hanya di bidang sini ya bu?

Sri Wijayanti

Gak, jadi perencanaan kami ini yang, istilahnya mengkompilasikan. Jadi ada di masing-masing bidang, jadi yang bertanggungjawab terhadap SKPD, contoh kasus yang misalnya bidang infrapanwil, nah itu dia mengkoordinasikan perencanaannya yang dinas PU, dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas, sesuai wilayahnya lah. Lah itu terus nanti dari hasil bidang, dari bidang-bidang yang teknis tadi, itu nanti baru ke kami untuk di.... eeh..apa ya bukan sekedar kompilasi sih, tapi ya memang untuk dirajutnya gitu loh, ke perencanaannya itu. Rancangan juga, rancangan awalnya kan dari kami, sebelumnya juga sudah ada guidance untuk pelaksanaan perencanaan. Tahun 2019 misalnya kan kita rembuk bareng-bareng, tapi nanti yang langsung berhubungan dengan SKPD, dibawahnya ya bidang-bidang teknis.

Emerha

Kalau koordinasi ke pimpinannya, bagaimana bu, misalnya ke BKAD, itu di bidang mana kalau soal perencanaan?

Sri Wijayanti

Kalau perencanaan koordinasi kami lebih banyak ke bidang anggaran dan pendapatan (BKAD). Kalau pendapatan itu kan bagaimana pendapatannya, terus kami bagaimana mengalokasikannya kan dari target pendapatannya kan sama, kami mengalokasikannya, nanti anggaran ini yang ditunggu di penganggarannya.

Emerha

Di perbendaharaan juga ada?

Sri Wijayanti

Di perbendaharaan itu nanti banyak di pelaksanaannya, pelaksanaan kegiatan.

Emerha

Kalau di lingkungan Bappeda ada standar dan kode etik perilaku dibuat?

Sri Wijayanti

Kalau SOP ada. Kalau kode etik yang dimaksudkan yang gimana ya? Yang dipasang dibawah itu apa ya mba Novi? Yang dipasang mba Retno di banner itu apa namanya? Kode etik atau apa itu? Nah SOP kita buat to, tapi yang dipasang di bawah itu apa itu ha..ha.. (bertanya kepada stafnya). Saya kurang paham, mas... mungkin yang sekretariat yang ini....inggih...

Q.6. Model perencanaan yang akuntabel (akuntabilitas perencanaan dipertanggungjawabkan)

Emerha

Kalau akuntabilitas hukumnya. Selain permendagri 86,ada produk hukum lainnya yang jadi dasar perencanaan?

Sri Wijayanti

Masih SPPD itu tadi, sistem perencanaan pembangunan daerah, perda itu loh...Cuma dua itu. Kami memang belum mengubah ini, seharusnya kan sudah diubah karena yang ini perda 2007 itu sudah lama ya..karena kan sudah ada permendagri yang 54, 86, tapi secara prinsip di permendagri 86 atau 54 itu kan tidak terlalu berbeda, perbedaannya tidak terlalu banyak.

Emerha

Kalau akuntabilitas programnya, sinkronisasi antara kabupaten dengan propinsi, dengan nasional, itu seperti apa bu?

Sri Wijayanti

Ya. Kami di tahapan penyusunan RKPS itu pasti ada sinkronisasi kita dengan DIY maupun dengan nasional kan, rancangan akhir kita konsultasikan, di DIY kan ada mekanisme itu. Nah itu kalau di sana menilai belum sinkron, kan pasti diminta ada sinkronisasi dan di DIY juga ada beberapa tahap yang harus dilewati pada saat pada forum trilateral, ada forum patial yang membahas musrempang, usulan-usulan APBN-lah intinya itu, ada..ada forumnya.

Emerha

Kalau akuntabilitas hasilnya, itu di permendagri 86 saya lihat ada formulir pencocokkan antara sasaran dan capaian sasaran, itu dibikin sesuai format itu juga?

Sri Wijayanti

Iya, dilakukan juga, itu di bidang...sama-sama di bidang pengendalian yang melakukan. Itu form-nya juga pake itu di apa...ada aplikasinya juga, soalnya ""MonevKu"". Kami hanya sampai ke ""RencanaKu"" sampai ke KUA PPAS, nanti pengendaliannya di ""MonevKu"". Aplikasinya ""MonevKu"" namanya. ""MonevKu"" itu datanya sudah dari anu ya..nanti data capaian keuangan sudah dari...eeeh..dari BKAD. Itu sudah ambil dari SIMDA, kan aplikasinya BKAD itu SIMDA namanya. Realisasinya sudah dari sana.

Emerha

Kalau akuntabilitas hasilnya, itu antara ""MonevKu"", ""AspirasiKu"", sama ""RencanaKu"" itu konek ya?

Sri Wijayanti

Belum..belum..iya, masih operasi sendiri-sendiri. Meskipun datanya dari Rencanku, kan ini perencanaan, ke penganggaran kan pakai SIMDA. Lah itu sudah apa ya, sudah ada pada saat desk, karena pada saat desk kita di pelaksanaan desk kita, eeh..pencermatan pra-RKA, itu kan kami juga melibatkan, eeh timnya ada, teman-teman di DPPKA, BKAD ya maksudnya, sekarang BKAD. Jadi nanti semaksimal mungkin yang apa yang sudah dikerjakan di perencanaan ini nanti akan sama dengan, udah ngalir itu ke SIMDA-nya. Meskipun belum konek, tapi sudah, kemarin sudah dicoba, dibuat di..apa jadi teman-teman di BKAD tidak entri lagi tapi masih ada sedikit apa sedikit trouble ya, jadi belum.

Emerha

Berarti yang nomor 4 saya tanyakan di pengendalian ya bu? Karena ini menyangkut monev ya...

Sri Wijayanti

Inggih...inggih.. itu pake ""MonevKu"" tadi dan dari ""MonevKu"", kan ini ""RencanaKu"" terus SIMDA, terus ini ""MonevKu"", nah ini yang realisasi (sambil menunjuk dan menjelaskan gambar dibalik kaca di mejanya). Keuangan di ""MonevKu"" dari SIMDA, tapi masih download terus upload lagi, belum, belum konek. Masih ngimput. Sudah dijamin sama.

2. Diana Puspitasari

Wawancara ke-1 dengan Diana Puspitasari, pada Kamis, 3 Mei 2018, pukul 14.35 WIB di ruang rapat, Kantor Bappeda. Diana adalah Kepala Subbagian Perencanaan di bawah Sekretaris Bappeda sampai dengan saat ini. Diana merupakan *gatekeepers* dan partisipan pertama dalam memperoleh informasi perencanaan di Bappeda. Melalui beliau peneliti diberi akses mewawancarai partisipan selanjutnya. Topik umum yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (RM2), yaitu bagaimana gambaran umum mekanisme perencanaan keuangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang ditangani oleh sub-bagian perencanaan anggaran di SKPD Bappeda. Mekanisme ini adalah mekanisme penyusunan APBD yang dimulai dari penyusunan Renja sampai dengan KUA PPAS (Khusus Tupoksi Subbagian Perencanaan).

Q.1. Alur penyusunan perencanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo

Emerha

Kalau dalam lingkup, saya tanya dalam ini dulu ya Bu, Bappeda ya. Kalau untuk perencanaan itu apakah saya, apakah semua Renja itu dikumpul di Bappeda?

Diana

He'e. Kalau itu fungsi sebagai perencana di pemerintah daerah ya.

Emerha

He'e

Diana

Jadi, fungsinya berada di bidang analisis data dan perencanaan.

Emerha

Iya.

Diana

Memang setelah renja ditetapkan, kalau sekarang sih namanya renjanya, saya kurang tahu aturan yang terbaru Permen 86.

Emerha

He'e.

Diana

Kalau, karena renja berdasarkan Permen 86 itu baru 2019 ini kan belum ditentukan.

Emerha

Iya.

Diana

Kalau tahun-tahun kemarin kan berdasarkan Permen 54 tahun 2010 itu renja ditetapkan berdasarkan peraturan eh Keputusan Kepala SKPD. Nah, setelah ditetapkan itu baru dikumpulkan ke Bapeda sebagai rapga.

Emerha

Iya.

Diana

Tapi, untuk tiap SKPD juga punya sendiri gitu.

Q.2. Pengelola perencanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo

Emerha

Terus kalau untuk renja yang dari SKPD itu.

Diana

He'e.

Emerha

Itu di bagian mana Bu yang kelola?

Diana

Bidang Analisis Data.

Emerha

Analisis data, ya?

Diana

He'e, he'e.

Emerha

Nah, terus kalau di bidang ini Bu, hubungannya dengan analisis data?

Diana

Saya kan di sekretariat data eh sekretariat Bapeda, sekretariat Bapeda itu membuat renja untuk Bapeda sendiri.

Emerha

Untuk Bapeda, ya?

Diana

He'e.

Emerha

Oh.

Diana

Kalau bidang analisis data itu menyusun RKPD. Kayak renjanya pemerintah daerah seperti itu.

Emerha

Kalau soal transparansi apakah renja itu dipublikasikan juga ya Bu?

Diana

Iya.

Emerha

Itu--

Diana

Kita share di sub domain, jadi tiap SKPD itu kan punya sub domain.

Emerha

Iya. Sub domain.

Diana

Sub domainnya di eee SKPD, SKPD-nya dot, kulonprogokab.go.id. Nah, nanti di share di situ tapi memang mungkin beberapa SKPD masih belum meng-upload di web tersebut. Biasanya yang diwajibkan itu kan paling rensra sama lakib yang di-share. Cuma renja kadang mereka tidak meng-upload, tapi kalau Bapeda selalu di upload.

Emerha

Iya, kalau di AKPD lain kayaknya saya lihat nggak ada.

Diana

He'e, he'e, he'e, iya memang seperti itu(tertawa). Memang kayaknya eee, tidak ada kewajiban di keputusan apa atau di aturan apa. Cuma, cuma fungsi ini saja keterbukaan informasi saja.

Emerha

Iya.

Diana

Mestinya di-upload gitu.

Q.3. Gambaran mekanisme perencanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo

Emerha

Iya. Terus kalau untuk mekanisme perencanaannya itu.

Diana

He'e.

Emerha

Apakah mengikuti sesuai dengan Pemendagri?

Diana

Iya.

Emerha

Atau ada ketentuan lainnya, Bu?

Diana

He'e

Emerha

Ditetapkan oleh Bupati?

Diana

Iya, jadi, kemarin-kemarin itu sebelum RPJM itu kita mengikuti Permendagri 54 tahun 2010.

Emerha

Iya.

Diana

Cuma di bulan September kalau nggak salah, kan ada Permendagri yang perubahan 54 itu. Jadi, 54 tidak berlaku, terus berlaku 86 tahun 2017.

Emerha

'17 ya.

Diana

Nah, sehingga RPJMD-nya sudah mengikuti aturan tersebut.

Emerha

He'em

Diana

Gitu.

Emerha

Iya. Bu, kalau dalam penyusunan renja itu kan--

Diana

He'e.

Emerha

Yang tangani untuk SKPD itu gimana Bu, apakah mereka diberi pelatihan atau gimana?

Diana

Yang menangani, oh, jadi--

Emerha

Iya.

Diana

Yang menangani renja itu kan--

Emerha

Di setiap SKPD-nya.

Diana

Di Subbag Perencanaan setiap SKPD.

Emerha

Iya.

Diana

Kalau pelatihan itu, sejauh ini belum pernah ya.

Emerha

He'e.

Diana

Cuma kalau misalnya ada aturan baru kemudian ada, kita ada sistem aplikasi.

Emerha

Iya.

Diana

Waktu awa-awal kita undang selaku Bapeda, selaku perencana ya, kita undang kemudian dilakukan kayak bimtek cuma sehari itu pengenalan tentang aplikasi. Kemudian di, di Bapeda ini kan pengampu istilahnya.

Emerha

He'e.

Diana

Jadi, kasubid-kasubid itu menjadi pengampu beberapa OPD contohnya Kasubid Sosial, Kesehatan, Sosial dan Tenaga eh, Tenaga Kerja kalau nggak salah, eh, dan Pemberdayaan. Dia mengampu Dinas Kesehatan, RSUD.

Emerha

Hmm.

Diana

Jadi, kalau ada permasalahan dari Subbag Perencanaan-nya SKPD tersebut bisa menanyakan atau bisa konsultasi kepada pengampu tersebut.

Emerha

Konsultasi, hmm.

Diana

Gitu.

Emerha

Iya. Terus kalau soal akuntabilitasnya gimana Bu?

Diana

He'e.

Emerha

Kalau, kalau misalkan sudah ter, sudah, sudah jadi renjanya?

Diana

He'e.

Emerha

Outputnya itu.

Diana

He'e.

Emerha

Tadi kan Ibu bilang dilaporkan dimana, di website.

Diana

He'e, he'e, he'e.

Emerha

Selain website apa ada mekanisme pelaporan yang lain?

Diana

Kalau untuk pelaksanaan renja.

Emerha

He'e.

Diana

Pelaksanaan renja itu kan menjadi APBD kan ya.

Emerha

Iya. APBD.

Diana

Nah, APBD kemudian di SKPD masing-masing ada DPA.

Emerha

Iya, DPA.

Diana

Nah, untuk pelaksanaannya itu kita ada sistem MonevKu, Monev Kulon Progo. Jadi, setiap bulan Kasubag perencanaan tadi meng-entry capaian fisik kemudian kendala permasalahan tiap-tiap kegiatan di instansi tersebut. Kemudian ada sistem DES dari pengampu DES itu kayak, apa ya, eee, apa, eee, ini, eee melihat, apa, bertanya, apa istilahnya kalau DES itu ya, konsinyiasi, apa sih, concinering

atau eee, bukan konsultasi ya tapi lebih ke ini eee capaiannya seperti ini kok bisa. Terus kendalamu benar seperti ini, kok angkanya seperti ini, kok bisa, buktinya apa, nah seperti itu.

Emerha

Oh.

Diana

Fungsinya pengampu menanyakan hal tersebut yang sudah mereka entry di Monev, gitu, jadi--

Emerha

Oh, renja itu ada aplikasinya ya Bu?

Diana

Kalau renja itu ada sistem, 2 sistem.

Emerha

He'e.

Diana

Monev KU sama RencanaKu.

Emerha

Iya, RencanaKu.

Diana

Nah, RencanaKu itu untuk perencanaannya.

Emerha

He'e.

Diana

Jadi, renja lebih ke, eh, RencanaKu. Nah, setelah jadi, setelah APBD ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatannya namanya MonevKu.

Emerha

Iya.

Diana

Nah, MonevKu-nya itu untuk melihat keberlangsungan kegiatan tersebut seperti itu.

Emerha

Hmm.

Diana

Kalau akuntabilitas nanti kuta ada Lakib juga kan.

Emerha

He'e, Lakib ya, iya.

Diana

Di akhir tahun, nah, setelah MonevKu-nya selesai kan di akhir tahun. Nah, MonevKu-nya nanti dipakai bahan menjadi Lakib tadi.

Emerha

Hmm. Kan solal itu, kan Kasubbag Perencanaan, di setiap Kasubbag Perencanaan itu.

Diana

He'e

Emerha

Yang tangani itu apa ya Bu? Kasubbag-nya atau ada khusus staf?

Diana

Yang apa?

Emerha

Yang tangani khusus perencanaan?

Diana

Menangani khusus Kasubbag Perencanaan ya.

Emerha

Kasubbag, ya?

Diana

He'e, he'e.

Emerha

He'e.

Diana

Ya, mungkin nanti eee lebih dalamnya, nanti pembagian tugasnya seperti apa ya nanti tergantung dia mendelegasikan ke stafnya seperti apa.

Emerha

Iya, jadi, kalau yang menyusun renja sama dengan menyusun DPA segala macam itu? Sampai dia--

Diana

Untuk DPA itu dari, jadi kan dalam menyusun renja khusus di Kulon Progo mungkin ya.

Emerha

He'e.

Diana

Kita di RencaKu, Sistem RencanaKu tadi sudah membuat pra-RKA.

Emerha

Pra RKA.

Diana

Pra RKA, jadi, nanti angkanya itu biar fix sampai ke DPA, lebih memudahkan. Jadi, sudah di-entry rigit gitu.

Emerha

Iya.

Diana

Nah, di situ masih bagiannya Subbag Perencanaan. Tapi, kalau sampai ke RKA itu yang kerjanya sudah ke BKAD kan. Nah, itu ke Subbag Keuangan.

Emerha

Oh, di Kasubbag Keuangan.

Diana

He'e.

Emerha

Oh, berarti ada pemisahan di situ, ya?

Diana

He'e, dari RKA dan DPA itu sudah, sudah Subbag Keuangan.

Emerha

Bu, kalau soal, apa, koordinasi.

Diana

He'e.

Emerha

Antara Kasubbag ke Kabid begitu.

Diana

He'e

Emerha

Nah, itu gimana Bu, apa, budayanya seperti apa ya Bu kalau--

Diana

Kalau di selaku, selaku OPD ya?

Emerha

He'e, selaku OPD.

Diana

Kita eee, renja itu ya memang ada timnya, kemudian tapi kan usulan berasal dari semua bidang kan ya.

Emerha

He'e.

Diana

Nah, itu kita rapatkan, kita rapatkan, nanti, jadi difasilitasi oleh Sekretariat.

Emerha

Iya.

Diana

Gitu, untuk pembahasan misal kamu mau usul seperti apa, anggarannya berapa, ini sesuai dengan rensra nggak, seperti itu.

Emerha

Oh, berarti masing-masing bidang ya diminta?

Diana

He'e, di, dihadirkan kemudian dijelaskan. Mungkin sebelumnya kita minta, ada usulan apa ini atau kita buat draft terlebih dahulu berdasarkan rensra, rensra kan sudah sampai kegiatan itu.

Emerha

Iya.

Diana

Jadi, dasarnya ini terus dirapatkan ada perubahan nggak, terus, oh itu output-nya sasaran di kegiatan bukan segitu sekarang sudah, sudah hilang yang sasaran itu misalnya seperti itu. Berarti anggarannya turun dong, iya, turun, seperti itu. Jadi, ada konfirmasi juga, seperti itu. Jadi, dirapatkan, he'e, mestinya SKPD lain juga seperti itu sih.

Q.4. Model penyusunan perencanaan APBD di Kabupaten Kulon Progo

Emerha

Iya. Itu munculnya, munculnya rencana itu dari mana ya Bu? Apakah ada aspirasi dari masyarakat juga di itu misalkan dari Musrenbang?

Diana

He'e, nah, kalau di Bapeda itu kan nggak pernah ada usulan dari masyarakat.

Emerha

He'e.

Diana

Karena kegiatannya bukan teknis ya.

Emerha

Iya.

Diana

Kalau usulan masyarakat itu rata-rata tentang jalan, tentang kesehatan, pendidikan. Nah, itu dia sudah mengakomodir ini usulan dari Musrenbang Kecamatan. Nanti di sistem juga menggunakan sistem RencanaKu tadi.

Emerha

He'e.

Diana

Ada usulan dari pokok pikiran dewan, ada usulan dari masyarakat melalui Musrenbang, seperti itu.

Emerha

Itu Musrenbang siapa yang laksanakan?

Diana

Gimana?

Emerha

Musrenbang siapa laksanakan? Bapeda juga?

Diana

Melaksanakan Musrenbang Kabupaten, kita, he'e.

Emerha

Oke.

Diana

Bapeda, he'e.

Emerha

Itu setiap berapa kali?

Diana

Setahun sekali.

Emerha

Iya, setahun sekali ya?

Diana

He'e, he'e. Tapi, sebelumnya ada konsultasi publik rancangan awal RKPD. Jadi, sebelum Musrenbang ada, ada, yang, yang, yang diundang juga mirip-mirip, sejumlah itu, itu namanya konsultasi publik rancangan awal. RKPD itu di awal bulan, eh, awal tahun. Kemudian ada Musrenbang Kecamatan di tiap-tiap kecamatan, setelah itu baru ada, ada Forum SKPD setelah itu kita yang melaksanakan. Setelah Forum SKPD ada Musrenbang Kabupaten tadi.

Emerha

Musrenbang itu bari tingkat desa dulu terus kelurahan.

Diana

Iya, Musrenbangdes.

Emerha

Kecamatan.

Diana

Kemudian terus kecamatan, terus baru ke kabupaten.

Emerha

Forum SKPD, ya?

Diana

Iya, Forum SKPD, terus kabupaten.

Emerha

Kabupaten, ya.

Diana

He'e, Forum SKPD itu kita juga yang melaksanakan untuk Bapeda bukan, bukan, terus SKPD-nya mau melaksanakan sendiri-sendiri, bukan.

Emerha

Oh, itu bagaimana kriterianya Bu untuk mengambil rencana yang ke depan misalkan banyak usulan dari masyarakat.

Diana

He'e.

Emerha

Nah, itu dari pihak Bapeda gimana memilah?

Diana

Anu, jadi, kita ada pagu wilayah.

Emerha

Ada pagu?

Diana

Pagu wilayah itu pagu yang diberikan kepada kecamatan agar nanti usulan kecamatan nggak banyak yang istilahnya Jawa-nya "muspro", eh, sia-sia.

Emerha

He'e.

Diana

Jadi, kalau misalnya, anggaran kita itu APBD kan cuma 1 hampir 1, 1,5T.

Emerha

Iya.

Diana

He'e, eh, 1, 1,5T he'e. Cuma 1,5 benar ya? 1,5T.

Emerha

Iya. 1,5T

Diana

Cuma ini dari, dari eee kecamatan kan kadang nggak, nggak mengira-ira anggarannya berapa yang penting usul jalan, ini berapa totalnya, berapa ratus miliar sendiri gitu kna.

Emerha

He'e.

Diana

Nah, praktiknya nanti kan yang terlaksana juga cuma berapa puluh karena dengan anggaran sebesar itu tidak mampu. Nah, itu adanya, akhirnya kita membuat pagu wilayah tadi, pagi inikan ke wilayah. Jadi, untuk eee, kemarin saya lupa berapa, 19M apa ya tiap kecamatan kalau nggak salah.

Emerha

Hmm, itu masyarakat, masyarakatnya tahu ya kalau ada anggaran sebesar itu?

Diana

He'e, he'e, dan terus saya nggak begitu hafal karena yang, yang membuat dari bidang analisis data ya.

Emerha

Analisis data, iya.

Diana

Jadi, ada ini berapa persennya dari itu untuk fisik, kalau, kalau nggak salah 70%-nya boleh untuk fisik, yang lain untuk nonfisik seperti itu. Tapi, anggarannya sudah dipatok segitu, gitu. Jadi, biar nanti nggak, nggak melebar, jadi benar-benar prioritasnya.

Emerha

Berarti masyarakat tahu bahwa usulannya itu diterima atau tidak lewat mana?

Diana

Usulannya diterima atau tidak, nanti biasanya di apa ya, di RKPD kita share juga.

Emerh

aDi RKPD.

Diana

Kalau mau, mau ngecek hasilnya ya.

Emerha

He'e, di RencanaKu bisa dilihat?

Diana

RencanaKu itu kalau untuk publik kayaknya tidak bisa kalau nggak salah.

Emerha

Oh, tidak ya?

Diana

Belum, belum, he'e.

Emerha

Oh.

Diana

Nantikan RencanaKu outputnya itu RKPD juga sih.

Emerha

RKPD.

Diana

RKPD nanti ya kegiatan ini sasarannya di mana saja misalnya pemeliharaan jalan, di ruas apa saja, anggarannya berapa itu kan sudah keluar.

Emerha

Iya.

Diana

Terus kita share di Sub domainnya Bapeda. Kemudian nanti setelah itu kan melalui PPAS kemudian jadi APBD itu juga di-share juga di pemerintah kabupaten. Jadi, bisa lihat sih oleh publik kalau mau--

Emerha

Berarti yang bisa di akses oleh masyarakat langsung ke APBD begitu?

Diana

RKPD bisa.

Emerha

RKPD bisa ya?

Diana

He'e, cuma kan kalau yang benar-benar terlaksana nanti di APBD kan?

Emerha

Iya, di APBD.

Diana

Kalau RKPD itu kadang mungkin di tengah jalan nanti anggarannya bertambah atau berkurang nanti kan sasarannya juga bisa bertambah, sasarannya bisa berkurang, itu.

Emerha

Itu untuk melibatkan masyarakat itu gimana ya Bu? Apa, orangnya ditentukan misalkan ini harus dipendam, yang ini harus-- atau masyarakat umum gimana?

Diana

Kita ada perwakilan dari Musrenang Kecamatan

Emerha

Iya.

Diana

Ada perwakilan dulu kayak harus ada wakil dari unsur perempuan juga.

Emerha

Unsur perempuan.

Diana

Itu keterwakilan perempuan kemudian dari sini juga kita rapatkan. Dari unsur ekonomi organisasinya apa saja yang kita undang kan organisasi profesi, LSM, kemudian perguruan tinggi, kepolisian, dan lain-lain. Jadi, kita minta dari--, jadi kan tiap bidang itu kan mewakili urusan ya, urusan. Nah, urusan di bidangmu mana saja, ini sudah benar belum misalnya oh itu ada IKIP PGRI kok belum masuk. Terus misalnya Organda atau apa, kok belum, nah itu di, di-list semua, terus di-ini, diundang seperti itu.

Emerha

Berarti kayak masyarakat seperti petani itu ada juga?

Diana

Ada, perwakilan.

Emerha

Pedagang, iya.

Diana

Petani kan ada ininya, organisasinya atau LSM juga ada, iya.

Emerha

Bu, kalau di Bapeda sendiri kalau untuk perencanaan dan penganggaran itu beda nggak ya?

Diana Perencanaan, nah, penganggaran kan BKAD, perencanaan di kita.

Emerha

He'e, berarti--

Diana

Cuma--

Emerha

Waktu merencanakan itu belum ada duitnya ya?

Diana

Sudah.

Emerha

Sudah ada?

Diana

Sudah.

Emerha

Dulu, jadi Bapeda dapat dari mana angkanya?

Diana

Angkanya dari kemampuannya dari BKAD.

Emerha

Oh, BKAD, ya?

Diana

He'e. Jadi, perencanaan dan penganggaran kan disetujui oleh TAPD ya.

Emerha

He'e.

Diana

Tim.

Emerha

Tim Anggaran.

Diana

He'e, Tim Anggaran itu terdiri dari BKAD sama Bapeda, sama beberapa kelapa bagian.

Emerha

Tapi, kan untuk mengetahui berapa jumlahnya kan pada saat--

Diana

Dari kemampuan--

Emerha

Pada saat perencanaan kan belum ada.

Diana

Belum.

Emerha

Belum diketahui.

Diana

He'e, prediksi namanya.

Emerha

Masuk prediksi, ya?

Diana

He'e, prediksi.

Emerha

Oh.

Diana

Ya, kita kan nggak tahu ininya.

Emerha

He'e.

Diana

Prediksi.

Emerha

Berarti masih menggunakan data tahun lalu? Misalkan tahun lalu--

Diana

Data tahun lalu dan he'e, berdasarkan tahun lalu kemudian kira-kira besok ada perubahannya apa. Nah, itu urusan BKAD ya yang lebih tahun anggaran eh angka-angkanya misalnya penerimaan pajak seperti apa.

Emerha

Iya. Kalau soal indikator kinerja ketika menyusun rencana itu, itu ikut diperiksa juga ya?

Diana

He'e.

Emerha

Misalkan inputnya, output-nya, impact-nya.

Diana

Iya, iya, fungsi dari pengampu kan seperti itu.

Emerha

Iya.

Diana

Jadi, indikator kinerja itu awalnya gini, kita punya istilahnya peta kinerja.

Emerha

Iya

Diana

Peta kinerja itu dibuat berbarengan dengan penyusunan PJMD. Jadi, di peta kinerja itu ada bagan, seperti bagan itu mulai dari visi terus ke misi, misinya Bupati kemudian ke sasaran daerah eh ke tujuan dulu, tujuan daerah, ke sasaran daerah, kemudian sasarannya OPD terus kemudian programnya OPD apa, kemudian kayaknya sampai program. Nah, kalau di rensra nanti mengerucut ke program itu ke kegiatan apa saja. Jadi, arahnya dia itu mau mendukung misi berapa itu sampai itu, ada peta kinerjanya, kayak gitu. Nah, itu menjadi dasar penyusunan rensra. Nah, untuk renja kan menyusunnya berdasarkan eh untuk renja berdasarkan rensra. Jadi, indikatornya ambil dari rensra.

Emerha

Berarti RPJMD itu berdasarkan visi-misi?

Diana

He'e, iya.

Emerha

Visi-misi Bupati.

Diana

He'e.

Emerha

Kalau, kalau misalkan terjadi penggantian bupati, karena kan visi-misinya kan beda.

Diana

He'e.

Emerha

Itu ya menyelesaikan juga ya?

Diana

Iya, ya, nanti kan penyusunan PJMD lagi sesuai aturan, aturan yang terbaru berapa ya, saya nggak hafal ini, tapi, jadi setelah bupati dilantik 6 bulan setelahnya harus menetapkan RPJMD.

Emerha

RPJMD.

Diana

Jadi, memang nanti bupatinya ganti ya RPJMD-nya ganti juga.

Emerha

Ganti juga, ya?

Diana

Jadi, tahun, tahun RPJMD kan mengikuti kapan tahunnya bupati itu dilantik.

Emerha

Iya, dilantik.

Diana

He'e.

Emerha

Kalau bupati sekarang sudah 2 periode ya?

Diana

He'e, he'e.

Emerha

Berarti nggak ganti ya?

Diana

Iya (tertawa).

Emerha

Oke, Bu, yang terakhir Bu.

Diana

He'e.

Emerha

Ibu, kalau untuk perencanaan yang seperti Ibu katakana tadi.

Diana

He'e.

Emerha

Ada koordinasi itu, itu memang setiap pimpinan memang mengharuskna seperti itu ya Bu atau setiap ganti pimpinan misalkan ganti lagi modelnya?

Diana

Itu memang tidak ada aturannya ya harus, untuk menyusun ini harus ada rapat, atau harus ada apa cuma yang di beberapa ketentuan itu paling nggak penyusunan rensra itu harus ada timnya, penyusunan renja itu harus ada timnya itu sudah ada ketentuannya. Cuma untuk pelaksanaan itu, perumusan misalnya usulan anggaran itu harus melalui rapat itu kebijakan sendiri tiap organisasi.

Emerha

Itu sendiri ya, oh, itu tidak diatur di dalam-

Diana

Tidak diatur kalau untuk rapat tapi hanya yang lebih ke ini ya, apa, kayak FGD. Jadi, kalau penyusunan rensra itu melalui FGD seperti itu diatur memang.

Emerha

Itu diatur ya?

Diana

He'e, he'e. Tapi, khusus untuk misalnya rapat-rapat harus berapa kali gitu, gitu nggak.

Emerha

Kalau yang FGD tadi diatur di mana? Di, di--

Diana

Permendagri 86.

Emerha

Oh, Permendagri ya?

Diana

He'e.

Emerha

Nggak ada Perdanya atau Perbub?

Diana

Perbubnya belum ada, perbub kita hanya ada perbub Musrenbang apa ya kalau nggak salah.

Emerha

Perbub Musrenbang ya?

Diana

He'e.

Emerha

Iya.

Diana

He'e.

Emerha

Itu sudah saya download.

Diana

He'e, he'e.

Emerha

Cuma yang Permen itu kan, Permen berapa ya?

Diana

86 tahun 2017.

Emerha

86 ya?

Diana

He'e.

Emerha

Iya, nanti saya baca itu.

Diana

Iya, itu yang terakhir.

Emerha

Oke, Bu, untuk sementara itu.

Diana

Oh, ya.

Emerha

Saya, nanti kapan-kapan kalau ada yang kurang saya wawancara lagi.

Diana

Iya, boleh, semoga bisa membantu (tertawa).

Emerha

Iya, insya Allah.

Diana

Moggo diminum dulu Mas.

Emerha

Oh, ya.

Diana

Monggo.

Emerha

Makasih banyak Bu.

Diana

Iya.

Wawancara ke-2 dengan Diana Puspitasari, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 13.07 WIB di ruang sekretariat, Kantor Bappeda. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Ini ya, kemarin kan saya wawancara, nah kan sesuai kaidah penulisan itu kan harus ada sumbernya di sini, jadi saya mau konfirmasi ke Ibu apakah Ibu keberatan kalau saya tulis nama lengkapnya Ibu?

Diana

Oh nggeh-nggeh, coba saya baca dulu ya.

Emerha

Biasanya kan ada yang cuman inisial gitu.

Diana

Ini tentang? Apa ini yang dishare itu?

Emerha

Tentang model itu, apa, perencanaan di Bappeda.

Diana

Memiliki website yang berfungsi sebagai media mobligasi eksternal di sub domain, malah menawarkan cara-cara yang sifatnya manual juga. Maksudnya?

Emerha

Jadi bisa jemput langsung datanya gitu, di Bappeda bisa minta langsung,

Diana

Oh, cara-cara yang sifatnya manual, yang kedua nenenenene..... ini maksudnya, eee gitu, saya ngomong e, gitu

Emerha

Iya verbatim kan,

Diana

Oh gitu, nanti sesuai yang nganu, yang yang persis yang

Emerha

Yang alamiah

Diana

Oh.... Nanti bisa....

Emerha

Nanti kalau misalnya mau yang formal, nanti saya konsultasikan ke dosen saya dulu. Karena itu kan alamiah. Gak bisa kita kurangi gak bisa kita tambah.

Diana

Hmm

Emerha

Jadi biasanya akan ada penelitian lain itu kadang namanya itu cuman inisial, mungkin mengandung rahasia atau gimana, kalau nama seperti ibu Diana Puspitasari, DP saja,

Diana

Hmm hmm. Tapi jabatannya kelihatan?

Emerha

Iya

Diana

Wuu... Maksudnya ini kan, saya juga jelasin beberapa nganu tidak diupload, boleh nggak?

Emerha

Iya boleh

Diana

Cuman ini aja ya?

Emerha

Ada beberapa itu. Yang namanya Ibu. lain kan saya bikin jadi kutipan tidak langsung, kalau ini kan kutipan langsung. Kayak ini kan, yang ibu bilang kan sudah saya elaborasi dengan kutipan tidak langsung.

Diana

He em, he em, Soalnya kan kalau ini menjelaskan kan memang urutannya begini, tapi saya kan apa ya, memberikan sisi negatifnya SKPD lain juga loh,

Emerha

Oh ya

Diana

Karena memang.... Nah itu dikumpulin ke atasan saya waktu itu ya, iya kan pak?

Emerha

He em. Nanti saya konfirmasi duluan ya jangan sampai itu sudah terbit.

Diana

He em nggeh nggeh

Emerha

Saya kan kualitatif, jadi banyak kata-kata nggak ada angka-angka.

Diana

Oh hem hem . Yang dari saya hanya ini saja ya pak ya?

Emerha

Ada beberapa itu kalau Ibu mau baca khusus di perencanaan,

Diana

mana pak?

Emerha

Ini

Diana

Hanya itu saja atau ada yang lain?

Emerha

Ya di bagian itu saja Ibu

Diana

Kok kutipan saya semua.

Emerha

He em. Khusus bagian perencanaan bagian awal ada tiga orang,

Diana

Sampai mana, Ini sudah?

Emerha

Iya, Ibu Sri, eh empat orang ya di bidang perencanaan.

Diana

Iya, sampai mana saya lihatnya,

Emerha

Sampai situ saja. Ini sudah ke BKAD, sudah sampai situ saja

Diana

Hem, sudah?

Emerha

Sampai situ tadi.

Diana

Cuman tadi itu, sudah. Ini kurang t, renstra....

Emerha

Oh ya, salah ketik,

Diana

Renstra, kurang juga

Emerha

He em.

Diana

Iya, menunggu itu ya

Emerha

Terus yang kedua juga saya mau minta foto Ibu.,

Diana

Hmm?

Emerha

Profil partisipan saya. Kemarin saya sudah minta data, Pak Nur, Pak Taufiq, Bu Ari, Ibu Meliani Pak Lukman,

Diana

BKAD semua?

Emerha

Ya BKAD, BAPPEDA tadi baru satu, Pak Hamdan pertama.

Diana

Oh ya, boleh. Mau foto di mana?

Emerha

Terseher di mana. Atau di meja kerjanya Ibu.

Diana

Oh ya boleh.

Diana

Jadi yang sub domainnya itu SKPD

Emerha

Yang SKPD itu nggak usah?

Diana

He em.

Emerha

Nanti dicoret aja

Diana

Nanti dishare di situ. Nah ini nggak usah ya. Cuma itu saja. Langsung di sini saja ya. Ini nggak usah aja. Gitu aja.

Emerha

Dan ini diparaf

Diana

Oh ya

Emerha

Oke, terus yang terakhir kemarin kesimpulan saya dari hasil wawancara dengan Pak Hamdan, Ibu Susi, sama Ibu Sri katanya ketika menyusun perencanaan itu katanya data perencanaan dari SKPD itu sering molor ya?

Diana

Data perencanaan,

Emerha

Misalkan kalau mereka minta.

Diana

Nah itu konfirmasinya ke mereka. Karena saya selaku SKPD kan, saya juga mengumpulkan gitu. Jadi mungkin konfirmasinya ke mereka. Kalau saya biasanya sih ya tepat waktu, tapi nggak tahu yang lain kan. Soalnya takutnya salah juga.

Emerha

Kalau menurut Ibu gimana, apa solusinya kira-kira yang sudah dilaksanakan selama ini?

Diana

Kalau biasanya sih rata-rata tetep ini ya memakai surat dengan batas waktu, kemudian kan bagian perencanaan itu pengumpulan dokumen itu menjadi bagian dari penilaian TPP. Itu ngefek juga, kalau kalau nggak tepat waktu, nanti angkanya bisa TPPnya jadi berapa persen,

Emerha

Jadi mereka dibiarkan aja ya? Yang penting TPP nya berkurang gitu?

Diana

Dengan adanya pemberitahuan seperti itu kan dia jadi lebih ontime tapi mungkin ini off the record, mungkin mereka belum tahu, kalau itu menjadi bagian dari TPP. Atau kadang mereka diingatkan, ini menjadi bagian dari TPP sehingga diminta segera mengumpulkan, kaya gitu baru mereka ini, berlomba-lomba, seperti itu

Emerha

Tapi memang ketentuan begitu kalau memang telat nggak?

Diana

Aturannya jadi kan kalau TPP ada perencanaan ada pengendalian ada absensi kan kayak gitu, perencanaan ada, biasanya ini, ee kesesuaian dengan jadwal pengumpulan dokumen misalnya pengumpulan renja, itu di bulan ini, di tanggal ini, tapi yang anu nanti ada penilaian sendiri, tapi kurang tahu penilaiannya

Emerha

Jadi itu menjadi indikator penilaian ya?

Diana

He em, salah satu, salah satu seperti itu.

Emerha

Oke Bu, itu saja.

Diana

Nggeh nggeh

Emerha

Makasih banyak.

3. C. Susy Setyo Cahyani

Wawancara pertama kali dengan Susy Setyo, pada Kamis, 31 Mei 2018, pukul 11.32 WIB di ruang kerjanya, Ruang Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan. Susy Setyo adalah Kepala Subbidang Analisis Data Pembangunan Bappeda sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme perencanaan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Penyusunan RPJPD yang transparan dan akuntabel

Susy Setyo

Ini maaf nih kalau nggak beraturan nggak apa-apa ya.

Emerha

Nggak apa-apa, Bu. Bu, saya mulai dari RJPM, RPJPD, itu sudah waktu Ibu di sini sudah pernah nyusun RPJPD ya?

Susy Setyo

Iya, RPJPD saya selama di Bapeda belum.

Emerha

Belum pernah, ya?

Susy Setyo

Itu kan disusun tahun 2005.

Emerha

2005, ya?

Susy Setyo

He'e, saya belum jadi PNS (terbaru)

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Iya, itu kan 25 tahun jadi nanti berakhir di 2025.

Emerha

2025 ya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Itu tidak direvisi ya selama--

Susy Setyo

Belum, selama ini ada, belum, iya, meskipun di dalamnya sasaran, sasarannya kan kualitatif jadi memang sudah diukur. Bisanya terwujudnya masyarakat yang sejahtera tapi di situ ukurannya belum jelas.

Emerha

Hmm.

Susy Setyo

Itu belum pernah di-review.

Q.2. Penyusunan RPJMD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalau RPJM, RPJMD.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Iya. Itu saya lihat di, di sistem di Perda, sistem perencanaan ya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Di situ kan ada rancangan awal.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Membuat, sebelum membuat RPJMD.

Susy Setyo

Iya, he'e.

Emerha

Itu gimana Bu modelnya rancangan awal itu seperti apa Bu?

Susy Setyo

Kalau kita untuk proses kemarin kita kan membuat RPJM baru.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Yang 2017/2022, untuk rancangan awal kan kita teknokratis dulu jadi internal Bappeda membuat suatu apa, analisis.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, hasil analisis ini kan jadi draft rancangan awal.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, ini kita konsultasi publik kan dengan berbagai elemen masyarakat baik LSM, tokoh masyarakat, terus instansi vertikal terus, nah, terus itu kan dapat masukan, hasil masukan kan sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan awal tadi.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, rancangan awal tadi setelah hasil konsultasi publik diserahkan kepada DPRD. Nah, di sana di DPRD kan dibahas bersama dengan eksekutif/legislatif.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Nah, hasil rancangan awal itu jadilah suatu nota kesepakatan bersama persetujuan rancangan awal seperti itu.

Emerha

Sebelum jadi RPJMD ya?

Susy Setyo

Iya.

Emerha

Nanti setelah itu kemana lagi?

Susy Setyo

Setelah nota kesepakatan rancangan awal.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Kita kan berproses lagi.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Terus lagi menyusun, menyusun, menyempurnakan lagi di rancang, menjadi rancangan RPJMD. Nah, di rancangan ini kan sudah unsur Renstra masuk kan. Jadi, dari Renstra OPD kita selaraskan terus menjadi rancangan RPJM. Nah, rancangan RPJM ini kita Musrenbangkan.

Emerha

Musrenbangkan?

Susy Setyo

Sama, sama forumnya.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Jadi, berbagai komponen terlibat baik daerah sekitar tetangga kita libatkan nanti kan kaitannya dengan program-program besar mereka RT RW dan sebagainya.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Hasil dari Musrenbang itu untuk penyempurnaan rancangan tadi menjadi rancangan akhir. Nah, untuk rancangan akhir RPJM kita konsultasikan ke Gubernur DIY. Nah, seerti itu, mendapat masukan, kita sempurnakan baru nanti kembali dikirim ke DPR untuk dibahas bersama. Jadi, di paripurnakan gitu.

Emerha

Diparipurnakan.

Susy Setyo

He'e, habis dari DPR masih dievaluasi gubernur melalui biro hukum.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, di situ terus setelah dievaluasi kan turun surat evaluasi itu baru bisa disahkan.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Di-Perda-kan.

Emerha

Di-Perda-kan, ya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Berarti setelah dibahas baru dikirim ke sana ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Sebelum ditetapkan.

Susy Setyo

Iya.

Emerha

Itu yang konsep siapa ya Bu?

Susy Setyo

Apanya?

Emerha

Rancangan itu RPJMD.

Susy Setyo

Kita kan dari Bapeda akan ada tim.

Emerha

Ada tim ya, tim teknis ya?

Susy Setyo

He'e, tim pelaksana. Jadi, kita dalam menyusun RPJMD kan ada beberapa pokja, pokja RPJM itu nanti di Bapeda semuanya.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Kan Bapeda ada bidang-bidang pengampu.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Mereka mengampu per urusan nah di bidang sini kan kompilasi semuanya. Terus kami didampingi kemarin didampingi tenaga ahli dari MAPUGM.

Emerha

Oh, jadi ada ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Tenaga.

Susy Setyo

Jadi, lebih banyak masukan kan kalau kita berpikir apa, mikir sendiri kan wes, sudah baguslah, tapi karena kita butuh masukan jadi banyak mewarnai itu.

Emerha

Iya. Kemudian di dalam tahap Musrenbang itu kan di setiap ya di RPJPD ada Musrenbang.

Susy Setyo

He'e.

Q.3. Penyusunan RKPD yang transparan dan akuntabel

Emerha

RPJPM ada Musrenbang, RKPD juga ada Musrenbang?

Susy Setyo

Ada.

Emerha

Itu apa bedanya Bu, 3 Musrenbang itu?

Susy Setyo

Ya, yang dibahas kan beda.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Untuk RKPD kan rencana tahunan.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Kalau yang RPJM kan 5 tahunan, program besar 5 tahun kalau yang tahunan ini sudah lebih ke sasarannya kan. Misalnya kalau RKPD kan sudah ada kegiatan.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Program kegiatan dan sasaran. Nah, sasaran ini kan melibatkan usulannya kan dari masyarakat. Masyarakat itu kan dari Musrenbang Kecamatan, dari Musrenbang Desa masuk dari pokok pikiran dewan, terus di-floor-kan ke forum kan. Nanti disepakati mana yang menjadi prioritas sasaran.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Kalau itu yang untuk RKPD seperti itu.

Emerha

RKPD-nya ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Kalau visi-misi bupati dimasukkan juga di dalam RKPD itu gimana itu?

Susy Setyo

Iya, iya, pertama kan kalau visi-misi itu kan ketika bupati terpilih mereka kan harus menyusun visi-misi. Nah, ketika kami menyusun rancangan awal RPJM, kami kan sudah mengutip visi-misi bupati terpilih. Nah, di situ kami olah juga jadi tidak murni, murni dari visi-misi bupati/wakil bupati. Tapi, kami olah lagi terus kami floor-kan lagi ke Pak Bupati setuju nggak kalau lebih disederhanakan lebih teknis bisa terwujud lebih riil gitu loh. Kalau nggak, bahasanya nggak muluk-muluk.

Emerha

Iya, itu duluan jadi mana Bu yang RPJMD atau visi-misi dulu?

Susy Setyo

Ya, visi-misi dulu baru RPJM.

Emerha

Visi-misi dulu ya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Kan kita menerjemahkan visi-misi itu RPJM itu.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Selama 5 tahun beliau mau apa terus kita, kita samakan dalam program daerah, gitu. Nah, terus RKPD kan penjabaran dari RPJM itu misal tahun pertama, tahun kedua kan di RPJM kan sudah ada temanya apa, prioritas apa. Terus di misalkan ini tahun kedua perencanaan 2019 kita jabarkan lagi. Tahunannya mau seperti apa target-targetnya kan tinggal nyuplik di situ.

Emerha

Oh, kalau misalkan visi-misi bupati itu berbeda dengan RPJMDes sebelumnya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Itu yang diikuti yang mana?

Susy Setyo

Visi-misi.

Emerha

Iya, itu nggak, nggak mungkin berbeda?

Susy Setyo

Nggak mungkin.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Karena RKPD kan penjabaran RPJM. Tidak mungkin lepas dari RPJM.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Kita nyusun RKPD itu kan dari RPJM-nya kabupaten kita sendiri terus RPJM-nya DIY jadi RPKD. Jadi, kita itu kan berjenjang.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Pemerintah, jadi, semua itu harus selaras nggak boleh keluar dari itu, he'e, kan kita dievaluasi kalau keluar dari itu kan yo istilahnya di, diingatkan.

Q.4. Penyusunan Restra dan Renja yang transparan dan akuntabel

Emerha

Nah, dalam penyusunan RPKD ya Bu, itu bersamaan dengan renja?

Susy Setyolya

Mekanisme kan kalau disesuaikan Permendagri yang 86 ini di akhir. akhir Desember, akhir tahun. Misal akhir tahun kemarin ya 2017.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Lah, SKPD-nya sudah harus menyusun rancangan awal renja.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Rancangan awal renja terus rancangan awal ada di sini kan terus dikumpulkan ke Bapeda.

Emerha

Ya.

Susy Setyo

Nah, ini menjadi bahan untuk menyusun rancangan RPKD.

Emerha

RKPD, ya?

Susy Setyo

Jadi, ini di Desember ini.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Ini untuk menyusun 2019, ini Desember 2000--eh, 2017, he'e, seperti itu.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Ini kan ada rancangan awal renja terus menjadi di, menjadi acuan rancangan awal RPKD terus nanti ini kan dikonsultasi publikkan menjadi apa, nanti kan ini menjadi rancangan renja terus di Musrenbangkan. Jadi, ini tuh selalu beriringan.

Emerha

Berarti Musrenbang ya.

Susy Setyo

Iya.

Emerha

He'e. Itu di dalam melakukan Musrenbang itu memang sudah ada prosedur tetapnya ya Bu?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Itu diatur di mana?

Susy Setyo

Di Perbup ada.

Emerha

Di Perbup ya.

Susy Setyo

Perbup pedoman pelaksanaan Musrenbang.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Bisa diambil di JDIH

Emerha

Di JDIH ya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Tapi, itu masih pakai Permen 54.

Emerha

Yang sebelum, sebelum Permen 86, ya?

Susy Setyo

He'e, kita belum revisi lagi.

Emerha

Iya. Nah, kalau mekanisme penyusunan renja itu sebelum jadi acuan itu gimana ya Bu?

Susy Setyo

Hah?

Emerha

Renja sama renstra SKPD?

Susy Setyo

Sama porsinya kan beringinan tadi.

Emerha

Sama ya?

Susy Setyo

He'e, jadi ketika kita RKPD jadi apa misalnya jadi rancangan, nah, di sini kita kan mengeluarkan surat edaran untuk OPD untuk menyusun rancangan misal rancangan awal renja yang disempurnakan mengacu pada rancangan awal RKPD, seperti itu.

Emerha

Jadi, kalau begitu Renstra juga sama dengan RPJMD?

Susy Setyo

Sama.

Emerha

Beriringan, ya?

Susy Setyo

Sama. Karena kan--

Emerha

Ini yang evaluasi renja itu?

Susy Setyo

Evaluasinya--

Emerha

Yang, yang kan yang bikin itu kan SKPD?

Susy Setyo

Iya.

Emerha

Berarti di bidang (11:34) juga ya Bu?

Susy Setyo

Bidang sana, ada--

Emerha

Oh, di, anu ya.

Susy Setyo

Bidang pengendalian evaluasi.

Emerha

Pengendalian.

Susy Setyo

Dia nanti evaluasi, evaluasi pelaksanaan RKPD ya otomatis dia renja.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Terus evaluasi RPJMD ada, di situ.

Emerha

Itu jadwal-jadwa pelaksanaan itu sudah diatur di Permendagri atau memang di perbup?

Susy Setyo

Yang ini?

Emerha

Yang ini kayak dari Desember.

Susy Setyo

Oh, ini?

Emerha

Harus, iya.

Susy Setyo

Ini Permendagri kalau kita sudah tahu ini yang 86.

Emerha

He'e

Susy Setyo

Yang perbup tadi ini masih yang pakai lama, ini sudah 86.

Emerha

Selain, selain Perbup tentang Musrenbang ada lain nggak untuk yang diatur tentang perencanaan?

Susy Setyo

Nggak ada.

Emerha

Cuma Musrenbang ya?

Susy Setyo

Iya, cuma Perda Perencanaan itu.

Emerha

Perda Perencanaan sama Musrenbang ya?

Susy Setyo

He'e.

Q.5. Penyusunan KUA-PPAS yang transparan dan akuntabel

Emerha

Hanya itu. Nah, setelah renja, renstra kemudian ada KUA-PPAS.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Nah, itu gimana Bu mekanismenya?

Susy Setyo

Kan kalau RKPD ditetapkan paling awal Juli nggih.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Eh, Juni.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, terus kita kan mulai berproses ke KUA.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

KUA PPAS, nah, KUA-PPAS ini tidak boleh, oh harus sama. Jadi, KUA-PPAS yang diantarkan ke Dewan ini sama dengan RKPD.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Baik uang, baik pendanaan maupun sasaran keluaran program kegiatan semua sama. Nah, ketika ini dibahas di Dewan mesti ada, ada perubahan kan ya biasa kita anu, apa, baik eksekutif, legislatif kan biasanya mau naikin pendapatan. Terus otomatis pendapatan naik, belanja naik. Nah, di situ nanti KUA yang ditetapkan ini mesti akan beda dengan KUA yang diantarkan Dewan.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Berarti itu, jadi, ini sama, RKPD dan KUA yang diantar ke Dewan itu sama.

Emerha

Sama, ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Berarti nggak besa yang mengajukan rencananya dulu?

Susy Setyo

Hah?

Emerha

Sebelum ditetapkan di DPRD?

Susy Setyo

Rancangan KUA ini sama dengan RKPD.

Emerha

Itu dalam penyusunannya menggunakan sistem ya Bu?

Susy Setyo

Iya.

Emerha

Itu otomatis muncul jadi KUA?

Susy Setyo

Iya.

Emerha

Itu pakai apa? Simda?

Susy Setyo

Sim, Sistem Perencanaanya kami RencanaKu, Rencana Kulon Progo.

Emerha

RencanaKu, ya?

Susy Setyo

He'e, Rencana, RencanaKu gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Di sini kami sudah pakai RKA, Pra RKA namanya. Jadi, Pra RKA, Pra RKA di sini jadi, jadi Pra RKA kami ini tinggal copy ke sini sudah jadi RKA.

Emerha

Oh, Pra RKA itu masuk di dalam Sistem RencanaKu juga di-input di dalam RencanaKu juga?

Susy Setyo

Nggak, di Simda.

Emerha

Simda.

Susy Setyo

Tetapi, dari database Pra RKA di RencanaKu, kita ekspor ke Simda.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Langsung jadi, jadi OPD itu nggak, nggak entry lagi.

Emerha

Nggak entry lagi, ya?

Susy Setyo

Nah, kami sudah membangun yang yang dari BPKP kan ada sosialisasi Sim, Simda Perencanaan.

Emerha

Sican?

Susy Setyo

He'e, Simcan. Tapi, ini baru proses ya ini teman-teman lagi install.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Dari BPKP.

Emerha

Berarti tadi Pra RKA tadi mulai renja ya, renja, sama renstra?

Susy Setyo

Dari ini, dari, dari rancangan akhir, akhir RKPD atau rancangan akhir renja.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Sudah ada Pra-nya.

Emerha

Berarti RKA itu tinggal masukin duitnya ya?

Susy Setyo

Iya, iya, sudah rinci kan di sini--

Emerha

Harus sudah ada kegiatannya kan.

Susy Setyo

Di sini kan kami ini kan sudah ada SHBJ, Satuan Harga, jadi ketika input RKA ini sudah tinggal klik semuanya.

Emerha

Tinggal klik ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Muncul ya.

Susy Setyo

Terus di sini sudah ada ruas jalan, ruas jalan yang di SK-kan Bupati. Jadi, ketika masyarakat mau entry ruas jalan mana tinggal milih, gitu.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Jadi, nggak akan keluar dari SK karena kaitannya kan kami aset, to?

Emerha

Ini RencanaKu bisa diakses masyarakat?

Susy Setyo

Bisa.

Emerha

Jadi, masyarakat bisa input dari luar?

Susy Setyo

Kalau inputnya pakai usulan warga.

Emerha

Oh. Ada menunya berarti, ya?

Susy Setyo

He'e, he'e. Kalau yang pengendalian ini juga ada lagi dia, dia MonevKu namanya.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

MonevKu, sama dia, terintegrasi, sama Simda Juga.

Emerha

Oh, konek, ya?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Tidak pakai ekspor-import, jadi langsung online?

Susy Setyo

Kalau yang ini tetap ekspor-miport ini.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Ini import ke sini ketika dia pengendalian bulanan kan uangnya sudah ambil dari sini.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

He'e, masih di import tadi kayak ini kan ekspor tadi. Nah, nanti kalau ada ini sudah nge-link ini.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Karena satu, satu, apa BPKP yang buat.

Emerha

Berarti tugasannya Bapeda cuma sampai di KUA-PPAS saja, ya?

Susy Setyo

Iya, he'e.

Emerha

Berarti ini sudah selesai ya, ini sudah di, di BKAD ya?

Susy Setyo

BKAD, he'e, meskipun kamu tetap mengawal sampai sini.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Sampai APBD. Kalau koordinasi kamu bagus antara Bapeda dan BKAD. Jadi, BKAD ini, ini terlibat sejak di sini, sejak di Musrenbang ini terlibat, sejak di Forum.

Emerha

Oh, sudah, sudah dilibatkan, ya?

Susy Setyo

He'e, dari Forum OPD ini sudah terlibat. Jadi, kami memang bersinergi istilahnya. Bapeda dan BKAD bekerja sama di sini mengawal semuanya sampai APBD.

Emerha

Itu di bidang apa ya kalau di BKAD?

Susy Setyo

Anggaran.

Emerha

Bidang Anggaran?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Di Perben tidak ya?

Susy Setyo

Perben nanti lebih ke penganggaran belanja tidak langsung kaitannya pegawai seperti itu.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Kami, mereka juga jadi tim kami.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nyusun RKPD dan KUA. Jadi, yang BKAD ini kan timnya dari bidang anggaran terus bidang pendapatan. Pendapatan sama pajak terus bidang Perben, ini semua terlibat.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Gitu.

Emerha

Itu prosedur-prosedur tadi itu sudah ada SOP-nya ya, ada SOP-nya?

Susy Setyo

Ada.

Emerha

Itu pakai apa ditetapkan perda?

Susy Setyo

He'e, pakai apa ya.

Emerha

Perbup atau Kepala SKPD?

Susy Setyo

Kepala Bapeda apa ya. Kepala Bapeda kayaknya.

Emerha

Kepala Bapeda.

Susy Setyo

Ada kayaknya di bawah di sekretariat.

Emerha

Oh. Itu kalau soal akses informasinya ke publik gimana Bu dari proses perencanaan tadi? Itu bisa diakses juga?

Susy Setyo

He'e. Kami--

Emerha

Secara terbuka.

Susy Setyo

Gini, misalnya untuk bahan Musrenbang kan biasanya sebelum Musrenbang itu misalnya hari H-nya Senin, nah, Kamis-Jumat itu sudah upload rancangan akhir eh rancangannya, rancangannya RKPd di-upload ters power poin-nya di upload, ringkasannya di-upload. Jadi, ketika produk jadi juga kami upload di web Bapeda. He'e.

Emerha

Itu cuma, cuma di web saja ya, nggak ada di, di tempat lain misalkan lewat media massa?

Susy Setyo

Oh, nggak.

Emerha

Kayak cuma, cuma semata-mata di web saja?

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Kalau dari proses mulai RPJMD itu Bu.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Butuh waktu berapa lama ya Bu kalau setelah menggunakan sistem semua?

Susy Setyo

Dari RPJM, nyusun apa?

Emerha

Eee, nyusun perencanaannya tadi dari RPJM.

Susy Setyo

Nyusun RPJM-nya?

Emerha

Iya, sampai di itu, sampai di KUA PPAS.

Susy Setyo

KRPD to?

Emerha

Iya, iya, dari, iya.

Susy Setyo

Dari RKPd sampai KUA?

Emerha

Iya, dari RPJM, RPJM di--

Susy Setyo

Kalau RPJM kan beda waktunya.

Emerha

Beda waktunya?

Susy Setyo

Timingnya, he'e, kalau--

Emerha

Tapi, bisa setahun ya? Tetap dalam, kalau pun tetap.

Susy Setyo

Kalau RPJM?

Emerha

Iya.

Susy Setyo

RPJM kan maksimal kan 6 bulan setelah Bupati ditetapkan to.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Harus, harus jadi RPJM itu.

Emerha

Harus sudah jadi?

Susy Setyo

He'e. Tapi, kami sudah berproses sejak awal.

Emerha

Oh. Kalau dari RKPD ke--?

Susy Setyo

KUA?

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Kan sudah diatur Permendagri jadi kami kan Desember terus penetapannya kan Juni, terus Juli sudah KUA, KUA di Dewan dibahas. Terus nanti Agustus sudah jadi ini rancangan APBD.

Emerha

Oh, jadi sudah ditetapkan jadwalnya di Permendagri ya?

Susy Setyo

Iya, Permendagri.

Emerha

Itu ada sanksi kalau terlambat?

Susy Setyo

Biasanya kami kan kekurangan DAU, misalnya ini terlambat, jadi komponen penilaian DAU. Misal APBD terlambat itu nanti DAU-nya turun.

Emerha

Oh

Susy Setyo

Saya selama ini belum pernah.

Emerha

Belum pernah, belum pernah terjadi ya?

Susy Setyo

Kalau yang terlambat mungkin penetapan KUA-nya, itu kan karena alatnya di DPR.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Tapi, untuk APBD belum pernah terlambat.

Emerha

Belum pernah terlambat ya. Bu, bisa diceritakan sedikit ya, kemarin saya lihat di website itu ada Kulon Progo kan kabupaten, kabupaten yang perencanaannya terbaik di, di DIY, itu gimana bisa?

Susy Setyo

(tertawa) Nggak tahu ya, kami itu 3 tahun berturut-turut.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Terbaik, ya, kalau prosesnya sama kami mengikuti Permendagri tapi mungkin kami itu hubungan kami dengan eksekutif eh dengan legislatif dan instansi yang terkait ini bagus gitu loh sampai ke kecamatan. Jadi, ketika proses perencanaan jalan terus partisipasi warga juga baik terus legislatif kan dari sejak Forum Konsultasi Publik mereka sudah, sudah terlibat.

Emerha

Sudah terlibat ya.

Susy Setyo

Jadi, itu. Terus terlibat, terus sampai ke Musrenbang, sampai nanti kami penyalarsan dengan Dewan itu berjalan baik gitu. Merekaaa reses kan, mereka reses di Dapilnya mereka. Mereka itu ngundang Bapeda.

Emerha

Oh.

Susy Setyo

Jadi, Bapeda narasumber juga. Jadi, ketika reses Bapeda ada terus Bapeda kan lebih ke ini loh prioritas 2019 misalnya seperti apa, nanti yang diusulkan seperti ini gitu, gitu.

Emerha

Berarti tidak ada trik-trik khusus ya, khusus, pokoknya dilaksanakan sesuai dengan Permendagri.

Susy Setyo

Iya, dilakukan Permendagri, terus koordinasi terus partisipasinya banyak.

Emerha

Komitmennya juga ya?

Susy Setyo

He'e. Mungkin, terus kami kan banyak program-program yang, apa, penanggulangan kemiskinan.

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Nah, itu misalnya program "Bela Beli", terus program "Bedah Rumah".

Emerha

He'e.

Susy Setyo

Itu kan pembiayaan kami banyak yang dari non, nonpemerintah. Itu jadi nilai positif kan sekarang. Jadi, kami itu nonpemerintahnya banyak karena APBD kami kan sedikit.

Emerha

Iya.

Susy Setyo

Jadi, kami harus jeli, jeli mencari sumber dana yang lain misalnya non-APBD ya kami dari APBN, dari DAK, terus dari JSR, Forum JSR, seperti itu.

Emerha

Iya. Oke, Bu, untuk sementara itu dulu ya Bu wawancara saya.

Susy Setyo

He'e.

Emerha

Kalau misalkan--

Susy Setyo

Nggih

Emerha

Setelah saya analisis ada yang kurang saya bisa wawancara lagi?

Susy Setyo

Iya, boleh.

Emerha

Tapi, sebelum ini Bu, saya mau minta datanya Ibu.

Susy Setyo

Iya. Kemarin itu sudah pernah ada yang mahasiswa S2 apa ya, tapi UGM juga.

Emerha

Oh, UGM, oh.

Susy Setyo

Mekanisme perencanaan.

Wawancara ke-2 dengan Susy Setyo Cahyani, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 15.03 WIB di ruang kerjanya, Bidang Analisis Data Pembangunan Bappeda. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Saya mau konfirmasi ke Ibu kan kalau kaidah penulisannya itu kan kita harus tampilkan sumbernya. Nah, ini apa Ibu keberatan kalau nama Ibu saya tulis lengkap? Kan kalau biasanya yang mengandung rahasia itu kan

Susi Setyo

Coba. Ini pertanyaannya ini apa ya?

Emerha

Dari sini.

Susi Setyo

Pertanyaannya apa?

Emerha

Ini sudah anu.

Susi Setyo

Oh konsep apa ini. Perencanaan?

Emerha

Iya. Itu sudah jadi narasi.

Susi Setyo

Iya. Nggak papa sih Pak.

Emerha

Tapi kalau Ibu mau baca traskripnya ada di sini.

Susi Setyo

Oh iya.

Emerha

Ini yang dekat. Jadi masih dilaptop.

Susi Setyo

Gimana Pak. Mau keteken.

Emerha

Ini aja.

Susi Setyo

Pake apa medianya ini?

Emerha

Iya ini aja.

Susi Setyo

Yang ini?

Emerha

Heém. Iya.

Susi Setyo

Masih ada yang kurang Pak?

Emerha

Ya?

Susi Setyo

Ada yang kurang nggak?

Emerha

Itu aja. Kalau itu saya cuma konfirmasi kalau Ibu keberatan namanya nggak saya cantumkan lengkap. Kalau misalkan ada yang mengandung rahasia iya mungkin saya kasih inisial gitu.

Susi Setyo

Kalau yang lain?

Emerha

Yang lain sama lengkap.

Susi Setyo

Sama aja namanya?

Emerha

Heém.

Susi Setyo

Lengkap. BKAD juga?

Emerha

BKAD juga. Itu sudah saya konfirmasi di BKAD.

Susi Setyo

Nggh. Nanti saya kalau boleh minta, kalau udah jadi.

Emerha

Boleh. Iya. Kalau sudah jadi dalam bentuk laporan akhir penelitian. Kan ada dua, ada yang mau kasih singkat ada yang kasih lengkap.

Susi Setyo

Karena nanti keluar rekomendasinya apa salah satu.

Emerha

Oke. Terus yang kedua kemaren kan hasil wawancara dengan Ibu udah pakai rencana KAP itu. Nah, itu rencana . . . (06:28) sama Simcan yang BPKP punya itu nggak konek ya Bu?

Susi Setyo

Simda?

Emerha

Iya. Yang Simda perencanaan.

Susi Setyo

Belum. Kalau kita mau transfer dari BPS ke APBD karena berbeda sistem jadi kita harus menyamakan kode dulu. Jadi yang direncanaku ini pra RKAny dibikin excel sesuai format supaya bisa masuk ke Simdanya BPKP disitu. Jadi nanti BPD tidak perlu dientry lagi di Simda tetapi pengampu BKAD masih harus meneliti per rekeningnya disetiap kegiatan.

Emerha

Jadi kalau dari perencanaan diapakan? Diexport gitu?

Susi Setyo

Diexport hoó. Di sana ada adminnya juga kan seatnya. Kita

Emerha

Itu tidak bisa dikasih konek ya? Misalkan

Susi Setyo

Beda ini, beda apa namanya ya, beda jadi berbasis apa

Emerha

Jadi gak bisa sama sekali ya?

Susi Setyo

Belum. Belum bisa. Jadi masih ada jembatan penghubungnya untuk bisa transfer kesana. Jadi integrasinya belum langsung link gitu lo, harus ada

Emerha

Jadi data output yang dari rencanaku berbentuk laporan gini udah dicetak, terus dikasih kesana terus di sana diinput lagi?

Susi Setyo

Entrynya Pak.

Emerha

Entrynya langsung?

Susi Setyo

Ya nggak nentry langsung. Tadi ada perantara apa, dari sini kan Pra RKA terus dibuat diversi tabel-tabel versi excel nanti diexport ke Simda. Jadi masuk Simda udah jadi gitu. Tapi kan masih perlu diteliti karena mungkin ada salah masuk apa apa gitu.

Emerha

Berarti tidak perlu entry lagi ya? Jadi hasil export itu bisa masuk ke Simda?

Susi Setyo

Nggak. Cuma ngoreksi lagi kan hasil. Udah ditransfer to terus dikoreksi. Jadi nggak nentry.

Emerha

Oh itu memang nggak bisa sama sekali dionlinekan ya?

Susi Setyo

Belum e. Belum. Nanti kedepan kita rencana dengan adanya Sim BPKP yang Simchan itu. Kalau Simchan kan produk BPKP juga. Nah, kan kode-kodenya sama dengan Simda. Nah kami nanti misal entry pra RKA di Simchan sudah langsung kebaca di Simda. Nggak usah ada perantara tadi data. Kalau selama ini kan data dari rencanaku dibawa kesana.

Emerha

Sekarang Simchan nggak dipakai?

Susi Setyo

Belum karena kami masih menyusun ASB, analisa standar biaya

Emerha

Oh persyaratannya ya?

Susi Setyo

Iya. Karena di Simchan harus masuk ASB satuan biaya itu.

Emerha

Berarti kalau udah pakai Simchan, rencanaku nggak pakai lagi?

Susi Setyo

Nggak.

Emerha

Oh tidak pakai lagi?

Susi Setyo

Heém.

Emerha

Berarti di Simchan bisa bikin par RKA juga?

Susi Setyo

Bisa.

Emerha

Sama ya. berarti rencanaku nggak dipakai lagi.

Susi Setyo

Kedepan cita-citanya. Kedepan sesuai rencana aksi kita, sesuai arahan dari BPK kan semuanya harus terintegrasi baik dari aspirasi dewan. Aspirasi dewan masuk ke rencanaku, maksudnya masuk disistem perencanaan, terus masuk disistem penganggaran. Terus dari penganggaran masuk di monitoring. Jadi semua terintegrasi. Arahan kami kedepan seperti itu entah nanti sistemnya mau seperti apa tapi kedepan kami akan semuanya terintegrasi.

Emerha

Yang jelas akan terintegrasi ya?

Susi Setyo

Iya.

Emerha

Oke. Terus yang terakhir saya mau minta foto untuk profil partisipan kayak gini.

Susi Setyo

Nggih. Profilnya udah perlu ngisi nggak?

Emerha

Udah. Udah diisi kemaren. Cuma saya belum cetak karena belum ada foto.

Susi Setyo

Oh iya.

Emerha

Saya foto ya.

Susi Setyo

Ini tanggal kemaren ya?

Emerha

Iya tanggal kemaren itu masih pakai Korpri. Saya cek Ibu katanya kemaren ke Jogja ya?

Susi Setyo

Iya kemaren sama Pak Aban. Evaluasi ABPD itu Pak.

Emerha

Yang perubahan ya?

Susi Setyo

Iya.

Emerha

Satu dua. Sekali lagi. Satu dua. Oke.

Susi Setyo

Nggih.

Emerha

Boleh?

Susi Setyo

Iya. Nggak papa.

Emerha

Oke.

Susi Setyo

Nggih.

Emerha

Nggak ada lagi Bu. Terima kasih banyak.

4. Khamdan Syakiri

Wawancara pertama kali dengan Khamdan Syakiri, pada Kamis, 24 Mei 2018, pukul 13.45 WIB di ruang kerjanya, Ruang SubBidang Perencanaan Pembangunan. Khamdan Syakiri adalah Kepala SubBidang Perencanaan Pembangunan Bappeda yang baru menjabat 5 bulan terakhir. Topik ini merupakan pendalaman wawancara sebelumnya dengan Sri Wijayanti tentang mekanisme perencanaan daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Mekanisme Penyusunan RPJMD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Menurut bapak, penyiapan rancangan awal itu seperti apa?

Khamdan Syakiri

Rancangan awal....secara ril nya saya gak tahu ya.. saya gak..gak mulai dari awal. Sepengetahuan saya kita ada sebelum kita menyiapkan RPJMD kita kan bikin secara teknokratis dulu karena ada peralihan jabatan bupati. Kita ada pendamping dari ahli,kayaknya seperti itu. Kemudian ada FGD-FGD dengan OPD juga. Seperti itu.

Emerha

Kemudian setelah rancangan awal kemana lagi?

Khamdan Syakiri

Setelah rancangan awal, biasanya kita konsultasi publik dulu, kalau RPJPD ya. Setelah konsultasi publik baru kita musrenbang-kan. Ada musrenbang juga. Setelah itu kita paparan ke Bupati dulu. Ada masukan-masukannya dari ahli, staf ahli, dari OPD-OPD yang lain. Kemudian kita juga minta fasilitasi dari Pemda DIY memperbaiki rancanrang sebelum kita tetapkan menjadi RPJMD. Langkah-langkahnya seperti itu.

Emerha

Dalam penyusunan setelah rancangan awal, konsepnya siapa yang bikin?

Khamdan Syakiri

Kalau yang bikin bidang-bidang Bappeda semua ya, kita kan di perencanaan, jadi kita yang mengkoordinir. Bidang-bidang juga nanti mengundang OPD-OPD untuk membahas eee..rancangan RPJMD.

Emerha

Setelah musrenbang, apa?

Khamdan Syakiri

Setelah musrenbang ini kita finalisasi, kita diskusikan dulu internal. Selain internal kemudian kita diskusikan dengan BKAD terutama tentang pagu-pagu yang disepakati. Setelah itu kita rapatkan dengan TAPD. Setelah dari TAPD kita paparkan di depan Bupati. Nah dari Bupati ada masukan-masukan apa nggak, baru kita finalkan.

Emerha

Proses atau prosefurya diatur selain dengan Permendagri 86, apa ada dengan perda atau perbub?

Khamdan Syakiri

Kayaknya ada, ada ya..ada sih. Sepertinya ada..ada. Nomornya saya lupa. Perda tentang sistem perencanaan...nah itu.

Emerha

Kalau perbub ada nggak? Misalkan orang harus melakukan musrenbang itu siapa semua yang diundang, itu tidak diatur?

Khamdan Syakiri

Kalau aturannya, anu sih...juknis aja. Setiap kegiatan misal forum konsultasi publik, kemudian musrenbang ada juknisnya. Kalau yang tandatangan ya kalau bukan Sekda ya kepala Bappeda.

Emerha

Kalau musrenbang, siapa-siapa saja yang diundang?

Khamdan Syakiri

OPD, kemudian ada juga perwakilan ormas, organisasi keagamaan, LSM, ada akademisi juga, terus DPRD juga kita undang. Semua...semua pemangku kepentingan yang ada di Kulon Progo.

Emerha

Jadi setelah musrenbang, jadilah konsep akhir RPJMD?

Khamdan Syakiri

Hmmm...konsep akhir, kemudian kita paparkan dulu, dipaparkan lagi kalau masih ada perubahan sebelum kita kirim ke pemda DIY.

Emerha

Konsepnya dipaparkan dimana?

Khamdan Syakiri

Bupati.

Emerha

Ada tim teknis yang dibentuk dalam penyusunan RPJMD ini?

Khamdan Syakiri

Tim teknis ada. SK Bupati. Yang melibatkan Bappeda dan OPD lainnya. Ada Sekda, Bagian Hukum. Semua kita libatkan.

Q.2. Mekanisme Penyusunan RKPD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalau RKPD, rancangan awalnya seperti apa?

Khamdan Syakiri

Sama sih, sama seperti RPJMD sih. Kita yang eeh...konsep awal dulu. Kan biasanya kan dari RPJMD, eeh RPJPD, kemudian dijabarkan RPJMD. Nah untuk RKPD ini kan kita ambil dari RPJMD tahun yang bersangkutan. Kemudian juga nantin OPD-OPD kan juga ada Renstra.

Renstra kan 5 tahunan. Nah itu kita gunakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD. Nanti kita sesuaikan juga dengan RKP nasional sama RKPD Pemda DIY. Tema-temanya kan kita selaraskan.

Emerha

Apakah penyusunan RKPD bersamaan dengan Renja?

Khamdan Syakiri

Bersamaan. Cuma nanti renja itu mengikuti rancangan awal kita kan. Setelah kita konsultasi publik kan, kan kita kirim ke OPD-OPD untuk mereka menyempurnakan rancangan renja-nya. Itu. Jadi renja itu kan mereka ambilnya dari Renstra. Kalau RKPD kita ambilnya dari RPJMD. Cuma ada sinkronisasi antara RKPD dan Renja nanti.

Emerha

Berarti ketika Bappeda bikin RPJMD, OPD bikin Renstra. Begitu juga RKPD, mereka bikin Renja. Jadi rancangan Renstra dan Renja sebelum penyusunan akhir RPJMD dan RKPD itu tetap digunakan?

Khamdan Syakiri

Hhhmm...iya.

Emerha

Lalu musrenbang-nya bagaimana kalau RKPD, apa bedanya dengan musrenbang RPJMD?

Khamdan Syakiri

Sebenarnya hampir sama sih, kalau musrenbang, cuma materinya mungkin ya, materinya yang di-musrenbang-kan beda-beda. Kalau musrenbangggg...kita kan. Kalau RKPD ya? RKPD dari musrenbangdes dulu kan, kemudian kecamatan ada musrenbang juga, per kecamatan, ada 12 kecamatan. Usulan-usulan dari kecamatan itu kita sampaikan ke OPD, nantinya masuk ke kegiatan OPD.

Emerha

Itu usulan musrenbang RKPD dimasukkan kemana?

Khamdan Syakiri

RKPD....iya, nanti di renja nya dia. Kalau renstra kan sudah ada. Nanti dia bikin renja awal dulu untuk menampung usulan-usulan itu. Kemudian kita konsultasi publik, abis konsultasi publik kita kirimkan ke OPD, jadi ada namanya, setelah konsultasi publik ada namanya forum perangkat daerah atau forum SKPD. Forum perangkat daerah itu untuk membahas usulan-usulan dari kecamatan, usulan dari Dewan, usulan dari masyarakat, bisa gak masuk di kegiatan-kegiatan OPD.

Emerha

Berarti dalam musrenbang RKPD itu kalau ada usulan baru ditampung lagi? Walaupun sudah masuk di RPJMD? Kalau ditampung di RKPD berarti otomatis diubah di RPJMD>

Khamdan Syakiri

Bisa. Ada. Nah tergantung nanti ada nggak pagu anggarannya. Tidak. Kita kan di...RPJMD kan cuma kegiatan dan sasaran saja. Kalau di RKPD kan lebih tajam lagi. Sasarannya berapa, dananya berapa, dipertajam lagi di RKPD. Kalau RPJPD masih globalan untuk kegiatan dan sasarnya. Untuk program dan kegiatan masih kita pertajam lagi di RKPD.

Emerha

Mereka yang dilibatkan sama juga dengan di musrenbang RPJMD?

Khamdan Syakiri

Kalau RPJMD mungkin lebih luas ya... Kalau RKPD kan untuk Kulon Progo aja sih. Lebih luas RPJMD, stakeholder-nya itu lebih luas.

Emerha

Kalau sudah di RKPD, bagaimana masyarakat tahu kalau usulannya diterima?

Khamdan Syakiri

Sebenarnya kita ada itu sih, kita kan pakai sistem ya, aplikasi e-planning ya. Kan ada usulan dari masyarakat, kemudian dari usulan dewan, kemudian ada usulan OPD sendiri to, ada di keterangannya ada di misalnya kegiatan A, itu sasarnya berapa, kemudian ada keterangan usulan siapa.

Emerha

Yang mengelola aplikasi e-planning itu dimana, pak?

Khamdan Syakiri

Kita di "rencanaku" di Bappeda. Kita juga sih yang kelola. Subbidang perencanaan. Tapi nanti yang input kan masing-masing OPD. Sudah kita user sama password masing-masing. Itu nanti, dari situ langsung link ke KUA-PPAS. Jadi kita konek, jadi setelah musrenbang kan kita cermati, kita bikin kayak pra-RKA gitu. Itu nanti sebagai bahan untuk Bappeda.

Emerha

Ketika menerima usulan, bukti bahwa itu adalah usulan itu apa?

Khamdan Syakiri

Kita ada berita acara, tiap-tiap tahapan itu ada berita acara. Mana usulan yang bisa diterima. Kemudian kalau dewan, kita verifikasi juga, ada usulannya siapa, setelah itu kita verifikasi. Bisa masuk apa nggak, ada keterangannya.

Emerha

Setelah usulan mereka diterima, apakah usulan itu diinformasikan balik ke mereka?

Khamdan Syakiri

Itu kita serahkan ke OPD karena sudah jadi kegiatan OPD. Yang disetujui mana saja, nah nanti OPD yang menginformasikan ke masing-masing. Itu RKPD juga kita publish. Di website kan juga di publish. Nah mereka bisa melihat dari situ.

Emerha

E-planning itu bisa diakses dari luar?

Khamdan Syakiri

E-planning....bisa. tapi kalau OPD sih yang akses, eeeh kalau masyarakat di website kita hasil rancangan awal kita publish, kemudian hasil konsultasi publik kita publish. Hasil musrenbang ya kita publish. Jadi RKPD juga kita publish. Soalnya nanti kalau kita buka e-planning nanti untuk masyarakat nanti bisa buba...kan. Kalau usul mereka bisa usul. Usulan warga itu ada menu tersendiri.

Emerha

Itu prosedur tersebut setiap tahun sama ya, mulai dari RPJMD?

Khamdan Syakiri

Hampir sama, ya. Tiap tahun kan dinamikannya beda-beda.

Emerha

Itu dimonitoring siapa pak? Hasil RPJMD sampai KUA-PPAS?

Khamdan Syakiri

Kita kan ada itu eeehh..adaaaa...penilaian dari Pemda DIY. Jadi kan rancangan akhir yang sudah kita finalisasi kita kirim ke pemda DIY, nanti mereka mencermati, ada yang diubah nggak, sudah selaras apa belum. Itu dikoreksi sama pemda DIY. Sebelum ditetapkan jadi RKPD kan harus ada....eehh satu lagi, ada reviu dari Irda juga sebelum ke Bappeda Propinsi, Irda sini juga mereviu.

Emerha

Apa yang direviu itu pak?

Khamdan Syakiri

Nah itu saya kurang tahu. Jenengan ke Irda saja. Soalnya kita..kita, saya belum pernah melakukan reviu, baru tahun ini saya memegang RKPD itu. Karena belum jadi nanti kita kirim ke Irda untuk direviu.

Emerha

Kalau Renstra SKPD, kalau renstra itu yang reviu itu Bappeda sini?

Khamdan Syakiri

Renstra SKPD....yang reviu masing-masing SKPD juga. Itu kan setelah kita mereviu RPJMD, itu kan Renstra nya juga perlu menyesuaikan RPJMD. Renstra-nya itu dikumpul disini. Semua dokumen perencanaan kumpulnya di sini, termasuk Renja OPD disini semua.

Q.3. Mekanisme Penyusunan KUA-PPAS yang transparan dan akuntabel**Emerha**

Sekarang KUA-PPAS bagaimana pak? Menurut yang Bapak ketahui?

Khamdan Syakiri

KUA PPAS saya belum pernah alami ya.. jadi kan hasil RKPD ini jadi KUA PPAS. Nah itu nanti kita kirim ke dewan untuk dibahas bersama bangkar kan persisnya. Seperti itu yang saya pahami. Nanti kita bahas antara dewan, ada BKAD juga, Bappeda juga, TAPD juga, harus klop antara pendapatan dan pembelanjaan, harus sesuai.

Emerha

Selain sistem e-planning, apalagi yang dikelola? Yang kelola bidang mana?

Khamdan Syakiri

Kita punya, eeehh Bappeda ada "Monevku", jadi pengendalian yang ada di RKPD itu. Yang kelola bidang Litbang.

Emerha

Kalau di bidang sini selain e-planning apa? Di subbidang mana?

Khamdan Syakiri

Eeehh..kita e-planning aja. Itu namanya "rencanaku". Iya di bidang sini.

Emerha

Itu bisa diakses publik?

Khamdan Syakiri

Kalau publik nggak lah. Internal aja sih.

Emerha

Itu konek sama Simda?

Khamdan Syakiri

Eeehh..sementara ini kita ekspor, jadi manual. Koneknya manual, data RKPD nanti diekspor ke Simda. Rencananya kan juga kita mau pake Simcan-nya BPKP. Simcan, Sim Perencanaan. Yang Simda kan yang bikin BPKP, nah BPKP juga bikin Simcan. Kita tahun ini sudah mulai input RPJMD ke Simcan, sama input Renstra di Simcan juga. Nanti 2020 kita bisa gunakan Simcan yang terintegrasi dengan Simda. Seperti itu. Simcan sudah ada. Mulai pake ini setelah sosialisasi ke OPD. Kemaren kita barusan sosialisasi ke OPD untuk menginput Renstra. Jadi baru tahap uji coba lah.

Emerha

Yang terakhir, model koordinasi dalam proses perencanaannya bagaimana pak? Antar-OPD misalnya dengan BKAD, dan seterusnya?

Khamdan Syakiri

Kita koordinasi terus, kita undang rapat. Kalau bikin juknis kita undang rapat, kemudian kalau sebelum pelaksanaan musrenbang, kita undang rapat. Kan kita ada....ini kan baru desk juga. Kita cermati kegiatannya OPD masing-masing. Kemudian alokasi belanjanya juga kita cermati. Kita ada tim..tim...kita dengan BKAD ada tim teknis sendiri. Sama Irda juga, kemaren waktu usulan diangkat juga kita undang mereviu usulan-usulan itu.

Wawancara kedua dengan Khamdan Syakiri, pada Selasa, 17 Juli 2018, pukul 13.45 WIB di ruang kerjanya, Ruang SubBidang Perencanaan Pembangunan. Topik ini tentang kendala, penyebab kendala, dan solusi yang sudah dilaksanakan dalam mengelola perencanaan (RM4).

Emerha

e.. selama bapak di sini

Khamdan Syakiri

He'e..

Emerha

Apa ada permasalahan yang bapak hadapi dalam penugasan bapak?

Khamdan Syakiri

Permasalahan dalam perencanaan?

Emerha

Ya..

Khamdan Syakiri

Kalo perencanaan sih.. masalahnya kan kita dikejar deadline waktu ya.. ini ya.. sesuai dengan Permendagri kan ada batasan-batasan waktu kapan dia harus ditetapkan, kapan mungkin akan dilaksanakan, kapan (00.32) harus diserahkan ke DPRD, kendalanya itu kadang-kadang e.. bahan-bahan dari OPD itu terlambat masuk ke kita iya.., usul-usulan kegiatan dari OPD itu terlambat masuk ke kita jadi ya.. karena kita dikejar waktu kemudian bahannya terlambat ya... akhirnya kadang-kadang kita lembur untuk mengejar itu

Emerha

Apa penyebab masalahnya itu pak?

Khamdan Syakiri

Ya.. kurang tahu ya.. kalo di.. OP.. kalo kita udah.. udah kirim surat ke OPD udah jadwal.. jadwal.. pelaksanaan kegiatan udah kita sampaikan ya.. di OPDnya tergantung perencanaan di OPD nya sih biasanya. Biasanya perencanaan dari OPD mengkoordinat.. mengkoordinir di.. OPD masing-masing ya.., nah itu.. kita mau ngoyak-ngoyak juga capek sendiri gitu lho maksudnya..

Emerha

Terus.. solusi yang sudah bapak laksanakan untuk mengatasi masalah itu apa?

Khamdan Syakiri

Ya.. solusinya ya.. itu kita.. kirim surat kemudian kita.. terfoni seperti itu, dan kita juga ada setiap 3 bulan kan ada penilaian kinerja. Perencanaan dan monitoring evaluasi jadi terus.. itu bagian dari kinerja OPD juga

Emerha

Tanggapan dari mereka setelah, menyurati itu gimana menurut bapak?

Khamdan Syakiri

Ehmm.. heheh. Ya.. ada sih yang terus kesel ngirim ada juga yang sama aja sih, hehehehe. Karenakan tergantung, tergantung di OPDnya masing-masing nggeh kalo Kepala nya care tentang perencanaan, biasanya kan perencanaan nggak begitu peduli kan yang penting, anggaran nya berapa nah itu yang.. mereka perjuangkan biasanya sih

Emerha

Sekarang ini udah.. udah, sudah sampai di tahap mana untuk perencanaan tahun 2019?

Khamdan Syakiri

Kita... RKPD sudah ditetapkan kemudian KUA PBHS sudah kita serahkan ke DPRD nanti tinggal tunggu jadwal dari DPRD, kemudian sekarang kita baru konsen ke perubahan. Perubahan di 2018, kan RKPD perubahan dulu baru APBD perubahan baru KUA, KUPA sama BHS perubahan

Emerha

Oh.. berarti yang.. RKPD tadi tuh yang efek dari perubahan ya?

Khamdan Syakiri

Yang sudah ditetapkan?

Emerha

Ya..

Khamdan Syakiri

Itu yang murni itu 2019

Emerha

Oh... 2019 udah ya..

Khamdan Syakiri

Kalo yang 2018 perubahan baru ini.. baru kita kerjakan ini

Emerha

Ehm... Musreimbang-musreimbang sudah selesai juga?

Khamdan Syakiri

Kalo musreimbang kan yang murni, kalo yang perubahan nggak ada murembang, itu udah dari bulan April kemaren kalo musreimbang 2019

Emerha

Itu memang di awal-awal bulan gitu ya, di awal-awal tahun gitu ya?

Khamdan Syakiri

Kita.. kita sesuai timeline nya dari.. Permendagri sebisa mungkin kita ikutin

Emerha

Ehm.. berarti dalam waktu dekat ke depan ini apa lagi tahapannya yang..?

Khamdan Syakiri

Ya itu kita sekarang simultan, kalo PBHS kan nunggu pembahasan di DPRD nanti nunggu jadwal sana, kemudian kita ini perubahan RKPD yang 2018 sama nanti kebijakan perubahan anggaran 2018 sama PBHS perubahan 2018

Emerha

Berarti setelah itu tinggal RKH ya?

Khamdan Syakiri

RKH iya.. kalo RKH sudah, kemaren kan RKPD kan kita sudah bikin RKH biar ketahuan jelas uangnya buat apa aja

Emerha

Tahapan untuk perhitungang udah selesai ya.. di bulan-bulan?

Khamdan Syakiri

Perencanaan rencana ya.. Juli-Agustus lah nanti terus didekskrolnya kan kita di.. untuk APB.. usulan APBD nya

Emerha

Itu dalam waktu dekat ini ada nggak rapat tentang perencanaan di bikin?

Khamdan Syakiri

Kemaren kita barusan rapat tentang usulan perubahan TAPD juga

Emerha

Dalam ke depan nggak ada lagi?

Khamdan Syakiri

Minggu... ini rencana kita mau.. desimal.. kan ada usulan-usulan dari OPD tapi karena kemampuan keuangan kita terbatas yang mana usulan-usulan yang prioritas mana yang belum itu yang..

Emerha

Biasanya itu kapan dilaksanakan?

Khamdan Syakiri

Besok pagi

Emerha

Dimana pak?

Khamdan Syakiri

Di sini

Emerha

Oh..

Khamdan Syakiri

Nanti itu internal Bappeda aja sih..

Emerha

Internal Bappeda ya.. itu di situ apa yang dibicarakan dalam desk?

Khamdan Syakiri

Kemaren kan yang... pengampu bidang-bidang kan udah des usulan.. usulan dari OPD kan udah di rasionalisasi, kemudian ini mau kita cermati lagi kira-kira mana yang lebih prioritas mana yang belum prioritas, karena itu tadi kemampuan keuangan kita terbatas

Emerha

Ehmm.. terus itu yang.. kepala Bappeda ya yang pimpin ya biasanya?

Khamdan Syakiri

Ehm... biasanya.. kita aja sih di bidang kita, kemudian nanti kita laporkan ke kepala Bappeda seperti itu, kalo yang kemaren malah pak Asisten 3 usulan-usulan dari OPD itu

Emerha

Anggota desnya itu siapa semua pak?

Khamdan Syakiri

Des.. kita me.. bidang-bidang pengampu biasanya.., Bappeda biasanya, sama BKD nanti mungkin..

Emerha

Anggaran ya..

Khamdan Syakiri

Anggaran tim teknisnya dulu setelah itu baru kita sampaikan ke TAPD

Emerha

Menurut bapak saran perbaikan untuk permasalahan tadi tuh seperti apa nanti?

Khamdan Syakiri

Permasalahan yang.. terlambat-terlambat itu ya..

Emerha

Ya.. yang bapak hadapi..

Khamdan Syakiri

Kalo saya sih.. kita udah ada sistem e-planing ya.. itu juga membantu untuk.. untuk.. e... sh.. penginputan sama perencanaan hrm.. kegiatan itu juga cukup membantu e-planing kemudian ya itu tadi di... mungkin pimpinan OPD nya lebih.. lebih.. lebih.. care ke anak buahnya, terutama ke perencanaan-perencanaannya soalnya.. kalo perencanaannya terlambat itu nanti juga mempengaruhi kinerja OPD juga kan. Biasanya yang.. yang disalahkan perencanaannya itu, tapi perencanaan kar.. perencanaan itu biasanya kan minta data ke.. bidang-bidang ke Kasubid, Kabid, nah.. itu kadang-kadang karena Kasubid, Kabid nya banyak kerjaan nah.. itu mereka kadang-kadang agak-agak cuek gitu sama usulan-usulan perencanaan. Nah.. mungkin Kepala OPD itu bisa lebih..lebih.. care lagi

Emerha

Kalo untuk ginput bola ke OPD-OPD itu nggak.. belum pernah dilakukan?

Khamdan Syakiri

Kalo jemput bola kita sebenarnya udah ada pengampu sudah.. sudah.. tiap kali anu.. kita telfon seperti itu, tapi ya.. karena kesibukan mereka juga ya.. kalo kemaren kendalanya itu mas di.. Juni itu banyak liburnya, hehehe. Libur 2 minggu itu ya... iya, kan pengaruh ke jadwal pelaksanaan kegiatan kita, sehabis lebaran juga e.. kan penyesuaian-penyesuaian dulu baru bisa on lagi gitu kan, nah.. itu itu.. kendala yang kalo kebanyakan libur ya.. mengganggu jalur perencanaan seperti itu

Emerha

Kalo besok itu, kan saya rencana juga mau observasi ya.. rencana mungkin saya bisa ambil gambar atau video

Khamdan Syakiri

Silahkan aja.. bisa..

Emerha

Izin dari bapak saya ikut besok, tapi mungkin sekitar berapa menit aja, jam berapa besok?

Khamdan Syakiri

Besok kita jam 9

Emerha

Jam 9 ya.. ya.. di sini ya..

Khamdan Syakiri

Iya..

Emerha

Untuk bukti penelitian saya sekalian juga saya untuk menang di pembahasan

Khamdan Syakiri

Pake video apa foto?

Emerha

Foto sama video

Khamdan Syakiri

Oh.. boleh nggak pa-pa

Emerha

Jadi saya hubungi bapak besok kalo..

Khamdan Syakiri

Bisa

Emerha

Okey pak itu aja hasil wawancara saya ya..

Khamdan Syakiri

Ya..

Wawancara ke-3 dengan Khamdan Syakiri, pada Selasa, 17 September 2018, pukul 15.15 WIB di ruang kerjanya, Ruang SubBidang Perencanaan Pembangunan. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Ini saya mau konfirmasi ini pak... nah ini... saya mau minta izin ke bapak karena sesuai kaidah penulisan kan saya harus tulis nama sumbernya, nah... bapak...

Khamdan

Ini... ada RJ, RPJP ini gimana ini

Emerha

Itu hasil transkrip wawancara...

Khamdan

Ini... ini nggak salah ini RKP apa... masih RKP...

Emerha

Iya pak masih RKP...

Khamdan

Ini di coret aja ya... yang ini, soalnya kan juga semua prosesnya sama ya... jadi di coret aja udah... habis ini nggak apa-apa..

Emerha

Maksud saya... saya minta kalo... bapak keberatan nggak kalo saya tulis nama lengkap bapak di bagian bawah ini

Khamdan

Oh nggak apa-apa...

Emerha

Hem... itu ada banyak namanya...

Khamdan

Soalnya paparan ini sebelum... sebelum sini... rancangan awal terus kita paparkan dulu, ini masih RPJMD ya...

Emerha

He'em..., iya...

Khamdan

Kalo RPJMD kan yang dulu... karena RPJP ini...

Emerha

Kalo orangnya masih di sini lagi lanjutannya... atau nggak ada... masih ada ya... nah... ini... kan tidak... tidak semua saya ambil Cuma yang... yang urgen kalo yang lain saya... jadi kalimat tidak langsung kalo ini kan kalimat langsung kutipan langsung...

Khamdan

He'em... he'em ya... boleh...

Emerha

Ya...

Khamdan

Ya...

Emerha

Terus yang kedua kemaren tuh ada kendala yang bapak alami itu masalah kan data masuk dari data perencanaan yang masuk dari SKPD itu kan telat nah itu... di sini saya sarankan, kalo... di... Bappeda itukan ada bidang pengampu pak, jadi setiap bidang itu mengampu SKPD berapa itu udah ada ya pak?

Khamdan

Udah ada...

Emerha

Itu... untuk mengatasi itu, itu kalo di... diefektifkan lagi gimana... bisa menurut bapak gimana?

Khamdan

Sebenarnya udah sih... sebenarnya kita... kita kan udah... pengampu juga udah ngejar-ngejar ke OPD jadi kan dari... dari... kita ke pengampu, nanti pengampu yang ngejar-ngejar OPD, kan nah... OPD ini yang kadang telat kirim ke kita, jadi kita juga selain ke pengampu kita juga kadang komunikasi langsung kita kan ada WA grup perencanaan se Kulon Progo juga terus... untuk efektifitasnya itu juga jadi penilaian OPD dalam bidang perencanaan

Emerha

Hem... jadi tetep walaupun sudah bidang pengampu yang turun langsung tetep juga ya...

Khamdan

He'em sama... begitu, nih sampe sekarang kita masih... masih ada yang belum ngumpul juga, sudah kita surati secara resmi batas waktunya kapan kemudian pengampu juga sudah kasih tahu ini lho OPD yang belum meng... kita juga udah share ke WA grup juga... seperti itu

Emerha

Jadi memang udah... udah... gimana caranya lagi...

Khamdan

Ya... kita tidak tahu kendalanya di... OPD ya... mungkin yang ngurusin baru... diklat atau apa... nah itu perlu...

Emerha

Jadi... itu tetap jadi... jadi masalah ya... belum... belum... ditemukan.. ya..., ya... itu pak yang terakhir mungkin saya minta foto

Lampiran 11:
Daftar Wawancara dengan Partisipan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Kulon Progo

1. Alif Romdhoni

- a. Wawancara ke-1 dengan Bapak Alif Romdhoni pada 25 Mei 2018, pukul 09.46 pagi di ruang kerjanya, ruang tamu bidang Pendapatan. Alif Romdhoni adalah kepala subbidang evaluasi dan pengendalian pendapatan di BKAD sampai saat ini. Wawancara ini tentang topik RM1 yaitu gambaran umum struktur APBD.

Q.1. Pertumbuhan anggaran pendapatan

Emerha

Kalau dari mekanisme tadi Pak, saya lihat di sistem dan prosedur di Peraturan Bupati, itu kan ada SKPD membuat SKP, SKRD. Nah, itu yang bikin siapa? Di bidang Pendapatan ya itu?

Alif Romdhoni

Untuk yang itu di Teknis, jadi misalnya contoh untuk, saya ambil contoh retribusi pajak sajalah ya, nggak jauh-jauh ya, pajak sebelah. Jadi, kami itu kan juga punya fungsi pendapatan dengan pajak.

Jadi, penentuan mulai dari SKPD sampai SKRD sampai kalau SKD kan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ya Pak, untuk yang contoh di luar pajak SKPDP, SKPD itu juga ada di pajak. Jadi, untuk yang itu bidang pajak.

Emerha

Bidang pajak yang bikin ya?

Alif Romdhoni

He'e, jadi langsung, tidak, tidak kami, kami lebih fungsi kendali koordinasi. Contoh misalnya retribusi menara telekomunikasi, itu bagian juga dari pendapatan kita. Nah, itu nanti yang akan menerbitkan di Kominfo. Kominfo nanti dengan Perda Pergub dia akan secara tarif, secara zonasinya nanti akan keluar SKRD-nya 6 bulan kemudian nanti ada keberatan atau tidak. Kemudian baru ada pemasukan, kemudian baru kemudian capaian dia akan ada. Itu ada di OPD Teknis misalnya SKD tentang tadi tentang menara telekomunikasi mungkin tentang pariwisata tentang itu juga ada di sana. Jadi, untuk penetapannya.

Emerha

Jadi, kalau, jadi, kalau pariwisata objeknya adalah pariwisata berarti yang bikin SKPD Pariwisata?

Alif Romdhoni

Iya, iya, iya pajak di kita misalnya retribusi menara di retribusi.

Emerha

Oh, kalau, kalau pajaknya di mana? Di Bidang Pendapatan?

Alif Romdhoni

Kalau pajak? Di Bidang Pajak.

Emerha

Di Bidang Pajak, ya?

Alif Romdhoni

Kita kan penerimaan pajak atau kemudian datanya ya yang pajak ya penetapan mulai dari anu di, di pajak. Semisalnya dia terkait dengan penetapannya PBB terutama ini yang, yang cukup besar itu ya.

Emerha

Kalau ya, kalau hasil pendapatan ya Pak, khusus saya bicara anggaran dulu ya Pak. Itu di, dievaluasi di sini juga ya misalnya seperti pendapatan pajak daerah berapa, retribusi daerah berapa. Ini saya coba menghitung ya Pak. Ini anggaran saya bandingkan tahun 2017 sama 2018. Ini anggaran saya bandingkan tahun 2017 sama 2018. Saya cuma pengen tahu ini ada terjadi kenaikan, penurunan. Ini saya baru bicara anggaran dulu, belum ada realisasi. Nah, itu saya pengen tahu itu Pak. Itu bagaimana evaluasi Bapak, kenapa bisa pendapatan pajak daerah itu tumbuh sebesar 34% dari 2017 ke 2018?

Alif Romdhoni

Oh, ya, untuk yang pajak daerah, ya?

Emerha

Iya, apakah karena efektifitas pendapatan atau bagaimana?

Alif Romdhoni

Sebenarnya untuk yang kasus ini terutama yang pajak daerah itu yang meningkatnya signifikan itu di MBLB.

Emerha

Apa itu Pak?

Alif Romdhoni

MBLB itu yang tadi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Emerha

Apa itu Pak?

Alif Romdhoni

MBLB itu yang tadi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Emerha

Oh itu ya..

Alif Romdhoni

Jadi, waktu penentuan awal, jadi penentuan pada, seperti ini, penentuan pendapatan itu kan tidak kita berbicara sendiri. Tapi, kita dengan eksekutif dan legislatif untuk menentukan pendapatan itu kan dua ini saling koordinasi saling anu. Kami punya data kemudian mereka juga punya data yang untuk dipersandingkan kemudian muncullah target pendapatan. Ini belum bicara realisasi, ya?

Emerha

Belum bicara realisasi. Masih target.

Alif Romdhoni

Nah, ketika berbicara target ada sebuah hal yang kadang menurut teman-teman di luar legislatif, itu kita itu akan membangun bandara. Logikanya MMBLB itu kan meliputi tanah urug, pasir, batuan andesit. Itu kan nanti pasti ngambil dari Kulon Progo.

Potensinya kan luar biasa untuk bangun ini butuh sekian rit, sekian ton, sekian anu, ada hitung-hitungan seperti itu yang kemudian ditetapkanlah oke berarti Kulon Progo nanti untuk MBLB-nya menjadi sekian miliar. Meningkatkan dari 3 menjadi 16 kalau tidak salah. Jadi, kan sangat signifikan sekali peningkatannya.

Nah, ada yang mungkin missed persepsi yang kemudian ternyata untuk proses progres untuk bandara itu tidak hanya ambil Kulon Progo.

Ternyata ada yang dari Purworejo, dari beberapa yang itu ternyata kemudian sekarang, nah, ini, ini sudah mulai kelihatan prosesnya kayaknya tidak akan tercapai itu kenaikan yang sekian belas miliar tadi dengan melihat beberapa. Jadi, kenaikannya lebih kepada tadi, ada asumsi-asumsi yang dibangun yang kemudian fakta di lapangan menjadi meleset. Itu contoh yang MBLB, contoh yang kedua misalnya beberapa di 2017 kita dengan asumsi bandara BPHTP Biaya Perolehan Hak itu, bandara itu akan sekian 50 miliar atau berapa. Jadi, itu sudah kita kencengin menjadi sebuah pendapatan.

Faktanya ternyata Angkasa Pura melakukan keberatan ke Pusat, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi, kebijakannya kemudian pembebasan BPHTP. Jadi, ada, ada sebuah angka dinamisasi pendapatan yang terjadi seperti itu dan kita ketika sudah berbicara seperti itu tidak bisa. Ketika itu sudah kebijakan ya tidak bisa. Ketika ini menyangkut apa ya, sebuah, bukan kesalahan ya, tapi mungkin kurang cermat mungkin kita ya untuk menentukan itu. Jadi, contoh kasus yang tadi yang MBLB, saya, saya contohkan oh ternyata ada yang lewat.

Artinya lewat itu ternyata prediksi yang harusnya dari kita kok malah dari daerah yang lain. Itu, itu baru satu contoh kecil belum beberapa yang lain. Contoh misalnya di PBB, di PBB itu untuk yang tahun 2017 contoh kasusnya saya kembalikan ke bandara saja, nggak usah jauh-jauh ya. Kita sudah menetapkan sekian miliar untuk PBB di NCOP-nya itu. Tetapi, ternyata mereka keberatan mengajukan sehingga memohon keringanan 50%. Waktu kita setuju karena memang belum semua dibebaskan oleh mereka.

Jadi, yang harusnya 6 miliar atau 3 miliar hanya sekian. Jadi, ada penentuan-penentuan target yang kemudian memang itu ada efek politis kalau saya melihatnya, kalau boleh sedikit melenceng ya. Efek politisnya ya tadi, mungkin dewan menentukan itu ya mungkin memang mereka punya hitungan yang bagi mereka kan mungkin semakin besar sebuah potensi yang mungkin ada hitung-hitungan lain, baik secara politis maupun pendapatan. Tetapi, ketika kemudian kita berbicara realisasi memang ini cukup berat ketika kenaikannya itu memang dan contoh yang pajak daerah yang kenaikan ini memang yang cukup signifikan besar tadi di aspek MBLB tadi, di anggaran ini. Itu dari sekitar 3 menjadi 16 miliar jadi juga—

Emerha

Kalau hasil retribusi daerah itu Pak, kenapa itu bisa tumbuh 12,4%?

Alif Romdhoni

Jadi, untuk yang retribusi beberapa objek wisata kan sudah cukup signifikan juga. Kemudian secara sebenarnya yang paling besar retribusi itu ada di Dinas Pariwisata dan di PU. He'e, kemudian beberapa yang ada di Dinas Perdagangan dengan Pasar. Jadi, kenaikannya ya, ini nanti lebih tepatnya sebenarnya di Perencanaan yang, yang, yang bisa menentukan itu.

Tapi, nanti kalau Njenengan butuh lebih detail lagi bisa dengan Pak Tinus. Artinya memang ada beberapa yang kalau Wisata ya memang beberapa objek. Tapi, ini juga sudah warning Pariwisata kemarin. Mas, kami nanti Glagah proses sekarang jalan yang ditutup Glagah sudah tidak akan bisa seperti dulu. Apa lagi kami menghadapi nanti Idul Fitri kan kantongnya Idul Fitri untuk Kulon Progo wisata itu ada di Glagah, di Sermo, ya, pantailah intinya ya, pantai. Padahal efektif pembangunan bandara kan kayaknya nanti aksesnya sedikit terbatas sih untuk itu. Jadi, kenaikannya memang lebih untuk yang retribusi ada beberapa penambahan objek wisata. Kemudian beberapa yang, karena retribusi kan ada yang wisata, ada yang juga dari kebersihan. Kemudian termasuk yang sewa-sewa penggunaan baik itu seperti Gedung Kaca, kemudian seperti menara telekomunikasi tadi, telekomunikasi. Jadi, juga ada kenaikan di 2016 ke 2017, eh 2017 ke 2018 hampir 300 sampai 400-an juta. Karena itu juga terkait penghitungan, apa ya, angka indeks yang kemudian muncul dari setiap menara telekomunikasi yang ada. Jadi, memang beberapa faktor yang mempengaruhi untuk kenaikan yang retribusi itu. Itu sih memang 12 Mei ya itu ya, dari 8 koma menjadi—

Emerha

Kalau itu, lain-lain PAD yang itu Pak, itu turun drastis ya Pak?

Alif Romdhoni

Lain-lain PAD yang sah? Hmm, bentar, tak bukakan kertas saya yang komponen lain-lain itu tadi yang bisa-- Tahun ini ya, menurun ya Mas ya, maksudnya yang Njenengan tanyakan tadi gimana PAD? Lain-lain yang PAD yang dimaksud?

Emerha

Iya, hmm, turun, minus 28%.

Alif Romdhoni

Oh, ya, jadi memang lain-lain pendapatan daerah yang sah itu tidak mesti anu ya, ini kan lebih ke dari provinsi dan pusat ya. Jadi, kalau komponennya itu ada dari hibah, dari hibah dari pemerintah daerah dalam hal ini provinsi. Jadi, kadang kan tidak setiap itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebuah potret kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, saya bicaranya seperti itu. Karena itu sangat tergantung dari, dari luar. Maksudnya dari luar ya bisa jadi kan kebijakan pemerintah provinsi, bisa jadi nanti dari pusat. Jadi, memang belum, karena di sini pendapatan daerah yang sah itu kan dari hibah ya. Ya, kalau nanti memang ada ya bisa menjadi anu tapi kalau tidak kan berarti memang dan itu—

Emerha

Berarti itu, itu bukan dikelola di Bidang Pendapatan ya? Bukan dia kalau Bidang Pendapatan-

Alif Romdhoni

Ya, bahasa saya sudah given. Tidak bisa kita ngejar secara anu. Itu nanti lain-lainnya, saya itu lebihnya di Bidang Anggaran dan. Yang dia senantiasanya dengan provinsi. Jadi, itu bukan bagian dari, jadi kalau bahasa saya kemandirian keuangan daerah. Itu dikeluarkan karena biasanya itu hanya hibah yang ya tergantung pemberi hibah sih.

Emerha

Kalau itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan?

Alif Romdhoni

He'e. Meningkatkan atau menurun ya, menurun ya?

Emerha

Menurun, ya. Menurun 1,60.

Alif Romdhoni

Bentar, bentar. jadi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu kan meliputi beberapa laba, bagi hasil dari beberapa mitra kita.

Kalau kemudian kita punya BPD itu kan biasanya dari bagi hasil dari laba BPD yang senantiasanya-- , cuma memang ada penurunan dari BPD untuk yang secara apa ya, kemarin sudah, sudah, sudah ada apa ya, akta notarisnya itu, yang ini juga sedang kita koordinasikan dengan BPD. Kenapa kok menjadi seperti ini tapi kembali karena ini juga lebih ke arah apa ya, ibaratnya mitra ya. Sebenarnya di luar itu juga kita punya Bank Pasar, punya Aneka Usaha, punya Selo Adikarto dan punya BUKP, di samping BPD. Jadi, kita untuk hasil yang dipisahkan itu ada 5 bagian, bagi hasil dan memang untuk saat ini kita memang baru mencoba untuk apa ya, tidak menjadikan itu sebagai target utama dalam jangka pendek. Contohnya misalnya, kita kemungkinan dimulai dari 2017/2018 kan, 3 tahun ke depan akan mencoba memberikan apa ya istilahnya, tambahan modal, suntikan modal untuk beberapa perusahaan-perusahaan daerah kita. Termasuk Bank Pasar, termasuk-- . Jadi terkadang penurunan ini kan , apa ya, biaya yang kemudian ibaratnya ya kita memang harus kencangkan ikat pinggang dulu saat ini. Tapi, ini nanti 2, 3 tahun lagi akan seperti ini. Nah, visibilitas perusahaan kemarin waktu memaparkannya seperti itu. Jadi, akhirnya ya, kita mencoba melihat itu tidak menjadi sebuah target sebagainya tadi pajak tapi kita berusahanya oh ya kan ini perusahaan daerah juga, punya kita juga, kita juga sudah, ya semoga nanti dengan seperti ini kita tidak kejar secara pendapatan. Tapi, 2, 3 tahun dia sudah akan lebih optimal seperti itu. Jadi, memang kemarin ada contoh untuk yang Aneka Usaha dan yang Selo Adikarto itu untuk penurunan dari bagi hasilnya memang kita tidak kejar sampai ke anu, karena memang mereka ada semacam apa ya, penyampaian, pemaparan kepada kita, ada beberapa yang memang ini konsekuensinya menjadi seperti. Ibaratnya apa ya bisnis plan-nya itu memang untuk tahun ini belum bisa. Contohnya ya Selo Adikarto itu nanti mungkin dia akan mencoba join. Jadi, nanti ketika bandara sudah berproses dia mungkin akan lebih targetnya malah bisa. Jadi, memang ada bisnis, proses bisnis yang akan sangat tergantung sehingga di satu sisi kita tidak bisa memperlakukan ini sebagaimana pajak. Tapi, ya karena ini perusahaan kita, ya kita berusahanya ya, oke, selama itu memang sehat secara keuangan, secara targetnya juga istilahnya tidak margin-nya tidak terlalu besar itu memang bagian dari strategi yang disepakati oleh kita dengan mereka. Tetapi, nanti 3, 4 tahun lagi akan lebih progresnya akan lebih bagus. Seperti itu kemarin laporan ke kami untuk beberapa bagi hasil dari itu perusahaan milik daerah kita. Yang bagus itu di Bank Pasar itu berapa miliar itu. BPD, Bank Pasar, Selo Adikarto, dan Aneka Usaha sebagai salah satu juga memang di (15:01 aspaoniks) plan-nya. Itu memang sedang mengejar siapa tahu bisa menjadi bagian dari sub kontraknya pembangunan bandara ini. Entah nanti di aspek apanya, nah, itu kan butuh, butuh upaya yang tidak hanya sumber dana tapi juga sumber daya yang cukup. Nah, itu yang kemarin memang di proses bisnis yang memang akhirnya ya akhirnya kita juga untuk menentukan dari masing-masing perusahaan daerah ini tidak, cukup memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek itu.

Emerha

Oke, Pak, untuk wawancara kali ini, mungkin sampai di sini dulu.

Alif Romdhoni

Nggih.

Emerha

Nanti kalau misalkan ada yang kurang saya bicara wawancara lagi?

Alif Romdhoni

Bisa, silakan nanti kalau misalnya membutuhkan.

Emerha

Iya

- b. Wawancara ke-2 dengan Alif Romdhoni, pada Jumat, 25 Mei 2018, pukul 10.16 WIB di ruang tamu bidang pendapatan. Alif Romdhoni adalah Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan BKAD dan telah menduduki jabatannya selama 4 tahun sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pembuatan SPj pendapatan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Gambaran tugas bidang pendapatan

Emerha

Pak kalau di bidang pendapatan itu salah satu kuasa jadi BUD atau gimana ini?

Alif Romdhoni

Oh bukan. Kalau kuasa BUDnya ini dalam perspektif seperti apa. Jadi BKAD saya jelaskan strukturnya dulu ya. BKAD itu kan ada sekretariat terus ada bidang perbendaharaan kemudian ada bidang anggaran, kemudian ada bidang akuntansi, bidang pajak dan kami di pendapatan. Jadi kalau kami di pendapatan ee apa ya hanya fungsi-fungsi terhadap proses pendapatan daerah secara umum khususnya lagi di OPD pendapatan karena kami di evaluasi pengendalian pendapatan jadi kami berhubungannya dengan OPD pendapatan. Kalau kemudian korelasinya tadi Pak kuasa BUD ya? Kalau kuasa BUD itu sepengetahuan kami adanya itu di perbendaharaan secara BUDnya. Tapi memang kami lebih ke arah fungsi koordinasi khusus di bidang pendapatannya. Jadi didalamnya kan pendapatan asli daerah meliputi retribusi pajak kemudian itulah kami di EFDAL kami yang melakukan evaluasi pengendalian terhadap proses *progress* dan capaian dari masing-masing OPD yang bertanggungjawab terhadap pendapatan. Misalnya kalau retribusi parkir ya ada di perhubungan, kemudian karcis pariwisata ada di dinas pariwisata, dan juga pajak sendiri tapi bidang pajak kan sudah berdiri sendiri. Itu bagian dari ketugasan. Jadi kalau kemudian bendaharanya bendahara pendapatan, bendahara penerimaan yang kami koordinasikan.

Emerha

Bendahara yang . . . (01:50) seluruh SKPD?

Alif Romdhoni

Yang memiliki. Jadi tidak semua tidak setiap OPD itu ada bendahara penerimaan, hanya OPD yang *cara-carane* itu memiliki fungsi untuk pendapatan. La terus misalnya contoh pariwisata dia kan punya retribusi di objek-objek. Nah, dia punya bendahara penerimaan. Jadi *neg* semua OPD yang punya itu bendahar pengeluaran, itu pasti punya semua. Kalau yang kemudian ada pendapatan yang masuk misalnya di BLUD rumah sakit itu dia punya bendahar penerimaan. Kalau kemudian anda tanya Bappeda, Bappeda tidak punya bendahara penerimaan karena dia kan tidak memiliki fungsi pendapatan, tidak memiliki fungsi untuk kemudian apa ya *leading* sektor untuk menerima proses-proses pendapatan asli daerah.

Emerha

Itu jenis-jenis pajak yang dikelola di sini apa semuanya?

Alif Romdhoni

Kita itu kalau jenis pajaknya itu ada, jadi ya meliputi pajak tujuh kalau nggak delapan ya. Nanti mulai dari pajak hotel, pajak air tanah. Tapi ini sebenarnya bidang pajak ya, bidang pajak. Nanti kalau ee nanti kalau misalnya butuh datanya ada. Jadi ee *anu* aja sambil *tag* pinjam data.

(Narasumber ambil data dan obrolan dengan orang lain menit 03:10 – 03:33)

Seng rencana yang kemaren itu, ambil yang dipinjamkan ke saya pas proses.

Sambil melihat data ini. Ini kalau kita pajak satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Sembilan sepuluh.

Emerha

Sepuluh ya?

Alif Romdhoni

Secara anu mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, MBLB mineral logam bukan batuan, parkir, air tanah, PBB dan PBHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang di bidang pajak urus jadi pajak daerahlah di situ. Nah, kalau kemudian PAD itu kan ada pajak ada retribusi, nah di luar itu kan retribusi yang kemudian ada di OPD-OPD teknis mulai dari dinas pariwisata, kemudian ada yang di PU, ada yang di Perhubungan, ada di bagian umum, kemudian ada yang di rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian RSUD sendiri, kemudian ada yang . . . (04:34), kemudian di kecamatan Wates juga ada. Jadi ada sekitar 14 OPD yang memiliki fungsi pendapatan juga.

Emerha

Nah itu apa Tupoksinya tadi Pak di bagian pendapatan sama pajak itu gimana anunya Pak?

Alif Romdhoni

Jadi kita ee lebih tepatnya kalau secara mekanismenya kita mensupervisi setiap OPD termasuk juga pajak. Jadi kalau kemudian kita memang setara tetapi setiap ee proses koordinasi mereka itu bagian yang kita supervise. Target-target mereka secara perencanaan, pajak yang masuk berapa itu bagian yang kita di pendapatan ini yang kita awasi. Jadi kita itu berbicara secara fungsi ee supervise tapi kadang kita berbicara secara OPD. Maksudnya gini, pada satu sisi saya mensupervisi semua OPD pendapatan. Saya juga karena bidang pajak ini sebagai *leading* sektornya BKAD di fungsi pajak ya dia termasuk yang saya supervise terkait dengan capaian pajaknya, permasalahan, target terkait dengan *progress*, terkait hal-hal yang kemudian menyangkut ee pemasukan daerahnya. Jadi ya fungsinya koordinasi supervise gitu.

Emerha

Oke. kalau kalau fungsi pemungutan pajak bukan di sini?

Alif Romdhoni

Bukan di pendapatan tapi di bidang pajaknya. Kalau kemudian anda bertanya secara BKAD ada di bidang pajak. Bidang pajak kan tadi ada 10 tadi termasuk yang ada front office di depan itu yang melayani masalah-masalah PBHTB, mulai dari setoran-setoran pajak yang ada di depan mulai dari PBB dengan bekerja sama dengan ee kecamatan sampai kelurahan melalui bank-bank persepsi yang sudah kita tunjuk. Jadi kalau kemudian ditanya fungsi untuk pemungutan melakukan ee eksekusi pajak kami itu ada di bidang pajaknya. Jadi kami lebih ke fungsi koordinasi terhadap semua tidak hanya pajak tapi juga retribusi.

Emerha

Termasuk perencanaan nilai Pak, perencanaan berapa besar pendapatan?

Alif Romdhoni

Betul. Iya. Perencanaan. Jadi di bidang kami itu kan ada tiga subbid yang pertama itu perencanaan pendapatan, kemudian saya di evaluasi dan pengendalian pendapatan kemudian yang ketiga subbid pengembangan pendapatan. Jadi kemudian kalau anda bertanya potensi berarti kita memprediksi itu ada di perencanaan pendapatan tadi dengan Pak Bin. Nah, yang saya buka ini adalah prediksi dan realisasi. Sehingga kalau kemudian nanti bertanya masing-masing subbid ini nanti ketika menentukan pas APBD, pas penentuan perubahan target pendapatan itu perencanaan. Kalau sudah berjalan itu nanti kami awasi kami kendalikan kita evaluasi. Kalau nanti ada potensi-potensi lain perkembangan, kadang kan ada dinamika hrag kekinian, kondisi ekonomi yang mulai baik kemudian ada revisi dan peraturan, ada juga misalnya ada perlu o iya direvisi lagi nih tarifnya nah itu nanti ada di pengembangan pendapatan seperti itu.

Q.2. Mekanisme pemeriksaan SPJ Penerimaan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Pak kalau soal SPJ penerimaannya Pak, fungsi di bagian-bagian itu kan melakukan verifikasi. Bisa Bapak ceritakan secara umum mekanismenya itu?

Alif Romdhoni

Jadi untuk proses, jadi verifikasi terhadap SPJ pendapatan, SPJ fungsional pendapatan itu kita lakukan setiap bulan. Mekanismenya kita setiap maksimal di tanggal ee 5 itu harus sudah menyampaikan misalnya sekarang ya contohnya sekarang kita bulan ini bulan Mei. Jadi tanggal 5 bulan mei itu mereka sudah menyampaikan SPJ fungsional di bulan April bulan sebelumnya. Nah, fungsi verifikasi ini adalah untuk sinkronisasi termasuk rekonsiliasi terkait dengan SIMDA yang ada di kita. Jadi kita itu kan menerapkan aplikasi keuangan yang berbasis SIM ya yang kemudian itu pengembangan dari BPKP. Jadi kita punya SIMDA pendapatan yang kemudian kita senantiasa rekon bukti STS dengan jumlah yang ada itu senantiasa kita cek. Sehingga di OPD ketika menyampaikan SPJ yang kita harus kita verifikasi dilengkapi dengan STS itu nanti dimasukkan ke kita. Kita bagi tim ada empat orang yang bertugas di bertanggung jawab di masing-masing OPD lakukan verifikasi, lakukan kecocokan, lakukan dengan membuka SIMDA. Kemudian ketika sudah cocok secara angka, buktinya juga sudah tersedia dan terdokumentasikan, kemudian nanti ada pengesahan dari kepala bidang. Nah, di situ ketika sudah dilakukan pengesahan dengan tanda paraf dan tanda tangan nantinya karena mereka buatnya dua, yang satu kita serahkan kembali yang satu untuk dokumentasi kita. Jadi secara umum ee proses ee pengecekan verifikasi SPJ pendapatan seperti itu. Jadi ada dokumen masuk kita cek dan itu biasanya karena bebannya berbeda OPDnya. Jadi ibarate teman-teman itu ngoreksi masing-masing OPD itu juga jadi yang paling anu itu OPD di BLUD, rumah sakit sama di anukan. Semakin banyak OPD itu memiliki apa ya, layanan yang ada retribusi ada biayanya semakin semakin harus lebih *njelimet* lagi. Semakin sedikit OPD yang mungkin, dia mungkin hanya retribusi parker tok misalnya itu mungkin lebih cepat untuk prosesnya. Tapi bagi OPD-OPD yang besar-besar yang setiap contohnya di rumah sakit, dinas kesehatan, pariwisata itu kan cukup besar. Itu memang proses verifikasinya membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan misalnya yang kecil di kecamatan, di bagian umum untuk sewa Gedung kaca ini, kemudian di dinas perdagangan itu. Secara umum gambarannya seperti itu Mas.

Emerha

Itu mekanismenya terstandar ya Pak di aturannya itu?

Alif Romdhoni

Iya. Ada. Nanti *tag* karena saya juga masih baru ya, saya baru januari kemaren. Nanti untuk yang SOP yang untuk itunya nanti kami cari nanti.

Emerha

SOP terbit di lingkungan mekanisme aja? Nanti apa SKPD?

Alif Romdhoni

Iya. Untuk yang apa?

Emerha

Yang tadi SOPnya tadi?

Alif Romdhoni

Iya. Jadi untuk proses, secara umum kan proses SPJ pendapatan ini kan *tag* ambikan gambarannya. *Draft* ya tapi ini. (narasumber mengambil *draft* dari menit 11:54 – 12:19).

Jadi *progress* secara umumnya seperti itu. Mulai dari masuk terus proses itu memang kita dan kita ya apa ya bahasanya di standar. Disamakan persesinya dengan teman-teman yang ada di OPD pendapatan kita terutama. Jadi kita anukan untuk itunya untuk di pendapatan.

Emerha

Berarti ada bendahara ee apa ada petugas ada tim teknis yang bertugas untuk?

Alif Romdhoni

Iya. Di kita ada tim teknisnya. Di kita ada tim yang bertugas memverifikasi terhadap SPj seperti itu termasuk melakukan rekonsiliasi dengan OPD. Ada tim teknisnya dan itu di SKkan oleh kepala OPD.

Emerha

Itu kalau bendahara penerimaan misalkan mereka pengen konsultasi itu nanti selalu koordinasi ke sini tidak?

Alif Romdhoni

Tergantung secara apanya yang ingin dikonsultasikan misalnya ketika dia membutuhkan rekon itu ada dua cara bisa ke kita, bisa ke akuntansi. Karena secara sim aplikasi kan ada di akuntansi. Ee kalau kemudian berbicara mekanisme karena sekarang yang sedang in kan non tunai itu biasanya melalui kita tapi nanti perbendaharaan yang lebih memahami proses *progress* dan regulasinya. Jadi ya nanti tergantung kalau kemudian, tapi yang lebih sering dengan kita. Misalnya Mas kok masih ada angka yang belum terdeteksi, jadi belum angka yang anu. Jadi nanti melalui kita, kita nanti dengan bidang akuntansi dan itu setiap bulan kita lakukan rekonsiliasi itu.

Emerha

Itu bidang pendapatan juga sering ee apa sering sosialisasi ke bendahara-bendahara penerimaan?

Alif Romdhoni

Kalau untuk ya sarana yang kita lakukan ya rakor setiap bulan itu.

Emerha

Ada rakor ya?

Alif Romdhoni

Haá. setiap bulan kita ada rakor kemudian tiap triwulanan dipimpin Pak Sekda langsung.

Emerha

Itu khusus bendahara penerimaan semua?

Alif Romdhoni

OPD pendapatan.

Emerha

Maksudnya OPD pendapatan ya?

Alif Romdhoni

OPD Pendapatan. Jadi bisa bedaharanya, bisa kepalanya yang datang. Tapi biasanya ee koordinasi OPD pendapatan.

Emerha

Itu dalam verifikasi SPj itu dilakukan per bulan atau setiap kali ada SPj masuk?

Alif Romdhoni

Per bulan. Jadi kita tetap mekanismenya SPj per bulan.

Emerha

Itu kalau misalkan ada temuan misalkan ada koreksian, ada tidak lengkap, itu gimana?

Alif Romdhoni

Nanti ada berita acara rekonsiliasi. Kemudian nanti kita rekon itu ee apa ya melibatkan beberapa pihak. Artinya bukan hanya OPD mereka dan kita tetapi juga bidang akuntansi yang menguasai sistem. Jadi kan untuk SIMDanya kan yang m=pegang akuntansi. Jadi contoh kasusnya begini misalnya ada angka masuk katakanlah sekian juta tapi tidak ada SPSnya. Neg yang belum ada SPS belum terganu itu kan belum bisa kita akui secara anu. Jadi kita tetap harus berpegangnya sampai detail di SPSS itu. Terkadang permasalahan yang kita hadapi itu ketika SPS itu kan harusnya rinci dan rigit tetapi biasanya OPD atau mungkin itu ngglundung. Yah sebenarnya tidak ada yang salah ketika 1.500.000 contohnya tetap secara angka kan tidak tetapi dalam proses pencatatan kan harus jelas. Ini misalnya 1.500.000 itu ada dua transaksi itu kan harus ini transaksi apa dan apa. Kalau secara uang yang anu ya memang tidak ada. Tapi biasanya nanti diakhir di proses pencatatan itu kan harus jelas secara penggunaan misalnya oh yang satu kebersihan, oh yang satu ternyata parkir. Jadi di situ yang kadang ee apa ya, masih dibutuhkan ee proses proses rekon itu. Jadi nanti berita acara rekonsiliasi itu yang disepakati yang mana ya itulah yang menjadi dokumen untuk kemudian kita pertanggungjawabkan.

Emerha

Itu dalam proses verifikasi itu bidang bidangnya Bapak juga melakukan pengesahan SPj tadi itu?

Alif Romdhoni

Iya.

Emerha

Jadi setelah diterima SPj itu lengkap disahkan?

Alif Romdhoni

Tag kasih lihat contohnya ya. Jadi ini contoh SPj pendapatan penerimaan dari sebuah OPD. Ketika dia mengirimkan seperti ini angka-angka sampai dilampirin dengan bukti-bukti setorannya, sudah cocok nanti ada proses verifikasi seperti ini sebagai pengesahan bahwa ini sudah cocok sudah sesuai sudah ada bukti pendukungnya. Sehingga nanti ada petugas verifikasi seperti ini nanti Pak Kepala juga seperti ini.

Emerha

Sebagai pengesahannya ya?

Alif Romdhoni

Iya. Ini lembar pengesahannya. Ini kan sudah telah diperiksa dan disahkan oleh Kuasa BUD. Jadi ya ibaratnya jadi ya kita kembali ke Jenengan tadi nanya neg kuasa BUD ya kuasa BUD di bendahar penerimaan nanti ada proses ini, ada proses petugas yang bertugas kemudian Kepala Bidang bisa.

Emerha

Emm harus . . . (18:48)?

Alif Romdhoni

Iya. Bisa dilihat juga ini penelitian.

Emerha

Pak kalau misalkan ada bendahara penerimaan itu selama proses mekanisme itu ada nggak yang misalkan diminta Bapak tadi bilang tanggal 5 kan masuk? Itu yang ee ada?

Alif Romdhoni

O iya. Ada sih.

Emerha

Jadi gimana mengantisipasinya?

Alif Romdhoni

Jadi ee gini kita kasih toleransi. Sebenarnya kalau secara anu itu tanggal 10 itu. Artinya nanti kalau kemudian memang sampai ee batas waktu, kita kan punya forum ya sekarang untuk meminimalisir itu kan paling tidak ada beberapa mulai dari WA, grup kita punya WA kita sering rakor. Ya itu nanti kita sampaikan di rakor terus ya lebih kea pa ya fungsi ee saya melihatnya memang belum ada ngirimnya tetap ngirim. Cuma waktunya itu yang kadang mundur. Jadi sebenarnya permasalahannya bisa nanti di sistem. Kadang kan SIMDA itu juga *error*, posisi di OPD itu juga. Jadi kalau kemudian ya alhamdulillah sih kalau secara bendaharannya cukup disiplin cuma kadang permasalahannya itu di sistem. Misalnya sedang mengalami *error* jaringan itu kan mereka kesulitan untuk itu. Tetapi ee biasanya ini kan nanti kan ada lampiran yang paling utama. Jadi yang kita kita mintakan misalnya nanti anu dikirim aja dulu karena nanti kan masih ada proses kelengkapan. Jadi kita kan membutuhkan angka yang sudah terverifikasi itu segera dikirimkan. Nah, biasanya itu nanti yang format ee ini yang kita verifikasi itu kan sebenarnya kan yang format SPj yang fungsional ini. Nah, kita kita mau mengutamakan yang ini dulu secara angka. Kalau kemudian mereka katakanlah Pak saya ada beberapa STS yang belum dilengkapi, ya nanti dilengkapi sambil proses rekonsiliasi. Tapi di biasanya ini kan sistem ini kan saya bisa akses mereka juga bisa akses. Jadi intinya kan saya ncocoki angka yang saya akses dengan teman-teman yang ada di bendahara itu. Kalau itu sudah lengkap ya paling nggak disampaikan. Jadi ya memang ada yang sok apa istilahnya mblenjani kalau Bahasa jawanya jadi keluar dari yang kita sepakati secara waktu. Tetapi ke arah karena tadi ada ada biasanya karena sistem kalau tidak ada ya biasanya, tapi saya selama 5 bulan ini belum pernah mendapati sampai kemudian tidak mengirimkan satu bulan itu memang belum ada. Kalau kemudian memang apa istilahnya tidak lengkap memang sering, artinya ketika kita cek itu kan kadang kan petugas ketika ngecek seperti ini itu kadang yang ditemui itu misalnya ada sebuah transaksi belum ada jadi seperti ini. Terkadang kan orek-orekan seperti ini yang kita anu, nah ini proses nanti di rekonsiliasi. Jadi kadang STS nomer belum ditemukan. Jadi seperti itu yang kadang terjadi. Jadi kalau ngirimnya ya alhamdulillah semuanya tetap ngirim.

Emerha

Jadi ada SIMDA pendapatan di sini juga ya Pak?

Alif Romdhoni

Iya. Tetap.

Emerha

Jadi dasar dari memverifikasi itu angka yang sudah ada di SIMDA itu?

Alif Romdhoni

Heém. Sudah ada di situ. Jadi SIM keuangan karena belum pendapatan berdiri sendiri ya. Jadi SIM keuangan yang di situ nanti ada tampilan menu untuk yang bendahara, kan nanti ada bendahara pengeluaran sendiri ada bendahara pendapatan. Nanti kita akses di bendahara pendapatan kemudian kita cek di buku harian pendapatan. Nanti kita akses dari situ. Tapi belum bicara SIMDA pendapatan tok berdiri sendiri. Tapi tetep masih jadi satu SIMDA keuangan.

Emerha

Itu di tahu SPDnya bendahara penerimaan benar apa tidak itu?

Alif Romdhoni

Oh bukti STS tadi.

Emerha

Bukti STS tadi?

Alif Romdhoni

Heé. Jadi kan dia harus memiliki STS.

Emerha

Itu dibandingkan dengan yang mana?

Alif Romdhoni

Gimana?

Emerha

Dibandingkan dengan apa?

Alif Romdhoni

Dibandingkan kami menerima dari BPD. Jadi BPD itu kan mengirimkan B9, tebusan, STS kita verifikasi di kita. Kemudian mereka juga punya karena sebagai penyeter, akuntansi juga punya. Jadi nanti kita *cross check* dari situ. Jadi tidak hanya SIM yang masuk secara, *online* secara aplikasi saja. Kita punya dikirim ada contohnya juga baru saja dikirim. Jadi nanti BPD secara temporary pasti akan menyampaikan data seperti ini kepada kita, kita gunakan nah, ini masih campur jadi satu. Jadi di sini belum per OPD. Nah, ini tugas kita untuk...

Emerha

Cek manual OPD aja ya?

Alif Romdhoni

Cek mana aja dengan STS yang ada, rinciannya apa. Makanya kan masih ada NPWP macem-macam. Jadi kita rekap dari ini untuk kemudian sebagai salah satu cara kita untuk memverifikasi..

Emerha

... (24:55) sebagai fasilitator ya verifikasi?

Alif Romdhoni

Iya.

Emerha

Apa ada sanksi Pak kalau misalkan mereka yang tidak menyampaikan SPj atau misalkan menyampaikan tapi telat atau menyampaikan tapi salah?

Alif Romdhoni

Kalau secara sanksi belum ada ya. Jadi memang kita berusaha berusahanya ya jangan sampai ada keterlambatan. Paling nanti yang kadang kita buat bodo neg Bahasa Jawa itu nanti ketika BPK. Jadi mereka juga biasanya kadang seperti ini kan seperti ini sekarang pas proses ada BPK itu biasanya ya mereka sangat disiplin. Jadi memang belum ada sanksi yang kemudian ketika ee istilahnya ada *punishment* ada *rewardnya* ya ketika telat kemudian ada *punishnya* yang seperti apa memang belum ada untuk yang pendapatan. Jadi paling nanti ya lebih ke tri wulan itu. Jadi pas tri wulan itu kan di depan Pak Sekda, kepala SKPD sendiri yang datang itu nanti di proses itu dilengkapi Pak Sekda itu sudah relatif anu tanpa harus dengan katakanlah dikurangi apalah itu mereka sudah merasa anu sendiri. Karena sebenarnya proses ini kan juga apa ya, semakin mereka disiplin kan ada, ini kan juga ada korelasi dengan insentif walaupun itu juga tidak menjadi apa ya istilahnya kunci atau menjadi utama tapi paling tidak juga mereka terkendala di itu. Jadi *neg* secara regulasi yang kemudian yang tidak menerima mendapatkan sanksi ini, nilai apa kinerja jelek itu memang belum ada di kita. Khusus yang pendapatan. Kalau yang keuangan secara umum memang ada, tapi itu keuangan secara umum. Harusnya keuangan secara umum itu kan kita ada mekanisme monev yang kemudian itu nanti ada nilai OPD yang kemudian itu nanti berhubungan dengan TPP itu memang ada.

Emerha

Itu ada ya Pak ya?

Alif Romdhoni

Ada. Tapi itu keuangan secara umum jadi tidak hanya pendapatan *tok* tapi didalamnya ya, karena kan ini kan nilai yang kemudian setiap OPD bisa. Kalau yang seperti ini kan berarti hanya OPD penerimaan saja yang bisa mengakses. Nah, kita memang belum kesitu. Tapi kalau OPD secara keseluruhan yang setiap OPD baik itu pendapatan maupun anu itu, dan ini menjadi bagian. Ketika dia menentukan target katakanlah pendapatan sekian, terealisasi sekian itu kan bagian dari . . . (27:20) milik. Tapi itu bukan dalam ranah kami untuk mengendalikan pendapatan kemudian ada sanksi dari OPD, tapi secara umum itu ranahnya nanti di Bappeda. Hubungannya dengan TPP dengan kepegawaian seperti itu. Jadi kalau secara pendapatan *tok* kita memang belum memiliki mekanisme untuk memberikan *punish* dan *reward*. Jadi kalau kemudian *neg* bagus terus bisa ditambah sekarang itu memang memang belum ada.

Emerha

Oke.

- c. Wawancara ke-3 dengan Bapak Alif Romdhoni pada 04 Juni 2018, pukul 13.25 pagi di ruang tamu bidang Pendapatan. Alif Romdhoni adalah kepala subbidang evaluasi dan pengendalian pendapatan di BKAD sampai saat ini. Wawancara ini tentang topik proses belajar transparansi dan akuntabilitas di bidang pendapatan (RM3).

Q.1. Model sosialisasi

Emerha

Iya pak ini tentang e.. apa cara tentang diklat pelatihan ya

Alif Romdhoni

He'em, he'em

Emerha

e.. dari awal itu pak, dari mana di tahu bahwa e.. pengelolaan pendapatan itu harus .. harus sudah seperti sekarang ini dilakukan awalnya gimana?

Alif Romdhoni

Sebenarnya kalo secara, pegawai itu kan bekerja secara regulasi ya dia harus bekerja menggunakan dasar itu, kalo kemudian bekerjanya dari mana ya dari Tupoksi, Tupoksi yang ada kemudian kita harus menjabarkan Tupoksi menjadi

kegiatan kita, dan saya pikir ketika siapapun yang namanya PNS itu di tempatkan di mana pun ya dia harus belajar Tupoksi dulu. Oh.. tupoksinya memang.. ya.. ketika hubungannya dengan pendapatan memang kita harus optimalisasi pendapatan ya.. gitu lah.. kayak gitu ya kita harus belajar terkait dengan seluk-beluk pendapatan. Kalo nanti berbicara terkait dengan pendiklatan sebenarnya ada institusi lain yang lebih berwenang dalamnhal ini. Karena di satu sisi kita hanya sifatnya hanya mengusulkan karena ini kebijakan untuk pendiklatan itu ada di badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan. Kemaren kita ada analis pajak kita kirimkan untuk mengikuti diklat itu, terus beberapa waktu yang lalu juga yang untuk properti itu, tapi memang ada yang sifatnya mandiri, kalo anda berbicaranya diklat kalo diklat itu kan kurikulum terpenuhi. Jam tatap muka segala macam harus ada, ada yang sifatnya cuma seminar, workshop atau sekedar. Jadi kalo yang stretnya di.. diklat mungkin lebih tepatnya di BKPP secara institusi yang mengampu, kalo tadi berbicaranya terkait dengan dari mana ditugaskan ya di Tupoksi, kemudian kita penjabaran Tupoksi, kemudian dari peraturan perundangan oh.. ternyata misalnya retribusi harus seperti ini, aturannya harus seperti ini, kalo pajak harus seperti ini, seperti itu. Itu prinsipnya antara Tupoksi itu yang kita gunakan.

Emerha

Pernah menggunakan tenaga ahli, sebelumnya?

Alif Romdhoni

Untuk beberapa, misalnya untuk menilai, contoh ya.. saya berbicaranya di sebelah, di.. kita ketika harus menilai misalnya pajak PBB kita gunakan tenaga ahli untuk donasinya segala macam, tapi memang kalo yang sifatnya retribusi karena dia kan ada di..OPD teknis ya.. ada beberapa yang memang menggunakan tenaga ahli tetapi se.. mulai 2016-2017 ke sini, itu memang diwajibkan. Kalo kemudian definisi tenaga ahli itu dari Dinas Akademik jadikan gini runtutannya untuk membuat suatu regulasi itu kan kita butuh payung huku, payung hukum itukan bisa Perda, bisa Perbup ketika kita berbicaranya Perda, karena Perda nanti harus ada eksekutif, legislatif nah.. di situ harus ada naskah akademik. Nah.. naskah akademik inilah yang menjadi logika menggunakan tenaga ahli e.. termasuk misalnya kami, ketika harus berhubungan dengan BUMD dengan aneka usaha itu kan kami harus membuat Perdanya. Nah di situ ada naskah akademik yang harus kami buat, misalnya ini harus menjadi Perumda berwujud apa misalnya Perseoran Terbatas, atau Perseroan Daerah. Nah.. kemudian ini harus memberi ban.. ban.. e.. bentuk modal seperti apa nah.. itukan ada naskah akademiknya ya.. kembali ke permasalahan apakah sudah, untuk beberapa sumber pendapatan terutama yang pajak dalam hal ini di PBB sudah menggunakan tenaga ahli dari bekerjanya denga.. saya lupa UGM tapi PS apa saya lupa itu.. itu ada di teman sebelah yang me.. apa ya.. untuk menentukan. Karena dia kan tiap tahun kan ada.. ada perubahan secara nilai jadi yang semula anu kan.. biasanya ada

Emerha

Oh.. itu dari.. dari UGM ya..

Alif Romdhoni

He'e untuk yang kemaren, temen dari UGM, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di luar, karena sebenarnya kan itu kan melihat dari jumlah ketersediaan anggaran, jadi biasanya kita kan ada anggaran untuk katakanlah.. untuk tenaga ahli penyusunan dan sebagainya itu apa, kemudian baru siapa yang masuk siapa yang anu baru.. tapi ini untuk yang setahu kami untuk yang ini UGM kemaren yang di PBB

Emerha

Itu bagaimana pak model interaksinya, tenaga ahli itu di... datang ke sini yang mengerjakan e.. atau gimana?

Alif Romdhoni

Jadi.. di sini kita sudah punya data dulu, datanya seperti ini secara.. data dasarnya dat.. data kasarnya ya.. data kasar ini kan kemudian kita serahkan ke teman-teman di sana untuk dilakukan pengkajian kemudian mereka turun ke lapangan, tentu saja sebelumnya ada semacam forum dengan kita ya.. untuk mempertajam data yang sudah ada ini, kemudian setelah kita sudah fanstomin mereka coba ke lapangan, kemudian mereka mencoba memaparkan hasilnya dengan berbagai pertimbangan tentu saja, dan tidak mutlak juga gitu kita hanya menggunakan hansi hanya itu, kita juga melihat kalo Bupati kan punya kebijakan ya, kalo kemudian hanya melihat pada posisinya mereka yang kemudian hanya berfikir oh... segini, tidak berpikir politis dalam tanda kutip karena ini kan juga ada juga kebijakan-kebijakan Bupati. Nah.. kemudian itulah yang kemudian kita formulasikan untuk kemudian kita tentukan untuk menjadi seperti apa. Jadi tidak mungkin tidak setiap A dari mereka menjadi A+, bisa A- artinya kita juga harus melihat kondisi riil, karena kita tidak mutlak semata-mata menggunakan data itu, tetapi itu menjadi salah satu apa terkait dengan bantuan, ya kita tetep nantikan outputnya kan kita tetep masih menggodok secara internal

Emerha

Yang dilakukan tenaga ahli itu apa pak, yang..?

Alif Romdhoni

Jadi.. kalo PBB itu kan da.. zona siaga per meter untuk menentukan, ini contoh kecilnya ya.. untuk PBB itu, jadi ketika menentukan suatu obyek pajak, untuk kemudian dia mendapatkan nilai tertentu katakanlah NGOP, dan NPOP kemudian muncul nanti di slip merah yang kemudian per meter berapa, itukan ada zonasinya, a.. zona itukan selain memperhitungkan katakanlah secara letak geografis kedekatan dengan fasilitas sarana umum, sarana publik, akses dan segala macam nah itu kan digunakan. Nah.. data kita yang sementara inikan mungkin masih banyak ya, karena kan kita warisan data 2014 dari... TPP... e.. pajak pratama kan waktu itu pelimpahan PBB itu kan kita 2014 ya.., PBB di limpahkan ke kita, nah.. kita dasarnya

dari situ jadi memang untuk memperbaiki blist yang ada itu memang ini juga berproses, jadi memang kalo kemudian bertanya apakah sudah benar khusus yang PBB apakah sudah bisa dikategorikan datanya itu sudah.. fiksfer sesuai, ya.. berapa persen masih belum, karena kita berproses di situ, ya contohnya itu, jadi untuk menentukan nilai obyek pajak yang ada di dalam

Emerha

Nah.. berarti e.. Pemda itu terima jadi hasilnya, hasil kayak penentuan nilai tadi, sama zonasi segala macam itu?

Alif Romdhoni

Ya.. kalo bahasanya terima jadi itu sesuatu yang mereka output dari mereka ya.. tetapi ketika kemudian kalo dipertanyakan apakah yang terima jadi ini langsung digunakan semata-mata tidak, jadi terima jadinya kan ibaratnya pengadaan barang dan jasa kan untuk jasa seperti itu kan, jasa konsultasi seperti itu kan ada nilainya, ya.. akhirnya ada sebuah dokumen yang memang harus ada karena kan misalnya 50 juta itu dokumen kajiannya seperti apa, nah.. tetapi dokumen kajian ini kan nantikan untuk di formulasi menjadi kebijakan kan harus kita.. kita lihat lagi kedalamannya, tidak kemudian untuk apa.. apa ya istilahnya meragukan, tetapi kita harus melihat fakta riil karena kondisi sosial ekonomi masyarakat itu kan sangat.. sangat berubah kita tidak ingin justru itu malah menghambat juga secara investasi, menghambat juga secara kebijakan. Contoh kasusnya misalnya waktu.. jadi waktu peralihan untuk menjadi bandara itu kan nilai nya kan menjadi berubah, satu sisi ya.. tapi di sisi lain kebijakan ketika ini kemudian harus ada, karena waktu itu belum ada pembebasan lahan secara seluruhnya kemudian butuh stimulan secara kebijakan agar ini mempercepat, akhirnya ada diseleksi-seleksi ya.. bukan dibebaskan tetapi ada permohonan-permohonan untuk keringanan segala macam. Jadi artinya jatuhnya ketika mereka harus bayar, ya akhirnya menjadi berubah konotasinya seperti itu, di 2017 kemaren kejadian angkasa pura itu mengajukan e.. kebe.. bukan keberatan tetapi apa ya.. mengajukan keringanan untuk PBB mereka 50%, tapi tahun ini tidak dikabulkan Bupati karena asumsinya kita kemaren kita melihatnya, karena itu belum keseluruhan dibebaskan okey.. masih katakanlah mereka masih punya bill, tapi ketika sekarang sudah keseluruhan ya itu sudah mutlak tanggung jawab angkasa pura. Jadi kalo kemudian tadi bahasanya apakah ini.. kemudian langsung kita terima, ya.. sebagai sebuah produk karena ibaratnya kita beli product itu kan bayar 50 juta dapat apa, beli motor ya dapat, tetapi apakah kemudian product ini e.. langsung kita mentah-mentah tidak, kita masih harus melihat karena ini pun kalo tidak kemudian tersosialisasi dengan baik paling tidak tingkat dua, tingkat bawah juga menimbulkan resistensi yang cukup besar, tapi kalo sudah me.. me.. menyangkut e.. kita kan sudah punya RT, RW ya.. zonasi-zonasi mana yang indus.. mana yang wisata, mana yang itu sudah ada, jadi juga ada sinkronisasi dari tahap itu, jadi mana yang memang pertanian, mana yang itu harus..

Emerha

Itu pembuatan zonasi tadi, nilai objek tadi memang harus menggunakan tenaga ahli nggak bisa di.. lakukan sendiri?

Alif Romdhoni

e... mungkin kalo tenaga kita mampu, tetapi kita masih sangat terbatas untuk yang memiliki kemampuan untuk itu artinya untuk penginderaan, untuk data-data itu kan kita masih.. masih apa ya.. baik secara fasilitas sarana yang harus digunakan maupun tenaga SDM nya, jadi memang cukup berat lah.. sebenarnya mungkin bisa kalo kemudian kita punya katakanlah misalnya THL dengan tenaga yang kemudian memenuhi dengan kapasitas katakanlah kemampuan pendidikan, kemudian kita juga punya sarana dan prasaranya untuk memotret segala macam zonasi itu, tetapi kan faktanya yang ada..kita belum mampu bisa ke situ

Emerha

Apakah tidak dilakukan semacam transfer pengetahuan dari tenaga ahli tadi ke karyawan di sini?

Alif Romdhoni

e.. yaitu berproses secara alami tentu saja ya.., artinya apa yang mereka anukan tetep kita juga.. juga harus.. karena kita tidak mungkin tergantung secara mutlak juga dengan mereka ketika kita memang harus berjalan kemudian tidak ada support secara anggaran misalnya, untung saja ini masih teranggarkan, misalnya ini tidak dianggarkan mau tidak mau kan kita tetep harus kerja, tanpa harus ada mereka cuman kan permasalahannya kan kalo saya melihat mungkin kalo secara regulasi memang yang bisa dipertanggung jawabkan ketika ada akademisi, dalam tanda kutip entah itu bisa dikatakan sebuah e... konsekuensi dari Undang-undang, kan sekarang kan semua peraturan perundang-undang itu kan harus ada.. naskah naskah akademik, baik yang sifatnya undang-undang, kita yang Perda aja juga harus ada naskah akademik ketika berbicara akademik ini kan memang domainnya kan akademisi yang secara anunya ada di kampus ya.., termasuk kita ya.. mau tidak mau, tetapi kalo kemudian nanti itu tidak tersedia anggaran ya mau tidak mau juga, kita juga nggak harus wes.. semampu kita untuk itu. Jadi kalo kemudian berbicara nya transfer pasti ada transfer learningf, Cuma kalo ini saya melihatnya lebih karena e.. eranya ya.. konsekuensi sebuah regulasi yang memang harus ada secara umum harus ada sebuah e.. proses di mereka ya.. kemudian kita tadi saya katakan kita kaji lagi yang kemudian mejadi formasi kebijakan

Emerha

Selama ini tidak pernah diadakan Bimtek dengan menggunakan tenaga ahli tadi supaya diajarkan?

Alif Romdhoni

Karena memang kalo berbicara itu kan sangat tidak efisien ya.. dengan Bimtek, jadi kita itu kan memang beberapa ya.. yang membidangi itu ya Cuma satu subjek saja, jadi memang akhirnya ya lebih kita intens walaupun di tempat perencanaan pajak itu, ya.. komunikasi dengan mereka, saya nggak tahu ya.. di luar yang kemudian formal. Jadi komunikasi-komunikasi yang informal, karena saya yakin pasti yang namanya hubungan komunikasi itu kan tidak semuanya harus berupa formal, ada

DPA ada anggaran segala macam, tapi ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya informal nah.. itu ditempuh atau tidak, berjalan atau tidak memang sementara kan ada di temen saya yang.. yang melakukannya di.., kami juga tidak bisa tapi sepengetahuan kami ketika mereka me.. menyusun ada kok bukunya saya pernah melihat itu hasil kajian-kajian seperti itu jadi ya.. mungkin lebih ke nganu kalo saya melihat eranya ya.. saat ini memang harus melibat kan itu. Karena kan kalo birokrat itu kan jelas praktisi ya.. dia tinggal praktek ibaratnya, kalo akademisi ya.. jelas dia memang menggodok mengolah teori kan. Kadang kan teori di praktekkan sulit ada, kadang yang praktek itu secara teori ya.. kadang-kadang seperti itu jadi apapun itukan, kadang kan kalo kita diberi kan ini kan secara teori ya, tapi kalo sudah bicara praktek di lapangan kan akan banyak faktor yang kemudian menentukan, sosial, kultural belum lagi kalo kemudian berbicara politik. Itu yang kadang kala, kalo akademisi kan sangat bebas dari itu, intervensi secara itu kan jelas mereka nggak mungkin, tentukan daerah AA ya udah selesai bagi mereka, dia tidak akan melihat bahwa ini sebenarnya seperti apa, kondisi sosial masyarakatnya seperti apa, semuanya seperti apa mereka nggak akan. Nah.. kita butuh sesuatu yang kemudian okey.. ini jelas putih ibaratnya, ha.. ini ada hitamnya lha.. kita harus melihatnya kan di.. di.. yang kemudian bisa berpijak di dua.. dua kaki ibaratnya, bukan kemudian area abu-abu itu memperbolehkan yang hitam dan memperbolehkan.. atau kemudian harus yang putih, tapi lebih karena kebijakan daerah itu kan nanti yang akan menanggung kan daerah. Ketika katakanlah di periksa BPK kenapa menentukan seperti ini, kan yang akan punya anu kan bukan akademisi tadi tapi yang sudah di ambil hasil kebijakan oleh Bupati misalnya, oh.. berarti sudah menggunakan ini, ini kanjiannya oh seperti ini, paling kan nantikan melihatnya kan secara oh ini administrasinya kurang, oh.. ini terlalu paling hanya seperti itu karena ini yang harus dipertanggung jawabkan dan mutlak Bupati adalah sebagai istilahnya bapaknya masyarakat dan mereka kan untuk mengambil kebijakan kan tidak arsip langsung secara teoritis seperti itu gambaran secara umum

Emerha

Selain.. selain bidang pajak tadi apa yang menggunakan tenaga ahli khusus di bidang pendapatan?

Alif Romdhoni

e.. kemaren waktu di bidang pendapatan, pajak itu kan kita punya 8 atau 10 itu ya yang kita.. itu baru yang dari aspek dari e.. PBB memang masih ada, tapi kalo yang berbicara yang di luar kalo sepengetahuan kami, karena ini kan lebih ke arah e.. apa ya... di SKPD teknis ya.. SKPD teknis, sepengetahuan kami di.. di perhubungan itu pernah.. pernah ada kerja sama dengan Puskar yang lalu lintas itu Cuma outputnya seperti apa kami tidak tahu, karena itu ada di.. di.. mereka, kemudian di Pariwisata itu juga pernah bekerja sama tapi apakah itu langsung kepada sebuah nominal angka, atau kajian secara umum kan bisa untuk zonasi kawasan wisata. Contoh konkritnya begini, ketika kemaren kita tidak bisa masuk pada obyek wisata tertentu karena itu.. itu terkait dengan regulasi dari Gubernur waktu itu kan ada wacana ada.. ya dibuat aja zonasinya ada jadi masuk kawasannya bukan peruntukan kawasannya seperti itu. Nah.. itu yang kemudian oleh temen-temen di dinas Pariwisata Cuma didiskusikan Cuma outputnya itu saya yang kurang tahu apakah kemudian bicaranya itu ke arah tarif retribusinya atau hanya berbicara zonasi, tetapi prinsipnya memang e.. konsekuensi saat ini Perda itu memang harus naskah akademisi, jadi apapun itu ketika bicaranya perda harus ada naskah.. dan yang namanya naskah akademis sudah domainnya pihak kampus ya Universitas, jadi memang kalo mau anu ya memang harus ada itu terlepas nanti outputnya itu apakah kemudian berbicara nominal, berbicara kemudian secara filosofis segala macam itu kan. Karena kalo kemudian ditanyakan, tahu opo to.. naskah akademisi koyo opo, apakah ada panduan bakunya kita juga nggak tahu, selama ya itulah naskah akademis ya.. ya sudah itu yang kita di lakui karena kemaren waktu kita ikut yang, jadi pendapatan ini kan salah satunya kan untuk yang terkait dengan BUMD kita punya e.. ada 4 BUMD yang pertama itu BPD, jelas itu karena BPD itu kan satu Provinsi ya.. sudah kasda di situ jadi kita dapet dari itu, kemudian kita punya bank pasar, Bank pasar itu Bank Perkreditan di bawah Kulonprogo, kita punya aneka usaha kita punya SPBU, punya perbengkelan, kemudian kita punya Aspal Mixplan jadi istilahnya.. yang punya Selo Adikarto jadi dia bergerak di Aspal Mix. Nah... ketika kita berbicara regulasi untuk penyertaan modal nya harus berapa itu kan kita membutuhkan kajian akademisi, untuk berbicara apakah ini, kan Bank Pasar kan saat ini kan mau beralih karena untuk e.. menjadi sebuah Bank dengan sekian asetnya itu kan katanya harus ada peralihan secara kepengurusan atau seperti apa itu kan, saat ini kemaren kita ikut rapat itu memang itu kajiannya dari temen-temen UGM untuk membuat itu, nah.. itu ada di bagian perekonomian memang yang menyusun tetapi kan intens bicaranya kan dengan kita karena nanti ketika kita e.. berbicara output e.. istilahnya bukan BP ya.. tapi istilahnya free investasinya lagi, jadi kan saat ini kan kemaren salah satu kajiannya itu tidak bisa yang investasi ini langsung kita tarik lagi di tahun berjalan, ini harus diwujudkan lagi akumulasi lagi, karena ini nanti akan sehat akan bisa lebih optimal kalo kemudian reinvestasinya itu kalo sudah berjalan 3-4 tahun seperti itu, seperti itu. Nah.. itu kan kajian dari temen-temen akademisi untuk kemudian oh.. ya.. sudah kalo seperti itu konsekuensinya misalnya mereka dapat katakanlah laba 2 milyar misalnya kan kita kembalikan lagi bahkan malah kita tambah lagi. Nah.. kalo berbicara secara uang memang tidak ada yang hilang sebenarnya angka yang pindah, tapi kalo berbicara angka segar yo bisa kita olah untuk menjadi program kegiatan di turunkan itu kan sebenarnya rugi kalo berbicara seperti itu. Tapi kalo kemudian dalam konsep reinvestasi itu butuh itu kan ada kajiannya itu sekian. Karena nanti ini akan katakanlah ini akan berjalan dengan bagus itu di tahun ketiga-keempat pak jadi seperti itu, ada.. kalo udah di anu nanti tidak hanya sekian milyar bahkan bisa lebih, hal-hal yang seperti itu kan yang kita selama ini dibukakan matan kita oleh temen-temen dari pihak akademisi untuk seperti itu kan. Sementara tahunya kita kan kita setor modal 2 milyar nanti bisa kembali 2,5 milyar untung kita dapet 500 –an kembali, ternyata ada beberapa kajian yang oh.. nggak seperti itu untuk beberapa perusahaan daerah ya akhirnya kita.. nah... salah satunya yang saat ini sedang di usul itu. Jadi itu juga berbicara pendapata karenakan di dalamnya kan bagian laba dari itu kan bagian dari lain-lainnya yang

sah..

Emerha

Kalo strategi-strategi pendapatan, misalkan pengembangan pendapatan e.. itu menggunakan tenaga ahli juga atau?

Alif Romdhoni

Yang apa untuk?

Emerha

Misalkan mengembangkan strategi-strategi pendapatan itu dirancang sendiri atau gimana menggunakan tenaga ahli juga?

Alif Romdhoni

Jadi.. jadi anu.. jadi kita pake dua cara ya.. jadi untuk menentukan pendapatan itu kan tidak hanya eksekutif tok, artinya ada legislatif juga, setelah itu legislatif punya hitungan, kita pun punya hitungan nah.. coro bodo.. nah.. kadang yang kita lakukan hitungan kita itu kan, kita hanya melihat pada pola inkulsi terus naik sekian sampe sekian persen nah.. di sisi yang lain di temen-temen Dewan itu mereka punya kajian, saya nggak tahu ya.. kalo dewan kan bagaimana mereka kan punya tenaga ahli juga, setiap fraksi atau setiap anggota dewan punya tenaga ahli, apakah dari tenaga ahli itu, tapi kriteria tenaga ahli mereka seperti apa kan kita tidak tahu. Nah.. saat ini yang.. terjadi untuk menentukan itu memang ada semacam bergining ya.. kita punya itungan, mereka punya, tetapi untuk beberapa itungan kita memang kita menggunakan akademisi sebagaimana tadi pajak, jadi ketika kita itungan tiap tahun X misalnya pajak kajian kami seperti ini tapi memang ada beberapa yang baru kita.. jadi belum semuanya pendapatan ini menggunakan e.. usulan atau analisa secara akademisi memang. Jadi memang baru beberapa

Emerha

Tadi nama.. namanya apa tadi ya pak ya.. ?

Alif Romdhoni

Yang..?

Emerha

Dari UGM tadi apa namanya, nama lembaganya?

Alif Romdhoni

Kalo yang.. tak tanyakan aja ya.. secara nganu, PSEKP Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

Emerha

ee.. ya ya.. ya..

Alif Romdhoni

Itu yang dikatakanlah oleh dokter

Emerha

Nah.. terus nanti... e.. strategi hitung-hitungan tadi itu belajar dari mana pak apakah punya spesialis?

Alif Romdhoni

Kita punya tren jadi di sini ada, kita punya RPJMD namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu kan ada di situ ada perhitungan prediksi lima tahun untuk pendapatannya, di satu sisi kita punya data realisasi, jadi misalnya katakanlah 2018 kita kan punya sudah punya realisasi 2017 jadi biasanya formulasinya itu di.. selain kita melihat bagaimana progres realisasinya apakah naik atau tidak kan dilihat dari realisasi misalnya kan sekarang realisasi 2017, bagaimana EPRB, bagaimana pajak, bagaimana PBB, bagaimana retribusi dan kita menentukan ini kita kan biasanya minta data dulu nih.. ke OPD karena yang tahu potensi kan OPD. Contoh misalnya yang tahu jumlah kendaraan, tahun titik kantong parkir, yang tahu perkembangan pasar, itu kan bagian dari retribusi itu kan dari masing-masing OPD, jadi kita memotret dari situ kemudian kita buat formulasi biasanya trennya naik, biasanya trennya naik walaupun nanti faktanya kan memang ada proses yang kemudian kita bisa merevisi target pendapatan, perubahan jadi kita ada mekanisme seperti itu. Artinya kita lebih ke arah bagaimana realisasi pada tahun yang lalu, kita lihat kita cocokin secara RPJMD bagaimana progresnya secara e.. capaian kemudian baru kita tentukan. Nah.. ada mekanisme rapat kerja sampai kemudia penuh dengan dewan jadi tidak hanya kita, makanya nanti kita bahasanya kita dalam tanda kutip itu dengan saling anu dengan anggota dewan, dewan punya data seperti apa, kami punya data seperti apa nah.. disitulah kemudian terjadi kesepakatan untuk menentukan target pendapatan pada tahun X seperti itu

Emerha

Itu ada orang khusus yang menanganinya itu pak?

Alif Romdhoni

e...Subbid

Emerha

Subbid nya?

Alif Romdhoni

Iya..

Emerha

Memang subbidnya keilmuannya di situ ya..?

Alif Romdhoni

Subbid perencanaan, nah... kalo kemudian berbicaranya keilmuan ini kan berbicara.. anu ya.. opo e.. kualifikasi pendidikan,

ah.. kebetulan yang menangani kan Pak Win secara ekonomi dia SE, nah.. dia juga membidangi Subbidnya kan Perencanaan Pendapatan ah.. akhirnya ya.. mau nggak mau dengan segala yang dipunyai SE nya ya.. itu yang.. sat.. ini dilakukan. Tapi kan memang untuk hal-hal sedemikian kan butuh waktu belajar, kalo kemudian orang dari sesuatu yang baru kan butuh proses, tapi prinsipnya kan organisasi itu kan bisa berjalan tanpa harus, nah.. ketika kita punya role, punya SOP, punya Tupoksi itu kan akhirnya kan. Jadi kita memang ada Subbid, jadi saya Subbidnya evaluasi dan pengendalian pendapatan nah.. pak Winardi.. ini subbidnya adalah perencanaan pendapatan, jadi total global baik itu PAD, baik itu nanti sifatnya di AK itu beliau yang.. lakukan, atau mau ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan?

Q.2. Model eksternalisasi

Emerha

Nah.. e.. untuk pegawai-pegawai yang sering diikutkan diklat keluar ada?

Alif Romdhoni

Ada.. untuk beberapa yang sering itu karena langsung menyangkut teknis ya.. teknis itu biasanya kalo misalnya pajak ada anu itu temen-temen di pajak, seperti kemaren Mas Eko yang Kasubbid penetapan itu mereka e.. diikutkan oleh BKBK diklat apa yo.. tapi terkait dengan pajak satu minggu di Jakarta itu Mas Eko, kemudian beberapa tahun lalu bahkan kita pernah kerja sama dengan STAN kita kirimkan 2 orang sebagai penilai properti atau apa itu, dua orang itu dikirim untuk ikut itu, kemudian yang sifatnya seminar, yang sifatnya sosialisasi ya.. sudah cukup banyak di.. untuk di pendiklatan untuk anu ya.. tetep ..

Emerha

Itu.. itu terjadwal ya pak setiap periode atau?

Alif Romdhoni

Kita tergantung dari penyelenggara instansi penyelenggara mitra dan dari usulan jadi tidak bisa jadi dalam satu tahun katakanlah tidak terus ada.. kan e... untuk di kelas Pre.. itu kan tergantung dari penyelenggaranya ya.., jadi kalo misalnya itu dari Kemendagri atau Kementerian Keuangan ya.. kapan kemudian kita bisa mengirim karena memang tersedia, karena di satu sisi juga ada biaya yang harus dikeluarkan nah.. kalo biaya itu teranggarkan secara BKPP, pasti kalo urusannya pendapatan kita yang akan di kirim orangnya, Cuma masalahnya kan untuk usulan-usulan seperti ini kan ada instansi di luar itu yang lebih bisa berbicara, misalnya jenengan tanya tahun ini diklat untuk bidang pendapatan ada berapa, nominalnya berapa nah itukan temen-temendi BKPP di sana. Walaupun nanti kalo kemudian ngepyake ya.. yang akan di.. kirim ya temen-temen kita seperti itu, tapi kalo kemudian berbicara dalam trennya dalam satu tahun direncanakan atau tidak, disediakan anggaran atau tidak itu kan dari temen-temen sana. Kalo yang.. sifatnya itu informal nonformal memang iya, tapi memang sangat terbatas kalo, terus yang menentukan mana yang itu BKPP yang menugaskan

Emerha

Menentukan diklatnya itu gimana pak, kayak kuliah gitu?

Alif Romdhoni

Klasikal, jadi klasikal dia.. ya jelas biasanya sekian hari kemudian ditempat tertentu biasanya di.. Jakarta atau di.. kemudian ya.. klasikal dari pagi, istirahat siang terus lanjut sore, lanjut malam

Emerha

Tatap muka ya?

Alif Romdhoni

Tatap muka, walaupun juga dengan praktek juga, karena itu kan yang dikirim kan semua.. OP.. semua Pemda.. ya jadi kan ada.. setahu saya, saya pernah di BKPP itu nanti ada, ada mekanisme biasanya posttest dan pretest untuk mengukur bagaimana seseorang ketika belum di diklat dengan sesudah di diklat apakah semakin pintar, atau semakin tidak tahu, ada posttest dan pretest, pretest dan posttest. Nah.. di situ juga nanti ada forum yang kemudian saling antar.. antar peserta setahu saya

Emerha

Itu pernah dilakukan?

Alif Romdhoni

Iya.. kalo standar diklat memang seperti itu

Emerha

Apa namanya tadi, protes..

Alif Romdhoni

Post.. posttest itu kan sesudah ya, pretest kan sebelum beda-beda post, itu.. se.. sepengetahuan kami ketika lembaga pendidikan itu harusnya seperti itu jadi dikata-dikata ya memang ada posttest dan ada pretest ada post...

Emerha

Belum.. belum pernah dilakukan itu ya di sini?

Alif Romdhoni

e.. itu mungkin peserta yang bisa anu ya.. kalo saya pernah ikut itu, pernah ada seperti itu, tapi kalo untuk mungkin ke arah ini apakah ada seperti itu kebetulan yang bersangkutan tidak datang tadi sedang keluar, apakah kemaren dilakukan seperti itu yang terbaru itu kan saya belum tanya-tanya juga, tapi biasanya ada seperti itu ya kalo di diklat, ada.. sebelum di diklat seperti apa pemahamannya setelah di diklat akan menjadi seperti apa

Emerha

Lalu mereka yang sudah diklat itu ke sini itu diajarkan lagi ke?

Alif Romdhoni

Ya.. ke sini itu ada transfer learning dengan teman-teman terutama dengan satu subbid yang jelas kemudian, tetapi kan harus dibuktikan dulu mereka lulus dan tidaknya ah.. nanti setelah ke sini ada surat keterangan lulus nanti ada anu.. kemudian merek, bahkan terkadang untuk yang seperti itu bisa.. istilahnya tanda kelulusannya bisa untuk mengajar di.. berbagai tempat sebenarnya ketika dia dinyatakan lulus dari sebuah seperti itu, penge.. peng.. pe.. pengalaman kami ketika kami waktu itu ada Bimtek Keuangan Daerah satu minggu di UGM itu juga ada sebuah sertifikat yang disitu sudah dianggap mampu untuk memberikan *transfer learning* terhadap, jadi kalo kemudian akan diakan misalnya Pemda katakanlah kemaren sudah mengirim kemudian kita.. secara penganggaran ada nih.. Bimtek Pajak misalnya kemudian narasumbernya ya.. yang kemaren kita kirim, kemaren kita kirim tentu saja dengan bukti dia lulus, nek dikirim tapi nggak lulus kan nggak mungkin ya.. biasanya seperti itu, jadi nanti ada *transfer learning* nya seperti itu

Emerha

Transfer learning itu medianya apa yang digunakan pak apakah diskusi atau ada Bimtek lagi di bikin ditingkat internal?

Alif Romdhoni

kalo di.. itu kembali ke anunya.. apa ya.. istilahnya kalo ini menyangkut kebijakan jelas itu, nanti pokoknya tinggal jadi sosialisasi kalo untuk diklat, tapi kalo ini transfer learningnya itu sifatnya untuk e.. apa ya.. sesuatu yang dari tidak tahu menjadi tahu, kita mekanismenya biasanya anu.. ya.. melalui rapat, jadi yo.. bahasanya.. e.. apa ya.. rapat koordinasi mungkin terkait dengan, jadi.. tidak kemudian sebagaimana mereka di Bimtek nginep klasikan disediakan makanan, tapi kita mekanisme ya rapat koordinasi kita undang yang terkait.. yang membidangi pajak, misalnya PBB dia pasti akan sampai ke kecamatan-kecamatan sampe ke dukuh-dukuh, nah disitulah kemudian nanti ada forum yang kemudian transfer learningnya di situ

Q.3. Model Kombinasi

Emerha

Terus peran pimpinan itu gimana pak, apakah selalu memberikan motivasi supaya pegawai itu rajin belajar atau?

Alif Romdhoni

Oh ya.. kalo secara umum kan, jelas ya tanggung jawab pimpinan itu kan salah satunya kan untuk memotivasi bawahan belajar, untuk lebih anu..

Emerha

Itu sering ya pak untuk beberapa, setiap bulan di monitoring atau bagaimana?

Alif Romdhoni

Iya.. jadikan kita setiap melalui mekanisme apel dan jam pimpinan jadi kan kita tiap senin sampe Kamis apel pagi jelas, kemudian ada setiap bulan sekali rapat struktural, nah.. di rapat struktural itu pimpinan pasti menegaskan baik secara kegiatan maupun tanggung jawab di masing-masing lingkup tugas di PPTK, eslom 4 dan eslom 3 di bawahnya untuk memantau bagaimana progres terutama yang sedang in.. pada saat itu. Misalnya kita rapat pada bulan Februari, Maret, pada bulan Maret misalnya, yang sedang in kan Maret itu kan PBB penyampaian pajak berjalan, nah.. biasanya pimpinan bagaimana progresnya untuk PBB berjalan kita, nanti digabungkan bagaimana secara realisasinya target-target untuk Kecamatan seperti apa, nah.. itu yang dilakukan pimpinan. Tapi e.. ketika akan nanti turun dari kan level terendahnya nanti kan sampe Jffustaf ya, sampe staf jadikan pimpinan kan hanya ke secara struktural nah nanti dari struktural kan.. ada istilahnya apa ya.. transfer lagi ke.. ke teman-teman di.. ke jajarannya yang punya staf untuk mekanismenya

Emerha

Jadi mereka yang sudah ikut diklat itu langsung dijadikan kayak tutor gitu, misalkan PBB tadi mereka langsung turun ke Lapangan ya pak untuk di praktekkan gitu, nggak ada yang lain khusus dia saja?

Alif Romdhoni

Ya.. kita kan kadang yang dikirim itu kan mungkin tahun yang A yang katakanlah, tahun kemaren si B katakanlah, ya.. si A dan si B ini ketika anu ya.. nanti menjadi leader ketika harus memberikan pencerahan ketika kemudian ada pertanyaan, ketika ada hal yang kemudian masih belum jelas ya.. referensinya dari si A dan si B, termasuk misalnya BPHTT, BPHTT itu kan kebetulan hak tanah dan bangunan, biasanya teman-teman itu sering kali ah.. ini ini.. saksi bisu sebenarnya, ketika ada seseorang datang ada transaksi intinya ingin keringanan karena mungkin nggak dapet jalan nek sekian itu terllau mahallah dari harga pasar lah. Nah.. teman-teman yang pernah di diklatkan penilai properti itu yang nanti akan berbicara, bisa ya bisa tidak. Jadi bisa dikabulkan bisa tidak, kembali ke... nanti bagaimana itu kondisi riil di lapangan bahkan ada sampe kunjungan lapangan untuk memastikan benar po yang disampaikan itu seperti itu. Karenakan untuk menentukan kan juga dilihat dari lingkungan juga, jangan sampe nanti dia mengajukan keringanan katakanlah 10 juta padahal lingkungan sekitar dia kemaren payune sampe 100 juta seperti itu, jadi teman-teman yang penilai-penilai kita kan punya penilai properti itu yang akan memberikan penjelasan-penjelasan itu yang langsung kepada masyarakat ya.. jadi ini tuh tempat konsultasi bagi masyarakat yang ingin yang.. merasa keberatan dengan BHPBB yang 3% dan 2%

Emerha

Apa.. apa output yang sudah dirasakan selama mereka menimba ilmu dari luar tadi?

Alif Romdhoni

Ya.. yang jelas langsung alhamdulillah kita secara regulasi kita tidak ada yang menabrak aturan ya, kan kadang dikless action ya.. sebuah regulasi atau katakanlah ini kamahalan ya output secara langsungnya kita bisa melihat bagaimana kondisifitas secara objek pajak termasuk secara umumnya kan blom toto, ketika kemudian secara regulasi tidak ada kan paling nek pemerintah kan dikless action kan dari aspek itu ketika terjadi, nah... selama ini kan kita belum menemui hal-hal seperti itu walaupun kalo bahasanya temen-temen dewan, ah.. itu kan entuk iki kan melalui sendiri, tidak berani mengambil resiko, yang kemudian ya.. tapi apa boleh buat ya.. memang itulah yang kita lakukan, jadi artinya secara langsung ketika temen-temen datang mendapatkan ilmu, kemudian bisa menjadi transfer learning, menjadi motivator, kemudian secara regulasi yang ada, kemudian bisa tidak ada yang dikecewakan kemudian bisa menerima dengan baik tanpa harus, nah.. itu yang selama ini yang secara langsung dirasakan ya seperti itu

Emerha

Ah.. mereka yang sudah belajar tadi yang sudah punya pengalaman, apa mereka mau membagikan pengalaman?

Alif Romdhoni

Oh ya.. kewajibannya kan memang pertama harus melaporkan ke pimpinan hasilnya, kemudian yang kedua kan memang harus ada transfer learning karena kan kalo kemudian mereka lakukan sendiri mereka juga akan kesulitan jadi prinsipnya itu kan, kita itu tugas kan harus bagi habis ya.., bukan berarti di bagi habis itu kemudian pimpinan tidak ngapa-ngapain tapi paling tidak kan ada rentang kendali change of commandnya, bentangan komando yang kemudian mana tropoksi masalah yang harus saya, mana yang cukup ditingkat bawah, mana yang cukup. Nah.. hal-hal seperti itukan dari transfer learning ini, nah..

Emerha

Apa yang membuat dia mau membagi pengalamannya?

Alif Romdhoni

Ya.. memang itu bagian dari tugas dan tanggung jawab ya, ketika memang menjadi itu nya ya harus menginformasikan setiap perubahan itu. Karena kalo.. kalo tidak e.. ya.. konsekuensinya organisasi yang..

Emerha

Tekanan pekerjaan yang terlalu banyak dia laksanakan sendiri?

Alif Romdhoni

Ya.. itu menjadi beban kalo tidak di transfer lagi, jadi memang harus ada upaya untuk e.. split lagi ya.. untuk.. untuk... mencerdaskan, karena bisa jadi nanti suatu saat dia tidak di tempat apakah kemudian harus dia terus kan nggak mungkin

Q.4. Model internalisasi

Emerha

Apa selama ini sudah ada kaderisasi itu?

Alif Romdhoni

Ya.. dan itu terjadi

Emerha

Sudah.. terjadi.. kaderisasi

Alif Romdhoni

Artinya ketika seseorang semakin lama expertnya semakin tinggi di satu sisi, tapi ketika ini nanti ada proses promosi ini yang mau nggak mau. Nah.. ini yang kadang memang e.. apa ya.. menjadi kendala bersama, ketika proses promosi atau pengisian mutasi tanpa memperhitungkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Kalo secara internal sebenarnya ya sudah terjadi ya ada transfer, bahkan ketika seseorang yang sudah pinter ini kemudian dipindah karena tuntutan katakanlah mungkin karir, nah.. kalo yang muncul dari bawah sudah terkaderkan itu nggak masalah. Nah.. masalahnya yang muncul itu justru dari luar yang mungkin tidak memiliki kapasitas latar belakang pendidikan kemampuan untuk itu. Tapi yang terjadi di internal ini rata-rata misalnya contoh di sebelah itu, kemaren promosinya yang kemaren dilibatkan itu memang staf yang membidangi itu yang kemudian promosi, jadi artinya tidak ada masalah di proses kaderisasi

Emerha

Apa karena sudah ada yang.. sudah di transfer kah?

Alif Romdhoni

Iya..

Emerha

Okey yang terakhir pak, apa prestasi di bidang pendapatan selama ini pak?

Alif Romdhoni

Prestasi dalam artian seperti apa ya.., kalo kemudian prestasi itu diwujudkan dengan sebuah apa istilahnya bukti ya.. secara umum PDP ya jelas itu kan sebuah prestasi pengakuan secara sistem kendali pendap.. e.. keuangan daerah di dalamnya juga ada pendapatan kalo secara umum kan, Alhamdulillah dari tahun ini pun PDP walaupun.. kemaren memang

Emerha

Kalo dari sisi target pendapatan?

Alif Romdhoni

Kalo dari sisi target Alhamdulillah pasti ada progres naik

Emerha

Naik.. ada progres terus

Alif Romdhoni

Ada progres naik, walaupun memang kita belum sampai ke 20% PAD kita sebagai penyokong pendapatan memang belum kita baru sekitar 15-17% karena harusnya 300 milyar kita harus 200-an sekian milyar tapi kalo secara progres memang, memang ada kenaikan, jadi itu yang mungkin.. ya... bisa dan secara umum ya tadi ya PDP tadi ya

Emerha

Apakah hasil pengalaman tadi, hasil pembelajaran yang dipelajari dari luar itu dibikin kan satu, di rangkum dalam satu media umpama seperti di jadikan juknis, itu ada?

Alif Romdhoni

Ada..SOP

Emerha

Pernah.. sudah jadi SOP?

Alif Romdhoni

Sudah jadi SOP, jadi apa yang di dapat oleh temen-temen ketika anu.. kita juga ada SOP lapangan nih.. kemudian mereka diklat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru itu misalnya bisa dari karena regulasi karena teori nah.. kemudian di praktekkan ya SOP ini yang kemudian di sesuaikan jadi ya.. ada perubahan terhadap SOP ketika temen-temen dan SOP ini kan sebenarnya perubahannya kan tidak hanya regulasi yang berubah tapi dengan struktur kelembagaan yang berubah, ketika ada fos mayor yang kemudian anu kan bisa di..

Emerha

Berarti dalam bentuk SOPnya ya pak, Kalo dalam bentuk orangnya siapa pak, yang sudah.. ini...?

Alif Romdhoni

Untuk berbicara pajak atau berbicara pendapatan..

Emerha

Pendapatan, yang sudah ahli?

Alif Romdhoni

Kalo yang sudah ahli, paling senior pak Lukman

Emerha

Pak Lukman

Alif Romdhoni

Nggeh.., dia di pengembangan jadi sudah berapa belasan tahun dia di BKAD ini, mau wawancara YBS?

Emerha

Nanti kapan-kapan saya bisa

Alif Romdhoni

Oh bisa.. jadi diantara temen-temen pendapatan kan saya baru, pak win baru, Pak Kabid baru, yang paling senior yang paling itu kan pak Lukman dia ada di pengembangan pendapatan. Jadi dia.. wah.. lebih anu.. saya pun kalo anu tanya beliau

Emerha

Okey, berarti selama ini pengalaman itu sudah jadi praktek yang sehat ya selama ini?

Alif Romdhoni

Ya..

Emerha

Okey pak itu dulu wawancara

Alif Romdhoni

Siap nggeh..

Emerha

Kapan-kapan kalo sudah saya olah lagi yang di..

Alif Romdhoni

Boleh silahkan kami tunggu, tapi ini libur lho nanti.. mulai minggu depan..

- d. Wawancara ke-4 dengan Alif Romdhoni, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 15.37 WIB di ruang tamu bidang pendapatan. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Nah.... saya pingin konfirmasi dikarenakan sesuai kaidah penulisan kan harus ada... kalo kita mengetikkan harus ada sumbernya, nah sekarang saya mau konfirmasi ke bapak, apakah bapak keberatan misalkan nama bapak saya tulis full, karena kalo biasanya kan kalo pemimpin yang lain kalo dia mengandung rahasia kadang Cuma inisialkan...

Alif Romadhoni

Ya... baca dulu ya..., ini yang disampaikan yang kemaren anu... itu

Emerha

Iya tapi tidak semuanya, hanya yang esensinya saja yang saya tampilkan

Alif Romadhoni

Oh tidak semuanya... oh gitu..., Cuma satu ini untuk saya

Emerha

He'em... ada lagi itu coba lipatan-lipatan

Alif Romadhoni

Oh ya...

Emerha

He'em... mana yang kena, atau mana yang asal comot

Alif Romadhoni

Oh ya... dari...

Emerha

Jadi menurut bapak nggak ada ya... hal-hal...

Alif Romadhoni

Menurut saya kan nggak, artinya kan ini bagi saya ini juga menjadi kontrol dan evaluasi bahwa memang kami sendiri secara anu itu ketika kita pada posisi yang seperti ini secara organisasi, ya... harapannya ini nantinya menjadi oh ya... berarti ada sesuatu yang salah, kenapa menjadi tidak efisien tidak efektif dalam pengelolaan bukti kalo misalkan akan menjadi anu... kalo kemudian digabung lah atau menjadi seperti apa, karena ya... memang posisinya menjadi... yang terjadi ya... seperti itu bagi saya seperti itu artinya kondisi-kondisi ini kan memang itu riil dari itu..., dan harapannya kan ini kan... nanti menjadi... apa ya... ibaratnya an... masukan dari... mungkin jenengan bisa memberikan input bahwa oh... ada sesuatu yang mungkin secara anu kurang bisa berjalan dengan baik, salah satunya di fungsi organisasi, nah mungkin kalo kemudian... menurut saya sih siap mempertanggung jawabkan secara anu... wong ini kan bukan sesuatu yang rahasia fakta riil yang bisa...

Emerha

Saran..., soalnya kan kalo penelitian saya kan misalnya kan keluar... kalo internal kan mungkin tidak..., soalnya kan penelitian saya keluar makanya perlu saya konfirmasi kalo saya keluar...

Alif Romadhoni

Ya... betul... ya... ketika ini memang keluar bahwa ini memang riil terjadi di kita kan kan, kita juga harus anu... ketika itu demi kebaikan karena ini kan juga memang... memang... memang harusnya memang ada perbaikan ketika kondisinya terjadi seperti itu, ya harapannya nanti... entah itu nanti wujudnya kepada kami, feedbacknya dari ini kan bisa untuk perbaikan kami

Emerha

Kalo soal kekurangan staf kemaren pak, tahunya memang itu mendapat... CPNS

Alif Romadhoni

Ini saya... dapat surat ini kita besok rapat CPNS, Cuma apakah formasinya seperti apa, termasuk kita di akomodir atau tidak itu kita tidak tahu, yang kita lakukan sekarang justru malah baru saja, jam... sampe baru saja selesai kita mewawancarai THL kita mau menambah THL

Emerha

THL ya..?

Alif Romadhoni

Cekker... cek untuk yang BLB ya itu maksudnya untuk lebih mengoptimalkan lagi pajak...

Emerha

Jadi kalo untuk usulan formasi masih dipertimbangkan ya?

Alif Romadhoni

Untuk yang CPNS belum tahu, paling besok, ini besok sudah katanya besok udah akan diumumkan saya besok baru...

Emerha

Karena saya lihat APBD nya, Kulonprogo itu kan 50... belanja... belanja keperluan kan 54% jadi semuanya nggak...

Alif Romadhoni

Ya... masih nyaris... nyaris artinya...

Emerha

Kan lebih dari 50 baru bisa di acc?

Alif Romadhoni

Tapi informasi yang terbaru, saya nggak tahu ya... Pusat membuka ini kan ada kah landasan politisnya, ada landasan itu kan mungkin... oh 2019 bisa jadi sebagaimana dulu SBY ngangkati tenaga honorer macam-macam itu kan, nah... makanya ini... apakah itu mempertimbangkan karena yang 50+, 50% itu untuk yang itu sebenarnya tidak tertulis sih jadi kalo kita melacak, kenapa kita tidak di kasih formasi dia tidak bisa... kan masih... oh mana aturannya yang tidak memperbolehkan kalo misalnya memang harusnya memang entah peraturan apa, atau edaran apa bahwa bagi OPD yang masih anu... tidak itu tidak pernah kita temui. Sehingga sebenarnya memang untuk ben sehat normal yo memang logikanya jangan terlalu banyak belanja BKP nya..., mungkin hanya logika secara makro tidak berani menuangkan secara tertulis bahwa bagi Pemda yang APBD nya sekian tidak boleh melakukan... lha itu nanti... bagi yang kecil-kecil seperti kami tidak akan dapat melakukan recruitment terus padahal pensiun berjalan terus itu yang...

Emerha

Sejak tahun 1000-an...

Alif Romadhoni

Itu yang sulit juga karena komponennya kan memang, tapi kita nggak tahu nanti ya... ada atau nggaknya, tapi katanya masih yang nawasitas sih..., yang kesehatan, pendidikan yang masih diprioritaskan, untuk yang anunya belum. Tapi kita di luar ASN lah kita rekrut yang BHL cek itu

Emerha

BHL ya...

Alif Romadhoni

He'e... biasanya itu yang tidak harus pake ijin tidak harus pokoknya APBD aja kita buat anu kan sudah berbeda, tapi prinsipnya kami bisa menerima dan mempertanggung jawabkan kalo nanti kemudian dikonfirmasi secara aturan...

Emerha

Terus yang terakhir, saya minta foto pak untuk profil partisipan kayaknya ini kemaren ini sudah saya ambil...

Alif Romadhoni

Oh gitu... ini ambil... wah...

Emerha

Heheheehhe... ini foto langsung

Alif Romadhoni

Foto langsung, berarti ini di foto langsung oh ya... tapi pakenya berbeda sendiri nanti...

Emerha

Nggak pa-pa sekarang kan tanggal 17...

Alif Romadhoni

Oh ya.... oh gitu... saya pas ke Jogja e... pas ini tuh, nggeh nggak apa-apa silahkan...

Emerha

Saya ambil ya...

Alif Romadhoni

Es... monggo lah sewujud-wujudnya

Emerha

Satu... dua....ya... sekali lagi

Alif Romadhoni

Wes gini aja

Emerha

Ya.... satu... dua... nah....heheheheheh.

Alif Romadhoni

Dukung ini sebelah... heheheh okey.... nggeh terima kasih semoga nanti mana yang mau di anu... prinsipnya ya itu... nanti e... apa ya... terhadap hasil ini ya... semoga nanti ada feed back ke kita demi kebaikan kita...

Emerha

Ya... Insyallah... Cuma kayaknya saya kesulitan mau cari apa ini kekurangannya ini, heheheeh

Alif Romadhoni

Ini tadi kan... bener kekurangan sebenarnya... masalah organisasi

Emerha

Iya... tapi kalo soal SDM itu kan umum gitu...

Alif Romadhoni

Iya... kalo SDM itu umum...

Emerha

Tapi kalo yang secara khusus gitu saya sudah mencoba cari aduh... kayaknya nggak ada kekurangan nih... heheheheeh

Alif Romadhoni

Ya.... kalo membandingkannya dengan OPD atau dengan yang lain lebih anu... Cuma kan anu kita kan... di...

Emerha

Udah... udah bagus banget anunya...

Alif Romadhoni

Hehehehehe, ya adanya itu lah, pokoknya ya mau nggak mau....

2. Angelia Resty K.

- a. Wawancara ke-1 dengan Angelia Resty, pada Kamis, 24 Mei 2018, pukul 10.16 WIB di ruang kerjanya. Resty adalah Bendahara Pengeluaran BKAD dan telah menduduki jabatannya selama 4 tahun sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pembuatan SPP, SPM dan SPj yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Pembuatan SPP yang transparan dan akuntabel

Emerha

Bu sudah berapa tahun jadi bendahara?

Angelia Resty

Jadi bendahara itu 4 tahun

Emerha

4 tahun. Jabatan bendahara itu 1 tahun?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Nah itu setiap tahun diperbaharui lagi?

Angelia Resty

Setiap tahun diperbaharui lagi.

Emerha

Berarti sudah 4 tahun ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Di administrasi keuangan (jeda). Mbak kalau untuk pembuatan SPP ya, SPP itu kan ada proses untuk pembuatan SPP gimana? Pake simda?

Angelia Resty

Pake simda kalau pembuatan.

Emerha

Pake simda. Berarti itu kan udah otomatis tinggal input berapa?

Angelia Resty

Ya input

Emerha

Yang diminta. Itu nggak ada yang pake manual ya?

Angelia Resty

He em. Otomatis langsung masuk.

Emerha

Itu nggak ada yang pakai manual ya?

Angelia Resty

Nggak ada.

Emerha

Terus dari setelah dicetak SPP itu jadi, itu diapakan? Dicatat ke mana? Ada register gitu?

Angelia Resty

Ada

Emerha

Itu register, buku registernya manual atau?

Angelia Resty

Ee Langsung otomatis dari simda

Emerha

Dari simda juga. Nah di sini ada PPK ya, berarti yang bikin SPM siapa?

Angelia Resty

PPK.

Emerha

Oh terpisah itu ya. Berarti Simda-nya dua dong?

Angelia Resty

Nggak sebenarnya cukup satu, tapi nanti di dalamnya ada fungsi PPKnya juga.

Emerha

Oh berarti ketika Mbak bikin SPP otomatis di sana bisa tarik SPM?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Lalu untuk menyerahkan SPP bagaimana? Filenya?

Angelia Resty

Ee.. Menyerahkan untuk pencairan ke sana atau?

Emerha

Nggak. Untuk diverifikasi di PPK dikasih filenya atau gimana?

Angelia Resty

Nggak, kalau kita kan sebenarnya kalau di Kulon Progo itu kan sebelum kita SPP SPM, itu setiap SPJ belanja itu diverifikasi dulu oleh PPK. Jadi ketika SPJ itu sudah benar-bener valid, ee istilahnya dari segi angka atau rekening itu sudah sesuai, nanti baru ke bendahara. Nah di bendahara itu setelah di, istilahnya dicocokkan seperti itu baru nanti dibuku ke SIMDA.

Emerha

Dokumen bukti-bukti kayak gini itu yang bikin siapa?

Angelia Resty

Per masing-masing PPTK

Emerha

Ada PPTK juga, bukan bendahara yang bikin?

Angelia Resty

Bukan.

Emerha

Berarti bendahara tinggal nunggu aja. Kalau misalkan ada yang telat masukkan SPJ itu gimana?

Angelia Resty

Biasanya kan kalau di sini kan karena untuk tahun ini sudah mulai, sebenarnya tahun kemarin sudah mulai non tunai, jadi sudah nggak ada panjar. Jadi biasanya ketika sudah ada uang di bendahara otomatis dari PPTK langsung dimasukkan SPJ. Kalau dulu kan masih panjar kan, nunggu panjar dulu. Masing-masing PPTK nunggu uang dari bendahara dulu, baru nanti mereka belanja. Kalau sekarang sistemnya kan transfer.

Emerha

Jadi uangnya itu masuk ke bendahara dulu?

Angelia Resty

Bendahara dulu

Emerha

Bendahara keluar, bendahara transfer ke PPTK?

Angelia Resty

Kalau dulu ambil tunai.

Emerha

Kalau dulu ambil tunai, sekarang transfer ke PPTK?

Angelia Resty

Sekarang transfernya langsung ke rekanan sistemnya.

Emerha

Ehm ya itu kalau pihak ketiga. Kalau di PPTK?

Angelia Resty

Kalau di PPTK sekarang, jadi PPTK itu ngebon dulu ke rekanan, Nanti setelah SPJ jadi baru bendahara transfer.

Emerha

Oh gitu, berarti ada dua sistimnya? Ada yang pakai panjar ada yang tidak?

Angelia Resty

Iya, kalau dulu mulai non tunai itu Oktober 2017. Ada beberapa kegiatan, e ada beberapa belanja yang memang di non tunai. Kalau yang tunai itu cuman SPPD, BBM.

Emerha

Oh berarti khusus non tunai itu hanya rekening-rekening tertentu ya. Tidak bisa di nganu, transfer?

Angelia Resty

Jadi e untuk ee kalau untuk yang masih tunai panjar di bendahara itu yang SPPD sama BBM. BBM ketika 2017. He em kalau sekarang sudah menggunakan... Kalau sekarang BBMnya sudah pakai kupon. E surat pengantar jenisnya.

Emerha

Ehm oke. Berarti misalkan PPTK punya kegiatan. Ia mau melaksanakan kegiatan. Nah tadi bilang ditransfer itu dasarnya apa ditransfer?

Angelia Resty

Jadi gini, e.. PPTK misalnya dia ada kegiatan rapat, dia ngebon dulu ke rekanan itu, istilahnya ini aku besok mau rapat.

Emerha

Ngutang, ngutang dulu jadinya?

Angelia Resty

Iya ngutang dulu nanti setelah kan sambil bikin SPJ, nanti SPJnya udah jadi, bendahara baru transfer.

Emerha

Itu hutang itu semuanya dikasih hutang ya? Mau itu rekanan itu?

Angelia Resty

Istilahnya anu toh bayar belakang, barang dulu ada, baru kita bayar. Tapi bukan hutang hutang gitu nggak.

Emerha

Berarti buktinya ada dulu, uangnya belakangan?

Angelia Resty

Iya, seperti itu.

Emerha

Semuanya gitu ya mulai 2017 itu?

Angelia Resty

2017 itu.

Emerha

Kalau yang sebaliknya ada? Misalnya dikasih duit dulu? Belanja dulu? Baru kumpul bukti terakhir?

Angelia Resty

Nggak ada.

Emerha

Sekarang nggak ada lagi seperti itu?

Angelia Resty

Nggak ada, jadi sekarang sistemnya SPJ jadi dulu baru nanti bendahara transfer. Karena kan kalau misalnya kita transfer dulu ternyata nanti SPJ nggak sesuai kan kita mau minta ke rekanan lagi udah susah, kalau misalnya ada kelebihan, kalau misalnya masih kurang, kita masih transfer lagi. Tapi kalau misalnya kelebihan belanja kan kita juga agak...

Emerha

Berarti khusus untuk yang terkait dengan pihak ketiga?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Kalau yang tidak terkait dengan pihak ketiga misalkan untuk makan minum kantor?

Angelia Resty

Kalau di sini nggak ada makan dan minum kantor.

Emerha

Eh bukan, perjalanan dinas?

Angelia Resty

Perjalanan dinas masih tunai.

Emerha

Nah itu masih tunai. Nah itu gimana modelnya?

Angelia Resty

Jadi misalnya PPTK mau DL ke Jakarta misalnya, nanti ngajuin dulu panjar, kan sudah perhitungan misalnya mau berapa hari, ada uang saku berapa, terus misalnya ee tiketnya berapa, transport lokalnya berapa, nanti ngajuin ke bendahara nanti kita kasih cash, setelah itu mereka pulang bikin SPJ baru kembali ke bendahara.

Emerha

Itu pake apa minta duitnya?

Angelia Resty

Ada buku panjar.

Emerha

Tidak ada semacam nota gitu surat? Misalkan PPTK minta duit ini untuk kegiatan ini?

Angelia Resty

Jadi untuk pencatatannya kita bikin buku panjar yang itu per rekening kegiatan. Jadi misalnya ada 40 kegiatan, jadi nanti ada 40 buku yang...

Emerha

Oh itu bukunya manual?

Angelia Resty

Iya, bukunya masih manual, jadi nanti kita masih nyatet panjar SPPD berapa.

Emerha

Tidak ada pakai itu ya, nota pencairan dana?

Angelia Resty

Ada. Itu perbulan kalau di sini.

Emerha

Per apa?

Angelia Resty

Setiap bulan PPTK bikin untuk kebutuhan dana selama satu bulan, misalnya ATK berapa, terus nanti makan minum harian berapa, lembur berapa, honor berapa itu, kita bikinnya perbulan NPDnya. Jadi ga setiap kita mau minta kita bawa NPD.

Emerha

NPD itu yang bikin siapa?

Angelia Resty

PPTK.

Emerha

PPTK yang bikin?

Angelia Resty

Ya tapi diketahui oleh pak kepala.

Emerha

Jadi disitu tertera jumlah duit yang diminta?

Angelia Resty

Ya

Emerha

Itu biasanya sesuai dengan NPD dikasih?

Angelia Resty

Sesuai kebanyakan memang sesuai dengan anggaran kas ya.

Emerha

Nah berarti nanti setelah pertanggungjawabannya masuk tadi, itu dikumpul kayak gini kan terus dibikikan SPP nya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Nah udah gitu diserahkan ke PPK?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Terus filenya ga diserahkan? Cuma dokumennya aja?

Angelia Resty

Filenya kan di situ udah ada.

Emerha

Sudah ada ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Berarti ada yang bikin SPP sendiri, SPM Sendiri ya, kalau misalkan dokumennya setelah diperiksa PPK SKPD tidak lengkap ?

Angelia Resty

Dikembalikan ke PPTK.

Emerha

Cara mengembalikannya gimana? PPK bikin surat penolakan atau bagaimana?

Angelia Resty

Kalau di sini belum pernah ya mbak ada surat penolakan. Belum pernah, belum pernah ada.

Emerha

Berarti kerjanya bendahara berkurang ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Cuma SPP aja ya bikinnya, sama byar-bayar?

Angelia Resty

Bayar.

Q.2. Pembuatan SPP LS Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalau untuk SPP LS?

Angelia Resty

LS yang kecil atau?

Emerha

Yang barang dan jasa?

Angelia Resty

Barang dan jasa prosedurnya juga nih.

Emerha

Nah itu yang bikin dokumennya siapa?

Angelia Resty

Yang bikin dokumennya itu Pejabat Pengadaan.

Emerha

Bukan PPTK?

Angelia Resty

Bukan.

Emerha

Apa beda PPTK dengan pejabat pengadaan?

Angelia Resty

Kalau PPTK itu kan penanggung jawab teknis kegiatan tapi untuk pengadaan itu kan yang melaksanakan itu kan ada PPKOM sama pejabat pengadaan. Jadi PPTK itu sudah di luar pengadaan.

Emerha

Berarti yang kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh PTK yang mana?

Angelia Resty

Jadi kegiatan yang di luar belanja modal.

Emerha

Di luar belanja dan modal, berarti barang dan jasa?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

PPTK. Itu kalau untuk minta SPJ ke mereka nggak susah?

Angelia Resty

Nggak.

Emerha

Misalkan begini, kan ada pengadaan barang nih ceritanya, harus dilaksanakan misalkan seminggu, sudah ditransfer, tapi pertanggungjawabannya belum ada? Itu gimana?

Angelia Resty

Hm kalau di sini itu. E dokumen pengadaan lengkap baru kita proses untuk SPPS PM. Jadi dokumen yang masuk ke bendahara itu sudah mulai dari SPK sampai dengan nanti kwitansi itu sudah harus lengkap.

Emerha

Kalau di PPTK itu yang bikin dokumen berarti mereka punya itu ya, punya staf khusus bikin itu, atau ada jabatan khusus yang bikin orang yang khusus yang bikin pertanggung jawaban?

Angelia Resty

Kalau khusus nggak ada. Jadi mungkin ada salah satu staf yang istilahnya dijadikan bendahara bayangan seperti itu.

Emerha

Oh itu ada ya?

Angelia Resty

Ada tapi itu nggak ada SKnya. Bendahara apa gitu.

Emerha

Oh nggak di SK kan?

Angelia Resty

Nggak.

Emerha

Kasian, capek ... hehe

Angelia Resty

Saya kalau jadi bendahara bayangan kayak gitu istilahnya.

Emerha

Apalagi kalau pendanaannya besar kan. Kadang yang jadi, yang jadi kendala di situ ya. Misalnya laporan pertanggung jawaban karena nggak ada yang bikin?

Angelia Resty

Sedangkan pekerjaannya masing-masing juga kan banyak. Jadi kayak SPJ pun, kadang nggak tersentuh, kadang satu bulan itu baru, kadang suka ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk LS kan semua sudah di pejabat pengadaan, jadi kita komunikasinya ke pejabat pengadaannya.

Emerha

Pejabat Pengadaan. Itu kalau mbak mau minta pertanggung jawaban gimana caranya ke mereka?

Angelia Resty

Kalau yang LS kan udah jadi baru ditransfer, jadi nggak ada masalah nggeh. Kalau yang UP misalnya ambil panjer, kita kasih waktu maksimal satu minggu harus kembali, kalau satu minggu nggak kembali nanti kembali tunai ke bendahara, ditarik lagi. Jadi ada sejenis apa ya.

Emerha

Mereka bikin pernyataan harus kembali nggak?

Angelia Resty

Nggak sih, cuman kita nanti begitu mereka ngambil ini satu minggu harus kembali, kalau misalnya satu minggu belum kembali nanti kita tarik lagi.

Emerha

Biasanya tepat waktu kalau harus kembali??

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Kalau misalkan telat gimana?

Angelia Resty

Telat mengembalikan SPJ?

Emerha

iya?

Angelia Resty

Kalau misalnya uang itu belum dipake, istilahnya masih ada di PPTK kita minta kembali tunai.

Emerha

Kalau misalkan dia bilang wah uangnya udah dibayar tapi SPJnya belum dibikin?

Angelia Resty

Nah itu nanti kita kasih waktu lagi biasanya, besok harus jadi ya.

Emerha

Nah itu gimana cara mintanya ke mereka kalau gitu modelnya?

Angelia Resty

Nggak ada yang ini sih, cuman lisan aja sih.

Emerha

Kadang kan mbak yang harus menghadap PPTK itu dia punya jabatan tinggi, apa nggak ada rasa secara wah Beliau ini akan sama saya gitu loh, cara memintanya itu pak tolong pak SPJ saya duitnya saya sudah mau GU nih, nah itu gimana?

Angelia Resty

Nggak sih. Ini kan SPJ-nya belum masuk Pak apa Bu, kita kan nganu, paling nggak, kan kemarin perjanjiannya satu minggu harus kembali gimana, kalau misalkan oh ini udah dipake buat bayar ini, kita tunggu misalnya sampai 2-3 hari. Kalau misalnya uangnya itu. nganu belum sempet di SPJ-kan, dan uangnya masih di sini, kita tarik dulu.

Emerha

Sering ada juga yang kayak gitu misalkan, wah karena dia pikir wah, saya kan lebih gitu, di atas, biar aja, lama-lamain. Ada nggak seperti itu?

Angelia Resty

Nggak ada kalau di sini. Enak semua orangnya, saling ini ya... Soalnya nanti kalau SPJ nggak segera kembali, nggak segera dibikin, terus misalnya uangnya ditarik nggak mau, nanti kegiatan yang lainnya, terganggu. Jadi mereka beban moral juga sama yang lainnya.

Emerha

Jadi ketika satu kegiatan itu mereka belum SPJkan, terus mereka meminta kegiatan lain, dikasih nggak duitnya? Nggak?

Angelia Resty

Misalnya PPTK? Dia udah panjar, tapi belum kembali, terus dia minta lagi? Biasanya kita ini dulu, yang itu dulu di SPJkan, baru nanti kita kasih.

Emerha

Mereka mau ya? Itu ada aturannya ya bikinnya?

Angelia Resty

Aturan untuk?

Emerha

Aturan kayak gitu, misalkan seminggu harus kembali duitnya, atau cuman komitmen aja?

Angelia Resty

Sebenarnya diatur dalam SOP.

Emerha

Ada ya SOPnya? Itu SOPnya di sini, di SKPD ini? Itu ada SOPnya ya?

Angelia Resty

Iya. Ada SOP.

Emerha

Ada anunya, ada copinya?

Angelia Resty

Coba nanti saya tanyakan dulu ke Ibu.

Emerha

Itu SOP berarti SK kepala badan ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Sering nggak mbak kalau bikin SPP itu dikembalikan sama PPK? Dikembalikan SPPnya sama PPK karena tidak lengkap, sering?

Angelia Resty

SPPnya ya? Belum pernah juga dikembalikan.

Emerha

Kapan biasanya PPK mengembalikan SPJ kita. Kesalahan apa biasanya yang harusnya dia kembalikan??

Angelia Resty

Mungkin karena nggak lengkap gitu.

Emerha

Nggak lengkap gitu urusannya gimana?

Angelia Resty

Misalnya kayak rapat gitu kan, kan ada DP nota undangan, terus sama pajak. Mungkin kita belum bayar pajaknya atau gimana. Nanti dikembalikan. Tapi sejauh ini di sini belum pernah PPK mengembalikan/menolak.

Emerha

Tapi waktu kalau misalnya dikembalikan kayak gitu berarti ketika mbak serahkan SPP ke sana, itu dikoreksi lagi nggak??

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Koreksi. Ada pembantu berapa orang mbak di sini? Pembantu Bendaharanya?

Angelia Resty

Bendaharanya 4.

Emerha

Pembantunya 4, bendaharanya 1. Berarti 5 semuanya. Berarti ada khusus yang periksa ya. Jadi kalau dari ke 4 pembantu itu dia bertanggung jawab ke mbak ya, nah itu mbak bagi tugas ke mereka itu apa bahasanya? Misalnya satu orang khusus periksa dokumen, satu orang operator ada gak?

Angelia Resty

Periksa dokumen verifikator kan di sini lebih ke pembantu PPKnya ya mbak ya. Verifikatornya.

Emerha

He em. Berarti pembantu itu operator semua kerjanya??

Angelia Resty

Gaji, entri SIMDA, Terus pajeg. He em, dia bikin laporan pajak. Terus satu lagi. Mengeset, ngeset, ngeset dokumen.

Emerha

Nah itu yang saya bilang tadi khusus yang periksa kayak gini kelengkapannya kalau cuman pisah-pisah gini kan nggak bisa, tapi ada orang khusus yang periksa tadi??

Angelia Resty

Ada sebelum di ini itu diverifikasi sama pembantu PPK. Ferivikator, Yang di apa, diverifikasi.

Emerha

Kan tadi ke sini dulu baru ke PPK. Kan itu tidak langsung ke PPK??

Angelia Resty

Ketika PPTK itu mau mengembalikan SPJ ke bendahara itu diverifikasi dulu. Sebelum naik ke pak kepala itu diverifikasi dulu, meminimalisir kesalahan, gitu, jadi biar nggak nanti ketika udah jadi SPP nggak bolak balik ke PPTK. Jadi curi start.

Emerha

Berarti dari PPTK itu mereka diwajibkan ke PPK dulu? Ke Verifukator PPK baru ke bendahara. Makanya tidak perlu diperiksa lagi?

Angelia Resty

Ke verifikator ya. Paling cuman kita periksanya sesuai sama DPA.

Emerha

Berarti kalau misalkan kegiatan itu ada pajak, misalkan tadi mbaknya bayar duit pake pajak tunai, nah itu potong pajaknya gimana mbak??

Angelia Resty

Jadi kita ngasihkannya sejumlah bruto. Nanti yang potong pajak PPTKnya sendiri. Nanti mereka setor untuk bukti pembayaran pajaknya harus dilampirkan di SPJ. Jadi misalnya makan minum nanti ada pajak restoran, nanti di belakang SPJnya harus ada pajaknya.

Emerha

Jadi mereka yang harus ngitung sendiri pajaknya, terus mereka bikin SSPnya?

Angelia Resty

Kalau billnya kan bendahara. Jadi mereka bikin N26, di situ ada pajeknya nanti kita koreksi pajeknya, kalau sudah cocok. Nanti kita bikin bill.

Emerha

Oh, itu ya. Berarti beban kerjanya itu banyak di sana ya di PPTK ya? Nggak juga ya?

Angelia Resty

Nggak juga. Justru sekarang dengan adanya CMS malah bendahara ini yang bebannya berat. Nanti kalau sebelum dientri di BKU ini harus CMS dulu ke sana. Terus wara wirinya itu, terus nanti masih cocokkan kesalahan, sering kan kalau sangking banyaknya terus ya...

Emerha

Oke oke. Nah itu kalau pajak GU ya, kalau pajaknya itu barang dan jasa, sama?

Angelia Resty

LS.

Emerha

Sama, mereka juga bayar??

Angelia Resty

E nanti dari rekanan kan ada surat kesanggupan. Kita bikin billing, nanti yang motong langsung BUD.

Emerha

Oh gitu, langsung dipotong ya. Dipotong pada saat SP2D? Tadi waktu kasih ke PPTK itu pajak itu udah dikasih tahu, oh ini pajak sekian, BPN sekian, BPH sekian, netto sekian, bruto sekian?

Angelia Resty

Jadi misalnya kayak gini, mereka kan belanja. Kan sudah termasuk pajak. Jadi nanti mereka bikinnya seperti ini sama pajek. Kita ngitung pajeknya aja. Ketika ini sudah betul, kita centang. Lalu kita bikinkan bilingnya sekalian, nanti kita kembalikan dibayar setelah ada bukti pembayaran dari bank, dilampirkan ke SPJ.

Emerha

Ini berarti kwitansi untuk dikasih ke PPTK ya? Pake ini semua ya?

Angelia Resty

Ya. Oh ini yang bikin PPTK. Iya. Cuma kan nanti bendahara kan tanda tangan tetep harus ngoreksi jumlahnya.

Emerha

Tadi bendahara sedikit banyak buktinya seperti ini juga? Di buku panjar aja. Ini mereka bayar yang ke sana ya?

Angelia Resty

Di buku panjar aja. Ini bukti kwitansinya dari rekanan.

Emerha

Ini kwitansi ini sudah standard ya.?

Angelia Resty

Sudah.

Emerha

Diatur di mana ini?

Angelia Resty

PERMENDAGRI 16 opo 13? Sek sek. Sek awal ya?

Emerha

Nggak ada perbupnya gitu model kwitansinya??

Angelia Resty

Kalau disidurnya sama seperti ini. Karena sisdur kan turunan dari PERMENDAGRI juga.

Emerha

Ntar slip adanya. Oke, berarti setelah SPP selesai ya, tugas bendahara itu ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

SPM itu tugasnya PPK. PPK dibawa ke bagian anggaran untuk tanda tangan.?

Angelia Resty

Eu iya..

Emerha

Artinya yang lebih tahu itu PPK ya? He em, siapa, PPK?

Angelia Resty

Untuk ininya? PPK-SKPDnya ibu sekretaris.

Emerha

Ibu sekretaris. Berarti ada pembantu PPK?

Angelia Resty

Pembantu PPKnya ada, sebagai verifikasi sama pembuat SPM ya mbak, sama petugas akuntansi.

Emerha

Berapa orang pembantu PPK ini??

Angelia Resty

Tiga, verifikasi, petugas akuntansi, pembuat SPM.

Emerha

Sama pelaporan? Tiga orang aja, satu dengan PPK, berarti 4?

Angelia Resty

Iya.

Q.3. Pembuatan SPP LS Gaji dan Tunjangan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalau LS gaji dan tunjangan?

Angelia Resty

LS gaji kan biasanya daftar gaji. Kita koreksi. Misalnya ada yang kenaikan pangkat, segala macam, ada peremajaan, kalau misalnya udah sesuai nanti kita langsung buat SP SPM

Emerha

Yang bikin daftar gaji itu siapa?

Angelia Resty

BUD.

Emerha

BUD. Berarti setiap bulan kita ambil di sana daftarnya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Berarti berdasarkan daftar gaji itu, kita bikin SPP. Kalau pajaknya bagaimana?

Angelia Resty

Kalau pajaknya kan dia pas kontrak.

Emerha

Itu dipotong?

Angelia Resty

Langsung otomatis. Nanti yang bayar dari Pemda.

Emerha

Berarti yang siapkan SSPnya bendahara?

Angelia Resty

Pemda kalau nggak salah.

Emerha

Berarti cuman ambil daftar gaji doang, sama SPJ SPP itu aja, nggak ada dokumen lain?

Angelia Resty

Nggak ada. Cuman nanti di SPMnya disebutkan PPh 21 nya berapa, terus fakturnya berapa seperti itu, untuk yang motong nanti langsung dari...

Emerha

Yang bikin SPP mereka dari sana ya? Eh apa SSP (surat setoran pajak)?

Angelia Resty

SSPnya sana.

Emerha

Kan itu ada taperum, ada taspen, NPWP, macam-macam kan analisis SSPnya?

Angelia Resty

Iya dari sana.

Emerha

LS gaji itu dia diverifikasi di sana?

Angelia Resty

BUD

Emerha

PPK, berarti cuman bikin SPP. Yang bikin SPP sama juga, sama juga masih PPK? Iya. Masih tetap ya? Sama ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Oke berarti yan bawa SPM ke BUD itu siapa?

Angelia Resty

Dari sini. Dari bendaharanya.

Emerha

Bendahara. Jadi SPM dikasih di sini. PPK tidak langsung bawa ke BUD?

Angelia Resty

Nggak.

Emerha

Berarti yang berhubungan dengan BUD bendahara ya berdasarkan SPM tadi itu?

Angelia Resty

Bendahara.

Emerha

Nah itu biasanya berapa lama baru terbit SP2D setelah SPM masuk?

Angelia Resty

Maksimal dua hari dari tanggal SPM.

Emerha

Dua hari ya. Nggak ada yang lewat dari situ? Kenapa harus dua hari?

Angelia Resty

Diperaturannya, sisdurnya kalau nggak salah.

Emerha

Kalau misalkan orangnya nggak ada?

Angelia Resty

Itu kan ada kuasa. Jadi kan pak kepala punya kuasa BUD.

Emerha

Ada sanksinya kalau lebih dari dua hari?

Angelia Resty

Kalau nggak salah ingat kayaknya ada. Tapi lupa apa...

Emerha

Dalam dua hari. Kalau misalkan di sana itu kan SPM diperiksa lagi?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Diverifikasi lagi. Kalau misalkan tidak lengkap gimana?

Angelia Resty

Dikembalikan.

Emerha

Dikembalikan, begitu dikembalikan bikin lagi SPPnya baru?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Nanti kalau SP2D gimana? Gimana dia tahu kalau SP2Dnya udah keluar?

Angelia Resty

Biasanya kan nanti kalau terbit SP2D kan di SIMDA juga ada.

Emerha

Oh itu online ya, jadi bisa dilihat di sini?

Angelia Resty

Iya. Bisa.

Emerha

Jadi SP2D tidak perlu dicetak?

Angelia Resty

Dicetak. Masih ada yang dicetak.

Emerha

Yang cetak siapa?

Angelia Resty

Dari BUD.

Emerha

Cuman informasi aja di BUD ya?

Angelia Resty

Ya, cuman udah masuk.

Emerha

SPP masuk sekian, SP2Dnya sekian. Itu online ya. Sejak kapan ada?

Angelia Resty

SIMDA ya tahun berapa mbak?

Emerha

SPP masuk sekian, SP2Dnya sekian. Itu online ya. Sejak kapan ada?

Angelia Resty

SIMDA 2011.

Emerha

Berarti SP2Dnya tadi begitu sudah keluar, udah cek di sini sudah ada, ambil di sana?

Angelia Resty

Ambil di sana

Emerha

Nah setelah hadir SP2Dnya diapakan?

Angelia Resty

Pertama nanti kita kan ke bank. Ngecek ke rekeningnya udah masuk belum.

Emerha

Itu ngeceknya gimana? Harus ke Bank?

Angelia Resty

Ke bank. Kalau sekarang udah pakai CMS bisa ngecek sendiri.

Emerha

Udah ada? Itu SMS banking apa?

Angelia Resty

Kalau SMS bankingnya sih enggak. Kita pakai CMS cash manajemen system.

Emerha

Bagaimana itu?

Angelia Resty

Itu program dari BPD, sebenarnya kerja sama dengan BPD. Jadi kita bisa ngecek saldonya bendahara sama bisa transfer sendiri lewat CMS.

Emerha

Itu jadi dilihatnya di mana kalau sudah masuk di rekening bendahara?

Angelia Resty

Jadi nanti di informasi di CMS itu kan kelihatan.

Emerha

Lewat apa informasinya?

Angelia Resty

CMSnya pakai laptop.

Emerha

Oh pakai laptop, itu semacam aplikasi ya?

Angelia Resty

Iya aplikasi berbasis web.

Emerha

Jadi berbasis web begitu?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Berarti yang punya aplikasi itu BPD?

Angelia Resty

BPD

Emerha

Setiap bendahara itu ada aplikasinya?

Angelia Resty

Kemarin kalau projectnya itu baru BKAD sama RSUD.

Emerha

Oh baru digarap semua?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Tahun berapa itu?

Angelia Resty

Mulai bulan April pertengahan.

Emerha

Tahun ini?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Berarti sebenarnya nggak perlu ke bank lagi y, tinggal dicek di situ aja?

Angelia Resty

Kalau untuk beberapa itu masih perlu. Misalnya kita pake transfer antar rekening antar bank, misal ke mandiri ke itu kita ngasih pesan.

Emerha

Oh ngasih pesan. Kalau penarikan tunai?

Angelia Resty

Penarikan tunai ngasih pesan.

Emerha

Oh berarti itu cuman informasi doang ya?

Angelia Resty

Ya, sama misalnya kayak transfer honor gitu kita sudah bisa transfer sendiri.

Emerha

Sudah bisa transfer sendiri? Lewat itu?

Angelia Resty

Sudah. CMS.

Emerha

Apa namanya?

Angelia Resty

CMS

Emerha

Singkatan dari apa itu?

Angelia Resty

Cash Manajement System

Emerha

Jadi kalau untuk pembayaran honor-honor langsung tinggal ketik di situ aja?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Jadi online BPD. Nah begitu SP2Dnya keluar, diapakan SP2D ini?

Angelia Resty

Diarsip

Emerha

Diarsip di buku apa?

Angelia Resty

Kita kan udah registernya juga, terus kits untuk hardnya kita arsip jadikan satu.

Emerha

Masukinnya manual ya?

Angelia Resty

Ya

Emerha

Nggak ada yang system?

Angelia Resty

Kendalinya gitu.

Emerha

Maksudnya nggak ada aplikasinya untu info buku penambahan SP2D?

Angelia Resty

Nggak ada, soalnya dari SIMDA sudah otomatis ada juga registernya itu.

Emerha

Oh ada juga. Berarti nggak pakai di SIMDA itu?

Angelia Resty

Jadi kan registernya udah ada. Terus nanti kita juga ngasih sendiri.

Emerha

Manual juga?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Di sini ada berapa bidang ya?

Angelia Resty

6, 7 sama sekretariat

Emerha

7 sama sekretariat. Berarti masing-masing bidang itu satu sama PPTK?

Angelia Resty

Satu bidang itu ada yang 3 PPTK, ada yang 2 PPTK.

Emerha

Ada 3 PPTK?

Angelia Resty

Karena kan yang jadi PPTK kan Subbid.

Emerha

Yang jadi PPTK subbid. Terus kabit jadi apa?

Angelia Resty

Penanggung jawab program.

Emerha

Semua gitu ya?

Angelia Resty

Iya, per kegiatan.

Emerha

Berarti penanggung jawab kegiatan beda dengan PPTK?

Angelia Resty

Iya,

Emerha

Penanggungjawab kegiatan beda nggak dengan PPTK?

Angelia Resty

Di atasnya PPTK.

Emerha

Berarti PPKom, pejabat pembuat komitmen?

Angelia Resty

Kalau PPKom itu kan beda, kalau PPKom kan sejenis untuk yang LS.

Emerha

Oh berarti PPTK jatuhnya di subbid ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Berarti satu bidang itu bisa lebih dari, berapa tadi, 3?

Angelia Resty

Ada dua ada yang tiga.

Emerha

Berarti di SK kan?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Berarti ada honoranya?

Angelia Resty

Nggak ada. Tapi per kegiatan itu ada honoranya. Perkegiatan.

Emerha

PPTK dianggarkan di honorer kegiatan?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Kegiatan mereka sendiri ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Berarti sekarang selain TPP ada juga honor?

Angelia Resty

Ada

Emerha

Berarti dua kali ya?

Angelia Resty

Tahun depan dihapus honornya

Emerha

Tahun depan dihapus ya. Nanti yang ngerjakan siapa? Karena dia orang kerja nggak dibayar?

Angelia Resty

Ya sudah tupoksi.

Emerha

Tupoksi ya, kadang begitu, itu kan bikin jadi malas orang kerja ya?

Angelia Resty

Iya. Tapi nanti gajinya yang naik.

Emerha

Yang tadinya ada, tiba-tiba tidak ada. Berarti kalau cuman honor dipindah di TPP, nggak apa-apa. Nggak masalah naik di TPP naik, itu mungkin bisa jadi semangat?

Angelia Resty

Iya. Terus yang nggak dapat nggak semangat.

Emerha

Berarti bisa sampai jadi 3 PPTK itu gimana ceritanya? Tidak bisakah satu PPTK saja?

Angelia Resty

Itu nggak tahu. Gimana mbak? Kok bisa jadi tiga PPTK itu?

Emerha

Dalam satu bidang?

Angelia Resty

Itu dapatnya ya. Ya kita terima aja.

Emerha

Yang bikin PPTK, yang ditunjuk SK PPTK siapa?

Angelia Resty

Kepala

Emerha

Kepala BKAD?

Angelia Resty

Iya. Berarti mungkin tergantung kegiatannya ya. Misalkan ada 10, nggak harus cuman satu ya, harus dibagi-bagi gitu. Jadi ada tiga puluh kegiatan jadi tiga PPTK, satu PPTK sepuluh-sepuluh. Masing-masing Kasubag itu membikin rencana apa program.

Emerha

Oh mereka punya kegiatan masing-masing. Jadi mereka yang jadi PPTK?

Angelia Resty

Ada usulan, gimana sih bisa jadi 3. Platfotmnya

Emerha

Dari Bappeda. Kenapa Bappeda? Itu apa?

Angelia Resty

Perencanaan pembangunan.

Emerha

Oh jadi masing-masingnya itu ada perencanaannya itu terkait dengan perencanaan di Bappeda ya?

Angelia Resty

Bukan perencanaan di Bappeda, rencana Bappeda secara keseluruhan. Rencana keseluruhan.

Emerha

Berarti kalau PPTK mengajukan SPJ ke sini berarti di PPTK itu ada arsip SPJ juga?

Angelia Resty

Ada.

Emerha

Aslinya di mana?

Angelia Resty

Aslinya di PPK.

Emerha

Di bendahara?

Angelia Resty

Di PPK. Pejabat penatausahaan keuangan.

Emerha

Terus yang diajukan ke BUD yang mana? Asli atau fotocopi?

Angelia Resty

Fotokopi. Jadi kan setiap PPK itu ngumpulin ke bendahara itu rangkap 4. Asli untuk PPK, kopi satu untuk bendahara, kopi dua untuk BUD, kopi keempat untuk BPD.

Emerha

Berarti 4 bundel itu diserahkan ke PPK. Berarti PPK tahan satu dikembalikan tiga?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Asli ditahan ya di sana?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Itu untuk SPJ itu misalkan kayak belanja perjalanan dinas harus lampirannya ini ini ini, itu diatur?

Angelia Resty

He em diatur.

Emerha

Di mana?

Angelia Resty

Di sisdur.

Emerha

Ada sisdurnya?

Angelia Resty

Ada.

Emerha

Yang sudah dicetak ada sisdurnya?

Angelia Resty

Ada.

Emerha

Boleh saya lihat sebentar? Ini hilang satu ini sakit kepala nih.

Angelia Resty

Kemarin ngoreksi beritanya nggak ada. Udah pada bingung. Paling keselempit di mana. Itu dikoreksi BUD nggak cocok, kurang, tolak. Sampai ke lampiran-lampirannya kok itu ditolak kalau misalnya kata terima kok nggak ada, kita lihat. Jadi dari sini sudah lengkap.

Emerha

Biasanya musim-musim sibuk gitu paling apa, di bulan-bulan apa? Sibuk untuk bikin dokumen kayak gini bu?

Angelia Resty

Kalau keuangan rutin sih, sibuk terus.

Emerha

Oh rutin ya, nggak berhenti-berhenti?

Angelia Resty

Soalnya kalau udah ada anggaran kasnya perbulan itu ada. Harus mengSPJkan.

Emerha

Harus mengSPJkan?

Angelia Resty

Itu kan dinamika. Tapi kalau berhenti, ada yang lelet bisa bubrah hitungan-hitungannya.

Emerha

Itu sebulan berapa kali GUnya?

Angelia Resty

Kalau kemarin-kemarin sebulan cuman berapa kali Mbak? 2-3. 2-3 kali. Sekarang itu sampai bulan Juni GU 11. Dari awal tahun sampai sekarang itu sudah 11 kali.

Emerha

Itu batas berapa baru bisa GU itu duit?

Angelia Resty

Ehm ada UPnya 100 berapa. Minimal 60%.

Emerha

UPnya 100 juta ya. Berarti?

Angelia Resty

150.

Emerha

150. berarti kalau 60% 90 ya. Berarti ketika pengeluaran sudah 90 juta harus GU?

Angelia Resty

Nggak harus. Sebenarnya lebih bagus dimaksimalkan.

Emerha

Dimaksimalkan 100%?

Angelia Resty

He em 100%.

Emerha

Kalau 100% nanti duitnya nggak ada di kas?

Angelia Resty

Kas mana? Nggak apa-apa kan, nanti kan masuk lagi. Ini dituker duit. Kalau SP2D sudah jadi kan uangnya masuk ke bendahara lagi.

Emerha

Kalau sampai nunggu 100%, kan misalkan kalau 90 istilahnya masih ada 60. 60 juta. Maksud saya ketika nunggu 100% otomatis udah nol kan uang di kas. Itu gimana antisipasinya?

Angelia Resty

Oh maksudnya nek GUnya sesuai UP gitu?

Emerha

Tunggu maksimal dari 100%?

Angelia Resty

Kita nggak pernah nunggu. Kalau nunggu nanti nganu, ada yang nggak kebagian uang.

Emerha

Nah itu maksudnya saya, perputarannya UP tidak lancar?

Angelia Resty

Jadi bendahara, bendahara bisa ngira-ngira, oh ini, sekian habis GU dulu, kalau nggak nanti yang belakang nggak mau. Soalnya kegiatan yang belakang kemungkinan uangnya lebih besar. Itu kadang PPTK pada nggak mengetahui itu, tahunya kok bendahara nggak ada uang. Padahal PPTK yang lambat, lambat ngirimnya ini.

Emerha

Mereka nggak tahu ya?

Angelia Resty

Sebenarnya tahu, tapi.....

Emerha

Tidak mau tahu?

Angelia Resty

Nggak mau tahu.

Emerha

Yang penting ada duit?

Angelia Resty

Kalau dulu pas panjer tidak ada duit tapi sekarang setelah CMS orang meminimalisir alasan. Kalau dulu kan tahunya bendahara ada uang terus. Padahal siklusnya uang bisa lancar ininya harus lancar. Padahal mereka minta itu belum memenuhi tanggung jawabnya ya mbak. Maksudnya seharusnya udah ngirim SPJ belum ngirim.

Emerha

Itu kalau berwarna-warna kayak gitu berarti udah ada blankonya ya bu?

Angelia Resty

Blankonya satu... Ini pesen kosongan nanti ngetik sendiri mas. Notanya pesen kosongan.

Emerha

Maksudnya blankonya ini disiapkan di sini ya?

Angelia Resty

Nggak.

Emerha

Blanko ini bukti kas ini?

Angelia Resty

PPTK bikin ini.

Emerha

Oh mereka bikin anggarkan ini juga?

Angelia Resty

Nyetak sendiri. Ini buku sisurnya dicari ada yang pinjam, ini yang perubahannya. Nah untuk itu, untuk jelasin, halah jamannya Pak Tri. Nanya yang kok tanda tangan. Bulan apa dulu? Kae di sini kok. Udah di sini ya?

Emerha

Ini yang terbaru ya?

Angelia Resty

Ya ini perubahan.

Emerha

2014 ya? Tapi ini belum diubah ya?

Angelia Resty

Belum.

Emerha

Berarti udah ada di admin websitenya ya. Di tools book?

Angelia Resty

Ya. Bu Ratna bukune.

Emerha

Bu Ratna siapa?

Angelia Resty

Sekretaris.

Emerha

Gak apa-apa dia lagi pake?

Angelia Resty

Nggak apa-apa cuman dipinjam.

Emerha

Oh cuman sini punya. Sesuai dengan SPP di sini ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Oke sekarang penatausahanya, itu SP2D siapa yang tata usaha? Yang bukukan? Tadi ada namanya buku...?

Angelia Resty

Register.

Emerha

Itu dimanual ya?

Angelia Resty

He em

Emerha

Masih manual semua ya? Walaupn di SIMDA ada ya?

Angelia Resty

Ada.

Emerha

Ini ada bendahara pengeluaran pembantu?

Angelia Resty

Nggak ada.

Emerha

Cuman pembantu bendahara aja?

Angelia Resty

Iya. Yang sekda ada ya. Sekda dan dinas-dinas besar biasanya

Emerha

Oh dinas besar? Oh gitu, dinas besar itu dihitung dari apanya? Anggarannya? Makin besar anggarannya berarti?

Angelia Resty

Yang punya pembantu itu ya. Apa ya? Yang punya UPTD biasanya? Yang membawahi UPTD. Terus nek sekda kan ada bagian-bagian gitu. Iya perbagian. Terus kalau dinas kesehatan kan puskesmas, terus kalau dinas pendidikan kan dulu ada UPTD, kalau sekarang kan udah dihapus.

Emerha

Nah ini bagaimana pencatatan uang persediaan? Pake buku panjer?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Itu tadi kan saya tanya bagaimana mengendalikan uang persediaan supaya tidak habis?

Angelia Resty

Jadi setiap uang yang sudah... kita ngeluarin uang, terus udah kembali 60%. Nanti otomatis GU. Biar uangnya tetap sejumlah UP.

Emerha

Oh dibatasi gitu ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Itu diatur di Perbub juga?

Angelia Resty

Perbub.

Emerha

Harus 60%. Di bawah 60 itu nggak bisa?

Angelia Resty

Nggak bisa.

Emerha

Ditolak di sana ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Bagaimana mereka tahu kalau 60%?

Angelia Resty

Jumlahnya mas, kan ada nilainya, misalnya UPnya berapa, terus ke sananya 60% dari itu tadi sebenarnya...

Emerha

Mereka hitung ya?

Angelia Resty

He em

Emerha

Ada juga pembayaran-pembayaran yang tidak ada anggarannya tapi dibayar dengan UP?

Angelia Resty

Nggak ada.

Emerha

Kalau misalkan itu diperintahkan pimpinan, kamu mau?

Angelia Resty

Nggak ada di sini.

Emerha

Nggak ada, nggak pernah pimpinan minta?

Angelia Resty

Nggak ada

Emerha

Kadang ada dibilang orang, kita mau ulang tahun dibuatkan spanduk ucapan selamat?

Angelia Resty

Iuran biasanya nanti.

Emerha

Iuran ya. Kadang yang susah itu bendahara jadinya. Tapi kalau bosnya pengertian aman?

Angelia Resty

Kalau di sini nggak, nggak kayak gitu.

Emerha

Kalau di SIMDA itu tidak ada pembukuan ya? Kayak tadi itu belum diupdate di SIMDA buku panjar, buku pembantu kas, buku simpanan bank?

Angelia Resty

Kalau buku bantu bank ada, terus kalau untuk buku panjer sebenarnya ada, cuman belum diaplikasikan. Kan masih manual untuk panjernya.

Emerha

Masih manual ya. Kenapa nggak diaplikasikan di SIMDA aja? Terlalu rumit di SIMDA? Atau nggak cocok sesuai itu?

Angelia Resty

Kalau selama ini beberapa teman yang pakai itu malah bingung sendiri kalau pakai SIMDA. Jadi mending manual aja.

Emerha

SIMDA itu nggak bisa diubah ya?

Angelia Resty

Nggak bisa.

Emerha

Nah tadi kalau penatausahaan dari tidak pakai panjar tadi berarti bayarnya itu berdasarkan bukti ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Jadi kayak pihak ketiga ya kan?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Begitu masuk, tunggu diverifikasi, kemudian dibayar. Berarti pajak udah langsung dipotong di situ?

Angelia Resty

Kalau yang non tunai?

Emerha

Yang tanpa uang panjar tadi?

Angelia Resty

Kalau non tunai nanti begitu yang kita bukukan di bank nanti otomatis sekaligus dengan pajaknya.

Emerha

Kalau BKU juga gitu? Masih manual?

Angelia Resty

BKUnya dari SIMDA.

Q.4. Pelaksanaan belanja yang transparan dan akuntabel

Emerha

Automatis dari SIMDA ya. Nggak ada yang manual. Itu tadi pakai NPD ya? Nah itu NPD dibukukan di mana?

Angelia Resty

NPDnya kan nanti dari PPTK kan kita tinggal akses.

Emerha

Nggak, waktu mereka minta duit kan pake NPD?

Angelia Resty

He em.

Emerha

Itu diarsipkan juga? Terus dicatat di mana? Di buku panjer berarti ya?

Angelia Resty

Kalau pencatatan di buku panjer nanti sesuai permohonan di PPTK. Kadang kan dalam satu NPD itu misalnya ada 5 juta. Kadang kan nggak diminta semua. Jadi yang diminta misalnya 3 juta dulu, soalnya yang 2 juta belum bisa input sekarang.

Emerha

Kenapa seperti itu mbak? Di NPD 5 juta, tapi dibayar 3 juta?

Angelia Resty

Jadi nanti kita satu bulan itu nggak hanya sekali GU.

Emerha

NPD dibikin 2?

Angelia Resty

NPDnya cuman sekali itu.

Emerha

Kapan panjer itu di SPJkan?

Angelia Resty

Di-SPJ-kan itu setiap mereka belanja kan langsung di-SPJ-kan.

Emerha

Langsung di-SPJ-kan. Berarti ketika panjar di-SPJ-kan, otomatis juga diubah di buku panjer?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Dan manual?

Angelia Resty

Iya misalnya nanti mereka panjernya 3 juta. Berarti nanti SPJ masuk misalnya 2,5, berarti kan panjer mereka sekitar 500.

Emerha

Oke. Kalau LS barang dan jasa? Berarti bendahara cuman terima SP2D?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Kan sudah masuk pertanggung jawaban, nah itu bisa dideteksi gak? Kalau pertanggung jawaban duluan masuk sebelum ada duitnya, apakah tidak mungkin terjadi misalkan ada mark up, ada fiktif, bisa dideteksi sama bendahra?

Angelia Resty

Kalau itu kan ada harga, ada survey dulu biasanya, terus nanti ada HPS-nya dulu, terus habis itu ada surat penawaran segala macam, karena nanti bendahara tahu di situ, kronologinya bagaimana, kenapa yang dipilih rekanannya ini, alasan apa, kan nanti kelihatan.

Emerha

Sama juga dengan LS gaji dan tunjangan ya?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Berarti tinggal terima SP2D. Berarti gajiannya sudah lewat bank semua?

Angelia Resty

Iya

Emerha

Otomatis bank yang masukin ke rekening masing-masing orang?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Kalau pertanggung jawaban UP itu kan lewat GU ya. Kalau di akhir tahun gimana?

Angelia Resty

Nanti ada di GU nihil.

Emerha

Biasanya di GU nihil lebih banyak sisa duitnya yang disetor atau bagaimana yang selama ini 4 tahun?

Angelia Resty

Biasanya sih yang disetor lebih sedikit, lebih banyak SPJ yang masuk.

Emerha

Berarti habis ya?

Angelia Resty

He em.

Emerha

Berarti SPj nihilnya benar-bener nihil ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Itu semua kalau untuk bikin pertanggung jawaban fungsional atau semua biasanya?

Angelia Resty

Kalau fungsional otomatis dari SIMDA.

Emerha

Otomatis keluar ya, nggak ada yang manual ya?

Angelia Resty

Nggak ada, otomatis.

Emerha

Berarti tinggal print ya?

Angelia Resty

Ya.

Emerha

Kalau yang administrative?

Angelia Resty

Administratif dari SIMDA.

Emerha

Sama juga. Tapi terpisah ya?

Angelia Resty

ya

Emerha

Berarti untuk SPM GU sama juga ya tetap diverifikasi di PPK ya. Kalau itu laporan penutupan kas di SIMDA juga?

Angelia Resty

Nggak, itu manual.

Emerha

Tapi itu tetap dilampirkan ya?

Angelia Resty

ya

Emerha

Itu batas kapan mengajukan SPJ fungsional ke bendahara BUD?

Angelia Resty

Laporan fungsionalnya? Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Emerha

Kalau telat bagaimana?

Angelia Resty

Nanti ada sanksinya.

Emerha

Apa sanksinya?

Angelia Resty

Biasanya dari kinerjanya jadi merah nanti.

Emerha

Jadi merah?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Kinerja yang di mana? Yang TPP?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Siapa yang kena?

Angelia Resty

Semua.

Emerha

Bendahara?

Angelia Resty

Nggak, satu instansi biasanya.

Emerha

Jadi kalau bendahara telat semua kena?

Angelia Resty

Kan tadi dari PPTK mas bendahara itu. Misalnya kalau PPTKnya lambat otomatis nanti efek ke sananya juga.

Emerha

Ke bendahara juga?

Angelia Resty

Sebenarnya itu kuncinya di PPTK, tapi itu yang kena bendahara.

Emerha

Itu bisa dikroyok itu PPTKnya. Gara-gara kamu ya, PPTK, PPTKnya kita kurang?

Angelia Resty

Tapi dia nggak sadar malahan Pak. Nyalahin. Nyalahin ke Bendahara ke keuangan, padahal dia sendiri yang salah.

Emerha

Gitu ya?

Angelia Resty

Tadi saya bilang minta uang nggak ada, tahunya bendahara punya uang toh, padahal dia sendiri yang bikin uangnya nggak ada.

Emerha

Iya karena SPJ belum masuk toh?

Angelia Resty

He em

Emerha

Kadang mereka nggak tahu ya. Salahnya di situ. Kalau untuk administrative tanggal berapa?

Angelia Resty

Di sini cuman fungsional aja yang laporan.

Emerha

Administratif nggak bikin? Nggak dimasukin ke PPK?

Angelia Resty

Nggak, cuman yang itu aja.

Emerha

Berarti udah setiap anu kan, udah ada laporannya ke sana kan?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Itu udah dianggap administratif?

Angelia Resty

Iya.

Emerha

Kalau TU?

Angelia Resty

Disini nggak ada TU.

Emerha

Nggak ada TU ya. Kenapa nggak ada TU?

Angelia Resty

Karena sudah cukup dengan UP.

Emerha

Itu udah berapa lama nggak ada TU?

Angelia Resty

Dari dulu udah nggak ada.

Emerha

UPnya 150 juta. Total anggaran berapa?

Angelia Resty

Kalau dengan gaji itu sekitar 15 M kalau belanjanya 9.

Emerha

Kalau di luar gaji?

Angelia Resty

Kalau untuk barang jasa kegiatan rutin itu sekitar 9.

Emerha

9 ya, besar juga ya. 150 udah cukup ya jadi nggak ada khawatir ya. Oke mbak itu sementara. Itu dulu wawancara saya. Tapi kalau misalkan saya masih ada yang kurang saya wawancara lagi ya?

Angelia Resty

Iya.

- b. Wawancara ke-2 dengan Angelia Resty, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 10.35 WIB di ruang kerjanya, Ruang Bendahara di Sekretariat BKAD. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).**

Emerha

e... pembukuannya itu kan tidak... tidak lewat sistim ya... tidak lewat Simda

Angelia Resty

Pake Simda... pake Simda...

Emerha

Yang pembukuan... kayak buku BKU buku...

Angelia Resty

Pake Simda...

Emerha

Oh... pake Simda...

Angelia Resty

Semua pake Simda sekarang...

Emerha

Nggak ada yang manual ya..?

Angelia Resty

Nggak ada

Emerha

Hem... itu saja... kapan itu manualnya... apa... pake

Angelia Resty

Pake Simda...

Emerha

Mulai Simda itu ya...

Angelia Resty

00.26 narasumber bertanya kepada staff: mbak mulai simda itu kapan ya... 2010... 11 2011

Emerha

2011...

Angelia Resty

He'em... ya okey....

Emerha

Terus selama ini kalo sudah menerapkan CMS itu sudah tidak ada lagi yang kena ya...?

Angelia Resty

Masih ada... untungnya...

Emerha

Untuk yang apa?

Angelia Resty

Untuk SPPD itu masih boleh kalo di kita sih Cuma SPPD aja yang masih... itu...

Emerha

BBM nggak lagi...

Angelia Resty

BBM sekarang udah mumpuni...

Emerha

Maksudnya...

Angelia Resty

Udah kerjasama dengan...

Emerha

Berarti tinggal SPBD saja ya...

Angelia Resty...

He'em....

Emerha

Kalo misalkan e... bayarnya ke PPTK sama juga tinggal SPPD...

Angelia Resty

Iya....

Emerha

Jadi semua kegiatan di atur...

Angelia Resty

Cuma non tunai yang CMS itu

Emerha

Nah... itu kalo pajaknya di potong langsung?

Angelia Resty

Potong langsung jadi nanti sama potong sama rekanannya udah... terima bersihnya aja...

Emerha

Terima bersih ya...

Angelia Resty

Iya...

Emerha

Yang... kedua... saya... kayak gini nih mbak... ini saya mau konfirmasi ke mbak apa... saya kan... analisis kaidah penulisan tesis itu kan kalo kita mau mengutip itu kan harus ada di depan jadi mbak nggak keberatan kalo saya tulis namanya lengkap gitu ya...

Angelia Resty

Hem nggak apa-apa

Emerha

Ini kan hasil wawancara kemaren

Angelia Resty

Oh gitu nggeh...

Emerha

Biasanya kan kalo misalkan ada yang sifatnya rahasia, biasanya kita taruh apa... inisial gitu ya... tapi ini bisalah kalo itu...

Angelia Resty

Ya... nggak apa-apa..., ini kan memang di ini... juga ada yang... DPK nya kita juga

Emerha

Kalo SPD yang dari PPTK itu... sering terlambat ya kemaren-kemaren...

Angelia Resty

Kalo sekarang sih udah di... udah... agak anu ya... karena udah non tunai kan jadi mereka... sekarang juga udah mulai dibatesin... sekarang... sekarang e... misalnya hari ini GU nya cair terus nanti kita udah langsung umumnin di grup kalo udah cair udah pada masuk semua sekarang lebih cepet...

Emerha

Yang terakhir saya minta fotonya mbak untuk lampiran ini

Angelia Resty

Kalo misalnya nggak usah di foto gimana...

Emerha

He'em....

Angelia Resty

Nggak usah di foto....

Emerha

Soalnya bukti juga sih mbak... mbak mau saya wawancara kan...

Angelia Resty

Oh gitu...

Emerha

Kayak ini...ya... ini kemaren saya ambil

Angelia Resty

Oh gitu ya..., harusnya itu nggak apa-apa lho... nggak usah di foto

Emerha

Untuk bukti...

Angelia Resty

Hehehehe... semua ya...

Emerha

He'em... ada 19 orang kita....

Angelia Resty

Oh... ibu juga

Emerha

Iya....

3. Atik Zuniastuti

a. Wawancara dengan Ibu Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T, pada 08 Mei 2018, pukul 14.49 di ruang kerjanya, Ruang Bidang Anggaran. Atik adalah Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan di BKAD sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai budaya kerja di bidang anggaran (RM2).

Q.1. Budaya organisasi dalam mengelola anggaran di bidang penganggaran

Emerha

Bu, topik saya tentang ini Bu, budaya dan deskresi dalam hal penganggaran.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Iya, tadi kan Ibu mengatakan tugasnya Ibu kan di PPAS ya.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

KUA-PPAS.

Atik Zuniastuti

Menjabarkan.

Emerha

Menjabarkan.

Atik Zuniastuti

Apa yang sudah tertuang di KUA-PPAS.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Ke dalam belanja APBD.

Emerha

APBD.

Atik Zuniastuti

Kalau PPAS-nya tugasannya di Bapeda.

Emerha

Iya, oh, gitu ya.

Atik Zuniastuti

Bukan di saya, iya.

Emerha

Iya, oke Bu, yang pertama Bu.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Apa ada ini ya Bu semacam kebiasaan gitu sebelum menyusun anggaran?

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Yang tidak, maksudnya yang tidak diatur di dalam perundang-undangan?

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Yang pernah dilakukan?

Atik Zuniastuti

Kalau kebiasaan nggak ada ya.

Emerha

Nggak ada ya?

Atik Zuniastuti

Kita selalu mengacu mempedomani peraturan baik itu peraturan undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah bahkan bila sudah tertuang dalam peraturan daerah tentu itu menjadi panduan kami untuk menyusun penganggaran.

Emerha

Iya. Bagaimana Bu caranya kalau kemarin kan untuk anggaran 2018 kan sudah selesai ya Bu ya?

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Dulu Ibu belum, belum terlibat di situ ya dalam penyusunan anggaran?

Atik Zuniastuti

Yang apa? Penyusunan APBD tahun ini?

Emerha

Iya, tahun ini.

Atik Zuniastuti

Belum.

Emerha

Belum, ya?

Atik Zuniastuti

Belum.

Emerha

Oh, ya. Bu, kalau soal penyusunan anggaran itu apakah ada, ada semacam sosialisasi dulu kepada semua SKPD?

Atik Zuniastuti

Dalam penyusunan anggaran?

Emerha

Iya, dalam penyusunan anggaran.

Atik Zuniastuti

Kita sosialisasinya ada bentuknya adalah penerbitan surat edaran kepada semua OPD untuk menyusun dokumen Pra-RKA atau Pra Rencana Kegiatan Anggaran. Jadi, itu kalau di PPAS itu kan sudah tertuang sebuah program itu terdiri dari kegiatan apa saja. Kemudian masing-masing kegiatan itu penganggarnya berapa. Nah, ketika PPAS sudah jadi kami lampirkan PPAS itu di dalam surat edaran ke masing-masing OPD, kita minta OPD untuk menyusun Pra RKA mendasari PPAS yang kita lampirkan gitu. Dan itu tahapannya biasanya di bulan Mei, iya.

Emerha

Bu, kalau dalam proses penyusunan itu.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Kalau misalkan pembagian pagunya itu gimana Bu?

Atik Zuniastuti

Pembagian pagunya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Itu mengikuti prioritas dan tematik pembangunan daerah dan itu sudah terumuskan sejak dari penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemudian kebijakan umum anggaran.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Prioritas pelaporan anggaran sementara.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Jadi, sejak penyusunan RKPD dan KUA-PPAS itu sudah berproses.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Melakukan anggaran itu dan itu tahapannya di Bappeda.

Emerha

Oh, berarti yang, yang bagi-bagi pagi itu bukan di bidang anggaran?

Atik Zuniastuti

Bukan

Emerha

Berarti sudah ada dari, dari Bappeda ya?

Atik Zuniastuti

Iya, makanya ketika di PPAS itu sudah tercantum urusan pendidikan.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Program ABC.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Masing-masing program itu ada jabaran kegiatannya 1, 2, 3.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Itu ada nama kegiatan, keluaran kegiatannya apa, anggarannya berapa. Nah, di kami tugasnya sejak mau menyusun Pra RKA.

Emerha

Pra RKA.

Atik Zuniastuti

Untuk menjabarkan nominal rupiah setiap program, eh, setiap kegiatan itu.

Emerha

Oh, berarti dia mencantumkan nilainya ya Bu?

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Kalau misalkan ada pagu anggaran satu SKPD.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Misalkan tidak cukup.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Anggarannya besar tapi pagunya segitu Bu.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Itu gimana mengatasinya Bu?

Atik Zuniastuti

Kalau cukup tidak cukup itu kan relatif ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Kalau, kalau mengikuti keinginan itu kan kebutuhan mungkin tidak ada cukupnya.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Nah, kembali ke prioritas dan tematik pembangunan daerah tadi. Jadi, sebuah SKPD kan dia punya koor ketugasannya, dimana koor ketugasannya yang menjadi pokok tupoksinya dia ya itu yang harus dia biayai.

Emerha

He'e

Atik Zuniastuti

Jangan membiayai hal-hal yang tidak tupoksinya dia.

Emerha

Berarti kalau misalkan pagunya cuma 15M.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Tapi, dia butuh 20M itu dikasih kan?

Atik Zuniastuti

Disusun dari prioritasnya.

Emerha

Disusun dari prioritasnya.

Atik Zuniastuti

Jadi, dia harus SKPD, eselon 2 dengan perangkatnya itu punya kewenangan untuk menentukan prioritas SKPD-nya itu dari 1 sampai 15M tadi. Kalau ada yang tidak terdani dari 15 ke 20M seharusnya itu yang tidak prioritas begitu.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Jadi, dia harus pandai-pandai mengelola uang anggaran, supaya yang terbiayai adalah yang prioritas begitu.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Memang kalau dipertimbangkan dari sisi kemampuan keuangan daerah, kami di Kulon Progo itu kan termasuk daerah yang PAD-nya kecil. Sehingga kami memang harus pandai-pandai mengelola anggaran dimana yang dibiayai hanya yang prioritas.

Emerha

He'e, prioritas, iya.

Atik Zuniastuti

Dan itu kebutuhan yang mendasar dan itu ada, ada panduannya dari ketentuan peraturan perundangan.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Yang diutamakan adalah yang memenuhi standar pelayanan minimal. Kemudian yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang memenuhi kebutuhan kan ada, ada kriterianya ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Kebutuhan dasar, kebutuhan pendukung itu kan ada kriterianya saya lupa di peraturan mana.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Nah, itu yang kita fokuskan ke situ. Terutama yang mendukung standar pelayanan minimal, iya.

Emerha

Bu, kalau misalkan tadi dalam pembagian pagu, tadi Ibu katakan sesuai kebutuhan ya bukan keinginan?

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Nah, kalau misalkan, itu apa ada maksudnya keputusan untuk memberikan itu dalam bentuk diskresi atau bagaimana Bu? Ada anunya?

Atik Zuniastuti

Itu sebenarnya itu lebih ditanyakan ke Bappeda e Mas.

Emerha

Oh, seperti itu.

Atik Zuniastuti

Penentuan, he'e, di sana ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Iya, nanti kalau saya jawab daripada salah (tertawa)

Emerha

(tertawa)

Atik Zuniastuti

Saya pernah di Bappeda.

Emerha

Oh, di Bappeda.

Atik Zuniastuti

Saya mungkin bisa memberi gambaran.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Tapi, jangan, jangan diakhir-akhir saya sudah berada di sini ada kebijakan yang berbeda di Bappeda.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Sehingga yang saya sampaikan itu sudah tidak update lagi.

Emerha

Oh, gitu.

Atik Zuniastuti

Nggak tahu ada perubahan kebijakan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Ya, lebih baik ditanyakan ke Bappeda juga gitu ya.

Emerha

Iya, oke. Bu, terkait tadi sosialisasi tadi.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Ke setiap SKPD, itu apakah ada pengelolanya Bu misalkan yang menyediakan materi, kemudian ada sistemnya.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Itu ada nggak?

Atik Zuniastuti

Jadi, begini, mungkin agak, agak ditarik ke belakang ya.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Sebelum berproses di, sebelum berproses di bidang saya. Jadi, penyusunan perencanaan penganggaran itu kan dari RKPD.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Kemudian ke KUA PPAS. Kemudian ke APBD. Nah, ketika KUA PPAS, saya lupa bulan Mei minggu ke berapa tapi ini bulan Mei, bulan Mei, ada ketentuannya minggu ke berapa begitu. Ini kita ambil lampirannya, kita cuplik per OPD.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Di dalam lampiran PPAS itu ada nomor program kegiatan kemudian sasaran, sasaran atau keluaran rupiah berapa. Nah, ini kita cuplik per SKPD, kita cuplik per SKPD. Kita sampaikan, kita sampaikan mendasari, mendasari cuplikan PPAS ini minta supaya SKPD menyusun Pra RKA. Artinya apa, tahapan kami adalah tahapan ketika KUA PPAS di Bappeda itu sudah final, sudah fix baru kami menerbitkan surat edaran, bentuknya surat edaran dari TAPD.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Kepala Kepala SKPD, memerintahkan Kepala SKPD supaya menyusun Pra RKA sesuai PPAS yang dicantumkan. Nah, itu dari sisi, apa ya, prosedur persuratan ya. Tapi, dari sisi, sistem kita sebenarnya di Kulon Progi punya RencanaKu. RencanaKu itu Rencana Kulon Progo itu sistem perencanaan dimana sejak tahapan RKPd itu sebenarnya sudah terlihat indikasi anggaran per program, per kegiatan sehingga di RencanaKu ini sudah, sudah ada Pra RKA. Jadi, Pra RKA, RKPd kalau kami istilahnya kemudian.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Pra RKA, RKPd itu sudah, sudah tertuang di RencanaKu. Nah, nanti di RencanaKu, dipastikan lagi karena ini masih indikasi ya yang di, yang di RKPd kan masih indikasi. Nanti Rupiah keluaran outputnya akan ada semacam DES, DES atau percermatan dari Bappeda yang mencermati penjabaran kegiatan itu dibelanjakan untuk apa, sosialisasi misalnya sosialisasi untuk, itu untuk berapa orang seperti itu pencermatannya. Nanti untuk memperbaiki Pra RKA yang sudah di RencanaKu. Jadi, ketika ada di situ sudah menghadap sistem, oh, ini dicoret, oh, ini dikurangi, oh ini harus ada tambah keluaran apa misalnya sosialisasi. Tapi, kok tidak ada buku panduan sosialisasinya atau materinya apa sosialisasi kok tidak ada materinya. Nah, itu yang ditambahkan. Hal seperti-seperti itu berprosesnya di Bappeda, di Bappeda dengan menggunakan sistem RencanaKu. Nah, nanti ketika di APBD di saya itu sudah menggunakan sistem yang berbeda namanya Simda, Njenengan pasti sudah familiar ya.

Emerha

Simda, ya, he'e.

Atik Zuniastuti

Nah, Simda ini yang penyusunannya sudah berapa puluh, berapa tahun yang lalu dengan kerjasama dengan --

Emerha

Sampai sekarang masih pakai Simda, ya?

Atik Zuniastuti

Masih.

Emerha

Yang dari BPKP itu kan?

Atik Zuniastuti

ilya, yang dari BPKP. Nah, ini tahun, tahun ketiga atau tahun keempat ya. Kami mensinergikan dari RencanaKu ke Simda.

Emerha

Oh, di, dikon, ya--

Atik Zuniastuti

Jadi, apa yang, iya, di, dikoneksikan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Jadi, apa yang sudah berproses di RencanaKu itu nanti di, dikoneksikan ke Simda sehingga ketika kami mengawal Pra RKA, SKPD sesuai surat edaran yang saya sampaikan tadi.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Itu sudah tidak ada missed, sudah tidak ada perbedaan antara pendampingan dari Bappeda dengan kami di BKAD. Artinya itu sudah nge-link, sistem itu sudah nge-link itu memang sangat, sangat membantu kami terutama ketika menghadapi SKPD yang tanda petik kadang-kadang dia punya mau.

Emerha

Iya, betul, ada kepentingan.

Atik Zuniastuti

Ketika di, ketika ketemu dengan Bappeda anu, oke, oke, oke, nanti ketika mau dipindah ke Simda karena ada rentang waktu dia nyisipkan apa.

Emerha

Iya, benar, itu ada juga (tertawa)

Atik Zuniastuti

Nah, itu, itu--

Emerha

Sering ya?

Atik Zuniastuti

Bukan sering, itu pernah terjadi ketika RencanaKu dan Simda belum terkoneksi.

Emerha

Konek, ya, he'e.

Atik Zuniastuti

Ketika RencanaKu dan Simda sudah terkoneksi, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa diminimalisir. Mungkin itu ya, jadi, jadi kami memang penyusunan APBD itu memang tidak serta-merta berdiri sendiri karena sudah ada proses sebelumnya di Bappeda sejak dari RKPD dan KUA PPAS. Bahkan mungkin 30% atau 50% pekerjaan penyusunan APBD itu sudah tertuang di Bappeda. Tapi, tapi itu anu ya, belanjanya. Tapi, kalau di BKAD kami kan selain belanja juga ada pendapatan.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Kemudian perekeningan. Itu yang masih di kami.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Bisa jadi ketika di Bappeda dia koor pencermatannya hanya kepada optimalisasi penggunaan anggaran supaya tepat keluaran kemudian terhadap benefit dan impact-nya bisa tercapai. Kalau di kami lebih ke pemanfaatan sampai detail Rupiahnya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Kemudian penempatan rekeningnya.

Emerha

He'e. Nomor rekeningnya.

Atik Zuniastuti

Iya. Kemudian jadwal pelaksanaan arus kasnya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Seperti itu, apakah kegiatan A mau direalisasikan tri wulan 1, tri wulan 2 atau tri wulan berapa.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Kemudian bulan Januari atau bulan apa itu di kami.

Emerha

Oh, gitu.

Atik Zuniastuti

Iya, tapi, meskipun detailnya di kami di Bappeda juga sudah, sudah di, sudah di ini, sudah dikawal.

Emerha

He'e

Atik Zuniastuti

Ini pelaksanaannya mau bulan apa. Kalau bulan misalnya pengadaan fisik infrastruktur jalan, dia meskinnya menghindari ketika musim penghujan. Nah, hal-hal itu untuk optimalisasi, apa, hasil, benefit dan impact tadi jangan sampai misalnya di pertanian pengadaan bibit. Musim panennya sudah lewat baru dia menjadwalkan pengadaan bibit kan tidak relevan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Nah, hal-hal itu yang dikawal di Bapeda.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Kalau kami mengawalnya di perencanaan penganggarannya.

Emerha

Penganggarannya.

Atik Zuniastuti

Mau bulan apa.

Emerha

Oh, gitu ya.

Atik Zuniastuti

Kalau musim tanamnya di bulan Juli mestinya kamu ya belanjanya bibitnya sebelum bulan Juli jangan setelah bulan Juli misalnya begitu.

Emerha

Iya. Terus Ibu, selain angka Rupiahnya itu, itu indikator kinerja juga ikut diperiksa nggak di setiap SKPD misalkan ada output terus outcome-nya?

Atik Zuniastuti

Iya, iya.

Emerha

Benefitnya, itu ikut diperiksa ya Bu?

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Indikatornya?

Atik Zuniastuti

Iya. Jadi, sebenarnya itu lebih distressingkan oleh Bappeda. Jadi, output, outcome, benefit, impact.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

itu pencermatannya oleh Bapeda. Kalau kami kemudian *ngathukke* dengan penjabaran di dalamnya. Misalnya di atas penulisannya dia keluarannya apa ya misalnya, misalnya pelatihan, latihan kerajinan bambu misalnya Deperindag ya. Tapi, di dalamnya dia tidak ada belanja material untuk pelaksanaan atau belanja bahan materi untuk pengadaan, pelatihan bambu. Pada waktu pelatihan kan mesti membutuhkan bahan-bahan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Materi mungkin apa, bambunya, mungkin peralatan pisaunya dan sebagainya. Loh, nanti kita konfirmasi, *Njenengan* atau SKPD mau mengadakan pelatihan kerajinan batu tapi kok di belanja *Njenengan* nggak mengadakan belanja materi, material bahan untuk pelatihan bambu. Nanti pada waktu pelatihan itu mau, mau namanya pelatihan kan pasti ada yang dikerjakan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Nanti mau ngapain, nah, misalnya. Terus dijawab oh nggak ada, itu nanti kelompok sudah siap untuk berswadaya misalnya beliau oh ya sudah, kalau sudah dijalankan seperti itu artinya meskipun tidak ada belanja bahan materi, kegiatan tetap akan bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan antara dinas dengan kelompok sasaran misalnya begitu. Atau misalnya untuk kegiatan pengadaan bibit, pengadaan bibit ini volumenya sekian, tapi di dalam rincian tidak terlihat ini sarannya siapa.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Sasarannya misalnya petani kopi, pengadaan bibitnya kok pengadaan bibit misalnya padi, sasaran kelompoknya kok petani kopi ini yang benar, benar nggak? Oh, iya, mohon maaf perlu dikoreksi. Nah, pencermatan-pencermatan itu kami mencocokkannya di belanjanya, di belanja.

Emerha

Itu di, bisa detail ya seperti itu ya Bu?

Atik Zuniastuti

Iya, harus (tertawa).

Emerha

Harus, ya?

Atik Zuniastuti

Harus.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Soalnya kalau tidak nanti ketika APBD sudah, sudah diundangkan menjadi Perda dan penjabarannya oleh Perbub, Peraturan Bupati nanti kita SPJ-nya kan pasti harus mengacu DPA itu.

Emerha

Iya, Bu.

Atik Zuniastuti

Kalau belanja bibit padi kok kelompok sasaran penerimanya petani kopi itu nanti di SPJ-nya nggak *gathuk* kan.

Emerha

He'e

Atik Zuniastuti

Nah, nanti yang repot di sana di perbendaharaan.

Emerha

Iya, he'e.

Atik Zuniastuti

Tapi, kami dari sisi perencanaan penganggaran kami bertugas untuk ngecek.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Kalau misalkan sudah rinci begitu Bu di, diperiksa, apa terjadi juga pergeseran atau perubahan anggaran?

Atik Zuniastuti

Tetap ada.

Emerha

Tetap ada ya?

Atik Zuniastuti

Tetap ada.

Emerha

Itu, itu wajib tiap tahun ya?

Atik Zuniastuti

Bukan wajib, sebenarnya kita lebih bukan ke kewajiban ya tapi ada kebutuhan untuk itu.

Emerha

Lebih kebutuhan.

Atik Zuniastuti

Misalnya saja yang baru sekarang ini kami terima, itu ada surat dari Sekda Povinsi bahwa kami ternyata di APBD Provinsi DIY itu kami mendapatkan bantuan khusus keuangan BKK Bantuan Keuangan Khusus dan itu tercantum di APBD DIY artinya itu sudah legal untuk dilaksanakan. Nah, kami di APBD kami bantuan keuangan khusus itu belum tercantum. Nah, kami harus mencantumkan pendapatan

dari BKK DIY itu dari sisi pendapatan dan dari sisi belanja kami harus menuangkan belanja, penganggaran belanjanya sesuai juknis yang diterbitkan oleh SKPD DIY. Nah, kami sudah terima informasi BKK-nya ini untuk SKPD mana nilainya berapa, sasarannya apa, itu sudah. Tapi, kami masih menunggu juknis dari SKPD DIY. Nanti kalau dari juknis dari SKPD DIY sudah jelas, kami baru berani menuangkan di penjabaran belanjanya supaya nggak keliru.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Jadi, penuangan belanjanya harus lewat juknis kan. Nah, kalau sudah fix sesuai ketentuan juknis baru kami nanti mengadakan perubahan APBD, begitu. Mendahului perubahan karena kalau perubahan normatifnya kan nanti bulan Juli.

Emerha

Iya, berdasarkan mendahului perubahannya?

Atik Zuniastuti

Perubahan APBD, nah, sekarang pergeseran mendahului perubahan--

Emerha

Berarti itu sudah bisa ada pencairan di saat itu?

Atik Zuniastuti

Kalau setelah di Perbub kan bisa.

Emerha

Bisa ya?

Atik Zuniastuti

Dan dasarnya kuat dari APBD DIY.

Emerha

APBD DIY.

Atik Zuniastuti

APBD DIY kan Perda.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Ya, dasarnya kuat.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Kalau tidak dicantumkan malah kami melanggar peraturan.

Emerha

Iya, benar.

Atik Zuniastuti

Wong sudah diberi sama DIY sama provinsi kok kabupaten tidak menindaklanjuti begitu.

Emerha

Oke.

Atik Zuniastuti

Nah, itu contoh-contoh yang memaksa kami mau nggak mau harus pergeseran mendahului perubahan.

Emerha

Oke.

Atik Zuniastuti

Artinya ada ketentuan di atasnya yang membutuhkan kami menyesuaikan dengan pergeseran mendahului perubahan. Misalnya ada juknis DAK, DAK-nya sudah tercantum di APBD, tapi ternyata secara juknis dari kementerian teknis mengubah. Jadi, yang sebelumnya belanja langsung ternyata diminta ke belanja tidak langsung. Nah, itu kami juga harus menindaklanjuti. Nah, dasar kami adalah Permen Peraturan Menteri Teknis yang mengatur tentang juknis penggunaan DAK bidang tertentu sesuai teknisnya ke teknisan kementerian itu. Jadi, ketika ada peraturan-peraturan di atasnya yang mengamanatkan kami untuk menyesuaikan di APBD ya kita tindak lanjuti.

Q.2. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan anggaran

Emerha

Iya, oke, Bu. Terus menurut Ibu kalau akuntabilitas dalam anggaran itu seperti apa Bu?

Atik Zuniastuti

Akuntabilitas anggaran ya.

Emerha

Menurut Ibu.

Atik Zuniastuti

Anggaran ya. Jadi, kalau menurut saya ini dengan pemahaman saya yang baru 3 minggu di sini ya.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Nggak apa-apa, iya. Jadi, bahwa setiap Rupiah, nilai Rupiah yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Caranya mempertanggungjawabkan adalah sejak dari penganggarnya harus sesuai peraturan perundangan. Realisasi pencairannya harus sesuai dengan peraturan perundangan. Administrasi pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan peraturan perundangan. Khusus administrasi pertanggungjawaban keuangan kami punya Perda, pengelolaan keuangan daerah dimana di situ diatur per belanja per rekening itu bentuk pertanggungjawabannya seperti apa itu sudah ada.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Nah, harus mengacu itu. Kemudian sampai ke pelaporan dari sisi akuntan, akuntansinya juga harus tepat. Ketika belanja A ya masuk akun marginnya di A, belanja B ke akuntansi pelaporannya di B. Nah, khususnya yang di bidang saya ya sejak penganggaran itu harus di ketentuan peraturan perundangan.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Jadi, di antaranya itu tadi saya *matur* Perda APBD sudah mengamankan adanya bantuan keuangan khusus ya kami kemudian menuangkannya di belanja di sisi pendapatan juga dituangkan. Kemudian kami dari sisi belanjanya. Kemudian ketika Kementerian Teknis menerbitkan juknis DAK, penggunaan DAK tertentu ternyata di APBD kami ada yang kurang tepat, tidak sesuai juknis ya kami harus penganggarnya harus menyesuaikan dengan juknis begitu.

Emerha

Kalau bentuknya seperti apa Bu kalau dalam penganggaran akuntabilitasnya itu bentuknya seperti apa? Misalkan harus melaporkan ke mana gitu?

Atik Zuniastuti

Kalau di kami terutama per rekening kan ya.

Emerha

Per rekening.

Atik Zuniastuti

Perekeningannya harus tepat, kemudian perinciannya juga wajar, jadi ketika pengadaan misalnya pengadaan ya, pengadaan A, kemudian kok rekeningnya kok di bukan misalnya pengadaan sebuah belanja modal. Tapi, kok perekeningannya kok ada di barang jasa. Nah, itu harus diluruskan, itu sebagai bentuk, apa ya, akuntabilitas itu tadi. Jadi, perekeningannya harus betul, kemudian kalau pun sudah betul dibelanja modal. Nah, belanja modalnya ini belanja modal kepada yang diserahkan kepada masyarakat atau belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah atau seperti apa. Nah, itu di perekeningannya.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Iya, sehingga nanti kalau administrasi keuangannya akan otomatis mengikuti. Kalau perekeningannya betul, administrasi keuangannya juga akan betul, kemudian SPJ-nya juga harus--

Emerha

Berarti kuncinya lewat sini ya. Kalau misalkan ada yang salah, salah rekening, kayak tadi Ibu bilang.

Atik Zuniastuti

Iya, iya.

Emerha

Apakah di bidang Perbend itu nggak mau meng-spj-kan atau gimana?

Atik Zuniastuti

Bisa.

Emerha

Bisa?

Atik Zuniastuti

Dia tetap bisa menerima SPJ.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Tapi, nanti ketahuannya ketika di akuntansi.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Ketahuan lagi ketika diperiksa oleh Inspektorat.

Emerha

BPK.

Atik Zuniastuti

Atau BPK. Oh, ini tidak boleh di sini harusnya penempatan rekeningnya di sini.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Nah, sebelum itu sampai ke peng-SPJ-an atau pun sebelum itu sampai di, di eee teliti diperiksa oleh BPK, kami kadang-kadang masih mengadakan pencermatan ulang.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Pencermatan ulang itu ketika ditemukan atau ada usulan dari SKPD bahwa belanja ini tidak pas di rekening ini. Sehingga mereka mengusulkan perubahan rekening nanti akan kami kaji.

Emerha

Kalau, kalau misalkan statusnya sudah terbayar, sudah cair duitnya.

Atik Zuniastuti

He'e, he'e.

Emerha

Masih bisa dibongkar lagi?

Atik Zuniastuti

Wah, kalau sudah terbayar saya nggak tahu.

Emerha

Sudah nggak bisa ya? Kalau misalkan begini, tadi sudah terbayar rekening tadi kayak Ibu bilang.

Atik Zuniastuti

He'e, he'e.

Emerha

Yang seharusnya belanja modal kok masuknya dia belanja barang.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Sudah lolos.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Sampai di Perbend dicairkan.

Atik Zuniastuti

He'e.

Emerha

Pas ketahuan nanti di akuntansi bahwa ini rekeningnya masuk di mana. Nah, itu gimana?

Atik Zuniastuti

Kalau saya belum tahu sejauh itu.

Emerha

Gitu ya.

Atik Zuniastuti

Tapi, setahu saya masih bisa diluruskan.

Emerha

Masih bisa ya.

Atik Zuniastuti

Ketika tahapan di akuntansi tapi kan tentu saja ada dokumen kayak berita acaranya istilahnya apa ya, konsinyiasi atau apa. Ya, saya kurang paham kalau itu.

Emerha

Iya, iya.

Atik Zuniastuti

Mungkin nanti teman akuntansi yang bisa menjelaskan itu.

Emerha

Oke.

Atik Zuniastuti

Tapi, kalau *ndilalah* di kami lolos.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Terlewat begitu ya dari pencermatan kami, kemudian di perbendaharaan juga SPJ-nya diterima.

Emerha

Lolos. Iya.

Atik Zuniastuti

Nah, kelihatannya nanti muaranya di akuntansi.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Ketika okelah di akuntansi *ndilalah*, kebetulan juga lolos karena tidak cermat juga, nanti oleh pemeriksa BPK nanti yang akan (tertawa). Tapi, sebenarnya sebelum, nggih Mbak, sebelum itu, oh ya monggo Mbak, nih, makasih ya Mbak, iya, hati-hati ya. Nanti ketika belum sampai seharusnya belum, ketika belum sampai di tahapan pemeriksa kami harus, maksudnya harus mengevaluasi diri.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Memperbaiki diri begitu.

Emerha

Itu kalau lolos jadi temuan nggak ya Bu?

Atik Zuniastuti

Jadi, temuan.

Emerha

Jadi, pasti jadi temuan ya?

Atik Zuniastuti

Pasti, dan sebagai informasi saja kami ini tahun keempat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Emerha

WTP, ya?

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

2017, ya?

Atik Zuniastuti

2017, tahun keempat.

Emerha

Oh, tahun keempat.

Atik Zuniastuti

Ya, semoga--

Emerha

2017 sudah keluar ya?

Atik Zuniastuti

Sudah. Semoga ini tahun kelima kami masuk.

Emerha

Oh.

Atik Zuniastuti

Oh, tahun 2017 belum.

Emerha

Sementara ya, dalam proses ya.

Atik Zuniastuti

Masih berproses pemeriksaan ini nanti.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

BPK selesai pemeriksaan tanggal 15 Maret.

Emerha

He'e, berarti Mei pengumumannya ya?

Atik Zuniastuti

Iya, semoga hasilnya masih WTP (tertawa).

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Artinya kami dari sisi perekeningan sudah betullah gitu, semoga nanti dari sisi pembelajaran kami selama 4 tahun ini tidak ada yang missed lagi (tertawa)

Emerha

WTP terus ya Bu?

Atik Zuniastuti

Iya, insya Allah, amin.

Q.3. Transparansi dalam konteks pengelolaan anggaran

Emerha

Nah, ini pertanyaan terakhir Bu.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Kalau dalam hal transparan anggaran menurut Ibu seperti apa?

Atik Zuniastuti

Transparansi anggaran ya? Eee, ini mestinya sejak perencanaan ya.

Emerha

Iya

Atik Zuniastuti

Sejak perencanaan, nah, itu sudah kami lakukan sejak tahapan Musrenbang Desa. Jadi, Musrenbang Desa itu dilaksanakan dengan mendasari surat edaran dari TAPD yang mana di surat edaran TAPD itu sudah ada guidance tematiknya. Artinya desa akan menuangkan APBDes-nya itu sudah mengacu kepada tematik yang tematik prioritas pembangunan yang diangkat oleh bupati. Kemudian Musrenbang Desa ditindaklanjuti oleh Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan otomatis juga mengacu, mempedomani prioritas pembangunan bupati itu. Itu melibatkan semua unsur masyarakat ya.

Emerha

Berarti APBDes itu ikut dievaluasi di sini juga ya?

Atik Zuniastuti

Bukan dievaluasi di kami tapi menjadi materi pembahasan di Musrenbang Kecamatan.

Emerha

Di Musrenbang, he'e.

Atik Zuniastuti

Ketika Musrenbang Kecamatan sudah di sepakati hasilnya seperti apa, hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Artinya Musrenbang Kabupaten itu tidak semata-mata hanya dari usulan SKPD Kabupaten. Tapi, sudah apa ya, nggih, monggo, monggo, iya, oh, ya ke bidang mana? Oh, iya, iya, nggih, nggih, makasih ya Mbak, iya. Artinya yang dibahas di Musrenbang Kabupaten itu sudah tidak hanya usulan dari SKPD. Tapi, sudah me--, apa ya, enak, istilahnya itu, sudah mengambil dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan tadi. Bahkan ketika di sejak Musrenbang Kecamatan pun kita sudah menghimbau kepada kecamatan untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan. Jadi, pokok-pokok pikiran Dewan itu sudah diolah sejak di Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Artinya lagi sumber, sumber perencanaan penganggaran itu sudah dari desa, kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan dan SKPD dari 4 aspek itu. Nah, yang membahas di Musrenbang kabupaten itu, bukan hanya Musrenbang kabupaten ya, sejak di, sejak kecamatan Forum SKPD dan pokok-pokok pikiran dewan itu dibahas sudah dengan melibatkan masyarakat. Kami pasti mengundang unsur masyarakat ketika perencanaan. Meskipun ini nanti di Bappeda ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Nanti mungkin Bappeda lebih menjelaskan.

Emerha

Oh, he'e.

Atik Zuniastuti

Jadi, ada eee unsur non-PNS-nya, unsur non-PNS itu kita bagi ke dalam beberapa sektor. Misalnya sektor kesehatan dan pendidikan. Itu nanti ada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya IDI Ikatan Dokter, IBI Ikatan Bidan. Kemudian PGRI, kemudian kalau di pendidikan itu ada Persatuan Guru juga ada, apa, Perga Belajar Perwakilan Warga Belajar ini yang mengikuti kelompok Paket A, Paket B, Paket C itu. Nah, wakil-wakil masyarakat ini pasti kita undang di dalam proses perencanaan.

Emerha

Itu di, diundang di dalam Musrenbang Kabupaten nanti?

Atik Zuniastuti

Iya, iya. Sejak Forum SKPD malah.

Emerha

Iya, sudah di Forum SKPD ya?

Atik Zuniastuti

Iya, sejak Forum SKPD sudah diundang dan tapi itu mohon maaf nanti tanggapannya di Bappeda nanti.

Emerha

Iya, oke.

Atik Zuniastuti

Mungkin Njenengan bisa menanyakan lagi.

Emerha

He'e.

Atik Zuniastuti

Kalau ketemu dengan teman-teman di Bappeda.

Emerha

Oke, Bu, bentuknya transparansinya seperti apa Bu?

Atik Zuniastuti

Transaparansinya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Ya, itu tadi.

Emerha

Lewat?

Atik Zuniastuti

Dengan kita mengundang masyarakat luas, adanya kita sudah--

Emerha

Ada pengumuman lewat website juga ada?

Atik Zuniastuti

Oh, kalau web, lewat website iya.

Emerha

Itu juga wajib ya?

Atik Zuniastuti

Iya, lewat kulonprogrokab dan ini dengan sistem itu tadi jadi desa maupun kecamatan itu, oh, ya monggo, monggo, desa dan kecamatan bisa membuka sistem RencanaKu itu.

Emerha

Hmm.

Atik Zuniastuti

Jadi, apa yang tertuang di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan itu nanti terakomodir juga di RencanaKu. Dia bisa ngecek usulan kecamatan dari Kecamatan A itu masuk nggak ya ketika mengusulkan perbaikan jalan dia bisa ngecek di eee di SKPDPU. Ruas jalanku muncul nggak ya dibangun nggak ya, itu bisa nge-klik di RencanaKu, bisa ngecek, *nggih*. Tapi, yang, yang bisa diakses oleh publik itu memang RencanaKu.

Emerha

RencanaKu.

Atik Zuniastuti

Kalau Simda kan sudah spesifik berkaitan dengan penganggaran, bukan spesifik sasaran kegiatan lagi tapi kami koornya lebih ke penganggaran. Simda ini belum bisa diakses oleh publik.

Emerha

Belum bisa ya?

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Mungkin karena sudah ada duitnya gitu ya?

Atik Zuniastuti

Iya, iya, iya itu dia dan itu berkaitan dengan apa nanti SPJ dan sebagainya ya.

Emerha

Kalau, kalau dari sisi transparansi?

Atik Zuniastuti

Di RencanaKu ini sebenarnya sudah ada duitnya.

Emerha

Sudah ada ya?

Atik Zuniastuti

Iya, tapi kan tidak, tidak kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan ketika jadi SPJ, ketika jadi SP2D jadi SPM. Kalau di RencanaKu sudah tercantum itu.

Emerha

Berarti sudah mulai dari Pra RKA sudah bisa dilihat di rencana?

Atik Zuniastuti

Iya, di RencanaKu itu sudah kelihatan uangnya. Misalnya eee ruas jalan A itu ikut masuk drencanakan di 2019 nggak ya misalnya besok. Walaupun iya eee anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan itu berapa misalnya 10M, itu sudah terlihat meskipun masih indikasi.

Emerha

Masih indikasi ya.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Pagu indikasi.

Atik Zuniastuti

Karena pendapatannya belum, masih berproses kan pendapatannya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Belum final, jadi masih indikasi. Nanti kalau --

Emerha

Berarti pagunya masih pagu indikatif juga ya?

Atik Zuniastuti

Iya, di RencanaKu pagunya masih indikatif.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Iya, gitu.

Emerha

Oke, Bu, terima kasih banyak.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Atas waktunya.

Atik Zuniastuti

Saya lulus tes nggak ini (tertawa)?

Emerha

(tertawa)

Atik Zuniastuti

Saya anak baru soalnya (tertawa)

Emerha

Iya, nggak apa-apa Bu (tertawa). Kapan-kapan saya wawancara lagi ya Bu kalau misalkan ada yang masih kurang.

Atik Zuniastuti

Iya, nggak apa-apa, silakan, selama saya masih bisa menjawab ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Walaupun jawaban saya kurang memuaskan ya mungkin nanti di, dikroscek di kon, apa ya.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Dilengkapi oleh teman narasumber lain.

Emerha

Ini kan saya hari Senin juga kan saya di Bapeda Bu.

Atik Zuniastuti

Oh, begitu.

Emerha

Iya.

Atik Zuniastuti

Iya.

Emerha

Sudah, sudah konfirmasi.

Atik Zuniastuti

Ya, setidaknya yang saya *matur* tadi sudah nyicil kan tadi.

Emerha

Iya, nanti saya--

Atik Zuniastuti

Bisa di--, iya, bisa dilengkapi oleh teman-teman Bapeda yang pasti secara perencanaan—

b. Wawancara ke-2 dengan Atik Zuniastuti, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 14.39 WIB di ruang kerjanya, Ruang Bidang Anggaran. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Kan biasanya ada sumber kutipannya ya..., nah... kayak ini kan misalnya transkrip wawancaranya ibu, nah... nanti kan penulisan itu kan di bawahnya itu kan ditaruh sumber jadi saya Cuma mau konfirmasi ke ibu, kalo ibu nggak keberatan kalo saya tulis namanya ibu?

Atik Zuniastuti

Oh... gitu saya baca... baca itu ya... banyak nggak itu, hehehehehe. Berapa lembar, heheheeh

Emerha

Ini bu... lumayan ini, baca satu-satu dulu aja. Biasanya kan kalo mengandung rahasia kadang Cuma inisial aja

Atik Zuniastuti

Ini tentang budaya organisasi dalam mengelola anggaran, he'e bu topik saya..., oh ya... rekamannya, he'e... he'e gitu ya...

Emerha

Iya... alami aja bu

Atik Zuniastuti

Oh gitu...

Emerha

Transkrip..., namanya transkrip verbatim

Atik Zuniastuti

Kalo di iya gitu aja gimana, jadi bukan he'e he'e, mungkin harus apa ini..., hem.... (01.28 suara narasumber tidak terdengar jelas). Ya... kepribadiannya p dobel ya nanti

Emerha

Nanti saya perbaiki, kan nanti saya kan tinggal kopi ke laporan saya nanti

Atik Zuniastuti

Oh ya...

Emerha

Jadi nanti setelah itu di bawahnya saya tulis namanya ibu

Atik Zuniastuti

He'em...

Emerha

Biasanya kalo ada rahasianya di anu, inisial A, Z gitu...

Atik Zuniastuti

Tapi ini anu ya... apa maksudnya kalo melihat dialognya kayak nggak nyambung ya..., maksudnya pertanyaannya apa, jawabannya apa kayak nggak jelas gitu sih, yang tidak... maksudnya yang tidak diatur dalam peraturan dalam undang-undangan

Emerha

Tapi tidak semua di... mana yang... yang... apa... yang... dianggap apa... yang dianggap esensi aja yang bisa saya salin ke... laporan saya

Atik Zuniastuti

He'em... hek'em... (narasumber berdeham), ini saran dari ibu, apakah ada semacam sosialisasi dulu ke OPD (02.55 narasumber membaca dengan suara tidak jelas), he'em... ya... saya baca saya pelajari ya...

Emerha

Ya...

Atik Zuniastuti

Kor itu tulisannya core ya..., nanti perlu di edit ya...

Emerha

Okey... saya nanti edit

Atik Zuniastuti

Atau saya edit sekalian, nanti tambah lama saya bacanya, hehehehehe

Emerha

Akan saya rekam, saya cek-cek, saya edit ulang

Atik Zuniastuti

Ini perlu nggak ya mas, yang e... dialog saya lupa konteksnya waktu itu jadi e... ketika saya menyampaikan ketika di... Bappeda e... nanti ketika kemudian pindah ke Simpai itu ada jeda waktu sehingga dia nyisipkan apa... lha ini mungkin...

Emerha

Nggak perlu ya...

Atik Zuniastuti

Nggak perlu aja ya..., saya coret aja ya... di sininya

Emerha

Ya...

Atik Zuniastuti

Saya strip aja... boleh... nanti biar nggak... nggak lupa jenengan. Hem... bagaimana ini strip outnya ini..., kayaknya anu... tidak terlalu berkaitan dengan konteks yang sedang kita diskusikan jadi nanti akan menimbulkan pertanyaan...

Emerha

Hemm... kayaknya nggak ada di sini

Atik Zuniastuti

Nggak ada...

Emerha

Ini software... software Nvivo ini, hehehehehe.

Atik Zuniastuti

Oh gitu...

Emerha

Ya saya coba foto aja bu... saya foto aja...

Atik Zuniastuti

Oh... nggak ada ya... ya udah di foto aja, perlu di blok nggak

Emerha

Ya..., Cuma nggak ada mau... ini di mana ini, nggak ada...

Atik Zuniastuti

Nggak ada kayaknya... atau di home... di home... di home...

Emerha

Ini warna... di warna aja ya...

Atik Zuniastuti

Warna boleh, di warna juga boleh kayaknya nggak aktif deh itu

Emerha

Warna... di warnanya ya... ya... udah...

Atik Zuniastuti

Gimana udah di konfirmasi juga... atau baru saya..

Emerha

Udah yang lain sudah

Atik Zuniastuti

Yang lain sudah dikonfirmasi

Emerha

He'em..., saya foto aja nanti saya

Atik Zuniastuti

Di foto aja he'e...

Emerha

Saya foto aja nanti saya... he'em...

Atik Zuniastuti

Ya lanjut ya..., saya bacanya juga sekilas-sekilas

Emerha

di.. anu juga sama begitu di Bappeda tadi

Atik Zuniastuti

Di Bappeda... oh ya...

Emerha

Ya... ada yang mereka menyinggung SKPD lain mereka suruh, heheheheehhe

Atik Zuniastuti

Itu kalo untuk evaluasi internal kami e... harus ya... di garis bawah, tapi jenengan kan ini keluar kan ya...

Emerha

Ya... makanya saya konfirmasi dulu

Atik Zuniastuti

Ya..., hehehehehehe. Ini boleh... saya tambah...

Emerha

Yang mana...

Atik Zuniastuti

Yang di sini saya tambah jawabannya e... jadi pencermatan rekening juga mendasari ketentuan... akuntansi... akuntansi daerah. Kan ada Perda atau Perbup nya tapi saya lupa namanya. Di sini mungkin setelah kaji ini ditambah... pencermatan ulang rekening belanja berdasarkan

Emerha

Itu nggak bisa itu

Atik Zuniastuti

Oh... nggak bisa edit ya..., atau bagaimana ya...

Emerha

Atau ibu anu aja ya... ibu bicara aja nanti saya rekam...

Atik Zuniastuti

Oh... untuk yang ini ya... yang poin... e... jawaban saya ya pencermatan ulang, itu ketika di... temukan atau ada usulan dari OPD bahwa belanja ini tidak pas rekening ini, sehingga mereka mengusulkan perubahan rekening nanti akan kami kaji, nah... dasar mengkaji dan mencermatinya itu berdasarkan ketentuan akuntansi daerah yang berupa... e... Perda atau Perbup saya lupa, nggeh gitu

Emerha

Ya...

Atik Zuniastuti

Ya... saya lanjut. Ya... cukup... ya... saya kira udah... nggak masalah, nggeh monggo

Emerha

Nanti saya periksa lagi ya bu ya...

Atik Zuniastuti

Ya... memang kalo baca harus apa... e... runtut dari awal... kalo di tengah-tengah jadi nggak jelas ini ngobrolin apa, soalnya terpotong di tengah ya... heheheheeh

Emerha

Okey yang terakhir bu, saya boleh meminta fotonya untuk profil partisipan saya, kemaren sudah saya ambil ini

Atik Zuniastuti

Oh ya... coba yang lihat yang ini oh ini Pak Kabid...

4. Nur Hadiyanto

- a. Wawancara ke-1 dengan Nur Hadiyanto pada 07 Mei 2018, pukul 08.35 pagi di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Nur Hadiyanto adalah Kepala Bidang Perbendaharaan di OPD BKAD sejak 2017 sampai dengan saat ini. Wawancara ini membicarakan topik tentang budaya kerja PKD di Kulon Progo.

Q.1. Karakteristik dan pembentukan budaya kerja di bidang perbendaharaan

Emerha

Setelah saya menganalisis adanya budaya kerja seperti yang Bapak katakan pada wawancara sebelumnya ada budaya kerja seperti subtansi mengungguli bentuk, setiap SKPD sering berkonsultasi dengan perbendaharaan, selalu ada kajian dan minta izin bupati, berkonsultasi dengan APIP jika ada permasalahan, dan ada perencanaan yang matang. Menurut bapak apakah hal itu merupakan budaya kerja yang diterapkan sehari-hari dalam setiap pengambilan keputusan di bidang perbendaharaan yang Bapak pimpin? Apakah itu sudah menjadi kebiasaan?

Nur Hadiyanto

Maksudnya langkah-langkah tadi itu ya. Langkah-langkah itu iya. Sudah pasti itu menjadi kebiasaan, artinya bahwa kita itu pengambilan keputusan itu kan memang harus ditinjau dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Jadi memang jarang sekali kita itu memutuskan sendiri untuk pengambilan keputusan ketika SKPD kemudian berkonsultasi kemudian terutama menyangkut masalah yang cukup material ya. Kalau cuma salah ketik biasanya kita bisa apa mengambil keputusan tapi kalau kemudian itu menyangkut hal-hal yang material harus kita pertimbangkan dari berbagai sudut pandang, berbagai dimensi.

Emerha

Sejak kapan budaya itu dilaksanakan, apakah saat pemerintahan Bupati Hasto? Apakah sebelum-sebelumnya juga sudah seperti ini?

Nur Hadiyanto

Ehhh... waduh kalau seingat itu saya kurang tahu, hu..hu. Saya baru setahun disini. Jadi yang dulu seperti apa, kami tidak bisa membandingkan. Tapi eee ya memang kalau bicara budayanya orang Yogya, orang Kulonprogo, memang apa ya, mereka itu cenderung patuh kok terhadap aturan. Jarang yang terlalu berdiskresi atau terlalu apa. Inovatif bisa tapi inovatif yang dalam koridor aturan, bukan inovatif yang sifatnya mensiasati aturan. Terus kemudian ya saya kira secara umum budaya kerja birokrasi itu mungkin secara nasional juga berubah ya. Artinya kalau dulu kan kita ini dianggap sebagai *rent seeker* (pemburu rente) untuk keuntungan pribadi, he..he. Nah sekarang itu kan apa, cenderung bahwa kewenangan tugas-tugas yang diberikan, keuangan yang diberikan itu eeee, dianggap sebagai peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan diri sendiri begitu. Tapi sekarang itu dengan saya kira dengan perkembangan hukum dan sebagainya kemudian aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan daerah itu saya kira budaya *rent seeker* itu sudah pemburu rente itu apa ..sudah ter apa, terkikislah. Soalnya bagi kita itu melaksanakan tugas yang betul-betul sebagai apa abdi masyarakat, abdi negara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya itu selalu ditekankan. Terutama pak Hasto ini di setiap apel itu selalu memberikan bahwa kita ini pelayan masyarakat, artinya bahwa sebenarnya dengan kita menjadi pelayan, dengan kita menjadi PNS birokrasi di pemerintah daerah itu justru ada peluang yang lebih bagi kita untuk berbuat baik kepada masyarakat. Nah orang kan sering keliru, dulu ketika jadi PNS, pegawai di pemma semacam ini, ee mungkin terlalu sibuk dengan tugas-tugas dia tidak menempatkan diri untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tapi begitu pensiun malah ingin jadi ketua RT, ingin jadi pengurus yayasan, he..he..he dan sebagainya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Begitu kan. Ya dulu kemana? Iya to..ha..ha, ketika jadi PNS ya begitu tidak memberikan, justru dia ketika jadi PNS kan punya kewenangan melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Tapi hi..hi pas pensiun baru mulai terpikirkan jadi pengurus yayasan, jadi ketua RT, kepala RW, begitu kan. Nah ini yang ditekankan seperti itu. Justru mumpung masih aktif/masih ada waktunya untuk berbuat baik, kesempatan punya kewenangan, ya itu hilang begitu.

Emerha

Pak darimana budaya itu dipelajari? Apakah dari proses belajar, atau dari pengalaman, atau belajar dari keberhasilan dan kegagalan OPD lain?

Nur Hadiyanto

Iya, saya kira dari semuanya. Iya dari berbagai sumber orang belajar itu eeh iya berproses, ternyata memang mungkin ya guru terbaik itu pengalaman walaupun pengalaman itu tidak harus pengalaman diri sendiri, pengalaman tempat lain juga. Saya kira, iya sekarang ini dengan maraknya OTT KPK, Bupati dan sebagainya itu juga suatu efek jera. Saya kira kita tidak ingin kenikmatan sesaat menderita sepanjang masa, hi..hi..hi.

Emerha

Apakah budaya itu pernah sebelum diterapkan pernah ada studi banding ke kabupaten lain yang sudah bagus pengelolaan keuangannya?

Nur Hadiyanto

Eeeh..kalau budaya kerja yang kita lembagakan, kita internalisasi, itu kita, saya kurang tahu kalau oleh pemerintah provinsi itu dia pernah studi banding kemana kita tidak tahu. Tapi kita mengacu kepada apa ya, bukan doktrinasi tapi pembudayaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, salah satunya itu dengan budaya SATRIYA. Iya budaya satriya-nya pemda DIY. Itu budaya birokrasinya ee pemda Kulon Progo kita menginduk ke sana. Jadi ketika ada diklat-diklat apa itu kita selalu diberikan sosialisasi tentang budaya satriya itu. Sengguh ora mingkuh, apalagi pokoknya nilai-nilai pelayanan begitu.

Emerha

Apakah budaya satriya itu diadopsi secara keseluruhan?

Nur Hadiyanto

Iya. Diadopsi semuanya. Setiap diklat pegawai, setiap sosialisasi itu diberikan materi tentang budaya Satriya. Nanti cari saja di internet, Pergub 72 Tahun 2008. Sawiji, greget, sengguh ora mingkuh. S itu selaras, A itu akal budi luhur, T itu teladan, R itu rela melayani, I itu inovatif, Y itu yakin dan percaya diri, dan A itu ahli profesional. Satriya.

Emerha

Pak, kalau di bidang Bapak apa ada slogan penyemangat kerja?

Nur Hadiyanto

Kalau slogan tidak ada. Adanya visi misi SKPD.

Emerha

Apakah pernah terjadi friksi antarbawahan atau antaratasan, misalnya kabid dengan kasubid?

Nur Hadiyanto

Eeehh, pertentangan tidak, kalau beda pendapat terhadap suatu hal sering. Tapi kadang-kadang misalnya saya dengan mbak Sri (kasubid belanja) satu SKPD. "ini kalau seperti ini boleh tidak" saya bilang "boleh". Ternyata mbak Sri bilang "tidak". Wah ini bagaimana ini, ha..ha. jadi memang itu harus didiskusikan.

Emerha

Kalau friksi antarbidang bagaimana, pak?

Nur Hadiyanto

Antarbidang juga iya. Karena tugas-tugas di BKAD itu sifatnya mengalir/saling keterkaitan. Dari rencana penganggaran, perbendaharaan, nanti di apa sana Aklap (akuntansi dan pelaporan). Kadang-kadang kalau ada masalah itu "loh ini masalahnya dimana?" Tahu-tahu dilimpahkan kesini loh, "itu masalahnya bukan masalah disini, bukan masalah keperbendaharaan, tapi masalah perencanaan". Nah kita sampaikan ke sana. Kadang ketika simda trouble begini-begini, loh ini bukan masalah perbendaharaan tapi masalahnya pelaporan. Jadi kita antar ke sana. Nah ini yang sering jadi apa, ya bukan saling lempar, saling cuci tangan. Tapi identifikasi masalah ini yang keliru sehingga apa yang diberi tugas untuk menyelesaikan juga kadang-kadang salah. Misalnya ada pergeseran anggaran, nah ini teman-teman ini belum apa kadang-kadang salah memahami antara aliran kas (cash flow) dengan anggaran kas (cash budget). Itu kan satu hal yang berbeda tapi ketika ada pergeseran kas, ada surat dari SKPD itu dilimpahkan ke sini. Ini yang diminta itu bukan masalah cash flow-nya kita untuk itu walaupun di sana itu mengambil keputusan apakah menyetujui pergeseran anggaran kas itu setuju atau tidak harus ada pertimbangan dari perbendaharaan, kan begitu. Tapi kan itu urusan anggaran itu kan kalau cash budget itu dia rencanakan bulan ini sekian, bulan ini sekian. Itu kan urusannya perencanaan. Cuma ketika dia menggeser itu boleh atau tidak ya kita lihat, wah ini kira-kira nanti pemasukan ketersediaan dananya ke siapa begitu. Kalau itu memang signifikan mempengaruhi cash flow pemda karena ada inflow dan casflow, ada kas masuk, kas keluar, kalau nanti ternyata kas masuknya tidak bisa mencukupi kas keluarnya kan, oh jangan tetap jangan digeser. Jadi masalahnya sesuai dengan identifikasi ketugasan.

Emerha

Kalau antarbidang, apakah ada yang merasa super power? Misalnya wah saya ini bidang yang paling menentukan di sini, apakah ada yang semacam itu?

Nur Hadiyanto

Tidak ada sekarang. Sama semuanya.

Emerha

Kalau untuk pewarisan budaya, misalkan ketika pimpinan yang satu lengser, ganti yang lain. Itu bagaimana pak?

Nur Hadiyanto

Inggih. Ya. Ini yang contoh gampang saja. Memang awal 2018 kemaren ada pergantian pimpinan. Ya kita itu kan apel pagi lah yang gampang. Dulu ketika pimpinan lama, apel pagi itu rajin. Dia lebih menekankan untuk apel dan sebagainya. Kemudian ganti pimpinan, pimpinan baru dia tidak urus apel tapi tetap apel, ha..ha..ha iya. Jadi sudah kebiasaan. Jadi saya kira teman-teman ini sudah lah bahwa loyalitas itu kepada organisasi bukan kepada orang/pimpinan. Wah ini ngomong ada saya atau tidak ada saya ha..ha..ha. Cuma kalau ada

hal-hal tertentu pengambilan keputusan kalau ada masalah ya tetap. Cuma pelayanan SP2D, masalah kas ini tetap harus challenge. Cuma mbak Sri itu bagaimana dia mensutradarai, men-direct itu ha.ha jelas direktor kan. Teman-temannya di seksi belanja mbak Ita mensutradarai teman-temannya di Seksi Pengelolaan Kas. Saya mensutradari mereka tetapi secara alir tugas pekerjaan tetap mengalir.

Q.2. Dimensi, indikator budaya, dan model pelaksanaan budaya kerja di bidang perbendaharaan

Emerha

Tentang apel tadi pak, kalau saya masuk ke dimensi disiplinnya, apakah pimpinan juga sering mengecek daftar hadir?

Nur Hadiyanto

Iya pasti. setiap apel dicek. Setiap hari.

Emerha

Menggunakan finger print?

Nur Hadiyanto

Tidak sih. Cuma masih apa, masih manual. Dulu pernah pakai finger print tapi rusak. Belum diadakan lagi.

Emerha

Kadang juga pimpinan menanyakan kalau misalkan ada yang tidak hadir?

Nur Hadiyanto

Iya pasti.

Emerha

Kalau soal sopan santunya, bagaimana kalau dikaitkan dengan prosedur birokrasi? Apabila terjadi perbedaan pendapat seperti yang Bapak katakan tadi, misalkan staf berbeda pendapat dengan pimpinan, haruskah dia mengikuti jenjang koordinasi seperti dari staf ke kasubid lalu ke kabis atau ada staf yang langsung ke pimpinan?

Nur Hadiyanto

Biasanya berjenjang. Pasti berjenjang. Misalkan kalau ada masalah ya pasti mbak Sri ke saya dulu. Saya kepala bidang tidak mungkin langsung ke kepala. Kecuali kalau saya tidak berada di tempat. Kadang-kadang tapi nanti pasti diberitahu. Tadi dipanggil Bapak terkait ini, keputusannya seperti ini. Seringnya berjenjang. Paling tidak bersama-sama begitu. Nanti staf yang ada masalah sama mas Hartono ini ada masalah eh penerbitan SKPP, ini kok beda antara tanggal SK dengan tanggal yang dipakai yang mana gitu. Teknis-teknisnya begitu.

Emerha

Terus kalau soal distribusi tugas, tentang tupoksi antara staf, antara kasubid itu bagaimana? Misalnya kasubid belanja, kalau misalkan yang lainnya tidak ada, apa ditangani oleh kasubid belanja atau dibiarkan begitu saja?

Nur Hadiyanto

Tidak. Kita team work. Jadi eeeh kebetulan memang orangnya terbatas ya, kita itu kurang. Jadi kalau ketugasan modelnya terus egosentris seperti itu tidak jalan. Tidak bisa. Jadi kalau anu ya harus bersama-sama. Jadi saling mengisi. Misalnya di tempat mbak Ita itu stafnya cuma dua, harusnya kan empat. Kurang. Nah kekurangannya ini kadang-kadang diambil alih tugas mbak Ariani (staf) dari seksi pengelolaan kas.

Emerha

Misalkan bendahara pengeluaran mau mencairkan, petugasnya tidak ada. Tidak diproses tunggu saja dulu atau nanti besok datang. Apo bisa seperti itu?

Nur Hadiyanto

Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau masalah pencairan itu sudah diatur dalam sisdu di perbup. Jadi antara mbak Sri, saya, dan pak Kepala itu tidak boleh semuanya bersama-sama meninggalkan kantor. Jadi kalau pak Kepala pergi, mbak Sri pergi, saya tinggal di kantor. Atau kalau saya, pak Kepala pergi, mbak Sri harus tinggal di kantor. Tidak bisa kosong. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak ada yang berangkat sama-sama. Ada ketentuan soalnya. Di SPM, Standar Pelayanan Minimal kita tentang pencairan itu 2 x 24 jam harus selesai.

Emerha

SPM itu diatur dengan apa?

Nur Hadiyanto

Di sisdu itu kemaren.

Emerha

Kalau soal staf-staf Bapak, apakah ada yang memberi ide atau semacam inovatif? Ketika ada suatu permasalahan tidak harus menunggu Bapak, mereka inisiatif sendiri?

Nur Hadiyanto

Inggih. Inisiatif tetap terbatas. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Inisiatif harus dikomunikasikan secara berjenjang. Misalnya yang tadi itu antara tanggal SK dengan tanggal ini beda, ini yang mau dipakai yang mana. Tidak bisa memutuskan sendiri, ya sudah pakai tanggal ini. Jadi kita komunikasikan pakai tanggal SK, kemudian SKPP-nya ada jeda satu bulan, artinya dia tidak terbayar di bulan yang bersangkutan loh ini. Nah semacam itu, kita harus. Intinya anu apa banyak kepala lebih baik dari satu kepala, ha..ha..ha, yang memikirkan. Masalah-masalah siapa pun boleh mengusulkan boleh, berinisiatif tapi tetap dalam pengambilan keputusan tetap di tangan pimpinan.

Emerha

Kalau ada orang yang melanggar, bagaimana? Apa ada sanksi dan sanksinya seperti apa? Ada sanksi budaya juga?

Nur Hadiyanto

Inggih. Ini yang sedang kita bangun. Jadi terus terang saja, yang tadi misalnya apel tadi terus dia tidak berangkat apel itu kalau di instansi BKAD ini ada insentif dari pendapatan daerah itu. Nah itu nanti berkonsekuensi ke insentif. Misalnya kalau tidak apel, potong insentif buka TPP. Nah itu yang kita kaitkan dengan itu eee, istilahnya reward and punishment-nya. Itu ya. Itu yang sedang kita matangkan.

Emerha

Dalam pelaksanaan tugas staf, apabila diberi deadline tugas kepada mereka sering dicapai?

Nur Hadiyanto

Pasti tercapai. Karena memang ada satu atau dua orang dalam jam kerja itu kadang-kadang suka poma-pamit gitu kan. Anu saya pagi itu pamit, ini dulu, antar anak dulu lah, ada urusan apa dulu lah, itu. Tapi nanti mereka akan anu sendiri, memperhitungkan sendiri kompensasinya ke jam kerja. Nanti pulang kerjanya agak lambat, digeser waktunya. Biasanya pulangannya agak sore. Kalau tugas-tugas tertentu, mereka harus lembur ya tetap dilaksanakan. Dulu pernah mereka pulang malam jam 11 malam, jam 2 malam, demi menyelesaikan tugas. Padahal ibu-ibu semua, ha.ha, pulang jam 2. Suaminya datang menyusul. Kan tidak berani pulang sendiri. Demi menyelesaikan tugas. Artinya kalau memang itu harus selesai besok, memang harus selesai, ya apapun yang terjadi pasti diupayakan untuk diselesaikan.

Emerha

Kalau soal pelatihan pak, apa staf-staf sering diikuti dalam pelatihan?

Nur Hadiyanto

Nah ini yang kurang. Saya itu setahun disini belum pernah ikut pelatihan apa pun, ha.ha.ha. Dulu waktu tugas di dinas sosial sering ikut pelatihan apa, BKSDM apa itu, setahun penuh dengan rapat. Tapi di sini itu kurang sekali pelatihan. Kasihan teman-teman, mereka itu belajar dengan autodidak. Jadi ada aturan baru, ya dia belajar, baca sendiri, bahkan ikut sosialisasi saja paling satu dua orang dan buruknya di sini itu tidak ada ini, paling cuma apel pas apel itu menyampaikan apa misalkan kemaren setelah ikut pelatihan disampaikan di apel, kemaren pelatihan begini-begini, tapi secara detil kemudian ditularkan, disebarluaskan, didesiminasikan itu belum ada forumnya. Jeleknya di sini itu. Ini kan harus diperbaiki. Kemaren ibu Sri ke Bandung, masalah ini PAUD. Nah ini seperti apa ya cuma tidak bisa disebarluaskan ke teman-teman begitu. Materi-materi yang diperoleh padahal itu kan penting untuk perkembangan aturan terutama. Di sini belum ada forum untuk itu menularkan ilmu yang didapat dari pelatihan, sosialisasi atau apa pun. Dulu di inspektorat itu, di sana itu ada yang namanya PKS, Pengembangan Kantor Sendiri. Jadi wajib hukumnya bagi yang sudah selesai pelatihan untuk menjadi narasumber bagi teman-temannya di PKS itu. Di sini yang belum ada itu.

Q.3. Kekuatan dan kelemahan budaya kerja di bidang perbendaharaan**Emerha**

Kalau soal loyalitas kepada pimpinan disini itu seperti apa?

Nur Hadiyanto

Inggih. Secara umum baik begitu. Kalau di skalakan 1 sampai dengan 10, barangkali ya 8,5 he he. Artinya baik kemudian yang 1,5 itu kan ya memang dia harus lebih loyal kepada organisasi.

Emerha

Jadi walaupun pimpinan berganti, tetap loyal?

Nur Hadiyanto

Nah itu kadang-kadang saya salah mengambil keputusan atau apa, diprotes. Di sini sudah gak tertutup, seharusnya begini-begini. Tapi saya kan punya pertimbangan sendiri. Eh begini mbak, nah ini akhirnya jadi diskusi untuk menemukan yang terbaik tapi mereka artinya berani untuk diskusilah. Tidak terus yes man, atau ha ha ha. Saya pun dengan pak kepala kalau ini seperti ini keliru, eh kita sowan. Kita datang ke sana. Pak newun sewu, apakah tidak lebih baik ini seperti ini.

Emerha

Jadi budaya itu belum pernah di SOP-kan, atau dibikin semacam aturan? Maksudnya tetap dipegang teguh seperti itu ya?

Nur Hadiyanto

Ya tadi itu yang pergub itu toh. Kita ikut kalau itu di, kita ikut yang di provinsi.

Emerha

Seperti yang Bapak katakan tadi ada reward and punishment, apakah ada penghargaan juga kepada staf-staf yang berprestasi? Misalkan ini jadi pegawai teladan?

Nur Hadiyanto

Belum. Belum ada. Dulu pernah ada tapi sekarang tidak ada, he he he. Cuma ini sih eh apa kadang-kadang di kita itu susah mencari tolok ukurnya itu loh. Jadi kadang-kadang malah dicibir "huh masak kamu jadi pegawai teladan, biasa-biasa sajalah". Ha ha ha. Itu tolok ukurnya apa. Tapi tugas-tugas beres dan selesai, he he. Masalah bisa diselesaikan dengan baik, ya akhirnya kelihatannya di anu tidak ada itu. Kalau dulu pernah ada pegawai teladan. Kadang-kadang lingkungan itu tidak memahami pertimbangan pimpinan menetapkan dia sebagai pegawai teladan itu ada unsur untuk memotivasi juga ha ha ha. Tidak juga baik banget, tapi lebih baik dimotivasi biar jadi pegawai teladan begitu. Tapi lingkungan kan tidak memahami itu, itu kadang-kadang sehingga mencibir malah, ha ha ha.

Emerha

Apakah budaya itu sering resisten kalau ada aturan-aturan baru dari pusat? Misalkan aturan yang mengatakan budaya ini sering dilakukan tapi tiba-tiba ada aturan dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatakan ini tidak boleh, itu ada resisten atau bagaimana?

Nur Hadiyanto

Eeeh sebenarnya bukan resisten permasalahannya. Tapi masalah ini sosialisasi. Kadang-kadang kalau ada aturan baru kemudian ternyata kita itu sudah biasanya, ha ha ha. Manajemen biasanya ada T orang jowo itu ha ha. Manajemen ada T itu ya masalah sosialisasi saja sebenarnya. Kalau memang ada aturan baru dan tersosialisasi dengan baik, saya kira akan patuh. Tapi karena biasanya sudah seperti ini, terus ada aturan baru kita tidak tahu, ya sudah celaka itu, he he he. Iya, celaka, betul. Konsekuensinya besar itu kemaren. Pengalaman kita 2017 itu gara-gara manajemen ada T biasanya seperti ini ternyata ada aturan baru itu kita jadi serapan DAK fisik paling rendah se-DIY, kita rugi 11 milyar. Itu kan itu, jadi biasanya DAK fisik itu per triwulan itu kita bisa mengajukan kontrak pencairan-kontrak pencairan, seperti itu ya, nah kemarin itu ada aturan baru, PMK 50, pengisian data kontrak paling lambat pada triwulan kedua, itu untuk sepanjang tahun. Artinya triwulan 3, triwulan 4 itu kita sudah tidak bisa lagi mengisi data kontrak. Lah karena biasanya itu boleh kita mengisi ternyata aplikasinya dikunci, baru ribut sih, lah tidak bisa diisi, ha ha...hangus. Jadi biasanya-biasanya itu kadang-kadang kalau, bukan resisten ya tapi memang sosialisasinya yang kurang puas. Ya memang kita jadi belajar dari situ tapi nilai atau harganya terlalu tinggi, kita belajar lagi, he he he.

Emerha

Pak kalau soal kebiasaan, misalkan ada salah satu staf lagi ada hajatan atau ada yang meninggal,itu bagaimana perlakuannya?

Nur Hadiyanto

Eehhh, kita memang ada aturan kebersamaan yang lebih internal, itu diatur, walaupun apa, semacam konvensi ya, aturan tidak tertulis, ini sekretariat yang atur, paling paham. Artinya jangankan yang mempunyai hajat, kalau yang punya hajat ya kita ikut budayanya lah, misalnya pernikahan atau khitanan anaknya itu kadang-kadang yang diundang ya kita datang ke sana. Kemudian yang sakit, tapi syaratnya sakitnya lebih dari dua hari dan diopname di rumah sakit. Ya itu ada konvensi-konvensi semacam itu untuk kebersamaan tadi. (30:41 – 33:40)

Emerha

Apakah ada orang yang ditokohkan dalam hal tugas sehari-hari selain pimpinan dan di luar struktur organisasi tetapi berpengaruh terhadap budaya kerja organisasi?

Nur Hadiyanto

Yah. Eeeh, di sini itu eee, tapi juga anu, kadang apa tadi itu pengaruh kepada budaya kerja/pekerjaan dan ini yang belum di anu. Jadi misalnya di sini ada yang kebetulan apa juga kiyai kadang-kadang pas kalau ada acara apa-apa, doa ya, itulah yang diminta untuk berdoa. Kemudian ada yang tokoh pemuda, mahir jadi MC, jadi apa, penata acara. Kalau kita pas ada acara apa ya dia ya begitu. Tapi yang tokoh ketokohan semacam itu diakui memang di kedinasan kantor, tapi pengaruhnya terhadap pekerjaan atau budaya kerja ya belum ha ha ha, belum bisa mengidentifikasi. Kalau itu dianggap yang ditukan kemudian yang selalu kita jadi rujukan konsultasi begitu ya. Itu secara berjenjang, tetap pada struktur.

Emerha

Jika ada pertentangan pendapat seperti yang Bapak katakan tadi lalu tidak reda beda pendapatnya, apakah bisa terbentuk kelompok-kelompok yang anti dan propimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari?

Nur Hadiyanto

Tidak ada. Tidak ada. Yang pasti, saya kira komunikasinya cukup baik. Jadi kalau ada pertentangan mbak Sri, mbak Eka kalau saya anggap bisa selesaikan di tingkat bidang begitu. Tidak sampai ke atas. Lebih sering tidak sampai ke atas. Tapi kalau memang ada hal-hal yang penting seperti plakantas sehingga kalau saya tidak bisa mengambil sikap/keputusan, baru ke atas.

Emerha

Tadi banyak staf-staf yang lebih loyal kepada organisasi seperti yang bapak katakan, apakah ada yang kesetiaannya kepada kelompok atau pimpinan itu melebihi kesetiaannya kepada organisasi?

Nur Hadiyanto

Maksudnya kesetiaan kepada pimpinan dan organisasi mana yang lebih kuat? Tetap organisasi. Mereka itu berani melawan kok, ha ha ha...iya. Jadi kalau pimpinan bersalah mereka tetap berani. Tetap berani. Tidak ada yang berbakti pada pimpinan. Itu tidak ada. Yang dulu memang ada. Kalau sama pimpinan pokoknya takut. Sekarang sudah, tahun ini sudah gak ada.

Emerha

Ada juga kah staf atau pimpinan yang berani berkorban untuk organisasi dibanding untuk kepentingan diri sendiri? Misalkan ketika mengambil keputusan ini mau kena temuan tidak ya. Ancang-ancang ini pasti kena temuan, ada tidak yang berani ambil risiko seperti itu untuk kepentingan organisasi?

Nur Hadiyanto

Maksudnya bentuknya apa pengorbanannya itu? Eeeh biasanya jarang ya situasi seperti itu terjadi, artinya bahwa kita mengambil keputusan yang berisiko yang demi organisasi itu jarang situasi seperti itu terjadi. Biasanya apa ya yang menguntungkan organisasi itu pasti sesuai dengan aturan itu kalau kita mengambil keputusan yang tidak sesuai aturan itu pasti itu tidak sejalan dengan kepentingan organisasi.

Emerha

Misalkan ada situasi seperti ini, salah satu staf ada yang mengatakan ini pasti jadi temuan, yang lain mengatakan ini tidak akan jadi temuan, oh iya saya berani ambil risiko yang penting dananya cair untuk masyarakat? Itu tetap juga tidak ada ya?

Nur Hadiyanto

Eehh seperti itu biasanya di anu, eee ya bukannya kita ini cari aman gitu loh, tapi yang seperti itu selalu diberikan landasan. Jadi harus secara kronologi itu lengkap, jadi ketika eksekusi terhadap satu hal tidak sesuai dengan aturannya harus ada kronologinya kemudian

keputusan itu tidak diambil sebagai keputusan pejabat/pribadi tetapi itu diambil sebagai keputusan organisasi. Iya, misalnya apa ya contohnya mungkin yang agak menyimpang begitu nah dulu ketika ini umpama ketika ada ini KLB Antrax, pernah dengar kan ada KLB Antrax? Nah itu kan sebenarnya, eee boleh tidak ini mengambil belanja tidak terduga untuk KLB Antrax. Nah ini diceritakan jadi untuk seperti itu harus diseting apa surat menyuratnya, dokumen yang agak seso ono opopo itu, ceritanya jelas, bisa dilacak. Kita minta misalnya Dinas Pertanian melalui surat, kemudian ada SK Bupati yang menyatakan bahwa ini KLB. Kemudian proses-proses seperti itu, harus ada nota dinas kita, harus ada persetujuan. Artinya itu harus terdokumentasi agar semuanya aman begitu. Bukan proses langsung setuju, tanda tangan pencairan tanpa dasar tahap-tahap itu. Jadi bagaimana itu, apa istilahnya itu, itu didorong sebagai suatu, itu tadi keputusan organisasi, bukan keputusan pejabat. Jadi ada kronologinya, oh dulu pernah ada surat dari Dinas Pertanian seperti ini, oh sudah ada kajian menyatakan ini KLB, kasusnya memang benar ini. Jadi tahapan-tahapan itu dibuat, walaupun itu belum ada aturan SOP-nya. Tapi biar suatu saat diperiksa itu ada ceritanya itu, jelas tidak orang terus lempar, uuh tidak tahu itu urusan pertanian, bukan seperti itu tapi sama-sama dibuat agar menjadi suatu kronologi yang jelas yang ada bukti-bukti dokumennya. Jadi intinya itu.

Emerha

Pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada pimpinan baru, terkait dengan budaya, budaya yang lama kan sudah dijalankan, begitu ada pimpinan baru terus dianulir dan bikin budaya baru. Itu pernah terjadi seperti itu? Ada resisten tidak?

Nur Hadiyanto

Iya. Ehhh tidak sih, justru ee pimpinan yang baru itu mengakomodir aspirasi dari staf-stafnya. Jadi kalau yang dulu kan mungkin kebijakan itu ada yang diputuskan oleh pimpinan, misalnya seperti apa pegawai yang pensiun itu biar diberikan sekedar tanda terimakasih/kenang-kenangan dari teman. Kalau dulu kan tidak mau, pimpinan yang dulu tidak mau seperti itu. Itu diterima. Kemudian yang tadi yang apel kemudian dipotong insentif itu, itu sebenarnya anak buah ini tidak mau, tapi pimpinan memutuskan kalau kamu tidak apel dipotong sehari Rp50.000, dari insentif itu. Akhirnya ada yang tidak apel 4 kali ya Rp200.000, he he. Tidak apel 3 kali Rp150.000 dipotong walaupun potongannya itu untuk kas kebersamaan tapi sebenarnya anak buah ini tidak suka itu. Kemaren minta supaya kebijakan itu ditinjau.

Emerha

Selain insentif, TPP, lembur ada juga? Banyak ya?

Nur Hadiyanto

Lembur ada juga, ya lumayan. Tapi memang tingkat Kulon Progo itu masih paling rendah, walau itu dikumpul-kumpul itu masih kalah dengan Bantul, Sleman, Gunung Kidul, itu kita paling kecil.

Emerha

Jadi kalau sudah ada TPP, honor-honor panitia itu tidak ada lagi?

Nur Hadiyanto

Kalau kita masih itu, itu kalau sudah ada TKD (tunjangan kinerja daerah). TKD di Kulon Progo masih dikaji. Sebenarnya pak Bupati minta diterapkan tahun 2018 ini, tapi perangkat kita belum siap. Jadi apa sih yang menilai kinerja individu terutama ini yang susah. Jadi kan ada tiga indikator yang dinilai terkait tunjangan kinerja daerah, ada kinerja individu, kemudian kinerja organisasi, yang ketiga kedisiplinan. Nah ini alat ukurnya yang susah. Bappeda itu sedang mengembangkan aplikasi pake android seperti notebook, jadi setiap hari itu aktivitasnya apa saja itu. Baru diuji coba kemaren. Katanya nanti rencananya, eee kalau tidak di perubahan anggaran 2018 ya di 2019. Iya mungkin sejalan dengan PP Gaji yang baru, ha ha ha, seperti itu. nanti kalau sudah itu harus terkait to perangkatnya harus siap, pendanaannya harus siap. Kalau yang pendanaannya bisa kita paksa-paksakan sedikit. Kemarin kita hitung-hitung kalau kebutuhan model TPP (tambahan perbaikan penghasilan) itu kita alokasikan seadanya uang di Kulon Progo ini terutama satu tahun untuk pegawai itu 27 milyar. Nanti kalau kita ubah dengan model TKD itu, kebutuhan kita itu hampir 68 milyar. Iya TPP dimasukkan menjadi TKD ditambah honor-honor itu masuk situ masih belum cukup, ha ha ha. Baru 40-an berapa, kurang 20-an cari darimana, ha ha ha. Minta rapat-rapat tidak usah pakai makan, snak saja, kemudian perjalanan dinas SKPD-SKPD minta dirasionalisasi supaya bisa menerapkan TKD, he he he, itu. Itu dari pendanaan bisa kita paksakan, tapi perangkat penilaian ini yang belum.

b. Wawancara ke-2 dengan Nur Hadiyanto pada 24 Mei 2018, pukul 09.41 pagi di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Wawancara ini merupakan pendalaman topik RM1 yaitu gambaran umum struktur APBD.

Q.1. Struktur anggaran pendapatan

Emerha

Setelah saya bandingkan antara anggaran 2017 dan 2018, struktur pendapatan secara total hanya tumbuh positif 6,2%, sedangkan khusus PAD tidak ada pertumbuhan malah negatif 14,73%. Bagaimana pendapat Bapak melihat kondisi ini?

Nur Hadiyanto

Kesan di BKAD ini sesuatu yang mengalir nggih, artinya dari satu bidang kepada bidnag yang itu saling keterkaitan. Jadi, kalau dari sisi pendapatan terkait target, terkait setoran penerimaan itu ada di Bidang Pendapatan dan Bidang Pajak. Kami hanya mengawasi dari sisi aliran kas masuk. Ya, jadi, kami cek di Kasda, ya, aliran kas masuk ini untuk tentu, apa, pada prinsipnya pendapatan itu adalah mempercepat aliran kas masuk ya. Jadi, kalau ada target yang belum, rapat koordinasi ada target yang belum itu kami minta untuk Bidang Pendapatan, Bidang Pajak itu untuk segera, nggih.

Emerha

Maksudnya secara teknis ke sana ya?

Nur Hadiyanto

Iya, teknisnya di sana. Pokoknya kami terima uangnya saja, terima (tertawa).

Emerha

Kalau tentang Dana Perimbangan?

Nur Hadiyanto

Iya, nggih, Dana Perimbangan ini juga yang berhubungan langsung dengan DJPK ya kadang-kadang, apa, tergantung ininya, jenis-jenisnya. Jadi, kalau DAU memang langsung kita, tapi kalau DAK kemudian DPHCHT dan sebagainya itu, Bidang Pendapatan juga sempat terlibat di sana. Di sana kan ada Sub Bidang Evaluasi Pendapatan. Kami hanya, apa, rekonsiliasi terkait dengan tadi aliran kas masuk. Artinya apakah sudah masuk ini misalnya DAU bulan ini masuk atau belum, itu kita koordinasikan. Tapi, kalau kemudian terkait kalau belum masuk yang ngurus itu ya Bidang Pendapatan, nggih.

Emerha

Itu menurut Bapak, ini kan saya lihat itu di Dana Perimbangan naik ya Pak 2,69%, yang dari di DAK-nya itu naik besar 11,38 itu DAU-nya kan tetap ya. Itu menurut Bapak kira-kira kenapa itu bisa naik Pak?

Nur Hadiyanto

Dana Perimbangan. DAK itu turun to Mas di sini.

Emerha

11, pertumbuhan 11,38, naik 26,6 miliar ya?

Nur Hadiyanto

Oh, ini gabungan berarti ya?

Emerha

Iya ini yang masih anggaran, Pak.

Nur Hadiyanto

Iya ini DAK ini kan ada yang DAK Fisik dan DAK Nonfisik

Emerha

Oh, jadi gabungan ya?

Nur Hadiyanto

Iya, kalau DAK Fisik kita memang kemarin turun. Artinya dari target itu hampir 11,6 miliar tidak tercapai. Nah, kenaikannya ini di sisi DAK Nonfisik ya, DAK Nonfisik, BOS, kemudian BOP PAUD, kemudian BOK. Nek itu sebenarnya hanya ini sih, apa, kebijakan pusat saja.

Emerha

He'e, berarti itu bisa dilobi ya?

Nur Hadiyanto

Ya, lobi sih nggak terlalu, kita nggak terlalu ini, apa—

Emerha

Jadi, nggak ada?

Nur Hadiyanto

Kemudian lobi-lobi apa itu nggak pernah.

Emerha

Nggak ada pengaruh dari sini misalnya?

Nur Hadiyanto

Nggak ada, nggak ada, nggak pernah melakukan lobi. Mungkin eranya sudah berubah kalau dulu bisa lobi-lobi kalau sekarang ya--, hitungannya kan sudah fix, ada rumus-rumusny.

Emerha

Sama dengan DAU ya?

Nur Hadiyanto

Parameter gitu sama kan.

Emerha

Kalau Dana Bagi Hasil itu memang gimana Pak untuk pembagiannya sampai bisa turun minus 2% itu. Berarti--

Nur Hadiyanto

Dana Bagi Hasil ini barangkali kan juga terkait dengan apa, penerimaan pusat kan. Artinya kalau penerimaan pusat itu yang dibagi turun artinya target-target pendapatan nasional tidak tercapai kita juga yang dibagikan juga turun. Mikirnya alokasi untuk kita juga turun.

Emerha

Tidak ada pengaruh penekanan pajak di sini, pajak pusat di Kulon Progo?

Nur Hadiyanto

Ya, pasti ada, pasti ya, jadi, hampir semua—

Emerha

Iya, jadi dengan, dengan banyaknya kegiatan otomatisasi banyak pajak juga yang dipotong? Berarti kurang kegiatan--

Nur Hadiyanto

Itu pajak dari sektor pemerintah nggih?

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Kalau pajak itu kan kemudian ada yang dari sektor privat, sektor bisnis juga. Barangkali ya itu artinya mungkin ya asumsi pertamanya sektor bisnis, apa, sektor privatnya belum terlalu berkembang di sini. Sehingga kemungkinan target pendapatan nasional dari sektor pajak belum tercapai.

Emerha

Iya. Kalau untuk lain-lain itu Pak, yang sah itu? Itu naiknya besar banget itu 43 ya, itu dilobi juga ya Pak?

Nur Hadiyanto

Bukan, lain-lain PAD yang sah itu kemarin karena ada SE Mendagri yang mengharuskan Dana BOS Pusat itu masuk ke daerah di rekening. Jadi, itu hanya semacam buble ekonomi, hanya gelembung saja, hanya apa, karena surat edaran dari Menteri Dalam Negeri penerimaan BOS itu diterimakan dicatat di rekening lain-lain PAD yang sah akhirnya itu menjadi--

Emerha

Oh, cuma lewat ya?

Nur Hadiyanto

Terlihat besar, jadi terlihat besar, nggih. Nek datanya sih nggak terlalu ini sih.

Emerha

Kalau dana-dana desa itu juga gitu ya, lewat rekening kabupaten ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Dana desa itu lewat rekening kita. Tapi, hanya lewat saja karena kan ada ketentuan 7 hari harus segera ditransfer ke--

Emerha

Ke desa?

Nur Hadiyanto

Iya, ke desa. Lain-lain PAD yang sah, iya, Dana BOS-nya saja 22 miliar.

Emerha

Hmm.

Nur Hadiyanto

Makanya naiknya ini, kalau dari sisi ini juga jadi eee di lain-lain PAD yang sah itu pendapatan DUK.

Emerha

Hmm.

Nur Hadiyanto

Itu kan bicara ke sana, tapi kan kemudian itu kembali untuk operasional DUK itu 117 miliar itu ya. Jadi, kelihatannya naik tapi ya, tapi itu satu BOS 22M, saya juga kurang tahu BOS kok jadi PAD. Ya, kan aneh to Mendagri ini.

Emerha

Itu sejak kapan ya Pak 2000 berapa ya?

Nur Hadiyanto

2017 saja.

Emerha

2017

Nur Hadiyanto

Nanti yang 2018 aturannya sudah berubah.

Emerha

Hmm

Nur Hadiyanto

Sudah berubah lagi, bingung Kemendagri itu mungkin.

Emerha

(tertawa)

Nur Hadiyanto

Njenengan cari saja surat edaran tentang BOS itu.

Emerha

Oh.

Nur Hadiyanto

Di anu Google search saja.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Surat Edaran BOS 2017 gitu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nanti ada ketentuan-ketentuan ini harus bagaimana mencatatnya di rekening apa, ya, jadi ya akhirnya kelihatan bengkok.

Emerha

Ya, ini walau, walaupun cuma lewat rekeningnya itu tetap yang bertanggung jawab Pemda juga ya?

Nur Hadiyanto

Maksudnya pertanggung jawaban bagaimana?

Emerha

Bertanggung jawab maksudnya yang bikin pertanggungjawaban itu?

Nur Hadiyanto

Ya, iya, jadi mau lewat manapun BOS tetap dipertanggungjawabkan ke pusat, kita membuat laporan.

Emerha

Tadi Bapak bilang cuma 1 minggu kan? Kan cuma lewat transfer.

Nur Hadiyanto

Oh, yang Dana Desa?

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Iya, pertanggungjawabannya ya laporan realisasi itu. Jadi, pertanggungjawabannya berupa laporan. Jadi, sudah kita, apa, pindahbukukan atau kita transfer ke desa itu sebagai laporan. Pokoknya jangan sampai mengendap lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari itu kita kena sanksi, kabupatennya yang kena sanksi.

Emerha

Oke, Pak. Kalau belanja Pak, belanja tidak langsung ya, itu anggarannya masih besar juga ya Pak?

Nur Hadiyanto

Gaji pegawai?

Emerha

Belanja pegawai ya?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Itu sudah termasuk apa namanya, tunjangan tambahan hasil, tambahan penghasilan ya Pak?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Sejak di (09:10)

Nur Hadiyanto

Eee, kalau yang untuk TPP Tunjangan Perbaikan Penghasilan itu di belanja langsung.

Emerha

Belanja langsung, ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Jadi, ini kan ada belanja pegawai yang belanja tidak langsung itu gaji.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

600 sekian ini. Nah, yang TPP-nya itu di sini.

Emerha

Itu naik itu ya 3,95 ya.

Nur Hadiyanto

Ada 27. Iya, itu karena kemarin ada yang tambahan untuk, apa, persandian kemudian yang tunjangan risiko yang di Dinas Kesehatan itu.

Emerha

Itu tunjangan kinerja sudah ada juga ya?

Nur Hadiyanto

Iya, tunjangannya di sini juga.

Emerha

TPP ada yang tunjangan kinerja kan beda ya?

Nur Hadiyanto

Kita belum ini, kita belum menerapkan tunjangan kinerja.

Emerha

Itu cuma baru TPP?

Nur Hadiyanto

Baru TPP, nggih.

Emerha

Nah, itu belanja langsungnya naik ya Pak totalnya 8% ya tumbuhnya?

Nur Hadiyanto

Iya, belanja langsung.

Emerha

Sama anggaran belanja modal.

Nur Hadiyanto

Nggih. Kok bandingkannya dengan ini, dengan anggaran 2018?

Emerha

Iya. Kita masih bicara anggaran dulu, Pak.

Nur Hadiyanto

Oh.

Emerha

Belum realisasi.

Nur Hadiyanto

Belum realisasi, ya.

Emerha

Kan belum keluar itu Pak LKPD-nya.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Nah, jadi antara saya mau lihat pertumbuhannya Pak, kemarin anggaran yang dianggarkan.

Nur Hadiyanto

Hmm

Emerha

Tiap tahun 2017/2018.

Nur Hadiyanto

Nggih, monggo, kok cepet sanget? (tertawa)

Emerha

Itu kalau soal pembiayaan gimana Pak?

Nur Hadiyanto

Pembiayaan, ya, cuma dari Silpa, kemudian pinjaman daerah itu yang masih kita punya terkait dulu kita pernah pinjam ke BPD.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Untuk membangun rumah sakit. Kemudian penyertaan modal ini ke BUMD, ada beberapa BUMD yang tahun ini menerima penyertaan modal BPD tanpa syarat.

Emerha

Pasar ya?

Nur Hadiyanto

Iya gitu, Bank Pasar.

Emerha

Bank Pasar, ya?

Nur Hadiyanto

Iya. BPR, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar.

Emerha

Berarti milik Pemda ya?

Nur Hadiyanto

Milik Pemda.

Emerha

Iya. Oke, Pak, ini, lalu untuk apa, prioritas kalau kita perkom ke anggaran itu dianggarkan menurut fungsinya Pak

Nur Hadiyanto

Hmm.

Emerha

Kalau pendidikan itu memang kan di undang-undang ini kan mencapai 20%.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Ini saya lihat sudah lebih dari 31.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

31, nah terus yang kedua itu tunjangan, apa, porsi Bidang Kesehatan itu 24%.

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Nah, itu bagaimana Pak, kalau di, diserasikan dengan kebijakan Pemda apakah sudah sesuai dengan anggaran itu?

Nur Hadiyanto

Nggih. Saya kira memang itu bisa dirunut nggih jadi dari Rensra-nya.

Emerha

Iya, Rensra.

Nur Hadiyanto

RPJMD ya.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah, dari visi-misi Pak Bupati, dari visi, misi, kemudian kebijakan, kemudian program dan kegiatan itu kan semuanya sudah linierlah, sudah satu arah.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Jadi, memang visi-misinya kan menjadikan, apa ya, rakyat Kulon Progo sejahtera, sehat nggih. Sebenarnya yang utama itu beliau itu karena dokter, bupatinya dokter sehingga misi yang ini adalah kesehatan.

Emerha

Kesehatan.

Nur Hadiyanto

Kulon Progo sehat baru kemudian iman dan takwa gitu kan dan apa, pendidikan juga. Saya kira itu sudah linier dan itu bisa terlihat di indikator-indikator makro kinerja bupati baik usia harapan hidup di Kulon Progo kan lumayan cukup tinggi nggih.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Lebih tinggi dibanding nasional, lebih tinggi dibanding DIY. Kemudian juga indikator-indikator, usia harapan hidup, IPM ya, Indikator IMP-nya kan juga, juga lumayan baik KULon Progo ini.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Itu memang, memang arahnya ke sana, diarahkan ke sana untuk kesehatan masyarakat.

Emerha

Tapi, kalau dari sisi bidang perekonomian cuma 6 ya Pak pertumbuhannya?

Nur Hadiyanto

Iya, jadi, memang ya kita betul-betul, apa, baru istilahnya basic need, ya, kebutuhan dasar yang digenjot habis-habisan memang. Jadi, untuk sektor-sektor ekonomi dan seperti belum bisa bicara banyak. Karena memang keterbatasan dana nggih, keterbatasan anggaran.

Emerha

Oke. Ya, saya coba menganalisis.

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Struktur pendapatannya.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Kalau kita lihat derajat desentralisasi itu, itu total keseluruhan kan 13,53% untuk retribusi pendapatan, pendapatan daerah ini.

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Berarti secara umum bisa disimpulkan bahwa tingkat kemampuan Pemda, apa, tingkat, tingkat kemampuan Pemda menyelenggarakan desentralisasi itu--

Nur Hadiyanto

Kecil.

Emerha

Masih ya, masih kecil ya?

Nur Hadiyanto

Masih kecil, iya.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Masih kecil.

Emerha

Menurut Bapak gimana?

Nur Hadiyanto

Iya, memang betul (tertawa)

Emerha

(tertawa)

Nur Hadiyanto

Jadi, ya, kita biasa kita uraikan di LKPD itu bukan derajat desentralisasi tapi semacam, anu, angka ketergantungan.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Jadi, semacam, nggih, jadi, ketergantungannya masih sangat tinggi terhadap pemerintah. Artinya kan derajat desentralisasinya rendah gitu, rendah memang kita akui. Karena secara kasat mata saja APBD 1,4 triliun ya.

Emerha

Iya, 1,4.

Nur Hadiyanto

PAD-nya hanya 249 miliar kemudian apa, eee, itu PAD yang terbesar pun ya tadi itu gara-gara BLUD yang untuk operasional saja 117. Kemudian karena salah masuk BOS 22, kalau itu keluar tinggal berapa coba (tertawa), PAD kita itu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nggih. Sangat tergantung kita. Ini malah makin kecil ya di 2018 ya.

Emerha

Iya. Makin kecil ya.

Nur Hadiyanto

(tertawa)

Emerha

Dari pajak daerahnya cuma 3,7%.

Nur Hadiyanto

Iya, 89,4, nggih

Emerha

Nah, kalau dari soal ketergantungan keuangan daerah ini kepada pemerintah pusat, ini 65% ya 2018 berarti sangat tergantung ya?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Di atas 50 (tertawa)

Nur Hadiyanto

(tertawa) Iya, iya, iya. Ya, memang kita, ya memang kondisinya Kulon Progo seperti itu. Kalau, gimana nggih, banyak hal yang, apa nggih, secara geografis, secara budaya, kemudian apa ya, ini Kulon Progo ini memang akhirnya jadi kurang sentra. Jadi, secara geografis kita itu kan terbagi 3 wilayah, utara pegunungan, tengah dataran, selatan pantai. Nah, kemudian kalau ini yang bupati yang terdahulu itu yang bagus itu kan bukan yang Pak Hasto nggih, yang Pak Toyo itu kan dulu visi-misinya itu secara, apa, sederhana itu menjadi 3: Tirto, Margo, Saras. Tirto itu air.

Emerha

Air.

Nur Hadiyanto

Margo itu jalan.

Emerha

Jalan.

Nur Hadiyanto

Sedangkan Saras itu kesehatan. Nah, memang dari dulu faktornya itu. Jadi, kalau kita bandingkan dengan Sleman, dengan Bantul. Sleman itu banyak sumber mata air nggih, Selokan Mataram, kemudian sumber air yang lain itu, ibaratnya mereka mau perikanan, mau pertanian airnya ada.

Emerha

Ada semua.

Nur Hadiyanto

He'e, tapi kalau Kulon Progo ini daerah di ujung di hilir. Jadi, air itu sudah habis dari Sleman yang Selokan Mataram sampai sini, Kali, masuk Kali Bawang habis (tertawa). Sehingga memang itu, dulu makanya pembangunannya "Tirto", Tirto itu membuat drainase.

Emerha

Bukannya ada itu saya lihat itu.

Nur Hadiyanto

Embung-embung dan sebagainya.

Emerha

Perusahaan apa itu, air minum itu yang dibikin Pak Bupati?

Nur Hadiyanto

Oh, nek itu cuma ini sih cuma itu faktor yang lain, itu hanya salah satu saja. Dan MDGs kan nggak, nggak, nggak tercapai kita.

Emerha

Oh.

Nur Hadiyanto

80% perkotaan harus dialiri dengan sistem perpetaan kan nggak tercapai karena memang sumbernya kecil, susah. Sermo itu nek kemarau itu walah turun berapa meter sampai 15 meter turunnya, ketinggian air, kering. Kemudian Tlereng, mata air Tlereng juga debetnya nggak terlalu besar. Itu juga nggak tahu sampai kapan itu ada mata air (tertawa), begitu. Jadi, itu faktor apa ya, sudah bawaan daerahnya susah air daerahnya gitu. Sehingga kemudian "Margo" jalan. Nah, jalan ini ya ini yang terjangkau dengan anu nopo, mobilitas anu kan ya hanya perkotaan saja sepertinya. Makanya yang diteruskan Pak Bupati sekarang yang sudah Menoreh, jalur bedah Menoreh yang nantinya dari bandara ke Borobudur itu.

Emerha

Itu bandara, ya?

Nur Hadiyanto

Karena dengan adanya jalan pasti apa ya, mobilisasi sumber saya ekonomi dan sebagainya kan lebih, lebih pesat.

Emerha

Kalau, kalau bandara itu di mana Pak ininya, jalannya?

Nur Hadiyanto

Sana!

Emerha

Dari mana?

Nur Hadiyanto

Dari, sana, bandara itu Temon di barat.

Emerha

Oh, berarti masuknya lewat sini?

Nur Hadiyanto

Barat itu sana, he'e, nek Njenengan dari Jogja masuk ke sana.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Ke barat nah nanti sudah Menoreh itu ke Borobudur itu di utara sana.

Emerha

Oh, belok ke kanan lagi?

Nur Hadiyanto

He'e, ke kanan, iya, itu bedah Menoreh.

Emerha

Jadi, ke arah Borobudur ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Nah, "Saras" kesehatan ya itu dulu mungkin ya faktor-faktor itu tadi, lingkungan alam dan sebagainya itu tingkat kesehatan masyarakatnya masih kurang baik. Tapi, nggih, itu terus kita upayakan. Soalnya kesehatan besar to kita.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Di bidang kesehatan besar. Nah, itu intinya itu bahwa secara geografis mungkin kita memang diwarisi oleh situasi yang (tertawa), tidak memungkinkan sektor perekonomian berkembang pesat. Lah, tadi itu kita itu eee PDRB-nya kan dominan sektor pertanian.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Tapi, susah air, gimana mau berkembang? (tertawa)

Emerha

(tertawa)

Nur Hadiyanto

Iya, to? (tertawa) Beda Sleman loh Mas, nek Sleman Njenengan ke daerah itu utara, Cangkringan itu, oh, mata air itu hampir tiap--

Emerha

Kalau dibanding dengan 4 kabupaten itu, Kulon Progo gimana posisinya?

Nur Hadiyanto

Ya, paling bawah.

Emerha

Paling bawah ya?

Nur Hadiyanto

Iya, dari segala hal.

Emerha

Semua? Termasuk dari keuangan juga?

Nur Hadiyanto

Iya, ah, itu APBD-nya kalah kok sama Gunung Kidul.

Emerha

Hmm.

Nur Hadiyanto

Kita 1,4, Gunung Kidul 1,6.

Emerha

1,6.

Nur Hadiyanto

Ya, to? Kita sekarang berapa? 1 koma berapa 1,6 juga nggih, sekitar itu nggih.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Totalnya.

Emerha

Jadi, mereka naik juga?

Nur Hadiyanto

1 koma, mereka naik juga. Mereka malah 1,8, naiknya cepat sana.

Emerha

Kalau Sleman?

Nur Hadiyanto

Sleman jangan ditanya dia sudah (tertawa)

Emerha

Sudah sampai dua, dua--

Nur Hadiyanto

Sudah lebih.

Emerha

Sudah lebih ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Tahun wingi Sleman, kita memang, ya secara geografis itu kemudian secara budaya magnet ekonomi kita itu rodo susah. Jadi, kalau orang Kulon Progo yang di sisi timur itu kena magnet ekonominya kan ketarik di Jogja.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Dia mau belanja-belanja baju yang gampang sajarah baju, sepatu, apa, pasti lari ke Jogja kan.

Emerha

Sekarang --

Nur Hadiyanto

Karena di sana lebih tersedia, anu, apa, pilihannya lebih lengkap dan sebagainya, yang sebelah utara kalau mau belanja sayuran dan sebagainya lari ke Muntilan, Pasar Muntilan itu, apa, produksi sayur-sayur dan sebagainya kan ngambil--

Emerha

Masuk wilayah Sleman?

Nur Hadiyanto

Masuk wilayah Jawa Tengah, iya. Kemudian yang barat itu larinya ke Purworejo karena emas misalnya Njenengan beli emas.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Emas Kulon Progo dengan emas Purworejo itu bagus--

Emerha

Purworejo.

Nur Hadiyanto

Emas Purworejo dia lebih tua, karatnya lebih bagus. Sama-sama katakanlah 20 karat itu kalau di kita emasnya masih bening. Tapi, kalau sana sudah, apa, agak kuninglah, di sini nggak, semacam itu. Jadi, utara ketarik, timur ketarik, kan akhirnya di Kulon Progo sendiri pokoknya Pak Bupati yang sekarang kan ini, apa, yang di, apa, yang dijadikan pekan kan bela beli Kulon Progo.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Ya, kan? Nah, itu. Jadi, harapannya--

Emerha

Batik tuh, batik.

Nur Hadiyanto

Hmm, salah satunya batik, air, beras, nek bisa itu uang itu beredar di Kulon Progo tidak lari keluar. Tapi secara geografis memang (tertawa), sudah diwarisi kondisi demikian sehingga ya agak sulit memang. Kecuali ada mega proyek ini berhasil, nanti akan mengubah, apanya, bandara.

Emerha

Iya. Kan bandara itu mungkin magnetnya mungkin ke sini lagi ya?

Nur Hadiyanto

Iya, nanti ke sini, yang diharapkan gitu.

Emerha

Kemarin saya lihat di RKPD kan kayak gitu juga untuk.

Nur Hadiyanto

Hmm, ya.

Emerha

Sudah mulai ke arah--

Nur Hadiyanto

Mungkin ya.

Emerha

Nah, untuk dari aspek kemandirian juga Pak, sama itu 15,65 itu masih dianggap kurang tinggi ya.

Nur Hadiyanto

Kecil ya.

Emerha

Iya, kecil ya Pak. Belum--

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Mungkin insya Allah saya akan bandingkan dengan 4 kabupaten yang lain.

Nur Hadiyanto

Kabupaten yang lain, oh, begitu.

Emerha

Buat analisisnya.

Nur Hadiyanto

Iya, iya.

Emerha

Ini yang--

Nur Hadiyanto

Pasti Kulon Progo paling kecil (tertawa).

Emerha

Berarti itu sudah ini ya, sudah--

Nur Hadiyanto

Sudah angka kemiskinannya paling tinggi lagi.

Emerha

Oh, iya.

Nur Hadiyanto

Kan kelihatan dari ini tadi kalau pertumbuhan ekonominya paling rendah, coba lihat saja ekonomi makronya yang tumbuh berapa persen, berapa persen, untuk Kulon Progo selalu paling kecil. Nah, kita, ya, itu tadi kondisinya sudah warisan geografisnya sulit, budayanya sulit. Ya, memang, tapi, tidak patah semangat.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Kalau ini kan upaya-upaya kita untuk --

Emerha

Untuk, anu, kemajuan itu.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Tadi di itu Pak, di Silpa tadi, itu saya lihat ada sekitar berapa ya 69 dari 18, 13 miliar itu kenapa Pak bisa ada Silpa? Apakah karena keberhasilan efisiensi anggaran?

Nur Hadiyanto

Yang mana?

Emerha

Atau Silpa?

Nur Hadiyanto

Silpa itu--

Emerha

Nah, ini Silpa. Ada 13 M, nah itu apa efisiensi anggaran atau efektifitas pendapatan.

Nur Hadiyanto

Eh, bukan to ini, Silpa itu kan pembiayaan.

Emerha

Silpa, Silpa tahun lalu?

Nur Hadiyanto

Berarti 2017 ini?

Emerha

Iya, 2017.

Nur Hadiyanto

Bukan, apa ya, nek Silpa ini, ini kan hanya angka yang pasang saja sebenarnya nek anggaran itu. Tapi, nanti riilnya kan nanti lihat di LKPD.

Emerha

Iya, LKPD, ya?

Nur Hadiyanto

Yang audited ya.

Emerha

Oh, iya.

Nur Hadiyanto

Itu aku belum tahu.

Emerha

Ada penjelasan ya.

Nur Hadiyanto

Dia hanya perkiraan saja nggih, nanti penjelasannya di situ. Cuma perkiraannya ini sisa anggaran gaji pertama. Kelihatannya sih anggaran gaji itu kemarin sisa hampir sekitar lima, 5 miliaran.

Emerha

5M ya?

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Berarti penghematan ya?

Nur Hadiyanto

Ya, bukan penghematan karena banyak pensiun (tertawa).

Emerha

Oh.

Nur Hadiyanto

Kita itu pensiun setahun 300 orang (tertawa). Iya, itu bukan penghematan artinya ya--

Emerha

Pensiun 300 tapi nggak ada yang masuk?

Nur Hadiyanto

Nggak ada yang masuk (tertawa)

Emerha

Berarti selama ini belum ada penerimaan?

Nur Hadiyanto

Aduh, kita makin berat ini memang di semua lembaga, di semua OPD itu kekurangan pegawai.

Emerha

Kekurangan pegawai ya.

Nur Hadiyanto

Dari formasi yang--

Emerha

Iya, kan--

Nur Hadiyanto

Itu, kemudian kemarin yang anu, yang gagal lelang, gagal lelang itu yang akhirnya, 2 itu yang besar-besar kayaknya. Kalau yang dari program kegiatan kecil-kecil, bisa efisiensi apaan, nggak ada (tertawa). Ya, paling cuma sisa misalnya beli apa, kertas ya (tertawa). Rencananya beli 12 eh beli 10 rim sudah cukup ya kan, sisanya kan kecil-kecil, yang sisa agak besar gaji sama gagal lelang.

Emerha

Kalau dilihat dari itu keserasian tentang belanja langsung sama belanja tidak langsung tadi, ada sekitar 45 ya Pak? Belanja langsungnya itu cuma 45%, berarti dianalisa secara umum itu berarti kurang ya pembangunan ya Pak?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Bangunan fisik, ya?

Nur Hadiyanto

Iya, iya, karena sebagian besar masih untuk--

Emerha

Masih untuk--

Nur Hadiyanto

Biaya pegawai.

Emerha

Pemerintahan.

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Pelayanan pemerintahan.

Nur Hadiyanto

Iya

Emerha

Banyak di teori-teori itu Pak ya yang mengatakan kalau mau ada pembangunan itu ini minimal di atas 60.

Nur Hadiyanto

50, 60 malahan.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Iya (tertawa)

Emerha

Ya, kalau--

Nur Hadiyanto

Ya, paling nggak kan--

Emerha

Berarti banyak pembangunan ya?

Nur Hadiyanto

Iya, ya, paling tidak kan 50%, di atas 50 kan, 50:50 kan untuk pembangunan ya untuk ininya, menjalankan roda pemerintahan.

Emerha

Itu nggak bikin bagaimana kalau memang sudah itu mau dibayarkan ya?

Nur Hadiyanto

(tertawa)

Emerha

Tergantung kemampuan pusat.

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Aset miliknya.

Nur Hadiyanto

Iya, nggih, makanya memang harus ada mega proyek tadi ya.

Emerha

Iya, mega proyek.

Nur Hadiyanto

Nggih, pada hal besar ya. Kalau ekonomi Kulon Progo itu mau baik harus ada sesuatu yang pemicunya, ada pemicu yang besar yang -- ya, kalau nggak ya selamanya seperti ini.

Emerha

Iya. Itu berarti kalau sudah keluar LKPD saya bisa dapat ya Pak filenya?

Nur Hadiyanto

Bisa.

Emerha

LKPD?

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Ini tanggal berapa, 29 ya Pak? 3 hari lagi ya?

Nur Hadiyanto

Jumat itu kapan ya?

Emerha

Jumat?

Nur Hadiyanto

Besok.

Emerha

Dua, Jumat 25 ya, besok?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

25 ya bisanya.

Nur Hadiyanto

Semoga betul (tertawa). Kadang-kadang, semoga nggak mundur gitu loh dari apa, dari agenda itu. Kemarin itu di WA itu sudah di-anu to, mana ya, oh tanggal 28.

Emerha

28 ya?

Nur Hadiyanto

Iya, hari Senin.

Emerha

Hari Senin depan.

Nur Hadiyanto

Akan penyerahan LHP kepada Pak Bupati lewat BPK.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Tanggal 28.

Emerha

28?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Itu biasanya sudah dapat itu langsung di-upload di web, di web ya? Belum ya?

Nur Hadiyanto

Kayaknya belum, belum.

Emerha

Berarti kalau ada mungkin saya bisa dapat lebih, lebih cepat bisa ya? (tertawa)

Nur Hadiyanto

(tertawa)

Emerha

Okelah, setelah penyerahan.

Nur Hadiyanto

Setelah penyerahan ya tanggal 28 itu paling cepat (tertawa)

Emerha

Paling cepat ya?

Nur Hadiyanto

Nggih, ya paling cepat tanggal 28.

Emerha

Nah, kalau untuk itu Pak, soal dana cadangan, dana cadangan. Itu saya belum bisa lihat pembentukannya itu di, secara umum saja Pak, dana cadangan ini.

Nur Hadiyanto

Dana cadangan, memang kita bentuk dana cadangan opo?

Emerha

Nggak Pak?

Nur Hadiyanto

Nggak punya (tertawa)

Emerha

Oh, iya, nggak ada ya?

Nur Hadiyanto

Nggak ada (tertawa)

Emerha

Oh, nggak ada, nggak ada ya. Ini kalau penerimaan kelebihan ini kan investasi ya Pak ya?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Yang tadi Bapak bilang itu ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Kalau penerimaan pinjaman atau Silpa, kalau pengeluaran pembiayaan dari penyertaan modal.

Emerha

Penyertaan modal.

Nur Hadiyanto

He'e. Ke BPD dan Bank Pasar ini.

Emerha

Penerimaan penjaminan itu dari mana Pak?

Nur Hadiyanto

Dari BPD.

Emerha

BPD, ya?

Nur Hadiyanto

Iya, kita pinjam BPD DIY.

Emerha

DIY?

Nur Hadiyanto

Iya, untuk bangun rumah sakit ya, utangnya itu (tertawa). Dana cadangan itu sejarahnya kita hanya sekali membentuk dan diuplek-uplek dipermasalahkan oleh Kejaksaan.

Emerha

Gitu ya?

Nur Hadiyanto

Malas banggunya. Dulu kan kita berencana untuk, apa, namanya dana cadangan pemberdayaan desa di DPD itu kita bentuk hampir 4 tahun, 2005, 2006, oh, 2004, '05, '06. '07. Itu kita mencadangkan sampai angka 44 miliar waktu itu kita bantukan ke desa supaya desa membuat Bundes, itu sudah loh padahal kan. Makanya kita juga harap do ringan le bangun desa itu supaya memberdayakan desa itu dulu belum ada dana desa waktu Pak Jokowi itu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Pak Bupati yang dulu itu sudah ada di CPD itu, dana cadangan pemberdayaan desa selama 4 tahun kita kumpulkan per tahunnya hampir 11 miliar, terkumpul 44 miliar kita bagi ke 88 desa. Rata-rata hampir dapat 500 jutaan itu. Mereka membentuk lembaga keuangan mikro yang menjadi Bundes. Tapi, ya gitu, serahkan ke desa, ya ada yang berkembang bagus, ada yang tewas (tertawa). Rata-rata kalau ketemu Pak Kades yang waktu itu koboy, koboy cengeng (tertawa). Iya, uangnya dikemplang sama Pak Kades.

Emerha

Yang bermasalah dengan Kejaksanaan apan ya?

Nur Hadiyanto

Nah, bermasalah dengan kejaksanaan itu, jadi selama kurun waktu 4 tahun dana cadangan itu disimpan di rekening bank, itu kan kalau ya ini Kejaksanaan itu menggunakan ketentuan sekarang untuk masalah-masalah yang sudah lampau. Jadi, kalau ketentuan sekarang kan misalnya disimpan sebagai dana cadangan ada bunga.

Emerha

He'e.

Nur Hadiyanto

Itu kan ditambah, menambah saldo dana cadangan itu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nah, kalau dulu itu nggak, jadi dana disimpan ada bunga, bungannya diambil, dibagikan untuk desa sesuai alokasi masing-masing. Jadi, di desa itu ada pendapatan bunga di CPD itu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Lah, itulah Kejaksanaan dipermasalahkan, menyalahi aturan dan sebagainya. Tapi, ya, sebenarnya nggak ada yang dirugikan. Katanya itu merugikan keuangan daerah, mestinya bunga itu jadi--

Emerha

Pendapatan bunga ya?

Nur Hadiyanto

Iya, pendapatan bunga yang dipermasalahkan (tertawa).

Emerha

Dan itu kan bagian dari manajemen kas ya Pak?

Nur Hadiyanto

Iya, sih, iya. Pendapatan bunganya yang bunga dana cadangan itu loh.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Bukan yang di rekening kas daerah, bukan, tapi yang di rekening dana cadangan.

Emerha

Oh.

Nur Hadiyanto

Itu, yang kedua, dana cadangan itu simpannya tidak di bank umum. Ketentuannya kan harus di bank umum tapi waktu itu kita simpannya di Bank Pasar. Bank Pasar kan milik kita sendiri.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Kan sambil memperkuat permodalan Bank Pasar.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Ya, lumayan kan, tiap tahun dapat 11 miliar, disimpan, dia bisa, ya, kadang-kadang aturannya nggak ada yang melarang tapi (tertawa), sok dicari-cari kesalahan. Kalau Kemendagri-nya kan Bank Umum Pak gitu tapi kan nggak ada larangan simpan di BPR (tertawa)

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Yang dipermasalahkan. Itu yang anu, dana cadangan yang sampai sekarang kita nggak pernah lagi membentuk dana cadangan.

Emerha

Dana cadangan ya.

Nur Hadiyanto

Kemarin itu yang rumah sakit itu sudah kita ini, gagallah pokoknya kalau usulan-usulan dana cadangan itu. Pembangunan rumah sakit kan butuh hampir kemarin itu hampir yang 5 miliar ya. Kita mau dana cadangan paling nggak 2 tahun atau 3 tahu ya, 2, 21, atau 23 gitu.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nanti dicairkan untuk pembangunan. Tapi, nggak jadi akhirnya utang di BPD (tertawa), untuk lebih cepat utang saja gitu. Pernah kita mau mencoba untuk Land Banking. Pemda itu membeli tanah di mana-mana sebagai Land Banking terutama untuk pengembangan kawasan di Sentolo itu. Tapi, ya itu uangnya yang mau dicadangkan ibaratnya habis untuk makan (tertawa). Kagak bisa nabung (tertawa)

Emerha

(tertawa)

Nur Hadiyanto

Dana cadangan kan sama dengan nabung ya (tertawa). Ya, ini, nah, kemarin ini kita sudah pernah dana cadangan nggak berhasil, utang berat, terus akhirnya menggunakan rumah sakit yang tahun ini kan ada lagi itu multi years. Tapi, multi year ya tergantung komitmen nanti kalau pada lupa sama komitmennya ngonggok lagi (tertawa)

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Kebutuhannya 240M kita alokasikan selama 3 tahun, 2018, '19, '20.

Emerha

Kalau soal itu tadi Pak, pendapatan bunga yang melalui kas daerah itu ada dilakukan?

Nur Hadiyanto

Ada, ada.

Emerha

Manajemen kasnya?

Nur Hadiyanto

Ada.

Emerha

Berarti dalam bentuk apa itu Pak?

Nur Hadiyanto

Ya--

Emerha

Deposito?

Nur Hadiyanto

Ada, ya, nek Giro kan nggak ada nggih.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Bunganya ya, ya kita lempar ke bentuk deposito.

Emerha

Deposito, itu diperbolehkan ya?

Nur Hadiyanto

Diperbolehkan. PP 39 2007.

Emerha

Tapi, saya lihat di peraturan gubernur DIY itu yang ketika APBD itu dievaluasi di sana, itu kan tidak boleh dianggarkan pendapatan bunga.

Nur Hadiyanto

Iya, pendapatan--

Emerha

Nah, itu gimana?

Nur Hadiyanto

Memang itu kan jadi semacam ironi ya.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Semacam ya itu ironi atau simalakama atau gimanalah istilahnya. Mestinya kan uang itu begitu diterima kemudian dibelanjakan. Jadwal-jadwal pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan sudah dijadwalkan untuk tiap bulan. Tapi, kan praktiknya itu sekarang dari dulu ya sampai sekarang itu kan menumpuk di belakang gitu loh. Entah proses lelangnya, entah proses-proses apa, perencanaan, kemudian studi kelayakan dan sebagainya itu. Yang namanya pengadaan barang dan jasa itu pasti cenderung mundur, jarang yang maju. Nah, akhirnya kas, aliran kas kan juga gitu. Kalau selama ini memang ada idle cash--

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Itu ya kita tempatkan dalam bentuk duit itu. Tapi, sebenarnya kalau depositnya makin besar, itu artinya kan pembangunannya nggak jalan.

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nah, ini makanya nggak boleh ada target pendapatan bunga deposito.

Emerha

Oh.

Nur Hadiyanto

Kalau ditargetkan masuknya ya kita harus menempatkan banyak-banyaknya. Kalau kita menempatkan sebanyak-banyaknya, artinya pembangunan tidak jalan, lah, ini kan susah kita. Sehingga memang tidak ada target tapi kalau ada pendapatan itu tetap harus dicatat kan gitu tanggung jawabnya.

Emerha

Iya. Tapi, di situ semua yang saya agak heran itu tidak disebutkan dasar hukum yang melarang untuk ditarget kan? Tapi, kalau untuk melakukan manajemen kas, kalau ada idle cash itu, itu kan jelas peraturannya memang ada.

Nur Hadiyanto

Iya, PP 39 2007.

Emerha

Iya, betul.

Nur Hadiyanto

Iya, ya, memang itu, susah pemerintahnya (tertawa). Kadang-kadang untuk mencari posisi yang--

Emerha

Artinya kan yang, artinya bukan, bukan kita sengaja memperlambat duit di dalam bank.

Nur Hadiyanto

Iya, duit--

Emerha

Artinya ada kegiatan, ada kendala-kendala ini daripada, daripada itu nganggur kan bisa dijadikan itu.

Nur Hadiyanto

Iya, dioptimalkan.

Emerha

Dioptimalkan.

Nur Hadiyanto

Optimalisasi kas. Tapi, ya itu memang nggak boleh ditargetkan karena itu tadi.

Emerha

Iya, ya.

Nur Hadiyanto

Iya. Tapi, kalau ada ya tetap baru dicatat. (tertawa) Kadang-kadang tercampur antara aspek--

Emerha

Masalahkannya sudah, sudah ada jadwal duit turun dari KPN berapa lamanya kas mengendap, kegiatan kan nggak bisa di--

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Kan sudah bisa kita hitung dari situ dia.

Nur Hadiyanto

Iya, kan ada perencanaan.

Emerha

30 hari kan.

Nur Hadiyanto

Nggih, aliran kasnya kan ada, aliran kasnya, nggih.

Emerha

Tidak ada aliran kasnya. Nah, itu, jadi ini yang masalahnya yang eee subtransi.

Nur Hadiyanto

Iya, di pelaksanaan.

Emerha

Harus ditargetkan itu.

Nur Hadiyanto

Nggih. Iya, itu juga (tertawa).

Emerha

(tertawa)

Nur Hadiyanto

Itu juga. Ini berarti Njenengan lama banget ini kapan lulusnya nanti? (tertawa)

Emerha

Makanya Pak, saya kualitatif Pak.

Nur Hadiyanto

(tertawa)

Emerha

Artinya kemarin --

Nur Hadiyanto

Targetnya itu kapan ininya, anunya?

Emerha

Kemarin kejar Mei.

Nur Hadiyanto

Nah.

Emerha

Ini Mei sudah --

- C. Wawancara dengan Bapak Nur Hadiyanto pada 24 Mei 2018, pukul 11.13 WIB di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Wawancara ini merupakan pendalaman topik RM2.

Q.1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalau Bapak sebagai Kuasa BUD, peran Bapak di TAPD sebagai apa Pak?

Nur Hadiyanto

Anggota. iya

Emerha

Ketika menyusun RKA-SKPD, apa dibuat surat edaran atau tidak pake surat edaran langsung bikin RKA saja?

Nur Hadiyanto

Biasanya dibuat, ada rambu-rambunya, yang buat bidang anggaran. Surat edaran tetap dibuat. Itu penajaman terkait prioritas belanja, kemudian terkait standarisasi harga barang dan jasa yang baru, kemudian ini...timing eeh..jadwal-jadwal harus disusun RKA-nya, kapan desk-nya, kapan harus diserahkan.

Emerha

Yang bikin standar harga barang dan jasa siapa pak?

Nur Hadiyanto

Kami, di bidang anggaran.

Emerha

Itu gimana cara bikinnya?

Nur Hadiyanto

Biasanya itu survei, dengan cara minimal 3, minimal 3 penyedia barang untuk 1 item barang.

Emerha

Itu setiap berapa bulan diubah?

Nur Hadiyanto

Eehh.....kalu ketentuannya mungkin hanya setahun sekali, tapi kemaren kalau ada hal-hal yang. Kemaren kan ada ini...ketentuan perbupnya itu tentang standarisasi itu apabila ada kenaikan harga yang....ada lonjakan, lonjakan harga itu bisa dilakukan perubahan sehingga untuk yang 2017 kita berubah 3 kali, ha...ha..haa..

Emerha

Jadi ketika akan melakukan penyusunan anggaran baru dilakukan survei? Termasuk perubahan anggaran?

Nur Hadiyanto

Iya, baru disurvei. Ketika ada perubahan anggaran, survei lagi. Eeehh tergantung mau pake yang lama itu dipandang masih relevan, pake yang lama. Tapi kalau ternyata itu kan ada lonjakan harga disesuaikan lagi. Tapi HET nya lonjakan harga hanya ada beberapa item barang tertentu. Tidak semua barang kecuali terjadi krisis ekonomi, nilai tukar rupiah anjlok..he..he..he.

Emerha

Dalam penyusunan RKA-SKPD, bagaimana mekanisme ril nya?

Nur Hadiyanto

Jadi dariiii...eehh.. mekanisme perencanaan di SKPD kan kemudian mereka ketika sudah menyusun Renstra, menyusun Renja, rencana kerja tahunan eh.. dari Renja itu kemudian nanti tentu dituangkan ke dalam DPA kalau di tingkat SKPD. Kalau di tingkat kabupaten ada KUA dan PPAS. Karena ketika mereka menyusun RKA, program dan kegiatan itu sudah..sudah rententan dari hasil perencanaan. Dari renstra, dari renja, menyusun Renja itu kan sudah dari musrenbang dan sebagainya. Nah itu sudah satu runtutan ketika muncul program dan kegiatan termasuk nanti pagu karena di KUA PPAS kan kemudian muncul plafon. Nah itu nanti anggaran kegiatan A, anggarannya berapa misalnya 500 juta atau 100 juta. Ha nanti ketika itu sudah muncul alokasi anggaran per kegiatan barulah disusun RKA-nya. Jadi 100 juta itu isinya untuk kegiatan apa saja. Mereka dikasih pagu, dikasih plafon.

Emerha

Bagaimana kalau misalnya kegiatan sudah direncanakan di Renstra dan Renja, tiba-tiba ketika dalam menyusun RKA ada kegiatan yang baru, itu bisa dimasukkan?

Nur Hadiyanto

Eehhh..kegiatan baru kan ada syaratnya, nggih. Ada syarat ya intinya penting dan mendesak, tapi kalau kegiatan dan program jarang ada yang baru muncul. Harus nunggu perubahan. Untuk ketentuan perubahan ini kan ada beberapa ini ya, beberapa level/tingkatan. Kalau dia hanya merubah uraian belanja, misalnya mau beli kertas HVS sekian kemudian bolpoin sekian, dulu mau beli kertas HVS 6, bolpin 7 tapi ternyata setelah dihitung kertas HVS nya butuh 7 dan akhirnya bolpoinnya hanya bisa 2. Itu tidak perlu dengan mekanisme perubahan. Itu bisa dengan mekanisme perubahan peraturan bupati di penjabaran APBD. Tapi kalau perubahan di level kegiatan itu harus merubah Perda APBD-nya. Kan nanti harus nunggu perubahan APBD. Itu. Itu sudah ada Perbupnya. Nanti ketemu bu Atik, pernah ketemu gak? Terkait dengan pergeseran anggaran itu seperti apa, kalau hanya cukup merubah perbup apa..penjabaran coba aja perbup penjabaran. Tapi ketika harus merubah perda APBD.

Emerha

Dalam pembahasan RKA-SKPD, ada prosedur pembahasan oleh TAPD dan tim teknis, Tim teknis itu siapa pak?

Nur Hadiyanto

Tim teknis itu ya..yang ini pelaksana desk. Jadi desk..desk apa ya..Desk RKA itu, disini yang nangani bidang anggaran. Nanti setelah SKPD itu datang yang memaparkan tadi itu, misalnya kegiatan A pengelolaan kas dapat dana 30 juta. Dari 30 juta itu opo wae gitu.. apa itu nanti di...dengan tim itu, desk.

Emerha

Tim teknis itu siapa yang bikin?

Nur Hadiyanto

Eeehh...Bappeda. Tapi kita jadi anggota.

Emerha

Tim teknis itu tidak tumpang tindih dengan TAPD?

Nur Hadiyanto

Tidak...itu kan kepanjangan tangan TAPD. Jadi ketika di level itu cukup di tim teknis, tapi ketika di level tadi harus TAPD. Jadi di level kegiatan ini dikasih berapa, dikasih ini itu digagalkan saja digantin dengan kegiatan ini...itu di level TAPD.

Emerha

Jadi ketika TAPD ingin tahu kenapa anggaran di SKPD A itu begini, jadi tidak perlu ke SKPD, langsung ditangani oleh tim teknis?

Nur Hadiyanto

Bisa...ada ini kok apa..dibagi tugas. Jadi ada satu orang itu atau satu kelompok mengampuh SKPD mana saja itu.

Emerha

Tim teknis di-SK-kan oleh bupati?

Nur Hadiyanto

Bagaimana..? tim teknis itu SK Bappeda? Ada SK-nya gak itu? SK bupati nggih..? Kebetulan saya sih bukan anggota malah enak mbak Sri anggota.

Emerha

Tim teknis itu wajib ya? Untuk membantu TAPD?

Nur Hadiyanto

Iya, kadang-kadang, anu tapi kalau anu iya TPAD biasa banget teknis nyobai..he..he. kadang-kadang di SKPD itu nyusun anggaran itu tidak jelas gitu, artinya ketika ini untuk honor tim sekian untuk ATK sekian, perjalanan dinas sekian, kegiatan anu kok, perjalanan dinas eeh sebanyak itu po, ha..ha..ha.

Emerha

Berarti yang koreksi bukan langsung TAPD ya, tapi tim teknis?

Nur Hadiyanto

Bukan, tapi kalau lolos di tim teknis nanti ketahuan TAPD ya..TAPD terpaksa berbicara teknis. Sering itu.

Emerha

Model pembahasan RKA di TAPD itu bagaimana, apakah setiap SKPD memaparkan satu per satu?

Nur Hadiyanto

Iya, PPTK-nya yang dipanggil.

Emerha

Jadi mereka itu presentasi? Itu wajib ya? Itu makan waktu lama ya?

Nur Hadiyanto

Iya, satu per satu. Iya wajib. Harus jelas, harus tepat juga meletakkan rekening belanja. Ya lumayan ya.... satu SKPD ini, itu mbak Ita kemaren jenengan desk berapa jam..? itu mbak Ita kemaren desk ke...eeehh..nek kita kegiatannya sudah ini..ini...Penempatan rekeningnya juga sudah bener juga nggih? Misalnya makan dan minum itu ada makan minum rapat, makan minum harian, itu kan peruntukannya lain-lain. Paling misalnya ATK, kadang juga gak logis. Ya.. kalau soalnya yang sudah rutin-rutin tiap tahun seperti itu sama, tinggalin. PPTK yang dipanggil langsung. Bukan kepala SKPD. Bukan.

Emerha

Kalau pembahasan di DPRD sama juga? Masih memeriksa hal yang sama?

Nur Hadiyanto

Gak. Kalau DPRD apa ya... profil APBD kebanyakan itu misalnya untuk dana infrastruktur, berapa persen, nilainya berapa. Dana penanggulangan kemiskinan.

Emerha

Lama mana pak pembahasan di TAPD dengna di DPRD?

Nur Hadiyanto

Kalau di DPRD itu kan politis ya...artinya kadang-kadang, walaupun di tingkat pansus mungkin pembahasannya tadi garis besar saja. Tapi kadang-kadang per anggota ini juga kadang-kadang membawa misi pribadi, misinya sendiri. Bukan pribadi tapi konstituwen, kadang saling ini gaduh. Susahnya Kulon Progo ini, kuenya kecil yang mau makan banyak, 40 orang. Kadang-kadang kalau jalan di tempat saya saja kok belum masuk, mogok nanti gak mau.

Emerha

Ketika anggaran sudah ditetapkan melalui TAPD, tidak bisa dibatalkan tapi oleh DPRD tolong anggarkan, bagaimana ?

Nur Hadiyanto

Biasanya DPRD dulu, ini tolong dianggarkan, syaratnya kan gak terbatas, nah setelah DPRD masuk semua, kue kita itu hanya segini yang di tempatku ini..ini, di tempatku gak bisa. Itulah penugasannya di situ.

Emerha

Kalau di tingkat SKPD, ada itu SKPD yang lobi-lobi anggaran pak? Misalnya kegiatan saya anggarannya harus sekian?

Nur Hadiyanto

Nah kalau itu, istilahnya bukan lobi. Itu kan sudah ada mekanismenya usulan di luar plafon namanya. Jadi kan wajib plafon. Kemudian ternyata ada usulan, ah ini karena pusat seperti misalnya dinas sosial ternyata pusat itu yang program dulu 2013 yang pusat, mulai 2018 di lepas, pusat tidak mau mendanai lagi, kan harus didanai oleh daerah. Nah masuk usulan di luar plafon. Nah kita juga, saya kira nanti mampukah pendapatan, kadang-kadang ehh..namanya pendapatan dan belanja mana yang di..kalau pendapatan itu yang target minimal yang harus dicapai, kalau belanja itu adanya batas maksimal. Kadang-kadang nek ada usulan di luar plafon ini yang dikejar sampai pendapatan, anu bisa naik gak pendapatannya. Program di luar plafon yang didanai sekian, nah nanti closing itu pendapatannya, he..he..he. mana ya yang bisa dinaikkan lagi. Ha..ha..ha.

Q.2. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang transparan dan akuntabel**Emerha**

Pak kalau penyusunan DPA juga seperti itu pakai tim teknis?

Nur Hadiyanto

Iya. Kalau sudah RKA ya sudah mengalir saja, kuncinya di RKA. DPA kan tinggal nuang, ada pencermatan itu tadi peletakan rekening, kadang-kadang SKPD itu bolak-balik misalnya dia mau beli kompor, beli panci, diserahkan pada kelompok masyarakat, itu dia harus meletakkannya di rekening belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, kan beda. Dengan kadang-kadang dia itu salah masuknya di belanja modal. Kalau belanja modal kan harus bicara sebagai aset.

Emerha

Bikin RKA itu langsung di SIMDA pak?

Nur Hadiyanto

Iya. RKA pake excel dulu...? Pra RKA itu pake excel ya. Dari pra RKA diinput ke Rencanaku, nanti ke DPA nya, input lagi ke simda? Gak langsung. Model ekspor impor. Input di simdanya nanti tinggal impor. Nanti kita ini kok, apa adanya, penelitiannya memang masih rendah, masih ini silahkan saja..ha..ha.. gak usah ditutupi, he..he..he.. apa adanya saja, syukur-syukur ada rekomendasi nanti yang bisa berguna.

Emerha

Jadi masih tim teknis yang sama ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Masih yang sama.

Q.3. Penyusunan Anggaran Kas yang transparan dan akuntabel**Emerha**

Kalau penyusunan anggaran kas? Itu ada dua kali, ada rancangan, kemudian input ke simda?

Nur Hadiyanto

Ketika mau bikin DPA, dia sudah include. Jadi bersamaan, gak, maksudnya DPA yang tadi itu ekspor impor dari Rencanaku, tapi kalau untuk penyusunan anggaran kasnya itu malah nginput lagi. Tidak ...tidak terus jadi...belum ada sistem tersendiri. Bukan 2 kali tapi memang belum ini buat waktu di tahap perencanaan.

Emerha

Anggaran kas diverifikasi dimana?

Nur Hadiyanto

Kalau anggaran kas hanya gaji yang diverifikasi di sini saja. Tapi kalau rencana penarikan dana, nah itu terserah SKPD, mau dilaksanakan karena mereka yang tahu. Setelah dari anggaran kas itu fixed dari Simda.

- d. Wawancara ke-4 dengan Nur Hadiyanto pada 04 Juni 2018, pukul 10.41 pagi di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Topik utama wawancara tentang proses belajar transparansi dan akuntabilitas di bidang perbendaharaan. Wawancara ini merupakan wawancara yang keempat kalinya sebagai pendalaman topik RM3.

Q.1. Model sosialisasi

Emerha

e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya?

Nur Hadiyanto

Ya..

Emerha

e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak?

Nur Hadiyanto

o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh?

Emerha

Awal-awal SIMDA..

Nur Hadiyanto

Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perpen gitu nggeh?

Bu sri

Nggeh, dari anggaran dulu

Nur Hadiyanto

Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA

Bu sri

Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih

Nur Hadiyanto

Dilatih, tahun piro itu mbak

Bu sri

2011

Nur Hadiyanto

2011 nggeh

Bu sri

Maksude le.. nopo.. le.. mulai....

Nur Hadiyanto

Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011

Emerha

Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu?

Nur Hadiyanto

Ya.. dulu sebelum itu manual

Bu sri

Dulu pake e..

Nur Hadiyanto

Apa namanya dulu..?

Bu sri

SIPK...

Nur Hadiyanto

SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat

Emerha

Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan?

Nur Hadiyanto

Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondi yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator

Emerha

Berarti dia yang sering dikirim ke sana

Nur Hadiyanto

Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondi yang..

Emerha

Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan?

Nur Hadiyanto

Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP

ke sini?

Bu sri

Jarang

Nur Hadiyanto

Jarang...

Bu sri

Kalo update kan Cuma via...

Nur Hadiyanto

Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti..

Emerha

Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem?

Nur Hadiyanto

e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya.., hehehehehe (narasumber tertawa)

Emerha

Okey pak, nggak apa-apa,

Nur Hadiyanto

Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh

Emerha

Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKB yang..?

Nur Hadiyanto

SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya..

Bu sri

Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya..

Nur Hadiyanto

Permendagri 13..

Emerha

Sl... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?

Bu sri

Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...

Nur Hadiyanto

Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh

Bu sri

Sama gratis

Emerha

Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?

Nur Hadiyanto

Pak Mondy kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehehe (narasumber tertawa)

Bu sri

Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..

Nur Hadiyanto

Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..

Emerha

Yang teknis ya..

Nur Hadiyanto

Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan

Emerha

Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yang ngurus semua ya?

Nur Hadiyanto

Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatornya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondy itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondy. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa)

Emerha

Itu siapa itu, emang udah di..

Nur Hadiyanto

Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman

Bu sri

Sleman dereng..

Nur Hadiyanto

Oh.. Sleman masih PKD nggeh..

Bu sri

Buatan sendiri

Nur Hadiyanto

Oh buatan sendiri

Emerha

Buatan sendiri

Nur Hadiyanto

Bantul saja?

Bu sri

Bantul kaleh.. Kulonprogo

Nur Hadiyanto

Kota dan Gunung Kidul

Bu sri

Belum pak...

Nur Hadiyanto

Iseh PKD nggeh?

Bu sri

Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum..

Nur Hadiyanto

Sistem yang lebih..

Bu sri

Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel..

Nur Hadiyanto

Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri

Bu sri

Di kembangkan sendiri...

Q.2. Model eksternalisasi

Emerha

Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu..

Nur Hadiyanto

Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya

Emerha

Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah?

Nur Hadiyanto

Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP

Emerha

Mereposisi tawarnya kuat

Nur Hadiyanto

Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan

Emerha

Pembinaan..

Nur Hadiyanto

Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan

Emerha

Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana?

Nur Hadiyanto

Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK

Emerha

Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja?

Nur Hadiyanto

Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2P-SP3P dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu

harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk blud, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi

Emerha

Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak?

Nur Hadiyanto

Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondi itu

Emerha

Oh.. itu tiap berapa bulan pak?

Nur Hadiyanto

Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulanan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali

Emerha

Kalo winyeknya itu selain winkek BPKP ada juga?

Nur Hadiyanto

Maksudnya?

Emerha

Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?

Nur Hadiyanto

Kalo SIMDA ya.. BPKP

Emerha

Selain SIMDA, selain SIMDA

Nur Hadiyanto

Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi

Emerha

Dari Provinsi ya..

Nur Hadiyanto

Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai

Emerha

Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C.. CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?

Nur Hadiyanto

Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa

Emerha

Itu.. itu punya siapa CMS itu..?

Nur Hadiyanto

Ya punya BPD, CMS itu kan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, Iha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA

Emerha

Bisa konek..

Nur Hadiyanto

Bisa konek nggeh, sehingga langsung tercatat masuk di SIMDA, nah.. sekarang masih manual CMS nganu bukti-bukti di anu ke SIMDA

Emerha

Berarti boleh dikatakan pak siapa tadi itu mas..?

Nur Hadiyanto

Mondi..

Emerha

Siapa?

Nur Hadiyanto

Mondi..

Emerha

Mas Mondi itu orang berpengalaman ya.. di sini?

Nur Hadiyanto

Ya.. untuk aplikasi dia yang paling expert lah, walaupun kita juga punya petugas-petugas la.. lain di masing-masing bidang selaku Admin bidang

Q.3. Model kombinasi

Emerha

Itu hasil.. hasil pengetahuan hem... hasil pengetahuannya itu di tuangkan dalam bentuk buku manual kalo misalkan dia mengajarkan ke bendahara-bendahara?

Nur Hadiyanto

Ya biasanya ada manualnya ada

Emerha

Manualnya ada ya?

Nur Hadiyanto

Nggeh..., susahny sekarang itu nek bendahara ini kan modelle tunjukan to.. jadi tidak ada sertifikasi

Emerha

He'e

Nur Hadiyanto

Yo.. sangat menyulitkan kita e.., kadang-kadang nek di ganti orang..

Emerha

Tiap tahun ganti..

Nur Hadiyanto

Iya... harus nganu dari awal

Emerha

Kan masa jabatannya Cuma satu tahun ya, memang ketentuannya kayak begitu?

Nur Hadiyanto

Ya... tapi itu kayaknya bisa diangkat lagi.. tapi kita rata-rata yo.. nek bendahara ki setahun ganti-setahun ganti mbote mbak, SKPD-SKPD niku

Bu sri

Jarang..

Nur Hadiyanto

Jarang yo...

Bu sri

Onten seng tekan pensiun wae ganti

Nur Hadiyanto

Niku.. terus-menerus sak pensiune, hehehehe (narasumber tertawa), nggeh niku susah kita itu. Walaupun itu secara pengendalian internal nggak baik ya, harusnya ya harus diganti.. tapi yo prakteknya yo.. angel.. le..

Emerha

Susah ya pak mencari?

Nur Hadiyanto

Apalagi sekarang keterbatasan personil itu, dimana-mana kekurangan personil, ya kita itu pensiun setiap tahun 300 orang nggak pernah ada gantinya

Emerha

Yang selain.. Nggak pernah ada penerimaan?

Nur Hadiyanto

Nggak ada penerimaan, ya lama-lama habis, heheheeh (narasumber tertawa). Dulu saiki garek 6 ewu piro yo mbak pegawe ki mbak, hehehehe. 6.800-an habis terus tergerus pensiun?

Emerha

Kalo Pegawai bapak semua sudah ikut diklat?

Nur Hadiyanto

Maksudnya yang?

Emerha

Yang... di lingkungan Pemda

Nur Hadiyanto

Lingkungan Pemda atau lingkungan BKAD

Emerha

Yang lingkungan ini yang.. khusus..?

Nur Hadiyanto

Oh.. di bidang, ya rata-rata pernah semua

Emerha

Semua ya..

Nur Hadiyanto

Nggeh.. mbak Ita pernah diklat tentang keuangan

Bu sri

Urung tau..

Nur Hadiyanto

Urung tau, heheheh, kalo mbak Har empun nggeh?

Bu sri

Nopo?

Nur Hadiyanto

Diklat tentang keuangan, pengelolaan keuangan daerah, belum.. seng wes tau sopo mbak Sri, hehehe. Ya itu lah

Emerha

Berarti yang jadi mentornya mereka Bu Sri?

Nur Hadiyanto

e... maksudnya Bu Sri ya.., ya paling apa ya.. nek diklat-diklat seng keuangan BKK ki, ha.. nggeh, nggeh.., hehehe. Akhirnya itu, di sini itu belajarnya secara otodidak keuangan itu baca sendiri, anu sendiri. Yang jadi bahan temuan, nggeh evaluasi, hehehe

Emerha

Jadi peran dari pimpinan untuk e.. apa.. memotivasi mereka untuk mengikuti diklat itu seperti apa, kalo misalkan dari penggunaan anggaran?

Nur Hadiyanto

e.. nggeh saya itu susahe mas kalo diklat itu, dulu kan ada kebijakan diklat itu harus di full ya istilahnya di BK..., BKAD, di BKD di BKPP, badan kepegawaian. Tapi nyatanya juga di sana anggarannya terbatas sehingga..

Emerha

Tidak ada diklat

Nur Hadiyanto

Tidak ada diklat

Q.4. Model internalisasi

Emerha

Itu mereka nggak ikut diklat, apakah memang tidak ada permintaan diklat atau pengaruh faktor kemauan?

Nur Hadiyanto

Bukan karena faktor anggaran, nggeh jadi.. kadang-kadang setiap tahun itu kita itu di beri apa.. di beri formulir itu ngisi untuk kebutuhan diklat, tapi ya.. sudah tinggal kebutuhan, kebutuhan aja nggak pernah, nggak pernah dilaksanakan. Saya nggak tahu mungkin sana lebih diklatnya yang diklat-diklat ini sih, yang diklat-diklat teknis fungsional gitu ya, yang ada sertifikatnya yang.. dia kemudian angka kredit dan sebagainya, nek yang diklat-diklat semacam itu kan nggak ada angka kreditnya, nggak ada ini kan, jadi nggak prioritas

Emerha

Tadi bapak bilang, tadi bapak bilang mereka itu otodidak itu gimana bisa ada faktor apa to sampai mau belajar otodidak?

Nur Hadiyanto

Ya.. karena sudah diberikan SK, di sini kan dia harus tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya di jabatan dari ini ya.. jadi mau nggak mau harus belajar sama temannya, hehehehe

Emerha

Jadi harus tahu ya..

Nur Hadiyanto

Iya.. saya tuh juga nggak pernah buka-buka SIMDA terus saya tanya-tanya ini caranya gimana, masuknya, caranya menampilkan seperti apa, ya sedikit-sedikit tahu juga tentang SIMDA

Emerha

Hem.. iya terus yang terakhir pak, kalo soal prestasi di dalam mengelola SIMDA di bidang Perben selama bapak memimpin ada?

Nur Hadiyanto

Maksudnya prestasi SKPD-SKPD itu?

Emerha

Ya..

Nur Hadiyanto

e.. prestasi e.. barang kali ini ya.. apa.. hanya.. dii.. terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, nggeh karena setiap tri wulan itu ada penilaian kinerja baik apa.. terutama serapan dengan serapan anggara, kemudian kemajuan fisik kegiatan itu ya... include di situ aja, walaupun faktor yang lainnya, masalah presensi kehadiran pegawai gitu kan, kemudian apalagi ya penilaian kinerja itu. Nah itu.. nanti yang berpengaruh kepada TPP, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, jadi boleh dikatakan kalo di Kulonprogo ini walaupun masih TPP, tapi TPP yang sudah rasatunkin, terutama dia ada...

Emerha

TPP rasa tunkin?

Nur Hadiyanto

He'e, karena.. karena memang sudah dikaitkan dengan kinerja, walaupun itungannya nanti bukan perorang tapi per SKPD, namanya dia sera.. serapannya jelek, kemajuan fisik kegiatannya jelek dia dapat 80% gitu, nah nanti yo pak Kepala, tekan stafnya yo.. terima TPPnya yo 80% gitu, jadi ada 3, gir 80, 90 sama yang bagus 100%

Emerha

Itu kalo mekanisme pengelola, di sini itukan masih dijadikan indikator?

Nur Hadiyanto

Pengelolaan kegiatan?

Emerha

Ya.. kegiatan, kecepatan

Nur Hadiyanto

Ya.. serapan

Emerha

Kecepatan pengeditan SP2D, itu dijadiin indikator?

Nur Hadiyanto

Iya.. iya itu jadi indikator.

- e. Wawancara ke-5 dengan Nur Hadiyanto pada 16 Juli 2018, pukul 12.58 pagi di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Topik utama wawancara tentang pendalaman proses belajar transaparansi dan akuntabilitas di bidang perbendaharaan. Wawancara ini merupakan pendalaman topik RM3.

Emerha

. . . (00:01) berapa Februari ya, Maret April Mei Juni. Lima bulan ya. Ya mungkin akan saya lompat-lompat ya Pak karena mungkin tinggal mana yang kurang ya.

Nur Hadiyanto

Iya gak papa.

Emerha

Pak kalau hasil-hasil penelitian dari organisasi lain itu apakah pernah digunakan juga untuk sebagai prinsip dalam mengelola keuangan daerah?

Nur Hadiyanto

Hadi penelitian terhadap nganu nggih, Kulon Progo sendiri nggih?

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Nggih tentu selalu digunakan. Kalau apa, biasanya kan terutama di Bappeda. Jadi hasil-hasil penelitian setelah izin penelitian itu diberikan, kemudian ee ketika selesai kan dia wajib menyampaikan satu eksemplar nggih dikembalikan ke kita itu. Nggih beberapa digunakan sebagai bahan itu.

Emerha

Oh, itu dipakai ya?

Nur Hadiyanto

Dipakai, nggih.

Emerha

Termasuk nanti hasil penelitian saya?

Nur Hadiyanto

Saya pernah yang, nggih kalau nanti dikembalikan dan ada rekomendasi yang harus kita lakukan biasanya digunakan. Yang pernah saya ikuti itu peneltian tentang ini, PAD dua kali. Jadi dia sih sederhana saja hanya analisis eltisitas PAD.

Emerha

Kuantitatif ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Mana-mana yang sektor-sektor PAD yang masih bisa digenjot, mana yang sudah jenuh katakanlah dengan apa itu, dia masih kontribusi besar tapi pertumbuhan dengan apa dari,

Emerha

Yang kerambu (02:28) itu?

Nur Hadiyanto

Iya di kerambu. Ini kesininya pertumbuhan, ini kesininya kontribusi. Nah, itu to. Ya itu dulu pernah di. Ya walaupun mungkin yang lain-lain ndak tau ya. Artinya 100 penelitian digunakan, seratus-seratusnya atau serratus penelitian digunakan satu ya saya agak kurang, tapi yang pernah saya ikuti kalau ada rekomendasi dari penelitian yang memang penting dan bermanfaat pasti digunakan sebagai paling nggak bahan untuk merumuskan kebijakan.

Emerha

Kalau penelitian yang dari luar?

Nur Hadiyanto

Penelitian yang dari luar?

Emerha

Misalkan organisasi luar, hasil penelitian organisasi yang dari luar misalkan organisasi A meneliti tentang ini. Tapi bukan di Kulon Progo penelitiannya.

Nur Hadiyanto

Oh, penelitian-penelitian luar. Ee biasanya itu menjadi salah satu, iya dipake juga sih sebagai salah satu konsideran. Biasanya misalnya merumuskan Renstra dan sebagainya, itu kan kita nek bahasa ekonomi itu perlu mempertimbangkan rata-rata industry. Katakanlah sebagai pembanding to misalnya tingkat ketergantungan terhadap Pusat atau derajat apa istilahnya disentralisasi seperti apa itu kan kita selalu membandingkan diri dengan luar gitu. terutama dengan ini, terutama dengan empat Kabupaten dan satu Kota yang sewilayah DIY. Nah, kita itu selalu membandingkan diri dengan Bantul, Sleman, Gunung Kidul. APBD kita tahun ini berapa, oh ternyata Bantul, Sleman, Gunung Kidul sekian. Biasanya dari hasil penelitian orang-orang terhadap Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Jadi kita gunakan. Terutama BPS ya lembaga luar

Emerha

Ha itu, BPS. Biasanya juga banyak ya?

Nur Hadiyanto

Nggih. Kalau di Kulon Progo boleh saya katakan empat, kalau di sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada empat pendekatan ya. Pendekatan teknokratik, partisipatif, kemudian pendekatan politik atau perwakilan lewat dewan, yang satu itu apa, ini masalah Musrenbang dan sebagainya. Saya kira kalau diukur derajatnya itu, sisi teknokratiknya itu cukup lumayan mewarnai perencanaan pada umumnya. Jadi tidak semata-mata politis asal usulane dewan terus bisa terwujud itu ya nggak. Ada porsi-porsi memang ee nopo, usulan-usulan dari dewan. Tapi lebih ke teknokratiknya itu kental misalnya Bupati menghendaki sekarang misalnya apa ee postur APBDlah katakanlah. Tahun ini APBD kita berapa, 1, 5 T nanti berapa persen ini untuk infrastruktur, berapa persen itu udah arahan dari berapa persen untuk pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang untuk bantuan sosial berapa itu ada arahan untuk seperti itu. Jadi porsi-porsi itu sudah secara garis besar ditentukan dulu porsi APBDnya nanti ya terjemahannya kita berebut kuenya sudah sesuai porsinya itu.

Emerha

Jadi maksudnya teknokratik itu diolah melalui hasil-hasil penelitian itu?

Nur Hadiyanto

Iya. Jadi nggih. Dulu kayaknya ada kok penelitian bluegreen ekonomi (06:59). Tapi tahun berapa ya saya dulu pernah jadi tim di Bappeda. Kita melihatnya persektor kontribusi PDRB bidang-bidangnya itu. Jadi bidang perdagangan berapa, bidang pertanian berapa. Nah, ini diukur dengan tadi itu, sama apa istilahnya ini jendela Jauhari Window ya. Hehe. Ini yang kontribusinya berapa, ini pertumbuhannya berapa. Kalau yang bagus kan kontribusi besar pertumbuhan besar itu yang digenjot. Nah strateginya kan itu. Jadi kalau dia pertumbuhannya tinggi tapi kontribusinya kecil, nah strateginya mungkin nah itu nanti dia butuh alokasi APBD yang berapa sih untuk maintenance pertumbuhan. Semacam itu. Kita juga anu kok dulu, tenaga ahli, ada Pak siapa yang dari PSYKP itu.

Menit 08:11 narasumber bertanya ke staff:

Mbak Iffah ingat ndak tenaga ahli Pak siapa yang dari UGM itu? Yang untuk ekonomi? Sekarang udah gak lagi ya? Staff ahli yang tenaga ahli UGM nggak ada ya. Pak Sahid. Pak Sahid siapa namanya, hehe lupa ya UGM. Dari PSEKP.

Emerha

Itu digunakan untuk apa?

Nur Hadiyanto

Ya beliau yang ini, yang apa melakukan kajian-kajian secara akademik.

Emerha

Kajian akademisi ya?

Nur Hadiyanto

heé. Terhadap kebijakan makro.

Emerha

Itu sekitar tahun berapa Pak?

Nur Hadiyanto

Belum lama kok itu. Saya di anu itu masih ada Pak Sahid di sosial itu. Berarti terakhir 2015 kayaknya, 2015 atau 2016.

Emerha

Maksudnya yang sebagai ahli diminta untuk

Nur Hadiyanto

Heé. Melakukan kajian akademis terhadap program kebijakan perekonomian. Dulu ada tiga, Pak Sahid siapa gitu, Pak Sahid kemudian Pak Jos Iwan Marantika sama Pak Aprilia, Aprilia siapa. Ini yang ekonomi, ekonomi yang sifatnya ekonomi kerakyatan nggih, Pak Jos Iwan itu terkait marketing pemasaran kemudian Pak Aprilia ini hukum. Jadi anu apa akademiknya dari beliau bertiga ini. Cuma kemudian kan benturan jabat crash dengan yang ini pejabat staff ahli Bupati ini lo diangkat dari structural.

Emerha

Oh mereka ini pernah menjadi staff ahli tapi

Nur Hadiyanto

Ini tenaga ahlinya namanya.

Emerha

Oh tenaga ahli?

Nur Hadiyanto

Tenaga ahli Bupati. Kemudian ada staff ahli Bupati. Staff ahli yang bidang ekonomi, bidang apa gitu lo. Yang pejabat structural eselon dua la ini kan dipandang terus ada benturan tugas dan anu to, akhirnya yang ini dihilangkan. Padahal ini sayang sekali.

Emerha

Oh, berarti dulu pernah direkrut sebagai?

Nur Hadiyanto

Tenaga ahli.

Emerha

Tenaga ahli?

Nur Hadiyanto

Iya. Dari ranah akademik.

Emerha

Karena undang-undang nggak memperbolehkan itu ya mungkin?

Nur Hadiyanto

Dulu boleh kok. Sepanjang anu. Di Provinsi aja masih kok.

Emerha

Berarti dia masuk dalam jabatan apa itu Pak?

Nur Hadiyanto

Ya bukan jabatan. Hanya diangkat saja sebagai tenaga ahli.

Emerha

Berarti dibayar dari APBD?

Nur Hadiyanto

Iya. Dibayar APBD honor.

Emerha

Kayak yang didewan juga kan begitu, ada tenaga ahlinya kan?

Nur Hadiyanto

Iya. Dewan, tenaga ahli dewan nggih. Ini dulu yang beliau yang melakukan apa ya apa akademiknya kuatlah, pendekatan-pendekatan teknokratiknya kuat di tenaga ahli. Saya pernah ini dilatih

Emerha

Itu berapa lama mereka di sini Pak?

Nur Hadiyanto

Ya hampir 10 tahun lebih itu.

Emerha

Ih lama banget. Di bawah tahun

Nur Hadiyanto

Iya. Di era kedua Pak Bupati Pak Toyo kemudian Pak Hasto periode pertama itu, Pak Hasto periode kedua ini kok gak dimasukkan lagi.

Emerha

Pak Hasto periode pertama masih ada?

Nur Hadiyanto

Masih ada. Masih.

Emerha

Berarti mereka ini yang berkontribusi untuk mengajarkan ke

Nur Hadiyanto

Tadi itu. Heé. Pendekatan teknokratiknya dalam perencanaan.

Emerha

Itu khusus perencanaan atau kalau khusus di bidang keuangan ada juga?

Nur Hadiyanto

Eee keuangan itu sifatnya hanya ini sih, hanya ee apa nek koyok karo BPKP itu apa nek njuk kita pakai SIMDAnyanya terus kita mendampingi seumur hidup. Hehehe.

Emerha

Pendampingan ya?

Nur Hadiyanto

Iya pendampingan BPKP.

Emerha

Berarti ini mereka ini yang satu khusus di perencanaan ya, ini yang lebih concern

Nur Hadiyanto

Ini ekonomi kerakyatan Pak Sahid, Pak Sahid Gito Sarjono atau Sahid siapa. Terus Pak Jos Marantika itu marketing, terus Pak Aprilia siapa itu hukum.

Emerha

Berarti mereka yang cikal bakal pertama kali yang melakukan kajian akademis perencanaan?

Nur Hadiyanto

Terhadap perencanaan program nggih.

Emerha

Sampai sekarang ini ide mereka masih dipakai sampai sekarang?

Nur Hadiyanto

Iya. Ini yang melahirkan Kulon Progo the jewel of java itu beliau, Pak Jos Iwan. Jewel of java.

Emerha

Apa itu Pak? jewel of java.

Nur Hadiyanto

Apa istilahnya, yang ini lo slogan-slogan atau apa. Nek the jewel of java iki opo mbak istilahe slogan opo? Motto opo opo? Hehe. Branding branding. Iya. The jewel of java. Pak Sahid ini dulu yang melahirkan apa ee beliau yang melahirkan KAKB. KAKB dan zen budaya tapi agak gagal ini.

Emerha

KAKB itu apa Pak?

Nur Hadiyanto

KAKB itu kelompok asuh keluarga binangun. Jadi sister family konsepnya. Ada diminta untuk satu kelompok masyarakat beranggota 10 orang. Ini membentuk kelompok masyarakat kayak dasawisma. Dasawisma itu, tapi ini ee anggotanya empat orang kaya, empat orang yang

Emerha

Miskin?

Nur Hadiyanto

Bukan. Ini yang kurang kaya, yang biasa. Terus dua orang miskin. Nah ini yang empat lapan ini harus bisa menolong yang miskin.

Emerha

Itu menolong dalam hal apa?

Nur Hadiyanto

Dalam hal ekonomi, dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Emerha

Berarti dia bantu dalam hal keuangan gitu?

Nur Hadiyanto

Bukan. Jadi dia bersama-sama dia membuat suatu kelompok produksi, usaha ekonomi produktif. Dia misalnya bikin usaha makanan ringan, makanan tradisional, bikin peyek, bikin apa istilahnya itulah makanan tradisional itu kemudian dijual. Nah, terus dia bikin warung warung KAKB, bikin warung smebako, watrung KAKB gitu. kalau warung KAKBnya masih di dinas pemberdayaan sekarang.

Emerha

Iya. Sekarang kan masuk salah satu inovasi itu di Kemenpan.

Nur Hadiyanto

Oh masih ya?

Emerha

Masih. Tahun 2017 Pak.

Nur Hadiyanto

Oh iya. KAKB ini. Ya ini dengan model seperti ini diharapkan apa, kalau ada hasilnya dari mereka berusaha itu harusnya yang paling menikmati ya dua orang ini, yang ini udah gak usah

Emerha

Berarti ini nggak semata-mata, ini bantuan pengetahuan juga ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Bantuan semangat.

Emerha

Tidak ada bantuan sama sekali?

Nur Hadiyanto

Nggak ada. Lebih ke mentalitas.

Emerha

Lebih ke sharing pengalaman gitu ya?

Nur Hadiyanto

Karena dianggap bahwa faktor utama penyebab kemiskinan itu mentalitas. Jadi mental miskin, kuasa miskin. Kalau dia bisa dibantu supaya mentas, tidak miskin,

Emerha

Supaya dia punya mental wirausaha gitu ya?

Nur Hadiyanto

Haá. Iya itu. Ditularkan.

Emerha

Ditularkan ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Ditularkan mental wirausahanya.

Emerha

Berarti beliau itu yang pertama kali mencetuskan itu?

Nur Hadiyanto

Iya. Ini . . . (15:57) ini yang bikin KAKB.

Emerha

Tahun berapa itu Pak?

Nur Hadiyanto

Mulai KAKB itu 2012.

Emerha

2012 ya.

Nur Hadiyanto

Iya. Saya ingat betul. Kalau Pak Aprilia sih masalah hukum ya, lebih ke dia semacam penasihat hukumnya Pemda. Waktu itu beberapa kali Pemda digugat masyarakat terkait Pol PP yang apa, ada Pol PP itu dia mengamankan pengamen huta (16:34) atau dilaporkan dianggap tidak manusiawi, diseret-seret, didorong-dorong, dipukul-pukul. Hehe. Digugat ya Pak April yang maju. Kemudian kebanyakan tentang Pilkada itu Pemda digugat, ini aturan ini gak bener, bikin apa.

Emerha

Di masa silam berarti sudah ada yang di bawah sukses dnegan bantuan beliau saat itu?

Nur Hadiyanto

Kasus-kasus hukum?

Emerha

Iya.

Nur Hadiyanto

Ya sukses kalau dulu. Kayaknya masih kok sekarang ini. Masih.

Emerha

Tapi posisinya di luar sekarang? Bukan tenaga ahli ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Kayak semacam pengacara gitu akhirnya, sewa gitu modelnya.

Emerha

Kalau yang satu ini Pak yang marketing?

Nur Hadiyanto

Marketing Pak Jos Iwan ini ya kita berterima kasih kepada beliau. Hehe. Beliau melahirkan branding the jewel of java, dia yang berjuang apa marketing pemasaran wilayah Kulon Progo.

Emerha

Haá. itu manfaatnya sekarang apa?

Nur Hadiyanto

Dia yang menemukan konsep bahwa ternyata Pulau Jawa, Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kemudian ada Jogja di sini itu tengahnya Kulon Progo. Jadi titik Kulon Progo kalau di tengah dia ke timur bisa, ke barat juga bisa. Itu makanya konsep the jewel of java, mutiaranya Pulau Jawa itu di Kulon Progo. La beliau kayaknya yang berhasil menarik makanya bandara itu ada di Kulon Progo itu. Hehe. Termasuk branding beliau sampai ke Ceko, ke India.

Emerha

Berarti dia letaknya jatuh di tengah Pulau Jawa ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Kulon Progo ini memang iya. Tapi pemikiran itu kan baru dicetuskan oleh Pak Jos ini.

Emerha

Itu tahun berapa dicetuskan ini?

Nur Hadiyanto

2010.

Emerha

2010 ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Dulu banyak konsepnya mau the jewel of java, mau the opolah itu. Ada beberapa konsep gitu ee branding. Tapi kan yang jadi ini terus ya kita berhasil proses bandara ini.

Emerha

Sekarang udah terwujud ya dengan proses bandara itu?

Nur Hadiyanto

Iya. Iya.

Emerha

Bandaranya itu kalau dari posisi Yogyakarta berarti masuk Purworejo itu masuk karena dia jatuh di tengah ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Purworejo dekat karena perbatasan ya. Ini kan Jogja itu bentuknya kayak gini, ini Kulon Progo, terus bandaranya kan di sini. La ini udah Purworejo, ini Kulon Progo, ini Bantul, ini Sleman. Jadi ya Purworejo lumayan kena ini juga Purworejo. Hehe. Lumayan kena.

Emerha

Jawa Tengah kemari ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Bisa kemari. Kebumen, Gombong.

Emerha

Lebih dekat ya nanti?

Nur Hadiyanto

Iya. Kalau dulu kan lokasinya di sini, Adi Sutjipto di Kota pindah ke Kulon Progo.

Emerha

Kalau soal ini Pak rotasi jabatan Pak. apakah sebelumnya kemaren dari mana Pak?

Nur Hadiyanto

Dinas sosial.

Emerha

Dinas sosial. Berapa lama Pak di dinas sosial?

Nur Hadiyanto

Empat tahun. 2013 sampai 2017.

Emerha

Emm. Itu menurut Bapak rotasi jabatan Bapak ke sini pengalaman dari sana itu ada yang maksudnya ada yang bisa diterapkan di sini?

Nur Hadiyanto

Eee nggih banyak saya kira ya. Cuman memang saya kurang tahu apa maksudnya dulu itu pernah ada dibuat SK tentang pola jabatan. Tapi ya akhirnya kan ada jabatan itu kan dirumpun-rumpunkan, rumoun jabatan ini yang bidang keuangan, ekonomi, sosial ini. Tapi sekarang ini anu e tidak dipatuhi artinya orang itu bisa kemana saja gitu lo. Apakah ini pilihan pendekatan bahwa seorang pamong itu dia generalis gitu ya harus tahu segala macam. Artinya memang tidak dipilih suatu pola pembinaan yang spesialistik. Tapi memang saya lihat nek Kulon Progo termasuk yang generalistik. Habis dari Kabid apa mutasi atau Kabid bidlat di BKPP bisa jadi camat. Hehehe. Gitu.

Emerha

Serba bisa.

Nur Hadiyanto

Serba bisa. Hehehe. Saya dari kepala bidang sosial jadi bidang perbendaharaan. Hehe.

Emerha

Mungkin dilihat dari latar belakang pendidikannya?

Nur Hadiyanto

Iya. Dulu justru saya ini akuntansi kok neng bidang sosial, kesasar ini. Ada orang kesasar ini. Hehehe. Tapi ya nggak papa artinya kita cukup banyak belajar banyak hal terutama program-program penanggulangan kemiskinan nggih kita belajar di sana, program-program penanggulangan kemiskinan, kemudian apa ee kemaren tentang transaksi non tunai itu malah kita mulai dari bansosnya. Baru kita sekarang di Pemda secara keseluruhan mulai melaksanakan transaksi non tunai. Padahal di sana sudah lebih dulu dilakukan untuk bantuan sosial. Nggih.

Emerha

Terus menurut Bapak seberapa baik mutasi jabatan itu dibanding yang dulu-dulu Bapak bilang kan masih menggunakan pola jabatan itu? Rumpun jabatan dibanding dengan yang sekarang?

Nur Hadiyanto

Ee tetapi memang ini anu ya, ee tiap pimpinan itu punya style sendiri. Dulu Pak Bupati yang dulu Pak Toyo Sadipo itu beliau lumayan lebih nganu, lebih ke rumpun dan pola itu tadi. Tapi kalau Pak Hasto sekarang ini memang dia pendekatannya generalistik, general tadi. Ee beberapa, tapi ya sama sebenarnya beberapa kali itu kelihatannya juga salah menempatkan orang gitu lo. Walaupun memang kalau tanpa panduan ini saya menilai yang Pak Hasto sekarang ini ee keterjadiannya lebih sering hehe menempatkan orang lebih sering.

Emerha

Setiap bulan ya?

Nur Hadiyanto

Dalem?

Emerha

Setiap bulan pelantikan berarti?

Nur Hadiyanto

Ndak ndak. Ndak setiap bulan sih. Paling satu tahun itu tiga kali apa ya. Dua kali tiga kali. Nggih. Jadi awal tahun itu mesti ada pelantikan, tengah tahun pasti, nanti akhir tahun juga.

Emerha

Berarti mereka itu dilantik general ya, maksudnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan?

Nur Hadiyanto

Kadang-kadang seperti itu. Cuma memang mungkin beliau juga apa kalau anu kita berpikir positif itu ya pengayaan lah istilahnya. Hehe. Pengayaan.

Emerha

Berarti bisa belajar dari jabatan yang lama ke jabatan yang baru?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Nah itu bagaimana? Apa selama ini memang sering orang yang baru itu mengajarkan pengalamannya di jabatan yang lama?

Nur Hadiyanto

Iya artinya bahwa itu memperluas wawasan Mas. Jadi lebih ke memperluas wawasan, jadi bukan intensifikasi tapi ekstensifikasi kalau saya melihat itu. Walaupun saya akuntansi katakanlah dulu tapi dulu pertama kali ditugaskan di bidang sosial juga kok merasa seperti ini, mosok akuntansi tugase di bidang sosial, gak cocok ini. Dan memang ya bingung gitu karena sama sekali blank to gak punya gambaran di dinas sosial tugasnya seperti apa gitu. Tapi ya insyaallah dengan belajar dan memang butuh waktu satu tahun penuh saya

Emerha

Untuk belajar?

Nur Hadiyanto

Heém. Ya wes makanya dalam satu tahun itu anu agak grubak grubuk gitu lo, gak paham lah apa yang dilakukan tapi jalan. Tapi memang kadang-kadang selain itu saya melihat ada penambahan manajemen resiko yang dilakukan oleh Pak Bupati. Bukannya saya sok apa gimana ya. Karena waktu saya dipindah 2013-2014 itu kan focus pemeriksaan BPK itu dia mencermati bansos to, dia mencermati bansos, dia mencermati hiba, hibah dan bansos. Nah itu yang, nah saya merasa oh saya dipindah kesitu itu supaya memperbaiki sistem penyaluran bansos yang dulu masih diberikan secara tunai, dicairkan oleh bendahara, uangnya diamplopi, kemudian diberikan kepada yang penerima itu, saya melihat supaya itu dirubah gitu dengan mungkin latar belakang saya akuntansi, saya bisa melihat itu. Itu dirubah sehingga yang mengenalkan konsep penyaluran bansos melalui perbankan itu waktu itu kami di sana itu. Jadi saya rubah sistemnya bahwa bansos itu tidak lagi dicairkan oleh bendahara, gak boleh bendahara pegang uang tunai apalagi uang bantuan itu gak boleh. Jadi harus dengan model rekening, berapapun dia menerima bantuan, kita kerjasama dengan bank dibukakan rekening cepat, diberikan uangnya cepat, termasuk nanti kita mintai pertanggungjawaban penggunaan dana seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah 2013-2014 meskipun bansos diuplek-uplek, dicermati, dibongkar-bongkar, dikorek-korek gitu semuanya aman. Karena sudah sistem itu, sudah kita sistem lewat bank gitu ya sudah.

Emerha

Berarti ada hikmahnya ya?

Nur Hadiyanto

Iya ada hikmahnya. Dan itu kayaknya disengaja karena waktu saya dipanggil fit and proper tes sebelum mutasi jabatan itu diberitahukan itu gitu. Ini anda dipindah di dinas sosial gitu. nah, nanti tengok tahun depan itu tema pemeriksaan BPK itu tentang hibah dan bansos, pokoknya diusahakan piye carane supaya dibuat aman. Artinya semuanya, kadang-kadang beliau menempatkan orang itu ada hadis (28:13) dan tujuan semacam itu. Jadi tidak semata-mata latar belakang Pendidikan kemudian tapi memang sesuai kebutuhan. Ya saya menilainya itu manajemen resiko tadi. Ini ketika apa ya, yang Pol PP katakanlah kita kan butuh tenaga Pol PP luar biasa untuk bandara ini. Yang ditempatkan disitu yang senior Pak Sumiran, kenapa gak Pak Duwana Heru. Padahal Pak Duwana Heru sudah sekretaris di situ, udah Plt lama di situ tapi kan dia junior mungkin dipandang ya mungkin bagus koordinasi dengan Polres dengan . . . (28:55). Tapi dari sisi disegani di masyarakat nek cah enom ini kan masyarakat kadang, wah cah cilik wingi sore ngeyel gitu. pasang yang senior, hehe kan masyarakat jadi uh rodo hormatlah gitu.

Emerha

Yang gagah ditakuti ya?

Nur Hadiyanto

Ditakuti. Profilnya memang Pak Sumiran rodo koboi jadi uwong rodo takut gitu kan. Kadang-kadang saya melihatnya seperti itu gitu. jadi manajemen resiko. Jadi mana-mana yang tempat-tempatnya rodo beresiko ditempatkan yang kira-kira bisa.

Emerha

Itu dari sisi kelebihan ya Pak?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Kalau Bapak melihat kelemahannya gimana menurut Bapak?

Nur Hadiyanto

Ya kelemahannya gitu. bagi kita yang ditugaskan ini jungkir balik tenan gitu lo le mikir, le belajar, le memahami, njuk

Emerha

Belum selesai belajar sudah dipindah

Nur Hadiyanto

Supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik itu. Ya kadang-kadang jeleknya gitu nek terlalu cepet yo, kadang-kadang kan dipandang wah di sini actionnya nggak cepat, nggak menyelesaikan gitu. Pindah lagi. Kadang-kadang ada yang empat bulan gitu.

Emerha

Ada unsur like and dislike juga mungkin?

Nur Hadiyanto

Like dan dislike nggak ada. Beliau saya nilai obyektif. Cuma dari faktor hehe . . . (30:21). Ada unsur-unsur saudara dan anu. Unsur-unsur saudara itu kadang-kadang ya mempengaruhi.

Emerha

Tapi kan tadi Bapak bilang sebelum diangkat, sebelum dilantik jabatan kan ada fit and proper test itu memang dibikin seperti itu?

Nur Hadiyanto

Ada. Ya tetap ada. Tetapi kan tetap anu ya, segala keputusan kan tetap ditangan walaupun fit and proper test walaupun . . . (30:57)

Emerha

fit and proper test itu melalui apa Pak? Melalui test yang apa itu seleksi pejabat pratama itu bukan?

Nur Hadiyanto

Bukan bukan. Kalau ini sih lebih ke internal ya. Kan yang dilelang jabatan kan eselon dua. Sampai eselon tiga kan hanya proses ini aja di

Emerha

Berarti fit and proper test tadi khusus di eselon tiga sama eselon empat.

Nur Hadiyanto

Iya. Maksudnya fit and proper test yang lebih bobotnya ringanlah. Kalau yang yang eselon dua kan lebih berat artinya lelang, fit and proper test betulan dengan lembaga psikologi UGM dan sebagainya. Kalau yang fit and proper test eselon tiga dan empat ini lebih ringan. Artinya kita di apa diberi surat tugas untuk mengikuti fit and proper test itu, membuat karya tulis, dipresentasikan, nanti diuji di beberapa dihadapan beberapa juri, perjakat itu. Itu.

Emerha

Itu sudah sering dilakukan Pak Bupati?

Nur Hadiyanto

Ya memang selalu itu dilakukan prosesnya.

Emerha

Sepanjang masa jabatannya?

Nur Hadiyanto

Iya. Sejak dulu. Sejak zaman Pak Toyo pun gitu.

Emerha

Oo.

Nur Hadiyanto

Dulu suratnya selembat Mbak Sri yang saya cropkan neng nggon laptop itu lo, seng ono nomer telponnya, dibaliknya ada nomer telponnya. Ha itu. Terus anu minta surat ini kesiapan kita membayar.

Emerha

Nah, terus Pak tadi dari tiga tenaga ahli tadi itu, apakah hasil ide dan pendapat mereka itu sudah didokumentasikan atau dibukukan gitu sebagai suatu pedoman? Itu udah dilakukan?

Nur Hadiyanto

Itu ada dulu. Tapi per sektor e.

Emerha

Per sektor ya?

Nur Hadiyanto

Heém.

Emerha

Jadi selesai kalau dia, tadi kalau marketing tadi berarti ada di posisi?

Nur Hadiyanto

Bappeda. Dia brandingnya the jewel of java, kemudian kenapa tulisannya seperti itu, bentuknya apa, filosofinya apa, warnanya itu apa maknanya. Itu ada di sana satu buku.

Emerha

Ada dalam bentuk satu buku sudah ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Iya.

Emerha

Itu yang bikin siapa? Bappeda sendiri atau yang disatukan?

Nur Hadiyanto

Ya lewat ini, Pak Jos Iwan.

Kok kas Kranggan Mbak. Kas Kranggan ini betul? Nomer rekening satu kosong-kosong dengan nama rekening kas Kranggan.

Emerha

Itu tenaga ahli tadi yang tiga itu Pak selain dimintakan ide dan pendapatnya apakah juga mereka mengajarkan ke pejabat-pejabat itu?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Ada?

Nur Hadiyanto

Iya. Jadi kita itu, nah ini dulu memang anu ya strateginya Pak Bupati yang mungkin kurang terdokumentasi. Artinya porses-prosesnya mungkin kemudian dilupakan karena. Jadi awal-awal Pak Hasto menjabat itu dibentuk tim yang lintas SKPD. Jadi waktu itu tiga tim, tiga tim lintas SKPD. Jadi ada tim ekonomi kerakyatan, ada tim investasi, sama tim penataan Kota Wates. Saya ingat betul kebetulan saya anggota tim di ekonomi kerakyatan waktu itu. Nah, ini anggotanya beberapa apa ya eselon tiga eselon empat di seluruh SKPD, ada eselon duanya selaku pengarah. Itu kita di ini kok, ya semacam dicuci otak di sekolahkan di PSYKP UGM saya waktu itu. Kalau yang tim lain saya nggak tahu, mungkin di UGM di anu yang lain nggih. Kalau yang penataan Kota Wates mungkin yang MPKD lah, di MPKD sana. Kalau saya di PSYKP itu. Ya itu di anu dilibatkan kemiskinan kemudian, padahal saya dulu waktu itu saya masih bertugas di Bawasda beda (36:21). Tapi diminta untuk jadi tim itu tentang kemiskinan dan lain-lain. Strategi. Kita satu tim itu kemudian

Emerha

Berarti ditempatkan diajarkan di PSEKP ya? Bukan di sini ya?

Nur Hadiyanto

Heém. Bukan nggih. Di sana kemudian kita diberi pelajaran itu. Ee dua hari kalau nggak salah waktu itu semacam short course gitu terus brainstorming kira-kira dengan Kulon Progo seperti ini, program apa yang yang bisa diajukan gitu. jadi sebanyak-banyaknya program dan tidak semuanya berhasil lo sebenarnya. Kalau yang airku, bila beli ini kan yang berhasil-berhasil. Yang berhasil itu hanya sedikit, lebih banyak yang tidak berhasil. Tapi ya memang orang harus mencoba kan gitu.

Emerha

Itu setelah mengikuti pelatihan yang di PSEKP itu ada dokumentasinya? Maksudnya hasil pengalamannya itu didokumentasikan?

Nur Hadiyanto

Dalam tim Bappeda yang punya. Atas tiga tim ini hasil karya ini tim ini apa aja ini Bappeda yang punya. Nah itu. Jadi ada. Berapa yang gagal ya senkudaya yang gagal. Jadi senkudaya itu maksudnya mau menyaingi alfamart indomaret yang jejaring itu. Jadi tadi kalau alfamart gerai itu kan ada alfaria trijaya ya yang pemasok dan anu. Kalau ini KAKB warung KAKB KAKB gitu nanti maunya senkudaya yang sentra perkulaka posdaya yang support barang. Kemudian kalau ada barang dari sini bisa dipasarkan ke semua jaringan. Konsepnya seperti itu tapi itu kurang berhasil.

Emerha

Kalau dari aspek transparansi pengelolaan keuangan daerah ada ide-ide dan pendapat para ahli yang diserap dari mereka, dari tiga orang ahli tadi?

Nur Hadiyanto

Tidak. Ini nek beliau-beliau ini asli program. Kalau yang faktor pendukung tadi ini keuangan kan pendukung ya, SDM keuangan. Pendukung pemerintahan itu lewat BPKP tadi. Jadi dengan BPKP itu selain ini, saya itu ikut pelatihannya BPKP itu berapa kali nggih, nggak terhitung. Tiga kali empat kali tentang sistem keuangan daerah. Dulu dari undang-undang 22 yang dulu dengan Permen berapa, undang-undang 99 itu. Hehe. Permen berapa sampai yang sekarang Permen 13 itu.

Emerha

Kemendagri 29?

Nur Hadiyanto

Iya. 29 dulu ya.

Emerha

Sama diganti dengan Permendagri 13 ya.

Nur Hadiyanto

Iya. Itu dulu. Kami dikirim untuk pelatihan sistem keuangan daerah ke BPKP. Dan beberapa juga teman-teman ini saya kira beberapa juga mengikuti yang dengan UGM dulu itu yang LKD-KKD.

Emerha

KKD iya. KKD. Saya pernah ikut itu KKD. Itu dulu pernah ada ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Kursus keuangan daerah sama latihan keuangan daerah. LKD-KKD pelatihan. Ya kalau anu itu sistemnya. Jadi memang dikirim-dikirim gitu, dikirim pelatihan, dikirim kursus, diklat.

Emerha

Menurut Bapak pengetahuan transparansi seperti apa nanti yang dibutuhkan kedepan dalam pengelolaan keuangan daerah?

Nur Hadiyanto

Nggih. Saya kira memang eranya sudah era transparansi ya kebutuhannya ya mendisclose artinya menyajikan. Saya kira yang sekarang didisclose kan baru laporan artinya bahwa penggunaan dapat dari mana, digunakan dimana.

Emerha

Itu belum ya?

Nur Hadiyanto

Yang sekarang itu tahapnya masih keuangan daerah yang didisclose ya, yang dibuka ke publik gitu. Nah, kedepan mungkin anu sampai dengan proses-proses mengapa ini dianggarkan itu juga perlu diungkap di publik.

Emerha

Dari mana datangnya ini, kemana dibelanjakan.

Nur Hadiyanto

Heé. Program ini usulan ini kenapa. Oh ini muncul, kenapa jalan ini yang dibuat, kenapa bukan jalan saya yang dekat rumah saya yang dibuat. Itu kan. Pasti nanti proses-proses itu akan di, selama ini kan ini diserahkan pada mekanisme Musrenbang, mekanisme usulan anggaran Musrenbang dan sebagainya. Tapi mungkin kedepan proses-proses itu harus dibuka ke publik ya. Kalau bisa kok itu. Gak cukup masyarakat itu dilaporin oh ini dapet 100 kita gunakan 150 katakanlah, yang 50 ngutang dari mana gitu. Terus hasilnya seperti ini kan tidak. Tapi kenapa ini dibuat, kenapa itu dibangun, kenapa bukan yang itu.

- f. Wawancara ke-6 dengan Nur Hadiyanto pada 16 Juli 2018, pukul 12.58 pagi di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Topik utama wawancara tentang kendala, penyebab kendala, dan solusi yang sudah dilakukan. Wawancara ini merupakan wawancara yang keenam kalinya tentang topik RM4.

Emerha

Oke Pak yang terakhir. Menurut Bapak apa permasalahan yang dihadapi dari bidang perbendaharaan yang Bapak hadapi sekarang?

Nur Hadiyanto

Gini. Saya menilai lebih ke anu ya, permasalahan Pemkab secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang itu kita itu besar keinginan tapi kemampuan keuangannya kurang gitu ya. Ya barangkali memang ee harus lebih anu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Ya saya kira dengan kita sekarang supaya bandara dibangun nanti berbagai, istilahnya mega proyek kalau di Kuloj Progo itu yo berusaha mengatasi keterbatasan-keterbatasan itu. Yah jadi saya melihat permasalahannya itu berusaha yang penting sumber-sumber keuangan itu bisa dikelola, bisa digali lebih lagi. Dan ini memang ee bukan persoalan di Kulon Progo saja nggih, bahkan mungkin persoalan nasional. Saya menilai bahwa sumber-sumber pendapatan pemerintah itu maksudnya bisa lebih diperluas ee jangan-jangan kita ini salah melakukan pendekatan nggih di masa lalu. Saya menilai kita itu didorong untuk globalisasi, didorong untuk PPP public private partnership itu keliatannya kok banyak merugikan pemerintah malah. Hehehe. Sehingga harusnya pemerintah itu betul-betul bisa mengelola rumah tangganya lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Ya mungkin mendorong sector swasta, mendorong masyarakat. Berperan itu penting tapi lebih penting bagaimana fungsi pemerintah melakukan redistribusi ekonomi, itu yang penting. Dan sekarang secara nasional itu lemah banget pemerintah itu. Sekarang apa-apa diserahkan mekanisme pasar dan sebagainya itu. Saya kira semangat Pak Bupati untuk kemandirian ini kuncinya disitu. Kita mestinya mengurus rumah tangga kita ini lebih intensif lagi, lebih baik lagi. Jangan apa-apa diserahkan swasta apalagi luar negeri, diserahkan pasar. Ternyata kalau kita dulu beranggapan dengan diserahkan pasar lebih efisien itu tidak terbukti gitu. hehehe. Ya kan. Ternyata lebih efisien lebih anu, ndak juga. Artinya ternyata lebih dikuasai oleh pelaku-pelaku, pemodal-pemodal besar. Itu yang mendasari semangat Pak Bupati untuk bela-beli (03:19) Kulon Progo itu. Kira-kira sehingga yang perlu kita lakukan mungkin ini permasalahan yang juga nasional supaya urusan rumah tangga pemerintah ini lebih digali lagi, lebih dikelola lagi dengan baik.

Emerha

Kalau dari aspek pelaksanaan dan pengatasan belanja, apa permasalahannya?

Nur Hadiyanto

Nah, ee ya ini persoalan *rent seekers*, pemburu rente ini masih apa Mas, menjadi persoalan yang besar dikita *nggih*. Artinya saya itu *sok* tanda tangan SP2D kemudian melihat dokumen belanja dnegan foto-foto, dengan *pack*. Kadang-kadang merasa kok ini mahal banget *nek* dikerjakan oleh ee rekanan pihak ketiga itu kan dia harus memperhitungkan pajak, kemudian laba yang diperkenankan, laba wajar yang diperkenankan 10%, pajak 10%, biaya-biaya yang lain. Termasuk mungkin ngasih Pimpronya. Hehehe. Jadi jatuhnya mahal.

Emerha

Masih banyak ya?

Nur Hadiyanto

Ya kalau dinilai apa ya, mungkin secara kasat mata saja *gawean* pemeliharaan kayak gitu kok. Nilainya 100 juta ini lo, haduuh. Hehe. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin masih terjadilah. Jadi persoalan di, karena memang kalau semuanya jadi kewenangan, kita, kita sendiri yang juga terlalu berat *nggih*, *kewewegen* gitu *nek wong Jowo nggih*. Kalau kami sampai harus sampai dengan substansinya, sampai dengan materialnya, barangnya, ngecek yo bukan tugas kami. Artinya itu tugasnya inspektorat kan *donge*. Hehehe. Ngerti.

Emerha

Itu apa penyebabnya bisa muncul rent seekers kayak tadi?

Nur Hadiyanto

Ya saya kira masalah kesejahteraan. Orang pengen sejahtera dengan cara instans, mungkin kemudian gaya hidup juga gitu. akhirnya itu jadi kurang menjiwai profesi pamong, profesi PNS. Nek pengen sugih yo ora dadi PNS gitu masalahe atau PNS sugih itu mestinya punya perusahaan juga, itu punya sambilan juga, apa kebunnya luas gitu baru PNS itu bisa kaya. Tapi kalau hanya PNS tok kok mau kaya itu yo gak bisa kita.

Emerha

Selama Bapak di sini apa solusi yang yang sudah diambil untuk memberantas rent seekers kayak gitu?

Nur Hadiyanto

Ya penyakitnya masih sama e. Kita itu sih udah ada KPK, kemaren ada Tim SABER Pungli, kemudian ada Inspektorat dan sebagainya itu yo anu e,

Emerha

Tetap masih ada?

Nur Hadiyanto

Susah ya Mas ya. Ada juga ya. Susah saya nek anu. Karena itu kita *miss* di, *nek* secara sejarah kan ini akibat dari 350 tahun dijajah Belanda. Hehehe. Makanya lahir amangkurat-amangkurat. Hehehe.

Emerha

Mungkin budaya turun temurun ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Kayaknya kok kalau orang itu lebih berpikir kepada kepentingan bangsa dan negara, berpikir kepada kepentingan generasi berikutnya dan sebagainya itu saya kira agak berkurang ya. Tapi kan orang yang terpikir kepentingan saat ini. Kenapa dulu kemudian Belanda itu sukses 350 tahun di Indonesia ini kan dia mendekati Raja-Raja yang mau bekerjasama. Hehehe. Di sisi lain ada pahlawan-pahlawan Dipenogo, Ki Ageng Serang yang berperang. Kalau semuanya jadi pahlawan tapi gak mungkin, hehehe di dunia ini pasti ada pelanggaran.

Emerha

Tadi seperti SIM (07:33) tadi udah berfungsi di sini?

Nur Hadiyanto

Sudah. Beberapa anu kena OTT.

Emerha

Terus centernya di mana Pak di sini? Yang kelola.

Nur Hadiyanto

Di Inspektorat.

Emerha

Inspektirat yang kelola ya?

Nur Hadiyanto

Iya. Sana. Kemaren yang kena ketangkep itu yang TPR Sermo.

Emerha

Oh sudah ada?

Nur Hadiyanto

Ada ditangkap. Ya itu tapi saya pikir ya hanya dikit. Yang ditangkap yang kecil-kecil kayak gitu. dia itu cuman harga *charge* karcis masuk Sermo itu kan 1500, dia bayarnya 2000 ndak punya kembalian. Akhirnya ya tidak kembalikan, harganya 1500 tapi dibayarnya 2000. Mungkin anggapannya kan wah ini baru satu orang, yang masuk berapa orang. Tapi kan tidak semuanya juga membayar 2000, pasti ada yang bayar pas juga 1500 gitu kan.

Emerha

Itu Tim Saber Pungli itu melibatkan BKAD juga ya?termasuk jadi anggota?

Nur Hadiyanto

Nggak. Tidak tidak. Kita termasuk yang diawasi. Hehehe. Jadi jangan-jangan kalau ngurus pencairan proyek itu ngasih amplopan. Hehehe. Supaya segera dicairkan gitu ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya.

Emerha

Berarti hanya inspektorat, semuanya inspektorat saja yang terlibat? Gak ada SKPD lain?

Nur Hadiyanto

Kayaknya inspektorat, Saber Pungli itu malah bagian hukum. Inspektorat bagian hukum, kepolisian, kejaksaan. Udah itu. Ee *nek* ditanya solusinya seperti apa *piye* yo, karena yo susah. Artinya kita harus memperkuat *character building*. Makanya KULON Progo juga sekarang menetapkan Perda tentang Pendidikan karakter. Waktu itu kita yang pertama lo, Kabupaten yang pertama menetapkan Perda Pendidikan karakter baru kemudian ditiru. Bahkan kemudian Mendiknas menerbitkan peraturan presiden tentang Pendidikan karakter. Dilihat aja tahunnya tahun berapa yang Perpresnya 2010, Perdanya Kulon Progo 2008. Kan duluan kita Pendidikan karakternya.

Emerha

Itu berarti masuk didalam kurikulum?

Nur Hadiyanto

Iya.

Emerha

Mulai darimana Pak?

Nur Hadiyanto

Dari SD. SD, SMP.

Emerha

Apa nama anunya, nama berarti Pendidikan karakter ya?

Nur Hadiyanto

Perda Pendidikan Karakter. Iya. Gitu. karena kita itu wes prihatin banget dengan yang seperti itu. Ya kita bangun mentalitas. Katanya mengapa di Jepang itu TK tidak diajarkan baca tulis hitung, tapi diajarkan antri, caranya nyebrang jalan yang baik karena memang membangun karakter dulu.

Emerha

Iya. Oke Pak untuk sementara itu udah.

Nur Hadiyanto

Nggih.

Emerha

Menyelesaikan temanya. Insyaallah akan saya olah lagi.

Nur Hadiyanto

Hehehe. Anu kemana-mana ya jadinya ya. Hehe. Mungkin njenengan harus cari benang merahnya. Hehehe. Nggih.

Emerha

Heé. Udahlah. Saya . . . (10:53)

Nur Hadiyanto

Tapi memang tadi seperti itu.

- g. Wawancara ke-7 dengan Nur Hadiyanto, pada Senin, 17 September 2018, pukul 12.38 WIB di ruang kerjanya, Ruang Kabid Perbendaharaan. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Nur Hadiyanto

He'e masih... he'e...

Emerha

Cuma masih bisa berubah itu...

Nur Hadiyanto

Dibantai-bantai, heheheh

Emerha

He'e... dibantai-bantai nanti pak, nanti ditanya pak kamu wawancara sama siapa, siapa yang wawancara mana orangnya, hehehehe.

Nah... itu kan iya... di kira... kan bisa dikarang-karang kalo ini, heheheheeh. Rencana saya mau publish pak, jadi saya sudah bikin artikelnya...

Nur Hadiyanto

Hem... kayak apa... naskah publikasinya gitu ya...

Emerha

He'e...

Nur Hadiyanto

Jadi jurnal itu ya... wah... panjang banget...

Emerha

Nah... itu... itu hasil olah data pak saya pakai Nvivo

Nur Hadiyanto

Heheheheeh iya...

Emerha

Yang lamanya di sini pak... olah datanya

Nur Hadiyanto

Ya...

Emerha

Kalo... kalo SPSS kan enak masukin angka kan keluar hasilnya kalo ini butuh... butuh analisis pak...

Nur Hadiyanto

Metode... butuh ketekunan... wah ini wah... ruwet ini..

Emerha

Ini dia hasilnya...

Nur Hadiyanto

Ya...

Emerha

Nah itu saya mau konfirmasi tentang... apa... nama... nama... nama partisipan apakah bapak bersedia kalo misalkan saya tulis lengkap nama bapak di situ, kayak ini saya ada... nah... kayak ini... ada namanya pak... jadi biasanya kan kalo ada yang sifatnya rahasia kan kadang kalo kualitatif itu biasanya inisial aja, tapi kalo nggak ada rahasia-rahasia apa... ya lengkap kayak gitu, jadi saya konfirmasi ke bapak, bapak keberatan tidak kalo saya tulis namanya lengkap. Nama sama jabatan sat.. itu...

Nur Hadiyanto

Ya... e... kalo... di tulis di sini nggak keberatan, ya artinya tapi apakah... ini memang harus ditulis, hehehehehe, ada hahahaha nya...

Emerha

Iya... harus gitu pak.... itu namanya wawancara verbatim pak

Nur Hadiyanto

Oh... hehehehehehe

Emerha

Asli pak, kan kalo kualitatif itu kan alamiah dia, hehehe

Nur Hadiyanto

Ya.... ini... hehehehehe, jawabannya kan sambil bergurau-bergurau, tahu ditulis begitu kan dijawab yang... lebih ini ya... lebih... tertata gitu

Emerha

Oh... nggak apa-apa, he'e saya keluarin, haha nya saya keluarin ya..

Nur Hadiyanto

Ya... maksudnya yang... apa yang...

Emerha

Ya nggak apa-apa... nanti saya konsultasikan ke dosen pembimbing dulu

Nur Hadiyanto

He'e ya... artinya bahwa diambil yang... pokok-pokoknya aja

Emerha

Yang formal aja ya...

Nur Hadiyanto

Ya... yang formal aja...

Emerha

Oh ya...

Nur Hadiyanto

Nggeh... he'em... nek saya e... bersedia silahkan ditulis nama lengkap, tapi ditulis secara formal

Emerha

Yang formal ya...

Nur Hadiyanto

He'e secara formal

Emerha

Okey... yang kedua ini kemaren pak tentang kendala yang... yang... ini e... ini... bapak kemaren saya wawancara, yang NH itu ya... NH...

Nur Hadiyanto

Ya... penyerapan rendah...

Emerha

Nah itu... saya usulkan kalo itu diterapkan ASP disemua tahap...

Nur Hadiyanto

Ya...

Emerha

Menurut bapak gimana, kalo soal ada orang yang... vensiker ya... mereka kan biasanya kan itu terkait dengan badget slidenya kan waktu itu... pada saat penganggaran itu kan bapak bilang kan hystoris, selalu hystoris ya... berarti ada budget slide di situ nah itu diantisipasi dengan ASP

Nur Hadiyanto

Ya... ya... memang... kita sedang menyusun kok ini ASP

Emerha

Oh gitu ya...

Nur Hadiyanto

Ya... jadi...

Emerha

Ini ASP dikombinasikan dengan SHBJ

Nur Hadiyanto

SHBJ ya...

Emerha

Berarti yang dimaksud dengan SHBJ memang betul-betul di survei harganya...

Nur Hadiyanto

Ya...

Emerha

Sesuai dengan kondisi riil

Nur Hadiyanto

Okey... nggeh... nggeh...

Emerha

Iya... jadi saya tawarkan begini pak... saran... saya nanti jadi...

Nur Hadiyanto

SHB semua tahap ya... ini...

Emerha

Okey... yang terakhir saya minta foto

Nur Hadiyanto

Hehehehehehe, siap...

Emerha

hehehehehe

Nur Hadiyanto

dimana

5. Sunarya

Wawancara dengan Sunarya pada 09 Mei 2018, pukul 13.51 wib, di ruang kerjanya, Ruang Kabid Pendapatan. Sunarya adalah Kepala Bidang Pendapatan di OPD BKAD. Saat ini telah dimutasi sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

Q.1. Eksistensi budaya kerja di bidang pendapatan

Emerha

Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten paling akuntabel di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan. Tahun kemaren juga sudah dapat piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau soal peraturan, setiap daerah harus patuh, tetapi ada yang tidak diatur dan ada celah. Kalau dari aspek pendapatan, apakah ada yang tidak diatur dalam peraturan menteri tetapi dilaksanakan sehari-hari?

Sunarya

Tentang pendapatan ya. Menurut kami yang namanya pendapatan, kalau sifatnya pungutan kepada rakyat itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun peraturan bupati. Kalau pajak dan retribusi pasti sudah tidak ada celah lagi. Itu kalau soal pajak dan retribusi. Tapi kalau dari sisi pendapatan daerah lain-lainnya, ya mungkin ada celah karena kami menerima beberapa pendapatan yang memang belum ada, istilahnya belum ada rumahnya sehingga nantinya masuk di lain-lain pendapatan yang sah dalam item kalau dulu namanya pendapatan insidental sehingga tidak ada klasifikasi ini masuk pendapatan mana itu berada. Atau kadang-kadang yang ada suatu pendapatan yang kita tidak tahu siapa yang transfer. Itu ada. Itu mungkin kesalahan dari pengirim/pentransfer maksudnya untuk bayar pajak atau bayar apa, tapi karena dalam berita itu tidak dicantumkan, hanya nama si ini, dari bank ini, dikirim sekian rupiah, tidak ada berita/keterangan ini untuk bayar ini, sehingga kami kesulitan. Masuklah dalam tempat lain-lain pendapatan yang sah. Seperti itu.

Emerha

Adakah budaya, misalkan apabila diatur oleh suatu peraturan, tetapi bertentangan dengan tugas-tugas keseharian kerja pegawai? Spesifik misalnya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa retribusi harus berdasarkan perda, implementasinya di lapangan seperti apa, karena rata-rata masyarakat tidak tahu kalau aturan ada seperti itu, ketika mereka disuruh bayar, mereka bertanya kenapa mereka harus dipungut? Bagaimana kalau seperti itu?

Sunarya

Sebenarnya perda kami, baik retribusi maupun pajak daerah itu sudah terselesaikan dengan baik, artinya masyarakat itu tahu ketika melakukan ini harus ada kewajiban ini. itu sudah tahu. Perkaranya di tingkat lapangan. Kemudian justru malah masyarakat sejauh mungkin kalau bisa menghindar misalnya, banyak hal contoh-contoh semacam itu misalnya, eeh apa, parkir. Oh, ditengok-tengok gak ada petugas parkir, ya sudah gak bayar atau mungkin dari sisi pajak mineral atau golongan C, karena keterbatasan pengawasan mungkin ada penambang yang menjadi wajib pajak kemudian tidak melaporkan produksi yang seharusnya dilaporkan. Itu kan artinya ada saja budaya masyarakat yang semacam itu tapi kalau dari kami, saya tidak pernah eeh apa melihat teman-teman kami ketika bekerja di lapangan tentu berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Emerha

Kalau ada masyarakat yang tidak taat pajak, apa trik atau kebiasaan yang sering dilakukan?

Sunarya

Ehhhh, kami akan tetap melakukan sebagaimana prosedur. Jadi ehhh contohnya yang umum terkait semua masyarakat yang kena pajak bumi dan bangunan kan, kami menetapkan dengan SPT, surat tagihan pajak. Kalau tidak, kalau sampai batas waktu tidak, biasanya petugas kami akan secara intens akan mendatangi kepada wajib pajak kenapa tidak membayar dan sebagainya. Biasanya kalau masyarakat pada umumnya itu membayar pajaknya bagus, tidak terjadi masalah. Tunggakan itu hanya terjadi karena mungkin tidak ada di tempat orangnya, banyak punya tanah tapi di luar daerah, atau mungkin justru malah ehhh apa perusahaan-perusahaan yang kemudian, ehh apa beberapa perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa apa semacam merasa keberatan sehingga mengajukan keringanan dan sebagainya semacam itu.

Emerha

Tadi bapak katakan mereka kan patuh, jadi apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka?

Sunarya

Saya pikir masyarakat itu sudah cukup sadar pajak. Sudah cukup sadar, apalagi sudah lama. Sudah sekian puluh tahun ada seperti itu. Jadi justru kalau masyarakat itu misalnya di triwulan pertama belum mendapatkan surat tagihan pajak PBB misalnya dari berjenjang ya, sampai pak Dukuh itu menanyakan “kok kami belum dapat yo?” Semacam itu mas. Biasanya kalau masyarakat malah semacam itu.

Emerha

Jadi ketika tetangga sudah dapat SPT, yang lain ikut tanya, punya saya mana?

Sunarya

Iya. Kenapa kok saya belum dapat? Mereka menanyakan.

Emerha

Apakah ada cara khusus supaya target-target pajak bisa tercapai?

Sunarya

Ehhh, gini mas. Jadi kami mencatat target itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu ya. Menganalisisnya, sehingga tercantumlah dalam APBD itu target. Pajak ini sekian, pajak ini sekian, retribusi ini sekian. Itu sudah dengan hitungan. Kalau kemudian target itu sampai waktu tertentu dievaluasi, kami ada namanya rapat koordinasi dan evaluasi realisasi pendapatan, mas. Itu mengapa tidak tercapai, sampai bulan ini kok tidak capai sesuai dengan rencana. Ha.. kami gali. Oh ternyata, misalnya ya, misalnya pajak galian C tidak tercapai ini kenapa. Maka kita lihat bahwa oh ini terjadi karena ada pelaporan yang tidak sesuai, maka kami gali kesana. Kami gali kenapa mereka tidak membayar pajak. Tapi kami bisa menemukan bukti bahwa ada yang belum dipajakin maka kami akan menerbitkan namanya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Nah itu kami tagih. Semacam itu. Kami ada upaya semacam itu termasuk setiap tahun kami mengadakan sosialisasi sehingga meskipun mereka sudah tahu, ya perlu kita ingatkan terus. Tidak hanya pajak yang saya sebutkan tadi termasuk pajak restoran, pajak air, dan sebagainya.

Emerha

Rapat koordinasi dan evaluasi itu wajib kah?

Sunarya

Kami ada kegiatan itu memang dan itu di program kami ada kegiatan itu untuk mengevaluasi dari masing-masing SKPD bahwa pendapatan misalnya retribusi pasar dari Dinas Perdagangan, retribusi IMB dari Dinas PU, dan seterusnya. Fungsinya hanya untuk memantau apakah ini sudah sesuai dengan rencana target atau belum. Maka kalau belum maka kita bersama-sama akan menelaah ke dalam, ada apa kok tidak tercapai. Mestinya mereka menyampaikan data dan analisa dan alasan kenapa tidak tercapai. Bahkan lebih dari target pun akan menjadi analisa kenapa lebih dari target, ada apa, sehingga ini untuk mengambil kebijakan manfaat ke depan.

Emerha

Kalau soal sosialisasi seperti yang Bapak katakan tadi, itu memang wajib dan selalu ada anggaran kegiatan sosialisasi?

Sunarya

Di kami ada anggaran sosialisasi.

Emerha

Apakah ada sistem ketika sosialisasi dengan membagi-bagi cara menghitung pajak?

Sunarya

Ohh ada. Ada. Pamvlet kecil-kecil itu loh. Cara menghitung pajak air tanah, cara menghitung pajak reklame, cara menghitung pajak ada semua. Itu sosialisasi kami langsung ke wajib pajak. Ada lagi kami sosialisasi melalui media masa biasanya kerjasama dengan radio lokal. Kemudian sosialisasi dengan memasang iklan layanan publik itu loh mas, kayak billboard-billboard itu loh kan. Ada “bayarlah pajak”, “pembangunan ini berkat pajak anda”.

Emerha

Sosialisasi itu kegiatan wajib juga? Ada anggarannya?

Sunarya

Ohh. Ada anggaran, mas. Kami tidak bisa mengeluarkan biaya tanpa ada anggarannya, mas ha..ha.

Emerha

Kalau soal sosialisasi, apa ada tim yang menyusun materi sosialisasi atau sering didokumentasikan?

Sunarya

Ohh. Semestinya ada. Teman-teman saya biasanya dalam hal SPj ya, nanti ada SPj itu kan harus ada dokumen bukti kegiatannya. Itu ada. Kalau masalah materi biasanya apa sebelum sosialisasi sudah dibuatkan materi. Kalau sosialisasi itu ada narasumbernya, biasanya narasumbernya mesti diminta. Kalau pun bukan sosialisasi pada wajib pajak retribusi misalnya ke mas media tadi apa, radio lokal tadi,

jadi sudah kami bicarakan. Artinya temanya itu sosialisasi itu ini sekarang trus nanti bagaimana sih tema bunyinya apa to, ah itu sudah sebelum keluar. Tidak hanya kami pasrah kepada teman-teman radio lokal, pokoknya ini terserah, gak. Sudah dibicarakan nanti apa yang akan ditampilkan. Itu sudah.

Emerha

Sosialisasi biasanya setiap berapa bulan?

Sunarya

Kalau yang sifatnya klasikal (kelas, pake kelas) itu PBB misalnya, PBB itu 12 kecamatan mas. Dua belas kecamatan sekali. Kemudian kalau penyebaran pamvlet-pamvlet gitu itu gak dihitung bulanan atau kadang-kadang pokoknya misalnya kita mau mengadakan/menengok pendataan baru wajib pajak itu kami kasih misalnya wajib pajak baru yang rumah makan, misalnya kita tidak tahu ada rumah makan baru itu kami berikan pamvletnya, ada kewajiban ini..ini. Seperti itu. Jadi itu tidak ada ikatan berapa kali setahun, tidak ada. Bahkan yang sudah lama pun, sekali bilang lupa kami kasihkan lagi kalau lupa.

Emerha

Untuk mengelola pamvle-pamvlet tersebut, menggunakan sistem informasi?

Sunarya

Ehhh, kalau di website-nya BKAD mestinya ada. Cuma itu apakah sudah diperbaharui atau belum, baru tahun ini. Itu dikelola oleh sekretariat BKAD. Kalau di sekretariat kan informasinya kan banyak, ya tentang pendapatan, kebijakan, dan macam-macam.

Emerha

Apa ada kendala dalam proses pengelolaan pendapatan?

Sunarya

Kendala. Kalau secara administrasi ya ada beberapa di beberapa OPD. Misalnya pendapatan OPD yang besar-besar itu. Misalnya Puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan. Salah satu contohnya itu. Kemudian di kami itu di pajak daerah. Kendalanya dari sisi jumlah dan kualitas petugas, kami kekurangan itu. Misalnya kadang-kadang laporan itu harus diubah/direvisi karena masih ada kesalahan-kesalahan.

Emerha

Bagaimana inisiatif mengatasi masalah tersebut, apakah mengikuti instruksi pimpinan atau bagaimana?

Sunarya

Oh tidak, kadang-kadang justru kalau misalnya oh ini salah, kami kan sebagai koordinator itu di bidang pendapatan. Setiap bulan SKPD pengelola pendapatan itu berkewajiban menyetorkan SPj fungsional pendapatan ke kami. Di sini ada namanya verifikasi atau validasi. Itu kami dan teman-teman ada membentuk tim untuk itu. Sehingga jika terjadi kesalahan, oh ini bukti pembayaran sekian, tertulisnya sekian, pokoknya ada kesalahan. Itu secara teori/secara SOP-nya ya kami harus mengembalikan lewat berjenjang. Oh ini kami membuat surat dari atasan kami kepala. Kepala nanti dikirim ke kepala pelaksana. Di sini kan juga membutuhkan waktu sehari-hari. Mending dengan keberadaan alat mesin yang canggih. Ini tolong dibetulkan ini. Nah back-up data kemudian menarik laporan itu ke sana. Mungkin tidak sampai sehari sudah jadi. Memang kemudian itu SOP, tapi itu lebih cepat lebih baik. Seperti itu. Daripada kami harus melalui antarkepala itu kan jadi lama. Iya kalau kepala yang di sana itu ada di tempat. Kalau tidak ada ya kami harus menunggu disposisi dan sebagainya, jadi lama. Jadi meskipun yang direvisi oleh SKPD sana dan itu harus tanda tangan kepala, tapi kan lebih cepat, prosedurnya nanti tetap resmi. Seperti itu. Tanda tangannya harus cepat.

Emerha

Kalau begitu di bidang pendapatan ada juga bendahara penerimaan ?

Sunarya

Kalau di SKPD BKAD ada bendahara penerima, tapi itu di bawah sekretaris. Di bidang pendapatan namanya itu verifikasi atas SPj fungsional pendapatan. Jadi SKPD misalnya dari dinas perdagangan, itu pendapatannya masuk ke sini. Nanti kan SPj fungsional itu nanti sebagai bahan rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan tadi itu loh.

Q.2. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah

Emerha

Sekarang kita bicara akuntabilitas. Akuntabilitas di bidang pendapatan itu seperti apa?

Sunarya

Aduh bagaimana ya. Akuntabilitas. Berarti kan. Ya menurut saya kami sesuai dengan SOP, mas. Tidak mengada-ada.

Emerha

Bentuk akuntabilitas itu seperti apa? Misalkan jika dikatakan bidang pendapatan harus mempertanggungjawabkan akuntabilitas. Bentuknya seperti apa?

Sunarya

Ya. Misalnya begini. Ah salah satu kasusnya terhadap manipulasi pendapatan tadi. Di dalam peraturan bupati disampaikan bahwa SKPD pengelola pendapatan harus menyampaikan SPj fungsional ke BKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Iya toh. Maka kami, kami kalau sampai tanggal hampir sebelum tanggal 10, maka akan kami hubungi secara personal. Seperti itu. Itu akan memenuhi prosedur tadi kan. Setelah itu kami adakan verifikasi sehingga nanti minggu ketiga kami harus adakan rapat evaluasi tadi itu. Nah rapat evaluasi itu nanti ada misalhnya kalau tidak tercapai ada apa dan sebagainya. Nah itu perlu kami sampaikan dalam rapat sehingga memang seperti itu. Itu kalau dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja kami juga punya kegiatan sesuai dengan DPA.

Q.3. Transparansi dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah

Emerha

Kalau soal transparan bagaimana pak dari sisi pendapatan? Apakah setiap pendapatan yang direncanakan dipublikasikan kepada masyarakat? Misalnya pemda Kulon Progo akan menerima pendapatan sebesar 10 milyar, ini diumumkan ke masyarakat?

Sunarya

Kalau langsung, tidak. Sebab begini mas, bahwa APBD, APBD loh, buku APBD yang di sana terletak target-target pendapatan dan pengeluaran itu adalah konsumsi publik. Memang kemudian tidak dilaporkan kemana, cuman di dalam APBD kan ada setiap tahun ada ringkasan APBD, kemudian dipublikasikan di mas media. Nah tapi bukan kami. Itu pemda secara keseluruhan bersama-sama. Semacam itu. Kalau masalah apakah itu transparan, siapa pun boleh kok mas. Memang kami tidak menempelkan "ini loh targetnya sekian". Tidak. Tapi siapa pun untuk kebutuhan mereka baik itu untuk penelitian, baik itu untuk memuaskan seseorang butuh informasi, ya tidak apa-apa. Ya kita kasih di situ. Ya begitu mas. Biasanya yang datang mahasiswa. "Pak realisasinya sudah mencapai angka berapa sekarang". Itu pertanyaan biasa itu. Tidak ada yang ditutupi kok mas.

Emerha

Jadi transparan itu disatukan semua lewat sekretariat?

Sunarya

Iya. Web-nya. Ya website-nya. Yang namanya APBD, angka-angka itu juga dikonsul dulu karena itu sudah, kalau sudah jadi perda APBD, ya itu sudah milik semuanya. Semua orang boleh melihat. Seperti itu.

Emerha

Ok pak. Topik pertanyaan yang terakhir, ini masalah diskresi. Kalau misalkan ada peraturan bupati atau peraturan menteri lengkap semua diatur, tapi ternyata ada celah yang tidak bisa diatur. Nah itu bagaimana, diskresinya khusus di bidang pendapatan seperti apa? Contohnya bagaimana? Misalkan seperti parkir?

Sunarya

Apa ya. Nah begini mas. Di dalam perda tentang pajak daerah no.6 tahun 2011 yang sekarang direvisi tapi belum jadi misalnya tidak ada yang mengatur masalah keringanan pajak. Tetapi di perbup, nah berarti kan diskresi ini. Perbup mengatur masalah keringanan pajak dengan dalih bahwa sesuai dengan ketentuan umum perpajakan pusat kemudian PP 55, itu pemerintah boleh kok memberi/mengatur masalah keringanan. Itu kan artinya diskresi ada. Seperti itu salah satu contohnya termasuk retribusi menara telekomunikasi. Diskresinya ya memberikan keringanan itu dengan peraturan bupati kemudian diatur oleh peraturan dinas kominfo.

Emerha

Proses pembuatannya itu bagaimana pak? Membuat diskresi apakah ada kajian sebelumnya kemudian diusulkan kepada bupati?

Sunarya

Wah iya. Itu nanti yang namanya peraturan, apalagi peraturan bupati nanti produknya bagian hukum. Kalau peraturan kepala dinas itu juga nanti harus didiskusikan. Artinya harus ada semacam rapat pembahasan yang melibatkan bagian hukum sebagai ahli hukumnya di tingkat kabupaten. Bukan melulu kami sendiri. Mereka mas kalau itu secara teknis mereka. Kami ikut di dalam perdiskusian itu. Kalau semua pengelola retribusi ke sini ya kami tidak kuat karena ada banyak.

Emerha

Apakah diskresi yang diambil tadi kalau misalkan ada pemeriksaan BPK, pernah jadi temuan?

Sunarya

Ya. Pernah. Tapi itu bukan jadi temuan karena itu adalah kebijakan pemerintah. Kalaupun kemudian itu BPK menganggap salah, kebijakan itu kemudian direvisi. Tapi belum pernah ada.

Emerha

Kalau diskresi itu melibatkan pengeluaran, misalkan investasi uang? Misalkan seperti pajak telekomunikasi tadi bagi hasil pajaknya, seberapa besar jumlah yang diterima itu diatur?

Sunarya

Diatur mas. Jadi begini loh mas. Untuk pungutan retribusi mengenai telekomunikasi seperti yang sebut tadi berdasarkan peraturan daerah yang kemudian keluarlah surat ketetapan, namanya surat ketetapan retribusi daerah. Ah semacam itu mas. Itu angkanya pasti. Semua diatur. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi mas, yang namanya memungut uang rakyat dalam bentuk pajak dan retribusi itu harus ada aturan dari peraturan daerah.

6. Eko Catur Setyawati

- a. Wawancara dengan Eko Catur Setyawati, pada Jumat, 25 Mei 2018, pukul 08.40 WIB di ruang kerjanya. Catur adalah PPK SKPD BKAD petugas akuntansi dan telah menduduki jabatannya selama 4 tahun sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme akuntansi yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Proses akuntansi di PPK

Emerha

Itu udah berapa lama di itu jadi PPK?

Eko Catur Setyawati

PPK akuntansi?

Emerha

Heé.

Eko Catur Setyawati

Emm 2008 sampai 2011. . . . (03:56). Terus saya kuliah, kuliah lagi 2016 jadi mbalik lagi ke mahasiswa. 3 tahun sama 2 tahun.

Emerha

2 tahun ya?

Eko Catur Setyawati

Heé. Hehe.

Emerha

Itu proses pembuatan akuntansinya gimana di PPK?

Eko Catur Setyawati

Ee iya. Sekarang kan semua by SIMDA ya Mas ya. Setiap transaksi yang itu apa yang dirasa dari bendahara penerima dan bendahara pengeluaran itu kan nanti sebenarnya akan terbentuk otomatis.

Emerha

Di SIMDA ya?

Eko Catur Setyawati

Ketika SIMDA si bendahara memasukkan *entry* -an PPK atau kalau yang bendahara penerima terutama itu penerimaan suka STS kan . . . (04:49) itu dia akan otomatis membentuk jumlah dengan catatan dia ngekliknya udah benar ya. Kadang kan ada yang salah ngeklik, atau salah rekening bank itu akan terbentuk otomatis. Tapi kalau yang transaksi aset, aset persediaan, kayak mutasi aset itu nanti kita buat jurnal manual.

Emerha

Manual?

Eko Catur Setyawati

Heém. Pakai jurnal manual. Kita *ngentry* bisa kredit itu lo Mas.

Emerha

Itu dasarnya apa untuk bikin jurnal di SIMDA?

Eko Catur Setyawati

Hem gimana?

Emerha

Dasarnya apa untuk bikin jurnal di SIMDA?

Eko Catur Setyawati

Dasarnya?

Emerha

Heém.

Eko Catur Setyawati

Maksudnya dasar hukum atau?

Emerha

Iya. Apakah SPP ini sudah kan bendahara pengeluaran itu kan membuat SPj?

Eko Catur Setyawati

Bukti pengeluaran?

Emerha

Iya. SPj apa fungsional itu. Itu yang jadi dasar pembuatan jurnal?

Eko Catur Setyawati

Ee kalau jurnal itu dia akan terbentuk otomatis. Jadi ketika nggak nggak dari SPj fungsional. Jadi setiap bukti-bukti transaksi keluar dia akan membentuk jurnal.

Emerha

Jadi dia otomatis jadi jurnal itu?

Eko Catur Setyawati

Ha terus nanti saya ee itu udah bener belum jurnalnya itu *diposting*.

Emerha

Tapi bukti dasar dari jurnal itu apa?

Eko Catur Setyawati

Ha itu dia akan terbentuk otomatis pake SIMDA itu, dia otomatis.

Emerha

Misalkan dia tulis jurnal?

Eko Catur Setyawati

Misalnya dia belanja, dia mengeluarkan belanja beli ATK kan sebesar 100.000. dia kan di bendahara *ngentry* dari situ, dia akan terbentuk jurnal nanti.

Emerha

Jadi 100.000 akan terbentuk jurnal? Biaya ATK untuk kas?

Eko Catur Setyawati

Sudah terbentuk jurnal. Jadi kita kan masih pakai dua baju *cash to accrual* dan *accrual*. Jadi dia nanti terbentuk jadi dua jurnal. Nah, terus nanti kalau itu sudah diyakini kebenarannya saya *posting*. Nah, dia jurnal itu akan masuk ke besar masing-masing.

Emerha

*Jadi dua jurnal terposting juga? Yang *accrual* sama *cash to accrual*?*

Eko Catur Setyawati

Iya.

Emerha

Jadi ketika ditelusuri buktinya ada?

Eko Catur Setyawati

Buktinya bukti kas keluarnya ya?

Emerha

Iya?

Eko Catur Setyawati

Bukti kas keluarnya di bendahara ada.

Emerha

Itu dipegang PPK juga?

Eko Catur Setyawati

Dipegang bendahara, bendahara PPK.

Emerha

PPK gak pegang bukti fungsional?

Eko Catur Setyawati

Nggak. Jadi kan ada verifikator. PPK fungsi verifikator.

Emerha

Iya. Kan setiap bulan itu kan bendahara kan malah menyerahkan SPj?

Eko Catur Setyawati

SPj fungsional iya.

Emerha

Ke PPK kan?

Eko Catur Setyawati

Iya.

Emerha

Itu ngasih ke PPK ya?

Eko Catur Setyawati

Saya juga ngarsip. Tapi itu kan udah kumpulan-kumpulan transaksi satu bulan.

Emerha

Satu bulan?

Eko Catur Setyawati

Hoó.

Emerha

Nah, itu yang jadi dasar bukti jurnal tadi kan?

Eko Catur Setyawati

Kalau itu nanti kita udah evaluasi.

Emerha

Sudah apa?

Eko Catur Setyawati

Kan kita *accrual*. Jadi setiap kegiatan akan terbentuk jurnal. Kalau dulu waktu belum *accrual* belum pakai SIMDA memang seperti itu. Jadi setiap akhir bulan kita terima SPj fungsional itu to Mas. Kita bikin jurnal tapi sudah akumulatif. Satu bulan sekali gitu lo. Nah, kalau sekarang kan *accrual* jadi setiap transaksi itu kan ada jurnalnya. Setiap ee transaksi penerimaan, pengeluaran, pasti ada jurnalnya per transaksi.

Emerha

Iya. Kalau berarti dibedakan juga antara dia mau . . . (08:19) sama TU?

Eko Catur Setyawati

Ya itu.

Emerha

Itu sama juga otomatis juga?

Eko Catur Setyawati

Otomatis juga. Selama itu dari dua bendahara dia akan otomatis.

Emerha

Lalu bagaimana Mbak bisa tahu kalau jurnalnya itu salah diposting sama SIMDA?

Eko Catur Setyawati

Kalau kalau penerimaan ya biasanya kan itu kan ada kalau bendahara itu ngentry kan itu menu *custom* di SIMDA itu kan misalnya penerimaan pajak reklame dan itu siapa. Keteranganannya seperti. Nanti kan dia terus tag diklik jurnal yang terbentuk apa. Nah, nanti kan bisa dilihat jurnal yang terbentuk seperti apa. Nah, kalau jurnalnya itu salah mungkin dia si bendahara ngekliknya salah. Ketika ngeklik kan bisa kita udah ngetik keterangan pajak reklame tapi pas ketika diklik pajak kisaran bisa jadi seperti itu.

Emerha

Ee berarti jurnalnya itu bisa diprint ya?

Eko Catur Setyawati

Bisa.

Emerha

Jadi dilampirkan semua bukti-buktinya gitu? Nggak?

Eko Catur Setyawati

Ee nanti kita kan jurnal-jurnal itu nanti satu sama jurnal, buku besar satu, Simplus itu kan di print nanti pada akhirnya satu bulan.

Emerha

Oh tidak tidak dilampirkan sama bukti-buktinya ya?

Eko Catur Setyawati

Bukti-bukti kan sudah di bendahara.

Emerha

Sudah di bendahara?

Eko Catur Setyawati

Haá. bukti-bukti udah di bendahara.

Emerha

Tapi arsip di PPK ada?

Eko Catur Setyawati

PPK ada. Iya. PPK fungsi akuntansi.

Emerha

Kapan kapan ee pertanggung jawaban bendahara itu jadi jadi belanja di SIMDA itu?

Eko Catur Setyawati

Eem, di GU kan.

Emerha

Ketika di GU kan? Berarti ada SPj nya?

Eko Catur Setyawati

Haá. diakui belanjanya itu ketika di GUKan. Tapi kalau bebannya setiap transaksi sudah diakui bebannya.

Emerha

Kan di situ ada pengesahan penggunaan anggaran Mbak?

Eko Catur Setyawati

Haá.

Emerha

Ha itu apa bukti pengesahan?

Eko Catur Setyawati

Pengesahan?

Emerha

Di PPK itu, PPK yang bikin kan?

Eko Catur Setyawati

Tapi bukan fungsi saya Mas.

Emerha

Bukan ya? Di bagian mana?

Eko Catur Setyawati

Bukan bukan akuntansi. Pengesahan PPK?

Emerha

Iya. Pengesahan LPj itu?

Eko Catur Setyawati

SPj?

Emerha

Iya. SPj bulanan itu bendahara. Kan dari dasar itu kan dianggap udah jadi belanja kan. Nah, itu baru bisa dibikin jurnalnya?

Eko Catur Setyawati

Jurnal itu kan *accrual* to Mas. Jurnal itu *accrual*. Jadi setiap kali transaksi itu harus dijurnal. Gak nunggu kita pengesahan dulu.

Emerha

Gak nunggu pengesahan?

Eko Catur Setyawati

Iya. Jurnal itu kan *accrual*. Tapi pengakuan belanja itu kalau sudah di GUKan. Belanja lo ya. Kalau beban setiap transaksi harus diakui. Kayak . . . (11:26), kayak misal akhir tahun itu kayak listrik, listrik kayak sekarang itu kan untuk bayar bulan kemaren kan. Nah, itu di akhir bulan kan kita harus nyatat yang untuk desember. Sementara kita kan belum bayar, bayarnya di Januari tapi kan pengakuan bebannya tetap harus dilakukan di desember.

Emerha

Sudah diakui duluan ya?

Eko Catur Setyawati

Hoó hoó. Tapi belanjanya nanti tahun berikutnya. Kayak gitu. Kalau belanja diakui GU kalau beban setaip transaksi terjadi itu sudah jadi beban.

Q.2. Pelaporan keuangan di PPK

Emerha

Berarti pembuatan jurnal itu setiap bulan langsung buat jurnal. Jadi ketika pembuatan laporan keuangan gimana untuk SKPD?

Eko Catur Setyawati

Tahunan?

Emerha

Iya. Tahunan.

Eko Catur Setyawati

Maksudnya gimana gimana?

Emerha

Jadi maksudnya Mbak waktu bikin laporan keuangan tahunan itu sudah nggak input-input jurnal lagi kan? Langsung?

Eko Catur Setyawati

Kan transaksi gak Cuma dari bendahara Mas. Kan ada persediaan, ada set, ada apa itu yang pendapatannya jadi piutan. Kita kan pendapatannya jadi piutang nah itu harus sampai mana-mana. Dan itu yang *by* SIMDA kita kan harus menyajikan data yang manual, katakanlah nilai piutang 100.000. 100.000 itu harus disajikan diperhitungkan di . . . (12:50) siapa itu kan harus digitukan.

Emerha

Mbaknya pakai manual apa? Excel?

Eko Catur Setyawati

Excel.

Emerha

Excel. Oke. Mbak selain di PPK itu Mbak pekerjaannya apa? Selain di PPK itu apa tupoksinya?

Eko Catur Setyawati

Sistem itu paling cuma bantu-bantu aja.

Emerha

Emm. Mbak itu lebih banyak di PPK aja ya?

Eko Catur Setyawati

PPK aja menyita waktu sekali Mas. Soalnya . . . (13:22)nya BKAD. BKAD itu cuma . . . (13:27) di sini. Ya dengan berbagai kerumitannya dan ee kerumitannya. Terus yang aset juga kan gak ada BKAD aset yang tadinya di SKPD BKAD.

Emerha

Emm gitu ya?

Eko Catur Setyawati

Iya. Jadi ini penerimaan ya yang mau diinput ya?

Emerha

Ini SKPD BKAD. Kurang . . . (13:48).

Eko Catur Setyawati

Itu juga di tata usahakan di situ? Di PPK?

Emerha

Iya. Iya. Jadi bukan hanya pengeluaran ya, penerimaan juga?

Eko Catur Setyawati

Iya. Dan kita penerimaan, ada penerimaan kalau yang SKPD gak ada penerimaan ya ringan sih. Lebih sederhana transaksinya. Karena yang berat itu di penerimaan ya sampai reload data.

Emerha

Kalau koordinasi ke bidang Aklap gimana kalau setiap PPK itu?

Eko Catur Setyawati

Jadi tiap beberapa waktu itu kita ada rapat koordinasi petugas akuntansi itu pasti ada.

Emerha

Ada?

Eko Catur Setyawati

Ada. Pembinaan terus kita rekon.

Emerha

Membahas setiap setiap berapa kali rekon?

Eko Catur Setyawati

Ee kalau yang pasti itu setiap tri wulanan. Pasti itu.

Emerha

Tri wulanan ya Mbak ya. Berarti sudah jadi neraca per tiga bulan itu?

Eko Catur Setyawati

Kalau neraca kita yang sudah neraca itu setahun.

Emerha

Setahun ya?

Eko Catur Setyawati

Heém. Akhir tahun. Kalau yang lain RA LO tiap bulan kalau neraca setahun.

Emerha

Berarti LRA sama LO adanya tiap bulan?

Eko Catur Setyawati

Ada. Ada. Kalau neraca tiap tahun.

Emerha

Itu yang sering di rekon ke sana?

Eko Catur Setyawati

Heé.

Emerha

Ke AKlap?

Eko Catur Setyawati

Heé. Soalnya menyusun neraca itu sangat berat sekali Mas. Hehehehe. Itu aja masih gak keliatan.

Emerha

Itu akuntansi bisa bikin neraca ya?

Eko Catur Setyawati

Ha?

Emerha

Kan bukan akuntansi itu gimana belajarnya?

Eko Catur Setyawati

Saya kan dulu SMEA.

Emerha

Oh lulus SMEA ya? Jadi tahu?

Eko Catur Setyawati

Iya. Jadi lebih lebih anu sih *neg* lebih malah lebih ee apa ya masuknya itu lebih kalau dalam dari SMEA lo Mas sampai general debit kreatif.

Emerha

Itu memang memang untuk jadi BPK itu syaratnya harus dari SMEA? Ada ketentuannya?

Eko Catur Setyawati

Nggak juga sih. Nggak.

Emerha

Nggak juga ya?

Eko Catur Setyawati

Nggak. Nggak.

Emerha

Berarti kalau ganti PPK berarti harus ajarin lagi yang baru?

Eko Catur Setyawati

Haá.

Emerha

Oh gitu. Mbak dulu berapa lama bisa menyesuaikan?

Eko Catur Setyawati

Ya itu lerning by doing pada akhirnya ya. Jadi kan gini Mas, setiap tahun itu kan masalah yang dihadapi gak mesti sama. Kesulitan-kesulitannya itu pasti anu gak sama setiap tahunnya itu. Pasti yang tim pendamping kan dari Aklap tim pendamping yang setiap ada masalah ini gimana ada keadaan seperti ini mohon solusinya misalnya. . . . (16:25) itu seperti apa sebenarnya kayak kayak gitu. Pas

misalnya katakanlah kita jurnal kayak gini, debit gini, kredit gini tapi pas dientry ke SIMDA sampai LO neraca gak balance nah itu ada solusi lagi gimana gitu lo.

Emerha

Kalau peran pimpinan gimana? Apa Mbak selalu dimonitoring langsung dari pengguna anggaran atau dari PPK? Gimana?

Eko Catur Setyawati

PPK. Kita kan di bawah PPK to Mas. PPK baru. PPK dulu to udah gak ada masalah.

Emerha

Jadi ketika pembuatan laporan di SIMDA itu ada paraf PPK juga? Banyak juga ada?

Eko Catur Setyawati

Ada. Kalau jurnal, buku besar, itu yang tanda tangan PPK. Kalau yang laporan keuangan LO, RA, neraca itu PA penggunaan anggaran.

Emerha

Berarti kalau tanda tangan BPK Mbak cuma paraf ya? Kan yang tanda tangan kan Ibu Ratna?

Eko Catur Setyawati

Iya. Saya gak paraf. Yang paraf Kasubbag.

Emerha

Kasubbag?

Eko Catur Setyawati

Iya

Emerha

Lalu PPKnya di mana?

Eko Catur Setyawati

Saya? PPK gak ada.

Emerha

PPKnya gak ada parafnya?

Eko Catur Setyawati

Nggak. Saya gak paraf. Yang tanda tangan beliau. Saya kan cuma pembantu beliau. Pembantu BPK fungsi akuntansi.

Emerha

Bagaimana membedakan membedakan tugasnya Mbak selaku PPK dengan bukan PPK?

Eko Catur Setyawati

Gimana maksudnya?

Emerha

Maksudnya kan mbak selaku PPK tidak paraf di situ. Berarti tidak bertanggung jawab kalau misalkan ada apa-apa?

Eko Catur Setyawati

Ya tapi kan kalau itu hubungannya dengan akuntansi pelaporan keuangan pasti tertuju ke saya, ya Cuma satu.

Emerha

Oh gitu ya? Oke. Waktu pemeriksaan BPK ikut diperiksa juga?

Eko Catur Setyawati

Iya

Emerha

Di seputar akuntansinya itu caranya tapi kan semuanya sudah melalui SIMDA?

Eko Catur Setyawati

Tapi kan kita CaLK-nyanya kan gak dari SIMDA. Dan di CaLK itu kan macem-macem to Mas. Setiap kejadian itu harus diterangkan. Masnya historisnya alasannya katakanlah dia kayak belanja misalnya anggarannya sekian cuma terealisasi sekian kenapa, itu kan kita harus menjelaskan disitu. Ya pokoknya sedetail mungkin supaya tidak perlu pertanyaan. Jelaskan di situ.

Emerha

Tadi ada yang manual di situ, itu gimana mau menyatukan kalau mau bikin LO dan LRA?

Eko Catur Setyawati

Itu cuma kayak data-data itu data-data pendamping. Jadi misalnya kita di neraca itu ada piutang. Ada piutang sebesar berapa nanti kita ada *worksheet*nya yang manual. Piutang itu di di

Emerha

Jurnalnya?

Eko Catur Setyawati

Jurnalnya kan udah by SIMDA.

Emerha

Gak pakai SIMDA?

Eko Catur Setyawati

Kalau jurnal penyesuaian-penyesuaian kita *entry* ke SIMDA kalau ada penyesuaian lo karena rekon atau apa apa. Itu kita *entry* manual di SIMDA juga.

Emerha

Di SIMDA juga tapi entry nya manual ya?

Eko Catur Setyawati

Haá haá. ada mneu entry nya.

Emerha

Ada menu entry nya ya? Manual ya?

Eko Catur Setyawati

Iya. Ada menu entry . Iya. Dan di situ ada menu entry *accrua*l sama biasa. Gitu

Emerha

Berarti yang otomatis itu yang di bendahara ya? Yang pembuatan SPP itu ya?

Eko Catur Setyawati

Heém. Itu otomatis.

Emerha

Berarti belanja semua pengeluaran?

Eko Catur Setyawati

Belanja dan penerimaan.

Emerha

Belanja dan penerimaan. Oh, penerimaan ada juga? Otomatisnya?

Eko Catur Setyawati

Ada. Di sini ada. Iya.

Emerha

Yang input gimana itu bisa otomatis?

Eko Catur Setyawati

Dia yang input bendahara penerima. Jadi setiap transaksi di SIMDA juga.

Emerha

Di sini ada bendahar penerimaan juga?

Eko Catur Setyawati

Ada.

Emerha

Oh. Berarti dia yang input SIMDA udah itu otomatis jadi jurnal di situ ya?

Eko Catur Setyawati

Haá.

Emerha

Eem. Oke Mbak itu untuk sementara itu dulu. Oke. kalau misalkan datanya masih kurang saya wawancara lagi ya?

Eko Catur Setyawati

Iya.

Emerha

Tapi boleh saya minta nomer?

Eko Catur Setyawati

HP?

Emerha

Ada WA? Kalau ada saya bisa hubungi biar gak mengganggu.

Eko Catur Setyawati

Oke.

- b. Wawancara ke-2 dengan Eko Catur Setyawati, pada Rabu, 19 September 2018, pukul 10.20 WIB di ruang sekretariat, Kantor Bappeda. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Iya... nanti ini juga saya mau minta fotonya mbak untuk lampiran

Eko Catur

Semuanya kayak gitu ya...

Emerha

Ya... semuanya saya minta kemaren... mana ya... udah terlepas

Eko Catur

Nanti untuk SIPE

Emerha

SIPE... ya... nanti tulis saja di situ, nanti saya ganti

Eko Catur

Kayaknya itu Widya Mataram deh

Emerha

Siapa...

Eko Catur

Widya Mataram Universitasnya bukan UMY

Emerha

Oh... siapa tadi Sutanti?

Eko Catur

Sutanti...

Emerha

Oh... tulis aja di situ, nanti saya ganti..., saya Cuma mau minta ini saja, kan kemaren sudah saya transkrip wawancaranya dengan mbak, ini kayak gini kan... ini kan ditulis nama, apa... mbak keberatan kalo ditulis nama

Eko Catur

UWMY

Emerha

Saya Cuma mau minta ini saja, kan kemaren sudah saya transkrip wawancaranya dengan mbak, ini kayak gini kan... ini kan ditulis nama, apa... mbak keberatan kalo ditulis nama

Eko Catur

Hem.... kayak... kayak kutipan gitu ya...

Emerha

Ya... kutipan... kan memang ketentuan penulisan kan gitu harus ada sumbernya, jadi saya tulis namanya mbak lengkap atau...

Eko Catur

e.... ngikut saja he'e...

Emerha

Nama lengkap ya... nggak ada yang... maksudnya hasil wawancara itu nggak ada yang sifatnya rahasia gitu ya..

Eko Catur

Ya...

Emerha

Biasanya kan kalo ada rahasiakan biasanya kita inisial aja gitu, mbak bisa lihat hasil transkrip wawancaranya, jadi kan saya tinggal ambil dari situ pindah kan ke sini kayak gitu. Kemaren juga si... siapa Ibu Atik kemaren kan juga dikoreksi

Eko Catur

Hem... gitu ya...

Emerha

Dilihat dari hasil wawancara, hasil wawancaranya, maksudnya beliau bilang kalo yang ini nggak usah di munculkan, ini nggak usah. Soalnya kan masalahnya kan laporan saya ini kan keluar gitu...

Eko Catur

Di publish to...

Emerha

Ya... he'em kalo cuman...

Eko Catur

Ini temanya apa to mas kok dari Bappeda, dari BKAD, nggak umum gitu to e...

Emerha

e... apa... topik saya judulnya "Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Budaya Organisasi"

Eko Catur

Berarti itu dari awal perencanaan sampai pelaporan gitu

Emerha

Iya... jadi yang saya soroti itu Cuma transparansi sama akuntabilitasnya

Eko Catur

e... nggak... e... kok di sini hampir semua Kabid ikut ya...

Emerha

He'em...

Eko Catur

He'em... jadi yang untuk prinsip keuangannya kok di SKPD tapi kan dia kan mengampu PPKAD kan he'e, maksudnya apa itu Cuma jadi sampling yang PPKAD kami yang di sini sebagai sampling atau gimana?

Emerha

Ya...

Eko Catur

Jadi sampling

Emerha

He'em...

Eko Catur

Sampling yang SKPD

Emerha

Di sini ada 14 orang... di... Bappeda 5 orang, eh... 4 orang di Inspektorat...

Eko Catur

Biasanya dari sisi perencanaan anggaran kan

Emerha

Iya... jadi... lebih banyak... lebih banyak di sini saya karena fokusnya kan hem..., kayak gini kan. Yang saya olah kata-katanya beda kalo kualiti kayak kuantiti kan pake angka-angka

Eko Catur

He'em... itu nanti di... anu... di... itu pake angka di... gradenya satu, dua

Emerha

Nggak... nggak... nggak gitu ini software untuk olah katanya, nah... kayak gini nah... ini nanti saya comot pindah ke sini, jadi saya tulis nama, namanya mbak jadi di bawah itu mungkin Eko Catur atau di singkat atau gimana. Tapi di sini nggak ada yang sifatnya rahasiakan saya...

Eko Catur

Ini memang bahasanya kayak gini ya...

Emerha

Iya... ini alami ini asli...

Eko Catur

Nanti tampilnya di sini juga akan seperti itu

Emerha

He'em...

Eko Catur

Wah, heheheh. Coba lihat, jadi di... dia bahasa itu aplikasi ya... eh... mana ini. Bahasa, kok jadi... bahasa.. bahasanya aneh

Emerha

Ya... karena ini transkrip, namanya transkrip verbatim, jadi dari menggerakkan tangan, kalo dalam kualitatif itu kan semuanya ada... ada maknanya

Eko Catur

Hem... bingung sendiri terserahlah... hehehehehehe. Bahasanya tuh kayak bahasa translating... biasanya kita translate dari bahasa inggris kita translate pake google translate gitu lho

Emerha

He'em, kayak tadi kan mbak bilang e... apa... ada... hahahaha itu juga di transkrip

Eko Catur

Ehm... malah jadi pusing saya, hehehehehe

Emerha

Kuali itu lamanya di sini, hehehehe

Eko Catur

Jadi... e... dari sini kan ya... jadi seperti apa olahan dari keterangan saya

Emerha

Nah nanti...

Eko Catur

Sudah... sudah ada belum draftnya di situ yang... pas wawancara saya jadi seperti apa

Emerha

Ya... nanti sekalian, tapi ndak... ndak semua juga saya anu... mana yang.... hanya yang relevan aja

Eko Catur

Ini kok... kayak gitu kan tahu, nggak... nggak anu banget...

Emerha

Soalnya saya sering kuantitatif ya... kalo dulu waktu di... kuliah

Eko Catur

He'e... EP itu angka...

Emerha

Pake SPSS apa itu segala macam

Eko Catur

He'e... yang diolah angka

Emerha

Ya... yang diolah angka pake regresi statistik

Eko Catur

He'e regresi...

Emerha

Ini nggak ada

Eko Catur

Pake ekonometrika

Emerha

Ini kata-kata

Eko Catur

Ini nggak... nggak terlalu SPY nggak nggak gitu ya..?

Emerha

Nggak ada... nah...

Eko Catur

Coba dilihat itu aja... mas yang sudah... sudah jadi

Emerha

Nah ini...

Eko Catur

Nah... masak kayak gini ditampilkan kayak gitu mas...

Emerha

Yang mana...

Eko Catur

Ya... e.... bahasanya...

Emerha

Ya... he'e... kalo kualitatif seperti itu nanti alami, beda seperti kuantitatif... kuantitatif kan di rekayasa gitu kan Cuma diambil sample kayak gini

Eko Catur

Nggak di... tata... lebih... menjadi bahasa yang lebih anu... nggak gitu...

Emerha

Nggak bisa... kalo itu yang asli itu kita sebenarnya kita nggak boleh... nggak boleh ditambah nggak boleh dikurang

Eko Catur

Ya... terserah mas lah...

Emerha

Ya... tapi maunya gimana yang formal gitu kan

Eko Catur

Nggak maksudnya aneh juga to bahasa kayak gitu lho mas

Emerha

Oh ya... coba nanti saya...

Eko Catur

e... jadi supaya ada... pokoknya intinya ada... kenapa rapat di dinas itu rutin, terus itu tenanan itu pasti ada, intinya kayak gitu lho...

Emerha

Ya...

Eko Catur

Maksudnya lebih di... bahasanya itu... lebih di baku gitu lho...

Emerha

Ya... yang baku ya...

Eko Catur

He'e

Emerha

Sama dengan mbak itu juga kemaren, siapa... mbak siapa... mbak Mey...

Eko Catur

Meylani ya...

Emerha

Mbak Mey...

Eko Catur

He'e...

Emerha

Pilihan... kan, apalagi kan dekan baru juga dari S3

Eko Catur

He'e... bahasanya... jadi kayak bahasa nggak... pasti itu ragu-ragu gitu lho... e... ya... coba di... bahasanya lebih menjadi lebih baku... he'em..

Emerha

Ya... okey... jadi saya, mungkin saya ilangkan saja yang... e... apa segala macem...

Eko Catur

e... beberapa... e..... jadi ada... ada... rapat koordinasi untuk petugas akutansi tri wulanan yang... rutin itu tri wulanan kalo misalnya ada... misalnya ck... ada khusus gitu pas ada pemeriksaan kita koordinasi khusus kita membahas apa gitu ada... tapi yang... pasti itu kan pasti ada...

Emerha

Ya...

Eko Catur

Persiapan akhir tahun pasti ada laporan kayak gitu... Cuma itu to yang keluar untuk saya

Emerha

He'em... contohnya satu itu.. itu yang...

Eko Catur

Bahasanya aja...

Emerha

Nggak apa-apa ya... jadinya ya... okey...

7. Iswandari Artiningsih

- a. Wawancara ke-1 dengan Iswandari Artiningsih pada 11 Mei 2018, pukul 13.30 di ruang kerjanya. Iswandari adalah Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) di BKAD sampai dengan saat ini.

Q.1. Budaya kerja organisasi di bidang akuntansi dan pelaporan

Emerha

Yang pertama Bu, budaya kerja.

Iswandari

He'e.

Emerha

Di lingkup bidang akuntansi.

Iswandari

Iya.

Emerha

Iya, eee, apakah itu kalau soal akuntansi kan sudah diatur dalam Permendagri.

Iswandari

Ada.

Emerha

Itu kan jelas, tapi, kan kemungkinan pelaksanaan di lapangan itu pasti ada yang belum diatur.

Iswandari

Iya.

Emerha

Nah, itu bagaimana Ibu menyikapi?

Iswandari

Oke, jadi, singkat cerita tentang kebijakan ya?

Emerha

Iya, betul, kebijakan?

Iswandari

Iya, saya ceritain dulu dari PP 71 turun ke Permendagri eee ini kalau khusus yang akuntansi kan ke yang 64 ya Penerapan SAP di Pemda.

Emerha

Permendagri 64?

Iswandari

He'e, saya nggak cerita dari yang pengelolaan keuangan, itu terlalu luas karena Permendagri 13 kan luas banget.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kalau yang mengkhusus, kalau yang Njenengan kersake kan yang khusus akuntansi ya.

Emerha

Iya, khusus akuntansi saja.

Iswandari

Iya, itu Permendagri 64 tapi Permendagri 64 itu kan terlalu, apa ya istilahnya, mungkin kalau dipahami oleh teman-teman pelaksana akuntansi di sini istilahnya Petugas Akuntansi di SKPD ada 45 SKPD tahun ini 2017, saya bicara 2017 ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Oke, pasti sangat kesulitan sehingga kebijakan kami adalah menurunkannya menjadi Peraturan Bupati. Nanti bisa dilihat di JDIH, dulu berawal dari Nomor 24 tahun 2014.

Emerha

He'e.

Iswandari

Sudah beberapa kali dilakukan perubahan penyempurnaan eee--

Emerha

Berarti misi (01:37) ya?

Iswandari

Bukan, itu masih di kebijakan.

Emerha

Masih kebijakan awal ya

Iswandari

Tataran kebijakan, iya.

Emerha

Awal kebijakan ya?

Iswandari

Tapi, walaupun kebijakan kita sudah berbau teknis jadi bisa dikatakan ada unsur teknisnya juga. Harapan kita lebih applicable, mudah dipahami karena terus terang petugas akuntansi semua SKPD kan beragam, tidak semua orang Jurusan Akuntansi, tidak semua sarjana akuntansi. Kadang yang sarjana akuntansi atau jurusan akuntansi pun memahami akuntansi keuangan daerah itu sulit karena banyak hal-hal khusus, tidak semata-mata seperti yang kita terima di bangku kuliah dulu gitu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Karena kalau kita di kuliah kan basisnya usaha nggih, nah, itu. Maka apalagi banyak kebijakan yang diatur batasan-batasan, ada peraturan-peraturan dan itu yang harus diakomodir. Nah, itu kan juga harus disinkronkan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Maka kita bikin Peraturan Bupati. Tadi saya bilang di JDIH ada, 24 2014 perubahannya terakhir 43 2000-- saya lupa, 2016 kalau nggak salah ya, kalau nggak '15, he'e, 2000--, 2016. Terus nanti terakhir lagi kita disempurnakan terutama di akun persediaan itu di 62 2017 yang 43 tadi 2016 nanti bisa dilihat di JDIH. Kalau bukan di JDIH biasanya di upload-nya 2 Perbub-nya dan lampirannya, yang dicermati lampirannya saja gitu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Karena Perbub-nya kan cuma bla-bla pasal-pasal. Nah, setelah turun sampai ke Perbub biasanya kita sosialisasi, sosialisasi. Kemudian kita kan pakai mediana aplikasinya Simda.

Emerha

Simda.

Iswandari

Dari BPKP kita sama dengan Bantul cuma 2 di Jogja kita Simda. Nah, jadi, sambil kita belajar Simda kita juga mensosialisasikan kebijakan. Apa yang aturan main kita jalani di Simda itu juga kita sinkronkan dengan kebijakan. Jadi, sama-samalah isinya nggak cuma kebijakan seperti teori akuntansi tapi juga ada unsur teknisnya. Kemudian kita bantu teman-teman di SKPD itu ada kita semacam, apa ya, eee, kayak modul gitu loh. Nah, harapannya kan mungkin lebih poin-poin saja kita ambil. Kan, kadang orang kalau baca peraturan, baca, walaupun itu sifatnya penting tapi malas gitu ya. Nah, akhirnya kita sarikan lagi, ada kita punya modul terus itu yang kita gunakan ke SKPD. Tetapi, kalau kita cuma berdasar ke dokumen kayak gitu-gitu, nggak terlalu efektif banget. Kecuali SDM-nya memang sudah menguasai akuntansi, rajin baca gitu, nggak masalah. Tapi, kebanyakan sudah tua-tua juga mungkin dari sisi teknologi IT kurang juga. Akhirnya kita bisanya pendampingan. Jadi, setiap saat walaupun nggak ada namanya judul kegiatan pendampingan akuntansi, kami melakukan itu. Setiap saat mereka bisa datang kemari, kerja di sini sambil kami dampingi kalau nggak tahu langsung tanya kita ajarin, oh, ini jurnalnya ini, apa, seperti itu. Kemudian kita kasih pemahaman ya akhirnya harapan kita taruhlah mereka mengerjakan karena berrobot ya, karena disuruh. Tetapi, karena berulang jadi hafal dengan sendiri jadi bisa. Itu teknik kami di sini gitu dan sekarang teman-teman di SKPD bagus, mereka bisa ngerjain pakai Simda. Walaupun mungkin kalau diibaratnya diuji teori akuntansinya nggak terlalu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Tapi, kan, kalau di lapangan dalam dunia kerja itu lebih ke aplikasinya kan, applicable-nya di lapangan ya. Itu mereka lumayan bisa gitu. Jadi, kalau misalnya tahu dapat contoh oh, saya dapat hibah nih ambulance dari Pusat gitu ya, dari Kementerian. Mereka tahu kalau itu harus dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional, mereka sudah tahu gitu. Terus sudah tahu kalau aset tetap itu harus disusut tahu. Karena ya itu tadi, pertama kita kasih tahu, oh, ini ada aset tetap disusut klik ini, klik ini. Tapi, lama-lama mereka karena sudah tahu nah mereka tahu. Memang ketika ada pergantian personel atau kemarin kan SKPD-nya rombak-rombak nih.

Emerha

Iya.

Iswandari

Baru, nah mesti ada organisasi yang baru, ada petugas yang baru, nah itu kita memang khusus. Tapi, ya, itu tadi nanti lama-lama harapannya bisa.

Emerha

Iya.

Iswandari

Yang lain bisa pasti semua bisa.

Emerha

Termasuk yang bukan akuntansi?

Iswandari

Hampir semua bukan akuntansi (tertawa).

Emerha

Hampir semua, ya?

Iswandari

Iya, tetapi--

Emerha

Itu kenapa? Memang kurang yang jurusan akuntansi?

Iswandari

Kalau, gini, mungkin dialami juga di semua Pemda bahwa SDM itu terbatas. Kalau kita maunya yang duduk jadi petugas akuntansi pasti orang minimal latar belakang akuntansi, D3-lah, atau mungkin yang lulusan SMEA karena ada yang sepuh-sepuh juga.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nah, tapi kan kita nggak bisa seperti itu kalau, kalau di Pemda ya. Akhirnya kita, istilahnya gini, ya apa adanya SDM yang ada diberdayakan oleh masing-masing SKPD. Jadi, ada yang bukan orang ekonomi, apalagi akuntansi, ada yang cuma lulusan SMA. Tapi, ya, itu nyatanya bisa jalan sampai hari ini, sampai hari ini bisa jalan kita sudah WTP dari 2013.

Emerha

'13, ya?

Iswandari

He'e, nah, itu kan ya karena masing-masing tadi itu komitmen, Mas. Komitmen itu dari atas sampai bawah. Atas itu ketika kita di bawah ada kesulitan ya namanya SDM mungkin ada yang bandel, ada yang gimana, kan kita ngejanya ke atas eh tolong dibina seperti itu. Kemudian misalnya dari BKD Kepegawaian BKPP dia punya mata anggaran untuk diklat, pelatihan, nah dia koordinasi dengan kita. Ayo, kita punya dana sekian mau kirim ke diklatnya Kemendagri atau ke Diklatnya PKP siapa nih yang mau disertakan ya kita kirim orang yang belum pernah diklat. Harapannya kan yo walaupun nggak maksimal tapi paling nggak ada input-lah.

Emerha

Iya.

Iswandari

Ada input, ada pengalaman, nah harapannya nggak cuma ini saja sih, nggak cuma bisa di sini saja disuruh ini-itu tapi ada informasi dari narasumber lain yang didapat paling nggak kan kayak gitu. Akhirnya, ya semua petugas akuntansi sudah pernah ikut beberapa kali ikut itu diklat atau pelatihan tentang akuntansi seperti itu. Jadi, kita kerjasama atau misalnya kebetulan kalau di sini karena kita kan BKAD itu SKPK di SKPK itu jadi kayak koordinator gitu ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Seluruh SKPD, kita punya eee anggaran misalnya untuk rapat-rapat koordinasi. Nah, dengan anggaran yang terbatas saya bisanya tri wulan 1 kali gitu kan. Kita kumpul semua petugas SKPD nah kita materi kita berikan apa yang kita rasa urgent gitu. Misalnya sekarang oh lagi urgent misalnya penata usahaan persediaan gitu ya. Nah, pada moment itu kita ngobrolin persediaan, dari A sampai Z pelan-pelan, harapannya mereka dengar dulu kemudian sedikit-sedikit paham. Kalau ada permasalahan apa, nah itu nanti sharing-nya di sana. Jadi, benar-benar kita mengefektifkan forum-forum kayak gitu karena cuma itu yang kita punya gitu.

Emerha

Itu koordinasi pendampingannya itu setiap saat ya Bu?

Iswandari

Setiap saat, kita, mungkin istilahnya cuma kegiatan pendampingan gitu ya, tapi sebenarnya kita membuka pintu setiap saat monggo ke sini kalau ada kesulitan gitu. Boleh lewat telepon ataupun mau WA, mau email, boleh

Emerha

Berarti sasarannya itu PPK ya?

Iswandari

Eee, istilahnya kalau di sini--

Emerha

Yang mengerjakan akuntansi di SKPD?

Iswandari

Iya, petugas akuntansi.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nek di SK-nya jabatannya PPK SKPD.

Emerha

PPK SKPD.

Iswandari

Fungsi akuntansi.

Emerha

Fungsi akuntansi.

Iswandari

He'e, karena kalau cuma dibilang PPK SKPD itu berarti sekretaris.

Emerha

Iya.

Iswandari

He'e, yang dia punya sub lagi, fungsi akuntansi atau bahasanya sederhana kita petugas akuntansi itu. Nah, jadi teman-teman di sini, saya terbatas bertujuh sama saya untuk 45 SKPD, 21 Puskesmas, 100 eh 300 sekolahan. Nah, itu cara kita seperti itu misalnya kayak Dindik, Dindik punya 300 sekolahan, saya kan nggak mungkin.

Emerha

Iya.

Iswandari

300, akhirnya kita minta tolong Dindik, lakukanlah apa yang kami lakukan kepada SKPD. Jadi, kayak berjenjang, mereka paham, jadi mereka yang turun ke sekolah, mereka yang bina sekolah. Ada aplikasi segala macam di Dindik. Nah, itu karena dia tahu yang dilakukan setelah dia lihat kita melakukan apa ke SKPD. Dinas Kesehatan dia punya 21 puskesmas, saya minta, saya kalau ke sana sendiri nggak, nggak, nggak cukup nih waktu dan tenaga, uang juga nggak ada. Tolong sebagai koordinator puskesmas lakukan hal yang sama, iya, mereka koordinasi. Nah, tetapi, ketika mereka akan terjun ke sub-subnya itu mereka koordinasi dengan kita. Contoh kita sekarang kita ke Dinkes nih, saya minta data kas dong, data kas itu seharusnya seperti ini gitu ya, harus misalnya pendapatan dipisah per jenis pendapatan dan segala macamnya, kita kasih tahu. Akhirnya mereka turun ke puskesmas dengan membawa form yang sama misalnya. Nah, itu karena mereka tahu kebutuhannya dia juga to. Nah, akhirnya di puskesmas ngerjain tapi kan nggak melulu ke kami walaupun tetap kami tetap kami membuka pintu untuk puskesmas. Kadang mereka juga ada yang langsung kemari gitu kan sama saja kayak gitu. Terus aset, aset kan ada bidang aset.

Emerha

Iya.

Iswandari

Saya nggak mungkin dong ke pengurus barang, terlalu banyak 45 SKPD, pengurus barangnya. Akhirnya teman-teman di aset bantu kami, mereka koordinasi untuk aset, untuk persediaan. Nanti hasilnya di transfer ke kita angkanya. Jadi, saya nggak pernah ngitung-ngitung aset saya nggak pernah. Karena dibantu oleh teman-teman di aset, seperti itu. Dan di sana juga ada Simda, karena hari gini kalau nggak dibantu Simda repot ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Gitu, jadi seperti itu.

Emerha

Berarti teknisnya itu setiap petugas akuntansi itu dikasih laptop ya?

Iswandari

Kalau--

Emerha

Untuk Simdanya.

Iswandari

Iya, biasanya semua petugas akuntansi itu punya laptop.

Emerha

Karena mereka mau ke sini harus--

Iswandari

Iya, Simda itu bisa dibuka di SKPD.

Emerha

Oh, bisa dibuka, ya?

Iswandari

He'e, jadi nggak harus mereka kerja di sini atau buka di sini. Jadi, di SKPD-nya ada, bisa gitu loh, dan nggak harus dengan laptop misalnya dengan komputer PC biasa bisa gitu. Hanya saja kalau ada trouble kesulitan ya mereka komunikasi, gitu.

Emerha

Hmm, kayaknya sering itu.

Iswandari

Iya, kita--

Emerha

Kalau ada petugas akuntansi yang malas misalkan SKPD A ini kok belum masuk laporannya? Itu gimana cara penanganannya?

Iswandari

Oh, ya, nggih, eee kalau misalnya ada yang kok telat nih.

Emerha

Iya.

Iswandari

Biasanya nek menurut aturan di Permendagri itu kan tanggal 10 bulan berikutnya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nah, itu kita pendekatan dulu, ini masalahnya apa gitu to. Kalau nggak bisa ke sini dikerjakan di sini gitu. Ketika nanti dia oh saya masalahnya ini-ini-ini-ini misal oh saya belum selesai ini karena mungkin data dari pengurus barang SKPD-nya belum masuk.

Emerha

Iya.

Iswandari

Akhirnya kita bantu koordinasi, saya ngomong sama bidang aset, tolong dong pengurus barang SKPD A dikondisikan karena datanya dibutuhkan oleh petugas akuntansi. Nah, saya ke yang PPK SKPD tadi sebagai atasannya. Saya juga menyampaikan hal yang sama tolong dikoordinir internal Njenengan antara petugas akuntansi dan barang karena datanya harus sama seperti itu dan kita ada misalnya kayak forum-forum koordinasi sampai ke PPK SKPD tadi yang bosnya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Sekretaris ya biasanya kalau di SKPD itu.

Emerha

Iya, sekretaris.

Iswandari

Nah, kita sampaikan ke mereka tapi biasanya yang menyampaikan atasan, kepala BKAD gitu ya karena levelnya biar lebih tinggi gitu to. Bahwa di sebuah SKPD koordinator ada di tangan dia gitu. Maka minta tolong kita ajarin, dulu awalnya gitu, kita ajarin, koordinasikan antara pengurus barang semua bendahara, penerimaan-pengeluaran, dan petugas akuntansi agar semua informasi itu mengalir, segala informasi mengalir. Contoh kalau ada belanja yang sudah terealisasi dilaporkanlah oleh bendahara pengeluaran ke petugas akuntansi ya walaupun dokumennya tetap dimulai dari pengeluaran tapi informasinya mengalir ke akuntansi. Karena akuntansi harus menjurnal segala macam. Nah, kalau cuma orang-orang ini yang koordinasi kan nggak maksimal akhirnya kita minta PPK SKPD-nya itu yang harusnya jadi koordinator. Dia harus mengkondisikan di SKPD-nya masing-masing, kita kasih tahu seperti itu dan alhamdulillah lumayan. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa kita yang bersangkutan dulu, petugas yang kita kejar, ada masalah apa, kalau sampai dia yang bilang oh ya saya punya masalah ini dan tidak bisa kita bantu ternyata kok mentok nih nggak bisa, kita lari ke atasnya. Ini ada kondisi seperti ini karena ini internal Njenengan tolong diselesaikan, seperti itu gitu. Dan syukurnya jalan sih sampai hari ini, nggak pernah ada yang ibaratnya nggak terselesaikan itu nggak ada.

Emerha

Itu jalur, jalur komunikasi dan jalur koordinasi itu memang sudah diatur ya Bu misalkan tadi Ibu berkoordinasi dengan PPK.

Iswandari

He'e.

Emerha

Dia kan jabatan sekretaris.

Iswandari

He'e.

Emerha

Nah, itu Ibu langsung ke sana atau bagaimana melalui kepala SKPD?

Iswandari

Langsung.

Emerha

Langsung ya?

Iswandari

Iya, kemudian kita kan kalau forum-forum begitu misalnya forum koordinasi dengan SKPD, oh, hari ini kita maunya koordinasi sama PPK misalnya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Ya, sudah kita undang semua PPK nanti kita berikan hal-hal apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau akhir tahun gitu ya, ya kita bilang ayo akhir tahun kami dibantu untuk mengkondisikan SKPD-nya, koordinasi semua lini ya kan, baik barang maupun keuangan karena kita mau menyusun laporan keuangan seperti itu. Terus nanti kadang di forum, kalau kita kesulitan lagi saya lari ke atasan dong.

Emerha

Iya.

Iswandari

Iya, kan, kepala BKAD, kan ada grup kepala-kepala. Nah, nanti komunikasinya kepala, kepala memerintahkan. Misalnya saya sudah nagih, Pak kok masuk-masuk, saya sudah nagih. Nah, nanti ditolongin eee, kepala sama kepala gitu kan. Anu loh, kami butuh data ini, kok teman-teman Njenengan kok belum, oh ya nanti dia di internal mengkondisikan sehingga nyuruh ke bawahannya dikoordinasikan selesai, angkanya masuk ke saya, seperti itu.

Emerha

Iya, dalam proses koordinasi itu Bu, apa tidak ada hambatan misalkan dengan PPK itu kan dia selaku sekretaris?

Iswandari

He'e.

Emerha

Jabatannya berarti 2 kan melekat, sekretaris kan eselon 3.

Iswandari

Tiga, he'e.

Emerha

He'e, kabad eselon 3B apa nggak ada rasa kayak gitu misalkan lah saya ini sekretaris loh, kenapa begitu.

Iswandari

Oh, nggak, nggak, biasa kok.

Emerha

Nggak ada ya?

Iswandari

He'e, biasa, kalau di sini biasae (tertawa)

Emerha

Oh.

Iswandari

Nggak ada, nggak ada kendala kayak gitu nggak ada.

Emerha

Nggak ada ya?

Iswandari

He'e, jadi, ya enak saja gitu kadang saya cuma tinggal telepon, ayo tempatmu belum ngumpul ini misalnya gitu kan, besok ya gitu, iya, atau nggak dibantu, saya telepon. Kadang kita, nggak pakai, seringnya kita jarang rapat ya.

Emerha

He'e.

Iswandari

Karena ya itu tadi keterbatasan dana paling isone itu tri wulan sekali gitu kan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nah, kalau sehari-hari itu ya sudah main telepon, telepon, mohon bantuan ini, mohon bantuan ini dan mereka iya, biasa.

Emerha

Iya, itu kebiasaan koordinasi itu sejak kapan ya Bu? Apakah sejak dapat WTP itu atau sebelum itu sudah, sudah berjenjang ya?

Iswandari

Oh, sebelumnya sudah. He'e, sebelumnya sudah.

Emerha

Sebelumnya sudah seperti itu ya, sudah jadi kebiasaan ya?

Iswandari

Sudah kita lakukan dari dulu, iya, he'e, itu gitu.

Emerha

Oh.

Iswandari

Terus misalnya nek kita BKAD itu kan link kerjasamanya sama Inspektorat nah kadang kita juga koordinasi sama Inspektorat gitu kan, itu gitu loh, sudah biasa gitu.

Emerha

Kalau untuk hal-hal yang misalkan ada ketika kadang kan akuntansi itu kan bisa disebut muara.

Iswandari

He'e, he'e.

Emerha

Kadang penyelewengan yang di bidang anggaran sama perbend itu kan nggak, nggak akan ketahuan.

Iswandari

Oh, ya, he'e.

Emerha

Tapi, pas di-input di akunnya baru ketahuan.

Iswandari

Iya, he'e, sering.

Emerha

Nah, itu bagaimana Ibu--

Iswandari

Oke.

Emerha

Sering dapat itu?

Iswandari

Iya, contoh kasus ya.

Emerha

He'e.

Iswandari

Saya kan harus mencatat aset tetap.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nah, ternyata ada realisasi belanja modal itu di bawah nilai aset tetap.

Emerha

He'e.

Iswandari

Padahal kebijakan kita kalau yang di bawah nilai kapitalisasi, itu kan tidak masuk aset tetap.

Emerha

Iya.

Iswandari

Seharusnya itu kemarin dianggarkannya tidak di belanja modal tapi di belanja pemeliharaan.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kodenya sudah beda to. Akhirnya hal-hal seperti itu kita sampaikan.

Emerha

Jadi, belanja bareng.

Iswandari

He'e, di barang saja gitu kan, kita sampaikan. Misalnya kalau kita punya forum nggih rapat semua bidang gitu ya. Nah, itu kita sampaikan, halo bidang anggaran ini ada kesalahan penganggaran loh kemarin 2017 misalnya di SKPD A harusnya ini ngak belanja modal tapi barang jasa karena, nah, teorinya kan kita sampaikan. Dan itu pembelajaran kita juga ke teman-teman di anggaran gitu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Oke, sekarang tolong tahun berikutnya dan seterusnya kalau pas penyusun RKA, penyusunan anggaran mohon dicermati kayak gitu.

Emerha

He'e.

Iswandari

Dan itu juga dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Biasanyaa yang kejadian seperti itu. Terus kalau misalnya lagi nyusun-nyusun anggaran, di sana kan yang tugas ya anggaran, tugas. Nah, terus ada nih SKPD ngajuin anggaran untuk apa gitu ya, dia mungkin ragu, dia langsung konfirmasi ke aset boleh, ke sini boleh misalnya ini ada kegiatan ini loh, nganggarkan ini, rekeningnya yang pas apa ya. Kalau dia pasang rekening ini boleh nggak terus kita diskusi ke teman-teman anggaran, wah nggak, tanya dulu itu barangnya mau ke mana. Oh, diserahkan ke pihak ketiga ke kelompok tani, oh, berarti nggak boleh di belanja modal, harus di belanja barang. Karena niat awalnya memang diserahkan ke kelompok. Nah, akhirnya di sana ketika Des anggaran itu memakai informasi dari kita seperti itu. Dan itu sudah, sudah sering terjadi. Jadi, kita kasih catatannya apa, kita sampaikan gitu.

Emerha

Terus kalau sudah terlanjur salah seperti itu?

Iswandari

Oh.

Emerha

Jadi temuan nggak ya itu?

Iswandari

Kalau terjadi kesalahan paling kita nek masih bisa--

Emerha

Kan sudah, sudah dibayar nih.

Iswandari

Iya.

Emerha

Sudah terjadi.

Iswandari

Kalau belanja kan tidak bisa dikoreksi.

Emerha

Iya.

Iswandari

Belanja itu ya apa adanya, tetap dia terlaporkannya di belanja modal. Tetapi, nanti teman petugas akuntansi di SKPD itu ketika menyusun laporan keuangan dia harus memberikan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

Emerha

Oh.

Iswandari

Itu kan tidak terpisahkan to dari laporan keuangan bahwa realisasi belanja modal itu lebih saji sekian karena untuk kegiatan ini menghasilkan barang ini seharusnya diserahkan ke pihak ketiga kemarin salah nganggarkannya harusnya di belanja barang. Tetapi, dari sisi aset sudah dibenarkan karena tidak menambah aset seperti itu. Tapi kalau untuk realisasinya potretnya tetap di belanja modal. Nah, itu kita sudah memberikan pembelajaran itu ke semua petugas akuntansi dan sampai hari ini mereka bisa.

Emerha

Berarti jadi temuan BPK ya?

Iswandari

Belum tentu.

Emerha

Belum tentu?

Iswandari

Kalau misalkan BPK itu kalau misalnya memeriksa kan sampling.

Emerha

Iya.

Iswandari

Sampling SKPD sampling kasus, kalau dirasa poin itu di SKPD itu penyajiannya cukup karena kan tadi sudah dijelaskan di CLK biasanya tidak diangkat sebagai teman.

Emerha

Oh, yang penting ada disclosure-nya ya.

Iswandari

Iya.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kan dia yang utama itu full disclosure kalau pemeriksaan BPK itu kan yang penting wajar bukan benar.

Emerha

Iya.

Iswandari

He'e, begitu, he'e.

Emerha

Oke, Bu, terus tadi masalah pelatihan apakah orang-orang petugas akuntansi yang dikirim ikut pelatihan itu setelah mereka pulang apakah ada semacam itu membagi-bagi ilmu, ya, saya loh sudah dari ini.

Iswandari

He'e.

Emerha

Di ke teman-teman atau ada sistem--

Iswandari

Oh, di SKPD-nya masing-masing?

Emerha

Iya, termasuk di sini.

Iswandari

Oh.

Emerha

Di Akuntansi.

Iswandari

Eee kalau di SKPD ya saya nggak tahu ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Karena kondisinya masing-masing, tapi bisa jadi iya gitu.

Emerha

Oh.

Iswandari

Mungkin secara sambil ngobrol nggih to, antara petugas akuntansi sama pengurus barang kalau diskusi soal angka pasti oh ini harusnya gini loh, kan itu sama saja dengan transfer knowledge kan.

Emerha

Iya, transfer knowledge.

Iswandari

Secara informal kalau di sini sama saja kalau misalnya saya ada admin Simda.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nah, itu habis pelatihan admin ketika ada ilmu baru nanti dia juga share ke tamn-teman oh sekarang kalau ini, seperti ini gitu, sebenarnya harusnya begini, oh, ini nggak boleh pakai akun ini karena apa.

Emerha

Iya, benar ya.

Iswandari

Kan kadang kalau di aplikasi itu agak beda sedikit nggih dengan teorinya.

Emerha

Berarti yang secara formal belum ada ya transfer knowledge-nya?

Iswandari

Kalau formal itu biasanya gini, ketika ada hal-hal baru kita pernah juga sering melakukan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Ada hal baru yang memang kita harus share ke SKPD, admin saya pulang dari BPKP.

Emerha

He'e.

Iswandari

Karena habis ikut pelatihan, wah ini Simda 2018 ini ada hal baru nih gitu to.

Emerha

Iya.

Iswandari

Harus kita ajarin ke SKPD kita kumpul.

Emerha

Oh.

Iswandari

Tadi kan saya punya forum koordinasi. Nah, pada moment itu kita share apa yang baru, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya seperti itu. Paling nggak kita sosialisasi dulu, kita minta SKPD coba.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nanti kalau ada kesulitan ke sini gitu saja. Jadi, sebenarnya tetap kita lakukan sesuai kebutuhan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Iya. Kadang kan saya punya anu, teman-teman sini ada grup WA yang isinya semua petugas akuntansi dan khusus buat kerjaan.

Emerha

Oh, khusus ya.

Iswandari

Jadi, iya, khusus buat kerjaan.

Emerha

Jadi, ada apa-apa lewat situ saja?

Iswandari

Jarang ada orang ngobrol, nah, kalau misalnya gini, saya bilang ke teman admin bilangin ke SKPD-nya misalnya hari ini mereka harus input saldo awal, jurnalnya ini sama ini, debet ini, kredit ini. Nah, itu lewat WA sudah share dicoba bisa gitu kan. Tapi, ketika ada yang sulit monggo ke sini, nah, kayak gitu, seringnya kayak gitu.

Emerha

Oh, gitu ya.

Iswandari

He'e, jadi misalnya yang tahun kemarin punya saldo, kas sebenarnya pengeluaran kan ada yang harus dieksekusi untuk jadi saldo awal di tahun berikutnya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Itu ada caranya, nah itu kita share di WA, ayo input, caranya begini, buka ini, buka ini, itu sudah lengkap di WA, dicoba dululah gitu. Ketika bisa ya sudah nggak usah ke sini tapi kalau ada kesulitan yuk ke sini.

Emerha

Itu mulai kapan? Sudah lama ya?

Iswandari

Sudah lama.

Emerha

Sudah lama ya?

Iswandari

He'e.

Emerha

Bagus ya.

Iswandari

Sudah lama. Karena lebih efektif begitu soalnya kalau kumpul-kumpul itu nek rapat okelah, segala waktu iya.

Emerha

Kita manfaatkan teknologi to.

Iswandari

Kalau nek forum rapat kan kadang saya ngundang hari ini ada yang nggak bisa.

Emerha

Iya.

Iswandari

Barengan sama tugas lain atau apa, atau sayanya yang nggak bisa nah kayak gitu.

Emerha

Oh, oke.

Iswandari

Lebih efektif kalau pakai media sosial. Terus teman-teman di aset juga sama.

Emerha

Sama.

Iswandari

Di bidang sana ke pengurus barangnya juga. Di-share oke hari ini update Sim baru, nah itu di share, copy ini, ganti ini konviknya dan semacam itu, juga sama.

Emerha

Oh, berarti antarbidang misalkan aset sama akuntansi ada proses otomatis nanti ada proses rekonsiliasi saldo ya?

Iswandari

Ada, he'e, iya, rekonsiliasi. Kita juga minta ke SKPD lakukan hal yang sama. Kami saja di level SKPKD di level Pemda kita rekon, apa lagi mereka di SKPD.

Emerha

Itu inputnya setiap bulan ya Bu?

Iswandari

Kalau di saya setiap bulan.

Emerha

Setiap bulan ya?

Iswandari

Iya.

Emerha

Jadi, ketika ada yang tidak cocok langsung ketahuan kan.

Iswandari

He'e, kelihatan, he'e, kelihatan

Emerha

Jadi--

Iswandari

Walaupun mereka kerja di SKPD.

Emerha

Iya.

Iswandari

Kalau ada yang nggak cocok admin saya nangkap. Oh, ini kok ditutup selisih gitu ya, ya sudah.

Emerha

Iya, sehingga rekonsiliasi di akhir tahun nggak terlalu susah ya?

Iswandari

He'e, harapannya kayak gitu, gitu.

Emerha

He'e.

Iswandari

Itu.

Emerha

Oke, Bu, kita beralih ke topik lagi.

Iswandari

He'e.

Q.2. Akuntabilitas dalam konteks proses akuntansi

Emerha

Tentang akuntabilitas Bu.

Iswandari

He'e.

Emerha

Menurut Ibu akuntabel, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan itu seperti apa Bu?

Iswandari

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan itu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Ketika data bisa dengan transparan disajikan dan diakses oleh berbagai daerah yang membutuhkan.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kemudian tidak ada informasi yang menyesatkan dan ya semuanya jelas ada dokumen sah yang mendasari dari data yang disajikan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Emerha

He'e.

Iswandari

Contoh sekarang pendapatan saja.

Emerha

He'e.

Iswandari

Ya, kan, kalau ada laporan pendapata oh saya terima retribusi persampahan sekian. Itu kan di laporan pendapatan pasti kelihatan siapapun bisa lihat. Nah, dia berani menyajikan laporan itu pasti didukung oleh surat tanda setoran, tanda bukti pembayaran dari wajib retribusi seperti itu. Maka ketika itu bisa dipertanggungjawabkan masuk diseleksi data bisa diakses semua orang, tidak ada informasi yang menyesatkan karena kalau Njenengan lihat di APBD kita dan di laporan pertanggungjawaban kita kan semua informasi rigit.

Emerha

Iya.

Iswandari

Persampahan itu di pasar mana saja, pasar di terminal mana saja ada. Nah, itu kan bagian dari akuntabilitas.

Emerha

Itu ada, ada tim khusus ya untuk itu?

Iswandari

Nggak, nggak.

Emerha

Nggak ada?

Iswandari

Iya, kita komitmen.

Emerha

Jadi, siapa, siapa yang bertanggungjawab atas itu?

Iswandari

Eee, kita komitmen bersama semua SKPD dan kan sudah tupoksi nggih.

Emerha

He'e.

Iswandari

Tupoksinya dia sebagai bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, petugas akuntansi. Nah, itu yang kemudian terakumulasi menjadi penyajian sebuah data yang valid, akurat, bisa dipertanggungjawabkan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Maka tadi saya bilang kita eee melalui PPK SKPD kita minta tolong bangunlah koordinasi yang kuat di dalam internal semua SKPD. Karena kalau sesama teman saja kan susah tapi kalau ketika ada yang nuani.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nah, itu kan lebih enak jalannya, gitu. Terus hal-hal yang krusial kita sampaikan. Pokoknya sharing informasi di internal SKPD saya, saya juga bilang, halo bidang pajak, bidang pendapatan, bidang perben, kalau ada apa-apa saya diceritain. Jadi, saya tahu gitu kan karena informasi itu nanti harus saya sajikan di laporan keuangan Pemda.

Emerha

He'e.

Iswandari

Nah, seperti itu, gitu.

Emerha

Kalau bentuk akuntabilitasnya apakah ada dibuat laporan keuangan setiap bulan atau per tri wulan?

Iswandari

Kalau laporan realisasi anggaran tiap bulan.

Emerha

Iya, tiap bulan?

Iswandari

He'e, nggih, terus nanti di, nek neraca gitu kita di akhir tahun.

Emerha

Oh, khusus neraca di akhir tahun?

Iswandari

Iya, neraca di akhir tahun.

Emerha

Nggak ada yang per bulan ya?

Iswandari

Eee, nggak, neraca kita minta tahunan, kebijakan kita tahunan terus kalau di aset laporan aset itu semesteran.

Emerha

He'e.

Iswandari

Itu, seperti itu. Tapi, kalau laporan yang pelaksanaan ABPD, pendapatan dan belanja kita bulanan.

Emerha

Bulanan ya?

Iswandari

He'e.

Emerha

Jadi, ketika pimpinan minta yang per bulan bisa?

Iswandari

Bisa dan misalnya nih di tengah bulan baru setengah bulan jalan dia minta pun ya kita bisa karena kan di Simda ada gitu.

Emerha

Oh, ada ya.

Iswandari

Iya, gitu.

Emerha

Itu Simda itu bisa di-ini ya Bu, misalkan kadang kan yang bikin BPKP?

Iswandari

Iya.

Emerha

Kadang kan tidak sesuai kondisi di Kulon Progo.

Iswandari

He'e.

Emerha

Itu bisa dibongkar ya misalkan --

Iswandari

Nggak boleh.

Emerha

Saya maunya ada menu ini.

Iswandari

Nggak boleh.

Emerha

Nggak boleh ya?

Iswandari

He'e, jadi, bahkan BPKP Jogja pun itu tidak boleh karena itu dari BPKP Jakarta. Jadi, Simda itu, tapi kita nggak perlu khawatir ketika misalnya ada aturan baru wah ini gimana nih mengakomidirnya gitu kan karena setiap ada Permendagri tau PMK yang baru itu BPKP Pusat memang sudah langsung dia update.

Emerha

Oh.

Iswandari

Nanti update-annya di kirim ke semua admin, itu otomatis.

Emerha

Oh, gitu ya.

Iswandari

He'e, jadi kita memang nggak bisa sendiri.

Emerha

Oh, jadi, kalau misalkan ada kebutuhan mendesak nih.

Iswandari

He'e.

Emerha

Tapi, tidak tersedia di menu Simda.

Iswandari

He'e.

Emerha

Itu gimana?

Iswandari

Kita manual pakai Excel.

Emerha

Manual, oh.

Iswandari

Pakai Excel manual.

Emerha

Nggak ada sistem pendamping yang lain ya?

Iswandari

Nggak ada, kita kalau--

Emerha

Yang dibikin sendiri sama Pemda?

Iswandari

Oh, kalau yang aset persediaan kita bikin sendiri.

Emerha

He'e.

Iswandari

Terus kalau di Dindik, Dindik itu dia punya. Jadi, karena di sana terlalu banyak to sekolahnya hampir 300 ya dia bangun sistem APBS namanya, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Harapannya outputnya kan bisa mmebantu masuk ke dalam Simda.

Emerha

Oh, he'e.

Iswandari

Walaupun secara manual masuknya, seperti itu.

Emerha

Iya.

Iswandari

Jadi, kalau yang, nek di kita, kalau misalnya nih ada permintaan dari provinsi form-nya nggak sama dengan yang Simda, ya sudah kita bikin manual dengan ambil data dari Simda kita olah biasanya gitu, pakai Excel.

Emerha

Oke.

Iswandari

He'e.

Emerha

Bu, kalau pengelolaan eee ABPD Desa itu.

Iswandari

He'e.

Emerha

Itu akuntansinya di handle di sini juga?

Iswandari

Oh, nggak.

Emerha

Itu gimana Bu?

Iswandari

Jadi, kalau yang setahu saya ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Misalnya nanti Mas-nya mau ingin tahu lebih jauh bisa ke Pemdes ya, Dinas Pemdes mungkin.

Emerha

Ada Dinas Pemdes sendiri ya?

Iswandari

He'e.

Emerha

Dinas Pemdes ya.

Iswandari

Nah, koordinatonya kan di sana.

Emerha

Oh.

Iswandari

Tetapi, turun lagi ke kecamatan, karena kecamatan juga harus mengkoordinasi semua desa.

Emerha

Ada jalur, jalur koordinasi ke sini juga?

Iswandari

Kalau ke sini?

Emerha

He'e.

Iswandari

Eee, khususnya di bidang akuntansi itu kalau akhir tahun mereka menyampaikan rekap saja, sekap pendapatan dan belanja serta sisa kasnya.

Emerha

iya.

Iswandari

Sudah, karena amanat Permendagri kan harus terlampir dalam pertanggungjawaban Bupati sebatas itu.

Emerha

Berarti laporan keuangan desa itu pisah dengan laporan Pemda ya?

Iswandari

Pisah, he'e.

Emerha

Pisah ya?

Iswandari

Pisah, iya, pisah cuma kan hubungannya desa, kecamatan itu kalau ke sini ke kantor ini BKAD di sekretariat kan untuk pencairan dana desa kayak gitu kan, itu lain ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Itu, itu saja, tapi kalau yang ke akuntansi nggak, nggak, cuma laporannya yang di akhir tahun direkap. Itupun saya melalui kecamatan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Jadi, desa melaporkan secara sederhana pakai Excel.

Emerha

Nah, itu yang tangani Dinas Pemdes ya?

Iswandari

He'e, saya koordinasi lewat Pemdes dan kecamatan.

Emerha

Iya, he'e.

Iswandari

Itu saya, saya nggak sampai ke desa. Waduh, nggak sanggup Mas kalau desanya 87.

Emerha

Iya, banyak (tertawa). Belum lagi SDM-nya Bu.

Iswandari

Tapi, suatu hari nggak menutup kemungkinan pusat itu mengamanatkan.

Emerha

Iya, itu digabung Bu.

Iswandari

Iya, itu loh yang saya takut. Dulu sekolah kan juga nggak.

Emerha

Kan dulu, kalau dulu kan lewat APBD kan.

Iswandari

Iya.

Emerha

Uangnya, dana desa itu.

Iswandari

Sekarang langsung.

Emerha

Sekarang kan langsung kan.

Iswandari

Iya.

Emerha

Nah, itu makanya terpisah.

Iswandari

Iyae.

Emerha

Oke, Bu.

Iswandari

Ngeri.

Q.3. Transparansi dalam konteks proses akuntansi

Emerha

Mengenai transparan.

Iswandari

He'e.

Emerha

Eee, menurut Ibu transparan dalam pelaporan keuangan itu seperti apa Bu?

Iswandari

Oke, transparan itu ketika semua informasi disajikan secara wajar didukung bukti yang sah dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, menurut saya itu transparan. Jadi, tidak ada hal yang disembunyikan.

Emerha

Konkritnya seperti apa Bu?

Iswandari

Contoh kalau ingin diketahui berapa realisasi pendapatan dan belanja padaa periode tertentu misalnya tahun 2016 gitu. Berarti kan harus nek ringkasannya mungkin bisa di upload.

Emerha

Iya.

Iswandari

Tetapi, Perda dan Perbub itu yang setumpuk itu kan nggak mungkin di upload.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nah, tapi kita selalu mempersilakan misalnya ada peneliti atau mahasiswa atau pihak manapun, LSM pernah, mau wartawan mau lihat monggo.

Emerha

Bisa diambil detailnya ya?

Iswandari

Bisa, bisa dilihat, yang butuhkan apa gitu.

Emerha

Per, per kegiatan.

Iswandari

Itu rinci banget.

Emerha

He'e.

Iswandari

Per kegiatan, per rekening.

Emerha

Karena di web itu cuma, cuma--

Iswandari

Ringkasan.

Emerha

Lampiran pertamanya saja ya?

Iswandari

Iya, nggih, karena itu teknis. Oh, lebih dari 20 Mega nggak bisa di upload.

Emerha

Iya, benar.

Iswandari

Tapi, biasanya setiap ada yang membutuhkan entah Dewan entah apa, bisa ke sini karena ketika sudah ditetapkan Perda, Perbub itu kan publik ya.

Emerha

Iya.

Iswandari

Untuk konsumsi publik itu bisa.

Emerha

Apa tidak ada kebijakan Bu ketika Perda itu diketuk palu disahkan terus dibagi-bagikan ke tempat-tempat fotokopi, nggak ada?

Iswandari

Nggak boleh.

Emerha

Nggak boleh ya?

Iswandari

He'e, itu adanya di SKPD.

Emerha

SKPD.

Iswandari

Kalau dulu ketika kita kemampuan keuangannya ada, kita menggandakannya dibagi satu SKPD satu.

Emerha

Oh.

Iswandari

Tapi, sekarang nggak karena kemampuan keuangan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Kita terbatas ya sudah, nanti kalau ada yang butuh ke sini. Tapi, kalau APBD, nek itu kan pertanggungjawaban.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kalau APBD biasanya semua SKPD 1 set punya.

Emerha

Satu, satu ya?

Iswandari

He'e, satu set punya gitu, jadi, ya gitu kalau membutuhkan bisa langsung datang ke sini gitu boleh dilihat.

Emerha

Iya.

Iswandari

Hanya saja yang nggak bisa langsung diakses itu ketika tahun berjalan kayak sekarang kan saya 2017 belum selesai baru proses.

Emerha

Iya.

Iswandari

Itu memang kebijakan Pemda tidak mengekspos data istilahnya yang belum diaudit karena takutnya nanti menjadi kebingungan misal ada yang penelitian nih.

Emerha

He'e.

Iswandari

Misalnya ada yang mau skripsi minta data PAD, saya kasih tapi kan suatu hari karena lagi proses saya berubah, karena data baru berubah, lah kan saya nggak mungkin meng-update yang tadi sudah dibawa kan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nah, takutnya suatu saat ada ekspose ganda lah itu makanya sama Kominfo kan ada beberapa informasi yang memang tidak bisa di ekspose ketika masih sedang dalam proses. Tapi, ketika misalnya selesai auditif besok Mei jadi Perda/Perbub wah boleh itu diekspos.

Emerha

Kalau di bidang akuntansi?

Iswandari

He'e.

Emerha

Ada tugas yang apa, yang bertugas itu untuk memasukkan mempublikasikan laporan keuangan?

Iswandari

Kalau publikasi, jadi gini untuk yang di web itu ranahnya di Kominfo.

Emerha

Oh, Kominfo.

Iswandari

Paling kita setor.

Emerha

Setor?

Iswandari

He'e.

Emerha

Datanya ya.

Iswandari

Ini loh eee laporan kami, ya kan, nanti dia yang upload kayak gitu. Tapi, kalau yang di media itu biasanya kalau kita sudah auditif itu kita ekspose di media.

Emerha

Oh.

Iswandari

Entah besok mau pakai Harjo atau Radar Jogja kayak gitu-gitu, ada, itu tugasnya di sini. Nanti kita kerjasama sama salah satu media massa ya sesuai kemampuan kita kan karena beda kalau KR mesti beda harga sama Harjo gitu, data ekspose. Tapi, itu cuma itu kalau sudah auditif karena memang amanat peraturannya seperti itu begitu auditif diekspos, gitu.

Emerha

Iya. Oke, Bu. Sudah 30 menit (tertawa)

Iswandari

(tertawa)

Emerha

Oke.

Iswandari

Iya, monggo nanti kalau misalnya--

Emerha

Masih banyak Bu, kalau misalkan ada lagu yang kurang--

Iswandari

Boleh ke sini ya.

Emerha

Saya masih bisa.

Iswandari

Iya, he'e, oke.

Emerha

Interview lagi.

Iswandari

Iya, monggo silakan.

Emerha

Oke.

Iswandari

Nanti diolah dulu.

Emerha

Iya, saya analisis dulu.

Iswandari

Kalau ada yang kurang, kurang, membutuhkan data.

Emerha

Iya.

Iswandari

Nanti tindak sini nggak apa-apa.

Emerha

BPK-nya selesainya Bu?

Iswandari

Masih lama Mas, itu tanggal 16 Maret baru pulang.

Emerha

He'e.

Iswandari

Terus tanggal 2--

Emerha

Jadi, perumusan pendahuluan ya?

Iswandari

Iya, tanggal 2 April datang lagi.

Emerha

Balik lagi.

Iswandari

Sampai akhir Mei.

Emerha

Oh.

Iswandari

Akhir Mei itu okelah dia selesai, tapi gilirannya kami dengan provinsi, evaluasi gubernur atas pertanggungjawaban kabupaten/kota. Itu prosesnya sampai selesai. Provinsi ini gandeng sama dewan DPRD.

Emerha

Iya.

Iswandari

Kami juga penjelasan--

Emerha

Berarti ada, ada jeda 1 bulan ya BKP ya?

Iswandari

Eee, 2 minggu.

Emerha

2 minggu saja ya?

Iswandari

He'e.

Emerha

Baru mereka turun lagi ya?

Iswandari

He'e, 2 April, nanti sudah datang lagi, selesainya akhir Mei.

Emerha

Mei.

Iswandari

Sampai auditif. Terus pokoknya semua proses pertanggungjawaban itu selesai di Agustus.

Emerha

He'e.

Iswandari

He'e.

Emerha

Berarti Mei, Mei, Juni.

Iswandari

Mei auditif, akhir Mei auditif.

Emerha

Juni sudah terbit laporannya ya?

Iswandari

Eee, kalau yang LKPD iya bisa, apa-apa itu bisa, karena sudah auditif ya.

Emerha

He'e.

Iswandari

Kalau yang Perda dan Pertanggungjawaban kan nunggu ditetapkan.

Emerha

Iya.

Iswandari

Ditetapkannya sama dewan itu kan pakai proses nih, rapat kerja segala macam, Agustus pas pertengahan.

Emerha

Agustus oh berarti ya.

Iswandari

Iya. Jadi, nanti di Agustus pertengahan kami ekspos di media massa di website tapi kalau di website ya itu ringkasannya saja karena nggak bisa semua.

Emerha

Saya sudah upload di, saya sudah download di media laporan keuangannya itu.

Iswandari

Iya, kalau misalnya perlu, apa, ke sini saja bisa difotokopi.

Emerha

Iya.

Iswandari

Biasanya atau difoto gitu, biasanya pada ke sini.

Emerha

Oke.

Iswandari

Gitu?

Emerha

Makasih banyak Bu.

Iswandari

Iya, sama-sama.

Emerha

Jika Ibu ada tugas lainnya (tertawa)

Iswandari

Maaf ya kalau ada kurang-kurangnya.

Emerha

Iya, nggak apa-apa Bu.

Iswandari

Nggih, nanti kalau masih perlu data informasi ke sini saja.

Emerha

Iya

- b. Wawancara ke-2 dengan Iswandari Artiningsih pada 04 Juni 2018, pukul 09.29 di ruang kerjanya. Iswandari adalah Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan(Aklap) di BKAD sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai prosedur akuntansi yang transparan dan akuntabel (RM2).**

Q.1. Prosedur akuntansi anggaran yang transparan dan akuntabel di PPKD

Emerha

E.... Ini tentang prosedur akuntansi ya Bu.

Iswandari Artiningsih

Iya. Hm em..

Emerha

E.. kemarin Ibu bilangkan mengikuti di Permendagri 64 ya? Prosedurnya.

Iswandari Artiningsih

Hm em em em em.

Emerha

Yang apa

Iswandari Artiningsih

SKPD?

Emerha

itu ya?

Iswandari Artiningsih

Iya

Emerha

Disitu saya lihat di Permendagri 64 itu ada dua proses di PPKD

Iswandari Artiningsih

Hm em

Emerha

sama di SKPD.

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

Nah itu yang saya ingin dalam.

Iswandari Artiningsih

Em em..

Emerha

Itu kalau untuk prosedur akuntansi dulu ya yang di P Pan yang di PPKD,

Iswandari Artiningsih

Em em.

Emerha

Itu dibentuk PPK sendiri ya PPKD-nya?

Iswandari Artiningsih

O.. di BKAD,

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

selaku SKPKD diakan juga sebagai PPKD.

Emerha

He nge.

Iswandari Artiningsih

Nah, a.. e... kami melakukan akuntansi PPKD. Ada sendiri di sini.

Emerha

Di,

Iswandari Artiningsih

Di sini.

Emerha

Di sini? Oh di sini.

Iswandari Artiningsih

Iya

Emerha

ada sendiri ya?

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

oh..

Iswandari Artiningsih

Jadi e.. petugasannya, laporannya misal ada yang harus dibuka oleh PPKD kami yang melakukan. Di SIMDA kan juga ada rumah PPKD

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Nah, itu juga kami yang melakukan.

Emerha

Nga..

Iswandari Artiningsih

Eksekusi di sini. Gitu.

Emerha

Berarti tidak di bidang Perbend ya? tidak

Iswandari Artiningsih

Ngak,

Emerha

Bidang Perbend?

Iswandari Artiningsih

Ngak

Emerha

Berarti langsung di itu

Iswandari Artiningsih

Iya di akuntansi.

Emerha

Nah itu, Ibu bisa ceritakan gimana mekanismenya? Mulai dari muatan akuntansi anggaran, pendapatan dari akuntansi anggaran, pendapatan

Iswandari Artiningsih

Oh kalau

Emerha

pajak?

Iswandari Artiningsih

Kalau anggaran kan

Emerha

E nge.

Iswandari Artiningsih

e kita tidak, akuntansi anggaranya tidak diterapkan.

Emerha

Nge..

Iswandari Artiningsih

Itu kan opsional.

Emerha

Iya opsional.

Iswandari Artiningsih

Jadi Kulon Progo tidak menerapkan akuntansi anggaran. Jadi kita e.. seperti yang ada di SKPD aja gitu. Untuk pendapatan akuntansi pendapatan di level PPKD itu kan ada bendahara penerimaan PPKD.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Yang membukukan pendapatan dana perimbangan dan transfer dan lain-lain. Itu dieksekusi ada di bidang pendapatan ada.

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Ada teman kami ditunjuk, ada SK nya. Nah dia yang melakukan itu di SIMDA segala macam seperti biasa. Gitu kan. Seperti kalau yang SKPD. Kemudian kalau bendahara pengeluaran PPKD juga ada. Hibah Bansos itu ada di sekretariat posisinya. Itu ada ditunjuk berada di Subbag Keuangan. Nah dua orang itu melakukan tugasnya masing-masing kan tinggal di akuntansikan

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Nah. Possing dan seterusnya itu kami melakukan disini. Karna e... karna keterbatasan SDM

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Kan petugas akuntansi PPKD itu kan e tidak bisa ditunjuk karna kita kurang SDM, Lah siapa gitu kan? Akhirnya secara tugasnya dilakukan oleh bidang yang to foxing nya mendekati. Nah karna itu akuntansi maka di bidang akuntansi kami yang melakukan. Kami buat e akuntansi nya PPKD seringnya kan dia masuk ke dalam akuntansi Pemda.

Emerha

Em nge.

Iswandari Artiningsih

Nah itu. Tapi kalau di 2019 nanti e insyaallah akan ditunjuk petugas akuntansi khusus PPKD. Jadi,

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Kami di akuntansi nanti hanya mengkonversi termasuk PPKD kalau ka sekarang kalau sen, kami yang kompilasi ya melakukan ya BPKD. Tapi kalau mulai 2019 sudah akan ditunjuk oleh. 2018 kan udah terlambat ya seperti kan dah jalan

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Iya gak pa pa kita proses masih seperti kemarin gitu. Ya karna itu keterbatasan SDM.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Jumlahnya.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Jadi kita melakukan dan mengkompilasi. Nah kalau besok kita tidak melakukan, karna sudah ada petugasnya sendiri berakuntansi khusus PPKD kami tinggal mengkompilasi.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Gitu

Emerha

Kalau khusus untuk prosedur tadi apa? Tidak diatur didalam Perbub selain Permendagri 64 tadi?

Iswandari Artiningsih

Oh. E kami punya Perbub tentang SAPD Kulon Progo.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Nomornya kalau gak salah 53/2014 bisa dilihat di JDIH ada.

Emerha

SKPD?

Iswandari Artiningsih

Iya

Emerha

Itu bukan kebijakan ya?

Iswandari Artiningsih

E.. bukan.Beda. Dia keluar bersamaan dengan kebijakan akuntansi. Jadi 2014 itu menyongsong Akrua 1 Januari 2015 kan Pemda itu harus syaratnya membuat 2 Perbub.

Emerha

E nge..

Iswandari Artiningsih

Yang satu tentang kebijakan akuntansi, yang Perbub 24, 2014 dan yang satu Perbub tentang SAPDnya sistem akuntansi Pemerintah Daerah nya turunan dari Permendagri 64,

Emerha

Iya 64.

Iswandari Artiningsih

Itu juga kami sudah buat. Kalau gak salah 53, 2014.

Emerha

53 ya?

Iswandari Artiningsih

Nanti bisa di,

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Nge nge. Itu di sana juga sebenarnya apa ya. Turunan dari Permendagri 64 itu, gitu. Kalau Bapak nanti lihat yang di JDIH ada Perbub 24, kayaknya itu urutan deh ya?

Emerha

Yang saya dapat cuma kebijakan akuntansi.

Iswandari Artiningsih

Yang 53? SAPD nya?

Emerha

SAPD nya saya tidak dapat. Yang ada itu cuman yang lama yang 2012, yang apa, mekanisme akuntansi keuangan daerah.

Iswandari Artiningsih

E...SAPD nggak?

Emerha

Iya nggak. Tidak dapat (Sambil tertawa)

Iswandari Artiningsih

E... sek, udah pernah browsing di JDIH yang Perbub 53?

Emerha

Iya sudah.

Iswandari Artiningsih

Anu aja. Nanti saya ditinggal email

Emerha

Em e.

Iswandari Artiningsih

Saya cari softcopy nya,

Emerha

Oh ya.

Iswandari Artiningsih

Saya minta Hukum, saya email ya.

Emerha

Oh ok.

Iswandari Artiningsih

Kadang karna misalnya besarnya nggak diupload,

Emerha

E nge.

Iswandari Artiningsih

gitu loh sama bagian hukum. Tak kira ada e. Jadi nanti tinggal email aja

Emerha

A... Iya. Oke oke.

Iswandari Artiningsih

Nanti saya

Emerha

Hm.

Iswandari Artiningsih

Ap email kan.

Q.2. Prosedur akuntansi pendapatan yang transparan dan akuntabel di PPKD

Emerha

Nah terus lanjut untuk akuntansi pendapatan ya Bu.

Iswandari Artiningsih

Em...

Emerha

Itu kalau mulai dari pendapatan pajak, itu

Iswandari Artiningsih

Em nge.

Emerha

Akuntansinya gimana? kalau,

Iswandari Artiningsih

Kalau,

Emerha

Pendapatan pajak

Iswandari Artiningsih

Kalau yang pajak kan ikut di akuntansi SKPD

Emerha

akuntansi SKPD

Iswandari Artiningsih

Jadi nanti bendahara penerimaan akan melakukan input seperti biasa kan kita pasti ndak nih

Emerha

Em nge.

Iswandari Artiningsih

Jadi buat sistem apa? Tanda bukti penerimaan, surat tanda setoran diinput segala macam itu kan berjalan dengan sendirinya sampai di fungsional. SPD fungsional bendahara. Nah nanti SPD fungsional bendahara itu akan di e... istilahnya secara sistem masuk ke LLRA.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Oleh petugas akuntansi SKPD langsung diklik.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

dah langsung, langsung masuk

Emerha

Itu kapan? Kapan dibuat jurnal kan? Kemarin saya tanya di bendahara penerimanya

Iswandari Artiningsih

Em em.

Emerha

Itu kan setiap bulan katanya ada apa dulu? ada

Iswandari Artiningsih

Segron.

Emerha

Segronisasi gitu antara

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

Nah itu

Iswandari Artiningsih

Kalau,

Emerha

saat itu langsung?

Iswandari Artiningsih

E.. Biasanya kalau teman akuntansi

Emerha

hm em.

Iswandari Artiningsih

di SKPD, Misalnya BKD gitu kan,

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Dia akan memposting monggo entar akhir bulan atau diawal bulan nah sebelum itu pasti dia sinkronisasi dulu. Kan saya selalu bilang ke SKPD, antara bendahara, petugas akuntansi, bendahara pengeluaran, penerimaan itu harus koodinasi internal di bawah PPKSKTD. Nah, proses itulah yang mereka lakukan sinkronisasi.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Sehingga nanti ketika diposting by sistem sudah masuk LRA ya ngaknya dah benar. Kelihatan kalau misalnya si petugas akuntansi posting LRA, kok misalnya belum match sama fungsionalnya. Nah mereka akan diskusi dengan bendaharanya.

Emerha

Itu otomatis di sini langsung, langsung terjurnal ya tinggal lihat?

Iswandari Artiningsih

Iya

Emerha

bisa

Iswandari Artiningsih

Em em.

Emerha

em.

Iswandari Artiningsih

Langsung itu

Emerha

Jadi petugas yang di sini ngak apa, ngapa-ngapain lagi?

Iswandari Artiningsih

Yang akuntansi?

Emerha

Setelah Iya. Setelah jadi jurnal?

Iswandari Artiningsih

Ada mungkin ada beberapa yang manual.

Emerha

Em nge.

Iswandari Artiningsih

itu dilakukan. Tapi biasanya kebanyakan dah by sistem soalnya kan dah pake aplikasi toh enaknya itu.

Emerha

Oh iya.

Iswandari Artiningsih

Itu juga termasuk untuk yang e.. semua SKPD pengelola pendapatan dan untuk yang pengelolaan juga sama.

Emerha

Sama ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. He..nge. Kecuali nanti ada misalnya ada kasus-kasus pengembalian belanja atau apa nah itu baru.

Emerha

Itu kewajiban untuk koordinasi antar bendahara dengan

Iswandari Artiningsih

Em nge..

Emerha

petugas akuntansi itu memang ada, ada

Iswandari Artiningsih

Ada.

Emerha

Ada anunya? Ada keputusan. Ada semacam surat

Iswandari Artiningsih

E...

Emerha

putusan?

Iswandari Artiningsih

ngak sih. Kita dari awal dulu cuma menyampaikannya di forum koordinasi. bagian dari pembinaan kita. dan tanpa apa istilahnya tanpa hitam diatas putih mereka

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

sudah menjalankan itu.

Emerha

Berarti ada komitmen bersama ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. Lebih kearah itu. Karna kalau misalnya mereka gak melakukan itu pun resiko mereka tanggung jawab mereka. Kalau kami

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

SKPK hanya semacam pembinaan begitukan? gitu.

Emerha

Kan Kalau misalkan mereka setelah langsung apa sinkronisasi.

Iswandari Artiningsih

Em em.

Emerha

terus terjadi kesalahan,

Iswandari Artiningsih

Em em,

Emerha

Itu apa? Ada prosedur tersendiri?

Iswandari Artiningsih

Iya. Misalnya nanti ada kesalahan e... harusnya pajak e hotel misalnya, keliru diinput ke pajak restoran misalnya,

Emerha

Iya,

Iswandari Artiningsih

gitu. Nanti mereka lapor ke kami.

Emerha

Em em.

Iswandari Artiningsih

ke bidang akuntansi, karna hanya admin saja yang bisa membatalkan dan kalau sudah dibatalkan proses transitnya. mereka input ulang, posting lagi.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Mereka gak bisa merevisi sendiri gitu.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Gitu.

Emerha

Berarti untuk seluruh pendapatan sama ya Bu ya?

Iswandari Artiningsih

Sama. Di semua SKPD prosesnya sama dan untuk belanja atau pengeluaran juga sama prosesnya seperti itu. Kalau misalnya ada yang input SPPD kemudian keliru ke rekening lain juga pembatalannya hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Oleh bidang saya. Gitu.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Gak bisa lakukan SKPD sendiri.

Emerha

Itu berarti dikunci ya anunya,

Iswandari Artiningsih

Oh iya.

Emerha

Sistemnya ya?

Iswandari Artiningsih

Di di menu SIMDA ada otorisasi untuk itu mah hanya ada di admin. Di sini gitu.

Q.3. Prosedur akuntansi aset yang transparan dan akuntabel di PPKD

Emerha

Kalau untuk aset gimana?

Iswandari Artiningsih

Aset?

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Aset itu kan karna kita tidak terintegrasi kasihan. Kita tidak terintegrasi sim nya jadi di sana ada sim sendiri

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Bidang Aset. Nah karna proses penyusunan neraca itu diakhir tahun maka e.. nilai aset akan masuk ke SIMDA secara manual di jurnal manual pada saat proses penyusunan laporan keuangan.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Nah itu nanti e.. pengurus barang berkoordinasi dengan petugas akuntansi masing-masing SKPD akan memberikan informasi angkanya berapa, nah petugas akuntansi SKPD yang akan mengakuntansi, melakukan jurnal manual di SIMDA.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

sehingga nanti angkanya masuk ke neraca SKPD. Itu. Aset, karena aplikasinya sendiri.

Emerha

Em.. Kalau aset yang di PPKD, kayak Perolehan investasi, pelepasan investasi itu gimana?

Iswandari Artiningsih

Kalau kok karna belum pernah ada ya

Emerha

Belum ada ya? Oh ya. oke.

Iswandari Artiningsih

Jadi paling adanya kek penyertaan model

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Penyertaan model kan kan sudah lewat PPKD, ada bendahara pengeluarannya tadi saya bilang di depan.

Emerha

Em em.

Iswandari Artiningsih

Nah Sudah-sudah dilakukan oleh

Emerha

sudah ya.

Iswandari Artiningsih

si bendera pengeluaran PPKD diinput nanti kami e tinggal memposting mamsuk ke LRA.

Emerha

Kalau koreksi kesalahan e penyesuaian untuk pengisian piutang masih manual juga?

Iswandari Artiningsih

e. enggak, Kalau penyesuaian piutang itu berhitungnya manual

Emerha

em em.

Iswandari Artiningsih

Tapi masuk ke jurnalnya SIMDA udah ada tinggal klik aja petugas akuntansi. Dan kan tidak semua e.. SKPD punya piutang, gitu toh.

Emerha

IYa.

Iswandari Artiningsih

Jadi pada SKPD tertentu itu dilakukan petugas akuntansi,

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Berhitungnya besaran pengisiannya manual.

Emerha

Manual.

Iswandari Artiningsih

E, tarifnya besaran persentasinya sudah ada di perbub kebijakan. nanti nilai itulah yang mereka input dengan jurnal manual di SIMDA.

Emerha

Em... Oke. Kalau soal pelaporan ya Bu, dari e SKPD akuntansi, itu ada ketentuan batas waktu untuk,

Iswandari Artiningsih

Batas waktu untuk?

Emerha

Iya untuk apa,

Iswandari Artiningsih

Menyampaikan laporan?

Emerha

Penyampaian iya.

Iswandari Artiningsih

Iya, jadi kan karna ada kaitannya dengan e di Bappeda itu ada yang namanya aplikasi e monev

Emerha

e nge.

Iswandari Artiningsih

Dia kan juga mengambil data dari database SIMDA. mereka juga di awal bulan. maka biasanya hari kerja pertama awal bulan itu sudah kita minta SKPD itu menyelesaikan. Jadi, paling dengan logika tanggal 1 hari kerja pertama kita ngak lebih dari tanggal 3, tanggal 4 itu sudah harus masuk. karna ada kebutuhan itu gitu.

Emerha

Itu ada, ada ininya ada dasar hukumnya? ada surat

Iswandari Artiningsih

e...

Emerha

putusan?

Iswandari Artiningsih

Oh, kalau dasar hukum sih ngak ya. cuma kita punya kayak komitmen

Emerha

Em em.

Iswandari Artiningsih

dan hasil kesepakatan bersamagitu. Jadi kapam mereka akan ambil data terus nanti SIMDA kan kita tutup, gitu. Cuma kalau batasan waktu kapan fungsional masuk kapan LRA masuk, itu di perbub kami kebijakan yang 24 itu sudah diatur dari dulu. nge nge.

Emerha

em,

Iswandari Artiningsih

unlimit

Emerha

tanggal 10 itu ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. Tapi biasanya sebelum tanggal 10 mereka udah ini.

Emerha

Udah masuk.

Iswandari Artiningsih

tanggal 10 itu kan karna kita gak mau melanggar permen toh, permendagri kan bilanganya tanggal 10.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Ya akhirnya gitu. Tapi kita menyerahkan ke SKPD sesuai kebutuhan. Contoh: Kalau migas. Migas itu kan punya kepentingan kompilasi internal. karna dia punya 21 PUs emas. maka dia di internal sana punya aturan main ke pusesmas, misalnya mau tanggal berapa mo nggo. mau tanggal 5 apa apa, kita serahkan gitu.

Emerha

Kalau misalkan ada pelanggaran misalkan telat, itu ada sanksinya?

Iswandari Artiningsih

Em.. Kalau dari kami surat teguran

Emerha

surat teguran?

Iswandari Artiningsih

Iya. Jadi kalau sesuai ketentuan kan tanggal 10, e nanti kalau tanggal 11 belum masuk kita layangkan teguran pertama.

Emerha

em nge.

Iswandari Artiningsih

Trus nanti e tanggal berapa misalnya tanggal kitya kasih batasan waktu gak usah sampe tanggal 15 misalnya. 15 maksudku 16 teguran kedua. Sampe ke teguran ketiga, tapi selama ini jarang.

Emerha

Oke.

Iswandari Artiningsih

Karna sebelum tanggak 5 aja mereka udah kirim kok.

Emerha

Konsekuensi dari surat teguran tadi itu apa? Kalau misalkan gak dipenuhi sampe batas waktu?

Iswandari Artiningsih

e... Kalau secara eksplisit kita tidak memberikan punishment hanya saja kan yang namanya teguran itu sudah secara ini toh, e sudah secaram ck apa ya caranya ni ki kinerja diakan buruk, karna kalau dia telat pun, kan ada di Bappeda, bappeda ada penilaian istilahnya rapotangitu toh. Nah itu juga pengaruhnya ke sana. ada grade-grade nya diumumkan tapi itu di Bappeda ya.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Yang punya lagi, kan hubungannya ke sana. jadi dari kami di bidang saya gak ada punishment apa-apa, cuma teguran itu saja. Tapi nanti efeknya, dampaknya kan di asisten sekda satu dua tiga itu juga kan ada e rakor internal per asisten. Di sana kan nanti juga ada teguran gitu. ada, ada informasi sampe sana bahwa ini blom, ini blom nah kan seperti itulah gitu loh.

Emerha

em.

Iswandari Artiningsih

nek di kami gak ada punishment.

Emerha

Kalau pengaruh ke TPP juga ya?

Iswandari Artiningsih

Oh ada.

Emerha

Ada ya?

Iswandari Artiningsih

Kalau dia telat

Emerha

em em.

Iswandari Artiningsih

maka nilainya kan jadi tidak 100%,

Emerha

Iya,

Iswandari Artiningsih

otomatis nanti TPP nya juga gak bisa 100%, tetapi e itukan cuman salah satu komponen penilai,

Emerha

e nge

Iswandari Artiningsih

Kadang e BKPP yang punya TPP ya? Diakan punya grade,

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Nah, nilainya diambil dari inspektorat, BKAD, Bappeda.

Emerha

E nge.

Iswandari Artiningsih

BKAD pun tidak hanya satu bidang saya, bidang saya cuma kecil. Kalau gak salah 20% berapa. Jadi e... ngak terlalu kelihatan gitu loh sepanjang yang lainnya

Emerha

em nge

Iswandari Artiningsih

sebagus nilainya. gitu.

Emerha

Itu sanksinya kolektif atau hanya untuk e..

Iswandari Artiningsih

SKPD

Emerha

Petugas akuntansi?

Iswandari Artiningsih

SKPD

Emerha

Kolektif seluruh,

Iswandari Artiningsih

nge nge. Iya

Emerha

termasuk penilai anggaran?

Iswandari Artiningsih

TPP itu kalau misalnya e... jelek cuma 80% misalnya itu satu SKPD dapat 80%

Emerha

Satu jadi kena ya?

Iswandari Artiningsih

Iya..Cuma kan dia nilainya jatuh itu bisa jadi kenapa? apakah di BKAD atau di Bappeda e monev nya atau di inspektorat mungkin ada temuan yang belum ditindaklanjuti? Gitu.

Q.4. Prosedur jurnal, buku besar dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di PPKD

Emerha

Kalau untuk jurnal Bu?

Iswandari Artiningsih

em em.

Emerha

Buku besar.

Iswandari Artiningsih

em nge.

Emerha

Itu se setelah, otomatis jadi ya, itu dicetak juga ya?

Iswandari Artiningsih

Oh gini. Saya cuma menyarankan.

Emerha

em eng.

Iswandari Artiningsih

mereka SKPD itu punya lah dokumen paling gak 1 buat arsip.

Emerha

Em nge.

Iswandari Artiningsih

Jadi monggo. Itu e saran saya dicetak tiap bulan ada,

Emerha

em nge,

Iswandari Artiningsih

Tanda tangan kalau ada format yang harus tanda tangani di disimpan. Karna tujuannya e... kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan pemeriksaan mereka bisa serahkan gitu. Tapi kami tidak sampe ke cet mana cetakan yang enggak, karna kami tidak mau ajukan kan banyak sekali. Ya kadang SKPD besar kek sekda gitu kan bisa sampe 500 lembar jurnal kalau sudah diakhir tahun. Dan kami ngak mensyaratkan itu, terlalu biaya tinggi gitu loh. Evron biaya tinggi. Cuman bisa menyarankan paling ngak minimal satu buatlah hardcopy dan itu disimpan sebagai arsip. Tapi ketika dia tidak melakukan ya monggo itu konsekuensi dia nanti di akhir tahun. Kalau misalnya dibutuhkan untuk pemeriksaan baru ngebut nyetak lah itu kan monggo itu di dia gitu.

Emerha

Kalau khusus untuk laporan keuangan PPKD,

Iswandari Artiningsih

nge nge,

Emerha

Itu bikinnya setiap bulan y, PPKD, khusus di yang tadi ada ... aku tanya sendiri

Iswandari Artiningsih

em.. PPKD?

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Kalau PPKD kan e karna tadi itu saya sampekan blum ada petugas yang khusus

Emerha

em nge,

Iswandari Artiningsih

selama ini kami tidak, tidak apa ya, secara produk output, hardcopy kami tidak cetak.

Emerha

em,

Iswandari Artiningsih

kenapa? karna kan toh tidak ada yang bisa bertanda tangan

Emerha

em...

Iswandari Artiningsih

Iya kan? Karna tidak ditunjuk. Jadi, tapi secara sistem kami lakukan, secara angka dia masuk ada, nge nge secara laporan dia include tapi secara dokumen e.. kami tidak bisa cetak. Karna kan gak ada petugas akuntansi.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Tapi kalau si bendahara masing-masing bikin sama fungsional.

Emerha

Em...

Iswandari Artiningsih

gitu. Oke.

Emerha

Jadi dibawah koordinator koordinir Ibu nanti

Iswandari Artiningsih

Em nge,

Emerha

e... Laporan keuangan itu

Iswandari Artiningsih

em nge,

Emerha

dilaporkan ke pengguna anggaran setiap bulan atau gimana?

Iswandari Artiningsih

E.. Iya. Jadi yang Pemda saya bicara yang Pemda ya, tugas kami nanti mengkompilasi semua SKPD termasuk data BPKD. Ada. Kemudian kami rangkum menjadi LRA Pemda

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Itu kami minta kan tanda tangan pak Kepala karna ada kewajiban kami untuk menyampaikan ke kemenkeu setiap bulan.

Emerha

Em...

Iswandari Artiningsih

Kalau sampe telat Biaya umumnya dipotong,

Emerha

Itu laporan apa tadi?

Iswandari Artiningsih

LRA

Emerha

LRA

Iswandari Artiningsih

LRA

Emerha

itu setiap bulan ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. LRA, LO itu

Emerha

:LRA, LO sama LPE?

Iswandari Artiningsih

E.. ngak.

Emerha

Ngak ya? cuma buat

Iswandari Artiningsih

Si pusat aplikasinya cuma minta yang fokus LRA.

Em..

Iswandari Artiningsih

Jadi kan memang tiap bulan harus bikin kompilasi LRA dan disampaikan ke pusat.

Emerha

Telat langsung dipotong DAU ya?

Iswandari Artiningsih

Iya e.. hahahaha. Itu karna di pusat kan punya aplikasi.

Emerha

nga nga,

Iswandari Artiningsih

Aplikasinya itu salah satu diantaranya kan data LRA dari Pemda. Nah itu. Kebutuhannya di sana.

Emerha

em em.

Iswandari Artiningsih

Baik Kemenkeu maupun Kemendagri.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Jadi tadi saya sampaikan kalau yang PPKD secara hardcopy memang saya tidak cetak. Tapi secara angka dia masuk. karna kami lakukan itu, gitu.

Emerha

Iya,

Iswandari Artiningsih

Cuma besok beda, kalau sudah ada penugas khusus di 2019, seperti tadi saya sampaikan, Oh tentu itu ada cetakan, harus dikirim seperti SKPD biasa. Ini kan karena kondisi.

Emerha

Kondisi iya. Kalau untuk CaLK atau catatan atau laporan keuangan

Iswandari Artiningsih

em em

Emerha

Itu bikinnya gimana Bu? Manual atau di sistem?

Iswandari Artiningsih

Manual.

Emerha

Itu manual ya?

Iswandari Artiningsih

Manual. dan itu cuma setahun sekali ketika laoran tahunan

Emerha

em..Neraca gak dibikin perbulan?

Iswandari Artiningsih

Ngak. Karna e... banyak pertimbangan ya. apalagi itu tadi yang sim aset nya kita juga settingnya semesteran, gitu kan. Sementara kalau neraca karna juga kebutuhan, kebuthan misalnya permintaan pusat atau ... gak gak pernah bulanan atau apa. Jadi kita kan masih sementara kerjakan aja dulu tahunan. Cuma itu kan nanti menyesuaikan. Kalau di Pusat kebijakannya nyuruh setiap bulan atau triwulan atau semster ya kita ikut. Sejauh ini masih tahunan.

Emerha

Oke. Sekarang diproses di SKPD ya?

Iswandari Artiningsih

em.

Emerha

tapi hampir sama ya antara mulai dari pendapatan, belanja,

Iswandari Artiningsih

em nge.

Q.5. Prosedur akuntansi anggaran yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

seterusnya. Itu anggaran tadi kenapa Bu gak di jurnal?

Iswandari Artiningsih

E... dulu dari awal memang pembelajaran yang kami terima pun

Emerha

e nge,

Iswandari Artiningsih

diterima Pemda itu kan mang anggaran opsional ya, dilakukan boleh tidak boleh. Jadi mungkin Pemda-Pemda itu cari apa gampangya? Hehehe (tertawa), tidak dilakukan gitu. Ya udah lagian kami itu kalau melakukan akuntansi anggaran itu berarti kita harus menganggap sebagai uang muka kerja toh. Tapi kan kita tidak menganut sistem uang muka kerja.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Sistemnya UP. Jadi em, jarang kayaknya ada Pemda yang menerapkan itu gitu.

Emerha

Kalo, kan ada anu di situ apa, kan akrualnya. Akroalnya kan kalau ketika anggaran kan sudah habis,

Iswandari Artiningsih

em em, Iya kalau kami karna itu tadi, e sejak awal tidak menganggap sebagai utang ya.

Emerha

nge nge

Iswandari Artiningsih

iyakan. Makanya e, kita tidak akan

Emerha

tidak

Iswandari Artiningsih

mengaplikasikan itu.

Emerha

berarti di SIMDA udah di, di SIMDA tidak menggunakan itu?

Iswandari Artiningsih

Ngak. Kami tidak menunjukkan di SIMDA itu. Gitu.

Emerha

Iya. Berarti sudah sistir dari sistem nya ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. He he. Dan kebanyakan kalau Pemda kan memang tidak menerapkan akuntansi anggaran.

Emerha

Em em. Hm.. Kalau untuk khusus akuntansi belanja, itu kan ada yang dari UP,

Iswandari Artiningsih

Em em,

Emerha

ada dari LS

Iswandari Artiningsih

Hm nge, hm nge.

Q.6. Prosedur akuntansi belanja dan beban dengan UP yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Nah itu gimana? a... apa kan UP e kan belanja dari UP itu diakui sebagai belanja kalau sudah dipertanggungjawabkan

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

Itu gimana mekanismenya?

Iswandari Artiningsih

Kalau, sek, oh sebentar saya cut dulu ya

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Telpon dari KPP dari tadi saya .. tunggu aja ya.

Jeda

Lanjutan wawancara dengan Ibu Iswandari Artiningsih, SE pada 04 Juni 2018, pukul 09.29 di ruang kerjanya.

Q.6. Prosedur akuntansi belanja dan beban dengan UP yang transparan dan akuntabel di SKPD

Iswandari

Ehhh, sampe dimana tadi?

Emerha

Prosedur akuntansi untuk belanja yang menggunakan UP?

Iswandari

Oh... Jadi kalau Kan kita juga pake SIMDA.. E... SP2D terbit UP cair sudah terbuka di SIMDA. dan nanti bendahara keluar masuknya uang juga uang dia juga udah dia membukukan di SIMDA. BKU segala macam sama fungsional, jadi nanti terkondisi di sana di fungsinya ada sisa kas, Ok... e... e...e... Iya. e... e... Ada sisa kas. Dari sana kita lihat tinggal berapa, udah nanti e GU juga prosesnya udah langsung di SIMDA ada gitu. Jadi,

Emerha

Jadi otomatis ya?

Iswandari

He e, sampe LS juga. LS e... dari SP2D udah ada kan ada register SP2D yang LS segala macam. Udah nanti sampe fungsional realisasinya udah masuk. Sampe ke LRA nah enaknya pake aplikasi itu. Jadi teman-teman gak gak terlalu repot paling cuman melengkapi kelengkapan SPj-SPj itu aja.

Q.7. Prosedur Akuntansi Belanja dan Beban yang Menggunakan LS yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Kalau untuk LS sama juga kayak gitu?

Iswandari

Sama. Hm em. Misalnya ada pajak atau segala macam ya itu udah diselesaikan dalam pembendaharaan. Masuk ke SIMDA itu udah clear.

Q.8. Prosedur akuntansi aset yang menggunakan LS yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Yang tadi lanjut untuk Akuntansi Aset? Kita kan punya SIM sendiri ya? Itu konek gak dengan SIMDA?

Iswandari

Enggak. Enggak ngak konek. e... Cuma Ck angkanya akan masuk SIMDA, masuk ke neraca diakhir tahun dengan jurnal manual itu aja.

Emerha

Em... Jadi Semua pembelian, penghapusan dilakukan di sana?

Iswandari

e... iya. E.. kalau pembelian gak. Pembelian kan di SKPD masing-masing.

Emerha

Oh lewat pengadaan itu ya?

Iswandari

Iya. Cuma angkanya. Karna itu realisasi belanja model tahun berjalan otomatis di fungsional bendahara sudah ada. Nah nanti kita tinggal sinkronisasi sama data yang di aset. Gitu. Untuk penambahan nilai asetnya. Karna kalau di SIMDA settingnya SIMDA itu bersistem realisasi belanja model udah masuk untuk menambah aset. Nah nanti tinggal e.... yang diluar pembelian. Misalnya mutasi antar SKPD itu nanti kita masukan lewat jurnal manual. Kalau yang pembelian dah otomatis di SIMDA ada.

Emerha

Yang penghapusan?

Iswandari

Penghapusan nanti manual masuknya.

Emerha

Manual juga?

Iswandari

Iya. He..e... di akhir tahun

Q.9. Prosedur akuntansi kewajiban yang menggunakan LS yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Em Iya. Hemk... Kalau akuntansi untuk kewajiban ada? utang.

Iswandari

Utang. E,.. utang itu ada beberapa turunan BUD itu masuknya manual juga.

Emerha

Manual ya?

Iswandari

Iya. Jurnal manual kar karna cuma BLUD yang punya kalau SKPD gak punya.

Q.10. Prosedur koreksi dan penyesuaian yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Kalau untuk depresiasi?

Iswandari

Penyusutan itu. sudah ada di SIM aset. Iya. Nanti masuknya ke SIMDA sama dengan nilai asetnya manual. Hek nge, dah bersistem juga disana. Jadi tinggal setor di kami berapa akumulasi penyusutannya, gitu.

Q.11. Prosedur pelaporan yang transparan dan akuntabel di SKPD

Emerha

Gitu, Ok. Kalau mekanisme untuk penerbitan laporan keuangan Pemda itu?

Iswandari

Laporan keuangannya Pemda. Iya. Nge... di SIMDA. Kan sudah ada konsolidasian nih. Kita tinggal melakukan cek end ricek. Apakah semua sudah masuk karna kita juga punya istilahnya apa ya? Tetap punya informasi manual toh. Nah setelah semua clear ya kita tinggal cetak, menunya ada SKPKD di SIMDA. Itu jadi tinggal cetak disana sudah konsolidasi yang BLUD dah masuk secara manual, yang aset tadi sudah betul secara manual. Jadi keluarnya neraca itu sudah lengkap. Udah hasil kompilasi.

Emerha

Tadi proses konsolidasi SIMDA juga yang melakukan?

Iswandari

Iya. Tapi e.. ada manualnya juga dari kami ketika... Hm em... Tadi yang BUD tuh kan masuknya. Trus e... apa ya? Dana Bos, itukan sebagai mana tahu. Aset penyusutan nah tadi itu tetap. Hem nge..

Emerha

Nanti setelah terbit laporan LKPD.. Itu direview lagi ya sama inspektorat?

Iswandari

Em.... mekanisme se kalau kita bikin LKPD yang tahunan, Sebelum diserahkan ke BPK itu harus direview inspektorat.

Emerha

Ok Bu. Untuk topik yang trus satu lagi ya kepikiran.

Iswandari

Iya.

- C. Wawancara dengan Iswandari Artiningsih, pada 04 Juni 2018, pukul 09.29 di ruang kerjanya, Ruang Akuntansi dan Pelaporan. Iswandari adalah Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan(Aklap) di BKAD sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai proses belajara transparansi dan akuntabilitas di bidang akuntansi dan pelaporan (RM3).

Q.1. Model sosialisasi

Emerha

Sekarang e.. tema saya tentang " Bagaimana Pemda Kulon Progo itu Belajar Tentang Transfaransi Pengelolaan Keuangan".

Nah itu pertama kali muncul ide untuk menggunakan apa, SIMDA itu gimana ya Bu?

Iswandari Artiningsih

Oh..

Emerha

Secara sistem gitu.

Iswandari Artiningsih

2012, 2012 itu ah.... dari BPKP Jogja,

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Itu memberikan sosialisasi bahwa e ini loh ada aplikasi SIMDA. Kemudian Pemda Kulon Progo kan waktu itu masih manual.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Pernah juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang istilahnya dibangun e.. swasta juga pernah.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Tapi komitmen dari pengambil kebijakan waktu itu kenapa gak kita beralih ke SIMDA, nah kalau kita diteknis pelaksanaan kan tinggal ikut kebijakan. Kemudian dari 2012 berusaha e beralih ke SIMDA untuk keuangannya. Ya sampe sekarang.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Gitu.

Emerha

Itu SIMDA dibayar ya? dibeli ya?

Iswandari Artiningsih

Ngak. SIMDA itu dibuat oleh BPKP pusat

Emerha

Em,

Iswandari Artiningsih

Kalau BPKP perwakilan Jogja itu sebagai apa ya? e... perpanjangan tangan aja. Tapi segala sesuatunya kan punya nya BPKP Pusat. Nah, Pemda setahu saya dimana pun tidak ada yang beli.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Itu kan Free.

Emerha

Free ya?

Iswandari Artiningsih

Ha nga. Hanya ketika kita membutuhkan pembelajaran, sosialisasi atau waktu itu ketika diawal-awal kita istilahnya BIMTEK lah gitu,

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Ke SKPD. Itu diselenggarakan oleh Pemda.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

jadi kita menganggarkan dari yang sederhana, makan, minum, rapat, honor narasumber kita menganggarkan di APBD. tapi kalau untuk aplikasinya sendiri kita sama sekali tidak dipungut biaya apapun gitu.

Emerha

Dari awal sebelum SIMDA tadi ada sistem sendiri ya? Itu dibeli apa dibikin?

Iswandari Artiningsih

e.. Kalau itu dulu pernah kita beli. Tapi saya udah lupa karna sudah lama sekali ya.

Emerha

He eng.

Iswandari Artiningsih

Pernah kita beli misalnya lupa saya dulu e ada apa ya itu? Dari UGM pernah

Emerha

em em.

Iswandari Artiningsih

gitu tuh ada. Cuma kan ketika itu juga tidak inter integrasi

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

Jadi secara manual misalnya khusus untuk bikin anggaran aja, kek gitu-gitu. Gitu. Kalau untuk laporannya dari dulu kita masih manual sebelum pake SIMDA. Akhirnya sejak ada SIMDA ya kita, kita justru kalau dari sisi pelaporan pertama kali pake aplikasi dari SIMDA, 2012 di SIMDA.

Emerha

2012 itu belum WTP ya?

Iswandari Artiningsih

Sebelum Akrua iya. masih WDP.

Emerha

Berarti ke ketika menggunakan SIMDA baru jadi WTP?

Iswandari Artiningsih

e.. waktu pake SIMDA pertama kita masih WDP,

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Karna kan WDP atau WTP itu bukan serta merta karna kita menggunakan aplikasi apa tidak.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Tapi ketika itu kan kasusnya di penebusan aset. Kita memang masih belum tertata. Nah setelah kita e terbantu dengan aplikasi

SIMDA kan jadi kita sedikit banyak ada, ada tahu ya, oh kurangnya ini, informasi ini. Nah aset yang mulai ditata kita punya database aset yang bagus, kita tetap pake SIMDA. ya kita 2013 bisa WTP setahun kedua pake SIMDA.

Emerha

Dulu sebelum WDP bagaimana ceritanya Bu, e... Kulon Progo itu latar belakangnya ingin supaya jadi WTP itu apa?

Iswandari Artiningsih

Lah kan e logis ya,

Emerha

Em,

Iswandari Artiningsih

Oppurtuni tertinggikan WTP,

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Trus apalagi kalau sampe gak pake catatan. Ya semua Pemda pasti arahnya ingin ke sana, karna itu tadi e disana ada transparansi, pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, nah di sana. Hanya kan e berusaha apalagi banyak aturan-aturan yang juga memang kemudian terbit dan harus dipatuhi iya kan kita berusaha maksimal menjalankan menerapkan semuanya. Nah komitmen bersama bersama aja.

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

gitu.

Emerha

Tadi Ibu bilang, e.... tiada pengaruh pake SIMDA atau tidak, harus dapat WTP?

Iswandari Artiningsih

Em...

Emerha

Selama pake SIMDA itu kan manual.

Iswandari Artiningsih

Em em..

Emerha

Itu pernah dapat WTP?

Iswandari Artiningsih

Belum, belum pernah. Sekali lagi karna pada saat itu mungkin banyak hal-hal atau variabel-variabel yang kita belum baik gitu. Ya contoh itu tadi, misalnya: e aset yang belum tertata, persediaan belum tertata gitu loh. Jadi kalau kita WTP itu bukan semata-mata karna kita pake SIMDA tapi memang lebih karna kita diberbagai sektor dah memperbaiki diri.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Membenahi diri, kalau SIMDA kan cuma media

Emerha

Iya,

Iswandari Artiningsih

Yang memudahkan kita itu aja.

Emerha

Itu kira-kira yang apa latar belakang yang e.. pengen WTP itu,

Iswandari Artiningsih

Em nge,

Emerha

apa? Apakah memang dengan WTP itu misalkan ada janji dari pemerintah pusat,

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

kalau WTP ditambah Daum nya atau gimana ini?

Iswandari Artiningsih

Eh.. kita ingin WTP karna pertama, jelas kalau opini tertinggi itu kan menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintahan.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Kalau Kulon Progo kan e, otomatis ingin menjadi good governance, clean governance makanya kan e.. gimana caranya kita berusaha memperbaiki pola pengelolaan keuangan kita sesuai ketentuan yang berlaku. A.., kemudian kalau sampe itu semua udah jalannya baik WTP itu kan otomatis kita raih. Gitu loh.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Jadi tujuannya semata-mata bukan WTPnya. Tapi menuju pola pengelolaan keuangan yang lebih baik. WTP itu cuma bonus, Gitu.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Nek tujuan utama itu menjadi lebih baik kinerja keuangannya gitu aja. Gitu.

Emerha

Itu siapa yang pertama kali mencetuskan supaya pengelolaan keuangan jadi lebih baik gitu?

Iswandari Artiningsih

Sama-sama sih komitmen

Emerha

sama-sama

Iswandari Artiningsih

dari pengambil kebijakan sampe kita di tataran teknis juga semua berkomitmen sama. Meningkatkan kinerja dulu sebaik mungkin dengan sudah kita berusaha maksimal sebaik mungkin sesuai ketentuan otomatis kan WTP mengikuti.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Em..

Emerha

Itu muncul ide seperti itu sejak tahun berapa? 2012 atau?

Iswandari Artiningsih

eh ngak sih, sebenarnya sejak dulu cuma kan berproses ya.

Emerha

He em

Iswandari Artiningsih

Gitu. Dari dulu kita ingin mendapat opini terbaik, kita udah berusaha cuma yang namanya proses itu gak instan toh memperbaiki yang sesuatu itu kan pelan-pelan dan ternyata kita baru bisa di 2013.

Emerha

Nah itu sebelum menggunakan SIMDA, manual kemarin

Iswandari Artiningsih

he em,

Emerha

apa menggunakan tenaga ahli untuk membantu pembuatan?

Iswandari Artiningsih

Kita sendiri..

Emerha

sendiri?

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

Jadi manualnya itu semua dikelola sendiri?

Iswandari Artiningsih

Iya, He em.. Gak pake jasa pihak ketiga.

Emerha

Kalau, setelah menggunakan SIMDA ada tenaga ahli juga?

Iswandari Artiningsih

ngak.

Emerha

Yang dari BPKP itu?

Iswandari Artiningsih

E..., paling kita cuma BPKP itu diawal dulu pendampingan

Emerha

Pendampingan,

Iswandari Artiningsih

Kemudian jadi tempat kita konsultasi ketika ada trouble di Sim nya. Gitu.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Error-error di Sim ya kita larinya ke BPKP, selebihnya gak ada.

Emerha

Jadi mereka mau diminta pendampingan?

Iswandari Artiningsih

Iya komitmen mereka, Iya.

Emerha

Pendampingannya dibayar ya?

Iswandari Artiningsih

E... paling honor narasumber ketika kita menghadirkna mereka untuk ada acara semacam kayak BIMTEK karna kita kan setiap tahunnya mungkin SDM nya ganti orang, ada SKPD yang e petugasnya baru. Nah seperti itu kan lumrah toh honor narasumber, tapi pembiayaannya yang lain gak ada.

Emerha

Itu BIMTEK dari BPKP itu dilaksanakan hanya diawal menggunakan SIMDA atau rutin?

Iswandari Artiningsih

Ngak. E, pernah beberapa kali juga dulu ketika diawal-awal pake SIMDA mereka e menggunakan anggaran mereka sendiri untuk melakukan BIMTEK tapi juga ada yang inisiatif kami untuk e mengundang mereka sebagai narasumber memberikan pembinaan juga ada.

Emerha

Oh gitu. Ya itu kalau khusus dari sistem, tapi kalau untuk dari pengetahuan akuntansi bagaimana Bu?

Iswandari Artiningsih

Eh, SDM nyakan beragam.

Emerha

Iya SDMnya.

Iswandari Artiningsih

Tidak semua berlatar belakang akuntansi

Emerha

em,.

Iswandari Artiningsih

Bahkan yang berlatar belakang akuntansi pun kan e, tidak serta merta bisa, apa ya? menguasai Akuntansi keuangan daerah. Jadi yang kita lakukan adalah e.. ya kita menyelenggarakan BIMTEK.

Emerha

BIMTEK

Iswandari Artiningsih

atau diklat, atau mengirimkan ke biasa banyak tawaran tuh

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Nah itu, Hal-hal seperti itu gitu. Dan BPKP juga membantu kok dari sisi itu tadi sebagai narasumber ketika kita membutuhkan pembinaan dari sisi teori.

Emerha

Sisi teori?

Iswandari Artiningsih

Bukan semata SIMDA nya

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Tapi teori akuntansi nya, gitu. Mereka juga pernah pura-pura jadi narasumber diawal-awal kita pake SIMDA dulu dan diawal-awal kita menerapkan EEmerhual Basis.

Emerha

Em...

Iswandari Artiningsih

Gitu.

Emerha

Tapi ketika melakukan BIMTEK sendiri

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

itu ada, ada maksudnya ada orang khusus yang punya pengetahuan akuntansi yang memberikan BIMTEK?

Iswandari Artiningsih

E... kan itu yang nyelenggarain BKD

Emerha

BKD

Iswandari Artiningsih

Nah, Kadang BKD itu e pernah narasumbernya mungkin dari e.. akademisi pernah, dari BK BPKD sendiri pernah, kemudian mungkin dari e ya beberapa pihak yang dirasa memang memiliki latar belakang teori akuntansi pernah diundang. Bahkan pernah ngundang dosen.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Pernah.

Emerha

Itu diawal-awal ya?

Iswandari Artiningsih

ya. He em.

Emerha

Setelah jalan?

Iswandari Artiningsih

Setelah ke sini biasanya sesama kita sendiri,

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Sama bidang akuntansi sendiri. kebetulan kan e secara bertahap ada pembinaan yang khusus untuk kita.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Agar kita bisa ngajarin teman-teman SKPD.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Nah Jadi ya udah sesama kita gitu.

Emerha

Ku tengok mengajarkan mereka itu dibentuk tim?

Iswandari Artiningsih

Em... Ngak sih sesuai kebutuhan aja

Emerha

sesuai kebutuhan

Iswandari Artiningsih

gak harus ada tim.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Setiap saat kita melakukan pendampingan tanpa harus ada kegiatan ini ya, sebuah gak harus ada kegiatan gitu, ngak. Setiap saat, setiap ada masalah mereka boleh datang ke sini untuk konsultasi. Gitu.

Emerha

Kalau yang Tim teknis yang dari BPKP itu?

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Itu bagaimana mereka mau mengajarkan kalau misalkan kan setiap ada trouble

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Harus panggil mereka atau gimana?

Iswandari Artiningsih

E.., gak juga.

Emerha

Gak juga.

Iswandari Artiningsih

Kadang kita yang ke sana.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

admin saya, paling admin saya kok ini hang atau gimana atau misalnya kok ini e... gak pas gitu mapping nya padahal dia gak bisa perbaiki sendiri gitu, dia bawa ke sana. Ke admin yang di sana. Gitu. Pernah juga kita undang admin sana ke sini mau.

Emerha

Kalau diundang itu yang tanggung biayanya?

Iswandari Artiningsih

E.. biasanya kita,

Emerha

Perjalanan

Iswandari Artiningsih

Ngak, SPPD nya mereka.

Emerha

Yang BPKP itu ya,

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

yang datang ke sini

Iswandari Artiningsih

kita ngak e kita free.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Kan di sana juga punya DIPa.

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

untuk ke daerah-daerah gitu.

Q.2. Model eksternalisasi

Emerha

Tadi Ibu bilang ada, apa tidak dibentuk tim gitu,

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

untuk mengajarkan mereka

Iswandari Artiningsih

He em he em he em,

Emerha

tentang akuntansi, khususnya yang bukan akuntansi

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Nah itu bagaimana bisa apa kebiasaan untuk berbagi pengetahuan itu memang sudah muncul atau gimana?

Iswandari Artiningsih

Kita anu, belajarnya sambil kerja, kerja sambil belajar. Jadi ini kalau misalnya kita ketemu sebuah kasus

Emerha

He em...

Iswandari Artiningsih

a.. Kita diskusi, misalnya: saya lagi nggarap (11:56, suara Narasumber terlalu cepat) oh begini teorinya, saya kan misalnya kebetulan saya yang tahu, kemudian saya sampaikan. Mereka bisa ingat trus nanti disampaikan kalau ada yang mengalami kesulitan serupa. Paling gitu aja.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Dan lagian misalnya kan bisa e meminta temn-teman di samping saya, kek PP 71 itu dipelajari paling ngak kita ke SKPD juga saya sampaikan itu paling ngak tempat referens nya ke sana dulu kalau masih bingung ada BULTEK kalau masih bingung ya diskusi gitu. Biasanya Referensi kita ke sana.

Emerha

Jadi bisa timbal balik, mereka bisa datang ke sini?

Iswandari Artiningsih

ya.

Emerha

Timnya Ibu bisa ke sana?

Iswandari Artiningsih

Iya. He em, Sesuai kebutuhan. Tapi seringan mereka yang ke sini. atau kita lewat telpon lewat WA, gitu aja.

Emerha

Itu sudah jadi kebiasaan ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. Kalau pertemuan rutin ada setiap triwulan nah saya selenggarakan saya undang mereka semua di forum itu monggo kalau mereka ada yang mau disampaikan permasalahan atau apa silahkan.

Emerha

Hm..

Iswandari Artiningsih

Rutin saya lakukan tria tiap triwulan.

Emerha

Iya. Nah apa yang Ibu lakukan supaya e.. kebiasaan itu tetap terjalin seperti itu. Misalkan bagaimana Ibu menciptakan suasana, supaya mereka itu.

Iswandari Artiningsih

Hm..

Emerha

mau belajar?

Iswandari Artiningsih

He em. Ck. Iya, nek saya sih cuma bisa menghimbau, menyarankan,

Emerha

Hm..

Iswandari Artiningsih

kebetulan saya kan di sini punya teman-teman yang selain integritasnya tinggi, lingkungannya bagus, jadi mereka biar terbiasa

dan bagus sih kinerjanya. Nah trus ke SKPD nya juga saya berusaha menjalin kerja sama yang baik. Jadi mereka juga ketika kita saran kan ya banyak sih

Emerha

Hm..

Iswandari Artiningsih

yang bisa mengikuti yang kita maksud. Gitu.

Emerha

Kalau dari segi individunya mereka itu kalau menurut penilaian Ibu

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Mau mereka belajar?

Iswandari Artiningsih

Mau.

Emerha

Walaupun bukan akuntansi?

Iswandari Artiningsih

mau. Iya mungkin satu dua ada yang bekerja tanpa tahu apa yang dilakukan.

Emerha

Oh, Iya.

Iswandari Artiningsih

Ibaratnya kayak robot juga. Tapi kan itu wajar karna memang kemampuan orang beda-beda. Tapi buktinya sampe sekarang semua SKPD itu lancar. Ngak ada masalah. Jadi walaupun saya yakin mereka belum *ngeh* banget teori yang mereka lakukan itu apa. Tapi paling ngak mereka bisa melakukan itu. Gitu loh.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Perasaan bisa menyelesaikan laporan keuangan walaupun mungkin ketika ditanya secara teoritis mereka gak terlalu paham isinya dari laporan keuangan itu.

Emerha

Hm..

Iswandari Artiningsih

Tapi kan itu proses gitu, paling gak kita gak bosen-bosennya kita memberikan informasi jadi kalau mereka di sampe ada pemeriksaan mereka bisalah menjelaskan begitu, sebatas yang mereka mampu gitu.

Emerha

Hm..

Iswandari Artiningsih

Itu.

Emerha

Nah kalau soal monitoring pimpinan gimana Bu, tentang tadi, kegiatan ibu mengakomodasi mereka, supaya paham akuntansi? Apa ada?

Iswandari Artiningsih

ya kan kalau medianya kan setiap PPTK

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

Setiap bulan, akhir bulan harus bikin laporan kegiatan

Emerha

He em,

Iswandari Artiningsih

yang dari sana kan secara berjenjang melalui Subbag perencanaan pasti disampaikan monev nya ke atasan. Nah dari sana kan bisa di pantau, oh ini jalan. Nah ketika tidak ada hal-hal yang signifikan kan berarti segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Emerha

He em

Iswandari Artiningsih

Kemudian bisa dilihat juga kan tiap bulan nanti e perencanaan itu mengenyelenggarakan pertemuan sama PPTK. Nah dari sana dilaporkan kegiatannya apa dan selalu ada koordinasi antar bidang

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

dengan atasan, nah itu kan di sana juga tempat kita menyampaikan kalau ada kesulitan.

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

Tapi diluar itu setiap saat ketika memang dibutuhkan diskusi dengan atasan kalau kita ketemu hal-hal yang urgen ya gak masalah, ya datang aja, pasti kita diskusi cari solusi. Gitu aja.

Emerha

Kalau soal BIMTEK tadi itu,

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

itu ada kegiatan tersendiri di DPA?

Iswandari Artiningsih

Di BKD

Emerha

Di BKD

Iswandari Artiningsih

Karna kebijakan Kulon Progo tempat pelatihan-pelatihan itu ada di BKD.

Emerha

dikondisikan.

Iswandari Artiningsih

Nek kita bisanya menyarankan e.. misalnya e seklai-kali adain dong BIMTEK apa gitu kan BIMTEK akuntansi, atau BIMTEK penerusan aset atau apa gitu. Karna memang ini toh kebutuhannya apa, terutama kalau ada aturan-aturan baru. Gitu.

Emerha

Kalau misalkan terjadi pergantian e PPK,

Iswandari Artiningsih

He em, he em.

Emerha

yang di SKPD

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Nah itu apakah PPK yang lama itu mau membagi ilmunya ke yang baru atau dihandel langsung sama Ibu supaya mereka belajar di sini?

Iswandari Artiningsih

Nek biasanya itu kalau kami menyarankan di setiap SKPD

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

itu ada kaderisasi

Emerha

He em

Iswandari Artiningsih

jadi walupun nanti ada pejabat baru atau petugas baru paling gak ada lah yang berbagi informasi disitu.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Tapi kalau memang masih membutuhkan informasi ya lari ke kami.

Emerha

Hm...

Iswandari Artiningsih

Gitu.

Emerha

Jadi rutin sudah jadi rutinitas ya?

Iswandari Artiningsih

Iya, he em. Biasa.

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Ada juga yang benar-benar baru, ya udah lari ke kami. Biasa.

Emerha

Selain BIMTEK itu ada forum-forum atau apa?

Iswandari Artiningsih

Ya paling triwulanan

Emerha

Triwulanan.

Iswandari Artiningsih

Saya undang mereka dan ya setiap saat kita membuka bahasanya apa ya, Klinik gitu ya?

Emerha

He em...

Iswandari Artiningsih

Monggo setiap ada kebutuhan ke sini aja, boleh telpon, boleh datang. Dari dulu seperti itu.

Emerha

Kemarin kalau lewat komunikasi, misalkan Whatsapp bikin grup,

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

Itu ada?

Iswandari Artiningsih

Ada. He em.

Emerha

Jadi komunikasi lewat situ.

Iswandari Artiningsih

He em, he em

Emerha

di samping ketemu langsung.

Iswandari Artiningsih

He em, he em, he em. Biasanya nanti kalau kita ada hal baru gitu kan atau ada hal yang harus dilakukan dilakukan oleh teman-teman misalnya semua harus menjurnal saldo awal, gitu,

Emerha

He em

Iswandari Artiningsih

Itu kan misalnya, nah itu kita sampe kan. Teman saya, ada adminnya nanti di grup menyampaikan admin saya ke semua petugas akuntansi sudah langsung kita pandu di situ, jurnalnya ini debit kreditnya ini, yang di jurnal ini. Itu sudah kita sampaikan. Cuma kalau mereka petugas akuntansi discovery masih bingung ya monggo datang ke sini. Gitu. Kita seperti itu.

Emerha

Kalau pegawai-pegawainya Ibu yang akuntansi berapa orang semua, yang latar belakang akuntansi?

Iswandari Artiningsih

Di ruangan saya?

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

Berapa ya? e... gak ada 50%

Emerha

Gak ada.

Iswandari Artiningsih

Padahal kami ber-7 loh (tertawa)

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Gak ada 50%.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Tapi semua walaupun bukan berlatar belakang akuntansi lumayan lah dengan porsinya masing-masing ya.

Emerha

Em.

Iswandari Artiningsih

Karna kan ada ketugasannya masing-masing.

Emerha

Nah itu ada, ada kewajiban untuk ikut diklat misalkan kayak Ibu bilang tadi

Iswandari Artiningsih

Oh iya.

Emerha

Ada permintaan

Iswandari Artiningsih

Iya. Dulu diawal

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Ketika misalnya kita misalnya kita baru, baru belajar akrual basis. gitu.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

Prioritas utama yang ikut diklat adalah semua yang ada di sini.

Emerha

Akuntansi.

Iswandari Artiningsih

Iya. Di sini. Karna kewajiban kita kan mengajarin SKPD kalau kita gak bisa, ya gimana, gitu kan. Makanya ah hampir semua. Eh semua malah udah.

Emerha

Semua?

Iswandari Artiningsih

Kecuali yang, kecuali yang baru ya. Adakan satu dua baru.

Emerha

Itu semua wajib harus ikut diklat?

Iswandari Artiningsih

Iya saya utang makan gitu. Kan kadang BPKP juga e, tapi juga periodik ya ngadain. Nah saya sertakan siapa yang belum pernah ikut, itu yang harus ikut. gitu.

Emerha

Nah kalau tadi ada yang belum pernah ikut, trus ada yang sudah

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

Nah apakah yang sudah ikut itu biasanya mengajarin

Iswandari Artiningsih

ngajarin iya.

Emerha

em..

Iswandari Artiningsih

Nanti yang udah pernah

Emerha

Walaupun tidak ada jatah untuk ikut diklat.

Iswandari Artiningsih

Iya. Jadi kita satu orang bisa, maka dia akan mengajarkan pada temannya yang lain.

Emerha

Em...

Iswandari Artiningsih

Jadi kalau anak SKPD banyak yang datang kan tidak tunggu satu dua orang, semua bisa melakukan, gitu.

Emerha

Itu bagaimana sampe mereka mau mengajarkan? apa ada perintah dari Ibu atau dia sukarela?

Iswandari Artiningsih

Ngak sih, kesadaran.

Emerha

kesadaran ya.

Iswandari Artiningsih

He em. komitmen tadi itu.

Emerha

He em. BIMTEK itu dimana biasanya Bu? di Jogja atau di Luar?

Iswandari Artiningsih

e... Pernah di Jogja, pernah diselenggarakan oleh BPKP

Emerha

Iya.

Iswandari Artiningsih

tapi BKD juga pernah menyelenggarakan sendiri di Kulon Progo.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Pernah. Ada lagi kalau gak ada saya,

Emerha

Peran pimpinan untuk memberikan motivasi ada? untuk supaya mereka ikut belajar diklat, itu gimana?

Iswandari Artiningsih

Paling ketika pembinaan itu sih.

Emerha

Pembinaan?

Iswandari Artiningsih

He em. Ada..

Emerha

Kalau yang di dalam yang diselenggarakan oleh Pemda Kulon Progo ada? Untuk BIMTEK untuk yang akuntansi ?

Iswandari Artiningsih

Lewat BKPP

Emerha

Lewat BKPP Itu

Iswandari Artiningsih

Ada petugas akuntansi

Emerha

Rutin?

Iswandari Artiningsih

Ngak, gak. gak juga.

Emerha

Gak rutin berarti ya?

Iswandari Artiningsih

Tergantung ke, mereka juga kan dibatasi penganggaran dan begitu banyak yang harus diakomodir toh?

Emerha

Nah kalau misalkan semua yang sudah ikut diklat itu,

Iswandari Artiningsih

He em

Emerha

Apakah a.. pengetahuan yang mereka miliki itu misalkan dibikinkan sebuah apa? semacam manual atau semacam jobdes hasil

Iswandari Artiningsih

Oh itu ngak sih. Paling ya ibaratnya apa ya, kayak belajar biasa aja, antara teman sama teman. Gitu aja. Gak langsung dituangkan dalam dokumen itu. Ngak.

Emerha

Nanti kalau mereka didiklat trus dipindah, atau misalkan promosi naik jabatan otomatis kan,

Iswandari Artiningsih

Oh itu resiko,

Emerha

Gitu ya?

Iswandari Artiningsih

nanti kan ada orang baru datang ya, kita bareng-bareng lagi belajar.

Emerha

Itu gimana Ibu minta orangnya atau gimana?

Iswandari Artiningsih

e, ya paling kita sampaikan

Emerha

em...

Iswandari Artiningsih

kan setiap orang masuk sini sudah tahu to fox nya apa, akan seperti apa nah itu.

Emerha

Em..

Iswandari Artiningsih

dia sudah tahu. Harus belajar ini, harus belajar ini pelan-pelan berproses. Gitu.

Q.3. Model kombinasi

Emerha

Apakah selama ini sudah ada misalkan pengalaman-pengalaman dalam mengelola keuangan yang sudah bagus,

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

itu pernah dijadikan standar, standar untuk maksudnya jadi, jadi dasar untuk bikin Peraturan Bupati?

Iswandari Artiningsih

Ngak sih.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

ngak ngak.

Emerha

Atau jadi seakan practice yang baik?

Iswandari Artiningsih

E, ngak sih. Kalau kita itu yang kita lakukan standarnya ya aturan pusat.

Emerha

Aturan pusat ya?

Iswandari Artiningsih

Pusat seperti apa, amanahnya yang dalam peraturan disebut seperti apa itu yang kita terapkan. Itu aja.

Emerha

Em.... Yang terakhir Bu.

Iswandari Artiningsih

He emm

Emerha

setelah semua berproses tadi dapat WTP,

Iswandari Artiningsih

hm em.

Q.4. Model internalisasi

Emerha

a, apa prestasi yang , yang paling itu yang paling nyata setelah Ibu berusaha melakukan Pengelolaan keuangan yang baik?

Iswandari Artiningsih

Apa ya? Karna ya tadi itu, e.. komitmennya kan.

Emerha

em...

Iswandari Artiningsih

me.. laksanakan pengelolaan keuangan yang baik. mempertanggungjawabkannya dengan baik, transparansi sesuai ketentuan yaitu aja sih sebenarnya yang selalu berusaha kita pertahankan dan kita tingkatkan.

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

gak terlalu ke WTP nya. Karna WTP itu tadi pasti akan mengikuti. Gitu loh.

Emerha

Udah ada, udah ada misalkan terbentuk misalkan salah satu orang

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

Sudah jadi ahli gitu?

Iswandari Artiningsih

He em.

Emerha

lantas dilihat Kulon Progo itu sudah WTP,

Iswandari Artiningsih

He em,

Emerha

Wah ini tolong orangnya kita undang untuk

Iswandari Artiningsih

Oh,

Emerha

Itu ada?

Iswandari Artiningsih

Itu di teman saya di aset.

Emerha

di aset?

Iswandari Artiningsih

Iya kan e... pertama kali kan dulu kita,

Emerha

Pak Taufik itu?

Iswandari Artiningsih

Iya. Kita tidak WTP nya kan karna Aset, gitu toh database nya. Kemudian bersama timnya

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Pak Taufik itu mulai merintis database yang baik, menciptakan aplikasi lah akhirnya e, berbuah manis. Kita punya database asisten baik mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik. akhirnya kita bisa WTP. Nah aplikasi nya itu sudah sudah banyak dipakai di daerah-daerah lain, mungkin nanti bisa konfirm ya.

Emerha

He em

Iswandari Artiningsih

a, pak Taufik dengan timnya juga sering diundang, He em. Sampai ke Maluku sampai kemana.

Emerha

Itu terkait dengan pengelolaan keuangan juga?

Iswandari Artiningsih

Nge, khusus yang aset.

Emerha

Khusus aset?

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

Kalau yang khusus akuntansi?

Iswandari Artiningsih

Kalau yang pengelolaan keuangan,

Emerha

He em,

Iswandari Artiningsih

ngak sih.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Karna kan setiap daerah punya ini sendiri-sendiri ya.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Dan sama lah gitu. paling kalau ketika ada studi banding yang kita cuma sharing, gitu aja. Diskusi gitu aja.

Emerha

Selama Ibu di sini apa udah ada Pemda-pemda lain studi banding untuk melihat?

Iswandari Artiningsih

Sering. He em.

Emerha

Udah berapa itu kira-kira?

Iswandari Artiningsih

Wah banyak. (ketawa)

Emerha

gak bisa dihitung ya.

Iswandari Artiningsih

Sering gitu.

Emerha

Itu rata-rata darimana itu Pemdanya?

Iswandari Artiningsih

Semua sih pulau Jawa

Emerha

He em,

Iswandari Artiningsih

Sulawesi,

Emerha

He em..

Iswandari Artiningsih

Sumatera sering. Kadang Pemdanya kadang dewannya.

Emerha

Hem..

Iswandari Artiningsih

Banyak. He em. Saya gak hafal. He he (ketawa)

Emerha

Itu sejak tahun berapa ya Bu, banyak kunjungan itu?

Iswandari Artiningsih

Em, kayaknya sejak kita WTP.

Emerha

2013?

Iswandari Artiningsih

2013, He em. Tapi sebelum itu memang udah banyak yang studi banding untuk hal lain gitu toh.

Emerha

He em.

Iswandari Artiningsih

Kalau yang khusus tentang bagaimana penerapan akrual basis ya sejak kita WTP itu. Banyak beberapa Pemda yang studi banding ke kita.

Emerha

Iya rata-rata,

Iswandari Artiningsih

Terutama yang aset

Emerha

He em, Aset. rata-rata yang ditanyakan itu tentang pengelolaan yang accrual basic itu ya?

Iswandari Artiningsih

Iya. He em. Sama aset. Bagaimana sampe Kulon Progo itu kok bisa gitu,

Emerha

Iya

Iswandari Artiningsih

Beralih dari aset yang belum beres ke database aset yang lebih baik. Gitu Pak Taufik sampe kemana-mana loh itu. Ho ngo. Kebetulan kan dia tergabung di PSKP UGM

Emerha

Iya UGM.

Iswandari Artiningsih

Jadi Sering ikut-ikutan ngajar. Bahkan untuk tema-tema yang bukan aset. Dia juga.

Emerha

Oke Bu untuk wawancara pagi ini saya rasa sudah cukup,

Iswandari Artiningsih

Iya.

Emerha

Nanti Saya olah lagi datanya. Kalau misalnya ada yang kurang, saya

Iswandari Artiningsih

Monggo.

Emerha

wawancara lagi.

Iswandari Artiningsih

Cepat dirampungkan tesisnya.

Emerha

Iya. he he (tertawa).

- d. Wawancara ke-4 dengan Iswandari Artiningsih, pada Senin, 17 September 2018, pukul 11.31 WIB di ruang kerjanya, Kantor BKAD. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Iya... ini kan kalo dalam penulisan ilmiah itu kan aturannya di kita wawancara itu kan harus lengkap naman orang ada di tulis di bawahnya kan, nah.... saya mau konfirmasi ke ibu... ibu nggak keberatan kalo nama ibu di tulis

Iswandari

o.... harus... harus di tulis...

Emerha

Ya... bisa kalo... kalo yang bersangkutan misalkan ada hal-hal yang tidak ingin, misalkan mengandung rahasia atau apa bisa juga dalam bentuk inisial aja...

Iswandari

Nggak apa-apa...

Emerha

Iya jadi... mungkin saya tulis lengkap seperti itu

Iswandari

Iya... nggak apa-apa okey..., ada lagi...

Emerha

Ya... itu yang pertama... yang kedua...

Iswandari

Berarti di sini ada beberapa cuplikan...

Emerha

Iya... nggak semua saya ambil, Cuma yang... mana yang kebetulan kena dengan narasinya itu yang saya lampirkan sebagai bukti...

Iswandari

Ya... ya...

Emerha

Kebetulan kan sudah mau publish saya..., hehehehehe. Nah ini kan kemaren soal... kekurangan kendala... yang ibu hadapi di sini kan ibu kemaren itu masalah apa ya... karena nggak ada PP... PTK di BPKAD ya...

Iswandari

Oha ya...

Emerha

Nah ini kan kemaren soal kekurangan kendala.... yang ibu hadapi di sini kan ibu kemaren itu masalah apa ya... karena nggak ada PP... PTK di BPKAD ya...

Iswandari

He'em...

Emerha

Nah... itu kalo misalkan dibentuk PTK di BPKAD itu gimana jadinya?

Iswandari

e... tahun depan, tahun depan akan di...

Emerha

Oh... itu memang akan diganti ya...

Iswandari

Iya... he'e... sudah akan di...

Emerha

Itu posisinya di mana di Terbin atau...

Iswandari

Tetep di sini di BKAD

Emerha

Oh... berarti itu dia SK kan ya..

Iswandari

Ya... pasti nanti ada SK Bupatinya, kemudian nanti akan ditunjuk siapa yang jadi PPK dan satuannya, sudah direncanakan untuk 2019 akan dibentuk mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kemaren

Emerha

Hem... yang terkait dengan yang bikin apa... akuntansi di sini ya... di bidang-bidangnya

Iswandari

Ya... ya...

Emerha

Oh... itu saya pikir bukan orang di Organ ya..?

Iswandari

Oh nggak... nanti tergantung kebijakan dari Kepala BKAD selaku SKPKAD nanti akan menunjuk siapa e... yang jadi petugas akuntansi siapa, yang jadi bendahara siapa itu kan...

Emerha

Oh... jadi masing-masing bidang-bidang itu mengusul ya...

Iswandari

Bisa jadi langsung ada penunjukkan dari e... Kepala gitu, yang jelas nanti ada persatuan yang akan dibentuk satuan

Emerha

Kalo bendahara.... apa pengeluaran khusus di PPKAD itu ada juga

Iswandari

Ada... sekarang kan...

Emerha

Itu posisinya di Organ gitu ya... oh di Sekertariat ya..

Iswandari

Di sekertariat... nggak disekertariat semua satuannya ikut di... bawah sekertariat gitu

Emerha

Hem... berarti yang urus-urus belanja..., bunga belanja, bantuan sosial

Iswandari

Di Sekertariat Subbag Keuangan

Emerha

Di sekertariat ya... oh ya... okey... kemudian yang terakhir ibu.. kebetulan kan nanti ada lampiran nama-nama partisipan di bawah sebagai bukti bahwa saya wawancara dengan ini, ibu ini, bapak ini, ibu keberatan nggak kalo saya ambil foto ibu

Iswandari

Ya... nggak apa-apa, hehehehe nggak apa-apa

Emerha

Ya sudah disitu aja ya bu...

Iswandari

Iya...

Emerha

Satu... dua... okey...ya.. itu aja bu... makasih banyak..

Iswandari

Iya nggeh...

Emerha

Jadi soalnya saya....

8. Kuni Mas'adah

- a. Wawancara ke-4 dengan Kuni Mas'adah pada 16 Juli 2018, pukul 10.52 di ruang kerjanya, Ruang Rapat Kepala BKAD. Topik utama wawancara tentang proses belajar pengetahuan transparansi dan akuntabilitas. Wawancara ini merupakan wawancara tentang topik RM3.

Emerha

Ya... topik saya kali ini tentang ini bu e.. tentang pengetahuan transparansi dan akuntabilitas

Kuni Mas'adah

He'em..

Emerha

Jadi ibu selaku PPK dan PPTK ya..

Kuni Mas'adah

Ya..

Emerha

Ya.. e.. menurut Ibu transparansi kalo di bidang PPTK itu, seperti apa yang sudah dijalani sekarang?

Kuni Mas'adah

e.. data yang kita.. terkait dengan transparansi, bahwa terkait dengan laporan yang kita buat, laporan yang kita sajikan itu, e.. bisa dilihat oleh semuanya, transparan siapa pun bisa e.. mengetahui, jadi tidak terbatas data itu hanya kita gunakan terus kita sembunyikan itu ndak. Kita akan berikan kepada siapa saja yang berhubungan dengan keuangan kita yang membutuhkan data kita, kita akan berikan, kita akan jelaskan. Jadi data itu tidak kita sembunyi.. sembunyikan..

Emerha

He'em, kalo soal akuntabilitas di bidangnya ibu seperti apa?

Kuni Mas'adah

e.. terkait dengan akuntabilitas, bahwa data itu kita sajikan sesuai dengan e.. regulasi yang ada. Kemudian e.. data itu bisa di.. pertanggung jawabkan

Emerha

Okey..

Kuni Mas'adah

Saya sambi ya..

Emerha

Ya.. silahkan

Kuni Mas'adah

Bisa yang lain mungkin, mau menambah pertanyaan yang perlu dibutuhkan tadi

Emerha

e.. terkait dengan yang ibu bilang tadi, siapa saja boleh terus sesuai dengan peraturan, selama ini sudah diterapkan itu?

Kuni Mas'adah

Sudah.. sudah.. siapa saja maksudnya siapa saja yang berhubungan dengan keuangan kita, contohnya ketika ada Mahasiswa mau penelitian, mau melihat data e.. laporan, laporan keuangan tentunya apa yang dibutuhkan itu terkait data penerimaan, data penda.. data pendapatan, data pengeluaran itu kita akan berikan

Emerha

Ya... sebelumnya tentang transparansi dan akuntabilitas itu, Ibu pernah belajar di mana itu ibu?

Kuni Mas'adah

Saya belajar, hanya ketika kami e.. ada regulasi kita baca, kalo terkait dengan Bimtek, diklat kami, kebetulan kami nggak.. nggak, nggak pernah mendapatkan jatah untuk itu..

Emerha

Oh.. berarti belajar sendiri ya, otodidak ya?

Kuni Mas'adah

Ya.. ya... ya.. kita selalu ikuti regulasi yang ada, kita baca regulasi yang ada bahwa kita itu e.. sebagai HSM harus melaksanakan tugas kita seperti ini, Tupoksi kita seperti ini. Nah.. Tupoksi kita itu yang kita terapkan terhadap e.. pelaksanaan kerja kita sehari-hari

Emerha

Cara Ibu belajar itu kemaren dengan cara bu, misalkan berinteraksi dengan teman, seperti yang ibu bilang tadi ada diklat?

Kuni Mas'adah

Kami tidak pernah dapet diklat

Emerha

Tidak pernah dapet diklat ya..

Kuni Mas'adah

He'e, kami e.. ketika kita dapet sosialisasi kami juga jarang dapet persiapan, sosialisasi yang terkait dengan regulasi itu ada, kita e.. memang selalu ada jatah sosialisasi mungkin pak Kepala, mungkin Bu Sekertaris itu dapat sosialisasi, kemudian ketika ada sosialisasi-sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi itu akan selalu diturunkan ke bawah walaupun saya tidak secara langsung mendapatkan, tapi saya mendapatkan turunan dari atasan seperti itu

Emerha

Hem...

Kuni Mas'adah

Jadi.. kemudian ketika kita dapatkan turunan dari atas terkait hal, katakanlah terkait hal e.. pelaksanaan pengelolaan keuangan, kita mengacu pada permendagri, katakanlah oh.. permendagri nomer berapa, oh.. permendagri 13 ya.. nanti tolong terkait dengan permendagri 13 yang kita butuhkan apa. Ketika kita membutuhkan e... penata usahaan, kita kan.. e.. saya akan lihat, seperti apa to.. aturan penata usahaan, seperti itu

Emerha

Itu.. dimana itu kemare dapat aturan turunan di.. dikasih langsung di sini di unit kerja?

Kuni Mas'adah

Biasanya kalo mendapatkan seperti itu, ketika di apel itu mereka yang memperoleh itu akan.. memberikan oleh-olehnya kepada kita semua jadi akan diberikan, jadi diberitahukan e.. kami habis melaksanakan sosialisasi katakanlah, sosialisasi Permendagri nomer sekian itu akan di sampaikan ketika apel. Nah ketika apel itu diturunkan, mereka sudah memberikan oleh-olehnya, memberikan penjelasannya, terkait dengan penjelasan secara detail, kita akan e.. melihat e.. regulasi yang ada jadi kita selalu download aturan-aturan yang ada

Emerha

Hem.. jadi Cuma di kasih tahu saja ini aturan ini terus ibu download ya..

Kuni Mas'adah

Ya.. kemudian kami yang membutuhkan, oh.. kami butuh terkait dengan apa gitu, kami yang.. kebetulan kami berhubungan dengan laporan keuangan kami akan nurut terkait pasal-pasal yang terkait dengan laporan keuangan, kemudian kalo undang-undang itu ada yang e.. di dalamnya terkait dengan pendapatan, bidang pendapatan tentunya juga akan mendownload sendiri terkait dengan aturan-aturan yang mereka butuhkan

Emerha

Jadi berarti mudah-mudah untuk mendownload itu gampang sekali ya..

Kuni Mas'adah

Gampang sekali, kita untuk mendapatkan itu kita gampang sekali, jadi kita tidak usah susah-susah untuk mendapatkan aturan, begitu aturan itu ada kita akan sudah disajikan oleh e.. media media.. yang sudah jalan dengan baik, yang IT nya itu sudah begitu

Emerha

Ibu tadi bilang tidak.. tidak pernah ikut Bimtek ya?

Kuni Mas'adah

He'em

Emerha

He'e, karena tidak pernah ikut Bimtek ibu belajar sendiri?

Kuni Mas'adah

Tadi dapat turunan tadi, kan diturunkan kemudian di sampaikan, nah.. ketika disampaikan itu kita mau mempelajari regulasi yang ada, nah...

Emerha

Nah.. yang mereka turunkan itu sudah jadi atau baru sekedar informasi?

Kuni Mas'adah

Informasi.. informasi nya..

Emerha

Informasi doang

Kuni Mas'adah

Informasi.., kemudian dari informasi itu kita.., e.. dari informasi itu katakanlah, ada informasi undang-undang yang baru, undang-undang baru itu terkait apa, oh.. terkait pengelolaan keuangan, kita selaku pengelola keuangan tentunya akan mencari undang-undang itu. Isinya seperti apa to, yang harus kita terapkan seperti apa, kita harus jalan seperti apa, nah.. seperti itu. Terus biasanya kalo undang-undang ada tentunya itu Pemerintah Daerah itu akan menurunkan regulasinya cuklok cuklik nes, kita mengacu pada itu

Emerha

Hem... BPJR undang-undangnya udah jadi, nah ini yang dipelajari?

Kuni Mas'adah

Nggak..

Emerha

Oh.. nggak nggak gitu ya..

Kuni Mas'adah

Kita hanya sekedar tahu aja, undang-undangnya, oh undang-undangnya seperti ini, aturannya seperti ini. Kalo sudah ada aturan seperti itu, mestinya bagian hukum punya kewajiban untuk menurunkan regulasi yang e.. di bawahnya walaupun acuannya tetep undang-undang yang ada. Undang-undang e.. peraturan pemerintah, ada undang-undang, kemudian ada Permendagri, nah.. dari Permendagri itu tentunya akan diturunkan menjadi tentunya peraturan Perkada, dari Perkada mungkin nanti akan ada Cuklak Cuknisnya, kita akan sela.. kebetulan kita terkait dengan pengelolaan keuangan ada Cuklak pengelolaan keuangan ada, Cuknisnya ada. Cuknis APBD, Cuklak pengelolaan keuangannya kita ada

Emerha

Menurut ibu informasi yang ibu terima tadi sama aturan-aturan itu bisa menambah pengetahuannya ibu?

Kuni Mas'adah

Bisa.. dan itu bisa kita terapkan e.. terkait dengan Tupoksi kami. Dan itu memang sebagai acuan kita, jalan kita melaksanakan tugas, acuan kita itu

Emerha

Selama ini memang, ibu udah nggak ada.. nggak ada sumber.. nggak ada sumber lain selain itu yang ibu terima pengetahuan tentang transparansi tadi?

Kuni Mas'adah

Nggak ada..

Emerha

Nggak ada, itu saja ya.., program Bimtek itu, itu diangkat berapa, sampe bisa ibu tidak bisa ikut itu kenapa, apakah memang tidak dianggarkan Bimtek atau?

Kuni Mas'adah

Anggaran Bimtek itu ada dianggarkan, tapi itu minim sekali, anggaran Bimtek itu hanya 12 juta untuk satu Kabupaten, satu.. Instansi kita ini untuk satu tahun, sedangkan untuk hal-hal seperti itu, Bimtek seperti itu, paling ndak satu orang anggarannya 5 juta, kita paling hanya bisa mengirim 2 orang dalam satu tahun, itu tahun-tahun kemaren. Tahun ini saya tidak tahu kita masih ada anggaran Bimtek apa ndak, dan di Bimtek itu biasanya, Bimtek yang sangat-sangat-sangat urgent kan terkait dengan hal-hal yang baru. Kalo terkait pengelolaan keuangan jelas aturan semuanya regulasinya sudah ada itu mungkin sudah tidak penting lagi. Bimtek itu terkait dengan aturan-aturan yang bener-bener baru, dan bener-bener urgent kita harus laksanakan

Emerha

Hem.. selain ibu belajar sendiri, apa pernah juga diskusi sama teman-teman?

Kuni Mas'adah

Pernah.., kita selain belajar aturan terkait dengan pelaksanaan keuangan tentunya suka ada kendala, suka ada hal-hal yang kadang kurang pas kita terapkan dengan, kita baca dengan aturannya, tetapi sebenarnya itu memang perlu kebijakan, dan itu sebenarnya dibenarkan. Nah untuk hal itu kita selalu konsultasi, selalu e.. diskusi dengan dengan teman-teman, hasil diskusi kita akan selalu tanyakan ke atas, saya bawa ke atas, ke Bu Seketaris, Bu Seketaris oke, coba kita nanti minta kebijakan Bapak Kepala seperti apa, nah.. hal-hal seperti itu akan e.. ketika kita temui di lapangan itu akan, banyak sekali sandunga-sandungan. Sebagai contoh katakanlah e.. terkait dengan pengelolaan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas e.. yang mana, perjalanan dinas itu, perjalanan dinas ditanggung oleh Daerah katakanlah, tetapi uang makan dan akomodasi ditanggung oleh e..

Emerha

Penyelenggara..

Kuni Mas'adah

Pengundang, ya.. katakanlah ber.. e.. menghadiri undangan nah.. itu kadang-kadang kita tersandung, biaya makannya berapa, perjalanan dinasnya berapa, terus yang dikasih kan makannya berapa kali. Nah itu adalah hal-hal yang tidak ada aturannya, tetapi kita harus e.. menggunakan kebijakan. Katakanlah biaya perjalanan dinas 2 hari, katakanlah 2 hari tentunya uang makannya 2 hari tapi di sana menghadiri undangan, ketika menghadiri undangan mereka dapet makan, nah.. perjalanan dinas itu makannya dikasih kan apa ndak, itu diaturan tidak ada, tapi itu perlu kita terapkan. Nah.. dengan kebijakan-kebijakan, oh.. kalo perjalanan dinas katakanlah 2 hari, di sana dapet undangan otomatis yang sehari dapet makan, makannya yang diberikan 1 hari saja. Tapi itu diaturan kan tidak ada aturan seperti itu

Emerha

Mungkin diskusi-diskusi dilakukan dimana, di tempat kerja atau?

Kuni Mas'adah

Di tempat kerja, diskusi langsung ketika kita ada masalah, kita langsung bagaimana pemecahannya, oh.. seperti ini kemudian langsung kita bawa langsung, jadi tidak pernah kita diskusi terus sesuai dengan FGD, semacam FGD kita ngundang kemudian ini kita nggak, karena kita memang anggaran-anggaran terkait dengan rapat njeh.., itu karena uang-uang rapat, uang FGD kita tidak ada, jadi diskusi secara spontan

Emerha

Menurut ibu, dengan diskusi itu bisa menambah pengetahuan ibu?

Kuni Mas'adah

Bisa..

Emerha

Bagaimana bisa?

Kuni Mas'adah

e... karena dengan e.. ketika kita diskusi itu akan.. pasti karena ada masalah, nah.. masalah itu kan akan e.. salah satu pendidikan kita, belajar kita adalah dari masalah, kita bisa menyelesaikan masalah, itu akan banyak menambah pengetahuan kita, tanpa ada masalah njeh.. tanpa ada masalah kita mulus-mulus aja ya mungkin, sepengetahuan kita ya segaris lurus itu, tapi dengan berkembangnya dengan adanya masalah pengetahuan kita akan semakin banyak

Emerha

Berarti ketika ada masalah baru di diskusikan ya...?

Kuni Mas'adah

Ya.. dan masalah-masalah itu banyak sekali, seandainya di masukan itu banyak sekali

Emerha

Diskusi itu dilakukan antar sesama atau di..?

Kuni Mas'adah

Antar sesama

Emerha

Ada atasan juga..?

Kuni Mas'adah

Antar sesama.. kemudian oh.. antar sesama kalo sudah antar sesama nanti kita bawa ke atasan, kita antar ke atasan berjenjang

Emerha

Kalo untuk rapat-rapat pertemuan itu ada juga diberi kesempatan ikut ibu?

Kuni Mas'adah

Yang namanya rapat-rapat, pertemuan itu sudah.. e.. dianggarkan njeh, dan anggaran itu sudah dihitung, sudah direncanakan e.. awal tahun, jadi rapat ini sebenarnya, rapat haknya siapa gitu, oi.. yang punya anggaran rapat adalah di.. Subag umum, Subag keuangan itu tidak ada anggaran rapat. Nah.. ketika sangat urgent dan memang membutuhkan.., membutuhkan rapat yang itu memang e.. harus itu.. kita akan minta ke Subag umum, itupun kalo Subag umum anggaran kasnya ada, kalo tidak ada ya kita lakukan seperti itu

Emerha

Hem.. jadi kalo untuk rapat memang ada, disediakan ruang rapat, tersedia?

Kuni Mas'adah

Ada ruang rapat, kita punya 2 ruang rapat di atas

Emerha

Selama ibu, jadi BPK sama PTK apa ibu pernah.. apa ibu pernah diundang ahli dari UGM akademisi untuk mengajarkan ibu, tentang gimana mengusahakan keuangan?

Kuni Mas'adah

Belum..

Emerha

Belum ya.., ndak pernah undang?

Kuni Mas'adah

Nggak pernah dapet undangan

Emerha

Kalo.. kalo lewat Bimtek, misalkan mereka dipanggil, ada Bimtek di sini ada?

Kuni Mas'adah

Nggak ada

Emerha

Belum ada juga ya..

Kuni Mas'adah

Belum ada juga, paling e.. Bimteknya Subag e... BUD Bimteknya kita, kemudian untuk menyamakan visi gitu, itu ada

Emerha

Dari BUD yang..

Kuni Mas'adah

Dari perbendaharaan kita sendiri

Emerha

Dari BUD yang dilaksanakan, BUD yang dilaksanakan, diundang semua BPK

Kuni Mas'adah

Ya.. untuk mengundang e.. Subag keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan

Emerha

Itu ada?

Kuni Mas'adah

Itu pernah.. pernah kami diundang sekali, tapi kan itu e.. intern ya.. antar hanya antar bidang, itu diundang. Dan itu sebenarnya, apa yang mereka sampaikan itu kita sudah jalankan

Emerha

Berarti itu ditingkat internal ya?

Kuni Mas'adah

Ya..

Emerha

Kalo yang dari tadi.. yang dari luar?

Kuni Mas'adah

Dari semacam dari UGM, itu belum belum..

Emerha

Belum ada..

Kuni Mas'adah

Belum..

Emerha

Berarti yang didatangkan belum ada, yang ibu juga ikut yang keluar juga belum pernah ya?

Kuni Mas'adah

Tidak pernah saya, sekarang saya ikut. Dulu tahun berapa ya.. pernah juga ikut Bimtek itu tahun 86, eh.. 2000.. 2000 2006 udah lama sekali itu, aturan Bimtek, tapi aturan aturan yang baru setelah tahun 2000 ini, nggak nggak pernah kita ikuti regulasi

Emerha

Sekarang itu, jarang lagi ada menggunakan penyuluhan Bimtek ya?

Kuni Mas'adah

Jarang.. jarang..

Emerha

Kenapa itu?

Kuni Mas'adah

Saya tidak tahu

Emerha

Atau memang dianggap semua sudah tahu ya?

Kuni Mas'adah

Ya.. sebenarnya ada juga mungkin di Bimtek, Bimtek bendahara itu ada juga, ada Bimtek bendahara, tapi kebetulan juga saya belum pernah ikut Bimtek bendahara

Emerha

Nah.. sebelum ibu jadi itu, ibu udah pernah dipromosiin jabatan, kan ibu udah berapa lama jadi Kasubag keuangan?

Kuni Mas'adah

Saya 2000.. 2013..

Emerha

2013 sampai hari ini?

Kuni Mas'adah

Sampai hari

Emerha

Itu sebelum 2013 ibu menjabat apa?

Kuni Mas'adah

Saya bendahara

Emerha

Oh.. berarti ibu belum pegang jabatan struktural?

Kuni Mas'adah

Belum

Emerha

Oh.. berarti dari bendahara langsung promosi jadi Kasubag keuangan?

Kuni Mas'adah

Kasubag keuangan..

Emerha

Berapa lama waktu itu jadi bendahara?

Kuni Mas'adah

Saya jadi bendahara sejak 2009

Emerha

2009

Kuni Mas'adah

Sampai 2013

Emerha

2013, berarti di situ naik pangkat ya, jadi kenaikan pangkat ke 3B ya waktu itu

Kuni Mas'adah

Iya..

Emerha

Hem.., nah.. waktu ibu jadi bendahara berarti, ilmu yang ibu dapat dari bendahara itu diterapkan di

Kuni Mas'adah

Pengelolaan keuangan ini

Emerha

Kasubag keuangan?

Kuni Mas'adah

Ya..

Emerha

Terus yang beberapa ibu menilai, seberapa baik transparansinya ketika ibu mela.. melaksanakan itu?

Kuni Mas'adah

Kebetulan ketika saya jadi bendahara, saya bendaharanya bendahara BPKD njeh, bukan bendahara SKPD, jadi bendahara pengelolaan keuangan yang saya jalani adalah pengelolaan keuangan hibah dan bantuan sosial. Ya memang e.. ketika saya jadi bendahara, banyak sekali e.. ilmu yang kami dapatkan, untuk kami terapkan sebagai Kasubag keuangan, memang hampir semuanya ketika saya jadi bendahara, ketika saya terapkan cocok karena memang sudah linknya ke sana

Emerha

Berart memang pas?

Kuni Mas'adah

Pas..

Emerha

Ilmunya dengan jabatannya?

Kuni Mas'adah

Iya, cuman kan ketika saya jadi bendahara kan BPTKP ketika kami menjabat itu memang kami membawahi sampai BKP sampai SKPD, itu yang SKPD itu tidak serumit yang BPKD

Emerha

Kalo selama ibu di BPKD itu kan bendaharanya tugasnya kan beda dengan yang di SKPD, nah.. ketika ibu jadi Kasubag keuangan otomatis ibu akan ketemu dengan masalah-masalah dari SKPD, nah itu bagaimana ibu me.. menyesuaikan pengalaman ibu?

Kuni Mas'adah

Tidak masalah karena memang e.. semuanya semua pekerjaan itu e.. aturannya bisa kita baca, kita punya atasan ketika kita punya masalah, kita ada tempat mengadu, maksudnya ada tempat e.. bertanya untuk mencari penyelesaian

Emerha

Hem.. berarti e.. apa sambil lalu ya.. jadi setiap saat ibu bisa bertanya ke orang itu?

Kuni Mas'adah

Iya bisa, iya bisa, dan kebetulan tiap tahun kita diperiksa oleh BPK jadi e.. minimal kalo diperiksa itu oh.. sudah hasilnya baik, tahun depan kita sudah bisa berjalan e... mengikuti tahun yang sudah sudah

Emerha

Tadi hasil hasil diskusi, dialog dengan teman-teman ibu tadi apakah hasilnya itu pernah di dokumentasi kan atau bagaimana?

Kuni Mas'adah

Jarang, karena hasilnya kami e.. katakanlah kami diskusi oh.. hasilnya A, begitu hasilnya A, kita tanyakan kepada atasan secara beknizem, oh ya.. memang sebaiknya seperti itu, tapi kalo atasan e... oh tidak sebenarnya e.. alurnya itu gini gini gini, kita akan diberikan penjelasan. Nah.. penjelasan seperti itulah yang nanti akan kita terapkan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan itu. Jadi kami jarang mendokumentasikan e.. diskusi-diskusi yang sifatnya hanya spontanitas

Emerha

Jadi untuk melapor ke atasan gimana, spontan juga nggak tertulis?

Kuni Mas'adah

Untuk melaksanakan.. iya.. bisa.. bisa..

Emerha

Jadi nggak dibikin kayak transtap gitu, bahwa hasil diskusi kami gini-gini-gini, nggak seperti itu?

Kuni Mas'adah

Tidak-tidak-tidak-tidak, oh kami ada masalah katakanlah masalah seperti ini ini ini, diskusi temen-temen seperti ini bagaimana, oh.. sebenarnya memang seperti itu, atau oh.. tidak harusnya ini-ini-ini, kalo seperti itu kami langsung sampaikan ke temen-temen, kami laksanakan seperti apa, hasil arahan itu atasan..

Emerha

Waktu ibu pindah dari bendahara ke Kasubag keuangan itu ibu juga biasa, mengajarkan kepada staf-staf itu?

Kuni Mas'adah

Biasa, ke temen-temennya ya.., temen-temen kita sudah temen-temen biasa kalo memang ada masalah, ada masalah kah nanti saya tanyakan e.. sampai di mana pengelolaan keuangan, Bu perlu ini-ini ini, okey kalo perlu mari kita bahas bersama. Atau ini perlu penghitungan UP sebaiknya Upnya mau berapa, ya udah.. kita cari jalan telah, kita cari kira-kira yang bisa kita LS kan berapa, yang bisa yang bisa kita UP kan katakanlah berapa, itu hanya diskusikan secara spontan, mari kita hitung bareng-bareng

Emerha

Kalo ibu selaku Kasubag keuangan ibu biasanya belajar ke siapa, kalo hal-hal yang ibu tidak pahami?

Kuni Mas'adah

Kami belajar.. e.. ada regulasi kami belajar regulasi, regulasi tidak paham kami akan tanyakan ke atasan secara perjanjian

Emerha

Terus kalo yang sudah ikut diklat di luar, atau diklat di dalam, tadi kan ibu bilang ibu belum pernah ikut diklat, tapi ibu lihat orang-orang yang sudah ikut diklat itu apakah diwajibkan membuat laporan?

Kuni Mas'adah

Ya..

Emerha

Laporan hasil diklat gitu ya?

Kuni Mas'adah

Ya laporan hasil

Emerha

Itu dalam bentuk apa?

Kuni Mas'adah

Laporan hasil perjalanan dinas dia

Emerha

Laporan hasil perjalanan dinas?

Kuni Mas'adah

Iya, karena ketika ikut diklat kan mereka melaksanakan perjalanan dinas, nah.. hasil perjalanan dinasnya seperti apa

Emerha

Itu memang sudah kewajiban ya, harus?

Kuni Mas'adah

Ya.., ketika melaksanakan perjalanan dinas harus

Emerha

Kalo.. misalkan ada masalah, masalah-masalah tentang pekerjaan apakah pernah ibu, misalkan minta ke pimpinan untuk mengadakan workshop Bimtek gitu, supaya mereka lebih paham itu pernah ada?

Kuni Mas'adah

Belum sih.. kalo ada masalah-masalah kami e.. biasanya bu kami ada masalah ini, kami belum paham, okey nanti kita undang siapa yang paham untuk bisa menjelaskan hanya seperti itu saja, katakanlah terkait dengan pengelolaan keuangan kita harus melaksanakan transfer non tunai katakanlah itu memang kewajiban bendahara, ya.. kita akan belajar.. sebenarnya yang paham non tunai siapa

Emerha

Itu biasanya siapa yang di undang itu, yang ibu bilang itu?

Kuni Mas'adah

e.. kebetulan terkait dengan pelaksanaan non tunai ini pernah kita pernah ada yang ikut magang di Pusat yaitu di bidang perbendaharaan, mereka yang ikut magang ke sana sedangkan yang harus melaksanakan adalah kita di e.. pengelola keuangan, ya kita tanya perlakuannya itu kepada mereka

Emerha

Itu ahli dari mana, dari kementerian?

Kuni Mas'adah

Bukan juga sih, itu temen-temen kita, temen kita sendiri, temen kita sendiri yang ikut magang di Pusat, kebetulan yang ikut magang adalah bukan pengelola keuangan SKPD tapi dia adalah bendahara daerahnya pengelola keuangan umum daerah, jadi mereka yang berhak untuk menjelaskan kepada OPD-OPD

Emerha

Tadi tidak ada itu ya.., tidak ada hasil diskusi tadi tidak di.. di.. dok.. di dokumentasikan tapi apakah ada semacam data base, misalkan ada himpunan peraturan?

Kuni Mas'adah

Kalo peraturan ada..

Emerha

Itu ada data basenya?

Kuni Mas'adah

e... regulasi.. regulasi kita akan Cuklak dan Cuknis, Cuklak-Cuknis lah.. itulah yang kita pegang, kita pedomani untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan hanya ketika kita tersandung masalah-masalah itu baru kita diskusi, tapi sebenarnya masalah-masalah itu pun masih dalam koridor Cuklak dan Cuknis itu cuman tidak dijelaskan secara rigit kan gitu

Emerha

Cuklak dan Cuknisnya itu ada

Kuni Mas'adah

Ada..

Emerha

Ini ya.. ini ya bu ya..

Kuni Mas'adah

Ya.., ada

Emerha

Berarti kalo ada apa-apa ibu tuh tinggal..

Kuni Mas'adah

Buka ya..

Emerha

Itu pernah ada aturan-aturan baru, sering diperbaharui juga?

Kuni Mas'adah

Diperbaharui

Emerha

Itu cetak.. cetak sendiri atau gimana ini, ini dianggarkan biaya nya?

Kuni Mas'adah

Di anggarkan biayanya

Emerha

Hem.. berarti ada ya?

Kuni Mas'adah

Ada

Emerha

Tadi seperti ibu bilang, ada dari mana tadi mengundang dari POD lain

Kuni Mas'adah

Hem..

Emerha

Di Pemda tadi di BUD..

Kuni Mas'adah

Bendahara.. bendahara umum daerah

Emerha

Iya, itu pernah ada taksiran antar Kabupaten untuk mengajarkan di sini?

Kuni Mas'adah

Tidak..

Emerha

Ndak ada ya?

Kuni Mas'adah

Saya belum pernah dengar untuk saing antar Kabupaten, paling kalo Kabupaten lain ke sini itu dalam rangka e.. studi komparasi gitu

Emerha

He'em studi banding

Kuni Mas'adah

e.. seperti itu, kalo mungkin kita juga terkait dengan kebutuhan menyamakan visi itu kita studi komparasi pernah juga kita studi komparasi tapi terkait e.. hibah dan bantuan sosial

Emerha

Ya.. khusus yang dokumentasi ini ya ada orangnya, yang.. maksudnya yang khusus?

Kuni Mas'adah

Nggak.. ada nggak ada

Emerha

Terus siapa yang tangani ini, yang mau bikin begini, nggak ada orang nya nggak ada?

Kuni Mas'adah

Oh.. kalo yang bikin bikin seperti ini kan ada memang e.. Subbid Subbidnya ada

Emerha

Ada Subbidnya

Kuni Mas'adah

Ada..

Emerha

Subbid apa namanya?

Kuni Mas'adah

Subbid kebijakan pengelolaan keuangan, subbid kebijakan kan ada

Emerha

Yang dianu ibu siapa namanya?

Kuni Mas'adah

Ibu... Mey..

Emerha

Ibu mey ya Kasubid pengelolaan keuangan

Kuni Mas'adah

Kasubid kebijakan

Emerha

Kebijakan ya..

Kuni Mas'adah

Ya.. ada sebenarnya itu

Emerha

Jadi mereka yang buat-buat yang itu ya...

Kuni Mas'adah

Ya.. kalo ada e.. aturan-aturan baru yang harus menyesuaikan, kalo ada aturan-aturan baru, kemudian e.. begitu ada aturan baru e.. ada yang usul, e.. ini aturan saya baru saya harus.., aturan mereka harus disesuaikan kalo toh mereka belum tahu kan mereka langsung akan melihat aturan baru untuk menyesuaikan aturan-aturannya

Emerha

Okey.. terus menurut ibu, setelah ibu diskusi tadi kemudian melapor ke pimpinan masalah ini, apakah sudah di pernah di bikin bahwa dari masalah yang ibu selesaikan ini sudah dijadikan dalam bentuk?

Kuni Mas'adah

Tidak.. tidak pernah

Emerha

Tidak pernah ya..

Kuni Mas'adah

Tidak pernah

Emerha

Jadi cukup diselesaikan di situ saja

Kuni Mas'adah

Cukup diselesaikan di situ saja

Emerha

e.. menurut Ibu apakah dengan adanya dokumentasi kayak gini, dengan diskusi bisa menambah pengetahuan ibu?

Kuni Mas'adah

Ya jelas

Emerha

Jelas ya?

Kuni Mas'adah

Jelas..

Emerha

Berarti itu sudah jadi budaya ya.. untuk diskusi apa segala macam itu?

Kuni Mas'adah

Iya..

Emerha

Itu sejak kapan bu?

Kuni Mas'adah

Sejak.. ketika ada masalah setiap saat ketika ada masalah

Emerha

Waktu ibu masih bendahara sudah sering ibu seperti itu?

Kuni Mas'adah

Ya.. kalo ada masalah kami tanyakan ada masalah seperti ini, oh ya...

Emerha

Kalo dari peran pimpinan untuk mengajarkan mereka pada saat diskusi itu ada?

Kuni Mas'adah

e.. peran pimpinan, pimpinan kan selalu mengajarkan kalo memang ada masalah monggo diselesaikan dulu di Subbidnya nanti kalo tidak ada baru diselesaikan naik ke atas berjenjang selalu seperti itu, itu artinya kan sudah arahan dari atas, dan terkait dengan hal-hal kalo kita ada masalah, kita selalu juga kita informasikan pada pimpinan, pak katakanlah ada masalah ini-ini-ini kita selesaikan seperti ini, oh.. ya okey berarti sudah beres

- b. Wawancara dengan Kuni Mas'adah, pada Jumat, 25 Mei 2018, pukul 08.04 WIB di ruang rapat Kepala BKAD. Selain sebagai pembantu PPK-SKPD bagian pembuatan SPM, Kuni juga merangkap sebagai PPTK khusus di bagian Sekretariat BKAD. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pembuatan SPJ oleh PPTK yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Kuni Mas'adah

Iya tanpa uang panjar

Emerha

Itu berarti SPJ nya harus ada duluan ?

Kuni Mas'adah

Iya

Emerha

Nah yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana mekanisme ibu menyiapkan SPJ?

Kuni Mas'adah

Euu di subag keuangan mulai bulan oktober tahun 2017, kita melalui mekanisme pembayaran non tunai. Artinya apa eu kalo sudah ada SPJ baru kita akan transfer ke eu masing-masing penerima dana yang berhak menerima uang. Kalo SPJ belum ada. Artinya apa? gak ada SPJkan kita gak bisa mengetahui berapa kebutuhannya mereka, Nah untuk mengetahui kebutuhan mereka, di awal tahun ketika menyusun APBD kemudian membuat RKA nya, kita sudah menetapkan anggaran KAS. Jadi setiap PPTK yang mempunyai kegiatan mereka membuat anggaran KAS. Anggaran kas mereka mau dicairkan di bulan apa, ketika mereka membuat anggaran kas katakanlah di bulan Mei, artinya apa bulan Mei tersebut mereka harus sudah menyiapkan SPJ untuk dimintakan dana. Nah dana itu setelah SPJ jadi kita verifikasi SPJnya sudah benar ok, disetujui, kemudian bendahara menyiapkan transfer dana. Kebetulan kami sudah menggunakan CMS *Cash Management System*. Jadi eum kami langsung transfer sendiri tidak melalui bank. Jadi bendahara itu sudah sekaligus merangkap layaknya sebagai pegawai bank. Jadi PPTK membuat SPJ itu berdasarkan anggaran kas itu yang sudah mereka buat. Jadi anggaran kas januari harus dilaksanakan Januari. Mereka menyusun SPJ. Oh saya punya januari kegiatan katakanlah pendataan. Nah ketika pendataan keperluan pendataan itu apa ? oh keperluan pendataan katakanlah kami butuh ATK, kemudian kami butuh perjalanan Dinas. Nah ketika ATK mau di beli kita pesan dulu kepada toko. Kemudian begitu kita sudah pesan, kemudian mendapatkan bon, kemudian kita SPJkan lengkap kita serahkan bendahara. Bendahara akan langsung mentransfer kepada pihak toko.

Emerha

Berati toko itu pihak ke 3 harus utang dulu ya. Kan uang dibutuhkan 3:12?

Kuni Mas'adah

Iya bisa, bisa ngutang dulu

Emerha

Ehm

Kuni Mas'adah

Bisa kita pesan dulu

Emerha

Heem

Kuni Mas'adah

Nota pesanan.

Emerha

Heem

Kuni Mas'adah

Kemudian yang jelas eu itu tergantung akad kita, saya pesan dulu nanti setelah itu baru kami kirim barang. Gak masalah.

Emerha

Itu ada perjanjian memang ?

Kuni Mas'adah

Gak ada, kita gak ada perjanjian. Cuman akan ketika jual beli saja

Emerha

Secara lisan saja.

Kuni Mas'adah

Secara lisan aja. Jadi eu kita memang tidak ada kontrak dengan toko mana eu ketika membeli ATK, enggak. Bebas kita membeli ATK

Emerha

Berarti modal kepercayaan aja ya

Kuni Mas'adah

Iya.

Emerha

Terus di bidang itu PPTK itu ada orang yang khusus bikin SPJ. Misalkan kayak bikin kwitansi ada?

Kuni Mas'adah

Tidak ada. Itu adalah sampiran. Biasanya setiap PPTK memang pegang satu orang. Untuk membantu memmbuatkan SPJ. Tapi kalo tugas membantu membuat tupoksi SPJ tidak ada

Emerha

Emm tidak ada . Bagaimana mereka mau bikin SPJ seperti itu, padahal bukan tupoksinya dia?

Kuni Mas'adah

Karena itu adalah sudah merupakan kewajiban subbit mereka untuk meng SPJkan. Kalo tidak mau ya kegiatan. Jadi mereka akan menyadari dengan dirinya sendiri, dengan kebutuhan mereka masing masing

Emerha

Apa ada. Apa yang membuat mereka itu. Misalkan apakah ada insentif dia selaku PPTK gitu dan mau melaksanakan pekerjaan ?

Kuni Mas'adah

Tidak ada.

Emerha

Itu biasanya untuk menyiapkan SPJ itu memakan waktu atau bagaimana?. Misalkan waah ini mengganggu pekerjaan saya yang ada tupoksinya. Sehingga pekerjaan membuat SPJ itu dikesampingkan, itu ada gak seperti itu ?

Kuni Mas'adah

Tidak ada.

Emerha

Tidak ada.

Kuni Mas'adah

Mereka sudah menyadari terkait dengan pembuatan SPJ karena kalau, katakanlah A yang diberikan tugas untuk membuat SPJ kebetulan A tidak bisa, mungkin PPTKnya akan membantu. Jadi kita saling. Saling bantu di dalam satu subid.

Emerha

Karena kegiatannya terkait dengan

Kuni Mas'adah

Subbid

Emerha

Tupoksi

Kuni Mas'adah

Iya Tupoksi subbidnya mereka kegiatannya mereka.

Emerha

Kalo di PPTK itu ada, setelah membuat SPJ ada membuat pembukuan itu tidak ada ? atau bagaimana ?

Kuni Mas'adah

Kalo di PPTK pembukuan masing-masing. Katakanlah saya di subbag keuangan. Saya mempunyai kegiatan keuangan, kemudian ada kegiatan pembuatan laporan. Nah kami punya kendali setiap PPTK, punya kendali terkait dengan kegiatan reklame masing-masing. Nah kalo di subbag keuangan terkait SPJ saya serahkan kepada salah satu staf kami. Monggo untuk mengeSPJK kan terkait dengan kendalinya dia mengendalikan. "Oh ini anggaran kas sudah, mba ini tolong anggaran KAS di bulan januari, februari, bulan maret, nanti di bulan ini harus meng SPJkan apa, nanti di bulan ini harus meng SPJkan apa. itu di bulan itu harus. Kebetulan staf kami sudah membuat kendalinya.

Emerha

Jadi waktu menerima uang dari bendahara itu dibukukan juga ? atau ada catatan – catatan.

Kuni Mas'adah

Ketika menerima uang. Ketika menerima uangkan langsung transfer kepada penerima. Ketika kita membuat SPJ kan kan kita sudah, katakanlah beli ATK sekian ratus ribu katakanlah, sudah di catat. Mereka punya kendali karena setiap bulan mereka membuat laporan bulanan. Otomatis sudah dikendalikan di laporan tiap bulan. Jadi tiap bulan itu kita membuat laporan terkait dengan laporan, eu fisik dan laporan keuangan. Jadi fisiknya sudah sampai berapa, keuangannya sudah sampai berapa. Itu kita sudah mengendalikan di situ.

Emerha

Kalo misalkan uang kegiatan itu ada pajaknya. PPTK yang bayar pajaknya ?

Kuni Mas'adah

Iya. Eu ketika kita meng SPJk kan ketika kita membuat SPJ. Itu sudah sekalian di hitung pajaknya nanti bendahara yang akan membayarkan pajaknya. Akan transfer ke penerima. Kemudian sisanya akan di transfer, euu kewajiban pajaknya akan langsung di transferkan ke bank.

Emerha

Itu tadi yang pake ini ya, apa CMS ya ?

Kuni Mas'adah

Iya. Jadi PPTK sudah tidak pegang uang.

Q.2. Mekanisme pembuatan SPj dengan uang panjar**Emerha**

Tidak pegang uang. Sekarang kalo dengan uang panjar 08:12 berarti PPTK pegang uang ya? Itu mekanisme nya gimana kalo dengan uang panjar ?

Kuni Mas'adah

Kalo dengan uang panjar, itu ketika awal bulan. Setiap awal bulan itu PPTK membuat NPD Nota Pencairan Dana . Nota pencairan dana itu fungsinya untuk minta dana di Bendahara. Ini lo anggaran kasnya di bulan ini, di NPD itu nanti akan kelihatan ini lo anggaran kasnya berap. Nanti di bulan depan di buat lagi, oh sisa bulan kemarin itu masih berapa. Nah nanti akan kelihatan di NPD tersebut. Nah setelah itu eu ada NPD masuk bendahara PPTK ngomong ke bendahara, "Bendahara tolong saya minta awal bulan kegiatan ini-ini dulu. Nah setelah diberikan uang, sebagai uang panjar. Dalam jangka satu minggu, PPTK harus mengembalikan dalam bentuk SPJ. Untuk bendahara membuat ganti uang persediaan. Kalo dalam waktu satu minggu terpaksa kita mau mengganti uang persediaan, ko PPTK uangnya masih ngendon. Belum bisa mengesPJKkan uang harus di tarik diberikan kepada PPTK yang lain yang siap untuk melaksanakan kegiatannya, karena eu tidak bisa semua kegiatan di danai dengan sekali GO.

Emerha

Itu satu minggu itu, batasan dari mana ?

Kuni Mas'adah

Batasan dari kesepakatan kita. Iya satu minggu harus dikembalikan. Kalo satu minggu tidak dikembalikan harus ditarik lagi.

Emerha

Tidak ada dalam bentuk aturan tertulis?

Kuni Mas'adah

Tidak ada.

Emerha

Itu harus disepakati bersama ya ?

Kuni Mas'adah

Iya. Sudah kesepakatan bersama. Kalo tidak mau ya tarik. Tarik ya semua sudah menyadari.

Emerha

Tadi di NPD itu berarti di dalam NPD itu uangnya semua diminta sekaligus ?

Kuni Mas'adah

Tidak. Dalam NPD katakanlah satu PPTK katakanlah 1 PPTK mempunyai satu kegiatan, tiga kegiatan itu dicantumkan semua. Kemudian kegiatan bulan ini butuh berapa, kalo memang itu dibutuhkan semuanya. Itu dibutuhkan semua. Tapi kadang-kadang ada kegiatan yang tertunda. Seperti katakanlah SPPD dinas, SPPD katakanlah, SPPD menjagani untuk bila ada undangan. Otomatis kalo itu tidak digunakan uang masih akan tetap di bendahara.

Emerha

Kalo eu misalkan apakah pernah terjadi misalkan. Ketika dikasih duit. Untuk suatu kegiatan terus SPJnya itu telat masuk, itu bagaimana antisipasinya ?

Kuni Mas'adah

Kita sudah sepakat dalam satu minggu SPJ tidak dibuatkan uang tarik kembali.

Emerha

Uang tarik kembali. Itu kerjasama ?

Kuni Mas'adah

Iya

Emerha

Tidak ada yang keberatan ?

Kuni Mas'adah

Tidak,

Emerha

Kalo misalkan uang sudah terpakai tapi belum di SPJkan. Bagaimana nota duitnya ?

Kuni Mas'adah

Kalo memang sudah terpakai. Dan itu memang untuk kegiatan. Dan itu kegiatannya belum selesai, memang ada, gini kami harus panjar. Tapi kalo memang kegiatan kami masih berlangsung. Ya kita kasih jangka waktu, gak papa yang jelas ketika kita mau GO. Yang jelas

batas GU adalah 60

Emerha

60...?

Kuni Mas'adah

Ketika batas mencapai 60% masih ada uang di panjar. Kegiatan masih berlangsung itu tidak masalah. Kita masih ada toleransi di situ.

Q.3. Mekanisme pembuatan SPj dengan LS

Emerha

Heem ok. Sekarang kalo untuk barang pengadaan barang dan jasa itu ditangani PPTK juga ?

Kuni Mas'adah

Iya. Pengadaan barang dan jasa itu di subbag umum. Dan itu ditangani oleh pihak pengadaan.

Emerha

Apa gimana pengadaan antara tupoksi PPTK dengan PPKOM? Pejabat pembuat komitmen khusus pengadaan.

Kuni Mas'adah

Eu PPTK itu adalah yang punya kegiatan, tetapi kalo pengadaan jasa sudah dimulai adalah semua diserahkan kepada PPKOM. PPKOM akan membuat panitia pengadaan. Nah itu semua sudah eu ditangani oleh panitia pengadaan.

Emerha

Emm, berarti

Kuni Mas'adah

Yang berkompeten adalah yang berperan itu adalah panitia pengadaan.

Emerha

Itu tidak ada tumpang tindih tupoksinya ?

Kuni Mas'adah

Tidak. Karena memang panitia pengadaan tidak semua di subbag umum. Kita menggunakan mereka –mereka yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Emerha

Batas-batas kerjanya itu gimana ? mereka kan, kegiatan ini ini punya PPKOM ini punya PPTK ada gak pembagian seperti itu ?

Kuni Mas'adah

Gini, ketika pengadaan barang jasa semua pengadaan itu adalah kegiatannya BPKOM nanti itu panitia pengadaan. Nah kalo didalam pengadaan itu ada rapat, pengadaan ATK nah itu yang memfasilitasi memang dari dana Kegiatan pengadaan tetapi difasilitasi oleh PPTK. Ketika rapat, ketika beli ATK, nanti yang mengadakan PPTK. Nanti ATKnya diserahkan kepada panitia untuk mengadakan kegiatan. Kemudian ketika ada honor panitia, yang membuatkan SPJnya juga PPTK. PPTK membuatkan SPJ baru mereka panitia tanda tangan terkait penerimaan honor.

Emerha

Berarti kalo khusus modal itu wilayahnya PPKOM.

Kuni Mas'adah

Iya khusus PPKOM

Emerha

Kalo barang dan jasa berarti khusus PPTK

Kuni Mas'adah

Iya.

Emerha

Tapi keseluruhannya itu yang bikin SPJ itu PPTK ?

Kuni Mas'adah

Iya.

Emerha

Walaupun pengadaan itu kontrak dengan BP3:

Kuni Mas'adah

Iya pengadaan itu kontrak. Tetapi terkait dengan kebutuhan pengadaan rapat, ATK. Ketika rapat awal, rapat mengundang BA Ke 3, katakanlah *unswizing* gitu enggak. Kitakan harus memfasilitasi. Kemudian pemasukan apa apa dokumen kontrak nah itu kan yang memfasilitasi subbag umum. Nanti sudah wilayahnya panitia ya itu panitia yang ber... melaksanakan.

Emerha

Itu tidak juga tidak ada, tidak ada pelaporan khusus di PPTK ya ? tidak diatur ya?

Kuni Mas'adah

Pelaporannya ya itu tadi, Tiap bulannya PPTK membuat laporan, laporan bulanan itu wajib bagi setiap PPTK untuk semua kegiatan.

Emerha

Itu kemana laporannya ?

Kuni Mas'adah

Laporannya di rangkum oleh subbag perencanaan

Emerha

Ditujukan ke kepala SKPD ?

Kuni Mas'adah

Laporannya itu akan dirangkum oleh subbag seluruh kabupaten Ponorogo. Jadi tidak oleh kepala. Tapi seluruh, nanti dirangkum akan masuk ke system.

Emerha

Dalam membuat SPJ itu ibu menggunakan system ya ? atau manual?

Kuni Mas'adah

Kalo SPJ manual.

Emerha

Oh SPJ manual.

Kuni Mas'adah

Enngih SPJ Manual. Katakanlah SPJ rapat enggih, ketika rapat kami butuh undangan, kemudian beli snack, itu ada bond pembelian, kemudian ada kwitansinya. Kemudian setelah ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen.

Emerha

Ehm

Kuni Mas'adah

Nah itu, kemudian ketika kami SPJkan, kita beli ada pajaknya. Juga kita harus menghitungnya pajaknya juga. Nah setelah dihitung pojaknya, katakanlah pembelian ATK dipotong, karena kan pajak itu untuk makan minum itu kita kena pajak restaurant enggih, kalo kita belinya di restaurant. Kecuali kita belinya di toko tidak kena pajak restaurant tapi tetep kena BPN dan BPH kena 2. Tapi kalo kita belinya di restaurant yang sifatnya jasa kita kena BPN dan BHH dua tiga. Nah itu yang menghitungnya adalah PPTK. Ini lo pajak saya. Kemudian setelah itu lengkap dihitung, diserahkan kepada bendahara

Emerha

Ketika ada pemeriksaan BPK

Kuni Mas'adah

Heem

Emerha

Ketika ada pemeriksaan BPK, PPTK ikut diperiksa juga ?

Kuni Mas'adah

Ketika ada pemeriksaan BPK itu sudah semuanya di bendahara.

Emerha

Emm

Kuni Mas'adah

Iya. PPTK kegiatan tidak pernah diperiksa.

Emerha

Jadi ketika misalkan, BPK periksa bendahara nah ini tanggung jawabnya PPTK. Nah ini siapa tanggung jawabnya ?

Kuni Mas'adah

Kebetulan sampai saat ini kita gak pernah ini ya. Gak pernah, tetapi kalo ada seperti itu, katakanlah itu miliknya kegiatan si A. Ada kena nah itu kegiatan tanya langsung kepada PPTKnya. Karena misalnya ada kewajiban ketika PPTK ketika membuat SPJ ada yang seolah oleh diragukan, harus di stor kembali. Nah kewajiban di stor kembali adalah PPTK.

Emerha

Iya itu gimana awalnya sampai bisa ada komitmen tadi gitu. Satu minggu kalo tidak bisa mempertanggungjawabkan harus kembali, atau sejak kapan dimulai?

Kuni Mas'adah

Itu kita sudah lama seperti itu ko. Sejak kapan saya kurang begitu ingat. Tapi yang jelas kita sudah jalan seperti itu dari dulu ada komitmen. Kalo memang tidak bisa mengSPJkan, karena memang anggaran kas itu adalah PPTKnya banyak yang sudah diawal bulan mohon tidak di SPJkan kita bisa tarik kembali untuk bisa digunakan ke PPTK yang lain.

Emerha

Kalo peran pimpinan, misalkan kepala SKPD untuk memonitoring pekerjaan PPTK gimana? sering di Monitor ?

Kuni Mas'adah

Euu kepala setiap 3 bulan sekali itu euu membuat berita acara terkait pembukuan kas. Jadi eu kepala itu memonitor terkait dengan keadaan kas setiap 3 bulan sekali selama kontrol monitor. Juga terkait dengan kegiatan di SPJ kami semua di tanda tangani oleh kepala. Jadi terkait SPJ, SPJ itu dibuat oleh PPTK. Kemudian di paraf oleh pembuat PPTK, di paraf oleh penanggung jawabnya program, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab program. Penanggung jawab kegiatannya adalah aselon 3 nya, atasan langsung nah

setelah itu dimintakan tanda tangan kepada pak kepala, nah setiap kali diminta kepada pak kepala, pak kepalapun akan selalu melihat. Kira-kira pas gak, srek gak. Kalo memang belum srek, belum pas, pak kepala tidak akan **20:29** terkait dengan SPJ itu. Seringkali terjadi seperti itu juga.

Emerha

Sering kah?

Kuni Mas'adah

Kadang-kadang kalo memang belumpas. Pak kepala memberikan catatan tolong bahas dengan saya. Jadi ketika pak kepala ko ini seperti ini, ini sebenarnya ada apa? ko saya belum srek, tolong panggil PPTK nya apa sebabnya? Baru setelah diberikan penjelasan, oh mungkin karena ada suatu sebab yang memang harus seperti itu baru akan di setujui. Tapi kalo memang, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pak kepala juga tidak akan tanda tangan, jadi semua SPJ pak kepala sudah memantau.

Emerha

Emm begitu berarti Bendahara itu enak ya, terima bersih ya ?

Kuni Mas'adah

Iya.

Emerha

Semua sudah lengkap, sudah di tanda tangan?

Kuni Mas'adah

Sudah

Emerha

Berarti semua tugas, di PPTK yang menyiapkan? SPJ nya ?

Kuni Mas'adah

Iya yang menyiapkan SPJ adalah PPTK. Jadi masuk bendahara, itu sudah lengkap. Sudah tinggal bayar. Ditandatangani oleh kepala. Kepala sudah menyetujuinya. Kalo belum disetujui kepala, bendahara belum akan membayarkan. Jadi kalo ada SPJ ko kepala itu belum tanda tangan belum menyetujui artinya bendahara belum akan mengeluarkan dana.

Emerha

Berarti SPJ itu disimpan, selama belum ditanda tangan kepala BKD

Kuni Mas'adah

Disimpan oleh PPTK.

Emerha

Disimpan oleh PPTK?

Kuni Mas'adah

Iya.

Emerha

Belum bisa dicairkan ya ?

Kuni Mas'adah

Belum.

Emerha

Oke. Itu untuk PPTK ya bu ya ?

Kuni Mas'adah

IYA.

Emerha

Karena ibu tadi udah menjadi anggota tentang PPTK. Saya bertanya tentang PPK lagi.

Kuni Mas'adah

Iya.

- c. Wawancara dengan Kuni Mas'adah, pada Jumat, 25 Mei 2018, pukul 08.26 WIB di ruang rapat Kepala BKAD. Kuni adalah Pembantu PPK bagian pembuatan SPM. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pembuatan SPM dan SPJ yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Emerha

Bu berapa orang anggota PPK ?

Kuni Mas'Adah

PPK itu ada, bu sekretaris, kemudian PPK verifikasi, PPK pembuat SPM, dan PPK Akuntansi.

Emerha

4 orang semua ya ?

Kuni Mas'Adah

Iya

Emerha

Berarti ibu dibagian mana ?

Kuni Mas'Adah

Saya di pembuat SPM

Emerha

Pembuat SPM

Kuni Mas'Adah

Iya. Itu sifatnya hanya membantu PPK. PPK aslinya kan di sekretaris kemudian sebenarnya semua ketugasan ada disekretaris. Tapi kami dibantu oleh eu kami-kami yang membuat SPM, verifikasi, kemudian yang akuntansi begitu.

Emerha

Itu penempatan PPK di sekretaris itu memang ada aturannya ? memang harus di sekretaris?

Kuni Mas'Adah

Kalo PPK itu memang harus di sekretaris memang ada

Emerha

Memang ada aturan ?

Kuni Mas'Adah

Ada.ada di permendagri 12 13 seperti itu.

Emerha

Di permendagri ya, kalo misalkan SPP masuk dari bendahara itu bagaimna mekanismenya?

Kuni Mas'Adah

SPJ masuk

Emerha

SPP.

Kuni Mas'Adah

Oh SPP kan gini. SPP kalo SPJ sudah siap SPJ sudah ok clear bendahara membuatkan SPP. SPP ditandatangani oleh kepala, tanda tangani oleh bendahara, kemudian dimintakan oersetujuan kepala. Ok sudah di tanda tangani kepala, turun. Nanti PPK SPM membuatkan SPM berdasarkan SPP yang ada. Dan eu SPM itu sudah melalui Simda jadi PPK pembuat SPM tinggal klik dari simda yang ada

Emerha

Tinggal klik ya ?

Kuni Mas'Adah

Iya.

Emerha

Itu butuh berapa lama untuk memeriksa ? SPP sama SPJ nya benar gitu.

Kuni Mas'Adah

Euu untuk SPP kami sudah ngikut eu pembuatan SPP sudah di verifikasi oleh Pe peka ferivikator. Jadi kami sudah tidak membutuhkan waktu lama lagi PPK ferivikasi sudah Ok. Itu tinggal melanjutkan saja.

Emerha

Emm. Itu di dalam sistem saya lihat ada pembuat rancangan, draf dulu ya bikin SPM rancangan dulu SPMnya ?

Kuni Mas'Adah

Darf. Ada draft

Emerha

Oh draft

Kuni Mas'Adah

Iy baru draf SPM kemudian SPM di final

Emerha

Itu gimana rancangannya bu ?

Kuni Mas'Adah

Rancangan itukan draf itu kan ada koreksi

Emerha

Oh ada koreksi

Kuni Mas'Adah

Dikoreksi dulu eu kami buat SPM, darf nya kita lihat dikoreksi ok. Sudah ok, kita finalkan. Kalo sudah final artinya kita tidak bisa merubah lagi SPM yang ada kecuali admin yang bisa merubahnya. Dan kami admin simda itu ada di bidang Aklap.

Emerha

Oh jadi gak bisa langsung di SPM terbit, harus draft dulu ?

Kuni Mas'Adah

Mekanismenya harus draft dulu. Bisa diterbitkan tetapi ketika sudah draft langsung kami finalkan. Tapi kalo memang, begitu di

simdanya. Begitu kami buat draf kemudian ada pernyataan final. Langsung kami finalkan SPP langsung jadi. Jadi tidak harus draft kita cetak tidak, cuman draft itu untuk kita koreksi. Sesudah koreksi di dalam eu komputer enggak, itu juga bisa.

Emerha

Oh berarti untuk kebutuhan koreksi ya

Kuni Mas'Adah

Iya kebutuhan koreksi

Emerha

Mana yang salah

Kuni Mas'Adah

Iya ketahuan mana yang salah

Emerha

Ini bukti sudah dikoreksi.

Kuni Mas'Adah

Tetapi kalo itu masih draft itu berarti masih bisa kita perbaiki. Tetapi begitu sudah kami finalkan, SPP itu tidak bisa kami perbaiki. Kecuali kita harus minta tolong kepada admin, untuk mendraftkan kembali. Tapi kalo masih draft masih ada yang salah masih bisa saya perbaiki sendiri.

Emerha

oh begitu, itu di simda sudah diatur seperti itu ?

Kuni Mas'Adah

Iya di simda sudah diatur seperti itu.

Emerha

Nah kalo misalkan SPP tidak lengkap, nah itu bagaimana mekanisme terbit penolakan SPMnya ?

Kuni Mas'Adah

Sampai saat ini Alhamdulillah SPP kami selalu lengkap. Dan apabila belum lengkap tentunya euu SPM belum kami akan buat. Minta dilengkapi dulu SPPnya baru kami lengkapi dulu SPM. Itulah kalo SPM kalo yang menolak itukan di BUD penolaka SPM. Tapi kalo di PPK SPM adalah penolakan SPP. Tapi sampai saat ini SPP itu tidak ada penolakan SPP, yang ditolak itu SPM

Emerha

Kalo penolakan SPM itu ada keluar itu juga ada anunya, kaya draft gitu dari simda

Kuni Mas'Adah

Kalo penolakan SPM itu adalah kewenangannya di bendahara umum daerah. Itu yang menolak adalah bendahara ketika. Ketika yang menolak adalah bendahara umum, ketika bendahara SOPD itu sudah membuat eu SPM. Kemudian diterbit SPP, kemudian diterbitkan SPM. SPM tersebut beserta lampiran SPJnya kita kirim ke BUD. Ketika BUD itu belum srek terhadap SPM itu bisa menolak SPM.

Emerha

Oh berarti apa bukti kalo PPK sudah mengUreksi ternyata salah ? dia ada semacam surat?

Kuni Mas'Adah

Ada paraf,

Emerha

Oh ada parafnya,

Kuni Mas'Adah

Ada surat pernyataanya, surat pernyataan PPK, PPK tanda tangan itu sudah ada.

Emerha

Surat pernyataan apa itu ?

Kuni Mas'Adah

Surat pernyataan verifikasi. Sudah ada dicentang kelengkapannya sudah, kemudian sudah ditanda tangani

Emerha

Jadi waktu SPP tidak lengkap itu dituliskan juga dalam bentuk tertulis?

Kuni Mas'Adah

Iya tetapi ketika, sampai saat ini semuanya, ketika kita membuat SPP semuanya sudah lengkap. Kalo toh memang tidak lengkap mesti harus disebutkan.

Emerha

Harus disebutkan secara tertulis ya.

Kuni Mas'Adah

Iya di lembar verifikasi. Kan dilembar verifikasi itu katakanlah eu syarat kelengkapan SPP itu apa saja. Nah syarat kelengkapan SPP itu ketika belum lengkap ya tidak di centang. Ketika sudah lengkap ya dicentang semua.

Emerha

Itu dikembalikan ke Bndahara?

Kuni Mas'Adah

Euu iya

Emerha

Kalo kegiatan yang dikairkan dari tambahan uang ada ya bu ? di PPTK, TU ?

Kuni Mas'Adah

Sampai saat ini kita tidak pernah dengan TU.

Emerha

Selama setahun ini belum ada TU

Kuni Mas'Adah

Belum ada TU.

Emerha

Karena memang gak pernah TU ya ?

Kuni Mas'Adah

Gak pernah TU.

Emerha

Itu TUnya di larang atau bagaimana ?

Kuni Mas'Adah

Tidak dilarang tapi alhamdulillah kita cukup dengan bisa di GU. Dengan GU bisa kita cukupi

Emerha

Emm

Kuni Mas'Adah

Karena ketika kita sudah menghitung, berapa to GU kita, ketika kita mau membuat rencana UP. Berapa UP kita kita sudah menghitung. Kira-kira dengan UP pun sudah bisa cukupi semua kegiatan kegiatan TU. TU itu apabila ada kegiatan yang membutuhkan dana lebih besar dari UP yang kita miliki.

Emerha

Melebihi UP ya

Kuni Mas'Adah

Iya melebihi UP

Emerha

Ketika bendahara bikin SPP itu kelihatan tidak dari SPM dari Simda ? Si PPK bisa memonitoring oh ini udah bikin sekian SPP, dilihat dari Simda itu bisa ?

Kuni Mas'Adah

Bisa. kan ada registernya.

Emerha

Oh ada registernya?

Kuni Mas'Adah

Ada dari simda bisa melihat.

Emerha

Berarti di dalam PPK itu ada komputer sendiri untuk membikin SPM ?

Kuni Mas'Adah

Tidak. Karena memang keterbatasan kami, ketika membikin SPM ya komputernya gantian aja,

Emerha

Oh satu sama itu?

Kuni Mas'Adah

Iya

Emerha

Lah kan, kalo bendahara buka SPM di sini bisa ?

Kuni Mas'Adah

Bisa.

Emerha

Bendahara bis buka in SPM?

Kuni Mas'Adah

Bisa

Emerha

Kalo satu komputer kan ?

Kuni Mas'Adah

Iya

Emerha

Ooh kenapa tidak ditanggung sama bendahara saja ? SPP sama SPM ? kalo satu komputer ?

Kuni Mas'Adah

Karena itu punya kewenangan masing-masing sebagai pengendalian. Kalo semua ditangani bendahara, pengendaliannya ada di mana ?

Emerha

Oh gitu.

Kuni Mas'Adah

Iya.

Emerha

Terus di dalam format SPM itu ada gak format tanda tangan PPK ?

Kuni Mas'Adah

Eu di SPM paraf bagian PPK ?

Emerha

Paraf ?

Kuni Mas'Adah

Iya

Emerha

Dibagian mana? kan cuman yang tanda tangan SPUkan kan cuman pengguna anggaran ?

Kuni Mas'Adah

PPK paraf di SPMnya ada, kemudian SPM itu, ada SPM kemudian ada surat pernyataan. SPM dan surat pernyataan itu ditanda tangani oleh pengguna. Nah PPK itu paraf di

Emerha

Kiri kanan ?

Kuni Mas'Adah

Kiri kanannya.

Emerha

Oh itu paraf PPK ya ?

Kuni Mas'Adah

Iya,

Emerha

Bukan paraf sekretaris ya ?

Kuni Mas'Adah

Sekretaris ya PPK kan, PPK nya sekretaris. Malah ada sekretaris kalo di SPM itu yang tanda tangan eu yang paraf adalah sekretaris. Kemudian yang PPTK itu untu pengendalian sebagai koreksi itu paraf di koordinasi. Jadi hanya paraf koordinasi, tetep kami akan koreksi selaku PPTK, itu PPTKnya bendahara paraf koordinasi itu di pojok eu SPM. Kemudian di surat pernyataannya kami PPTK dan PPTK.

Emerha

Kalo pemeriksaan PPK. PPK di periksa juga ya?

Kuni Mas'Adah

Pemeriksaan PPK

Emerha

Terkait dengan pembuatan SPM, kan SPM diperiksa PPK juga

Kuni Mas'Adah

Jarang

Emerha

Jarang ya ?

Kuni Mas'Adah

Jarang biasanya pemeriksaan PPK, PPK itu yang banyak diperiksa adalah permohonan SPJ kemudian SP2D nya.

Emerha

SP2D?

Kuni Mas'Adah

Iya. Walaupun di SP2D itu nanti bendahara akan menyertakan lengkap. Ketika meminta SPJ di SPJ itu akan menyertakan pembuatan SPJ dan SPMnya, karena ketika dokumen, ketika menyimpan dokumen itu akan lengkap disertakan disertakan SPP dan SPMnya. Jadi ketika kita putus suatu saat, oh ini SPJ sekian GU tanggal sekian, SPP nya ini, kemudia SPMnya ini nanti SP2Dnya tinggal nyarikan. Jadi bendahara selalu tertib mendokumenkan SPJ beserta dengan SPPnya.

Emerha

Di dalam PPK itu juga ada pembukuannya? Maksudnya SPM yang tidak terbit berapa, yang tidak cair berapa itu ada pembukuannya?

Kuni Mas'Adah

Itu langsung di Simda. Jadi PPK tidak membuat buku tersendiri. Kita kalo kita butuh kita klik simdanya kita print SPMnya. Jadi dokumen SPM oh SPMnya, SPM tanggal sekian nomor sekian, nominalnya sekian itu registrasi sudah ada. Jadi pembukuan secara manual kita tidak membuat. Karena sudah diwakili oleh Simda.

Emerha

Ok. Bu kalo untuk akuntansi di PPK itu dibagian mana bu ?

Kuni Mas'Adah

PPK akuntansi ada di subbag keuangan kami

Emerha

Ada khusus orang yang tangani akuntansi

Kuni Mas'Adah

Ada

Emerha

Itu apakah dia kasubag juga ?

Kuni Mas'Adah

Dia staf subbag keuangan.

Emerha

Staf ya. Nanti rencanan saya mau mewawancarai satu lagi yang bagian akuntansi.

Kuni Mas'Adah

Oh bisa saya panggilkan

Emerha

Iya boleh

Kuni Mas'Adah

Yang bagian akuntansi ya. Sebentar.

- d. Wawancara ke-4 dengan Kuni Mas'adah, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 13.53 WIB di ruang sekretariat, Kantor BKAD. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Ya... saya mau konfirmasi itu Bu... apa hem... kemaren waktu hasil wawancara saya itu sempat saya analisis, waktu bendahara memberikan uang panjar ka BPTK, Ibu secara BPTK itu dalam jumlah bruto ya bu, pajaknya sudah dipotong di bendahara atau... BPTK yang...

Kuni Mas'adah

Belum... belum... BPTK

Emerha

BPTK yang bayar pajak ya...

Kuni Mas'adah

Ya... tapi dulu itu waktu ketika belum menggunakan non tunai tapi kalo sekarang kita sudah non tunai, jadi ketika me...ngajukan e... MPD e.... BPTK sudah tidak lagi menerima uang..

Emerha

Hem... langsung ya...

Kuni Mas'adah

BPTK ya... mulai oktober, ya.. mulai Oktober tahun kemaren kita sudah menggunakan non tunai kecuali yang di bawah 1 juta, itu BPTK belanja dulu, SPJ jadi dulu baru diserahkan ke bendahara, bendahara langsung membayarkan... via rekening masing-masing penerima

Emerha

Hem... kalo pajak langsung dipotong juga berarti ya...

Kuni Mas'adah

Ya... pajak langsung di potong oleh bendahara se... sebagai wajib

Emerha

Okey... kemudian yang kedua e... pembukuan ibu kan masih manual ya... ketika menerima uang dari... bendahara kan... ibu bilang kemaren...

Kuni Mas'adah

Ketika kasih panjar memberikan uang itu kita bukukan secara manual, uang... buku panjar itu dengan manual itu kita tidak punya aplikasi kecuali sekarang sudah non tunai, semuanya sudah terdebit dan terkredit dengan sendirinya, begitu... itu akan dihitung sendiri oleh aplikasi

Emerha

Kan... kalo menurut ibu kalo misalkan, pembukuan PPTK itu pake aplikasi buatan internal menurut ibu gimana?

Kuni Mas'adah

Sebenarnya e... kita sebenarnya... sudah tidak butuh aplikasi internal nggeh karena semuanya sudah pake Simda kemudian ketika pembukuan sudah... JMS, kemudian JMS itu sudah terintegrasi dengan Simda juga jadi... buat apa pembukuan manual, kalo pembukuan aplikasi, pembuatan aplikasi intern maksudnya kan, sudah tidak perlu aplikasi intern lagi

Emerha

Hem... kalo... yang bikin... SPJ di... kan yang bikin SPJ kan PPTK nah... itu ibu kan tidak menunjuk orang yang khusus, misalkan bendahara kegiatan gitu yang... yang membuat SPJ tidak...

Kuni Mas'adah

Tidak...

Emerha

Kalo menurut ibu gimana apa... perlu nggak dibuat... dibentuk bendahara kegiatan supaya dia punya...

Kuni Mas'adah

Tidak... tidak... karena dia sifatnya dia hanya membelanjakan tidak membukukan, semua pembukuan ada di bendahara, jadi... PPTK diberikan dana dibelanjakan, kembalikan lagi ke bendahara...

Emerha

Hem... untuk yang membikin-bikin SPJ itu misalkan kwitansi...

Kuni Mas'adah

Bendahara...

Emerha

Oh... bendahara... bukan... bukan PPTK

Kuni Mas'adah

e... PPTK itu membantu membuatkan tapi nanti diverifikasi ke bendahara dulu kalo memang sudah oke, ya oke... kalo ndak diverifikasi oleh tim verifikasi e... Subag Keuangan. Kalo kwitansi kan sudah ada blankonya...

Emerha

Sudah ada blankonya...

Kuni Mas'adah

Ya... blanko PPTK

Emerha

Itu... yang ketik siapa, yang bikin yang cetak kwitansi misalkan ada kegiatan rapat, rapat koordinasi PPTK yang laksanakan kan harus ada SPJ gitu ya...

Kuni Mas'adah

Ya... itu kan di...

Emerha

Kwitansi itu... itu yang bikin itu...

Kuni Mas'adah

Cetak percetakan, cetak... cetak... cetak B26 kan ada cetak nih... cetak di cetak nah nanti... e... BPTK tinggal ngisi berapa belanjanya kan seperti itu

Emerha

Oh... ibu nggak merasa repot kalo misalkan yang... yang... kan yang... bertanggung jawab terhadap kegiatan itu kan PPTK tidak repot misalkan harus... misalkan pekerjaan ibu kan banyak harus urus SPJ apakah... langkah baiknya kalo dibentuk dengan SK misalkan ini khusus orang bikin SPJ gitu?

Kuni Mas'adah

Tidak... karena SPJ itu tidak ada ketugasan tersendiri semuanya bisa e... PPTK bisa menunjuk salah satu stafnya untuk membantu tapi tidak perlu diberikan SK

Emerha

Tidak perlu ya...

Kuni Mas'adah

Ya... karena menurut sampingan

Emerha

Memang... memang sedikit pekerjaannya...

Kuni Mas'adah

Ya... itu hanya pekerjaan sampingan...

Emerha

Kalo... soal keterlambatan SPJ ke masuk ke bendahara...

Kuni Mas'adah

Tidak ada... keterlambatan kalo mereka terlambat e... ketika menggunakan panjar itu uang ditarik kembali tapi kalo sekarang kita sudah menggunakan non tunai ya... kalo tidak menyetorkan SPJ otomatis uang tidak akan diberikan jadi seperti itu

Emerha

Ya... okey... terus yang berikut ini ibu, saya kan sudah jadi drafnya nah... menurut kaidah penulisan saya kan mengambil kutipan wawancaranya ibu ya... ini apakah ibu keberatan kalo saya tulis nama lengkap ibu di sini, karena biasanya kan kalo ada yang mengandung rahasia itu biasanya namanya di... di inisial gitu sama..

Kuni Mas'adah

Saya bukan PPPK verifikator lho...

Emerha

PPPK apa ya...

Kuni Mas'adah

Saya... PPPK pembuat SBM...

Emerha

Oh ya... saya ubah

Kuni Mas'adah

PPPK indikatornya di rubah, kalo di sini saya sebagai PPTK aja,

Emerha

Oh ya kan ada dua ibu... dua jabatannya ibu kan sebagai PPPK pembuat SBM sama PPTK

Kuni Mas'adah

Pemba... ndak saya sebagai pembantu PPPK, PPPK pembantu kan sebagai pembantu PPPK, PPPK itu kan cuman satu nah... pembantunya ada beberapa nah... kami adalah pembantu PPPK

Emerha

Ah... kalo yang... ya... PPPK bagian pembuatan SBM

Kuni Mas'adah

Ya...

Emerha

Kalo PPPK indikator siapa?

Kuni Mas'adah

Bu Mursim...

Emerha

Oh ya... Bu Mursim oh ya... okey... okey... salah saya berarti

Kuni Mas'adah

He...

Emerha

Salah berarti saya...

Kuni Mas'adah

Ya... mestinya ini kalo terkait dengan verifikator adalah ke Bu Mursim

Emerha

Okey... berarti ibu nggak keberatan ya... kalo saya tulis nama ya...

Kuni Mas'adah

Nggak apa-apa

Emerha

Okey yang terakhir bu... ini kan... saya mau minta fotonya ibu untuk profil partisipan saya, jadi yang lain itu udah ada

Kuni Mas'adah

Heheh..., wah... kok semua pake foto...

Emerha

Kan kemaren saya foto, saya lihat ibu kemaren sibuk jadi.... heheheheh, karena kan ibu rapat

Kuni Mas'adah

He'em... ya boleh saya betulkan dulu jilbab saya

Emerha

Iya...

Kuni Mas'adah

Tadi habis sholat masih...

Emerha

Ya...

Kuni Mas'adah

Habis sholat jilbabnya di lepas

Emerha

Di situ aja ya... satu... dua... ya... satu... dua... okey...ini boleh

Kuni Mas'adah

hehehehehe

Emerha

Nah... okey ya...

Kuni Mas'adah

Boleh...

Emerha

Okey makasih ibu sudah menyita waktunya 10 menit

Kuni Mas'adah

Ya... nggak apa-apa

Emerha

Okey...

9. Lukman Hakim

- a. Wawancara ke-1 dengan Bapak Lukman Hakim pada 16 Juli 2018, pukul 15.30 di ruang kerjanya, Ruang Tamu Kabid Pendapatan. Topik utama wawancara tentang proses belajar pengetahuan transparansi dan akuntabilitass. Wawancara ini merupakan wawancara tentang topik RM3.

Emerha

Ee kalau bidang pengembangan itu Pak tupoksinya apa Pak yang pengembangan pendapatan?

Lukman Hakim

Tupoksinya ya di bidang anu pengembangan pendapatan pajak dan retribusi. Termasuk ee istilahnya mencermati opo ee regulasi yang ada itu. Untuk

Emerha

Berarti tugasnya itu?

Lukman Hakim

Ya kalau tupoksinya ada sih di anu, di Pergubnya ada itu. Kalau secara lengkap ada tapi intinya termasuk itu opo, mencermati menginventarisasi regulasi terkait ini pendapatan. Itu untuk pengembangan pendapatan. Terus termasuk merencanakan kegiatan untuk pengembangan pendapatan misalnya sosialisasi terus opo, pelatihan-pelatihan.

Emerha

Oh tu khusus pendapatan tupoksinya ya?

Lukman Hakim

Heém. Pendapatan terkait di pendapatan.

Emerha

Selama inimateri tentang pengembangan pendapatan itu dibikin sendiri atau gimana Pak? Kayak Bapak bilang tadi ada sosialisasi pelatihan itu dibikin sendiri atau gimana?

Lukman Hakim

Iya. Ini misalnya yang sudah dilaksanakan kan untuk pengembangan pendapatan sosialisasi anu PPBP2. Terus sosialisasi tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Terus sosialisasi tentang bendahara penerimaan pendapatan. Itu yo materinya yo istilahnya kita mengacu ke regulasi yang ada aja.

Emerha

Itu yang jadi instrukturnya siapa Pak?

Lukman Hakim

Instrukturnya dari bidang pendapatan terus dari PNS di luar Kabupaten, PNS Provinsi.

Emerha

Termasuk Bapak jadi instrukturnya?

Lukman Hakim

Heé. Saya juga pernah.

Emerha

Kalau yang dari luar dari mana Pak?

Lukman Hakim

Kalau mineral bukan logam dan batuan itu dari PUP ESDM.

Emerha

PUP?

Lukman Hakim

ESDM Provinsi DIY.

Emerha

Itu apa? Singkatan apa itu Pak?

Lukman Hakim

Dari kan dinas PUP ya. Dinas ke

Emerha

Pekerjaan umum?

Lukman Hakim

Dinas pekerjaan umum dan perumahan energi sumber daya mineral.

Emerha

Berarti itu ada anggarannya ya Pak ya?

Lukman Hakim

Yang untuk apa? Sosialisasi?

Emerha

Keahlian tadi?

Lukman Hakim

Oh ada. Itu namanya istilahnya itu honorarium. Ada honorarium. Apa namanya honorarium.

Emerha

Itu ada di anu kan ya?

Lukman Hakim

Ada ada.

Emerha

Kalau soal sosialisasi bendahara penerimaan tadi tentang apa? Yang diajarkan ke mereka.

Lukman Hakim

Yang sudah itu tentang anu tentang tata cara penyampaian LPJ.

Emerha

Itu juga sama mengundang ahli dari luar?

Lukman Hakim

Itu cuma dari intern aja, dari perbendaharaan, dari pusat.

Emerha

Itu materinya dari mana Pak ambilnya?

Lukman Hakim

Ambilnya ya dari ini aja dari Permendagri aja.

Emerha

Berarti instrukturnya Bapak?

Lukman Hakim

Instrukturnya dari perbendaharaan terus dari bidang pendapatan juga ada.

Emerha

Ee itu cara sosialisasi itu cara yang diminati apa? Tatap muka semua? Tidak ad acara lain?

Lukman Hakim

Heé. Biasa sama kayak tanya jawab itu. Penyampaian materi apakai slide.

Emerha

Praktiknya gak ada?

Lukman Hakim

Gak ada.

Emerha

Pelatihan nggak ada ya

Lukman Hakim

Terus anu pernah sosialisasi pajak hotel restoran gitu.

Emerha

Heém. Itu setiap perubahan program langsung disosialisasikan?

Lukman Hakim

Itu juga termasuk tapi kalau nggak ada yo itu kira-kira apa yang perlu disampaikan. Intinya untuk

Emerha

Materi-materinya tadi itu kan dari peraturan-peraturan tadi ya?

Lukman Hakim

Ha peraturan daerah juga ada terus

Emerha

Itu untuk mendapatkan peraturan itu mudah nggak?

Lukman Hakim

Gimana?

Emerha

Untuk mendapatkan peraturan-peraturan tadi itu mudah diperoleh?

Lukman Hakim

Ya kan di peraturan Bupati dan Perda kan sudah ada.

Emerha

Kalau yang dari pemerintah pusat itu gampang diperoleh?

Lukman Hakim

Kalau pusat ya karena regulasinya kan paling dari undang-undang kan sudah ada. Sudah ada hari ini yang dari PUPSDM kan sudah ada. Gitu.

Emerha

Apakah setiap undang-undang yang baru keluar atau peraturan-peraturan itu langsung ditindak lanjuti dalam bentuk Perbup Perda? Muncul khusus pendapatan?

Lukman Hakim

Ya kalau memang di sananya ada, bukan untuk ditindak lanjuti dengan Perda ya ditindak lanjuti.

Emerha

Oo tergantung . . . (06:31)

Lukman Hakim

Tergantung amanatnya pasal itu.

Emerha

Itu langsung yang bikin itu siapa Pak? bidang pendapatan?

Lukman Hakim

Bidang pendapatan draftnya lalu disampaikan ke bagian hukum nanti dibahas.

Emerha

Tadi buritek (06:57) yang dilakukan sendiri tadi kan ada anggarannya ya Pak ya? Nah, itu setiap berapa kali dilakukan Pak?

Lukman Hakim

Kalau setahun itu ya untuk PBB dua kali.

Emerha

Dua kali setahun

Lukman Hakim

Dua kali yang satu itu namanya anu opo, sosialisasi penyampaian SPP Perdana di anu seluruh kecamatan diundang, seluruh Kades. Yang kedua itu nanti di tempatnya di kecamatan, per kecamatan 12 itu kita keliling ke sana.

Emerha

Langsung ke kecamatan ya?

Lukman Hakim

Heé. Bekerja sama dengan PNS kecamatannya itu. Nanti di sana sebagai tempat aja, akomodasi kita.

Emerha

Itu setiap bulan ya ada?

Lukman Hakim

Itu setiap tahun satu kali. Dua kali, yang satu kali di sini di Kabupaten, yang kira-kira sebulan setelah ini dilakukan langsung kecamatan-kecamatan.

Emerha

Untuk tahun ini sudah dilaksanakan?

Lukman Hakim

Sudah. Bulan apa itu, Maret apa ya.

Emerha

Kalau yang gas, mineral tadi apa Pak? itu tiap berapa bulan?

Lukman Hakim

Itu mineral satu kali setahun.

Emerha

Sudah dilaksanakan?

Lukman Hakim

Sudah.

Emerha

Kalau sosialisasi perbendaharaan penerimaan?

Lukman Hakim

Itu juga sekai setahun.

Emerha

Sudah selesai?

Lukman Hakim

Itupun sifatnya bisa nanti, kan sosialisasi anggaran itu di sit tidak menyebutkan apa yang mau disosialisasikan, cuma anggaran saja. Bisa saja itu tidak setiap tahun. Tergantung kira-kira apa yang perlu disosialisasi dari kesepuluh pajak itu, kesepuluh pajak daerah. Ha yang mau

Emerha

Sepuluh itu semua disosialisasikan?

Lukman Hakim

Gak mesti. Kira-kira yang perlu saja. Tahun ini yang perlu apa gitu. Dilihat anggaran di APBDnya kira-kia oh ini perlu yang perlu.

Emerha

Yang dalam waktu dekat ini ada sosialisasi yang akan dilaksanakan?

Lukman Hakim

Ada. Pajak mineral bukan logam itu.

Emerha

Itu tanggal berapa Pak?

Lukman Hakim

Belum ditentukan tanggal berapa tapi bulan ini.

Emerha

Minggu ini juga ya?

Lukman Hakim

Minggunya paling yo akhir. Akhir bulan.

Emerha

Akhir bulan. Menurut Bapak ee bimtek-bimtek sosialisasi kayak gitu bisa meningkatkan pengetahuan?

Lukman Hakim

Iya?

Emerha

Bagaimana bisa?

Lukman Hakim

Ya karena mereka jadi tahu misalnya apa tata cara pengisian form pendataan anu, pendataan itu MBLB mineral bukan logam yang ditambang, dia tahunya dari sosialisasi itu. Formnya dibagikan terus juga dikasih tahu caranya ngisi seperti itu.

Emerha

Seberapa baik menurut Bapak pelatihan itu dilakukan? Sebaiknya dilakukan.

Lukman Hakim

Artinya?

Emerha

Ee maksudnya Bapak menilai itu titik kebaikannya apa, manfaatnya seperti apa?

Lukman Hakim

Ya manfaatnya ya dengan cara itu kita bisa jalan satu-satunya untuk mengumpulkan mereka itu kalau untuk mengefisienkan waktu itu. Kan dari sekian puluh wajib pajak kan kalau kita datang ke tempatnya masing-masing kan tidak efisien nggih waktunya.

Emerha

Eem itu semua wajib pajak harus mendapatkan sosialisasi ya?

Lukman Hakim

Misalnya per anu, misalnya kita mau sosialisasi pajak hotel restoran ya wajib pajak hotel restoran yang diundang. Kan waktunya efisien dan efektif.

Emerha

Bagaimana Bapak menilai kalau mereka itu yang, peserta itu sudah paham sehingga tidak diperlukan lagi sosialisasi atau diperlukan sosialisasi. Itu bagaimana Bapak menilai mereka?

Lukman Hakim

Ya ketika tindak lanjutnya itu kan mereka sudah lancar dan membayar pajak. Walaupun nggak itu karena sudah tahu tapi itu bukan karena tidak tahu. Karena mungkin wajib pajak itu sudah tahu tapi mungkin aman-aman, ya niatnya mungkin mau ngemplang lain lagi itu. Tapi intinya sosialisasi itu supaya mereka tahu dan tambah tahu gitu. mengingatkan juga bisa.

Emerha

Kalau dari cara wajib pajak atau peserta latihan gitu, Bapak ndak sering ngajarka mereka untuk saling diskusi?

Lukman Hakim

Ee

Emerha

Antar wajib pajak misalkan yang satu ikut sosialisasi yang satu tidak. Ayo dianjurkan yang ini bisa kita diskusi.

Lukman Hakim

Kalau yang masalah diskusi itu mereka bahkan sudah punya perkumpulan-perkumpulan misal hote restoran punya PHRI to persatuan hotel restoran Indonesia to.

Emerha

Jadi disitu wadahnya untuk diskusi?

Lukman Hakim

Hó. Dia sudah punya anu persatuan.

Emerha

Terus peran Bapak di situ seperti apa?

Lukman Hakim

Gimana?

Emerha

Perannya Bapak ke perhimpunan-perhimpunan itu bagaimana? Bagaimana Bapak . . . (13:36)

Lukman Hakim

Ya nggak ada perannya. Hanya menghimbau saja bahwa regulasi itu harus dipatuhi gitu. tapi kalau mereka mau mengusulkan apa tapi yang membangun boleh. Misalnya dalam rancangan Perda mereka itu mau mengusulkan tarif 7,5% kalau naik jangan terlalu tinggi misalnya jadi 8 atau berapa. Jangan di istilahnya jangan dimaksimalkan 10% itu dari mereka.

Emerha

Kalau yang apakah Pemda juga memfasilitasi mereka kayak tadi perhimpunan-perhimpunan gitu. Ada bantuan khusus keuangan kek atau apa dari Pemda?

Lukman Hakim

Nggak ada.

Emerha

Itu nggak ada ya? Mereka udah mandiri ya?

Lukman Hakim

Heém.

Emerha

Menurut Bapak apa yang menyebabkan mereka mau berbagi pengalaman?

Lukman Hakim

Maksudnya pengalaman apa?

Emerha

Yang kayak tadi sering diskusi itu? Yang satu nggak ikut sosialisai, yang satunya ikut terus dia ajarkan ke yang satunya. Itu menurut Bapak apa yang menyebabkan mereka mau?

Lukman Hakim

Kalau itu kepentingan mereka sendiri aja. Kepentingan. Lebih cenderung ke kepentingan mereka itu.

Emerha

Kalau untuk ruang diskusi disediakan juga untuk mereka?

Lukman Hakim

Pas sosialisai yo otomatis dikasih slot waktu. Kalau di luar itu boleh di sini konsultasi, boleh kapanpun. Bahkan

Emerha

Kalau dari ahli dari akademisi ada yang dipanggil untuk sosialisai jadi instruktur?

Lukman Hakim

Kalau yang hotel restoran pelaku usaha pajak. Dari reklame dulu apa, pajak dari restoran pernah.

Emerha

Siapa Pak yang pernah diundang?

Lukman Hakim

Dulu itu yang pengusaha wingko Sulistyowati.

Emerha

Pengusaha asli di sini?

Lukman Hakim

Iya. Wingko.

Emerha

Apa itu?

Lukman Hakim

Wingko Sulistyowati yang itu lo makanan kecil itu. Itu kami mengundang cuma untuk ini aja supaya beliau itu menyampaikan sejarahnya dia membangun usaha saja. Supaya mereka juga dapat manfaat dari orang tersebut gitu lo. Bukan dari sisi pajaknya karena produksi wingko itu tidak ditarik pajak. Karena bukan restoran, jajanan kecil sih. Gurih itu. Mungkin njenengan pernah di Jogja ada.

Emerha

Iya. Yang saya makan dulu. Sosialisasinya murni Pemda ya.

Lukman Hakim

Iya. Mereka ya yang dipanggil dikasih anu, dikasih honorarium narasumber.

Emerha

Honorarium narasumber?

Lukman Hakim

Iya.

Emerha

Menurut Bapak ee para ahli itu bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak Bapak?

Lukman Hakim

Bisa.

Emerha

Dengan mengundang mereka?

Lukman Hakim

Insyaallah bisa.

Emerha

Bagaimana itu?

Lukman Hakim

Ya karena mereka, karena beliau yang kami undang sebagai narasumber, sebagai orang yang berhasil mereka cerita dari pengalaman beliau merintis kan yang saya undang kan yang sekarang sukses sau-satunya yang paling sukses itu perusahaan wingko yang di Wates itu yang paling terkenal yang paling enak wingkunya. Ha beliau cerita dari dulu sebelum berhasil dari kecil. Nah, kan pengalaman beliau itu disebarkan itu yang wajib pajak. Selain kami mensosialisasikan untuk narik pajak hotel dan restoran kan dari sisi lain mereka ee cara tahu cara membangun bisnis gitu lo dari kecil menjadi besar gitu.

Emerha

Menurut Bapak faktor apa yang menyebabkan si ahli itu mau memberikan pengalaman sama dia?

Lukman Hakim

Ya faktor anu aja mereka ya sama Pemda juga ada kerja samanya. Kerja sama istilahnya Pemda juga ikut bisa apa diajak kerja sama dari mereka masih kecil, dari beliau masih kecil usahanya seperti itu.

Emerha

Itu ee jadi instruktur gitu Bapak melakukan dokumentasi nggak apa yang dikatakan oleh ahli itu? Atau ahli itu bawa kayak slide dibagi-bagi ada nggak?

Lukman Hakim

Waktu itu nggak yang yang di tahun 2014 apa ya, eh 2015 yang ahli dari pengusaha itu. Setelah itu cuma itu aja satu, yang lain cuma sosialisasi biasa aja yang cuma menyampaikan ini aja ilmu dan cara-cara pembayaran sperti itu.

Emerha

Kalau staff Bapak yang Bapak utus keluar untuk diklat ada pernah? Misalkan di pemerintah pusat atau di Piki?

Lukman Hakim

Kalau staff saya bidang pendapatan belum gak ada, belum pernah.

Emerha

Kenapa itu belum pernah? Gak ada anggarannya atau gimana?

Lukman Hakim

Itu yak arena di bidang lain yang berangkat. Misalnya di bidang pajak ada kemaren barusan Cuma pemeriksaan. Gak ada.

Emerha

Tergantung SDMnya juga ya banyak sedikitnya. Selama ini Bapak menjadi pembicara di luar Pemda? Misalkan Pemda lain yang mengundang untuk menceritakan pengalaman Bapak putar baliknya ya, misalkan tadi.

Emerha

Bapak di bidang pendapaan itu berapa lama?

Lukman Hakim

Bidang pendapatan itu, ada bidang pendapatan ada sejak 2017, baru dua tahun ini. baru dua tahun berjalan.

Emerha

Sebelumnya Bapak di mana?

Lukman Hakim

Di yang bidang pajak non PBB dan PBHTP. Masih masih sebelum ada PP nomer 19 perubahan. Masih DPA dulu.

Emerha

Menurut Bapak dengan rotasi seperti itu bisa meningkatkan pengetahuan Bapak?

Lukman Hakim

Kalau saya itu sih kebetulan dari praktek ke teori lagi sekarang di bidang pendapatan itu. Artinya yo tidak begitu anu

Emerha

Pengalaman Bapak di jabatan sebelumnya bisa diterapkan di jabatan sekarang?

Lukman Hakim

Ya malahan diterapkan artinya kita tahu selaku dibidang pendapatan yang isinya coordinator itu tahu tahu teknis gitu kok. Ketika mengusulkan apa, tau teknisnya. Sekarang kayak Menko Menteri coordinator ekonomi itu bidang pendapatan, teknisnya dulu saya pernah melaksanakan di non PBB PHBTP, misalnya pajak hotel restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak BPJS, pajak hiburan itu pernah. Tapi PBB dan PBHTP saya tidak pernah menangani secara teknis.

Emerha

Kerja di awal-awal Bapak pejabat di sini Bapak belajar di mana tentang PBB, tentang tupoksinya bidang pendapatan?

Lukman Hakim

Ya kan kalau jabatan baru di ukuran tugas, perukuran tugas. Perukuran tugas ada, terus disitu diaca tugas kita apa aja.

Emerha

Bapak juga sering berdiskusi dengan staff Bapak?

Lukman Hakim

La iya.

Emerha

Kalau misalnya minta pendapat dari mereka atau belajar dari mereka bila pernah?

Lukman Hakim

La iya. Seperti itu. Kebetulan saya kan orang lama di sini, dari lain bidang saya pun saya ya berusaha misalnya yang teknis di sini kan ada bidang pajak. Kalau ada persoalan yang baru saya berusaha menanyakan.

Emerha

Menurut Bapak apakah rotasi pejabat itu bisa menambah pengetahuan?

Lukman Hakim

Seharusnya bisa.

Emerha

Seharusnya bisa. Bagaimana bisa Pak?

Lukman Hakim

Ya misalnya ya rotasi jabatan dalam arti yang sama apa jabatan yang sama atau?

Emerha

Jabatan Bapak yang sekarang ini dari yang sebelumnya ke yang sekarang?

Lukman Hakim

Bisa. Karena dulu itu menangani teknis kecil sekarang menangani ee coordinator lebih besar itu. kita haru tahu aturan-aturan lebih besar lagi, sering banyak baca, sering banyak mengikuti perkembangan. Dulu mengurangi, dulu cuma menangani pajak sebelum menangani BKAD saya, dari BKAD ngomongin pajak itu, pajak berapa, delapan atau berapa. Sekarang menangani semuanya tapi dalam konteks coordinator. Misalnya saya harus tahu retribusi seperti itu. itu pajak saja.

Emerha

Kalau Bapak jadi instruktur di Bimtek sosialisasi itu, itu ee materi-materi Bapak itu dikumpulkan dijadikan satu dokumen gitu ada? Pernah dibaca?

Lukman Hakim

Pernah.

Emerha

Itu di?

Lukman Hakim

Di karena di PPBUnya (26:03)

Emerha

Itu dikelola di mana Pak dokumennya?

Lukman Hakim

Dokumen di Mas Eko ada, di bidang pajak ada.

Emerha

Itu yang bikin Bapak sendiri?

Lukman Hakim

Itu kebetulan dari bidang pajak. Saya kan pelaksanaannya gitu aja, yang teknis buat itu nanti disampaikan.

Emerha

Itu dalam bentuk apa Pak? File atau?

Lukman Hakim

Di flashdisk aja.

Emerha

Flashdisk berarti file ya?

Lukman Hakim

Iya.

Emerha

Itu dibagiakn ke peserta nanti?

Lukman Hakim

Yang hardcopynya iya, hardcopynya dibagikan.

Emerha

Hardcopynya itu, fike nggak dibagikan?

Lukman Hakim

O nggak. Cuma kan nanti di slide. Nggak yang dia anu.

Emerha

Kalau diskusi antar staff Bapak itu sering dianjurkan membahas masalah-masalah tentang pajak ada?

Lukman Hakim

Kalau secara ini, secara resmi itu gak pernah gitu bilang saya tapi otomatis itu

Emerha

Otomatis ya?

Lukman Hakim

Ha'a. kalau ada masalah kan pasti ditanyakan ke yang di atas.

Emerha

Itu ada didokumentasikan juga?

Lukman Hakim

Oh nggak kalau itu.

Emerha

Misalnya si A punya masalah ini tentang pajak terus dibikinkan keluhan staff dikirimkan ke pimpinan untuk dimintakan diskusi?

Lukman Hakim

Oh nggak. Kalau itu atas nama anu aja, permasalahan apa nanti jadinya apa.

Emerha

Berarti lisan saja Pak? Habis disitu saja?

Lukman Hakim

Ha'a. misalnya ada permasalahan wajib pajak pengurangan atau apa apa itu. nggak ada dokumentasi ini dari A dari B kita tahu.

Emerha

Kalau Bapak mengajarkan ke mereka biasanya bagaimana Pak modelnya? Dari Bapak ke staff untuk misalnya yang baru, Bapak biasanya mengajarkan tentang tupoksinya melalui apa?

Lukman Hakim

Kalau saya selagi itu ada dokumen ya saya kasih dokumen suruh baca. Kalau ada peraturan Bupati yang nomer berapa disuruh download di anu, di JDIH jaringan dokumentasi dan informasi hukum di web ada. JDIH Kulon Progo nomer berapa tunjukkan itu, tolong baca nanti sewaktu-waktu tupoksi masih sibuk.

Emerha

Kalau yang ikut diklat yang Bapak bilang tadi apakah mereka diwajibkan bikin laporan Pak setelah diklat itu?

Lukman Hakim

Kebetulan yang diklat itu di bidang lain Pak, bidang pajak itu. Paling laporannya yang pasti itu laporan perjalanan dinas Pak.

Emerha

Itu yang paling banyak ya?

Lukman Hakim

Ha'a. Tapi kalau dokumen yang setelah diklat itu ya ada misalnya saya pernah dikasih dan Perbup pemeriksaan kemaren. Ini Pak Perbup pemeriksaan kemaren

Emerha

Oh berarti teman di bidang pajak bagi-bagi ke sini?

Lukman Hakim

Ha'a.

Emerha

Dan itu sering Pak?

Lukman Hakim

Ya kalau ada hubungannya aja. Kemaren saya dikasih file anu Perbup, kompilasi Perbup dari daerah-daerah itu sama hardcopynya ada satu. Perbup pemeriksaan itu.

Emerha

Tadi yang dari ahli yang Bapak datangkan dari Kementerian PUPR ya?

Lukman Hakim

Dinas. Dinas.

Emerha

Itu ada kerja samanya Pak? Atau cuma saat dibutuhkan saja waktu itu?

Lukman Hakim

Kerja samanya di Perda ini kan sekarang MBLB kan kewenangan pengelolaannya itu kan di Provinsi. Dinas PUPR esdm Provinsi DIY. Itu. Tapi pajaknya masuknya sini, pajak mineral bukan logam. Jadi kewenangan sana itu misalnya pengawasan, pengawasan tentang pengambilan mineral bukan logam pasir, batu apa itu sana yang ngawasi itu sana.

Emerha

Bagaimana Bapak bisa meloby mereka supaya mau Pak? Ada hubungan pertemanan atau apa?

Lukman Hakim

Hubungan kerja setiap anu kan ada, setiap hari itu kan ada. Misalnya kita ada anu wajib pajak yang misalnya sering pulang bayar pajak kan lapor ke sana. Terus ada wajib, ada wajib pajak ha to, yang tidak berizin misalnya ditanya saya laporkan dia, PUP kan masalah perizinan kan PUP sana. Selalu berkoordinasi.

Emerha

Itu kalau Bapak mengadakan sosialisasi sendiri, itu topic sosialisasi Bapak yang tentukan ya?

Lukman Hakim

Ha'a.

Emerha

Gimana cara menentukannya Pak topic?

Lukman Hakim

Ya tergantung permasalahannya yang mau dibahas itu. Misalnya kemarin sebelum ada opo, sebelum kan kemarin ada satu mungkin kalau njenengan kemarin Pak Santo ya, pernah ketemu Pak Susanto. Pak sopo, Pak Alif?

Emerha

Pak Alif.

Lukman Hakim

Di bidang pajak kan ada kebijakan baru yang bahwa ini itu pendataan di anu, pendataan di lokasi penambangan dengan memasang porter, apa yang di istilahnya ngadang di jalan itu di pos-pos, pos pemantauan pos pendataan. Seperti itu.

Emerha

Bapak punya data base tentang pengembangan pendapatan tadi Pak pakai menggunakan sistem informasi?

Lukman Hakim

Sistem informasinya kalau pengembangan nggak ada.

Emerha

Nggak ada ya?

Lukman Hakim

Kalau itu cuma

Emerha

Yang pendapatan secara internal? Misalkan SPJ-SPJ penerimaan itu harus masuk ke bidang pendapatan itu ada data basenya?

Lukman Hakim

Nggak. Karena di sini itu hanya coordinator saja, teknisnya di bidang pajak. Soalnya bidang pajak itu sekarang sedang mengembangkan Simda dari BPKP itu. seadanya gitu.

Emerha

Di bidang pendapatan?

Lukman Hakim

Ha'a. itu adanya di bidang pajak.

Emerha

Kalau Bapak pernah studi banding ke Kabupaten lain ada untuk belajar tentang pendapatan pernah dilakukan?

Lukman Hakim

Pernah kemaren.

Emerha

Di mana?

Lukman Hakim

Di Temanggung pada tanggal sebelum puasa itu 12 Mei itu. Tanya-tanya tentang yo sana. Misalnya saya peroleh sana itu pajak mineral bukan logam dan batuan itu tidak ditarik.

Emerha

Tidak ditarik pajaknya ya?

Lukman Hakim

Tidak diselenggarakan karena ee fokusnya untuk apa namanya, pelestarian alam. Tidak ada kerusakan.

Emerha

Menurut Bapak studi banding pengalaman itu bermanfaat nggak kontribusinya ke Kulon Progo ada? Kemaren itu pergi.

Lukman Hakim

Ya itu suatu ketika bisa dijadikan referensi misalnya Kulon Progo bisa aja punya kebijakan seperti Temanggung yang eksplorasi MBLB nya dihentikan ata dikurangi bisa.

Emerha

Itu hasil studi banding didokumentasikan ya Pak? Ada?

Lukman Hakim

Dokumentasinya di laporan perjalanan dinas saja.

Emerha

Cuma di situ saja ya? Nggak dibagi-bagi untuk orang lain?

Lukman Hakim

Nggak. Nanti suatu ketika untuk

Emerha

Selama ini setelah Bapak melakukan banyak sosialisasi, strategi apa yang sudah Bapak ambil dari hasil sosialisasi itu? atau digunakan dalam pengembangan pendapatan?

Lukman Hakim

Yang itu?

Emerha

Yang hasil-hasil sosialisasi baik didalam maupun diluar walaupun bukan milik pengalaman Bapak. Nah, itu sudah ada nggak yang diramu menjadi strategi untuk mengembangkan pendapatan?

Lukman Hakim

Yang dari sosialisasi itu?

Emerha

Iya.

Lukman Hakim

Ha itu kan hasilnya itu yang anu, yang ee apa istilahnya membuat kebijakan kita pendataan di lapangan itu memakai sistem tol pendapatan, tol pendataan. Itu hasil dari sosialisasi itu.

Emerha

Tol pendataan itu yang bagaimana?

Lukman Hakim

Pendataan truk yang lewat itu ditanya pakai itu (36:50), diberikan itu, suruh ngisi formulir dari PT apa gitu. Nanti di situ dipegang kita, hasilnya itu surat pemberitaan pajak daerah. Itu seperti itu. itu baru juga, itu strategi baru mulai bulan September 2017 baru dilaksanakan.

Emerha

Kalau dari hasil-hasil penelitian di luar yang dijadikan referensi ada untuk pengembangan pendapatan? Pernah Bapak lakukan?

Lukman Hakim

Yang di luar?

Emerha

Iya.

Lukman Hakim

Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.

Emerha

Berarti Bapak meniru dari Tangerang tadi ya.

Lukman Hakim

Ha'a. Mau mulai target akhir tahunlah peraturan Bupati itu sudah jadi. Nanti biar digunakan untuk 2019 jika diperlukan sebagai dasar regulasi untuk pemeriksaan itu, pegangan pedoman. Pemeriksaan kan harus ada Perbup to. Standar pemeriksaan itu apa, terus syarat-syaratnya itu kan di Perbup itu sebagai pegangan kita untuk melakukan, untuk melangkah gitu lo.

Emerha

Selama proses, selama terjadinya proses sosialisasinya atau tupoksinya yang Bapak lakukan itu memang sudah menjadi budaya ya selama ini?

Lukman Hakim

Saya sudah ada kegiatan di anu, di TPA di APBD ada, dananya disediakan.

Emerha

Kalau hasil-hasil penelitian, hasil-hasil sosialisasi itu bisa diminta oleh orang lain pendapatan?

Lukman Hakim

Yang hasil gimana maksudnya?

Emerha

Misalkan habis melakukan sosialisasi di sini terus ada file-nya di sini, itu orang bisa minta gitu dari bidang lain untuk belajar?

Lukman Hakim

O iya bisa. Memang bahan yang disampaikan pada saat sosialisasi ya bisa itu. Bisa semua.

- b. Wawancara ke-2 dengan Bapak Lukman Hakim pada 16 Juli 2018, pukul 15.30 di ruang kerjanya, Ruang Tamu Kabid Pendapatan. Topik utama wawancara tentang kendala, penyebab kendala, dan solusi yang sudah dilakukan. Wawancara ini merupakan wawancara tentang topik RM4.

Emerha

Oke. Topik yang terakhir Pak, selama Bapak mengelola pengembangan pendapatan apa masalah yang Bapak hadapi?

Lukman Hakim

Pengembangan, di pengembangan pendapatan itu yang saya hadapi itu ee apa namanya, jumlah SDM itu dari pajak yang anu masih

Emerha

Masih kurang?

Lukman Hakim

Emh.

Emerha

Itu apa yang menyebabkan sampai bisa kurang?

Lukman Hakim

Bahkan tahu sendiri kita kan selama beberapa tahun ada moratorium dari pusat to?

Emerha

Penurunan kepegawaian.

Lukman Hakim

Haá. Kalau . . . (00:52). Walaupun saya tidak pernah baca tapi pernah dengar. Jangan sampai belanja pegawai itu melebihi 50 itu kan.

Emerha

Selain.

Lukman Hakim

50% dari nilai APBD to.

Emerha

Selain SDM itu apalagi yang teknis yang jadi kendala menurut pengetahuan Bapak?

Lukman Hakim

Sebagai kendala ya masalah dana juga iya mempengaruhi itu. La kok keterbatasan jumlah anggaran, keterbatasan pembinaan secara keseluruhan pendapatan Kulon Progo ini.

Emerha

Solusi yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kurangnya SDM tadi apa selama ini, yang sudah dilakukan?

Lukman Hakim

Yang sudah dilakukan sejak 2017 itu ada, ada ini mengangkat, meminta untuk pengadaan PHL tenaga harian lepas.

Emerha

Tenaga harian lepas ya?

Lukman Hakim

Haá. jumlahnya lupa saya dibidang pajak itu puluhan.

Emerha

Tahun ini juga ada?

Lukman Hakim

Ada. Sudah berlanjut.

Emerha

Kalau untuk kekurangan pagu anggaran sudah ada solusinya yang sudah dihasil?

Lukman Hakim

Solusinya ya dengan, ya kalau yang lain ya belum. Kalau yang PHL ya udah dianu. Misalnya saya SKPD keluar masih minim.

Emerha

Termasuk juga untuk Diklat ke luar daerah ya?

Lukman Hakim

Haá.

Emerha

Masih kurang?

Lukman Hakim

Diklat tidak di, seharusnya yang memikirkan Diklat itu BKPP.

Emerha

Pagu anggaran yang kurang itu di mana Pak posisinya? Maksudnya di kegiatan apa gitu yang Bapak merasa kurang? Di pelatihannya? Khusus di bidang pengembangan Bapak.

Lukman Hakim

Di pelatihannya itu haá. Misalnya kalau ini di pajak kan seharusnya dari BKPP itu walaupun formasinya suda masuk sana kan seharusnya memikirkan PPNS yang ada di sini. Karena sebagai Fiskes pemungut pajak kan kekuatannya ada PPNS, terus mungkin ada pemeriksa gitu. Jabatan . . . (03:34) untuk kedepannya lo.

Emerha

Menurut Bapak pengetahuan apalagi yang dibutuhkan di bidang Bapak untuk bekerja di masa-masa yang akan datang?

Lukman Hakim

Kalau saya itu sebetulnya ini, kalau di bidang pendapatan itu memang luas ya. Kita cuma memberikan umpan-umpan saja gitu. ini seharusnya seperti ini seperti ini. Kalaupun saya anu, mungkin ya saya bisa sebagai pemeriksa juga bisa. Di sana kemarin Cuma satu yang dijadikan teknis saja pemeriksa Sanaa. Sebetulnya di tempat bidang saya pendapatan juga bisa itu. Dia ahli pemeriksa juga bisa cuma sifatnya coordinator seperti itu.

Emerha

Oke Pak untuk sementara itu aja dulu wawancara.

Lukman Hakim

La iya. Mungkin njenengan sebagai BKPP besok memikirkan oh supaya di anu. Terutama ini, keahlian-keahlian yang diperlukan di BKAD itu supaya optimalisasi pendapatan itu meningkat. Itu harus pemeriksa itu coba.

Emerha

Pemeriksa sama instrukturnya?

Lukman Hakim

Haá. pemeriksa struktur ini yang saya mungkin, yang perlu tambahan. Struktur yang ada di SKPD itu harus juga mendukung.

Emerha

Dirampingkan atau diapakan? Artinya terlalu gemuk.

Lukman Hakim

Kalau di, kalau di daerah lain di DIY selain Kulon Progo itu kan strukturnya berdasarkan alur itu kan Pak. Di sana kan, misanya di Bantul ya, njenengan pernah gak ke Bantul? Pokoknya di Bantul apa di selain itu kan berdasarkan alur aliran kerja itu. Sebabnya ada bidang pendaftaran dan pendataan terus ada bidang penagihan. Nah, dini nggak.

Emerha

Di sini nggak ada ya?

Lukman Hakim

Di sini bidang pendapatan itu cuma teoris istilahnya.

Emerha

Ini otomatis menambah melebarkan struktur berarti menambah SDM juga?

Lukman Hakim

Bukan menambah struktur.

Emerha

Maksudnya diadakan khusus Tupoksi itu tapi dengan pegawai yang sama?

Lukman Hakim

Artinya struktur dari pendaftaran pendataan itu di bidang pajak itu kalau di sini Can Seksi (06:28) to yang struktur bidang angsuran pajak. Kalau di Bantul itu ditanggung oleh eselon 3.

Emerha

Berarti naik status gitu?

Lukman Hakim

Heém.

Emerha

Jadi ada sub bidang naik status ya Pak ya?

Lukman Hakim

Jadi lebih lebih ringan gitu.

Emerha

Iya. Oh gitu.

Lukman Hakim

Di sini teknis seluruh pajak itu ditanggung oleh satu bidang. Bidang pajak saja. Saya kalau ada pemeriksaan atau apa kita tidak terlalu

Emerha

Jadi misalnya bidang pengembangan pendapatan jadi bidang sendiri?

Lukman Hakim

Karena didalam apa, tapi di subdit jangan tidak. Jangan bidang subdit opo ngono.

Emerha

Iya iya. Paham saya. Supaya lebih ringan ya investigasinya?

Lukman Hakim

Haá. nanggung apa, eselon yang nanggung itu lebih tinggi gitu, eselon tiga gitu lo. Kalau di sini kan nggak, eselon bidang pendapatan itu bebannya terlalu berat yang menanggung masalah pendaftaran pendataan pajak, menanggung masalah penagihannya itu. Kalau di daerah lain selain di DIY ya, kalau di daerah lain pun seperti itu. Jadi di sini bidang, seluruh bidang itu menangani teknis semua gitu. kalau di sini nggak. Bidang pendapatan menangani coordinator pajak teknisnya nggak tahu.

Emerha

Jadi ada satu bidang yang teknis gitu ya?

Lukman Hakim

Haá teknis. Yang satu kayak seperti saya teori. Tetapi saya bisa cerita seperti ini karena pernah melaksanakan teknis. Saya dulu di seksi penetapan dan penagihan pajak non PBB lo, non PBB dengan PBHTB delapan pajak.

Emerha

Iya. Oke Pak. Itu aja dulu. Kalau misalkan masih ada yang kurang saya mau wawancara lagi nanti.

Lukman Hakim

O iya iya. Tahu nomer hape saya dari Mas Alif itu ya?

Emerha

Iya. Bapak yang tadi Pak. Hehe.

Lukman Hakim

Saya nomernya terblokir jadi mungkin kalau ditelpon nggak

- c. Wawancara ke-3 dengan Lukman Hakim, pada Senin, 17 September 2018, pukul 11.41 WIB di ruang tamu, Bidang Pendapatan. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Hem... ya... ah... aduh... cuma... kayak gini pak... kan nanti mungkin kalo wawancara ini seperti contoh seperti pak Nur nanti kan saya sebut namanya lengkap seperti ini, jadi saya mau konfirmasi ke bapak, bapak tidak keberatan kalo saya tulis lengkap namanya bapak

Lukman

Terus... yang... saya pernah ngomong apa di sini?

Emerha

Kemaren kan tentang... yang pendapatan ya pak...

Lukman

He'em... yang halaman berapa itu tadi

Emerha

Yang ini... lagi di cari ini, kemaren di mana ini ya..., tapi nggak semuanya juga Cuma yang penting-penting saja. Terus ini, ini sudah mau publish pak, mau publish...

Lukman

Udah selesai...

Emerha

Iya... tapi baru draft itu pak, mungkin koreksian RPJP

Lukman

RCP... RPC... RPJPD ki opo yo...

Emerha

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah...

Lukman

Oh... R... Oh iya... kalo menengah RPJMD, kok kayaknya di daerah itu adanya Cuma RPJMD... yang tahunan...

Emerha

Ya... cuman ini lima kan tahun, kalo RPJPD biasanya kan sekali susun aja kan 25 tahun pak

Lukman

Tapi kok... saya nggak pernah... apa ya... apa ada pak di daerah?

Emerha

Ada...di daerah ada...

Lukman

Di Bappeda

Emerha

Bappeda ada kemaren, Cuma mereka semuanya di sana nggak pernah ngalami gitu

Lukman

Oh...

Emerha

Katanya mereka datang udah ada RPJPD berarti mungkin yang pertama-pertama ya... yang nyusun karena kan 25 tahun pak

Lukman

Oh... ah.. iyo, he'e 25 tahun yo...

Emerha

Kecuali yang masih... kan nggak ada...

Lukman

Di daerah memang ada yang GBHN... itu dulu... dulu lho, sekarang kok kayaknya. Itu berdasarkan rekaman to...

Emerha

Ya berdasarkan rekaman pak...

Lukman

Ya udah di catet nama saya aja

Emerha

Ha... nggak tercetak kali itu ya...

Lukman

Oh... Cuma mau mencatat namanya to... jabatannya apa...

Emerha

Iya... he'e untuk istilahnya kan biasanya ada yang kalo yang mengandung rahasia kan biasanya kan Cuma inisial aja, misalkan kalo kita ada temuan inspektorat, hem... kayak gini pak...

Lukman

Catet aja... hem... he'em... nggak usah di kasih gelar nggak apa-apa lah...

Emerha

He'e tapi itu di dalamnya nanti di sini kan dapat..., ini nanti. Itu nggak ada yang mengandung... rahasia ya pak...

Lukman

He'e...

Emerha

Jadi ini masih draft... mungkin masih ada yang harus saya tambah... tambahkan sama dikurangi

Lukman

Iki... kendala pengeluaran...

Emerha

He'em...

Lukman

Kayaknya salah sebut...

Emerha

Kendala penerimaan...

Lukman

Pengeluaran... yang betul pengeluaran...

Emerha

Oh pengeluaran... oh ya...

Lukman

Terkait pra setoran... pra setoran...

Emerha

Setornya kan dibidang penerimaan pak bukan di pengeluaran...

Lukman

Yang anu... yang anunya kan yang bayar kan pengeluaran... anu... yang untuk SKPD itu lho, kita rapat itu bayarre...

Emerha

Oh... oh... yang di sini

Lukman

He'e...

Emerha

Di sini ya...

Lukman

He'e... kita kan wakil di warung makan, yang memungut itu bendahara yang pengeluaran, nanti pengeluaran bayar di anu...

Emerha

Di itu ya... oh berarti

Lukman

Penerimaan...

Emerha

Berarti... berarti dari sini pendapatannya ya... pendapatan..

Lukman

Pra setoran khusus, ya... salah salah... coret

Emerha

Ya.. boleh nanti tinggal saya korelasikan di dalam anunya... transkripnya...

Lukman

Ya udah di catet aja...

Emerha

Ya.. okey... pak gitu aja...

Lukman

Jabatannya udah...

Emerha

Ya... udah ada lengkap, Cuma di situ karena banyak yang... kalo nama kan tidak selalu pasang Cuma di profilnya ada

Lukman

Oh...

Emerha

Kalo profilnya bapak kan ada di sini... nis... hem... terus..., nah... kalo ini ada pak...

Lukman

He'e...

Emerha

Ini kalo diteliti ini ada...

Lukman

Oh... bulan Februari ya... sebelum puasa ya...

Emerha

Ya... ini..., nah... ini... hem... ini namanya bapak...

Lukman

Ya...

Emerha

Oh ya... cuman... pangkat... ini nanti akan muncul di... lampiran nanti pak...

Lukman

Oh gitu...

Emerha

Namanya bapak, nah Cuma masih ada yang kurang ini, kalo bapak bersedia saya minta fotonya bapak untuk lampiran profil partisipan...

Lukman

Foto

Emerha

Ya... saya foto langsung aja

Lukman

Piye...

Emerha

Ini ke sini nah... satu... dua... tiga... okey... satu... dua... tiga... okey... udah... udah tadi

Lukman

Oh ya wes..

Emerha

Tinggal saya... ini fungsi boleh kan atau ulang...

Lukman

Itu...

Emerha

Itu aja okey... okey pak itu aja pak terima kasih atas konfirmasinya

10. Meylani Lestari

- a. Wawancara ke-1 dengan Meylani Lestari pada 17 Juli 2018, pukul 11.34 di ruang kerjanya, Ruang Bidang Anggaran. Melani adalah kepala Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD yang baru menjabat 5 bulan. Topik utama wawancara tentang proses belajar transparansi dan akuntabilitas penganggaran di bidang kebijakan pengelolaan keuangan (RM3).

Emerha

e.. ibu sebelum di.. Kasubid sini, sebelumnya dimana bu?

Mey Lestari

Sebelumnya di bagian perekonomian

Emerha

di..Sekertariat ya..

Mey Lestari

Nggak di bagian Perekonomian Sek.. oh ya.. Sekertariat Daerah

Emerha

Hem.. tadi bulan, sejak bulan apa di sini?

Mey Lestari

26 Januari 2018

Emerha

2018 ya..kalo tupoksi nya kebijakan pengelolaan keuangan itu apa memangnya?

Mey Lestari

Tupoksinya kami?

Emerha

Iya tupoksinya?

Mey Lestari

Yang pertama kita membuat regulasi terkait e.. pengelolaan keuangan kalo dari salah satu penugasan kami menyusun harga barang dan jasa salah satunya, kemudian menyusun peraturan ASB Analisis Standar Belajar, kemudian kita menyusun produk-produk hukum yang itu memang diperlukan untuk menjalankan e.. apa ya.. keuangan..

Emerha

Pengelolaan.. berarti di khusus berarti khusus lingkup keuangan saja ya..?

Mey Lestari

Keuangan mencakup yang bidang keuangan dan perbendaharaan ya pak, kalo kebijakan untuk pendapatan untuk kebijakan di aset dan akuntansi itu tidak menjadi Tupoksi kami di luar Tupoksi kami

Emerha

Berarti akuntansi juga tidak ya..?

Mey Lestari

Akuntansi juga tidak..,

Yakup

Akuntansi di sini

Mey Lestari

Oh.. termasuk akuntansi termasuk maaf.. yang tidak pendapatan dan aset mereka membuat kebijakan tersendiri, he'e di urus bidang pendapatan dan aset eh.. he'e betul. Termasuk yang itu ya pak tunjangan.. tunjangan untuk perumahan dan advokasi di luar juga di kami penyusunannya

Emerha

Itu proses untuk menyunnya itu gimana mekanismenya, melibatkan semua?

Mey Lestari

He'e... untuk proses penyusunan e... pembuatan peraturan kita lebih banyak itu yang terlibat dari internal BKAD kita, semua bidang kita undang karena biasanya saling berkaitan, kemudian pihak luar atau OPD luar kita mengundang Bappeda kita mengundang bagian hukum dan Inspektorat Daerah. Tapi kalo untuk e.. penyusunan SHBJ karena itu digunakan oleh seluruh OPD kita ada perwakilan dari OPD, walau nggak semuanya ya pak. OPD-OPD yang besar kita ikut libatkan dalam penyusunan tersebut, kita.. e... rapatkan kalo sudah ada draftnya, draft itu yang akan menjadi pembahasan di rapat, gitu bisa beberapa kali baru finalisasi

Emerha

Kalo untuk kan ini KSB sama sekali ndak berharag ya?

Mey Lestari

He'e...

Emerha

e... itu e.. ibu sebelumnya ibu pernah ikut pelatihan atau kursus dalam?

Mey Lestari

Sama sekali belum pernah di bidang baru

Emerha

Sama sekali belum pernah, selama di bidang baru sama sebelumnya?

Mey Lestari

He'e.. baik selama menjabat di sini maupun sebelum di sini, emang ini hal baru buat.. buat.. kita ya.. kita apa aku ya..., hehehehe. Buat saya pribadi dulu lah..

Emerha

Iya.. waktu menyusun kebijakan itu, itu dikonsep sendiri atau sudah ada konsep dari.. misalkan di bidang Perden maupun Pendidikan tentang Prosedur pembayaran, itu sudah bikin konsep sendiri terus di kirimkan ke sini itu mekanismenya gimana?

Mey Lestari

Selama ini ada yang seperti itu..

Yakup

Ada yang dia bikin konsep sendiri ada yang kita libatkan Limas, seperti itu

Mey Lestari

He'e, karena kan kadang-kadang kan inisiatornya dari mereka gitu ya pak, e... kemudian ada juga di mix, mix and match gitu dengan dengan kita bareng-bareng, he'e

Emerha

Nanti setelah jadi gitu produknya kemudian di bawa ke bagian apa bu?

Mey Lestari

Di rapat kan dulu beberapa kali hampir mendekati final, bagian hukum itu udah Cuma tinggal inilah final sedikit lagi gitu prosesnya tetapi proses penyusunan semua ada di sini, dibagian hukum tinggal legal draftingnya, he'e. kalo secara substansi sudah dimatangkan di BKAD

Emerha

Kalo ibu baru 4 bulan di sini terus ibu waktu itu belajar di mana gitu, atau ada sharing pengalaman dengan staf?

Mey Lestari

Ya.. ya.. sharing informasi dengan teman-teman yang sudah lama di sini, terus belajarnya itu ya.. pas kauistisik gitu ya, sekarang yang diharapi apa baru kita buka aturan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dihadapi ini, karena kan aturan-aturannya sangat banyak, aturan bidang keuangan itu dinamis dan sangat banyak, perubahan-prubahan itu sangat banyak sehingga belajare yo pelan-pelan sambil e.. bekerja, belajar sambil berjalan gitu

Emerha

Kalo sumber dari.. itu apa di sini yang jadi dasar pijakan untuk penyusunan?

Mey Lestari

Ini ada regulasi-regulasi dari Pemerintah Pusat ini yang dipakai ya ini ya pak..

Yakup

Ya... Pemerintah Pusat, Permendagri kita, Permendagri 13

Mey Lestari

He'e permendagri.. permendagri 13

Emerha

Itu apakah setiap ada aturan baru dari Pemerintah Pusat itu langsung di bikin kan.. Perda atau Perbupnya, setiap.. setiap.. yang ke..?

Yakup

Untuk amanat iya di.. bikin..

Emerha

Sesuai amanatnya ya.. misalkan diatur dengan Perbup gitu Perda

Mey Lestari

Jadi mengikuti aturan Pusatnya ya pak ya, ada yang aturan Pusat yang sudah ada yang berubah, kita juga belum mengikuti juga ada, hibah. He'e.. hibah wasis kan sudah ada yang keluar yang terbaru 2018 perubahannya

Emerha

Itu kenapa bisa di bentuk Subbid sendiri bu?

Mey Lestari

He'e..

Emerha

Kebijakan pengelolaan keuangannya?

Mey Lestari

Sudah sama-sama, mulai dari keuangan mereka itu

Yakup

Karena memang sebuah kebijakan itu dari keuangan bagian keuangan di tentukan ini gimana (06.14 suara Yakup tidak jelas), e.. bagian keuangan ini kan di.. di hapus apa namanya di hapus

Mey Lestari

Sekda, bagian keuangan jadi nggak ada..

Yakup

Nggak ada kemudian..

Mey Lestari

Nah.. itu Tupoksi pekerjaannya ikut ke.. BKAD, jadi Sub Bidang pengelolaan kebijakan keuangan itu adalah renkarnasi dari Sekda bagian keuangan, Sekda. Pekerjaannya nggak ilang, cuman bagiannya yang ilang pekerjaannya tetap ada, yang dulu itu ada dua Sub bag sekarang di sini jadi nya adalah satu Seksi gitu

Emerha

Itu tidak tumpang tindih sama bagian hukum?

Mey Lestari

Tidak kalo kami itu bener-bener mengolah secara substansinya.. kalo bagian hukum proses legal draftingnya saja, sudah jadi di dalamnya itu sudah tidak ada.. apa pak, maksudnya apa yang harus di buat itu sudah selesai. Sana itu tinggal pengesahan, pengundangan.. gitu ya pak ya.. sama proses penyusunan proses apa ya pak ya.. ya pembuatan perdana itu. Semua pembahasannya di kita, bagian hukum dilibatkan ketika penyusunan, mereka mengikuti dan memberikan sumbang saran kayak gitu, tapi proses dari kita, yang rapat kita, yang bahas kita, semua kita, draft udah jadi bagian hukum, kita minta tolong untuk diterbitkan tapi melalui pak Sekda atau Pak Bupati gitu

Emerha

Terus selama di.. ke bidangnya itu sudah berapa Perda atau Perbup yang diterbitkan?

Mey Lestari

Kalo Perbup baru dua itupun perubahan.. perubahan Perbup tentang.. saya ndak apal ya.. tentang ini e.. apa namanya hak administrasi, administratif DPRD

Emerha

BPRD?

Mey Lestari

e.. DPRD

Emerha

DPRD

Mey Lestari

Jadi DPRD punya hak adminitratif itu to, kita baru e.. nyusun itu dua perubahannya sama Perbup SHBJ yang untuk 2019

Emerha

SHBJ?

Mey Lestari

SHBJ, Standar Harga.. e.. Standarisasi Harga Barang dan jasa untuk digunakan 2019 gitu satu perbup, SHBJ, sama dua.. dua.. perubahan

Yakup

SHBJ kan perubahannya kan ada dua ya.. dua kali

Mey Lestari

Perubahan..

Yakup

Yang kemaren itu satu, sama Per.. Perbup...

Mey Lestari

He'e.. Perbup SHBJ 2019, Perubahan SHBJ 2018 yang kedua sama perubahan yang..

Yakup

Nganu.. Hak Keuangan..Hak keuangan Dewan

Mey Lestari

Hak Keuangan dewan

Emerha

Kalo sebelum itu?

Mey Lestari

Berarti berapa 4 ya, 4 ya pak ya.. banyak

Yakup

Banyak Cuma kan.. sebelum itu kan mulai 2018-2000 di sini itu 2000, kalo di sini itu mulai 2017 pak karena per januari 2017 ya mbak

Mey ya, kita melebur di sini.. jadi harus ada..

Mey Lestari

He'e.. Sub bid baru ada 2017 pak

Emerha

Oh.. sub bid nya baru ada 2017 ya..

Mey Lestari

He'em.. di sini.. jadi produk hukum yang di dihasilkan yang 2017 ini banyak kok pak

Emerha

Ya ya ya..

Mey Lestari

Ada yang buatan baru ada yang merubah peraturan yang sudah ada. Jadi lingkup kita itu ya itu tadi masuk lingkupnya itu ke anggarannya, Perbendaharaannya dan administrasinya

Emerha

Ibu bisa diceritakan proses untuk berarti ada di lakukan semacam rapat gitu menentukan satu kebijakan misalkan, SH.. apa tadi?

Mey Lestari

SHBJ, Standarisasi Harga Barang dan Jasa, he'e

Emerha

Itu siapa-siapa yang terlibat yang diundang di rapat?

Mey Lestari

Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu

Emerha

Semua OPD dilibatkan?

Mey Lestari

He'e.. tetapi hanya satu personil atau ada yang 3 personil seperti itu, mereka kita bagi-bagi tugas gitu. Kaitan dengan harga konstruksi kita minta orang PU, kaitan dengan harga alat-alat kesehatan itu kita minta orang Dinkes gitu pak, pembagian sesuai dengan Tupoksi nya, kalo alat tulis kan itu, cenderung general kan semua menggunakan di kita ya.. kita.. ya pak ya.. yang lakukan pokoknya survei dulu. Udah survei dapat data harga kita memutuskan data harag yang dipakai mau harga rata-rata atau harga yang tertinggi dan berapa margin yang akan digunakan, karena nyusunnya sekarang makeknya besok gitu, udah.. kira rapat dapet harga kita rapatkan dan pembahasannya langsung ke TAPD seperti itu. Udah rapat ke TAPD masih ada item-item apa yang nggak disetujui ya nanti kita perbaiki

lagi ada harga yang dinilai belum apa ya.. nggak mengikuti e.. harga sekarang ya kita survei ulang gitu. Udah rapat beberapa kali ada tanggapan ya.. kita perbaikan selesai, sudah kita proses bagian hukum, bagian hukum tinggal memproses Perdanya e.. Perbup nya...

Emerha

Perbub ya?

Mey Lestari

He'e

Emerha

Itu mereka survei pake apa tuh, itu ditanya harganya masing-masing barang?

Mey Lestari

Ada form dari kita

Emerha

Ada form?

Mey Lestari

He'em..

Emerha

Jadi, isi tinjauan ini isi harganya?

Mey Lestari

He'em.., jadi form ATK kita udah rigid kertas jenis ini, pokoknya udah detail banget..

Yakup

Jadi barang-barang apa yang mau kita masukan di draft itu kita cantumkan di sana nanti tinggal harganya yang mengisi yang pihak ketiga yang kita survei gitu, nah.. kita biasanya menggunakan 3 data ada pasar pak.., ada 3 pasar

Mey Lestari

He'em..

Emerha

3 data pasar harga semua, harga toko?

Yakup

Ya semua harga toko..

Emerha

Terus yang tiga ini apa ya?

Mey Lestari

Toko A, toko, B, toko C

Yakup

Toko A, Toko B, Toko C

Mey Lestari

Toko indonesia..

Emerha

Untuk perbandingan itu ada 3 toko?

Mey Lestari

Iya.. misalnya toko ATK di.. idealnya sih.. membagi wilayah, daerah yang rame, daerah yang.., kan kita kan 12 kecamatan

Yakup

Mudah, sulit, sedang

Mey Lestari

He'e..

Yakup

Kalo.. kalo.. kecilnya.. soalnya kan kondisi wilayah di Kulonprogo ada yang beneran sulit..

Mey Lestari

Mungkin kan di sini sulit, di sana nggak terlalu

Emerha

Ya...

Mey Lestari

Nah.. makanya..

Emerha

Tapi dipilih ya..

Mey Lestari

Makanya... nanti keputusannya mau pilih harga rata-rata kah atau harag tertinggi kah

Emerha

Yang paling tinggi, paling rendah, atau tengah-tengah dari tiga toko itu?

Mey Lestari

He'e

Emerha

Itu.. anunya.. di.. e.. kegiatannya itu dianggarkan ya.. dianggarkan?

Mey Lestari

He'e..

Emerha

Berarti ada survei khusus untuk survei itu?

Mey Lestari

Eh.. itu nggak, hanya SPBD budget ya pak ya, kalo yang survei?

Yakup

Untuk biaya surveinya untuk pihak ketiganya, mereka diberikan jasa

Mey Lestari

He'e, jadi kalo bapak jadi tokonya itu.. kami.. minta tolong gitu untuk menjadi responden kan ada uang jasa untuk pengisian blanko, karena data yang kita minta memang sangat banyak, bahkan nggak nggak sekali jadi nanti kadang-kadang kita balikin.. balik lagi ke tempat itu udah selesai apa belum, kalo cuman sedikit kita langsung tanya jawab aja

Emerha

Itu setiap tahun berapa kali di update harganya?

Mey Lestari

Setahun sekali..

Yakup

Setahun sekali

Mey Lestari

He'e.. , dan setiap kalo ada perubahan, kalo ada kenaikan..

Yakup

Setiap ada perubahan..

Emerha

Setiap ada kenaikan harga?

Mey Lestari

He'em seperti gejolak harga kerta kemaren

Yakup

Seperti kemaren harga kita ada titipan Butok, terus kita ulang, kita survei ulang kita ada perubahan Perbup

Mey Lestari

Perbup yang lama udah tuh ya..., kita susulin Perbup yang baru, dengan item yang dirubah apa aja udah itu tok yang..

Emerha

Menurut ibu model rapat kalo tadi itu bisa.. bisa meningkatkan pengetahuan ya.. e.. ibu sebagai Kasubid pengelola?

Mey Lestari

Dengan rapat-rapat?

Emerha

He'e

Mey Lestari

Iya.. selain meningkatkan pengetahuan juga kan bisa saling sharing, sharing pendapat sharing informasi, tanggapan kan dari rapat itu semua keluar ya.. muncul, dari sisi orang pendapatan misalnya gimana, dari sisi pelaporannya gimana, perbendaharaan nanti yang akan melaksanakan SPG-annya gimana, jelas tidak hanya jadi ajang belajar tapi memang di situ juga solusi ya.. tapi keputusan kan baru ditahap kita, apapun hasilnya kita tetap bawaan ke Pak Sekda, atau Pak Bupati kalo itu menyangkut kebijakan yang penting rembuk matengnya di sini di BPKAD

Emerha

Kalo untuk penyusunan HSB kayak gitu ada di lap.. pernah menggunakan tenaga ahli dari akademisi?

Mey Lestari

Kalo.. HSB ini anu pak.., itu tuh tugas baru bagi kami

Emerha

HSB pernah dilakukan sebelumnya?

Yakup

Sebelumnya sudah tapi hanya sebatas kegiatan rekomendasi, kalo dulu istilahnya BHU nya itu baru berapa kegiatan ya mbak, yang itu.. dan itu..

Mey Lestari

Kita baru 14 sama Kecamatan kan..

Yakup

Dan itu.. pendampingannya kita pake biro.. biro organisasi, biro organisasi Provinsi kemaren

Emerha

Biro Organisasi Provinsi?

Yakup

Iya..

Emerha

Itu apa, itu instansi pemerintah

Yakup

Iya.. iya..

Mey Lestari

Kita konsultasi berarti, tadi belum.. waktu itu 2017

Yakup

2000 sebelumnya

Mey Lestari

2016, maaf.. 2015-2016 penyusunan HSB tapi itu pun baru 14 kegiatan kalo nggak salah baru kegiatan di Kecamatan dan kegiatan di BAU yang umum OPD semua pake, itu tidak menggunakan tenaga ahli, tidak menggunakan jasa tenaga ahli, tetapi intens siapa yang mendapatkan e.. amanat untuk menyusun ASB

Emerha

Mereka punya?

Mey Lestari

Sudah ada ASBnya, dan ASB kita mengacu seperti apa yang dibuat oleh provinsi mengadopsi metodenya kan lain-lain, metodenya yang kita pake sesuai dengan Provinsi udah, belum sempat kita selesaikan semua, ini tahun 2018 ini tengah-tengah jalan ini kami mendapatkan e.. amanat untuk menyusun ASB

Emerha

ASB ya?

Mey Lestari

He'em.. baru mau akan ini

Emerha

Ya.. di biro tadi memang mereka punya tenaga ahli, atau hanya punya contoh?

Yakup

Kalo tenaga ahli mungkin mereka karena penyusunan ASB di Provinsi itu ada di.. Tupoksinya ada di.. biro organisasi..

Emerha

Oh gitu

Mey Lestari

Bukan di BKAD, bukan di BKA, kalo sana BKA ya..

Emerha

BKA

Yakup

Tapi di Biro Organisasinya

Mey Lestari

He'e kalo tidak salah mereka juga meng.. gandeng tenaga ahli dari UGM

Emerha

Dari UGM ya?

Mey Lestari

Ya..

Emerha

Karena itu yang.. pertama kali yang menciptakan itu kan dari UGM

Mey Lestari

Iya Pak Ritonga..

Emerha

Ya..

Mey Lestari

Pak Ucok

Emerha

Pak Ucok, pak siapa lagi ya namanya

Mey Lestari

He'e.., karena kita kalo tentang ASB kami ini baru, orang-orang baru yang menangani semua kebetulan, walaupun pak Yakup dari keuangan dulu tidak di bidang yang menangani ASB sehingga ini bidang baru bagi kami, kami mulainya dari awal mencari referensi ke Kabupaten, atau pun ke Biro, ataupun ke BPKP misalkan, tentang ASB masih dalam tahap itu, sekarang belum kita

Emerha

Karena rencana baru mau di bikin, berarti rencana mau pake tenaga ahli?

Mey Lestari

Iya.. mau minta bantuan tenaga ahli

Emerha

Dari UGM juga?

Mey Lestari

He'em.. he'em.. Cuma belum ada kesepakatan

Emerha

Tadi di sini udah ada 14 kegiatan mulai dari ASB ini?

Mey Lestari

Iya yang dulu 2016..

Yakup

2015-2016

Emerha

He'e.. itu masih di pake sampai sekarang?

Yakup

Masih.. tapi tidak tidak ini ya..

Emerha

Sudah tidak update lagi

Yakup

e.. karena ini e.. hanya penyusunan yang sekarang ini, yang mau kita susun ini, hasilnya berbeda, kalo yang kemaren ini kan bebas

Emerha

Hem.. itu yang kemaren udah pernah diterapkan di penyusunan Anggaran ASB?

Mey Lestari

Penyusunan anggaran.., kayaknya belum

Emerha

Berarti kemaren belum-belum menggunakan ASB?

Yakup

Belum sepenuhnya

Mey Lestari

Iya..

Emerha

Cuma setengah harga doang ya?

Yakup

Jadi memang dalam penyusuna e.. apa penyusunan RKA itu memang...memang di sampaikan kepada pengampu-pengampu ASB itu

Mey Lestari

Kalo Gorontalo sudah ada ASB nya?

Emerha

Ada ASB nya

Mey Lestari

Udah lengkap semuanya?

Emerha

Dulu masih, yang lengkap itu masih jamannya pak Fadel atau Gubernurnya terus kepala

Mey Lestari

Kalo ada dokumennya kita malah mau minta ini

Emerha

Di BKAD nya masih.. siapa itu yang nulis buku itu Nurlan Daris ya.., nah itu dia Kabid, Kabid akuntasinya itu, peneliti yang berjasa banget

Mey Lestari

Dan ASB nya di sana eksis di pake terus?

Emerha

Nanti kalo anu, kan di tuangkan dalam buku itu Nurlan Daris itu

Mey Lestari

Nurlan Daris, bukunya di jual umum?

Emerha

Umum..

Mey Lestari

Nurlan Daris...

Emerha

Iya.. semua itu sudah di tuang dalam buku

Mey Lestari

Sekarang di mana?

Emerha

Hem..

Mey Lestari

Sekarang di mana, masih jadi Kabid atau udah jadi Kepala?

Emerha

Kemaren udah jadi... Inspektur di daerah waktu Fadel Muhammad jadi Menteri ditarik ke sana..

Mey Lestari

Ke.. Kementerian..

Emerha

Kementerian..

Mey Lestari

Oh...

Emerha

Saya nggak tahu kalo sekarang

Mey Lestari

Staf ahlinya menteri paling ya.., oh.. Nur.. Nur itu

Emerha

Nurlan Daris iya..

Mey Lestari

Jadi nggak punya ini softcopynya.. kalo

Emerha

Dia..

Mey Lestari

Kalo ada soft copynya kita mau.. mau belajar, Perbupnya..

Emerha

Bukunya kemaren kan. Di undang-undang ke mana-mana itu kan Kabupaten

Mey Lestari

Perda pa di sana, ASBnya perda?

Emerha

Apa, Perda..

Mey Lestari

Perda ya..

Emerha

Perda..

Mey Lestari

Bukan Perbup...

Emerha

Jadi di sana itu e.. Kasubid keuangan itu bukan Kasubid itu Kabid, jadi dia lebih tinggi, kalo sini kan Kasubid perencanaan, Kasubid keuangan dan aset, nah Kasubid Keuangan sana itu anunya itu Kabid.. Kabag.. Kabag jadinya itu ekselon 3

Mey Lestari

Di bawahnya apapak di bawah ekselon 3?

Emerha

Di bawahnya nggak ada, jadi di tingkatkan anunya.. label nya untuk menangani.., kan untuk orang kan terlalu

Yakup

Jadi ekselon 3 nggak ada ekselon 4nya, di bawahnya ekselon 3 itu nggak ada ekselon 4 nya?

Emerha

Ada maksudnya dulu kalo kayak di sini kan ada Kasubid apa ya.., ada Kasubid keuangan ya, nggak ada ya?

Mey Lestari

Nggak ada, adanya bagian keuangan..

Emerha

Oh ya.. kalo sana di setiap Diskap itu ada kabag keuangan

Mey Lestari

Oh...

Emerha

Bukan Kasubid keuangan, nggak ada kan Kabag kan kalo untuk aset, nah.. mereka ini yang di kasih kewenangan khusus untuk itu jadi melakukan PPKnya di situ, di Kabid di ekselon 3 dia naik.., jadi salah satu strategi mereka untuk

Yakup

Jadi PPK nya itu ekselon 3, berarti yang merencanakan PPK nya itu

Mey Lestari

Siapa tadi itu namanya Nur Wulandari?

Emerha

Nurlan daris ya..

Mey Lestari

Nurlan Daris

Emerha

Ada bukunya, mulai dari awal dari 2007 diterbit

Mey Lestari

Nanti tak tak lihat ya.. Nurlan Daris, dan sampai sekarang masih eksis ya.. itu digunakan untuk perencanaan oleh Bappedanya ya..

Emerha

Memang dia sudah dengan Bappeda

Mey Lestari

Judul buku nya apa?

Emerha

ya?

Mey Lestari

Judul bukunya apa?

Emerha

Pengelola.., Pengelolaan Keuangan Daerah

Mey Lestari

Oh ya.. segini malah praktisi

Emerha

Sekarang undangan yang terbaru malah sudah akroiliesis, dulu masih.. masih pake yang lama?

Yakup

Kalo khusus.. terkait ASBnya beliau nggak anu..

Emerha

Terkait ASB nya belum ada, Cuma dia nggak tuangkan di buku Cuma di kasih sedikit aja, tapi kalo anu bisa di.. di.. anu.. lihat di Perdanya gimana

Mey Lestari

Bapaknya nggak punya perdanya pak, copyan Perdanya nggak ada?

Emerha

Nggak ada soalnya saya nggak terlibat di sana..

Mey Lestari

Boleh nggak minta ke temennya bapak, hehehe

Emerha

Sekarang kan masih beda-beda, pergantian pimpinan kan beda lagi kebijakannya, dulu kalo pak Mustofan dia masih perhatian banget dibagian ini

Yakup

He'em.. waktu jamannya pak Fadel itu kan jaman jayanya..

Emerha

Ibu udah berapa kali di rotasi jabatan?

Mey Lestari

Belum.. ini kan baru promosi pertama, baru nya ini..

Emerha

Menurut ibu bagaimana rotasi jabatan itu bisa meningkatkan pengetahuannya dengan cara apa?

Mey Lestari

Dengan cara apa, eh.. dengan di mutasi ke bidang yang berbeda itu juga udah meningkatkan pengetahuan tapi Cuma dari sekedar pengetahuannya ya.. kalo kinerja nya kan tetep mengikuti dulu ya pengalaman tetep apa ya.. guru yang paling berharga e.. ya itu.. dengan mutasi itu memang meningkatkan pengalaman tapi belum tentu sebanding dengan kinerjanya, he'em.. nggak..nggak.. terus ekspres lah.. karena hal baru

Emerha

Ibu juga sering ikut diskusi dengan staf?

Mey Lestari

He'em.. iya... belajarnya kan sama temen-temen yang udah lama di sini ya.. kebetulan mutasinya itu dari bidang yang cukup berbeda nggak pernah nanganin sebelumnya tentang akuntansi apalagi pengelolaan keuangan tiba-tiba masuk ke sini seperti itu yang jelas pengetahuannya beda, jelas tambah dengan mutasi ini, belajarnya sama Pak yakup, heheeh.

Emerha

Kalo bapak pernah ikut diklat juga pak?

Yakup

Saya.. diklat bendahara pernah, diklat akuntansi pernah, tapi ditingkatan pemda

Emerha

Jadi internal di sini ya, untuk yang keluar belum pernah, kalo dari.. kalop dari pimpinan supaya apa namanya staf dengan Kasubidnya itu bisa aktif berdiskusi ada yang sering berperan pimpinan untuk menganjurkan?

Mey Lestari

Penyampaian kepada, diskusi Cuma ini ya.. sering ya.. setiap ada masalah kan ya.. kita terus berembuk bareng-bareng gitu, Kabid ngumpulin kita semua

Emerha

Seperti Bu Kabid bilang ayo nanti kamu tanya sama ini yang lebih tahu..

Mey Lestari

Ya.. kami.. ya udah.. ada masalah apa ayo kita duduk dulu kita obrolin dulu gitu kan ya pak, ada setiap permasalahan apa yang membidangi di bidang itu yang terlibat semuanya dikumpulkan, dan kita saling diskusi, itu.. udah udah jalanlah..

Emerha

Itu sering ya..?

Mey Lestari

Ya.. udah kesehariannya lah.. kita diskusi

Emerha

Setiap ada masalah bersama?

Mey Lestari

Dijemput.. jemput putrane pak, he'e ndak pa-pa

Emerha

Itu ketika menyerap ansipasi saat menyusun Perbup, misalkan tadi ya 1 itu di.. di.. dokumentasikan?

Mey Lestari

Iya.. ada..

Emerha

Aspirasinya bidang-bidang ini, misalkan saya mau ada pasar gini itu ada, dokumentasikan?

Mey Lestari

Ada.. iya.. ada.. masukkannya, ya.. kita demokratis ya masukkannya apa, pendapatnya apa, latar belakangnya apa, alasannya apa nanti kan kita bahas bersama

Emerha

Itu dalam bentuk apa, file?

Mey Lestari

Dokumentasi kan paling notulensi.. notulen perjalanan rapat itu kan notulensinya tetep kita buat dan usulan draft-draftnya itu kan ada coret-corettannya gitu, ada masukkannya tambahan itu tetep ada nanti e.. untuk mengolah kembali baru yang coretan tadi ilang

Emerha

Itu ada di arsip

Mey Lestari

Itu aja, he'e

Emerha

Diarsipkan ada ya..

Mey Lestari

He'e, iya..

Emerha

Dulu waktu bapak ikut diklat e.. apakah diwajibkan untuk membuat, atau dianjurkan membuat laporan hasil diklat?

Yakup

Kalo laporan ya.. kita buat laporan hanya untuk laporan ke atasan terkait hasil diklat itu kita laporkan, kita kan juga ada surat tugasnya yang harus...

Emerha

Jsurat tugas, jadi laporannya itu Cuma laporan di bagian dinas itu ya. berartio ke mana e.. ke.. Provinsi?

Yakup

Pelaksanaannya?

Emerha

Iya?

Yakup

Pelaksanaannya di.. tapi yang melaksanakan Pemda, Pemda Kulonprogo

Emerha

Kulonprogo

Yakup

Tapi pelaksanaannya di provinsi di.. Kotagede

Mey Lestari

Pasar gede?

Yakup

Di Kotagede

Mey Lestari

Di Kotagede

Emerha

Dulu waktu ibu bikin Perda atau perbup pertama ada yang pernahkah yang ibu menginisiasi sendiri, misalkan tindakan pertama butuh Perbup yang ini.. ini.. ini.. ?

Mey Lestari

Hem.. saya belum

Emerha

Belum ya..?

Mey Lestari

He'e, di tambahkan amanat-amanat ini ya pak ya.., amanat aturan perundang-undang itu ya..

Emerha

Usulan ya..

Mey Lestari

Iya, jadi nggak begitu

Emerha

Terus terkait dengan usulan-usulan tadi ibu punya data basenya?

Mey Lestari

Usulan?

Emerha

Iya, kayak tadi yang dikasih lihat bapak, misalkan sebelum jadi Perbub ini usulan ini, ini aspirasinya ini ini ini, dalam bentuk data base?

Mey Lestari

Kebetulan usulannya ya..

Yakup

Draft..

Mey Lestari

Kebetulan usulannya bentuknya draft

Emerha

Draft?

Mey Lestari

He'e, kebetulan karena belum banyak juga ya, jadi baru kita bahas non tunai ini, jadi ya mau buat data base juga belum banyak data yang harus saya rekap, ya usulannya draft

Emerha

Draft?

Mey Lestari

Iya..

Emerha

Itu pake sistim atau?

Mey Lestari

Nggak masih manual

Yakup

manual

Emerha

Manual ya?

Mey Lestari

Nggak belum ada kayak.. kalo bagian hukum sih sudah tersusun ya.. sistimnya ada.. apa.. prom..Pemperda itu lho, misalnya usulan ini masih masih di bahas dewa, kita kan masih manual ini, masih mengusulkan ini ya udah kita bahas, yang belum prioritas nanti selanjutnya yang urgent ini

Emerha

Dalam pengesahan itu ibu pernah mengambil pengalaman dari daerah lain?

Mey Lestari

Iya biasanya itu

Emerha

Apa, daerah mana biasanya yang dijadikan contoh?

Yakup

Kabupaten Sleman....

Mey Lestari

di.. DIY dulu ya kita, di DIY dulu, tapi ya kita ke Gunung Kidul, kita ke Sleman, kita juga menghubungi Bantul pokoknya daerah yang dekat dulu dan kita di satu Provinsi

Emerha

Ibu yang datengin mereka ke sana?

Mey Lestari

He'e, iya kita mau li..

Emerha

Diskusi di sana?

Mey Lestari

He'e kita mau, sama.. bareng-bareng kok nggak cuman saya, bareng-bareng

Emerha

Hem.., berarti setiap kali mau terbitkan peraturan kayak gitu harus, harus konsultasi dulu ke tempat lain cari.. cari tahu dulu seperti apa?

Mey Lestari

He'e pada saat sebelum penyusunan, ya kalo daerah lain sudah punya ya kita berkaca dulu sama yang udah punya bagaimana di sana aplikasinya e.. cocok nggak sama kita, sama nggak. Hal yang baik ya.. kita rujuk ya pak ya..

Emerha

Tadi apa ibu bilang mau bikin peraturan apa, CMS ya?

Mey Lestari

e.. bukan CMS ya.. transaksi non tunai

Emerha

Itu gimana?

Mey Lestari

Ya.. ini tentang mekanisme pembayaran non tunai untuk semua belanja di kita, OPD nya kita

Emerha

Non tunai itu pakai apa?

Mey Lestari

Kami sih sementara ini masih..

Yakup

Terbataskan..

Mey Lestari

He'em masih sangat terbatas, mekanismenya aja masih cuman dari sekedar bendahara sini ya pak ya, tidak..

Yakup

Transfer, cara pembayarannya transfer

Mey Lestari

Transfer.. cuman baru tata cara pembayarannya mentransfer, kita rapat me.. membeli ke pihak ketiga itu tidak membayar tunai tapi diganti dengan transfer, non tunai nya baru sebatas itu, CMS nya belum ada itu pak, atau baru terbatas digunakan ya..

Yakup

Ya..

Mey Lestari

Kalo untuk CMS kami belum bisa memperbanyak karena yang menggunakan di bendahara

Yakup

Perbendaharaan

Mey Lestari

Di Perbendaharaan sama di.. Keuangan, di Kasubag Keuangan, mbak Resti kan udah pake CMS

Emerha

CMS itu beda ya sama non tunai?

Mey Lestari

e.. salah satu tata cara pembayaran yang nanti akan diatur di Perbup non tunai

Emerha

CMS itu bukan punya BPD?

Mey Lestari

Itu alatnya, toolsnya untuk kita melakukan transaksi non tunai salah satu

Emerha

Oh di kasih dulu di sini ya..

Mey Lestari

He'em, e.. mereka harus ready dengan programnya kita menggunakan aplikasi nya, itu adalah programnya dari Perbankan nggak Cuma BPD ya di sini kan Perbankan, tapi ya..

Emerha

Oh semua Bank ya?

Mey Lestari

Iya.., tapi ya BPD kan Bank nya Daerah ya, seperti itu biasanya kan

Emerha

Jadi berarti misalkan pencairan SP2B jadi bendahara itu kan tidak perlu ke BPD lagi kan, mereka cukup ditransfer lewat CMS itu?

Yakup

Ya.. pencairannya ya.. ikut transfer itu tapi yang pertama nggak gitu..

Mey Lestari

Itu daerahnya Perbendaharaan pak

Emerha

Tapi yang rancang Perbupnya di sini?

Mey Lestari

He'e, nah.. hal-hal yang teknis seperti itu lah masukannya yang dari yang pengguna gitu

Emerha

Itu Perda apa Perbup?

Mey Lestari

Perbup

Emerha

Perbup, sekarang udah jadi?

Mey Lestari

Kita baru pembahasan 3 kali, belum jadi, masih proses pembahasan di Bab belanja, pembahasan kita sedikit demi sedikit, ini bahas ini dulu, ini dulu, ini dulu selesai finalisasi setuju nggak dengan..

Yakup

Kemaren itu pelaksanaannya memang baru dalam bentuk instruksi Bupati, itu menindak lanjuti dari SKE Mendagri terkait transaksi non tunai ini, untuk tahun ini, ini akan di apa namanya e.. regulasinya akan dituangkan dalam Perbup

Mey Lestari

Perbup, sudah ada induk sebetulnya, induk nomer 1 tahun 2017 ya pak, tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Masih secara umum

Emerha

Itu yang Perbup yang sudah di bikin dari sini itu dipublikasikan di.. Website yang?

Mey Lestari

Nanti itu ranahnya di hukum, bagian hukum punya JDIH, Jaringan Dokumentasi itu nanti mereka yang mengupload

Emerha

Kalo di Website BKD, nggak ada aturannya, Cuma di JDIH ya?

Mey Lestari

e.. nggak ada, e.. itukan itu kalo udah jadi produknya Perbup atau pun Perda itu udah jadi output nya bagian hukum

Emerha

Kabupaten..

Mey Lestari

E.. bagian Kabupaten terutama OPD nya bagian hukum, kalo dari kami keluaran kami adalah draft atau wel.. Rat Perbup gitu kalo udah ranahnya mempublikasikan produk hukum udah di bagian hukum jadi tidak double publikasi ya pak

Emerha

Kalo pernah juga menggunakan hasil-hasil penelitian dari misalkan ada mahasiswa meneliti di sini terus dia sarankan ini, itu pernah digunakan juga?

Mey Lestari

Kalo selama 4 bulan ini belum

Emerha

Sebagai output, input

Mey Lestari

Pernah nggak pak, hasil riset digunakan, di aplikasikan belum pak, ini maaf datanya, hem.., udah mau selesai belum pak, masih pertanyaannya, mau menjemput anaknya

Emerha

Oh ya.. nggak pa pa, boleh, udah nggak, nggak terlalu ini

Mey Lestari

Udah nggak substansi banget to, udah pak duluan aja, heheheh

Emerha

Tentang pendapat menurut ibu, ini pendapatnya ibu aja ya.., menurut ibu e.. ketersediaan data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah itu bisa menambah pengetahuan yang lai?

Mey Lestari

He'e

Emerha

Bagaimana?

Mey Lestari

Dari data dan informasi iya

Emerha

Yang ibu sampaikan, misalkan oh ini yang udah jadi Perbup ini, sudah dipublikasikan gitu ya, kalo pendapat ibu apakah itu bisa, bisa menambah pengetahuan misalnya seperti bendahara?

Mey Lestari

Kan selain dipublikasikan ke bagian, kalo dibagian hukum secara apa.. media elektronik ya, kita juga masih secara manual hard copynya kita berikan

Emerha

Oh.. diberikan, itu dibagi ya semua?

Mey Lestari

Iya kepada semua OPD, ini kayak ada perubahan Perbup SHPJ kita ngopy untuk semuanya ke OPD gitu, jadi dua.. dua kali

Emerha

Itu bisa diakses semua orang ya?

Mey Lestari

He'em, udah kita sampaikan secara resmi, juga secara elektronik diumumkan

Emerha

Berarti se.. selain di publikasikan di media juga diakses?

Mey Lestari

Iya.. kami juga.. iya... kami juga mengantarkan dokumennya ke OPD-OPD gitu

Emerha

Itu memang sudah sering dilakukan ya?

Mey Lestari

Iya seperti itu memang

Emerha

Setiap kali ada?

Mey Lestari

Karena kalo Cuma sekedar di upload kan belum tentu yang mau pake, oh.. udah ada aturan baru kok nggak tahu gitu, jadi produk yang udah jadi..

Emerha

Jadi orang, bendahara yang nggak tahu bisa minta di sini?

Mey Lestari

Iya.., kalo nggak ada di sini ya.. salinannya kita di kasihkan, karena kita yang mengusulkan Perda atau Perbup itu nanti sama bagian hukum kita diberikan salinan gitu, jadi mau ngopy ke kita bisa, ngopy langsung ke bagian hukum juga bisa, download juga bisa

Emerha

Bisa ya?

Mey Lestari

Iya..

Emerha

Ada juga pernah dibikin, misalkan ibu sudah menjadikan satu Perbup terus selain bisa di.. di upload e.. di download di JDH, selain mereka bisa datang ambil fil, itu ada juga dibikin sosialisasi, misalnya Perbup ini?

Mey Lestari

Nggak.. kalo sosialisasi, bagian hukum yang mensosialisasikan, paling nanti kita selaku yang membidangi diajak gitu biasanya seperti itu

Emerha

Pembicara?

Mey Lestari

He'e, cuman pas saya masih di sini, selama saya di sini belum.. belum pernah, karena Perbup yang kita buat kemaren sifatnya perubahan ya jadi bukan perbup baru, jadi belum pernah kalo saya, he'e. biasanya gitu, Perbup tentang pangan ya.. yang dulu menginisiasi membuat nanti dia diundang menjadi narasumbernya ketika bagian hukum sosialisasi produk hukum ke desa-desa ataupun ke kecamatan kayak gitu

Emerha

Pernah ada.. e.. anjuran dari pemda atau pimpinan ibu untuk melanjutkan S2, untuk menambah pengetahuan?

Mey Lestari

Oh iya.. ya.. Bu Kabid mendukung

Emerha

Itu ada.. mendukung, itu ada anggarannya untuk BKAD?

Mey Lestari

Anggar.. anggarannya kalo BKAD biasanya kalo kami ini kayak yang pada sekolah itu yang dari Bappenas itu, tapi kalo untuk dana APBD maksudnya yang mensekolahkan itu BKPP pak yang bisa menjawab. Ada.. ada.. kalo ndak salah teman saya kemaren ikut program beasiswa tapi dari APBD, ada.. tapi pastinya berapa itu BKPP

Emerha

Itu setiap tahun ada yang di utus dari sini?

Mey Lestari

Kalo BKAD saya kurang tahu, he'em.., BKPP aja pak ranahnya kalo penambahan wawasan, tapi memang ada, kebanyakan dari Bappenas ikutnya kayaknya. Bapak dari daerah apa Bappenas yang membiayai study Daerah atau Bappena?

Emerha

Dari Daerah

Mey Lestari

Daerah ya.. e.. apa..

Emerha

APBD

Mey Lestari

Ya.. AP.. AP.. APBD ya..

Emerha

Kemaren saya wawancara dengan ibu Iswandari

Mey Lestari

Iya Bu Ari

Emerha

Ibu Ari, kemaren kan saya minta Perbup tentang prosedur akuntansi itu udah ada memang?

Mey Lestari

Prosedur..

Emerha

Akuntansi..

Mey Lestari

e.. kita ada.. e.. yang adanya Kebijakan sama sistemnya ya..

Emerha

Ya.. yang ada di JDH itu Kebijakan sama sistemnya

Mey Lestari

He'e..

Emerha

Yang Prosedur khusus akuntansi nggak ada?

Mey Lestari

Kalo bentuk judulnya prosedur nggak ada, adanya sistem akuntansi, sama kebijakan akuntansi

Emerha

Kebijakan oh.. ya..

Mey Lestari

Bukankah prosedurnya itu masuk di dalamnya.., di dalam kebijakannya, ndak?

Emerha

Kalo kebijakan itu kan Cuma kalo aset harus dicatatannya gini

Mey Lestari

Kalo untuk bidang itu saya masih..

Emerha

Kalo yang seperti ini adakan prosedur pembayaran gitu, kayak gitu-gitu

Mey Lestari

Oh ya.. SOP nya ya..

Emerha

Ya.. SOP, kalo akuntansi kan, kemaren kan saya tanya katanya ada, makanya di bilang Ibu Ari tanya sama ibu Mey

Mey Lestari

He'em.. he'em.., Bu ari bilang nggak ada?

Emerha

Dia bilang ada

Mey Lestari

Ada ya prosedurnya..

Emerha

Iya saya kasih lihat, saya di JDH saya download yang sekian..

Mey Lestari

He'em.. ada..

Emerha

Iya tapi tidak.. tidak menyebutkan prosedurnya

Mey Lestari

Oh gitu di dalamnya itu

Emerha

Cuma menyebutkan kalo kebijakan Cuma menyebutkan, di catat sebesar ini.. harus.. di

Mey Lestari

He'em.. he'em.. cuman tata caranya gimana lho, habis ini, ini, ini gitu

Emerha

Prosedurnya kayak di situ kalo SPD, bendahara harus datang dulu terus ke sini, terus ke sini

Mey Lestari

Ke mana.. oh ya...

Emerha

Oh ya.. yang terakhir bu

- b. Wawancara ke-2 dengan Meylani Lestari pada 17 Juli 2018, pukul 12.15 di ruang kerjanya, Ruang Bidang Anggaran. Melani adalah kepala Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan BKAD yang baru menjabat 5 bulan. Topik utama wawancara tentang kendala, penyebab kendala, dan solusi yang sudah dilakukan (RM4).

Emerha

Apa permasalahan yang ibu hadapi selama ibu menjabat sebagai Subbid di?

Meylani Lestari

He'e, ini permasalahan dalam konteks pribadi, e.. sudut pandang pribadi?

Emerha

Permasalahan e.. pekerjaannya ibu

Meylani Lestari

Oh pekerjaan ya

Emerha

Yang jadi kendala selama ini?

Meylani Lestari

e.. kalo dari pribadi saya sendiri ini e.. ilmu baru dengan bidang yang berbeda jadi saya harus banyak menggali informasi terus kalo dari permasalahan, kalo dari staf saya sih dua udah terpenuhi ya.., SDM sih udah terpenuhi, ehm... mungkin yang menjadi permasalahan itu gini, pekerjaan kami tidak berdiri sendiri, pekerjaan kami itu banyak melibatkan bidang-bidang lain itu ya pak. E... kalo kami sering membuat Perbup ini kendala kami adalah satu, ketika mengumpulkan temen-temen kami, itu mungkin mencari waktu yang match karena kesibukan masing-masing di bidang itu yang berbeda. Mungkin itu ya.. koordinasi, ketika kita mau mengumpulkan orangnya untuk berkoordinasi gitu. Tetapi kalo pun tidak melalui rapat kami di luar rapat pun sebetulnya bisa, tidak menjadi kendala yang utama juga sih. Cuman oh.. kendalanya ini aja, aturan-aturan yang perkembangannya sangat dinamis, jadi kita

Emerha

Cepat sekali berubah?

Meylani Lestari

Jadi kan nututinya harus cepet gitu

Emerha

Ya..., apa.. apa yang menjadi penyebab terjadinya kendala itu tadi?

Meylani Lestari

Iya.. karena kan aturan dari.. dari Pusatnya kan berubah-ubah kalo kita di sini sistemnya kan mengikuti seperti air mengalir, sana aturannya berubah kita otomatis harus ngikutin

Emerha

Terus solusi yang sudah ibu laksanakan sekarang apa untuk mengatasi masalah itu?

Meylani Lestari

Ya.. ya kita ya.. berusaha untuk mengikuti sesuai dengan koridor dan ketentuan aja yang berlaku pak, gitu aja, he'em..

Emerha

Sekarang yang.. yang sudah apa..., prestasi yang sudah ibu hasilkan untuk kontribusinya di.. OPD seperti apa sekarang, prestasi yang sudah ibu?

Meylani Lestari

Prestasi.. saya belum ada prestasi apa-apa tuh, ya.. kita cuman ini aja sih menjalankan e.. apa target kinerja kita sesuai di DPA kita, kita menghasilkan apa ya.. itu kita laksanakan gitu pak, sukur-sukur bisa melebihi target gitu, he'em..

Emerha

Gitu aja deh bu, hasil wawancara saya nanti selama saya akan di sini tanya lagi, kalo misalkan masih kurang wawancara lagi

Meylani Lestari

Oh iya nggak pa-pa

Emerha

He'e.. udah 30 menit bu

Meylani Lestari

Oh ya..

- c. Wawancara ke-3 dengan Meylani Lestari, pada Senin, 17 September 2018, pukul 12.21 WIB di ruang bidang anggaran. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Saya Cuma konfirmasi ini... ini kayak gini nanti tapi... punya... ibu... tadi... ini karena tebal jadi saya tidak catat semua, ya... ini saya mau konfirmasi ke ibu apa... nanti nama ibu tertulis lengkap di sini. Ini wawancara saya ib... dengan ibu kemaren ini ya...

Meylani

Ini yang... pak Hamdan ini..

Emerha

Ya itu pak Hamdan contohnya saja, tapi nggak saya cetak semua, ini hasil-hasil wawancara saya mungkin akan saya kutip, karena sesuai kaidah ilmiah itu kan apa yang kita kutip harus ada sumbernya, jadi harus dilampirkan . kalo... tidak... mengandung rahasia biasanya kan Cuma inisial saja eh... kalo ini rahasia kan biasanya Cuma inisial aja...

Meylani

He'em... he'em... ini kan Cuma step ya... terus kalo yang buket saya yang mana

Emerha

Yang... yang ini...

Meylani

Itu harusnya sudah...

Emerha

Ya... tapi nggak semua yang... yang urgen saja yang saya ambil nanti, hasil wawancaranya nggak semuanya. Karena saya kan kualitatif jadi harus ada.... wawancara itu dari mana sumber karena itu nanti dipertanyakan..

Meylani

Yang mau... misalkan nih yang mau dimasukkan yang mana aja...

Emerha

Ini...

Meylani

e... kalo kayak kata-kata seperti ini masih boleh di edit to...

Emerha

Iya... man...

Meylani

He'e... maksudnya misalkan kayak-kayak gitu kan

Emerha

Kalo ini nggak bisa di edit

Meylani

Oh... nggak bisa..

Emerha

Ya.. cuman yang e.. di anu itu dijelaskan di narasinya kayak gini...

Meylani

Hem... harus sama persis gitu dengan yang di... situ

Emerha

Iya... sama persis sama yang diwawancara

Meylani

Hem... gitu bahasa saya kan dulu nggak formil gitu lho, hehehehehe

Emerha

Hehehe, kayak ini... ini satu masuk nih... kita lebih banyak itu yang terlibat di internal BKAD

Meylani

He'em... mungkin yang ini mas yang bahasanya yang formil saja, kalo mau di catat ke sini

Emerha

Iya yang formal..

Meylani

He'e... maksudnya kan e... apa ya.. kita diskusikannya kan waktu itu kan gaya bahanya santai gitu lho...

Emerha

Oh... kalo... kalo soal tata bahasa kalimat memang...

Meylani

Tata bahasa kalimat... diperbaiki

Emerha

Ya... diperbaiki Cuma apa substansinya nggak berubah...

Meylani

Yang substansinya aja he'e..., misalkan oh ya... maksudnya gini mas dalam pembuatan peraturan e... kita lebih banyak melibatkan internal dari BKD, seperti itu ya... mungkin bisa seperti itu, he'em... (narasumber berdeham). Semua bidang kita... undang hem... hem... kemudian ada beberapa OPD dari luar yang kita undang mungkin seperti itu, seperti Bappeda seperti itu.. mungkin ya.. ya... isinya seperti itu

Emerha

Berarti maksudnya tadi... tetap tetap dimencantumkan ini tapi diperjelas

Meylani

Tapi diediting... eh... eh... maksudnya jangan plek sama kayak gini mas, maksudnya kan bahasanya kan tidak formal kan.. karena kita bahasa ngobrol ya... tapi substansi dari sini dimasukkan ke sini...

Emerha

Oh... oh... kalo begitu saya bikin kutipan tidak langsung aja

Meylani

Ya... gitu aja... kalo dulu maksudnya mau serius kan kita juga bahasanya serius gitu ya..

Emerha

Oh.. gitu ya...

Meylani

Tapi dari sini kan bisa substansinya dibuat sama tapi tidak terus... kayak gitu...

Emerha

Oh ya... boleh... berarti ibu lebih suka yang kutipan tidak langsung ya...

Meylani

He'e... maksudnya kan karena itu akan dicantumkan ke sini ya bahasanya formil saja, jadi substansinya dapet, tapi tidak bahasa kita lagi diskusi tidak formal gitu... ya... kalo ini sudah benar

Emerha

Hem... ya..

Meylani

di... di... apa...re... arrange lagi di ulang lagi sama jenengan di olah sehingga lebih... lebih formal kayak ini kan formal gitu, terus... gede banget... ada apa... gitu, hehehehe

Emerha

Ya... ya... berarti... maksudnya formal tadi itu... maksudnya kalimat gitu...

Meylani

Ya... kalimatnya...

Emerha

Misalkan seperti ini e... he... ini he ini ilang ya...

Meylani

He'em. Nggak usah... itu gitu..

Emerha

Oh..., hehehehe

Meylani

Gitu sesuai dengan pertanyaan... kan tidak harus plek seperti itu to... yang penting tidak... tidak mengubah isi yang dikeluarkan dari situ

Emerha

Oh ya... okey... berarti sesuai kaidah bahasanya ya..

Meylani

He'e... isinya saja tapi dirubah... saja nggak... di rubah seperti itu

Emerha

Okey... okey... ya... okey... itu yang pertama, terus yang kedua ini nggak jadi ya..

Meylani

Nggak apa-apa.. nggak apa-apa...

Emerha

Banyak ini berapa halaman... satu... karena kemaren kan berdua ya...

Meylani

He'em... ada pak Yakup juga...

Emerha

Ya... yang ini soal ASB ya... ibu kan banyak menyinggung ASB di situ, itu saya sarankan untuk penyusunan ASB ya... itu gimana menurut ibu

Meylani

Ya... nggak apa-apa itu memang kewajiban itu pertama... kenapa ASB memang urgen yang pertama sudah menjadi rencana aksi dari tindak penanggulangan pemberantasan oleh KPK, jadi memang ASB itu sudah... menjadi target untuk di susun yang pertama itu. Kemudian yang kedua, BPKP kan mengeluarkan sistem perencanaan, Simcan perencanaan...

Emerha

Simcan iya..

Meylani

Nah.. Simcan itu e... yang paling pertama kali untuk bisa mengoperasikan memang adalah ASB dan SSH, SSH kan sudah ada ya.. SHBJ tinggal ASB nya yang kita belum punya, dan hingga sampai dengan saat ini memang kita sedang proses mulai untuk menyusun ASB didampingi oleh BPKP

Emerha

Baru permulaan...

Meylani

Baru... baru akan mulai...

Emerha

Oh..baru akan mulai ya...

Meylani

Baru... sudah... mulai... sudah mulai...

Emerha

Itu bulan berapa...

Meylani

Baru kemaren ini

Emerha

Oh... baru kemaren ini

Meylani

Sekarang Agustus ya... Agustus kita mulai...

Emerha

Yang bikin ASB nya siapa ibu sendiri atau...

Meylani

Kita sama tim membuat ASB kami bersama tim mayoritas Bappeda, kemudian BKAD kemudian beberapa OPD-OPD besar, yang mana kegiatan di dalamnya itu banyak dana... dari Pemerintah pusat kayak DPU misalkan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan e... beberapa OPD tidak semua OPD terlibat yang OPD besar

Emerha

Ya... terus tidak ada yang dilibatkan...

Meylani

E... e... kalo rancangan awal tadinya kita mau melibatkan UGM tapi e... penyusunan yang dilakukan oleh akademisi itu beda dengan yang sekarang, karena yang sekarang kan pake sistem mau nyusunnya pun dari awal sudah masuk ke sistem jadi kita pendampingannya dengan BPKP aja

Emerha

Dengan BPKP ya...

Meylani

He'em... tidak ada akademisi

Emerha

Sudah... sudah... sudah pernah liat atau studi banding ke Pemda lain tentang ASB?

Meylani

Sudah... ke Purworejo...

Emerha

Purworejo...

Meylani

Karena Purworejo itu menjadi pilot projectnya BPKP sak Indonesia

Emerha

Untuk... untuk ASB

Meylani

Tapi sampai dengan sekarang belum selesai juga selama di sana, belum selesai ASBnya

Emerha

Oh... berarti BPKP bisa bikin ASB juga ya..

Meylani

Memang sistemnya yang buat mereka, sehingga kita juga dibimbing sama mereka tapi ini kami baru... baru mulai baru dua kali ketemu gitu... jadi masih belum tahu ini nanti ke depannya seperti apa masih proses...

Emerha

Itu sudah ada data... maksudnya contoh ASB yang sudah pernah di lihat?

Meylani

Kebetulan belum... karena ASB nya lain pak, kalo yang dulu akademisi itukan pakainya regresi

Emerha

Iya... regresi namanya...

Meylani

Pake SPSS, kita belum pernah ngitung itu, karena belum pernah buat model seperti itu, nah... yang sekarang model ASB nya itu dengan sistem itu, jadi langsung... e... bikin ASB langsung ngelink dengan sistem, jadi ASB nya dipandu dengan sistem... gitu

Emerha

Hem... untuk mendapatkan angka-angkanya itu dari mana?

Meylani

Nah... makanya itu kita belum... sampai masuk ke situ mas, baru... baru... kemaren dua kali ketemu, baru dijelaskan nanti bagaimana penyusunannya...

Emerha

Kan... itu kan memang harus pake regresi... karena dia memprediksi harga kan... harga ke depan?

Meylani

He'em... he'em... di dalam sistem itu juga ini ditanyakan nanti unsurnya apa saja gitu, jadi banyak... banyak kayaknya sih banyak justifikasi seperti di dalam... itu nanti angka itu kita input juga di dalamnya rumus regresinya muncul otomatis gitu... mas, Cuma mas kita belum pernah belum praktek langsung

Emerha

Tapi ibu pernah lihat model... model ASB itu udah pernah lihat?

Meylani

Kalo Cuma sekilas-sekilas ya lihat ya... tapi nggak belum paham

Emerha

Jadi kalo misalkan kegiatan pra jabatan 150 juta terus di kloppin dua 120 juta, kan kayak gitu kan ASB nya...

Meylani

Jadi salah satunya misalkan mau kegiatan pelantikan Bimtek seperti itu

Emerha

Hem... iya... berarti melibat kan BPKP ya... saya pikir kemaren pake itu Pak Ucok...

Meylani

Nggak jadi... ya... karena ini biar sinkron dengan sistemnya yang nawarin BPKP ya...

Emerha

Oh... itu ada sis... mau di masukin ke sistem gimana?

Meylani

Iya sudah... di... terintegra... sudah diinstal di... ini... di... websitenya Pemkab jadi di... Bappeda, dia ada di bawah ada Simcan udah ada... apa... strukturnya atau apa namanya...

Emerha

Dia masuk di Simcan atau di Rencanaku?

Meylani

Di Simcan... dia.. berbeda dengan Rencanaku..

Emerha

Di Simcan ya...

Meylani

Jadi dia di item sendiri

Emerha

Jadi kalo menggunakan Simcan wajib ada ASB

Meylani

Ya... ASB itu pintu pembukanya...

Emerha

Oh... jadi mau tidak mau harus ya..

Meylani

Yah... makanya jadi keharusan karena besok sistem perencanaannya menggunakan yang sistem BPKP nggak tahu digunakan atau tidak ya tapi wacana sampai dengan yang sekarang kan BPKP kan mengeluarkan sistem perencanaan itu, dan kita memang mendapatkan amanatnya dua dari BPKP itu sendiri, dan juga menjadi rencana aksi KPK jadi memang sudah sangat urgen ASB di susun, tapi sayangnya kan modelnya beda lagi cara nyusunnya beda lagi, nah... jadinya kita harus belajar dari nol lagi... gitu...

Emerha

Okey... cukup... okey terus yang terakhir saya punya ini bu... nanti di lampiran laporan penelitian saya itu ada profil partisipan di... kayak punya ibu kan ada yang kayak gini kan, jadi kan belum lengkap, ini ada tanggal lahir, pangkat, masa kerja yang sudah ibu kasih ke saya kemaren kan, nah... itu...

Meylani

Alamat rumah di Wates aja tulis aja mas

Emerha

Ini...

Meylani

Itu apa... alamat rumah.. apa

Emerha

Tidak ada kosong waktu itu...

Meylani

Waktu itu saya nggak nulis atau memang nggak ada

Emerha

Nggak... nggak tulis

Meylani

Oh... di tulis di Wates aja nggak apa-apa

Emerha

Di Wates aja ya..

Meylani

He'e Cuma dekat sini kok

Emerha

Iya... nah terus di situ saya juga kalo ibu bersedia mungkin saya mau minta foto nya ibu untuk dilampirkan di... profil partisipan...

Meylani

He'em... kapan itu

Emerha

bisa

Meylani

Foto resmi, atau foto apa...

Emerha

Foto biasa aja...

Meylani

Foto begini, hehehehehe

Emerha

Hehehehehe saya foto...

Meylani

Apa...

Emerha

Kalo... kalo tadi kan pak Anu saya foto juga...

Meylani

Siapa...

Emerha

Pak siapa ini... pak Lukman

Meylani

Oh... pak Lukman

Emerha

Ini ibu Wandu...

Meylani

Oh ibu Wandu... numpang duduk di sana ya...

Emerha

Iya boleh... hehehehehe

Meylani

Jadi kayak direktur dong, hehehehehe. Banyak mau di foto aku tak bedakan dulu, heheheheeh

Emerha

Ya... silahkan...

11. **Nasip**

- a. Wawancara ke-1 dengan Bapak Nasip pada 09 Mei 2018, pukul 09.26 wib, di ruang kerjanya, Ruang Kabid Pajak. Nasip adalah Kepala Bidang Pendapatan di OPD BKAD sampai dengan saat ini. Tema utama wawancara adalah budaya kerja di bidang pajak (RM3).

Q.1. Budaya kerja dalam mengelola keuangan di bidang pajak

Emerha

Eee, ini kan penelitian saya Pak tentang menata prestasi daerah melalui akuntabilitas. Jadi, saya ingin mengetahui budaya kerja di masing-masing bidang.

Nasip

Iya

Emerha

Jadi, fokus penelitian saya seperti itu, nah, saya kualitatif jadi saya harus wawancara

Nasip

Iya, iya.

Emerha

Iya, Pak, oke, saya mulai Pak dari pertanyaan pertama Pak. Pak, kalau dalam hal pengeluaran pajak daerah, apakah ada kebiasaan yang sering dilakukan tapi tidak diatur dalam aturan pengelolaan pajak? Ada nggak?

Nasip

Maksudnya kebiasaan apa ini?

Emerha

Iya, misal, misalkan kalau pajak daerah dari eee parkir umpama.

Nasip

Iya.

Emerha

Itu kan sudah diatur di dalam undang-undang tentang retribusi daerah.

Nasip

Nggih.

Emerha

Nah, dalam hal teknis pelaksanaannya itu misalkan terbetur ada yang tidak diatur, apakah itu ada diskresi atau bagaimana?

Nasip

Eee, kalau kaitannya dengan masalah pajak ini sebetulnya semuanya sudah ada aturannya nggih.

Emerha

Iya.

Nasip

Ada di aturannya kemudian eee, tapi ya mohon maaf karena saya kan belum lama di sini nggih baru 1 bulan.

Emerha

1 bulan?

Nasip

Nggih, tapi, hal yang saya alami selama ini semuanya sesuai dengan aturan yang ada, hanya kadang eee juga ada yang sifatnya katakanlah seperti eee permohonan keringanan, permohonan keringanan yang berkaitan dengan masalah nah ini, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Ini kan sebetulnya kan di dalam aturan kan sudah ada nggih yang kaitannya dengan tentang penetapan tarifnya.

Emerha

Iya.

Nasip

Tapi, kadang kita juga kesulitan untuk mendapatkan nilai pasar karena kita tidak ada nilai pasar kemudian juga kita keterbatasan personel sehingga kadang kita hanya menggunakan eee nilai sama dengan NGOP.

Emerha

NGOP ya?

Nasip

Iya. Tapi, sebetulnya kan penggunaan NGOP ini kan sebenarnya kan terakhir.

Emerha

Iya.

Nasip

Setelah yang diatur tadi kan dilalui tetapi kan nah itu tadi pertama itu kan, keterbatasan personal, kemudian juga eee kesulitan untuk mendapatkan nilai pasar. Karena kan kalau sifatnya itu hanya waris, warisan itu kan kadang untuk mencari nilai pasar di kiri-

kanannya kan sulit. Tetapi, berbeda dengan ini kalau sudah ada transaksi kita tinggal hubungi dengan, apa, mencari informasi di kirikanannya sebetulnya berapa to kemarin itu di situ gitu, tanggane Njenengan itu, nah saat itu kan kita bisa mendapatkan. Tapi, karena seperti itu ya kadang kita menggunakan hal terakhir itu. Jadi, kan sebetulnya kan yang dianggap baik kan sebetulnya kan belum dilewati.

Emerha

Iya.

Nasip

Cuman kan memang kita kesulitan karena keterbatasan personel kemudian juga sulit untuk mencari nilai pasar dan juga karena kita belum ada eee nilai pasar yang, yang istilahnya sebagai injek yang dibakukan belum karena ini kita belum bekerja sama dengan UGM itu membuat itu.

Emerha

Oh, gitu ya. Kalau soal keterbatasan SDM itu belum ada apresiasi ya untuk menentukan harga pasar tadi?

Nasip

Eee, ya, itu tadi karena kan eee kita baru kerja sama dengan UGM, mudah-mudahan ya sebetulnya tahun ini nanti kita semoga jadi sehingga kita mudah-mudahan nyewa yang bagus karena kayak gimana, setiap jadi kan harus di SK-kan dengan SK Bupati. Sehingga orang itu begitu datang ke sini kita sudah dari, kalau lagi katakanlah ke lokasi tinggal melihat saja ini loh nek bandingin gone Njenengan itu kan nilainya sekian-sekian-sekian, sudah, sudah (04:41) Sehingga tidak perlu otot-otot gitu loh ya, nggih.

Emerha

Kalau soal, kalau terjadi permasalahan kayak tadi itu Pak, apakah eee berkoordinasi atau Bapak mengambil keputusannya gimana Pak? Harus, harus rapat dulu terus habis itu dilaporkan ke pimpinan kemudian diminta ditetapkan Perbubnya atau gimana Pak?

Nasip

Oh, gini, kita biasanya kalau ada permasalahan gitu, kita koordinasi dengan baik yang ada di sub bidang termasuk juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kita kembali lagi ke lapangan mencari informasi yang sebenarnya, sebenar-benarnya eee sampai dengan mendapatkan nilai yang hampir mendekati. Kemudian dari eee pihak pemohon juga katakanlah kita ajak bicara kemudian nanti disepakati memang nilai yang aslinya seperti, seperti itu. Katakanlah sebetulnya di, di sana kan eee ada sudah ada nilai nggih kita temukan, katakanlah antara 300 sampai 400. Ya, kemudian eee si pemohon tadi kan katakanlah kok cuma eee 250 padahal kan nilai minimalnya 300, ya ini kita ya itu tadi kita bentuk kemudian di lapangan. Nah, memang ternyata dalam hal kondisi itu letaknya di sana tetapi karena ada (06:34) mereka berada di (06:37) sehingga nilainya memang tidak bisa sampai dengan 300. Sehingga nanti kita ya anulah, apa, agak mendekati gitu dan biasanya mereka mau menerima.

Emerha

Kalau misalkan ditentukan dengan cara seperti itu Pak, ketika ada pemeriksaan BPK deskresi yang semacam itu tidak menjadi temuan ya?

Nasip

Ya, sebetulnya eee dari BPK kemarin juga sudah ada pemeriksaan cuma kemarin yang di, yang ditanyakan BPK ini kaitannya dengan masalah yang eee pembebasan di bandara itu. Tapi, karena sudah ada surat yang pertanda tangan dari Kementerian Keuangan, yang kedua dari Gubernur, yang ketiga dari SK Bupati sehingga itu bisa menjawab bagi BPK. Kemudian yang kaitannya dengan eee, kaitannya dengan masalah eee (07:50) tadi sebetulnya kita eee sudah ada itu harga yang, yang istilahnya di pasaran nggih. Tapi, karena yang si pasarnya itu kan merupakan variasi dan juga memang kondisi di lapangan itu bisa mendukung kelihatannya sampai saat ini eee bisa diterima. Tapi--

Emerha

Berarti setelah--

Nasip

Nggih, tapi, harapan kami nanti tetap kita memang ada semacam eee nilai, nilai indikasi di lapangan atau zona nilai tanah tadi yang nanti segera bisa terbit dan bisa di SK-kan sehingga kita lebih kuat. Jadi, kita tidak mengada-ada.

Emerha

Berarti selama ini--

Nasip

Memang kalau nek dipikir ya itu kan bisa terjadi kongkalikong nggih.

Emerha

Iya, benar.

Nasip

Ya, tapi, harapan kami eee memang itu apa adanya dan kami berharap tidak terjadi seperti itu

Emerha

Bapak, saya pikir juga konsultasi dengan Inspektorat dalam hal untuk menghindari terjadi temuan?

Nasip

Eee, memang anu, kita kadang sebelum melakukan kebijakan itu kadang kan kita supaya lebih aman.

Emerha

Iya.

Nasip

Itu kan konsultasi dulu ke Inspektorat.

Emerha

Lebih aman.

Nasip

Nggih, seperti apa to kalau, kalau seperti ini itu nanti kira-kira menyalahi nggak kan gitu, kita biasanya seperti arahnya ke sana dulu. Nah, kalau memang mereka itu meng-iya-kan dan bisa menerima ya kita melanjutkan kebijakan seperti itu. Tapi kalau mereka kok yo mengindikasikan oh nggak bisa itu nanti sudah anu, nyalahin ya itu kita yo --

Emerha

Ngikuti?

Nasip

Iya.

Emerha

Pak, kala terjadi masalah-masalah seperti apakah pernah dieventalisir masalah itu Pak, misalkan sekarang terjadi masalah itu? Kemudian di tahun depan kemungkinan akan terjadi masalah itu, apakah itu bisa dijadikan pelajaran atau gimana cara mengelolanya Pak?

Nasip

Eee.

Emerha

Jangan sampai terulang kejadian yang semacam itu?

Nasip

Baik, sekali lagi karena saya baru sebulan di sini ya berarti kan saya belum, belum, belum bisa menjawab secara pasti kaitannya dengan masalah itu. Tapi, kalau saya yakin bahwa hal seperti itu mesti, mesti di, anu, dinetralisir sehingga itu untuk ke depan bidang--

Emerha

Kalau misalkan Bapak, misalkan masih baru, tindakan apa yang harusnya Bapak lakukan kalau misalkan terjadi seperti itu? Apakah Bapak berkoordinasi dulu di staf Bapak kaitannya yang seperti itu seperti apa?

Nasip

Nggih, jadi, itu jelas nggih, jelas selaku pejabat baru di sini kemarin yang pertama tentu mohon koordinasi dari staf yang ada di ranah saya, kemungkinan yang sering terjadi seperti kan. Kadang-kadang ya itu tadi eee kaitan dengan masalah pajak itu eee bagi WP kecenderungannya, kecenderungannya itu untuk eee istilahnya memperoleh keringanan.

Emerha

Iya.

Nasip

Kemudian dengan menyampaikan data yang tidak valid. Jadi, eee seperti sudah terjadi, ini biasanya kalau yang, yang dimaksudkan yang transaksi nggih.

Emerha

Iya.

Nasip

Kalau yang seperti waris, hibah itu kan nah memang itu tidak ada transaksi ya tidak begitu bermasalah, yang transaksi ini yang ini yang melibatkan perantara, nah ini. Tapi, eee dari kemarin-kemarin sehingga kami tidak langsung begitu percaya mereka menyampaikan bahwa Pak ini loh harga transaksi yang sebenarnya. Ternyata setelah kita cek di lapangan, nggih, itu eee bilang ke mereka eee katakan lu sudah benar, baru kemudian setelah kita panggil yang kedua dengan kita mempunyai bukti, mereka mau mengakui bahwa memang transaksinya seperti itu. Jadi, kan memang kecenderungan dari transaksi yang melibatkan tiap itu cenderung untuk, untuk memberikan informasi yang tidak valid.

Emerha

Ehmm, kalau Bapak sebagai pejabat baru, Bapak butuh berapa lama untuk beradaptasi belajar di bidang yang baru itu Pak, seperti sekarang ini?

Nasip

Ya, katakanlah kalau dikatakan saya butuh berapa lama eee saya tidak, tidak bisa menjawab kepastiannya gitu ya. Tapi, dengan beriringnya proses kemudian juga saya selalu eee, apa, mengalami kemudian saya mau mencari informasi yang sering terjadi sehingga saya juga tidak malu untuk bertanya sehingga saya kelihatannya ya dalam waktu 1 bulan kelihatannya saya sudah, sudah, sudah bisa untuk menyesuaikan. Cuma mungkin kalau ada eee permasalahan yang timbul kemudian juga katakanlah masalah yang sudah ada dan juga karakter-karakter dari anu, saya belum bisa kalau semua.

Emerha

Iya.

Nasip

Apalagi untuk, untuk adanya dengan masalah, permasalahan dengan gaji saya berusaha untuk menggali sebetulnya permasalahan atau yang masih, masih ada di sini itu kelihatannya sudah saya eee himpun. Kemudian kalau dari karakter dari masing-masing personel.

Emerha

Iya.

Nasip

Kemudian juga yang paling pokoknya yang sering ke lapangan itu saya belum, belum apalagi ke--

Emerha

Terus Pak, kalau misalkan Bapak mau mengambil keputusan, Bapak tadi bilang kan harus tidak malu bertanya kepada staf.

Nasip

Nggih.

Emerha

Kadang mereka diundang, apakah Bapak sering juga melaporkan kesalahan staf ke pimpinan untuk, dalam hal mengambil keputusan?

Nasip

Itu pasti.

Emerha

Itu seringnya Pak?

Nasip

Jadi, nggih, jadi, seperti yang saya laksanakan ini tadi kan dalam rangka itu bukan kebutuhan Pak Kepala tapi itu kebutuhan saya.

Emerha

He'e, iya.

Nasip

Mungkin bidang pajak ini kan, akan mengambil kebijakan yang Pak Kepala Dinas juga harus tahu sehingga eee tadi sih memang tidak ada agenda secara tersendiri tapi memang ada kendala dari bidang pajak untuk disampaikan ke Pak Kepala yang misalnya di bidang ada beberapa hal termasuk permasalahan yang sudah bisa diurai. Sehingga kita tinggal melaksanakannya.

Emerha

Kalau soal pelatihan Pak, kalau misalkan ada pegawai baru, apakah mereka juga ikut? Ada, ada misalkan ada pelatihan retribusi pajak.

Nasip

Iya.

Emerha

Tarif yang baru.

Nasip

Iya

Emerha

Itu Bapak juga ikut, ikut pelatihan bersama-sama dengan staf?

Nasip

Eee, kalau kaitannya dengan masalah pelatihan dan keterlibatan saya, sekali lagi saya kan masih baru nggih.

Emerha

He'e.

Nasip

Ini kemarin baru kita mengirimkan teman-teman untuk pendampingan untuk pelaksanaan Simda Pendapatan.

Emerha

Iya.

Nasip

Dan kalau saya ada waktu itu saya selalu ikut.

Emerha

Iya.

Nasip

Tetapi, kalau yang memang ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan ya--

Emerha

Waktunya kan--

Nasip

Mereka yang akan menangani langsung itu ke sana ya. Tapi, pada prinsipnya kalau saya tidak ada kegiatan saya juga ikut karena di BPKP.

Emerha

Iya.

Nasip

Itu kemarin kan saya ke sana dan saya ikut bergabung untuk seperti apa jalannya, iya.

Emerha

Iya, kalau misalkan ada yang ikut sosialisasi Pak misalkan diutus 3 orang.

Nasip

Nggih,

Emerha

Setelah mereka pulang sosialisasi apakah ilmu mereka ini dikumpulkan dalam bentuk file atau buku terus dipelajari bersama-sama, ada seperti itu?

Nasip

Eee, kebetulan untuk kegiatan seperti itu saya belum anu ya, belum mendapatkan.

Emerha

Iya.

Nasip

Tapi, kalau saya lihat dari arsip yang sudah ada sepertinya juga eee dikumpulkan nah kemungkinan besar juga sedang disampaikan kepada teman-teman.

Emerha

Jangan sampai nanti mereka sudah ikut pelatihan terus sudah mahir setelah itu dipindah.

Nasip

Iya, nggih.

Emerha

Kelabakan lagi kita ya.

Nasip

Itu makanya kan eee saya juga tidak pengen seperti itu.

Emerha

Iya

Nasip

Sehingga kemarin dalam eee pelatihan itu saya eee minta tidak hanya yang saat nanti untuk pelaksanaan itu yang mau menangani termasuk saya minta untuk ada selalu cadangannya kader.

Emerha

Cadangannya, iya.

Nasip

Jadi, kan, tidak tahu eee kadang orang kan ya nek sehat terus nek nggak, kan gitu. Kalau cuma satu orang kan nanti bisa mengacaukan semua. Sehingga kemarin kita mengirimkan tetap minimal itu dalam satu anu itu, 2 orang.

Emerha

Berarti ada semacam minimal ada semacam perintah gitu ketika yang ikut sosialisasi eh tolong ajarkan itu si ini, ajarkan si ini.

Nasip

Nggih, iya.

Emerha

Itu ada ya secara lisan ya?

Nasip

Ada, nggih, nggih.

Q.2. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan pajak

Emerha

Pak, dalam hal akuntabilitas pengelolaan pajak Pak. Menurut Bapak definisi akuntabel itu seperti apa Pak dalam konteks pengelolaan pajak?

Nasip

Ya, sebetulnya kan kalau menurut saya yang namanya eee, ketika sedang hal pengelolaan pajak ini eee apa yang terdata kemudian eee kita terima itu yo istilahnya ada semacam eee perimbangan gitu istilahnya dapat di, dipertanggungjawabkan. Eee mungkin perlu saya sampaikan yang namanya pajak kan tidak bisa 100% akan ditarik semua, tapi kan paling tidak kan ada, ada perhitungannya kejelasannya berapa itu yang sudah masuk kemudian berapa yang eee menjadi masih menjadi piutang. Itu yang, yang paling penting di situ. Kemudian eee semua yang berkaitan dengan transparan pajak ini tentunya terkelola dengan baik, terbukukan dengan baik dan untuk eee kegiatan itu ke arah sana maka ini nanti kita akan menerapkan Simda Pedapatan.

Emerha

Simda Pendapatan. Sebelumnya belum, belum diterapkan?

Nasip

Belum, belum. Kita mau rencana nanti mulai 1 Maret.

Emerha

1 Maret.

Nasip

Nggih, dengan itu nanti wah semua sudah, sudah masuk data ke situ. Jadi, kalau kita mau melayani Inspektorat, mau melayani BPK sudah tidak kesulitan lagi karena semua data ada di situ.

Emerha

Jadi, selama ini sebelum menggunakan Simda nanti pelaporannya gimana Pak? Masih manual?

Nasip

Manual, nggih.

Emerha

Masih manual ya?

Nasip

Nggih.

Q.3. Transparansi dalam konteks pengelolaan pajak

Emerha

Kalau soal transparan Pak, apakah menurut Bapak definisi transparan dalam pengelolaan pajak itu seperti apa Pak?

Nasip

Eee.

Emerha

Apakah semua pemberitahuan harus diumumkan di website? Yang belum tertagih yang sudah tertagih ada seperti itu?

Nasip

Eee kalau kita eee berkaitan dengan transparansi sebenarnya kita juga sudah menyampaikan eee kepada katakanlah kalau pemberitahuan kita sampai di tingkat kecamatan bahwa kita punya piutang pajak sekian. Kemudian untuk yang belum tertagih sekian itu kita sampaikan. Karena kita mau tidak mau harus minta bantuan baik dengan Pak Camat maupun Pak Kasdes karena biasanya kan masalah terjadi di tingkat padukuhan. Sehingga perlu kita sampaikan ini setiap katakanlah mungkin paling lama itu kalau yang saya alami nggih, misalnya di kecamatan itu setiap (21:34) itu nanti ada, ada evaluasi dan monitoring kaitannya dengan masalah pajak itu. Sehingga mereka selalu diberikan laporan bahwa di desa ini masih ada piutang tunggakan sekian-sekina.

Emerha

Oh, berarti ada sosialisasi ya?

Nasip

Iya, nggih.

Emerha

Ini anggarkannya sekian.

Nasip

Nggih. Saya, karena, apa, kita semuanya tahu sebetulnya itu pajaknya itu memang belum terbayarnya itu memang dari asli dari WP atau dari mana-mana ya.

Emerha

Iya.

Nasip

Tapi, karena banyak kita temukan ternyata WP itu sudah beres. Nah, ini yang kedua ini yang sering disampaikan nah sekarang--

Emerha

Nah, berarti salah satu cara ya Pak, kalau misalkan eee upaya Bapak untuk kalau pajak itu kan ada targetnya ya Pak.

Nasip

Iya.

Emerha

Kalau misalkan di tahun ini Bapak harus capai target, apa biasanya upaya Bapak yang dilakukan supaya mencapai target?

Nasip

Ya, yang jelas anu, kita bisa hanya menunggu jadi kalau untuk saat ini kita sudah berupaya untuk selalu cukup bulan.

Emerha

Iya.

Nasip

Yang namanya penagihan itu kan biasanya dilakukan kalau tidak atau belum dibayar.

Emerha

Iya.

Nasip

Karena sudah, sudah saatnya to. Tetapi, kita tidak melakukan hanya semacam itu. Justru kita mendahului dalam rangka untuk bisa segera mencapai target. Katakanlah secara, orang secara awam kan yang namanya nagih itu kan karena sudah jatuh tempo tadi, nggih to?

Emerha

He'e.

Nasip

Tetapi, kita supaya kalau tidak, kalau menunggu seperti itu, itu nanti kan akan lama. Katakanlah pajak itu kan sampai dengan bulan September. Tetapi, kita melakukan penagihan secara terus menerus sampai dengan akhir tahun. Logikanya kan kita menagih kalau sudah setelah September to, logikanya.

Emerha

Iya, iya.

Nasip

Setelah September, tapi kita tidak seperti itu, kita tetap melakukan penagihan.

Emerha

Tiap bulan dikontrol, ya?

Nasip

Iya, nggih.

Emerha

Jangan sampai nanti sudah waktunya ternyata nggak bisa bayar sama sekali.

Nasip

Nggih, nggih.

Emerha

Iya, supaya jangan berpeluang mereka untuk--

Nasip

Supaya juga tidak ada istilahnya memperbesar tunggakan gitu dan juga nanti untuk pencapaian target supaya bisa lebih cepat gitu. Tapi, kalau kita cuma diam saja sampai nunggu sampai batas tempo, kemudian tahu-tahu sudah selesai kita tagih lagi, nah, nantikan nggak ada fungsinya. Cuma sekadar nagih karena tidak terbayar.

Emerha

Iya. Kalau misalkan Bapak tidak mencapai target gimana Pak apa ada pengaruh? Pengaruh dengan jabatan Bapak? Apakah dari penilaian pimpinan kita?

Nasip

Ya, yang jelas kaitannya dengan ketidaktercapaian target itu secara langsung eee terhadap saya ya tidak, tidak begitu signifikan nggih. Tetapi, ini akan mempengaruhi kinerja dari OPD

Emerha

Keseluruhan ya Pak?

Nasip

Iya. Kalau secara person belum, belum begitu dilihat kalau katakanlah--

Emerha

Biasanya kalau tidak tercapai target begitu Pak, ada yang di sasar nanti kan Kabidnya, sekarang nih digeser nih gitu.

Nasip

Iya, nggih, nggih, nggih, itu, itu bisa ya, bisa juga terjadi. Tetapi, dalam hal ini kan mungkin juga perlu dilihat nggih targetnya itu kan seperti apa. Kemarin kan dengan hitung-hitungan biasanya kan karena memang ada faktor yang, yang tidak apa, tidak bisa dihindari ya ya mungkin tidak, tidak dijadikan masalah ya.

Emerha

Baik.

Nasip

Tapi, kalau memang itu bukan merupakan suatu faktor yang, yang istilahnya sangat eee utama tetapi kenapa tidak bisa dilakukan ya kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Memang berimbas dengan jabatan yang mungkin nanti oleh yang terjadi sama--

Emerha

Dalam hal pajak Pak, di, di bagian mana Pak yang paling besar Pak pemasukan pajak?

Nasip

Pajak yang paling besar PBB.

Emerha

PBB, ya?

Nasip

Iya, PBB.

Emerha

Berarti kalau, kalau ada yang paling besar gitu Pak mungkin eee prioritasnya itu maksudnya paling prioritas yang paling prioritas dari semua sumber pemasukan itu tetap di PBB ya Pak, tetap yang paling besar ya Pak?

Nasip

Kalau untuk--

Emerha

Atau yang misalkan yang kecil di bisa diusahakan bagaimana caranya mesti jadi besar seperti apa usahanya Pak?

Nasip

Kalau untuk tahun ini eee kelihatannya berbeda untuk prioritas tahun ini kelihatannya kita menggenjot dan untuk yang lebih mengintensifkan lagi di pajak untuk mineral bukan logam dan batuan.

Emerha

Oh.

Nasip

Karena kalau PBB itu kan semacamnya kita sudah, sudah berjalan nggih.

Emerha

Iya.

Nasip

Tapi, kalau untuk mineral bukan logam dan batuan ini memang harus bekerja keras kita karena kita ditarget dari kemarin tahun di 2017 itu biasa besar itu hampir 3,5 sekarang menjadi 16.

Emerha

17M?

Nasip

Iya, itu kan berarti kan beliau kerja keras itu.

Emerha

Terus gimana Bapak mau memotivasi staf Bapak supaya gimana caranya Bapak memotivasi mereka biar--

Nasip

Ya, saya dan teman-teman itu selalu menyampaikan bahwa kita bekerja atas namanya bidang bukan atas nama Subdit. Karena semuanya berkaitan.

Emerha

Iya.

Nasip

Baik dari pendataan, pendaftaran, kemudian dari penetapan, dari dan yang terakhirnya di penagihan itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus selalu koordinasi.

Emerha

Tim Work ya?

Nasip

Iya, simultan, jadi monggo karena ini merupakan suatu kerja kita bareng, kita tidak boleh terkotak-kotak. Artinya mana yang memang membutuhkan kita bantu. Kan bicara kita pada tahun ini memang begitu besar untuk dituntut kaitannya dengan masalah pendapatan. Kemudian juga kita merekrut tenaga harian lepas.

Emerha

Oh, ada juga Pak?

Nasip

Iya, untuk lebih bisa mengoptimalkan karena selama ini kan eee mereka kan cuma mengirimkan laporan itu kan masih banyak yang lebih sesuai dengan hasil aslinya. Ya, sekarang kita menurunkan teman-teman tenaga harian lepas sebagai satgas untuk melakukan pendataan.

Emerha

Iya.

Nasip

Ya, harapannya untuk bisa lebih mendekatilah reproduksi mereka yang sebenarnya.

Emerha

Ada insentif juga ya Pak digaji mereka?

Nasip

Ada.

Emerha

Untuk, untuk petugas lapangan?

Nasip

Oh, kalau yang di petugas, artinya yang, yang kontrakan atau yang pegawai sini?

Emerha

Yang pegawai.

Nasip

Oh, ada, iya.

Emerha

Itu ada?

Nasip

Ya, dari dulu ada kan, otomatis.

Emerha

Itu langsung dari APBD ya?

Nasip

Oh, iya.

Emerha

Oh.

Nasip

Itu kan kaitannya dengan, kaitannya dengan eee pemungut pajak.

Emerha

Oh.

Nasip

Itu nantinya kan mesti, mesti ada insentif tapi kemungkinan nanti juga di akhir tahun.

Emerha

Mungkin besarnya tergantung target yang dicapai ya?

Nasip

Iya, betul (tertawa)

Emerha

Apalagi kalau nggak tercapai target nggak ada?

Nasip

Ya, ya, tetap ada cuma eee mungkin kan eee cuma ya katakanlah berapa persennya saya kurang, kurang anu nggih. Tapi, yang jelas, tetap, tetap ada karena bagaimanapun meskipun tidak tercapai kan sebetulnya kan biar tidak terus merupakan suatu kesalahan yang eee fatal. Karena akan kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Bisa saja kemarin kita kan parkir katakanlah yang, yang salah menghitung targetnya kan juga bisa. Tapi, untuk, untuk insentif tentu meskipun tidak tercapai tetap. Karena dari 10 itu kan kadang kan hanya ada beberapa yang tidak tercapai, tidak semuanya kan tidak tercapai.

Emerha

Oke, Pak, itu--

Nasip

Nggih.

Emerha

Itu saja dulu Pak wawancara kita sudah 30 menit (tertawa)

Nasip

Iya (tertawa).

Emerha

Nanti insya Allah Pak, kalau anu, saya analisis datanya.

Nasip

Iya.

Emerha

Kalau misalkan ada yang kurang nanti saya minta wawancara lagi ya Pak?

Nasip

Nggih, nggih, monggo silakan.

Emerha

Terima kasih banyak nih Pak (tertawa)

Nasip

Sama-sama.

Emerha

Iya.

- b. Wawancara ke-2 dengan Nasip pada 31 Mei 2018, pukul 13.51 wib, di ruang kerjanya, Ruang Kabid Pajak. Nasip adalah Kepala Bidang Pendapatan di OPD BKAD sampai dengan saat ini. Tema utama wawancara adalah mekanisme pelaksanaan pajak yang transparan dan akuntabel.

Q.1. Mekanisme pembuatan SKP Daerah dan SKRD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalo untuk ini pembuatan SKP Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau Surat Ketetapan Retribusi 0:10 Daerah

Nasip

Heem

Emerha

Itu dibikin di sini ya ?

Nasip

Heem ya itu kan

Emerha

Itu bagaimana mekanismenya pak ?

Nasip

Kaitannya dengan masalah yang self assisment, itukan dari pihak BP 0:31kan laporan.

Emerha

Heem

Nasip

Melapor. Melapor ini volume saya ini progresis saya dalam satu bulan kemudian setelah diterima kaitannya dengan masalah volume meraka kemudian, tapi kita juga tidak langsung serta merta sesuai dengan laporan enggih, kita melakukan kroscek dulu. Biasanya kan mereka kan cenderungnya kan mengurangi data, tapi kemudian setelah ada kepastian kemudian kita terbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah baru mereka menerima. Kemudian mereka bayar lewat bank. Untuk bukti setornya nanti disampaikan ke sini.

Emerha

Oh berarti, ketika mereka mau bayar. Mereka meminta SKP dulu.

Nasip

Iya

Emerha

Itu Prosedurnya standar ya pak?

Nasip

Iya

Emerha

Memang ada Pro tap yang seperti itu. Itu SKPnya di atur dengan ?

Nasip

Dengan anu SK kepala Abadi

Q.2. Mekanisme pembayaran pajak yang transparan dan akuntabel

Emerha

SK kepala BKD ya ? Kalo pembayarannya bagaimana pak ?

Nasip

Emh

Emerha

Dia menerima itu yang tunai tidak diambil di sini ?

Nasip

Kita, karena kita kan sudah apa memberlakukan untuk non tunai

Emerha

Heem. Non tunai

Nasip

Iya non tunai sehingga walau bagaimanapun, setelah meriman SKPD nantikan akan membayar lewat bank terdekat. Dan untuk saat inikan kita bisa lewat membayar dengan BPD juga bisa

Emerha

Emm

Nasip

Kemudian untuk yang selain BPD, BNI juga bisa kita adanya bekerjasama dengan Bank BPD dan BNI.

Emerha

Jadi sudah tidak ada lagi penerimaan di bendahara penerima?

Nasip

Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tinggal kecil: 3:24. Kemudian juga upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.

Emerha

Kalo lewat bank itu gimana pak, cara controlnya pak ?

Nasip

Gimana ?

Emerha

Kontrol kalo pembayarannya itu tepat waktu, bagaimana di kontrol pak ?

Nasip

Eu gini untuk kaitannya dengan masalah eu pajak inikan sebetulnya sudah di anu ya, sudah ada masa pajaknya. Kemudian kita saat inikan baru, ya sebenarnya kita memerlukan. Karena kita anggap untuk waktu itu bagi mereka terlalu sempit. Karena hanya 7 hari kerja, nah kita akan merubah menjadi paling tidak 15. Supaya mereka mempunyai kekuasaan waktu dari SKPD yang kita sampaikan sehingga sesuai tepat waktu. Sehingga tidak kena denda. Nah nanti dari sistem itu akan kelihatan mereka segera membayar atau tidak dan itu kalo tidak muncul kemudian masalah pembayaran, nanti akan di bidang kaitannya dengan masalah penagihan, maka perlu di tagih. Kemudian kaitannya dengan masalah kontrol kita selalu mengadakan rekonsiliasi. Dengan pihak BPD.

Emerha

Oh ada rekon

Nasip

Enngih ada rekon dengan pihak BPD.

Q.3. Mekanisme penerimaan pajak oleh bendahara penerima yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalo yang dibendahara penerimaan gimana pak controlnya? yang tunai ?

Nasip

Iya di sana sebetulnya juga anu ya, sebetulnya kalo harusnya juga sama. Nanti dari bendahara penerima itu mereka juga

langsung nyetor, nyetornya juga langsung ke BANK ke kas. Tidak dipegang sampai dengan 24 jam gitu

Emerha

Emm

Nasip

Hari ini diterima nanti segera di setorkan.

Emerha

Setorkan

Nasip

Karena tidak boleh pegang uang lebih dari 24 jam

Emerha

Itu ada ketentuannya?

Nasip

Iya

Emerha

Itu diatur di mana pak ?

Nasip

Itu di di kalo tidak salah di perpu Ya

Emerha

Perbup ?

Nasip

Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu, kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke anggaran penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kasian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening

Emerha

Kalo untuk penerimaan bank, untuk kontrolnya gimana pak ? kontrol juga pak?

Nasip

Penerimaan bank. Kaitannya dengan eu pelaporan itukan nanti setiap bulan itu nati pihak bank menyampaikan laporannya.

Emerha

Laporannya ?

Nasip

Kemudian seperti ada pembayaran transfer. Itu nanti kita juga langsung diberitahu. Ini ada transfer dari PT ini . Nah kita nanti melacak. Oh ternyata itu untuk pembayaran untuk pajak reklame itu nanti kita kroscek. Mungkin nanti temen kita ada yang nyari, terus kemudian oh ternyata tidak terbayar terus nanti dimasukan ke aplikasi. Sehingga nanti ada semacam itu enggih, data itu ini sudah ini belum, ini sudah ini belum, di aplikasi ada.

Emerha

Aplikasinya connect gak pak ? online. Tadi bapak bilang simda pendapatan sama di BPD.

Nasip

Kalo yang *connect* itu cuman yang kaitannya dengan masalah BPD. Kaitannya dengan BPD/PBB 09:25, datanya datanya BPD/PBB. Tapi kalo simda pendapatan dengan BPD itu tidak connect. Cuman nantikan BPD memberikan data kepada kita. Ternyata ada transfer sekian. Nah itu nanti kita yang ajukan ke simda pendapatan. Sama

Emerha

Berarti Cuma PBB yang online? Kenapa yang lain

Nasip

Ya PBB

Emerha

Kenapa hanya PBB (09:31) yang online?

Nasip

Ya untu yang lainnya memang kita belum anu enggih, belum siap. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengarahkan pada transaksi non tunai. Jadi kalo PBB bayar langsung bisa langsung ketemu. Maka katakanlan ATM itukan BPD ini lagsung muncul atas nama ini, oh ya bener berarti lagsung masukan angka. Tetapi kalo seperti pajak reklame itu cuman menuju ke rekening. Ini saya membayar untuk reklame ke iklan ini nomor rekeningnya nanti sudah persen lagi. Sehingga kita harus nyari lagi tapi yang kecil-kecikan langsung to. Nah itu nanti berkaitan dengan masalah system aplikasi sekrang kita bisa baru input yang BPD. Cuman yang kalo harapan dari ATK diharapkan semuanya itu bisa secara online, tetapi ya itu tadi mengingat kitakan kesiapannya kaitannya dengan masalah aplikasi, brangkas itukan. Jadi arah kita sekarang baru non tunai. Sehingga masyarakat bisa langsung membayar lewat bank, tidak usah ke BUD membawa uang tidak usah.

Emerha

Jadi kalo PBB yang baru online, mungkin pendapatan PBB berapa atau gimana? Dari seluruh sumber pendapatan yang lain.

Nasip

Kalo dari sumber pendapatan, kan ini terbesar PBB

Emerha

PBB ya ?

Nasip

PBBkan untuk tahun ini kan dengan target yang sedikit ya blas

Emerha

Nah kalo sudah menetapkan sistem non tunai udah gak ada bendahara penerimaan lagi ya ?

Nasip

Ya tetep ada.

Q.4. Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Ok kalo tadi soal SPJ penerimaan. Jadi ketika bendahara sudah memuat secara tunai, yang non tunai, nah itu pertanggungjawabannya gimana pak ?

Nasip

Sebetulnya pada akhirnya sama enggih. Karena kan sebenarnya kan cuman anu aja kita itu eu memberikan bantuan pada mereka sebenarnya yang merekakan bayar bisa langsung bayar ke bank enggih, ya Cuma mungkin karena mereka sesuatu hal alasan wes anu harusnya, tapi nanti setelah kita terima ya langsung kita setorkan di bank. Karena kita tidak boleh memegang uang setoran selama 24 jam.

Emerha

Berarti SPJ yang dimasukan ke, jadi pendapatan yang di SKPD itu kan dipertanggung jawabkan? Bendahara mempertanggungjawabkan dalam masalah SPJ penerimaan.

Nasip

Heem

Emerha

Nah itu diverifikasi di sini ya pak?

Nasip

Iya

Emerha

Itu bagian mana pak ?

Nasip

Kalo kaitannya dengan masalah pendapatan nantikan di anu e itu di anu itu di keuangan nanti yang memverifikasi. Kalo yang gini itukan hanya sebatas yang menangani secara teknis. Secara teknisnya, tetapi kalo kaitannya dengan masalah keuangan, itu nanti ada kesalahan teknis, nah itukan di anu e istilahnya Pejabat Pengelola Keuangan.

Emerha

Oh berarti dibidang pendapatan ya yang bidang evaluasi itu ya ?

Nasip

Iya. Karena kan pada tidak hanya saya enggih, karena pendapatan ada dari yang diluar. Saya cuman badan permasalahan pajak saja.

Emerha

Kalo soal administrasi, ketika melakukan pembayaran non tunai itu gimana pak ? harus diminta lagi atau sederhana saja pak ?

Nasip

Kalo non tunai itu pada fungsinya dengan eu pada kalo tidak salah tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan cuman yang membedakan hanya sistem membayarnya saja to? jadi ya kalo non tunai itu ya menulis langsung, begitu di masukan rekening ya menjabarkan bukti kemudian dikirimkan kepada kita. kalo yang tunai ya cuman langsung membayar sesuai dengan surat ketetapanannya itu, kemudian ya mengisi Surat keterangan Pajak Daerah, SKPDnya kemudian di isi pihak BPD kalo kita sudah membayar.

Emerha

SKPD daerah itu yang non tunai itu di catet di mana pak ?

Nasip

Itu tuh sama di penerimaan. Jadi bendahara penerimaan itu nanti akan mengentry tunai maupun non tunai. Tapi pada prinsipnya tunai juga nanti akhirnya kan non tunai, karenakan kita menyetorkan ke bank bukti itu kan menyetorkan di

Emerha

Berarti SKPD satu itu ditunjukan ke bendahara penerimaan?

Nasip

Heem.

Emerha

Berarti ada 3 yang terkait ya, langsung ke bidang pajak, bank, bendahara penerimaan.

Nasip

Iya

Emerha

Itu simda pendapatan itu bisa diakses dari luarnya pak,

Nasip

Ndak bisa.

Emerha

Ndak bisa ya.

Nasip

Itu kan punya milik, ya kitu kan ya milik yang bikin itu kan anu BPKP. Jadi yang pertama BPKP itu ya simda keuangan

Emerha

Berbeda enggak ?

Nasip

Kalo simda keuangan itu mulai dari perencanaan. kemudian Pembuatan dokumennya sampai dengan nanti sisanya, akhir laporan keuangan, lah kemudian untuk yang simda pendapatan ini, ini juga yang membuatkan adalah BPKP juga dalam rangka ya itu tadi penanganan masalah keuangan pendapatan supaya tidak terjadi kebocoran secara berlebih

Emerha

Terus ini pak, kalo sumber pendapatan dimulai dari perencanaan juga pak ? sampai

Nasip

Itu iya. Karenakan mereka juga harus mengentri data to

Emerha

Emm

Nasip

Cuman hanya khusus untuk pendapatan. Tapi kan disana sudah kita pilah-pilah. Pilah pilahnya kaitannya dengan masalah BPD. Kalo BPD itu euu karena yo agak rumit. Itu juga belum dipilahkan dengan subbag kita. kemudian umpame pajak juga kan ada sendiri, restaurant ada sendiri, nah nanti di aplikasi itukan memang memudahkan kita manakala kita dimintai sekarang ini sampai bulan ini yang mana saja yang sudah mana yang belum nanti akan kelihatan juga. Cuman masalahnya kita nanti rajin selalu untuk mengentri umpanya katakanlah ada pembayaran langsung kita masukan, kemudian kalo tidak ada yang menyelesaikan kewajiban nanti akan muncul di aplikasinya itu akan muncul perlu penagihan. Itu juga ada, tinggal nyetak nanti seperti penagihan perbulan itu nanti tinggal nyetak, formatnya sudah ada. Jadi ko kalo tidak bayar ini sudah jatuh tempo sudah terlambat, nah itu nanti kena denda. Nah itu juga muncul itu. Nah itu nanti kena denda

Emerha

Antara simda pendapatan dengan simda keuangan itu conect pak ? Online?

Nasip

Bisa

Emerha

Tapi kalo misalkan simda pendapatan mau bikin laporan keuangan tinggal minta data keuangan, atau harus input lagi

Nasip

Jadi gini eu dari pihak BPKD memang sampai saat ini belum bisa dilakukan secara link. Tetapi bisa dilinkkan secara export import

Emerha

Export import

Nasip

Enggih. Cuman kemarin eu dari pihak BPKD sendiri inikan bagaimana enggih, melaksanakan penyempurnaan seperti yang simda keuangan itu juga disempurnakan pada, ya nanti harapannya untuk semua juga bisa langsung masuk ke link pihak keuangan. Sehingga nanti simdamembuat laporan keuangan dengan masalah dibuatkan itu sudah tidak lagi minta di simda pendapatan di sini, tetapi bisa langsung ke sana. Tetapi sekarang masih mungkin bisa tapi dengan cara export import. Untuk itu yang bisa dilakukan

Emerha

Kalo misalkan terjadi penyimpangan pak, untuk pendapatan atau ada mekanisme tersendiri?

Nasip

Maksudnya pa ?

Q.5. Mekanisme penyetoran penerimaan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Ada penerimaan di bendahara, ketika di setorkan, nah itu gimana ada mekanismenya sendiri ?

Nasip

Ya tentunya mesti ada enggih karena kitakan selalu konfirmasi. Seperti tadi saya sampaikan manakala ada WD, kemudian di simda tidak munculkan otomatis muncul tagihan lah kalo. Lah kalo tagihan kita konfirmasi tapi gak keto, ketika

sudah menyetorkan, jadi kan mau gimana kalo mereka tidak menyerahkan secara tunai takutnya itu akan kita, katakanlah kalo memang belum di setor ya segera di setor. Kalo memang istilahnya dipakai ya mohon segera di ganti tapi ya setahu saya seperti itu belum pernah terjadi

Emerha

Emmp ya itu yang di depan saya lihat

Nasip

Iya

Emerha

Pelayana apa itu?

Nasip

Ya itu anu yang melayani kaitannya dengan masalah pajak yang kita tangani karena kan ada 10 jenis. Yang tadi saya sampaikan, kalo yang kebetulan tidak membayar secara non tunai berartikan mereka membayar secara tunai. Itu juga bisa dilakukan itu. Nah itu juga pelayanan kaitannya dengan masalah konsultasi PBB. Kemudian kaitannya dengan masalah reklame, kemudian dengan masalah biaya perolehan hak perolehan dan bangunan, kemudian pajak di bulan pajak, tapi mayoritas untuk yang di depan ini yang kesehariannya itu adalah yang paling banyak itu adalah, saat ini pelayanan untuk euu pajak bea perolehan bangunan dan BPD.

Emerha

Eummm

Nasip

Itu staf mesti ada karena yang BPD itukan kaitannya dengan masalah SPP itu mereka banyak mengajukan berubah. Berubah karena karena ada yang berbeda, berubah karena kisaran pajak yang tidak sesuai. Berubah karena jenis pajaknya tidak ada. Berubah karena oubyek dari subyek nya sendiri juga dika ada. Ada yang ganda, ada yang sebetulnya sudah pecah tapi masih satu, nah itu untuk saat ini kita pelayanan seperti itu. Kemudian kalo biaya perolah bangunan ini sebetulnya mereka sebelumnya tidak bayar dulu tapi kemudian terus kita validasi . harus kita validasi bahwa untuk 24:58..sudah eumm bayar sehingga nanti proses di BPN juga dilanjutkan. Karena kalo kita tidak validasi, kemudian tidak bisa memproses karena memang pengukuranya seperti itu.

Emerha

Emm

Nasip

Tapi mereka anu membayarnya di bank

Emerha

Itu gak ada bank ya?

Nasip

Banknya di depan

Nasip

Ooh berarti semua pelayanan di situ ya, mulai dari KRT makanya saya sebetulnya itu, pengennya itu pelayanan di depan itu sayakan berdampingan dengan, sehingga begitu ada yang datang, ada uang tunai ya langsung kita buat ya katakanlah SKPD nya suruh bayarkan nanti tinggal kita menerima bukti pembayarannya. Itu yang dilihat, jadi seperti ini, ini kan dari PT Pelangi Jaya Industri. Ini mereka harus membayar biaya pajak sebesar 177.000.523, nah kalo sebesar inikan resiko to ? nah ini mereka langsung di bank membayar, ini sudah membayar dari bank BPD ini. Nah setelah ini baru disampaikan ke pelayanan di depan itu. Nantikan saya validasi

Emerha

Oh mereka validasi . sana ya?

Nasip

Kalo mereka sudah bayar. Iya tapikan ini bayarnya di Bank, tidak di depan di bank langsung di bank. Yang ke sini tinggal berkasnya ini karena ini yang format ini sudah di anu di bank. Jadi karena ini lewat apakah itu BPN, apa itu Notaris kemudian mereka sudah membuat rincian ini, kemudian mereka bayar cicilan validasi yang sesuai. Kalo tidak sesuai dengan itung-itungan kita nanti eu saya belum tanda tangan. Mereka harus membuat lagi kekurangan apa, inikan yang menghitung mereka bahwa saya membeli tanah dengan harga sekian. Berarti say dikurangi dengan 60 juta sebagai anu nilai objek paja yang tidak pajak. Nilai pajak yang gak kena pajak itu kan 60juta nah saya 5% itukan yang 5% itukan yang harus mereka bayar pada kita dari pajak atas perolehan tanah nah kemudian mengajukan ini dokumen ini ke kita. ya sudah bayar untuk saat ini, kemudian kita cek lapangan dengan berdasarkan ini alamat NOP dimana kita cek di sana. Kalo di sana transaksinya itu dari informasinya yang ada di sana itu lebih tinggi dari yang tertulis di sini maka ini saya nanti tidak tanda tangan dulu

Emerha

Emmm

Nasip

Nanti mereka membuat lagi untuk membayar itung-itungan kekurangannya. Katakanlah seharusnya satu meter itu harganya 500ribu tetapkan mereka masih mnulis 450ribu. Berarti kan masih ada kekurangan 50ribu kali keluasaan

kemudian di kurangi 6 juta kemudian di kembalika 5% baru mereka bayar, baru ini saya tanda tangani baru saya

Emerha

Berarti sebelum mereka bayar belum melakukan validasi ya ? di cek fisik dulu ya ?

Nasip

Iya. Ya ini kan sebetulnya eu yang sebetulnya tidak perlu kami lakukan sebetulnya tetapi kalo si WP itu jujur lo dikarenakan kebanyakan yang namanya WP itu tidak jujur to ? kalo mereka jujur kita tidak perlu ke cek lapangan, kemudian kita juga katakanlah punya semacam nilai. Nilai dikasih rata-rata yang sudah ditetapkan dengan bupati. Atau walaupun kita sudah mempunyai masalah sistem kaitannya dengan peta blok kemudian di SK kan , nanti nilainya sekian kita tidak perlu ke lokasi. Tapi saat ini 30:13..belum punya untuk patokan seperti itu untuk ya kan kita sebagai Bank kita untuk BPATP sehingga kita perlu cek ke lapangan untuk meyakinkan karena notaris sendirikan sok rodp gimana enggeh kan pngen golek segel. Jadikan ngurangi harga transaksi yang ada. Sehingga memang kita memang masih butuh cek dilapangan, meskipun pada kenyataannya untuk belum bisa sevalid yang terjadi enggih.

Emerha

Itu di tempat pelayanan itu mulai yang dikonsultasi juga pak ? melayani wajib pajak juga pak ?

Nasip

Enggih. Jadi kalo yang di deoan ya kemarin baru saja saya tambahkan fasilitas untuk, dikarenakan kemarin untuk konsultasikan tidak satu tempat lagi. Kadang sok kita taro di kadang ya di ruang tamu yang di sana karena kan sekrang sudah ada mejanya sendiri. kita melayani konsultasi baik dari BPD, 31: 40 maupun yang lainnya

Emerha

Yang terakhir pak, ada evaluasi diakhir tahun ada untuk pendapatan?

Nasip

Evaluasi pendapatan itu dilaksanakan setiap triwulan

Emerha

Triwulan ?

Nasip

Iya

Emerha

Itu modelnya bagaimana evaluasi ?

Nasip

Evaluasinya justru nanti itu secara keseluruhan enggih. Tidak hanya khusus kita nanti biasanya di oleh pak sekda.

Emerha

Ohh berarti tingkat kabupaten semuanya.

Nasip

Heeh tingkat kabupaten semuanya, meskipun kita melakukan evaluasi secara intern. Itu setiap 3bulan jadi sebelum tingkat kabupaten melakukan evaluasi kita harus melakukan evaluasi dulu. Nantikan kita juga akan ditanyakan to, setiap unsur-unsur pendapatan dari gaji kita yang kita tangani itu sampai sejauh mana kemudian kenapa itukan juga harus kita siapkan.

Emerha

Ok pak sementara itu aja

Nasip

Enggih

Emerha

Makasih banyak pak.

Nasip

Sama-sama.

- c. Wawancara ke-3 dengan Nasip pada 31 Mei 2018, pukul 13.51 wib, di ruang kerjanya, Ruang Kabid Pajak. Nasip adalah Kepala Bidang Pendapatan di OPD BKAD sampai dengan saat ini. Tema utama wawancara adalah mekanisme pelaksanaan pajak yang transparan dan akuntabel.

Q.1. Mekanisme pembuatan SKP Daerah dan SKRD yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalo untuk ini pembuatan SKP Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau Surat Ketetapan Retribusi 0:10 Daerah

Nasip

Heem

Emerha

Itu dibikin di sini ya ?

Nasip

Heem ya itu kan

Emerha

Itu bagaimana mekanismenya pak ?

Nasip

Kaitannya dengan masalah yang self assisment, itukan dari pihak BP 0:31kan laporan.

Emerha

Heem

Nasip

Melapor. Melapor ini volume saya ini progresis saya dalam satu bulan kemudian setelah diterima kaitannya dengan masalah volume meraka kemudian, tapi kita juga tidak langsung serta merta sesuai dengan laporan enggih, kita melakukan kroscek dulu. Biasanya kan mereka kan cenderungnya kan mengurangi data, tapi kemudian setelah ada kepastian kemudian kita terbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah baru mereka menerima. Kemudian mereka bayar lewat bank. Untuk bukti setornya nanti disampaikan ke sini.

Emerha

Oh berarti, ketika mereka mau bayar. Mereka meminta SKP dulu.

Nasip

Iya

Emerha

Itu Prosedurnya standar ya pak?

Nasip

Iya

Emerha

Memang ada Pro tap yang seperti itu. Itu SKPnya di atur dengan ?

Nasip

Dengan anu SK kepala Abadi

Q.2. Mekanisme pembayaran pajak yang transparan dan akuntabel

Emerha

SK kepala BKD ya ? Kalo pembayarannya bagaimana pak ?

Nasip

Emh

Emerha

Dia menerima itu yang tunai tidak diambil di sini ?

Nasip

Kita, karena kita kan sudah apa memberlakukan untuk non tunai

Emerha

Heem. Non tunai

Nasip

Iya non tunai sehingga walau bagaimanapun, setelah meriman SKPD nantikan akan membayar lewat bank terdekat. Dan untuk saat inikan kita bisa lewat membayar dengan BPD juga bisa

Emerha

Emm

Nasip

Kemudian untuk yang selain BPD, BNI juga bisa kita adanya bekerjasama dengan Bank BPD dan BNI.

Emerha

Jadi sudah tidak ada lagi penerimaan di bendahara penerima?

Nasip

Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tinggal kecil: 3:24. Kemudian juga upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.

Emerha

Kalo lewat bank itu gimana pak, cara controlnya pak ?

Nasip

Gimana ?

Emerha

Kontrol kalo pembayarannya itu tepat waktu, bagaimana di kontrol pak ?

Nasip

Eu gini untuk kaitannya dengan masalah eu pajak inikan sebetulnya sudah di anu ya, sudah ada masa pajaknya.

Kemudian kita saat inikan baru, ya sebenarnya kita memerlukan. Karena kita anggap untuk waktu itu bagi mereka terlalu sempit. Karena hanya 7 hari kerja, nah kita akan merubah menjadi paling tidak 15. Supaya mereka mempunyai kekuasaan waktu dari SKPD yang kita sampaikan sehingga sesuai tepat waktu. Sehingga tidak kena denda. Nah nanti dari sistem itu akan kelihatan mereka segera membayar atau tidak dan itu kalo tidak muncul kemudian masalah pembayaran,

nanti akan di bidang kaitannya dengan masalah penagihan, maka perlu di tagih. Kemudian kaitannya dengan masalah kontrol kita selalu mengadakan rekonsiliasi dengan pihak BPD.

Emerha

Oh ada rekon

Nasip

Enngih ada rekon dengan pihak BPD.

Q.3. Mekanisme penerimaan pajak oleh bendahara penerima yang transparan dan akuntabel

Emerha

Kalo yang dibendahara penerimaan gimana pak controlnya? yang tunai ?

Nasip

Iya di sana sebetulnya juga anu ya, sebetulnya kalo harusnya juga sama. Nanti dari bendahara penerima itu mereka juga langsung nyetor, nyetornya juga langsung ke BANK ke kas. Tidak dipegang sampai dengan 24 jam gitu

Emerha

Emm

Nasip

Hari ini diterima nanti segera di setorkan.

Emerha

Setorkan

Nasip

Karena tidak boleh pegang uang lebih dari 24 jam

Emerha

Itu ada ketentuannya?

Nasip

Iya

Emerha

Itu diatur di mana pak ?

Nasip

Itu di di kalo tidak salah di perpu Ya

Emerha

Perbup ?

Nasip

Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu, kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke anggaran penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kasian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening

Emerha

Kalo untuk penerimaan bank, untuk kontrolnya gimana pak ? kontrol juga pak?

Nasip

Penerimaan bank. Kaitannya dengan eu pelaporan itukan nanti setiap bulan itu nati pihak bank menyampaikan laporannya.

Emerha

Laporannya ?

Nasip

Kemudian seperti ada pembayaran transfer. Itu nanti kita juga langsung diberitahu. Ini ada transfer dari PT ini . Nah kita nanti melacak. Oh ternyata itu untuk pembayaran untuk pajak reklame itu nanti kita kroscek. Mungkin nanti temen kita ada yang nyari, terus kemudian oh ternyata tidak terbayar terus nanti dimasukan ke aplikasi. Sehingga nanti ada semacam itu enggih, data itu ini sudah ini belum, ini sudah ini belum, di aplikasi ada.

Emerha

Aplikasinya connect gak pak ? online. Tadi bapak bilang simda pendapatan sama di BPD.

Nasip

Kalo yang *connect* itu cuman yang kaitannya dengan masalah BPD. Kaitannya dengan BPD/PBB 09:25, datanya datanya BPD/PBB. Tapi kalo simda pendapatan dengan BPD itu tidak connect. Cuman nantikan BPD memberikan data kepada kita. Ternyata ada transfer sekian. Nah itu nanti kita yang ajukan ke simda pendapatan. Sama

Emerha

Berarti Cuma PBB yang online? Kenapa yang lain

Nasip

Ya PBB

Emerha

Kenapa hanya PBB (09:31) yang online?

Nasip

Ya untu yang lainnya memang kita belum anu enggih, belum siap. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengarahkan pada transaksi non tunai. Jadi kalo PBB bayar langsung bisa langsung ketemu. Maka katakanlan ATM itukan BPD ini lagsung muncul atas nama ini, oh ya bener berarti lagsung masukan angka. Tetapi kalo seperti pajak reklame itu cuman menuju ke rekening. Ini saya membayar untuk reklame ke iklan ini nomor rekeningnya nanti sudah persen lagi. Sehingga kita harus nyari lagi tapi yang kecil-kecikan langsung to. Nah itu nanti berkaitan dengan masalah system aplikasi sekrang kita bisa baru input yang BPD. Cuman yang kalo harapan dari ATK diharapkan semuanya itu bisa secara online, tetapi ya itu tadi mengingat kitakan kesiapannya kaitannya dengan masalah aplikasi, brangkas itukan. Jadi arah kita sekarang baru non tunai. Sehingga masyarakat bisa langsung membayar lewat bank, tidak usah ke BUD membawa uang tidak usah.

Emerha

Jadi kalo PBB yang baru online, mungkin pendapatan PBB berapa atau gimana? Dari seluruh sumber pendapatan yang lain.

Nasip

Kalo dari sumber pendapatan, kan ini terbesar PBB

Emerha

PBB ya ?

Nasip

PBBkan untuk tahun ini kan dengan target yang sedikit ya blas

Emerha

Nah kalo sudah menetapkan sistem non tunai udah gak ada bendahara penerimaan lagi ya ?

Nasip

Ya tetep ada.

Q.4. Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Ok kalo tadi soal SPJ penerimaan. Jadi ketika bendahara sudah memuat secara tunai, yang non tunai, nah itu pertanggungjawabannya gimana pak ?

Nasip

Sebetulnya pada akhirnya sama enggih. Karena kan sebenarnya kan cuman anu aja kita itu eu memberikan bantuan pada mereka sebenarnya yang merekakan bayar bisa langsung bayar ke bank enggih, ya Cuma mungkin karena mereka sesuatu hal alasan wes anu harusnya, tapi nanti setelah kita terima ya langsung kita setorkan di bank. Karena kita tidak boleh memegang uang setoran selama 24 jam.

Emerha

Berarti SPJ yang dimasukan ke, jadi pendapatan yang di SKPD itu kan dipertanggung jawabkan? Bendahara mempertanggungjawabkan dalam masalah SPJ penerimaan.

Nasip

Heem

Emerha

Nah itu diverifikasi di sini ya pak?

Nasip

Iya

Emerha

Itu bagian mana pak ?

Nasip

Kalo kaitannya dengan masalah pendapatan nantikan di anu e itu di anu itu di keuangan nanti yang memverifikasi. Kalo yang gini itukan hanya sebatas yang menangani secara teknis. Secara teknisnya, tetapi kalo kaitannya dengan masalah keuangan, itu nanti ada kesalahan teknis, nah itukan di anu e istilahnya Pejabat Pengelola Keuangan.

Emerha

Oh berarti dibidang pendapatan ya yang bidang evaluasi itu ya ?

Nasip

Iya. Karena kan pada tidak hanya saya enggih, karena pendapatan ada dari yang diluar. Saya cuman badan permasalahan pajak saja.

Emerha

Kalo soal administrasi, ketika melakukan pembayaran non tunai itu gimana pak ? harus diminta lagi atau sederhana saja pak ?

Nasip

Kalo non tunai itu pada fungsinya dengan eu pada kalo tidak salah tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan cuman yang membedakan hanya sistem membayarnya saja to? jadi ya kalo non tunai itu ya menulis langsung, begitu di masukan rekening ya menjabarkan bukti kemudian dikirimkan kepada kita. kalo yang tunai ya cuman langsung membayar sesuai dengan surat ketetapannya itu, kemudian ya mengisi Surat keterangan Pajak Daerah, SKPDnya kemudian di isi pihak BPD

kalo kita sudah membayar.

Emerha

SKPD daerah itu yang non tunai itu di catet di mana pak ?

Nasip

Itu tuh sama di penerimaan. Jadi bendahara penerimaan itu nanti akan mengentry tunai maupun non tunai. Tapi pada prinsipnya tunai juga nanti akhirnya kan non tunai, dikarenakan kita menyetorkan ke bank bukti itu kan menyetorkan di

Emerha

Berarti SKPD satu itu ditunjukan ke bendahara penerimaan?

Nasip

Heem.

Emerha

Berarti ada 3 yang terkait ya, langsung ke bidang pajak, bank, bendahara penerimaan.

Nasip

Iya

Emerha

Itu simda pendapatan itu bisa diakses dari luarnya pak,

Nasip

Ndak bisa.

Emerha

Ndak bisa ya.

Nasip

Itu kan punya milik, ya kita kan ya milik yang bikin itu kan anu BPKP. Jadi yang pertama BPKP itu ya simda keuangan

Emerha

Berbeda enggak ?

Nasip

Kalo simda keuangan itu mulai dari perencanaan. kemudian Pembuatan dokumennya sampai dengan nanti sisanya, akhir laporan keuangan, lah kemudian untuk yang simda pendapatan ini, ini juga yang membuatkan adalah BPKP juga dalam rangka ya itu tadi penanganan masalah keuangan pendapatan supaya tidak terjadi kebocoran secara berlebih

Emerha

Terus ini pak, kalo sumber pendapatan dimulai dari perencanaan juga pak ? sampai

Nasip

Itu iya. Karenakan mereka juga harus mengentry data to

Emerha

Emm

Nasip

Cuman hanya khusus untuk pendapatan. Tapi kan disana sudah kita pilah-pilah. Pilah pilahnya kaitannya dengan masalah BPD. Kalo BPD itu euu karena yo agak rumit. Itu juga belum dipilahkan dengan subbag kita. kemudian umpame pajak juga kan ada sendiri, restaurant ada sendiri, nah nanti di aplikasi itukan memang memudahkan kita manakala kita dimintai sekarang ini sampai bulan ini yang mana saja yang sudah mana yang belum nanti akan kelihatan juga. Cuman masalahnya kita nanti rajin selalu untuk mengentry umpanya katakanlah ada pembayaran langsung kita masukan, kemudian kalo tidak ada yang menyelesaikan kewajiban nanti akan muncul di aplikasinya itu akan muncul perlu penagihan. Itu juga ada, tinggal nyetak nanti seperti penagihan perbulan itu nanti tinggal nyetak, formatnya sudah ada. Jadi ko kalo tidak bayar ini sudah jatuh tempo sudah terlambat, nah itu nanti kena denda. Nah itu juga muncul itu. Nah itu nanti kena denda

Emerha

Antara simda pendapatan dengan simda keuangan itu conect pak ? Online?

Nasip

Bisa

Emerha

Tapi kalo misalkan simda pendapatan mau bikin laporan keuangan tinggal minta data keuangan, atau harus input lagi

Nasip

Jadi gini eu dari pihak BPKD memang sampai saat ini belum bisa dilakukan secara link. Tetapi bisa dilinkkan secara export import

Emerha

Export import

Nasip

Enggih. Cuman kemarin eu dari pihak BPKD sendiri inikan bagaimana enggih, melaksanakan penyempurnaan seperti yang simda keuangan itu juga disempurnakan pada, ya nanti harapannya untuk semua juga bisa langsung masuk ke link pihak keuangan. Sehingga nanti simdamembuat laporan keuangan dengan masalah dibuatkan itu sudah tidak lagi minta di simda pendapatan di sini, tetapi bisa langsung ke sana. Tetapi sekarang masih mungkin bisa tapi dengan cara export import.

Untuk itu yang bisa dilakukan

Emerha

Kalo misalkan terjadi penyimpangan pak, untuk pendapatan atau ada mekanisme tersendiri?

Nasip

Maksudnya pa ?

Q.5. Mekanisme penyetoran penerimaan yang transparan dan akuntabel

Emerha

Ada penerimaan di bendahara, ketika di setorkan, nah itu gimana ada mekanismenya sendiri ?

Nasip

Ya tentunya mesti ada enggih karena kitakan selalu konfirmasi. Seperti tadi saya sampaikan manakala ada WD, kemudian di simda tidak munculkan otomatis munculkan tagihan lah kalo. Lah kalo tagihan kita konfirmasi tapi gak keto, ketika sudah menyetorkan, jadi kan mau gimana kalo mereka tidak menyerahkan secara tunai takutnya itu akan kita, katakanlah kalo memang belum di setor ya segera di setor. Kalo memang istilahnya dipakai ya mohon segera di ganti tapi ya setahu saya seperti itu belum pernah terjadi

Emerha

Emmp ya itu yang di depan saya lihat

Nasip

Iya

Emerha

Pelayana apa itu?

Nasip

Ya itu anu yang melayani kaitannya dengan masalah pajak yang kita tangani karena kan ada 10 jenis. Yang tadi saya sampaikan, kalo yang kebetulan tidak membayar secara non tunai berartikan mereka membayar secara tunai. Itu juga bisa dilakukan itu. Nah itu juga pelayanan kaitannya dengan masalah konsultasi PBB. Kemudian kaitannya dengan masalah reklame, kemudian dengan masalah biaya perolehan hak perolehan dan bangunan, kemudian pajak di bulan pajak, tapi mayoritas untuk yang di depan ini yang kesehariannya itu adalah yang paling banyak itu adalah, saat ini pelayanan untuk euu pajak bea perolehan bangunan dan BPD.

Emerha

Eummm

Nasip

Itu staf mesti ada karena yang BPD itu kaitannya dengan masalah SPP itu mereka banyak mengajukan berubah. Berubah karena karena ada yang berbeda, berubah karena kisaran pajak yang tidak sesuai. Berubah karena jenis pajaknya tidak ada. Berubah karena oubyek dari subyek nya sendiri juga dika ada. Ada yang ganda, ada yang sebetulnya sudah pecah tapi masih satu, nah itu untuk saat ini kita pelayanan seperti itu. Kemudian kalo biaya perolah bangunan ini sebetulnya mereka sebelumnya tidak bayar dulu tapi kemudian terus kita validasi . harus kita validasi bahwa untuk 24:58..sudah eumm bayar sehingga nanti proses di BPN juga dilanjutkan. Karena kalo kita tidak validasi, kemudian tidak bisa memproses karena memang pengukurannya seperti itu.

Emerha

Emm

Nasip

Tapi mereka anu membayarnya di bank

Emerha

Itu gak ada bank ya?

Nasip

Banknya di depan

Nasip

Ooh berarti semua pelayanan di situ ya, mulai dari KRT makanya saya sebetulnya itu, pengennya itu pelayanan di depan itu sayakan berdampingan dengan, sehingga begitu ada yang datang, ada uang tunai ya langsung kita buat kan ya katakanlah SKPD nya suruh bayarkan nanti tinggal kita menerima bukti pembayarannya. Itu yang dilihat, jadi seperti ini, ini kan dari PT Pelangi Jaya Industri. Ini mereka harus membayar biaya pajak sebesar 177.000.523, nah kalo sebesar inikan resiko to ? nah ini mereka langsung di bank membayar, ini sudah membayar dari bank BPD ini. Nah setelah ini baru disampaikan ke pelayanan di depan itu. Nantikan saya validasi

Emerha

Oh mereka validasi . sana ya?

Nasip

Kalo mereka sudah bayar. Iya tapikan ini bayarnya di Bank, tidak di depan di bank langsung di bank. Yang ke sini tinggal berkasnya ini karena ini yang format ini sudah di anu di bank. Jadi karena ini lewat apakah itu BPN, apa itu Notaris kemudian mereka sudah membuat rincian ini, kemudian mereka bayar cicilan validasi yang sesuai. Kalo tidak sesuai dengan itung-itungan kita nanti eu saya belum tanda tangan. Mereka harus membuat lagi kekurangan apa, inikan yang

menghitungkan mereka bahwa saya membeli tanah dengan harga sekian. Berarti say dikurangi dengan 60 juta sebagai anu nilai objek paja yang tidak pajak. Nilai pajak yang gak kena pajak itu kan 60juta nah saya 5% itukan yang 5% itukan yang harus mereka bayar pada kita dari pajak atas perolehan tanah nah kemudian mengajukan ini dokumen ini ke kita. ya sudah bayar untuk saat ini, kemudian kita cek lapangan dengan berdasarkan ini alamat NOP dimana kita cek di sana. Kalo di sana transaksinya itu dari informasinya yang ada di sana itu lebih tinggi dari yang tertulis di sini maka ini saya nanti tidak tanda tangan dulu

Emerha

Emmm

Nasip

Nanti mereka membuat lagi untuk membayar itung-itungan kekurangannya. Katakanlah seharusnya satu meter itu harganya 500ribu tetapkan mereka masih mnulis 450ribu. Berarti kan masih ada kekurangan 50ribu kali keluasan kemudian di kurangi 6 juta kemudian di kembalika 5% baru mereka bayar, baru ini saya tanda tangani baru saya

Emerha

Berarti sebelum mereka bayar belum melakukan validasi ya ? di cek fisik dulu ya ?

Nasip

Iya. Ya ini kan sebetulnya eu yang sebetulnya tidak perlu kami lakukan sebetulnya tetapi kalo si WP itu jujur lo dikarenakan kebanyakan yang namanya WP itu tidak jujur to ? kalo mereka jujur kita tidak perlu ke cek lapangan, kemudian kita juga katakanlah punya semacam nilai. Nilai dikasih rata-rata yang sudah ditetapkan dengan bupati. Atau walaupun kita sudah mempunyai masalah sistem kaitannya dengan peta blok kemudian di SK kan , nanti nilainya sekian kita tidak perlu ke lokasi. Tapi saat ini 30:13..belum punya untuk patokan seperti itu untuk ya kan kita sebagai Bank kita untuk BPATP sehingga kita perlu cek ke lapangan untuk meyakinkan karena notaris sendirikan sok rodp gimana enggeh kan pngen golek segel. Jadikan ngurangi harga transaksi yang ada. Sehingga memang kita memang masih butuh cek dilapangan, meskipun pada kenyataannya untuk belum bisa sevalid yang terjadi enggih.

Emerha

Itu di tempat pelayanan itu mulai yang dikonsultasi juga pak ? melayani wajib pajak juga pak ?

Nasip

Enggih. Jadi kalo yang di deoan ya kemarin baru saja saya tambahkan fasilitas untuk, dikarenakan kemarin untuk konsultasikan tidak satu tempat lagi. Kadang sok kita taro di kadang ya di ruang tamu yang di sana karena kan sekrang sudah ada mejanya sendiri. kita melayani konsultasi baik dari BPD, 31: 40 maupun yang lainnya

Emerha

Yang terakhir pak, ada evaluasi diakhir tahun ada untuk pendapatan?

Nasip

Evaluasi pendapatan itu dilaksanakan setiap triwulan

Emerha

Triwulan ?

Nasip

Iya

Emerha

Itu modelnya bagaimana evaluasi ?

Nasip

Evaluasinya justru nanti itu secara keseluruhan enggih. Tidak hanya khusus kita nanti biasanya di oleh pak sekda.

Emerha

Ohh berarti tingkat kabupaten semuanya.

Nasip

Heeh tingkat kabupaten semuanya, meskipun kita melakukan evaluasi secara intern. Itu setiap 3bulan jadi sebelum tingkat kabupaten melakukan evaluasi kita harus melakukan evaluasi dulu. Nantikan kita juga akan ditanyakan to, setiap unsur-unsur pendapatan dari gaji kita yang kita tangani itu sampai sejauh mana kemudian kenapa itukan juga harus kita siapkan.

Emerha

Ok pak sementara itu aja

Nasip

Enggih

Emerha

Makasih banyak pak.

Nasip

Sama-sama.

- d. Wawancara ke-4 dengan Nasip pada 17 Juli 2018, pukul 12.47 wib, di depan ruangan bidang Pajak. Nasip adalah Kepala Bidang Pendapatan di OPD BKAD sampai dengan saat ini. Tema utama wawancara adalah kendala, penyebab kendala, dan solusi yang sudah dilaksanakan atas permasalahan yang dihadapi di bidang pajak (RM4).

Emerha

e... selama bapak jadi Kabid apa permasalahan yang sering bapak hadapi?

Nasib

Ya... tadi di depan sudah sampaikan bahwasannya be.. berada di bidang pajak ini berurusan dengan e.. wajib pajak yang namanya wajib pajak itu adalah cenderung untuk berbuat cauran menghindari ataupun tidak mau membayar, sehingga kalo ada laporan pajak itu, pasti tidak pernah ada yang bener, mesti ada selisih dengan perhitungan kita, pertama. Kemudian yang kedua e.. selalu bahwa e.. itungan kita itu terlalu besar, kemudian mesti mereka merasa keberatan atas penetapan pajak yang harus mereka bayar, itu e.. merupakan permasalahan yang memang harus kita selalu hadapi ya.. dengan adanya berbagai permasalahan yang kemudian cenderung e.. memanipulasi data itu kan, kita kan perlu.. perlu ada pendekatan bagaimana mereka

Emerha

Itu apa penyebabnya pak mereka bisa jadi seperti itu?

Nasib

Ya pengennya mereka itu kan, seng jenenge sudah punya hasil itu kan yo ora pengen di elongi to mas, heheheeh. Lha nek prinsipere mereka itu kan, mosok seng nyambut gawe kok mereka seng nampo duete

Emerha

Itu memang budaya masyarakat memang seperti itu?

Nasib

Iya..

Emerha

Terus selama ini solusi yang sudah bapak laksanakan apa untuk mengatasi masalah itu?

Nasib

Kita e.. nganu.. selalu melakukan pendekatan pada mereka, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab kaitannya dengan masalah pelaporan e.. hasil mereka itu kan kaitannya dengan masalah pajak, kemudian yang namanya pajak itu kan tidak.. kalo bisa kan jangan di.. manipulasi karena kan ada hukumnya, sehingga

Emerha

He'em.. dengan.. dengan cara apa bapak akan melaksanakan solusi itu?

Nasib

e.. kita yang pertama e.. kaitannya dengan masalah apa yang sudah di.. temukan oleh BPK kita sampaikan, katakanlah bahwa BPK menemukan hal semacam ini, dan ini perlu ditindaklanjuti gitu. Kemudian e.. kita juga.. melakukan kerja sama yang.. yang ringan.. ringan.. dulu dengan inspektorat. Kaitannya dengan masalah PBB ini kan biasanya yang sering to, lha.. kemudian kalo masalah untuk e.. melakukan percepatan, penagihan di tingkat desa, di tingkat kecamatan kita melibatkan inspektorat. Dengan inspektorat itu berbicara itu mereka sudah merasa takut lebih dulu berbeda dengan kalo hanya kita saja yang berbicara. Dan kemudian kita juga punya.. punya e.. koordinasi dengan bagian hukum dan juga ada akses ke kejaksaan sudah membuka, tapi ini kita lakukan kepada memang yang betul-betul wajib pajaknya sudah tidak bisa diatasi lagi gitu

Emerha

Okey...

Nasib

Jadi bisa dilimpahkan ke.. Kejaksaan

Emerha

Ehm.. kalo soal transparansi pak, apa hambatan bapak untuk bersifat.. bersikap transparan ke wajib pajak?

Nasib

Eh.. sebetulnya kalo.. masalah transparansi kita sudah sampaikan bahwa saya minta kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran dengan menitipkan dari pegawai kita, justru saya harapkan untuk dibayar melalui Bank semuanya saja, termasuk ini juga kita sudah di.. dipersiapkan oleh bidang anggaran untuk membuat peraturan Bupati tentang transaksi non tunai itu kemaren kita.. dari bidang pajak sendiri, saya sudah mengusulkan untuk e.. enam jenis pajak yang dibayarkan secara non tunai

Emerha

Non tunai.. itu pajak apa aja pak semua enam?

Nasib

PBB, kemudian.. e.. Hotel, Restoran, Air Tanah, kemudian PBJ dan yang satunya lagi PBHTB. Kemudian kalo yang lainnya, itu memang saya belum.. bisa.. atau belum mewajibkan karena ini berkaitan dengan masalah pemasukan

Emerha

Kenapa pemasukannya?

Nasib

Contohnya pajak hiburan, pajak hiburan itu kan sifatnya insidentil, kemudian kalo kita wajibkan dengan non tunai. Padahal hiburan itu katakanlah ada yang cuman seminggu, kemudian kita belum sempat ketemu hiburan sudah selesai rampung, kita wes lolos ora sido oleh pajak hiburan. Makanya kita untuk pajak hiburan ini biasanya kita mendatangi kemudian menanyakan berapa, kemudian omsetnya berapa kita tetapkan, kemudian kita tagih untuk pajak hiburannya..

Emerha

Selama ini memang sudah ada penyelewengan tentang pembayaran seperti yang bapak katakan tadi, jangan lewat staf saya?

Nasib

e.. kalo sifatnya... penyelewengan belum ada cuman e... saya kan kuatir

Emerha

Antisipasi?

Nasib

Ya.. mengantisipasi, kemudian juga termasuk kaitannya dengan masalah memberikan kemudahan pada mereka. Kalo mereka kan saya tidak akan bayar kalo tidak diambil ke sini, itu kan malah resiko to.., ah.. kemudian dengan kita memberikan pun jenengan mboten.. tidak usah datang ke kantor, jenengan membayar aja lewat Bank terdekat nanti sudah sampai dengan rekening ini

Emerha

Itu kalo.. yang nantang untuk pembayaran non tunai ini atau kenapa harus non tunai mereka, atau karena jumlahnya mereka besar?

Nasib

Ya.. pertimbangan saya memang itu yang sudah memungkinkan dan memang sudah jumlahnya besar-besar, juga pun mempermudah mereka

Emerha

Kalo soal wajib pajak sudah.. sudah.. sudah.. terbiasa dengan pembayaran non tunai?

Nasib

Sudah.. sudah..

Emerha

Dengan cara mengontrolnya seperti apa pak contohnya?

Nasib

e.. gini.. kalo kaitannya dengan masalah.. biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan nggak usah datang ke sini, bayar di Bank BPD mana saja bisa nanti kemudian me.. nunjukin waktu bukti pembayaran itu nanti di sini untuk validasi sudah saya tanda tangan. Kemudian reklame.. reklame itu kan kebanyakan yang punya kan tidak berdomisili di sini, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, nah.. mereka nanti bayar dengan sistem transfer nanti terus cuman memberi tahuin kepada kita bahwa saya sudah bayar lewat transfer, nah.. nanti..

Emerha

Oh... non tunai itu transfer ya pak ya?

Nasib

Ya.. kemudian BPD nanti akan memberika laporan kepada kita ini ada transferan sekian untuk reklame ini nanti kita cocokkan

Emerha

Pembayaran lewat e-banking nggak ada, misalkan lewat sms Banking, lewat Hp Android?

Nasib

Rencana nanti untuk Perbup yang baru itu bisa

Emerha

Itu bisa ya.. dengan cara gitu

Nasib

Ya.. nggeh bisa.. karena kan nanti juga harus koordinasi dulu to dengan pihak Bank, jadi rencananya sudah arah ke sana, jadi yang namanya non tunai ta.. tadi tidak hanya di.. di APMD kaitannya dengan transfer tapi dengan E-Banking, dengan sms Banking juga bisa

Emerha

Oh.. ya..

Nasib

Cuma sekarang kita susun dulu perangkatnya

Emerha

Ya.. tanggapan dari.. wajib bapak gimana itu non tunai, katakanlah mereka yang.. yang gagap teknologi kan tidak semua mereka punya?

Nasib

Ya.. betul, e.. bahwa bagi mereka yang memang atau sudah terbiasa dengan penuh dengan kesibukan itu.. justru mereka senang bisa membayar dimana saja tidak harus ada dipelayanan tidak perlu repot repot membawa uang, tetapi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan urusan dengan Bank dengan kartu semacam itu, kelihatannya kok menganggap wah.. ribet gitu padahal tidak, tapi ya.. biasa.. tapi ya mayoritas masih bisa

Emerha

Rata-rata begitu kalo di awal-awal ya mereka masih kaget?

Nasib

Ya.. ya.. nggeh..

Emerha

Okey pak gitu dulu hasil wawancara saya, kalo misalkan kurang saya masih

Nasib

Oh nggeh..

Emerha

Makasih banyak pak

Nasip

Nggeh sama-sama..

- e. Wawancara ke-5 dengan Nasip, pada Selasa, 18 September 2018, pukul 12.41 WIB di ruang bidang pajak. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Saya nanti ada wawancara kan nama... kan mau tertulis di sini, kan nama... nama bapak jadi kalo bapak tidak keberatan saya tulis namanya nanti... nama lengkap...

Nasip

Hem...

Emerha

Yang seperti ini kan... ini tercetak jadi..., kan biasanya kalo... mengandung rahasia itu kadang hanya inisial saja

Nasip

Ini sudah... maksudnya ini atau bukan

Emerha

Ya...

Nasip

Maksudnya ini atau bukan

Emerha

Ya., maksudnya contohnya seperti ini Cuma nanti kan ada namanya bapak nanti di sini, Cuma nggak tahu tadi saya sudah sempat bawa...

Nasip

Hehehehe, ya... tadi nggak ditekuk dulu...

Emerha

Ya... Cuma ada di komputer ini ada di laptop... saya bukakan. Kalimat-kalimat hasil transkripnya, itu Cuma konfirmas, ini diketik, kayaknya salah baa... salah bawa saya ini. Ya... kemudian itu pak saya... mau... minta foto... untuk yang. Terus satu... dua... tiga..., satu... dua... tiga..., nah... boleh nih pak...

Nasip

Lho..., untuk di mana ini

Emerha

Ini...

Nasip

He'em...

Emerha

Di Bromo pak...

Nasip

Bromo

Emerha

Iya... masih... bikin penelitian kemaren sempat juga ke Bromo, heheheh

Nasip

Hem... kalo ke sana itu berarti sampe sana... enake opo sore...

Emerha

Iya... berangkatnya tengah malam...

Nasip

Iya...

Emerha

Sore ya... sore sekitar jam 12 malam, tiba jam 4 pagi, masih gelap-gelap gitu

Nasip

Jeep

Emerha

Jeep dari malang. Ini hasil wawancara saya dengan bapak ini nanti kan... nantikan saya akan pindah ke laporan ki... jadi.. nanti bagian bawah itu ada nama bapak yang... saya akan tulis lengkap nama bapak. Jadi saya tadi saya izin ke bapak, apakah bapak tidak keberatan saya mau tulis lengkap namanya bapak karena memang kaidah penulisan tesis itu untuk ada sumbernya. Ini ada beberapa wawancara ini...

Nasip

Dan terdapat sama dengan ini

Emerha

Ya...

Nasip

Ada di tempat jawaban

Emerha

Oh ya...

Nasip

Kan sama ini bareng...

Emerha

Oh ya... sama bapak ya... ya nanti saya ubah... ini wawancara saya kemaren udah saya transkrip tapi tidak semua saya ambil yang... yang urgent saja ya..., nggak ada yang mengandung rahasia kan...

Nasip

Nggak... nggak ada...

Emerha

Begitu nanti tinggal saya pindahkan ke... laporan saya... ini semua ini. Kalo teman saya yang di KPK penelitiannya nah itu... inisial pak... karena banyak mengandung rahasia hem...

Nasip

Udah pindah...

Emerha

Hem...

Nasip

Udah di pindah...

Emerha

Udah... banyak nih pak, ini kan beberapa kali saya wawancara kan

Nasip

Yang itu to... lewat rekaman itu to...

Emerha

Ya... lewat rekaman. Okey... udah jadi gitu aja pak...

Nasip

Udah gitu aja...

12. Taufiq Amrullah

- a. Wawancara ke-1 dengan Taufik, pada Selasa, 8 Mei 2018, pukul 11.19 WIB di Kantin MEP UGM. Taufik Amrullah adalah Kepala Bidang Aset BKAD dan telah menduduki jabatannya selama 6 tahun sampai dengan saat ini. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang mekanisme pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo (RM2).

Q.1. Dasar hukum pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kulon Progo

Emerha

Landasan hukum aset daerah, pengelolaannya diatur dimana, perda atau perbub?

Taufik

Ada, peraturan daerah dan peraturan bupati

Emerha

Itu satu paket dengan pengelolaan keuangan daerah yang ada di perbendaharaan?

Taufik

Ohh, terpisah. Terpisah.

Emerha

Itu diatur mulai dari perencanaan ya, pak?

Taufik

Eeeh di, untuk yang aset daerah ya? Iya. Seperti permendagri 19. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan pengadaan.

Emerha

Itu di Perda nomor berapa ya pak?

Taufik

Perda-nya, sebentar. Nanti saya carikan.

Emerha

Saya cek di JDIH-nya, tidak dapat ya pak?

Taufik

Ada. Di JDIH-nya masih lama, Perda lama itu. Tahunnya 2011 kalau tidak salah. Sini saya carikan.

Emerha

Berarti perda dan perbub-nya itu semuanya diturunkan dari Permendagri 19 ya?

Taufik

Yang Perda-nya masih turunan, eeh apa, eeeh masih Permendagri 17, tapi Perbub-nya sudah mengacu pada Permendagri 19. Tapi ini sekarang kita sedang mengajukan, eeeh Perda terbaru. Revisi. Iya revisi Perda. Ini tinggal apa namanya, tinggal kita eeh, pengesahan. Nanti untuk nomor dan sebagainya nanti saya kirimkan.

Q.2. Model pengelolaan aset daerah yang transparan (indikator dan alat ukurnya)

Emerha

Dalam hal pengelolaan aset, apa ada sistem atau mekanisme keterbukaan dalam mengelolanya, mulai dari perencanaan sampai pengadaan?

Taufik

Kalau kita dimulai dari RKBMD. Hanya saja apa namanya, di dalam pelaksanaannya nanti pada saat usulan RKBMD ada, itu finalisasinya kan ada plafonisasi anggaran. Jadi dari segala usulan yang ada, paling masuk sekitar 30% ada. 30% dari usulan yang ada.

Emerha

Itu usulannya dari setiap SKPD?

Taufik

Dari SKPD. Jadi mekanisme kita apa namanya. Ada..ada, mereka mengusulkan, kemudian kita lakukan desk bersama dengan Bappeda, kemudian masuk di program perencanaan Bappeda.

Emerha

Lalu bagaimana menyaring kebutuhan masing-masing di setiap SKPD itu?

Taufik

Eeh, walaupun standar, standar apa namanya, standar prasarana kan masih diatur umum, Cuma kita mempertimbangkan surplus, kondisi surplus yang ada berdasarkan data tahun sebelumnya. Jadi kita kan berdasarkan tipe yang ada kita sandingkan dengan usulan. Jadi kalau mereka usulannya eeeh dirasa melebihi dari yang sewajarnya, ya kita lakukan sesuai kebutuhan.

Emerha

Hasil setelah dikompilasi kebutuhannya, apakah itu diumumkan kembali kepada SKPD? Bagaimana mereka tahu kalau usulan mereka diterima?

Taufik

Jadi apa namanya, hasil-hasil desk kita itu, semuanya kan kita buat rangkap dua, kita kembalikan ke SKPD kemudian kita serahkan ke Bappeda. Setelah masuk dalam Bappeda nanti kategorinya kan masih disandingkan dengan plafon yang ada. Nah nanti semuanya dikembalikan lagi kepada SKPD, nanti dari prioritas yang sudah muncul tadi mana yang menjadi prioritas utama yang akan masuk di dalam apa namanya APBD, RKA. Jadi begitu.

Emerha

Kalau soal transparansi pengelolaannya, apakah menggunakan website atau aplikasi internal?

Taufik

Untuk perencanaan? Kalau untuk perencanaan, belum. Tapi untuk penatausahaan kita upload di. Untuk penatausahaan kita upload di website. Pelaporannya juga kayak begitu. Pasti dalam bentuk pdf karena untuk SIM Aset kita masih offline, sehingga hasil akhirnya adalah hasil audit yang kita upload bersama dengan laporan keuangan.

Emerha

Itu ada aplikasi tersendiri untuk aset ya pak? Seperti Simbada?

Taufik

Ohhh ada, ada. Cuma offline, karena offline kemudian yang kita upload hanya laporan akhir, laporan akhir dari apa namanya, eeeh yang setelah diaudit BPK.

Emerha

Kalau untuk keluar, yaitu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat? Yang di luar lingkungan SKPD apakah ada untuk aset?

Taufik

Ohh, gak. Kalau untuk aset hanya untuk lingkungan pemkab saja.

Q.3. Transparansi pengelolaan aset dibangun dan dilaksanakan dengan model sistem informasi

Emerha

Kalau dalam konteks pengelolaan aset, menurut Bapak definisi transparan itu seperti apa?

Taufik

Dari sisi yang mana? Pengelolaan aset? Dari sisi pengelolaan aset kan kalau kita bicara aset itu baik dari perencanaan, eeeh yang paling utama kan ada di dalam perencanaan ini. Jadi dalam perencanaan ini, semua usulan mestinya sudah ter apa namanya, terdokumentasikan di e-planning-nya Bappeda. Kalau itu sudah masuk, dalam artian setelah ada rencana kebutuhan barang, kemudian kita lakukan desk, kemudian semua hasilnya ini diserahkan kepada Bappeda sehingga masuk dalam e-planning-nya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi berdasar pada pagu yang ada. Kemudian setelah di APBD ditetapkan, ini transparansi pengelolaan asetnya kan di masalah pengadaan barangnya. Nah di sini eeh kita kan menggunakan ULP semuanya. Jadi semuanya ikut juga dengan mekanisme apa namanya eeeh pakai LKPP itu, sehingga saya rasa itu adalah sebuah transparansi dalam sistem pengadaan. Kemudian pada saat untuk setelah pengadaan selesai, untuk pemanfaatan dan sebagainya itu, itu ranahnya di SKPD/ di pengelola. Itu internal saya rasa. Tidak perlu

orang lain tahu, termasuk juga penatausahaan. Tapi di dalam laporan pada saat membuat apa, neraca daerah, itu perlu diungkapkan berapa sih kekayaan miliknya pemerintah daerah. Itu dimunculkan di dalam apa namanya, dalam eeh, dalam website. Mungkin itu.

Emerha

Terkait dengan pengadaan aset tadi, apa peran bidang aset di dalam ULP?

Taufik

Nah, kebetulan eeh sejak tahun 2012 di kabupaten Kulon Progo, semua pengadaan kita serahkan di OPD. Jadi kita hanya memberikan rambu-rambu saja di dalam,.. artinya bahwa eeh pada saat desk, ini butuh kendaraan berapa, seperti itu, itu hanya rambu-rambu dalam perencanaan. Pasca apa namanya APBD sudah ditetapkan itu ranahnya di masing-masing OPD. Tapi untuk daerah-daerah lain mungkin masih ada yang apa namanya, ehh pengadaannya ada di bidang aset.

Emerha

Kalau transparansi lewat media sosial, ada juga kah pak? Apa ada akun FB, atau IG selain website?

Taufik

Tidak ada.

Q.4. Akuntabilitas pengelolaan aset dibangun dengan model sistem informasi (website)

Emerha

Kalau soal akuntabilitas pak, menurut Bapak akuntabilitas dalam konteks pengelolaan aset itu seperti apa?

Taufik

Iya kalau menurut saya bahwa konsepnya kan di dalam penatausahaan, itu ada catatan yang sesuai dengan apa namanya, kondisi ril barang. Ada masalah mendasar di aset itu kan masalah kan barangnya ada, catatannya gak ada. Catatannya ada barangnya gak ada. Ini yang membuat beberapa daerah tidak WTP kan, permasalahannya kan hanya semata berkisar di situ aja. Jadi pertanggungjawaban secara bisa dipertanggungjawabkan kalau selama barang itu ada, catatannya juga ada. Saya rasa itu.

Emerha

Apa upaya ril yang dilakukan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset? Saya lihat di website ada apel kendaraan, itu apa? Apakah itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah?

Taufik

Apel kendaraan itu kan salah satu bentuk untuk pengamanan apa..pengamanan kendaraan. Jadi kendaraan kan kita eeh serahkan atau kita eeh..dimanfaatkan, yang pertanggungjawabkan adalah pertanggungjawaban pejabat struktural atau fungsional tertentu. Eeh itu kan secara berkala kita lakukan apel kendaraan.

Emerha

Itu dasar hukumnya apa, itu kebijakan atau memang ada peraturannya?

Taufik

Ehh..ya kita selama ini untuk..untuk meng...eeeh, hanya ini sebenarnya hanya kita ingin mengetahui apakah pemeliharaan sudah dilakukan terhadap kendaraan tersebut. Jadi secara berkala kemudian bagaimana kondisi kendaraan. Jadi dalam artian kecenderungan untuk mengamankan.

Emerha

Kalau soal pemanfaatan bisa dideteksi dari situ juga, misalkan kendaraan ini kan untuk keperluan kantor, tetapi digunakan untuk pekerjaan pribadi? Apa bisa dideteksi dari situ pak?

Taufik

Maksudnya?

Emerha

Maksudnya pemanfaatan kendaraan dinas itu kan biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah itu bisa dideteksi dari dilakukannya apel kendaraan?

Taufik

Gak...gak bisa. Itu...itu hanya iya. Kalau hanya untuk pemanfaatan ril, yang jelas kan dalam artian kalau mereka bawa ke kantor, berarti dipakai untuk keperluan kantor. Tapi di luar itu kita masih belum tahu juga kan. Tapi yang jelas bahwa kalau, eeh diadakan kendaraan yang ada, rawat, berarti di dalam apa namanya, sesuai dengan perjanjian mereka, apa namanya, pemanfaatan BMD-nya mereka berjalan seperti yang ada di dalam..apa..perjanjian yang berlaku.

Emerha

Kalau saat apel kendaraan, misalkan ada yang tidak hadir kendaraannya, bagaimana?

Taufik

Ehhh nanti kita anu, apa namanya...kita minta dihadirkan, di hari berikutnya.

Emerha

Jadi tujuannya hanya untuk mengecek apakah sudah dilakukan pemeliharaan?

Taufik

Iya, kemudian kondisi ril barangnya. Kalau perlu makanya kan di dalam apel ini sekaligus untuk mengetahui ehh..mana kendaraan-kendaraan kalau yang perlu dilakukan usulan penghapusan, ya diusul penghapusan, ganti yang baru, ganti untuk pengadaan berikutnya. Salah satunya itu. Jadi semacam juga bisa dilakukan kalau kita katakan ya..inventarisasi, bisa. Semacam itu.

Emerha

Itu setiap berapa bulan pak?

Taufik

Ehhh...apa namanya, semesteran.

Emerha

Itu ada dasarnya, ada perbub-nya ya pak?

Taufik

Gak ada.

Emerha

Jadi bagaimana mereka mau melakukan itu?

Taufik

Edaran. Eee..edaran dari masing-masing SKPD.

Emerha

Yang melakukan apel itu di masing-masing SKPD, bukan dari bidang aset?

Taufik

Jadi SKPD atas permintaan kita juga. Dalam artian kita kan melakukan himbauan kepada apa namanya..himbauan kepada SKPD untuk melakukan apel kendaraan.

Emerha

Apakah itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan aset?

Taufik

Bisa mungkin.

Q.5. Mengevaluasi dan menilai prestasi pengelolaan aset

Emerha

Soal monitoringnya bagaimana pak, selain apel kendaraan tadi apa ada model evaluasi pengelolaan aset?

Taufik

Evaluasi...yang kita lakukan ehhh...berkala, yang untuk apa namanya...untuk aset tetap semesteran, dalam artian kita apa..kita melakukan monev sekaligus kita membuat laporan semesteran. Tapi kalau untuk yang persediaan, 3 bulanan, untuk melakukan rekon, rekon persediaan. Cuma itu. Malah kalau yang untuk obat, obat apa namanya..obat-obat di puskesmas, rekonnya 1 bulan sekali.

Emerha

Persediaan juga ditangani bidang aset ya pak?

Taufik

Itu di subbid kami ada salah satu subbid yang membawahi persediaan. Jadi namanya subbid penghapusan dan administrasi persediaan.

Emerha

Jadi bidang aset itu berkoordinasi dengan SKPD, misalnya rumah sakit tentang obat-obatan. Lalu untuk monitoringnya, apa di rumah sakit juga menggunakan sistem informasi?

Taufik

Ada. Jadi apa namanya...aplikasi yang kita gunakan ada beberapa, bagi yang untuk aset tetap kita gunakan SIM Aset, yang kita buat sendiri. Kemudian untuk persediaan ada beberapa, jadi persediaan itu kita membuat SIM untuk rumah sakit sendiri. Kemudian SIMO, itu namanya SIM obat untuk puskesmas, sendiri. Kemudian ada SIM Persed untuk yang nonobat. Untuk semua SKPD

Emerha

Itu tetap dilakukan stock opname juga ya pak?

Taufik

Iya berkala tadi itu. Minimal 3 bulanan. Tapi yang untuk obat setiap bulan.

Emerha

Ketika ada pemeriksaan BPK, mereka menggunakan data tadi itu ?

Taufik

Iya, data tadi itu.

Emerha

Bagaimana mengkoordinasikan atau mengintegrasikan antara OPD-OPD dengan bidang Aset karena kita ketahui setiap OPD itu adalah eselon II sementara bidang Aset itu eselon III, kecuali dikoordinie langsung dari atas. Bagaimana Bapak mengantisipasi ini biar koordinasi berjalan lancar?

Taufik

Iya..memang apa ya...secara kedinasan memang statusnya sama ya.. tetapi kita secara fungsi kan ada fungsi kita sebagai koordinator pelaporan. Koordinator, jadi bidang aset itu selaku PPKD untuk pelaporan aset tetap dan persediaan. Nah dengan ketugasan ini lah kita gunakan. Jadi saya mengkoordinir eselon II di atas saya itu hal yang biasa. Jadi ketika diminta data, mereka harus. Dengan catatan itu bahwa WTP itu kan ada di masing-masing OPD. Kalau yang bermasalah atau di salah satu OPD ya itu mereka yang bertanggungjawab terhadap ketika WTP di laporan kami. Jadi yang membuat laporan itu saya tekankan bahwa itu yang membuat bukan bidang aset. Yang membuat itu adalah pengguna barang yang dalam hal ini adalah kepala OPD.

Emerha

Jadi jalur koordinasinya bagaimana, apa lewat sekretaris?

Taufik

Jadi dalam artian kita mem...mem apa...membuat link sebuah sistem itu berjenjang. Jadi sekolah melaporkan ke UPT, UPT melaporkan ke dinas pendidikan, dinas pendidikan melaporkannya ke kami, BKAD selaku PPKD. Kemudian puskesmas juga demikian, puskesmas melapor ke dinkes, dinkes melapor ke kami selaku PPKD. Dan itu rekapitulasi ada di kami, sehingga data-data dari bidang aset sudah langsung digunakan untuk akuntansi untuk membentuk akun persediaan, maupun akun aset tetap atau aset lainnya.

Emerha

Jalur koordinasinya lewat surat atau langsung ketemuan?

Taufik

Ehhh...lewat surat bisa, trus tapi biasanya kan kalau sudah triwulanan itu otomatis apa namanya jadi kita rapat koordinasi.

Emerha

Kalau ada OPD-OPD yang bandel jika dimintakan data, ada, itu bagaimana?

Taufik

Yaah...lima tahun terakhir ini sudah tidak ada. Ya mungkin dulu-dulu sebelum kita WTP mungkin ada.

Emerha

Yang terakhir, apa ada prestasi yang sudah dicapai selama ini dalam pengelolaan aset? Kan saya lihat di website sudah WTP. Sekarang khusus dari sisi aset prestasinya bagaimana?

Taufik

Yahh kita eeeh...kalau dari WTP itu kan baru kita mulai tahun 2013, jadi apa namanya, baru apa namanya...tahun 2013, 2014, 2015, 2016, tahun keempat. Kalau tahun kemaren 2016 itu malah tanpa temuan aset tetap. Tanpa temuan, jadi apa namanya dalam artian secara administratif tidak ditemukan sebuah eeh kesalahan kan gitu, semacam itu. Kemudian kalau dari apa namanya yang lain-lain, kebetulan kalau di untuk..apa namanya sarana kita sharing antarkabupaten trus dan kebetulan saya sejak tahun 2012 kan gabung dengan SEKP. Kalau di MEP UGM baru mulai tahun kemarin ini. Ini ya kita berbagi semacam itu. Itu yang bisa kita capai.

Emerha

Jadi secara administratif tidak ada temuan sama sekali, misalnya catatannya ada tapi fisiknya tidak ada atau sebaliknya?

Taufik

Jadi dalam artian di BPK sudah tidak ada temuan sama sekali.

- b. Wawancara ke-2 dengan Pak Taufik, pada Senin, 14 Mei 2018, pukul 10.59 WIB di ruang kerjanya, bidang aset. Wawancara dengan Taufik Amrullah ini merupakan wawancara yang kedua kalinya tapi dengan topik yang berbeda. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang proses belajar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kulon Progo (RM3).

Q.1. Model sosialisasi

Emerha

Sebelum Bapak bertugas di sini, apakah model pengelolaan aset memang sudah transparan dan akuntabel seperti sekarang ini?

Taufik

Kalau pelaporan-pelaporan sudah, hanya saja kan eeeh...permasalahannya kan hanya di data. Data kemaren yang saya sampaikan dalam paparan saya itu. Jadi permasalahannya di data, yang belum apa... direkon, dilakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan eehh...bidang aset dan bidang akuntansi. Selama ini itu, sehingga data itu kan antara yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan data yang dimiliki bidang aset kan terjadi perbedaan yang mendasar. Atas perbedaan-perbedaan yang mendasar itu yah..kita buat kan apa namanya, kita lakukan kan sensus, sensus barang negara, inventarisasi. Nah kita kan untuk sensus kita mengetahui kondisi data yang valid yang sebenarnya kita terapkan mana yang tidak ada, sehingga atas hasil sensus kita ketahui oh ternyata ada barang yang rusak berat sekian milyar, yang barangnya tidak ada sekian milyar. Nah kalau aset tetapnya itu bersih di akunnya tidak ada temuan di apa namanya, pada saat pemeriksaan BPK, repost semuanya ke aset akun lain-lain, sehingga di aset tetap menjadi bersih dalam artian sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang dinyatakan disitu kalau kita mencantumkan pada akun aset tetap berarti barang itu harus berfungsi kemudian apa namanya, nilainya harus ada dan dimanfaatkan, tidak boleh ada barang rusak berat, sehingga kan eeh,kita melakukan reklasifikasi. Kalau di permendagrinya waktu itu 17 kan masih diperkenankan bahwa barang itu boleh rusak berat, boleh rusak ringan, boleh baik, boleh tidak ada nilainya, kan begitu. Tapi untuk apa namanya eeeh.. kita me-link-kan dua..dua apa, dua aturan yang berbeda itu ya kita samakan persepsi, oohh..kita diperiksa oleh BPK, sehingga datanya harus sesuai dengan SAP, ya kita ngikutin.

Emerha

Pertama kali belajar transparansi dan akuntabilitas itu darimana?

Taufik

Ehhh...kita kan melihat cuma opini bahwa eehh..laporan keuangan itu harus disajikan sebagai eehh..konsumsi publik. Salah satunya akun dalam laporan keuangan adalah aset daerah, maksudnya aset tetap dan juga persediaan juga, sehingga menurut hemat kami kan, eehh di dalam pelayanan publik kami kan juga punya..punya apa, punya semangat juga bahwa apa yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan dan itu semuanya bisa terbuka. Saya rasa gitu. Kalau pembelajarannya mungkin ya...kita baik pengalaman mungkin ya.. tapi ya..di dalam pengelolaan aset tetap kami kan kerja sama dengan..awalnya kan kita kerja sama dengan PSEKP, jadi kita

apa namanya, saya punya kasus begini kemudian apa namanya kita di sana adalah komunitas, saya masuk di dalamnya, ya kita benahi dulu.

Emerha

Apakah ada ahli dari akademisi yang digunakan untuk meng-share keahliannya tentang pengelolaan aset??

Taufik

Ada. Jadi tim-tim dari PSEKP, eeh..melakukan ini, apa namanya, eeehh pembinaan.

Emerha

Itu tim dari mana pak?

Taufik

PSEKP, MEP UGM

Emerha

Itu tahun berapa mulainya pak?

Taufik

Bulan Juni 2012. Jadi kita kan ada PSEKP, ada pelatihan-pelatihan untuk manajemen aset, kemudian penatausahaan aset tetap dan persediaan dan salah satu kita share di sana.

Emerha

Apakah para ahli tersebut membentuk tim ketika mengajarkan?

Taufik

Eehh..jadi saya dan saya juga terlibat di dalamnya, gitu terlibat di dalamnya..eehh untuk me..membuat sebuah roadmap apa namanya...perbaikan seperti yang di file "765 hari menata aset" itu ada jadwal-jadwal kapan kita bisa melakukan dan sebagainya.

Emerha

Itu dianggarkan untuk membayar tim ahli? Lalu bagaimana mereka mau mengajarkan keahliannya?

Taufik

Tidak ada.. Gak dibayar mereka. Eehh..itu kan karena, kita kan koneksi, jadi hubungan berteman itu yang jadi dasar.

Emerha

PSEKP itu apa?

Taufik

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, sebelahnya MEP

Emerha

Itu memang sudah ada kerja sama?

Taufik

Ya kita di situ, sejak saat itu saya menjadi..menjadi apa namanya, diminta untuk berbagi di sana.

Emerha

Bapak terlibat mengajar di sini, berarti punya koneksi?

Taufik

Itu satu. Nah dari apa namanya...eehh..ya dianggap korporasi lah. Dari WDP sekian tahun menjadi WTP kita membenahi data dan sebagainya, itu sebagai sebuah apa namanya...sebuah potret yang dipakai untuk PSEKP, ini loh sebenarnya sebagai contoh.

Emerha

Berapa lama mereka mengajarkan pengetahuannya?

Taufik

Di kita waktu itu tahun 2012, selama tahun 2012 itu. Dalam artian dilepas itu....kayak gini saya berbaju dua, di sana saya bersama teman-teman kemudian kita kondisikan, sampai kita membuat produk-produk SIM itu kan itu produk kita semua.

Q.2. Model eksternalisasi

Emerha

Ohh...itu semua SIM aplikasi internal yang digunakan di aset itu output dari tim ya pak?

Taufik

Aplikasi itu kita bangun kan dari sana, apa namanya..eehh..ada beberapa aplikasi yang jalan, mungkin disitu ada filenya ya...(memastikan kepada peneliti kalau gambar aplikasi SIM apakah sudah ada di file yang diberikan di awal, sambil membuka file di laptopnya). Nah ini....(file muncul di laptop kecilnya dan ingin memperlihatkan kepada peneliti, namun karena kurang kelihatan, pak Taufik mengambil monitor besar di ruang sebelah. Akhirnya gambar model aplikasi SIM muncul di layar monitor besar).

Emerha

Model mereka mengajarkan pengetahuan dan pengalamannya, bagaimana pak? Apakah tatap muka atau langsung praktik, pak? Dilakukan di sini?

Taufik

Yaaa...kita tetap..ya modelnya tetap praktikal. Nah sehingga jadi, iya dilakukan di sini atau di gedung yang agak luas itu. Jadi ini kan..ini..eeh kalau dulu pengurus barang pendidikan (sambil menunjukkan foto di layar yaitu foto tim dari bidang aset yang menjadi pengajar). Pak Sugiantoro itu programernya. Kalau co-programer pak Mahsum ini sekarang di LPPM, eeeh Badan Penanggulangan Bencana. Ini kepala seksi saya. Ini tim saya. Ini orang sini semua tapi menjadi tim ahlinya sana.

Emerha

Selain SIM yang ini, ada juga SIMBADA ya pak?

Taufik

SIMBADA kan produknya BPKP. Gak kita pake. Kita pake SIM Aset Pemda, hasil rancangan sendiri (sambil memperlihatkan tampilan muka layar SIM rancangan sendiri). Jadi kita ada SIM Aset Pemda, ada BPS, kemudian yang aset desa yang kita rancang. Ada APBS, anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan laporan BOS. Yang terakhir itu persediaan. Iya SIM Persediaan. Kita terapkan kemaren terakhir itu di Kabupaten Batang. Ini kalau kota yang kerja sama kita sejak 2013 itu Kota Bontang sampai sekarang. Jadi teman-teman itu ke sana 4 kali dalam setahun. Jadi bermula dari kerja sama tadi, ya semacam itu. Tapi memang awalnya me-launching-kan brand semacam ini. Brand-nya adalah "Asyik Menata Aset". Brand itu kenapa di-launching-kan karena apa namanya...eeehh aset itu kan dikelola oleh orang-orang nomor dua kelas. Hebatnya kelas ke sekian dari tataran..tataran kasta pegawai. Jadi gak diperhatikan, kemudian kita coba share dulu agar diperhatikan. Saya launching-kan bukunya, sampai akhirnya pak Bupati pun, eeh..nempel stiker label-label dan kita minta juga wakil bupati menempelkan stiker di apa namanya...eeehh sekolah. Jadi gaungnya sampai ke kecamatan. Jadi supaya karena goalnya tadi asyik dan itu menjadi minta perhatian, ya..kita minta ada pencaangan khusus, pencaangan dan sosialisasi. Akhirnya kan sekarang itu pengurus barang menjadi..oohh saya itu diperhatikan. Itu..jadi mereka dalam pembuatan laporan..bekerja.

Q.3. Model kombinasi

Emerha

Berarti nanti mereka itu aktif sampai hari ini masih tetap bimbingan ya Pak?

Taufik

Bagaimana?

Emerha

Masih yang tim tadi itu sampai hari ini?

Taufik

Ya device tapi dalam artian yang melaksanakan ya saya. Ya saya selaku

Emerha

Lalu Pak tadi Bapak katakan ada Bupati itu berarti didukung sepenuhnya oleh Pak Bupati ya?

Taufik

Jadi ee diawal mungkin saya bisa cerita, oke nanti gambarnya bisa banyak bercerita dokumentasi. Nah kenapa saya dokumentasikan semacam ini karena saya juga kerja sama sama apa namanya di PSKB saya harus berinteraksi dengan peserta-peserta latihan dari berbagai apa daerah kan gitu. Saya melaksanakan apa yang yang sekarang saya jalankan. Jadi itu nanti ee ya jadi kita ada satgas WTP waktu itu kemudian....

Emerha

Satgas apa Pak?

Taufik

Satgas WTP.

Emerha

Oh, ada dibetuk satgas juga ya?

Taufik

Heém dulu pernah kita buat satgas WTP untuk 2012-2013 kan gitu.

Emerha

Berarti khusus menata aset ya? Karena memang kuncinya dari aset?

Taufik

Iya. Kita minta dibentuk medianya. Kemudian apa namanya pada waktu itu kita paparan rencana tentang tindak lanjut PPK. Sehingga yang tadi kemudian ini kita ya semacam itu. Nanti filenya bisa diperiksa.

Emerha

Terus Pak bisa diceritakan Pak bagaimana terbentuk bisa muncul ide membentuk tim kajian kayak gitu? Itu awalnya dari diapa Pak idenya?

Taufik

Ya karena kegalauan saya aja. jadi saya sempat malah ee jadi saya kan bingung dari dari ee apa ekonomi bidang ekonomi di Bappeda taruh di bidang aset itu kan hal yang berbeda jauh. Yang satu yang saya pernah merencanakan tentang bandara sebagainya yang harini baru jadi bandara. Jadi kita mulai sejak tahun 2009 itu terus ya kemudian di sini kan saya ditempatkan di sini yang jadi saya bingung galau ngapain lo. Ya tapi tadi dengan cara kerja sama saya kumpulkan teman-teman yang dia mungkin basicnya saya juga bukan akuntansi karena berkaitan aset kan juga nggak ya. Jadi kita paparan misalnya inventarisasi dengan tepat kita sampaikan seperti itu seperti itu. Jadi Pak Bupati sendiri yang anu, jadi semua saya laporkan ke Pak, supaya nanti kita diperhatikan kan selama ini memang tidak diperhatikan.

Emerha

Itu sampai tim dari MEP UGM mau itu gimana?

Taufik

Oh, kalau MEP saya hanya anu apa namanya tenaga *on call* aja di MEP. Karena saya sudah dikenal di PSYKP di Fakultas Ekonomi terus MEP itu rekomendasi Bu Uswatun penilai . . . (18:44). Itu Pak Levi dilibatkan kalau mau anu. Nah, terus dilibatkan ngajar-ngajar masuk. Di situ.

Emerha

Berarti Bapak juga sebenarnya udah jadi dosen di sana ya?

Taufik

Bukan dosen. Cuma tutor. Tutor aja.

Emerha

Kan ada namanya dosen luar biasa dari praktisi itu kan?

Taufik

Jadi istilahnya begini, di sana itu tenaga tidak tetap apa ya.

Emerha

Kalau di UGM sering gitu ada dosen dari praktisi?

Taufik

Iya ini saya sejak tahun 2000 sampai Februari kemaren saya apa 2017 itu baru, November itu baru anu. Ee ini dosen tidak tetap.

Emerha

Dosen. Iya. Dosen luar biasa. Hehe?

Taufik

Itu. Jadi bermula dari sana. Jadi ide itu saya punya buku ya sebentar, ada *filenya* nanti bisa *dicopy*. Mungkin dari buku itu njenengan bisa anu. Sebentar. Mungkin bisa dipakai. Diary. Nah mungkin ini bisa dipakai nanti. Karena membaca dari sini nanti. Iya. Nanti di *copy* aja.

Emerha

Udah jadi dalam file, udah jadi dalam bentuk tulisan ya Pak?

Taufik

Iya. Tinggal berbagi aja. jadi semua berawal dari kegalauan. Kemaren itu dituliskan aja sudah *sopo seng gelem* di anu aja di di apa yang mau dipakai. Karena ini kan cuma catatan harian saya tiap hari untuk apa.

Emerha

Udah jadi dalam file, udah jadi dalam bentuk tulisan ya Pak?

Taufik

Iya. Tinggal berbagi aja. jadi semua berawal dari kegalauan. Kemaren itu dituliskan aja sudah *sopo seng gelem* di anu aja di di apa yang mau dipakai. Karena ini kan cuma catatan harian saya tiap hari untuk apa.

Emerha

Lalu setelah ee Bapak terapkan pengalaman dari tim kajian tadi itu setelah diterapkan di sini modelnya bagaimana Pak? Apa Bapak bikin sebuah pedoman atau semacam prosedur tetap untuk melaksanakan pengelolaan aset?

Taufik

Iya. Iya kita ada buat buat Protap, buat prosedur, buat apa namanya aturan-aturan yang kita apa namanya ya semacam itu anunya. Tetapi yang terpenting kan bagi saya kan gini semua yang ada itu kalau bisa kan dituliskan. Jadi kalau kita gak punya aturannya ya kita buat aturannya. Itu kalau kita ya buat seperti ini.

Emerha

Berarti ini semacam manualnya ya Pak ya?

Taufik

Iya. Itu waktu di masa yang kita bantu buat apa ee di Kota Bontang, asumsi di Kota Bontang.

Emerha

Itu Bapak sudah menyebar sampai ke sana ya Pak ya? Seperti Kabupaten lain?

Taufik

Dan goalnya akhirnya kita masukkan semua itu ada dalam rencana kita Bappeda.

Emerha

Ini masuk dalam rencana strategis di Bappeda ya?

Taufik

Iya. Tapi itu . . . (24:15) kita masukkan di Renstra.

Emerha

Oh, Renstranya ya. Lalu Pak kalau untuk pegawai gimana Pak diikutkan diikutkan diklat ke apa namanya?

Taufik

PSEKP?

Emerha

PSEKP itu atau langsung diajarkan langsung di sini?

Taufik

Kita di sini.

Emerha

Berarti gak ke sana ya. Eem. Selain itu apalagi Pak model apa media untuk mengajarkan ke pegawai selain ini? Apa ada dalam bentuk?

Taufik

Kan dia selama ini tutorial sama kita saya muter to. Jadi kalau Jokowi itu Sukanya apa Sukanya ke lapangan ya saya paling seneng kan gak suka duduk di kursi. Jadi saya waktu luang saya pakai untuk muter-muter ke sekolah-sekolah, ke puskesmas karena itu saya akan mendapatkan apa namanya kendala-kendala kesulitan yang didapat semacam itu. Dan saya kan dapat tambahan-tambahan apa, masukan-masukan dari mereka dilihat dari kondisi real. Karena saya mau tidak mau kalau saya juga harus *sharing* dengan orang lain saya harus mendapatkan real real permasalahan. Walaupun kondisi yang dari apa ee kondisi . . . (26:47) dimunculkan masalah sering itu kan hanya Cuma dua aja. kan hanya ini aja kalau dimunculkan.

Emerha

Iya. Masalahnya yang sering itu?

Taufik

Heém.

Emerha

Barangnya ada. Hehe. Berarti kalau setelah sudah di, sudah ditraining sendiri berarti gak ada lagi ikut training di luar misalkan ada panggilan training dari Pemerintah pusat? Itu ada?

Taufik

Ada. Training dari Pemerintah pusat kita kita apa namanya, kita ikutkan jadi apa namanya untuk hal-hal yang sifatnya ee sifatnya ada tambahan-rambahan aturan baru dan sebagainya itu kita anu. Itu kebanyakan udah *sharing* ke tempat-tempat.

Emerha

Iya. Itu udah di sharing ke sana semua ya Pak ya?

Taufik

Iya. Yang kita-kita. Wonogiri, Tegal, Talang, Tagalog, Sumatera, . . . (28:00) sudah kita.

Emerha

Berarti itu ini posisi Bapak sebagai tim PSEKP ya?

Taufik

Heém.

Emerha

Dalam rangka ini bukan bukan atas nama Pemda ya?

Taufik

Heém. Ya intinya semacam ini, intinya saya ingin menyampaikan bahwa aset itu sebenarnya gak susah gitu. Cuma permasalahannya kita kan melupakan melupakan bahwa kita kan harus istiqomah didalam melaksanakan penata kesehatan. Terlebih-lebih kalau untuk persediaan ya. Persediaan, faktur data, barang yang ada ya dicatat. Kemudian apa namanya transaksi ke luar ya langsung dilakukan pengeluaran. Sehingga pada akhir periodik mau pemeriksaan kita apa namanya tidak sudah kan gitu. Selama ini kan kendalanya kan dana itu juga masih ada yang ngerjakan model kebut semalam itu. Masih banyak semacam itu. Tapi sebenarnya kalau itu ditata dan ini terlebih-lebih yang untuk obat ya. Kalau obat kita sudah sampaikan ke teman-teman ya satu hari buat laporan ya hari itu juga selesai. Sehingga untuk yang SIM yang obat kan di luar SIM tadi ada kita membangun SIM baru namanya SIMO. Jadi sistem informasi manajemen obat. Jadi kita buat secara online untuk semua puskesmas dan farmasi. Sehingga obat yang keluar dari bidang farmasi sekian dari puskesmas mana saja itu bisa juga dilihat. Dan itu obatnya apa namanya teman-teman pengelola obat mereka kan mendapat resep dari dokter kemudian mereka ngetik. Nah, itu pada saat mereka ngetikkan *e-ticket* ambil obat untuk pasien itu otomatis mereka sudah membuat laporan. Laporan pengeluaran jadi mereka tidak perlu dua kali kerja. Selama ini kan ngurus di *e-ticket* pake tangan kemudian ngetik lagi, nanti ngentry lagi.

Emerha

Kalau itu langsung otomatis ya?

Taufik

Yang ini otomatis lagi.

Emerha

Nah, itu ee transfer pengetahuan tadi itu hanya untuk di bidang aset ya Pak? Tidak berlaku untuk bidang yang lain misalkan akuntasi dan pelaporan, perbend?

Taufik

Ya saya kan bekerja sesuai dengan kewenangan saya. Nanti kalau saya bekerja ngambil tupoksi orang kan nanti menjarah tupoksi, ndak boleh.

Emerha

Iya. Tidak maksudnya ada sharing juga ke mereka tentang model?

Taufik

Iya. Model itu kan kita sampaikan bahwa itu hanya sebagian aja, sebagai apa namanya informasi aja to. Informasi bahwa kita begini nanti kalau seandainya model itu bisa diterapkan untuk yang lain bisa gitu.

Q.4. Model internalisasi

Emerha

Iya. Sekarang ee penerapan dari hasil apa pengalaman Bapak tadi itu wujudnya seperti apa sekarang Pak?

Taufik

Ya kalau dari sisi ini kan saya dalam artian apalagi dua tahun terakhir itu tahun 2016 gak ada temuan ya. Maksudnya temuan kemaren itu bisa dikoreksi udah selesai, tidak muncul di LHP itu. Bagi saya sudah bahwa oh tugas saya yang selama dulu bidang aset itu tugasnya berat, oh ternyata dengan dengan membangun sistem itu bisa dipermudah. Karena tugas kita kan hanya kopilator saja. Bisa saya rasakan sekarang. Dan kalau dengan kompilator gini kan, wah saya kan bisa apa namanya berfikir yang lain dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.

Emerha

Kalau dari atas nama Pemda ada gak Pak itu hasil misalkan prestasi dari pengelolaan aset itu dipublikasikan ke luar? Atas nama Pemda bukan atas nama LP apa tadi?

Taufik

Oh, ada kita kerja sama dengan Malaka. Jadi Malaka itu kita kerja sama ee Malaka. Jadi ini satu-satunya kemaren saya baru apa namanya bekerja atas nama Pemda. Nah, ini Malaka kita membuat surat . . . (32:37) mereka. Jadi Bupati Malaka mebuat surat kepada Bupati Kulon Progo untuk kita melakukan apa namanya ee workshop dengan program milik daerah.

Emerha

Eem. Dilakukan di sini yaa?

Taufik

Ya.

Emerha

Di sini ya mereka dipanggil ke sini ya?

Taufik

Ee kami diminta datang ke sana, kami diminta datang ke sana. Jadi ini resmi tidak melalui PSYKP tapi betul-betul dengan atas nama Pemda. Ini modelnya Bapak ini memberikan waktu kepada kami sampai kemaren saya cuti 5 hari saya. Kita berangkat hari minggu puangnya sabtu.

Emerha

Itu bagaimana mereka tau kalau Kulon Progo itu berhasil menata asetnya?

Taufik

Ya hanya dari mulut ke mulut dari apa namanya informasi pelatihan kan ada ada namanya staff-staff latihan itu yang datang kan gitu. Kan biasanya kan satu pelatihan itu kan banyak kan anunya apa namanya, jadi kebetulan juga untuk yang di Malaka ini kami membangun, akhirnya kemaren membangun *smart city*. Jadi goalnya membuat semacam *smart city* untuk di Malaka itu untuk pembinaan. Ya materi-materi yang kita berikan cuma sampai itu. Penataan BUD, strategi WTP yah.

Emerha

Kalau dari BPK sendiri gimana Pak melihat kemajuan pengelolaan aset?

Taufik

Ya BPK kan prinsipnya kan yang dilihat kan secara umum kan laporan. Laporan tepat waktu, kemudian kemudahan mereka meminta data. Kalau bagi kami kan data itu kan tidak ada yang harus disembunyikan. Jadi semua semua data yang pada SIM, pada saat BPK masuk ya semua kita serahkan, kita *copy*kan semuanya. Jadi kita kan bicara data itu apa datanya dalam artian kalau seandainya nanti kami salah ya mohon kami dikoreksi bagaimana. Kalau itu yang terpenting dalam penataan pengelolaan aset jangan sampai terjadi Fraud atau kecurangan.

Emerha

Itu tadi hasil kayak buku ini sudah jadi standar ya Pak kalau sekarang? Sudah ada yang dibikin dalam bentuk aktual?

Taufik

Ada. Ada yang dalam bentuk Perbup.

Emerha

Yang hasil pengalaman Bapak itu sudah?

Taufik

Ya Perbupnya ada beberapa tadi apa namanya Perbup yang misalnya kalau yang pasti kita ada Pergub sewa barang milik daerah, kemudian ada klasifikasi BUD.

Emerha

Itu asli dari anunya Bapak juga ya? Udah masuk ke situ ya?

Taufik

Iya.

Emerha

Tadi Bapak katakan kalau ketika Bapak keliling mau cari ada masalah apa di lapangan itu menurut Bapak apa hambatan yang Bapak hadapi dalam mengelola aset?

Taufik

Hambatan biasanya yang sekarang masih muncul itu kan ee keterlambatan data yang diberikan dari bendahara kepada apa kepada pengurus barang. Itu yang selalu muncul yang sehingga kadang-kadang mereka agak terlambat membuat laporan gitu. Jadi hambatan hanya masalah koordinasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran petugas akuntansi. Yang sebenarnya ketiga unsur ini kalau PPK nya masing-masing SKPD itu berjalan gak masalah. Dan alhamdulillah untuk SKPD-SKPD yang tidak terlalu besar yang dibawa tidak punya sub-sub unit pelaporan sudah *clear*. Yang agak berat itukan melakukan koordinasi untuk dinas Pendidikan, koordinasi untuk dinas kesehatan yang di bawahnya kan ada banyak entitas pelaporan. Nah, ini yang yang apa namanya kita tekankan. Makanya untuk semua pelaporan di laporan keuangan di akhir tahun yang kita kejar adalah Dinkes sama Disdik. Kita perhatikan . . . (37:20). Karena yang lainnya relatif sudah berjalan dalam artian tidak punya entitas pelaporan di bawahnya lagi.

Emerha

Eem. Kalau soal itu Pak ee kemampuan menyerap pegawai itu ketika diajarkan bagaimana? Gak jadi hambatan gitu?

Taufik

Selama ini ya karena kita di sini buka-buka apa kantor ini kan buka setiap hari buka konsultasi.

Emerha

Untuk staff ya?

Taufik

Iya. Jadi setiap hari teman-teman siap menerima konsultasi.

Emerha

Kalau soal waktu dan tempat?

Taufik

Waktu tempat kita punya dua.

Emerha

Sembarang di, paling banyak di sini ya Pak?

Taufik

Iya. Kita paling banyak di sini. Ya kita itu ada Gudang kita jadikan ruang rapat jadi ruang rapat sederhana untuk mereka-mereka bisa gunakan.

Emerha

Kalau soal motif mereka Pak mau, kalau kira-kira menurut Bapak mereka mau mempelajari itu ee pengelolaan aset khusus SKPD yang lain itu gimana Pak? Menurut Bapak apa masih rendah atau gimana?

Taufik

Ya alhamdulillah sudah lumayan sekarang. Jadi ya mungkin di awal-awalnya dulu yang saya lakukan kan gini, pada awal saya masuk itu kan 60% lah yang 40% itu yang muda-muda. 60% ee pengurus barang itu kan sudah tua. Di atas 45 tahun itu tidak bisa komputer, padahal syaratnya kan harus bisa excel atau word itu. Tidak bisa. Kita ganti, kami minta diganti semuanya. Jadi saya mau jadi kepala bidang aset asal dengan catatan saya minta kesepakatan. Jadi di dalam 5 hari tadi yang saya ada persyaratan itu mengganti . . . (39:24).

Emerha

Sampai hari ini sekarang muda?

Taufik

Sampai hari ini ya sudah muda-muda.

Emerha

Berarti ada syarat untuk menjadi pengurus barang itu harus bisa computer?

Taufik

Iya. Ada syaratnya.

Emerha

Kalau permasalahan perbedaan budaya gak ada ya Pak? Gak ada masalah ya?

Taufik

Selama ini nggak.

Emerha

Nggak ada ya. Memang rata-rata semua penduduk asli di sini ya yang menjadi itu ya?

Taufik

Iya.

Emerha

Kalau untuk mereka Pak untuk mereka sendiri dari SKPD itu mereka mau membagi ke?

Taufik

Maksudnya?

Emerha

Tadi kan Bapak bilang ada ketika mereka diganti tadinya udah diajar tuh, tapi diganti. Terus yang ajakan yang baru yang mana?

Taufik

Jadi kita berkala ada pelajaran berkala untuk teman-teman yang baru itu.

Emerha

Yang baru ya?

Taufik

Iya.

Emerha

Saya pikir ada transfer?

Taufik

Kadang-kadang sampai kita buat kan private yang baru ada berapa orang dua orang kita private gitu.

Emerha

Itu langsung praktik ya Pak?

Taufik

Langsung praktik.

Emerha

Oke Pak. Itu dulu untuk sementara Pak. Sudah azan. Nanti insyaallah saya analisis lagi datanya Pak, nanti kalau masih kurang saya.

Taufik

Mungkin yang kita sudah *sharing* dengan daerah-daerah lain.

Emerha

Oke Pak. Itu dulu untuk sementara Pak. Sudah azan. Nanti insyaallah saya analisis lagi datanya Pak, nanti kalau masih kurang saya.

Taufik

Mungkin yang kita sudah *sharing* dengan daerah-daerah lain.

Emerha

Iya?

Taufik

Saya juga berapa . . . (40:55).

Emerha

Iya. Kabupaten itu sampai ke Gunung Kidul juga ya Pak ya?

Taufik

Iya. Gunung Kidul kemaren kita mendampingi sebelum WTP itu.

Emerha

Di Jogja cuma Gunung Kidul aja? sleman nggak?

Taufik

Iya. Nggak. Karena kita yang terlambat itu kan Kulon Progo sama Gunung Kidul yang belum begitu telat.

Emerha

Saat itu ya 2012 itu ya? Eem.

Taufik

Iya. Karena di Kulon Progo itu kan karena ee aset itu kan hanya . . . (42:23). Itu kan teman-teman kan akhirnya kayak membuat baju atau kumpulan namanya ini. Nah.

Emerha

Laskar apa itu Pak artinya?

Taufik

Jadi *laskar* dolanan untuk bermain-main dengan . . . (42:43). Jadi *laskar* yang bermain-main dengan angka. Akhirnya pengurus barang sekian ini, tak tertentu. Jadi kalau mereka berkumpul ya.

Emerha

Oh ini ya? Ketika dilakukan pelatihan ya Pak?

Taufik

Ini anu ee acara halal bi halal.

Emerha

Khusus pengurus barang? Berarti sudah tercipta suasana untuk ini ya Pak ya, untuk berbagi?

Taufik

Iya. Itu kita harapannya. Oke.

- c. Wawancara ke-3 dengan Pak Taufik, pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 14.04 WIB di ruang kerjanya, bidang aset. Wawancara dengan Taufik Amrullah ini merupakan wawancara yang ketiga kalinya dan masih seputar topik yang sama. Topik utama yang diwawancarai adalah pendalaman lebih detil tentang proses belajar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kulon Progo (RM3).

Emerha

Kita mulai

Taufik Amrullah

Ya.. silahkan..

Emerha

e.. kemaren kan saya sudah lihat tuh yang bapak kasih lihat ke saya

Taufik Amrullah

Apa tuh?

Emerha

Buku modul pelatihan, nah itu apakah sudah ada di dalam bentuk hem.. regulasi atau Perda, Pergub yang sudah di rangkum di.. dijadikan pedoman aturan?

Taufik Amrullah

Hem.. untuk Perda sudah ada, Perda pengelolaan daerah yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perbup nya, perbup otonomi daerah, terus ada Perbup tentang sewa-menyewa barang milik daerah, sewa kemudian Perbup barang bongkarang, dari barang bongkaran gedung, kemudian Perbup tentang e.. tindak lanjut e.. peraturan Bupati, keputusan Bupati tindak lanjut dari sensus. Kemudian penilaian barang milik daerah nah kita tindak lanjut di situ

Emerha

Itu hasil dari kompilasi dari

Taufik Amrullah

Kombinasi dari bawah ya..

Emerha

Bapak ke SKPD ya..

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Terus menurut kira-kira pengetahuan transparansi dan akuntabilitas yang seperti apa nanti yang dibutuhkan ke depan terkait dengan pengelolaan aset?

Taufik Amrullah

Terkait dengan pengelolaan aset yang ke depan yang paling dominan itu adalah masalah optimalisasi, jadi optimalisasi itu berkenaan dengan apa namanya e.. penggunaan dalam indeks daerah yang dikerjasama kan dengan pihak ketiga, inikan akan sangat berkaitan dengan pendapatan maksi daerah Cuma dalam pelaksanaannya e.. harus nilai.. apa.. nilai kerja sama dan sebagainya harus transparan, justru itu yang yang.. perlu ke depan untuk ditingkatkan selain setelah penata usahaan beredar

Emerha

Itu nanti e.. kebutuhan itu nanti dengan cara apa, supaya bisa bapak peroleh?

Taufik Amrullah

Yang bisa kita lakukan satu mungkin menyusun e.. regulasi tentang optimalisasi barang milik daerah untuk yang yang baru yang kita keluarkan adalah produknya adalah tentang sewa-menyewa, mungkin ada lagi aturan-aturan misalnya penyertaan modal e.. kemudian nilai investasi atau kerja sama dengan pihak ketiga baik itu BPS atau BSG dan seterusnya mungkin gitu

Emerha

Masih tetap kerjasama dengan PSEKP atau ada rencana untuk dengan pihak ketiga lainnya?

Taufik Amrullah

Ya.. karena kita terlibat di dalamnya ya.. ter.. kita bermain apa.. terlibat di dalam anggota SIKP ya.. kita melibatkan orang-orang PSEKP selaku akademisi

Emerha

Oh ya.. itu di PSEKP ada juga teknis yang latihan ke sana, maksudnya menerima pelajaran di sana setiap rutin?

Taufik Amrullah

Teknis dari mana, dari kita atau dari?

Emerha

Ya.. dari.. Pemda

Taufik Amrullah

Dari Pemda Kulonprogo ada yang kita kirimkan ke sana apa namanya e.. tapi secara rutin kan yang melaksanakan PSEKP jadi kita menginisiasi kegiatan apa.. e.. diklat yang kita inisiasi maksudnya kami di sini e.. selaku Kepala Bidang Aset yang kerja sama dengan PSEKP, internal diklat di PSEKP dan itu tidak hanya apa namanya untuk Kulonprogo saja tapi untuk seluruh Indonesia

Emerha

Dalam bulan ini ada pak itunya diklat?

Taufik Amrullah

Bulan ini.. minggu yang lalu, sama besok tanggal 14 tanggal 19

Emerha

Di Tunas besok?

Taufik Amrullah

He'e.., 19 itu misalnya e.. besok kita... untuk saya.. materinya tentang ntar-ntar e.. penyusunan neraca tetap berdasarkan laporan barang milik daerah

Emerha

Itu tanggal 19?

Taufik Amrullah

Ya.. tanggal 19 besok

Emerha

Itu pesertanya dari mana pak?

Taufik Amrullah

Pesertanya seluruh Indonesia

Emerha

Seluruh Indonesia bapak yang ajarkan?

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Oh.. saya rencana setelah wawancara itu ada nanti observasi, kalo bapak berkenan mungkin saya Cuma mau ambil videonya bapak ngajar ke mereka itu

Taufik Amrullah

He'em, bisa nanti saya hari Kamis jam

Emerha

Hari kamis..

Taufik Amrullah

Jadwal jam 1

Emerha

Jam 1 siang ya..

Taufik Amrullah

Jam 1 siang

Emerha

Oh ya.. nanti insyaallah saya datang Cuma mau amati saja gimana prosesnya bapak mengajarkan ke mereka terus prakteknya gimana, seperti apa sampai mereka tahu

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Menurut bapak pertemuan seperti itu bagaimana bisa meningkatkan pengetahuan terkait dengan PSEKP tadi dengan aset?

Taufik Amrullah

Ya.. kita kan di sini kalo untuk untuk diklat itu kan tugasnya kan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi melalui sharing-sharing informasi ya.. kalo dari saya kan pelaku ya.. praktisi kemudian temen-temen yang didatangkan, e.. yang datang ke PSEKP mereka briefing nya untuk melakukan apa e.. diklat yang berhubungan dengan pekerjaan mereka jadi di situ akan datang temen-temen semua semacam pengurus barang, PPTK, kemudian apa namanya Bendahara dan seterusnya jadi di situ kita sharing informasi

Emerha

Kalo mereka yang sudah mengikuti pelatihan di PSEKP itu apakah diwajibkan juga atau di anjurkan untuk mengajarkan ke mereka yang tidak sempet ikut ke pelatihan?

Taufik Amrullah

Itu internal person jadi tergantung, tergantung..

Emerha

Khusus di bidang aset

Taufik Amrullah

Kalo di bidang aset kan kita, apa namanya khusus di bidang aset apa namanya khusus di bidang aset sendiri kita melakukan pelatihan mandiri, jadi pelatihan kita sendiri yang kita kitaselenggarakan e.. tidak bekerja sama dengan PSEKP tapi kita melakukan pelatihan e.. internal

Emerha

Itu ada internal?

Taufik Amrullah

Ada, jadi kita ada..

Emerha

Itu berkala?

Taufik Amrullah

Ya...

Emerha

Itu berkala di bikin?

Taufik Amrullah

Itu paling tidak e.. sekali dalam setahun pasti ada, jadi meliputi penata usahaan aset tetap, kemudian penata usahaan persediaan, jadi kita kemas dalam bentuk workshop atau semacam apa sarasehan lah istilahnya..

Emerha

Untuk tahun ini sudah di laksanakan?

Taufik Amrullah

Tahun ini.. kita kemaren sudah dalam bentuk workshopnya... e.... penataan aset tetap dan persiapan sensus 2018 sudah kita lakukan di bulan Jun... Mei.. Mei 2018

Emerha

Bulan Mei ya, jadi nggak ada lagi yang ke depan ini?

Taufik Amrullah

e.. belum ada

Emerha

Oh ya.., itu pertemuan kayak gitu dianggarkan, dianggarkan di DPAny, BKAD ya?

Taufik Amrullah

Ya.. lewat BKAD

Emerha

Kalo hasil pelatihan kemaren tentang aset itu sudah ada kah yang menjadi maksudnya hasil didikan bapak kayak di inisiasi gitu, sudah ada tentang aset di bidang bapak?

Taufik Amrullah

Maksudnya di di di.. lingkup saya

Emerha

Ya..

Taufik Amrullah

Di lingkup sini, kalo di lingkup Pemkab ada.. sa.. ada pak Sugiantoro dari SBKAN yang itu bisa ajarkan aset tetap, kemudian Lina Abnol bisa, Bambang Suarji, kemudian dari bidang saya sendiri ada Pak Rony, ada Bu Nurwati, kemudian mbak Rian, Mas Lutfi ada.. ada.. 7 lah 7 tentor yang..

Emerha

Sekarang masih aktif?

Taufik Amrullah

Masih aktif semua

Emerha

Itu udah jadi tentor ya mereka ya?

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Nah.. tentang rotasi jabatan bapak, bapak dulu sebelumnya di mana pak?

Taufik Amrullah

Kepala Bidang Ekonomi

Emerha

Di?

Taufik Amrullah

Bappeda

Emerha

Bappeda ya.., itu tahun berapa pak?

Taufik Amrullah

2009..

Emerha

2009

Taufik Amrullah

2009

Emerha

Berarti 2009 pindah ke sini?

Taufik Amrullah

2009 pindah ke sini 2012 bulan lalu

Emerha

2012...

Taufik Amrullah

Tahun 2012, berarti ini tahun ke... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun ke 7

Emerha

Tahun ke 7 ya.., e.. menurut bapak pengalaman bapak di Perekonomian Bappeda itu, itu relevan di bawa ke sini selaku Kabid Aset?

Taufik Amrullah

Tidak ada hubungannya sama sekali

Emerha

Berarti tidak ada yang bisa diterapkan?

Taufik Amrullah

Tidak ada, hal yang baru betul-betul baru

Emerha

Betul baru

Taufik Amrullah

Cuma yang saya terapkan hanya e.. semangat di bidang ekonomi bahwa brand sebuah brand itu penting. Jadi waktu di ekonomi saya punya kegiatan waktu itu untuk me.. membuat branding Kulonprogo yang The Jewel of Java itu ah.. itu saya terapkan di bidang aset, kita juga buat brand Asik Natasha

Emerha

Aset?

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Kemaren nggak bapak jelaskan tentang Asik Menata Aset itu, nah itu menurut bapak bagaimana mutasi jabatan bapak ke Kabid Aset itu bisa menambah pengalaman bapak?

Taufik Amrullah

Karena saya, saya pribadi suka dengan yang baru ya, yo challenge ya.. jadi dalam artian saya kurang begitu suka dalam kondisi speedy ya, jadi kondisi yang.. nyaman gitu, bagi saya harus ada tantangan-tantangan dalam hidup nah.. saya melihatnya e.. kok Kulonprogo ini lebih dari.. 7 tahun tidak BTP itu kenapa kan gitu, jadi itu.. itu sebuah tantangan dari dulu sebenarnya e.. saya juga tidak serta merta karena saya di pindah tapi saya juga pernah bicara dengan Pak Sekda waktu itu e.. sanggupkah saya me.. menata aset itu lebih baik kan gitu sebelum saya dipindah ke sini, karena kan tidak semua orang kan mau menjadi Kepala Bidang Aset karena dalam tanda kutip tidak ada apa-apanya kan, yang ada hanya masalah-masalah gitu aja, tapi ternyata setelah saya duduk di sini masalah itu menjadikan berkah

Emerha

Selama bapak menjadi Kabid Aset menurut bapak apakah pengetahuan bapak meningkat dengan menjadi Kabid Aset, seperti apa itu contohnya?

Taufik Amrullah

Ya... yang khusus yang berkenaan dengan manajemen aset mungkin ada peningkatan, ya.. ya.. paling tidak e... kontribusi yang bisa saya berikan adalah saya bisa sharing tentang pengalaman menata aset itu dengan teman-teman melalui PSEKP, dan ini sebenarnya kan ada ada.. apa.. sosok yang saya saya... kagumi kalo sekarang menjadi Kepala BKAD Gorontalo yaitu bapak Setiojati Kepala BKAD Gorontalo

Emerha

BKD atau BKAD?

Taufik Amrullah

BKAD Keuangan, iya..

Emerha

Kabupaten atau Provinsi pak?

Taufik Amrullah

Itu Gorontalo yang.. Provinsi Gorontalo Pemprov

Emerha

Pemprov ya..

Taufik Amrullah

Dia SH. MH coba tulis

Emerha

Saya saya cek

Taufik Amrullah

Cek aja itu kayak buku-bukunya dia

Emerha

Itu.. teman teman lama bapak ya?

Taufik Amrullah

Bukan saya siswa itu gara-gara di apa namanya PNS itu ternyata kan bisa gitu lho, jadi saya googling-googling aja

Emerha

Mungkin yang sering ada itunya.. ada blognya itu, siapa namanya, bukan yang itu ya.. Kepala BKAD

Taufik Amrullah

Kepala BKAD

Emerha

Iya.. ada Vlognya itu, saya juga ikut, pak siapa namanya ya?

Taufik Amrullah

Pak siapa namanya, itu yang.. yang membuat saya dulu waktu awal-awal di.. masuk di bidang aset oh.. ternyata e..

Emerha

Dia kan sering menulis itu pak e..

Taufik Amrullah

Iya menulis, nah saya tulis, itu yang.... yang.. memotivasi saya pertama kali itu... BKAD, apalagi?

Emerha

Kalo setiap kali bapak mengajar di PSEKP itu e.. bapak kan bikin PPT ya pak, itu di.. bapak kumpulkan di.. dokumentasikan, kemudian di bagian ke peserta?

Taufik Amrullah

Iya, jadi.. kan sana yang meminta dari PSEKP yang selalu membagi iya..

Emerha

Selalu.. selalu.. selalu bagi seperti itu ya..

Taufik Amrullah

Agak lupa namanya saya, tapi dia yang menginspirasi saya itu, oh ternyata PNS juga bisa ber.. berkiprah, sebelum kita PNS itu nggak ada kerjaan, PNS nggak bisa anu itu, itu itu.. sesuatu yang salah gitu

Emerha

Dia.. dia aktif menulis itu

Taufik Amrullah

SH. MH itu jabatannya itu

Emerha

Saya.. saya.. langganan vlognya itu, jadi setiap tahun ada tulisan-tulisannya di share, saya lupa karena memang sudah lama saya tidak buka.. buka lagi. Kalo nggak salah dulu dia itu di Kabupaten Gorontalo pak, mungkin dipindah lagi di Provinsi ya..

Taufik Amrullah

Coba ya.. coba ini ya.. BKAD, SH. MH saya ingatan, bukunya banyak yang sudah diterbitkan itu

Emerha

Hem...

Taufik Amrullah

Makanya waktu itu kan saya terus kemudian e.. apa e.. ngumpulkan materi, materi hasil pemeriksaan Nyonya itu kan e.. berkenaan dengan temuan-temuan aset dan jadilah buku "Meraih Opini WTP Apa Adanya" yang.. yang dikarang oleh ahli vidia, kalo bisa googling itu meraih buku apa, meraih opini WTP apa adanya ahli vidia, inilah yang kita pakai sebagai bahan pembelajaran di PSEKP

Emerha

Itu.. itu hasil penelitian beliau atau gimana pak?

Taufik Amrullah

Jadi itu.. saya kan dulu BPK, kemudian materi-materi dia saya kumpulkan, kemudian apa namanya e.. di edit kemudian apa namanya kita jadikan buku diterbitkan oleh BPFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi ya itulah yang kita pake untuk selama itu, saya nggak ada bukunya pas habis, biasanya peserta minta memang itu

Emerha

Kalo pesertanya sudah ikut diklat itu khususnya dari Kulonprogo, itu ada kewajiban untuk membuat laporan pak sudah sampe mana dia mengetahui?

Taufik Amrullah

Kalo laporan formalnya iya.., tapi Cuma sejauh mana dia mengaplikasikan itu yang kita masih belum... belum ada informasilah, belum ada informasi

Emerha

Kalo penelitian-penelitian dari luar pak yang dikumpulkan, yang bapak kumpulkan adakah untuk dijadikan referensi di Kulonprogo?

Taufik Amrullah

Belum.. belum punya saya..

Emerha

Kalo penelitian sendiri di... dari bapak?

Taufik Amrullah

Belum.. belum ada, jadi saya hanya.. hanya.. me.. me.. apa namanya mencoba ya.. itu membuat catatan kecil yang kasih kan ke jenengan itu tapi belum sempet di bukukan juga ya itulah yang saya ceritakan hanya sekelumit aja

Emerha

Kalo.. kalo hasil penelitian yang pernah meneliti di Kulonprogo kemudian memberi saran perbaikan itu ada diambil juga dari bapak?

Taufik Amrullah

Ada beberapa apa.. beberapa mahasiswa yang apa namanya e.. yang.. ada di S2 itu ada S1 pernah itu ada beberapa itu, ada bukunya ya saya serahkan ke.. BKAD to, semua sudah ada.. ada.. di sana, jadi yang seperti mas, jenengan ini, itu apa namanya minta waktu, minta diskusi kemudian mereka kirimkan hasil penelitiannya kan gitu. Ya.. intinya memang ya.. permasalahan aset itu.. menjadi kendala utama kan mulai opini WTP, tapi kalo sekarang untuk BKAD sekarang kan dengan pencapaiannya hampir sudah sekitar 300.., kalo 2000, kalo RKP 2016 itu sekitar 386 Kabupaten kota yang sudah WTP

Emerha

386 dari...?

Taufik Amrullah

Dari 400

Emerha

5.. 500, 524

Taufik Amrullah

Sekitar itu jadi sudah lebih.. lebih 50%

Emerha

Sudah lebih dari 50% ya..

Taufik Amrullah

Kemaren saya denger waktu.. dapetkan itu.. sekitar ada e.. maaf.. 378

Emerha

378

Taufik Amrullah

378 atas RKP 2016

Emerha

Berarti udah lebih dari setengah ya...

Taufik Amrullah

Ya..

Emerha

Mungkin sekitar 60%

Taufik Amrullah

Makanya ini cara bicaranya kan kalo udah untuk.. Kabupaten kota udah mulai ada kejenuhan to, ya.. yang ini yang lebih perlu digarap lagi adalah untuk penata usaha aset bisa, ini yang pen.. perlu di..

Emerha

Dulu, dulu belum pernah masuk itu ya pak, belum pernah di tata itu aset desa?

Taufik Amrullah

Belum, Permen tentang pengelolaan aset desa kan baru kemaren satu.., nomor 1 tahun 2016 ya. mungkin sebelumnya ada gitu ya, sebelum aturan itu ada tapi kan belum gencar untuk.. untuk.. dijadikan dasar penyusunan neraca, baru setelah Permen 2016 itu mewajibkan itu apa.. inventarisasi aset desa untuk.. untuk.. untuk dimasukkan dalam neraca.. neracanya desa

Emerha

Itu bukan.. bukan.. masuk di.. neraca Pemda, bukan ya?

Taufik Amrullah

Nggak, desa

Emerha

Berarti Pemda memang hanya fasilitas ya..

Taufik Amrullah

Fasilitas iya, makanya untuk tahun 2016 ya.. 15-16 kami ambil satu Kecamatan, untuk pertukaran, 11.. 11 desa itu kami dampingi untuk melakukan inventaris desa

Emerha

Kalo tentang aset itu pak, udah... udah.. punya data base pak yang udah apa.. yang udah resmi gitu apa.. aset?

Taufik Amrullah

Ada..

Emerha

Itu di bawa sendiri ya pak..

Taufik Amrullah

Ya.. SIM sendiri

Emerha

Maksudnya pake server sendiri

Taufik Amrullah

Ya.., jadi kita kan untuk untuk apa namanya.. oh yang anu.. yang untuk.. untuk aset kita, kita belum online, kita masih offline, jadi modelnya masih apa mereka setor flashdisk, tapi data base kita ada di server kita.. kita urus sendiri jadi...

Emerha

Oh itu bisa diakses semua orang?

Taufik Amrullah

Jadi nanti hasil akhirnya kita uploadkan dalam bentuk pdf ke.. kita pdf kan, jadi yang kemaren yang apa namanya, salah satu untuk pen.. e.. apa e.. untuk transparansi keuangan adalah waktu me.. menampilkan data aset Pemerintah kabupaten Kulonprogo selain data anggaran

Emerha

Itu ada peraturannya ya yang khusus?

Taufik Amrullah

Ya.. ada udah buat

Emerha

Berarti sering diperbaharui kalo misalnya..

Taufik Amrullah

Ya.. setiap tahun hasil RKPd, jadi setiap.. apa namanya setiap akhir tahun hasil RKPd e.. kita uploadkan untuk neraca akhir tahun

Emerha

Iya.., kalo dari Pemda yang melakukan penelitian ada pak tentang aset misalkan ada permasalahan tentang aset ini terus dilakukan penelitian Pemda sendiri yang melakukan?

Taufik Amrullah

Belum ada..

Emerha

Belum ada ya..

Taufik Amrullah

Kalo.. kalo.. apa.. kalo.. personal ada, tapi terbatas dilaporan keuangan, laporang keuangan tentang aset itu kan ada, karena bidang anggaran, dari wakil sekertariat.. sekertariat ada itu

Emerha

Menurut bapak kalo sekarang kan 2017 WTP sudah ya, itu seberapa besar kontribusi aset tetap terhadap WTP?

Taufik Amrullah

Maksudnya?

Emerha

Kan sebagian besar itu kan total..

Taufik Amrullah

Oh nilai nya?

Emerha

Ya nilainya..

Taufik Amrullah

Ya.. kalo dari lihat totalitas dari laporan keuangan kita itukan aset itu akan 70% lebih dari, ya.. 70% dari di daftar di.. neraca daerah, ya sehingga makanya temennya akun masuk tidak.. tidak la.. tidak apa.. ada kesalahan yang lebih batas toleransi R.. itu akan menyebabkan 3W intinya kan di situ. Data terakhir coba tak..

Emerha

Kalo hasil-hasil seminar, hasil-hasil rapat.. hasil apa.. e.. mengajarnya bapak di PSEKP itu apakah di.. di bikin dalam bentuk file terus semua orang bisa ambil itu ada pak?

Taufik Amrullah

Belum...

Emerha

Itu nggak ada ya..

Taufik Amrullah

Heheheh, itu saya. kemaren udah anu, udah dari pihak PSEKP sendiri, sudah minta.. minta di.. anu.. minta apa namanya, untuk dikumpulkan itu kemudian kita buat buku gitu, ya.. sebenarnya kalo sudah tersusun di... di mana file sini sudah ada, Cuma ya mungkin nanti kita tindak lanjuti itu, itu.. itu penting juga untuk sharing juga

Emerha

Artinya siapa.. siapa yang.. mau kan untuk belajar?

Taufik Amrullah

Ya.. ya.. rencana saya juga pengen gitu itu berbagi tadi, seperti.. orang Gorontalo itu

Emerha

He,.. dia bikin satu blog

Taufik Amrullah

Ya.. he'e

Emerha

Khusus pengalaman-pengalaman dia, dia ungkapkan di situ kemudian menjadi.. menjadi orang terinspirasi gitu

Taufik Amrullah

He'em he'em betul, ya memang ini 2011, 2012 itu kan e.. materi-materi yang apa namanya e.. yang bisa kita anu kan.. ehm... apa.., mulai dari.. 3 mei

Emerha

Termasuk di website Pemda juga nggak ada dibikin kayak gitu?

Taufik Amrullah

Belum ada, heheheheh. Ya.. ya.. tanyalah macem-macem

Emerha

Tapi apa bapak bisa bikin satu apa.. satu vlog di itu, terus di ini ya pak ya, nanti bisa akses semua kan semua tulisan bapak kan bisa lari ke situ?

Taufik Amrullah

Ya.. saya mulai dari persediaan, aset tetap, apa itu optimalisasi, banyak kok ini, ya kelemahan tadi mungkin hampir sera.. hampir 50-an anu adalah yang udah termodifikasi ya..

Emerha

Kemaren saya nyusun bab pembahasan saya, sebagian saya kutip dari sini, dari bapak ini saya.., tapi saya cantumkan sumbernya, hehehehe nggak pa..

Taufik Amrullah

Tak tak tak anu tindaklanjuti itu bagus

Emerha

Jadikan sekarang kan, semua universitas kan wajib publikasi pak, jadi hasil laporan itu wajib publikasi jadi muncul semua di internet lah nanti

Taufik Amrullah

Ini kayak ini.. langsung apa ke.. terinter.. kemaren sama besok Kamis kan ini, jadi ya.. ya.. nanti ke depan, memang versi KPDA itu, malah sana ada dana..dana ini.. jadi dana.. ada.. be.. ada insentifnya lah kalo mau.. mau buat buku gitu ya, udah buat aja pak. Ya.. Cuma Cuma karena waktu ya mungkin, mungkin nanti memang ada juga

Emerha

Kalo soal e.. peneli..penelitian dari e.. dari luar terus dikumpulkan bapak bikin dalam bentuk buku itu sudah pernah juga ada, hasil-hasil misalkan 10 penelitian dari sini, terus dirangkum semacam rangkuman gitu?

Taufik Amrullah

Belum.. belum belum

Emerha

Itu juga belum ada ya?

Taufik Amrullah

Kalo itu hanya saya ambilka, saya masukkan menjadi bahan materi-materi itu aja ya.., materi-materi itu yang.. yang apa namane dari..

Emerha

Selain.. untuk ikut diklat di PSEKP ada ini pak e.. staf bapak yang diutus untuk tugas belajar, selama bapak menjadi?

Taufik Amrullah

Selama saya di sini belum..

Emerha

Belum ada..

Taufik Amrullah

Belum yang namanya tugas belajar, ini temen-temen tak minta anu.. yo belum ada yang anu ini

Emerha

Kalo atas kemauan mereka sendiri izin belajar?

Taufik Amrullah

Kalo izin belajar ada, yang ambil S1, S1 ini

Emerha

Itu terkait aset juga rata-rata?

Taufik Amrullah

Ya sekarang ngambilnya bukan aset tapi dia ngambil di manajemen secara umum

Emerha

Hem..

- d. Wawancara ke-4 dengan Pak Taufik, pada Senin, 16 Juli 2018, pukul 14.04 WIB di ruang kerjanya, bidang aset. Topik utama yang diwawancarai adalah tentang permasalahan, kendala dan solusi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kulon Progo (RM4).

Emerha

Nah, selama Bapak jadi Kabid Aset, apa permasalahan tentang pemutusan aset yang Bapak hadapi?

Taufik Amrullah

Ya secara umum kalau sekarang kan karena paling tidak puncak pimpinan itu sudah sudah tahu bahwa aset berpengaruh terhadap opini, maka mereka sekarang sudah mau memperhatikan pengurus barang itu. Sehingga yang dulunya pengurus barang yang tidak diperhatikan sekarang sudah mendapat perhatian. Ini kan akan berbeda di dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga secara umum ya permasalahan-permasalahan yang ada itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti dulu kan gitu. sehingga ee bisa kita atasi, kita selesaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau kita awalnya dulu *goal*nya adalah mencapai opini WTP kan berarti masuk di dalam tataran penata usahaan. Penata usahaan sudah *clear* berarti sekarang sudah masuk di dalam pengamanan. Pengamanan selesai dengan baik nanti kan masuk di optimalisasi. Nah, inilah yang sekarang saya ingin juga mendukung kebijakan besar juga yang sekarang berusaha untuk bagaimana mendapat ee membuat strategi pengelolaan aset itu bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ee langkah yang ingin saya lakukan untuk itu ini untuk tahun 2018 kita mencoba untuk membuat *roadmap* tentang pengelolaan BUMD yang dalam tanda kutip adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan. Ya kan itu. Nah, salah satunya adalah untuk penguatan permodalan BUMD, kita mencoba menyertakan modal dalam bentuk aset yang biasanya kita penyertaan modal kan dalam bentuk uang. Nah, ini kita coba untuk tahun 2018 ini menyertakan modal tanah kepada dua BUMD, yang dalam hal ini adalah BPD Bank Pasar dan PT. SHK Aset Adikarta masing-masing satu bidang.

Emerha

Nah itu kendala yang paling signifikan yang Bapak rasakan?

Taufik Amrullah

Ya kendala yang apa, yang signifikan untuk pengambilan kebijakan adalah menyamakan persepsi itu. Jadi kita perlu mengadakan komunikasi intens dengan dewan, kemudian komunikasi yang sama dengan sekretariat untuk menyamakan persepsi kita terhadap *goal* yang ingin kita tuju.

Emerha

Menurut Bapak apa penyebab sampai kurang komunikasi itu?

Taufik Amrullah

Ya karena kan masing-masing kita beda kepentingan. Karena perbedaan kepentingan inilah yang mungkin bisa menyebabkan persepsi yang berbeda. Jadi seperti penyertaan modal itu kan ada pemikiran bahwa kalau modal aset diserahkan kepada BUMD itu sudah dianggap sebagai kekayaan yang dipisahkan. Itu kalau suatu saat hilang bagaimana seperti itu. Padahal kan kalau kita menata pada *good government* itu kan perusahaan daerah pun juga diatur dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga untuk pengamanan terhadap aset yang kita sertakan sebagai penyertaan modal saya rasa masih bisa.

Emerha

Terus solusi yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah itu sudah pernah dilakukan?

Taufik Amrullah

Jadi kita adakan semacam, jadi kita bentuk forum komunikasi BUMD.

Emerha

Emh

Taufik Amrullah

Yang di dalamnya melibatkan semua direktur dari BUMD, kita punya empat BUMD yang 100% milik daerah dan BPD itu yang kita hanya punya saham 6%. Nah, ini kita ada pertemuan berkala yang tiga bulanan kita lakukan. Dan juga anggotanya pimpinan dewan. Jadi pimpinan dan wakil pimpinan dewan kita masukkan sebagai salah satu anunya.

Emerha

Forum komunikasi BUMD itu anggotanya siapa semua Pak?

Taufik Amrullah

Iya?

Emerha

Forum komunikasi?

Taufik Amrullah

Itu semua direktur BUMD ikut kemudian kalau dari kita instansi-instansi yang terkait dengan BUMD. Kemaren kita terakhir kita mengadakan pertemuan untuk antisipasi bandara. Jadi pasca bandara selesai apa yang bisa kita lakukan itu kita buat kemarin. Pertemuannya sebelum puasa.

Emerha

... (05:16) Pak ya?

Taufik Amrullah

Dokumentasinya ee

Emerha

Menurut Bapak kenapa tadi komunikasi itu menjadi penyebab pengambilan kebijakan aset?

Taufik Amrullah

Ya tadi ada perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan. Yang yang seringkali menyebabkan kita kan

Emerha

Misalnya seperti apa Pak contohnya?

Taufik Amrullah

Jadi ee disatu sisi misalnya dewan keinginannya hanya aset itu model disewakan saja, tidak perlu diikutsertakan dengan alasan-alasan tertentu. Nanti contoh teknis yang terjadi dengan alasan. Itu pas kemaren itu pertemuan sebelum lebaran beranggotakan semua apa direktur BUMD yang ada dan anggota dewan. Kemudian sebelumnya itu bulan apa, bulan oh April, 26 April.

Emerha

26 April?

Taufik Amrullah

Iya. Ini tanggal 8 April. Ini kita buat sebagai, kita buat leleh-leleh semacam ini Pak. Ya kegiatan-kegiatan yang formal ini ya kita adakan.

Emerha

Ini masuk kegiatan informal ya?

Taufik Amrullah

Informal.

Emerha

Kalau dari aspek transparansi dan akuntabilitas Pak, apa kendalanya? Untuk mentransparansikan aset seperti yang Bapak katakana tadi.

Taufik Amrullah

Kita sekarang ee SIM kita belum *online*.

Emerha

Belum online?

Taufik Amrullah

Belum *online*. Jadi mungkin setahun dua tahun kedepan kita mulai meng-*online*-kan itu dengan catatan, kalau dengan *online* itu kan berarti kan semuanya itu bisa mengakses tapi dalam kutip terbatas. Mungkin kedepan itu.

Emerha

Selama ini apa yang menyebabkan tidak bisa online?

Taufik Amrullah

Iya. SIM kita memang belum kita anu. Jadi kendala-kendala di jaringan, kendala-kendala di program itu yang yang kemaren menjadikan apa namanya, kita masih bertahan dengan dengan model *offline*. Karena ee *user* saya kan lebih dari 500 orang. Jadi kalau dipakai bersama-sama itu tidak kuat. Nah, berbeda dengan SIM keuangan. SIM keuangan itu kan untuk sekolah itu kan yang hanya dinas Pendidikan. Jadi satu, jadi hanya membawahi sekitar 42 SKPD. Nah, kita puskesmas sama sekolah-sekolah masuk itu mereka sama-sama pakai anu, pakai apa namanya, pakai *online* nggak kuat. Dan dulu saya sampaikan ke njenengan bahwa kita sudah punya apa namanya, pernah membuat apa, membuat sistem dalam bentuk *online* tapi masih belum berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi kita kan ada apa namanya, sudah saya kasihkan ke njenengan belum ya?

Emerha

Yang apa Pak?

Taufik Amrullah

Evaluasi SIM.

Emerha

Oh belum. Kalau itu sih belum ada.

Taufik Amrullah

Belum ya?

Emerha

Iya.

Taufik Amrullah

Bentar bentar. Saya sampaikan.

Emerha

Jadi kalau yang belum online kayak gitu sekarang solusinya apa Pak?

Taufik Amrullah

Solusinya ada. Jadi kita modelnya setor *flashdisk* atau kirim email. Jadi kita kirim email, setor *flashdisk* atau kirim email yang ini.

Emerha

Itu memang butuh biaya besar Pak untuk onlinenya Pak?

Taufik Amrullah

Nggak.

Emerha

Kalau kayak Bapak bilang tadi itu kayak jaringan?

Taufik Amrullah

Nah, yang agak itunya apa namanya, penguatan itu aja, jaringan aja. Sewa jaringan itu yang kalau bahasanya teman-teman *bandwidth*nya dibesarin gitu lo. Nggak banyak sebenarnya, hanya saja nanti kalau kita dengan yang model-model sekarang itu lebih murah bisa Pak. Cuma itu, kita masih terkendala di programmernya kan yang masih. Aduh, nggak ada ya. Sambil saya carikan kalau ada lagi.

Emerha

Iya Pak. oke untuk sementara itu. Tambahan wawancara saya. Insyaallah saya mulai datanya Pak. kalau masih kurang saya wawancara lagi.

Taufiq Amrullah

Sama-sama.

- e. Wawancara ke-5 dengan Taufiq Amrullah, pada Senin, 17 September 2018, pukul 13.05 WIB di ruang kerjanya. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Nah, kalau kayak ini kan di bidang perencanaan. Ini kan ada delapan kegiatan yang untuk transparansi. Nah, kegiatan ini saya pakai teori knowledge convection, dia masuk eksplisit knowledge. Jadi dia pengetahuan eksplisit yang kelihatan. Jadi ini saya golong-golongkan ke masing-masing eksplisit knowledge. Jadi kayak ini. Terus sinergi bersama stakeholder dengan melibatkan BKD. Jadi ini itu unsur transparansi. Ini terbuka. Bisa dikatakan seperti ini.

Taufiq Amrullah

Termasuk tadi golongannya ya, didalam pelaporan sama anunya ya.

Emerha

Pelaporan. Jadi ada empat tahap nih perencanaan.

Taufiq Amrullah

Jadi setelah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan satunya penata usahanya ya. itu hasil lihat kesimpulan tadi ya. Oke. Satu yang . . . (01:03) tadi.

Emerha

Ha ini yang saya profil Pak. Bapak keberatan Pak kalau saya tulis nama Bapak di kutipan wawancara. Kutipan seperti ini. Karena kan biasanya kalau ada yang sifatnya rahasia itu tidak disebut nama tapi cuma inisial. Tapi kalau yang tidak rahasia mungkin makanya saya minta izin ke Bapak.

Taufiq Amrullah

Nggak masalah. Kita untuk ngoordinasi itu kan gak papa. Saya jadi diminta kadang-kadang apa namanya, misalnya undangannya ya undangan Pak Sekda yang kemudian tapi pelaksana saya gitu gak masalah.

Emerha

Iya oke gitu aja nanti saya akan tulis nama lengkap Bapak ya dan jabatannya. Oke. yang kedua ini terkait dengan kendala kemaren yang Bapak sampaikan waktu wawancara itu Sim asset yang tidak terintegrasi dengan Simda ya. Nah, itu kan kemaren kendalanya kan masalah user yang banyak ya Pak, kendala sehingga butuh berdiet atau ditambah. Sekarang itu berdiet berapa mega Pak?

Taufiq Amrullah

Ya apa namanya untuk yang haduh kapasitasnya saya nggak tahu persis. Tapi sudah kita konfirmasi ke Kominfo nanti 2019 mau dianu.

Emerha

Itu rencananya mau gimana Pak? mau pakai Intranet atau?

Taufiq Amrullah

Nanti pakai sementara Intranet seperti yang Simda keuangan. Jadi begitu tidak pakai internet.

Emerha

Oh tidak pakai internet?

Taufiq Amrullah

Iya, intranet. Karena kan terbatas itu nanti kan terbatasnya dipakai apa namanya, dipakai untuk scoopnya scoop internal SKPD aja.

Emerha

Jadi kalau untuk melinkan semua SKPD itu

Taufiq Amrullah

Jaringan intranet.

Emerha

Jaringannya ada?

Taufiq Amrullah

Ada. Untuk Pemda sendiri.

Emerha

Oh itu sudah diarahkan ya Pak?

Taufiq Amrullah

Iya. Nanti itu pakai www.kulonprogokab.go.id. Biasanya kan kayak gitu. Pakai itu. Biasanya itu nanti.

Emerha

Itu kalau misalkan dipihak ketiga itu nanti gimana menurut Bapak? Misalkan mau online, yang online itu databasenya aja?

Taufiq Amrullah

Bisa. Bisa jadi. Ya berarti kan fungsinya hanya sebagai pengembang sistem aja kan?

Emerha

Heém.

Taufiq Amrullah

Nggak masalah. Nggak masalah dalam artian data itu tetap dipegang oleh Pemda, dalam artian ini kan tidak akan keluar sebagai data yang keluar. Nggak masalah kalau itu dikembangkan oleh pihak ketiga.

Emerha

Bapak lebih pilih mana dipihak ketiga atau diolah sendiri kayak intranet kayak gitu?

Taufiq Amrullah

Sama aja. Tapi kalau seandainya kita pilihannya dengan internet ya, kalau dengan internet itu kan ini aksesnya kan semua orang bisa, akses terbuka. Kalau intranet lebih tertutup untuk internal ya. Cuma hanya saja dari segi keamanan intranet lebih terjaga. Kalau internet kan ini kalau seandainya ada pengamanan yang lebih bagus gak masalah.

Emerha

Iya. Masalahnya kekurangan itu database kita bisa diambil orang ya?

Taufiq Amrullah

Heém. Karena kalau yang diset keuangan itu kan rata-rata dimana-mana itu pakai intranet.

Emerha

Kalau soal biaya bagaimana Pak? Murah mana intranet dengan pihak ketiga?

Taufiq Amrullah

Hampir sama aja.

Emerha

Hampir sama ya.

Taufiq Amrullah

Maksudnya dipihak ketiga kan?

Emerha

Yang pakai itu

Taufiq Amrullah

Tombol jaringannya?

Emerha

Heém.

Taufiq Amrullah

Ya sama aja. ya maksudnya disini kan juga ada biaya pemeliharaan dan sebagainya kan di sini. Yang honoronya dapat honor tim ya. Kalau ini langsung dengan pihak ketiga kita control LS. Ya memang nilai dari sisi ini lebih besar nilai awalnya, tapi kan kalau nanti ini ada biaya pemeliharaan trouble-troble lagi kan juga bayar lagi, intranet juga lebih banyak nantinya.

Emerha

Kalau intra?

Taufiq Amrullah

Heé iya internetnya. Kalau teman-teman ngerjakan sendiri dalam artian seperti yang saat ini kan itu semua trouble-trouble kan ada di Kominfo yang menyelesaikan. Lebih murah maksud saya, lebih murah bukan sama maksudnya. Jadi untuk biaya-biaya kalau dengan pihak ketiga biasanya kan nilainya besar.

Emerha

Lebih mahal ya?

Taufiq Amrullah

Heém.

Emerha

Nah, itu kalau soal mau dionline kan tadi itu sekarang udah bagaimana persiapannya?

Taufiq Amrullah

Ya ini kita kemaren korrordinasi dengan Kominfo ya nanti kalau seandainya oke nanti 2019 kita ujicoba. Ini kan kita yang untuk Sim obat itu kan sudah internet. Ya Sim obat itu kan jaringannya kan jaringan udah terbuka semua jadi diakses darimana pun juga.

Emerha

Jadi semua by itu connecting dengan rumah sakit, dengan atau?

Taufiq Amrullah

Sendiri-sendiri. Dan yang obat itu hanya obat Puskesmas sama bidang farmasi. Jadi untuk Puskesmas Kulonprogo itu connect dengan bidang farmasi. Kalau rumah sakit sendiri.

Emerha

Itu SIM obat itu dibikin sendiri ya Pak?

Taufiq Amrullah

Heém. Sama Kominfo.

Emerha

Itu kenapa nggak pakai Simda barang Pak?

Taufiq Amrullah

Ya karena lebih kompleks kemaren. Jadi yang obat itu kan lebih kompleks. Jadi biar dipakai untuk lebih apa, transaksi kan harian. Transaksi harian itu ada yang Puskesmas itu malah transaksi satu hari bisa lebih dari 300 transaksi.

Emerha

Berarti kalau Simda tidak bisa mengakomodir itu ya?

Taufiq Amrullah

Sebenarnya bisa. Tetapi kan yang Simda sekarang ini kan hanya di keuangan saja.

Emerha

Yang Simda barang maksudnya.

Taufiq Amrullah

Simda barang?

Emerha

Iya.

Taufiq Amrullah

Bisa. Hanya saja itu Simda barang yang kita pakai untuk barang kan hanya tidak online to. Nah, itu kan karena kebutuhan dibidang Farmasi itu harus tahu kondisi barang saat ini mereka kan harus terintegrasi semua Puskesmas. Jadi kalau yang lain-lain kan hanya internal mislanya ATK dan sebagainya itu kan tidak perlu terintegrasi dengan yang lain-lain. Nah, ini untuk bidang farmasi dengan obat-obat di Puskemas kan terintegrasi untuk mengetahui stok-stok obat di tiap harinya.

Emerha

Kalau selain obat sama persediaan yang lain kan ada Sim asset sendiri juga?

Taufiq Amrullah

Ada.

Emerha

Ha itu kenapa nggak pakai Simda barang saja? Misalkan untuk motor, mobil, kan ada biasanya kan kode-kode barang itu di Simda barang?

Taufiq Amrullah

Ya itu tadi. Satu dari sisi kebutuhan kemudian yang kedua pendekatan-pendekatan apa, pendekatan kemudahan user pemakai. Yang ketiga dari tingkat aman, hebat karena faktor biaya. Jadi kenapa kita pakai beberapa aplikasi yang kita gunakan ya pertimbangannya tadi, pertimbangan seperti yang kemaren saya sampaikan itu kan karena pertimbangan semua tadi. Jadi kalau kembali lagi untuk yang, untuk asset tetap, tata usaha aset tetap ini kan kita gunakan pakai Sim aset. Yang untuk persediaan kita di sini sebenarnya ada Sim persediaan.

Emerha

Sim buatan sendiri ya?

Taufiq Amrullah

Heém. Persediaan. Tapi ini juga ada yang masuk di sini. Ya jadi kalau penata usahanya satu maka yang masuk di sini di sini ada Sim asset dan persediaan. Nah, saya jawab persediaan. Ini kalau yang penata usahanya cuma satu seperti di sekolah itu kan satu. Berarti ini akan jadi satu. Tapi ada yang lebih konkrit lagi ini khusus obat. Nah, obat ini kan ada 21 Puskesmas yang harus terintegrasi dengan bidang farmasi. Nah, bidang farmasi ini akhirnya kita membuat Simu namanya, Sim Obat. Nah, ini kita modelnya dengan jaringan internet. Nanti yang nyiapkan adalah Kominfo. Nah, di rumah sakit ada Sim obat rumah sakit, RSUD juga ada sendiri. Obat tapi untuk internal mereka tapi bukan pakai yang ini kan gitu. Ini karena kompleks makanya ini belum menjangkau yang ini. Ini mereka buat sendiri RSUD. Tapi pada saat laporan akhir, laporan akhir itu kan ada namanya rekon data, rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini ditempat kami semua asset tetap sama persediaan akan mendapatkan satu laporan.

Emerha

Nah, itu tadi makanya yang saya tanyakan di sini, posisi Simda barang ini tidak dipakai di sini ya?

Taufiq Amrullah

Yang untuk mana?

Emerha

Di salah satu atau di mana?

Taufiq Amrullah

Simda barang yang di mana? Kita nggak pakai Simda barang.

Emerha

Nah itu. Maksudnya saya pertanyakan kenapa nggak pakai Simda barang atau kelemahannya WPKP itu?

Taufiq Amrullah

Oh WPKP Itu. Jadi awalnya itu kalau kita pakai Simda barang WPKP kita kan harus mengentry semua, bisa dikatakan kita harus entry awal yang kita waktu itu nggak sanggup. Akhirnya kan kita buat sendiri itu.

Emerha

Kalau yang ini nggak entry awal?

Taufiq Amrullah

Jadi dari data excel yang ada kita inport langsung masuk.

Emerha

Oh kalau Simda barang nggak bisa ya?

Taufiq Amrullah

Nggak bisa.

Emerha

Oh pantesan.

Taufiq Amrullah

Itu kalau kelemahan dulu kan disitu. Padahal kita kan punya 500 unit pengelola barang sampai sekolah.

Emerha

500? User?

Taufiq Amrullah

Iya. User.

Emerha

Memang kalau Cuma berapa mega gak bisa ngangkat itu ya Pak?

Taufiq Amrullah

Iya. Makanya itulah yang kita akhirnya kita pakai Sim sendiri itu. Dan rata-rata yang untuk Simda barang di beberapa daerah yang saya tanya itu mereka terbatas cuma sampai di ROPD. Sekolah-sekolah nggak menata usahakan di Simda barang. Coba nanti kalau nanti penelitian lebih dalam lagi.

Emerha

Iya. Soalnya penelitian saya tidak sampai kesana.

Taufiq Amrullah

Itu yang dianu mereka hanya data dari dinas Pendidikan udah sampai situ aja. Tapi di sini ada UPT misalnya ada sekolah ini hanya rekapan di sini. Rekap data atau semuanya data masuk kesitu.

Emerha

Nah, ini kalau mau link ke Simda keuangan gimana untuk pembuatan neraca?

Taufiq Amrullah

Ya kan kalau kita masukkan hasil akhir aja.

Emerha

Jadi bisa diexport, export import?

Taufiq Amrullah

Nggak. Entry. Entry hasil akhir.

Emerha

Entry ulang?

Taufiq Amrullah

Iya.

Emerha

Yang entry ulang tadi ini di sini? Laporan ini?

Taufiq Amrullah

Iya. Nanti kita masukkan ke keuangan.

Emerha

Entry satu persatu ya? Tapi nggak banyak ini ya?

Taufiq Amrullah

Nggak.

Emerha

Jadi tinggal bentuk jurnal berapa penyusutan, berapa total ini? Jadi tinggal totalnya aja?

Taufiq Amrullah

Heém. Jadi per tip aja. Kalau itu asset tetap per tip. Nanti itu ada 6 tip. Nanti kalau yang persediaan itu kita ada 4 based klarifikasi. Jadi ya cuma itu aja nanti per SKPD tinggal nentry.

Emerha

Ini kalau koneksinya bisa dikasih konek? Biar nggak perlu input-input laporan?

Taufiq Amrullah

Maksudnya? Dengan Simda keuangan?

Emerha

Dengan simda keuangan.

Taufiq Amrullah

Nggak bisa.

Emerha

Nggak bisa konek?

Taufiq Amrullah

Nggak bisa. Harus sendiri-sendiri programnya. Kan beda program. Jangankan Sim keuangan kita, yang Simda PPKP barang PPKP dengan sim keuangan itu nggak konek.

Emerha

Berarti export import juga?

Taufiq Amrullah

Iya. Nggak konek.

Emerha

Saya pikir bisa. Jadi begitu kita misalkan Simda pendapatan sama Simda keuangan, saya mau cari tahu berapa pendapatan tinggal lihat dari Simda keuangan itu nggak bisa kayak gitu?

Taufiq Amrullah

Oh kalau keuangan, keuangan itu kan yang jalan itu kan mulai dari perencanaan, terus kemudian realisasi pendapatan, belanja, itu kan sudah anu pendapatan belanja itu sudah jadi. Tapi yang untuk barang itu kan nggak anu, ditata sendiri. Jadi hanya rekon, akhirnya rekon antara realisasi anggaran dengan berapa pembelian dan penambahan aset.

Emerha

Iya iya. Oke.

Taufiq Amrullah

Nah, kalau memang mau masuk malah dialami yang daerah yang menerapkan Simda keuangan dan asetnya bersama-sama. Itu kalau larinya ke Simda barang yang PPKP.

Emerha

Oh gitu ya. Berarti kesimpulan umumnya tadi, Bapak mau linkan tadi itu jadi menggunakan tinggal nambah bandwitchnya aja ya?

Taufiq Amrullah

Ya kalau jadi ini kita mau rubah rencana. Jadi nanti kalau seandainya mau online, ini kan dengan kita pakai online ini kan kita rubah. Jadi rubah programnya, jadi rubahnya tidak pakai program ini lagi, kita programnya online. Rencananya gitu. tapi Belum bisa terintegrasi juga dengan Simda keuangan. Heém. Tapi kalau mekanisme yang ini sementara ini offline, ini kan kita sudah berjalannya ke online itu. Sehingga datanya hari ini juga bisa kita terimakan. Ada perubahan di SKPD hari ini, hari ini pun kita juga terima. Kalau ini kan kadang-kadang kan kita terimanya kan sebulan sekali atau dilaporan malah triwulanan atau semesteran.

Emerha

Oke. Terus yang terakhir soal kurangnya strategi pengelolaan aset yang bisa meningkatkan pendapatan daerah? Nah, itu kendalanya kan beda kepentingan, beda juga pemikiran tentang aset. Nah, itu kalau saya sarankan untuk lakukan upaya optimalisasi?

Taufiq Amrullah

Oh oke.

Emerha

Itu bisa? Menurut Bapak gimana misalkan sewa apa tadi Pak, sewa yang dipihak ketigakan itu ya? itu sudah pernah dilakukan?

Taufiq Amrullah

Belum belum.

Emerha

Ha itu ya Pak.

Taufiq Amrullah

Bisa.

Emerha

Oke Pak. Terus

Taufiq Amrullah

Atau maaf tambahan juga untuk kayak misalkan . . . (16:56) BUMD yang selama ini kan, tahun ini baru kita lakukan. Jadi ada tanah yang kegang pasar sama . . . (16:03) itu untuk optimalisasi.

Emerha

Iya. Jadi biar pihak ketiga yang bangun nanti tinggal kontrak 25 tahun umpama. Setelah asset 25 tahun asset jadi milik Pemda. Jadi tinggal bagi pendapatan kan?

Taufiq Amrullah

Heém.

Emerha

Oke Pak.

Taufiq Amrullah

Berarti dah clear ya? udah clear tinggal maju ujian aja ya?

Emerha

Iya. Makanya saya konfirmasi lagi sekali lagi. Karena ini kan masuk disaran-saran Pak. jadi kan saya akan memberikan saran. Nanti saya akan ditanya kalau ini kamu pasti masuk akal nggak, jangan kamu kasih saran begini tapi ternyata sampai sana gak dipakai jadi saya konfirmasi. Yang terakhir saya boleh minta foto Bapak Pak untuk profil dipartisipan saya?

Taufiq Amrullah

Oh gitu. Oke. Silahkan.

13. Sri Sugiyarti

- a. Wawancara ke-1 dengan Ibu Sri Sugiyarti, SE pada 14 Mei 2018, pukul 08.00 pagi di ruang kerjanya, Ruang Perbendaharaan. Sri Sugiyarti adalah Kepala Subbidang Belanja di bawah Kabid Perbendaharaan di BKAD sampai dengan saat ini. Topik wawancara adalah mekanisme pelaksanaan belanja di PPKD (RM2).

Q.1. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas melalui struktur pengelola keuangan di bidang perbendaharaan

Emerha

Pemilihan kuasa BUD itu bagaimana, apakah harus Kabid Perbendaharaan?

Sri Sugiyarti

Iya, aaahh, kuasa BUD itu banyak. Jadi kita ada SK Kuasa BUD yang SK Bupati tentang kuasa BUD. Tidak hanya bidang perbendaharaan tapi ada bidang pajak, bidang aset. Ada SK nya dan di SK-kan. Tidak semua bidang menjadi kuasa BUD. Jumlahnya itu saya lupa, Cuma perbendaharaan, pajak, aset. Nanti lihat fotokopi SK-nya. Biar jelas.

Emerha

Dalam perda No.5 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disebutkan ada perbup tentang mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban bendahara? Dimana perbup-nya, saya cari kok gak ada?

Sri Sugiyarti

Ada. Di belakang ada. Di penatausahaan bendahara pengeluaran. Di sisurnya. Jadi nanti ada judul penatausahaan bendahara pengeluaran, sudah lengkap.

Emerha

Di dalam sisur tersebut apakah ril memang dipratikkan seperti itu ?

Sri Sugiyarti

Harus. Harus melaksanakan seperti itu. Jadi kan dibuat oleh tim yang terdiri dari auditor, badan pelayanan pengadaan. Jadi auditornya Inspektorat to, terus kami mewakili para bendahara karena yang melaksanakan bendahara yang mengarahkan di sini. Terus sisur itu juga ini harus sesuai dengan aturan di atasnya, permendagri. Eh kolaborasi permendagri 13 dengan perpres pengadaan barang dan jasa.

Emerha

Kalau untuk PPK-SKPD bagaimana bu pembentukannya?

Sri Sugiyarti

Eeeh..PPK-SKPD Sk-nya oleh, di-SK-kan apa tidak ya? Kayaknya lupa, tapi kayaknya di-SK-kan.

Emerha

PPK-SKPD itu di setiap SKPD, kalau di BKAD di mana, di sekretaris?

Sri Sugiyarti

Di sekretaris. Di sekretaris. Jadi sudah diatur eeeh apa, pencatat penatausahaan keuangan itu kalau eee Badan itu sekretaris, ada KTU aaa, jadi orang nomor dua lah. Jadi sudah diatur.

Emerha

Itu memang begitu kah bu, harus sekretaris yang jadi PPK-SKPD? Tidak bisa di bawah Kasubag Perencanaan misalnya?

Sri Sugiyarti

Ah tidak bisa, karena PPK itu tidak boleh dijabat dirangkap oleh PPTK. Itu PP 58 tahun 2005.

Emerha

Itu PPK di sekretaris memang melekat seperti itu?

Sri Sugiyarti

Iya, pejabat penatausahaan keuangan. Kita mengaturnya seperti itu dan aturan itu PPK tidak boleh dirangkap oleh PPTK.

Emerha

Jadi PPTK jatuh dimana, di kabid?

Sri Sugiyarti

Semuanya PPTK itu. Eselon IV itu semuanya PPTK. Kabid itu kan penanggungjawab kegiatan.

Emerha

Oh beda PPTK sama penanggungjawab kegiatan?

Sri Sugiyarti

Ya. Mungkin maksudnya PPKom apa ya? Kita kan membedakan pejabat sama-sama PPK. Kalau yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen itu beda lagi. Jadi kalau kita namanya di sisur kita bunyinya eeee terjemahannya PPKom. Kalau PPK yang saya sampaikan tadi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Oh PPK.

Emerha

Kalau PPK kan di sekretaris. Kalau PPKom dimana?

Sri Sugiyarti

PPKom itu kewenangan pengguna anggaran untuk menunjuk eee biasanya kepala bidang. Atau kalau tidak ada syaratnya PPK ee PPKom kan harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Atau staf pun boleh asal memenuhi syarat punya sertifikat pengadaan. Ditunjuk dengan SK kepala dinas. Kalau tidak ditunjuk tidak bisa otomatis.

Emerha

Untuk anggota dari PPK, darimana saja, bu?

Sri Sugiyarti

Ini pak Pejabat Penatausahaan Keuangan ya. PPK kan punya pembantu, nah itu di kasubbag keuangan. Pembantunya kan verifikasi SKPD sama akuntansi, pembuat SPM. Ada tiga. Jadi itu wilayahnya PPK-SKPD. Kasubbag keuangan SKPD. Jadi semua SKPD di Kasubbag keuangannya, stafnya itu merangkap anggota PPK.

Emerha

Dalam hal pembuatan di SKPD sini (BKAD) selaku PPKD, kalau bendahara SKPD mengajukan SPP harus diverifikasi sama PPKD?

Sri Sugiyarti

Ah iya, jadi begini. Itu di penatausahaan bendahara pengeluaran sebenarnya sudah ada. Di sisdur kalau bapak sudah membaca, di situ sudah dijelaskan. SPP itu kan memang ranahnya bendahara pengeluaran. Ya terus eee setelah SPP disetujui baru SPM. SPM sudah wilayahnya PPK-SKPD. Yang mengajukan SPP kan bendahara. SPM itu yang membuat ranahnya PPK-SKPD, karena ada pembantu PPK itu pembuat SPM, verifikasi, dan fungsi akuntansi. Jadi sudah beda. Simdanya jadi satu. Iya jadi semua pakai satu. Bendahara pengeluaran bisa juga buka SPM. Kalau kewenangannya tapi kadang-kadang kalau kurang SDM suatu SKPD kadang-kadang saling membantu.

Emerha

Apakah di SKPD lain ada seperti itu? Maksudnya bendahara pengeluaran yang membuat SPP dan juga SPM dirangkap?

Sri Sugiyarti

Saya kira praktiknya ada. Istilahnya kalau SPP, SPM itu masih dalam suatu, beda kalau SP2D mengandung arti yang minta dan yang memberi harus beda. Kebijakan masing-masing kalau memang benar-benar tidak ada kadang-kadang ya fungsinya itu tidak dilakukan sekali. Berdiri sendiri ya, terpisah. Jadi wilayahnya bendahara pengeluaran beda dengan PPK.

Emerha

Dalam hal pengajuan SPM tadi, khusus GU dan LS, apakah ada batasan frekuensi pengajuan GU?

Sri Sugiyarti

Ya kalau GU minimal 60% dari uang persediaan. Itu ada SK-nya. Jadi bunyinya itu ada di SK uang persediaan, penetapan uang persediaan dalam SK Bupati.

Emerha

Berarti kalau melebihi dari 60%, ditolak ya?

Sri Sugiyarti

Boleh. Minimal. Ya maksimal sebesar UP. Di bawah 60% belum bisa.

Emerha

Khusus yang LS apa ada juga yang LS selain GU. Kan mirip GU itu? Yang membedakan kan cuma pertanggungjawaban yang harus ada terlebih dahulu?

Sri Sugiyarti

Yang mirip eee, beda. Jadi kalau GU itu sudah dibelanjakan, jadi uangnya sudah keluar. Kan namanya "ganti" mengganti uang yang sudah dipersiapkan.

Emerha

Kalau mekanisme LS untuk selain pengadaan barang dan jasa, ada?

Sri Sugiyarti

Ada. Eeeeh jadi kita masih ada LS, LS apa ya? LS Gaji, maksudnya kalau LS murni kan harus dengan rekanan. Ya kita juga kan ada LS dengan misalnya bila pihak ketiganya misalnya BPJS Kesehatan. Ada yang LS-nya yang masih LS Bendahara Pengeluaran. Ya karena terdiri dari beberapa misalnya sewa tanah yang di kas desa atau beberapa eeeh,, apa beberapa desa karena kalau kepala desa itu kan bukan pihak ketiga, makanya itu masuk wilayah LS bendahara pengeluaran.

Emerha

Untuk LS bendahara pengeluaran itu pengaturannya bagaimana, berarti pertanggungjawabannya harus ada terlebih dahulu juga sementara uangnya belum dibayar?

Sri Sugiyarti

Haaa, memang aturannya seperti itu. Jadi kelengkapan dokumennya itu termasuk ada kwitansi dan itu sudah harus ditandatangani. Kalau misalnya selain hibah misalnya itu kan ada nota perjanjian hibah. Itu juga semuanya lengkap, jadi tidak bisa kita terus mengeluarkan uang tanpa itu.

Emerha

Berarti LS bendahara pengeluaran itu di-SK-kan juga, lalu bagaimana membedakan yang mana yang harus di GU dan mana yang harus di LS?

Sri Sugiyarti

Jadi kalau di sisdur itu memang tidak diatur secara ini ya, pencairannya dengan apa, tetapi di permendagri kita biar luwes begitu. Jadi kalau itu kaitannya langsung dengan pihak ketiga ya itu LS atau kalau ada dokumen SPK-nya itu LS. Jadi memang tidak dibatasi, kan untuk masing-masing SKPD.

Emerha

Di sisdur itu saya melihat ada 5 rangkap tembusan SPj dan kalau pada saat yang mengajukan sifatnya fungsional yang setiap tanggal 10? Itu untuk siapa saja? Apakah kalau ada pemeriksaan tidak perlu lagi meminta SPj di bendahara?

Sri Sugiyarti

Ehhhh, beda. SPj 5 rangkap itu maksudnya SPj ini ee bukti pengeluaran. Jadi itu 5 itu kalau masuknya di BKAD, kuasa BUD itu hanya satu, fotokopian. Kalau asli harus ada di PPK-SKPD atau di bendahara pengeluaran. Jadi untuk inspektorat satu, untuk BUD satu, kuasa BUD satu, aslinya kan satu, terus masih ada eeeh ini satu untuk apabila ada auditor eksternal memeriksa, ha itu. Mintanya sih asli, ada juga pemeriksa minta gitu bisa fotokopi. Semuanya di bendahara karena dokumen yang ada di sini adalah dokumen untuk pencairan. Kalau hanya untuk sampel, maksudnya kalau ada auditor biasanya eksternal minta sampelnya saja baru melalui SKPD. Di kami kan tembusan, biasanya setelah melihat tembusannya, baru diminta aslinya seperti apa.

Emerha

Mengapa harus fotokopi yang diajukan untuk pencairan, bukan asli?

Sri Sugiyarti

Memang asli harus dipegang oleh bendahara pengeluaran karena tanggungjawab verifikasi itu oleh PPK-SKPD menurut permendagri 13 itu bunyinya seperti itu. Jadi keabsahan itu menjadi kan ada pernyataan tanggungjawab, eeehh secara material keabsahan itu menjadi tanggungjawab PPK-SKPD. Logika kami di pada waktu menyusun perbup itu ya berarti asli harus ada di SKPD karena yang bertanggungjawab dulu kan SKPD. Nah kalau meskipun misalnya eeeh apa kan ada misalnya kwitansi, itu kan juga ada bunyi ini fotokopi yang bermaterai. Jadi tetap kelihatan oh ini ada materainya asli.

Emerha

Kalau misalkan ada kasus penyelewengan, seperti dinas A, biasanya dari aparat kejaksaan atau aparat penegak hukum sering kan mintanya ke BKAD, kadang-kadang mereka itu minta yang asli?

Sri Sugiyarti

Ehhh setelah, dulu memang setelah permendagri 13 semuanya langsung ke ini ke SKPD, kuasa BUD hanya dimintai apa sebagai saksi untuk mendengar, kroscek saja tapi secara apa material, yang jelas yang bertanggungjawab penuh kan SKPD. Jadi kita tidak pernah ini, kita kan hanya dokumen lengkap saja dan sah. Maksudnya sah bisa dilihat dari, itu tadi contohnya misalnya kalau kwitansi ya ada materainya. Lengkap maksudnya sesuai dengan belanja yang ada di sisdur. Jadi seperti itu.

Emerha

Kriteria kelengkapannya itu diatur dimana?

Sri Sugiyarti

Ada di sisdur-nya itu. Di dokumen belanja. Kelengkapan dokumen belanja di perbup 72 itu.

Emerha

Bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD menyeter SPM dimana?

Sri Sugiyarti

Di sini. Di kuasa BUD. Kuasa BUD itu hanya bidang perbendaharaan. Maksudnya untuk SPM yang mengajukan surat perintah membayar. Kemudian yang menerbitkan SP2D itu ya hanya seksi belanja, tidak ada lainnya. Jadi masuknya harus ke sini. SPM-nya. SPM dan kelengkapan dokumennya.

Emerha

Apakah ada verifikator juga di sini?

Sri Sugiyarti

Ahhhhh, sebenarnya namanya bukan tim lagi ya karena ini beda dengan sebelum permendagri karena verifikator ini sebenarnya adanya di SKPD. Nah kita sebenarnya yang pertama memastikan bahwa dananya cukup, dana di rekening belanja itu. Sebenarnya tugas pokoknya itu.. itu.

Emerha

Berarti ketika sampai di sini SPM-nya, dananya langsung cair?

Sri Sugiyarti

Tidak juga. Tetap di...Kan ada kuasa BUD masih mempunyai tugas untuk melihat kelengkapan dan keabsahan. Cuma memang di permendagri itu, ada apa ya satu sisi berbunyi bahwa verifikasi adanya di SKPD dan di satu sisi, kuasa BUD masih harus melihat kelengkapan. Kalau di kabupaten yang lain misalnya Sleman, Kota ahh, kalau Sleman malah tanpa dokumen, misalnya tanggungjawab mutlak saja untuk GU. Nah yang kota itu hanya bukti pengeluaran detil saja tanpa lampirannya. Kita di Kulon Progo, masih lengkap karena memang sisdurnya masih bunyi seperti itu. Tapi mungkin perkembangannya kita juga inilah...eeehh karena memang harus ini harus melepas SKPD untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau selama ini terus jadi ini, nanti di BUD ketahuan salahnya. Jadi kita itu seolah-olah jadi ikut verifikasi padahal verifikasi itu di SKPD karena yang punya verifikator di sana. Tugasnya PPK-SKPD itu nanti di perbup 72 itu silahkan di..iya...sama dengan kuasa BUD kan, bedanya sangat jauh.

Emerha

Berarti memeriksa keabsahan itu BUD ada anggotanya? Sebelum ditandatangani SP2D?

Sri Sugiyarti

Diparaf masing-masing dulu. Jadi kita ada check listnya.

Emerha

Ketika ada pemeriksaan BPK itu tidak dipermasalahkan, semuanya dilimpahkan di PPK-SKPD?

Sri Sugiyarti

Ya memang aturannya begitu. Jadi permendagri-nya. Jadi nanti jenengan juga harus membaca permendagri 13 juga, PP 58 2005, terus sisdur kita itu di perbup 72. Begitu. Itu memang seperti itu amanahnya itu memang sudah benar oleh SKPD karena pengguna anggaran

itu SKPD. Jadi yang bertanggungjawab itu yang menggunakan ya to. Di sini kan kalau kuasa BUD itu malah ehhh kalau intinya, jadi kita waktu sosialisasi dengan BPKP itu ya kalau ada surat perintah membayar ya tugasnya mencairkan asal dananya masih ada. Jadi memastikan bahwa kita kan sebetulnya tidak eehh buktinya itu sudah di ini jadi kalau melebihi musti ada warning di kita, begitu.

Emerha

Bu, tadi ada pembatasan GU 60% itu tujuannya apa, bu?

Sri Sugiyarti

Ehhh, supaya ini loh perputarannya itu cepat. Kalau 100% kan lama.

Emerha

Kalau belum mencapai 60% sementara UP bendahara pengeluaran itu habis ketika dipanjar tapi SPj-nya belum masuk?

Sri Sugiyarti

Jadi UP itu kan menghitungnya, eeehhh yang mau direncanakan dengan GU dibagi duabelas. Jadi harusnya kan minimal satu bulannya GU. Nah kalau semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan anggaran kasnya, perencanaannya dari awal itu gak masalah. Nah kalau ada masalah itu kehabisan uang dan sebagainya, itu karena memang perencanaannya kurang ini, kurang pas.

Emerha

Soal itu gak ada diskresi dari BKAD?

Sri Sugiyarti

Ahhh...Jadi kan ada juga yang TU, tambah uang persediaan kalau sesuai dengan aturan TU yang sifatnya mendesak dari sisi waktu dan uang, haaa boleh. Jadi tetap ada bukan diskresi tapi sudah diatur, silahkan mengajukan tambah uang persediaan.

Emerha

Apakah kuasa BUD juga memeriksa penggunaan UP di bendahara pengeluaran? Adakah kontrol?

Sri Sugiyarti

Memeriksa, tidak juga. Yah kalau itu sudah diatur, ada di ini ya setiap bulan itu ada rakor asistensi. Jadi rakor SKPD. Ya setiap bulan. Ya itu kita melaporkan bahwa SKPD A serapannya sekian. Itu juga untuk penilaian kinerja keuangan pada waktu kita mau mencairkan TPP. Tambahan penghasilan kan syaratnya harus kinerja keuangannya ehh jadi ada merah, hijau, kuning. Jadi detilnya SKPD yang tahu.

Emerha

Biasanya bendahara itu UP-nya habis karena bayar panjar dan pertanggungjawaban belum masuk, kadang dia mengambil langkah untuk LS saja. Apakah itu bisa?

Sri Sugiyarti

Kalau dengan pihak ketiga. Jadi kan di awal itu sebelum mengajukan hitungan UP, itu kan sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, oh ini besok saya mau LS ini. Yang ini, ini, ini, LS, sehingga UP saya tidak terlalu besar sehingga perputarannya juga tidak macet itu sudah oleh SKPD.

Emerha

Setiap SKPD beda-beda ya UP-nya?

Sri Sugiyarti

Beda-beda. Iya beda, karena kan bisa jadi LS-nya seperti di PU belanja kepada pihak ketiga lebih banyak. Belanja modalnya lebih banyak dari belanja rutinnya.

Emerha

Kalau di SKPD pembayaran UP, pembayaran uang panjar, pertanggungjawaban seperti apa, kapan masuk supaya perputaran UP di SKPD itu lancar. Itu diatur dimana kalau di SKPD?

Sri Sugiyarti

Kalau itu masing-masing SKPD punya sendiri-sendiri ya. Ada yang membuat SPP sendiri, itu memang manajemennya sudah oleh SKPD karena kan yang tahu eeh apa keadaannya jadi itu masing-masing SKPD beda-beda. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi. Bisa jadi SOP, atau hanya dengan kesepakatan, ahhh kan boleh maksudnya apa tidak tertulis tapi diatur. Masing-masing SKPD beda-beda. Jadi misalnya BKAD itu kalau sekarang bagi duit, bagi siapa yang menyimpan uang silahkan tiap bulan mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana). Itu terus kan di ini ya di SKPD sudah harus masuk dua minggu sudah sampai di sana. Jadi masing-masing SKPD itu beda.

b. Wawancara ke-2 dengan Sri Sugiyarti, pada Rabu, 19 September 2018, pukul 10.39 WIB di ruang kerjanya, Bidang Perbendaharaan. Wawancara bertujuan mengkonfirmasi temuan dan hasil wawancara sebelumnya (RM4).

Emerha

Saya kan kualitatif jadi kan setiap saya mengutip hasil wawancara saya harus tulis nama sumbernya, jadi saya Cuma konfirmasi ke ibu apa ibu tidak keberatan kalo saya tulis lengkap nama ibu

Sri Sugiyarti

Oh ya...

Emerha

Karena biasanya kalo ada yang mengandung rahasia itu kan biasanya hanya ini... inisial saja

Sri Sugiyarti

Terus...

Emerha

Ya... itu konfirmasi saya kalo...

Sri Sugiarti

Oh ya... ini... ini to..., ini kok ada boleh minimal apa ini...

Emerha

Ya...

Sri Sugiarti

E... kalo GU minimal 60% dari UP betul itu ada SK nya betul, ada di SK uang persediaan, penetapan uang persediaan dalam SK Bupati e... ini boleh minimal, ini apa... maksimal sebesar UP kalo eh... kalo di bawah 60% belum bisa, minimal itu 60%. Ini ada kata-kata ini di tengah ini lho boleh

Emerha

Ada minimal ya...

Sri Sugiarti

He'e... kok mengganggu ya...

Emerha

Oh ya... kalo anu nanti saya yang akan...

Sri Sugiarti

Minimal 60% dari UP ada Sknya, di SK UP, penetapan, ini pertanyaannya dulu apa ya... kok saya jawabnya boleh minimal gitu, hehehehehe, itunya

Emerha

Hem... kalo ibu mau baca anunya... transkripnya...

Sri Sugiarti

Nggak... he'e... tapi sih ini maksudnya... maksudnya udah sama

Emerha

Ini ada di sini... transkrip

Sri Sugiarti

Boleh... oh... maksudnya boleh minimal 60% kalo di bawah nggak bisa gitu ya...

Emerha

He'e...

Sri Sugiarti

Hem... pas minim... pas 60% maksudnya gitu

Emerha

Ya... di bawah 60% kan nggak bisa, berarti minimal 60% gitu

Sri Sugiarti

Jadi intinya... he'e... intinya di bawah 60% nggak bisa, nah ini sudah, ya...

Emerha

Ini kalo ibu mau baca hasil transkripnya. Kemaren ibu Atik juga gitu... dia baca ulang

Sri Sugiarti

Kalo yang... kalo yang... apa... yang... ini... yang mana... yang... yang... SKUP nya...

Emerha

SKUP ke bawah lagi ya bu tinggal di

Sri Sugiarti

Oh... ke bawah lagi...

Emerha

Iya nggak apa-apa

Sri Sugiarti

.... kalo melebihi dari 60% di tambah ya... oh... boleh... minimal... terus ini anu ya... e.. di.. salin persis ya...heheheheheh

Emerha

He'e... harus begitu

Sri Sugiarti

o... harus gitu...

Emerha

Asli nggak boleh di kurang nggak boleh ditambah...

Sri Sugiarti

Ooh... ohh... nggak di kasih pertanyaannya...

Emerha

Cuma nanti... ya... ya... kalo kutipan langsung begitu, tapi ada juga kutipang tidak langsung nah... itu mulai kita...

Sri Sugiarti

Oh... gitu ya... itu... tambahannya yang miring tadi ya... kutipan langsung...

Emerha

Ya... kutipan langsung..

Sri Sugiarti

Yak... yah... intinya... intinya... sudah masuk kok, Cuma mungkin mas anu...

Emerha

Terus... yang terakhir saya boleh minta fotonya ibu kayak gini nah... ini untuk bukti bahwa saya sudah mewawancarai...

Sri Sugiarti

Oh nggeh... nanti saya WA ya... apa gimana...

Emerha

Terserah ibu... atau saya... saya foto boleh...

Sri Sugiarti

Oh gitu... ya silahkan... saya nggak pake korpri...

Emerha

Itu pas hari senin dulu...

Sri Sugiarti

Oh barusan... kalo nggak tak kirim...

Emerha

Oh ya... boleh... nanti di kirim

14. Sutanti

Wawancara dengan Sutanti, SE pada 31 Mei 2018, pukul 08.42 di ruang kerjanya, Ruang Pelayanan Perpajakan. Sutanti adalah Bendahara Penerimaan di BKAD sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai prosedur akuntansi penerimaan yang transparan dan akuntabel (RM2).

Q.1. Pembuatan SPj Penerimaan yang Transparan dan Akuntabel

Emerha

Tadi saya dari sana, dari bidang pajak, setelah wajib pajak itu akan membayar euh apa, kan diterbitkan SKPnya ya.

Sutanti

He em ya

Emerha

Nah sekarang SKP itu diserahkan ke bendahara

Sutanti

Iya. Eu ke WP-nya dulu.

Emerha

Itu gimana jenisnya?

Sutanti

Biasanya kalau misalnya, misalnya kan ada yang penagih ya, nganter surat tagihan ada SKPnya itu, nah nanti WPnya ke sini untuk membawa itu SKP, terus nanti dibuatkan SSIDnya untuk bayar di sini atau bisa juga langsung ke Bank BPD.

Emerha

Ehm kalau setelah itu bagaimana cara . . . (00:47) setelah semuanya dibayar?

Sutanti

Setelah semuanya dibayar di sini, nanti kalau saya ya, saya sore rekapan setornya ke BPD juga, seperti itu. Jadi saya nanti mengarsip SSPD sama SKP. Kalau yang warung makan itu kan nggak pake SKP, yang pake SKP yang air tanah, reklame, udah gitu. . . (01:12). Jadi saya punya arsipnya.

Emerha

Berarti dapat tembusan dari?

Nah itu pembukuannya ada pake sistem ya?

Sutanti

Iya. Dapat tembusan.

Emerha

Untuk dibukukan ya?

Sutanti

Iya.

Emerha

Nah itu pembukuannya ada pakai sistem ya?

Sutanti

Iya, nanti masuk ke SIMDA. Atau ada satu lagi SIMDA pendapatan tapi untuk yang masukkan itu saya dibantu oleh Pak Karmanto. Soalnya saya kan nggak bisa kalau sambil nyambi gitu. Dibantu sama Pak Karmanto.

Emerha

Berarti ada dua SIMDA pendapatan sama SIMDA keuangan?

Sutanti

He em

Emerha

Itu jalan sekaligus SIMDA-nya atau satu-satu?

Sutanti

Satu-satu. Sementara baru satu-satu, harus masukkan satu-satu. Soalnya belum bisa dieksplor *nggih*.

Emerha

Nah, terus kalau penyusunan LPJ itu gimana mbak?

Sutanti

LPJ?

Emerha

LPJ. Yang setiap tanggal berapa itu?

Sutanti

16? PLN itu ya? LPLN bukan LPJ ini?

Emerha

LPJ ada berapa?

Sutanti

LPJ apaan ya Pak?

Emerha

Laporan Pertanggungjawaban bendahara.

Sutanti

Oh untuk saya?

Emerha

Iya.

Sutanti

Sebulan sekali Pak.

Emerha

Jadi gimana prosedurnya?

Sutanti

Saya tinggal ini aja, nanti kan *ngeprint* dari SIMDA apa saja yang sudah masuk, nanti saya tambahkan lampiran bukti-bukti yang saya kumpulkan, yang tadi dimintakan tanda tangan pak kepala, terus saya jilid.

Emerha

Oh berarti semua sudah tersedia di SIMDA ya?

Sutanti

Heém. Sudah. Tinggal *print* aja.

Emerha

Berarti ketika apa bukti termin itu di input dulu ya? Makanya muncul?

Sutanti

Heém. Diinput dulu. Bisa muncul, terus nanti tinggal menyesuaikan urutannya.

Emerha

Nah setelah dicetak itu diserahkan kemana?

Sutanti

Ke bagian pajak. Eh, kok bagian pajak, bagian punyanya mas Alif itu apa ya, pendataan ya. Pendapatan, ke bagian pendapatan. Iya.

Emerha

Untuk diverifikasi?

Sutanti

He em. Terus saya nyimpan satu arsip.

Emerha

Itu tidak diperiksa sama BPK?

Sutanti

Nggak, BPKnya kan biasanya satu tahun sekali kan. Oh BPK?

Emerha

Iya.

Sutanti

PPKnya di Mbak Nisa sama kalau misalnya ada yang salah atau apa, nanti kita revisi lagi. Misalnya belum cocok, kan kita cocokkannya sama bagian pendapatan sama bagian akuntansi. Jadi kita cocokkan dulu.

Emerha

Itu duluan mana? Bersamaan ke PPK dan pendapatan?

Sutanti

Kalau misalnya tanggal 10 itu kita apa adanya dulu. Kalau udah cocok ya udah tapi nanti kalau misalnya di pertengahan kan kita nggak mesti ini *nggih*, pendapatannya kadang belum masuk juga, belum *keinput*. Nah nanti kita revisi lagi.

Emerha

Itu yang pendapatan itu setiap tanggal berapa?

Sutanti

Setiap tanggal 10 sudah harus kita setor.

Emerha

Kalau yang PPK?

Sutanti

PPKnya sama. Kan cuman ke ini aja, yang fungsionalnya udah.

Emerha

Oh berarti administratif sama PPK?

Sutanti

He em. Sama.

Emerha

Bearti format laporannya sama?

Sutanti

Sama.

Emerha

Cuman dibikin rangkap saja?

Sutanti

He em rangkap dua. Kalau yang ke Aklap itu nanti Pak T yang cocokkan sendiri dulu sebelum kita cetak. Sehingga kan cocokkan dulu, sementara udah cocok, kita cetak dulu.

Emerha

Dicocokkan dengan Aklap setiap bulan juga?

Sutanti

Iya, setiap bulan, setiap mau cetak SIMDAnya.

Emerha

Berarti di SIMDA itu juga langsung bikin jurnal atau . . . (04:46) yang bikin jurnal?

Sutanti

Kalau jurnal saya kok gak sampai ke situ *nggih*. Nanti yang buat jurnal itu mbak Catur biasanya. Tadi sudah ketemu sama bu Catur kan?

Emerha

Nah kalau penggunaan anggaran yang mana yang dikasih yang ke Kepala BKADnya?

Sutanti

Kepala BKAD?

Emerha

Yang mana yang dua yang ke PPK itu juga?

Sutanti

Nggak. Kan kita cuma minta tanda tangannya aja terus nanti kita keluar kita cetak terus telpon ke bagian pendapatan itu.

Emerha

Berarti yang di PPK itu ya? PPK kan bikin usahanya.

Sutanti

Cuman dua acc saja. Jadi Pak Kepalanya cuma tanda tangan aja.

Emerha

Butuh berapa lama untuk diperiksa sama PPK?

Sutanti

Kalau ini sih biasanya saya cuma ini aja, kalau udah cocok aja, Aklap itu sudahe. Heém. Sama Pak T. kalau sempet kita ke sana ya udah kita cetak aja. nanti kalau ditemukan ada yang salah baru verifikasi lagi.

Emerha

Oh jadi sebelum dicetak ke?

Sutanti

Cocokkan dulu.

Emerha

Cocokkan dulu ke Aklap?

Sutanti

Heém.

Emerha

Oh jadi dasarnya ada di Aklap ya?

Sutanti

Iya.

Emerha

Yang kalau yang di, yang di pendapatan berapa lama?

Sutanti

Kalau di pendapatan

Emerha

Ini verifikasi juga?

Sutanti

Iya. Nanti dicocokkan sama *entry*annya Mbak Nisa itu. Kalau di sana kita ya udah kita kumpul di sana. Nanti kalau misalnya ada yang salah baru maksud saya memang arsipnya ditumpuknya di sana. Jadi kita nggak tentukan bakal lama di sana.

Emerha

Berarti fungsional yang Sub ya?

Sutanti

Heém.

Emerha

Yang itu tadi.

Sutanti

Kumpul di situ.

Emerha

Itu apanya prosedur pembuatan SPj itu ada anunya ada protap/SOP-nya?

Sutanti

Emm SOPnya saya ini Cuma tinggal ngikut yang dulu aja

Emerha

Memang sudah seperti itu dari dulu ya?

Sutanti

Heém. Memang seperti itu dari dulu.

Emerha

Kalau misalnya ada pembayaran tunai kan yang menentukan ya, nah itu gimana?

Sutanti

Yang tunai? Yang tunai kita terima di sini.

Emerha

Di sini. Kalau yang non tunai bagaimana?

Sutanti

Non tunai dianya ke bank sendiri. Nanti kita tinggal terima anunya.

Emerha

Kan model pertanggungjawabannya sama?

Sutanti

Kalau yang non tunai itu biasanya bendahara yang ke sana. Bendahara yang Mbak Resti itu. Jadi saya yang tunai aja.

Emerha

Oh berarti Mbak tunai ya?

Sutanti

Iya. Tunai saja. Kalau non tunai sama bendahara pengeluaran nanti kan dia yang megang ini to. Kalau saya gak punya rekening, kalau yang di sana kan punya rekening untuk tanggungan uangnya jadi bisa maintenance.

Emerha

Jadi biar pajak . . . (07:53)?

Sutanti

Kalau pajak mungkin untuk dia di sini ya, invent di sini aja. nanti setiap SKPD punya ini sendiri-sendiri. Jadi nanti itu masalah yang nantinya sama bendahara pengeluaran masing-masing instansi.

Emerha

Emm, berarti semua yang non tunai baik itu penerimaan maupun pengeluaran ditangani oleh bendahara pengeluaran?

Sutanti

Heém. Kalau yang non tunai itu biasanya kita cuma nerimanya pengesahan yang untuk STTPDnya. Jadi kita mengesahkan saja kalau ini perhitungannya udah bener nanti dia ke banknya. Jadi kita tidak terima uangnya.

Emerha

Oh iya. Nah terus yang yang monitoring Mbak ini siapa nanti yang setiap bulan? Yang evaluasi Mbak misalnya yang

evaluasi gitu ada? Diawasi langsung oleh kepala anggaran atau ada?

Sutanti

Emm, kita gimana *nggih*. Kalau diawasi itu cuman ada yang *entry* cuman ada yang *entry* maksudnya nyocokin pendapatan saya nanti di *entry* tempatnya Mas Eko yang bagian pendapatn itu. Nanti kalau ada yang selip langsung ke saya, Mbak ini salah misalnya ada selisih berapa gitu kan nanti langsung misalnya kurang setor atau apa. Paginya langsung saya ini langsung perbaiki lagi. Misalnya ada kurang setor kan biasanya ini juga salah angka tau, nanti di sana ketemu salahnya. Nah, kita nanti langsung nututi di hari berikutnya.

Emerha

Itu untuk ee format pertanggung jawaban itu seragam ya? Misalkan harus ada dokumen A B C D gitu?

Sutanti

Heém. Sama.

Emerha

Lengkap ya? Itu harus lengkap?

Sutanti

Iya.

Emerha

Kalau tidak lengkap itu gimana?

Sutanti

Emm, selaa ini kita seperti itu e Pak.

Emerha

Maksudnya tidak, kalau misalkan tidak lengkap terus terlambat itu ada sanksi?

Sutanti

Kalau misalnya terlambat bisanya dikasih surat teguran *nggih*.

Emerha

Siapa yang dikasih surat teguran?

Sutanti

Ya yang misalnya terlambat. Ini kan sudah lewat, pokoknya tanggal 10 kan sudah harus. Jadi *nggih* kalau tanggal 11 berarti surat tegurnya sudah diterima.

Emerha

Apa konsekuensinya kalau dapat surat teguran?

Sutanti

Emm, selama ini saya hehehe ini *nggih* nggak ini sih nggak dapat surat tegurannya, langsung bikin aja.

Emerha

Biasanya kalau yang lain?

Sutanti

Kalau di yang lain saya kurang tau. Nanti yang mengeluarkan surat teguran dibagiannya Pak Alif.

Emerha

Di bidang pendapatan?

Sutanti

Heém.

Emerha

Oh mereka yang ini ya . . . (10:36)?

Sutanti

Iya. Memverifikasikan.

Emerha

Kalau untuk pimpinan BK kelapa BK dosen . . . (10:48) anggaran itu ada apa yang sering kontrol Mbak setiap bulan itu gimana?

Sutanti

Nggak. Cuma lewat laporan itu aja.

Emerha

Cuma lewat laporan?

Sutanti

Heém.

Emerha

Ada rapat evaluasi dibikin setiap bulan seluruh bendahara penerimaan?

Sutanti

Seluruh bendahara penerimaan, seluruh SKPD?

Emerha

Iya.

Sutanti

Kalau itu ya ada tapi gak setiap bulan.

Emerha

Setiap berapa bulan?

Sutanti

Eem berapa ya. Lumayan lama juga e itu. Gak mesti setiap bulan. Misalnya ada sesuatu yang di ini, nanti baru dikumpulkan rapat atau apa. Biasanya kalau mau ada pemeriksaan dari BPK paling tidak mesti di ini dulu dikumpulkan dulu nanti supaya laporannya itu sudah ini apa yang mesti disiapkan untuk BPK. Biasanya seperti itu.

Emerha

Emm. Berarti waktu menyampaikan SPj ke bendahara ke pendapatan itu hanya sebulan sekali?

Sutanti

Iya. Sebulan sekali.

Emerha

Nah, nanti yang periksa setiap harinya itu SPj Mbak itu siapa?

Sutanti

Kalau setaip hari Mas Eko itu bagian pajak. Dia kan ikut entry juga setiap hari pendapatn berapa yang masuk.

Emerha

Jadi di situ bisa kita lihat kesalahannya ya?

Sutanti

Iya.

Emerha

Pak Eko itu apa?

Sutanti

Pak Eko itu bagian di sebelah sana Mas. Apa sih saya kurang tahu juga e. Pak Eko itu cuman nyocokkan pendapatan juga tapi di bawahnya Bu Gumi.

Emerha

Oh di bawahnya Bu Gumi?

Sutanti

Heém.

Emerha

PPK berarti?

Sutanti

Kalau Bu Gumi PPK. Kalau Mbak caturnya kurang tahu saya, maksudnya apa nama jobnya dia saya kurang tahu. Hehe.

Emerha

Ini kalau penerimaan itu kan yang . . . (12:43) kan 24 jam harus disetor?

Sutanti

Heém.

Emerha

Itu kalau diterima tunai itu Mbaknya langsung terima duit atau langsung ke sini mereka?

Sutanti

Kalau yang tunai?

Emerha

Heém.

Sutanti

Yang tunai langsung ke sini.

Emerha

Oh. Kalau wajib pajak itu ee misalkan sudah diterbitkan SKRD, SKPD ya segala macem kan. Dia terlambat bayar itu ada hubungannya dengan laporannya Mbak?

Sutanti

Emm nggak ada kayaknya.

Emerha

Gak ada ya?

Sutanti

Saya cuman ini aja. nanti dapetnya kan denda, jadi saya tinggal misalnya laporannya denda ya saya masukkan dendanya berapa. Misal hari ini ada denda apa aja gitu.

Emerha

Itu pencatatannya accrual atau gimana di SIMDA?

Sutanti

Iya. Masuk ke situ.

Emerha

Accrual? Jadi kayak dia data yang perlu dibayar yang perlu dicatat kan?

Sutanti

Iya.

Emerha

Itu waktu pemilihan bendahara pengeluaran itu jabatannya setiap berapa tahun?

Sutanti

Eemmm. Kayaknya sih

Emerha

Setahun sekali?

Sutanti

Setahun sekali. Kalau ini kemaren kayaknya sih SKnya hehe . . . (14:23)

Emerha

Langsung muncul SKnya ya?

Sutanti

Heém langsung muncul SK yang itu.

Emerha

Itu tidak ada persyaratan untuk jadi bendahar atau bagaimana? Misalkan lulusan SMEA umpamanya atau misalkan ee mengetahui komputer?

Sutanti

Kayaknya sih gak ada. Cuman langsung dapat SK aja. hehehe.

Emerha

Oke Mbak. Untuk sementara itu dulu wawancara saya. Kalau ada yang masih kurang saya wawancara lagi.

Sutanti

Oh nggih. Tag sambil ngelengkapin yang ini ya.

Emerha

Oh iya.

Lampiran 12:

Daftar Wawancara dengan Partisipan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

1. Ari Fitriani

- a. Wawancara ke-2 dengan Ibu Ari Fitriani, SE pada 16 Juli 2018, pukul 09.08 di ruang umum, Kantor Inspektorat. Ari Fitriani adalah Auditor Madya di Inspektorat sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel (RM2).

Emerha

e... ibu di irban ya di irban

Ari Fitriani

Saya auditor

Emerha

Tapi di bawahnya irban perekonomian ya...

Ari Fitriani

e... kalo sini itu.. belum di kelompokkan di urban jadi..

Emerha

Oh gitu ya.. jadi auditor itu semua

Ari Fitriani

Iya.. tapi mungkin memang banyak di bidang perekonomian, heheheh

Emerha

Jadi auditor ada berapa orang ya..?

Ari Fitriani

Auditor itu ada 27 ya kalo nggak salah

Temam Narasumber

Sembilan...

Ari Fitriani

Oh.. sembilan.... oh tambah nganu ya.. tambah Mas Hari sama mbak Wanti

Emerha

Ya.. kalo untuk di bidang pengawasan bu, apakah udah ada perda atau pergub yang dibikin untuk pengawasan?

Ari Fitriani

e... ada perbup SOPK, SOPK, SOPK, kemudian ada Perbup tentang pedoman pengawasan ada e.. pagam cater itu ada..

Emerha

Itu Perda semua ya..

Ari Fitriani

itu perbup..

Emerha

Perbup ya... itu bisa diakses di.. di.. Dia

Ari Fitriani

Bisa nanti di..

Emerha

Oh ya.. hem.. e.... terus kalo untuk LKPD itu yang.. yang.. review di sini ya?

Ari Fitriani

Ya..

Emerha

Itu.. di dalam perda atau Perbup nya itu diatur tentang prosedur pengawasan?

Ari Fitriani

Kalo prosedur.. peng.. e.. kalo di pedoman pengawasan itu hanya jenis-jenis pengawasannya apa.. tetapi kalo prosedur review nya itu ada di SOP ataupun program kerja review, yang khusus review program kerja review

Emerha

Oh.. jadi di masing-masing auditornya ya..

Ari Fitriani

Iya.. kalo SOP menyeluruh, investur SK investur kalo program kerja review itu di masing-masing timnya jadi yang menyusun ketua tim

Emerha

Oh.. ya.. itu kalo untuk review atau itu ndak review sama pengawasannya misalkan proposal laporan keuangan sebelum itu selalu berbeda?

Ari Fitriani

e.. beda.. jadi review.. review itu lebih banyak untuk memberi keyakinan bahwa laporan keuangan itu telah di susun berdasarkan sistem pengendali intern yang memadai dan e... standar akuntansi pemerintahan, kalo.. pemeriksaan e.. tetapi tidak memberi apa istilahnya hanya memberi keyakinan terbatas

Emerha

Opini ya..

Ari Fitriani

Tidak sampai pada pemberian opini kalo pemeriksaan kan lebih.. derajatnya lebih tinggi dari review dan itu nanti yang memberi opini, kalo kita ya.. hanya sebatas memberi keyakinan secara terbatas

Emerha

Kalo untuk pemeriksaan, yang ada di setiap SKPD itu apa namanya?

Ari Fitriani

Di sini ada.. pemeriksaan namanya pemeriksaan re... e.. reguler itu secara menyeluruh jadi dari keuangan kemudian dari pengelolaan barang, kepegawaian, itu secara menyeluruh ada yang dengan tujuan tertentu. Tematik istilahnya jadi bisa di.. ngambil barang dan jasa saja di.. cash opname, atau stock opname, jadi khusus.., dan review ini juga termasuk pemeriksaan khusus, kalo review kan khusus. Bisa review RKA, bisa review laporan keuangan.. itu kan khusus

Emerha

Itu ada.. ada.. waktunya ya.. untuk pemeriksaan reguler tadi ya.. setiap setiap kapan..?

Ari Fitriani

Ada.. sudah ada program kerja pemeriksaan tahunannya jadi kalo untuk pemeriksaan reguler itu setiap tahun wajib seluruh SKPD, di kurangi yang di serahkan untuk diperiksa Provinsi

Emerha

Setahun sekali ya..

Ari Fitriani

Ya.. setahun sekali

Emerha

Oh.. ada juga yang diserahkan di Provinsi?

Ari Fitriani

Ya.. di serahkan di.. Inspektorat Provinsi biasanya sekitar 4 atau 5 SKPD itu..

Emerha

Oh.. berarti tidak semua SKPD diperiksa oleh inspektorat Kabupaten ya.., berarti kalo sudah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi nggak diperiksa

Ari Fitriani

Iya..

Emerha

Okey, terkait dengan peran apik dalam penurunan pengelolaan laporan keuangan gimana?

Ari Fitriani

Jadi.. kita dari hasil pemeriksaan itu bisa ada penilaian keuangan ya.. e.. itu nanti, kalo kami sebagai tidak segera ditindaklanjuti juga ada mungkin e.. aduan aduan dari.. masyarakat atau mungkin ada aduan dari Kejaksaan atau Kepolisian itu bisa juga kita memeriksa penyelewengan keuangan tapi kalo untuk mencegahnya ya.. kita di.. pemeriksaan reguler tadi, kemudian kita juga ada evaluasi SPIP nya.. jadi untuk apa ya.. sistemnya kita.. kita kawal juga, ada juga kita pembinaan-pembinaan, pendampingan-pendampingan. Kadang dari SKPD konsultasi ke kami juga, ada yang namanya unit konsultasi

Emerha

Hem.. itu di.. unit konsultasi tadi di sediakan di sini ya?

Ari Fitriani

Ya.. jadi setiap SKPD, atau dari desa atau dari manapun ketika ada kebingungan masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, atau barang bisa konsultasi di sini

Emerha

Kalo soal deteksi berarti sudah terjadi penyelewengan atau gimana, ataukah setelah misalkan sudah jadi temuan terus inspektorat periksa langsung disuruh tindak lanjuti atau gimana, diserahkan ke BPK atau bagaimana?

Ari Fitriani

Ketika ada durasi pemeriksaan kita, jadi ketika ada unsur pidananya ya.. otomatis di serahkan ke.. pihak

Emerha

Berwenang

Ari Fitriani

Ya.. ke pihak yang berwenang, tapi kalo istilahnya tidak ada unsur pidana penyelewengan secara administratif walaupun itu nanti menyebabkan kerugian, itu ya.. cukup pembinaan kepegawaian, dan kemudian ketika sudah dikembalikan ya sudah

Emerha

Kalo mekanisme pengawasan tadi di mana diaturnya tadi bu?

Ari Fitriani

di.. pedoman pengawasan di Perbup pedoman pengawasan

Emerha

Itu Perbup ya..

Ari Fitriani

Itu ada.., kemudian e.. program kerjanya itu.. di program kerja di SOP maupun di Program kerja auditnya

Emerha

Itu bisa diakses di mana ya..?

Ari Fitriani

Kalo SOP nanti minta ke.. pak.. Bambang Sutris

Emerha

Itu bisa ya di minta..

Ari Fitriani

Bisa.. minta.. kalo PKR nya e.. Prgram Kerjanya.. bisa nanti ke saya mau apa misalnya yang review, atau yang reguler atau yang desa..

Emerha

Bisa melihat step-stepnya itu dalam pemeriksaan?

Ari Fitriani

Kalo step-stepnya adanya di SOP dan.. kalo step pemeriksaannya sendiri di program kerjanya

Emerha

Di program kerjanya ya.. oh ya..., ini tentang transparansi ya.. pengawasan menurut ibu transparansi pengawasan itu seperti apa Bu?

Ari Fitriani

Hem.. di kita.. di kami ya.. jadi kalo kami itu e.. seperti pedoman pengawasan, per program itu sudah bisa di share, sudah bisa di unduh kemudian piagam audit atau internal audit chapter itu kan juga bisa di unduh juga jadi SK.. e.. stake holder kan bisa lihat apa yang.. apa yang.. di larang ataupun di lakukan auditor itu kan bisa di lihat di situ. Kemudian setiap satu tahun itu kita ada namanya gelar pengawasan, nah itu kita.. paparkan walaupun tidak secara detail hasil-hasil pengawasan yang kita lakukan selama satu tahun

Emerha

hem.. itu dilaporkan kemana?

Ari Fitriani

Itu ada.., semacam..

Emerha

Bupati?

Ari Fitriani

Kalo Bupati..., setiap kita pemeriksaan kan kita sampaikan ke Bupati ke SKPD terkait. Jadi.. sama ke BPK jadi di luar itu kita tidak menyampaikan karena bagaimanapun juga LH itu kan sifatnya rahasia

Emerha

Oh.. gitu ya..

Ari Fitriani

Ya.. kemudian hanya kita sampaikan lewat gelarpengawasan jadi semua auditen yang kita periksa tahun itu kita undang, kemudian kita paparkan hasil-hasil pemeriksaan secara, ya.. secara umum ya.. tidak.. tidak detail per SKPD itu ndak..

Emerha

Hem..

Ari Fitriani

Bisa nanti kalo.. apa ya.. bayangan kami kalo bener-bener hasil nya, kalo dari prosesnya transparan nggak apa- apa, tapi hasilnya transparan kan kalo ada sesuatu bisa.. jadi..

Emerha

Oh gitu.. berarti hasil-hasil pengawasannya tidak bisa diakses sembarang orang ya.. itu memang ada ketentuannya?

Ari Fitriani

Ada, dari Kejaksaan pun atau Kepolisian kalo mau minta hasil pemeriksaan harus lewat Bupati dulu, harus minta ijin ke Bupati, Bupati acc baru kami bisa memberikan

Emerha

o.. itu diatur di mana di Perda atau apa?

Ari Fitriani

Itu di.. Perbupnya itu

Emerha

Oh.. di Perbupnya, berarti kalo yang.. yang bisa diakses itu yang typenya yang gimana bu hasil pemeriksaan?

Ari Fitriani

Yang.. tadi yang kita.. kita sampaikan pada saat gelar pengawasan aja, jadi gelar pengawasan itu di situ hanya misalnya, ya tahun ini yang kita periksa sekian, kemudian temuan administrasi sekian, temuan kerugian sekian, yang bisa ditindaklanjuti sekian tapi kalo secara detail itu nggak bisa

Emerha

Oh.. berarti Cuma masuk dari informasi umumnya saja ya.. yang bisa ya. iya.. kalo misalkan terjadi penyimpangan itu gimana bu, tindak.. tindakannya gimana bu?

Ari Fitriani

Penyimpangan ketika bisa diselesaikan secara damai ya istilahnya ya.. diselesaikan di sini istilahnya, ada temuan kemudian di setor kemudian tindakan disiplin pegawai ya sudah itu kita selesai. Tapi kalo nggak bisa nanti ada namanya Majelis BPTGR ya.. itu nanti.. tingkat penyelesaian yang lebih tinggi di situ. Tetapi kalo sudah ada unsur pidananya di.. APH

Emerha

Di APH ya..

Ari Fitriani

Ya..

Emerha

Berarti kalo tidak ada unsur pidana di BPTGR

Ari Fitriani

Ya... kalo selesai di sini ya di sini, tapi kebanyakan selesai di sini

Emerha

Itu di.. di sidang bu kalo di BPTGR?

Ari Fitriani

Kalo di BPTGR iya..

Emerha

Di sidang kayak sidang pengadilan gitu ya

Ari Fitriani

e.. kalo sini belum, yang sudah Gorontalo to.. sudah pake kayak pake baju.. baju hakim itu kemaren itu memang kita pengen ke sana lihat sidang di BPTGR itu, kalo sini ya sekedar di panggil kemudian e.. ditemui majelis-majelis belum kayak di Gorontalo

Emerha

Kalo di sana itu kan ada.. kayak terdakwa gitu ya bu, ditanya-tanya kenapa bisa terjadi?

Ari Fitriani

Ya.., waktu itu sempat eh.. ke Gorontalo yuk lihat sidang, heheheh. Kalo.. bapak di.. ins.. instansinya apa di sana?

Emerha

Kalo saya di kepegawaian

Ari Fitriani

Oh di kepegawaian...

Emerha

Kebetulan kan saya kuliahnya di Ekonomi jadi ambil ini

Ari Fitriani

Ooh.. hehehheh

Emerha

Itu awalnya untuk membangun transparansi itu, pengawasan itu memang dibatasi atau bagaimana, apa misalkan inspektorat maunya pengawasan itu setiap orang bisa lihat seperti ini.. ini.. ini.. atau memang sudah di atur oleh Undang-Undang ini tidak boleh gini..

Ari Fitriani

Ya.. sudah diatur, sudah di atur peraturannya dengan APH pun kita ada, kalo sekarang sudah ada di Undang-Undangnya ya.. jadi kalo ada dugaan penyelewengan sebelum di periksa oleh aparat penegak hukum APH dulu yang bisa kalo dulu Cuma pake MoU itu

Emerha

Oh.. berarti ada MoU antara Kejaksaan dengan inspektorat ya..

Ari Fitriani

Ada.. ada.. Bupati.. Bupati.. Kejaksaan, Keoplisian

Emerha

Jadi ketika ada.. penyelewengan di SKPD ini jadi APH tidak perlu turut ke situ jadi di serahkan ke Inspektorat

Ari Fitriani

Diper kalo APH turun sendiri, heheheh

Emerha

hem...

Ari Fitriani

Kita tahun ini sudah berapa kasus ya.. yang istilahnya dari APH kirim surat ke kami, sudah.. tiga kasus

Emerha

Heem.. kasus korupsi?

Ari Fitriani

Juga penyelewengan juga di pengadaan barang-jasa

Emerha

Itu kalo aduan-aduan dari masyarakat gimana.. tanggapannya?

Ari Fitriani

Aduan dari masyarakat sama kita.. kalo dari masyarakat biasanya kita istilahnya e.. suku tendangan dulu, jadi di cari kebenarannya, benar atau tidak, ini layak untuk di audit lebih rinci atau tidak kalo cukup di.. penelusuran itu di suru tendangan itu ya sudah.. tidak kita angkat untuk audit lebih lanjut

Emerha

Biasanya.. kalo laporan aduan itu dari masyarakat disertai bukti atau Cuma surat kaleng?

Ari Fitriani

Kadang ya.. disertai bukti, kadang ada yang surat kaleng denger dari sini, denger dari sini di rangkum jadi satu. Kita ini terakhir aduan dari masyarakat itu.. dari sekian yang.. diadukan ada sembilan atau berapa itu hanya satu yang terbukti

Emerha

Itu untuk aduan dari masyarakat ada.. ada.. dasar hukumnya bahwa ini harus tangani sekian berapa lama waktu?

Ari Fitriani

Kita nggak ada Cuma kita BPKPT itu kalo untuk penanganan kasus itu 15 hari pemeriksaan Cuma kalo dari APH itu biasanya di suratnya itu sudah menyebutkan jadi sekian hari setelah menerima surat ini kami harus sudah mengetahui hasilnya. Di sini ada.. dari APH sudah ada batas waktunya, jadi di..

Emerha

Kalo masyarakat itu sama juga ya.. nggak bisa mengakses informasi pengawasan?

Ari Fitriani

Nggak bisa.. nggak bisa ya.. Cuma sebatas tahun ini yang sudah di periksa mana saja, terus yang sudah di.. kita gelar di.. gelar pengawasan daerah itu yang bisa diakses. Takutnya kalo bisa di akses itu mereka nggak paham, dan memahaminya kan lain gitu, hehehehe. Malah jadi bumerang

Emerha

Itu dalam pengawasan ada ini.. ada sistem informasi yang digunakan?

Ari Fitriani

Ada.. yang mengelola.. bukan di program..

Emerha

itu apa tepatnya, aplikasi apa?

Ari Fitriani

Kita baru SIM... SIM pengawasan itu SIM.. kaya apa.. sama SIM yang dari BPK itu masalah tindak lanjut- tindak lanjut, kita lewat SIM

Emerha

Oh.. jadi semua hasil temuan dan tindak lanjut, di kirim di situ ya.., mana yang sudah selesai.. mana yang..

Ari Fitriani

Cuma khusus untuk secara keseluruhan APBD itu ada namanya, Monef tuh.. jadi di situ, masyarakat bisa mengakses e.. program kerja dari SKPD itu, apa kemudian pencapaiannya sudah sampe mana gitu, bisa di Monef itu. Itu yang mengelola di Kasubap perencanaan dan keuangan..

Emerha

Ini konek yang antara Monef ini?

Ari Fitriani

e.... di sini Monefku.., Rencanaku.. e.. apalgi ya.. ada beberapa SIM yang konek jadi satu. Kalo khusus untuk pengawasan sendiri itu tidak konek manapun..

Emerha

Oh... tidak konek ya..

Ari Fitriani

Dan tidak semua orang bisa membuka secara.., harus punya passwordnya. Kalo mau mengakses ya.. yang hanya sudah diunggah di.. Webnya Inspektorat

Emerha

Kalo tentang laporan keuangan tadi, itu dia masuk di Pemeriksaan mana Bu.., reguler atau?

Ari Fitriani

Kalo.. pemerik.. di.. review ada sendiri

Emerha

Oh.. okey.. jadi bukan, bukan.. pemeriksaan RKPD?

Ari Fitriani

Bukan.. bukan.. tapi review RKPD. Karena di amanatnya Permendagri juga hanya review, di sebut review

Emerha

Jadi kalo review setelah.. sebelum..

Ari Fitriani

Sebelum ditanggapi oleh Bupati

Emerha

He'e.. itu berapa lama reviewnya?

Ari Fitriani

Review biasanya.. ada dua review. Jadi yang pertama review laporan keuangan SKPD, dan review laporan keuangan LKPD jadi masing-masing 15 hari. Tapi waktunya bersamaan dengan penyusunan laporan.. kan laporan keuangan SKPD dulu jadi baru di konsolidasi di laporan keuangan LKPD

Emerha

Itu gimana mekanismenya kalo untuk mereview LKPD yang SKPD dengan yang.. SKPD juga kan?

Ari Fitriani

Ya... jadi SKPD dulu kan selesai. Kemudian kan hasil laporan SKPD jadi dasar untuk penyusunan LKPD juga mungkin kan ada perbaikan angka dan sebagainya. Nah.. nanti berbarengan dengan penyusunan LK.. e.. es.. LKPD nanti yang review masuk.... yang review SKPD nya masuk, dan hasil review nya juga bisa jadi dasar untuk review LKPD, mungkin ada yang perlu kita perdalam di situ, kemaren belum tuntas kita perdalam via LKPD

Emerha

Berarti kalo ada yang salah diminta untuk diperbaiki?

Ari Fitriani

He'em.. yang memperbaiki nanti BK... BKAD nanti di perbaiki di BKAD kemudian jadi.. draft.. laporan keuangan yang audited, itu kami masuk di.. proses itu proses penyusunan LKPD nya

Emerha

Ya.. itu bagaimana jadi tahu kalo udah di review oleh inspektorat atau ada semacam opini?

Ari Fitriani

Ada laporan hasil review..

Emerha

Ada ya..

Ari Fitriani

Ada..

Emerha

Kalo untuk prestasi pengawasan ya.. selama ini ada.. sudah.. sudah pernah ada?

Ari Fitriani

Prestasi pengawasan maksudnya.., dapet award apa gitu?

Emerha

Ya..

Ari Fitriani

Kalo.. khusus untuk Inspektorat sendiri, kita kan kalo kayak itu nggak ada ya..

Emerha

Oh ya..

Ari Fitriani

Cuman kan kita ada.. namanya Kapabilitas APIB jadi kami itu khususnya leveling di.. mutunya di.. assesment oleh BPKP ini.. saat ini kami level 3

Emerha

Oh.. level 3

Ari Fitriani

Untuk tahun ini level 3

Emerha

Berarti yang tinggi itu apa.. level berapa?

Ari Fitriani

Level.. sampe level 5

Emerha

Oh.. berarti yang tinggi itu level 1

Ari Fitriani

Paling rendah itu level 1, level 1, level 2, level 3, sampe level 5

Emerha

Oh.. mulai dari 5 ya..

Ari Fitriani

Mulai dari satu

Emerha

Mulai dari satu..

Ari Fitriani

Satu.. satu.. satu terendah, dua..

Emerha

Yang tertinggi berarti 5

Ari Fitriani

Yang tertinggi 5

Emerha

Oh.. level 3 ya..

Ari Fitriani

Ya.. memang targetnya pak Jokowi kan juga 2019 level 3 semua

Emerha

Itu yang.. memang harus BPKP ya.. yang ini ya..

Ari Fitriani

Ya.. assesment di BPKP

Emerha

Assesment di BPKP hem...

Ari Fitriani

Tiap tahun kami di.. evaluasi ini nanti, ini kami.. malah 2 kali, kemaren sekitar Februari sudah, ini besok bulan.. Agustus itu sudah masuk lagi untuk assesment lagi

Emerha

Itu.. apanya.. indikatornya apa ya?

Ari Fitriani

Ada buanyak ada 6 elemen, jadi setiap elemen itu ada sekitar 20-an.. indikator

Emerha

Oh... secara umum ada kebetulan misalkan apa?

Ari Fitriani

Ya.. masalah dari perencanaan, kemudian dari SDMnya seperti apa, kemudian dari pengawasan sendiri dari mulai pengadministrasian dari program kerjanya, sampe nanti laporan hasil auditnya tuh itu seperti apa, itu kan ada.. istilahnya kendali mutu-kendali mutu ndak itu harus memenuhi kendali mutu, kendali mutu itu ya..

Emerha

itu bu.. saya beralih ke topik yang terakhir ya..

- b. Wawancara ke-2 dengan Ibu Ari Fitriani, SE pada 16 Juli 2018, pukul 09.30 di ruang umum, Kotor Inspektorat. Ari Fitriani adalah Auditor Madya di Inspektorat sampai dengan saat ini. Topik wawancara mengenai kendala, penyebab kendala, serta solusi yang sudah diambil dalam pengawasan PKS (RM4).

Ari Fitriani

Yang jelas kalo.. keuangan itu kalo Pemda nya WTP, berarti Inspektoratnya jalan, heheeh. Ya.. Cuma bisa dilihatnya di situ

Emerha

Ya.. mengawasi ya..

Ari Fitriani

Ya.. ya.. yang mengawalkan.. yang mengawalkan inspektorat

Emerha

Lha terus apa, kalo dalam pelaksanaan pengawasan apa permasalahan yang bisa sering di.. alami?

Ari Fitriani

Kalo masalah pengawasannya sendiri sih nggak terlalu, jadi kalo kami sih.. permasalahannya di SDM yang kurang, kemudian sarana-prasarana. E.. SDM kita kan.. sudah jumlahnya terbatas terus kemudian e.. kemampuannya ada yang.. misalnya kayak pengadaan barang-jasa itu kan hanya beberapa yang mempunyai sertifikat lulus pengadaan jadi itu kan, mestinya ketika ada pemeriksaan khusus pengadaan kan tidak bisa.. semua mereka yang bisa, tapi dari segi profesionalitasnya juga kan juga dipertanyakan juga. Ya.. kemudian kalo kami itu.. keterbatasan SDMnya di.. yang teknik ya.. teknik itu kita yang, sini kebanyakan keuangan

Emerha

Jadi auditor itu ndak semuanya keuangan ya?

Ari Fitriani

Ya.. auditor tuh.. kalo yang.. paling kalo ada aturan-aturan baru.. itu yang kadang kami harus menyesuaikan..

Emerha

Apa.. apa penyebab sampe bisa SDM nya kurang?

Ari Fitriani

Ini kan kami sudah lama meratorium.., kemudian kalo untuk bisa jadi auditor itu kan harus ada.. harus lulus Diklat pembentukan auditor, ya itu yang biasanya yang.. yang.. Diklat dulu lulus harus lulus, kalo nggak lulus ya nggak bisa jadi auditor

Emerha

Nggak ada program, misalnya untuk pindah, menerima pindahan dari?

Ari Fitriani

Ada.. ada beberapa yang sudah masuk di sini kemudian kami tawari untuk diikuti diklat pembentukan nanti ketika mereka sudah lulus baru dipindah kan di auditor

Emerha

Oh.. gitu jadi pindah antar instansi bisa ya.., kalo pindah antar Kabupaten juga boleh?

Ari Fitriani

Boleh boleh, biasanya kan 2 tahun.., dulu di sini.. nanti ikut diklat baru nanti habis diklat lulus baru bisa ikut di pemeriksaan

Emerha

Kalo soal keterbatasan SDM, kemaren selain yang tadi itu solusinya apa lagi untuk menyelesaikan masalah itu?

Ari Fitriani

Kita.. e... jadi untuk pemeriksaan Desa yang.. kan pemeriksaan Desa ada 2 saat ini, yang akhir masa jabatan. Itu jadi.. selama masa jabatan Kepala Desa ada yang hanya laporan pertanggung jawaban jadi setahunan, nah.. yang.. yang.. laporan pertanggung jawaban itu anggotanya.. kan kalo normal biasanya, Inspek.. tim itu pengendali mutu, Inspektur kemudian membantu penanggung jawab urban, pengendali teknis, kemudian Ketua tim, anggota tiga, sama staf admin. Nah.. di.. audit desa yang laporan pertanggung jawaban tahunan itu anggotanya kami kurangi jadi Cuma 2 dari 3 Cuma 2. Tapi salah satu kendala kemudian hari pemeriksaan yang dulu 15, mulai jadi 12, kemudian jadi 8 hari. Jadi kami bisa menjangkau lebih banyak

Emerha

Berarti orang nya dikurangi, waktunya diperpanjang

Ari Fitriani

Waktunya di kurangi juga..

Emerha

Oh waktunya dikurangi

Ari Fitriani

Waktunya di kurangi juga, terus kemudian kalo anu ya.. diklat-diklat itu sih, untuk pengembangan kompetensinya diklat-diklat, terus kemudian banyak yang terus belajar

Emerha

Kalo yang tadi tugas belajar itu udah, itu memang udah diprogramkan mereka yang auditor?

Ari Fitriani

Itu kan kalo, khusus untuk auditor itu ada yang namanya e.. prostar.. Instar di Belon itu lho

Emerha

Star.. BPKB

Ari Fitriani

Iya Star BPKB itu biasanya tugas belajarnya ikut di situ, daftar lewat situ nanti anu..

Emerha

Yang dari sini ada juga?

Ari Fitriani

Sini.. sudah.. e.. yang pertama Star BPKB itu 7 atau 8 S2

Emerha

Oh.. sudah banyak ya..

Ari Fitriani

Setelah itu ada S2 sama S1, tapi kebetulan sudah lulus semua

Emerha

Okey bu.. untuk sementara itu dulu, udah 30 menit

Ari Fitriani

Nanti kalo...

Emerha

Nanti kalo misalnya kurang bisa..

Ari Fitriani

Ya..monggo nanti itu ada nomer WA saya

Emerha

Mari ya bu..

Ari Fitriani

Iya...

Lampiran 13: Framework Matrix Wawancara tentang Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	A1. Bersinergi Bersama Stakeholder dengan Melibatkan BKAD	A2. Tersedia Media Publikasi Internal dan Eksternal	A3. Konsultasi Publik dan Menyerap Aspirasi melalui Sistem Informasi	A4. Tersedia Layanan Pengaduan Masyarakat	A5. Pra RKA dan Standar Evaluasi	A6. Berorientasi Proses dengan Membenruk Pokja RPJM	A7. Konektivitas Sistem Perencanaan dengan Penganggaran	A8. Payung Hukum Perencanaan Memadai dan Mengikuti Aturan Berlaku
1 : C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.	<p>He'e, Rencana, RencanaKu gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.</p> <p>Sampai APBD. Kalau koordinasi kamu bagus antara Bappeda dan BKAD. Jadi, BKAD ini, ini terlibat sejak di sini, sejak di Musrenbang ini terlibat, sejak di Forum.</p> <p>He'e, dari Forum OPD ini sudah terlibat. Jadi, kami memang bersinergi istilahnya. Bappeda dan BKAD bekerja sama di sini mengawal semuanya sampai APBD.</p> <p>Nyusun RKPD dan KUA. Jadi, yang BKAD ini kan timnya dari bidang anggaran terus bidang pendapatan. Pendapatan sama pajak terus bidang Perbend, Ini semua</p>	<p>Sim, Sistem Perencanaanya kami RencanaKu, Rencana Kulon Progo</p> <p>He'e, Rencana, RencanaKu gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.</p> <p>Gini, misalnya untuk bahan Musrenbang kan biasanya sebelum Musrenbang itu misalnya hari H-nya Senin, nah, Kamis-Jumat itu sudah upload rancangan akhir eh rancangannya, rancangannya RKPD di-upload ters power poinnya di upload, ringkasannya di-upload. Jadi, ketika produk jadi juga kami upload di web Bappeda. He'e.</p>	<p>Nah, ini kita konsultasi publik kan dengan berbagai elemen masyarakat baik LSM, tokoh masyarakat, terus instansi vertikal terus, nah, terus itu kan dapat masukan, hasil masukan kan sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan awal tadi.</p> <p>Nah, rancangan awal tadi setelah hasil konsultasi publik diserahkan kepada DPRD. Nah, di sana di DPRD kan dibahas bersama dengan eksekutif/legislatif.</p> <p>Terus lagi menyusun, menyusun, menyempurnakan lagi dirancang, menjadi rancangan RPJMD. Nah, di rancangan ini kan sudah unsur Renstra masuk kan. Jadi, dari Renstra OPD kita selaraskan terus menjadi rancangan RPJM. Nah, rancangan RPJM ini kita Musrenbangkan.</p> <p>Jadi, berbagai komponen terlibat baik daerah sekitar tetangga kita melibatkan nanti kan kaitannya dengan program-program besar mereka RT RW dan sebagainya.</p> <p>Hasil dari Musrenbang itu untuk penyempurnaan rancangan tadi menjadi rancangan akhir. Nah, untuk rancangan akhir</p>		<p>He'e, Rencana, RencanaKu gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.</p> <p>Di sini kami sudah pakai RKA, Pra RKA namanya. Jadi, Pra RKA, Pra RKA di sini jadi, jadi Pra RKA kami ini tinggal copy ke sini sudah jadi RKA.</p> <p>Nah, kami sudah membangun yang yang dari BPKP kan ada sosialisasi Sim, Simda Perencanaan.</p> <p>He'e, Simcan. Tapi, ini baru proses ya ini teman-teman lagi install.</p> <p>Di sini kan kami ini kan sudah ada SHBJ, Satuan Harga, jadi ketika input RKA ini sudah tinggal klik semuanya.</p> <p>Terus di sini sudah ada ruas jalan, ruas jalan yang di SK-kan Bupati. Jadi, ketika masyarakat mau entry ruas jalan mana tinggal milih, gitu.</p>	<p>He'e, tim pelaksana. Jadi, kita dalam menyusun RPJMD kan ada beberpa pokja, pokja RPJM itu nanti di Bappeda semuanya.</p> <p>Mereka mengampu per urusan nah di bidang sini kan kompilasi semuanya. Terus kami didampingi kemarin didampingi tenaga ahli dari MAPUGM.</p> <p>Jadi, lebih banyak masukan kan kalau kita berpikir apa, mikir sendiri kan wes, sudah baguslah, tapi karena kita butuh masukan jadi banyak mewarnai itu.</p> <p>Selama 5 tahun beliau mau apa terus kita, kita samakan dalam program daerah, gitu. Nah, terus RKPD kan penjabaran dari RPJM itu misal tahun pertama, tahun kedua kan di RPJM kan sudah ada temanya apa, prioritas apa. Terus di misalkan ini tahun kedua perencanaan 2019 kita jabarkan lagi. Tahunannya mau seperti apa target-targetnya kan tinggal nyuplik di situ.</p>	<p>He'e. Mungkin, terus kami kan banyak program-program yang, apa, penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Nah, itu misalnya program "Bela Beli", terus program "Bedah Rumah".</p> <p>Itu kan pembiayaan kami banyak yang dari non, nonpemerintah. Itu jadi nilai positif kan sekarang. Jadi, kami itu nonpemerintahnya banyak karena APBD kami kan sedikit.</p> <p>Terbaik, ya, kalau prosesnya sama kami mengikuti Permendagri tapi mungkin kami itu hubungan kami dengan eksekutif eh dengan legislatif dan instansi yang terkait ini bagus gitu loh sampai ke kecamatan. Jadi, ketika proses perencanaan jalan terus partisipasi warga juga baik terus legislatif kan dari sejak Forum Konsultasi Publik mereka sudah, sudah terlibat.</p> <p>Jadi, itu. Terus terlibat, terus sampai ke Musrenbang, sampai nanti kami penyaluran dengan Dewan itu berjalan baik gitu. Mereka reses kan, mereka reses di Dapilnya</p>	Perbup pedoman pelaksanaan Musrenbang.

	terlibat.		<p>RPJM kita konsultasikan ke Gubernur DIY. Nah, seperti itu, mendapat masukan, kita sempurnakan baru nanti kembali dikirim ke DPR untuk dibahas bersama. Jadi, di paripurnakan gitu.</p> <p>Program kegiatan dan sasaran. Nah, sasaran ini kan melibatkan usulannya kan dari masyarakat. Masyarakat itu kan dari Musrenbang Kecamatan, dari Musrenbang Desa masuk dari pokok pikiran dewan, terus di-floor-kan ke forum kan. Nanti disepakati mana yang menjadi prioritas sasaran.</p> <p>Iya, iya, pertama kan kalau visi-misi itu kan ketika bupati terpilih mereka kan harus menyusun visi-misi. Nah, ketika kami menyusun rancangan awal RPJM, kami kan sudah mengutip visi-misi bupati terpilih. Nah, di situ kami olah juga jadi tidak murni, murni dari visi-misi bupati/wakil bupati. Tapi, kami olah lagi terus kami floor-kan lagi ke Pak Bupati setuju nggak kalau lebih disederhanakan lebih teknis bisa terwujud lebih riil gitu loh. Kalau nggak, bahasanya nggak muluk-muluk.</p> <p>Ini kan ada rancangan awal renja terus menjadi di, menjadi acuan rancangan awal RKPD terus nanti ini kan dikonsultasi publikkan menjadi apa, nanti kan ini menjadi rancangan renja</p>	<p>Kalau yang ini tetap eksport-import ini.</p> <p>He'e, masih di import tadi kayak ini kan eksport tadi. Nah, nanti kalau ada ini sudah nge-link ini.</p> <p>He'e, he'e. Kalau yang pengendalian ini juga ada lagi dia, dia MonevKu namanya.</p>		<p>mereka. Mereka itu ngundang Bapeda.</p> <p>Jadi, Bapeda narasumber juga. Jadi, ketika reses Bapeda ada terus Bapeda kan lebih ke ini loh prioritas 2019 misalnya seperti apa, nanti yang diusulkan seperti ini gitu, gitu.</p> <p>Lah, SKPD-nya sudah harus menyusun rancangan awal renja.</p> <p>Rancangan awal renja terus rancangan awal ada di sini kan terus dikumpulkan ke Bapeda.</p> <p>Nah, ini menjadi bahan untuk menyusun rancangan RKPD.</p> <p>KUA PPAS, nah, KUA-PPAS ini tidak boleh, oh harus sama. Jadi, KUA-PPAS yang diantarkan ke Dewan ini sama dengan RKPD.</p> <p>Baik uang, baik pendanaan maupun sasaran keluaran program kegiatan semua sama. Nah, ketika ini dibahas di Dewan mesti ada, ada perubahan kan ya biasa kita anu, apa, baik eksekutif, legislatif kan biasanya mau naikin pendapatan. Terus otomatis pendapatan naik, belanja naik. Nah, di situ nanti KUA yang ditetapkan ini mesti akan beda dengan KUA yang diantarkan Dewan.</p>	
--	-----------	--	---	---	--	---	--

			<p>terus di Musrenbangkan. Jadi, ini tuh selalu beriringan.</p> <p>Jadi, Bapeda narasumber juga. Jadi, ketika reses Bapeda ada terus Bapeda kan lebih ke ini loh prioritas 2019 misalnya seperti apa, nanti yang diusulkan seperti ini gitu, gitu.</p>				<p>Sim, Sistem Perencanaanya kami RencanaKu, Rencana Kulon Progo</p> <p>He'e, Rencana, RencanaKu gitu. Nah, di sini kan mulai yang akomodir dari Musrenbang Desa, terus Musrenbang Kecamatan, terus Forum, habis Forum kan Musrenbang, terus Musrenbang jadi RKPD, RKPD ditetapkan jadi KUA. Nah, KUA jadi nanti kan jadi RKA, RKA yang di Rancangan APBD. Kami sudah, ini kan Simda.</p> <p>Tetapi, dari database Pra RKA di RencanaKu, kita ekspor ke Simda.</p>	
2 : Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.	<p>Itu keterwakilan perempuan kemudian dari sini juga kita rapatkan. Dari unsur ekonomi organisasinya apa saja yang kita undang kan organisasi profesi, LSM, kemudian perguruan tinggi, kepolisian, dan lain-lain. Jadi, kita minta dari-- , jadi kan tiap bidang itu kan mewakili urusan ya, urusan. Nah, urusan di bidangmu mana saja, ini sudah benar belum misalnya oh itu ada IKIP PGRI kok belum masuk. Terus misalnya Organda atau apa, kok belum, nah itu di, di-list semua, terus di-ini, diundang seperti itu.</p>	<p>Kita share di sub domain, jadi tiap SKPD itu kan punya sub domain.</p> <p>Sub domainnya di eee SKPD, SKPD-nya dot, kulonprogokab.go.id. Nah, nanti di share di situ tapi memang mungkin beberapa SKPD masih belum meng-upload di web tersebut. Biasanya yang diwajibkan itu kan paling renstra sama lakip yang di-share. Cuma renja kadang mereka tidak meng-upload, tapi kalau Bapeda selalu di upload.</p> <p>He'e, he'e, he'e, iya memang seperti</p>	<p>Cuma kalau misalnya ada undang selaku Bapeda, kita ada sistem aplikasi.</p> <p>Waktu awa-awal kita undang selaku Bapeda, selaku perencana ya, kita undang kemudian dilakukan kayak bimtek cuma sehari itu pengenalan tentang aplikasi. Kemudian di, di Bapeda ini kan pengampu istilahnya.</p> <p>Jadi, kalau ada permasalahan dari Subbag Perencanaan-nya SKPD tersebut bisa menanyakan atau bisa konsultasi kepada pengampu tersebut.</p> <p>Kalau usulan masyarakat itu rata-rata tentang jalan, tentang kesehatan,</p>		<p>Kalau renja itu ada sistem, 2 sistem.</p> <p>Monev KU sama RencanaKu.</p> <p>Nah, RencanaKu itu untuk perencanaannya.</p> <p>Kita di RencanaKu, Sistem RencanaKu tadi sudah membuat pra-RKA.</p> <p>Pra RKA, jadi, nanti angkanya itu biar fix sampai ke DPA, lebih memudahkan. Jadi, sudah di-entry rigit gitu.</p> <p>Nah, di situ masih bagiannya Subbag Perencanaan. Tapi, kalau</p>	<p>Kita eee, renja itu ya memang ada timnya, kemudian tapi kan usulan berasal dari semua bidang kan ya.</p> <p>Jadi, ada ini berapa persennya dari itu untuk fisik, kalau, kalau nggak salah 70%-nya boleh untuk fisik, yang lain untuk nonfisik seperti itu. Tapi, anggarannya sudah dipatok segitu, gitu. Jadi, biar nanti nggak, nggak melebar, jadi benar-benar prioritasnya.</p> <p>Peta kinerja itu dibuat berbarengan dengan penyusunan RPJMD. Jadi, di peta kinerja itu ada bagan, seperti bagan</p>	<p>Itu memang tidak ada aturannya ya harus, untuk menyusun ini harus ada rapat, atau harus ada apa cuma yang di beberapa ketentuan itu paling nggak penyusunan renstra itu harus ada timnya, penyusunan renja itu harus ada timnya itu sudah ada ketentuannya. Cuma untuk pelaksanaan itu, perumusan misalnya usulan anggaran itu harus melalui rapat itu kebijakan sendiri tiap organisasi.</p> <p>Jadi, kasubid-kasubid itu menjadi pengampu beberapa OPD contohnya Kasubid Sosial, Kesehatan, Sosial dan</p>	<p>Iya, jadi, kemarin-kemarin itu sebelum RPJM itu kita mengikuti Permendagri 54 tahun 2010.</p> <p>Cuma di bulan September kalau nggak salah, kan ada Permendagri yang perubahan 54 itu. Jadi, 54 tidak berlaku, terus berlaku 86 tahun 2017.</p> <p>Nah, sehingga RPJMD-nya sudah mengikuti aturan tersebut.</p>

		<p>itu(tertawa). Memang kayaknya eee, tidak ada kewajiban di keputusan apa atau di aturan apa. Cuma, cuma fungsi ini saja keterbukanaan informasi saja.</p> <p>Usulannya diterima atau tidak, nanti biasanya di apa ya, di RKPD kita share juga.</p> <p>Terus kita share di Sub domainnya Bapeda. Kemudian nanti setelah itu kan melalui PPAS kemudian jadi APBD itu juga di-share juga di pemerintah kabupaten. Jadi, bisa lihat sih oleh publik kalau mau--</p>	<p>pendidikan. Nah, itu dia sudah mengakomodir ini usulan dari Musrenbang Kecamatan. Nanti di sistem juga menggunakan sistem RencanaKu tadi.</p> <p>He'e, he'e. Tapi, sebelumnya ada konsultasi publik rancangan awal RKPD. Jadi, sebelum Musrenbang ada, ada, yang, yang, yang diundang juga mirip-mirip, sejumlah itu, itu namanya konsultasi publik rancangan awal. RKPD itu di awal bulan, eh, awal tahun. Kemudian ada Musrenbang Kecamatan di tiap-tiap kecamatan, setelah itu baru ada, ada Forum SKPD setelah itu kita yang melaksanakan. Setelah Forum SKPD ada Musrenbang Kabupaten tadi.</p> <p>Anu, jadi, kita ada pagu wilayah.</p> <p>Pagu wilayah itu pagu yang diberikan kepada kecamatan agar nanti usulan kecamatan nggak banyak yang istilahnya Jawa-nya "muspro", eh, sia-sia.</p> <p>Jadi, kalau misalnya, anggaran kita itu APBD kan cuma 1 hampir 1, 1,5T.</p> <p>He'e, eh, 1, 1,5T he'e. Cuma 1,5 benar ya? 1,5T.</p> <p>Cuma ini dari, dari eee kecamatan kan kadang nggak, nggak mengira-ira anggarannya berapa yang</p>	<p>sampai ke RKA itu yang kerjanya sudah ke BKAD kan. Nah, itu ke Subbag Keuangan.</p> <p>Kalau usulan masyarakat itu rata-rata tentang jalan, tentang kesehatan, pendidikan. Nah, itu dia sudah mengakomodir ini usulan dari Musrenbang Kecamatan. Nanti di sistem juga menggunakan sistem RencanaKu tadi.</p> <p>Nah, untuk pelaksanaannya itu kita ada sistem MonevKu, Monev Kulon Progo. Jadi, setiap bulan Kasubbag perencanaan tadi meng-entry capaian fisik kemudian kendala permasalahan tiap-tiap kegiatan di instansi tersebut. Kemudian ada sistem DES dari pengampu DES itu kayak, apa ya, eee, apa, eee, ini, eee melihat, apa, bertanya, apa istilahnya kalau DES itu ya, konsinyiasi, apa sih, concinering atau eee, bukan konsultasi ya tapi lebih ke ini eee capaiannya seperti ini kok bisa. Terus kendalamu benar seperti ini, kok angkanya seperti ini, kok bisa, buktinya apa, nah seperti itu.</p> <p>Fungsinya pengampu menanyakan hal tersebut yang sudah mereka entry di Monev, gitu, jadi--</p> <p>Jadi, renja lebih ke, eh,</p>	<p>itu mulai dari visi terus ke misi, misinya Bupati kemudian ke sasaran daerah eh ke tujuan dulu, tujuan daerah, ke sasaran daerah, kemudian sasarannya OPD terus kemudian programnya OPD apa, kemudian kayaknya sampai program. Nah, kalau di rensra nanti mengerucut ke program itu ke kegiatan apa saja. Jadi, arahnya dia itu mau mendukung misi berapa itu sampai itu, ada peta kinerjanya, kayak gitu. Nah, itu menjadi dasar penyusunan rensra. Nah, untuk renja kan menyusunnya berdasarkan eh untuk renja berdasarkan rensra. Jadi, indikatornya ambil dari renstra.</p>	<p>Tenaga eh, Tenaga Kerja kalau nggak salah, eh, dan Pemberdayaan. Dia mengampu Dinas Kesehatan, RSUD.</p> <p>Nah, itu kita rapatkan, kita rapatkan, nanti, jadi difasilitasi oleh Sekretariat.</p> <p>Gitu, untuk pembahasan misal kamu mau usul seperti apa, anggarannya berapa, ini sesuai dengan renstra nggak, seperti itu.</p> <p>Jadi, dasarnya ini terus dirapatkan ada perubahan nggak, terus, oh itu output-nya sasaran di kegiatan bukan segitu sekarang sudah, sudah hilang yang sasaran itu misalnya seperti itu. Berarti anggarannya turun dong, iya, turun, seperti itu. Jadi, ada konfirmasi juga, seperti itu. Jadi, dirapatkan, he'e, mestinya SKPD lain juga seperti itu sih.</p> <p>Ada usulan dari pokok pikiran dewan, ada usulan dari masyarakat melalui Musrenbang, seperti itu.</p> <p>He'e, Forum SKPD itu kita juga yang melaksanakan untuk Bapeda bukan, bukan, terus SKPD-nya mau melaksanakan sendiri-sendiri, bukan.</p> <p>He'e, di, dihadirkan</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>penting usul jalan, ini berapa totalnya, berapa ratus miliar sendiri gitu kan.</p> <p>Nah, praktiknya nanti kan yang terlaksana juga cuma berapa puluh karena dengan anggaran sebesar itu tidak mampu. Nah, itu adanya, akhirnya kita membuat pagu wilayah tadi, pagi inikan ke wilayah. Jadi, untuk eee, kemarin saya lupa berapa, 19M apa ya tiap kecamatan kalau nggak salah.</p>		<p>RencanaKu. Nah, setelah jadi, setelah ABPD ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatannya namanya MonevKu.</p> <p>Nah, MonevKu-nya itu untuk melihat keberlangsungan kegiatan tersebut seperti itu.</p> <p>Di akhir tahun, nah, setelah MonevKu-nya selesai kan di akhir tahun. Nah, MonevKu-nya nanti dipakai bahan menjadi Lakip tadi.</p>		<p>kemudian dijelaskan. Mungkin sebelumnya kita minta, ada usulan apa ini atau kita buatkan draft terlebih dahulu berdasarkan rensra, rensra kan sudah sampai kegiatan itu.</p>	
3 : Khamdan Syakiri, S.Psi	<p>Kalau RPJMD mungkin lebih luas ya... Kalau RKPD kan untuk Kulon Progo aja sih. Lebih luas RPJMD, stakeholder-nya itu lebih luas.</p> <p>KUA PPAS saya belum pernah alami ya.. jadi kan hasil RKPD ini jadi KUA PPAS. Nah itu nanti kita kirim ke dewan untuk dibahas bersama banggar kan persisnya. Seperti itu yang saya pahami. Nanti kita bahas antara dewan, ada BKAD juga, Bappeda juga, TAPD juga, harus klop antara pendapatan dan pembelanjaan, harus sesuai.</p>	<p>Sebenarnya kita ada itu sih, kita kan pakai sistem ya, aplikasi e-planning ya. Kan ada usulan dari masyarakat, kemudian dari usulan dewan, kemudian ada usulan OPD sendiri to, ada di keterangannya ada di misalnya kegiatan A, itu sasarannya berapa, kemudian ada keterangan usulan siapa.</p> <p>Rancangan awal....secara ril nya saya gak tahu ya.. saya gak..gak mulai dari awal. Sepengetahuan saya kita ada sebelum kita menyiapkan RPJMD kita kan bikin secara teknokratis dulu karena ada peralihan jabatan bupati. Kita ada pendamping dari ahli,kayaknya seperti itu. Kemudian ada FGD-FGD dengan OPD juga. Seperti itu.</p>	<p>Setelah rancangan awal, biasanya kita konsultasi publik dulu, kalau RPJPD ya. Setelah konsultasi publik baru kita musrenbang-kan. Ada musrenbang juga. Setelah itu kita paparan ke Bupati dulu. Ada masukan-masukannya dari ahli, staf ahli, dari OPD-OPD yang lain. Kemudian kita juga minta fasilitasi dari Pemda DIY memperbaiki rancanrang sebelum kita tetapkan menjadi RPJMD. Langkah-langkahnya seperti itu.</p> <p>OPD, kemudian ada juga perwakilan ormas, organisasi keagamaan, LSM, ada akademisi juga, terus DPRD juga kita undang. Semua..semua pemangku kepentingan yang ada di Kulon Progo.</p> <p>Hmmm...konsep akhir, kemudian kita paparkan dulu, dipaparkan lagi kalau</p>	<p>Kita ada berita acara, tiap-tiap tahapan itu ada berita acara. Mana usulan yang bisa diterima. Kemudian kalau dewan, kita verifikasi juga, ada usulannya siapa, setelah itu kita verifikasi. Bisa masuk apa nggak, ada keterangannya.</p>	<p>Kita di “rencanaku” di Bappeda. Kita juga sih yang kelola. Subbidang perencanaan. Tapi nanti yang input kan masing-masing OPD. Sudah kita user sama pasword masing-masing. Itu nanti, dari situ langsung link ke KUA-PPAS. Jadi kita konek, jadi setelah musrenbang kan kita cermati, kita bikin kayak pra-RKA gitu. Itu nanti sebagai bahan untuk Bappeda.</p> <p>Kita punya, eeehh Bappeda ada “Monevku”, jadi pengendalian yang ada di RKPD itu. Yang kelola bidang Litbang.</p> <p>Eeehh..kita e-planning aja. Itu namanya “rencanaku”. Iya di bidang sini.</p> <p>Kita kan ada itu eeehh..adaaaa...penilaian dari Pemda DIY. Jadi kan</p>	<p>Tim teknis ada. SK Bupati. Yang melibatkan Bappeda dan OPD lainnya. Ada Sekda, Bagian Hukum. Semua kita libatkan.</p>	<p>Setelah musrenbang ini kita finalisasi, kita diskusikan dulu internal. Selain internal kemudian kita diskusikan dengan BKAD terutama tentang pagu-pagu yang disepakati. Setelah itu kita rapatkan dengan TAPD. Setelah dari TAPD kita paparkan di depan Bupati. Nah dari Bupati ada masukan-masukan apa nggak, baru kita finalkan.</p> <p>Sebenarnya hampir sama sih, kalau musrenbang, cuma materinya mungkin ya, materinya yang di-musrenbang-kan beda-beda. Kalau musrenbangggg...kita kan. Kalau RKPD ya? RKPD dari musrenbangdes dulu kan, kemudian kecamatan ada musrenbang juga, per kecamatan, ada 12</p>	<p>Kalau yang bikin bidang-bidang Bappeda semua ya, kita kan di perencanaan, jadi kita yang mengkoordinir. Bidang-bidang juga nanti mengundang OPD-OPD untuk membahas eee..rancangan RPJMD.</p> <p>Kayaknya ada, ada ya..ada sih. Sepertinya ada..ada. Nomornya saya lupa. Perda tentang sistem perencanaan...nah itu.</p> <p>Kalau aturannya, anu sih...juknis aja. Setiap kegiatan misal forum konsultasi publik, kemudian musrenbang ada juknisnya. Kalau yang tandatangan ya kalau bukan Sekda ya kepala Bappeda.</p>

		<p>Itu kita serahkan ke OPD karena sudah jadi kegiatan OPD. Yang disetujui mana saja, nah nanti OPD yang menginformasikan ke masing-masing. Itu RKPD juga kita publish. Di website kan juga di publish. Nah mereka bisa melihat dari situ.</p> <p>E-planning....bisa. tapi kalau OPD sih yang akses, eeeh kalau masyarakat di website kita hasil rancangan awal kita publish, kemudian hasil konsultasi publik kita publish. Hasil musrenbang ya kita publish. Jadi RKPD juga kita publish. Soalnya nanti kalau kita buka e-planning nanti untuk masyarakat nanti bisa buba...kan. Kalau usul mereka bisa usul. Usulan warga itu ada menu tersendiri.</p>	<p>masih ada perubahan sebelum kita kirim ke pemda DIY.</p> <p>RKPD....iya, nanti di renja nya dia. Kalau renstra kan sudah ada. Nanti dia bikin renja awal dulu untuk menampung usulan-usulan itu. Kemudian kita konsultasi publik, abis konsultasi publik kita kirimkan ke OPD, jadi ada namanya, setelah konsultasi publik ada namanya forum perangkat daerah atau forum SKPD. Forum perangkat daerah itu untuk membahas usulan-usulan dari kecamatan, usulan dari Dewan, usulan dari masyarakat, bisa gak masuk di kegiatan-kegiatan OPD.</p>		<p>rancangan akhir yang sudah kita finalisasi kita kirim ke pemda DIY, nanti mereka mencermati, ada yang diubah nggak, sudah selaras apa belum. Itu dikoreksi sama pemda DIY. Sebelum ditetapkan jadi RKPD kan harus ada....eeh satu lagi, ada reviu dari Irda juga sebelum ke Bappeda Propinsi, Irda sini juga mereviu.</p> <p>Nah itu saya kurang tahu. Jenengan ke Irda saja. Soalnya kita..kita, saya belum pernah melakukan reviu, baru tahun ini saya memegang RKPD itu. Karena belum jadi nanti kita kirim ke Irda untuk direviu.</p> <p>Renstra SKPD....yang reviu masing-masing SKPD juga. Itu kan setelah kita mereviu RPJMD, itu kan Renstra nya juga perlu menyesuaikan RPJMD. Renstra-nya itu dikumpul disini. Semua dokumen perencanaan kumpulnya di sini, termasuk Renja OPD disini semua.</p>		<p>kecamatan. Usulan-usulan dari kecamatan itu kita sampaikan ke OPD, nantinya masuk ke kegiatan OPD.</p> <p>Kita koordinasi terus, kita undang rapat. Kalau bikin juknis kita undang rapat, kemudian kalau sebelum pelaksanaan musrenbang, kita undang rapat. Kan kita ada....ini kan baru desk juga. Kita cermati kegiatannya OPD masing-masing. Kemudian alokasi belanjanya juga kita cermati. Kita ada tim..tim...kita dengan BKAD ada tim teknis sendiri. Sama Irda juga, kemaren waktu usulan diangkat juga kita undang mereviu usulan-usulan itu.</p> <p>Sama sih, sama seperti RPJMD sih. Kita yang eeh...konsep awal dulu. Kan biasanya kan dari RPJMD, eeh RPJPD, kemudian dijabarkan RPJMD. Nah untuk RKPD ini kan kita ambil dari RPJMD tahun yang bersangkutan. Kemudian juga nanti OPD-OPD kan juga ada Renstra. Renstra kan 5 tahunan. Nah itu kita gunakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD. Nanti kita sesuaikan juga dengan RKP nasional sama RKPD Pemda DIY. Tema-temanya kan kita selaraskan</p>	
--	--	---	---	--	---	--	---	--

							<p>Bersamaan. Cuma nanti renja itu mengikuti rancangan awal kita kan. Setelah kita konsultasi publik kan, kan kita kirim ke OPD-OPD untuk mereka menyempurnakan rancangan renja-nya. Itu. Jadi renja itu kan mereka ambilnya dari Renstra. Kalau RKPD kita ambilnya dari RPJMD. Cuma ada sinkronisasi antara RKPD dan Renja nanti.</p> <p>Bisa. Ada. Nah tergantung nanti ada nggak pagu anggarannya. Tidak. Kita kan di...RPJMD kan cuma kegiatan dan sasaran saja. Kalau di RKPD kan lebih tajam lagi. Sasarannya berapa, dananya berapa, dipertajam lagi di RKPD. Kalau RPJPD masih globalan untuk kegiatan dan sasarnya. Untuk program dan kegiatan masih kita pertajam lagi di RKPD.</p> <p>Eeehh..sementara ini kita ekspor, jadi manual. Koneknya manual, data RKPD nanti diekspor ke Simda. Renncananya kan juga kita mau pake Simcan-nya BPKP. Simcan, Sim Perencanaan. Yang Simda kan yang bikin BPKP, nah BPKP juga bikin Simcan. Kita tahun ini sudah mulai input RPJMD ke Simcan, sama input Renstra di</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Simcan juga. Nanti 2020 kita bisa gunakan Simcan yang terintegrasi dengan Simda. Seperti itu. Simcan sudah ada. Mulai pake ini setelah sosialisasi ke OPD. Kemaren kita barusan sosialisasi ke OPD untuk menginput Renstra. Jadi baru tahap uji coba lah.	
4 : Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.	Ya.. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi proses perencanaan. Ya ini kan setiap...setiap prosesnya kan ada musrembang, dan sebagainya itu kita, misalnya kita umumkan, eeh maksudnya seperti rancangan awal, kemudian rancangan RKPD, rancangan, kemudian nanti...nanti RKPD-nya kan semuanya diupload di web to.. Prosesnya juga kita..kita lakukan misalnya musrembang kan kita juga menghadirkan semua stakeholder yang apa..yang berperan di kegiatan, jadi tidak hanya instansi pemerintah tapi ada juga LSM, kemudian eeeh organisasi ormas, organisasi massa, organisasi keagamaan, itu juga kita undang semua.	Di kami ada, usulan masyarakat itu di aplikasi “Rencanaku”. Itu ada memang ada usulan masyarakat. Mestinya yang kita upload, yang kita sampaikan ke masyarakat itu bukan yang sifatnya rahasia. Contoh kasus begini, pernah kan kita ada data album kemiskinan. Nah di data album kemiskinan itu yang kita sampaikan ke masyarakat kan hanya yang agregatnya saja, jumlah penduduk miskinnya yang bisa diakses gitu loh, artinya bahwa di desa ini ada kemiskinan tetapi by name, by address-nya kan tidak kita buka, itu kan menyangkut kerahasiaan orang. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengetahui data itu, silahkan berkonsultasi ke kami. Kebutuhannya untuk apa pengen mengetahui data yang by name, by address orang miskin tadi. Contohnya gitu itu	Di sini, iya di bidang sini. Di aplikasi Rencanaku itu ada form usulan masyarakat gitu loh. Kemudian di musrembang sendiri itu kan ada juga usulan dari masyarakat kan pada saat musrembang kecamatan itu. Itu ada usulan dari masyarakat. kemudian di DPRD itu sudah membuat sistem aplikasi namanya “Aspirasiku”. Nah itu semua yang warga masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau mungkin keluhan gitu , bisa lewat “aspirasiku” itu. Yang bisa ngakses yang NIK Kulon Progo. Iya yang bisa memasukkan cuma rakyat Kulon Progo. Hm.hm pake NIK itu dikelola di DPRD. Ya..masyarakat tahu apa yang kita bangun, apa yang kita rencanakan, itu aja sih. Dan masyarakat juga berhak atau memberikan usulan terhadap apa yang mereka butuhkan Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan	Kalau pelaporan itu ada form aduan yang dikelola oleh Diskominfo. Itu kan ada. Ada juga setiap hari kamis pagi, itu kan Bupati kan ada forum, namanya “forum kamisan”, itu beliau menyediakan waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 10, menerima warga masyarakat. Bupati atau wakil bupati, hari kamis pagi. Tapi kalau mau kesana biasanya ini dulu ya mas, daftar dulu. Eeeh..eeh karena kan kadang bupati dan wakil, kadang wakil bupati saja beserta staf ahli biasanya atau asistennya. Nah nanti dari forum kamis pagi itu kan ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang apa saja. Itu terus nanti ada, kan ada yang nyatet ya, di-feedback-kan ke SKPD, misalnya jalan rusak, itu nanti	Gak sih. Sepertinya tidak disediakan penjelasan khusus. Tapi dengan bahasa yang sederhana, mereka kan tahu. Bahasa perencanaan kita juga bukan, masak, artinya yang muluk-muluk. Kita mencoba dengan bahasa yang sederhana. Jadi langsung gampang dimengerti. Iya..iya..pengendalian dan evaluasi kan sesuai permendagri 86 itu kan, pengendalian dan evaluasi dilakukan di setiap tahap. Jadi misalnya pada saat penyusunan rancangan awal RKPD, itu pengendaliannya bagaimana. Rancangan itu di bidang pengendalian nanti yang lakukan itu Iya, dilakukan juga, itu di bidang...sama-sama di bidang pengendalian yang melakukan. Itu form-nya juga pake itu di apa...ada aplikasinya juga, soalnya “Monevku”. Kami hanya sampai ke “Rencanaku” sampai ke KUA PPAS,	Di ini..di ini tadi, di dokumen-dokumen yang tadi, yang kita upload itu, kan jadi kelihatan to.. jadi besok di akhir, di rancangan, eeeh di dokumen RKPD yang akhir itu kan ada kegiatan, kegiatan yang belum, yang ditunda pelaksanaannya, yang belum disepakati mungkin karena kan keterbatasan anggaran, nah itu kan tidak semua kebutuhan, kadang kan masyarakat itu usulannya kan banyak sekali sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Itu kan dimana-mana pasti ada yang constrain anggaran kayak gitu. Itu di...tunda pelaksanaannya atau untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan. Kan itu bisa dipergunakan untuk rancangan tahun berikutnya. Dokumen tertulisnya juga ada, nanti bukunya juga ada, buku kayak gini (sambil menunjuk tumpukan buku di sampingnya). Nah ini untuk yang sudah disepakati. Nah ini	Iya pasti. Kami ada ini ya mas, itu yang ditempel teman-teman itu (sambil menunjuk tempelan kertas besar di dinding sebelah kanannya), itu peta indikator kinerja. Itu kan dari visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, terus sasaran SKPD-nya, kemudian itu program, ada di dokumen juga. Aspirasiku sementara ini masih dikelola di dewan dan kita mendapatkan data sudah dalam bentuk hardcopy, hasil dari Aspirasiku. Itu disampaikan ke kami, menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Ya..masing-masing. Yang jelas di sini masing-masing personal itu mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Itu nanti dikoordinasikan sampai ke atas, sampai ke levelnya. Kalau perencanaan kan kita ada TAPD, tim anggaran pemerintah daerah itu yang punya	Komplit. Dalam bentuk pdf. Bisa didownload, nanti coba jenengan di web-nya Bappeda, he..ee, Bappeda Kulon Progo. Tapi untuk yang tahun ini kita baru sampe pada tahap rancangan. Nah rancangan akhirnya kan belum. Masih SPDP itu tadi, sistem perencanaan pembangunan daerah, perda itu loh...Cuma dua itu. Kami memang belum mengubah ini, seharusnya kan sudah diubah karena yang ini perda 2007 itu sudah lama ya..karena kan sudah ada permendagri yang 54, 86, tapi secara prinsip di permendagri 86 atau 54 itu kan tidak terlalu berbeda, perbedaannya tidak terlalu banyak.

		<p>loh. Lebih mudahnya yang disampaikan.</p> <p>Akuntabel itu perencanaannya sesuai standar ya. Akuntabel itu bisa diperbandingkan, bisa ada target, ada targetnya. Cuma itu sih yang saya tahu.</p> <p>Yaa itu setelah jadi dokumen akhir, tapi tahapannya tadi yang saya sampaikan bahwa rancangan awal RKPD misalnya, rancangan awal RKPD itu kan kita upload, rancangannya kita upload, rancangan akhirnya kita upload. Jadi kan masyarakat bisa mengikuti kalau yang memang ingin kan bisa mengikuti prosesnya itu. Itu iya jadi.</p> <p>Yang tadi yang usulan dari masyarakat, kan masyarakat bisa, bisa menginput. Kalau yang di luar admin-nya SKPD.</p>	<p>pembangunan. Ya kita di forum-forum itu tadi, ya...musrembang.</p>	<p>disampaikan ke mana...ke dinas PU, dan biasanya di sini juga dapat tembusan.</p> <p>Eehh di front office, tapi itu daftar dulu. Di front office di kantornya Bupati. Soalnya takut kalau terlalu banyak, apa waktunya terbatas. Tapi tetap dibuka selain itu Bupati juga ada acara “Bupati Menyapa”, itu lewat RRI dan biasanya jumat pagi, tapi saya gak hapal ya jam berapa. Jumat pagi-pagi itu disiarka di radio, biasanya ada yang telepon.</p> <p>Yang selama ini sudah berjalan baru Dinas Perhubungan, nah perhubungan itu ne jenengan mirsane di apa namanya...tiang-tiang LPJU, nah itu kan ada nomor telepon kalau misalnya LPJU ini mati silahkan hubungi nomor ini, itu dinas perhubungan. Yang lain saya kurang..kurang tahu. Mungkin ada juga cuman beda-beda.</p>	<p>nanti pengendaliannya di Monevku. Aplikasinya Monevku namanya. Monevku itu datanya sudah dari anu ya..nanti data capaian keuangan sudah dari...eeeh..dari BKAD. Itu sudah ambil dari SIMDA, kan aplikasinya BKAD itu SIMDA namanya. Realisasinya sudah dari sana.</p>	<p>yang ditunda. Dua-duanya kita upload. Kita upload satu buku.</p>	<p>tanggungjawab.</p> <p>Gak, jadi perencanaan kami ini yang, istilahnya mengkompilasikan. Jadi ada di masing-masing bidang, jadi yang bertanggungjawab terhadap SKPD, contoh kasus yang misalnya bidang infrapanwil, nah itu dia mengkoordinasikan perencanaannya yang dinas PU, dinas pertanian tata ruang, lingkungan hidup, itu perencanaannya ke bidang infrapanwil tadi. Kemudian yang bidang Sosek, itu ada dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas, sesuai wilayahnya lah. Lah itu terus nanti dari hasil bidang, dari bidang-bidang yang teknis tadi, itu nanti baru ke kami untuk di.... eeh..apa ya bukan sekedar kompilasi sih, tapi ya memang untuk dirajutnya gitu loh, ke perencanaannya itu. Rancangan juga, rancangan awalnya kan dari kami, sebelumnya juga sudah ada guidance untuk pelaksanaan perencanaan. Tahun 2019 misalnya kan kita rembuk bareng-bareng, tapi nanti yang langsung berhubungan dengan SKPD, dibawahnya ya bidang-bidang teknis.</p> <p>Kalau perencanaan koordinasi kami lebih banyak ke bidang anggaran dan pendapatan</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--	--

							<p>(BKAD). Kalau pendapatan itu kan bagaimana pendapatannya, terus kami bagaimana mengalokasikannya kan dari target pendapatannya kan sama, kami mengalokasikannya, nanti anggaran ini yang ditunggu di penganggarannya.</p> <p>Ya. Kami di tahapan penyusunan RKPS itu pasti ada sinkronisasi kita dnegan DIY maupun dengan nasional kan, rancangan akhir kita konsultasikan, di DIY kan ada mekanisme itu. Nah itu kalau di sana menilai belum sinkron, kan pasti diminta ada sinkronisasi dan di DIY juga ada beberapa tahap yang harus dilewati pada saat pada forum trilateral, ada forum patrial yang membahas musreimbang, usulan-usulan APBN-lah intinya itu, ada..ada forumnya.</p> <p>Belum..belum..iya, masih operasi sendiri-sendiri. Meskipun datanya dari Rencanku, kan ini perencanaan, ke penganggaran kan pakai SIMDA. Lah itu sudah apa ya, sudah ada pada saat desk, karena pada saat desk kita di pelaksanaan desk kita, eeh..pencermatan pra-RKA, itu kan kami juga melibatkan, eeh timnya</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							ada, teman-teman di DPPKA, BKAD ya maksudnya, sekarang BKAD. Jadi nanti semaksimal mungkin yang apa yang sudah dikerjakan di perencanaan ini nanti akan sama dengan, udah ngalir itu ke SIMDA-nya. Meskipun belum konek, tapi sudah, kemarin sudah dicoba, dibuat di..apa jadi teman-teman di BKAD tidak entri lagi tapi masih ada sedikit apa sedikit trouble ya, jadi belum.	
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.							<p>Ketika mau bikin DPA, dia sudah include. Jadi bersamaan, gak,maksudnya DPA yang tadi itu ekspor impor dari Rencanaku, tapi kalau untuk penyusunan anggaran kasnya itu malah nginput lagi. Tidak ...tidak terus jadi...belum ada sistem tersendiri. Bukan 2 kali tapi memang belum ini buat waktu di tahap perencanaan.</p> <p>Kalau anggaran kas hanya gaji yang diverifikasi di sini saja. Tapi kalau rencana penarikan dana, nah itu terserah SKPD, mau dilaksanakan karena mereka yang tahu. Setelah dari anggaran kas itu fixed dari Simda.</p>	

							<p>Iya. RKA pake excel dulu...? Pra RKA itu pake excel ya. Dari pra RKA diinput ke Rencanaku, nanti ke DPA nya, input lagi ke simda? Gak langsung. Model ekspor impor. Input di simdanya nanti tinggal impor. Nanti kita ini kok, apa adanya, penelitiannya memang masih rendah, masih ini silahkan saja..ha..ha..gak usah ditutupi, he..he..he.. apa adanya saja, syukur-syukur ada rekomendasi nanti yang bisa berguna.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

15 : Nasip, S.E.						<p>Nasip Kalo yang connect itu cuman yang kaitannya dengan masalah BPD. Kaitannya dengan BPD/PBB 09:25, datanya datanya BPD/PBB. Tapi kalo simda pendapatan dengan BPD itu tidak connect. Cuman nantikan BPD memberikan data kepada kita. Ternyata ada transfer sekian. Nah itu nanti kita yang ajukan ke simda pendapatan. Sama</p> <p>Nasip Ya untuk yang lainnya memang kita belum anu enggih, belum siap. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengarahkan pada transaksi non tunai. Jadi kalo PBB bayar langsung bisa langsung ketemu. Maka katakanlan ATM itukan BPD ini lagsung muncul atas nama ini, oh ya bener berarti lagsung masukan angka. Tetapi kalo seperti pajak reklame itu cuman menuju ke rekening. Ini saya membayar untuk reklame ke iklan ini nomor rekeningnya nanti sudah persen lagi. Sehingga kita harus nyari lagi tapi yang kecil-kecikan langsung to. Nah itu nanti berkaitan dengan masalah system aplikasi sekrang kita bisa baru input yang BPD. Cuman</p>	
------------------	--	--	--	--	--	--	--

							<p>yang kalo harapan dari ATK diharapkan semuanya itu bisa secara online, tetapi ya itu tadi mengingat kitakan kesiapannya kaitannya dengan masalah aplikasi, brangkas itukan. Jadi arah kita sekarang baru non tunai. Sehingga masyarakat bisa langsung membayar lewat bank, tidak usah ke BUD membawa uang tidak usah.</p> <p>Nasip Itu kan punya milik, ya kitu kan ya milik yang bikin itu kan anu BPKP. Jadi yang pertama BPKP itu ya simda keuangan</p> <p>Nasip Kalo simda keuangan itu mulai dari perencanaan. kemudian Pembuatan dokumennya sampai dengan nanti sisanya, akhir laporan keuangan, lah kemudian untuk yang simda pendapatan ini, ini juga yang membuatkan adalah BPKP juga dalam rangka ya itu tadi penanganan masalah keuangan pendapatan supaya tidak terjadi kebocoran secara berlebih</p> <p>Nasip Enggih. Cuman kemarin eu dari pihak BPKP sendiri inikan bagaimana enggih, melaksanakan penyempurnaan seperti</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>yang simda keuangan itu juga disempurnakan pada, ya nanti harapannya untuk semua juga bisa langsung masuk ke link pihak keuangan. Sehingga nanti simdamembuat laporan keuangan dengan masalah dibuatkan itu sudah tidak lagi minta di simda pendapatan di sini, tetapi bisa langsung ke sana. Tetapi sekarang masih mungkin bisa tapi dengan cara export import. Untuk itu yang bisa dilakukan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

17 : Sutanti, S.E.							<p>Sutanti Iya, nanti masuk ke SIMDA. Atau ada satu lagi SIMDA pendapatan tapi untuk yang masukkan itu saya dibantu oleh Pak Karmanto. Soalnya saya kan nggak bisa kalau sambil nyambi gitu. Dibantu sama Pak Karmanto.</p>	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.							<p>Untuk perencanaan? Kalau untuk perencanaan, belum. Tapi untuk penatausahaan kita upload di. Untuk penatausahaan kita upload di website. Pelaporannya juga kayak begitu. Pasti dalam bentuk pdf karena untuk SIM Aset kita masih offline, sehingga hasil akhirnya adalah hasil audit yang kita upload bersama dengan laporan keuangan.</p> <p>Ohhh ada, ada. Cuma offline, karena offline kemudian yang kita upload hanya laporan akhir, laporan akhir dari apa namanya, eeh yang setelah diaudit BPK.</p> <p>Dari sisi yang mana? Pengelolaan aset? Dari sisi pengelolaan aset kan kalau kita bicara aset itu baik dari perencanaan, eeh yang paling utama kan ada di dalam perencanaan ini. Jadi dalam perencanaan ini, semua usulan mestinya sudah ter apa namanya, terdokumentasikan di e-planning-nya Bappeda. Kalau itu sudah masuk, dalam artian setelah ada rencana kebutuhan barang, kemudian kita lakukan desk, kemudian semua hasilnya ini diserahkan kepada Bappeda sehingga masuk dalam e-planning-nya, sesuai dengan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>kebutuhan. Tapi berdasar pada pagu yang ada. Kemudian setelah di APBD ditetapkan, ini transparansi pengelolaan asetnya kan di masalah pengadaan barangnya. Nah di sini eeh kita kan menggunakan ULP semuanya. Jadi semuanya ikut juga dengan mekanisme apa namanya eeh pakai LKPP itu, sehingga saya rasa itu adalah sebuah transparansi dalam sistem pengadaan. Kemudian pada saat untuk setelah pengadaan selesai, untuk pemanfaatan dan sebagainya itu, itu ranahnya di SKPD/ di pengelola. Itu internal saya rasa. Tidak perlu orang lain tahu, termasuk juga penatausahaan. Tapi di dalam laporan pada saat membuat apa, neraca daerah, itu perlu diungkapkan berapa sih kekayaan miliknya pemerintah daerah. Itu dimunculkan di dalam apa namanya, dalam eeh, dalam website. Mungkin itu.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 14: Framework Matrix Wawancara tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	B1. Struktur Pengelola Keuangan yang Terkoordinasi dengan Baik	B2. Menggunakan Standar Harga yang Diperbaharui	B3. Diverifikasi, Divalidasi, dan Direkonsiliasi sesuai Aturan	B4. Sistem Desk yang Bersifat Teknis dan Menangani Usulan di Luar Plafon Anggaran	B5. Pembatasan Jumlah Minimal Ganti Uang Persediaan	B6. Rakor dan Evaluasi Berkala Kinerja Keuangan SKPD	B7. Pemberlakuan Sistem Pembayaran Nontunai
5 : Alif Romdhoni	<p>Yang memiliki. Jadi tidak semua tidak setiap OPD itu ada bendahara penerimaan, hanya OPD yang cara-carane itu memiliki fungsi untuk pendapatan. La terus misalnya contoh pariwisata dia kan punya retribusi di objek-objek. Nah, dia punya bendahara penerimaan. Jadi neg semua OPD yang punya itu bendahar pengeluaran, itu pasti punya semua. Kalau yang kemudian ada pendapatan yang masuk misalnya di BLUD rumah sakit itu dia punya bendahara penerimaan. Kalau kemudian anda tanya Bappeda, Bappeda tidak punya bendahara penerimaan karena dia kan tidak memiliki fungsi pendapatan, tidak memiliki fungsi untuk kemudian apa ya leading sektor untuk menerima proses-proses pendapatan asli daerah.</p> <p>Kita itu kalau jenis pajaknya itu ada, jadi ya meliputi pajak tujuh kalau nggak delapan ya. Nanti mulai dari pajak hotel, pajak air tanah. Tapi ini sebenarnya bidang pajak ya, bidang pajak. Nanti kalau ee nanti kalau misalnya butuh datanya ada. Jadi ee anu aja sambil tag pinjam data. (Narasumber ambil data dan obrolan dengan orang lain menit 03:10 - 03:33)Seng rencana yang kemaren itu, ambil yang dipinjamkan ke saya pas proses. Sambil melihat data ini. Ini kalau kita pajak</p>		<p>Iya. Di kita ada tim teknisnya. Di kita ada tim yang bertugas memverifikasi terhadap SPj seperti itu termasuk melakukan rekonsiliasi dengan OPD. Ada tim teknisnya dan itu di SKkan oleh kepala OPD.</p> <p>Nanti ada berita acara rekonsiliasi. Kemudian nanti kita rekon itu ee apa ya melibatkan beberapa pihak. Artinya bukan hanya OPD mereka dan kita tetapi juga bidang akuntansi yang meguasai sistem. Jadi kan untuk SIMDAny kan yang m=pegang akuntansi. Jadi contoh kasusnya begini misalnya ada angka masuk katakanlah sekian juta tapi tidak ada SPSnya. Neg yang belum ada SPS belum bisa kita akui secara anu. Jadi kita tetap harus berpegangnya sampai detail di SPSS itu. Terkadang permasalahan yang kita hadapi itu ketika SPS itu kan harusnya rinci dan rigit tetapi biasanya OPD atau mungkin itu ngglundung. Yah sebenarnya tidak ada yang salah ketika 1.500.000 contohnya tetap secara angka kan tidak tetapi dalam proses pencatatan kan harus jelas. Ini misalnya 1.500.000 itu ada dua transaksi itu kan harus</p>			<p>Kalau untuk ya sarana yang kita lakukan ya rakor setiap bulan itu.</p> <p>Haá. setiap bulan kita ada rakor kemudian tiap triwulanan dipimpin Pak Sekda langsung.</p> <p>OPD Pendapatan. Jadi bisa bedaharanya, bisa kepalanya yang datang. Tapi biasanya ee koordinasi OPD pendapatan.</p>	

	<p>satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Sembilan sepuluh.</p> <p>Secara anu mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, MBLB mineral logam bukan batuan, parkir, air tanah, PBB dan BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu yang di bidang pajak urus jadi pajak daerahlah di situ. Nah, kalau kemudian PAD itu kan ada pajak ada retribusi, nah di luar itu kan retribusi yang kemudian ada di OPD-OPD teknis mulai dari dinas pariwisata, kemudian ada yang di PU, ada yang di Perhubungan, ada di bagian umum, kemudian ada yang di rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian RSUD sendiri, kemudian ada yang . . . (04:34), kemudian di kecamatan Wates juga ada. Jadi ada sekitar 14 OPD yang memiliki fungsi pendapatan juga.</p> <p>Jadi kita ee lebih tepatnya kalau secara mekanismenya kita mensupervisi setiap OPD termasuk juga pajak. Jadi kalau kemudian kita memang setara tetapi setiap ee proses koordinasi mereka itu bagian yang kita supervise. Target-target mereka secara perencanaan, pajak yang masuk berapa itu bagian yang kita di pendapatan ini yang kita awasi. Jadi kita itu berbicara secara fungsi ee supervise tapi kadang kita berbicara secara OPD. Maksudnya gini, pada satu sisi saya mensupervisi semua OPD pendapatan. Saya juga karena bidang pajak ini sebagai leading sektornya BKAD di fungsi pajak ya dia termasuk</p>		<p>ini transaksi apa dan apa. Kalau secara uang yang anu ya memang tidak ada. Tapi biasanya nanti diakhir di proses pencatatan itu kan harus jelas secara penggunaan misalnya oh yang satu kebersihan, oh yang satu ternyata parkir. Jadi di situ yang kadang ee apa ya, masih dibutuhkan ee proses proses rekon itu. Jadi nanti berita acara rekonsiliasi itu yang disepakati yang mana ya itulah yang menjadi dokumen untuk kemudian kita pertanggungjawabkan.</p> <p>Tag kasih lihat contohnya ya. Jadi ini contoh SPj pendapatan penerimaan dari sebuah OPD. Ketika dia mengirimkan seperti ini angka-angka sampai dilampirin dengan bukti-bukti setorannya, sudah cocok nanti ada proses verifikasi seperti ini sebagai pengesahan bahwa ini sudah cocok sudah sesuai sudah ada bukti pendukungnya. Sehingga nanti ada petugas verifikasi seperti ini nanti Pak Kepala juga seperti ini.</p> <p>Iya. Ini lembar pengesahannya. Ini kan sudah telah diperiksa dan disahkan oleh Kuasa BUD. Jadi ya ibaratnya jadi ya kita kembali ke Jenengan tadi nanya neg kuasa BUD ya kuasa BUD di bendahar penerimaan nanti ada proses ini, ada proses petugas yang bertugas kemudian Kepala Bidang bisa.</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>yang saya supervise terkait dengan capaian pajaknya, permasalahan, target terkait dengan progress , terkait hal-hal yang kemudian menyangkut ee pemasukan daerahnya. Jadi ya fungsinya koordinasi supervise gitu.</p> <p>Jadi untuk proses, jadi verifikasi terhadap SPJ pendapatan, SPJ fungsional pendapatan itu kita lakukan setiap bulan. Mekanismenya kita setiap maksimal di tanggal ee 5 itu harus sudah menyampaikan misalnya sekarang ya contohnya sekarang kita bulan ini bulan Mei. Jadi tanggal 5 bulan mei itu mereka sudah menyampaikan SPJ fungsional di bulan April bulan sebelumnya. Nah, fungsi verifikasi ini adalah untuk sinkronisasi termasuk rekonsiliasi terkait dengan SIMDA yang ada di kita. Jadi kita itu kan menerapkan aplikasi keuangan yang berbasis SIM ya yang kemudian itu pengembangan dari BPKP. Jadi kita punya SIMDA pendapatan yang kemudian kita senantiasa rekon bukti STS dengan jumlah yang ada itu senantiasa kita cek. Sehingga di OPD ketika menyampaikan SPJ yang kita harus kita verifikasi dilengkapi dengan STS itu nanti dimasukkan ke kita. Kita bagi tim ada empat orang yang bertugas di bertanggung jawab di masing-masing OPD lakukan verifikasi, lakukan kecocokan, lakukan dengan membuka SIMDA. Kemudian ketika sudah cocok secara angka, buktinya juga sudah tersedia</p>		<p>Heém. Sudah ada di situ. Jadi SIM keuangan karena belum pendapatan berdiri sendiri ya. Jadi SIM keuangan yang di situ nanti ada tampilan menu untuk yang bendahara, kan nanti ada bendahara pengeluaran sendiri ada bendahara pendapatan. Nanti kita akses di bendahara pendapatan kemudian kita cek di buku harian pendapatan. Nanti kita akses dari situ. Tapi belum bicara SIMDA pendapatan tok berdiri sendiri. Tapi tetep masih jadi satu SIMDA keuangan.</p> <p>Dibandingkan kami menerima dari BPD. Jadi BPD itu kan mengirimkan B9, tebusan, STS kita verifikasi di kita. Kemudian mereka juga punya karena sebagai penyeter, akuntansi juga punya. Jadi nanti kita cross check dari situ. Jadi tidak hanya SIM yang masuk secara, online secara aplikasi saja. Kita punya dikirim ada contohnya juga baru saja dikirim. Jadi nanti BPD secara temporary pasti akan menyampaikan data seperti ini kepada kita, kita gunakan nah, ini masih campur jadi satu. Jadi di sini belum per OPD. Nah, ini tugas kita untuk...</p> <p>Cek mana aja dengan STS yang ada, rinciannya apa. Makanya kan masih ada NPWP macem-macem. Jadi kita rekap dari ini</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>dan terdokumentasikan, kemudian nanti ada pengesahan dari kepala bidang. Nah, di situ ketika sudah dilakukan pengesahan dengan tanda paraf dan tanda tangan nantinya karena mereka buatnya dua, yang satu kita serahkan kembali yang satu untuk dokumentasi kita. Jadi secara umum ee proses ee pengecekan verifikasi SPJ pendapatan seperti itu. Jadi ada dokumen masuk kita cek dan itu biasanya karena bebannya berbeda OPDnya. Jadi ibarate teman-teman itu ngoreksi masing-masing OPD itu juga jadi yang paling anu itu OPD di BLUD, rumah sakit sama di anukan. Semakin banyak OPD itu memiliki apa ya, layanan yang ada retribusi ada biayanya semakin semakin harus lebih njelimet lagi. Semakin sedikit OPD yang mungkin, dia mungkin hanya retribusi paker tok misalnya itu mungkin lebih cepat untuk prosesnya. Tapi bagi OPD-OPD yang besar-besar yang setiap contohnya di rumah sakit, dinas kesehatan, pariwisata itu kan cukup besar. Itu memang proses verifikasinya membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan misalnya yang kecil di kecamatan, di bagian umum untuk sewa Gedung kaca ini, kemudian di dinas perdagangan itu. Secara umum gambarannya seperti itu Mas.</p> <p>Iya. Jadi untuk proses, secara umum kan proses SPJ pendapatan ini kan tag ambilkan gambarannya. Draft ya tapi ini. (narasumber mengambil draft dari menit 11:54 - 12:19).Jadi progress</p>	<p>untuk kemudian sebagai salah satu cara kita untuk memverifikasi..</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>secara umumnya seperti itu. Mulai dari masuk terus proses itu memang kita dan kita ya apa ya bahasanya di standar. Disamakan persesinya dengan teman-teman yang ada di OPD pendapatan kita terutama. Jadi kita anukan untuk itunya untuk di pendapatan.</p> <p>Tergantung secara apanya yang ingin dikonsultasikan misalnya ketika dia membutuhkan rekon itu ada dua cara bisa ke kita, bisa ke akuntansi. Karena secara sim aplikasi kan ada di akuntansi. Ee kalau kemudian berbicara mekanisme karena sekarang yang sedang in kan non tunai itu biasanya melalui kita tapi nanti perbendaharaan yang lebih memahami proses progress dan regulasinya. Jadi ya nanti tergantung kalau kemudian, tapi yang lebih sering dengan kita. Misalnya Mas kok masih ada angka yang belum terdeteksi, jadi belum angka yang anu. Jadi nanti melalui kita, kita nanti dengan bidang akuntansi dan itu setiap bulan kita lakukan rekonsiliasi itu.</p> <p>Jadi ee gini kita kasih toleransi. Sebenarnya kalau secara anu itu tanggal 10 itu. Artinya nanti kalau kemudian memang sampai ee batas waktu, kita kan punya forum ya sekarang untuk meminimalisir itu kan paling tidak ada beberapa mulai dari WA, grup kita punya WA kita sering rakor. Ya itu nanti kita sampaikan di rakor terus ya lebih kea pa ya fungsi ee saya melihatnya memang belum ada ngirimnya tetap ngirim. Cuma waktunya itu yang kadang mundur. Jadi sebenarnya</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>permasalahannya bisa nanti di sistem. Kadang kan SIMDA itu juga error, posisi di OPD itu juga. Jadi kalau kemudian ya alhamdulillah sih kalau secara bendaharanya cukup disiplin cuma kadang permasalahannya itu di sistem. Misalnya sedang mengalami error jaringan itu kan mereka kesulitan untuk itu. Tetapi ee biasanya ini kan nanti kan ada lampiran yang paling utama. Jadi yang kita kita mintakan misalnya nanti anu dikirim aja dulu karena nanti kan masih ada proses kelengkapan. Jadi kita kan membutuhkan angka yang sudah terverifikasi itu segera dikirimkan. Nah, biasanya itu nanti yang format ee ini yang kita verifikasi itu kan sebenarnya kan yang format SPj yang fungsional ini. Nah, kita kita mau mengutamakan yang ini dulu secara angka. Kalau kemudian mereka katakanlah Pak saya ada beberapa STS yang belum dilengkapi, ya nanti dilengkapi sambil proses rekonsiliasi. Tapi di biasanya ini kan sistem ini kan saya bisa akses mereka juga bisa akses. Jadi intinya kan saya ncocoki angka yang saya akses dengan teman-teman yang ada di bendahara itu. Kalau itu sudah lengkap ya paling nggak disampaikan. Jadi ya memang ada yang sok apa istilahnya mblenjani kalau Bahasa jawanya jadi keluar dari yang kita sepakati secara waktu. Tetapi ke arah karena tadi ada ada biasanya karena sistem kalau tidak ada ya biasanya, tapi saya selama 5 bulan ini belum pernah mendapati sampai kemudian tidak mengirimkan satu bulan</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	itu memang belum ada. Kalau kemudian memang apa istilahnya tidak lengkap memang sering, artinya ketika kita cek itu kan k						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>6 : Angelia Resty K.</p>	<p>Satu bidang itu ada yang 3 PPTK, ada yang 2 PPTK.</p> <p>Karena kan yang jadi PPTK kan Subbid.</p>						<p>Pake simda kalau pembuatan.</p> <p>He em. Otomatis langsung masuk.</p> <p>Ee Langsung otomatis dari simda</p> <p>Biasanya kan kalau di sini kan karena untuk tahun ini sudah mulai, sebenarnya tahun kemarin sudah mulai non tunai, jadi sudah nggak ada panjar. Jadi biasanya ketika sudah ada uang di bendahara otomatis dari PPTK langsung dimasukkan SPJ. Kalau dulu kan masih panjar kan, nunggu panjar dulu. Masing-masing PPTK nunggu uang dari bendahara dulu, baru nanti mereka belanja. Kalau sekarang sistemnya kan transfer.</p> <p>Kalau dulu ambil tunai.</p> <p>Sekarang transfernya langsung ke rekening sistemnya.</p> <p>Kalau di PPTK sekarang, jadi PPTK itu ngebon dulu ke rekening, Nanti setelah SPJ jadi baru bendahara transfer.</p> <p>Iya, kalau dulu mulai non tunai itu Oktober 2017. Ada beberapa kegiatan, e ada beberapa belanja yang memang di non tunai. Kalau yang tunai itu cuman SPPD, BBM.</p> <p>Jadi e untuk ee kalau untuk yang masih tunai panjar di bendahara itu yang SPPD sama BBM. BBM ketika 2017. He em kalau sekarang sudah menggunakan... Kalau</p>
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

						<p>sekarang BBMnya sudah pakai kupon. E surat pengantar jenisnya.</p> <p>Jadi gini, e.. PPTK misalnya dia ada kegiatan rapat, dia ngebon dulu ke rekanan itu, istilahnya ini aku besok mau rapat.</p> <p>Iya ngutang dulu nanti setelah kan sambil bikin SPJ, nanti SPJnya udah jadi, bendahara baru transfer.</p> <p>Nggak juga. Justru sekarang dengan adanya CMS malah bendahara ini yang bebannya berat. Nanti kalau sebelum dientri di BKU ini harus CMS dulu ke sana. Terus wara wirinya itu, terus nanti masih cocokkan kesalahan, sering kan kalau sangking banyaknya terus ya...</p> <p>Pertama nanti kita kan ke bank. Ngecek ke rekeningnya udah masuk belum.</p> <p>Ke bank. Kalau sekarang udah pakai CMS bisa ngecek sendiri.</p> <p>Kalau SMS bankingnya sih enggak. Kita pakai CMS cash manajemen system.</p> <p>Itu program dari BPD, sebenarnya kerja sama dengan BPD. Jadi kita bisa ngecek saldonya bendahara sama bisa transfer sendiri lewat CMS.</p> <p>Jadi nanti di informasi di CMS itu kan kelihatan.</p> <p>CMSnya pakai laptop.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Iya aplikasi berbasis web.</p> <p>Kemarin kalau projectnya itu baru BKAD sama RSUD.</p> <p>Mulai bulan April pertengahan.</p> <p>Kalau untuk beberapa itu masih perlu. Misalnya kita pake transfer antar rekening antar bank, misal ke mandiri ke itu kita ngasih pesan.</p> <p>Penarikan tunai ngasih pesan.</p> <p>Ya, sama misalnya kayak transfer honor gitu kita sudah bisa transfer sendiri.</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.</p>	<p>Biasanya dibuat, ada rambu-rambunya, yang buat bidang anggaran. Surat edaran tetap dibuat. Itu penajaman terkait prioritas belanja, kemudian terkait standarisasi harga barang dan jasa yang baru, kemudian ini...timing eeh..jadwal-jadwal harus disusun RKA-nya, kapan desk-nya, kapan harus diserahkan.</p> <p>Biasanya itu survei, dengan cara minimal 3, minimal 3 penyedia barang untuk 1 item barang.</p>	<p>Eehh.....kalu ketentuannya mungkin hanya setahun sekali, tapi kemaren kalau ada hal-hal yang. Kemaren kan ada ini...ketentuan perbupnya itu tentang standarisasi itu apabila ada kenaikan harga yang....ada lonjakan, lonjakan harga itu bisa dilakukan perubahan sehingga untuk yang 2017 kita berubah 3 kali, ha...ha..haa..</p> <p>Iya, baru disurvei. Ketika ada perubahan anggaran, survei lagi. Eeehh tergantung mau pake yang lama itu dipandang masih relevan, pake yang lama. Tapi kalau ternyata itu kan ada lonjakan harga disesuaikan lagi. Tapi HET nya lonjakan harga hanya ada beberapa item barang tertentu. Tidak semua barang kecuali terjadi krisis ekonomi, nilai tukar rupiah anjlok..he..he..he.</p>	<p>Jadi dariiii...eehh.. mekanisme perencanaan di SKPD kan kemudian mereka ketika sudah menyusun Renstra, menyusun Renja, rencana kerja tahunan eh.. dari Renja itu kemudian nanti tentu dituangkan ke dalam DPA kalau di tingkat SKPD. Kalau di tingkat kabupaten ada KUA dan PPAS. Karena ketika mereka menyusun RKA, program dan kegiatan itu sudah..sudah rententan dari hasil perencanaan. Dari renstra, dari renja, menyusun Renja itu kan sudah dari musrenbang dan sebagainya. Nah itu sudah satu runtutan ketika muncul program dan kegiatan termasuk nanti pagu karena di KUA PPAS kan kemudian muncul plafon. Nah itu nanti anggaran kegiatan A, anggarannya berapa misalnya 500 juta atau 100 juta. Ha nanti ketika itu sudah muncul alokasi anggaran per kegiatan barulah disusun RKA-nya. Jadi 100 juta itu isinya untuk kegiatan apa saja. Mereka dikasih pagu, dikasih plafon.</p> <p>Eehhh..kegiatan baru kan ada syaratnya, nggih. Ada syarat ya intinya penting dan mendesak, tapi kalau kegiatan dan program jarang ada yang baru muncul. Harus nunggu perubahan. Untuk ketentuan perubahan ini kan ada beberapa ini ya, beberapa level/tingkatan.</p>	<p>Tim teknis itu ya..yang ini pelaksana desk. Jadi desk..desk apa ya..Desk RKA itu, disini yang nangani bidang anggaran. Nanti setelah SKPD itu datang yang memaparkan tadi itu, misalnya kegiatan A pengelolaan kas dapat dana 30 juta. Dari 30 juta itu opo wae gitu.. apa itu nanti di...dengan tim itu, desk.</p> <p>Tidak...itu kan kepanjangan tangan TAPD. Jadi ketika di level itu cukup di tim teknis, tapi ketika di level tadi harus TAPD. Jadi di level kegiatan ini dikasih berapa, dikasih ini itu digagalkan saja digantin dengan kegiatan ini...itu di level TAPD.</p> <p>Bisa...ada ini kok apa..dibagi tugas. Jadi ada satu orang itu atau satu kelompok mengampuh SKPD mana saja itu.</p> <p>Iya, kadang-kadang, anu tapi kalau anu iya TPAD biasa banget teknis nyobai..he..he. kadang-kadang di SKPD itu nyusun anggaran itu tidak jelas gitu, artinya ketika ini untuk honor tim sekian untuk ATK sekian, perjalanan dinas sekian, kegiatan anu kok, perjalanan dinas eeh sebanyak itu po, ha..ha..ha.</p> <p>Bukan, tapi kalau lolos di tim teknis nanti ketahuan TAPD ya..TAPD terpaksa berbicara teknis. Sering itu.</p>			
---------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

		<p>Kalau dia hanya merubah uraian belanja, misalnya mau beli kertas HVS sekian kemudian bolpoin sekian, dulu mau beli kertas HVS 6, bolpin 7 tapi ternyata setelah dihitung kertas HVS nya butuh 7 dan akhirnya bolpoinnya hanya bisa 2. Itu tidak perlu dengan mekanisme perubahan. Itu bisa dengan mekanisme perubahan peraturan bupati di penjabaran APBD. Tapi kalau perubahan di level kegiatan itu harus merubah Perda APBD-nya. Kan nanti harus nunggu perubahan APBD. Itu. Itu sudah ada Perbupnya. Nanti ketemu bu Atik, pernah ketemu gak? Terkait dengan pergeseran anggaran itu seperti apa, kalau hanya cukup merubah perbup apa..penjabaran coba aja perbub penjabaran. Tapi ketika harus merubah perda APBD.</p> <p>Iya. Kalau sudah RKA ya sudah mengalir saja, kuncinya di RKA. DPA kan tinggal nuang, ada pencermatan itu tadi peletakan rekening, kadang-kadang SKPD itu bolak-balik misalnya dia mau beli kompor, beli panci, diserahkan pada kelompok masyarakat, itu dia harus meletakkannya di rekening belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, kan beda. Dengan kadang-kadang dia itu salah masuknya di belanja</p>	<p>Iya, satu per satu. Iya wajib. Harus jelas, harus tepat juga meletakkan rekening belanja. Ya lumayan ya.... satu SKPD ini, itu mbak Ita kemaren jenengan desk berapa jam..? itu mbak Ita kemaren desk ke...eeehh..nek kita kegiatannya sudah ini..ini...Penempatan rekeningnya juga sudah bener juga nggih? Misalnya makan dan minum itu ada makan minum rapat, makan minum harian, itu kan peruntukannya lain-lain. Paling misalnya ATK, kadang juga gak logis. Ya.. kalau soalnya yang sudah rutin-rutin tiap tahun seperti itu sama, tinggalin. PPTK yang dipanggil langsung. Bukan kepala SKPD. Bukan.</p> <p>Nah kalau itu, istilahnya bukan lobi. Itu kan sudah ada mekanismenya usulan di luar plafon namanya. Jadi kan wajib plafon. Kemudian ternyata ada usulan, ah ini karena pusat seperti misalnya dinas sosial ternyata pusat itu yang program dulu 2013 yang pusat, mulai 2018 di lepas, pusat tidak mau mendanai lagi, kan harus didanai oleh daerah. Nah masuk usulan di luar plafon. Nah kita juga, saya kira nanti mampukah pendapatan, kadang-kadang ehh..namanya pendapatan dan belanja</p>		
--	--	---	---	--	--

			modal. Kalau belanja modal kan harus bicara sebagai aset.	mana yang di..kalau pendapatan itu yang target minimal yang harus dicapai, kalau belanja itu adanya batas maksimal. Kadang-kadang nek ada usulan di luar plafon ini yang dikejar sampai pendapatan, anu bisa naik gak pendapatannya. Program di luar plafon yang didanai sekian, nah nanti closing ituh pendapatannya, he..he.he. mana ya yang bisa dinaikkan lagi. Ha..ha..ha.			
10 : Eko Catur Setyawati, S.E.	Jadi tiap beberapa waktu itu kita ada rapat korrdinasi petugas akuntansi itu pasti ada. Ee kalau yang pasti itu setiap tri wulanan. Pasti itu.						

<p>12 : Kuni Mas'adah</p>							<p>Kuni Mas'adah Euu di subag keuangan mulai bulan oktober tahun 2017, kita melalui mekanisme pembayaran non tunai. Artinya apa eu kalo sudah ada SPJ baru kita akan transfer ke eu masing-masing penerima dana yang berhak menerima uang. Kalo SPJ belum ada. Artinya apa? gak ada SPJ kan kita gak bisa mengetahui berapa kebutuhannya mereka, Nah untuk mengetahui kebutuhan mereka, di awal tahun ketika menyusun APBD kemudian membuat RKA nya, kita sudah menetapkan anggaran KAS. Jadi setiap PPTK yang mempunyai kegiatan mereka membuat anggaran KAS. Anggaran kas mereka mau dicairkan di bulan apa, ketika mereka membuat anggaran kas katakanlah di bulan Mei, artinya apa bulan Mei tersebut mereka harus sudah menyiapkan SPJ untuk dimintakan dana. Nah dana itu setelah SPJ jadi kita verifikasi SPJnya sudah benar ok, disetujui, kemudian bendahara menyiapkan transfer dana. Kebetulan kami sudah menggunakan CMS Cash Mangement System. Jadi eum kami langsung transfer sendiri tidak melalui bank. Jadi bendahara itu sudah sekaligus merangkap layaknya sebagai pegawai bank. Jadi PPTK membuat SPJ itu berdasarkan anggaran kas itu yang sudah mereka buat. Jadi anggaran kas januari harus dilaksanakan Januari. Mereka menyusun</p>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---

							SPJ. Oh saya punya januari kegiatan katakanlah pendataan. Nah ketika pendataan keperluan pendataan itu apa ? oh keperluan pendataan katakanlah kami butuh ATK, kemudian kami butuh perjalanan Dinas. Nah ketika ATK mau di beli kita pesan dulu kepada toko. Kemudian begitu kita sudah pesan, kemudian mendapatkan bon, kemudian kita SPJkan lengkap kita serahkan bendahara. Bendahara akan langsung mentransfer kepada pihak toko.
15 : Nasip, S.E.			<p>Nasip Melapor. Melapor ini volume saya ini progresis saya dalam satu bulan kemudian setelah diterima kaitannya dengan masalah volume mereka kemudian, tapi kita juga tidak langsung serta merta sesuai dengan laporan enggak, kita melakukan kroscek dulu. Biasanya kan mereka kan cenderungnya kan mengurangi data, tapi kemudian setelah ada kepastian kemudian kita terbitkan Surat ketetapan Pajak Daerah baru mereka menerima. Kemudian mereka bayar lewat bank. Untuk bukti setornya nanti disampaikan ke sini.</p> <p>Nasip Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok</p>			<p>Nasip Evaluasi pendapatan itu dilaksanakan setiap triwulan</p> <p>Nasip Evaluasinya justru nanti itu secara keseluruhan enggak. Tidak hanya khusus kita nanti biasanya di oleh pak sekda.</p> <p>Nasip Heeh tingkat kabupaten semuanya, meskipun kita melakukan evaluasi secara intern. Itu setiap 3bulan jadi sebelum tingkat kabupaten melakukan evaluasi kita harus melakukan evaluasi dulu. Nantikan kita juga akan ditanyakan to, setiap unsu-unsur pendapatan dari gaji kita yang kita tangani itu sampai sejauh mana kemudian kenapa itu kan juga harus kita siapkan.</p>	<p>Nasip Kita, karena kita kan sudah apa memberlakukan untuk non tunai</p> <p>Nasip Iya non tunai sehingga walau bagaimanapun, setelah meriman SKPD nantikan akan membayar lewat bank terdekat. Dan untuk saat inikan kita bisa lewat membayar dengan BPD juga bisa</p> <p>Nasip Kemudian untuk yang selain BPD, BNI juga bisa kita adanya bekerjasama dengan Bank BPD dan BNI.</p> <p>Nasip Kadang ada. Masih ada Karena ada yang istilahnya untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya seperti catering, itu kadang-kadang sok masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tinggal kecil: 3:24. Kemudian juga</p>

		<p>masih lakukan ke bank langsung bayar. Tapi ya proses tanda tangan ya tinggal kecil: 3:24. Kemudian juga upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.</p> <p>Nasip Eu gini untuk kaitannya dengan masalah eu pajak inikan sebetulnya sudah di anu ya, sudah ada masa pajaknya. Kemudian kita saat inikan baru, ya sebenarnya kita memerlukan. Karena kita anggap untuk waktu itu bagi mereka terlalu sempit. Karena hanya 7 hari kerja, nah kita akan merubah menjadi paling tidak 15. Supaya mereka mempunyai kekuasaan waktu dari SKPD yang kita sampaikan sehingga sesuai tepat waktu. Sehingga tidak kena denda. Nah nanti dari sistem itu akan kelihatan mereka segera membayar atau tidak dan itu kalo tidak muncul kemudian masalah pembayaran, nanti akan di bidang kaitannya dengan masalah penagihan, maka perlu ditagih. Kemudian kaitannya dengan masalah kontrol kita selalu mengadakan rekonsiliasi. Dengan pihak BPD.</p> <p>Nasip Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu,</p>			<p>upaya kita untuk model jemput bola. Karena kalo sudah kita jemput, sistemnya mudah masuk.</p> <p>Nasip Iya di sana sebetulnya juga anu ya, sebetulnya kalo harusnya juga sama. Nanti dari bendahara penerima itu mereka juga langsung nyetor, nyetornya juga langsung ke BANK ke kas. Tidak dipegang sampai dengan 24 jam gitu</p> <p>Nasip Hari ini diterima nanti segera disetorkan.</p> <p>Nasip Karena tidak boleh pegang uang lebih dari 24 jam</p> <p>Nasip Iya. Cuman kadang kita itu repotnya ini tadi ya kadang-kadang ya nanti bisa kita maklumi. Katakanlah hari Jum'at sudah ngecek jam kerja itu, kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke bendahara penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kesian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>kemudian mereka ada yang langsung bayar tunai ke bendahara penerima. Nah itukan nanti setelah itukan tutup. Harus stor. Cuman ya kita harus istilahnya mau rela hari sabtu masuk untuk setor ke bank. Itukan hal yang merepotkan, kalo pas bendaharanya tidak ada acara tidak masalah. Tapi kalo pas bendaharanya ada acara pas hari libur kan kesian. Sehingga kalo mau bayar kalo pas kedatangan hari jum'at, hari jum'at pagi. Sehingga nanti sebelum tutupkan bisa kita masukan ke rekening</p> <p>Nasip Penerimaan bank. Kaitannya dengan eu pelaporan itukan nanti setiap bulan itu nati pihak bank menyampaikan laporannya.</p> <p>Nasip Kemudian seperti ada pembayaran transfer. Itu nanti kita juga langsung diberitahu. Ini ada transfer dari PT ini . Nah kita nanti melacak. Oh ternyata itu untuk pembayaran untuk pajak reklame itu nanti kita kroscek. Mungkin nanti temen kita ada yang nyari, terus kemudian oh ternyata tidak terbayar terus nanti dimasukan ke aplikasi. Sehingga nanti ada semacam itu enggak, data itu ini sudah ini belum, ini sudah ini belum, di aplikasi ada.</p> <p>Nasip Kalo kaitannya dengan masalah pendapatan nantikan di anu e itu di anu itu di keuangan</p>			<p>Nasip Ya untuk yang lainnya memang kita belum anu enggak, belum siap. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengarahkan pada transaksi non tunai. Jadi kalo PBB bayar langsung bisa langsung ketemu. Maka katakanlan ATM itukan BPD ini langsung muncul atas nama ini, oh ya bener berarti langsung masukan angka. Tetapi kalo seperti pajak reklame itu cuman menuju ke rekening. Ini saya membayar untuk reklame ke iklan ini nomor rekeningnya nanti sudah persen lagi. Sehingga kita harus nyari lagi tapi yang kecil-kecilan langsung to. Nah itu nanti berkaitan dengan masalah system aplikasi sekraang kita bisa baru input yang BPD. Cuman yang kalo harapan dari ATK diharapkan semuanya itu bisa secara online, tetapi ya itu tadi mengingat kitakan kesiapannya kaitannya dengan masalah aplikasi, brangkas itukan. Jadi arah kita sekarang baru non tunai. Sehingga masyarakat bisa langsung membayar lewat bank, tidak usah ke BUD membawa uang tidak usah.</p> <p>Nasip Sebetulnya pada akhirnya sama enggak. Karena kan sebenarnya kan cuman anu aja kita itu eu memberikan bantuan pada mereka sebenarnya yang merekakan bayar bisa langsung bayar ke bank enggak, ya Cuma mungkin karena mereka sesuatu hal</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>nanti yang memverifikasi. Kalo yang gini itukan hanya sebatas yang menangani secara teknis. Secara teknisnya, tetapi kalo kaitannya dengan masalah keuangan, itu nanti ada kesalahan teknis, nah itukan di anu e istilahnya Pejabat Pengelola Keuangan.</p> <p>Nasip Kalo non tunai itu pada fungsinya dengan eu pada kalo tidak salah tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan cuman yang membedakan hanya sistem membayarnya saja to? jadi ya kalo non tunai itu ya menulis langsung, begitu di masukan rekening ya menjabarkan bukti kemudian dikirimkan kepada kita. kalo yang tunai ya cuman langsung membayar sesuai dengan surat ketetapan nya itu, kemudian ya mengisi Surat keterangan Pajak Daerah, SKPDnya kemudian di isi pihak BPD kalo kita sudah membayar.</p> <p>Nasip Cuman hanya khusus untuk pendapatan. Tapi kan disana sudah kita pilah-pilah. Pilah pilahnya kaitannya dengan masalah BPD. Kalo BPD itu euu karena yo agak rumit. Itu juga belum dipisahkan dengan subbag kita. kemudian umpane pajak juga kan ada sendiri, restaurant ada sendiri, nah nanti di aplikasi itukan memang memudahkan kita manakala kita dimintai sekarang ini sampai bulan</p>			<p>alasan wes anu harusnya, tapi nanti setelah kita terima ya langsung kita setorkan di bank. Karena kita tidak boleh memegang uang setoran selama 24 jam.</p> <p>Nasip Itu tuh sama di penerimaan. Jadi bendahara penerimaan itu nanti akan mengentry tunai maupun non tunai. Tapi pada prinsipnya kan tunai juga nanti akhirnya kan non tunai, karenakan kita menyetorkan ke bank bukti itu kan menyetorkan di</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>ini yang mana saja yang sudah mana yang belum nanti akan kelihatan juga. Cuman masalahnya kita nanti rajin selalu untuk mengentri umpanya katakanlah ada pembayaran langsung kita masukan, kemudian kalo tidak ada yang menyelesaikan kewajiban nanti akan muncul diaplikasinya itu akan muncul perlu penagihan. Itu juga ada, tinggal nyetak nanti seperti penagihan perbulan itu nanti tinggal nyetak, formatnya sudah ada. Jadi ko kalo tidak bayar ini sudah jatuh tempo sudah terlambat, nah itu nanti kena denda. Nah itu juga muncul itu. Nah itu nanti kena denda</p> <p>Nasip Ya tentunan mesti ada enggak karena kitakan selalu konfirmasi. Seperti tadi saya sampaikan manakala ada WP, kemudian di simda tidak munculkan otomatisakan muncul tagihan lah kalo. Lah kalo tagihan kita konfirmasi tapi gak keto, ketika sudah menyetorkan, jadi kan mau gimana kalo mereka tidak menyerahkan secara tunai takutnya itu akan kita, katakanlah kalo memang belum di setor ya segera di setor. Kalo memang istilahnya dipakai ya mohon segera di ganti tapi ya setahu saya seperti itu belum pernah terjadi</p> <p>Nasip Ooh berarti semua pelayanan di situ ya, mulai dari KRT makanya saya</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>sebetulnya itu, pengennya itu pelayanan di depan itu sayakan berdampingan dengan, sehingga begitu ada yang datang, ada uang tunai ya langsung kita buat kan ya katakanlah SKPD nya suruh bayarkan nanti tinggal kita menerima bukti pembayarannya. Itu yang dilihat, jadi seperti ini, ini kan dari PT Pelangi Jaya Industri. Ini mereka harus membayar biaya pajak sebesar 177.000.523, nah kalo sebesar inikan resiko to ? nah ini mereka langsung di bank membayar, ini sudah membayar dari bank BPD ini. Nah setelah ini baru disampaikan ke pelayanan di depan itu. Nantikan saya validasi</p> <p>Nasip Kalo mereka sudah bayar. Iya tapikan ini bayarnya di Bank, tidak di depan di bank langsung di bank. Yang ke sini tinggal berkasnya ini karena ini yang format ini sudah di anu di bank. Jadi karena ini lewat apakah itu BPN, apa itu Notaris kemudian mereka sudah membuat rincian ini, kemudian mereka bayar cicilan validasi yang sesuai. Kalo tidak sesuai dengan itung-itungan kita nanti eu saya belum tanda tangan. Mereka harus membuat lagi kekurangan apa, inikan yang menghitungkan mereka bahwa saya membeli tanah dengan harga sekian. Berarti say dikurangi dengan 60 juta sebagai anu nilai objek</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>paja yang tidak pajak. Nilai pajak yang gak kena pajak itu kan 60juta nah saya 5% itukan yang 5% itukan yang harus mereka bayar pada kita dari pajak atas perolehan tanah nah kemudian mengajukan ini dokumen ini ke kita. ya sudah bayar untuk saat ini, kemudian kita cek lapangan dengan berdasarkan ini alamat NJOP dimana kita cek di sana. Kalo di sana transaksinya itu dari informasinya yang ada di sana itu lebih tinggi dari yang tertulis di sini maka ini saya nanti tidak tanda tangan dulu</p> <p>Nasip Nanti mereka membuat lagi untuk membayar itung-itungan kekurangannya. Katakanlah seharusnya satu meter itu harganya 500ribu tetapi mereka masih menulis 450ribu. Berarti kan masih ada kekurangan 50ribu kali keluasan kemudian di kurangi 6 juta kemudian di kembalikan 5% baru mereka bayar, baru ini saya tanda tangani baru saya</p> <p>Nasip Iya. Ya ini kan sebetulnya eu yang sebetulnya tidak perlu kami lakukan sebetulnya tetapi kalo si WP itu jujur lo karenakan kebanyakan yang namanya WP itu tidak jujur to ? kalo mereka jujur kita tidak perlu ke cek lapangan, kemudian kita juga katakanlah punya semacam nilai. Nilai</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>dikasih rata-rata yang sudah ditetapkan dengan bupati. Atau walaupun kita sudah mempunyai masalah sistem kaitannya dengan peta blok kemudian di SK kan, nanti nilainya sekian kita tidak perlu ke lokasi. Tapi saat ini 30:13..belum punya untuk patokan seperti itu untuk ya kan kita sebagai Bank kita untuk BPATP sehingga kita perlu cek ke lapangan untuk meyakinkan karena notaris sendirian sok rodp gimana enggeh kan pngen golek segel. Jadikan ngurangi harga transaksi yang ada. Sehingga memang kita memang masih butuh cek</p>			
16 : Sri Sugiyarti, S.E.	<p>Harus. Harus melaksanakan seperti itu. Jadi kan dibuat oleh tim yang terdiri dari auditor, badan pelayanan pengadaan. Jadi auditornya Inspektorat to, terus kami mewakili para bendahara karena yang melaksanakan bendahara yang mengarahkan di sini. Terus sisur itu juga ini harus sesuai dengan aturan di atasnya, permendagri. Eh kolaborasi permendagri 13 dengan perpres pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Saya kira praktiknya ada. Istilahnya kalau SPP, SPM itu masih dalam suatu, beda kalau SP2D mengandung arti yang minta dan yang memberi harus beda. Kebijakan masing-masing kalau memang benar-benar tidak ada kadang-kadang ya fungsinya itu tidak dilakukan sekali. Berdiri sendiri ya, terpisah. Jadi</p>		<p>Ada. Eeeeh jadi kita masih ada LS, LS apa ya? LS Gaji, maksudnya kalau LS murni kan harus dengan rekaman. Ya kita juga kan ada LS dengan misalnya bila pihak ketiganya misalnya BPJS Kesehatan. Ada yang LS-nya yang masih LS Bendahara Pengeluaran. Ya karena terdiri dari beberapa misalnya sewa tanah yang di kas desa atau beberapa eeeeh,, apa beberapa desa karena kalau kepala desa itu kan bukan pihak ketiga, makanya itu masuk wilayah LS bendahara pengeluaran.</p> <p>Haaa, memang aturannya seperti itu. Jadi kelengkapan dokumennya itu termasuk ada kwitansi dan itu sudah harus ditandatangani. Kalau</p>	<p>Ya kalau GU minimal 60% dari uang persediaan. Itu ada SK-nya. Jadi bunyinya itu ada di SK uang persediaan, penetapan uang persediaan dalam SK Bupati.</p> <p>Boleh. Minimal. Ya maksimal sebesar UP. Di bawah 60% belum bisa.</p> <p>Yang mirip eee, beda. Jadi kalau GU itu sudah dibelanjakan, jadi uangnya sudah keluar. Kan namanya “ganti” mengganti uang yang sudah dipersiapkan.</p> <p>Ehhh, supaya ini loh perputarannya itu cepat. Kalau 100% kan lama.</p> <p>Jadi UP itu kan menghitungnya, eeehhh</p>	<p>Memeriksa, tidak juga. Yah kalau itu sudah diatur, ada di ini ya setiap bulan itu ada rakor asistensi. Jadi rakor SKPD. Ya setiap bulan. Ya itu kita melaporkan bahwa SKPD A serapannya sekian. Itu juga untuk penilaian kinerja keuangan pada waktu kita mau mencairkan TPP. Tambahan penghasilan kan syaratnya harus kinerja keuangannya eeeh jadi ada merah, hijau, kuning. Jadi detilnya SKPD yang tahu.</p>	

	<p>wilayahnya bendahara pengeluaran beda dengan PPK.</p> <p>Kalau itu masing-masing SKPD punya sendiri-sendiri ya. Ada yang membuat SPP sendiri, itu memang manajemennya sudah oleh SKPD karena kan yang tahu eeh apa keadaannya jadi itu masing-masing SKPD beda-beda. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi. Bisa jadi SOP, atau hanya dengan kesepakatan, aahh kan boleh maksudnya apa tidak tertulis tapi diatur. Masing-masing SKPD beda-beda. Jadi misalnya BKAD itu kalau sekarang bagi duit, bagi siapa yang menyimpan uang silahkan tiap bulan mengajukan NPD (Nota Pencairan Dana). Itu terus kan di ini ya di SKPD sudah harus masuk dua minggu sudah sampai di sana. Jadi masing-masing SKPD itu beda.</p> <p>Iya, aaahh, kuasa BUD itu banyak. Jadi kita ada SK Kuasa BUD yang SK Bupati tentang kuasa BUD. Tidak hanya bidang perbendaharaan tapi ada bidang pajak, bidang aset . Ada SK nya dan di SK-kan. Tidak semua bidang menjadi kuasa BUD. Jumlahnya itu saya lupa, Cuma perbendaharaan, pajak, aset. Nanti lihat fotokopi SK-nya. Biar jelas.</p> <p>Iya, pejabat penatausahaan keuangan. Kita mengaturnya seperti itu dan aturan itu PPK tidak boleh dirangkap oleh PPTK.</p> <p>Semuanya PPTK itu. Eselon IV itu semuanya PPTK. Kabid itu</p>	<p>misalnya selain hibah misalnya itu kan ada nota perjanjian hibah. Itu juga semuanya lengkap, jadi tidak bisa kita terus mengeluarkan uang tanpa itu.</p> <p>Jadi kalau di sisur itu memang tidak diatur secara ini ya, pencairannya dengan apa, tetapi di permendagri kita biar luwes begitu. Jadi kalau itu kaitannya langsung melalui dengan pihak ketiga ya itu LS atau kalau ada dokumen SPK-nya itu LS. Jadi memang tidak dibatasi, kan untuk masing-masing SKPD.</p> <p>Ehhhhh, beda. SPj 5 rangkap itu maksudnya SPj ini ee bukti pengeluaran. Jadi itu 5 itu kalau masuknya di BKAD, kuasa BUD itu hanya satu, fotokopian. Kalau asli harus ada di PPK-SKPD atau di bendahara pengeluaran. Jadi untuk inspektorat satu, untuk BUD satu, kuasa BUD satu, aslinya kan satu, terus masih ada eeee ini satu untuk apabila ada auditor eksternal memeriksa, ha itu. Mintanya sih asli, ada juga pemeriksa minta gitu bisa fotokopi. Semuanya di bendahara karena dokumen yang ada di sini adalah dokumen untuk pencairan. Kalau hanya untuk sampel, maksudnya kalau ada auditor biasanya eksternal minta sampelnya saja baru melalui SKPD. Di kami kan tembusan, biasanya</p>	<p>yang mau direncanakan dengan GU dibagi duabelas. Jadi harusnya kan minimal satu bulannya GU. Nah kalau semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan anggaran kasnya, perencanaannya dari awal itu gak masalah. Nah kalau ada masalah itu kehabisan uang dan sebagainya, itu karena memang perencanaannya kurang ini, kurang pas.</p> <p>Ahhh...Jadi kan ada juga yang TU, tambah uang persediaan kalau sesuai dengan aturan TU yang sifatnya mendesak dari sisi waktu dan uang, haaa boleh. Jadi tetap ada bukan diskresi tapi sudah diatur, silahkan mengajukan tambah uang persediaan.</p>	
--	---	---	--	--

	<p>kan penanggungjawab kegiatan.</p> <p>Ya. Mungkin maksudnya PPKom apa ya? Kita kan membedakan pejabat sama-sama PPK. Kalau yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen itu beda lagi. Jadi kalau kita namanya di sisdur kita bunyinya eeee terjemahannya PPKom. Kalau PPK yang saya sampaikan tadi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Oh PPK.</p> <p>PPKom itu kewenangan pengguna anggaran untuk menunjuk eee biasanya kepala bidang. Atau kalau tidak ada syaratnya PPK ee PPKom kan harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Atau staf pun boleh asal memenuhi syarat punya sertifikat pengadaan. Ditunjuk dengan SK kepala dinas. Kalau tidak ditunjuk tidak bisa otomatis.</p> <p>Ini pak Pejabat Penatausahaan Keuangan ya. PPK kan punya pembantu, nah itu di kasubbag keuangan. Pembantunya kan verifikasi SKPD sama akuntansi, pembuat SPM. Ada tiga. Jadi itu wilayahnya PPK-SKPD. Kasubbag keuangan SKPD. Jadi semua SKPD di Kasubbag keuangannya, stafnya itu merangkap anggota PPK.</p> <p>Ah iya, jadi begini. Itu di penatausahaan bendahara pengeluaran sebenarnya sudah ada. Di sisdur kalau bapak sudah membaca, di situ sudah</p>		<p>setelah melihat tembusannya, baru diminta aslinya seperti apa.</p> <p>Memang asli harus dipegang oleh bendahara pengeluaran karena tanggungjawab verifikasi itu oleh PPK-SKPD menurut permendagri 13 itu bunyinya seperti itu. Jadi keabsahan itu menjadi kan ada pernyataan tanggungjawab, eeehh secara material keabsahan itu menjadi tanggungjawab PPK-SKPD. Logika kami di pada waktu menyusun perbup itu ya berarti asli harus ada di SKPD karena yang bertanggungjawab dulu kan SKPD. Nah kalau meskipun misalnya ehhh apa kan ada misalnya kwitansi, itu kan juga ada bunyi ini fotokopi yang bermaterai. Jadi tetap kelihatan oh ini ada materainya asli.</p> <p>Ehhh setelah, dulu memang setelah permendagri 13 semuanya langsung ke ini ke SKPD, kuasa BUD hanya dimintai apa sebagai saksi untuk mendengar, kroscek saja tapi secara apa material, yang jelas yang bertanggungjawab penuh kan SKPD. Jadi kita tidak pernah ini, kita kan hanya dokumen lengkap saja dan sah. Maksudnya sah bisa dilihat dari, itu tadi contohnya misalnya kalau kwitansi ya ada materainya. Lengkap maksudnya sesuai dengan belanja yang ada di sisdur.</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>dijelaskan. SPP itu kan memang ranahnya bendahara pengeluaran. Ya terus eee setelah SPP disetujui baru SPM. SPM sudah wilayahnya PPK-SKPD. Yang mengajukan SPP kan bendahara. SPM itu yang membuat ranahnya PPK-SKPD, karena ada pembantu PPK itu pembuat SPM, verifikator, dan fungsi akuntansi. Jadi sudah beda. Simdanya jadi satu. Iya jadi semua pakai satu. Bendahara pengeluaran bisa juga buka SPM. Kalau kewenangannya tapi kadang-kadang kalau kurang SDM suatu SKPD kadang-kadang saling membantu.</p>	<p>Jadi seperti itu.</p> <p>Ahhhhh, sebenarnya namanya bukan tim lagi ya karena ini beda dengan sebelum permendagri karena verifikator ini sebenarnya adanya di SKPD. Nah kita sebenarnya yang pertama memastikan bahwa dananya cukup, dana di rekening belanja itu. Sebenarnya tugas pokoknya itu.. itu.</p> <p>Tidak juga. Tetap di...Kan ada kuasa BUD masih mempunyai tugas untuk melihat kelengkapan dan keabsahan. Cuma memang di permendagri itu, ada apa ya satu sisi berbunyi bahwa verifikasi adanya di SKPD dan di satu sisi, kuasa BUD masih harus melihat kelengkapan. Kalau di kabupaten yang lain misalnya Sleman, Kota ahh, kalau Sleman malah tanpa dokumen, misalnya tanggungjawab mutlak saja untuk GU. Nah yang kota itu hanya bukti pengeluaran detil saja tanpa lampirannya. Kita di Kulon Progo, masih lengkap karena memang sisduanya masih bunyi seperti itu. Tapi mungkin perkembangannya kita juga inilah...eeehh karena memang harus ini harus melepas SKPD untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau selama ini terus jadi ini, nanti di BUD ketahuan salahnya. Jadi kita itu seolah-olah jadi ikut verifikasi padahal</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>verifikasi itu di SKPD karena yang punya verifikator di sana. Tugasnya PPK-SKPD itu nanti di perbup 72 itu silahkan di..iya...sama dengan kuasa BUD kan, bedanya sangat jauh.</p> <p>Ya memang aturannya begitu. Jadi permendagrinya. Jadi nanti jenengan juga harus membaca permendagri 13 juga, PP 58 2005, terus sisdur kita itu di perbup 72. Begitu. Itu memang seperti itu amanahnya itu memang sudah benar oleh SKPD karena pengguna anggaran itu SKPD. Jadi yang bertanggungjawab itu yang menggunakan ya to. Di sini kan kalau kuasa BUD itu malah ehhh kalau intinya, jadi kita waktu sosialisasi dengan BPKP itu ya kalau ada surat perintah membayar ya tugasnya mencairkan asal dananya masih ada. Jadi memastikan bahwa kita kan sebetulnya tidak eeeh buktinya itu sudah di ini jadi kalau melebihi musti ada warning di kita, begitu.</p> <p>Kalau dengan pihak ketiga. Jadi kan di awal itu sebelum mengajukan hitungan UP, itu kan sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, oh ini besok saya mau LS ini. Yang ini, ini, ini, LS, sehingga UP saya tidak terlalu besar sehingga perputarannya juga tidak macet itu sudah oleh SKPD.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

17 : Sutanti, S.E.	<p>Sutanti Ke bagian pajak. Eh, kok bagian pajak, bagian punyanya mas Alif itu apa ya, pendataan ya. Pendapatan, ke bagian pendapatan. Iya.</p> <p>Sutanti Nggak. Kan kita cuma minta tanda tangannya aja terus nanti kita keluar kita cetak terus telpon ke bagian pendapatan itu.</p> <p>Sutanti Emm, kita gimana nggih. Kalau diawasi itu cuman ada yang entry cuman ada yang entry maksudnya nyocokin pendapatan saya nanti di entry tempatnya Mas Eko yang bagian pendapatan itu. Nanti kalau ada yang selip langsung ke saya, Mbak ini salah misalnya ada selisih berapa gitu kan nanti langsung misalnya kurang setor atau apa. Paginya langsung saya ini langsung perbaiki lagi. Misalnya ada kurang setor kan biasanya ini juga salah angka tau, nanti di sana ketemu salahnya. Nah, kita nanti langsung nututi di hari berikutnya.</p> <p>Sutanti Pak Eko itu bagian di sebelah sana Mas. Apa sih saya kurang tahu juga e. Pak Eko itu cuman nyocokkan pendapatan juga tapi di bawahnya Bu Kuni.</p>		<p>Sutanti Biasanya kalau misalnya, misalnya kan ada yang penagih ya, nganter surat tagihan ada SKPnya itu, nah nanti WPnya ke sini untuk membawa itu SKP, terus nanti dibuatkan SSIDnya untuk bayar di sini atau bisa juga langsung ke Bank BPD.</p> <p>Sutanti PPKnya di Mbak Nisa sama kalau misalnya ada yang salah atau apa, nanti kita revisi lagi. Misalnya belum cocok, kan kita cocokkannya sama bagian pendapatan sama bagian akuntansi. Jadi kita cocokkan dulu.</p> <p>Sutanti Kalau misalnya tanggal 10 itu kita apa adanya dulu. Kalau udah cocok ya udah tapi nanti kalau misalnya di pertengahan kan kita nggak mesti ini nggih, pendapatannya kadang belum masuk juga, belum keinput. Nah nanti kita revisi lagi.</p> <p>Sutanti He em rangkap dua. Kalau yang ke Aklap itu nanti Pak T yang cocokkan sendiri dulu sebelum kita cetak. Sehingga kan cocokkan dulu, sementara udah cocok, kita cetak dulu.</p>			<p>Sutanti Eem berapa ya. Lumayan lama juga e itu. Gak mesti setiap bulan. Misalnya ada sesuatu yang di ini, nanti baru dikumpulkan rapat atau apa. Biasanya kalau mau ada pemeriksaan dari BPK paling tidak mesti di ini dulu dikumpulkan dulu nanti supaya laporannya itu sudah ini apa yang mesti disiapkan untuk BPK. Biasanya seperti itu.</p>	<p>Sutanti Iya. Tunai saja. Kalau non tunai sama bendahara pengeluaran nanti kan dia yang megang ini to. Kalau saya gak punya rekening, kalau yang di sana kan punya rekening untuk tanggungan uangnya jadi bisa maintenance.</p> <p>Sutanti Heém. Kalau yang non tunai itu biasanya kita cuma nerimanya pengesahan yang untuk STTPDnya. Jadi kita mengesahkan saja kalau ini perhitungannya udah bener nanti dia ke banknya. Jadi kita tidak terima uangnya.</p>
--------------------	--	--	--	--	--	---	---

18 : Taufik
Amrullah, S.T.,
M.M.

Iya...memang apa ya...secara kedinasan memang statusnya sama ya.. tetapi kita secara fungsi kan ada fungsi kita sebagai koordinator pelaporan. Koordinator, jadi bidang aset itu selaku PPKD untuk pelaporan aset tetap dan persediaan. Nah dengan ketugasan ini lah kita gunakan. Jadi saya mengkoordinir eselon II di atas saya itu hal yang biasa. Jadi ketika diminta data, mereka harus. Dengan catatan itu bahwa WTP itu kan ada di masing-masing OPD. Kalau yang bermasalah atau di salah satu OPD ya itu mereka yang bertanggungjawab terhadap ketika WTP di laporan kami. Jadi yang membuat laporan itu saya tekankan bahwa itu yang membuat bukan bidang aset. Yang membuat itu adalah pengguna barang yang dalam hal ini adalah kepala OPD.

Jadi dalam artian kita mem..mem apa...membuat link sebuah sistem itu berjenjang. Jadi sekolah melaporkan ke UPT, UPT melaporkan ke dinas pendidikan, dinas pendidikan melaporkannya ke kami, BKAD selaku PPKD. Kemudian puskesmas juga demikian, puskesmas melapor ke dinkes, dinkes melapor ke kami selaku PPKD. Dan itu rekapitulasi ada di kami, sehingga data-data dari bidang aset sudah langsung digunakan untuk akuntansi untuk membentuk akun persediaan, maupun akun aset tetap atau aset lainnya.

Eehh..lewat surat bisa, trus tapi biasanya kan kalau sudah

	triwulanan itu otomatis apa namanya jadi kita rapat koordinasi.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Lampiran 15: Framework Matrix Wawancara tentang Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	A : C1. Kerjasama yang Baik PPTK, PPK, dan Bendahara	B : C2. PPTK sebagai Fungsi Pembuat Pertanggungjawaban	C : C3. Sistem Panjar Berbasis Bukti Pertanggungjawaban	D : C4. Komitmen Bersama Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Lengkap	E : C5. Keadaan Kas dan Aset Tetap yang selalu Dimonitoring
6 : Angelia Resty K.	<p>Nggak sebenarnya cukup satu, tapi nanti di dalamnya ada fungsi PPKnya juga.</p> <p>NPDnya kan nanti dari PPTK kan kita tinggal akses.</p> <p>Nggak, kalau kita kan sebenarnya kalau di Kulon Progo itu kan sebelum kita SPP SPM, itu setiap SPJ belanja itu diverifikasi dulu oleh PPK. Jadi ketika SPJ itu sudah benar-bener valid, ee istilahnya dari segi angka atau rekening itu sudah sesuai, nanti baru ke bendahara. Nah di bendahara itu setelah di, istilahnya dicocokkan seperti itu baru nanti dibuku ke SIMDA.</p> <p>Ada sebelum di ini itu diverifikasi sama pembantu PPK. Ferivikator, Yang di apa, diverifikasi.</p> <p>Ketika PPTK itu mau mengembalikan SPJ ke bendahara itu diverifikasi dulu. Sebelum naik ke pak kepala itu diverifikasi dulu, meminimalisir kesalahan, gitu, jadi biar nggak nanti ketika udah jadi SPP nggak bolak balik ke PPTK. Jadi curi start.</p> <p>Ke verifikator ya. Paling cuman kita periksanya sesuai sama DPA.</p> <p>Jadi misalnya kayak gini, mereka kan belanja. Kan sudah termasuk pajak. Jadi nanti mereka bikinnya seperti ini sama pajek. Kita ngitung pajeknya aja. Ketika ini sudah betul, kita centang. Lalu kita bikinkan bilingnya sekalian, nanti kita kembalikan dibayar setelah ada bukti pembayaran dari bank, dilampirkan ke SPJ.</p> <p>LS gaji kan biasanya daftar gaji. Kita koreksi. Misalnya ada yang kenaikan pangkat, segala macam, ada peremajaan, kalau misalnya udah</p>	<p>Per masing-masing PPTK</p> <p>Di atasnya PPTK.</p> <p>Kalau PPKom itu kan beda, kalau PPKom kan sejenis untuk yang LS.</p> <p>Iya. Berarti mungkin tergantung kegiatannya ya. Misalkan ada 10, nggak harus cuman satu ya, harus dibagi-bagi gitu. Jadi ada tiga puluh kegiatan jadi tiga PPTK, satu PPTK sepuluh-sepuluh. Masing-masing Kasubag itu membikin rencana apa program.</p> <p>Kalau pencatatan di buku panjer nanti sesuai permohonan di PPTK. Kadang kan dalam satu NPD itu misalnya ada 5 juta. Kadang kan nggak diminta semua. Jadi yang diminta misalnya 3 juta dulu, soalnya yang 2 juta belum bisa input sekarang.</p> <p>Di-SPJ-kan itu setiap mereka belanja kan langsung di-SPJ-kan.</p> <p>Iya misalnya nanti mereka panjernya 3 juta. Berarti nanti SPJ masuk misalnya 2,5, berarti kan panjer mereka sekitar 500.</p>	<p>Nggak ada, jadi sekarang sistemnya SPJ jadi dulu baru nanti bendahara transfer. Karena kan kalau misalnya kita transfer dulu ternyata nanti SPJ nggak sesuai kan kita mau minta ke rekanan lagi udah susah, kalau misalnya ada kelebihan, kalau misalnya masih kurang, kita masih transfer lagi. Tapi kalau misalnya kelebihan belanja kan kita juga agak...</p> <p>Jadi misalnya PPTK mau DL ke Jakarta misalnya, nanti ngajuin dulu panjer, kan sudah perhitungan misalnya mau berapa hari, ada uang saku berapa, terus misalnya ee tiketnya berapa, transport lokalnya berapa, nanti ngajuin ke bendahara nanti kita kasih cash, setelah itu mereka pulang bikin SPJ baru kembali ke bendahara.</p> <p>Kita nggak pernah nunggu. Kalau nunggu nanti nganu, ada yang nggak sebagian uang.</p> <p>Jadi bendahara, bendahara bisa ngira-ngira, oh ini, sekian habis GU dulu, kalau nggak nanti yang belakang nggak mau. Soalnya kegiatan yang belakang kemungkinan uangnya lebih besar. Itu kadang PPTK pada nggak mengetahui itu, tahunya kok bendahara nggak ada uang. Padahal PPTK yang lambat, lambat ngirimnya ini.</p> <p>Kalau dulu pas panjer tidak ada duit tapi sekarang setelah CMS orang meminimalisir alasan. Kalau dulu kan tahunya bendahara ada uang terus. Padahal siklusnya uang bisa lancar ininya harus lancar. Padahal mereka minta itu belum memenuhi tanggung jawabnya ya mbak. Maksudnya seharusnya udah ngirim SPJ belum ngirim.</p>	<p>Jadi untuk pencatatannya kita bikin buku panjer yang itu per rekening kegiatan. Jadi misalnya ada 40 kegiatan, jadi nanti ada 40 buku yang...</p> <p>Iya, bukunya masih manual, jadi nanti kita masih nyatet panjer SPPD berapa.</p> <p>Setiap bulan PPTK bikin untuk kebutuhan dana selama satu bulan, misalnya ATK berapa, terus nanti makan minum harian berapa, lembur berapa, honor berapa itu, kita bikinnya perbulan NPDnya. Jadi ga setiap kita mau minta kita bawa NPD.</p> <p>Hm kalau di sini itu. E dokumen pengadaan lengkap baru kita proses untuk SPPS PM. Jadi dokumen yang masuk ke bendahara itu sudah mulai dari SPK sampai dengan nanti kwitansi itu sudah harus lengkap.</p> <p>Kalau khusus nggak ada. Jadi mungkin ada salah satu staf yang istilahnya dijadikan bendahara bayangan seperti itu.</p> <p>Misalnya kayak rapat gitu kan, kan ada DP nota undangan, terus sama pajak. Mungkin kita belum bayar pajaknya atau gimana. Nanti dikembalikan. Tapi sejauh ini di sini belum pernah PPK mengembalikan/menolak.</p> <p>Jadi kita ngasihkannya sejumlah bruto. Nanti yang potong pajak PPTKnya sendiri. Nanti mereka setor untuk bukti pembayaran pajaknya harus dilampirkan di SPJ. Jadi misalnya makan minum nanti ada pajak restoran, nanti di belakang SPJnya harus ada pajeknya.</p> <p>Kalau buku bantu bank ada, terus kalau untuk buku panjer sebenarnya ada, cuman belum diaplikasikan. Kan masih manual untuk panjernya.</p> <p>Kalau yang LS kan udah jadi baru ditransfer, jadi nggak ada masalah nggeh. Kalau yang UP misalnya ambil panjer, kita kasih waktu maksimal satu minggu harus kembali, kalau satu minggu nggak kembali nanti kembali tunai ke bendahara, ditarik lagi. Jadi ada sejenis apa</p>	<p>Periksa dokumen verifikator kan di sini lebih ke bantu PPKnya ya mbak ya. Verifikatornya</p> <p>Gaji, entri SIMDA, Terus pajeg. He em, dia bikin laporan pajak. Terus satu lagi. Mengeset, ngeset, ngeset dokumen.</p>

	<p>sesuai nanti kita langsung buat SP SPM</p> <p>Kalau itu kan ada harga, ada survey dulu biasanya, terus nanti ada HPS-nya dulu, terus habis itu ada surat penawaran segala macam, karena nanti bendahara tahu di situ, kronologinya bagaimana, kenapa yang dipilih rekanannya ini, alasan apa, kan nanti kelihatan.</p> <p>Yang bikin dokumennya itu Pejabat Pengadaan.</p> <p>Kalau PPTK itu kan penanggung jawab teknis kegiatan tapi untuk pengadaan itu kan yang melaksanakan itu kan ada PPKOM sama pejabat pengadaan. Jadi PPTK itu sudah di luar pengadaan.</p> <p>Jadi kegiatan yang di luar belanja modal.</p> <p>Sedangkan pekerjaannya masing-masing juga kan banyak. Jadi kayak SPJ pun, kadang nggak tersentuh, kadang satu bulan itu baru, kadang suka ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk LS kan semua sudah di pejabat pengadaan, jadi kita komunikasinya ke pejabat pengadaannya.</p>		<p>Jadi setiap uang yang sudah... kita ngeluarin uang, terus udah kembali 60%. Nanti otomatis GU. Biar uangnya tetap sejumlah UP.</p> <p>Iya misalnya nanti mereka panjernya 3 juta. Berarti nanti SPJ masuk misalnya 2,5, berarti kan panjer mereka sekitar 500.</p>	<p>ya.</p> <p>Nggak sih, cuman kita nanti begitu mereka ngambil ini satu minggu harus kembali, kalau misalnya satu minggu belum kembali nanti kita tarik lagi.</p> <p>Kalau misalnya uang itu belum dipake, istilahnya masih ada di PPTK kita minta kembali tunai.</p> <p>Nggak sih. Ini kan SPJnya belum masuk Pak apa Bu, kita kan nganu, paling nggak, kan kemarin perjanjiannya satu minggu harus kembali gimana, kalau misalkan oh ini udah dipake buat bayar ini, kita tunggu misalnya sampai 2-3 hari. Kalau misalnya uangnya itu. nganu belum sempet di SPJkan, dan uangnya masih di sini, kita tarik dulu.</p> <p>Nggak ada kalau di sini. Enak semua orangnya, saling ini ya... Soalnya nanti kalau SPJ nggak segera kembali, nggak segera dibikin, terus misalnya uangnya ditarik nggak mau, nanti kegiatan yang lainnya, terganggu. Jadi mereka beban moral juga sama yang lainnya.</p> <p>Misalnya PPTK? Dia udah panjar, tapi belum kembali, terus dia minta lagi? Biasanya kita ini dulu, yang itu dulu di SPJkan, baru nanti kita kasih.</p> <p>Laporan fungsionalnya? Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>Nanti ada sanksinya. Biasanya dari kinerjanya jadi merah nanti.</p> <p>Kan tadi dari PPTK mas bendahara itu. Misalnya kalau PPTKnya lambat otomatis nanti efek ke sananya juga.</p> <p>Tapi dia nggak sadar malahan Pak. Nyalahin. Nyalahin ke Bendahara ke keuangan, padahal dia sendiri yang salah.</p> <p>Tadi saya bilang minta uang nggak ada, tahunya bendahara punya uang toh, padahal dia sendiri yang bikin uangnya nggak ada.</p>	
--	---	--	---	--	--

10 : Eko Catur Setyawati, S.E.				<p>Ada. Kalau jurnal, buku besar, itu yang tanda tangan PPK. Kalau yang laporan keuangan LO, RA, neraca itu PA penggunaan anggaran.</p> <p>Iya. Saya gak paraf. Yang paraf Kasubbag.</p> <p>Nggak. Saya gak paraf. Yang tanda tangan beliau. Saya kan cuma pembantu beliau. Pembantu PPK fungsi akuntansi.</p>	
12 : Kuni Mas'adah	<p>Kuni Mas' Adah Oh SPP kan gini. SPP kalo SPJ sudah siap SPJ sudah ok clear bendahara membuat SPP. SPP ditandatangani oleh kepala, tanda tangani oleh bendahara, kemudian dimintakan persetujuan kepala. Ok sudah di tanda tangani kepala, turun. Nanti PPK SPM membuat SPM berdasarkan SPP yang ada. Dan eu SPM itu sudah melalui Simda jadi PPK pembuat SPM tinggal klik dari simda yang ada</p> <p>Kuni Mas' Adah Euu untuk SPP kami sudah ngikut eu pembuatan SPP sudah di verifikasi oleh PPK Verifikator. Jadi kami sudah tidak membutuhkan waktu lama lagi PPK verifikasi sudah Ok. Itu tinggal melanjutkan saja.</p> <p>Kuni Mas' Adah Dikoreksi dulu eu kami buat SPM, draf-nya kita lihat dikoreksi ok. Sudah ok, kita finalkan. Kalo sudah final artinya kita tidak bisa merubah lagi SPM yang ada kecuali admin yang bisa merubahnya. Dan kami admin simda itu ada di bidang Aklap.</p> <p>Kuni Mas' Adah Mekanismenya harus draft dulu. Bisa diterbitkan tetapi ketika sudah draft langsung kami</p>	<p>Kuni Mas'adah Tidak ada. Itu adalah sampiran. Biasanya setiap PPTK memang pegang satu orang. Untuk membantu membuat SPJ. Tapi kalo tugas membantu membuat tupoksi SPJ tidak ada</p> <p>Kuni Mas'adah Iya Tupoksi subbidnya mereka kegiatannya mereka.</p> <p>Kuni Mas'adah Kalo di PPTK pembukuan masing-masing. Katakanlah saya di subbag keuangan. Saya mempunyai kegiatan keuangan, kemudian ada kegiatan pembuatan laporan. Nah kami punya kendali setiap PPTK, punya kendali terkait dengan kegiatan reklame masing-masing. Nah kalo di subbag keuangan terkait SPJ saya serahkan kepada salah satu staf kami. Monggo untuk mengeSPJK kan terkait dengan kendalinya dia mengendalikan. "Oh ini anggaran kas sudah, mba ini tolong anggaran KAS di bulan januari, februari, bulan maret, nanti di bulan ini harus meng SPJkan apa, nanti dibulan ini harus meng SPJkan apa. itu dibulan itu harus. Kebetulan staf kami sudah membuat kendalinya.</p> <p>Kuni Mas'adah Ketika menerima uang. Ketika menerima uang kan langsung transfer kepada penerima. Ketika kita</p>	<p>Kuni Mas'adah Euu di subag keuangan mulai bulan oktober tahun 2017, kita melalui mekanisme pembayaran non tunai. Artinya apa eu kalo sudah ada SPJ baru kita akan transfer ke eu masing-masing penerima dana yang berhak menerima uang. Kalo SPJ belum ada. Artinya apa? gak ada SPJ kan kita gak bisa mengetahui berapa kebutuhannya mereka, Nah untuk mengetahui kebutuhan mereka, di awal tahun ketika menyusun APBD kemudian membuat RKA nya, kita sudah menetapkan anggaran KAS. Jadi setiap PPTK yang mempunyai kegiatan mereka membuat anggaran KAS. Anggaran kas mereka mau dicairkan di bulan apa, ketika mereka membuat anggaran kas katakanlah di bulan Mei, artinya apa bulan Mei tersebut mereka harus sudah menyiapkan SPJ untuk dimintakan dana. Nah dana itu setelah SPJ jadi kita verifikasi SPJnya sudah benar ok, disetujui, kemudian bendahara menyiapkan transfer dana. Kebetulan kami sudah menggunakan CMS Cash Mangement System. Jadi eum kami langsung transfer sendiri tidak melalui bank. Jadi bendahara itu sudah sekaligus merangkap layaknya sebagai pegawai bank. Jadi PPTK membuat SPJ itu berdasarkan anggaran kas itu yang sudah mereka buat. Jadi anggaran kas januari harus dilaksanakan Januari. Mereka</p>	<p>Kuni Mas' Adah Itu langsung di Simda. Jadi PPK tidak membuat buku tersendiri. Kita kalo kita butuh kita klik simdanya kita print SPMnya. Jadi dokumen SPM oh SPMnya, SPM tanggal sekian nomor sekian, nominalnya sekian itu registrasi sudah ada. Jadi pembukuan secara manual kita tidak membuat. Karena sudah diwakili oleh Simda.</p> <p>Kuni Mas'adah Iya. Eu ketika kita meng SPJK kan ketika kita membuat SPJ. Itu sudah sekalian di hitung pajaknya nanti bendahara yang akan membayarkan pajaknya. Akan transfer ke penerima. Kemudian sisanya akan di transfer, euu kewajiban pajaknya akan langsung di transferkan ke bank.</p> <p>Kuni Mas'adah Kalo dengan uang panjar, itu ketika awal bulan. Setiap awal bulan itu PPTK membuat NPD Nota Pencairan Dana . Nota pencairan dana itu fungsinya untuk minta dana di Bendahara. Ini lo anggaran kasnya di bulan ini, di NPD itu nanti akan kelihatan ini lo anggaran kasnya berap. Nanti di bulan depan di buat lagi, oh sisa bulan kemarin itu masih berapa. Nah nanti akan kelihatan di NPD tersebut. Nah setelah itu eu ada NPD masuk bendahara PPTK ngomong ke bendahara, "Bendahara tolong saya minta awal bulan kegiatan ini-ini dulu. Nah setelah diberikan uang, sebagai uang panjar. Dalam jangka satu minggu, PPTK harus mengembalikan dalam bentuk SPJ. Untuk bendahara membuat ganti uang persediaan. Kalo dalam waktu satu minggu terpaksa kita mau mengganti uang</p>	<p>Kuni Mas'adah Euu kepala setiap 3 bulan sekali itu euu membuat berita acara terkait pembukuan kas. Jadi eu kepala itu memonitor terkait dengan keadaan kas setiap 3 bulan sekali selama kontrol monitor. Juga terkait dengan kegiatan di SPJ kami semua di tanda tangani oleh kepala. Jadi terkait SPJ, SPJ itu dibuat oleh PPTK. Kemudian di paraf oleh pembuat PPTK, di paraf oleh penanggung jawabnya program, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab program. Penanggung jawab kegiatannya adalah eselon 3 nya, atasan langsung nah setelah itu dimintakan tanda tangan kepada pak kepala, nah setiap kali diminta kepada pak kepala, pak kepalapun akan selalu melihat. Kira-kira pas gak, srek gak. Kalo memang belum srek, belum pas, pak kepala tidak akan 20:29 terkait dengan SPJ itu. Seringkali terjadi seperti itu juga.</p> <p>Kuni Mas'adah Kadang-kadang kalo memang belum pas. Pak kepala memberikan catatan tolong bahas dengan saya. Jadi ketika pak kepala ko ini seperti ini, ini sebenarnya ada apa? ko saya belum srek, tolong panggil PPTK nya apa sebabnya? Baru setelah diberikan penjelasan, oh mungkin karena ada suatu sebab yang memang harus seperti itu baru akan di setujui. Tapi kalo memang, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pak kepala juga tidak akan</p>

<p>finalkan. Tapi kalo memang, begitu di simpanya. Begitu kami buat draf kemudian ada pernyataan final. Langsung kami finalkan SPP langsung jadi. Jadi tidak harus draft kita cetak tidak, cuman draft itu untuk kita koreksi. Sesudah koreksi di dalam eu komputer enggak, itu juga bisa.</p> <p>Kuni Mas' Adah Tetapi kalo itu masih draft itu berarti masih bisa kita perbaiki. Tetapi begitu sudah kami finalkan, SPP itu tidak bisa kami perbaiki. Kecuali kita harus minta tolong kepada admin, untuk mendraftkan kembali. Tapi kalo masih draft masih ada yang salah masih bisa saya perbaiki sendiri.</p> <p>Kuni Mas' Adah Sampai saat ini Alhamdulillah SPP kami selalu lengkap. Dan apabila belum lengkap tentunya euu SPM belum kami akan buat. Minta dilengkapi dulu SPPnya baru kami lengkapi dulu SPM. Itulah kalo SPM kalo yang menolak itukan di BUD penolakan SPM. Tapi kalo di PPK SPM adalah penolakan SPP. Tapi sampai saat ini SPP itu tidak ada penolakan SPP, yang ditolak itu SPM</p> <p>Kuni Mas' Adah Ada surat pernyataanya, surat pernyataan PPK, PPK tanda tangan itu sudah ada.</p> <p>Kuni Mas' Adah Surat pernyataan verifikasi. Sudah ada dicentang kelengkapannya sudah, kemudian sudah ditanda tangani</p> <p>Kuni Mas' Adah Karena itu punya kewenangan masing-masing sebagai pengendalian. Kalau semua ditangani bendahara, pengendaliannya ada di</p>	<p>membuat SPJ kan kan kita sudah, katakanlah beli ATK sekian ratus ribu katakanlah, sudah di catat. Mereka punya kendali karena setiap bulan mereka membuat laporan bulanan. Otomatis sudah dikendalikan di laporan tiap bulan. Jadi tiap bulan itu kita membuat laporan terkait dengan laporan, eu fisik dan laporan keuangan. Jadi fisiknya sudah sampai berapa, keuangannya sudah sampai berapa. Itu kita sudah mengendalikan di situ.</p> <p>Kuni Mas' adah Batasan dari kesepakatan kita. Iya satu minggu harus dikembalikan. Kalo satu minggu tidak dikembalikan harus ditarik lagi.</p> <p>Kuni Mas' adah Tidak. Dalam NPD katakanlan satu PPTK katakanlah 1 PPTK mempunyai satu kegiatan, tiga kegiata itu dicantumkan semua. Kemudian kegiatan bulan ini butuh berapa, kalo memang itu dibutuhkan semuanya. Itu dibutuhkan semua. Tapi kan kadang-kadang ada kegiatan yang tertunda. Seperti katakanlah SPPD dinas, SPPD katakanlah, SPPD menjagani untuk bila ada undangan. Otomatis kalo itu tidak digunakan uang masih akan tetap di bendahara.</p> <p>Kuni Mas' adah Kebetulan sampai saat ini kita gak pernah ini ya. Gak pernah, tetapi kalo ada seperti itu, katakanlah itu miliknya kegiatan si A. Ada kena nah itu kegiatan tanya langsung kepada PPTKnya. Karena misalnya ada kewajiban ketika PPTK ketika membuat SPJ ada yang seolah oleh diragukan, harus disetor kembali. Nah kewajiban disetor kembali adalah PPTK.</p> <p>Kuni Mas' adah Iya yang menyiapkan SPJ adalah PPTK. Jadi masuk</p>	<p>menyusun SPJ. Oh saya punya januari kegiatan katakanlah pendataan. Nah ketika pendataan keperluan pendataan itu apa ? oh keperluan pendataan katakanlah kami butuh ATK, kemudian kami butuh perjalanan Dinas. Nah ketika ATK mau di beli kita pesan dulu kepada toko. Kemudian begitu kita sudah pesan, kemudian mendapatkan bon, kemudian kita SPJkan lengkap kita serahkan bendahara. Bendahara akan langsung mentransfer kepada pihak toko.</p> <p>Kuni Mas' adah Kemudian yang jelas eu itu tergantung akad kita, saya pesan dulu nanti setelah itu baru kami kirim barang. Gak masalah.</p> <p>Kuni Mas' adah Gak ada, kita gak ada perjanjian. Cuman akad ketika jual beli saja</p> <p>Kuni Mas' adah Secara lisan aja. Jadi eu kita memang tidak ada kontrak dengan toko mana eu ketika membeli ATK, enggak. Bebas kita membeli ATK</p> <p>Kuni Mas' adah Tidak ada. Itu adalah sampiran. Biasanya setiap PPTK memang pegang satu orang. Untuk membantu membuatkan SPJ. Tapi kalo tugas membantu membuatkan tupoksi SPJ tidak ada</p> <p>Kuni Mas' adah Karena itu adalah sudah merupakan kewajiban subbid mereka untuk meng-SPJ-kan. Kalo tidak mau ya kegiatan. Jadi mereka akan menyadari dengan dirinya sendiri, dengan kebutuhan mereka masing masing</p>	<p>persediaan, ko PPTK uangnya masih ngendon. Belum bisa mengesPJKkan uang harus di tarik diberikan kepada PPTK yang lain yang siap untuk melaksanakan kegiatannya, karena eu tidak bisa semua kegiatan di danai dengan sekali GU.</p> <p>Kuni Mas' adah Pelaporannya ya itu tadi, Tiap bulannya PPTK membuat laporan, laporan bulanan itu wajib bagi setiap PPTK untuk semua kegiatan.</p> <p>Kuni Mas' adah Enngih SPJ Manual. Katakanlah SPJ rapat enggak, ketika rapat kami butuh undangan, kemudian beli snack, itu ada bon pembelian, kemudian ada kwitansinya. Kemudian setelah ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen.</p> <p>Kuni Mas' adah Nah itu, kemudian ketika kami SPJkan, kita beli ada pajaknya. Juga kita harus menghitung pajaknya juga. Nah setelah dihitung pajaknya, katakanlah pembelian ATK dipotong, karena kan pajak itu untuk makan minum itu kita kena pajak restaurant enggak, kalo kita belinya di restaurant. Kecuali kita belinya di toko tidak kena pajak restaurant tapi tetep kena BPN dan BPH kena 2. Tapi kalo kita belinya di restaurant yang sifatnya jasa kita kena BPN dan BHH dua tiga. Nah itu yang menghitung adalah PPTK. Ini lo pajak saya. Kemudian setelah itu lengkap dihitung, diserahkan kepada bendahara</p> <p>Kuni Mas' adah Karena itu adalah sudah merupakan kewajiban subbid mereka untuk meng-SPJ-kan. Kalo tidak mau ya kegiatan. Jadi mereka akan menyadari dengan dirinya sendiri, dengan kebutuhan mereka masing masing</p> <p>Kuni Mas' adah Mereka sudah menyadari terkait dengan pembuatan SPJ karena kalau, katakanlah A yang diberikan tugas untuk</p>	<p>tanda tangan, jadi semua SPJ pak kepala sudah memantau.</p>
--	--	--	---	--

	<p>mana ?</p> <p>Kuni Mas' Adah PPK paraf di SPMnya ada, kemudian SPM itu, ada SPM kemudian ada surat pernyataan. SPM dan surat pernyataan itu ditanda tangani oleh pengguna. Nah PPK itu paraf di</p> <p>Kuni Mas' Adah Kiri kanannya.</p> <p>Kuni Mas' Adah Sekretaris ya PPK kan, PPK nya sekretaris. Malah ada sekretaris kalo di SPM itu yang tanda tangan eu yang paraf adalah sekretaris. Kemudian yang PPTK itu untuk pengendalian sebagai koreksi itu paraf di koordinasi. Jadi hanya paraf koordinasi, tetep kami akan koreksi selaku PPTK, itu PPTKnya bendahara paraf koordinasi itu di pojok eu SPM. Kemudian di surat pernyatannya kami PPTK dan PPTK.</p> <p>Kuni Mas' Adah Jarang biasanya pemeriksaan PPK, PPK itu yang banyak diperiksa adalah permohonan SPJ kemudian SP2D nya.</p> <p>Kuni Mas' Adah Iya. Walaupun di SP2D itu nanti bendahara akan menyertakan lengkap. Ketika meminta SPJ di SPJ itu akan menyertakan pembuatan SPJ dan SPMnya, karena ketika dokumen, ketika menyimpan dokumen itu akan lengkap disertakan disertakan SPP dan SPMnya. Jadi ketika kita putus suatu saat, oh ini SPJ sekian GU tanggal sekian, SPP nya ini, kemudian SPMnya ini nanti SP2Dnya tinggal nyarikan. Jadi bendahara selalu tertib mendokumentasikan SPJ beserta dengan SPPnya.</p>	<p>bendahara, itu sudah lengkap. Sudah tinggal bayar. Ditandatangani oleh kepala. Kepala sudah menyetujuinya. Kalo belum disetujui kepala, bendahara belum akan membayarkan. Jadi kalo ada SPJ ko kepala itu belum tanda tangan belum menyetujui artinya bendahara belum akan mengeluarkan dana.</p>	<p>Kuni Mas' adah Mereka sudah menyadari terkait dengan pembuatan SPJ karena kalau, katakanlah A yang diberikan tugas untuk membuat SPJ kebetulan A tidak bisa, mungkin PPTKnya akan membantu. Jadi kita saling. Saling bantu di dalam satu subid.</p> <p>Kuni Mas' adah Kalo di PPTK pembukuan masing-masing. Katakanlah saya di subbag keuangan. Saya mempunyai kegiatan keuangan, kemudian ada kegiatan pembuatan laporan. Nah kami punya kendali terkait dengan kegiatan reklame masing-masing. Nah kalo di subbag keuangan terkait SPJ saya serahkan kepada salah satu staf kami. Monggo untuk mengeSPJK kan terkait dengan kendalinya dia mengendalikan. "Oh ini anggaran kas sudah, mba ini tolong anggaran KAS di bulan januari, februari, bulan maret, nanti di bulan ini harus meng SPJkan apa, nanti dibulan ini harus meng SPJkan apa. itu dibulan itu harus. Kebetulan staf kami sudah membuat kendalinya.</p> <p>Kuni Mas' adah Ketika menerima uang. Ketika menerima uang kan langsung transfer kepada penerima. Ketika kita membuat SPJ kan kan kita sudah, katakanlah beli ATK sekian ratus ribu katakanlah, sudah di catat. Mereka punya kendali karena setiap bulan mereka membuat laporan bulanan. Otomatis sudah dikendalikan di laporan tiap bulan. Jadi tiap bulan itu kita membuat laporan terkait dengan laporan, eu fisik dan laporan keuangan. Jadi fisiknya sudah sampai berapa, keuangannya sudah sampai berapa. Itu kita sudah mengendalikan di situ.</p>	<p>membuat SPJ kebetulan A tidak bisa, mungkin PPTKnya akan membantu. Jadi kita saling. Saling bantu di dalam satu subid.</p> <p>Kuni Mas' adah Iya Tupoksi subbidnya mereka kegiatannya mereka.</p> <p>Kuni Mas' adah Batasan dari kesepakatan kita. Iya satu minggu harus dikembalikan. Kalo satu minggu tidak dikembalikan harus ditarik lagi.</p> <p>Kuni Mas' adah Iya. Sudah kesepakatan bersama. Kalo tidak mau ya tarik. Tarik ya semua sudah menyadari.</p> <p>Kuni Mas' adah Tidak. Dalam NPD katakanlan satu PPTK katakanlah 1 PPTK mempunyai satu kegiatan, tiga kegiata itu dicantumkan semua. Kemudian kegiatan bulan ini butuh berapa, kalo memang itu dibutuhkan semuanya. Itu dibutuhkan semua. Tapi kan kadang-kadang ada kegiatan yang tertunda. Seperti katakanlah SPPD dinas, SPPD katakanlah, SPPD menjagani untuk bila ada undangan. Otomatis kalo itu tidak digunakan uang masih akan tetap di bendahara.</p> <p>Kuni Mas' adah Kita sudah sepakat dalam satu minggu SPJ tidak dibuatkan uang tarik kembali.</p> <p>Kuni Mas' adah Kalo memang sudah terpakai. Dan itu memang untuk kegiatan. Dan itu kegiatannya belum selesai, memang ada, gini kami harus panjar. Tapi kalo memang kegiatan kami masih berlangsung. Ya kita kasih jangka waktu, gak papa yang jelas ketika kita mau GO. Yang jelas batas GU adalah 60</p> <p>Kuni Mas' adah Ketika batas mencapai 60% masih ada uang di panjar. Kegiatan masih berlangsung itu tidak masalah. Kita masih ada toleransi di situ.</p>	
--	---	--	---	--	--

	<p>Kuni Mas' Adah Kalo penolakan SPM itu adalah kewenangannya di bendahara umum daerah. Itu yang menolak adalah bendahara ketika. Ketika yang menolak adalah bendahara umum, ketika bendahara SKPD itu sudah membuatkan eu SPM. Kemudian diterbit SPP, kemudian diterbitkan SPM. SPM tersebut beserta lampiran SPJnya kita kirim ke BUD. Ketika BUD itu belum srek terhadap SPM itu bisa menolak SPM.</p> <p>Kuni Mas' Adah Iya tetapi ketika, sampai saat ini semuanya, ketika kita membuat SPP semuanya sudah lengkap. Kalo toh memang tidak lengkap mesti harus disebutkan.</p> <p>Kuni Mas' Adah Iya di lembar verifikasi. Kan dilembar verifikasi itu katakanlah eu syarat kelengkapan SPP itu apa saja. Nah syarat kelengkapan SPP itu ketika belum lengkap ya tidak di centang. Ketika sudah lengkap ya dicentang semua.</p> <p>Kuni Mas' adah Eu PPTK itu adalah yang punya kegiatan, tetapi kalo pengadaan jasa sudah dimulai adalah semua diserahkan kepada PPKOM. PPKOM akan membuat panitia pengadaan. Nah itu semua sudah eu ditangani oleh panitia pengadaan.</p> <p>Kuni Mas' adah Tidak. Karena memang panitia pengadaan tidak semua di subbang umum. Kita menggunakan mereka -mereka yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.</p>		<p>Kuni Mas' adah Kalo dengan uang panjar, itu ketika awal bulan. Setiap awal bulan itu PPTK membuat NPD Nota Pencairan Dana . Nota pencairan dana itu fungsinya untuk minta dana di Bendahara. Ini lo anggaran kasnya di bulan ini, di NPD itu nanti akan kelihatan ini lo anggaran kasnya berap. Nanti di bulan depan di buat lagi, oh sisa bulan kemarin itu masih berapa. Nah nanti akan kelihatan di NPD tersebut. Nah setelah itu eu ada NPD masuk bendahara PPTK ngomong ke bendahara, "Bendahara tolong saya minta awal bulan kegiatan ini-ini dulu. Nah setelah diberikan uang, sebagai uang panjar. Dalam jangka satu minggu, PPTK harus mengembalikan dalam bentuk SPJ. Untuk bendahara membuat ganti uang persediaan. Kalo dalam waktu satu minggu terpaksa kita mau mengganti uang persediaan, ko PPTK uangnya masih ngendon. Belum bisa mengesPJKkan uang harus di tarik diberikan kepada PPTK yang lain yang siap untuk melaksanakan kegiatannya, karena eu tidak bisa semua kegiatan di dana dengan sekali GU.</p> <p>Kuni Mas' adah Batasan dari kesepakatan kita. Iya satu minggu harus dikembalikan. Kalo satu minggu tidak dikembalikan harus ditarik lagi.</p>	<p>Kuni Mas' adah Itu kita sudah lama seperti itu ko. Sejak kapan saya kurang begitu ingat. Tapi yang jelas kita sudah jalan seperti itu dari dulu ada komitmen. Kalo memang tidak bisa mengSPJkan, karena memang anggaran kas itu adalah PPTKnya banyak yang sudah diawal bulan mohon tidak di SPJkan kita bisa tarik kembali untuk bisa digunakan ke PPTK yang lain.</p>	
--	---	--	---	--	--

	<p>Kuni Mas'adah Gini, ketika pengadaan barang jasa semua pengadaan itu adalah kegiatannya BPKOM nanti itu panitia pengadaan. Nah kalo didalam pengadaan itu ada rapat, pengadaan ATK nah itu yang memfasilitasi memang dari dana Kegiatan pengadaan tetapi difasilitasi oleh PPTK. Ketika rapat, ketika beli ATK, nanti yang mengadakan PPTK. Nanti ATKnya diserahkan kepada panitia untuk mengadakan kegiatan. Kemudian ketika ada honor panitia, yang membuatkan SPJnya juga PPTK. PPTK membuatkan SPJ baru mereka panitia tanda tangan terkait penerimaan honor.</p> <p>Kuni Mas'adah Iya pengadaan itu kontrak. Tetapi terkait dengan kebutuhan pengadaan rapat, ATK. Ketika rapat awal, rapat mengundang Pihak Ke 3, katakanlah unswizing gitu enggak. Kitakan harus memfasilitasi. Kemudian pemasukan apa apa dokumen kontrak nah itukan yang memfasilitasi subbag umum. Nanti sudah wilayahnya panitia ya itu panitia yang ber... melaksanakan.</p>				
--	---	--	--	--	--

17 : Sutanti, S.E.	<p>Sutanti</p> <p>Iya. Nanti dicocokkan sama entryannya Mbak Nisa itu. Kalau di sana kita ya udah kita kumpul di sana. Nanti kalau misalnya ada yang salah baru maksud saya memang arsipnya ditumpuknya di sana. Jadi kita nggak tentukan bakal lama di sana.</p>			<p>Sutanti</p> <p>Setelah semuanya dibayar di sini, nanti kalau saya ya, saya sore rekapan setornya ke BPD juga, seperti itu. Jadi saya nanti mengarsip SSPD sama SKP. Kalau yang warung makan itu kan nggak pake SKP, yang pake SKP yang air tanah, reklame, udah gitu. . . (01:12). Jadi saya punya arsipnya.</p> <p>Sutanti Saya tinggal ini aja, nanti kan ngeprint dari SIMDA apa saja yang sudah masuk, nanti saya tambahkan lampiran bukti-bukti yang saya kumpulkan, yang tadi dimintakan tanda tangan pak kepala, terus saya jilid.</p> <p>Sutanti Kalau ini sih biasanya saya cuma ini aja, kalau udah cocok aja, Aklap itu sudahe. Heém. Sama Pak T. kalau sempet kita ke sana ya udah kita cetak aja. nanti kalau ditemukan ada yang salah baru verifikasi lagi.</p> <p>Sutanti</p> <p>Ya yang misalnya terlambat. Ini kan sudah lewat, pokoknya tanggal 10 kan sudah harus. Jadi nggih kalau tanggal 11 berarti surat tegurnya sudah diterima.</p>	
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.				<p>Iya kalau menurut saya bahwa konsepnya kan di dalam penatausahaan, itu ada catatan yang sesuai dengan apa namanya, kondisi ril barang. Ada masalah mendasar di aset itu kan masalah kan barangnya ada, catatannya gak ada. Catatannya ada barangnya gak ada. Ini yang membuat beberapa daerah tidak WTP kan, permasalahannya kan hanya semata berkisar di situ aja. Jadi pertanggungjawaban secara bisa dipertanggungjawabkan kalau selama barang itu ada, catatannya juga ada. Saya rasa itu.</p>	<p>Kalau kita dimulai dari RKBMD. Hanya saja apa namanya, di dalam pelaksanaannya nanti pada saat usulan RKBMD ada, itu finalisasinya kan ada plafonisasi anggaran. Jadi dari segala usulan yang ada, paling masuk sekitar 30% ada. 30% dari usulan yang ada.</p> <p>Dari SKPD. Jadi mekanisme kita apa namanya. Ada..ada, mereka mengusulkan, kemudian kita lakukan desk bersama dengan Bappeda, kemudian masuk di program perencanaan Bappeda.</p> <p>Eeh, walaupun standar, standar apa namanya, standar prasarana kan masih</p>

					<p>diatur umum, Cuma kita mempertimbangkan surplus, kondisi surplus yang ada berdasarkan data tahun sebelumnya. Jadi kita kan berdasarkan tipe yang ada kita sandingkan dengan usulan. Jadi kalau mereka usulannya eeeh dirasa melebihi dari yang sewajarnya, ya kita lakukan sesuai kebutuhan.</p> <p>Jadi apa namanya, hasil-hasil desk kita itu, semuanya kan kita buat rangkap dua, kita kembalikan ke SKPD kemudian kita serahkan ke Bappeda. Setelah masuk dalam Bappeda nanti kategorinya kan masih disandingkan dengan plafon yang ada. Nah nanti semuanya dikembalikan lagi kepada SKPD, nanti dari prioritas yang sudah muncul tadi mana yang menjadi prioritas utama yang akan masuk di dalam apa namanya APBD, RKA. Jadi begitu.</p> <p>Nah, kebetulan eeeh sejak tahun 2012 di kabupaten Kulon Progo, semua pengadaan kita serahkan di OPD. Jadi kita hanya memberikan rambu-rambu saja di dalam,.. artinya bahwa eeh pada saat desk, ini butuh kendaraan berapa, seperti itu, itu hanya rambu-rambu dalam perencanaan. Pasca apa namanya APBD sudah ditetapkan itu ranahnya di masing-masing OPD. Tapi untuk daerah-daerah lain mungkin masih ada yang apa namanya, ehh pengadaannya ada di bidang aset.</p> <p>Apel kendaraan itu kan salah satu bentuk untuk pengamanan apa..pengamanan kendaraan. Jadi kendaraan kan kita eeh serahkan atau kita eeh..dimanfaatkan, yang pertanggungjawabkan adalah pertanggungjawaban pejabat struktural atau fungsional tertentu. Eeh itu kan secara berkala kita lakukan apel kendaraan.</p> <p>Ehh..ya kita selama ini untuk..untuk meng...eeeh, hanya ini sebenarnya hanya kita ingin mengetahui apakah</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>pemeliharaan sudah dilakukan terhadap kendaraan tersebut. Jadi secara berkala kemudian bagaimana kondisi kendaraan. Jadi dalam artian kecenderungan untuk mengamankan.</p> <p>Gak...gak bisa. Itu...itu hanya iya. Kalau hanya untuk pemanfaatan ril, yang jelas kan dalam artian kalau mereka bawa ke kantor, berarti dipakai untuk keperluan kantor. Tapi di luar itu kita masih belum tahu juga kan. Tapi yang jelas bahwa kalau, eeh diadakan kendaraan yang ada, rawat, berarti di dalam apa namanya, sesuai dengan perjanjian mereka, apa namanya, pemanfaatan BMD-nya mereka berjalan seperti yang ada di dalam..apa..perjanjian yang berlaku.</p> <p>Ehhh nanti kita anu, apa namanya...kita minta dihadirkan, di hari berikutnya.</p> <p>Iya, kemudian kondisi ril barangnya. Kalau perlu makanya kan di dalam apel ini sekaligus untuk mengetahui ehh..mana kendaraan-kendaraan kalau yang perlu dilakukan usulan penghapusan, ya diusul penghapusan, ganti yang baru, ganti untuk pengadaan berikutnya. Salah satunya itu. Jadi semacam juga bisa dilakukan kalau kita katakan ya..inventarisasi, bisa. Semacam itu.</p> <p>Jadi SKPD atas permintaan kita juga. Dalam artian kita kan melakukan himbauan kepada apa namanya..himbauan kepada SKPD untuk melakukan apel kendaraan.</p> <p>Evaluasi...yang kita lakukan ehhh...berkala, yang untuk apa namanya...untuk aset tetap semesteran, dalam artian kita apa..kita melakukan monev sekaligus kita membuat laporan semesteran. Tapi kalau untuk yang persediaan, 3 bulanan, untuk melakukan rekon, rekon persediaan. Cuma itu. Malah kalau yang untuk obat, obat apa namanya..obat-obat di puskesmas,</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>rekonnya 1 bulan sekali.</p> <p>Itu di subbid kami ada salah satu subbid yang membawahi persediaan. Jadi namanya subbid penghapusan dan administrasi persediaan.</p> <p>Ada. Jadi apa namanya...aplikasi yang kita gunakan ada beberapa, bagi yang untuk aset tetap kita gunakan SIM Aset, yang kita buat sendiri. Kemudian untuk persediaan ada beberapa, jadi persediaan itu kita membuat SIM untuk rumah sakit sendiri. Kemudian SIMO, itu namanya SIM obat untuk puskesmas, sendiri. Kemudian ada SIM Persed untuk yang nonobat. Untuk semua SKPD</p> <p>Iya berkala tadi itu. Minimal 3 bulanan. Tapi yang untuk obat setiap bulan.</p>
--	--	--	--	--	---

Lampiran 16: Framework Matrix Wawancara tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan
11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>itu dilakukan. Tapi biasanya kebanyakan dah by sistem soalnya kan dah pake aplikasi toh enakunya itu.</p> <p>Oh... Jadi kalau Kan kita juga pake SIMDA.. E... SP2D terbit UP cair sudah terbuka di SIMDA. dan nanti bendahara keluar masuknya uang juga uang dia juga udah dia membukukan di SIMDA. BKU segala macam sama fungsional, jadi nanti terkondisi di sana di fungsinya ada sisa kas, Ok... e... e...e... Iya. e... e... Ada sisa kas. Dari sana kita lihat tinggal berapa, udah nanti e GU juga prosesnya udah langsung di SIMDA ada gitu. Jadi,</p> <p>He e, sampe LS juga. LS e... dari SP2D udah ada kan ada register SP2D yang LS segala macam. Udah nanti sampe fungsional realisasinya udah masuk. Sampe ke LRA nah enakunya pake aplikasi itu. Jadi teman-teman gak gak terlalu repot paling cuman melengkapi kelengkapan SPj-SPj itu aja.</p> <p>Sama. Hm em. Misalnya ada pajak atau segala macam ya itu udah diselesaikan dalam pembendaharaan. Masuk ke SIMDA itu udah clear.</p> <p>Dia kan juga mengambil datadari database SIMDA. mereka juga di awal bulan. maka biasanya hari kerja pertama awal bulan itu sudah kita minta SKPD itu menyelesaikan. Jadi, paling dengan logika tanggal 1 hari kerja pertama kita ngak lebih dari tanggal 3, tanggal 4 itu sudah harus masuk. karna ada kebutuhan itu gitu.</p> <p>Enggak. Enggak ngak konek. e... Cuma Ck angkanya akan masuk SIMDA, masuk ke neraca diakhir tahun dengan jurnal manual itu aja.</p> <p>Aset itukan karna kita tidak terintegrasi kasihan. Kita tidak terintegrasi sim nya jadi</p>	<p>Dia akan memposting monggo entar akhir bulan atau diawal bulan nah sebelum itu pasti dia sinkronisasi dulu. Kan saya selalu bilang ke SKPD, antara bendahara, petugas akuntansi, bendahara pengeluaran, penerimaan itu harus koodinasi internal di bawah PPK-SKPD. Nah, proses itulah yang mereka lakukan sinkronisasi.</p> <p>Sehingga nanti ketika diposting by sistem sudah masuk LRA ya ngaknya dah benar. Kelihatan kalau misalnya si petugas akuntansi posting LRA, kok misalnya belum match sama fungsionalnya. Nah mereka akan diskusi dengan bendaharanya.</p> <p>Iya. Cuma angkanya. Karna itu realisasi belanja model tahun berjalan otomatis di fungsional bendahara sudah ada. Nah nanti kita tinggal sinkronisasi sama data yang di aset. Gitu. Untuk penambahan nilai asetnya. Karna kalau di SIMDA settingnya SIMDA itu bersistem realisasi belanja model udah masuk untuk menambah aset. Nah nanti tinggal e.... yang diluar pembelian. Misalnya mutasi antar SKPD itu nanti kita masukan lewat jurnal manual. Kalau yang pembelian dah otomatis di SIMDA ada.</p> <p>Laporan keuangannya Pemda. Iya. Nge... di SIMDA. Kan sudah ada konsolidasian nih. Kita tinggal melakukan cek end ricek. Apakah semua sudah masuk karna kita juga punya istilahnya apa ya? Tetap punya informasi manual toh. Nah setelah semua clear ya kita tinggal cetak, menunya ada SKPKD di SIMDA. Itu jadi tinggal cetak disana sudah konsolidasi yang BUD dah masuk secara manual, yang aset tadi sudah betul secara manual. Jadi keluarnya neraca itu sudah lengkap. Udah hasil kompilasi.</p> <p>Iya. Tapi e.. ada manualnya juga dari kami ketika... Hm em... Tadi yang BUD tuh kan masuknya. Trus e... apa ya? Dana Bos, itukan</p>	<p>Em.... mekanisme se kalau kita bikin LKPD yang tahunan, Sebelum diserahkan ke BPK itu harus direview inspektorat.</p>	<p>e... Kalau secara eksplisit kita tidak tidak memberikan punishment hanya saja kan yang namanya teguran itu sudah secara ini toh, e sudah secara apa ya caranya ni ki kinerja dia kan buruk, karna kalau dia telat pun, kan ada di Bappeda, bappeda ada penilaian istilahnya rapotang itu toh. Nah itu juga pengaruhnya ke sana. ada grade-grade nya diumumkan tapi itu di Bappeda ya.</p> <p>Yang punya lagian, kan hubungannya ke sana. jadi dari kami di bidang saya gak ada punishment apa-apa, cuma teguran itu saja. Tapi nanti efeknya, dampaknya kan di asisten sekda satu dua tiga itu juga kan ada e rakor internal per asisten. Di sana kan nanti juga ada teguran gitu. ada, ada informasi sampe sana bahwa ini blom, ini blom nah kan seperti itulah gitu loh.</p> <p>Kalau dia telat maka nilainya kan jadi tidak 100%,</p> <p>Automatis nanti TPP nya juga gak bisa 100%, tetapi e itukan cuman salah satu komponen penilai,</p> <p>Kadang e BKPP yang punya TPP ya? Diakan punya grade, Nah, nilainya diambil dari inspektorat, BKAD, Bappeda.</p> <p>TPP itu kalau misalnya e... jelek cuma 80% misalnya itu satu SKPD dapat 80%</p> <p>Iya..Cuma kan dia nilainya jatuh itu bisa jadi kenapa? apakah di BKAD atau di Bappeda e monev nya atau di inspektorat mungkin ada temuan yang belum ditindaklanjuti? Gitu.</p>

Nama	D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan
	<p>di sana ada sim sendiri</p> <p>Bidang Aset. Nah karna proses penyusunan neraca itu diakhir tahun maka e.. nilai aset akan masuk ke SIMDA secara manual di jurnal manual pada saat proses penyusunan laporan keuangan.</p> <p>Nah itu nanti e.. pengurus barang berkoordinasi dengan petugas akuntansi masing-masing SKPD akan memberikan informasi angkanya berapa, nah petugas akuntansi SKPD yang akan mengakuntansi, melakukan jurnal manual di SIMDA.</p> <p>sehingga nanti angkanya masuk ke neraca SKPD. Itu. Aset, karena aplikasinya sendiri.</p>	<p>sebagai mana tahu. Aset penyusutan nah tadi itu tetap. Hem nge..</p> <p>Kan petugas akuntansi PPKD itu kan e tidak bisa ditunjuk karna kita kurang SDM, Lah siapa gitu kan? Akhirnya secara tugasnya dilakukan oleh bidang yang tupoksi nya mendekati. Nah karna itu akuntansi maka di bidang akuntansi kami yang melakukan. Kami buat e akuntansi nya PPKD seringnya kan dia masuk ke dalam akuntansi Pemda.</p> <p>Kami di akuntansi nanti hanya mengkonversi termasuk PPKD kalau ka sekarang kalau sen, kami yang kompilasi ya melakukan ya BPKD. Tapi kalau mulai 2019 sudah akan ditunjuk oleh. 2018 kan udah terlambat ya seperti kan dah jalan</p> <p>Jadi kita melakukan dan mengkompilasi. Nah kalau besok kita tidak melakukan, karna sudah ada petugasnya sendiri berakuntansi khusus PPKD kami tinggal mengkompilasi.</p> <p>Nggak sih. Kita dari awal dulu cuma menyampaikannya di forum koordinasi. bagian dari pembinaan kita. dan tanpa apa istilahnya tanpa hitam diatas putih mereka</p> <p>Iya. Lebih kearah itu. Karna kalau misalnya mereka gak melakukan itu pun resiko mereka tanggung jawab mereka. Kalau kami</p> <p>SKPKD hanya semacam pembinaan begitukan? gitu.</p>		
19 : Ari Fitriani	<p>Kita baru SIM... SIM pengawasan itu SIM.. kaya apa.. sama SIM yang dari BPK itu masalah tindak lanjut- tindak lanjut, kita lewat SIM</p> <p>Cuma khusus untuk secara keseluruhan APBD itu ada namanya, Monev tuh.. jadi di situ, masyarakat bisa mengakses e.. program kerja dari SKPD itu, apa kemudian pencapaiannya sudah sampe mana gitu, bisa di Monev itu. Itu yang mengelola di Kasubag</p>		<p>Bukan.. bukan.. tapi review RKPD. Karena di amanatnya Permendagri juga hanya review, di sebut review</p> <p>Sebelum ditanggapi oleh Bupati</p> <p>Review biasanya.. ada dua review. Jadi yang pertama review laporang keuangan SKPD, dan review laporan keuangan LKPD jadi masing-masing 15 hari. Tapi waktunya bersamaan dengan penyusunan laporan.. kan laporan keuangan SKPD dulu jadi baru di konsolidasi di laporan</p>	

Nama	D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan
	<p>perencanaan dan keuangan..</p> <p>e.... di sini Monevku..., Rencanaku.. e.. apalgi ya.. ada beberapa SIM yang konek jadi satu. Kalo khusus untuk pengawasan sendiri itu tidak konek manapun..</p> <p>Dan tidak semua orang bisa membuka secara.., harus punya passwordnya. Kalo mau mengakses ya.. yang hanya sudah di.. unggah di.. Webnya Inspektorat</p>		<p>keuangan LKPD</p> <p>Ya... jadi SKPD dulu kan selesai. Kemudian kan hasil laporan SKPD jadi dasar untuk penyusunan LKPD juga mungkin kan ada perbaikan angka dan sebagainya. Nah.. nanti berbarengan dengan penyusunan LK.. e.. es.. LKPD nanti yang review masuk.... yang review SKPD nya masuk, dan hasil review nya juga bisa jadi dasar untuk review LKPD, mungkin ada yang perlu kita perdalam di situ, kemaren belum tuntas kita perdalam via LKPD</p> <p>e... ada perbup SOPK, SOPK, SOPK, kemudian ada Perbup tentang pedoman pengawasan ada e.. piagam cater itu ada..</p> <p>Kalo prosedur.. peng.. e.. kalo di pedoman pengawasan itu hanya jenis-jenis pengawasannya apa.. tetapi kalo prosedur review nya itu ada di SOP ataupun program kerja review, yang khusus review program kerja review</p> <p>Iya.. kalo SOP menyeluruh, inspektur, SK inspektur kalo program kerja review itu di masing-masing timnya jadi yang menyusun ketua tim</p> <p>e.. beda.. jadi review.. review itu lebih banyak untuk memberi keyakinan bahwa laporan keuangan itu telah di susun berdasarkan sistem pengendali intern yang memadai dan e... standar akuntansi pemerintahan, kalo.. pemeriksaan e.. tetapi tidak memberi apa istilahnya hanya memberi keyakinan terbatas</p> <p>Di sini ada.. pemeriksaan namanya pemeriksaan re... e.. reguler itu secara menyeluruh jadi dari keuangan kemudian dari pengelolaan barang, kepegawaian, itu secara menyeluruh ada yang dengan tujuan tertentu. Tematik istilahnya jadi bisa di.. ngambil barang dan jasa saja di.. cash opname, atau stock opname, jadi khusus.., dan review ini juga termasuk pemeriksaan khusus, kalo review kan khusus. Bisa review RKA, bisa review laporan keuangan.. itu kan khusus</p>	

Nama	D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan
			<p>Ada.. sudah ada program kerja pemeriksaan tahunannya jadi kalo untuk pemeriksaan reguler itu setiap tahun wajib seluruh SKPD, di kurangi yang di serahkan untuk diperiksa Provinsi</p> <p>Ya.. di serahkan di.. Inspektorat Provinsi biasanya sekitar 4 atau 5 SKPD itu..</p> <p>Jadi.. kita dari hasil pemeriksaan itu bisa ada penilaian keuangan ya.. e.. itu nanti, kalo kami sebagai tidak segera ditindaklanjuti juga ada mungkin e.. aduan aduan dari.. masyarakat atau mungkin ada aduan dari Kejaksaan atau Kepolisian itu bisa juga kita memeriksa penyelewengan keuangan tapi kalo untuk mencegahnya ya.. kita di.. pemeriksaan reguler tadi, kemudian kita juga ada evaluasi SPIP nya.. jadi untuk apa ya.. sistemnya kita.. kita kawal juga, ada juga kita pembinaan-pembinaan, pendampingan-pendampingan. Kadang dari SKPD konsultasi ke kami juga, ada yang namanya unit konsultasi</p> <p>Ya.. jadi setiap SKPD, atau dari desa atau dari manapun ketika ada kebingungan masalah pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, atau barang bisa konsultasi di sini</p> <p>Hem.. di kita.. di kami ya.. jadi kalo kami itu e.. seperti pedoman pengawasan, per program itu sudah bisa di share, sudah bisa di unduh kemudian piagam audit atau internal audit chapter itu kan juga bisa di unduh juga jadi SK.. e.. stake holder kan bisa lihat apa yang.. apa yang.. di larang ataupun di lakukan auditor itu kan bisa di lihat di situ. Kemudian setiap satu tahun itu kita ada namanya gelar pengawasan, nah itu kita.. paparkan walaupun tidak secara detail hasil-hasil pengawasan yang kita lakukan selama satu tahun</p> <p>Kalo Bupati..., setiap kita pemeriksaan kan kita sampaikan ke Bupati ke SKPD terkait. Jadi.. sama ke BPK jadi di luar itu kita tidak menyampaikan karena bagaimanapun juga LH itu kan sifatnya rahasia</p> <p>Ya.. kemudian hanya kita sampaikan lewat gelar</p>	

Nama	D1. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Internal dan Eksternal	D2. Sinkronisasi Data Pelaporan melalui PPK	D3. Sistem Pengawasan Pelaporan yang Memadai	D4. Penghargaan Kinerja Pelaporan
			<p>pengawasan jadi semua auditi yang kita periksa tahun itu kita undang, kemudian kita paparkan hasil-hasil pemeriksaan secara, ya.. secara umum ya.. tidak.. tidak detail per SKPD itu ndak..</p> <p>Bisa nanti kalo.. apa ya.. bayangan kami kalo bener-bener hasil nya, kalo dari prosesnya transparan nggak apa- apa, tapi hasilnya transparan kan kalo ada sesuatu bisa.. jadi..</p> <p>Ada, dari Kejaksaan pun atau Kepolisian kalo mau minta hasil pemeriksaan harus lewat Bupati dulu, harus minta ijin ke Bupati, Bupati acc baru kami bisa memberikan</p> <p>Yang.. tadi yang kita.. kita sampaikan pada saat gelar pengawasan aja, jadi gelar pengawasan itu di situ hanya misalnya, ya tahun ini yang kita periksa sekian, kemudian temuan administrasi sekian, temuan kerugian sekian, yang bisa ditindaklanjuti sekian tapi kalo secara detail itu nggak bisa</p> <p>Penyimpangan ketika bisa diselesaikan secara damai ya istilahnya ya.. diselesaikan di sini istilahnya, ada temuan kemudian di setor kemudian tindakan disiplin pegawai ya sudah itu kita selesai. Tapi kalo nggak bisa nanti ada namanya Majelis TPTGR ya.. itu nanti.. tingkat penyelesaian yang lebih tinggi di situ. Tetapi kalo sudah ada unsur pidananya di.. APH</p> <p>Nggak bisa.. nggak bisa ya.. Cuma sebatas tahun ini yang sudah di periksa mana saja, terus yang sudah di.. kita gelar di.. gelar pengawasan daerah itu yang bisa diakses. Takutnya kalo bisa di akses itu mereka nggak paham, dan memahaminya kan lain gitu, hehehehe. Malah jadi bumerang</p>	

Lampiran 17: Framework Matrix Wawancara tentang Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	F1. Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi	F2. Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif	F3. Berorientasi dan Komitmen Melayani	F4. Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral	F5. Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi
7 : Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.	<p>Kita sosialisasinya ada bentuknya adalah penerbitan surat edaran kepada semua OPD untuk menyusun dokumen Pra-RKA atau Pra Rencana Kegiatan Anggaran. Jadi, itu kalau di PPAS itu kan sudah tertuang sebuah program itu terdiri dari kegiatan apa saja. Kemudian masing-masing kegiatan itu penganggarnya berapa. Nah, ketika PPAS sudah jadi kami lampirkan PPAS itu di dalam surat edaran ke masing-masing OPD, kita minta OPD untuk menyusun Pra RKA mendasari PPAS yang kita lampirkan gitu. Dan itu tahapannya biasanya di bulan Mei, iya.</p> <p>Ketika Musrenbang Kecamatan sudah di sepakati hasilnya seperti apa, hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Artinya Musrenbang Kabupaten itu tidak semata-mata hanya dari usulan SKPD Kabupaten. Tapi, sudah apa ya, nggih, monggo, monggo, iya, oh, ya ke bidang mana? Oh, iya, iya, nggih, nggih, makasih ya Mbak, iya. Artinya yang dibahas di Musrenbang Kabupaten itu sudah tidak hanya usulan dari SKPD. Tapi, sudah me--, apa ya, enak, istilahnya itu, sudah mengambil dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan tadi. Bahkan ketika di sejak Musrenbang Kecamatan pun kita sudah menghimbau kepada kecamatan untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan. Jadi, pokok-pokok pikiran Dewan itu sudah diolah sejak di Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Artinya lagi sumber, sumber perencanaan penganggaran itu sudah dari desa,</p>	<p>Ketika okelah di akuntansi ndilalah, kebetulan juga lolos karena tidak cermat juga, nanti oleh pemeriksa BPK nanti yang akan (tertawa). Tapi, sebenarnya sebelum, nggih Mbak, sebelum itu, oh ya monggo Mbak, nih, makasih ya Mbak, iya, hati-hati ya. Nanti ketika belum sampai seharusnya belum, ketika belum sampai di tahapan pemeriksa kami harus, maksudnya harus mengevaluasi diri.</p> <p>itu pencermatannya oleh Bappeda. Kalau kami kemudian ngathukke dengan penjabaran di dalamnya. Misalnya di atas penulisannya dia keluarannya apa ya misalnya, misalnya pelatihan, latihan kerajinan bambu misalnya Deperindag ya. Tapi, di dalamnya dia tidak ada belanja material untuk pelaksanaan atau belanja bahan materi untuk pengadaan, pelatihan bambu. Pada waktu pelatihan kan mesti membutuhkan bahan-bahan.</p> <p>Materi mungkin apa, bambunya, mungkin peralatan pisaunya dan sebagainya. Loh, nanti kita konfirmasi, Njenengan atau SKPD mau mengadakan pelatihan kerajinan batu tapi kok di belanja Njenengan nggak mengadakan belanja materi, material bahan untuk pelatihan bambu. Nanti pada waktu pelatihan itu mau, mau namanya pelatihan kan pasti ada yang dikerjakan.</p> <p>Misalnya saja yang baru sekarang ini kami terima, itu ada surat dari Sekda Provinsi bahwa kami ternyata di APBD Provinsi DIY itu kami mendapatkan bantuan khusus keuangan BKK Bantuan Keuangan Khusus dan itu tercantum di APBD DIY artinya itu sudah legal untuk dilaksanakan. Nah, kami di APBD kami bantuan keuangan khusus itu belum tercantum. Nah, kami harus mencantumkan pendapatan dari BKK DIY itu dari sisi pendapatan dan dari sisi belanja kami harus menuangkan belanja, penganggaran belanjanya sesuai juknis yang</p>	<p>Jadi, dia harus SKPD, eselon 2 dengan perangkatnya itu punya kewenangan untuk menentukan prioritas SKPD-nya itu dari 1 sampai 15M tadi. Kalau ada yang tidak terdani dari 15 ke 20M seharusnya itu yang tidak prioritas begitu.</p> <p>Jadi, dia harus pandai-pandai mengelola uang anggaran, supaya yang terbiayai adalah yang prioritas begitu.</p> <p>Memang kalau dipertimbangkan dari sisi kemampuan keuangan daerah, kami di Kulon Progo itu kan termasuk daerah yang PAD-nya kecil. Sehingga kami memang harus pandai-pandai mengelola anggaran dimana yang dibiayai hanya yang prioritas.</p> <p>Dan itu kebutuhan yang mendasar dan itu ada, ada panduannya dari ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Yang diutamakan adalah yang memenuhi standar pelayanan minimal. Kemudian yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang memenuhi kebutuhan kan ada, ada kriterianya ya.</p> <p>Kebutuhan dasar, kebutuhan pendukung itu kan ada kriterianya saya lupa di peraturan mana.</p> <p>Itu sudah tidak ada missed, sudah tidak ada perbedaan antara pendampingan dari Bappeda dengan kami di BKAD. Artinya itu sudah nge-link, sistem itu sudah nge-link itu memang sangat, sangat membantu kami terutama ketika menghadapi SKPD yang tanda petik kadang-kadang dia punya mau.</p> <p>Ketika di, ketika ketemu dengan Bappeda anu, oke, oke, oke, nanti ketika mau dipindah ke Simda karena ada rentang waktu dia nyisipkan apa.</p> <p>Bisa jadi ketika di Bappeda dia koor</p>	<p>Iya.Jadi, sebenarnya itu lebih distresingkan oleh Bappeda. Jadi, output, outcome, benefit, impact.</p>	<p>Kita selalu mengacu mepedomani peraturan baik itu peraturan undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah bahkan bila sudah tertuang dalam peraturan daerah tentu itu menjadi panduan kami untuk menyusun penganggaran.</p> <p>Itu mengikuti prioritas dan tematik pembangunan daerah dan itu sudah terumuskan sejak dari penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemudian kebijakan umum anggaran.</p> <p>Sebelum berproses di, sebelum berproses di bidang saya. Jadi, penyusunan perencanaan penganggaran itu kan dari RKPD.</p> <p>Kemudian ke KUA PPAS. Kemudian ke APBD. Nah, ketika KUA PPAS, saya lupa bulan Mei minggu ke berapa tapi ini bulan Mei, bulan Mei, ada ketentuannya minggu ke berapa begitu. Ini kita ambil lampirannya, kita cuplik per OPD.</p> <p>Di dalam lampiran PPAS itu ada nomor program kegiatan kemudian sasaran, sasaran atau keluaran rupiah berapa. Nah, ini kita cuplik per SKPD, kita cuplik per SKPD. Kita sampaikan, kita sampaikan mendasari, mendasari cuplikan PPAS ini minta supaya SKPD menyusun Pra RKA. Artinya apa, tahapan kami adalah tahapan ketika KUA PPAS di</p>

<p>kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan dan SKPD dari 4 aspek itu. Nah, yang membahas di Musrenbang kabupaten itu, bukan hanya Musrenbang kabupaten ya, sejak di, sejak kecamatan Forum SKPD dan pokok-pokok pikiran dewan itu dibahas sudah dengan melibatkan masyarakat. Kami pasti mengundang unsur masyarakat ketika perencanaan. Meskipun ini nanti di Bapeda ya.</p> <p>Iya, lewat kulonprogrokab dan ini dengan sistem itu tadi jadi desa maupun kecamatan itu, oh, ya monggo, monggo, desa dan kecamatan bisa membuka sistem RencanaKu itu.</p> <p>Pra RKA, RKPD itu sudah, sudah tertuang di RencanaKu. Nah, nanti di RencanaKu, dipastikan lagi karena ini masih indikasi ya yang di, yang di RKPD kan masih indikasi. Nanti Rupiah keluaran outputnya akan ada semacam DES, DES atau percermatan dari Bapeda yang mencermati penjabaran kegiatan itu dibelanjakan untuk apa, sosialisasi misalnya sosialisasi untuk, itu untuk berapa orang seperti itu pencermatannya. Nanti untuk memperbaiki Pra RKA yang sudah di RencanaKu. Jadi, ketika ada di situ sudah menghadap sistem, oh, ini dicoret, oh, ini dikurangi, oh ini harus ada tambah keluaran apa misalnya sosialisasi. Tapi, kok tidak ada buku panduan sosialisasinya atau materinya apa sosialisasi kok tidak ada materinya. Nah, itu yang ditambahkan. Hal seperti-seperti itu berprosesnya di Bapeda, di Bapeda dengan menggunakan sistem RencanaKu. Nah, nanti ketika di APBD di saya itu sudah menggunakan sistem yang berbeda namanya Simda,</p>	<p>diterbitkan oleh SKPD DIY. Nah, kami sudah terima informasi BKK-nya ini untuk SKPD mana nilainya berapa, sasarannya apa, itu sudah. Tapi, kami masih menunggu juknis dari SKPD DIY. Nanti kalau dari juknis dari SKPD DIY sudah jelas, kami baru berani menuangkan di penjabaran belanjanya supaya nggak keliru.</p> <p>Nanti mau ngapain, nah, misalnya. Terus dijawab oh nggak ada, itu nanti kelompok sudah siap untuk berswadaya misalnya beliau oh ya sudah, kalau sudah dijalankan seperti itu artinya meskipun tidak ada belanja bahan materi, kegiatan tetap akan bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan antara dinas dengan kelompok sasaran misalnya begitu. Atau misalnya untuk kegiatan pengadaan bibit, pengadaan bibit ini volumenya sekian, tapi di dalam perincian tidak terlihat ini sasarannya siapa.</p> <p>Sasarannya misalnya petani kopi, pengadaan bibitnya kok pengadaan bibit misalnya padi, sasaran kelompoknya kok petani kopi ini yang benar, benar nggak? Oh, iya, mohon maaf perlu dikoreksi. Nah, pencermatan-pencermatan itu kami mencocokkannya di belanjanya, di belanja.</p> <p>Sejak perencanaan, nah, itu sudah kami lakukan sejak tahapan Musrenbang Desa. Jadi, Musrenbang Desa itu dilaksanakan dengan mendasari surat edaran dari TAPD yang mana di surat edaran TAPD itu sudah ada guidance tematiknya. Artinya desa akan menuangkan APBDes-nya itu sudah mengacu kepada tematik yang tematik prioritas pembangunan yang diangkat oleh bupati. Kemudian Musrenbnag Des ditindaklanjuti oleh Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan otomatis juga mengacu, mempedomani prioritas pembangunan bupati itu. Itu melibatkan semua unsur masyarakat ya.</p> <p>Jadi, ada eee unsur non-PNS-nya, unsur non-PNS itu kita bagi ke dalam beberapa sektor. Misalnya sektor kesehatan dan pendidikan.</p>	<p>pencermatannya hanya kepada optimalisasi penggunaan anggaran supaya tepat keluaran kemudian terhadap benefit dan impact-nya bisa tercapai. Kalau di kami lebih ke pemanfaatan sampai detail Rupiahnya.</p> <p>Nah, kembali ke prioritas dan tematik pembangunan daerah tadi. Jadi, sebuah SKPD kan dia punya koor ketugasannya, dimana koor ketugasannya yang menjadi pokok tupoksinya dia ya itu yang harus dia biayai.</p> <p>Ini pelaksanaannya mau bulan apa. Kalau bulan misalnya pengadaan fisik infrastruktur jalan, dia meskinnya menghindari ketika musim penghujan. Nah, hal-hal itu untuk optimalisasi, apa, hasil, benefit dan impact tadi jangan sampai misalnya di pertanian pengadaan bibit. Musim panennya sudah lewat baru dia menjadwalkan pengadaan bibit kan tidak relevan.</p> <p>Jadi, penuangan belanjanya harus lewat juknis kan. Nah, kalau sudah fix sesuai ketentuan juknis baru kami nanti mengadakan perubahan APBD, begitu. Mendahului perubahan karena kalau perubahan normatifnya kan nanti bulan Juli.</p>		<p>Bapeda itu sudah final, sudah fix baru kami menerbitkan surat edaran, bentuknya surat edaran dari TAPD.</p> <p>Kepala Kepala SKPD, memerintahkan Kepala SKPD supaya menyusun Pra RKA sesuai PPAS yang dicantumkan. Nah, itu dari sisi, apa ya, prosedur persuratan ya. Tapi, dari sisi, sistem kita sebenarnya di Kulon Progi punya RencanaKu. RencanaKu itu Rencana Kulon Progo itu sistem perencanaan dimana sejak tahapan RKPD itu sebenarnya sudah terlihat indikasi anggaran per program, per kegiatan sehingga di RencanaKu ini sudah, sudah ada Pra RKA. Jadi, Pra RKA, RKPD kalau kami istilahnya kemudian.</p> <p>Soalnya kalau tidak nanti ketika APBD sudah, sudah diundangkan menjadi Perda dan penjabarannya oleh Perbub, Peraturan Bupati nanti kita SPJ-nya kan pasti harus mengacu DPA itu.</p> <p>Artinya ada ketentuan di atasnya yang membutuhkan kami menyesuaikan dengan pergeseran mendahului perubahan. Misalnya ada juknis DAK, DAK-nya sudah tercantum di APBD, tapi ternyata secara juknis dari kementerian teknis mengubah. Jadi, yang sebelumnya belanja langsung ternyata diminta ke belanja tidak langsung. Nah, itu kami</p>
--	--	--	--	--

	<p>Njenengan pasti sudah familiar ya. iIya, yang dari BPKP. Nah, ini tahun, tahun ketiga atau tahun keempat ya. Kami mensinergikan dari RencanaKu ke Simda.</p> <p>Jadi, apa yang sudah berproses di RencanaKu itu nanti di, dikoneksikan ke Simda sehingga ketika kami mengawal Pra RKA, SKPD sesuai surat edaran yang saya sampaikan tadi.</p> <p>Ketika RencanaKu dan Simda sudah terkoneksi, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa diminimalisir. Mungkin itu ya, jadi, jadi kami memang penyusunan APBD itu memang tidak serta-merta berdiri sendiri karena sudah ada proses sebelumnya di Bapeda sejak dari RKPD dan KUA PPAS. Bahkan mungkin 30% atau 50% pekerjaan penyusunan APBD itu sudah tertuang di Bappeda. Tapi, tapi itu anu ya, belanjanya. Tapi, kalau di BKAD kami kan selain belanja juga ada pendapatan.</p> <p>Jadi, apa yang tertuang di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan itu nanti terakomodir juga di RencanaKu. Dia bisa ngecek usulan kecamatan dari Kecamatan A itu masuk nggak ya ketika mengusulkan perbaikan jalan dia bisa ngecek di eee di SKPDPU. Ruas jalanku muncul nggak ya dibangun nggak ya, itu bisa ngklik di RencanaKu, bisa ngecek, nggih. Tapi, yang, yang bisa diakses oleh publik itu memang RencanaKu.</p>	<p>Itu nanti ada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya IDI Ikatan Dokter, IBI Ikatan Bidan. Kemudian PGRI, kemudian kalau di pendidikan itu ada Persatuan Guru juga ada, apa, Perga Belajar Perwakilan Warga Belajar ini yang mengikuti kelompok Paket A, Paket B, Paket C itu. Nah, wakil-wakil masyarakat ini pasti kita undang di dalam proses perencanaan.</p> <p>Dengan kita mengundang masyarakat luas, adanya kita sudah--</p>			<p>juga harus menindaklanjuti. Nah, dasar kami adalah Permen Peraturan Menteri Teknis yang mengatur tentang juknis penggunaan DAK bidang tertentu sesuai teknisnya ke teknisan kementerian itu. Jadi, ketika ada peraturan-peraturan di atasnya yang mengamankan kami untuk menyesuaikan di APBD ya kita tindak lanjuti.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.</p>	<p>Eeeh sebenarnya bukan resisten permasalahannya. Tapi masalah ini sosialisasi. Kadang-kadang kalau ada aturan baru kemudian ternyata kita itu sudah biasanya, ha ha ha. Manajemen biasanya ada T orang jowo itu ha ha. Manajemen ada T itu ya masalah sosialisasi saja sebenarnya. Kalau memang ada aturan baru dan tersosialisasi dengan baik, saya kira akan patuh. Tapi karena biasanya sudah seperti ini, terus ada aturan baru kita tidak tahu, ya sudah celaka itu, he he he. Iya, celaka, betul. Konsekuensinya besar itu kemaren. Pengalaman kita 2017 itu gara-gara manajemen ada T biasanya seperti ini ternyata ada aturan baru itu kita jadi serapan DAK fisik paling rendah se-DIY, kita rugi 11 milyar. Itu kan itu, jadi biasanya DAK fisik itu per triwulan itu kita bisa mengajukan kontrak pencairan-kontrak pencairan, seperti itu ya, nah kemarin itu ada aturan baru, PMK 50, pengisian data kontrak paling lambat pada triwulan kedua, itu untuk sepanjang tahun. Artinya triwulan 3, triwulan 4 itu kita sudah tidak bisa lagi mengisi data kontrak. Lah karena biasanya itu boleh kita mengisi ternyata aplikasinya dikunci, baru ribut sih, lah tidak bisa diisi, ha ha...hangus. Jadi biasanya-biasanya itu kadang-kadang kalau, bukan resisten ya tapi memang sosialisasinya yang kurang puas. Ya memang kita jadi belajar dari situ tapi nilai atau harganya terlalu tinggi, kita belajar lagi, he he he.</p>	<p>Tidak ada. Tidak ada. Yang pasti, saya kira komunikasinya cukup baik. Jadi kalau ada pertentangan mbak Sri, mbak Eka kalau saya anggap bisa selesaikan di tingkat bidang begitu. Tidak sampai ke atas. Lebih sering tidak sampai ke atas. Tapi kalau memang ada hal-hal yang penting seperti plakantas sehingga kalau saya tidak bisa mengambil sikap/keputusan, baru ke atas.</p> <p>Eeeh, pertentangan tidak, kalau beda pendapat terhadap suatu hal sering. Tapi kadang-kadang misalnya saya dengan mbak Sri (kasubid belanja) satu SKPD. “ini kalau seperti ini boleh tidak” saya bilang “boleh”. Ternyata mbak Sri bilang “tidak”. Wah ini bagaimana ini, ha..ha. jadi memang itu harus didiskusikan.</p> <p>Antarbidang juga iya. Karena tugas-tugas di BKAD itu sifatnya mengalir/saling keterkaitan. Dari rencana penganggaran, perbendaharaan, nanti di apa sana Aklap (akuntansi dan pelaporan). Kadang-kadang kalau ada masalah itu “loh ini masalahnya dimana?” Tahu-tahu dilimpahkan kesini loh, “Itu masalahnya bukan masalah disini, bukan masalah keperbendaharaan, tapi masalah perencanaan”. Nah kita sampaikan ke sana. Kadang ketika simda trouble begini-begini, loh ini bukan masalah perbendaharaan tapi masalahnya pelaporan. Jadi kita antar ke sana. Nah ini yang sering jadi apa, ya bukan saling lempar, saling cuci tangan. Tapi identifikasi masalah ini yang keliru sehingga apa yang diberi tugas untuk menyelesaikan juga kadang-kadang salah. Misalnya ada pergeseran anggaran, nah ini teman-teman ini belum apa kadang-kadang salah memahami antara aliran kas (cash flow) dengan anggaran kas (cash budget). Itu kan satu hal yang berbeda tapi ketika ada pergeseran kas, ada surat dari SKPD itu dilimpahkan ke sini. Ini yang diminta itu bukan masalah cash flow-nya kita untuk itu walaupun di sana itu mengambil keputusan apakah menyetujui pergeseran anggaran kas itu setuju atau tidak harus ada pertimbangan dari perbendaharaan,</p>	<p>Terus kemudian ya saya kira secara umum budaya kerja birokrasi itu mungkin secara nasional juga berubah ya. Artinya kalau dulu kan kita ini dianggap sebagai rent seeker (pemburu rente) untuk keuntungan pribadi, he..he. Nah sekarang itu kan apa, cenderung bahwa kewenangan tugas-tugas yang diberikan, keuangan yang diberikan itu eeee, dianggap sebagai peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan diri sendiri begitu. Tapi sekarang itu dengan saya kira dengan perkembangan hukum dan sebagainya kemudian aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan daerah itu saya kira budaya rent seeker itu sudah pemburu rente itu apa ..sudah ter apa, terkikislah. Soalnya bagi kita itu melaksanakan tugas yang betul-betul sebagai apa abdi masyarakat, abdi negara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya itu selalu ditekankan. Terutama pak Hasto ini di setiap apel itu selalu memberikan bahwa kita ini pelayan masyarakat, artinya bahwa sebenarnya dengan kita menjadi pelayan, dengan kita menjadi PNS birokrasi di pemerintah daerah itu justru ada peluang yang lebih bagi kita untuk berbuat baik kepada masyarakat. Nah orang kan sering keliru, dulu ketika jadi PNS, pegawai di pemda semacam ini, ee mungkin terlalu sibuk dengan tugas-tugas dia tidak menempatkan diri untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tapi begitu pensiun malah ingin jadi ketua RT, ingin jadi pengurus yayasan, he..he..he dan sebagainya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Begitu kan. Ya dulu kemana? Iya to..ha..ha, ketika jadi PNS ya begitu tidak memberikan, justru dia ketika jadi PNS kan punya kewenangan melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Tapi hi..hi pas pensiun baru mulai terpikirkan jadi pengurus yayasan, jadi ketua RT , kepala RW, begitu kan. Nah ini yang ditekankan seperti itu. Justru mumpung masih aktif/masih ada waktunya untuk berbuat baik, kesempatan punya kewenangan, ya itu hilang begitu.</p> <p>Eehh... waduh kalau seingat itu saya kurang</p>	<p>Tidak. Kita team work. Jadi eeeh kebetulan memang orangnya terbatas ya, kita itu kurang. Jadi kalau ketugasan modelnya terus egosentris seperti itu tidak jalan. Tidak bisa. Jadi kalau anu ya harus bersama-sama. Jadi saling mengisi. Misalnya di tempat mbak Ita itu stafnya cuma dua, harusnya kan empat. Kurang. Nah kekurangannya ini kadang-kadang diambil alih tugas mbak Ariani (staf) dari seksi pengelolaan kas.</p> <p>Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau masalah pencairan itu sudah diatur dalam sisdu di perbup. Jadi antara mbak Sri, saya, dan pak Kepala itu tidak boleh semuanya bersama-sama meninggalkan kantor. Jadi kalau pak Kepala pergi, mbak Sri pergi, saya tinggal di kantor. Atau kalau saya, pak Kepala pergi, mbak Sri harus tinggal di kantor. Tidak bisa kosong. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak ada yang berangkat sama-sama. Ada ketentuan soalnya. Di SPM, Standar Pelayanan Minimal kita tentang pencairan itu 2 x 24 jam harus selesai.</p> <p>Eehhh, kita memang ada aturan kebersamaan yang lebih internal, itu diatur, walaupun apa, semacam konvensi ya, aturan tidak tertulis, ini sekretariat yang atur, paling paham. Artinya jangankan yang mempunyai hajat, kalau yang punya hajat ya kita ikut budayanya lah, misalnya pernikahan atau khitanan anaknya itu kadang-kadang yang diundang ya kita datang ke sana. Kemudian yang sakit, tapi syaratnya sakitnya lebih dari dua hari dan diopname di rumah sakit. Ya itu ada konvensi-konvensi semacam itu untuk kebersamaan tadi.</p>	<p>Pasti tercapai. Karena memang ada satu atau dua orang dalam jam kerja itu kadang-kadang suka pomat-pamit gitu kan. Anu saya pagi itu pamit, ini dulu, antar anak dulu lah, ada urusan apa dulu lah, itu. Tapi nanti mereka akan anu sendiri, memperhitungkan sendiri kompensasinya ke jam kerja. Nanti pulang kerjanya agak lambat, digeser waktunya. Biasanya pulangannya agak sore. Kalau tugas-tugas tertentu, mereka harus lembur ya tetap dilaksanakan. Dulu pernah mereka pulang malam jam 11 malam, jam 2 malam, demi menyelesaikan tugas. Padahal ibu-ibu semua, ha,ha, pulang jam 2. Suaminya datang menyusul. Kan tidak berani pulang sendiri. Demi menyelesaikan tugas. Artinya kalau memang itu harus selesai besok, memang harus selesai, ya apapun yang terjadi pasti diupayakan untuk diselesaikan.</p> <p>Inggih. Ya. Ini yang contoh gampang saja. Memang awal 2018 kemaren ada pergantian pimpinan. Ya kita itu kan apel pagi lah yang gampang. Dulu ketika pimpinan lama, apel pagi itu rajin. Dia lebih menekankan untuk apel dan sebagainya. Kemudian ganti pimpinan, pimpinan baru dia tidak urus apel tapi tetap apel, ha..ha..ha iya. Jadi sudah kebiasaannya. Jadi saya kira teman-teman ini sudah lah bahwa loyalitas itu kepada organisasi bukan kepada orang/pimpinan. Wah ini ngomong ada saya atau tidak ada saya ha.ha.ha. Cuma</p>
---------------------------------------	---	--	---	---	---

	<p>kan begitu. Tapi kan itu urusan anggaran itu kan kalau cash budget itu dia rencanakan bulan ini sekian, bulan ini sekian. Itu kan urusannya perencanaan. Cuma ketika dia menggeser itu boleh atau tidak ya kita lihat, wah ini kira-kira nanti pemasukan ketersediaan dananya ke siapa begitu. Kalau itu memang signifikan mempengaruhi cash flow pemda karena ada inflow dan casflow, ada kas masuk, kas keluar, kalau nanti ternyata kas masuknya tidak bisa mencukupi kas keluarnya kan, oh jangan tetap jangan digeser. Jadi masalahnya sesuai dengan identifikasi ketugasan.</p> <p>Biasanya berjenjang. Pasti berjenjang. Misalkan kalau ada masalah ya pasti mbak Sri ke saya dulu. Saya kepala bidang tidak mungkin langsung ke kepala. Kecuali kalau saya tidak berada di tempat. Kadang-kadang tapi nanti pasti diberitahu. Tadi dipanggil Bapak terkait ini, keputusannya seperti ini. Seringnya berjenjang. Paling tidak bersama-sama begitu. Nanti staf yang ada masalah sama mas Hartono ini ada masalah eh penerbitan SKPP, ini kok beda antara tanggal SK dengan tanggal yang dipakai yang mana gitu. Teknis-teknisnya begitu.</p> <p>Inggih. Inisiatif tetap terbatas. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Inisiatif harus dikomunikasikan secara berjenjang. Misalnya yang tadi itu antara tanggal SK dengan tanggal ini beda, ini yang mau dipakai yang mana. Tidak bisa memutuskan sendiri, ya sudah pakai tanggal ini. Jadi kita komunikasikan pakai tanggal SK, kemudian SKPP-nya ada jeda satu bulan, artinya dia tidak terbayar di bulan yang bersangkutan loh ini. Nah semacam itu, kita harus. Intinya anu apa banyak kepala lebih baik dari satu kepala, ha..ha..ha, yang memikirkan. Masalah-masalah siapa pun boleh mengusulkan boleh, berinisiatif tapi tetap dalam pengambilan keputusan tetap di tangan pimpinan.</p> <p>Maksudnya bentuknya apa pengorbanannya itu? Eeeh biasanya jarang ya situasi seperti itu terjadi, artinya bahwa kita mengambil keputusan yang berisiko yang demi</p>	<p>tahu, hu..hu. Saya baru setahun disini. Jadi yang dulu seperti apa, kami tidak bisa membandingkan. Tapi eee ya memang kalau bicara budayanya orang Yogya, orang Kulonprogo, memang apa ya, mereka itu cenderung patuh kok terhadap aturan. Jarang yang terlalu berdiskresi atau terlalu apa. Inovatif bisa tapi inovatif yang dalam koridor aturan, bukan inovatif yang sifatnya mensiasati aturan.</p>	<p>kalau ada hal-hal tertentu pengambilan keputusan kalau ada masalah ya tetap. Cuma pelayanan SP2D, masalah kas ini tetap harus challenge. Cuma mbak Sri itu bagaimana dia mensutradarai, men-direct itu ha.ha jelas direktor kan. Teman-temannya di seksi belanja mbak Ita mensutradarai teman-temannya di Seksi Pengelolaan Kas. Saya mensutradarai mereka tetapi secara alir tugas pekerjaan tetap mengalir.</p> <p>Nah itu kadang-kadang saya salah mengambil keputusan atau apa, diprotes. Di sini sudah gak tertutup, seharusnya begini-begini. Tapi saya kan punya pertimbangan sendiri. Eh begini mbak, nah ini akhimya jadi diskusi untuk menemukan yang terbaik tapi mereka artinya berani untuk diskusilah. Tidak terus yes man, atau ha ha ha. Saya pun dengan pak kepala kalau ini seperti ini keliru, eh kita sowan. Kita datang ke sana. Pak newun sewu, apakah tidak lebih baik ini seperti ini.</p> <p>Maksudnya kesetiaan kepada pimpinan dan organisasi mana yang lebih kuat? Tetap organisasi. Mereka itu berani melawan kok, ha ha ha...iya. Jadi kalau pimpinan bersalah mereka tetap berani. Tetap berani. Tidak ada yang berbakti pada pimpinan. Itu tidak ada. Yang dulu memang ada. Kalau sama pimpinan pokoknya takut. Sekarang sudah, tahun ini sudah gak ada.</p>
--	---	--	---

		<p>organisasi itu jarang situasi seperti itu terjadi. Biasanya apa ya yang menguntungkan organisasi itu pasti sesuai dengan aturan itu kalau kita mengambil keputusan yang tidak sesuai aturan itu pasti itu tidak sejalan dengan kepentingan organisasi.</p>			<p>Iya. Ehhh tidak sih, justru ee pimpinan yang baru itu mengakomodir aspirasi dari staf-stafnya. Jadi kalau yang dulu kan mungkin kebijakan itu ada yang diputuskan oleh pimpinan, misalnya seperti apa pegawai yang pensiun itu biar diberikan sekedar tanda terimakasih/kenang-kenangan dari teman. Kalau dulu kan tidak mau, pimpinan yang dulu tidak mau seperti itu. Itu diterima. Kemudian yang tadi yang apel kemudian dipotong insentif itu, itu sebenarnya anak buah ini tidak mau, tapi pimpinan memutuskan kalau kamu tidak apel dipotong sehari Rp50.000, dari insentif itu. Akhirnya ada yang tidak apel 4 kali ya Rp200.000, he he. Tidak apel 3 kali Rp150.000 dipotong walaupun potongannya itu untuk kas kebersamaan tapi sebenarnya anak buah ini tidak suka itu. Kemaren minta supaya kebijakan itu ditinjau.</p> <p>Eehh seperti itu biasanya di anu, eee ya bukannya kita ini cari aman gitu loh, tapi yang seperti itu selalu diberikan landasan. Jadi harus secara kronologi itu lengkap, jadi ketika eksekusi terhadap satu hal tidak sesuai dengan aturannya harus ada kronologinya kemudian keputusan itu tidak diambil sebagai keputusan pejabat/pribadi tetapi itu diambil sebagai keputusan organisasi. Iya, misalnya apa ya contohnya mungkin yang</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>agak menyimpang begitu nah dulu ketika ini umpama ketika ada ini KLB Antrax, pernah dengar kan ada KLB Antrax? Nah itu kan sebenarnya, eee boleh tidak ini mengambil belanja tidak terduga untuk KLB Antrax. Nah ini diceritakan jadi untuk seperti itu harus diseting apa surat menyuratnya, dokumen yang agak seso ono opopo itu, ceritanya jelas, bisa dilacak. Kita minta misalnya Dinas Pertanian melalui surat, kemudian ada SK Bupati yang menyatakan bahwa ini KLB. Kemudian proses-proses seperti itu, harus ada nota dinas kita, harus ada persetujuan. Artinya itu harus terdokumentasi agar semuanya aman begitu. Bukan proses langsung setuju, tanda tangan pencairan tanpa dasar tahap-tahap itu. Jadi bagaimana itu, apa istilahnya itu, itu didorong sebagai suatu, itu tadi keputusan organisasi, bukan keputusan pejabat. Jadi ada kronologinya, oh dulu pernah ada surat dari Dinas Pertanian seperti ini, oh sudah ada kajian menyatakan ini KLB, kasusnya memang benar ini. Jadi tahapan-tahapan itu dibuat, walaupun itu belum ada aturan SOP-nya. Tapi biar suatu saat diperiksa itu ada ceritanya itu, jelas tidak orang terus lempar , uuh tidak tahu itu urusan pertanian, bukan seperti itu tapi sama-sama dibuat agar menjadi suatu kronologi yang jelas yang ada bukti-bukti dokumennya. Jadi intinya itu.</p>
--	--	--	--	--

<p>9 : Drs. Sunarya, M.M.</p>	<p>Tapi kami bisa menemukan bukti bahwa ada yang belum dipajakin maka kami akan menerbitkan namanya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Nah itu kami tagih. Semacam itu. Kami ada upaya semacam itu termasuk setiap tahun kami mengadakan sosialisasi sehingga meskipun mereka sudah tahu, ya perlu kita ingatkan terus. Tidak hanya pajak yang saya sebutkan tadi termasuk pajak restoran, pajak air, dan sebagainya.</p> <p>Ohh ada. Ada. Pamvlet kecil-kecil itu loh. Cara menghitung pajak air tanah, cara menghitung pajak reklame, cara menghitung pajak ada semua. Itu sosialisasi kami langsung ke wajib pajak. Ada lagi kami sosialisasi melalui media masa biasanya kerjasama dengan radio lokal. Kemudian sosialisasi dengan memasang iklan layanan publik itu loh mas, kayak billboard-billboard itu loh kan. Ada “bayarlah pajak”, “pembangunan ini berkat pajak anda”.</p> <p>Ohh. Semestinya ada. Teman-teman saya biasanya dalam hal SPj ya, nanti ada SPj itu kan harus ada dokumen bukti kegiatannya. Itu ada. Kalau masalah materi biasanya apa sebelum sosialisasi sudah dibuatkan materi. Kalau sosialisasi itu ada narasumbernya, biasanya narasumbernya mesti diminta. Kalau pun bukan sosialisasi pada wajib pajak retribusi misalnya ke mas media tadi apa, radio lokal tadi, jadi sudah kami bicarakan. Artinya temanya itu sosialisasi itu ini sekarang trus nanti bagaimana sih tema bunyinya apa to, ah itu sudah sebelum keluar. Tidak hanya kami pasrah kepada teman-teman radio lokal, pokoknya ini terserah, gak. Sudah dibicarakan nanti apa yang akan ditampilkan. Itu sudah.</p>	<p>Kalau yang sifatnya klasikal (kelas, pake kelas) itu PBB misalnya, PBB itu 12 kecamatan mas. Dua belas kecamatan sekali. Kemudian kalau penyebaran pamvlet-pamvlet gitu itu gak dihitung bulanan atau kadang-kadang pokoknya misalnya kita mau mengadakan/menengok pendataan baru wajib pajak itu kami kasih misalnya wajib pajak baru yang rumah makan, misalnya kita tidak tahu ada rumah makan baru itu kami berikan pamvletnya, ada kewajiban ini..ini. Seperti itu. Jadi itu tidak ada ikatan berapa kali setahun, tidak ada. Bahkan yang sudah lama pun, sekali bilang lupa kami kasihkan lagi kalau lupa.</p> <p>Oh tidak, kadang-kadang justru kalau misalnya oh ini salah, kami kan sebagai koordinator itu di bidang pendapatan. Setiap bulan SKPD pengelola pendapatan itu berkewajiban menyetorkan SPj fungsional pendapatan ke kami. Di sini ada namanya verifikasi atau validasi. Itu kami dan teman-teman ada membentuk tim untuk itu. Sehingga jika terjadi kesalahan, oh ini bukti pembayaran sekian, tertulisnya sekian, pokoknya ada kesalahan. Itu secara teori/secara SOP-nya ya kami harus mengembalikan lewat berjenjang. Oh ini kami membuat surat dari atasan kami kepala. Kepala nanti dikirim ke kepala pelaksana. Di sini kan juga membutuhkan waktu sehari-hari. Mending dengan keberadaan alat mesin yang canggih. Ini tolong dibetulkan ini. Nah back-up data kemudian menarik laporan itu ke sana. Mungkin tidak sampai sehari sudah jadi. Memang kemudian itu SOP, tapi itu lebih cepat lebih baik. Seperti itu. Daripada kami harus melalui antarkepala itu kan jadi lama. Iya kalau kepala yang di sana itu ada di tempat. Kalau tidak ada ya kami harus menunggu disposisi dan sebagainya, jadi lama. Jadi meskipun yang direvisi oleh SKPD sana dan itu harus tanda tangan kepala, tapi kan lebih cepat, prosedurnya nanti tetap resmi. Seperti itu. Tanda tangannya harus cepat.</p> <p>Ehhhh, kami akan tetap melakukan</p>	<p>Sebenarnya perda kami, baik retribusi maupun pajak daerah itu sudah terselesaikan dengan baik, artinya masyarakat itu tahu ketika melakukan ini harus ada kewajiban ini. itu sudah tahu. Perkaranya di tingkat lapangan. Kemudian justru malah masyarakat sejauh mungkin kalau bisa menghindar misalnya, banyak hal contoh-contoh semacam itu misalnya, eee apa, parkir. Oh, ditengok-tengok gak ada petugas parkir, ya sudah gak bayar atau mungkin dari sisi pajak mineral atau golongan C, karena keterbatasan pengawasan mungkin ada penambang yang menjadi wajib pajak kemudian tidak melaporkan produksi yang seharusnya dilaporkan. Itu kan artinya ada saja budaya masyarakat yang semacam itu tapi kalau dari kami, saya tidak pernah eeh apa melihat teman-teman kami ketika bekerja di lapangan tentu berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.</p> <p>Tapi kalau dari sisi pendapatan daerah lain-lainnya, ya mungkin ada celah karena kami menerima beberapa pendapatan yang memang belum ada, istilahnya belum ada rumahnya sehingga nantinya masuk di lain-lain pendapatan yang sah dalam item kalau dulu namanya pendapatan insidental sehingga tidak ada klasifikasi ini masuk pendapatan mana itu berada. Atau kadang-kadang yang ada suatu pendapatan yang kita tidak tahu siapa yang transfer. Itu ada. Itu mungkin kesalahan dari pengirim/pentransfer maksudnya untuk bayar pajak atau bayar apa, tapi karena dalam berita itu tidak dicantumkan, hanya nama si ini, dari bank ini, dikirim sekian rupiah, tidak ada berita/keterangan ini untuk bayar ini, sehingga kami kesulitan. Masuklah dalam tempat lain-lain pendapatan yang sah. Seperti itu.</p>		<p>Diatur mas. Jadi begini loh mas. Untuk pungutan retribusi mengenai telekomunikasi seperti yang sebut tadi berdasarkan peraturan daerah yang kemudian keluarlah surat ketetapan, namanya surat ketetapan retribusi daerah. Ah semacam itu mas. Itu angkanya pasti. Semua diatur. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi mas, yang namanya memungut uang rakyat dalam bentuk pajak dan retribusi itu harus ada aturan dari peraturan daerah.</p> <p>Apa ya. Nah begini mas. Di dalam perda tentang pajak daerah no.6 tahun 2011 yang sekarang direvisi tapi belum jadi misalnya tidak ada yang mengatur masalah keringanan pajak. Tetapi di perbup, nah berarti kan diskresi ini. Perbup mengatur masalah keringanan pajak dengan dalih bahwa sesuai dengan ketentuan umum perpajakan pusat kemudian PP 55, itu pemerintah boleh kok memberi/mengatur masalah keringanan. Itu kan artinya diskresi ada. Seperti itu salah satu contohnya termasuk retribusi menara telekomunikasi. Diskresinya ya memberikan keringanan itu dengan peraturan bupati kemudian diatur oleh peraturan dinas kominfo.</p> <p>Kami ada kegiatan itu memang dan itu di program kami ada kegiatan itu untuk mengevaluasi dari masing-masing SKPD bahwa</p>
-------------------------------	--	---	--	--	---

	<p>Ehhh, kalau di website-nya BKAD mestinya ada. Cuma itu apakah sudah diperbaharui atau belum, baru tahun ini. Itu dikelola oleh sekretariat BKAD. Kalau di sekretariat kan informasinya kan banyak, ya tentang pendapatan, kebijakan, dan macam-macam.</p> <p>Kalau langsung, tidak. Sebab begini mas, bahwa APBD, APBD loh, buku APBD yang di sana terletak target-target pendapatan dan pengeluaran itu adalah konsumsi publik. Memang kemudian tidak dilaporkan kemana, cuman di dalam APBD kan ada setiap tahun ada ringkasan APBD, kemudian dipublikasikan di mas media. Nah tapi bukan kami. Itu penda secara keseluruhan bersama-sama. Semacam itu. Kalau masalah apakah itu transparan, siapa pun boleh kok mas. Memang kami tidak menempelkan “ini loh targetnya sekian”. Tidak. Tapi siapa pun untuk kebutuhan mereka baik itu untuk penelitian, baik itu untuk memuaskan seseorang butuh informasi, ya tidak apa-apa. Ya kita kasih di situ. Ya begitu mas. Biasanya yang datang mahasiswa. “Pak realisasinya sudah mencapai angka berapa sekarang”. Itu pertanyaan biasa itu. Tidak ada yang ditutupi kok mas.</p> <p>Iya. Web-nya. Ya website-nya. Yang namanya APBD, angka-angka itu juga dikonsul dulu karena itu sudah, kalau sudah jadi perda APBD, ya itu sudah milik semuanya. Semua orang boleh melihat. Seperti itu.</p>	<p>sebagaimana prosedur. Jadi ehhh contohnya yang umum terkait semua masyarakat yang kena pajak bumi dan bangunan kan, kami menetapkan dengan SPT, surat tagihan pajak. Kalau tidak, kalau sampai batas waktu tidak, biasanya petugas kami akan secara intens akan mendatangi kepada wajib pajak kenapa tidak membayar dan sebagainya. Biasanya kalau masyarakat pada umumnya itu membayar pajaknya bagus, tidak terjadi masalah. Tunggakan itu hanya terjadi karena mungkin tidak ada di tempat orangnya, banyak punya tanah tapi di luar daerah, atau mungkin justru malah ehhh apa perusahaan-perusahaan yang kemudian, ehh apa beberapa perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa apa semacam merasa keberatan sehingga mengajukan keringanan dan sebagainya semacam itu.</p> <p>Ehhh, gini mas. Jadi kami mencatat target itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu ya. Menganalisisnya, sehingga tercantumlah dalam APBD itu target. Pajak ini sekian, pajak ini sekian, retribusi ini sekian. Itu sudah dengan hitungan. Kalau kemudian target itu sampai waktu tertentu dievaluasi, kami ada namanya rapat koordinasi dan evaluasi realisasi pendapatan, mas. Itu mengapa tidak tercapai, sampai bulan ini kok tidak capai sesuai dengan rencana. Ha.. kami gali. Oh ternyata, misalnya ya, misalnya pajak galian C tidak tercapai ini kenapa. Maka kita lihat bahwa oh ini terjadi karena ada pelaporan yang tidak sesuai, maka kami gali kesana. Kami gali kenapa mereka tidak membayar pajak.</p> <p>Kalau di SKPD BKAD ada bendahara penerima, tapi itu di bawah sekretaris. Di bidang pendapatan namanya itu verifikasi atas SPj fungsional pendapatan. Jadi SKPD misalnya dari dinas perdagangan, itu pendapatannya masuk ke sini. Nanti kan SPj fungsional itu nanti sebagai bahan rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan tadi itu loh.</p> <p>Ya. Misalnya begini. Ah salah satu kasusnya terhadap manipulasi pendapatan tadi. Di</p>			<p>pendapatan misalnya retribusi pasar dari Dinas Perdagangan, retribusi IMB dari Dinas PU, dan seterusnya. Fungsinya hanya untuk memantau apakah ini sudah sesuai dengan rencana target atau belum. Maka kalau belum maka kita bersama-sama akan menelaah ke dalam, ada apa kok tidak tercapai. Mestinya mereka menyampaikan data dan analisa dan alasan kenapa tidak tercapai. Bahkan lebih dari target pun akan menjadi analisa kenapa lebih dari target, ada apa, sehingga ini untuk mengambil kebijakan manfaat ke depan.</p>
--	---	---	--	--	--

	<p>dalam peraturan bupati disampaikan bahwa SKPD pengelola pendapatan harus menyampaikan SPj fungsional ke BKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Iya toh. Maka kami, kami kalau sampai tanggal hampir sebelum tanggal 10, maka akan kami hubungi secara personal. Seperti itu. Itu akan memenuhi prosedur tadi kan. Setelah itu kami adakan verifikasi sehingga nanti minggu ketiga kami harus adakan rapat evaluasi tadi itu. Nah rapat evaluasi itu nanti ada misalhnya kalau tidak tercapai ada apa dan sebagainya. Nah itu perlu kami sampaikan dalam rapat sehingga memang seperti itu. Itu kalau dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja kami juga punya kegiatan sesuai dengan DPA.</p> <p>Wah iya. Itu nanti yang namanya peraturan, apalagi peraturan bupati nanti produknya bagian hukum. Kalau peraturan kepala dinas itu juga nanti harus didiskusikan. Artinya harus ada semacam rapat pembahasan yang melibatkan bagian hukum sebagai ahli hukumnya di tingkat kabupaten. Bukan melulu kami sendiri. Mereka mas kalau itu secara teknis mereka. Kami ikut di dalam perdiskusian itu. Kalau semua pengelola retribusi ke sini ya kami tidak kuat karena ada banyak.</p> <p>Saya pikir masyarakat itu sudah cukup sadar pajak. Sudah cukup sadar, apalagi sudah lama. Sudah sekian puluh tahun ada seperti itu. Jadi justru kalau masyarakat itu misalnya di triwulan pertama belum mendapatkan surat tagihan pajak PBB misalnya dari berjenjang ya, sampai pak Dukuh itu menanyakan “kok kami belum dapat yo?” Semacam itu mas. Biasanya kalau masyarakat malah semacam itu.</p>			
--	--	--	--	--

11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>Akhirnya kita bisanya pendampingan. Jadi, setiap saat walaupun nggak ada namanya judul kegiatan pendampingan akuntansi, kami melakukan itu. Setiap saat mereka bisa datang kemari, kerja di sini sambil kami dampingi kalau nggak tahu langsung tanya kita ajarin, oh, ini jurnalnya ini, apa, seperti itu. Kemudian kita kasih pemahaman ya akhirnya harapan kita taruhlah mereka mengerjakan karena berrobot ya, karena disuruh. Tetapi, karena berulang jadi hafal dengan sendiri da jadi bisa. Itu teknik kami di sini gitu dan sekarang teman-teman di SKPD bagus, mereka bisa ngerjain pakai Simda. Walaupun mungkin kalau diibaratnya diuji teori akuntansinya nggak terlalu.</p> <p>Tapi, kan, kalau di lapangan dalam dunia kerja itu lebih ke aplikasinya kan, applicable-nya di lapangan ya. Itu mereka lumayan bisa gitu. Jadi, kalau misalnya tahu dapat contoh oh, saya dapat hibah nih ambulance dari Pusat gitu ya, dari Kementerian. Mereka tahu kalau itu harus dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional, mereka sudah tahu gitu. Terus sudah tahu kalau aset tetap itu harus disusut tahu. Karena ya itu tadi, pertama kita kasih tahu, oh, ini ada aset tetap disusut klik ini, klik ini. Tapi, lama-lama mereka karena sudah tahu nah mereka tahu. Memang ketika ada pergantian personel atau kemarin kan SKPD-nya rombak-rombak nih.</p> <p>Iya, kemudian kita kan kalau forum-forum begitu misalnya forum koordinasi dengan SKPD, oh, hari ini kita maunya koordinasi sama PPK misalnya.</p> <p>Ya, sudah kita undang semua PPK nanti kita berikan hal-hal apa yang</p>	<p>Seluruh SKPD, kita punya eee anggaran misalnya untuk rapat-rapat koordinasi. Nah, dengan anggaran yang terbatas saya bisanya tri wulan 1 kali gitu kan. Kita kumpul semua petugas SKPD nah kita materi kita berikan apa yang kita rasa urgent gitu. Misalnya sekarang oh lagi urgent misalnya penata usahaan persediaan gitu ya. Nah, pada moment itu kita ngobrolin persediaan, dari A sampai Z pelan-pelan, harapannya mereka dengar dulu kemudian sedikit-sedikit paham. Kalau ada permasalahan apa, nah itu nanti sharing-nya di sana. Jadi, benar-benar kita mengefektifkan forum-forum kayak gitu karena cuma itu yang kita punya gitu.</p> <p>Setiap saat, kita, mungkin istilahnya cuma kegiatan pendampingan gitu ya, tapi sebenarnya kita membuka pintu setiap saat monggo ke sini kalau ada kesulitan gitu. Boleh lewat telepon ataupun mau WA, mau email, boleh</p> <p>He'e, di barang saja gitu kan, kita sampaikan. Misalnya kalau kita punya forum nggih rapat semua bidang gitu ya. Nah, itu kita sampaikan, halo bidang anggaran ini ada kesalahan penganggaran loh kemarin 2017 misalnya di SKPD A harusnya ini ngak belanja modal tapi barang jasa karena, nah, teorinya kan kita sampaikan. Dan itu pembelajaran kita juga ke teman-teman di anggaran gitu.</p> <p>Dan itu juga dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Biasanyaa yang kejadian seperti itu. Terus kalau misalnya lagi nyusun-nyusun anggaran, di sana kan yang tugas ya anggaran, tugas. Nah, terus ada nih SKPD ngajuin anggaran untuk apa gitu ya, dia mungkin ragu, dia langsung konfirmasi ke aset boleh, ke sini boleh misalnya ini ada kegiatan ini loh, nganggarkan ini, rekeningnya yang pas apa ya. Kalau dia pasang rekening ini boleh nggak terus kita diskusi ke teman-teman anggaran, wah nggak, tanya dulu itu barangnya mau ke mana. Oh, diserahkan ke pihak ketiga ke kelompok tani, oh, berarti nggak boleh di belanja modal, harus di belanja barang. Karena niat awalnya memang</p>	<p>Iya, itu Permendagri 64 tapi Permendagri 64 itu kan terlalu, apa ya istilahnya, mungkin kalau dipahami oleh teman-teman pelaksana akuntansi di sini istilahnya Petugas Akuntansi di SKPD ada 45 SKPD tahun ini 2017, saya bicara 2017 ya.</p> <p>Oke, pasti sangat kesulitan sehingga kebijakan kami adalah menurunkannya menjadi Peraturan Bupati. Nanti bisa dilihat di JDIH, dulu berawal dari Nomor 24 tahun 2014.</p> <p>Maka kita bikin Peraturan Bupati. Tadi saya bilang di JDIH ada, 24 2014 perubahannya terakhir 43 2000-- saya lupa, 2016 kalau nggak salah ya, kalau nggak '15, he'e, 2000--, 2016. Terus nanti terakhir lagi kita disempurnakan terutama di akun persediaan itu di 62 2017 yang 43 tadi 2016 nanti bisa dilihat di JDIH. Kalau bukan di JDIH biasanya di uplod-nya 2 Perbub-nya dan lampirannya, yang dicermati lampirannya saja gitu.</p>	<p>He'e, jadi nggak harus mereka kerja di sini atau buka di sini. Jadi, di SKPD-nya ada, bisa gitu loh, dan nggak harus dengan laptop misalnya dengan komputer PC biasa bisa gitu. Hanya saja kalau ada trouble kesulitan ya mereka komunikasi, gitu.</p> <p>He'e, jadi, ya enak saja gitu kadang saya cuma tinggal telepon, ayo tempatmu belum ngumpul ini misalnya gitu kan, besok ya gitu, iya, atau nggak dibantu, saya telepon. Kadang kita, nggak pakai, seringnya kita jarang rapat ya.</p> <p>Nah, kalau sehari-hari itu ya sudah main telepon, telepon, mohon bantuan ini, mohon bantuan ini dan mereka iya, biasa.</p> <p>Nah, itu kan lebih enak jalannya, gitu. Terus hal-hal yang krusial kita sampaikan. Pokoknya sharing informasi di internal SKPD saya, saya juga bilang, halo bidang pajak, bidang pendapatan, bidang perben, kalau ada apa-apa saya diceritain. Jadi, saya tahu gitu kan karena informasi itu nanti harus saya sajikan di laporan keuangan Pemda.</p>	<p>Tapi, walaupun kebijakan kita sudah berbau teknis jadi bisa dikatakan ada unsur teknisnya juga. Harapan kita lebih applicable, mudah dipahami karena terus terang petugas akuntansi semua SKPD kan beragam, tidak semua orang Jurusan Akuntansi, tidak semua sarjana akuntansi. Kadang yang sarjana akuntansi atau jurusan akuntansi pun memahami akuntansi keuangan daerah itu sulit karena banyak hal-hal khusus, tidak semata-mata seperti yang kita terima di bangku kuliah dulu gitu.</p> <p>Nah, itu kita pendekatan dulu, ini masalahnya apa gitu to. Kalau nggak bisa ke sini dikerjakan di sini gitu. Ketika nanti dia oh saya masalahnya ini-ini-ini-ini misal oh saya belum selesai ini karena mungkin data dari pengurus barang SKPD-nya belum masuk.</p>
----------------------------------	--	---	---	--	--

	<p>kita butuhkan. Misalnya kalau akhir tahun gitu ya, ya kita bilang ayo akhir tahun kami dibantu untuk mengkondisikan SKPD-nya, koordinasi semua lini ya kan, baik barang maupun keuangan karena kita mau menyusun laporan keuangan seperti itu. Terus nanti kadang di forum, kalau kita kesulitan lagi saya lari ke atasan dong.</p> <p>Nah, itu habis pelatihan admin ketika ada ilmu baru nanti dia juga share ke teman-teman oh sekarang kalau ini, seperti ini gitu, sebenarnya harusnya begini, oh, ini nggak boleh pakai akun ini karena apa.</p> <p>Ada hal baru yang memang kita harus share ke SKPD, admin saya pulang dari BPKP.</p> <p>Karena habis ikut pelatihan, wah ini Simda 2018 ini ada hal baru nih gitu to.</p> <p>Tadi kan saya punya forum koordinasi. Nah, pada moment itu kita share apa yang baru, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya seperti itu. Paling nggak kita sosialisasi dulu, kita minta SKPD coba.</p> <p>Oke, transparan itu ketika semua informasi disajikan secara wajar didukung bukti yang sah dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, menurut saya itu transparan. Jadi, tidak ada hal yang disembunyikan.</p> <p>Contoh kalau ingin diketahui berapa realisasi pendapatan dan belanja pada periode tertentu misalnya tahun 2016 gitu. Berarti kan harus nek ringkasannya mungkin bisa di upload.</p>	<p>diserahkan ke kelompok. Nah, akhirnya di sana ketika Des anggaran itu memakai informasi dari kita seperti itu. Dan itu sudah, sudah sering terjadi. Jadi, kita kasih catatannya apa, kita sampaikan gitu.</p> <p>Iya. Kadang kan saya punya anu, teman-teman sini ada grup WA yang isinya semua petugas akuntansi dan khusus buat kerjaan.</p> <p>Jarang ada orang ngobrol, nah, kalau misalnya gini, saya bilang ke teman admin bilangin ke SKPD-nya misalnya hari ini mereka harus input saldo awal, jurnalnya ini sama ini, debet ini, kredit ini. Nah, itu lewat WA sudah share dicoba bisa gitu kan. Tapi, ketika ada yang sulit monggo ke sini, nah, kayak gitu, seringnya kayak gitu.</p> <p>Ada, he'e, iya, rekonsiliasi. Kita juga minta ke SKPD lakukan hal yang sama. Kami saja di level SKPKD di level Pemda kita rekon, apa lagi mereka di SKPD.</p> <p>Kalau ada yang nggak cocok admin saya nangkap. Oh, ini kok ditutup selisih gitu ya, ya sudah.</p> <p>He'e, nah, itu kan ya karena masing-masing tadi itu komitmen, Mas. Komitmen itu dari atas sampai bawah. Atas itu ketika kita di bawah ada kesulitan ya namanya SDM mungkin ada yang bandel, ada yang gimana, kan kita ngejanya ke atas eh tolong dibina seperti itu. Kemudian misalnya dari BKD Kepegawaian BKPP dia punya mata anggaran untuk diklat, pelatihan, nah dia koordinasi dengan kita. Ayo, kita punya dana sekian mau kirim ke diklatnya Kemendagri atau ke Diklatnya PKP siapa nih yang mau disertakan ya kita kirim orang yang belum pernah diklat. Harapannya kan yo walaupun nggak maksimal tapi paling nggak ada input-lah.</p> <p>He'e, yang dia punya sub lagi, fungsi akuntansi atau bahasanya sederhana kita petugas akuntansi itu. Nah, jadi teman-teman</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>Nah, tapi kita selalu mempersilakan misalnya ada peneliti atau mahasiswa atau pihak manapun, LSM pernah, mau wartawan mau lihat monggo.</p> <p>Tapi, biasanya setiap ada yang membutuhkan entah Dewan entah apa, bisa ke sini karena ketika sudah ditetapkan Perda, Perbub itu kan publik ya.</p> <p>Ini loh eee laporan kami, ya kan, nanti dia yang upload kayak gitu. Tapi, kalau yang di media itu biasanya kalau kita sudah auditif itu kita ekspose di media.</p> <p>Iya. Jadi, nanti di Agustus pertengahan kami ekspos di media massa di website tapi kalau di website ya itu ringkasannya saja karena nggak bisa semua.</p> <p>Karena Perbub-nya kan cuma bla-bla pasal-pasal. Nah, setelah turun sampai ke Perbub biasanya kita sosialisasi, sosialisasi. Kemudian kita kan pakai mediana aplikasinya Simda.</p> <p>Itu ada caranya, nah itu kita share di WA, ayo input, caranya begini, buka ini, buka ini, itu sudah lengkap di WA, dicoba dululah gitu. Ketika bisa ya sudah nggak usah ke sini tapi kalau ada kesulitan yuk ke sini.</p> <p>Sudah lama. Karena lebih efektif begitu soalnya kalau kumpul-kumpul itu nek rapat okelah, segala waktu iya.</p> <p>Kalau nek forum rapat kan kadang saya ngundang hari ini ada yang nggak bisa.</p> <p>Lebih efektif kalau pakai media sosial. Terus teman-teman di aset</p>	<p>di sini, saya terbatas bertujuh sama saya untuk 45 SKPD, 21 Puskesmas, 100 eh 300 sekolahan. Nah, itu cara kita seperti itu misalnya kayak Dindik, Dindik punya 300 sekolahan, saya kan nggak mungkin.</p> <p>300, akhirnya kita minta tolong Dindik, lakukanlah apa yang kami lakukan kepada SKPD. Jadi, kayak berjenjang, mereka paham, jadi mereka yang turun ke sekolah, mereka yang bina sekolah. Ada aplikasi segala macam di Dindik. Nah, itu karena dia tahu yang dilakukan setelah dia lihat kita melakukan apa ke SKPD. Dinas Kesehatan dia punya 21 puskesmas, saya minta, saya kalau ke sana sendiri nggak, nggak, nggak cukup nih waktu dan tenaga, uang juga nggak ada. Tolong sebagai koordinator puskesmas lakukan hal yang sama, iya, mereka koordinasi. Nah, tetapi, ketika mereka akan terjun ke sub-subnya itu mereka koordinasi dengan kita. Contoh kita sekarang kita ke Dinkes nih, saya minta data kas dong, data kas itu seharusnya seperti ini gitu ya, harus misalnya pendapatan dipisah per jenis pendapatan dan segala macamnya, kita kasih tahu. Akhirnya mereka turun ke puskesmas dengan membawa form yang sama misalnya. Nah, itu karena mereka tahu kebutuhannya dia juga to. Nah, akhirnya di puskesmas ngerjain tapi kan nggak melulu ke kami walaupun tetap kami tetap kami membuka pintu untuk puskesmas. Kadang mereka juga ada yang langsung kemari gitu kan sama saja kayak gitu. Terus aset, aset kan ada bidang aset.</p> <p>Saya nggak mungkin dong ke pengurus barang, terlalu banyak 45 SKPD, pengurus barangnya. Akhirnya teman-teman di aset bantu kami, mereka koordinasi untuk aset, untuk persediaan. Nanti hasilnya di transfer ke kita angkanya. Jadi, saya nggak pernah ngitung-ngitung aset saya nggak pernah. Karena dibantu oleh teman-teman di aset, seperti itu. Dan di sana juga ada Simda, karena hari gini kalau nggak dibantu Simda repot ya.</p> <p>Akhirnya kita bantu koordinasi, saya</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>juga sama.</p> <p>Di bidang sana ke pengurus barangnya juga. Di-share oke hari ini update Sim baru, nah itu di share, copy ini, ganti ini konviknya dan semacam itu, juga sama</p> <p>Entah besok mau pakai Harjo atau Radar Jogja kayak gitu-gitu, ada, itu tugasnya di sini. Nanti kita kerjasama sama salah satu media massa ya sesuai kemampuan kita kan karena beda kalau KR mesti beda harga sama Harjo gitu, data ekspose. Tapi, itu cuma itu kalau sudah auditif karena memang amanat peraturannya seperti itu begitu auditif diekspos, gitu.</p> <p>Kalau APBD biasanya semua SKPD 1 set punya.</p> <p>He'e, satu set punya gitu, jadi, ya gitu kalau membutuhkan bisa langsung datang ke sini gitu boleh dilihat.</p> <p>Nah, takutnya suatu saat ada ekspose ganda lah itu makanya sama Kominfo kan ada beberapa informasi yang memang tidak bisa di ekspose ketika masih sedang dalam proses. Tapi, ketika misalnya selesai auditif besok Mei jadi Perda/Perbub wah boleh itu diekspos.</p> <p>He'e, jadi, bahkan BPKP Jogja pun itu tidak boleh karena itu dari BPKP Jakarta. Jadi, Simda itu, tapi kita nggak perlu khawatir ketika misalnya ada aturan baru wah ini gimana nih mengakomidinya gitu kan karena setiap ada Permendagri tau PMK yang baru itu BPKP Pusat memang sudah langsung dia update.</p>	<p>ngomong sama bidang aset, tolong dong pengurus barang SKPD A dikondisikan karena datanya dibutuhkan oleh petugas akuntansi. Nah, saya ke yang PPK SKPD tadi sebagai atasannya. Saya juga menyampaikan hal yang sama tolong dikoordinir internal Njenengan antara petugas akuntansi dan barang karena datanya harus sama seperti itu dan kita ada misalnya kayak forum-forum koordinasi sampai ke PPK SKPD tadi yang bosnya.</p> <p>Nah, kita sampaikan ke mereka tapi biasanya yang menyampaikan atasan, kepala BKAD gitu ya karena levelnya biar lebih tinggi gitu to. Bahwa di sebuah SKPD koordinator ada di tangan dia gitu. Maka minta tolong kita ajarin, dulu awalnya gitu, kita ajarin, koordinasikan antara pengurus barang semua bendahara, penerimaan-pengeluaran, dan petugas akuntansi agar semua informasi itu mengalir, segala informasi mengalir. Contoh kalau ada belanja yang sudah terealisasi dilaporkanlah oleh bendahara pengeluaran ke petugas akuntansi ya walaupun dokumennya tetap dimulai dari pengeluaran tapi informasinya mengalir ke akuntansi. Karena akuntansi harus menjumlah segala macam. Nah, kalau cuma orang-orang ini yang koordinasi kan nggak maksimal akhirnya kita minta PPK SKPD-nya itu yang harusnya jadi koordinator. Dia harus mengkondisikan di SKPD-nya masing-masing, kita kasih tahu seperti itu dan alhamdulillah lumayan. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa kita yang bersangkutan dulu, petugas yang kita kejar, ada masalah apa, kalau sampai dia yang bilang oh ya saya punya masalah ini dan tidak bisa kita bantu ternyata kok mentok nih nggak bisa, kita lari ke atasnya. Ini ada kondisi seperti ini karena ini internal Njenengan tolong diselesaikan, seperti itu gitu. Dan syukurnya jalan sih sampai hari ini, nggak pernah ada yang ibaratnya nggak terselesaikan itu nggak ada.</p> <p>Iya, kan, kepala BKAD, kan ada grup kepala-kepala. Nah, nanti komunikasinya kepala, kepala memerintahkan. Misalnya saya sudah nagih, Pak kok masuk-masuk, saya sudah</p>			
--	---	--	--	--	--

	<p>Oh, kalau yang aset persediaan kita bikin sendiri.</p> <p>Terus kalau di Dindik, Dindik itu dia punya. Jadi, karena di sana terlalu banyak to sekolahnya hampir 300 ya dia bangun sistem APBS namanya, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Harapannya outputnya kan bisa mmebantu masuk ke dalam Simda.</p>	<p>nagih. Nah, nanti ditolongin eee, kepala sama kepala gitu kan. Anu loh, kami butuh data ini, kok teman-teman Njenengan kok belum, oh ya nanti dia di internal mengokondisikan sehingga nyuruh ke bawahannya dikoordinasikan selesai, angkanya masuk ke saya, seperti itu.</p> <p>Terus misalnya nek kita BKAD itu kan link kerjasamanya sama Inspektorat nah kadang kita juga koordinasi sama Inspektorat gitu kan, itu gitu loh, sudah biasa gitu.</p>			
--	---	--	--	--	--

15 : Nasip, S.E.	<p>Ini kemarin baru kita mengirimkan teman-teman untuk pendampingan untuk pelaksanaan Simda Pendapatan.</p> <p>Nggih, dengan itu nanti wah semua sudah, sudah masuk data ke situ. Jadi, kalau kita mau melayani Inspektorat, mau melayani BPK sudah tidak kesulitan lagi karena semua data ada di situ.</p>	<p>Kalau yang seperti waris, hibah itu kan nah memang itu tidak ada transaksi ya tidak begitu bermasalah, yang transaksi ini yang ini yang melibatkan perantara, nah ini. Tapi, eee dari kemarin-kemarin sehingga kami tidak langsung begitu percaya mereka menyampaikan bahwa Pak ini loh harga transaksi yang sebenarnya. Ternyata setelah kita cek di lapangan, nggih, itu eee bilang ke mereka eee katakan lu sudah benar, baru kemudian setelah kita panggil yang kedua dengan kita mempunyai bukti, mereka mau mengakui bahwa memang transaksinya seperti itu. Jadi, kan memang kecenderungan dari ransaksi yang melibatkan tiap itu cenderung untuk, untuk memberikan informasi yang tidak valid.</p> <p>Oh, gini, kita biasanya kalau ada permasalahan gitu, kita koordinasi dengan baik yang ada di sub bidang termasuk juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kita kembali lagi ke lapangan mencari informasi yang sebenarnya, sebenar-benarnya eee sampai dengan mendapatkan nilai yang hampir mendekati. Kemudian dari eee pihak pemohon juga katakanlah kita ajak bicara kemudian nanti disepakati memang nilai yang aslinya seperti, seperti itu. Katakanlah sebetulnya di, di sana kan eee ada sudah ada nilai nggih kita temukan, katakanlah antara 300 sampai 400. Ya, kemudian eee si pemohon tadi kan katakanlah kok cuma eee 250 padahal kan nilai minimalnya 300, ya ini kita ya itu tadi kita bentuk kemudian di lapangan. Nah, memang ternyata dalam hal kondisi itu letaknya di sana tetapi karena ada (06:34) mereka berada di (06:37) sehingga nilainya memang tidak bisa sampai dengan 300. Sehingga nanti kita yo anulah, apa, agak mendekati gitu dan biasanya mereka mau menerima.</p> <p>Mungkin bidang pajak ini kan, akan mengambil kebijakan yang Pak Kepala Dinas juga harus tahu sehingga eee tadi sih memang tidak ada agenda secara tersendiri tapi memang ada kendala dari bidang pajak untuk</p>	<p>Ya, sebetulnya kan kalau menurut saya yang namanya eee, ketika sedang hal pengelolaan pajak ini eee apa yang terdata kemudian eee kita terima itu yo istilahnya ada semacam eee pertimbangan gitu istilahnya dapat di, dipertanggungjawabkan. Eee mungkin perlu saya sampaikan yang namanya pajak kan tidak bisa 100% akan ditarik semua, tapi kan paling tidak kan ada, ada perhitungannya kejelasannya berapa itu yang sudah masuk kemudian berapa yang eee menjadi masih menjadi piutang. Itu yang, yang paling pentingkan di situ. Kemudian eee semua yang berkaitan dengan transparan pajak ini tentunya terkelola dengan baik, terbukukan dengan baik dan untuk eee kegiatan itu ke arah sana maka ini nanti kita akan menerapkan Simda Pedapatan.</p> <p>Eee kalau kita eee berkaitan dengan transparansi sebenarnya kita juga sudah menyampaikan eee kepada katakanlah kalau pemberitahuan kita sampai di tingkat kecamatan bahwa kita punya piutang pajak sekian. Kemudian untuk yang belum tertagih sekian itu kita sampaikan. Karena kita mau tidak mau harus minta bantuan baik dengan Pak Camat maupun Pak Kasdes karena biasanya kan masalah terjadi di tingkat padukuhan. Sehingga perlu kita sampaikan ini setiap katakanlah mungkin paling lama itu kalau yang saya alami nggih, misalnya di kecamatan itu setiap (21:34) itu nanti ada, ada evaluasi dan monitoring kaitannya dengan masalah pajak itu. Sehingga mereka selalu diberikan laporan bahwa di desa ini masih ada piutang tunggakan sekian-sekain.</p> <p>Ya, katakanlah kalau dikatakan saya butuh berapa lama eee saya tidak, tidak bisa menjawab kepastiannya gitu ya. Tapi, dengan beriringnya proses kemudian juga saya selalu eee, apa, mengalami kemudian saya mau mencari informasi yang sering terjadi sehingga saya juga tidak malu untuk bertanya sehingga saya melihatannya ya dalam waktu 1 bulan melihatannya saya sudah, sudah, sudah bisa untuk menyesuaikan. Cuma mungkin</p>	<p>Ya, saya dan teman-teman itu selalu menyampaikan bahwa kita bekerja atas namanya bidang bukan atas nama Subdit. Karena semuanya berkaitan.</p> <p>Baik dari pendataan, pendaftaran, kemudian dari penatapan, dari dan yang terakhirnya di penagihan itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus selalu koordinasi.</p> <p>Iya, simultan, jadi monggo karena ini merupakan suatu kerja kita bareng, kita tidak boleh terkotak-kotak. Artinya mana yang memang membutuhkan kita bantu. Kan bicara kita pada tahun ini memang begitu besar untuk dituntut kaitannya dengan masalah pendapatan. Kemudian juga kita merekrut tenaga harian lepas.</p>	<p>Iya, untuk lebih bisa mengoptimalkan karena selama ini kan eee mereka kan cuma mengirimkan laporan itu kan masih banyak yang lebih sesuai dengan hasil aslinya. Ya, sekarang kita menurunkan teman-teman tenaga harian lepas sebagai satgas untuk melakukan pendataan.</p> <p>Ya, sebetulnya eee dari BPK kemarin juga sudah ada pemeriksaan cuma kemarin yang di, yang ditanyakan BPK ini kaitannya dengan masalah yang eee pembebasan di bandara itu. Tapi, karena sudah ada surat yang pertanda tangan dari Kementerian Keuangan, yang kedua dari Gubernur, yang ketiga dari SK Bupati sehingga itu bisa menjawab bagi BPK. Kemudian yang kaitannya dengan eee, kaitannya dengan masalah eee (07:50) tadi sebetulnya kita eee sudah ada itu harga yang, yang istilahnya di pasaran nggih. Tapi, karena yang si pasarnya itu kan merupakan variasi dan juga memang kondisi di lapangan itu bisa mendukung kelihatannya sampai saat ini eee bisa diterima. Tapi--</p> <p>Nggih, tapi, harapan kami nanti tetap kita memang ada semacam eee nilai, nilai indikasi di lapangan atau zona nilai tanah tadi yang nanti segera bisa terbit dan bisa di SK-kan sehingga kita lebih kuat. Jadi, kita tidak mengada-ada.</p>
------------------	---	---	--	--	--

	<p>disampaikan ke Pak Kepala yang misalnya di bidang ada beberapa hal termasuk permasalahan yang sudah bisa diurai. Sehingga kita tinggal melaksanakannya.</p> <p>Memang kalau nek dipikir ya itu kan bisa terjadi kongkalingkong nggih.</p> <p>Ya, tapi, harapan kami eee memang itu apa adanya dan kami berharap tidak terjadi seperti itu</p> <p>Eee, memang anu, kita kadang sebelum melakukan kebijakan itu kadang kan kita supaya lebih aman.</p> <p>Itu kan konsultasi dulu ke Inspektorat.</p> <p>Nggih, seperti apa to kalau, kalau seperti ini itu nanti kiras-kira menyalahi nggak kan gitu, kita biasanya seperti arahnya ke sana dulu. Nah, kalau memang mereka itu meng-iya-kan dan bisa menerima ya kita melanjutkan kebijakan seperti itu. Tapi kalau mereka kok yo mengindikasikan oh nggak bisa itu nanti sudah anu, nyalahin ya itu kita yo -</p>	<p>kalau ada eee permasalahan yang timbul kemudian juga katakanlah masalah yang sudah ada dan juga karakter-karakter dari anu, saya belum bisa kalau semua.</p>		
--	--	---	--	--

Lampiran 18: Framework Matrix Wawancara tentang Proses Sosialisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	S1. Tanya Jawab Pejabat Baru dan Saling Membantu Pekerjaan	S2. Wacana Pembuatan Kebijakan Pendapatan Daerah	S3. Belajar Bareng Permasalahan Keuangan	S4. Perbincangan Data Aset Tetap yang Amburadul
5 : Alif Romdhoni	<p>Alif Romdhoni</p> <p>Karena memang kalau berbicara itu kan sangat tidak efisien ya.. dengan Bimtek, jadi kita itu kan memang beberapa ya.. yang membidangi itu ya cuma satu subjek saja, jadi memang akhirnya ya lebih kita intens walaupun di tempat perencanaan pajak itu, ya.. komunikasi dengan mereka, saya nggak tahu ya.. di luar yang kemudian formal. Jadi komunikasi-komunikasi yang informal, karena saya yakin pasti yang namanya hubungan komunikasi itu kan tidak semuanya harus berupa formal, ada DPA ada anggaran segala macam, tapi ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya informal nah.. itu ditempuh atau tidak, berjalan atau tidak memang sementara kan ada di temen saya yang.. yang melakukannya di.., kami juga tidak bisa tapi sepengetahuan kami ketika mereka me.. menyusun ada kok bukunya saya pernah melihat itu hasil kajian-kajian seperti itu jadi ya.. mungkin lebih ke nganu kalau saya melihat eranya ya.. saat ini memang harus melibatkan itu. Karena kan kalau birokrat itu kan jelas praktisi ya.. dia tinggal praktik ibaratnya, kalau akademisi ya.. jelas dia memang menggodok mengolah teori kan. Kadang kan teori di praktikkan sulit ada, kadang yang praktik itu secara teori ya.. kadang-kadang seperti itu jadi apapun itu kan, kadang kan kalau kita diberi kan ini kan secara teori ya, tapi kalau sudah bicara praktik di lapangan kan akan banyak faktor yang kemudian menentukan, sosial, kultural belum lagi kalau kemudian berbicara politik. Itu yang kadang kala, kalau akademisi kan sangat bebas dari itu, intervensi secara itu kan jelas mereka nggak mungkin, tentukan daerah AA ya udah selesai bagi mereka, dia tidak akan melihat bahwa ini sebenarnya seperti apa, kondisi sosial masyarakatnya seperti apa, semuanya seperti apa mereka nggak akan. Nah.. kita butuh sesuatu yang kemudian okey.. ini jelas putih ibaratnya, ha..ini ada hitamnya lha.. kita harus melihatnya kan di.. di.. yang kemudian bisa</p>	<p>Alif Romdhoni</p> <p>Jadi.. di sini kita sudah punya data dulu, datanya seperti ini secara.. data dasarnya dat.. data kasarnya ya.. data kasar ini kan kemudian kita serahkan ke teman-teman di sana untuk dilakukan pengkajian kemudian mereka turun ke lapangan, tentu saja sebelumnya ada semacam forum dengan kita ya.. untuk mempertajam data yang sudah ada ini, kemudian setelah kita sudah fanstomin mereka coba ke lapangan, kemudian mereka mencoba memaparkan hasilnya dengan berbagai pertimbangan tentu saja, dan tidak mutlak juga gitu kita hanya menggunakan hanya hanya itu, kita juga melihat kalau Bupati kan punya kebijakan ya, kalau kemudian hanya melihat pada posisinya mereka yang kemudian hanya berfikir oh... segini, tidak berpikir politis dalam tanda kutip karena ini kan juga ada juga kebijakan-kebijakan Bupati. Nah.. kemudian itulah yang kemudian kita formulasikan untuk kemudian kita tentukan untuk menjadi seperti apa. Jadi tidak mungkin tidak setiap A dari mereka menjadi A+, bisa A- artinya kita juga harus melihat kondisi riil, karena kita tidak mutlak semata-mata menggunakan data itu, tetapi itu menjadi salah satu apa terkait dengan bantuan, ya kita tetep nantikan outputnya kan kita tetep masih menggodok secara internal</p> <p>Alif Romdhoni Jadi.. kalau PBB itu kan da.. zona siaga per meter untuk menentukan, ini contoh kecilnya ya.. untuk PBB itu, jadi ketika menentukan suatu obyek pajak, untuk kemudian dia mendapatkan nilai tertentu katakanlah NJOP, dan NPOP kemudian muncul nanti di slip merah yang kemudian per meter berapa, itu kan ada zonasinya, a.. zona itu kan selain memperhitungkan katakanlah secara letak geografis kedekatan dengan fasilitas sarana umum, sarana publik, akses dan segala macam nah itu kan digunakan. Nah.. data kita yang sementara inikan mungkin masih banyak ya, karena kan kita warisan data 2014 dari... KPP... e.. pajak</p>		

	<p>berpijak di dua.. dua kaki ibaratnya, bukan kemudian area abu-abu itu memperbolehkan yang hitam dan memperbolehkan.. atau kemudian harus yang putih, tapi lebih karena kebijakan daerah itu kan nanti yang akan menanggung kan daerah. Ketika katakanlah di periksa BPK kenapa menentukan seperti ini, kan yang akan punya anu kan bukan akademisi tadi tapi yang sudah diambil hasil kebijakan oleh Bupati misalnya, oh.. berarti sudah menggunakan ini, ini kajiannya oh seperti ini, paling kan nantikan melihatnya kan secara oh ini administrasinya kurang, oh.. ini terlalu paling hanya seperti itu karena ini yang harus dipertanggung jawabkan dan mutlak Bupati adalah sebagai istilahnya bapaknya masyarakat dan mereka kan untuk mengambil kebijakan kan tidak arsip langsung secara teoritis seperti itu gambaran secara umum</p>	<p>pratama kan waktu itu pelimpahan PBB itu kan kita 2014 ya.. PBB di limpahkan ke kita, nah.. kita dasarnya dari situ jadi memang untuk memperbaiki blist yang ada itu memang ini juga berproses, jadi memang kalau kemudian bertanya apakah sudah benar khusus yang PBB apakah sudah bisa dikategorikan datanya itu sudah.. fiks fem sesuai, ya.. berapa persen masih belum, karena kita berproses di situ, ya contohnya itu, jadi untuk menentukan nilai obyek pajak yang ada di dalam</p> <p>Alif Romdhoni</p> <p>e.. yaitu berproses secara alami tentu saja ya.., artinya apa yang mereka anukan tetap kita juga.. juga harus.. karena kita tidak mungkin tergantung secara mutlak juga dengan mereka ketika kita memang harus berjalan kemudian tidak ada support secara anggaran misalnya, untung saja ini masih teranggarkan, misalnya ini tidak dianggarkan mau tidak mau kan kita tetep harus kerja, tanpa harus ada mereka cuma kan permasalahannya kan kalau saya melihat mungkin kalau secara regulasi memang yang bisa dipertanggung jawabkan ketika ada akademisi, dalam tanda kutip entah itu bisa dikatakan sebuah e... konsekuensi dari Undang-undang, kan sekarang kan semua peraturan perundang-undang itu kan harus ada.. naskah naskah akademik, baik yang sifatnya undang-undang, kita yang Perda aja juga harus ada naskah akademik ketika berbicara akademik ini kan memang domainnya kan akademisi yang secara anunya ada di kampus ya.., termasuk kita ya.. mau tidak mau, tetapi kalau kemudian nanti itu tidak tersedia anggaran ya mau tidak mau juga, kita juga nggak harus wes.. semampu kita untuk itu. Jadi kalau kemudian berbicara nya transfer pasti ada transfer learning, cuma kalau ini saya melihatnya lebih karena e.. eranya ya.. konsekuensi sebuah regulasi yang memang harus ada secara umum harus ada sebuah e.. proses di mereka ya.. kemudian kita tadi saya katakan kita kaji lagi yang kemudian menjadi formasi kebijakan</p>		
--	---	---	--	--

<p>8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.</p>	<p>Eee nggih banyak saya kira ya. Cuman memang saya kurang tahu apa maksudnya dulu itu pernah ada dibuat SK tentang pola jabatan. Tapi ya akhirnya kan ada jabatan itu kan dirumpun-rumpunkan, rumoun jabatan ini yang bidang keuangan, ekonomi, sosial ini. Tapi sekarang ini anu e tidak dipatuhi artinya orang itu bisa kemana saja gitu lo. Apakah ini pilihan pendekatan bahwa seorang pamong itu dia generalis gitu ya harus tahu segala macam. Artinya memang tidak dipilih suatu pola pembinaan yang spesialistik. Tapi memang saya lihat nek Kulon Progo termasuk yang generalistik. Habis dari Kabid apa mutasi atau Kabid bidlat di BKPP bisa jadi camat. Hehehe. Gitu.</p> <p>Iya. Dulu justru saya ini akuntansi kok neng bidang sosial, kesasar ini. Ada orang kesasar ini. Hehehe. Tapi ya nggak papa artinya kita cukup banyak belajar banyak hal terutama program-program penanggulangan kemiskinan nggih kita belajar di sana, program-program penanggulangan kemiskinan, kemudian apa ee kemaren tentang transaksi non tunai itu malah kita mulai dari bansosnya. Baru kita sekarang di Pemda secara keseluruhan mulai melaksanakan transaksi non tunai. Padahal di sana sudah lebih dulu dilakukan untuk bantuan sosial. Nggih.</p> <p>Ee tetapi memang ini anu ya, ee tiap pimpinan itu punya style sendiri. Dulu Pak Bupati yang dulu Pak Toyo Sadipo itu beliau lumayan lebih nganu, lebih ke rumpun dan pola itu tadi. Tapi kalau Pak Hasto sekarang ini memang dia pendekatannya generalistik, general tadi. Ee beberapa, tapi ya sama sebenarnya beberapa kali itu kelihatannya juga salah menempatkan orang gitu lo. Walaupun memang kalau tanpa panduan ini saya menilai yang Pak Hasto sekarang ini ee keterjadiannya lebih sering hehe menempatkan orang lebih sering.</p> <p>Ndak ndak. Ndak setiap bulan sih. Paling satu tahun itu tiga kali apa ya. Dua kali tiga kali. Nggih. Jadi awal tahun itu mesti ada pelantikan, tengah tahun pasti, nanti akhir</p>		<p>Emerha e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya? Nur Hadiyanto Ya.. Emerha e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak? Nur Hadiyanto o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh? Emerha Awal-awal SIMDA.. Nur Hadiyanto Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh? Bu sri Nggeh, dari anggaran dulu Nur Hadiyanto Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA Bu sri Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih Nur Hadiyanto Dilatih, tahun piro itu mbak Bu sri 2011 Nur Hadiyanto 2011 nggeh Bu sri Maksude le.. nopo.. le.. mulai.... Nur Hadiyanto Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011 Emerha Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu? Nur Hadiyanto</p>
---------------------------------------	--	--	--

	<p>tahun juga.</p> <p>Kadang-kadang seperti itu. Cuman memang mungkin beliau juga apa kalau anu kita berpikir positif itu ya pengayaanlah istilahnya. Hehe. Pengayaan.</p> <p>Iya artinya bahwa itu memperluas wawasan Mas. Jadi lebih ke memperluas wawasan, jadi bukan intensifikasi tapi ekstensifikasi kalau saya melihat itu. Walaupun saya akuntansi katakanlah dulu tapi dulu pertama kali ditugaskan di bidang sosial juga kok merasa seperti ini, mosok akuntansi tugase di bidang sosial, gak cocok ini. Dan memang ya bingung gitu karena sama sekali blank to gak punya gambaran di dinas sosial tugasnya seperti apa gitu. Tapi ya insyaallah dengan belajar dan memang butuh waktu satu tahun penuh saya</p> <p>Heém. Ya wes makanya dalam satu tahun itu anu agak grubak grubuk gitu lo, gak pahamlah apa yang dilakukan tapi jalan. Tapi memang kadang-kadang selain itu saya melihat ada penambahan manajemen resiko yang dilakukan oleh Pak Bupati. Bukannya saya sok apa gimana ya. Karena waktu saya dipindah 2013-2014 itu kan focus pemeriksaan BPK itu dia mencermati bansos to, dia mencermati bansos, dia mencermati hiba, hibah dan bansos. Nah itu yang, nah saya merasa oh saya dipindah kesitu itu supaya memperbaiki sistem penyaluran bansos yang dulu masih diberikan secara tunai, dicairkan oleh bendahara, uangnya diamplopi, kemudian diberikan kepada yang penerima itu, saya melihat supaya itu dirubah gitu dengan mungkin latar belakang saya akuntansi, saya bisa melihat itu. Itu dirubah sehingga yang mengenalkan konsep penyaluran bansos melalui perbankan itu waktu itu kami di sana itu. Jadi saya rubah sistemnya bahwa bansos itu tidak lagi dicairkan oleh bendahara, gak boleh bendahara pegang uang tunai apalagi uang bantuan itu gak boleh. Jadi harus dengan model rekening, berapapun dia menerima bantuan, kita kerjasama dengan bank dibukakan rekening cepat, diberikan uangnya</p>	
	<p>Ya.. dulu sebelum itu manual Bu sri Dulu pake e.. Nur Hadiyanto Apa namanya dulu..? Bu sri SIPK.. Nur Hadiyanto SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat Emerha Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan? Nur Hadiyanto Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondy yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondy yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang.. Bu sri Kalo update kan Cuma via.. Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto</p>	

	<p>cepat, termasuk nanti kita mintai pertanggungjawaban penggunaan dana seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah 2013-2014 meskipun bansos diuplek-uplek, dicermati, dibongkar-bongkar, dikorek-korek gitu semuanya aman. Karena sudah sistem itu, sudah kita sistem lewat bank gitu ya sudah.</p> <p>Iya ada hikmahnya. Dan itu kayaknya disengaja karena waktu saya dipanggil fit and proper tes sebelum mutasi jabatan itu diberitahukan itu gitu. Ini anda dipindah di dinas sosial gitu. nah, nanti tengok tahun depan itu tema pemeriksaan BPK itu tentang hibah dan bansos, pokoknya diusahakan piye carane supaya dibuat aman. Artinya semuanya, kadang-kadang beliau menempatkan orang itu ada hadis (28:13) dan tujuan semacam itu. Jadi tidak semata-mata latar belakang Pendidikan kemudian tapi memang sesuai kebutuhan. Ya saya menilainya itu manajemen resiko tadi. Ini ketika apa ya, yang Pol PP katakanlah kita kan butuh tenaga Pol PP luar biasa untuk bandara ini. Yang ditempatkan disitu yang senior Pak Sumiran, kenapa gak Pak Duwana Heru. Padahal Pak Duwana Heru sudah sekretaris di situ, udah Plt lama di situ tapi kan dia junior mungkin dipandang ya mungkin bagus koordinasi dengan Polres dengan . . . (28:55). Tapi dari sisi disegani di masyarakat nek cah enom ini kan masyarakat kadang, wah cah cilik wingi sore ngeyel gitu. pasang yang senior, hehe kan masyarakat jadi uh rodo hormatlah gitu.</p> <p>Ditakuti. Profilnya memang Pak Sumiran rodo koboi jadi uwong rodo takut gitu kan. Kadang-kadang saya melihatnya seperti itu gitu. jadi manajemen resiko. Jadi mana-mana yang tempat-tempatnya rodo beresiko ditempatkan yang kira-kira bisa.</p> <p>Supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik itu. Ya kadang-kadang jeleknya gitu nek terlalu cepet yo, kadang-kadang kan dipandang wah di sini actionnya nggak cepat, nggak menyelesaikan gitu. Pindah lagi. Kadang-kadang ada yang empat bulan gitu.</p>		<p>e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya..., hehehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Okey pak, nggak apa-apa,</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh</p> <p>Emerha</p> <p>Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya..</p> <p>Bu sri</p> <p>Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Permendagri 13..</p> <p>Emerha</p> <p>SI... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?</p> <p>Bu sri</p> <p>Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Sama gratis</p> <p>Emerha</p> <p>Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Pak Mondri kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka</p>
--	---	--	---

	<p>Like dan dislike nggak ada. Beliau saya nilai obyektif. Cuma dari faktor hehe . . . (30:21). Ada unsur-unsur saudara dan anu. Unsur-unsur saudara itu kadang-kadang ya mempengaruhi.</p> <p>Iya. Maksudnya fit and proper test yang lebih bobotnya ringanlah. Kalau yang yang eselon dua kan lebih berat artinya lelang, fit and proper test betulan dengan lembaga psikologi UGM dan sebagainya. Kalau yang fit and proper test eselon tiga dan empat ini lebih ringan. Artinya kita di apa diberi surat tugas untuk mengikuti fit and proper test itu, membuat karya tulis, dipresentasikan, nanti diuji dibeberapa dihadapan beberapa juri, perjakat itu. Itu.</p> <p>Iya. Sejak dulu. Sejak zaman Pak Toyo pun gitu.</p>		<p>liat-liat laporan Emerha Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya? Nur Hadiyanto Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatonya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa) Emerha Itu siapa itu, emang udah di.. Nur Hadiyanto Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman Bu sri Sleman dereng.. Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak... Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri</p>
--	---	--	--

		<p>Di kembangkan sendiri...</p> <p>Q.2. Model eksternalisasi</p> <p>Emerha</p> <p>Yang merekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya</p> <p>Emerha</p> <p>Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Mereposisi tawarnya kuat</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan</p> <p>Emerha</p> <p>Pembinaan..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan</p> <p>Emerha</p> <p>Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK</p> <p>Emerha</p> <p>Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada</p>	
--	--	---	--

		<p>mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi</p> <p>Emerha</p> <p>Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondi itu</p> <p>Emerha</p> <p>Oh.. itu tiap berapa bulan pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Maksudnya?</p> <p>Emerha</p> <p>Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo SIMDA ya.. BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Selain SIMDA, selain SIMDA</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi</p> <p>Emerha</p> <p>Dari Provinsi ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai</p> <p>Emerha</p> <p>Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C..</p> <p>CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar</p>	
--	--	---	--

			<p>belum bisa Emerha Itu.. itu punya siapa CMS itu..? Nur Hadiyanto Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA Emerha Bis</p>	
11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>Iswandari Artiningsih Setelah ke sini biasanya sesama kita sendiri,</p> <p>Iswandari Artiningsih Sama bidang akuntansi sendiri. kebetulan kan e secara bertahap ada pembinaan yang khusus untuk kita.</p> <p>Iswandari Artiningsih Agar kita bisa ngajarin teman-teman SKPD.</p>		<p>Iswandari Artiningsih Kita anu, belajarnya sambil kerja, kerja sambil belajar. Jadi ini kalau misalnya kita ketemu sebuah kasus</p> <p>Iswandari Artiningsih a.. Kita diskusi, misalnya: saya lagi nggarap (11:56, suara Narasumber terlalu cepat) oh begini teorinya, saya kan misalnya kebetulan saya yang tahu, kemudian saya sampaikan. Mereka bisa ingat trus nanti disampaikan kalau ada yang mengalami kesulitan serupa. Paling gitu aja.</p> <p>Iswandari Artiningsih Dan lagian misalnya kan bisa e meminta temn-teman di samping saya, kek PP 71 itu dipelajari paling ngak kita ke SKPD juga saya sampaikan itu paling ngak tempat referens nya ke sana dulu kalau masih bingung ada BULTEK kalau masih bingung ya diskusi gitu. Biasanya Referensi kita ke sana.</p> <p>Iswandari Artiningsih Tapi kan itu proses gitu, paling gak kita gak bosan-bosennya kita memberikan informasi jadi kalau mereka di sampe ada pemeriksaan mereka bisalah menjelaskan begitu, sebatas yang mereka mampu gitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih Oh itu ngak sih. Paling ya ibaratnya apa ya, kayak belajar biasa aja, antara teman sama teman. Gitu aja. Gak langsung dituangkan dalam dokumen itu. Ngak.</p> <p>Iswandari Artiningsih nanti kan ada orang baru datang ya, kita bareng-bareng lagi belajar.</p>	

			<p>Iswandari Artiningsih Itu memberikan sosialisasi bahwa e ini loh ada aplikasi SIMDA. Kemudian Pemda Kulon Progo kan waktu itu masih manual.</p> <p>Iswandari Artiningsih Tapi komitmen dari pengambil kebijakan waktu itu kenapa gak kita beralih ke SIMDA, nah kalau kita di teknis pelaksanaan kan tinggal ikut kebijakan. Kemudian dari 2012 berusaha e beralih ke SIMDA untuk keuangannya. Ya sampe sekarang.</p> <p>Iswandari Artiningsih Ha nggak. Hanya ketika kita membutuhkan pembelajaran, sosialisasi atau waktu itu ketika diawal-awal kita istilahnya BIMTEK lah gitu,</p> <p>Iswandari Artiningsih jadi kita menganggarkan dari yang sederhana, makan, minum, rapat, honor narasumber kita menganggarkan di APBD. tapi kalau untuk aplikasinya sendiri kita sama sekali tidak dipungut biaya apapun gitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih Tapi ketika itu kan kasusnya di penebusan aset. Kita memang masih belum tertata. Nah setelah kita e terbantu dengan aplikasi SIMDA kan jadi kita sedikit banyak ada, ada tahu ya, oh kurangnya ini, informasi ini. Nah aset yang mulai ditata kita punya database aset yang bagus, kita tetap pake SIMDA. ya kita 2013 bisa WTP setahun kedua pake SIMDA.</p> <p>Iswandari Artiningsih Kemudian jadi tempat kita konsultasi ketika ada trouble di SIM-nya. Gitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih Error-error di SIM ya kita larinya ke BPKP, selebihnya gak ada.</p> <p>Iswandari Artiningsih E... paling honor narasumber ketika kita menghadirkna mereka untuk ada acara semacam kayak BIMTEK karna kita kan setiap tahunnya mungkin SDM nya ganti orang, ada SKPD yang e petugasnya baru. Nah seperti itu kan lumrah toh honor narasumber, tapi pembiayaannya</p>	
--	--	--	---	--

			<p>yang lain gak ada.</p> <p>Iswandari Artiningsih Ngak. E, pernah beberapa kali juga dulu ketika diawal-awal pake SIMDA mereka e menggunakan anggaran mereka sendiri untuk melakukan BIMTEK tapi juga ada yang inisiatif kami untuk e mengundang mereka sebagai narasumber memberikan pembinaan juga ada.</p> <p>Iswandari Artiningsih Nah itu, Hal-hal seperti itu gitu. Dan BPKP juga membantu kok dari sisi itu tadi sebagai narasumber ketika kita membutuhkan pembinaan dari sisi teori.</p> <p>Iswandari Artiningsih Bukan semata SIMDA nya</p> <p>Iswandari Artiningsih Tapi teori akuntansi nya, gitu. Mereka juga pernah pura-pura jadi narasumber diawal-awal kita pake SIMDA dulu dan diawal-awal kita menerapkan accrual basic.</p> <p>Iswandari Artiningsih Kadang kita yang ke sana.</p> <p>Iswandari Artiningsih admin saya, paling admin saya kok ini hang atau gimana atau misalnya kok ini e... gak pas gitu mapping nya padahal dia gak bisa perbaiki sendiri gitu, dia bawa ke sana. Ke admin yang di sana. Gitu. Pernah juga kita undang admin sana ke sini mau.</p>	
12 : Kuni Mas'adah	<p>Kebetulan ketika saya jadi bendahara, saya bendaharanya bendahara BPKD njeh, bukan bendahara SKPD, jadi bendahara pengelolaan keuangan yang saya jalani adalah pengelolaan keuangan hibah dan bantuan sosial. Ya memang e.. ketika saya jadi bendahara, banyak sekali e.. ilmu yang kami dapatkan, untuk kami terapkan sebagai Kasubag keuangan, memang hampir semuanya ketika saya jadi bendahara, ketika saya terapkan cocok karena memang sudah linknya ke sana</p> <p>Tidak masalah karena memang e.. semuanya semua pekerjaan itu e.. aturannya bisa kita</p>			

	<p>baca, kita punya atasan ketika kita punya masalah, kita ada tempat mengadu, maksudnya ada tempat e.. bertanya untuk mencari penyelesaian</p> <p>Pernah.., kita selain belajar aturan terkait dengan pelaksanaan keuangan tentunya suka ada kendala, suka ada hal-hal yang kadang kurang pas kita terapkan dengan, kita baca dengan aturannya, tetapi sebenarnya itu memang perlu kebijakan, dan itu sebenarnya dibenarkan. Nah untuk hal itu kita selalu konsultasi, selalu e.. diskusi dengan dengan teman-teman, hasil diskusi kita akan selalu tanyakan ke atas, saya bawa ke atas, ke Bu Seketaris, Bu Seketaris oke, coba kita nanti minta kebijakan Bapak Kepala seperti apa, nah.. hal-hal seperti itu akan e.. ketika kita temui di lapangan itu akan, banyak sekali sandunga-sandungan. Sebagai contoh katakanlah e.. terkait dengan pengelolaan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas e.. yang mana, perjalanan dinas itu, perjalanan dinas ditanggung oleh Daerah katakanlah, tetapi uang makan dan akomodasi ditanggung oleh e...</p> <p>Di tempat kerja, diskusi langsung ketika kita ada masalah, kita langsung bagaimana pemecahannya, oh.. seperti ini kemudian langsung kita bawa langsung, jadi tidak pernah kita diskusi terus sesuai dengan FGD, semacam FGD kita ngundang kemudian ini kita nggak, karena kita memang anggaran-anggaran terkait dengan rapat njeh.., itu karena uang-uang rapat, uang FGD kita tidak ada, jadi diskusi secara spontan</p> <p>e... karena dengan e.. ketika kita diskusi itu akan.. pasti karena ada masalah, nah.. masalah itu kan akan e.. salah satu pendidikan kita, belajar kita adalah dari masalah, kita bisa menyelesaikan masalah, itu akan banyak menambah pengetahuan kita, tanpa ada masalah njeh.. tanpa ada masalah kita mulus-mulus aja ya mungkin, sepengetahuan kita ya segaris lurus itu, tapi dengan berkembangnya dengan adanya masalah pengetahuan kita akan semakin banyak</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Antar sesama.. kemudian oh.. antar sesama kalo sudah antar sesama nanti kita bawa ke atasan , kita antar ke atasan berjenjang</p> <p>Biasa, ke temen-temennya ya..., temen-temen kita sudah temen-temen biasa kalo memang ada masalah, ada masalah kah nanti saya tanyakan e.. sampai di mana pengelolaan keuangan, Bu perlu ini-ini ini, okey kalo perlu mari kita bahas bersama. Atau ini perlu penghitungan UP sebaiknya Upnya mau berapa, ya udah.. kita cari jalan telah, kita cari kira-kira yang bisa kita LS kan berapa, yang bisa yang bisa kita UP kan katakanlah berapa, itu hanya diskusikan secara spontan, mari kita hitung bareng-bareng</p> <p>Kami belajar.. e.. ada regulasi kami belajar regulasi, regulasi tidak paham kami akan tanyakan ke atasan secara berjenjang.</p> <p>e... regulasi.. regulasi kita akan juklak dan juknis, juklak-juknis lah.. itulah yang kita pegang, kita pedomani untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan hanya ketika kita tersandung masalah-masalah itu baru kita diskusi, tapi sebenarnya masalah-masalah itu pun masih dalam koridor juklak dan juknis itu cuman tidak dijelaskan secara rigit kan gitu</p>			
13 : Lukman Hakim, S.E., M.M.	<p>Di yang bidang pajak non PBB dan PBHTP. Masih masih sebelum ada PP nomer 19 perubahan. Masih DPA dulu.</p> <p>Kalau saya itu sih kebetulan dari praktek ke teori lagi sekarang di bidang pendapatan itu. Artinya yo tidak begitu anu</p> <p>Ya kan kalau jabatan baru di ukuran tugas, perukuran tugas. Perukuran tugas ada, terus disitu diaca tugas kita apa aja.</p> <p>Ya misalnya ya rotasi jabatan dalam arti yang sama apa jabatan yang sama atau?</p> <p>La iya. Seperti itu. Kebetulan saya kan orang lama di sini, dari lain bidang saya pun saya ya berusaha misalnya yang teknis di sini kan ada bidang pajak. Kalau ada persoalan yang</p>		<p>Oh nggak. Kalau itu atas nama anu aja, permasalahan apa nanti jadinya apa.</p> <p>Ha'a. misalnya ada permasalahan wajib pajak pengurangan atau apa apa itu. nggak ada dokumentasi ini dari A dari B kita tahu.</p>	

	baru saya berusaha menanyakan.			
14 : Meylani Lestari	<p>Dengan cara apa, eh.. dengan di mutasi ke bidang yang berbeda itu juga udah meningkatkan pengetahuan tapi Cuma dari sekedar pengetahuannya ya.. kalo kinerja nya kan tetep mengikuti dulu ya pengalaman tetep apa ya.. guru yang paling berharga e.. ya itu.. dengan mutasi itu memang meningkatkan pengalaman tapi belum tentu sebanding dengan kinerjanya, he'em.. nggak..nggak.. terus ekspres lah.. karena hal baru</p> <p>Ya.. ya.. sharing informasi dengan teman-teman yang sudah lama di sini, terus belajarnya itu ya.. pas kauistisik gitu ya, sekarang yang diharapi apa baru kita buka aturan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dihadapi ini, karena kan aturan-aturannya sangat banyak, aturan bidang keuangan itu dinamis dan sangat banyak, perubahan-prubahan itu sangat banyak sehingga belajare yo pelan-pelan sambil e.. bekerja, belajar sambil berjalan gitu</p> <p>He'em.. iya... belajarnya kan sama temen-temen yang udah lama di sini ya.. kebetulan mutasinya itu dari bidang yang cukup berbeda nggak pernah nanganin sebelumnya tentang akuntansi apalagi pengelolaan keuangan tiba-tiba masuk ke sini seperti itu yang jelas pengetahuannya beda, jelas tambah dengan mutasi ini, belajarnya sama</p>	<p>He'e... untuk proses penyusunan e... pembuatan peraturan kita lebih banyak itu yang terlibat dari internal BKAD kita, semua bidang kita undang karena biasanya saling berkaitan, kemudian pihak luar atau OPD luar kita mengundang Bappeda kita mengundang bagian hukum dan Inspektorat Daerah. Tapi kalo untuk e.. penyusunan SHBJ karena itu digunakan oleh seluruh OPD kita ada perwakilan dari OPD, walau nggak semuanya ya pak. OPD-OPD yang besar kita ikut libatkan dalam penyusunan tersebut, kita.. e... rapatkan kalo sudah ada draftnya, draft itu yang akan menjadi pembahasan di rapat, gitu bisa beberapa kali baru finalisasi</p> <p>Ada yang dia bikin konsep sendiri ada yang kita libatkan Limas, seperti itu</p> <p>He'e, karena kan kadang-kadang kan inisiatornya dari mereka gitu ya pak, e... kemudian ada juga di-mix, mix and match gitu dengan dengan kita bareng-bareng, he'e</p> <p>Di rapat kan dulu beberapa kali hampir mendekati final, bagian hukum itu udah Cuma tinggal inilah final sedikit lagi gitu prosesnya tetapi proses penyusunan semua ada di sini, dibagian hukum tinggal legal drafting-nya, he'e. kalo secara substansi</p>		

	<p>Pak yakup, heheeh.</p> <p>Penyampaian kepada, diskusi Cuma ini ya.. sering ya.. setiap ada masalah kan ya.. kita terus berembuk bareng-bareng gitu, Kabid ngumpulin kita semua</p> <p>Ya.. kami.. ya udah.. ada masalah apa ayo kita duduk dulu kita obrolin dulu gitu kan ya pak, ada setiap permasalahan apa yang membidangi di bidang itu yang terlibat semuanya dikumpulkan, dan kita saling diskusi, itu.. udah udah jalanlah..</p> <p>Ada.. iya.. ada.. masukkannya, ya.. kita demokratis ya masukkannya apa, pendapatnya apa, latar belakangnya apa, alasannya apa nanti kan kita bahas bersama</p>	sudah dimatangkan di BKAD		
--	---	---------------------------	--	--

<p>15 : Nasip, S.E.</p>	<p>Iya. Itu saya tidak mempunyai kewenangan untuk itu tetapi yang ngatur itu tentunya harus dengan intern menggunakan surat perintah kepala badan. Tetapi kalau hanya sekedar pekerjaan karena keterbatasan personil tadi itu biasa. Makanya kan dari subbid katakanlah pendataan itu tidak hanya bekerja di subbid pendataan saja tetapi juga bisa membantu yang ada di penetapan.</p> <p>Jadi ee ini sudah sudah kesepakatan kita, bahwa kita bekerja tidak hanya dalam lingkup subbid kita tetapi mana yang memang perlu bantuan itu nanti kita bantu. Jadi yang inisiatif nanti Kasubidnya. Katakanlah, Mas karena saya ada kegiatan ini tolong saya dibantu katakanlah pendataan, pendataan itu kan hanya punya dua orang. Kalau melakukan pendataan hanya dua orang kan kapan selesainya. Sehingga dari subbid lain diminta bantuannya untuk bisa membantu untuk melakukan pendataan. Seperti sekarang ini, ini ada yang keluar ini melakukan pendataan di sepanjang jalan Diponegoro sama Brigjen Katamso melakukan pendataan reklame. Kemudian kalau kaitannya dengan masalah penagihan PBB yang ke desa-desa terkait dengan tunggakan. Itu juga tidak mungkin hanya dilakukan oleh subbid penagihan karena mereka juga hanya punya staff dua orang. Padahal yang dilakukan adalah untuk 87 desa. Nah, ini juga mengajak dari subbid yang lain sepanjang subbid yang lain pas tidak ada kegiatan yang bisa mengganggu mereka. Jadi mereka akan saling koordinasi kapan kosong sehingga nanti mereka sama-sama ikut dilibatkan.</p> <p>Ya sebetulnya yang namanya pekerjaan kalau hanya sifatnya monoton itu tentu tidak akan menambah pengetahuan. Tetapi karena adanya saling membantu sehingga mereka akan tahu. Karena katakanlah saya, saya itu kan hanya menangani masalah pajak air tanah padahal kan di sini tidak hanya pajak air tanah tetapi juga pajak restoran. Oh ternyata kalau pajak air tanah itu ditetapkan oleh kita besarnya, tetapi kalau restoran ternyata berdasarkan omset mereka gitu kan. Otomatis</p>	<p>Ada. Ya itu tadi umpamane pas kita ada permasalahan itu biasanya kita tidak harus menunggu sampai rapat koordinasi tidak. Tapi kalau ada permasalahan yang urgen nah itu segera kita kumpulkan untuk rekan-rekan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah. Tidak menunggu sampai rapat koordinasi itu tidak. Kemudian kaitannya dengan masalah pengetahuan aturan-aturan perpajakan kita juga ada forum.</p> <p>Ini kana nu, itu satu Provinsi. Sehingga untuk yang ketempatan itu gentian giliran. Kemaren baru saja dari Gunung Kidul tanggal berapa itu, hari</p> <p>Kalau anunya itu sebetulnya tergantung. Tergantung tetapi nanti tinggal yang tuan rumah itu mencari waktu tetapi paling tidak ya ee tiga bulan sekali ketemu.</p> <p>Anu dari BKAD Kabupaten.</p> <p>Oh tidak ada itu. Tidak ada kalau wajib pajak.</p> <p>Ya macam-macam. Kaitannya dengan permasalahan aturan-aturan itu mungkin kan ada yang berbeda persepsi, mungkin jawabannya seperti apa. Karena masing-masing daerah itu kan berbeda katakanlah seperti pajak penerangan jalan. Itu kan ada yang selama ini kan ee kita hanya menerima saja, kita tidak tahu datanya seberapa-seberapa itu tidak tahu. Mungkin nanti lain daerah sudah ada yang bisa melaksanakan melakukan rekonsiliasi jalan dengan . . . (16:34) seperti apa acaranya. Kemudian kaitannya dengan masalah ee MBLB, MBLB mungkin ada di Kabupaten lain yang bisa menerapkan MBLB ini penarikannya tidak tidak apa, tidak berdasarkan laporan dari pihak penambang tapi mungkin daerah lain sudah ada yang menerapkan dengan model ee ehm ee kapasitas itu juga ada. Kemudian mereka kan masing-masing anu kan, kemudian juga PBB. PBB mungkin itu kalau di sini penerapannya dua tarif. Tetapi ada Kabupaten lain yang sudah menerapkan dengan system lima tarif itu kan kita juga</p>	<p>Ee gini. Untuk ahli yang jelas kaitannya karena kita tidak mampu, karena yang namanya untuk membuat NIR dengan rata-rata kemudian penentuan zona nilai tanah itu kan kita tidak ada yang ahli. Ha kita kan minta tolong yang ahlinya ya di PSEKP UGM itu, itu dalam rangka untuk menyusun NIR kaitannya untuk penentuan pajak daerah. Kemudian kalau dari BPKP kaitannya dengan masalah aplikasi yang digunakan. Kita juga tidak istilahnya karena tidak mampu kita untuk secara mandiri ee mengoperasikan ee aplikasi karena aplikasinya memang buatan BPKP. Itu kan lanjutan dari Simda keuangan, ini bagian dari Simda keuangan itu Simda pendapatan. Karena juga arahan mereka.</p>	
-------------------------	---	--	--	--

	<p>kan pengetahuan mereka akan tahu. Kemudian keterlibatan lagi di MBLB, ternyata itu MBLB yang menjadi pedoman atau aturan untuk membuat adalah dasarnya volume. Dari sisi pekerjaan dengan membantu di bidang subbid otomatis pengetahuan mereka akan bertambah. Tetapi kalau hanya monoton yang mereka kerjakan hanya di subbid itu dan pekerjaan hanya itu ya mereka pengetahuannya juga. Ehm.</p> <p>Ee kalau Sekcam itu kan kaitannya dengan masalah ketugasan kan pokoknya ada di sekretariat. Kaitannya dengan masalah umum, kemudian keuangan, kemudian kepegawaian. Nah, kalau yang di bidang pajak ini kaitannya dengan masalah ketugasan saya yang dulu ya kaitannya mungkin ee masalah administrasi keuangannya. Katakanlah dalam hal kegiatan itu kalau ada kegiatan kalau sudah dilaksanakan mohon untuk segera bisa disusun SPJnya, SPJnya seperti apa to. Ha itu kan kalau saya tahu karena dulu kan saya di sekretariat itu kan termasuk pengelolaan keuangan, kemudian kaitannya dengan masalah kepegawaian. Makanya saya cuma mengingatkan untuk tahun ini siapa yang sudah bisa naik pangkat untuk bisa segera dipersiapkan. Kalau masalah ketugasan memang sudah berbeda nggih, berbeda jauh. Karena yang dulu hanya di sekretariat kaitannya dengan masalah kepegawaian keuangan kalau di sini ya mengurus tetapi kan tida mengurus keuangannya tetapi bagaimana untuk mendapatkan uang gitu.</p> <p>Ada. Ya itu tadi umpamane pas kita ada permasalahan itu biasanya kita tidak harus menunggu sampai rapat koordinasi tidak. Tapi kalau ada permasalahan yang urgen nah itu segera kita kumpulkan untuk rekan-rekan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah. Tidak menunggu sampai rapat koordinasi itu tidak. Kemudian kaitannya dengan masalah pengetahuan aturan-aturan perpajakan kita juga ada forum.</p> <p>Ada. Tapi itu yo tidak tidak terjadwal to. Ini cuman kalau wah kita perlu omong-omongan</p>	<p>belajar. Sehingga ee kalau ada perubahan sebenarnya kita juga belajar kepada mereka kaitannya dengan masalah pelaporan sehingga kita juga berupaya kaitannya dengan pengubahan tarif PBB ini baru kita ajukan menjadi empat. Kalau sekarang itu kan kita baru membedakan dua kelas nggih, yang sampai 1 milyar yang diatas 1 milyar. Kemudian kita ee melakukan ee koordinasi ya minta bantuan akademisi dalam hal ini UGM di PSYKP. Nah, dalam rangka untuk mengubah</p> <p>Ya cumin cumin anu apa, kita istilahnya seperti kesepakatan ha itu. Itu besok pertemuan yang akan datang nanti penyelenggaranya mana.</p> <p>Kabid-kabid pajak kemudian juga termasuk Kasubidnya.</p> <p>Di sini kemaren di Hotel Kusuma.</p> <p>Keliatannya di anggaran ada untuk di forum itu ada.</p> <p>Di bidang pendapatan.</p> <p>Ee gini. Untuk ahli yang jelas kaitannya karena kita tidak mampu, karena yang namanya untuk membuat NIR dengan rata-rata kemudian penentuan zona nilai tanah itu kan kita tidak ada yang ahli. Ha kita kan minta tolong yang ahlinya ya di PSEKP UGM itu, itu dalam rangka untuk menyusun NIR kaitannya untuk penentuan pajak daerah. Kemudian kalau dari BPKP kaitannya dengan masalah aplikasi yang digunakan. Kita juga tidak istilahnya karena tidak mampu kita untuk secara mandiri ee mengoperasikan ee aplikasi karena aplikasinya memang buatan BPKP. Itu kan lanjutan dari Simda keuangan, ini bagian dari Simda keuangan itu Simda pendapatan. Karena juga arahan mereka.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>di sini gitu. Paling-paling kita di warung sambil makan-makan nanti ee kita bcarakan hal-hal seperti itu bisa. Ehm.</p>			
--	--	--	--	--

<p>18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.</p>	<p>Cuma yang saya terapkan hanya e.. semangat di bidang ekonomi bahwa brand sebuah brand itu penting. Jadi waktu di ekonomi saya punya kegiatan waktu itu untuk me.. membuat branding Kulonprogo yang The Jewel of Java itu ah.. itu saya terapkan di bidang aset, kita juga buat brand Asik Menata Aset</p> <p>Ya... yang khusus yang berkenaan dengan managemen aset mungkin ada peningkatan, ya.. ya.. paling tidak e... kontribusi yang bisa saya berikan adalah saya bisa sharing tentang pengalaman menata aset itu dengan temen-temen melalui PSEKP, dan ini sebenarnya kan ada ada.. apa.. sosok yang saya saya... kagumi kalo sekarang menjadi Kepala BKAD Gorontalo yaitu bapak Setiojati Kepala BKAD Gorontalo</p> <p>Tidak ada.. Gak dibayar mereka. Ehhh..itu kan karena, kita kan koneksi, jadi hubungan berteman itu yang jadi dasar.</p> <p>Ya kita di situ, sejak saat itu saya menjadi..menjadi apa namanya, diminta untuk berbagi di sana.</p> <p>Itu satu. Nah dari apa namanya...eehh..ya dianggap korporasi lah. Dari WDP sekian tahun menjadi WTP kita membenahi data dan sebagainya, itu sebagai sebuah apa namanya..sebuah potret yang dipakai untuk PSEKP, ini loh sebenarnya sebagai contoh.</p>			
---	---	--	--	--

Lampiran 19: Framework Matrix Wawancara tentang Proses Eksternalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
5 : Alif Romdhoni	<p>Alif Romdhoni</p> <p>Ada.. untuk beberapa yang sering itu karena langsung menyangkut teknis ya.. teknis itu biasanya kalau misalnya pajak ada anu itu temen-temen di pajak, seperti kemaren Mas Eko yang Kasubbid penetapan itu mereka e.. diikutkan oleh BKBK diklat apa yo.. tapi terkait dengan pajak satu minggu di Jakarta itu Mas Eko, kemudian beberapa tahun lalu bahkan kita pernah kerja sama dengan STAN kita kirimkan 2 orang sebagai penilai properti atau apa itu, dua orang itu dikirim untuk ikut itu, kemudian yang sifatnya seminar, yang sifatnya sosialisasi ya.. sudah cukup banyak di.. untuk di pendiklatan untuk anu ya.. tetep .</p>			
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.	<p>Emerha</p> <p>e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya..</p> <p>Emerha</p> <p>e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh?</p> <p>Emerha</p> <p>Awal-awal SIMDA..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh?</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggeh, dari anggaran dulu</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA</p> <p>Bu sri</p>	<p>Emerha</p> <p>e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya..</p> <p>Emerha</p> <p>e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh?</p> <p>Emerha</p> <p>Awal-awal SIMDA..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh?</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggeh, dari anggaran dulu</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA</p>	<p>Emerha</p> <p>e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya..</p> <p>Emerha</p> <p>e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh?</p> <p>Emerha</p> <p>Awal-awal SIMDA..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh?</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggeh, dari anggaran dulu</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA</p> <p>Bu sri</p>	<p>Bappeda. Dia brandingnya the jewel of java, kemudian kenapa tulisannya seperti itu, bentuknya apa, filosofinya apa, warnanya itu apa maknanya. Itu ada di sana satu buku.</p> <p>Ya lewat ini, Pak Jos Iwan.</p>

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Dilatih, tahun piro itu mbak</p> <p>Bu sri</p> <p>2011</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>2011 nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Maksude le.. nopo.. le.. mulai....</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011</p> <p>Emerha</p> <p>Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. dulu sebelum itu manual</p> <p>Bu sri</p> <p>Dulu pake e..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Apa namanya dulu..?</p> <p>Bu sri</p> <p>SIPK...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerjaa, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondi yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator</p>	<p>Bu sri</p> <p>Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Dilatih, tahun piro itu mbak</p> <p>Bu sri</p> <p>2011</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>2011 nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Maksude le.. nopo.. le.. mulai....</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011</p> <p>Emerha</p> <p>Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. dulu sebelum itu manual</p> <p>Bu sri</p> <p>Dulu pake e..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Apa namanya dulu..?</p> <p>Bu sri</p> <p>SIPK...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerjaa, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondi yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari</p>	<p>Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Dilatih, tahun piro itu mbak</p> <p>Bu sri</p> <p>2011</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>2011 nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Maksude le.. nopo.. le.. mulai....</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011</p> <p>Emerha</p> <p>Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. dulu sebelum itu manual</p> <p>Bu sri</p> <p>Dulu pake e..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Apa namanya dulu..?</p> <p>Bu sri</p> <p>SIPK...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerjaa, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondi yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang... Bu sri Kalo update kan Cuma via... Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya... hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasihkan kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha</p>	<p>temen-temen yang dilatih sebagai operator Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang... Bu sri Kalo update kan Cuma via... Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya... hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasihkan kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha</p>	<p>Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang... Bu sri Kalo update kan Cuma via... Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya... hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasihkan kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?</p> <p>Bu sri</p> <p>Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Sama gratis</p> <p>Emerha</p> <p>Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Pak Mondi kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan</p> <p>Emerha</p> <p>Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatornya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Itu siapa itu, emang udah di..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman</p> <p>Bu sri</p> <p>Sleman dereng..</p>	<p>Emerha</p> <p>SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?</p> <p>Bu sri</p> <p>Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Sama gratis</p> <p>Emerha</p> <p>Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Pak Mondi kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan</p> <p>Emerha</p> <p>Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatornya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Itu siapa itu, emang udah di..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman</p> <p>Bu sri</p>	<p>SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?</p> <p>Bu sri</p> <p>Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Sama gratis</p> <p>Emerha</p> <p>Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Pak Mondi kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan</p> <p>Emerha</p> <p>Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatornya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Itu siapa itu, emang udah di..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman</p> <p>Bu sri</p> <p>Sleman dereng..</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak... Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP Emerha</p>	<p>Sleman dereng.. Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak... Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP</p>	<p>Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak... Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP Emerha</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi Emerha Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak? Nur Hadiyanto Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondit itu Emerha Oh.. itu tiap berapa bulan pak? Nur Hadiyanto Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya</p>	<p>Emerha Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi Emerha Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak? Nur Hadiyanto Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondit itu Emerha Oh.. itu tiap berapa bulan pak? Nur Hadiyanto Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur</p>	<p>Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi Emerha Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak? Nur Hadiyanto Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondit itu Emerha Oh.. itu tiap berapa bulan pak? Nur Hadiyanto Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>dulu setahun 4 kali jadi 3 kali</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Maksudnya?</p> <p>Emerha</p> <p>Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo SIMDA ya.. BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Selain SIMDA, selain SIMDA</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi</p> <p>Emerha</p> <p>Dari Provinsi ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai</p> <p>Emerha</p> <p>Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C..</p> <p>CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa</p> <p>Emerha</p> <p>Itu.. itu punya siapa CMS itu..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA</p> <p>Emerha</p> <p>Bisa</p>	<p>wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya</p> <p>dulu setahun 4 kali jadi 3 kali</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Maksudnya?</p> <p>Emerha</p> <p>Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo SIMDA ya.. BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Selain SIMDA, selain SIMDA</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi</p> <p>Emerha</p> <p>Dari Provinsi ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai</p> <p>Emerha</p> <p>Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C..</p> <p>CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa</p> <p>Emerha</p> <p>Itu.. itu punya siapa CMS itu..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA</p> <p>Emerha</p> <p>Bis</p>	<p>dulu setahun 4 kali jadi 3 kali</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Maksudnya?</p> <p>Emerha</p> <p>Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo SIMDA ya.. BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Selain SIMDA, selain SIMDA</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi</p> <p>Emerha</p> <p>Dari Provinsi ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai</p> <p>Emerha</p> <p>Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C..</p> <p>CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa</p> <p>Emerha</p> <p>Itu.. itu punya siapa CMS itu..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA</p> <p>Emerha</p> <p>Bisa</p>	
11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>Iswandari Artiningsih</p> <p>Karna kebijakan Kulon Progo tempat</p>	<p>Iswandari Artiningsih</p> <p>Iya. Kalau pertemuan rutin ada setiap</p>	<p>Iswandari Artiningsih</p> <p>Bahkan yang berlatar belakang akuntansi pun</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan BinteK dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>pelatihan-pelatihan itu ada di BKD.</p> <p>Iswandari Artiningsih Nek kita bisanya menyarankan e.. misalnya e seklai-kali adain dong BIMTEK apa gitu kan BIMTEK akuntansi, atau BIMTEK penerusan aset atau apa gitu. Karna memang ini toh kebutuhannya apa, terutama kalau ada aturan-aturan baru. Gitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih Iya. Di sini. Karna kewajiban kita kan mengajarin SKPD kalau kita gak bisa, ya gimana, gitu kan. Makanya ah hampir semua. Eh semua malah udah.</p> <p>Iswandari Artiningsih Iya saya utang makan gitu. Kan kadang BPKP juga e, tapi juga periodik ya ngadain. Nah saya sertakan siapa yang belum pernah ikut, itu yang harus ikut. Gitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih e... Pernah di Jogja, pernah diselenggarakan oleh BPKP</p> <p>Iswandari Artiningsih tapi BKD juga pernah menyelenggarakan sendiri di Kulon Progo.</p>	<p>triwulan nah saya selenggarakan saya undang mereka semua di forum itu monggo kalau mereka ada yang mau disampaikan permasalahan atau apa silahkan.</p> <p>Iswandari Artiningsih Rutin saya lakukan tria tiap triwulan.</p> <p>Iswandari Artiningsih Setiap bulan, akhir bulan harus bikin laporan kegiatan</p> <p>Iswandari Artiningsih yang dari sana kan secara berjenjang melalui Subbag perencanaan pasti disampaikan monev nya ke atasan. Nah dari sana kan bisa di pantau, oh ini jalan. Nah ketika tidak ada hal-hal yang signifikan kan berarti segala sesuatunya berjalan dengan baik.</p> <p>Iswandari Artiningsih jadi walupun nanti ada pejabat baru atau petugas baru paling gak ada lah yang berbagi informasi disitu.</p> <p>Iswandari Artiningsih Tapi kalau memang masih membutuhkan informasi ya lari ke kami.</p> <p>Iswandari Artiningsih Saya undang mereka dan ya setiap saat kita membuka bahasanya apa ya, Klinik gitu ya?</p> <p>Iswandari Artiningsih Itu kan misalnya, nah itu kita sampe kan. Teman saya, ada adminnya nanti di grup menyampaikan admin saya ke semua petugas akuntansi sudah langsung kita pandu di situ, jurnalnya ini debit kreditnya ini, yang di jurnal ini. Itu sudah kita sampaikan. Cuma kalau mereka petugas akuntansi discovery masih bingung ya monggo datang ke sini. Gitu. Kita seperti itu.</p>	<p>kan e, tidak serta merta bisa, apa ya? menguasai Akuntansi keuangan daerah. Jadi yang kita lakukan adalah e.. ya kita menyelenggarakan BIMTEK.</p> <p>Iswandari Artiningsih atau diklat, atau mengirimkan ke biasa banyak tawaran tuh</p> <p>Iswandari Artiningsih Nah, Kadang BKD itu e pernah narasumbernya mungkin dari e.. akademisi pernah, dari BK BPKD sendiri pernah, kemudian mungkin dari e ya beberapa pihak yang dirasa memang memiliki latar belakang teori akuntansi pernah diundang. Bahkan pernah mengundang dosen.</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
12 : Kuni Mas'adah			<p>Belum ada juga, paling e.. Bimteknya Subag e... BUD Bimteknya kita, kemudian untuk menyamakan visi gitu, itu ada</p> <p>Ya.. untuk mengundang e.. Subag keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan</p> <p>Itu pernah.. pernah kami diundang sekali, tapi kan itu e.. intern ya.. antar hanya antar bidang, itu diundang. Dan itu sebenarnya, apa yang mereka sampaikan itu kita sudah jalankan</p>	
13 : Lukman Hakim, S.E., M.M.	<p>Ya tergantung permasalahannya yang mau dibahas itu. Misalnya kemarin sebelum ada opo, sebelum kan kemarin ada satu mungkin kalau njenengan kemarin Pak Santo ya, pernah ketemu Pak Susanto. Pak sopo, Pak Alif?</p> <p>Di bidang pajak kan ada kebijakan baru yang bahwa ini itu pendataan di anu, pendataan di lokasi penambangan dengan memasang porter, apa yang di istilahnya ngadang di jalan itu di pos-pos, pos pemantauan pos pendataan. Seperti itu.</p>		<p>Itupun sifatnya bisa nanti, kan sosialisasi anggaran itu di situ tidak menyebutkan apa yang mau disosialisasikan, cuma anggaran saja. Bisa saja itu tidak setiap tahun. Tergantung kira-kira apa yang perlu disosialisasi dari kesepuluh pajak itu, kesepuluh pajak daerah. Ha yang mau</p> <p>Belum ditentukan tanggal berapa tapi bulan ini.</p> <p>Ya karena mereka jadi tahu misalnya apa tata cara pengisian form pendataan anu, pendataan itu MBLB mineral bukan logam yang ditambang, dia tahunya dari sosialisasi itu. Formnya dibagikan terus juga dikasih tahu caranya ngisi seperti itu.</p> <p>Ya manfaatnya ya dengan cara itu kita bisa jalan satu-satunya untuk mengumpulkan mereka itu kalau untuk mengefisiensikan waktu itu. Kan dari sekian puluh wajib pajak kan kalau kita datangi ke tempatnya masing-masing kan tidak efisien nggih waktunya.</p> <p>Misalnya per anu, misalnya kita mau sosialisasi pajak hotel restoran ya wajib pajak hotel restoran yang diundang. Kan waktunya efisien dan efektif.</p> <p>Ya ketika tindak lanjutnya itu kan mereka sudah lancar dan membayar pajak. Kalaupun nggak itu karena sudah tahu tapi itu bukan karena tidak tahu. Karena mungkin wajib pajak itu sudah tahu tapi mungkin eman-eman, ya niatnya mungkin mau ngemplang</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
			<p>lain lagi itu. Tapi intinya sosialisasi itu supaya mereka tahu dan tambah tahu gitu. mengingatkan juga bisa.</p> <p>Ya nggak ada perannya. Hanya menghimbau saja bahwa regulasi itu harus dipatuhi gitu. tapi kalau mereka mau mengusulkan apa tapi yang membangun boleh. Misalnya dalam rancangan Perda mereka itu mau mengusulkan tarif 7,5% kalau naik jangan terlalu tinggi misalnya jadi 8 atau berapa. Jangan di istilahnya jangan dimaksimalkan 10% itu dari mereka.</p> <p>Kalau itu kepentingan mereka sendiri aja. Kepentingan. Lebih cenderungnya ke kepentingan mereka itu.</p> <p>Wingko Sulityowati yang itu lo makanan kecil itu. Itu kami mengundang cuma untuk ini aja supaya beliau itu menyampaikan sejarahnya dia membangun usaha saja. Supaya mereka juga dapat manfaat dari orang tersebut gitu lo. Bukan dari sisi pajaknya karena produksi wingko itu tidak ditarik pajak. Karena bukan restoran, jajanan kecil sih. Gurih itu. Mungkin njenengan pernah di Jogja ada.</p> <p>Iya. Mereka ya yang dipanggil dikasih anu, dikasih honorarium narasumber.</p> <p>Ya karena mereka, karena beliau yang kami undang sebagai narasumber, sebagai orang yang berhasil mereka cerita dari pengalaman beliau merintis kan yang saya undang kan yang sekarang sukses sau-satunya yang paling sukses itu perusahaan wingko yang di Wates itu yang paling terkenal yang paling enak wingkonya. Ha beliau cerita dari dulu sebelum berhasil dari kecil. Nah, kan pengalaman beliau itu disebarkan itu yang wajib pajak. Selain kami mensosialisasikan untuk narik pajak hotel dan restoran kan dari sisi lain mereka ee cara tahu cara membangun bisnis gitu lo dari kecil menjadi besar gitu.</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
			<p>Ya faktor anu aja mereka ya sama Pemda juga ada kerja samanya. Kerja sama istilahnya Pemda juga ikut bisa apa diajak kerja sama dari mereka masih kecil, dari beliau masih kecil usahanya seperti itu.</p> <p>Kerja samanya di Perda ini kan sekarang MBLB kan kewenangan pengelolaannya itu kan di Provinsi. Dinas PUPR ESDM Provinsi DIY. Itu. Tapi pajaknya masuknya sini, pajak mineral bukan logam. Jadi kewenangan sana itu misalnya pengawasan, pengawasan tentang pengambilan mineral bukan logam pasir, batu apa itu sana yang ngawasi itu sana.</p> <p>Hubungan kerja setiap anu kan ada, setiap hari itu kan ada. Misalnya kita ada anu wajib pajak yang misalnya sering pulang bayar pajak kan lapor ke sana. Terus ada wajib, ada wajib pajak ha to, yang tidak berizin misalnya ditanya saya laporkan dia, PUP kan masalah perizinan kan PUP sana. Selalu berkoordinasi.</p>	
14 : Meylani Lestari			<p>Iya.. selain meningkatkan pengetahuan juga kan bisa saling sharing, sharing pendapat sharing informasi, tanggapan kan dari rapat itu semua keluar ya.. muncul, dari sisi orang pendapatan misalnya gimana, dari sisi pelaporannya gimana, perbendaharaan nanti yang akan melaksanakan SPG-annya gimana, jelas tidak hanya jadi ajang belajar tapi memang di situ juga solusi ya.. tapi keputusan kan baru ditahap kita, apapun hasilnya kita tetap bawaan ke Pak Sekda, atau Pak Bupati kalo itu menyangkut kebijakan yang penting rembuk matengnya di sini di BPKAD</p>	
15 : Nasip, S.E.	Ee biasanya diklat kan ada anu, ada penjelasannya. Diklat itu ada penjelasannya bahwa diklat itu nanti fungsinya ini ini ini, terus kriterianya nanti kan ini ini ini, itu kan sudah ada. Nanti kan kita melihat sapa dari sini yang masuk kriteria itu gitu.		<p>Ya kalau kita sepanjang itu ada anggaran untuk mengikuti diklat kita berupaya untuk selalu mengikuti diklat meskipun entah satu orang atau dua orang. Nah, ini kita koordinasi dengan kepegawaian, badan kepegawaian itu. kemudian untuk peningkatan kapasitas dari rekan-rekan yang ada di lapangan kita dalam satu bulan sekali itu melakukan rapat koordinasi baik dengan yang harian lepas yang ada di lapangan</p>	

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
			<p>maupun dengan rekan-rekan kita, kita sampaikan ada hal-hal yang mungkin perlu untuk segera ditindak lanjuti atau ada aturan-aturan baru kita sampaikan di e rapat koordinasi rutin yang setiap bulannya itu dilakukan. Termasuk kaitannya dengan masalah PAD. PAD ini kan kita evaluasi, kita evaluasi umpamannya kan untuk akhir bulan itu sudah kita tahu angkanya belum mencapai seperti target. Nah, itu nanti kita sampaikan kemudian upaya apa yang harus kita laksanakan nanti kita rembug secara bersama-sama.</p> <p>Iya. Kaitannya dengan masalah percepatan. Karena kan dari dua triwulan atau satu semester ini seharusnya kan sudah 50% tetapi kita baru mencapai 42. Ini kan perlu langkah-langkah percepatan karena kemarin tahu sendiri bulan juni hanya efektif 11 hari. La kemudian ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan percepatan baik koordinasi dengan kecamatan maupun dengan desa. Nah, kalau itu nanti kita sudah ee melibatkan dengan Pak Wakil Bupati gitu.</p> <p>Ee gini. Karena selama ini kan kita bekerja dasarnya hanya sebagai rutinitas nggih, rutinitas kemudian pengetahuan ya hanya seperti itu seperti itu saja. Kemudian kaitannya dengan masalah kalau ada hal-hal yang baru ya saya sara mereka akan sangat jarang yang mau terus belajar, kemudian ini ada pengetahuan baru belajar, karena mereka sudah disibukkan dengan pekerjaannya. Sehingga hanya satu-satunya untuk menambah pengetahuan ya hanya kalau diikutkan diklat.</p> <p>Iya. Jadi kan ehm saya beranggapan bahwa teman-teman saya yang dulu sudah pernah bimtek otomatis sudah membuat laporan. Karena laporan itu nanti kaitannya dengan masalah dana. Termasuk sebagai lampiran SPJ.</p>	
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.	Yaaa...kita tetap..ya modelnya tetap praktikal. Nah sehingga jadi, iya dilakukan di sini atau		Ya.. kita kan di sini kalo untuk untuk diklat itu kan tugasnya kan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi melalui sharing-	Tapi memang awalnya me-launching-kan brand semacam ini. Brand-nya adalah “Asyik Menata Aset”. Brand itu kenapa di-

Nama	E1. Usulan Pelaksanaan Bintel dan Pelatihan	E2. Forum Konsultasi Rutin	E3. Rapat dan Monitoring	E4. Pendokumentasian Ide melalui Branding
	<p>di gedung yang agak luas itu. Jadi ini kan..ini..eeh kalau dulu pengurus barang pendidikan (sambil menunjukkan foto di layar yaitu foto tim dari bidang aset yang menjadi pengajar). Pak Sugiantoro itu programernya. Kalau co-programer pak Mahsum ini sekarang di LPPM, eeh Badan Penanggulangan Bencana. Ini kepala seksi saya. Ini tim saya. Ini orang sini semua tapi menjadi tim ahlinya sana.</p>		<p>sharing informasi ya.. kalo dari saya kan pelaku ya.. praktisi kemudian temen-temen yang didatangkan, e.. yang datang ke PSEKP mereka briefing nya untuk melakukan apa e.. diklat yang berhubungan dengan pekerjaan mereka jadi di situ akan datang temen-temen semua semacam pengurus barang, PPTK, kemudian apa namanya Bendahara dan seterusnya jadi di situ kita sharing informasi</p> <p>Kalo di bidang aset kan kita, apa namanya khusus di bidang aset apa namanya khusus di bidang aset sendiri kita melakukan pelatihan mandiri, jadi pelatihan kita sendiri yang kita kitaselenggarakan e.. tidak bekerja sama dengan PSEKP tapi kita melakukan pelatihan e.. internal</p> <p>Itu paling tidak e.. sekali dalam setahun pasti ada, jadi meliputi penata usahaan aset tetap, kemudian penata usahaan persediaan, jadi kita kemas dalam bentuk workshop atau semacam apa sarasehan lah istilahnya..</p> <p>Tahun ini.. kita kemaren sudah dalam bentuk workshopnya... e.... penataan aset tetap dan persiapan sensus 2018 sudah kita lakukan di bulan Jun... Mei.. Mei 2018</p>	<p>launching-kan karena apa namanya...eeehh aset itu kan dikelola oleh orang-orang nomor dua kelas. Hebatnya kelas ke sekian dari tataran..tataran kasta pegawai. Jadi gak diperhatikan , kemudian kita coba share dulu agar diperhatikan. Saya launching-kan bukunya, sampai akhirnya pak Bupati pun, eeh..nempel stiker label-label dan kita minta juga wakil bupati menempelkan stiker di apa namanya...eeehh sekolah. Jadi gaungnya sampai ke kecamatan. Jadi supaya karena goalnya tadi asyik dan itu menjadi minta perhatian, ya..kita minta ada pencaanangan khusus, pencaanangan dan sosialisasi. Akhirnya kan sekarang itu pengurus barang menjadi..oohh saya itu diperhatikan. Itu..jadi mereka dalam pembuatan laporan..bekerja.</p> <p>Cuma yang saya terapkan hanya e.. semangat di bidang ekonomi bahwa brand sebuah brand itu penting. Jadi waktu di ekonomi saya punya kegiatan waktu itu untuk me.. membuat branding Kulonprogo yang The Jewel of Java itu ah.. itu saya terapkan di bidang aset, kita juga buat brand Asik Menata Aset</p> <p>Karena saya, saya pribadi suka dengan yang baru ya, yo challenge ya.. jadi dalam artian saya kurang begitu suka dalam kondisi speedy ya, jadi kondisi yang.. nyaman gitu, bagi saya harus ada tantangan-tantangan dalam hidup nah.. saya melihatnya e.. kok Kulonprogo ini lebih dari.. 7 tahun tidak WTP itu kenapa kan gitu, jadi itu.. itu sebuah tantangan dari dulu sebenarnya e.. saya juga tidak serta merta karena saya di pindah tapi saya juga pernah bicara dengan Pak Sekda waktu itu e.. sanggupkah saya me.. menata aset itu lebih baik kan gitu sebelum saya dipindah ke sini, karena kan tidak semua orang kan mau menjadi Kepala Bidang Aset karena dalam tanda kutip tidak ada apa-apanya kan, yang ada hanya masalah-masalah gitu aja, tapi ternyata setelah saya duduk di sini masalah itu menjadikan berkah</p>

Lampiran 20: Framework Matrix Wawancara tentang Proses Kombinasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
5 : Alif Romdhoni		<p>Alif Romdhoni</p> <p>Iya.. jadikan kita setiap melalui mekanisme apel dan jam pimpinan jadi kan kita tiap senin sampe Kamis apel pagi jelas, kemudian ada setiap bulan sekali rapat struktural, nah.. di rapat struktural itu pimpinan pasti menegaskan baik secara kegiatan maupun tanggung jawab di masing-masing lingkup tugas di PPTK, eslom 4 dan eslom 3 di bawahnya untuk memantau bagaimana progres terutama yang sedang in.. pada saat itu. Misalnya kita rapat pada bulan Februari, Maret, pada bulan Maret misalnya, yang sedang in kan Maret itu kan PBB penyampaian pajak berjalan, nah.. biasanya pimpinan bagaimana progresnya untuk PBB berjalan kita, nanti digabungkan bagaimana secara realisasinya target-target untuk Kecamatan seperti apa, nah.. itu yang dilakukan pimpinan. Tapi e.. ketika akan nanti turun dari kan level terendahnya nanti kan sampe staf ya, sampe staf jadikan pimpinan kan hanya ke secara struktural nah nanti dari struktural kan.. ada istilahnya apa ya.. transfer lagi ke.. ke temen-temen di.. ke jajarannya yang punya staf untuk mekanismenya</p> <p>Alif Romdhoni</p> <p>Ya.. kita kan kadang yang dikirim itu kan mungkin tahun yang A yang katakanlah, tahun kemaren si B katakanlah, ya.. si A dan si B ini ketika anu ya.. nanti menjadi leader ketika harus memberikan pencerahan ketika kemudian ada pertanyaa, ketika ada hal yang kemudian masih belum jelas ya.. referensinya dari si A dan si B, termasuk misalnya BPHTB, BPHTB itu kan kebetulan hak tanah dan bangunan, biasanya temen-temen itu sering kali ah.. ini ini.. saksi bisu sebenarnya, ketika ada seseorang datang ada transaksi intinya ingin keringanan karena mungkin nggak dapet jalan nek sekian itu terlalu</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>mahallah dari harga pasar lah. Nah.. temen-temen yang pernah didiklatkan penilai properti itu yang nanti akan berbicara, bisa ya bisa tidak. Jadi bisa dikabulkan bisa tidak, kembali ke... nanti bagaimana itu kondisi riil di lapangan bahkan ada sampe kunjungan lapangan untuk memastikan bener po yang disampaikan itu seperti itu. Karena kan untuk menentukan kan juga dilihat dari lingkungan juga, jangan sampe nanti dia mengajukan keringanan katakanlah 10 juta padahal lingkungan sekitar dia kemaren payune sampe 100 juta seperti itu, jadi temen-temen yang penilai-penilai kita kan punya penilai properti itu yang akan memberikan penjelasan-penjelasan itu yang langsung kepada masyarakat ya.. jadi ini tuh tempat konsultasi bagi masyarakat yang ingin yang.. merasa keberatan dengan BHPBB yang 3% dan 2%</p> <p>Alif Romdhoni Ya.. yang jelas langsung alhamdulillah kita secara regulasi kita tidak ada yang menabrak aturan ya, kan kadang di-class action ya.. sebuah regulasi atau katakanlah ini kamahalan ya output secara langsungnya kita bisa melihat bagaimana kondisifitas secara objek pajak termasuk secara umumnya kan blom toto, ketika kemudian secara regulasi tidak ada kan paling nek pemerintah kan di-class action-kan dari aspek itu ketika terjadi, nah... selama ini kan kita belum menemui hal-hal seperti itu walaupun kalau bahasanya temen-temen dewan, ah.. itu kan entuk iki kan melalui sendiri, tidak berani mengambil resiko, yang kemudian ya.. tapi apa boleh buat ya.. memang itulah yang kita lakukan, jadi artinya secara langsung ketika temen-temen datang mendapatkan ilmu, kemudian bisa menjadi transfer learning, menjadi motivator, kemudian secara regulasi yang ada, kemudian bisa tidak ada yang dikecewakan kemudian bisa menerima dengan baik tanpa harus, nah.. itu yang selama ini yang secara langsung dirasakan ya seperti itu</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.		<p>Emerha e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya? Nur Hadiyanto Ya.. Emerha e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistamkan semua itu dari mana pak? Nur Hadiyanto o.. nggeh mensistamkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh? Emerha Awal-awal SIMDA.. Nur Hadiyanto Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh? Bu sri Nggeh, dari anggaran dulu Nur Hadiyanto Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA Bu sri Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih Nur Hadiyanto Dilatih, tahun piro itu mbak Bu sri 2011 Nur Hadiyanto 2011 nggeh Bu sri Maksude le.. nopo.. le.. mulai.... Nur Hadiyanto Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011 Emerha Itu latar belakang harus menggunakan</p>	<p>Nggih tentu selalu digunakan. Kalau apa, biasanya kan terutama di Bappeda. Jadi hasil-hasil penelitian setelah izin penelitian itu diberikan, kemudian ee ketika selesai kan dia wajib menyampaikan satu eksemplar nggih dikembalikan ke kita itu. Nggih beberapa digunakan sebagai bahan itu.</p> <p>Saya pernah yang, nggih kalau nanti dikembalikan dan ada rekomendasi yang harus kita lakukan biasanya digunakan. Yang pernah saya ikuti itu penelitian tentang ini, PAD dua kali. Jadi dia sih sederhana saja hanya analisis elastisitas PAD.</p> <p>Iya. Mana-mana yang sektor-sektor PAD yang masih bisa digenjot, mana yang sudah jenuh katakanlah dengan apa itu, dia masih kontribusi besar tapi pertumbuhan dengan apa dari,</p> <p>Iya diagram pertumbuhan. Ini kesininya pertumbuhan, ini kesininya kontribusi. Nah, itu to. Ya itu dulu pernah di. Ya walaupun mungkin yang lain-lain ndak tau ya. Artinya 100 penelitian digunakan, seratus-seratusnya atau seratus penelitian digunakan satu ya saya agak kurang, tapi yang pernah saya ikuti kalau ada rekomendasi dari penelitian yang memang penting dan bermanfaat pasti digunakan sebagai paling nggak bahan untuk merumuskan kebijakan.</p> <p>Oh, penelitian-penelitian luar. Ee biasanya itu menjadi salah satu, iya dipake juga sih sebagai salah satu konsideran. Biasanya misalnya merumuskan Renstra dan sebagainya, itu kan kita nek bahasa ekonomi itu perlu mempertimbangkan rata-rata industry. Katakanlah sebagai pembanding to misalnya tingkat ketergantungan terhadap Pusat atau derajat apa istilahnya disentralisasi seperti apa itu kan kita selalu membandingkan diri dengan luar gitu. terutama dengan ini, terutama dengan empat Kabupaten dan satu Kota yang sewilayah DIY. Nah, kita itu selalu membandingkan diri</p>	

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. dulu sebelum itu manual</p> <p>Bu sri</p> <p>Dulu pake e..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Apa namanya dulu..?</p> <p>Bu sri</p> <p>SIPK...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondri yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator</p> <p>Emerha</p> <p>Berarti dia yang sering dikirim ke sana</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang..</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini?</p> <p>Bu sri</p> <p>Jarang</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Jarang...</p> <p>Bu sri</p> <p>Kalo update kan Cuma via...</p>	<p>dengan Bantul, Sleman, Gunung Kidul. APBD kita tahun ini berapa, oh ternyata Bantul, Sleman, Gunung Kidul sekian. Biasanya dari hasil penelitian orang-orang terhadap Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Jadi kita gunakan. Terutama BPS ya lembaga luar</p> <p>Nggih. Kalau di Kulon Progo boleh saya katakan empat, kalau di sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada empat pendekatan ya. Pendekatan teknokratik, partisipatif, kemudian pendekatan politik atau perwakilan lewat dewan, yang satu itu apa, ini masalah Musrenbang dan sebagainya. Saya kira kalau diukur derajatnya itu, sisi teknokratiknya itu cukup lumayan mewarnai perencanaan pada umumnya. Jadi tidak semata-mata politis asal usulane dewan terus bisa terwujud itu ya nggak. Ada porsi-porsi memang ee nope, usulan-usulan dari dewan. Tapi lebih ke teknokratiknya itu kental misalnya Bupati menghendaki sekarang misalnya apa ee postur APBDDlah katakanlah. Tahun ini APBD kita berapa, 1, 5 T nanti berapa persen ini untuk infrastruktur, berapa persen itu udah arahan dari berapa persen untuk pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang untuk bantuan sosial berapa itu ada arahan untuk seperti itu. Jadi porsi-porsi itu sudah secara garis besar ditentukan dulu porsi APBDnya nanti ya terjemahannya kita berebut kuenya sudah sesuai porsinya itu.</p> <p>Iya. Jadi nggih. Dulu kayaknya ada kok penelitian bluegreen ekonomi (06:59). Tapi tahun berapa ya saya dulu pernah jadi tim di Bappeda. Kita melihatnya persektor kontribusi PDRB bidang-bidangnya itu. Jadi bidang perdagangan berapa, bidang pertanian berapa. Nah, ini diukur dengan tadi itu, sama apa istilahnya ini jendela Jauhari Window ya. Hehe. Ini yang kontribusinya berapa, ini pertumbuhannya berapa. Kalau yang bagus kan kontribusi besar pertumbuhan besar itu yang digenjot. Nah strateginya kan itu. Jadi</p>	

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya..., hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri? Bu sri Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus.. Nur Hadiyanto Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh Bu sri Sama gratis Emerha Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..? Nur Hadiyanto Pak Mondy kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehehe (narasumber tertawa)</p>	<p>kalau dia pertumbuhannya tinggi tapi kontribusinya kecil, nah strateginya mungkin nah itu nanti dia butuh alokasi APBD yang berapa sih untuk me-maintenance pertumbuhan. Semacam itu. Kita juga anu kok dulu, tenaga ahli, ada Pak siapa yang dari PSEKP itu.</p>	

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Bu sri Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak.. Nur Hadiyanto Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya.. Emerha Yang teknis ya.. Nur Hadiyanto Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan Emerha Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya? Nur Hadiyanto Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatonya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa) Emerha Itu siapa itu, emang udah di.. Nur Hadiyanto Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman Bu sri Sleman dereng.. Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak...</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iseh PKD nggeh?</p> <p>Bu sri</p> <p>Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Sistem yang lebih..</p> <p>Bu sri</p> <p>Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri</p> <p>Bu sri</p> <p>Di kembangkan sendiri...</p> <p>Q.2. Model eksternalisasi</p> <p>Emerha</p> <p>Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya</p> <p>Emerha</p> <p>Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Mereposisi tawarnya kuat</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan</p> <p>Emerha</p> <p>Pembinaan..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan</p> <p>Emerha</p> <p>Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana?</p> <p>Nur Hadiyanto</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK</p> <p>Emerha</p> <p>Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi</p> <p>Emerha</p> <p>Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondri itu</p> <p>Emerha</p> <p>Oh.. itu tiap berapa bulan pak?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali</p> <p>Emerha</p> <p>Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Maksudnya?</p> <p>Emerha</p> <p>Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kalo SIMDA ya.. BPKP</p> <p>Emerha</p> <p>Selain SIMDA, selain SIMDA</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi Emerha</p> <p>Dari Provinsi ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai</p> <p>Emerha</p> <p>Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C.. CSE.. CSM ya.. untuk pencairan?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa</p> <p>Emerha</p> <p>Itu.. itu punya siapa CMS itu..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya punya BPD, CMS itu kan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA</p> <p>Emerha</p> <p>Bis</p>		
11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>Iswandari Artiningsih</p> <p>E, ngak sih. Kalau kita itu yang kita lakukan standarnya ya aturan pusat.</p> <p>Iswandari Artiningsih Pusat seperti apa, amanahnya yang dalam peraturan disebut seperti apa itu yang kita terapkan. Itu aja.</p>			
12 : Kuni Mas'adah		<p>e.. kebetulan terkait dengan pelaksanaan non tunai ini pernah kita pernah ada yang ikut magang di Pusat yaitu di bidang perbendaharaan, mereka yang ikut magang ke sana sedangkan yang harus melaksanakan adalah kita di e.. pengelola keuangan, ya kita tanya perlakuannya itu kepada mereka</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Ya.. kalo ada e.. aturan-aturan baru yang harus menyesuaikan, kalo ada aturan-aturan baru, kemudian e.. begitu ada aturan baru e.. ada yang usul, e.. ini aturan saya baru saya harus.., aturan mereka harus disesuaikan kalo toh mereka belum tahu kan mereka langsung akan melihat aturan baru untuk menyesuaikan aturan-aturannya</p> <p>Jarang, karena hasilnya kami e.. katakanlah kami diskusi oh.. hasilnya A, begitu hasilnya A, kita tanyakan kepada atasan secara beknizem, oh ya.. memang sebaiknya seperti itu, tapi kalo atasan e.. oh tidak sebenarnya e.. alurnya itu gini gini gini, kita akan diberikan penjelasan. Nah.. penjelasan seperti itulah yang nanti akan kita terapkan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan itu. Jadi kami jarang mendokumentasikan e.. diskusi-diskusi yang sifatnya hanya spontanitas</p> <p>Tidak-tidak-tidak-tidak, oh kami ada masalah katakanlah masalah seperti ini ini ini, diskusi temen-temen seperti ini bagaimana, oh.. sebenarnya memang seperti itu, atau oh.. tidak harusnya ini-ini-ini, kalo seperti itu kami langsung sampaikan ke temen-temen, kami laksanakan seperti apa, hasil arahan itu atasan..</p>		
13 : Lukman Hakim, S.E., M.M.	<p>Di Temanggung pada tanggal sebelum puasa itu 12 Mei itu. Tanya-tanya tentang yo sana. Misalnya saya peroleh sana itu pajak mineral bukan logam dan batuan itu tidak ditarik.</p> <p>Ya itu suatu ketika bisa dijadikan referensi misalnya Kulon Progo bisa aja punya kebijakan seperti Temanggung yang eksplorasi MBLB nya dihentikan atau dikurangi bisa.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p>	<p>Ha itu kan hasilnya itu yang anu, yang ee apa istilahnya membuat kebijakan kita pendataan di lapangan itu memakai sistem tol pendapatan, tol pendataan. Itu hasil dari sosialisasi itu.</p> <p>Pendataan truk yang lewat itu ditanya pakai itu (36:50), diberikan itu, suruh ngisi formulir dari PT apa gitu. Nanti di situ dipegang kita, hasilnya itu surat pemberitaan pajak daerah. Itu seperti itu. itu baru juga, itu strategi baru mulai bulan September 2017 baru dilaksanakan.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup.</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
	<p>Sistem informasinya kalau pengembangan nggak ada.</p> <p>Nggak. Karena di sini itu hanya koordinator saja, teknisnya di bidang pajak. Soalnya bidang pajak itu sekarang sedang mengembangkan Simda dari BPKP itu. seadanya gitu.</p> <p>Ha'a. itu adanya di bidang pajak.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p>	<p>Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p> <p>Ha'a. Mau mulai target akhir tahunlah peraturan Bupati itu sudah jadi. Nanti biar digunakan untuk 2019 jika diperlukan sebagai dasar regulasi untuk pemeriksaan itu, pegangan pedoman. Pemeriksaan kan harus ada Perbup to. Standar pemeriksaan itu apa, terus syarat-syaratnya itu kan di Perbup itu sebagai pegangan kita untuk melakukan, untuk melangkah gitu lo.</p>		
14 : Meylani Lestari	<p>Iya.. misalnya toko ATK di.. idealnya sih.. membagi wilayah, daerah yang rame, daerah yang.., kan kita kan 12 kecamatan</p> <p>Makanya... nanti keputusannya mau pilih harga rata-rata kah atau harag tertinggi kah</p> <p>He'e, jadi kalo bapak jadi tokonya itu.. kami.. minta tolong gitu untuk menjadi responden kan ada uang jasa untuk pengisian blanko, karena data yang kita minta memang sangat banyak, bahkan nggak nggak sekali jadi nanti kadang-kadang kita balikin.. balik lagi ke tempat itu udah selesai apa belum, kalo cuman sedikit kita langsung tanya jawab aja</p> <p>Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu</p> <p>He'e.. , dan setiap kalo ada perubahan, kalo</p>	<p>Jadi mengikuti aturan Pusatnya ya pak ya, ada yang aturan Pusat yang sudah ada yang berubah, kita juga belum mengikuti juga ada, hibah. He'e.. hibah wasis kan sudah ada yang keluar yang terbaru 2018 perubahannya</p> <p>Jadi DPRD punya hak adminitratif itu to, kita baru e.. nyusun itu dua perubahannya sama Perbup SHBJ yang untuk 2019</p> <p>SHBJ, Standar Harga.. e.. Standarisasi Harga Barang dan jasa untuk digunakan 2019 gitu satu perbup, SHBJ, sama dua.. dua.. perubahan</p> <p>Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu</p> <p>Perbup yang lama udah tuh ya..., kita susulin Perbup yang baru, dengan item yang dirubah</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
	<p>ada kenaikan..</p> <p>Karena kalo Cuma sekedar di upload kan belum tentu yang mau pake, oh.. udah ada aturan baru kok nggak tahu gitu, jadi produk yang udah jadi..</p> <p>Iya.., kalo nggak ada di sini ya.. salinannya kita di kasihkan, karena kita yang mengusulkan Perda atau Perbup itu nanti sama bagian hukum kita diberikan salinan gitu, jadi mau ngopy ke kita bisa, ngopy langsung ke bagian hukum juga bisa, download juga bisa</p>	<p>apa aja udah itu tok yang..</p> <p>Kita baru pembahasan 3 kali, belum jadi, masih proses pembahasan di Bab belanja, pembahasan kita sedikit demi sedikit, ini bahas ini dulu, ini dulu, ini dulu selesai finalisasi setuju nggak dengan..</p> <p>Kemaren itu pelaksanaannya memang baru dalam bentuk instruksi Bupati, itu menindak lanjuti dari SK Mendagri terkait transaksi non tunai ini, untuk tahun ini, ini akan di apa namanya e.. regulasinya akan dituangkan dalam Perbup</p> <p>Perbup, sudah ada induk sebetulnya, induk nomer 1 tahun 2017 ya pak, tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Masih secara umum</p> <p>e.. nggak ada, e.. itukan itu kalo udah jadi produknya Perbup atau pun Perda itu udah jadi output nya bagian hukum</p> <p>E.. bagian Kabupaten terutama OPD nya bagian hukum, kalo dari kami keluaran kami adalah draft atau wel.. Raperbup gitu kalo udah ranahnya mempublikasikan produk hukum udah di bagian hukum jadi tidak double publikasi ya pak</p> <p>Tidak kalo kami itu bener-bener mengolah secara substansinya.. kalo bagian hukum proses legal draftingnya saja, sudah jadi di dalamnya itu sudah tidak ada.. apa pak, maksudnya apa yang harus di buat itu sudah selesai. Sana itu tinggal pengesahan, pengundangan.. gitu ya pak ya.. sama proses penyusunan proses apa ya pak ya.. ya pembuatan perdana itu. Semua pembahasannya di kita, bagian hukum dilibatkan ketika penyusunan, mereka mengikuti dan memberikan sumbang saran kayak gitu, tapi proses dari kita, yang rapat kita, yang bahas kita, semua kita, draft udah jadi bagian hukum, kita minta tolong untuk diterbitkan tapi melalui pak Sekda atau Pak</p>		

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
		<p>Bupati gitu</p> <p>Kalo Perbup baru dua itupun perubahan.. perubahan Perbup tentang.. saya ndak apal ya.. tentang ini e.. apa namanya hak administrasi, administratif DPRD</p> <p>He'e.. tetapi hanya satu personil atau ada yang 3 personil seperti itu, mereka kita bagi-bagi tugas gitu. Kaitan dengan harga konstruksi kita minta orang PU, kaitan dengan harga alat-alat kesehatan itu kita minta orang Dinkes gitu pak, pembagian sesuai dengan Tupoksi nya, kalo alat tulis kan itu, cenderung general kan semua menggunakan di kita ya.. kita.. ya pak ya.. yang lakukan pokoknya survei dulu. Udah survei dapat data harga kita memutuskan data harag yang dipakai mau harga rata-rata atau harga yang tertinggi dan berapa margin yang akan digunakan, karena nyusunnya sekarang makeknya besok gitu, udah.. kira rapat dapet harga kita rapatkan dan pembahasannya langsung ke TAPD seperti itu. Udah rapat ke TAPD masih ada item-item apa yang nggak disetujui ya nanti kita perbaiki lagi ada harga yang dinilai belum apa ya.. nggak mengikuti e.. harga sekarang ya kita survei ulang gitu. Udah rapat beberapa kali ada tanggapan ya.. kita perbaiki selesai, sudah kita proses bagian hukum, bagian hukum tinggal memproses Perdanya e.. Perbup nya...</p> <p>Jadi barang-barang apa yang mau kita masukan di draft itu kita cantumkan di sana nanti tinggal harganya yang mengisi yang pihak ketiga yang kita survei gitu, nah.. kita biasanya menggunakan 3 data ada pasar pak.., ada 3 pasar</p>		
15 : Nasip, S.E.	<p>He'em. Jad kan katakanlah sekarang ada wajib pajak datang ke sini, katakanlah mau ee berkaitan dengan pajak ee restoran. Pertama mereka kan melaporkan, melaporkan jadi dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, terus nanti kan masuk di aplikasi bidang penetapan. Penetapan kan mengentry data</p>		<p>Kalau berkaitan dengan yang luar itu biasanya kita berkaitan dengan masalah ee aturan. Katakanlah kita kalau mau menyusun Perbup itu biasanya kita adopsi, kita melakukan studi referensi.</p>	

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
	yang mereka laporkan. Dari aplikasi itu bisa otomatis diterbitkan surat ketetapan pajaknya. Nah, itu nanti kan langsung bisa diprint dari data yang sudah dimasukkan tadi, nanti bisa disampaikan ke BP. Nanti dari BP itu kan ee menerima ketetapan, kalau sudah bayar nanti bidang bendahara itu memasukkan ke aplikasi. Nah, nanti bagi yang di subbid penerimaan itu nanti buka, oh ini sudah bayar. Otomatis sudah bisa ditampilkan. Tetapi sudah sampai jatuh tempo di subbid penerimaan ternyata masih kosong berarti kan mereka belum bayar. Lah, kemudian di subbid penagihan juga buka yang adminnya penagihan itu buka, oh ternyata yang sudah jatuh tempo dan belum bayar itu ini ini ini. Nanti terus diproses dari aplikasi itu sudah bisa muncul ee surat ketetapan pajak kurang bayar.			
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.	<p>Itu. Jadi bermula dari sana. Jadi ide itu saya punya buku ya sebentar, ada filenya nanti bisa dicopy. Mungkin dari buku itu njenengan bisa anu. Sebentar. Mungkin bisa dipakai. Diary. Nah mungkin ini bisa dipakai nanti. Karena membaca dari sini nanti. Iya. Nanti di copy aja.</p> <p>Heém. Ya intinya semacam ini, intinya saya ingin menyampaikan bahwa aset itu sebenarnya gak susah gitu. Cuma permasalahannya kita kan melupakan melupakan bahwa kita kan harus istiqomah didalam melaksanakan penatausahaan aset. Terlebih-lebih kalau untuk persediaan ya. Persediaan, faktur data, barang yang ada ya dicatat. Kemudian apa namanya transaksi ke luar ya langsung dilakukan pengeluaran. Sehingga pada akhir periodik mau pemeriksaan kita apa namanya tidak sudah kan gitu. Selama ini kan kendalanya kan dana itu juga masih ada yang ngerjakan model kebut semalam itu. Masih banyak semacam itu. Tapi sebenarnya kalau itu ditata dan ini terlebih-lebih yang untuk obat ya. Kalau obat kita sudah sampaikan ke teman-teman ya satu hari buat laporan ya hari itu juga selesai. Sehingga untuk yang SIM yang obat kan di</p>	<p>Iya. Iya kita ada buat buat Protap, buat prosedur, buat apa namanya aturan-aturan yang kita apa namanya ya semacam itu anunya. Tetapi yang terpenting kan bagi saya kan gini semua yang ada itu kalau bisa kan dituliskan. Jadi kalau kita gak punya aturannya ya kita buat aturannya. Itu kalau kita ya buat seperti ini.</p> <p>Dan goalnya akhirnya kita masukkan semua itu ada dalam rencana kita Bappeda.</p> <p>Iya. Tapi itu . . . (24:15) kita masukkan di Renstra.</p> <p>Ada. Training dari Pemerintah pusat kita kita apa namanya, kita ikutkan jadi apa namanya untuk hal-hal yang sifatnya ee sifatnya ada tambahan-rambahan aturan baru dan sebagainya itu kita anu. Itu kebanyakan udah sharing ke tempat-tempat.</p> <p>Hem.. untuk Perda sudah ada, Perda pengelolaan daerah yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perbup nya, perbup otonomi daerah, terus ada Perbup tentang sewa-menyewa barang milik daerah, sewa kemudian Perbup barang bongkarang, dari</p>	<p>Makanya waktu itu kan saya terus kemudian e.. apa e.. ngumpulkan materi, materi hasil pemeriksaan Nyonya itu kan e.. berkenaan dengan temuan-temuan aset dan jadilah buku “Meraih Opini WTP Apa Adanya” yang.. yang dikarang oleh ahli vidia, kalo bisa googling itu meraih buku apa, meraih opini WTP apa adanya ahli vidia, inilah yang kita pakai sebagai bahan pembelajaran di PSEKP</p> <p>Jadi itu.. saya kan dulu BPK, kemudian materi-materi dia saya kumpulkan, kemudian apa namanya e.. di edit kemudian apa namanya kita jadikan buku diterbitkan oleh BPFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi ya itulah yang kita pake untuk selama itu, saya nggak ada bukunya pas habis, biasanya peserta minta memang itu</p> <p>Ada beberapa apa.. beberapa mahasiswa yang apa namanya e.. yang.. ada di S2 itu ada S1 pernah itu ada beberapa itu, ada bukunya ya saya serahkan ke.. BKAD to, semua sudah ada.. ada.. di sana, jadi yang seperti mas, jenengan ini, itu apa namanya minta waktu, minta diskusi kemudian mereka kirimkan hasil penelitiannya kan gitu. Ya.. intinya memang ya.. permasalahan aset itu.. menjadi</p>	

Nama	K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal	K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan	K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian	K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya
	<p>luar SIM tadi ada kita membangun SIM baru namanya SIMO. Jadi sistem informasi manajemen obat. Jadi kita buat secara online untuk semua puskesmas dan farmasi. Sehingga obat yang keluar dari bidang farmasi sekian dari puskesmas mana saja itu bisa juga dilihat. Dan itu obatnya apa namanya teman-teman pengelola obat mereka kan mendapat resep dari dokter kemudian mereka ngetik. Nah, itu pada saat mereka ngetikkan e-tiket ambil obat untuk pasien itu otomatis mereka sudah membuat laporan. Laporan pengeluaran jadi mereka tidak perlu dua kali kerja. Selama ini kan ngurus di e-tiket pake tangan kemudian ngetik lagi, nanti ngentry lagi.</p> <p>Ya.., jadi kita kan untuk untuk apa namanya.. oh yang anu.. yang untuk.. untuk aset kita, kita belum online, kita masih offline, jadi modelnya masih apa mereka setor flashdisk, tapi data base kita ada di server kita.. kita urus sendiri jadi...</p> <p>Jadi nanti hasil akhirnya kita uploadkan dalam bentuk pdf ke.. kita pdf kan, jadi yang kemaren yang apa namanya, salah satu untuk pen.. e.. apa e.. untuk transparansi keuangan adalah waktu me.. menampilkan data aset Pemerintah kabupaten Kulonprogo selain data anggaran</p> <p>Ya.. setiap tahun hasil RKPD, jadi setiap.. apa namanya setiap akhir tahun hasil RKPD e.. kita uploadkan untuk neraca akhir tahun</p>	<p>barang bongkaran gedung, kemudian Perbup tentang e.. tindak lanjut e.. peraturan Bupati, keputusan Bupati tindak lanjut dari sensus. Kemudian penilaian barang milik daerah nah kita tindak lanjut di situ</p> <p>Jadi ee diawal mungkin saya bisa cerita, oke nanti gambarnya bisa banyak bercerita dokumentasi. Nah kenapa saya dokumentasikan semacam ini karena saya juga kerja sama sama apa namanya di PSEKP saya harus berinteraksi dengan peserta-peserta latihan dari berbagai apa daerah kan gitu. Saya melaksanakan apa yang yang sekarang saya jalankan. Jadi itu nanti ee ya jadi kita ada satgas WTP waktu itu kemudian....</p> <p>Iya, jadi.. kan sana yang meminta dari PSEKP yang selalu membagi iya..</p>	<p>kendala utama kan mulai opini WTP, tapi kalo sekarang untuk BKAD sekarang kan dengan pencapaiannya hampir sudah sekitar 300.., kalo 2000, kalo RKPD 2016 itu sekitar 386 Kabupaten kota yang sudah WTP</p>	

Lampiran 21: Framework Matrix Wawancara tentang Proses Internalisasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
5 : Alif Romdhoni			<p>Alif Romdhoni</p> <p>Sudah jadi SOP, jadi apa yang di dapat oleh temen-temen ketika anu.. kita juga ada SOP lapangan nih.. kemudian mereka diklat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru itu misalnya bisa dari karena regulasi karena teori nah.. kemudian di praktekkan ya SOP ini yang kemudian di sesuaikan jadi ya.. ada perubahan terhadap SOP ketika temen-temen dan SOP ini kan sebenarnya perubahannya kan tidak hanya regulasi yang berubah tapi dengan struktur kelembagaan yang berubah, ketika ada force major yang kemudian anu kan bisa di..</p>	<p>Alif Romdhoni</p> <p>Artinya ketika seseorang semakin lama expertnya semakin tinggi di satu sisi, tapi ketika ini nanti ada proses promosi ini yang mau nggak mau. Nah.. ini yang kadang memang e.. apa ya.. menjadi kendala bersama, ketika proses promosi atau pengisian mutasi tanpa memperhitungkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. kalau secara internal sebenarnya ya sudah terjadi ya ada transfer, bahkan ketika seseorang yang sudah pinter ini kemudian dipindah karena tuntutan katakanlah mungkin karir, nah.. kalau yang muncul dari bawah sudah terkaderkan itu nggak masalah. Nah.. masalahnya yang muncul itu justru dari luar yang mungkin tidak memiliki kapasitas latar belakang pendidikan kemampuan untuk itu. Tapi yang terjadi di internal ini rata-rata misalnya contoh di sebelah itu, kemaren promosinya yang kemaren dilibatkan itu memang staf yang membidangi itu yang kemudian promosi, jadi artinya tidak ada masalah di proses kaderisasi</p> <p>Alif Romdhoni kalau yang sudah ahli, paling senior pak Lukman</p> <p>Alif Romdhoni Nggeh..., dia di pengembangan jadi sudah berapa belasan tahun dia di BKAD ini, mau wawancara YBS?</p> <p>Alif Romdhoni Oh bisa.. jadi diantara temen-temen pendapatan kan saya baru, pak win baru, Pak Kabid baru, yang paling senior yang paling itu kan pak Lukman dia ada di pengembangan pendapatan. Jadi dia.. wah.. lebih anu.. saya pun kalau anu tanya beliau</p>
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.	Iya. Jadi kita itu, nah ini dulu memang anu ya strateginya Pak Bupati yang mungkin kurang	Heém. Bukan nggih. Di sana kemudian kita diberi pelajaran itu. Ee dua hari kalau nggak salah waktu itu semacam short course gitu terus	Emerha e.. saya ingin yang e.. mendalami yang	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
	<p>terdokumentasi. Artinya porses-prosesnya mungkin kemudian dilupakan karena. Jadi awal-awal Pak Hasto menjabat itu dibentuk tim yang lintas SKPD. Jadi waktu itu tiga tim, tiga tim lintas SKPD. Jadi ada tim ekonomi kerakyatan, ada tim investasi, sama tim penataan Kota Wates. Saya ingat betul kebetulan saya anggota tim di ekonomi kerakyatan waktu itu. Nah, ini anggotanya beberapa apa ya eselon tiga eselon empat di seluruh SKPD, ada eselon duanya selaku pengarah. Itu kita di ini kok, ya semacam dicuci otak di sekolahkan di PSEKP UGM saya waktu itu. Kalau yang tim lain saya nggak tahu, mungkin di UGM di anu yang lain nggih. Kalau yang penataan Kota Wates mungkin yang MPKD lah, di MPKD sana. Kalau saya di PSEKP itu. Ya itu di anu dilibatkan kemiskinan kemudian, padahal saya dulu waktu itu saya masih bertugas di Bawasda beda (36:21). Tapi diminta untuk jadi tim itu tentang kemiskinan dan lain-lain. Strategi. Kita satu tim itu kemudian</p>	<p>brainstorming kira-kira dengan Kulon Progo seperti ini, program apa yang yang bisa diajukan gitu. jadi sebanyak-banyaknya program dan tidak semuanya berhasil lo sebenarnya. Kalau yang airku, bila beli ini kan yang berhasil-berhasil. Yang berhasil itu hanya sedikit, lebih banyak yang tidak berhasil. Tapi ya memang orang harus mencoba kan gitu</p> <p>Dalam tim Bappeda yang punya. Atas tiga tim ini hasil karya ini tim ini apa aja ini Bappeda yang punya. Nah itu. Jadi ada. Berapa yang gagal ya senkudaya yang gagal. Jadi senkudaya itu maksudnya mau menyaingi alfamart indomaret yang jejaring itu. Jadi tadi kalau alfamart gerai itu kan ada alfaria trijaya ya yang pemasok dan anu. Kalau ini KAKB warung KAKB KAKB gitu nanti maunya senkudaya yang sentra perkulaka posdaya yang support barang. Kemudian kalau ada barang dari sini bisa dipasarkan ke semua jaringan. Konsepnya seperti itu tapi itu kurang berhasil.</p> <p>Tidak. Ini nek beliau-beliau ini asli program. Kalau yang faktor pendukung tadi ini keuangan kan pendukung ya, SDM keuangan. Pendukung pemerintahan itu lewat BPKP tadi. Jadi dengan BPKP itu selain ini, saya itu ikut pelatihannya BPKP itu berapa kali nggih, nggak terhitung. Tiga kali empat kali tentang sistem keuangan daerah. Dulu dari undang-undang 22 yang dulu dengan Permen berapa, undang-undang 99 itu. Hehe. Permen berapa sampai yang sekarang Permen 13 itu.</p> <p>Iya. Itu dulu. Kami dikirim untuk pelatihan sistem keuangan daerah ke BPKP. Dan beberapa juga teman-teman ini saya kira beberapa juga mengikuti yang dengan UGM dulu itu yang LKD-KKD.</p> <p>Iya. Kursus keuangan daerah sama latihan keuangan daerah. LKD-KKD pelatihan. Ya kalau anu itu sistemnya. Jadi memang dikirim-dikirim gitu, dikirim pelatihan, dikirim kursus, diklat.</p>	<p>kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya? Nur Hadiyanto Ya.. Emerha e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak? Nur Hadiyanto o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh? Emerha Awal-awal SIMDA.. Nur Hadiyanto Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh? Bu sri Nggeh, dari anggaran dulu Nur Hadiyanto Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA Bu sri Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pengdengaran di latih, pelaporan dilatih Nur Hadiyanto Dilatih, tahun piro itu mbak Bu sri 2011 Nur Hadiyanto 2011 nggeh Bu sri Maksude le.. nopo.. le.. mulai.... Nur Hadiyanto Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011 Emerha Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu? Nur Hadiyanto Ya.. dulu sebelum itu manual</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>Emerha e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya? Nur Hadiyanto Ya.. Emerha e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak? Nur Hadiyanto o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh? Emerha Awal-awal SIMDA.. Nur Hadiyanto Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh? Bu sri Nggeh, dari anggaran dulu Nur Hadiyanto Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA Bu sri Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih Nur Hadiyanto Dilatih, tahun piro itu mbak Bu sri 2011 Nur Hadiyanto 2011 nggeh Bu sri Maksude le.. nopo.. le.. mulai.... Nur Hadiyanto Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011 Emerha Itu latar belakang harus menggunakan SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu? Nur Hadiyanto Ya.. dulu sebelum itu manual Bu sri Dulu pake e..</p>	<p>Bu sri Dulu pake e.. Nur Hadiyanto Apa namanya dulu..? Bu sri SIPK.. Nur Hadiyanto SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat Emerha Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan? Nur Hadiyanto Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondri yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang.. Bu sri Kalo update kan Cuma via.. Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>Nur Hadiyanto Apa namanya dulu..? Bu sri SIPK... Nur Hadiyanto SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat Emerha Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan? Nur Hadiyanto Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondri yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang... Bu sri Kalo update kan Cuma via... Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini</p>	<p>selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya.., hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri? Bu sri Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus... Nur Hadiyanto Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh Bu sri Sama gratis Emerha Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..? Nur Hadiyanto Pak Mondri kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehehe (narasumber tertawa) Bu sri Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak.. Nur Hadiyanto</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>ya..., hehehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Okey pak, nggak apa-apa,</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh</p> <p>Emerha</p> <p>Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya..</p> <p>Bu sri</p> <p>Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Permendagri 13..</p> <p>Emerha</p> <p>SL... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri?</p> <p>Bu sri</p> <p>Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh</p> <p>Bu sri</p> <p>Sama gratis</p> <p>Emerha</p> <p>Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Pak Mondri kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehehe (narasumber tertawa)</p> <p>Bu sri</p> <p>Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p>	<p>Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya..</p> <p>Emerha</p> <p>Yang teknis ya..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan</p> <p>Emerha</p> <p>Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya?</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatonya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondri itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondri. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa)</p> <p>Emerha</p> <p>Itu siapa itu, emang udah di..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul,</p> <p>Sleman</p> <p>Bu sri</p> <p>Sleman dereng..</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh.. Sleman masih PKD nggeh..</p> <p>Bu sri</p> <p>Buatan sendiri</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Oh buatan sendiri</p> <p>Emerha</p> <p>Buatan sendiri</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Bantul saja?</p> <p>Bu sri</p> <p>Bantul kaleh.. Kulonprogo</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Kota dan Gunung Kidul</p> <p>Bu sri</p> <p>Belum pak...</p> <p>Nur Hadiyanto</p> <p>Iseh PKD nggeh?</p> <p>Bu sri</p> <p>Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum..</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan Emerha Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya? Nur Hadiyanto Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatormya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa) Emerha Itu siapa itu, emang udah di.. Nur Hadiyanto Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman Bu sri Sleman dereng.. Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak... Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto</p>	<p>Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP Emerha Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP Emerha Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul</p>	<p>aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi Emerha Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak? Nur Hadiyanto Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondit itu Emerha Oh.. itu tiap berapa bulan pak? Nur Hadiyanto Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali Emerha Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga? Nur Hadiyanto Maksudnya? Emerha Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA? Nur Hadiyanto Kalo SIMDA ya.. BPKP Emerha Selain SIMDA, selain SIMDA Nur Hadiyanto Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi Emerha</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belanja Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
			<p>Dari Provinsi ya.. Nur Hadiyanto Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai Emerha Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C.. CSE.. CSM ya.. untuk pencairan? Nur Hadiyanto Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa Emerha Itu.. itu punya siapa CMS itu..? Nur Hadiyanto Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA Emerha Bisa</p>	
10 : Eko Catur Setyawati, S.E.			<p>Iya. Jadi lebih lebih anu sih neg lebih malah lebih ee apa ya masuknya itu lebih kalau dalam dari SMEA lo Mas sampai general debit kreatif.</p> <p>Ya itu lerning by doing pada akhirnya ya. Jadi kan gini Mas, setiap tahun itu kan masalah yang dihadapi gak mesti sama. Kesulitan-kesulitannya itu pasti anu gak sama setiap tahunnya itu. Pasti yang tim pendamping kan dari Aklap tim pendamping yang setiap ada masalah ini gimana ada keadaan sepeti ini mohon solusinya misalnya. . . . (16:25) itu seperti apa sebenarnya kayak kayak gitu. Pas misalnya katakanlah kita jurnal kayak gini, debit gini, kredit gini tapi pas dientry ke SIMDA sampai LO neraca gak balance nah itu ada solusi lagi gimana gitu lo.</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
11 : Iswandari Artiningsih, S.E.	<p>Iswandari Artiningsih a, pak Taufik dengan timnya juga sering diundang, He em. Sampai ke Maluku sampai kemana.</p> <p>Iswandari Artiningsih Dan sama lah gitu. paling kalau ketika ada studi banding yang kita cuma sharing, gitu aja. Diskusi gitu aja.</p> <p>Iswandari Artiningsih Semua sih pulau Jawa Iswandari Artiningsih Sumatera sering. Kadang Pemdanya kadang dewannya.</p> <p>Iswandari Artiningsih 2013, He em. Tapi sebelum itu memang udah banyak yang studi banding untuk hal lain gitu toh.</p> <p>Iswandari Artiningsih Kalau yang khusus tentang bagaimana penerapan akrual basis ya sejak kita WTP itu. Banyak beberapa Pemda yang studi banding ke kita.</p> <p>Iswandari Artiningsih Pak Taufik itu mulai merintis database yang baik, menciptakan aplikasi lah akhirnya e, berbuah manis. Kita punya database asisten baik mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik. akhirnya kita bisa WTP. Nah aplikasi nya itu sudah sudah banyak dipakai di daerah-daerah lain, mungkin nanti bisa konfirm ya.</p>		Iswandari Artiningsih me.. laksanakan pengelolaan keuangan yang baik. mempertanggungjawabkannya dengan baik, transparansi sesuai ketentuan yaitu aja sih sebenarnya yang selalu berusaha kita pertahankan dan kita tingkatkan.	
12 : Kuni Mas'adah	<p>Saya belum pernah dengar untuk saing antar Kabupaten, paling kalo Kabupaten lain ke sini itu dalam rangka e.. studi komparasi gitu</p> <p>e.. seperti itu, kalo mungkin kita juga terkait dengan kebutuhan menyamakan visi itu kita studi komparasi pernah juga kita studi komparasi tapi terkait e.. hibah dan bantuan sosial</p>	<p>Anggaran Bimtek itu ada dianggarkan, tapi itu minim sekali, anggaran Bimtek itu hanya 12 juta untuk satu Kabupaten, satu.. Instansi kita ini untuk satu tahun, sedangkan untuk hal-hal seperti itu, Bimtek seperti itu, paling ndak satu orang anggarannya 5 juta, kita paling hanya bisa mengirim 2 orang dalam satu tahun, itu tahun-tahun kemaren. Tahun ini saya tidak tahu kita masih ada anggaran Bimtek apa ndak, dan di Bimtek itu biasanya, Bimtek yang sangat-sangat-sangat urgent kan terkait dengan hal-hal yang baru. Kalo terkait pengelolaan keuangan jelas aturan semuanya regulasinya sudah ada itu mungkin sudah tidak penting lagi. Bimtek itu terkait dengan aturan-aturan yang bener-bener</p>		

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		baru, dan benar-bener urgent kita harus laksanakan		
13 : Lukman Hakim, S.E., M.M.	<p>O iya bisa. Memang bahan yang disampaikan pada saat sosialisasi ya bisa itu. Bisa semua.</p> <p>Saya sudah ada kegiatan di anu, di DPA di APBD ada, dananya disediakan.</p>			
14 : Meylani Lestari	<p>di.. DIY dulu ya kita, di DIY dulu, tapi ya kita ke Gunung Kidul, kita ke Sleman, kita juga menghubungi Bantul pokoknya daerah yang deket dulu dan kita di satu Provinsi</p> <p>He'e pada saat sebelum penyusunan, ya kalo daerah lain sudah punya ya kita berkaca dulu sama yang udah punya bagaimana di sana aplikasinya e.. cocok nggak sama kita, sama nggak. Hal yang baik ya.. kita rujuk ya pak ya..</p> <p>Iya.. kami juga.. iya... kami juga mengantarkan dokumennya ke OPD-OPD gitu</p> <p>Kan selain dipublikasikan ke bagian, kalo dibagian hukum secara apa.. media elektronik ya, kita juga masih secara manual hard copynya kita berikan</p> <p>Nggak.. kalo sosialisasi, bagian hukum yang mensosialisasikan, paling nanti kita selaku yang membidangi diajak gitu biasanya seperti itu</p>			
15 : Nasip, S.E.	Lah laporannya iya. Kebanyakan kan sekarang pajak daerah itu dari yang MBLB	Ya kalau itu mesti kita koordinasikan dulu, lebih-lebih kalau itu aturan dari pemerintah pusat Karena kita punya forum ya kita bicarakan		Kalau saya memandang ya kaitannya dengan masalah ee pajak ini karena yang sudah lama di sini itu kan yang di subbid penetapan itu.

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
	<p>berapa ini berapa berapa. Kita kan juga ada aturan kaitannya dengan masalah data ini kan mana yang boleh diberikan mana yang tidak kan itu juga ada.</p>	<p>di forum mau tindak lanjutnya seperti apa. Seperti halnya kaitannya dengan masalah ee NJOPTKP yang tidak kena pajak itu kan sampai saat ini pemahaman kan masih berbeda-beda. Dan sampai saat ini juga belum ada ee jawaban yang secara pasti bahwa untuk NJOTKP itu hanya kena satu kali itu belum ada jawaban. Jadi kita kemarin kan dari masing-masing Kabupaten kan minta bantuan dengan Provinsi untuk bisa mengkonsultasikan dengan Kementerian, tetapi ya mereka belum bisa memberikan jawaban yang pasti bahwa itu hanya sekali itu belum ada. Sehingga kita masih menerapkan ya sesuai persepsi kita. Pokoknya setiap pengajuan ee itu yang kena NJOTKPnya.</p> <p>Ee secara pastinya bisa. Karena selama ini kan ya kita akui kaitannya dengan masalah ee data ini kadang kita sulih nggih, sulit untuk bisa menyusun secara baik itu kita sulit. Tapi dengan bantuan para ahli, kemudian juga adanya hasil dari forum, kemudian juga dari diklat ini akan semakin mungkin menambah wawasan kita. Karena selama ini kita kan kadang cuman tahu, oh ternyata untuk pajak ini kita satu hanya menggunakan hanya dua jenis tariff tapi ternyata kita konsultasi dengan para ahli itu gak masalah, penetapan itu gak harus dua tariff to. Tetapi kita hanya berpedoman pada undang-undangnya itu kan maksimal itu kan ee sampai dengan angka 0,3 katakanlah seperti itu. Kalau kita kan selama ini tahunya cuma dua tapi ternyata . . . (40:15) tari itu bisa dibuat mau berapa saja bisa hanya patokannya itu sampai setingginya itu cuman 0,3.</p> <p>Kalau menurut saya itu tidak hanya di bidang pajak kaitannya dengan masalah keingin tahuan, kaitannya dengan masalah ee yang berkaitan dengan pekerjaan itu saya rasa kok tidak terlalu dominan.</p> <p>Iya. Karena apa? Katakanlah kita ada pengetahuan lebih, ada diklat tersendiri tetapi efek dari apa yang mereka ee terima itu tidak berpengaruh dan belum ada pengaruhnya terhadap kinerja mereka.</p>		<p>Mas Eko itu.</p> <p>Iya. Itu kan sudah dari dulu, dari staff dulu kan</p> <p>Ya justru. Nggih. Kadang itu yang saya minta bantuan untuk bisa memberikan penjelasan.</p> <p>Ya kalau ee kaitannya dengan masalah sosialisasi karena saya belum pernah melaksanakan nggih selama di sini, tapi saya yakin untuk Mas Eko memang sudah bisa dijadikan sebagai sumber untuk bisa memberikan penjelasan. Karena kadang saya juga kalau ada hal-hal yang kurang tahu itu saya coba minta Mas Eko.</p>

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
		<p>Ya kalau saya memandang mereka memang betul-betul pengen menambah pengetahuan mereka. Ya memang betul-betul sadar kaitannya dengan masalah pekerjaan mereka. Tetapi kadang-kadang juga ada yang istilahnya apa ya, pengen ikut kemudian tapi kendalanya setelah ikut mereka kemudian dimutasi. Ha itu yang menjadi tidak . . . (42:20), wah pengen ikut itu ya kadang seperti itu.</p> <p>Ya mungkin. Nggih nggih. Tetapi waktu saya di kecamatan itu juga saya menemui ada orang seperti itu kok. Jadi yang satunya itu saya dorong untuk bisa segera menyelesaikan akhirnya mereka berhasil mengikuti penyesuaiannya, akhirnya bisa menjadi 3A. Tetapi ada dua orang yang saya dorong dorong sampai saya itu, kalau ada memang permasalahan tolong dikatakan. Kalau kaitannya dengan masalah di kampus ini ada yang siap membantu itu yo jawabnya enaknya saja. Pokoknya ya wes, berarti kan</p> <p>Ya itu yang mandiri. Kalau yang dibiayai oleh Pemda itu malah justru mereka bertanggungjawab. Ndak berani mau seenaknya, ndak berani. Karena kan konsekuensinya nanti kalau anu kan mengembalikan.</p> <p>Yang mandiri he'e. Saya kan sudah sampai bilang eman-eman lo njenengan iki istilahnya sudah keluar banyak sekian juta tinggal hanya sedikit saja menyelesaikan skripsi kok tidak dikerjakan itu eman-eman to.</p> <p>Iya. Kalau untuk kaitannya dengan masalah pengen pengetahuannya meningkat kok saya rasa kok tidak. Karena relevansinya dengan pekerjaan kan juga berbeda.</p>		

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.	<p>Iya. Yang kita-kita. Wonogiri, Tegal, Talang, Tagalog, Sumatera, . . . (28:00) sudah kita.</p> <p>Oh, ada kita kerja sama dengan Malaka. Jadi Malaka itu kita kerja sama ee Malaka. Jadi ini satu-satunya kemaren saya baru apa namanya bekerja atas nama Pemda. Nah, ini Malaka kita membuat surat . . . (32:37) mereka. Jadi Bupati Malaka mebuat surat kepada Bupati Kulon Progo untuk kita melakukan apa namanya ee workshop dengan program milik daerah.</p> <p>Kita terapkan kemaren terakhir itu di Kabupaten Batang. Ini kalau kota yang kerja sama kita sejak 2013 itu Kota Bontang sampai sekarang. Jadi teman-teman itu ke sana 4 kali dalam setahun. Jadi bermula dari kerja sama tadi, ya semacam itu.</p> <p>Ya... yang khusus yang berkenaan dengan manajemen aset mungkin ada peningkatan, ya.. ya.. paling tidak e... kontribusi yang bisa saya berikan adalah saya bisa sharing tentang pengalaman menata aset itu dengan temen-temen melalui PSEKP, dan ini sebenarnya kan ada ada.. apa.. sosok yang saya saya... kagumi kalo sekarang menjadi Kepala BKAD Gorontalo yaitu bapak Setiojati Kepala BKAD Gorontalo</p> <p>Dia SH. MH coba tulis</p> <p>Bukan saya, siswa itu gara-gara di apa namanya PNS itu ternyata kan bisa gitu lho, jadi saya googling-googling aja</p> <p>Iya menulis, nah saya tulis, itu yang.... yang.. memotivasi saya pertama kali itu... BKAD, apalagi?</p> <p>Agak lupa namanya saya, tapi dia yang menginspirasi saya itu, oh ternyata PNS juga bisa ber.. berkiprah, sebelum kita PNS itu nggak ada kerjaan, PNS nggak bisa anu itu, itu itu.. sesuatu yang salah gitu</p>	<p>Selama ini ya karena kita di sini buka-buka apa kantor ini kan buka setiap hari buka konsultasi.</p> <p>Iya. Jadi setiap hari teman-teman siap menerima konsultasi.</p> <p>Jadi kita berkala ada pelajaran berkala untuk teman-teman yang baru itu.</p> <p>Kadang-kadang sampai kita buat private yang baru ada berapa orang dua orang kita private gitu.</p> <p>Heheheeh, itu saya. kemaren udah anu, udah dari pihak PSEKP sendiri, sudah minta.. minta di.. anu.. minta apa namanya, untuk dikumpulkan itu kemudian kita buat buku gitu, ya.. sebenarnya kalo sudah tersusun di... di mana file sini sudah ada, Cuma ya mungkin nanti kita tindak lanjuti itu, itu.. itu penting juga untuk sharing juga</p> <p>Ya.. ya.. rencana saya juga pengen gitu itu berbagi tadi, seperti.. orang Gorontalo itu</p> <p>Ya.. saya mulai dari persediaan, aset tetap, apa itu optimalisasi, banyak kok ini, ya kelemahan tadi mungkin hampir sera.. hampir 50-an anu adalah yang udah termodifikasi ya..</p>	<p>Ada. Ada yang dalam bentuk Perbup.</p> <p>Ya Perbupnya ada beberapa tadi apa namanya Perbup yang misalnya kalau yang pasti kita ada Pergub sewa barang milik daerah, kemudian ada klasifikasi BUD.</p> <p>Heheheeh, itu saya. kemaren udah anu, udah dari pihak PSEKP sendiri, sudah minta.. minta di.. anu.. minta apa namanya, untuk dikumpulkan itu kemudian kita buat buku gitu, ya.. sebenarnya kalo sudah tersusun di... di mana file sini sudah ada, Cuma ya mungkin nanti kita tindak lanjuti itu, itu.. itu penting juga untuk sharing juga</p>	

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belajar Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
	<p>Ya.. karena kita terlibat di dalamnya ya.. ter.. kita bermain apa.. terlibat di dalam anggota PSEKP ya.. kita melibatkan orang-orang PSEKP selaku akademisi</p> <p>Ya.. kita kan di sini kalo untuk untuk diklat itu kan tugasnya kan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi melalui sharing-sharing informasi ya.. kalo dari saya kan pelaku ya.. praktisi kemudian temen-temen yang didatangkan, e.. yang datang ke PSEKP mereka briefing nya untuk melakukan apa e.. diklat yang berhubungan dengan pekerjaan mereka jadi di situ akan datang temen-temen semua semacam pengurus barang, PPTK, kemudian apa namanya Bendahara dan seterusnya jadi di situ kita sharing informasi</p> <p>Ya.. karena kita terlibat di dalamnya ya.. ter.. kita bermain apa.. terlibat di dalam anggota PSEKP ya.. kita melibatkan orang-orang PSEKP selaku akademisi</p> <p>Ya.. kita kan di sini kalo untuk untuk diklat itu kan tugasnya kan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi melalui sharing-sharing informasi ya.. kalo dari saya kan pelaku ya.. praktisi kemudian temen-temen yang didatangkan, e.. yang datang ke PSEKP mereka briefing nya untuk melakukan apa e.. diklat yang berhubungan dengan pekerjaan mereka jadi di situ akan datang temen-temen semua semacam pengurus barang, PPTK, kemudian apa namanya Bendahara dan seterusnya jadi di situ kita sharing informasi</p> <p>Ya kalau dari sisi ini kan saya dalam artian apalagi dua tahun terakhir itu tahun 2016 gak ada temuan ya. Maksudnya temuan kemaren itu bisa dikoreksi udah selesai, tidak muncul di LHP itu. Bagi saya sudah bahwa oh tugas saya yang selama dulu bidang aset itu tugasnya berat, oh ternyata dengan dengan membangun sistem itu bisa dipermudah. Karena tugas kita kan hanya kompilator saja. Bisa saya rasakan sekarang. Dan kalau dengan kompilator gini kan, wah saya kan</p>			

Nama	I1. Materi PKD sbg Pedoman Sharing Pengalaman	I2. Pelatihan dan Belanja Mandiri	I3. Justifikasi SOP dan Penjelasan Laporan	I4. Ketersediaan Data dan Akses Informasi
	<p>bisa apa namanya berfikir yang lain dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.</p> <p>Ya alhamdulillah sudah lumayan sekarang. Jadi ya mungkin di awal-awalnya dulu yang saya lakukan kan gini, pada awal saya masuk itu kan 60% lah yang 40% itu yang muda-muda. 60% ee pengurus barang itu kan sudah tua. Di atas 45 tahun itu tidak bisa komputer, padahal syaratnya kan harus bisa excel atau word itu. Tidak bisa. Kita ganti, kami minta diganti semuanya. Jadi saya mau jadi kepala bidang aset asal dengan catatan saya minta kesepakatan. Jadi di dalam 5 hari tadi yang saya ada persyaratan itu mengganti . . . (39:24).</p> <p>Ya BPK kan prinsipnya kan yang dilihat kan secara umum kan laporan. Laporan tepat waktu, kemudian kemudahan mereka meminta data. Kalau bagi kami kan data itu kan tidak ada yang harus disembunyikan. Jadi semua semua data yang pada SIM, pada saat BPK masuk ya semua kita serahkan, kita copykan semuanya. Jadi kita kan bicara data itu apa datanya dalam artian kalau seandainya nanti kami salah ya mohon kami dikoreksi bagaimana. Kalau itu yang terpenting dalam penataan pengelolaan aset jangan sampai terjadi Fraud atau kecurangan.</p>			

Lampiran 22: Framework Matrix Wawancara tentang Kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
3 : Khamdan Syakiri, S.Psi	Kalo perencanaan sih.. masalahnya kan kita dikejar deadline waktu ya.. ini ya.. sesuai dengan Permendagri kan ada batasan-batasan waktu kapan dia harus ditetapkan, kapan mungkin akan dilaksanakan, kapan (00.32) harus diserahkan ke DPRD, kendalanya itu kadang-kadang e.. bahan-bahan dari OPD itu terlambat masuk ke kita iya.., usul-usulan kegiatan dari OPD itu terlambat masuk ke kita jadi ya.. karena kita dikejar waktu kemudian bahannya terlambat ya... akhirnya kadang-kadang kita lembur untuk mengejar itu				
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.				<p>Nah, ee ya ini persoalan rent seekers, pemburu rente ini masih apa Mas, menjadi persoalan yang besar dikita nggih. Artinya saya itu sok tanda tangan SP2D kemudian melihat dokumen belanja dnegan foto-foto, dengan pack. Kadang-kadang merasa kok ini mahal banget nek dikerjakan oleh ee rekanan pihak ketiga itu kan dia harus memperhitungkan pajak, kemudian laba yang diperkenankan, laba wajar yang diperkenankan 10%, pajak 10%, biaya-biaya yang lain. Termasuk mungkin ngasih Pimpronya. Hehehe. Jadi jatuhnya mahal.</p> <p>Ya kalau dinilai apa ya, mungkin secara kasat mata saja gawean pemeliharaan kayak gitu kok. Nilainya 100 juta ini lo, haduuh. Hehe. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin masih terjadilah. Jadi persoalan di, karena memang</p>	

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
				kalau semuanya jadi kewenangan, kita, kita sendiri yang juga terlalu berat nggih, kewewegen gitu nek wong Jowo nggih. Kalau kami sampai harus sampai dengan substansinya, sampai dengan materialnya, barangnya, ngecek yo bukan tugas kami. Artinya itu tugasnya inspektorat kan dong. Hehehe. Ngerti.	
12 : Kuni Mas'adah				e.. pengalaman sebagai PPTK ada.. ketika panjar tidak bisa dibayarkan semuanya karena apa.. katkanlah e... ketika kita melaksanakan lembur ternyata anggaran kas lembur kita katakanlah untuk 5 hari tapi e.. pelaksanaan kegiatan kita ternyata dilaksanakan lembur 2 hari sudah cukup artinya akan ada sisa, sisa yang tidak bisa kita laksanakan yang panjar itu, panjar yang diberikan bendahara itu tidak bisa kita SPJ kan nah.. itu kita akan kembalikan, itu adalah kendala namanya kendala saya tidak bisa menyelesaikan anggaran yang sudah di anggarkan. Nah.. e.. tentunya itu akan kita berikan penjelasan karena apa lembur hanya.. maksimal hanya dilaksanakan menye.. menyesuaikan pekerjaan nah... e.. sisa anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan lembur yang akan datang	
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.					Ya secara umum kalau sekarang kan karena paling tidak puncak pimpinan itu sudah sudah tahu bahwa aset berpengaruh terhadap opini, maka mereka sekarang sudah mau memperhatikan pengurus barang itu. Sehingga yang dulunya pengurus barang yang tidak diperhatikan sekarang sudah mendapat perhatian.

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
					<p>Ini kan akan berbeda di dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga secara umum ya permasalahan-permasalahan yang ada itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti dulu kan gitu. sehingga ee bisa kita atasi, kita selesaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau kita awalnya dulu goalnya adalah mencapai opini WTP kan berarti masuk didalam tataran penata usahaan. Penata usahaan sudah clear berarti sekarang sudah masuk didalam pengamanan. Pengamanan selesai dengan baik nanti kan masuk dioptimalisasi. Nah, inilah yang sekarang saya ingin juga mendukung kebijakan besar juga yang sekarang berusaha untuk bagaimana mendapat ee membuat strategi pengelolaan aset itu bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ee langkah yang ingin saya lakukan untuk itu ini untuk tahun 2018 kita mencoba untuk membuat roadmap tentang pengelolaan BUMD yang dalam tanda kutip adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan. Ya kan itu. Nah, salah satunya adalah untuk penguatan permodalan BUMD, kita mencoba menyertakan modal dalam bentuk aset yang biasanya kita penyertaan modal kan dalam bentuk uang. Nah, ini kita coba untuk tahun 2018 ini menyertakan modal tanah kepada dua BUMD, yang dalam hal ini adalah BPD Bank Pasar dan PT. SHK Aset Adikarta masing-masing satu bidang.</p>

Lampiran 23: Framework Matrix Wawancara tentang Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	a. Penyampaian Dokumen Perencanaan di Tingkat SKPD Tidak Tepat Waktu	b. Sebagian Besar Masyarakat Belum Bisa Mengakses Informasi PKD	c. Tidak Ada Petugas yang Mengakuntasikan Transaksi di PPKD	d. Masih Adanya Persoalan Rent Seeker dan Penyerapan Anggaran Rendah	e. Kurangnya Strategi Pengelolaan Aset yg Bisa Meningkatkan Pendapatan Daerah
3 : Khamdan Syakiri, S.Psi	Kalo perencanaan sih.. masalahnya kan kita dikejar deadline waktu ya.. ini ya.. sesuai dengan Permendagri kan ada batasan-batasan waktu kapan dia harus ditetapkan, kapan mungkin akan dilaksanakan, kapan (00.32) harus diserahkan ke DPRD, kendalanya itu kadang-kadang e.. bahan-bahan dari OPD itu terlambat masuk ke kita iya.., usul-usulan kegiatan dari OPD itu terlambat masuk ke kita jadi ya.. karena kita dikejar waktu kemudian bahannya terlambat ya... akhirnya kadang-kadang kita lembur untuk mengejar itu				
8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc.				<p>Nah, ee ya ini persoalan rent seekers, pemburu rente ini masih apa Mas, menjadi persoalan yang besar dikita nggih. Artinya saya itu sok tanda tangan SP2D kemudian melihat dokumen belanja dnegan foto-foto, dengan pack. Kadang-kadang merasa kok ini mahal banget nek dikerjakan oleh ee rekanan pihak ketiga itu kan dia harus memperhitungkan pajak, kemudian laba yang diperkenankan, laba wajar yang diperkenankan 10%, pajak 10%, biaya-biaya yang lain. Termasuk mungkin ngasih Pimpronnya. Hehehe. Jadi jatuhnya mahal.</p> <p>Ya kalau dinilai apa ya, mungkin secara kasat mata saja gawean pemeliharaan kayak gitu kok. Nilainya 100 juta ini lo, haduuh. Hehe. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin masih terjadilah. Jadi persoalan di, karena memang kalau semuanya jadi kewenangan, kita, kita sendiri yang juga terlalu berat nggih, kewewegen gitu nek wong Jowo nggih. Kalau kami sampai harus sampai dengan substansinya, sampai dengan materialnya, barangnya,</p>	

				ngecek yo bukan tugas kami. Artinya itu tugasnya inspektorat kan dong. Hehehe. Ngerti.	
12 : Kuni Mas'adah				e.. pengalaman sebagai PPTK ada.. ketika panjar tidak bisa dibayarkan semuanya karena apa.. katkanlah e... ketika kita melaksanakan lembur ternyata anggaran kas lembur kita katakanlah untuk 5 hari tapi e.. pelaksanaan kegiatan kita ternyata dilaksanakan lembur 2 hari sudah cukup artinya akan ada sisa, sisa yang tidak bisa kita laksanakan yang panjar itu, panjar yang diberikan bendahara itu tidak bisa kita SPJ kan nah.. itu kita akan kembalikan, itu adalah kendala namanya kendala saya tidak bisa menyelesaikan anggaran yang sudah di anggarkan. Nah.. e.. tentunya itu akan kita berikan penjelasan karena apa lembur hanya.. maksimal hanya dilaksanakan menye.. menyesuaikan pekerjaan nah... e.. sisa anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan lembur yang akan datang	
18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.					Ya secara umum kalau sekarang kan karena paling tidak puncak pimpinan itu sudah sudah tahu bahwa aset berpengaruh terhadap opini, maka mereka sekarang sudah mau memperhatikan pengurus

					<p>barang itu. Sehingga yang dulunya pengurus barang yang tidak diperhatikan sekarang sudah mendapat perhatian. Ini kan akan berbeda di dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga secara umum ya permasalahan-permasalahan yang ada itu hanya permasalahan-permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti dulu kan gitu. sehingga ee bisa kita atasi, kita selesaikan dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau kita awalnya dulu goalnya adalah mencapai opini WTP kan berarti masuk didalam tataran penata usahaan. Penata usahaan sudah clear berarti sekarang sudah masuk didalam pengamanan. Pengamanan selesai dengan baik nanti kan masuk dioptimalisasi. Nah, inilah yang sekarang saya ingin juga mendukung kebijakan besar juga yang sekarang berusaha untuk bagaimana mendapat ee membuat strategi pengelolaan aset itu bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, ee langkah yang ingin saya lakukan untuk itu ini untuk tahun 2018 kita mencoba untuk membuat roadmap tentang pengelolaan BUMD yang dalam tanda kutip adalah merupakan kekayaan yang dipisahkan. Ya kan itu. Nah, salah satunya adalah untuk penguatan permodalan BUMD, kita mencoba menyertakan modal dalam bentuk aset yang biasanya kita penyertaan modal kan dalam bentuk uang. Nah, ini kita coba untuk tahun 2018 ini menyertakan modal tanah kepada dua BUMD, yang dalam hal ini adalah BPD Bank Pasar dan PT. SHK Aset Adikarta masing-masing satu bidang.</p>
--	--	--	--	--	--

Lampiran 24: Framework Matrix Dokumentasi tentang Gambaran Umum dan Postur APBD yang Menjadi Objek Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Belanja Lanngsung			
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Barang dan Jasa	3) Belanja Modal
1 : Perda No.11 Tahun 2007	<p>a. Belanja pegawai 1. Semula 2. Bertambah Rp 32.818.934.174,00 Rp 3.156.143.838,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00</p>	<p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00</p>	<p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00 Rp 294.668.648.482,25 Rp 25.179.278.958,65 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 24.674.251.303,86 Jumlah Penerimaan setelah perubahan</p> <p>b. Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah Rp 69.122.706.711,84 Rp 269.489.369.523,60</p>
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	<p>a. Belanja pegawai 1. Semula 2. Bertambah Rp 32.818.934.174,00 Rp 3.156.143.838,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00</p> <p>a. Belanja pegawai 1. Semula 2. Bertambah Rp 32.818.934.174,00 Rp 3.156.143.838,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00</p> <p>a. Belanja pegawai 1. Semula 2. Bertambah</p>	<p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula</p>	<p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00 Rp 294.668.648.482,25 Rp 25.179.278.958,65 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 24.674.251.303,86 Jumlah Penerimaan setelah perubahan</p> <p>b. Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah Rp 69.122.706.711,84 Rp 269.489.369.523,60</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00 Rp 294.668.648.482,25 Rp 25.179.278.958,65 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Pasal 4</p>

Belanja Lanngsung			
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Barang dan Jasa	3) Belanja Modal
	<p>Rp 32.818.934.174,00 Rp 3.156.143.838,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00</p> <p>a. Belanja pegawai 1. Semula 2. Bertambah Rp 32.818.934.174,00 Rp 3.156.143.838,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula 2. Bertambah Rp 280.502.542.802,40 Rp 66.965.808.979,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00</p>	2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00	<p>(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 24.674.251.303,86 Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah Rp 69.122.706.711,84 Rp 269.489.369.523,60</p> <p>c. Belanja Modal 1. Semula 2. Berkurang Rp 347.468.351.781,00 Rp 35.975.078.012,00 Rp 294.668.648.482,25 Rp 25.179.278.958,65 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 24.674.251.303,86 Jumlah Penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1. Semula 2. Bertambah Rp 69.122.706.711,84 Rp 269.489.369.523,60</p>
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.399.750.700,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.304.806.799.246,00	c. Belanja Modal sejumlah Rp. 362.984.344.169,00
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	<p>a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.399.750.700,00</p> <p>a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.399.750.700,00</p> <p>a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.399.750.700,00</p> <p>a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.399.750.700,00</p>	<p>b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.304.806.799.246,00</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.304.806.799.246,00</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.304.806.799.246,00</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.304.806.799.246,00</p>	<p>c. Belanja Modal sejumlah Rp. 362.984.344.169,00</p> <p>c. Belanja Modal sejumlah Rp. 362.984.344.169,00</p> <p>c. Belanja Modal sejumlah Rp. 362.984.344.169,00</p> <p>c. Belanja Modal sejumlah Rp. 362.984.344.169,00</p>

Belanja Lanngsung			
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Barang dan Jasa	3) Belanja Modal
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.32.818.934.174,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 280.502.542.802,40	c. Belanja Modal sejumlah Rp 294.668.648.482,25
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.32.818.934.174,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 280.502.542.802,40	c. Belanja Modal sejumlah Rp 294.668.648.482,25
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.32.818.934.174,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 280.502.542.802,40	c. Belanja Modal sejumlah Rp 294.668.648.482,25
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.32.818.934.174,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 280.502.542.802,40	c. Belanja Modal sejumlah Rp 294.668.648.482,25
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.32.818.934.174,00	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 280.502.542.802,40	c. Belanja Modal sejumlah Rp 294.668.648.482,25

Belanja tidak langsung							
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Bunga	3) Belanja Hibah	4) Belanja Bantuan Sosial	5) Belanja Bagi Hasil	6) Belanja Bantuan Keuangan	7) Belanja Tidak Terduga
1 : Perda No.11 Tahun 2007	a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula 2. Bertambah Rp 615.789.620.030,75 Rp 10.592.230.095,79 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54	b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 Rp Rp Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan c. Belanja subsidi 1. Semula 622.211.979,17 158.454.139,17 Rp 463.757.840,00	d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah 0,00 0,00 Rp 0,00 Rp 22.914.500.000,00 Rp 7.293.575.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00 Rp 27.586.200.000,00 144.854.400,00 Rp 27.731.054.400,00	f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1. Semula 2. Berkurang Rp 9.400.826.245,00 Rp 3.111.909.500,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 6.288.916.745,00	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula 2. Berkurang h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00	h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.515.689.298,11 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.515.689.298,11
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula 2. Bertambah Rp 615.789.620.030,75 Rp 10.592.230.095,79 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula 2. Bertambah Rp 615.789.620.030,75 Rp 10.592.230.095,79 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula 2. Bertambah Rp 615.789.620.030,75 Rp 10.592.230.095,79	b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 Rp Rp Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan c. Belanja subsidi 1. Semula 622.211.979,17 158.454.139,17 Rp 463.757.840,00 b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 Rp Rp Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan c. Belanja subsidi 1. Semula 622.211.979,17 158.454.139,17 Rp 463.757.840,00 b. Belanja bunga 1.	d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah 0,00 0,00 Rp 0,00 Rp 22.914.500.000,00 Rp 7.293.575.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00 d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah 0,00 0,00 Rp 0,00 Rp 22.914.500.000,00 Rp 7.293.575.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan e. Belanja Bantuan	e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00 Rp 27.586.200.000,00 144.854.400,00 Rp 27.731.054.400,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00 Rp 27.586.200.000,00 144.854.400,00 Rp 27.731.054.400,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula	f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1. Semula 2. Berkurang Rp 9.400.826.245,00 Rp 3.111.909.500,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 6.288.916.745,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1. Semula 2. Berkurang Rp 9.400.826.245,00 Rp 3.111.909.500,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 6.288.916.745,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula 2. Berkurang h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula 2. Berkurang h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.515.689.298,11 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.515.689.298,11 h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.515.689.298,11 Jumlah Belanja Tidak

Belanja tidak langsung							
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Bunga	3) Belanja Hibah	4) Belanja Bantuan Sosial	5) Belanja Bagi Hasil	6) Belanja Bantuan Keuangan	7) Belanja Tidak Terduga
	<p>Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</p> <p>b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54</p> <p>a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula 2. Bertambah Rp 615.789.620.030,75 Rp 10.592.230.095,79</p> <p>Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</p> <p>b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54</p>	<p>Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 Rp Rp</p> <p>Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan</p> <p>c. Belanja subsidi 1. Semula 622.211.979,17 158.454.139,17 Rp 463.757.840,00</p> <p>b. Belanja bunga 1. Semula 2. Berkurang Rp 626.381.850.126,54 Rp Rp</p> <p>Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan</p> <p>c. Belanja subsidi 1. Semula 622.211.979,17 158.454.139,17 Rp 463.757.840,00</p>	<p>Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00</p> <p>d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah 0,00 0,00 Rp 0,00 Rp 22.914.500.000,00 Rp 7.293.575.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan</p> <p>e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00</p> <p>d. Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah 0,00 0,00 Rp 0,00 Rp 22.914.500.000,00 Rp 7.293.575.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan</p> <p>e. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00</p>	<p>2. Bertambah Rp 30.208.075.000,00 Rp 27.586.200.000,00 144.854.400,00 Rp 27.731.054.400,00</p>	<p>dan Pemerintah Desa 1. Semula 2. Berkurang Rp 9.400.826.245,00 Rp 3.111.909.500,00</p> <p>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 6.288.916.745,00</p> <p>f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1. Semula 2. Berkurang Rp 9.400.826.245,00 Rp 3.111.909.500,00</p> <p>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 6.288.916.745,00</p>	<p>Rp 152.750.618.660,00</p> <p>g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula 2. Berkurang h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00</p> <p>g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1. Semula 2. Berkurang h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00</p>	<p>Terduga setelah perubahan Rp 3.515.689.298,11</p> <p>h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.515.689.298,11</p> <p>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.515.689.298,11</p> <p>h. Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Bertambah Rp 153.959.609.500,00 Rp 1.208.990.840,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 152.750.618.660,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 1.515.689.298,11</p> <p>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.515.689.298,11</p>
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 618.845.503.494,66	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 477.109.379,00	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.949.790.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 20.738.700.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.601.319.000,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.562.215.875,32

Belanja tidak langsung							
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Bunga	3) Belanja Hibah	4) Belanja Bantuan Sosial	5) Belanja Bagi Hasil	6) Belanja Bantuan Keuangan	7) Belanja Tidak Terduga
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 618.845.503.494,66	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 477.109.379,00	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.949.790.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 20.738.700.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.601.319.000,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.562.215.875,32
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 618.845.503.494,66	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 477.109.379,00	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.949.790.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 20.738.700.000,00		g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.562.215.875,32
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 618.845.503.494,66	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 477.109.379,00	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.949.790.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 20.738.700.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.601.319.000,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.562.215.875,32
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 618.845.503.494,66	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 477.109.379,00	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.949.790.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 20.738.700.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.601.319.000,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.562.215.875,32
					f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 6.601.319.000,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 152.922.961.000,00	
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.789.620.030,75	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 622.211.979,17	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.914.500.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 27.586.200.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 9.400.826.245,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 153.959.609.500,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Belanja tidak langsung							
Nama Dokumen	1) Belanja Pegawai	2) Belanja Bunga	3) Belanja Hibah	4) Belanja Bantuan Sosial	5) Belanja Bagi Hasil	6) Belanja Bantuan Keuangan	7) Belanja Tidak Terduga
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.789.620.030,75	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 622.211.979,17	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.914.500.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 27.586.200.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 9.400.826.245,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 153.959.609.500,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.789.620.030,75	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 622.211.979,17	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.914.500.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 27.586.200.000,00		g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 153.959.609.500,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.789.620.030,75	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 622.211.979,17	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.914.500.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 27.586.200.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 9.400.826.245,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 153.959.609.500,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
	a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.789.620.030,75	b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 622.211.979,17	d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 22.914.500.000,00	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 27.586.200.000,00	f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 9.400.826.245,00	g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 153.959.609.500,00	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,00

Dana Perimbangan			
Nama Dokumen	1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Hasil Pajak	2) Dana Alokasi Umum	3) Dana Alokasi Khusus
1 : Perda No.11 Tahun 2007	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula 2. Berkurang Rp 29.250.013.000,00 Rp 1.005.300.000,00 Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Berkurang Rp 28.244.713.000,00 Rp 718.490.508.000,00 Rp 12.621.568.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 Rp 231.472.513.000,00 Rp 2.350.893.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 233.823.406.000,00
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula 2. Berkurang Rp 29.250.013.000,00 Rp 1.005.300.000,00 Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula 2. Berkurang Rp 29.250.013.000,00 Rp 1.005.300.000,00 Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula 2. Berkurang Rp 29.250.013.000,00 Rp 1.005.300.000,00 Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1. Semula 2. Berkurang Rp 29.250.013.000,00 Rp 1.005.300.000,00 Jumlah Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Berkurang Rp 28.244.713.000,00 Rp 718.490.508.000,00 Rp 12.621.568.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Berkurang Rp 28.244.713.000,00 Rp 718.490.508.000,00 Rp 12.621.568.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Berkurang Rp 28.244.713.000,00 Rp 718.490.508.000,00 Rp 12.621.568.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Berkurang Rp 28.244.713.000,00 Rp 718.490.508.000,00 Rp 12.621.568.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula	c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 Rp 231.472.513.000,00 Rp 2.350.893.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 233.823.406.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 Rp 231.472.513.000,00 Rp 2.350.893.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 233.823.406.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 Rp 231.472.513.000,00 Rp 2.350.893.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 233.823.406.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00 Rp 231.472.513.000,00 Rp 2.350.893.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 233.823.406.000,00

Dana Perimbangan			
Nama Dokumen	1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Hasil Pajak	2) Dana Alokasi Umum	3) Dana Alokasi Khusus
		2. Bertambah Rp 705.868.940.000,00	
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.678.780.000,00	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 260.428.865.000,00.
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.678.780.000,00	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 260.428.865.000,00.
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.678.780.000,00	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 260.428.865.000,00.
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.678.780.000,00	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 260.428.865.000,00.
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.678.780.000,00	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 705.868.940.000,00	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 260.428.865.000,00.
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 29.250.013.000,00.	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00.	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 231.472.513.000,00
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 29.250.013.000,00.	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00.	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 231.472.513.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 29.250.013.000,00.	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00.	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 231.472.513.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 29.250.013.000,00.	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00.	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 231.472.513.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 29.250.013.000,00.	b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 718.490.508.000,00.	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 231.472.513.000,00

Lain Lain					
Nama Dokumen	1) Pendapatan Hibah	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dari Pemda Lainnya	3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4) Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	5) Dana Desa
1 : Perda No.11 Tahun 2007	e. Pendapatan Hibah 1. Semula 2. Bertambah Rp 19.425.064.373,00 Rp 2.249.215.544,00 Rp 4.044.521.032,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan f. Sumbangan Pihak Ketiga 1. Semula Rp 6.293.736.576,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 71.351.328.300,00 Rp 4.527.066.334,20 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Rp 50.890.070.000,00 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp 2. Bertambah 0,00 Rp 19.425.064.373,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	b Dana Desa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 77.627.477.000,00 0,00 Rp 77.627.477.000,00
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	e. Pendapatan Hibah 1. Semula 2. Bertambah Rp 19.425.064.373,00 Rp 2.249.215.544,00 Rp 4.044.521.032,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan f. Sumbangan Pihak Ketiga 1. Semula Rp 6.293.736.576,00 e. Pendapatan Hibah 1. Semula 2. Bertambah Rp 19.425.064.373,00 Rp 2.249.215.544,00 Rp 4.044.521.032,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan f. Sumbangan Pihak Ketiga 1. Semula Rp 6.293.736.576,00 e. Pendapatan Hibah 1. Semula 2. Bertambah Rp 19.425.064.373,00 Rp 2.249.215.544,00 Rp 4.044.521.032,00 Jumlah Pendapatan Hibah	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 71.351.328.300,00 Rp 4.527.066.334,20 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 71.351.328.300,00 Rp 4.527.066.334,20 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 71.351.328.300,00 Rp 4.527.066.334,20 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Rp 50.890.070.000,00 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Rp 50.890.070.000,00 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Rp 50.890.070.000,00 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp 2. Bertambah 0,00 Rp 19.425.064.373,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp 2. Bertambah 0,00 Rp 19.425.064.373,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp 2. Bertambah 0,00 Rp 19.425.064.373,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula	b Dana Desa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 77.627.477.000,00 0,00 Rp 77.627.477.000,00 b Dana Desa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 77.627.477.000,00 0,00 Rp 77.627.477.000,00 b Dana Desa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 77.627.477.000,00 0,00 Rp 77.627.477.000,00 b Dana Desa 1. Semula 2. Bertambah/berkurang Rp Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 77.627.477.000,00 0,00 Rp 77.627.477.000,00

Lain Lain					
Nama Dokumen	1) Pendapatan Hibah	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dari Pemda Lainnya	3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4) Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	5) Dana Desa
	setelah perubahan f. Sumbangan Pihak Ketiga 1. Semula Rp 6.293.736.576,00 e. Pendapatan Hibah 1. Semula 2. Bertambah Rp 19.425.064.373,00 Rp 2.249.215.544,00 Rp 4.044.521.032,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan f. Sumbangan Pihak Ketiga 1. Semula Rp 6.293.736.576,00			Rp 2. Bertambah 0,00 Rp 19.425.064.373,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 41.821.400.000,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 77.536.045.119,45	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.62.250.000.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 70.000.000.000,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.889.191.000,00
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 41.821.400.000,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 77.536.045.119,45	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.62.250.000.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 70.000.000.000,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.889.191.000,00
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 41.821.400.000,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 77.536.045.119,45	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.62.250.000.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 70.000.000.000,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.889.191.000,00
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 41.821.400.000,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 77.536.045.119,45	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.62.250.000.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 70.000.000.000,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.889.191.000,00
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 41.821.400.000,00	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 77.536.045.119,45	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.62.250.000.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 70.000.000.000,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.889.191.000,00
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 2.249.215.544,00.	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 71.351.328.300,00.	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.50.890.070.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.627.477.000,00
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 2.249.215.544,00.	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 71.351.328.300,00.	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.50.890.070.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.627.477.000,00

Lain Lain					
Nama Dokumen	1) Pendapatan Hibah	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dari Pemda Lainnya	3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4) Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda Lainnya	5) Dana Desa
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 2.249.215.544,00.	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 71.351.328.300,00.	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.50.890.070.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.627.477.000,00
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 2.249.215.544,00.	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 71.351.328.300,00.	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.50.890.070.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.627.477.000,00
	a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 2.249.215.544,00.	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 71.351.328.300,00.	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.50.890.070.000,00	f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00.	e. Dana Desa sejumlah Rp.77.627.477.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Nama Dokumen	1) Pendapatan Pajak Daerah	2) Hasil Retribusi Daerah	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4) Lain-lain PAD yang Sah
1 : Perda No.11 Tahun 2007	a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 81.519.038.320,79 Rp 38.494.939.969,50 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 43.024.098.351,29	b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 8.840.603.205,00 Rp 1.433.405.626,87 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13 Rp 13.806.411.232,81 Rp 1.976.984.530,73 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula 2. Bertambah Rp 15.783.395.763,54 Rp 117.048.960.202,99 Rp 59.566.101.195,66 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 81.519.038.320,79 Rp 38.494.939.969,50 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 43.024.098.351,29	b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 8.840.603.205,00 Rp 1.433.405.626,87 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13 Rp 13.806.411.232,81 Rp 1.976.984.530,73 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula 2. Bertambah Rp 15.783.395.763,54 Rp 117.048.960.202,99 Rp 59.566.101.195,66 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
	a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 81.519.038.320,79 Rp 38.494.939.969,50 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 43.024.098.351,29	b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 8.840.603.205,00 Rp 1.433.405.626,87 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13 Rp 13.806.411.232,81 Rp 1.976.984.530,73 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula 2. Bertambah Rp 15.783.395.763,54 Rp 117.048.960.202,99 Rp 59.566.101.195,66 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
	a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 81.519.038.320,79 Rp 38.494.939.969,50 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 43.024.098.351,29	b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 8.840.603.205,00 Rp 1.433.405.626,87 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13 Rp 13.806.411.232,81 Rp 1.976.984.530,73 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula 2. Bertambah Rp 15.783.395.763,54 Rp 117.048.960.202,99 Rp 59.566.101.195,66 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
	a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 81.519.038.320,79 Rp 38.494.939.969,50 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 43.024.098.351,29	b. Hasil Retribusi Daerah 1. Semula 2. Berkurang Rp 8.840.603.205,00 Rp 1.433.405.626,87 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1. Semula 2. Bertambah Rp 7.407.197.578,13 Rp 13.806.411.232,81 Rp 1.976.984.530,73 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Semula 2. Bertambah Rp 15.783.395.763,54 Rp 117.048.960.202,99 Rp 59.566.101.195,66 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Pendapatan	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Nama Dokumen	1) Pendapatan Pajak Daerah	2) Hasil Retribusi Daerah	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4) Lain-lain PAD yang Sah
	Pajak Rp. 57.687.397.290,89	8.325.783.127,13	Dipisahkan sejumlah Rp. 15.531.111.952,62	125.524.979.373,89.
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	a. Pendapatan Pajak Rp. 57.687.397.290,89	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.325.783.127,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 15.531.111.952,62	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 125.524.979.373,89.
	a. Pendapatan Pajak Rp. 57.687.397.290,89	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.325.783.127,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 15.531.111.952,62	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 125.524.979.373,89.
	a. Pendapatan Pajak Rp. 57.687.397.290,89	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.325.783.127,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 15.531.111.952,62	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 125.524.979.373,89.
	a. Pendapatan Pajak Rp. 57.687.397.290,89	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.325.783.127,13	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 15.531.111.952,62	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 125.524.979.373,89.
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 81.519.038.320,79	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.840.603.205,00.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.806.411.232,81.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 117.048.960.202,99.
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 81.519.038.320,79	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.840.603.205,00.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.806.411.232,81.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 117.048.960.202,99.
	a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 81.519.038.320,79	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.840.603.205,00.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.806.411.232,81.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 117.048.960.202,99.
	a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 81.519.038.320,79	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.840.603.205,00.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.806.411.232,81.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 117.048.960.202,99.
	a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 81.519.038.320,79	b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 8.840.603.205,00.	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.806.411.232,81.	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 117.048.960.202,99.

Pembiayaan					
Nama Dokumen	1) Silpa Tahun Lalu	2) Penerimaan Pinjaman Daerah	b. Pengeluaran Pembiayaan	1) Penyertaan Modal Pemda	2) Pembayaran Pokok Utang
1 : Perda No.11 Tahun 2007	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 25.426.041.134,86 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2. Bertambah Rp 6.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula Rp 9.000.000.000,00 Rp 2. Bertambah/berkurang Rp 731.500.000,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
2 : Perda No.11 Tahun 2017~APBD Perubahan 2017	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 25.426.041.134,86 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2. Bertambah Rp 6.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula Rp 9.000.000.000,00 Rp 2. Bertambah/berkurang Rp 731.500.000,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 25.426.041.134,86 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2. Bertambah Rp 6.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula Rp 9.000.000.000,00 Rp 2. Bertambah/berkurang Rp 731.500.000,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 25.426.041.134,86 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2. Bertambah Rp 6.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula Rp 9.000.000.000,00 Rp 2. Bertambah/berkurang Rp 731.500.000,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1. Semula 2. Bertambah Rp 44.448.455.407,98 Rp 25.426.041.134,86 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1. Semula 2. Bertambah Rp 6.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula Rp 9.000.000.000,00 Rp 2. Bertambah/berkurang Rp 731.500.000,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
3 : Perda No.13 Tahun 2017	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.000.000.000,00			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.254.000.000,00

Pembiayaan					
Nama Dokumen	1) Silpa Tahun Lalu	2) Penerimaan Pinjaman Daerah	b. Pengeluaran Pembiayaan	1) Penyertaan Modal Pemda	2) Pembayaran Pokok Utang
4 : Perda No.13 Tahun 2017~APBD 2018	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.000.000.000,00			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.254.000.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.000.000.000,00			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.254.000.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.000.000.000,00			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.254.000.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.000.000.000,00			b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.1.254.000.000,00
5 : Perda No.18 Tahun 2016	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.448.455.407,98			b. Penyertaan Modal sejumlah Rp.6.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.731.500.000,00
6 : Perda No.18 Tahun 2016~APBD 2017	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.448.455.407,98			b. Penyertaan Modal sejumlah Rp.6.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.731.500.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.448.455.407,98			b. Penyertaan Modal sejumlah Rp.6.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.731.500.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.448.455.407,98			b. Penyertaan Modal sejumlah Rp.6.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.731.500.000,00
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 44.448.455.407,98			b. Penyertaan Modal sejumlah Rp.6.000.000.000,00	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.731.500.000,00